

Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan bangga telah menyelenggarakan Seminar Nasional Politik dan Kebudayaan pada 24-25 Oktober 2016. Seminar Nasional ini diikuti oleh 66 panelis yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dari berbagai lembaga akademik maupun praktis yang menggeluti bidang kajian politik dan kebudayaan. Prosiding ini terdiri dari makalah yang dipresentasikan di dalam panel-panel diskusi dalam seminar.

Susunan penulisan prosiding mengikuti susunan panel yang telah diselenggarakan yang meliputi:

- Perempuan dan politik gender
- Kepemimpinan dan politik lokal di Indonesia
- Isu lingkungan dan politik
- Kesehatan dan budaya masyarakat
- Civil society dan politik kewargaan
- Budaya politik, politik pariwisata dan pariwisata budaya
- Komunikasi politik dan budaya komunikasi,
- Gerakan sosial
- Folklore, identitas dan politik lokal
- Kebijakan, politik dan kebudayaan

Prosiding ini disusun juga untuk dapat mengakomodasi khalayak umum yang ingin mempelajari perkembangan kajian politik dan kebudayaan di Indonesia. Semoga bermanfaat.

PROSIDING

Seminar Nasional **POLITIK DAN KEBUDAYAAN**

Kampus Universitas Padjadjaran
24-25 Oktober 2016





**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL POLITIK DAN KEBUDAYAAN**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL POLITIK DAN KEBUDAYAAN**



Copyright @2016

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Diterbitkan oleh Unpad Press
Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Lantai IV
Jl. Ir. Soekarno KM 21 Bandung 45363
Telp. (022) 84288867/ 84288812
Fax : (022) 84288896
e-mail : press@unpad.ac.id / press@unpad.ac.id .
<http://press.unpad.ac.id>
Anggota IKAPI dan APPTI

Editor :
Rina Hermawati
Dede Tresna Wiyanti
Dede Mulyanto
Erna Herawati
Selly Riawanti
Budhiawati Supangkat
Rimbo Gunawan
Dede Mariana
Caroline Paskarina
Mudiyati Rahmatunnisa

Tata Letak :
Hardian Eko Nurseto

Desainer Sampul : M. Taufany Rachman E.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Padjadjaran

Prosiding Seminar Nasional dan Kebudayaan Penyunting, Putri,
Nadya Hari.

--Cet. pertama – Bandung; Unpad Press; 2016

___h.; 29,7 cm

PRAKATA

Seperti kita ketahui bersama, politik dan kebudayaan merupakan salah satu tema penting dalam kajian-kajian antropologi. Manusia yang merupakan objek kajian dalam antropologi dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis. Demikian pula dengan kehidupan politik yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebudayaan. Wajah birokrasi, lembaga eksekutif, dan legislatif maupun sikap politik masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebutlah maka Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema Politik dan Kebudayaan.

Seminar Nasional Politik dan Kebudayaan yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Oktober 2016, menampilkan pembicara utama: Philips J. Vermonte, Ph.D. (Direktur Eksekutif CSIS Indonesia), Dedi Mulyadi, SH. (Bupati Kabupaten Purwakarta), dan Dr. Budi Rajab (Departemen Antropologi FISIP Unpad). Seminar ini diikuti oleh 66 panelis yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dari berbagai lembaga akademik maupun praktis yang menggeluti bidang kajian politik dan kebudayaan.. Tema-tema panel terdiri dari berbagai aspek yang terkait politik dan kebudayaan, yang meliputi: perempuan dan politik gender, kepemimpinan dan politik lokal di Indonesia, isu lingkungan dan politik, kesehatan dan budaya masyarakat, civil society dan politik kewargaan, budaya politik, politik pariwisata dan pariwisata budaya, komunikasi politik dan budaya komunikasi, gerakan sosial, folklore, identitas dan politik lokal serta kebijakan, politik dan kebudayaan.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan seminar dan penerbitan buku abstrak ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandung, Oktober 2016

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
PANEL 1 PEREMPUAN DAN POLITIK GENDER	
Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya (Neneng Komariah, Pawit M. Yusup, Saleha Rodiah, Encang Saepudin)	1
Eksistensi Perempuan Sebagai Penggerak Utama Ketahanan Pangan (Studi Kasus Petani Melayu Perempuan di Dusun Semayong, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat) (Atem, Annisa Sintha Putri Nusantara)	9
Representasi Eksploitasi Seksualitas dalam novel 50 Riyal Sisi Lain TKW Indonesia di Arab Saudi karya Deni Wijaya (Hiyang Widya Prasastiani, Alfaratna Sefti Nurlaily, Ethis Kartika Sari)	17
Gender dan Identitas: Representasi Sosial Perempuan Dalam Kumpulan Cerpen Wanita Muda Di Sebuah Hotel Mewah (Siti Nur Aisya Putri)	24
Kesadaran Politik Difabel Perempuan: Studi di Yogyakarta (Titi Fitrianita, Ucca Arawindha)	31
Perempuan Dayak Mali dalam Bingkai Kearifan Lokal (Nikodemus Niko)	38
Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Kemasyarakatan Pasca Reformasi (Erna Herawati)	42
Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik vs Budaya Masyarakat Indonesia (Randi)	50
Bias Gender dalam Pemberitaan Aktivitas Politik Kaum Perempuan di Media (Eni Maryani, Agus Setiawan, Detta, Rachmawan)	57
Dampak Pemberdayaan Perempuan Dalam Program Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) (Studi Dampak pada Sikap dan Perilaku Perempuan dalam Membina Tumbuh Kembang Anak dan Remaja di Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut) (Nina Karlina, Mas Halimah)	66
Negara dan Ibu Rumah Tangga: Wajah Sehari-hari pembentukan Negara dalam Bidang Kesehatan melalui Posyandu (Arief Wicaksono)	75
PANEL 2 KEPEMIMPINAN DAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA	
Politik Keakerabatan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Rina Hermawati, Nunung Runiwati)	84
Kontribusi Peran Politik Tuan Guru Dalam Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan (Mukhtar Sarman)	90
Tuan Tanah dan Lurah : Relasi Politik Lokal <i>Patron Clie</i> n di Desa Sukorejo Kecamatan Godanglegi Kabupaten Malang dalam Kurun Waktu 2007-2012 (Annise Sri Maftuchin)	102
Peran Opinion Leader Dalam Masyarakat Transisi (Studi di Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang) (Agus Rahmat, Hendarmawan, Edy Suryadi, Cipta Endyana)	109
Kepemimpinan Lokal dalam Pengembangan Masyarakat Desa (Rudi Saprudin Darwis)	116
PANEL 3 ISU LINGKUNGAN DAN POLITIK	
Culture and Flood in Indonesia : A Student Perspective (Debora M. M. Hutajulu, Ayu S. Ardipramesa)	123
Implementasi Komunikasi Lingkungan Melalui Ritual Hajat Laut di Kabupaten Pangandaran (Iriana Bakti, Susi Perbawasari, Kokom Komariah)	129

PANEL 4 KESEHATAN DAN BUDAYA MASYARAKAT	
Pola Komunikasi dan Budaya Sehat Pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) Di Pedesaan (Asep Suryana, Putri Trulline)	134
Menyelaraskan Kebijakan Kesehatan bagi Penderita Thalasemia di Kota Palangkaraya (Kesehatan Sebagai Produk Politik dan Budaya) (Saputra Adiwijaya dan Katriani Puspita Ayu)	142
Kemiskinan dan Balita Gizi Buruk di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu (Rahma Syafitri)	151
PANEL 5 CIVIL SOCIETY DAN POLITIK KEWARGAAN	
Formasi Wacana Kewarganegaraan Pasca-Reformasi (Caroline Paskarina)	160
Peran Civil Society Dalam Membangun Budaya Demokrasi di Indonesia (Siti Witianti, Ratnia Solihah)	167
Self-Adaptation of Children Beggars Toward Violence on Street Analysis of Logotherapy Viktor Frank on Meaning of Misery of Child Beggars At Area Of Religious Tourism, Cirebon (Atwar Bajar)	175
Homofobia dalam Film <i>Dallas Buyers Club</i> (Novia Adibagus Shofah)	183
Benturan Kekuasaan : Polisi, Arema, dan Aremania (Indhar Wahyu Wira Harjo)	189
PANEL 6 BUDAYA POLITIK	
Perilaku Pemilih dan Budaya Politik dalam Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi (Ratnia Solihah, Siti Witianti)	197
Politik Kepercayaan: Sebuah Relasi Sosial dan Budaya dalam Perdagangan Komoditas di Pedesaan Sumatera (Amilda)	208
Manfaat Perubahan Politik terhadap Identitas Budaya Pecinan Kekinian (Lya Dewi Anggraini)	217
PANEL 7 POLITIK PARIWISATA DAN PARIWISATA BUDAYA	
Sketsa Pariwisata di Aceh : Dari Regulasi Berbasis Syar’i Hingga Resistensi Masyarakat dalam Apologi Rekreasi (Studi Kasus di Kota Lhokseumawe, Aceh) (Pangeran P.P.A. Nasution dan Andry Ruida Hasi)	225
Dilema <i>Sex Tourism</i> dalam Paradigma Pembangunan Pariwisata Perkotaan (Widyastuti)	235
Strategi Promosi Pariwisata Kota Bandung (Studi Kasus Aktivitas Bandung Creatif City Forum (BCCF) (Iwan Koswara, Duddy Zein)	245
Peningkatan Citra Pangandaran melalui Kearifan Lokal oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Priyo Subekti, Hanny Hafiar, Dadang Sugiana)	252
Pencak Silat As A Special Cultural Tourism Potential : A Case on Lembaga Pewarisan Pencaksilat (Pencak Silat Inheritance Institute) (Dindin Dimiyati, Muhammad Farhan)	257
Global Tourism Challenges: Menuju Pariwisata Berbasis Syariah (Bagus Irawan)	264
PANEL 8 KOMUNIKASI POLITIK DAN BUDAYA KOMUNIKASI	
Reactive Strategy and Personal Image : A Guide For ‘Awkarin’ (Ditta Hummamy, Hanifah Amalia, Mohammad Shihab)	270
Iklan Politik dan Dampaknya Terhadap Keputusan Memilih Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif (Survey Pada Kalangan Pemilih Pemula Mahasiswa UPI Angkatan 2014 (Ramadhan Wengku Arizal, Heny Hendrayati)	276
Public Relation For Tradisional Pencak Silat (Mohammad Shihab, I Nyoman Musiasa)	284
Pemanfaatan Pagelaran Wayang Golek Sebagai Metode Kampanye Politik Pasangan Sabdaguna dalam Pemilukada Kabupaten Bandung Periode 2016-2021 (Yanti Setianti, Priyo Subekti, Yogaswara Sunandar)	288
Budaya Politik dan Komunikasi Politik dan Transisi Demokrasi Pasca Orde Baru (Dede Mariana, Ari Ganjar Herdiansyah, Diah Fatma Sjoraida, Heru Riyanto)	294

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dalam Meme : Sebuah Analisa Isi Terhadap Meme-meme di Dunia Maya (Nuning Kurniasih)	302
PR Politik Sebagai Strategi Komunikasi Politik Jokowi (Evie Ariadne Shinta Dewi)	308
Hoax Politik di Media Sosial Twitter (Studi Etnografi Virtual Tentang Keberadaan Hoax Politik di Media Sosial Twitter) (Renata Anisa, Rachmaniar)	313
Reak Sebagai Media Komunikasi Tradisional Pada Masyarakat Cilengkrang Kecamatan Ujungberung (Feliza Zubair, Lukiat Komala)	317
PANEL 9 GERAKAN SOSIAL	
Peran Elit Non-Politik dalam Peningkatan Demokrasi Lokal di Bali Kasus Proses Penolakan Reklamasi Teluk Benoa (Diana Fawzia, Nursatyo, Truly Wangsalegawa)	322
Perpustakaan Rakyat : Gerakan Emansipatoris dalam Mengembangkan Budaya Membaca dan Wacana Sosial (Dika Sri Pendanari)	333
Demokrasi Buruh dan Kesejahteraan (Studi Deskriptif tentang Dinamika Organisasi Buruh dan Tingkat Kesejahteraan di Kabupaten Bandung) (Suwandi Sumartias dan Ikhsan Fuady)	340
Representation of “Teman Ahok” As Form Cultural Identity and Resistance To Political Olygarchy (Anang Viki Pratama Hadju)	348
Cultural consciousness Movement Against Corruption, Intellectual Academics in PerspectiveIntellectual Craftsmanship C. Wright Mills (Arie Wahyu Prananta)	357
PANEL 10 FOLKLORE, IDENTITAS, DAN POLITIK LOKAL	
Revitalisasi dan Rekonstruksi Kearifan Lokal Untuk Membangun Hukum Kehutanan Yang Berkelanjutan (Caritas Woro Murdiati Runggandini)	367
Boss Selalu Benar: Folklore di Tempat Kerja (Chico Adhibaskara Ekananda Hindarto)	376
Menggali Kearifan Lokal Sosial Politik Masyarakat Minangkabau Melalui Ungkapan (Wirdanengsih)	381
Peranan Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Desa di Minahasa (Studi di Desa Warembungan Kecamatan Pincleng Kabupaten Minahasa) (Welly Waworundeng)	387
Model Pengelolaan Madrasah Mandiri Berbasis Kearifan Lokal (Junardi Harahap, Budi Rajab, Budhi Gunawan, Opan Suwartapradja)	391
Pemilihan Wali Jorong Langsung dan Implikasinya Terhadap Budaya Politik Nagari (Irawati)	394
Idiom Jawa dan Politik Elektoral Lokal (Iwan Nurhadi)	402
Nilai Budaya Malapus dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabuoaten Minahasa Selatan (Very Y. Londa)	408
PANEL 11 KEBIJAKAN, POLITIK, KEBUDAYAAN	
Dilema Kebijakan Land Reform (Anik Susanti, Nyimas Nadya Izana, Nike Kusumawanti)	417
Kendala Budaya dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Masalah <i>Human Trafficking</i> di Kabupaten Indramayu (Slamet Mulyana, Meria Octaviani, Ira Mirawati, Kismiyati El Karimah)	422
Implikasi Budaya Populer terhadap Kebijakan Industri Kreatif Indonesia (Studi Kasus: Pengaruh Hallyu Terhadap Indonesia) (Seny Soniaty, Widyastuti, Rahmad Efendi)	430
Pulau Sebatik : Sebuah Kajian Kawasan Perbatasan (Suatu Studi Tentang Masyarakat Terhadap Kawasan Perbatasan) (Poppy Setiawati Nurisnaeny, Junardi Harahap)	440
Pengaruh Sosial dan Budaya dalam Perumusan Sosial dan Budaya dalam Perumusan Kebijakan Desentralisasi Kewenangan Pusat di Daerah Dalam Penerapan UU No. 6/2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Nagari Sumatra Barat (Tamrin)	446
Tantangan Bagansiapiapi Menghadapi Globalisasi: Dengan Melestarikan Warisan Budaya (Lies Mariani)	455



PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Neneng Komariah
Pawit M. Yusup
Saleha Rodiah
Encang Saepudin

Fakultas Ilmu Komunikasi – Universitas Padjadjaran
nenengkomariah@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam program pemberdayaan perempuan terutama tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/perencanaan, partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi. Manfaat penelitian yaitu sebagai bentuk evaluasi program terutama terhadap implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan *mixed methods* dan teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket, wawancara, *Focus Group Discussion*, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan skor kumulatif dari masing-masing sub variable, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama yakni partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/perencanaan program adalah positif. Bagian kedua yakni partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kurang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Pesisir di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya kurang aktif dalam mengikuti program pemberdayaan perempuan.

Kata kunci: partisipasi, pemberdayaan perempuan, masyarakat pesisir, Cipatujah, Tasikmalaya

PENDAHULUAN

Desa Sindangkerta merupakan salah satu Desa di Kecamatan Cipatujah yang mempunyai luas wilayah 1.500 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 5.380 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 2.673 laki-laki dan 2.707 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1.702 KK. Jumlah keluarga miskin 370 KK dengan

persentase 21% dari jumlah keluarga yang ada di Sindangkerta. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Sindang Kerta secara umum berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta sebagian merupakan daerah pesisir pantai dengan suhu berkisar antara 27 sd. 30 derajat celcius.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat Desa Sindangkerta sebagian besar merupakan masyarakat pesisir. Secara teoritis, masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Sedangkan secara luas masyarakat pesisir dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial di wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan.

Dalam kerangka sosiologis, masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan, memiliki perilaku yang berbeda dengan katakanlah masyarakat petani/agraris. Perbedaan ini sebagian besar disebabkan karena karakteristik sumberdaya yang menjadi input utama bagi kehidupan sosial ekonomi mereka. Masyarakat nelayan akrab dengan ketidakpastian yang tinggi karena secara alamiah sumberdaya perikanan bersifat *invisible* sehingga sulit untuk diprediksi. Sementara masyarakat agraris misalnya memiliki ciri sumberdaya yang lebih pasti dan *visible* sehingga relatif lebih mudah untuk diprediksi terkait dengan ekspektasi sosial ekonomi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini maka tidak jarang ditemui karakteristik masyarakat nelayan yang keras, sebagian temperamental dan tidak jarang yang boros karena ada persepsi bahwa sumberdaya perikanan “tinggal diambil” di laut (Satria, 2009).

Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, membuat nelayan harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Penyesuaian ini antara lain dengan memanfaatkan anggota rumah tangga untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam hal ini, istri para nelayan merupakan anggota rumah tangga yang memiliki potensi dalam membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka didera oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumberdaya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar, dan modal. Kebijakan dan implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini masih belum optimal dalam memutus mata rantai belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Kusnadi 2009).

Di dalam buku pedoman *Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan* (PPEP) disebutkan bahwa “Permasalahan perempuan di bidang ekonomi tidak terlepas dari kemiskinan. Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum terbagi dalam empat kelompok, yaitu perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan; perempuan yang belum/tidak berusaha; perempuan pengusaha mikro; dan perempuan pengusaha kecil dan menengah”.

Perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan khususnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan, harus berusaha dengan segala cara dan berorientasi pada kebutuhan saat ini. Perempuan dalam keluarga miskin ini sulit untuk berpikir jernih dan terbuka dalam menata kehidupan masa depan. Sedangkan untuk perempuan yang belum/ tidak berusaha, dihadapi permasalahan sikap, budaya, pengetahuan dan penerapan. Perempuan tidak berusaha karena motivasi yang kurang walaupun sumberdaya yang dimilikinya sebenarnya cukup atau mampu. Di lain pihak, ada perempuan ingin tapi tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan untuk usaha. Tiga pendekatan kemiskinan yang bisa dijadikan dasar untuk pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan kultural, struktural, dan alamiah. Pendekatan ini bisa dilakukan baik secara parsial maupun bersamaan dapat dipakai untuk menjelaskan penyebab kemiskinan di kalangan kaum perempuan, baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Pertama, pendekatan secara kultural sebagian masyarakat kita masih dipengaruhi secara kuat oleh budaya tradisional yang berideologi patriarki. Yaitu fenomena ketimpangan struktural berupa keterbatasan kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan, memperoleh akses ekonomi (misalnya bekerja untuk memperoleh penghasilan dan bukan sebatas

menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga), berorganisasi, dan lain sebagainya masih tetap berlaku. Kedua, kemiskinan struktural berekses pada timbulnya kemiskinan kultural dalam wujud rendahnya pendidikan dan keterampilan sebagian besar perempuan (terutama di pedesaan). Sementara itu, kemiskinan alamiah menjelaskan adanya sebagian kaum perempuan yang bersikap pasrah terhadap posisi dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, karena secara sadar menyadari demikianlah kodratnya sebagai seorang perempuan.

Penduduk wanita yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk pria merupakan sumber daya pembangunan yang cukup besar. Partisipasi aktif pria dan wanita dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Wanita-wanita nelayan mempunyai potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, dimana posisi wanita yang selama ini hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga ditingkatkan sebagai pencari nafkah. Untuk itu, perlu diadakannya pemberdayaan bagi istri-istri nelayan. Optimalisasi peran wanita nelayan dalam pembangunan pesisir hanya dapat dilakukan melalui integrasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan nasional, propinsi atau kabupaten/kota baik pada ranah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi pembangunan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di lingkungan sekitarnya. Perempuan dengan jumlah yang sangat besar merupakan modal sosial yang potensial bagi kelangsungan pembangunan bangsa. Sejalan dengan pernyataan tersebut Mengenai konsep pemberdayaan perempuan Hikmat menyatakan sebagai berikut:

“... Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang

semakin baik pula kemampuan partisipasinya. ...” (Hikmat 2004)

Rumusan Masalah dan tujuan penelitian

Berdasarkan kepada latar belakang di atas, penelitian ini mengkaji tentang tingkat partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan untuk mengetahui Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/perencanaan, partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi.

Kerangka Pemikiran

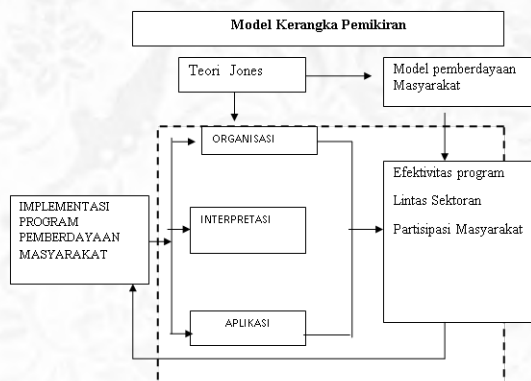
Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah teori dari Charles O. Jones. Jones (1984:166) mengemukakan tiga aktivitas yang penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organization, interpretation, and application*.

1. *Organization: the establishment or rearrangement of resources, unit and methods for putting a policy into effect;*
2. *Interpretation: the translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directive;*
3. *Application: the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives of instrument.*

Berdasar pada apa yang dikemukakan Jones tersebut, maka masalah pemberdayaan masyarakat sebagai implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang model pemberdayaan perempuan masyarakat pesisir sebagai upaya dari implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin (P2KFM), dimana (P2KFM) adalah suatu program pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat fakir miskin (keluarga) yang terintegrasi untuk adanya partisipasi aktif masyarakat yang berbentuk pikiran, tenaga, keahlian dan materi untuk terwujudnya masyarakat mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Jones, tiga aktivitas yang penting dalam implementasi kebijakan publik yaitu *organization, interpretation,*

and application. Bila ketiga aktivitas tersebut dilaksanakan dengan baik, akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri. Kerangka penelitian ini secara garis besar tergambar dalam bagan di bawah ini.



METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka, meskipun ada data kualitatif sebagai pendukungnya, seperti kata-kata atau kalimat yang tersusun dalam angket, kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono. Ia mengemukakan Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Suatu pernyataan/ pertanyaan yang memerlukan alternatif jawaban, di mana masing-masing : sangat setuju diberi angka 4, setuju 3, kurang setuju 2, dan tidak setuju 1 (Sugiyono, 2002: 7). Populasi adalah wilayah generalisasi objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat nelayan di Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai data yang didapatkan jumlah keluarga nelayan yakni 50 kepala keluarga. Analisis data lapangan terkait tingkat partisipasi masyarakat tentang pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Kuesioner yang diberikan kepada responden, berupa pernyataan tertutup mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Setiap pernyataan yang diajukan, responden hanya

perlu menjawab satu pilihan jawaban yang tersedia. Butir-butir pernyataan yang diajukan mengacu pada tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Jawaban-jawaban yang tercantum dalam kuesioner mengacu pada skala likert. Pertanyaan yang ada dalam kuesioner masing-masing jawaban diberi skor sebagai berikut.

Tabel 1. Alternatif Jawaban Responden dan Skor Penilaian

Pilihan jawaban	Skor masing-masing pernyataan	
	Pernyataan positif	Pernyataan negatif
Sangat tidak setuju	1	5
Tidak setuju	2	4
Tidak ada pendapat	3	3
Setuju	4	2
Sangat setuju	5	1

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya adalah menganalisis data yang telah didapatkan dengan menggunakan model analisis deskriptif. Model analisis ini menjelaskan pernyataan responden dengan mendeskripsikannya melalui penggunaan tabel dan pengukurannya menggunakan skala likert. Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah skor dari seluruh responden adalah:

Tabel 2. Jumlah Skor Seluruh Responden

Maksimal	50 responden x 5 = 250
Minimal	50 responden x 1 = 50
Median	50 responden x 3 = 150
Kuartil I	50 responden x 2 = 100
Kuartil III	50 responden x 4 = 200

Jumlah skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa pendekatan (Sugiyono, 2008), untuk menentukan seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat, sebagai berikut :

- Jika Kuartil III < Skor < Maksimal; artinya sangat positif (partisipasi masyarakat dinilai aktif).
- Jika Median < Skor < Kuartil III; artinya positif (partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif).
- Jika Kuartil I < Skor < Median; artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif).
- Jika Minimal < Skor < Kuartil I; artinya sangat negatif (partisipasi masyarakat dinilai tidak aktif).

Apabila dipersentasikan, maka besar tingkat partisipasi masyarakat dapat dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat partisipasi} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

Pada bagian ini akan diukur mengenai tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tolak ukur yang

ada pada masing-masing variabel. Untuk mempermudah pengolahan data, data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah penjelasannya berdasarkan kepada hasil analisis terhadap masing-masing indikator dari setiap variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan/ Perencanaan

Variabel ini memiliki enam indikator yaitu a) Informasi mengenai program pemberdayaan perempuan didapatkan melalui kelurahan atau RT/RW setempat, b) Pemberitahuan mengenai adanya program pemberdayaan perempuan bagi masyarakat dilakukan secara jelas, c) Masyarakat mencari tahu lebih jauh mengenai program pemberdayaan perempuan, d) Pernah diajak musyawarah untuk membahas perencanaan program pemberdayaan perempuan, e) Pernah memberikan masukan gagasan/ ide dalam program pemberdayaan perempuan, dan f) Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan harus dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan, Berikut adalah perhitungan dari tiap indikator/tolak ukur tersebut.

Tabel 3. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan/Perencanaan

No	Tolak ukur	Skor	Median
1	Informasi mengenai program pemberdayaan perempuan didapatkan melalui kelurahan atau RT/RW setempat	194	150
2	Pemberitahuan mengenai adanya program pemberdayaan perempuan bagi masyarakat dilakukan secara jelas	211	150
3	Masyarakat mencari tahu lebih jauh mengenai program pemberdayaan perempuan	167	150
4	Pernah diajak musyawarah untuk membahas perencanaan program pemberdayaan perempuan	163	150
5	Pernah memberikan masukan gagasan/ ide dalam program pemberdayaan perempuan Pernah memberikan masukan gagasan/ ide dalam program pemberdayaan perempuan	129	150
6	Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan harus dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan	208	150
Total		1072	150
Rata-rata		178.66	150

Data di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/ Perencanaan program pemberdayaan perempuan cukup tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh adalah 178.66. Skor tersebut jauh lebih tinggi dari skor median yakni 150. Data ini

menunjukkan bahwa nilai Median < nilai Skor < nilai Kuartil III. Hal ini artinya positif (partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif). Tingkat partisipasi ini terjadi disebabkan oleh keterbukaan para pengelola program pemberdayaan perempuan yang dimonitoring oleh pihak pemerintahan.

Namun, Berdasarkan data di atas dari enam indikator yang menjadi tolak ukur variabel ini dapat dipilah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menunjukkan skor di atas median dan kelompok kedua skor berada di bawah median. Kelompok pertama yakni a) Informasi mengenai program pemberdayaan perempuan didapatkan melalui kelurahan atau RT/RW setempat memperoleh skor 259, b) Pemberitahuan mengenai adanya program pemberdayaan perempuan bagi masyarakat dilakukan secara jelas skor 211 c) Masyarakat mencari tahu lebih jauh mengenai program pemberdayaan perempuan skor 167 d) Pernah diajak musyawarah untuk membahas perencanaan program pemberdayaan perempuan skor 163, dan e) Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan harus dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan skor 208. Sedangkan kelompok kedua yakni pernah memberikan masukan gagasan/ ide dalam program pemberdayaan perempuan memperoleh skor 129. Skor untuk indikator ini cukup jauh di bawah skor median. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan para perempuan ini merasa enggan untuk mengeluarkan pendapatnya karena merasa malu dan ragu-ragu. Ada rasa takut pertanyaan, ide atau gagasan yang akan disampaikan tidak diterima.

Apabila skor kumulatif dari sub variabel ini dipresentasikan maka dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat partisipasi } V1 = \frac{178.66}{250} \times 100 = 71.46$$

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

Variabel ini memiliki enam indikator yaitu a) Sebagian dana yang digunakan sebagian modal usaha adalah milik pribadi. b) Tempat yang digunakan untuk berusaha adalah milik pribadi. c) Alat usaha yang digunakan dalam menjalankan usaha adalah milik pribadi. d) Setiap kegiatan dalam program pemberdayaan perempuan selalu didokumentasikan e) Selalu ikut serta dalam pengadministrasian kegiatan f) Fasilitator mudah ditemui oleh anggota program pemberdayaan perempuan g) Fasilitator sangat berperan dalam pendampingan kelompok. Berikut adalah perhitungan dari tiap indikator/ tolak ukur tersebut:

Tabel 4 Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

No	Tolak ukur	Skor	Median
1	Sebagian dana yang digunakan sebagian modal usaha adalah milik pribadi.	121	150
2	Tempat yang digunakan untuk berusaha adalah milik pribadi.	138	150
3	Alat usaha yang digunakan dalam menjalankan usaha adalah milik pribadi.	145	150
4	Setiap kegiatan dalam program pemberdayaan perempuan selalu didokumentasikan	163	150
5	Selalu ikut serta dalam pengadministrasian kegiatan	147	150
6	Fasilitator mudah ditemui oleh anggota program pemberdayaan perempuan	142	150
7	Fasilitator sangat berperan dalam pendampingan kelompok	144	150
Total		1.000	150
Rata-rata		142.85	150

Data di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan negatif. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh adalah 142.85. Walaupun skor tersebut tidak terlalu jauh dari skor median yakni 150 namun masih berada di bawah skor median. Apabila kita melihat data satu demi satu dari setiap indikator maka terlihat hanya satu indikator yakni Setiap kegiatan dalam program pemberdayaan perempuan selalu didokumentasikan yang mendapat skor lebih dari skor median yakni 165. Sedangkan indikator lainnya memperoleh skor dibawah skor median.

Berdasarkan data di atas dari tujuh indikator yang menjadi tolak ukur variabel ini dapat dipilah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menunjukkan skor diatas median dan kelompok kedua skor berada di bawah median. Berdasarkan pada data yang tergambar bahwa nilai Kuartil I < nilai Skor < nilai Median. Hal ini artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif).

Apabila skor kumulatif dari sub variabel ini dipresentasikan maka dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat partisipasi } V2 = \frac{142.85}{250} \times 100 = 57.14$$

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat

Variabel partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat memiliki 4 indikator. Keempat indikator tersebut adalah a) Kemudahan dalam permohonan pengajuan program pemberdayaan perempuan, b) Kemudahan prosedur dalam mendapatkan modal usaha dari program pemberdayaan perempuan, c) Adanya program pemberdayaan perempuan membantu pemecahan masalah usaha yang dihadapi anggota, dan d) Keterampilan anggota kelompok menjadi meningkat dengan pendampingan yang diberikan. Berikut adalah perhitungan dari tiap indikator/ tolak ukur tersebut:

Tabel 5. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat

No	Tolak ukur	Skor	Median
1	Kemudahan dalam permohonan pengajuan program pemberdayaan perempuan	110	150
2	Kemudahan prosedur dalam mendapatkan modal usaha dari program pemberdayaan perempuan	138	150
3	Adanya program pemberdayaan perempuan membantu pemecahan masalah usaha yang dihadapi anggota	145	150
4	Keterampilan anggota kelompok menjadi meningkat dengan pendampingan yang diberikan	165	150
Total		558	150
Rata-rata		139.5	150

Data di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat program pemberdayaan perempuan kurang aktif atau negatif. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh adalah 139.5. Skor tersebut jauh dari skor median yakni 150. Apabila kita melihat data satu demi satu dari setiap indikator maka terlihat hanya satu indikator yakni Keterampilan anggota kelompok menjadi meningkat dengan pendampingan yang diberikan yang mendapat skor lebih dari skor median yakni 165. Sedangkan indikator lainnya memperoleh skor dibawah skor median

Berdasarkan data di atas dari empat indikator yang menjadi tolak ukur variabel ini dapat dipilah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menunjukkan skor diatas median dan kelompok kedua skor berada di bawah median. Berdasarkan pada data yang tergambar bahwa nilai Kuartil I < nilai Skor < nilai Median. Hal ini artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif).

Apabila skor kumulatif dari sub variabel ini dipresentasikan maka dapat dihitung sebagai berikut:

$$139.5$$

$$\text{Tingkat partisipasi } V3 = \frac{139.5}{250} \times 100 = 55.8$$

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam evaluasi

Variabel partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi memiliki empat indikator. Keempat indikator tersebut adalah a) Selalu memberi masukan kepada pengelola program pada akhir pelaksanaan kegiatan. b) Sering mengadu pada pengelola program mengenai pelaksanaan kegiatan. c) Suka membantu pengelola program dalam menyusun pelaporan kegiatan, dan d. Membantu pengumpulan data/ bahan pelaporan kegiatan. Nilai skor dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 6 Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi

No	Tolak ukur	Skor	Median
1	Selalu memberi masukan kepada pengelola program pada akhir pelaksanaan kegiatan	107	150
2	Sering mengadu pada pengelola program mengenai pelaksanaan kegiatan	150	150
3	Suka membantu pengelola program dalam menyusun pelaporan kegiatan	138	150
4	Membantu pengumpulan data/ bahan pelaporan kegiatan	131	150
Total		526	150
Rata-rata		131.5	150

Data di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi program pemberdayaan Perempuan kurang aktif bahkan negatif. Hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh adalah 131.5. Skor tersebut berada di bawah skor median yakni 150. Berdasarkan pada data yang tergambar bahwa nilai Kuartil I < nilai Skor < nilai Median. Hal ini artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif).

Apabila skor kumulatif dari sub variabel ini dipresentasikan maka dapat dihitung sebagai berikut; 131.5.

$$\text{Tingkat partisipasi } V4 = \frac{131.5}{250} \times 100 = 52.6$$

Berdasarkan skor kumulatif dari masing-masing sub variabel maka tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama yakni partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan/ perencanaan program positif. Hal ini karena

skor sub variabel ini menunjukkan bahwa nilai Median < nilai Skor < nilai Kuartil III. Data ini artinya positif (partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif). Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7 Perhitungan Skor Kumulatif Setiap Sub Variabel

SubVariabel	Nilai Media		Skor		Kuartil III
Pengambilan keputusan	150	<	178.66	<	200

Bagian kedua yakni partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kurang positif. Hal ini karena nilai Kuartil I < nilai Skor < nilai Median. Hal ini artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 8 Perhitungan Skor Komulatif Setiap Sub Variabel

Sub Variabel	Kuartil I		Skor		Nilai Median
Pelaksanaan program	100	<	142.85	<	150
Pengambilan manfaat	100	<	139.5	<	150
Evaluasi program	100	<	131.5	<	150

Apabila skor kumulatif dari variabel ini dihitung maka partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan adalah negatif. Hal ini terlihat dari Kuartil I < nilai Skor < nilai Median. Hal ini artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9 Perhitungan Skor Kumulatif Variabel

Variabel	Kuartil I		Skor		Nilai Media
Partisipasi masyarakat	100	<	148.11	<	200

Apabila skor kumulatif ini dipresentasikan maka dapat dihitung sebagai berikut

$$\text{Tingkat partisipasi } V = \frac{148,11}{250} \times 100 = 59,24$$

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, baik pada kelompok sasaran yang terlibat pada program pemberdayaan perempuan maupun kepada para pengelola program ditemukan fakta-fakta empiris bahwa pemberdayaan masyarakat miskin yang selama ini menjadi rencana program utama di Kecamatan Cipatujah belum terlaksana secara efektif dan efisien.

Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya dana, kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta tingkat partisipasi aktif masyarakat masih kurang. Selain itu, program Program pemberdayaan perempuan khususnya dalam bidang ekonomi yakni usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) baik melalui pemberian modal tidak banyak membantu, karena tidak diiringi oleh model-model pemberdayaan yang berkelanjutan.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang rendah (miskin), merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan prinsip keadilan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

Sesuai ciri sistem ekonomi kerakyatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Ancok (1999) mengajukan dua strategi yang harus di tempuh yaitu: *pertama*, melakukan upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok; *kedua*, berupaya untuk membantu masyarakat melalui pemberdayaan agar mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Dalam kaitan itu, penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan terkait erat dengan pembangunan ekonomi rakyat antara lain pengembangan berbagai usaha produktif yang merupakan potensi kewilayahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam program pemberdayaan perempuan kurang positif. Hal ini artinya masyarakat yang terkena program pemberdayaan kurang aktif dalam mengikuti program. Hal ini terlihat dari Kuartil I < nilai Skor < nilai Median. Hal ini artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif). Kesimpulan lebih rinci sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan/ perencanaan dalam program pemberdayaan perempuan adalah sangat positif. Hal ini karena nilai Median < nilai Skor < nilai Kuartil III. Data ini artinya positif (partisipasi masyarakat dinilai cukup aktif).
2. Partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan/ perencanaan dalam program pemberdayaan perempuan adalah negatif . Hal ini karena nilai Kuartil I < nilai Skor < nilai Median.

Hal ini artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif).

3. Partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan/ perencanaan dalam program pemberdayaan perempuan adalah negatif. Hal ini karena nilai Kuartil I < nilai Skor < nilai Median. Hal ini artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif).
4. Partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan/ perencanaan dalam program pemberdayaan perempuan adalah sangat negatif. Hal ini karena nilai Kuartil I < nilai Skor < nilai Median. Hal ini artinya negatif (partisipasi masyarakat dinilai kurang aktif).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diajukan saran sebagai berikut :

1. Proses pemberdayaan perempuan sebaiknya direncanakan secara matang dengan melibatkan berbagai sektor yang memiliki keterkaitan program
2. Perencanaan program pemberdayaan perempuan perlu melibatkan masyarakat yang akan menjadi target pemberdayaan
3. Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan sebaiknya berkelanjutan dan berimbang.
4. Kontrol pelaksanaan program pemberdayaan perempuan perlu melibatkan masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama sehingga terjalin keterbukaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidjowijoto, Rian Nugroho, 2007. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Gramedia
- Hikmah, Istiana. 2007. *Gender dalam Rumah Tangga Masyarakat Nelayan*. Jakarta: Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- Hikmat, Marry. 2001. *Strategy Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Ulama Press.
- Kamiso, H. N., 2012. *Pengantar Ilmu Perikanan 3. Bahan Ajar Pengantar Ilmu Perikanan*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta : LkiS.
- Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Nurfaizah, Eva . 2013. *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan Di Desa Karangkepoh,*

Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Semarang; IKIP PGRI.

- Pranarka, A.M.W & Onny S. Prijono. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Pranarka, A.M.W & Onny S. Prijono. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Roesmidi dan Riza Risyanty. 2006. *Pemberdayaan masyarakat*. Sumedang: Alqaprint
- Satria, A. 2009. *Ekologi Masyarakat Nelayan*. LKiS. yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama.
- Soetomo. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 1999. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama
- Sukardi, 2012. *Peran Perikanan dan Kelautan dalam Kehidupan Manusia*. Bahan Ajar Pengantar Ilmu Perikanan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Eksistensi Perempuan Sebagai Penggerak Utama Ketahanan Pangan (Studi kasus: Petani Melayu Perempuan di Dusun Semayong, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)

Atem

Annisa Sintha Putri Nusantara

Program Studi Sosiologi Pascasarjana FISIP, Universitas Padjadjaran¹
atemkornadi@gmail.com

Abstract

The term of gender is not a foreign thing again in the 21st century, there are so many discussion on theoretical aspect as well as practical problems on reconsideration of the gender issues, and also realm of political, cultural, social, including in economic or employment. Many studies have clarified the involvement of women in agriculture, but women are often described as having a contribution which is lacking in the sustainability of the agricultural business. Most of the roles women performed as works that easily and lightly, or jobs that do not require physical strength too, otherwise the work considered the weight will be done by men. Because of the patriarchal culture has looked that women are weak, soft, emotional and more suitable for domestic business in the works. The reality of the position of women in some cultures do not always put women as a weak figure. In Malay Sambas Regency, women become the deciding factor of the success of the agricultural business. The contribution of women is greater than men in processing of agricultural lands, and the involvement of women in farming has been hereditary. This article aims to describe and explore the contributions of Malay women as prime movers in the business of maintaining food security that is in the village Semayong, district of Sambas of West Kalimantan province, especially in the field of agriculture. The methods used in this article is a qualitative method and data collection techniques used through observation, interview and review of the literature.

Key Words: Gender, Women, Food, Malay, Farms

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia untuk bisa melangsungkan kehidupan. Produksi pangan sendiri dihasilkan melalui proses seperti perkebunan, pertanian maupun peternakan. Tingkat kebutuhan pangan dunia saat ini semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Di Indonesia sebagian besar penduduknya mengkonsumsi nasi (beras) sebagai makanan pokok yang dihasilkan dari

produktivitas pertanian padi, sebagian kecil lagi mengkonsumsi ubi, sagu dan juga jagung. Saat ini Indonesia mengalami rawan pangan, sehingga pemerintah gencar mengembangkan program ketahanan pangan. Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Indonesia pada triwulan I tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang masih terdata rawan pangan (70%-89,9% AKG) sebanyak 84,823,188 atau 33,74% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk yang terdata sangat rawan pangan (<70% AKG) sebanyak 43,739,341 atau 17,40% dari total penduduk Indonesia. Melihat angka yang masih cukup besar tersebut, maka setiap daerah di Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar dalam kelangsungan ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga baik dari segi jumlah, keamanan, mutu dan harga yang terjangkau (Mulyani dan Mandamari, 2012).

Dilihat dari aspek pembangunan sendiri, sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama sebagai penggerak ekonomi di Indonesia. Usaha di bidang pertanian masih banyak dilakukan di daerah pedesaan. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 237.641.326 jiwa yang mana tinggal di perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79%) dan di daerah pedesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21%). Diketahui mayoritas masyarakat pedesaan bermata pencaharian sebagai petani, kenyataan ini tak dapat dipungkiri bahwa tenaga kerja akan banyak terserap di bidang pertanian. Meskipun tidak semua bidang pertanian yang dikelola menjadi sumber pendapatan ekonomi utama bagi para petani atau keluarga karena tidak jarang masyarakat di beberapa daerah mengelola pertanian hanya sebagai pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari, akan tetapi proses produktivitas pertanian padi tentu dapat menunjang kemandirian pangan masyarakat pedesaan. Membahas topik pembangunan termasuk dalam usaha pertanian tidak jarang akan dilekatkan mengenai isu-isu gender, yang mana sering terjadi ketimpangan-ketimpangan yang dirasakan khususnya

oleh kaum perempuan dalam implementasi program pembangunan tersebut.

Beberapa studi perempuan yang telah dilakukan di berbagai wilayah, sebagian besar seringkali digambarkan bahwa kedudukan perempuan kurang berarti dalam pembangunan, tidak jarang perempuan mengalami ketidakadilan dan termarginalisasi dalam kegiatan produksi maupun dunia kerja. Begitu juga dalam pengelolaan pertanian. Keterlibatan kaum perempuan dalam dunia kerja khususnya dalam produksi pertanian telah berlangsung sejak lama, namun hingga saat ini tidak sedikit peran perempuan hanya dianggap sebagai pendamping atau bukan penentu keberhasilan usaha tani. Di Asia terdapat sekitar 50% tenaga kerja di sektor pertanian adalah perempuan, akan tetapi dalam sub-sektor pekerjaan tersebut umumnya tenaga kerja keluarga dan tidak dibayar. Dalam kegiatan sub-sektor pangan khususnya tanaman padi perempuan umumnya mendapatkan pembagian kerja seperti menanam, menyumbang tanaman yang mati, menyang, mengairi, memanen, membersihkan padi, mengeringkan dan menjual. Sedangkan untuk perencanaan maupun pengambilan keputusan program pembangunan kaum perempuan jarang terlibat (Suradisastri dan Lubis, 2000). Sama halnya yang terjadi di Amerika Latin juga terdapat pembagian kerja dalam sektor pertanian, namun kegiatan pertanian tersebut lebih didominasi oleh kaum laki-laki sedangkan perempuan tidak terlalu tampak (Saptari dan Holzner, 2016). Keterbatasan partisipasi dan akses perempuan terhadap sumber daya produktif tersebut tidak jarang memicu tingginya tingkat kemiskinan kaum perempuan, diskriminasi terhadap upah dan hal tersebut menjadi penghambat yang membatasi kontribusi perempuan dalam revitalisasi pertanian yang merupakan salah satu jalan keluar dari kemiskinan (Byrlee dan Janyry, 2008; Pieris, 2015).

Banyak penelitian yang dilakukan di Indonesia juga mengungkapkan eksistensi perempuan pedesaan yang berperan aktif dalam pengelolaan usaha pertanian. Umumnya perempuan yang terlibat dalam proses pertanian memiliki peran ganda yakni menyangkut kerja di lahan pertanian dan pekerjaan rumah tangga. Misalnya di beberapa desa di Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat, perempuan tani umumnya berperan aktif hampir di setiap kegiatan usaha tani dan juga melakukan pekerjaan sebagai pencari nafkah rumah tangga (buruh pabrik, pembantu rumah tangga), sedangkan dalam usaha tani perempuan terlibat dalam kegiatan menanam, memelihara, mengendalikan gulma, memanen, membersihkan (menampi), pascapanen, pemasaran hasil. Kegiatan persiapan dan pengolahan lahan biasanya dilakukan oleh kaum pria (Elizabeth 2007b, Elizabeth, 2008).

Berbeda dengan kebanyakan yang dialami perempuan di Asia, di Afrika kontribusi perempuan dalam bidang pertanian memperlihatkan sebaliknya. Keterlibatan perempuan tidak hanya sebatas pekerjaan-pekerjaan ringan namun hampir seluruh kegiatan dalam proses pertanian dilakukan oleh perempuan, meskipun terdapat pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, umumnya laki-laki hanya sebatas mempersiapkan lahan untuk kegiatan selanjutnya segala pekerjaan dari penanaman hingga panen dilakukan oleh perempuan (Saptari dan Holzner, 2016). Sebagai gambaran, Bank Dunia menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang produksi pangan di Asia Pasifik mencapai 38-71%. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara angka partisipasi perempuan dalam kegiatan produksi pangan juga bervariasi. Thailand menduduki posisi teratas dengan tingkat partisipasi perempuan sebesar 60%, posisi berikutnya berturut-turut diduduki oleh Indonesia (54%), Filipina (47%) dan Malaysia (35%) (www.kupang.tribunnews.com).

Tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam bidang pangan tersebut dapat tercermin di salah satu wilayah Indonesia, hal tersebut terjadi pada perempuan Melayu yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya di Dusun Semayong Desa Sungai Kumpai. Perempuan berkontribusi secara aktif dalam proses pengelolaan pertanian. Hampir seluruh kegiatan pertanian khususnya tanaman padi dengan sistem berladang dilakukan oleh perempuan baik dari pengolahan lahan hingga panen. Tidak hanya dalam pertanian padi aktivitas perempuan juga terlibat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yakni melalui usaha menyadap karet serta kegiatan domestik seperti mengurus anak dan aktivitas rumah. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya peran perempuan baik dalam pertanian maupun mencari nafkah keluarga mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, sosial-budaya hingga faktor pekerjaan yang dilakukan suami sebagian besar bekerja diluar daerah dan luar negeri (Malaysia).

Kenyataan eksistensi perempuan dalam usaha pertanian dapat dikatakan masih jarang terjadi di Indonesia oleh karenanya fenomena tingginya tingkat kontribusi perempuan dalam usaha tani dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai penggerak keberlangsungan ketahanan pangan di Desa Sungai Kumpai, menjadi menarik untuk didiskusikan dan ditinjau lebih luas. Oleh karenanya artikel ini hendak mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana kontribusi perempuan Melayu yang ada di Dusun Semayong Desa Sungai Kumpai dalam proses pengelolaan pertanian yang merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.

METODE

Metode yang digunakan dalam karya tulis ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yakni penulis memberikan uraian, menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta, keadaan ataupun situasi terkait hal-hal yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian kualitatif ini untuk memberikan gambaran tentang eksistensi kaum perempuan Melayu yang berkontribusi secara dominan dalam pengelolaan usaha pertanian keluarga yang dilakukan secara tradisional di Dusun Semayong Desa Sungai Kumpai Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada 6 informan yang dipilih sesuai kriteria yang telah ditentukan, yakni perempuan yang telah menikah dan telah bekerja sebagai petani minimal lima tahun, memiliki lahan pertanian sendiri dan tergabung dalam kelompok tani, Peneliti juga melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian dan mengikuti kegiatan proses pertanian. Untuk memperluas dan mendukung gagasan dalam penulisan artikel ini, penulis juga melakukan kajian literatur melalui tinjauan-tinjauan sumber-sumber bacaan diantaranya buku-buku, jurnal ilmiah, makalah maupun artikel-artikel online dan penelitian-penelitian terdahulu serta analisis permasalahan dan kasus yang terjadi atau pernah terjadi mengenai topik yang ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Dusun Semayong

Dusun Semayong merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Dilihat secara administratif, Desa Sungai Kumpai memiliki luas daerah lebih kurang 2.685 ha. Terdiri dari dua dusun yakni Dusun Bogam dan Dusun Semayong. Dusun Bogam hanya terdapat dua rukun tetangga (RT) dan satu rukun warga (RW). Sedangkan Dusun Semayong memiliki enam RT dan empat RW. Jumlah penduduk Desa Sungai Kumpai berdasarkan profil desa tahun 2013 ialah sebanyak 2.982 jiwa. Terdiri dari 1.526 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.456 perempuan dan 2.438 jiwa berada di Dusun Semayong, 544 jiwa di Dusun Bogam. Dapat dilihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup seimbang dimana jumlah laki-laki berkisar 51% dan perempuan 49%. Sebagian besar penduduk di Desa Sungai Kumpai berada pada kelompok usia yang masih produktif, yakni berada dalam rentang usia 15-40 tahun. Mayoritas penduduk di Desa Sungai Kumpai bermata pencaharian sebagai petani dan mengandalkan pendapatan dan ekonomi keluarga melalui pekerjaan menyadap karet, buruh kayu dan buruh bangunan serta sebagian kecil bekerja sebagai pegawai negeri dan berdagang. Jika Dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk Desa Sungai

Kumpai masih tergolong cukup rendah, sebagian besar penduduk hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebagian kecil melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi (PT).

Karakteristik Petani Perempuan Melayu

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan yakni para petani perempuan, bahwa karakteristik petani Melayu perempuan di Dusun Semayong jika dilihat dari taraf pendidikan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Rata-rata tingkat pendidikan mereka hanya sekolah dasar dan kebanyakan tidak tamat. Latar belakang pendidikan yang rendah tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perempuan untuk bekerja di sektor pertanian, yang mana menjadi mata pencaharian yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dilihat dari kepemilikan lahan, berdasarkan data informan sebagian besar petani memiliki lahan pertanian sendiri yang rata-rata didapat dari warisan orang tua. Hanya sebagian kecil yang menyewa lahan petani lainnya dengan biaya sewa dapat berupa uang atau hasil panen sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan.

Perempuan Melayu di Dusun Semayong yang bekerja sebagai petani kebanyakan sudah menikah dan memiliki anak. Suami mereka sebagian besar bekerja sebagai buruh bangunan, dan buruh kayu yang berada di luar desa atau kampung, bahkan tidak sedikit yang bekerja sebagai buruh bangunan dan perkebunan yang ada di negeri tetangga, yakni Malaysia. Berdasarkan keterangan beberapa informan, suami mereka memilih negara Malaysia dikarenakan nilai mata uang Negara Malaysia lebih tinggi dan bahasa yang hampir mirip sehingga tidak menjadi kendala untuk mencari nafkah disana, dengan kata lain para istri yang bekerja sebagai petani rata-rata ditinggal oleh suami. Selain bertani padi, perempuan Melayu di Semayong juga melakukan aktivitas mencari nafkah sebagai penyadap karet untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu berarti petani Melayu perempuan memiliki peran maupun beban ganda yakni sebagai ibu rumah tangga yang harus merawat anak-anak dan mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani dan penyadap karet.

Peran dan Aktivitas Perempuan dalam Pertanian

Tidak dipungkiri semakin hari keterlibatan perempuan dalam dunia kerja semakin meningkat. Begitu juga dalam usaha pertanian kontribusi perempuan dapat dikatakan tidak kalah besar dibanding laki-laki. Peran perempuan akan semakin kompleks ketika mereka telah menikah, ketika menjadi istri dan memiliki anak perempuan tidak hanya melakukan pekerjaan domestik namun juga kegiatan non-domestik yakni di luar rumah, karena

kegiatan perempuan dalam usaha mencari nafkah saat ini semakin meningkat maka dapat dikatakan perempuan yang telah menikah akan sulit menghindari beban ganda. Begitu juga dengan perempuan di Dusun Semayong yang bekerja sebagai petani di ladang, mereka beranggapan bahwa setelah menikah ia berkewajiban untuk membantu suami mencari nafkah, salah satunya dengan menjadi petani, karena sebagai usaha yang dianggap paling cocok dan mudah dilakukan tanpa memerlukan pendidikan yang tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh seorang informan yang menyatakan bahwa setelah menikah sudah seharusnya sebagai seorang istri ia berkewajiban membantu suami dalam mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani, karena menurutnya bertani adalah pekerjaan yang cocok untuk mereka dan telah menjadi pekerjaan yang dilakukan secara turun-temurun. Informan lain juga menyatakan alasan yang serupa, bahwa ia bekerja sebagai petani di ladang karena untuk membantu suaminya mencari nafkah, karena jika hanya mengandalkan suami saja, pendapatannya tidak tentu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari istri harus bekerja dengan bertani dan juga menyadap karet.

Adapun sistem pertanian yang dikelola oleh petani di Dusun Semayong masih secara tradisional dan melalui melalui sistem berladang tetap. Yakni bentuk pertanian yang dilakukan pada lahan yang sama dalam setiap periodenya tanpa melakukan pengairan di lahan pertanian. Sistem berladang sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah tanah atau lahan yang diusahakan dan ditanami (ubi, jagung, dan sebagainya) dengan tidak diairi (Atem, 2014). Usaha pertanian yang dikelola ialah usaha pertanian keluarga, yang mana hasil pertanian tidak untuk dijual melainkan konsumsi pribadi keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar para suami bekerja di luar daerah, dengan begitu kontribusi laki-laki dalam bidang pertanian dapat dikatakan sedikit. Perempuan lebih mendominasi kegiatan bercocok tanam di lahan pertanian. Hanya sebagian kecil suami yang menetap di desa dan bekerja sebagai petani, kendatipun suami yang menetap dan bekerja sebagai petani, peran yang dilakukan istri tetap tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan suami dalam mengelola pertanian dan cenderung seimbang. Pada kasus suami yang menetap di desa dan bekerja sebagai petani, pembagian kerja tidak tampak jelas, yakni hampir tidak ada pemisahan kerja yang dilakukan baik oleh perempuan (istri) maupun laki-laki (suami). Hampir setiap pekerjaan yang dilakukan laki-laki dalam bertani juga dilakukan oleh perempuan secara bersama-sama. Seperti keterangan yang didapatkan dari salah satu informan yang menyatakan bahwa saat bertani ia melakukan semua kegiatan tersebut dimulai dari pengolahan yakni menebas dan menyemprot

gulma dengan pestisida hingga panen, terkadang ia juga dibantu oleh suami apabila ia belum pergi bekerja di luar daerah.

Beragam aktivitas pertanian yang dilakukan perempuan di lahan pertanian (ladang), perempuan menjadi aktor utama yang menjalankan usaha tani, maka dari itu berhasil atau tidaknya proses pertanian di Dusun Semayong ditentukan oleh sejauhmana peran dan keterampilan perempuan dalam mengelola pertanian. Adapun beragam aktivitas pertanian yang dilakukan petani perempuan Semayong di ladang, mulai dari kegiatan utama menanam padi, kegiatan sampingan berkebun semangka, menanam ubi kayu, dan sayur-sayuran yang biasanya dilakukan dengan cara tumpang sari. Aktivitas menanam padi sebagai aktivitas utama dalam pertanian yang dilakukan oleh perempuan di ladang hampir mencakup seluruh aspek. Mulai mengolah lahan, menyemai benih padi, menanam, merawat, memanen hingga aktivitas pascapanen yakni merontokan dan mengeringkan padi, hal tersebut sesuai dengan pernyataan beberapa informan yang mengaku melakukan semua aktivitas pertanian mulai dari mengolah lahan hingga kegiatan pasca panen, semuanya mereka lakukan dan terkadang turut dibantu oleh suami mereka. Adapun gambaran umum aktivitas pertanian saat bercocok tanam padi yang dilakukan oleh perempuan Melayu di Dusun Semayong secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

1. Mengolah Lahan
Proses pengolahan lahan yang dilakukan oleh petani perempuan meliputi, pembersihan atau pembunahan gulma, yang biasanya dengan cara menebas dengan menggunakan alat-alat tradisional (*parang*) dan menyemprotkan pestisida. Karena sistem pertanian dilakukan dengan sistem ladang tetap dan tadah hujan, sehingga tidak dilakukan penggarapan lahan.
2. Menyemai benih
Penyemaian benih biasa dilakukan dengan dua cara, yang *pertama*, melalui penggemburan tanah (tanah di gali dengan *parang* dan dihamparkan kemudian di taburkan benih padi). *Kedua*, dengan cara melobangi tanah (dengan alat tradisional, masyarakat setempat menyebutnya *penugal*, yakni kayu yang diruncingkan) dan kemudian lobang tersebut di isi dengan benih padi.
3. Menanam (*Nandor*)
Menanam padi dalam sebutan masyarakat setempat ialah *Nandor*, juga dilakukan secara tradisional dengan melobangi tanah dengan alat *penugal* dan memasukan benih padi yang telah tumbuh setelah disemai sebelumnya.
4. Memelihara
Kegiatan memelihara tanaman padi biasanya dilakukan dua tahap yakni pada saat umur padi

beberapa bulan setelah ditanam yakni saat padi belum berbuah, dan setelah padi berbuah. Sebelum berbuah padi akan dirawat dengan cara menghilangkan rumput atau gulma yang mengganggu pertumbuhan padi, serta menaburkan pupuk dan penyemprotan pestisida pembunuh hama padi. Setelah berbuah biasanya petani kembali menyemprotkan pestisida untuk mengusir hama agar buah padi tidak terganggu.

5. Memanen

Panen padi dilakukan menggunakan ani-ani, sehingga memerlukan waktu yang lama. Panen biasanya tidak hanya terjadi satu kali, setelah proses panen pertama selesai biasanya akan muncul buah-buah baru dari pohon padi yang masih ada namun jumlahnya hanya sedikit.

6. Merontok padi

Kegiatan merontok padi dilakukan dengan cara menginjak dan memilin-milin buah padi beserta tangkainya dengan kaki dan dilakukan di rumah.

Enam poin di atas merupakan proses dari awal hingga akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh perempuan di Dusun Semayong dalam hal pertanian. Proses tersebut didominasi oleh perempuan, menurut informasi dari para informan, hal tersebut sudah wajar dilakukan oleh perempuan dengan alasan memang sudah tradisi sejak dahulu.

Alokasi Waktu

Tugas dan peran perempuan yang telah menikah tentu akan berbeda dibanding sebelum menikah terutama dalam mengatur waktu khususnya bagi mereka yang tidak hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga namun juga sebagai pencari nafkah keluarga, sehingga perempuan harus pintar membagi waktu untuk keluarga dan juga bekerja. Alokasi waktu bekerja berkaitan dengan pembentukan sebuah manajemen waktu yang harus dilakukan oleh istri demi keberlangsungan pekerjaan yang mereka emban. Tidak jarang perempuan mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan waktu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Terlepas dari itu perempuan yang bekerja sebagai petani di Dusun Semayong harus mampu membagi waktu mereka untuk kegiatan-kegiatan produktif. Setidaknya tiga kegiatan produktif utama yang memerlukan curahan waktu bagi petani Melayu perempuan di dusun Semayong, yakni kegiatan di rumah, kegiatan bertani di ladang, dan kegiatan mencari nafkah menyadap karet.

1. Curahan Waktu di Rumah

Kegiatan atau pekerjaan di rumah merupakan salah satu kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan produktif, karena waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini juga tidak kalah besarnya

dibanding kegiatan diluar rumah. Hal tersebut ditemukan bilamana pelaksanaannya diserahkan/digantikan oleh orang lain yang diberi imbalan atas pekerjaannya mengurus rumah tangga (upah). Dengan demikian jelas bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan produktif, karena akan bernilai ekonomis bila ditransformasikan kepada pihak jasa tenaga kerja bayaran (*paid worker*) (Elizabeth, 2008:62). Semua informan dalam penelitian ini telah memiliki anak, jadi kegiatan yang biasa mereka lakukan di rumah, meliputi memasak, menyuci, mengurus anak apabila anak mereka masih kecil dan kegiatan domestik lainnya. Tidak ada ketetapan waktu untuk aktivitas di rumah karena segala aktivitas rumah dilakukan saat waktu luang sebelum berangkat atau pulang kerja.

2. Curahan waktu di Ladang

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa perempuan merupakan pelaku utama yang menggerakkan proses pertanian di Dusun Semayong, itu berarti pertanian di ladang hampir sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan, oleh karenanya berhasil atau tidaknya usaha tani bergantung dengan sejauh mana perempuan mampu membagi waktu mereka. Beberapa petani perempuan di Semayong bekerja sebagai petani telah mencapai puluhan tahun. Salah satu keterangan informan menyebutkan bahwa ia telah bekerja sebagai petani sudah lebih dari dua puluh tahun, dan bertani ia lakukan setelah menikah. Seperti telah dihipunkan dari beberapa pernyataan informan, didapatkan data bahwa rata-rata petani perempuan di Dusun Semayong menghabiskan waktunya untuk kegiatan produktif bertani di ladang ialah sekitar 4-7 jam per hari. Waktu bekerja di ladang lebih lama pada saat menanam dan saat panen dibanding kegiatan-kegiatan bertani lainnya. Umumnya istri mulai bekerja di ladang pada pukul 1-5 sore, namun tidak jarang juga istri akan menghabiskan waktunya di ladang seharian sejak pukul 05:00 pagi sampai 05:00 sore, biasanya dilakukan pada saat panen atau menanam atau pada ketika hujan di malam hari sehingga mereka tidak bisa menyadap karet di pagi harinya.

3. Kegiatan Menyadap Karet

Menyadap karet menjadi bagian kegiatan petani perempuan yang tidak kalah pentingnya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa usaha tani yang dilakukan hanya untuk kebutuhan pangan keluarga, dan untuk memenuhi finansial keluarga melalui

kegiatan menyadap karet dan uang hasil penjualannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Curahan waktu yang diperlukan perempuan untuk menyadap karet tidak kalah besarnya dibanding kegiatan di rumah maupun bertani di ladang. Setiap informan memiliki alokasi waktu yang berbeda-beda saat menyadap karet karena tergantung keterampilan (kecepatan) masing-masing saat menyadap karet tersebut. Berdasarkan keterangan informan biasanya mereka melakukan kegiatan menyadap karet sejak dini hari, masing-masing informan berbeda. Rata-rata waktu yang diperlukan ialah berkisar 3-5 jam dalam sehari, tergantung luas atau banyaknya pohon karet yang disadap.

Alokasi waktu yang diperlukan perempuan dalam sehari untuk melakukan ketiga aktivitas produktif di atas sangat besar, meskipun demikian mereka masih beranggapan hanya sebatas membantu suami dan suami adalah pencari nafkah utama bagi keluarga. Petani Melayu perempuan yang ada di Semayong rata-rata tergolong memiliki curahan jam kerja yang tinggi, karena waktu yang mereka habiskan untuk melakukan semua pekerjaan dapat mencapai 10 jam bahkan lebih dalam sehari. Jika indikator yang digunakan untuk menentukan kedudukan pencari nafkah dalam keluarga menggunakan jam kerja, dapat dikatakan juga bahwa istri sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga apabila jam kerja perempuan atau istri melebihi suami.

Budaya dan Petani Perempuan di Semayong

Perkembangan masyarakat selalu beriringan dengan berkembangnya budaya, karena masyarakat selalu hadir dengan beragam nilai-nilai, kebudayaan maupun adat-istiadat. Oleh karenanya tidak salah jika dikatakan bahwa dimana ada masyarakat maka disitu akan terdapat kebudayaan. Budaya itu sendiri di definisikan oleh Mulyani seperti dikutip dalam (Sanadi, 2014), ialah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi-kegenerasi. Sebelumnya juga telah diutarakan bahwa dalam studi perempuan sering kali disebutkan adanya budaya patriarki, yakni menempatkan kaum laki-laki sebagai sosok yang memiliki otoritas tinggi dalam berbagai hal kehidupan termasuk dalam kehidupan keluarga, sosok laki-laki adalah seorang pemimpin yang harus dipatuhi. Budaya patriarki ini oleh banyak perempuan terutama para aktivis dan kelompok feminis seringkali dianggap sebagai penghalang kemajuan bagi perempuan yang tidak jarang munculnya diskriminasi maupun subordinasi di kalangan perempuan. Konstruksi budaya yang sejak dulu hingga masih terasa saat ini adalah perempuan

bekerja di ruang domestik, mengurus rumah dan anak-anak sedangkan suami bekerja di luar (ruang publik) mencari nafkah untuk keluarga. Kebiasaan ini berlangsung secara turun-menurun dan zaman ke zaman sehingga dianggap sebagai adat-istiadat yang harus ditaati dan dilakukan terutama bagi perempuan.

Konstruksi budaya patriarki juga tidak luput dirasakan di kalangan masyarakat Semayong khususnya bagi kaum perempuan, namun hal tersebut tidak berlaku untuk semua aspek. Peran gender laki-laki dan perempuan untuk di beberapa aspek penting dirasakan sudah cukup baik bagi kalangan perempuan, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Sudah banyak dijelaskan sebelumnya bahwa tingginya kontribusi perempuan dalam bidang-bidang produktif terutama dalam bidang pertanian, peran perempuan bahkan mendominasi segala proses kegiatan pertanian. Tidak terdapat perbedaan kerja yang dilakukan perempuan dan laki-laki dalam bidang pertanian, setiap kerja yang dilakukan laki-laki juga dilakukan perempuan dalam bercocok tanam padi. Dapat dikatakan kaum laki-laki yang sifatnya membantu istri dan kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak lama. Seperti keterangan yang diungkapkan oleh salah satu informan, yang menyatakan bahwa bekerja sebagai petani merupakan kewajiban yang harus dilakukan setelah menikah dan bertani ia akui sebagai pekerjaan yang telah dilakukan secara turun-temurun yang biasa dilakukan di Semayong. Sama halnya dengan keterangan yang diungkapkan oleh informan lainnya, yang beranggapan bahwa adanya stigma negatif yang akan dirasakan oleh perempuan apabila mereka tidak bekerja dalam konteks ini ialah bekerja sebagai petani. Istri yang tidak bekerja dipandang kurang baik oleh masyarakat. Kenyataan ini dapat disimpulkan sebagai bentuk konstruksi budaya terhadap perempuan dimana perempuan yang hanya bekerja dalam ruang domestik dianggap kurang baik bagi masyarakat Semayong, dan keterbukaan akses pekerjaan di luar rumah yang diberikan terhadap perempuan adalah salah-satu bentuk cairnya peran gender di kalangan masyarakat Melayu di Semayong. Dengan begitu petani perempuan di Dusun Semayong menunjukkan bahwa peran perempuan tidak hanya sebatas dalam ruang lingkup merawat dan menjaga keluarga. Ia juga berkontribusi untuk pekerjaan-pekerjaan produktif untuk menunjang kebutuhan keluarga baik secara ekonomi maupun kebutuhan pangan khususnya.

Eksistensi Perempuan Sebagai Penggerak Utama Ketahanan Pangan

Dalam rumah tangga, perempuan merupakan aktor utama ketahanan pangan rumah tangganya. Ketahanan pangan rumah tangga juga akan berdampak pada ketahanan pangan nasional.

Perempuan di Dusun Semayong membuktikan bahwa perempuan memegang kunci ketahanan pangan keluarga, karena melalui tangan perempuanlah kebutuhan pangan dan nutrisi yang didapatkan oleh setiap anggota keluarga dapat tercukupi. Peran perempuan secara dominan dalam pertanian merupakan bukti eksistensi perempuan dalam ketahanan pangan. Perempuan terlibat untuk dapat memilih benih sampai pengolahan pertanian secara cermat sehingga hasil panen dapat optimal, jika hasil panen optimal maka kebutuhan keluarga dapat tercukupi. Perempuan juga yang bertanggungjawab untuk menjaga ketersediaan bahan pangan untuk keluarga agar tetap aman. Menurut Asian Development Bank (2013) terdapat tiga pilar ketahanan pangan, yaitu; ketersediaan, keamanan, dan pemanfaatan terhadap pangan. Jika ketiga hal tersebut sudah baik, maka keluarga tersebut sudah dapat dikatakan ketahanan pangannya baik.

Kontribusi perempuan dalam pertanian ini perlu menjadi sebuah perhatian yang serius. Perhatian tersebut dapat diwujudkan dalam upaya penyadaran akan eksistensi perempuan tersebut. Meskipun di Dusun Semayong, para perempuan menganggap bahwa kontribusinya dalam pertanian hanyalah sebagai suatu 'kewajiban yang turun temurun' yang harus dilakukan oleh seorang istri, namun hal tersebut tidak bisa terus dibiarkan begitu saja. Kesadaran akan peran mereka yang sangat besar bagi keluarga akan menumbuhkan dampak-dampak positif bagi status mereka sebagai perempuan yang kontributif di masyarakat. Kesadaran tersebut akan menimbulkan suatu pemahaman bahwa dalam rumah tangga, baik suami maupun istri adalah *partner* dalam kesejahteraan keluarga. Kesadaran tersebut juga memungkinkan adanya peningkatan eksistensi perempuan dalam upaya intervensi pengambilan keputusan terutama menyangkut ketahanan pangan keluarga. Selama ini yang menjadi permasalahan adalah keterlibatan perempuan dalam usaha tani hanya dianggap sebagai upaya istri dalam membantu suami saja dan bukan sebagai pemegang peran vital dalam proses produksi usaha tani. Anggapan tersebut dapat menimbulkan tidak adanya penghargaan dari suami terhadap peran istrinya. Terdapat anggapan dari laki-laki bahwa tugas perempuan dalam pertanian yang selama ini dilakukan adalah sebagai tugas wajar seorang istri dan memang sudah menjadi "kodrat" istri dan cap sebagai seorang ibu rumah tangga tetap melekat pada istri. Tidak jarang perempuan sendiri ikut berpikir hal yang sama, dan menempatkan diri sendiri sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut berpotensi akan menimbulkan rendahnya kesadaran laki-laki atas besarnya peran perempuan dalam usaha tani. Rendahnya kesadaran laki-laki dan perempuan tersebut juga akan memungkinkan rendahnya partisipasi perempuan untuk mengungkap masalah konkrit yang mereka

alami dalam proses usaha produksi tani (Bemmel, 2009). Jika laki-laki dan perempuan menyadari kontribusi mereka dalam pertanian sangat besar, maka akan memungkinkan adanya intervensi perempuan yang lebih banyak dalam mengemukakan pendapat terkait usaha tani dan menyuburkan potensi mereka untuk dapat meningkatkan hasil pertanian. Seperti yang disebutkan dalam forum dunia yang membahas tentang "*Gender Equality and Food Security: Womens empowerment as a tool against hunger*" dalam publikasi Asian Development Bank (2013) menyatakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkontribusi untuk ketahanan pangan. Keputusan tersebut dapat berupa menyediakan sarana bagi perempuan untuk mengeluarkan pendapat mengenai alokasi lahan, pilihan tanaman yang tumbuh, hingga pembagian kerja dalam mengelola tanah atau lahan. Semua itu sangat berguna bagi keberlangsungan ketahanan pangan lokal. Pelibatan perempuan ini juga akan berdampak pada upaya mencerdaskan perempuan. Diharapkan kasus seperti di Dusun Semayong yang menjadikan usaha tani sebagai jalan terakhir pekerjaan yang dipilih karena tingkat pendidikan perempuan yang rendah tidak terjadi lagi. Diharapkan usaha tani yang memang sudah turun temurun dipegang oleh dominasi perempuan akan menjadi suatu lahan usaha yang menyejahterakan keluarga tani, didukung dengan kemampuan dan pengetahuan perempuan yang baik di bidang pertanian.

Kesadaran akan eksistensi perempuan tersebut juga akan memungkinkan keterbukaan akses sumberdaya pertanian bagi perempuan. Perempuan bukan hanya ditempatkan sebagai pihak yang membantu laki-laki saja melainkan sebagai aktor utama peningkatan kualitas pertanian. Jika hasil pertanian berkualitas maka jumlah hasil panen akan melimpah dan tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan keluarga saja, selain itu hasil panen yang berkualitas juga memungkinkan perempuan untuk dapat mendistribusikan pangan yang bernutrisi kepada seluruh anggota keluarganya.

Eksistensi perempuan dalam ketahanan pangan ini tidak hanya harus disadari oleh masyarakat yang bersangkutan melainkan juga oleh pemerintah tingkat lokal maupun nasional. Meskipun ketersediaan pangan cukup baik di tingkat lokal maupun nasional, namun jika ketersediaan pangan di tingkat individu masih tidak merata maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Prabowo, 2010). Oleh karena itu, kontribusi perempuan di Dusun Semayong ini harus didukung penuh oleh pemerintah dengan menyejahterakan kehidupan keluarga tani. Perhatian terhadap kebutuhan perempuan mengingat perannya yang ganda juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai beban kerja yang selama ini dilakukan oleh

perempuan demi kesejahteraan keluarganya hanya dianggap sebagai sebuah kewajiban turun temurun seorang istri yang tidak dipandang sebagai sesuatu yang kontributif dan berharga.

SIMPULAN

Eksistensi perempuan sebagai penggerak utama pangan di Dusun Semayong memiliki peran yang dominan, di antaranya: mengolah lahan, menyemai benih, menanam, memelihara, memanen, dan merontok padi. Peran perempuan (istri) sangatlah besar dibandingkan laki-laki dalam bidang pertanian, hal ini dikarenakan laki-laki (suami) lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di bidang lain selain pertanian. Keterlibatan perempuan secara dominan dalam pertanian di Dusun Semayong memang sudah menjadi tradisi secara turun temurun, perempuan yang sudah menikah dianggap tidak baik jika hanya mengurus rumah tangga saja, maka dari itu perempuan terlibat secara penuh dalam usaha tani, biasanya hasil panen digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Keterlibatan perempuan ini dianggap sebagai cara istri dalam membantu suaminya mencukupi kebutuhan keluarga. Selain dalam bidang pertanian, perempuan di Dusun Semayong ini juga melakukan pekerjaan sebagai penyadap karet.

Eksistensi perempuan dalam ketahanan pangan ini harus dapat diapresiasi dengan upaya penyadaran bahwa keterlibatan mereka sangat berarti banyak dalam ketahanan pangan. Perempuan dan ketahanan pangan adalah dua hal yang berkaitan, sebab melalui perempuanlah ketahanan pangan keluarga dapat terpenuhi. Terutama di Dusun Semayong, keterlibatan perempuan yang dominan harus dapat diapresiasi sebagai aktor utama ketahanan pangan. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat mengemukakan pendapat terkait permasalahan konkrit yang mereka alami dalam usaha tani adalah hal yang penting. Kesadaran laki-laki (suami) akan peran besar istri juga perlu ditingkatkan. Dalam hal ini diharapkan akan muncul kesadaran bahwa baik laki-laki dan perempuan merupakan *partner* dalam menyejahterakan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. 2013. Gender Equality and Food Security-Womens empowerment as a tool against hunger. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank.
- Atem. (2014). Peranan Istri Yang Bekerja Sebagai Petani di Ladang Dusun Semayong Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat. *Sociologique, Jurnal Sosiologi* Vol 2 (4): 1-14
- Badan Ketahanan Pangan (2015). Data Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2014, Diakses

tanggal 14 Oktober 2016 dari <http://bkp.pertanian.go.id/kategori-32-statistik.html>

- Badan Pusat Statistik (2010). Jumlah dan Distribusi Penduduk, Diakses tanggal 13 Oktober 2016 dari <http://sp2010.bps.go.id/>
- Bahari, Baratyohanes. 2008. Model Komunikasi Lintas Budaya Dalam Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Melayu Dan Madura Di Kalimantan. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol 6, (2): 1-12
- Bemmelen, Sita Thamar. 2009. *Menuju Masyarakat Adil Gender*. Bali:VECO Indonesia.
- Elizabeth, Roosganda. 2008. Peran Ganda Wanita Tani dalam Mencapai Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Pedesaan. *Jurnal Iptek Tanaman Pangan* Vol. 3 (1): 59-68
- Mandamdari, Alpha Nadeira dan Mulyani, Altri. 2012. Peran Wanita Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Cilongok). *Jurnal SEPA* Vol 8(2): 59-67
- Markus, Jenny. 2016. Perempuan dan Ketahanan Pangan (online) , Diakses tanggal 14 Oktober 2016 dari <http://kupang.tribunnews.com/2010/11/23/perempuan-dan-ketahanan-pangan>
- Pieris, Karen Winsdel Dinly. 2015. Ketahanan dan Krisis Pangan Dalam Perspektif Malthus, Dependensi dan Gender. *Jurnal Hubungan Internasional* Vol VIII (1): 1-13
- Prabowo, Rossi. 2010. Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal MEDIAGRO* Vol 6 (2): 62-73
- Profil Desa Sungai Kumpai Tahun 2013.
- Ratna, S dan Holzner, B. (2016). *Perempuan, Kerja Dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Kalyanamitra
- Sanadi, Debora Ria. (2014). Komunikasi Interpersonal Pada Keluarga Beda Budaya *The Messenger*, Vol Vi (1): 29-33
- Suradisastra Kedi dan Lubis, M. Adriana. 2000. Aspek Gender Dalam Kegiatan Usaha Peternakan. *Wartazoa* Vol 10 (1): 13-19

REPRESENTASI EKSPLOITASI SEKSUALITAS DALAM NOVEL *50 RIYAL: SISI LAIN TKW INDONESIA DI ARAB SAUDI* KARYA DENI WIJAYA

Hiyang Widya Prasastiani
Prodi Kajian Sastra dan Budaya, FIB, Unair
hiyangwidya@gmail.com

Alfaratna Septi Nurlaily
Prodi Kajian Sastra dan Budaya, FIB, Unair

Ethis Kartika Sari
Prodi Kajian Sastra dan Budaya, FIB, Unair

Abstrak

Struktur gender yang sudah terbangun dan tertanam bertahun-tahun, bukanlah pekerjaan mudah. Salah satu dengan memahami struktur gender dari segi permainan kekuasaan yang bersifat timbal balik. Dalam kehidupan sehari-hari, posisi-posisi dalam struktur itu dapat berubah tergantung situasi dan kondisi tertentu. Terdapat penyimpangan seksual, seks dijadikan bahan dagangan berkaitan. Ada pelepasan nafsu seks secara liar di dalam relasi seks tersebut dengan banyak orang. Serta menjadi perempuan di tengah budaya patriakal yang membuatnya selalu mengalami kekerasan sepanjang hidup. Bermula hal itu, Penelitian ini mengenai eksploitasi seksualitas yang dialami para perempuan Indonesia di dalam prostitusi yang dikaji lewat Novel 50 Riyal Sisi Lain TKW Indonesia di Arab Saudi karya Deni Wijaya. Penelitian bertujuan mendeskripsikan beberapa eksploitasi seksualitas dalam novel 50 Riyal, mengetahui strategi yang dilakukan dalam menghadapi relasi seksualitas dan kekuasaan dalam novel 50 Riyal, bagaimana karya sastra sebagai karya fiksi dapat mengangkat realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat, menentukan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang Deni Wijaya dalam 50 Riyal. Penelitian menggunakan metode *content analysis*. Melalui metode ini peneliti menentukan dan mengembangkan fokus tertentu, yaitu “Eksploitasi Seksualitas dalam novel 50 Riyal: Analisis Dekonstruksi Gender”. Metode *content analysis* pada prinsipnya menitikberatkan pada objektivitas dan realitas, melakukan klasifikasi pada teks agar dapat mengidentifikasi unsur-unsur di dalam teks secara substansial dengan menggunakan data dan teori yang ada. Maka dengan menggunakan wacana dekonstruksi yang ditampilkan dalam novel 50 Riyal dengan tanpa menghancurkan teori gender. Gender ditarik pada wilayah ketimuran yang terkonstruksi dari pandangan

Barat. Sedangkan teori yang digunakan yakni menggunakan teori gender dan dekonstruksi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara satu disiplin ilmu tertentu (ilmu sastra) dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga memungkinkan adanya penelitian yang multidisipliner.

Kata kunci: Gender, Eksploitasi, Seks, Novel, Budaya, Kekuasaan

PENDAHULUAN

Struktur gender yang sudah terbangun dan tertanam bertahun-tahun, bukanlah pekerjaan mudah. Salah satu hal adalah dengan cara memahami struktur gender dari segi permainan kekuasaan yang bersifat timbal balik, tidak hanya searah, dari kekuatan dominan ke subordinat. Struktur gender bukanlah sesuatu yang statis. Dalam kehidupan sehari-hari, posisi-posisi dalam struktur itu dapat berubah tergantung situasi dan kondisi tertentu. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik kaum laki-laki maupun perempuan. Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan Negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya, proses eksploitasi (Fakih, 1987:14). Dari proses eksploitasi inilah yang kemudian dapat membuat perempuan terjebak dalam prostitusi yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Mereka kaum perempuan terpaksa melacurkan diri mereka oleh sebab situasi dan kondisi.

Menurut Chasanah (2002: 15-16), selama ini masyarakat masih belum bisa menerima sepenuhnya kehadiran “pelacur”, mereka selalu dianggap sebagai

“sampah” masyarakat. Dengan menghadirkan sosok “pelacur” melalui wacana yang berbeda, tetapi bukan berarti menunjukkan bahwa pelacur (seperti dalam novel *50 Riyal*) itu baik, tetapi hendaknya menunjukkan bahwa setiap manusia, apapun profesinya, tetap mempunyai sisi baik dan buruk. Dalam novel *50 Riyal* ini, pembaca dituntut dapat berpikir secara bijak dalam membaca. Hal-hal yang teresplisit dalam teks tidak begitu saja diterima sebagai hasil pembacaan.

Pelacuran menurut Kartini Kartono (Marzuki, 2001: 112), suatu bentuk penyimpangan seksual, dimana terdapat pola organisasi impuls-impuls/dorongan seks yang tidak wajar. Ada dorongan seks yang tidak terintegrasi dalam kepribadian, dengan mana relasi seks itu sifatnya impersonal, tanpa afeksi dan emosi (kasih sayang), berlangsung cepat, tanpa mendapatkan orgasme di pihak wanita. Seks dijadikan bahan dagangan sehingga benda/materi dan uang. Ada pelepasan nafsu seks secara liar di dalam relasi seks tersebut dengan banyak orang. Bermula dari hal ini, akan melahirkan suatu penelitian sederhana mengenai eksploitasi seksualitas yang dialami para perempuan tersebut di dalam prostitusi yang dikaji lewat Novel *50 Riyal Sisi Lain TKW Indonesia di Arab Saudi* karya Deni Wijaya. Dengan menguak gambaran eksploitasi seksualitas para TKW yang ditampilkan dalam novel tersebut melalui hubungannya dengan Bagas, serta ideologi yang terbentuk melalui penggambaran eksploitasi seksualitas tersebut.

METODE

Secara umum, pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Terdapat dua sumber data yang digunakan yakni sumber pokok dan sumber data pendukung (Faruk, 2012: 40). Sumber data pokok disini adalah novel *50 Riyal: Sisi Lain TKW Indonesia di Arab*. Sedangkan sumber data pendukungnya adalah referensi kepustakaan yang menunjang penelitian ini yang berhubungan dengan teori dekonstruksi Jacques Derrida serta penelitian terdahulu. Teknik analisis data, mengaplikasikan teori dekonstruksi ke dalam novel untuk menemukan oposisi biner yang dihubungkan dengan hierarki metafisik. Haryatmoko (2016) menjelaskan mengenai bagaimana dekonstruksi Derrida berkaitan dengan konsep *liyan* atau *différence* yang mampu menciptakan makna baru yang sama sekali berbeda saat dilakukannya pencabutan pada oposisi biner. Pada penjelasan lebih lanjut disebutkan pula bahwasannya oposisi biner memiliki hierarki metafisik yang apabila didekonstruksi akan menyingkap ideologi-ideologi yang terkandung dalam bahasa yang digunakan. Dalam menjelaskan hal tersebut, Haryatmoko (2016) menggunakan contoh penyebutan

minoritas dan mayoritas yang menunjukkan adanya ideologi bahwa kaum tertentu terpinggirkan dan kaum lainnya menjadi lebih penting. Kebekuan ideologi metafisik inilah yang hendak dicairkan oleh Derrida dengan cara mengusik hierarki metafisik melalui konsep *undécidable* (Haryatmoko, 2016).

Konsep *undécidable* dipahami sebagai bentuk inkonsistensi teks dimana tidak adanya makna yang pasti, tidak bisa langsung diputuskan, plural dan bisa jadi saling bertentangan (Haryatmoko, 2016). Untuk singkatnya, Tyson (2006:59 dalam Haryatmoko, 2016:140) membantu menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan identifikasi konsep tersebut yang dimulai dari pengumpulan penafsiran kejadian-kejadian atau gambar-gambar teks, mencari pertentangan satu sama lainnya pada penafsiran teks tersebut, menjabarkan penafsiran baru dari konflik-konflik yang terekam pada teks dan terakhir adalah penentuan *undécidable*. Melalui penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konsep *différance*, hierarki metafisik dan *undécidable* pada teori dekonstruksi tentu sangat diperlukan untuk mengkaji lebih jauh mengenai isu eksploitasi seksualitas pada penggambaran tokoh utama Bagas dan Dewi dalam novel *50 Riyal*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Eksploitasi Seksualitas para TKW yang Ditampilkan pada Hubungan Bagus dan Dewi dalam Novel *50 Riyal Sisi Lain TKW Indonesia di Arab Saudi* karya Deni Wijaya

Menurut Goenawan Mohammad (1981:1-14) terdapat tiga pola sikap dari sastra Indonesia terhadap persoalan seks dan cara penggambaran seks. Pertama, karya yang berusaha mempersoalkan seks tetapi tidak menggambarannya. Kedua, karya-karya yang mempersoalkan seks dan menggambarannya dengan cara “meneriakkan dengan keras-keras”, ketiga, karya yang mempersoalkan seks sebagai bagian dari kehidupan manusia yang wajar dan menggambarannya secara wajar pula. Dalam novel ini mengambil pola yang kedua dan ketiga, mempersoalkan seks tetapi tidak menggambarannya serta mempersoalkan seks sebagai bagian dari kehidupan manusia yang wajar dan menggambarannya secara wajar.

Seksualitas tidak akan pernah lepas dari konteks masyarakat. Bahkan seksualitas dibentuk oleh masyarakat, bukan sesuatu yang alamiah yang seakan-akan datang dari langit. Seksualitas lantas dipahami dan dimaknai dalam batasan dan bidang yang ditentukan

oleh masyarakat. Contoh yang paling jelas adalah definisi tentang pornografi. Pornografi adalah karya-karya manusia berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, foto-foto, benda-benda pahat yang melanggar susila dan kesopanan agama, yang merangsang kehidupan seks pada waktu tertentu daripada norma-norma kondisi setempat yang dapat merusak norma-norma masyarakat dan akibat-akibat negatif yang disebarluaskan pers, televisi, dan film (Lesmana, 1995: 10).

Dalam novel ini menceritakan beberapa tokoh, yaitu Dewi, Yuyun dan Asmiati, yang menjadi TKW demi setumpuk riyal bukanlah profesi yang asing lagi. Menjadi pekerja tanpa dokumen resmi dan bahkan, tanpa disadari, tidak mendapatkan gaji pun mereka sanggupi. Kisah-kisah para TKW yang dikerjai majikannya sudah menjadi cerita basi. Novel ini mengungkap fakta kehidupan para *Syarmuth* (Pekerja Seks) Indonesia yang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, mereka cuma dihargai 50 Riyal atau setara dengan lima mangkok bakso. Bahkan mereka juga kerap mengalami penipuan dan kekerasan dari para pelanggannya. “Pelacur Indonesia di sana terlanjur dikenal sebagai barang murahan. Sampai-sampai melekat julukan melecehkan seperti *abu khomsin* yang dalam bahasa Arab artinya barang seharga 50 riyal,” (Wijaya, 2015: 38).

Novel fiksi ini mengisahkan pahit getir perjuangan hidup Dewi, seorang mualaf, dalam mencari penghidupan di negeri yang sering disebut Tanah Suci. Di Jeddah, secara tidak sengaja, dia bertemu dengan Bagas, seorang mahasiswa University of King Abdul Aziz yang juga berprofesi sebagai sopir taksi. Bagas adalah lelaki alim dan baik hati yang menolong Dewi dari kejaran Abdullah. Mereka terlibat kisah cinta yang sangat mengharukan dan dilematis, yang melibatkan mucikari Mami Zulaikha, Yuyun dan Asmiati.

Namun kenyataan pahit harus dia terima karena ternyata kehidupan di Arab Saudi tidak semudah dan seindah yang dia bayangkan sebelumnya. Dia mendapatkan majikan kejam yang selalu berusaha untuk merenggut kehormatannya sampai dia terjermum dalam dunia prostitusi hingga berurusan dengan polisi Saudi karena dituduh melakukan pencurian dan pembunuhan. Akibatnya, dia harus mendekam di penjara dan berjuang untuk bisa terbebas dari jeratan hukuman pancung pemerintah Arab Saudi. Dan di tengah pergulatan batin yang keras, dengan segala cara, Bagas ingin membebaskan Dewi dari jeratan hukuman pancung.

Dengan masih banyaknya penduduk dewasa di negara-negara Muslim yang buta huruf, minimnya pengetahuan

hukum Islam berkaitan dengan seks ataupun adanya usaha-usaha yang disengaja dari negara-negara tertentu untuk melestarikan budaya nasionalnya meski bertentangan dengan prinsip Islam. Menyebabkan masih banyak kaum Muslimin memahami dan mempraktekkan seks yang menyimpang dari norma Islam atau bercampur tahayul serta mistik. Kebodohan ini juga berdampak pada praktek seks yang tidak sehat dan beresiko, baik mengancam kesehatan mereka, tatanan sosial maupun agama (Marzuki Umar, 2001:14).

Pada bagian lain, masyarakat yang memiliki kombinasi terbelenggu kemiskinan dan kebodohan juga ikut menambah corak tingkah laku seksual yang ada. Dengan motivasi ekonomi, belenggu prostitusi biasanya menjerat gadis-gadis dari golongan ini. (2001: 15). Sehingga secara “dipaksakan” dapat mencapai puncak kenikmatan seksual (orgasme) ternyata dapat terjadi tanpa adanya rasa cinta di dalamnya. Dikarenakan mereka belum mengenal satu sama lain, namun, pada saat mereka melakukan aktivitas seksual tersebut, mereka bisa mencapai orgasme. Bila didekonstruksikan secara psikologis, pada saat itu secara psikologis ia (*syarmuth*) butuh perlindungan. Perempuan cenderung menerima dan terkalahkan dengan sikap pertentangannya.

Beberapa alasan lelaki mengunjungi wanita tuna susila ialah mencari variasi dalam relasi seks, iseng, malu melakukan relasi heteroseksual dengan wanita biasa, istri tengah hamil atau bersalin, jauh dari istri karena melakukan tugas dan lainnya. Di samping itu, alasan perkembangan kebijaksanaan pada pekerja yang semakin baik menjadi pendorong maraknya lelaki yang menggeluti plesiran ini. (2001: 113). Seperti berikut ini yang merupakan penggalan dialog saat Bagas sedang kebingungan mencari teman dekatnya yang bernama Dewi sehingga memberanikan diri untuk mendatangi tempat para *Syarmuth* bekerja meskipun dengan tubuh lunglai gemeteran. Apalagi Bagas merupakan sosok pemuda yang alim dan juga menyandang status salah satu mahasiswa di University of King Abdul Aziz.

“Tenang, mbak. Saya booking dobel untuk satu hari satu malam 400 riyal. Pokoknya langsung ku bayar cash nanti, gimana? (Bagas membujuk Asmiati)”, “Sejak kapan dan kenapa memutuskan untuk berprofesi sebagai *syarmuth* di Jeddah? Lalu apakah tidak takut tertangkap oleh polisi setempat dan dijebloskan ke penjara? Apakah tidak ingin pulang ke tanah air?” (Wijaya, 2015: 99).

Asmiati: “Aduuuuhhh...Mas ini seperti tidak tahu saja, bagaimana nasib para TKW di sini. Lebih banyak kisah sukanya, mas. Mulai dari disiksa,

diperkosa, melacur, bahkan sampai dihukum mati. Mau gimana lagi... sudah terlanjur basah, ya mandi sekalian, mas. Siapa sih mas, orang yang mau menjalani profesi ini...?" (Wijaya, 2015: 100).

Dari percakapan di atas merupakan penggambaran yang mendeskripsikan adanya aktivitas seksual antara Asmiati (*Syarmuth*) dengan para lelaki Arab yang mem-*booking*-nya, dan Asmiati sudah terbiasa menjalaninya sehingga terlihat dapat menikmati aktivitas seksual tersebut, walaupun perbuatan yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan ajarannya dan seolah melupakan tentang "berzina itu dosa" dengan yang bukan muhrim.

Dalam novel ini menceritakan ketidakadilan yang dialami oleh para TKW hingga berujung ke prostitusi karena mereka tidak dapat berbuat apapun di bawah ancaman pihak yang lebih berkuasa atas diri mereka. Seperti yang dialami Dewi, sebelumnya dia menjadi seorang pembantu rumah tangga dengan majikan perempuan yang sangat kasar dan selalu mencaci makinya, serta majikan laki-laki yang genit dan tidak beretika. Karena desakan situasi yang dialami, Dewi melukai majikan laki-lakinya dan kabur, hingga akhirnya diculik oleh orang suruhan majikan perempuannya dan dijadikan sebagai *syarmuth*. Ketidakberdayaan Dewi memaksanya untuk diam dan tidak dapat berbuat apa pun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tinggal di apartemen dengan sesama TKW yang telah menjadi lama menjadi budak nafsu lelaki Arab. Melalui kehidupan para TKW yang bekerja di Arab, tergambarlah dengan jelas bentuk eksploitasi seksualitas yang terjadi pada mereka ketika orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan berkuasa dapat melakukan apa pun terhadap diri mereka, seperti memaksa mereka menjadi pekerja seks atau *syarmuth* untuk para lelaki hidung belang di Arab Saudi. Relasi kuasa disini sangat bermain dan berperan penuh dalam mengatur kehidupan para TKW yang terintimidasi oleh orang-orang yang berkuasa dan tidak memiliki hati nurani, seperti Mami Zulaikha, padahal dia sendiri adalah orang Indonesia yang menikah dengan pria Arab, Abdullah. Namun, hatinya tidak bergeming ketika saudaranya sesama orang Indonesia mengalami kesulitan yang justru diakibatkan oleh dirinya sendiri yang notabene adalah seorang geromo para *syarmuth* Indonesia.

Ideologi yang terbentuk melalui penggambaran eksploitasi seksualitas para TKW dalam hubungan Bagus dan Para TKW dalam novel 50 Riyal Sisi Lain TKW Indonesia di Arab Saudi karya Deni Wijaya

Bagas: "hmmm...ada benarnya juga. Tapi..apa kamu tidak ingin keluar dari sini?"

Asmiati: "Aku terjebak dalam situasi sulit mas, aku kabur dari majikanku dan menjadi kejaran polisi. Dalam kondisi seperti itu, siapa sih yang tidak putus asa dan khawatir... Mas, bayangkan bagaimana jika mas sendiri hidup di negeri orang tanpa ada dokumen resmi seperti visa ataupun paspor dan tidak mempunyai uang sepeser pun? Bahkan tidak mempunyai kerabat atau sanak saudara? Mas, bisa bayangkan itu? Pasti mas akan mengerti."

"Satu lagi hal yang sangat aku sesalkan dan menambah penderitaanku. Orang yang aku anggap sebagai dewa penolong justru telah merenggut kehormatanku dengan paksa dan menjualku kepada seorang mucikari. Lalu apa yang bisa kulakukan? Siapa yang dapat menolongku dan mengeluarkanku dari sini? Pemerintah?" (Wijaya, 2015: 101).

Perempuan adalah entitas yang cenderung rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena kategori seksual dan konstruksi gendernya yang dianggap lemah dan tidak berdaya. Adanya konstruksi gender yang sekaligus memproduksi oposisi biner sering menempatkan perempuan pada oposisi sebagai *the other* atau *liyan*. Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex* memberikan perbedaan antara seks dan gender. Gender berkaitan dengan *other* (dengan "O" huruf kapital) dan seks berkaitan dengan *other*. Perbedaannya yaitu *Other* merujuk pada konsepsi eksistensialisme perempuan dalam arti yang sebenarnya. Sedangkan *other* merujuk pada konsep perempuan yang dipandang sebagai yang lain atau objek (Riyanto, 2011).

Menurut Tyson (2006: 259 dikutip dalam Haryatmoko, 2016), langkah pertama yang dilakukan adalah mencatat semua penafsiran yang ditawarkan teks dimana ditemukan adanya gambaran eksploitasi seksualitas terhadap para TKW yang tergambar dalam hubungan antara Bagus dan para TKW di Arab Saudi. Selanjutnya, Tyson (2006: 259 dikutip dalam Haryatmoko, 2016) menyarankan untuk melihat pertentangan dalam penafsiran tersebut. Menggunakan teori dekonstruksi, maka ditemukan bahwa sejatinya hubungan tokoh tersebut memunculkan oposisi biner dimana hitam/buruk adalah lawan dari putih/baik. Di sisi lain penafsiran hubungan keduanya juga memunculkan adanya hierarki metafisik dimana Bagus menjadi superior dan Dewi serta para TKW yang menjadi *syarmuth* adalah inferior.

Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa ternyata terdapat pertentangan oposisi biner dan hierarki metafisik antara hubungan Bagus dan para TKW.

Dikatakan demikian karena dalam teori dekonstruksi disebutkan bahwa oposisi biner dan hierarki metafisik perlu diusik untuk menghasilkan pemaknaan baru terhadap teks (Haryatmoko, 2016). Oleh karenanya bagan tersebut menunjukkan bagaimana oposisi biner hitam dan putih dengan hierarki metafisiknya dapat bergerak saling silang. Hal ini terjadi karena dekonstruksi tidak mempercayai pemaknaan mutlak bahwasannya ada usaha pembebasan diri dari eksploitasi seksualitas yang dialami Dewi dan para TKW lainnya dengan usaha Bagas melalui gambaran superioritas Bagas yang merupakan mahasiswa Universitas King Abdul Aziz yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia sedangkan Dewi merupakan TKW yang tidak berdaya akan adanya ancaman eksploitasi seksualitas dari mucikari Mami Zulaikha.

Merujuk pada langkah ketiga yang diajarkan Tyson (2006:259 dikutip dalam Haryatmoko, 2016), pemaknaan tersebut perlu dikaji kembali dengan melihat konflik-konflik yang tercipta di antara hubungan Bagas dan Dewi sehingga memunculkan penafsiran baru. Untuk menggali hal tersebut, ditemukan beberapa percakapan dimana Bagas lebih banyak melakukan penghargaan dengan mengangkat status sosial para TKW yang diwakili oleh Yuyun, salah seorang *syarmuth* asal Indonesia yang menjadi anak buah Mami Zulaikha. Berikut adalah bukti-bukti percakapan yang terjadi antara Bagas dan Yuyun:

“Kenapa kau menceritakan semuanya padaku, Yun? Apa kau tidak takut tertipu lagi?” goda Bagas untuk mencairkan suasana.

“Kenapa harus takut? Aku percaya padamu kok, Mas. Justru aku mau bertobat karena kamu, Mas.”
Ucap Yuyun.

“Mbak, kalau mau bertobat jangan karenaku, tapi karena Allah.” Timpal Bagas.

“Mas, tapi aku malu pada Allah. Masih mungkinkah Dia memaafkanku. Dosa-dosaku sudah terlalu banyak, Mas.” Sesal Yuyun.

“Mbak, Allah itu Maha pengampun dan Maha pemurah. Sebesar apa pun dosa kita, jika kita benar-benar bertobat, maka Allah akan mengampuni kita. Insya Allah. Pintu tobat terbuka bagi siapa saja.” kata Bagas menghibur. (Wijaya, 2015: 46).

Berdasarkan bukti-bukti percakapan tersebut, ditemukan bahwa Bagas sangat menghormati dan ingin membantu Yuyun sebagai TKW yang bekerja di Arab Saudi. Yuyun adalah satu dari banyak TKW asal Indonesia yang bekerja di Arab Saudi demi memperbaiki kondisi

ekonominya. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa para TKW adalah pahlawan devisa negara, namun, perlakuan pemerintah Indonesia terhadap para TKW yang membutuhkan bantuan tidaklah sesuai dengan anggapannya. Merujuk pada hal tersebut, Bagas berupaya menolong para TKW yang terpaksa menjadi *syarmuth* karena ulah Mami Zulaikha, meskipun harus mengorbankan nyawanya, terutama jika menyangkut tentang Dewi, gadis pujaannya. Maka, analisa pemaknaan terkait adanya superioritas Bagas yang dimanfaatkan untuk memanfaatkan para TKW karena kebaikan dan ketampanannya tidak sepenuhnya benar, bahkan sebaliknya film ini ternyata tetap saja menonjolkan superioritas orang yang berpendidikan seperti Bagas terhadap TKW. Analisa inilah yang mengantarkan pada langkah terakhir yang disampaikan oleh Tyson (2006:259 dikutip dalam Haryatmoko, 2016) terkait penentuan *undécidabilitas* teks.

Berdasarkan analisa dan temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya ideologi yang ditanamkan dalam novel *50 Riyal* berkaitan dengan diskriminasi pangkat atau status sosial yang dilakukan oleh orang-orang berkuasa di Arab Saudi. Novel ini menyisipkan makna dimana superioritas masih memegang kendali terhadap kehidupan kaum inferioritas di Arab Saudi, terutama di kalangan para TKW. Dekonstruksi telah membuktikan adanya politik teks pada novel tersebut yang memunculkan pemaknaan baru dimana kehidupan TKW yang menjadi pekerja seks atau *syarmuth* dan yang diexpose disini adalah bentuk pembelaan bagi para TKW tersebut bahwasannya menjadi *syarmuth* adalah paksaan bagi mereka dan ketidakberdayaan yang mereka alami tidak dapat melepaskan diri mereka dari ancaman ini.

Perempuan di tengah konstruksi ideologi patriarki cenderung ditempatkan pada posisi sekunder dari referensi primer (laki-laki). Gemelli (2008) mengungkapkan pemikiran dan studi Simone de Beauvoir tentang eksistensi perempuan yang *absent*. Beauvoir memformulasikan konsep perempuan di tengah ideologi patriarki dipandang sebagai liyan (*other*), laki-laki adalah norma, dan referensi primer; sementara perempuan dipandang sekunder, abnormal sehingga perempuan hanya menjadi bagian dari relasi laki-laki ketimbang sebagai entitas yang otonom dan mempunyai peran yang inferior. Ungkapan de Beauvoir bahwa perempuan tidak dilahirkan tetapi “dicetak” menunjukkan betapa perempuan sejak lama telah diperlakukan tidak adil oleh masyarakat. Perempuan tidak pernah ada sampai dia dibuat demikian. Artinya perempuan sudah lama teraniaya, terpenjara dan terdepak dari keadilan yang luhur karena diposisikan

sebagai liyan (*other*) (Riyanto, 2011). Akan tetapi di satu sisi, seksualitas tidak semata-mata biologi atau tubuh, tetapi kombiansi antara struktur anatomi dan psikologi. Menurut Sigmund Freud (2003: 115), perasaan nikmat dapat diperoleh melalui tindakan-tindakan sederhana yang juga merupakan faktor pembangkit berahi.

"Mungkin juga aku akan sulit untuk keluar dari sini?" kata Asmiati.

"Kenapa sulit?" Bagas.

"Aku masih terlilit utang sama Mami. Mungkin selamanya takkan bisa membayarnya."

"Utang apa sih?" lanjut Bagas.

"Kata Mami, utangku padanya sangat banyak termasuk semua fasilitas yang kugunakan di sini juga harus ku bayar. Belum lagi bayaranku harus dipotong oleh Mami dengan berbagai alasan ini dan itu," jawab Asmiati. (Wijaya, 2015: 101).

"Sudahlah Mas, tidak perlu dibahas hal itu. Aku di sini yang penting kerja sesuai perintah Mami. Aku tak mau cari masalah dengannya. Semua sudah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Entahlah sampai kapan aku akan di sini. Mungkin hanya waktulah yang akan menjawab semuanya, sebenarnya aku rindu keluargaku. Aku rindu anakku yang masih balita. Aku rindu canda tawanya yang menggemaskan..mungkin sekarang dia sudah besar (meneteskan air mata). Mas, aku ingin pulang.(sambil meneteskan air mata)," lanjut Asmiati. (Wijaya, 2015: 102).

"Yang sungguh menyakitkan, Syarmuth asal Indonesia sering kali mendapatkan cemoohan, menganggap kami ini seperti barang murahan. Bahkan seperti gak ada harganya sama sekali... Mereka sering kali berbuat curang dan kasar kepada kami," lanjut Asmiati. (Wijaya, 2015: 103).

Profesi yang dipilih Asmiati sebagai pelacur membawanya pada kesadaran diri atas otoritas dan harga dirinya secara harfiah. Ia bertemu dengan makna menjadi perempuan di tengah budaya patriakal yang membuatnya selalu mengalami kekerasan sepanjang hidupnya ketika memutuskan untuk mengadu nasib sebagai TKW di Arab Saudi. Ia sama sekali tidak memiliki hak atas tubuhnya karena terjerat di posisinya sebagai seorang perempuan yang memang harusnya menerima apapun yang terjadi pada dirinya, ikhlas dan tidak menentang. Faktor kemiskinan menyebabkan seseorang membebaskan diri dari larangan sosial dengan menampakkan rasa ketidakberdayaan secara sosial ekonomi (Marzuki Umar, 2001).

Hal yang diungkapkan Freud itu seperti dari kutipan Asmiati, *"Ya mau gimana lagi, Mas! ku ikuti saja kemauan mereka... Tapi enak juga kok... hehe." Asmiati sambil tersenyum nakal, seolah ingin menyembunyikan kegalauan hatinya. (Wijaya, 2015: 106).*

Mereka (*Syarmuth*), dengan keadaan yang terpaksa seperti itu, menjalani semua itu dengan 'perasaan senang' tanpa memikirkan dosa yang akan mereka tanggung. Meskipun dalam hati kecil mereka ingin melakukan pemberontakan yang terjadi pada dirinya. Dan bagi mereka pemerintah hanya mengutamakan devisa negara saja daripada memperhatikan rakyatnya. Asmiati menganggap bahwa pemerintah khususnya dengan beberapa oknum di dalamnya adalah seseorang yang munafik dengan mengandalkan atas nama agama semata.

Dengan sudah membudayanya seksualisasi di segenap kehidupan, menyebabkan ajaran hijab mendapat penilaian yang bermacam-macam. Mulai dari Arabisasi bangsa lain hingga tuduhan memenjarakan hak dan kebebasan wanita. (2001: 187).

"Eh...tapi apa kamu tidak takut dosa dan hukuman Tuhan? (Tanya Bagas)".

Asmiati menjawab dengan muka sedih dan tertunduk, "Untuk urusan Tuhan... Aku sebenarnya tidak terlalu suka, mas. Itu hal yang sangat pribadi dan sensitif bagi semua orang," lanjutnya, "Semua orang selalu merasa benar atas keyakinan mereka Mas. Biasanya masing-masing merasa paling benar. Kalaupun salah, mereka akan berusaha mencari pembenaran atas keyakinannya. Bahkan kadang mengatasnamakan Tuhan, atas perbuatan kasar yang mereka lakukan. Mungkin yang mereka lakukan telah benar. Tetapi caranya salah, Mas. Itu sering terjadi di sini. Kami sering terjaring razia oleh oknum yang mengatasnamakan kebenaran Tuhan, tapi justru mereka sendiri yang menodai kesucian Tuhan," (Wijaya, 2015: 106-107).

Tetapi di sisi lain, temannya yang bernama Dewi, sangat tidak menyukai mengenai hal itu. Beda dengan Asmiati yang lambat laun telah terbiasa. Bagi Dewi lebih baik mati bunuh diri daripada harus mempertahankan harga diri dan keperawanannya pada para lelaki di negeri yang kental dengan ke-islamannya tersebut. Dewi menginginkan untuk bisa kembali ke kampung halamannya jika ada kesempatan pada dirinya.

Dengan pertolongan dari Bagas yang telah membebaskannya dari dunia prostitusi tersebut dan fitnah yang keji dari Mami Zulaikha yang telah

membawanya ke dunia tersebut, akhirnya Dewi bisa pulang ke kampung halamannya yakni di Sumba, NTT, Indonesia. Menurut Dewi, lebih baik pulang ke kampung halaman daripada kerja dari TKW dengan iming-iming Riyal tetapi tidak sesuai yang diharapkannya. Ini seperti yang dikatakan oleh Faruk.

Namun, makna ketimpangan itu hanya terbangun ketika misalnya wanita dan studi wanita menggunakan tolak ukur dunia lelaki, materialisme. Ketika wanita bersikeras menolak materi sebagai tolak ukur kehidupan dan segala bentuk kebahagiaan, ketergantungannya pada lelaki pun lenyap. Lelaki tidak dapat menggunakan hartanya untuk menguasai wanita. Sumber kekuasaan wanita bukan pada harta, tetapi pada rasa, cinta, moralitas. Ketika wanita menolak materi sebagai tolak ukur kebahagiaan, ia tak perlu bergentayangan di luar rumah sehingga dapat pula terhindar dari segala bentuk ancaman pelecehan dan kekerasan laki-laki. Wanita yang tetap tinggal di rumah tidak akan ternista, tidak akan gagap, dan merasa terancam (Faruk, 2001: 152-154).

KESIMPULAN

Berkaca dari hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa novel *50 Riyal* ini menonjolkan gambaran sosial masyarakat Arab yang masih cenderung kuat terhadap superioritas status sosial dan pendidikan. Dari gambaran novel tersebut, penggambaran tokoh Bagas yang seorang mahasiswa memiliki kedudukan tinggi dan disegani di lingkungan tempat tinggalnya. Berbeda dengan para TKW yang tidak berpendidikan dan hanya dapat mengerjakan pekerjaan kasar seperti buruh atau pembantu. Bahkan banyak di antara mereka sampai terjerumus ke lembah hitam prostitusi di Arab. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwasannya problematika yang terjadi pada para TKW di Arab Saudi tidak terlepas dari tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya. Ideologi inilah yang terbentuk di Arab Saudi mengenai TKW asal Indonesia mengenai pekerja seks tidak dapat terlepas dari kondisi dan situasi sulit yang mereka alami karena majikan yang tidak manusiawi dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan situasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fayyadl, Muhammad. 2006. *Derrida*. Yogyakarta: Lkis.

- Barker, C. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publication.
- Barry, Petter. 2010. *Beginning Theory: Pengantar Komprehensif Teori Sastra dan Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Butler, J. 1990. *Gender Trouble: Feminism and Subversion of Identity*. New York and London: Routledge.
- Chasanah, Ida Nurul. 2005. *Eksplorasi Seksualitas Dalam Novel Mahadewa Mahadewi: Analisis Dekonstruksi Gender*. Penelitian: Universitas Airlangga.
- Chasanah, Ida Nurul. 2002. "intertekstualitas Fiksi dan Sains dalam Novel Supernova: Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh karya Dee: Tinjauan Semiotik" SKRIPSI. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Creswell, J. W. 2003. *Research Design Second Edition*. London: Sage Publication.
- Eckert, P., & Ginet, M.C. 2003. *Language and Gender*. Cambridge University Press.
- Faruk. 2001. *Women Womeni Lupus*. Magelang: Indonesiatara.
- Fakih, Mansoer. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freud, Sigmund. 2003. *Teori Seks*. Yogyakarta: Jendela.
- Fromm, Erich. 2002. *Cinta Seksualitas Matriarkhi Gender*. Jakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Habermas, Jurgen. 1973. *Theory and Practice*. Beacon Press: Boston.
- Haralambos and Holborn. 2000. *Sosiologi: Themes and Perspective*. London: Harper Collins Publisher Limited.
- Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Lesmana, Tjipta. 1995. *Pornografi dalam Media Massa*. Jakarta: PuspaSwa.
- Mohammad, Goenawan. 1981. *Seks, Sastra, Kita*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Riyanto, A. 2011. *Aku dan Liyan Kata Filsafat dan Sayap*. Malang: Widya Sasana Publication.
- Sa'abah, Marzuki Umar. 2001. *Perilaku Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jogyakarta: UII Press.

Gender dan Identitas: Representasi Sosial Perempuan Dalam Kumpulan Cerpen Wanita Muda Di Sebuah Hotel Mewah

Siti Nur Aisya Putri
Mahasiswa Kajian Sastra dan Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga
putri.aisya23@yahoo.com

Abstrak

Fenomena diskriminasi terhadap perempuan, kemiskinan, krisis ekonomi dan kekuasaan uang, bentuk fenomena yang saat ini marak terjadi dalam era modernisasi. Hamsad Rangkuti dalam kumpulan cerpen yang berjudul “Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah” merupakan sebuah karya yang mengungkap gender dan mewakili adanya fenomena tersebut dimana banyak memberikan pemahaman tentang permainan kuasa uang. Permasalahan kemiskinan, yang ternyata bisa lebih nyaring dari berita politik yang biasa dilihat di televisi atau kita baca di surat kabar merupakan sebuah problema dan perempuan digunakan sebagai objek eksploitasi dalam praktiknya. “Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah” untuk mengungkap adanya fakta politik uang dan kekuasaan pada era modernisasi melalui identitas gender sebagai bentuk perwakilannya. Untuk mengetahuinya, penelitian ini menggunakan teori analisis wacana kritis yang dijalankan dan dioperasikan melalui wacana fairclough (1998). Teori gender Freud tentang Otoriter Seks juga digunakan dalam mengetahui peran kuasa wanita terhadap arena politik kekuasaan dan seksualitas. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka dibantu dengan teknik catat kemudian dilakukan analisa deskriptif untuk mencari keterkaitan antarunsur sehingga diperoleh simpulan makna cerpen Hamsad Rangkuti yang terkandung didalamnya berdasarkan karakteristik. Adapun karakteristik terdapat dominasi isu gender yang mengarah pada diskriminasi perempuan karena faktor kemiskinan, politik dan kekuasaan uang. Kekonsistensian unsur mengarahkan pada kesimpulan bahwa Hamsad Rangkuti berusaha menampilkan pola cerita melodrama akan adanya kekuasaan uang dalam mendominasi kehidupan dan menghadirkan budaya modernitas.

Kata Kunci: Gender, Cerpen, Representasi, Identitas kekuasaan, Politik.

¹ Stereotip perempuan tradisional tidak mengenal kekuasaan, kefemininan juga tidak memuat ketegaran, keperkasaan, atau ketegasan yang merupakan unsur inti kekuasaan. Stereotip klasik mengenai perempuan dan kefemininan tidak mencantumkan gagasan kekuasaan, dan meskipun kondisi telah berubah, stereotip tersebut sulit dihilangkan. Kekuasaan selalu identik dengan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekuatan politik kekuasaan, politik uang menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa dibendung lagi keberadaannya sehingga membuahkan budaya patriarki. Budaya ini, tidak mengakomodasikan kesetaraan, keseimbangan, sehingga perempuan menjadi tidak penting untuk diperhitungkan.

Tujuan dari penelitian gender dalam kumpulan cerpen “Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah” karya Hamsad Rangkuti adalah mendorong kesetaraan gender dan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap wanita karena politik uang yang marak terjadi. Wanita menjadi bentuk eksploitasi paling rentan dan digantikan dengan uang sebagai solusi untuk membungkamnya. Sehingga peran wanita tidak memiliki kuasa¹ atas politik uang tersebut.

Permasalahan Politik uang yang terjadi dalam kumpulan cerpen “Wanita Muda di Sebuah Hotel Mewah” di antaranya adalah karena adanya kemiskinan, uang yang selalu berkuasa untuk membeli seksualitas, jabatan, dan masalah hak- hak wanita yang terus terpinggirkan.

Secara umum, sudah terjadi permainan kuasa, hal tersebut tidak terlepas dari uang dan ketimpangan gender, meskipun melalui kumpulan cerpen, tulisan Hamsad ini merupakan perwakilan dalam menyuarakan realitas yang saat ini benar-benar terjadi di masyarakat. Persoalan uang yang digunakan untuk mewakili simbol politik, permasalahan uang dan permasalahan seksualitas dengan wanita sebagai objek eksploitasi yang tidak bisa terlepas dari adanya relasi kuasa tersebut. Dari adanya semua permasalahan tersebut maka perlu diadakan kajian tentang permainan politik uang, peran gender wanita dan kemiskinan yang tidak memiliki kuasa untuk berbicara maupun melawan.

maskulinitas, yakni ketegaran, kekuatan, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Penguasa harus selalu menampilkan ketegaran, kekuatan, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Hal ini termuat dalam buku Perempuan dan Politik, Siti Musdah Mulia, (Jakarta: Gramedia Pustaka), hlm 3-5.

Terdapat hal yang menarik dalam penelitian kumpulan cerpen Hamsad Rangkuti ini, ada beberapa tahapan untuk menemukan karakteristik gender yang digunakan untuk membongkar politik uang, kekuasaan, kemiskinan merupakan gambaran secara langsung problematik yang terjadi pada masyarakat saat ini. Hamsad Rangkuti begitu nyaring dalam menyuarakan adanya problematik tersebut. Terdapat beberapa tahapan unsur dalam menemukan keseluruhan makna yang diinginkan yaitu adanya wanita yang selalu lemah dalam bayang-bayang kekuasaan dan kemiskinan yang tidak muncul ke permukaan untuk menyuarakan penderitaan maupun ketimpangan sosial yang dihadapi.

Wanita selalu berada dalam dikotomi otoriter² dalam perangkat kekuasaan baik yang disebabkan karena pengaruh laki-laki maupun uang. Problematik dalam permasalahan ini adalah terletak pada bagaimana seorang wanita dijadikan sebagai alat untuk menghasilkan uang, bentuk eksploitasi dari adanya serentetan konflik kemiskinan, politik, budaya, ekonomi. “Wanita” menjadi sebuah objek penggambaran terhadap adanya kaum yang lemah dan minoritas yang kapanpun siap untuk dijadikan bentuk eksploitasi paling mudah³.

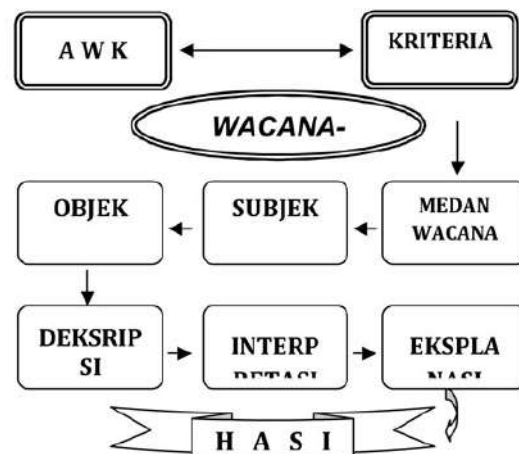
Problem-problem permasalahan kekuasaan uang yang menjadikan wanita masuk dalam objek yang terdalam ketika harus dihadapkan dalam kesulitan ekonomi, gaya hidup, dan tuntutan untuk selalu tampil dalam kemapanan. Ada bentukan budaya baru akan kekuasaan uang yang begitu mendominasi. Budaya modernitas⁴ untuk uang, ideologi akan adanya uang dan kekuasaan dalam melibatkan wanita dalam membentuk kebudayaan baru hal inilah yang akan dibahas melalui teori Analisis Wacana Kritis dan teori pendekatan gender Freud tentang Otoriter Seks.

Model Analisis Wacana Kritis (AWK)

Ada beberapa model AWK yang dilakukan para ahli analisis wacana. Dalam diteliti dan dianalisis: (1) AWK merupakan media wacana yang akan dianalisis, (2) kriteria ideologi, tentukan kriterianya mengapa media wacana itu ditentukan sebagai ideologi tertentu, (3) wacana-wacana kritis, tentukan media wacana yang akan dianalisis, baik berupa artikel media massa,

cerpen, atau novel, (4) medan wacana teks/wacana kritis, tentukan setiap wacana yang mengandung hal-hal yang kritis yang akan dianalisis, (5) subjek penceritaan, tentukan siapa yang menjadi subjek penceritaannya, (6) objek penceritaan, tentukan siapa yang menjadi objek penceritaan, (7) deskripsi bahasa, tentukan makna dari deskripsi bahasa, baik diksi, frase, klausa, kalimat, dan gaya bahasa, (8) interpretasi, makna.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Yoce Aliah Darma (2009), yaitu model yang diadopsi dan dimodifikasi dari model Sara Mills (1997) dan Norman Fairclough. Kemudian dari kedua model ini dibuat satu model yang diperkirakan akan lebih representatif dalam mengupas masalah ideologi gender dan kekuasaan politik uang. Model ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa wacana cerpen berideologi gender dan kekuasaan politik uang akan dapat dikupas dengan lebih mendalam. Kedua model di atas merupakan bahan inspirasi untuk membuat model AWK versi baru yang disebut AWK Ideologi Gender (AWKIG) versi Yoce Aliah Darma. Model ini diharapkan akan lebih bermakna dalam mengkaji wacana-wacana yang kritis. Cara menentukan teks atau wacana kritis yang akan dianalisis; (1) menentukan teks atau wacana kritis yang akan dianalisis; (2) menentukan subjek penceritaan; (3) menentukan objek penceritaan; (4) menentukan deskripsi bahasa; (5) menentukan interpretasi jenis ideologi gender; (6) menentukan eksplanasi ketidakadilan gender⁵.



² Karakter otoriter, yang relasinya dengan orang lain dibatasi harapan akan kekuasaan dan dominasinya, memperlihatkan karakteristik yang sama juga dalam tingkah laku seksualnya. Yang terpenting adalah kepuasan seksualnya, meskipun pasangan seksnya menderita kesakitan fisik dan emosional. Otoriter kekuasaan seks menjadi bentuk dominasi dalam menindas hak-hak perempuan untuk bersuara dan menolak. Hal ini termuat dalam buku Cinta, Seksualitas dan Matriarki. (Erich Fromm, Yogyakarta: Jalasutra hlm170-171)

³ maksud eksploitasi paling mudah yakni wanita cenderung menyerah pada dogma dan kondisi tekanan sosial yang ada seperti halnya tekanan ekonomi, tekanan kekuasaan, dan tekanan lainnya

yang akhirnya membuat wanita menyerah hingga kehilangan ideologi dan kehormatan.

⁴ Budaya Modernitas: Bahwa budaya ini menyatukan adanya sebuah sistem produksi global dengan sebuah sistem kontrol yang ketat. Yang harus dicatat adalah bahwa sistem produksi global ini memiliki empat dimensi utam: Industrialisasi, kapitalisme, perang dan pengawasan atas semua aspek kehidupan sosial. Hal ini dalam buku Dadi Wong wadon, Risa Permanadeli (Yogyakarta: Pustaka Ifada), hlm, 4-5.

⁵ Jurnal ideologi gender dalam karya sastra Indonesia (Penelitian fundamental). Yoce Alih Darma, DKK. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Uhamka.

METODE

Data Penelitian

Data yang digunakan yakni kata atau frasa atau kalimat atau paragraf yang terdapat dalam kumpulan cerpen “*Wanita Muda Disebuah Hotel Mewah*” karya Hamsad Rangkuti (2016). Data yang diambil hanya yang berkaitan dengan teori analisis wacana kritis yang dijalankan dan dioperasikan melalui wacana Fairclough (1998), Teori gender Freud tentang Otoriter Seks juga digunakan dalam mengetahui peran kuasa wanita terhadap arena politik kekuasaan dan seksualitas serta kajian lokalitas untuk mendukung penemuan karakteristik cerpen dalam unsur budaya modernitas.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi karena penelitian sastra khususnya mengkaji tentang kumpulan cerpen, teknik pengumpulan datanya berupa teknik dokumentasi. Prosedur pengumpulan data yakni:

1. Memeriksa unsur-unsur intrinsik melalui pembacaan kumpulan cerpen *Wanita Muda Disebuah Hotel Mewah* karya Hamsad Rangkuti yang dilakukan secara berulang-ulang.
2. Mencari masalah-masalah yang terdapat dalam kumpulan cerpen *Wanita Muda Disebuah Hotel Mewah* karya Hamsad Rangkuti.
3. Mengklasifikasi data berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan yakni masalah tentang politik uang, peran gender wanita dalam kekuasaan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode yang diperoleh melalui gabungan metode yang tidak bertentangan. Metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang dilanjutkan dengan analisis, berarti tidak hanya menguraikan melainkan memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya (Ratna, 2009: 53). Prosedur analisis data yakni:

1. Menganalisis Kumpulan Cerpen Hamsad Rangkuti yang berjudul “*Wanita Muda Disebuah Hotel Mewah*” yang terbaca dalam karya melalui Analisis Wacana Kritis dan teori otoriter seks.
2. Memaknai kembali cerpen Hamsad Rangkuti berdasarkan hasil kajian berupa karakteristik cerpennya, termasuk unsur permainan politik uang, kekuasaan, gender wanita, dan masalah kemiskinan. Yang ada pada kumpulan cerpen “*Wanita Muda Disebuah Hotel Mewah*” karya Hamsad Rangkuti.

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji identitas gender dan representasi sosial untuk mengungkap kekuasaan dan politik uang dalam kumpulan cerpen tersebut, cerpen ini merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan rakyat kecil yang ditindas dengan adanya kuasa uang dan jabatan dan adanya bentuk penindasan terhadap wanita miskin yang dieksploitasi secara seksualitas. Melalui cerpen tersebut Hamsad ingin menunjukkan fenomena kekuasaan uang pada budaya modernitas di dalamnya. Meskipun banyak kumpulan cerpen yang menceritakan tentang masalah perempuan, namun cerpen ini memiliki kelebihan yang harus dijadikan penelitian yaitu adanya unsur kekuasaan yang begitu mendominasi dalam wilayah politik uang dan seksualitas, menjadikan seorang wanita sebagai objek yang paling mudah untuk dieksploitasi. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas ideologi kekuasaan dan politik uang, ideologi gender feminis dalam seksualitas, ideologi gender dalam membongkar kekuasaan uang, ideologi pengakuan status, ideologi budaya modernitas melalui judul cerpen, *Cerita awal tahun, Wanita muda disebuah hotel mewah, Sukri membawa pisau belati*.

“*Cerita Awal Tahun Baru*”

Ikhtisar Cerpen

Tersiar kabar bahwa orang kaya dengan mobil *mercy*-nya menabrak dinding jembatan dan masuk mencebur ke dalam kali, di dalam arus sungai yang begitu deras semua barang-barangnya nampak timbul tenggelam dipermukaan. Petugas hanya sibuk menyelamatkan korban yang telah menjadi mayat. Demikianlah berita itu tersiar. Barang-barang berharga hanyut dibawa arus deras. Uang berhamburan dari kantong orang kaya itu dibawa arus bercampur dengan sampah-sampah. Berita itu hinggap di Telinga Tugimin, “*Kere yang tinggal menetap di dalam kotak-kotak kardus di pinggir sungai*”. (hal: 40).

Muncul di benak tugimin, ingin memiliki uang yang telah berhamburan dalam sungai tersebut. Terlintas dalam benaknya untuk mencebur ke sungai dan mendapatkan uang-uang itu.

“Tugimin melompat terjun menangkap lembaran uang sepuluh ribu rupiah.” (hal: 44)

Ideologi kekuasaan dan uang

Sebagai orang miskin tentu saja, Tukimin begitu menginginkan uang dan bayang-bayang untuk mendapatkan uang begitu menguasai dirinya. Daya imajinasi telah membawa pola pikirnya melebihi kesadaran yang sesungguhnya, melewati bayang-bayang realitas sosial menuju realitas ekonomi, pada tahap inilah kekuasaan uang menjadi praktik paling nyata dalam mendominasi kehidupan.

Nilai kuasa pada uang sepuluh ribu rupiah:

“Matanya seperti menyapu seluruh permukaan air dari tepi ke tepi. Dia melihat kotoran manusia hanyut. Dia melihat celana dalam wanita hanyut. Balon-balon tidak berudara, popok bayi. Bekas pembalut wanita. Sandal jepit. Sepatu tentara. Peci lusuh. Potongan karcis. Puntung-puntung rokok. Kaleng-kaleng, kantong semen, Goni, Kardus-kardus bekas kemasan alat elektronik, sampah pohon, dahan patah, papan peti sabun, bangkai tikus, bangkai anjing, bangkai ayam, bangkai kucing, pelepah pisang, dan lembaran uang sepuluh ribu rupiah.” (Hal 44)

“Tugimin melompat terjun menangkap lembaran uang sepuluh ribu rupiah. Ia dapat menggenggam lembaran uang sepuluh ribu rupiah. Ia memegangnya erat-erat. Ia takut uang itu lepas dari tangannya. Tetapi ia tidak takut nyawanya lepas dari tubuhnya.” (hal 44)

“Orang bercerita, para petugas terpaksa memotong jari-jari mayat itu dengan gergaji besi, supaya para petugas polisi kriminal bisa dengan mudah mengambil uang sepuluh ribu rupiah itu untuk dijadikan barang bukti. Sebab kalau jari-jari itu tidak digergaji, kata kabar itu lagi, uang sepuluh ribu itu akan menjadi robek.” (hal 46)

Teks di atas merupakan representasi bahwa ideologi uang begitu berkuasa dalam mendominasi cara pandang seseorang. Meskipun harus berbalut dengan kotoran, dengan bangkai, Tugimin tidak mengurungkan niatnya untuk melompat ke dalam aliran sungai yang sangat deras. Kenekatan inilah yang membuat tokoh Tugimin akhirnya rela untuk kehilangan nyawanya, hanya demi mendapatkan uang sepuluh ribu rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa uang sepuluh ribu rupiah telah mensubordinasi cara pandang Tugimin dalam realitas kehidupan. Uang sepuluh ribu rupiah tidak hanya berarti untuk Tugimin, namun uang sepuluh ribu juga berarti untuk pihak kepolisian sebagai bentuk barang bukti. Arti kekuasaan sepuluh ribu rupiah untuk kehidupan seseorang dan sepuluh ribu rupiah untuk sebuah bukti dalam ranah hukum.

“Cerpen Wanita Muda disebuah Hotel Mewah”

Ikhtisar Cerpen

Seorang wanita muda datang ke sebuah hotel mewah di pusat kota. Dia duduk di lobinya, sampai petugas hotel datang dan bertanya: Apakah Nona memerlukan kamar, Atau Nona ingin menemui seseorang? Wanita itu memandang ke petugas hotel itu dan berkata dengan pasti: Tidak, aku tidak memesan kamar. Dia menarik ujung rok dan memperlihatkan betisnya. Aku hendak menjual diri, Aku ingin ada orang membeli diriku, hari ini, pada saat kami memerlukan uang, aku ingin menjual diri.

“Cobalah, Tawarkan diriku. Aku muda, cantik, masih suci, dan bisa merangsang, Berapa harga yang kau pinta? Tergantung mereka berani berapa?”

Wanita itu menarik lebih tinggi ujung bajunya. Petugas hotel itu pergi mengetuk kamar tamu-tamunya.

“Sungguh? “kata mereka.

“Sungguh?” kata petugas hotel itu.

“Lima puluh ribu! Bawa masuk kekamarku

“Dan sedikit tip untukku, Tuan?”

“Bawa masuk! Aku tidak pernah lupa memberi tip, petugas hotel itu datang kepada wanita muda itu.

“Ada seorang tamu yang mau kepadamu. Dia berani dua puluh lima ribu.

“Cuma segitu? Alangkah murahannya! Tidak adakah yang berani membayarku lebih tinggi? (hal: 136)

Tindakan petugas hotel tersebut, telah melakukan politik uang dimana seharusnya si wanita muda mendapatkan uang lima puluh ribu rupiah, namun dimanipulasi menjadi dua puluh lima ribu rupiah.

Ideologi kekuasaan dan Politik Uang

Sebagai seorang petugas hotel, tentu harus melakukan pelayananan yang terbaik bagi para pengunjung hotel dan tamu-tamu yang datang. Hal ini sudah diperankan dengan baik oleh petugas hotel, ketika harus bertanya kepada seorang wanita muda. Namun wanita muda tersebut justru menjawab bahwa dirinya ingin menjual diri. Hal inilah yang membuat si petugas harus menawarkan wanita itu kepada satu persatu pengunjung hotel, hingga menemukan harga tertinggi dan tidak lupa dari setiap dirinya menawarkan harga selalu meminta tip, dan muncullah harga tertinggi dari harga-harga lain yang telah ditawarkan, anehnya dari setiap tawaran petugas itu selalu mengatakan kepada si wanita muda dengan harga separuh dari harga aslinya. Petugas hotel itu pun pergi mengetuk pintu kamar-kamar tamu.

“Baru ada yang menawar lima puluh ribu. Wanita itu tidak mau.

“Aku mau pada penawaran yang tertinggi, seratus ribu.”

“petugas hotel menyampaikan dua ratus ribu kepada pengunjung hotel.

Dan tidak lupa menanyakan tip kepada pengunjung hotel dan wanita muda itu berapa yang akan di dapat (hal: 137-139).

Tindakan petugas hotel tersebut, telah melakukan politik uang dimana seharusnya si wanita muda mendapatkan uang lima puluh ribu rupiah, namun dimanipulasi menjadi dua puluh lima ribu rupiah. Begitu seterusnya hingga pada penawaran harga tertinggi, Petugas hotel juga selalu mengatakan berapa tip untukku kepada si wanita muda dan kepada si tamu hotel. Pemanfaatan profesi dan sikap yang tidak transparansi inilah yang disebutkan sebagai tindakan melakukan politik uang. Politik uang sendiri tidak harus terjadi dalam kampanye, politik pemerintah, namun dalam lingkup individu dengan individu lainnya yang tidak mengalami transparansi juga tergolong “politik uang”. Dalam hal berpolitik memang tidak pernah memandang golongan, ras, individu, keluarga maupun teman. Semua dalam politik terlihat netral, sama dan wajar, Dan praktiknya tidak memandang apakah ini tergolong baik, tergolong manusiawi, tergolong merugikan orang lain atau tidak. Jika kita sudah siap untuk berpolitik, maka kita harus siap untuk melepaskan atribut-atribut tersebut, yang penting politik yang akan dilakukan membawa kemenangan bagi si pelakunya baik untuk tujuan uang maupun jabatan.

Jika sering kita lihat politik uang dalam dunia kampanye, dan politik uang dalam birokrasi pemerintahan, maka saat dalam teks tersebut diperlihatkan adanya politik uang dalam ranah seksualitas. Politik uang telah menjadi fenomena baru dalam masyarakat, yang seolah nampak biasa dilakukan. Wabah politik uang ini sendiri ternyata tidak hanya terjadi pada pejabat-pejabat negara namun juga masyarakat dari lapisan terkecil. Uang telah membuat rasa nyaman kepada seseorang, hingga melanggengkan adanya kekuasaan ingin menimbun sebanyak-banyaknya uang.

Ideologi Feminis dalam seksualitas

Ideologi seksualitas adalah ideologi yang muncul ketika hasrat akan seks muncul, ideologi tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh adanya faktor biologis namun lebih kepada faktor kebutuhan lainnya, misalnya kebutuhan fisik maupun kebutuhan ekonomi.

Wanita muda yang rela menjual dirinya karena dia membutuhkan uang.

“ Aku hendak menjual diriku, hari ini, pada saat kami memerlukan uang. Aku ingin menjual diri!” (hal: 133)
“ Apa yang kau jaul?” , “Kau Jual dirimu, Anakku?” (hal : 143)

Tokoh wanita, dalam teks di atas menggunakan seksualitas sebagai suatu tindakan dalam menutupi adanya lubang kebutuhan ekonomi, dimana dirinya membutuhkan uang, Kepasrahan akan suatu kelemahan seorang wanita ditunjukkan melalui teks tersebut. Ketika wanita berada dalam satu kondisi terlemah dirinya tidak bisa melakukan hal-hal lainnya kecuali dengan satu jalan menjual diri. Tokoh wanita tersebut cenderung memanfaatkan seksualitas untuk kepentingan lain, bukan kepada kepentingan hasrat.

Wanita muda tersebut menjadi bentuk representasi dari adanya realitas sosial yang terjadi saat ini, saat nilai kebutuhan uang lebih tinggi daripada nilai harga diri dan kehilangan keperawanan sekalipun. Realitas inilah yang menjadikan wanita harus merasakan pahit dan merugi, keperawanan dan seksualitas menjadi dipertaruhkan dengan adanya uang. arus modernisasi terhadap realitas lemahnya perempuan dan hak-haknya yang sudah tidak dipedulikan.

Cerpen tersebut melalui penokohan si wanita, mengajak kita untuk melihat realitas yang terjadi, mempertanyakan adanya hak-hak yang seharusnya dilindungi, hak akan hasrat dan hak akan kebutuhan ekonomi.

Praktik seksualitas, ideologi Gender dalam membongkar kekuasaan uang

Cerpen wanita muda disebuah hotel mewah merupakan cerpen yang problematis dimana terdapat praktik seksualitas, ideologi gender dan kekuasaan uang didalamnya. Melihat fenomena seorang wanita muda rela menjual keperawanannya hanya karena tidak mempunyai uang.

“Aku mau harga yang tertinggi”

“Berapa itu?” Kata tamu hotel itu, “Berapa Tuan Katan?” kata Wanita itu.

“Bawalah masuk, Tuan. Katakanlah di dalam!” Kata petugas hotel itu.

“Mari masuk,” kata tamu hotel itu sambil merangkul wanita itu,

“Katakanlah!” kata wanita itu lagi.

“Akan kukatakan di dalam.”

“Wanita muda itu masuk ke dalam kamar hotel mewah itu. Petugas hotel itu menutupkan pintu kamar. Dia pergi ke lubang rahasia. Dia intip wanita muda itu dan tamu hotel itu. Dia lihat kedua orang itu tawar-menawar. Tetapi dia lihat wanita muda itu menanggalkan sepatunya. Dia buka rok bawahnya. Dia lepas penutup buah dadanya. Dan semua kesucian itu telah dilihat oleh petugas hotel itu.(Hal 142)

Melalui teks di atas dapat dilihat kekuasaan bertindak untuk menawarkan nilai seksualitas dalam praktiknya. Kekuasaan dan hasrat berkaitan dengan cara yang lebih

rumit dan lebih bersifat kodrati daripada permainan antara di satu pihak, suatu energi liar, alami dan hidup, yang naik terus-menerus dari bawah dan, di pihak lain, suatu perintah dari atas yang berusaha menghalanginya. Tidak perlu mereka-reka bahwa hasrat ditindas, mengingat bahwa hukum pembentuk hasrat dan kekosonganlah yang menegakkannya. Hubungan kekuasaan memang hadir dimana hasrat hadir, jadi konteks sesksualitas yang hadir dalam memenuhi kebutuhan ekonomi bukan penindasan terhadap kaum wanita, namun lebih keluar dari kebutuhan utamanya. Dalam hal ini hasrat yang terjadi adalah adanya nilai kekuasaan dalam memiliki uang.

Budaya Modernitas

Dalam cerpen wanita muda di sebuah hotel mewah diungkap bahwa terjadi proses modernitas dalam kehidupan si tokoh wanita. Ketika dirinya terdesak untuk mendapat uang dan memenuhi kebutuhan ekonomi, si wanita muda cukup datang ke hotel dan meminta petugas hotel untuk mencarikan siapa yang mau membeli keperawanannya. Mudah-mudahan bekerja sebagai pekerja seks komersial saat ini, pergi ke hotel dan akan mendapatkan uang yang diinginkan.

“Aku ingin menjual diri! Apakah kau bisa mencarikan pembeli?”

“Kami menawarkan kepada tamu-tamu kami, wanita-wanita yang telah terpakai. Wanita-wanita khusus untuk itu. Kami tidak pernah menawarkan gadis suci seperti Anda.

“Cobalah. Tawarkan diriku. Aku muda. Cantik. Masih Suci. Dan bisa merangsang.” (hal 133-135)

Budaya modernitas saat ini tidak hanya bergerak menuju kemajuan yang lebih positif, namun juga ke arah sistem yang negatif, karena sistem kapitalis yang begitu menjajah masyarakat kita, serta konsep kesetaraan akan kemiskinan yang meliputi kesehatan, pendidikan, hak untuk makan, hak untuk hidup yang selalu dijajah dengan kekuasaan uang. Hotel telah berubah fungsi dalam budaya modernitas saat ini, tidak ubahnya tempat prostitusi yang menyediakan wanita pekerja seks komersial untuk para tamunya. Kekuasaan uang telah melahirkan adanya budaya modernitas.

“Sukri Membawa Pisau Belati”

Ikhtisar Cerpen

Sukri adalah kekasih sumarni, namun sumarni tidak mengakui bahwa sukri adalah kekasihnya terjadi konflik dalam kisah percintaan keduanya. Pada akhirnya sukri mengakhiri nyawa sumarni karena kecemburuannya dengan pria lain yang datang ke rumah sumarni membawa skuter dan ingin melamar sumarni. Niat pria lain tersebut diterima dengan baik oleh sumarni dan keluarganya, sehingga membuat

sukri merasa dihianati. Keputusan sumarni menerima pria lain karena harta dan kekayaan yang dimilikinya, sementara sukri adalah pemuda miskin yang hanya mampu untuk mengobrol janji.

“Perempuan busuk! Kau cepat menjadi lain. Kau cepat melupakan dekapanmu pada diriku. Kau pandai memperlakukan lelaki. Aku tidak mengira, kau sejahat itu. Memandang manusia itu dari benda-benda. Beberapa hari yang lalu kau masih Sumarni, tetapi beberapa hari kemudian, begitu disentuh benda-benda, kau telah mejadi lain. Aku tidak sudi kekasihku jatuh ke pelukan orang lain. Aku akan menyudahi!” (Hal: 175).

Dalam teks tersebut terdapat adanya problematik percintaan antara sumarni dan kekasihnya, sumarni cenderung memilih harta dan benda-beda mewah dibandingkan dengan kesetiaan cinta terhadap sukri. Representasi tokoh sukri menganggap sumarni wanita busuk karena lebih memilih harta yang mampu merubah kepribadian pada dirinya.

Praktik seksualitas, ideologi Gender dalam membongkar kekuasaan uang

Praktik seksualitas dalam perannya menjadi kegiatan paling praktis dalam memenuhi tingkat kebutuhan, cara singkat inilah yang dipilih kebanyakan wanita hingga rela menjual harga diri dan kesetiaan, dalam praktik tersebut unsur keluarga juga menjadi peran pembentuk didalamnya.

“Ayah sumarni keluar dari ruang dalam”
“Sukri ! Jaga mulutmu, kau ini apa-apaan. Pemuda tanpa modal. Jangan kau mainkan anakku. Apa yang telah kau beri ke depannya sebagai rasa kasih dan cintamu? Datang hampir tiap malam dengan janji-jani. Jangan kau memberi harapan-harapan yang tidak pasti kepada kami. Pergi kau! Biarkan anakku mencari jodoh yang lebih sempurna daripada kau.

“Orang tua terkutuk! Mata duitan. Apa bedanya kau dengan orang lain kalau kau berfikir seperti itu? Anakmu ingin kau jual belikan?”

“Dia punya skuter. Dia punya modal untuk anakku, dan kau? Hanya janji-janji yang tidak terbukti.”

“Kalau begitu, kau adalah orang tua yang memandang benda-benda.”

“Semua orang tua akan bersikap begitu untuk kebahagiaan anak gadisnya.” (hal 175-178)

Unsur kekayaan atau unsur materi selalu muncul dengan adanya naluri sebuah keinginan dan hasrat, unsur ini tidak peduli jika harus menyimpang dari adanya norma dan kesetiaan, relasi pengaruh kekayaan begitu kuat dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang, hal tersebut terlihat jelas dalam teks diatas. Dimana seorang ayah sumarni tidak malu mengatakan bahwa keluarganya lebih memilih kekayaan yang ada

pada diri si pemuda dari pada sukri yang miskin. Bentuk problematik inilah yang kembali dimunculkan yang hampir memiliki kesamaan dengan problem Siti Nurbaya yang akhirnya terjadi konflik pembunuhan karena adanya cinta yang ditengarai oleh materi, begitu juga pada konflik tersebut. Kekayaan dan materi telah menghilangkan harga diri seseorang.

Ideologi Kekuasaan Status

Dalam suatu hubungan dimasyarakat kuno maupun masyarakat modern. Konsep keberadaan laki-laki selalu ingin dijunjung tinggi, terutama pengakuan akan hal status. Sebagai seorang laki-laki pengakuan dan keberadaan dirinya merupakan satu hal yang penting diwujudkan.

“Aku kekasih Sumarni! Kami telah lama menjalin cinta.”

“Benarkah begitu sumarni? Baru saja kudengar, kau katakan, kau tidak mempunyai kekasih.”

“Aku tidak pernah mempunyai kekasih. Aku tidak menganggapmu kekasih, Sukri. Kita hanya berteman biasa. Aku belum terikat kepada siapa pun. Aku bebas berbuat apa yang kurasa baik untukku. Dia suka datang kemari dan aku menemaninya. Dia kenal pada orang tuaku dan aku kenal pada orang tuanya. Kami hanya sebagai sahabat baik. Aku tidak menganggap sukri kekasihku. Dia keliru memandang diriku. Dia menganggap aku kekasihnya, dia keliru!”

“ Aku tidak sudi kekasihku jatuh kepelukan orang lain. Aku akan menyudahimu!”

Sikap sukri begitu ingin mendapatkan pengakuan akan hal status hubungan, nampak dirinya memiliki kecemburuan ketika sumarni harus menjalin hubungan dengan pria lain, sikap keakuan dan ingin memiliki sumarni secara utuh sebagai kekasih mencerminkan sikap sukri yang ingin memiliki kekuasaan penuh dalam hal status. Pandangan gender, sumarni merupakan seorang wanita yang berani ketika dirinya harus melawan sukri dan menentang sikap kuasanya tersebut.

Budaya Modernitas

Dalam cerpen Sukri membawa pisau belati diungkap bahwa terjadi proses modernitas dalam kehidupan si tokoh wanita (Sumarni). Keinginan untuk tampil menjadi orang kaya, dan memiliki barang-barang seperti perhiasaan, kendaraan, banyak uang merupakan gejala budaya modernitas.

“Begitu kau disentuh benda-benda, kau telah menjadi lain.”

“Dia Punya Skuter. Dia punya modal untuk anakku”.

“Mas membelikan aku cicin kawin. Apakah aku sudah boleh memakainya mulai sekarang.” (hal 175-179)

Budaya modernitas dalam cerpen tersebut mengarah pada budaya modernitas pada keinginan atau hasrat dalam memiliki sesuatu barang-barang mewah dan berharga. Dengan budaya inilah banyak wanita saat ini berlomba memilikinya dan tampil sebagai yang terdepan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada kumpulan cerpen, “Wanita Muda Disebuah Hotel Mewah”. Yang terdapat dalam ketiga judul cerpen yaitu *Cerita awal tahun, Wanita muda disebuah hotel mewah, Sukri membawa pisau belati*. Model AWK yang diterapkan untuk menganalisis cerpen berideologi gender dan kekuasaan uang ini adalah versi AWKIG dan Teori gender Freud tentang Otoriter Seks, hasilnya efektif untuk mengungkap ideologi kekuasaan dan politik uang, ideologi gender feminis dalam seksualitas, ideologi gender dalam membongkar kekuasaan uang, ideologi pengakuan status dan ideologi budaya modernitas, dari adanya bentuk-bentuk tersebut juga ditemukan adanya diskriminasi, subordinasi, ketidaktransparasian dalam hubungan politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih saya sampaikan kepada Allah SWT karena telah memberikan saya kesempatan untuk belajar dan mencari ilmu, Yang kedua kepada pihak Universitas Padjajaran Bandung karena telah bersedia menerima abstrak saya, dan yang ketiga kepada kedua orang tua saya karena telah memberikan saya doa, semangat sehingga saya bisa mengikuti kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Dkk. 2002. *Analisis Wacana: Dari Linguistik sampai Dekonstruksi*. Yogyakarta: Kanak.
- Handayani, Cristina S dan Ardhan Novianto. 2004. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Hayat, Edi dan Miftahus surur. 2005. *Perempuan Multikultural: Negosiasi dan Representasi*. Depok: Desantara.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, Riant .2008. *Gender dan Strategi: Pengurus utamanya di indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Permadeli, Risa. 2015. *Dadi Wong Wadon: Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern*. Yogyakarta: Pustaka Ifada (Anggota Ikapi)
- Rangkuti Hamsad. 2016. *Wanita Muda Disebuah Hotel Mewah*. Jakarta: Senja.

Kesadaran Politik Perempuan Difabel: Studi di Yogyakarta

Titi Fitrianita

Ucca Arawindha

Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya

titifitrianita@gmail.com

Abstrak

Stigma ganda dan rendahnya aksesibilitas terhadap banyak hal yang dihadapi perempuan difabel mendorong beberapa difabel dan pegiat isu sosial membentuk SAPDA, yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan dan pemenuhan hak difabel perempuan sebagai warga negara. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis peran SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak) dalam menghadirkan kesadaran berpolitik difabel perempuan di Yogyakarta. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, FGD, dan penggalan data sekunder, penelitian ini memperlihatkan bahwa ruang demokrasi yang luas telah memberikan kebebasan bagi SAPDA hadir dan memperjuangkan inklusivitas di berbagai level baik pada tataran masyarakat maupun pada level kebijakan di pemerintahan. Berbagai strategi advokasi yang dilakukan oleh SAPDA menumbuhkan kesadaran politik perempuan difabel. Tumbuhnya kesadaran berpolitik ini sebagai hasil dari keterlibatan dan pelibatan difabel perempuan itu sendiri dalam pertemuan-pertemuan SAPDA yang membahas strategi advokasi. Kritisisme yang dilontarkan perempuan difabel kepada pemerintah atas kebijakan yang tidak berpihak kepada difabel dan upaya menangkal stigma dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari menjadi aksi nyata atas kesadaran berpolitik yang dilakukan oleh perempuan difabel.

Kata kunci: perempuan, difabel, kesadaran, politik, SAPDA

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari difabel adalah kelompok yang termarginalkan. Mereka hidup di tengah-tengah stigma masyarakat: stigma kurang produktif, objek belas kasihan, dan stigma buruk lainnya. Tak jarang di antara mereka yang sering disembunyikan oleh keluarga. Kondisi akan menjadi lebih buruk manakala fasilitas publik di Indonesia banyak yang belum ramah terhadap mereka. Fasilitas seperti trotoar, transportasi, pendidikan, pasar dan lainnya. Kondisi ini menjadikan mereka semakin terpinggirkan.

Kajian akademis selama ini belum begitu banyak menyorot isu eksklusif mengenai difabel, padahal isu

difabel ini sama halnya dengan isu kelompok marginal lainnya, seperti isu kelompok keagamaan, isu perempuan, Orang Dengan HIV/AIDS, dan lainnya. Penelitian ini berusaha mengangkat isu marginalitas terkait difabel, khususnya difabel perempuan, yang dalam hal ini mengalami stigma ganda. Difabel dengan stigma lemah, kurang produktif, dan obyek belas kasihan, ditambah dengan masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat, menempatkan difabel perempuan menjadi kajian yang penting untuk dilakukan dan dikembangkan dalam kerangka akademis.

Penelitian mengenai difabel perempuan telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Rita Barbuto dan Emilia Napolitano mengkaji bagaimana kondisi perempuan difabel di Eropa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Italia banyak difabel perempuan yang mengalami stigma dan kekerasan, pun demikian yang terjadi di negara lain. Oleh sebab itulah, sejak tahun 2001, DPI (*Disabled People International*) Italia, mempunyai peran vital dalam mempengaruhi implementasi hak-hak difabel, khususnya perempuan. Melalui CRPD (*Convention on The Rights of Person with Disabilities*) yang dilakukan oleh Italia dengan konsep *Peer Conselling*, banyak membuahkan hasil. Banyak hak difabel perempuan yang terpenuhi dan berkurangnya kekerasan terhadap difabel perempuan di Italia khususnya, dan kemudian diberlakukan di negara-negara lainnya di Eropa (Napolitano dan Barbuto, 2014).

Lain halnya di Italia, penelitian mengenai difabel perempuan juga dilakukan di Indonesia oleh Ulfa, salah satu mahasiswa UGM Yogyakarta, sebagai tugas akhir. Fokus penelitian tersebut adalah bagaimana strategi SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak) Yogyakarta dalam memperjuangkan hak difabel perempuan khususnya di DIY (Ulfa, 2015). Hasil dari penelitian tersebut adalah SAPDA mempunyai empat strategi. Pertama, *Low Profile Strategy*, yaitu usaha membongkar kesadaran masyarakat tentang stigma dan konstruksi difabel perempuan dengan berbagai kegiatan kampanye dan menghembuskan wacana tandingan atas wacana yang berkembang di masyarakat Yogyakarta. Kedua, Asistensi (pendampingan) bagi difabel perempuan. Program ini dimaksudkan membekali difabel perempuan dengan pengetahuan hak yang telah ditetapkan melalui regulasi internasional, nasional, maupun daerah. Ketiga, Advokasi, dengan cara

memperjuangkan hak difabel dalam wilayah kebijakan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas. Keempat, memperjuangkan terbukanya partisipasi difabel perempuan dalam program pemerintah maupun program yang dijalankan sendiri.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Udiyo Basuki dalam Jurnal Sosio Religia dengan judul “Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas”. Fokus tulisan tersebut adalah implementasi perlindungan hak disabilitas melalui UU No. 9 Tahun 2011. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa UU perlindungan HAM terhadap disabilitas belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal tersebut digambarkan dari masih banyaknya perilaku diskriminasi terhadap difabel dan kekerasan terhadap difabel, khususnya difabel perempuan di Indonesia. Payung hukum yang kuat, baik yang telah digagas internasional maupun nasional harus diimbangi dengan pengawasan dan pendampingan yang tepat dalam implementasi, karena dalam hal ini Negara mempunyai kewajiban melindungi hak asasi setiap warga negaranya (Basuki, 2012).

Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, perlindungan terhadap pemenuhan hak difabel, khususnya perempuan telah banyak dilakukan dari berbagai level, baik secara internasional, nasional, maupun daerah. Media yang digunakan pun berbagai macam, mulai dari perumusan melalui konvensi secara internasional, UU dalam skala nasional maupun daerah, dan melalui LSM.

Permasalahan yang belum ditempatkan pada penelitian sebelumnya adalah bahwa berbagai macam strategi dan upaya atas pemenuhan hak difabel perempuan tersebut berimplikasi pada terciptanya kesadaran berpolitik difabel perempuan. Saat ini, perempuan difabel bukanlah aktor yang diam, tetapi telah memiliki cara berpikir dan pengetahuan untuk bergerak memenuhi hak sebagai warga negara. Salah satunya dalam fokus tulisan ini, terlihat begitu jelas peran SAPDA Yogyakarta dalam memperjuangkan hak difabel perempuan dan akhirnya menumbuhkan kesadaran berpolitik difabel perempuan di Yogyakarta. Kesadaran politik yang dimaksud di sini adalah dimana difabel perempuan mempunyai kepedulian dalam memperjuangkan haknya sebagai warga negara.

Peran SAPDA menjadi penting di sini dikarenakan SAPDA merupakan lembaga formal berbadan hukum dan bertujuan menciptakan inklusivitas dalam aspek kehidupan sosial yang menjadi hak dasar perempuan, difabel, dan anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan atas dasar persamaan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan tujuan dari SAPDA tersebut, maka kesadaran berpolitik difabel perempuan tercipta dan

akan bertumbuh melalui strategi, advokasi, dan pelibatan difabel perempuan dalam program kegiatan.

Dengan demikian, diharapkan tulisan ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai implikasi positif dari banyaknya gagasan memperjuangkan hak difabel perempuan, salah satunya yaitu terciptanya kesadaran politik melalui lembaga yang bergerak dari bawah, yaitu SAPDA.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemilihan metode tersebut, dikarenakan penelitian ini berusaha menggambarkan dan memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian (Moleong, 2007: 07). Teknik penelusuran data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive*, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti melakukan pengamatan dengan ikut serta kegiatan yang dilakukan oleh difabel perempuan yang tergabung dalam SAPDA, kemudian melakukan wawancara mendalam kepada informan penelitian, yaitu difabel perempuan menggunakan *guide interview*. FGD dilakukan dengan melibatkan 50 anggota SAPDA dan HWDI.

Teknik analisis data menggunakan reduksi data, *display*, dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu membandingkan hasil wawancara antar informan penelitian.

SAPDA : TELAAH HISTORIS DAN ADVOKASI

SAPDA yang merupakan singkatan dari Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak merupakan sebuah lembaga non profit yang didirikan pada Bulan Juli 2005 di Yogyakarta. Lembaga ini menjadi lembaga formal yang berbadan hukum lewat pengesahan akta notari Anhar Rusli, SH nomor 51 tahun 2005 pada 2 Desember 2005.

Lembaga ini didirikan dengan tujuan menciptakan inklusivitas dalam aspek kehidupan sosial yang menjadi hak dasar bagi perempuan difabel dan anak khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang juga menjadi sebagai dasar bagi terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk mencapai tujuannya, SAPDA mengkonkritkan kegiatannya lewat advokasi kebijakan di tingkat daerah, pendidikan pendamping, dan pemberdayaan perempuan difabel dan anak di sektor kesehatan dan pendidikan.

SAPDA memiliki beberapa misi. Pertama, melakukan kajian keilmuan dan penelitian ilmiah. Kedua, memperjuangkan terwujudnya kebijakan publik yang

menjamin pemenuhan hak-hak dasar perempuan difabel dan anak di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Ketiga, melakukan pemberdayaan, pendidikan dan advokasi tentang isu-isu perempuan, difabel dan anak di kalangan masyarakat luas. Keempat, menjalin kerjasama dengan stakeholder berkaitan dengan penanganan persoalan perempuan, difabel dan anak. Kelima, membangun sapsda sebagai *crisis center* bagi perempuan difabel dan anak.

Tindakan pertama yang dilakukan oleh SAPDA adalah melakukan pengorganisasian difabel dan melatih kemampuan advokasi sehingga mereka dapat melakukan negosiasi dengan pemerintah dan juga mengadvokasi difabel yang lainnya yang belum tergabung dengan SAPDA. SAPDA membantu cabang lokal SAPDA yang ada di Sleman, Kulonprogo, dan Klaten mengidentifikasi dan memetakan permasalahan difabel di tempat masing-masing. Secara bersama-sama mereka melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh difabel yaitu pertama pendapatan yang rendah karena tidak adanya pekerjaan atau karena dibayar dengan sangat murah. Kedua, rendahnya pendidikan difabel. Dan ketiga adalah tingkat kesehatan yang masih rendah. Dalam pemetaan permasalahan tersebut juga diketahui bahwa pemerintah lokal tidak memiliki prioritas alokasi keuangan untuk pelayanan bagi difabel.

Setelah melakukan pemetaan permasalahan, SAPDA memetakan target gerakannya yaitu negara, masyarakat, dan perempuan difabel. Secara taktis, upaya SAPDA dalam memperjuangkan inklusivitas bagi difabel perempuan melalui pertama, *low profile strategy* yaitu membangun kesadaran perempuan difabel dengan melakukan kajian keilmuan dan media kampanye advokasi. Kedua, *layering strategy* yaitu melakukan pendampingan bagi perempuan difabel baik melalui komunitas maupun permasalahan perseorangan. Ketiga, *advocacy strategy* yaitu dengan melakukan advokasi kebijakan daerah. Keempat, strategi keterlibatan kritis dengan menjalin kerjasama dengan lembaga lain terkait berbagi pengalaman dan pendanaan yang berhubungan dengan program yang dijalankan SAPDA. Empat strategi tersebut merupakan usaha yang dilakukan oleh SAPDA untuk meningkatkan peran perempuan difabel dalam upaya membangun penerimaan masyarakat dan membangun perlindungan hukum bagi mereka (Ulfa, 2015).

KESADARAN POLITIS DIFABEL PEREMPUAN

Bahasa “cacat” yang lekat dengan kepasifan dan ketidakberdayaan dimulai sejak zaman kolonial dimana medikalisasi tubuh dan disabilitas menguat. Kondisi ini menguat pada masa Suharto dimana orang cacat dikontrol di dalam lembaga sekolah yang bernama SLB

(Sekolah Luar Biasa) (Thohari, 2010).

Baru pada tahun 1990-an, muncul wacana baru mengenai difabel dimana penyandang difabel diberitakan sebagai orang yang mampu berprestasi sebagaimana orang pada umumnya. Bahasa “difabel” dan “disabilitas” sebagai bentuk penghalusan bahasa dan konstruksi bahasa baru untuk menghilangkan konstruksi “cacat” yang penuh dengan kepasifan dan ketidakberdayaan.

Permasalahan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan difabel lebih berat dibandingkan dengan laki-laki difabel. Anak perempuan difabel tidak tumbuh dalam lingkungan yang membangun harga diri (*dignity*). Oleh sebab itulah anak perempuan difabel tumbuh besar dengan stigma di dalam dirinya bahwa dia tidak berharga dan tidak mampu mengambil bagian di masyarakat. Dan yang paling berat adalah perempuan difabel dianggap sebagai perempuan yang tidak mampu menjadi istri dan melahirkan (Komardjaja, 2010). Ibu C mengungkapkan pengalamannya sebagai perempuan difabel di bawah ini.

“Antara dianggap dan nggak dianggap” (Ibu C)

“*Tak ceritani*, di rumah saya ada tamu, di rumah saya ada foto saya, tamu ini suka sama saya, setelah tau saya difabel nggak jadi” (Ibu W)

Permasalahan diskriminasi yang dialami oleh perempuan difabel bukan hanya karena entitas perempuan yang dimilikinya namun juga entitas difabel yang melekat padanya. Mereka terpinggirkan ke akses informasi, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Laki-laki difabel memiliki akses yang lebih luas terhadap keempat hal tersebut dibandingkan perempuan difabel. Hal inilah yang membuat perempuan difabel mendapatkan diskriminasi dan stigma ganda.

“Apa artinya diskriminasi terhadap saya, terhadap kita-kita para difabel. Kita mau melangkah mau sekolah aja ya, waktu itu saya mau lulus : SMP.. :SMP kan di yayasan, terus mau SMA mau masuk SMA.. pake jilbab aja ngga boleh, aku kan difabel..sudah dicemoohkan, itu sudah pasti. Setelah itu lulus SMA ya, mau kuliah.. dari faktor ekonomi, dari faktor sosial, dan sebagainya.. itu sangat menyakitkan buat saya pribadi” (Ibu C)

Usaha untuk mengadvokasi difabel agar dipandang sebagai subjek yang mandiri sebenarnya telah dilakukan pada masa Suharto. Namun, perluasan wacana inklusivitas yang diinginkan oleh pegiat disabilitas lebih leluasa untuk dilakukan setelah reformasi tiba. Muncullah beragam lembaga sosial non profit yang bergerak di isu disabilitas termasuk SAPDA

dan mengkhususkan pada permasalahan yang dihadapi oleh perempuan difabel mengingat stigma dan diskriminasi ganda yang dialaminya sehingga untuk mengurai permasalahan yang mereka hadapi juga memerlukan usaha yang khas.

“Karena selama ini kan perempuan dilemahkan, beda sama laki-laki kan, ya memang waktu itu belum ada lembaga yang benar-bener khusus perempuan disabilitas dan anak, tapi kalo ada sesuatu yang laki-laki juga kita libatkan kita ga ada khusus yang laki-laki enggak ya” (Ibu N)

SAPDA lahir membawa semangat perubahan demi kehidupan difabel perempuan lebih baik. Sebagai sebuah lembaga non profit yang diinisiasi oleh kalangan difabel, SAPDA semenjak awal telah meneguhkan identitas kolektif - yang menjadi syarat bagi gerakan sosial dalam hal ini disabilitas. Dari difabel untuk difabel. Hal ini memudahkan SAPDA untuk melakukan tindakan kolektif menggerakkan difabel perempuan untuk berjuang bersama demi kepentingan mereka.

Menjadi hal yang khas bagi kaum marginal termasuk di dalamnya difabel menganggap bahwa apa yang mereka alami adalah masalah personal. Seringkali mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas kondisi ketidakberdayaan mereka. Hanya ketika mereka berbagi masalah yang mereka hadapi, mereka sadar bahwa kesulitan yang mereka alami bukanlah masalah personal namun permasalahan sosial (Klein dalam Shakespeare, 2013)

Jika permasalahan utama perempuan penyandang disabilitas adalah eksklusi, anggapan miring, dan diskriminasi serta mayoritas di antara mereka mengalami lemahnya kondisi ekonomi (Shakespeare, 1993), SAPDA menjadi poin penting bagi munculnya kesadaran bagi difabel perempuan bahwa ada kondisi sosial yang menyebabkan mereka mengalami semua hal tersebut.

Klein (dalam Shakespeare, 1993) menyebutkan ada 3 proses yang mendorong munculnya kesadaran politis di kalangan difabel. Pertama, afiliasi lewat keanggotaan dan berbagi kepentingan. Kedua, penolakan atas status yang diberikan secara tradisional oleh masyarakat. Ketiga, permasalahan personal menjadi permintaan politis hanya ketika ketidakmampuan untuk bertahan dilihat sebagai konsekuensi dari ketimpangan sosial dibandingkan kegagalan personal, sehingga sistem itulah yang harus disalahkan.

Identitas kolektif yang muncul dari bergabungnya perempuan difabel di dalam SAPDA merupakan hal yang alami yang dirasakan oleh semua gerakan sosial yang tujuannya adalah selalu untuk menolak nilai yang dominan yang dianggap opresif di dalam masyarakat

(Fominaya, 2010).

Hal tersebut di ataslah yang terjadi pada perempuan difabel di Yogyakarta. Pertemuan mereka dengan SAPDA dimulai lewat ajakan teman dan saudara yang sebelumnya juga telah bergabung dengan SAPDA atau organisasi difabel yang lain, tv, internet, atau dari Dinas Sosial.

“Kalo di umum itu masi agak kurang ya, tanggapan masyarakat umum dengan disabilitas. Juga untuk membela teman-teman seperti ini kan kadang belum ter-cover oleh pemerintah, kita mengadvokasi seperti, kita kan sebagai pendamping ya di dalam organisasi, pengurus, jadi setiap ada kita ada yang membutuhkan kursi roda atau apa” (Ibu I)

“Sebenarnya kalo temen-temen itu mau bersosialisasi dan mau berbicara dan ngomong ma yang lain masyarakat tu juga cepet ke kita, cuman ya kitanya penerimaan dirinya teman-teman difabel sendiri itu masih kurang percaya diri” (Ibu K)

Pemaparan masalah yang dihadapi oleh perempuan difabel dengan gamblang diceritakan dan disampaikan sebagai bagian dari permasalahan bersama yang harus ditangani, bukan lagi sebagai semata-mata permasalahan personal lewat pilihan kata “kita”. Meskipun pengalaman diskriminasi berbeda antara satu orang difabel dengan difabel lainnya namun kesadaran bahwa ada masalah bersama yang harus dipecahkan karena adanya entitas bersama sebagai penyandang difabel telah muncul dan harus dipecahkan secara bersama pula.

Hambatan sosial dimana mereka tidak mendapatkan akses kepada pendidikan dan munculnya kesadaran bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut hak mereka kepada pemerintah menjadi titik nadir yang penting dalam memunculkan kesadaran politis mereka. Pengurus SAPDA dalam hal ini tidak menempatkan diri sebagai elit yang hanya menjadikan organisasi sebagai jalur politis untuk beberapa orang tertentu saja namun selalu mengkomunikasikan program-program yang mereka buat kepada anggotanya sehingga pelan namun pasti para anggota yang sebelumnya tidak terdidik dan terbiasa untuk melihat permasalahan personal mereka sebagai permasalahan sosial menjadi paham bahwa ada ketimpangan di dalam masyarakat yang menyebabkan kesulitan di dalam hidup mereka dan pemerintah wajib turut campur untuk menuntaskan masalah ketimpangan tersebut.

Kesadaran bahwa adanya masalah bersama karena entitas bersama yang dimiliki dilanjutkan dengan pemahaman advokasi yang harus dilakukan kepada difabel terutama perempuan. Para relawan yang juga

adalah difabel yang saat ini menjadi pendamping memahami bahwa tanpa adanya organisasi yang menaungi kelompok difabel perempuan akan sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pihak lain yang terkait.

“Perlu kan gini mbak, saya kan memerlukan alat bantu, kalau nggak ada oraganisasi nggak ada yang menyalurkan, saya alat bantu saya dapat di mana, saya cari ke mana saya tanya ke siapa, sedangkan saya beli ga mampu, misalnya begitu. Ada, kita dikasi tau, kan dari kabupaten ada bantuan kaki palsu, tangan palsu” (Ibu I)

“Demo apa? Demo dimana, tak ceritani *wes*. Kita demonya di DPRD meminta akses jalan untuk tuna netra kan banyak *to*. Sekarang contohnya di Malioboro sudah dibersihkan *to* mbak, itu hasil dari demo kita ke DPR yang tahun lalu. Itu kan dulu buat parkir *to* itu, kita demo 16 hari tanpa kekerasan akses itu, terakhir setelah satu sasi itu baru direalisasikan pembersihan jalan Malioboro itu” (Ibu D)

Identitas kolektif yang telah diformalkan lewat organisasi menghasilkan kekuatan untuk mengakses sumber daya yang dimiliki oleh organisasi formal yang dalam hal ini adalah pemerintah. Pengetahuan bahwa dengan berorganisasi formal dapat melakukan tuntutan kepada pemerintah dengan berdemo meminta akses yang lebih ramah kepada penyandang disabilitas di tempat publik juga menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

Hal yang paling penting dalam proses advokasi yang dilakukan oleh SAPDA adalah munculnya keberanian di dalam diri perempuan penyandang disabilitas akan potensi mereka yang sama dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Hal inilah yang memunculkan semangat untuk memperjuangkan keadilan dalam wacana mengenai kategori disabilitas di tengah masyarakat dan usaha menciptakan ruang-ruang di masyarakat yang ramah kepada difabel terutama perempuan kepada pemerintah yang merupakan pihak paling strategis dalam melakukan perubahan.

“Disabilitas kan banyak macamnya, kebutuhan mereka juga banyak, bukan hanya secara materi tapi kan pengetahuan juga” (Ibu K)

Wacana bahwa kategori disabilitas hanyalah konstruksi dari wacana yang muncul atas dominasi politik tertentu, tafsiran agama yang tidak adil, atau dominasi medis (Thohari, 2010) disebarluaskan terutama kepada anggota anggota SAPDA. Logika pengetahuan ini berusaha mengatasi dan mengalahkan wacana yang dibangun yang diarahkan kepada difabel yang cenderung menempatkan mereka sebagai orang atau kelompok dengan kategori tidak berdaya dan

objek saja, bukan sebagai subjek yang mampu berdiri mandiri asalkan ruang-ruang yang ada di dalam masyarakat memberikan kesempatan kepada mereka untuk mandiri.

Usaha yang dilakukan oleh anggota SAPDA adalah usaha untuk memunculkan kemandirian. Dengan membangun identitas diri anggota agar mampu bekerja dan berkarya di dalam masyarakat sama dengan orang “normal”. Konstruksi pengetahuan ini melembaga di dalam anggota SAPDA. Maka yang mereka perjuangkan adalah hilangnya sekat-sekat yang ada di dalam masyarakat yang membuat mereka tidak mampu dengan bebas berkarya dan bekerja. Yang akhirnya membuat mereka dilihat sebagai manusia, bukan manusia yang memiliki kekurangan.

“kita mampu..dan kita punya akhlakul karimah. Ya itu.. kita harus buktikan kepada masyarakat bahwa kita juga sama seperti mereka..bahwa kita juga sama mempunyai kesempatan. untuk hidup bersama, untuk berumah tangga, untuk menciptakan usaha, untuk bekerja, mencari tenaga.. apa aja” (Ibu P)

“Kan selama ini asumsi dan banyak orang bahwa disabilitas itu, dalam tanda kutip ya, maniak dengan bantuan, ininya bantuan terus untuk dia. Kenyataannya seperti itu, dia ga dapat bantuan itu marah, tapi ada juga dari beberapa temen hanya satu bantuan dapet bantuan satu gitu tapi dia nggak dapet bantuan lain ya gak apa-apa tapi ada juga yang di sini dapet di sana dapet jadi kesannya seperti itu. Tapi ada juga, ada teman yang, kan bantuan itu tidak hanya berupa uang, tapi bisa kaya pelatihan, seperti ini kan” (Ibu W)

“Kita kan sama-sama difabel ya, kita kan pengen tau ya, ya orang-orang masih mendiskriminasikan, Iya di disabilitas tidak dilihat sebelah mata gitu mas jadi liatnya biar gini, ga gini tok, kan disabilitas ga minta bantuan tok, kerja juga” (Ibu P)

Sikap di atas merupakan antitesis atas sikap yang dikembangkan oleh beberapa difabel umumnya dan difabel perempuan khususnya yang memanfaatkan kedifabelan mereka sebagai alat untuk “meminta” dengan paksa. Sikap “meminta paksa” ini di satu sisi dapat dipandang sebagai alat “orang kalah” untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan jangka pendek mereka seperti konsumsi. Namun, dalam jangka panjang sikap ini membuat penyandang disabilitas tetap dijadikan sebagai objek dan tidak menjadikan penyandang disabilitas sebagai manusia yang berdaya (yang memiliki harkat).

Kritik atas pelanggaran wacana tidak adil oleh difabel lewat sikap “meminta” menjadi hal yang didapatkan oleh perempuan difabel dari SAPDA yang

dikolaborasikan dengan pengalaman mereka sendiri sebagai difabel yang mandiri. Sikap ini lantas menjadi perpaduan yang sempurna ketika kesadaran atas ketidakadilan yang didapatkan oleh masyarakat umum dan pelanggaran stigma dari kalangan difabel dihilangkan sehingga benar-benar tercipta inklusivitas yang diharapkan.

Kesadaran politis yang ditunjukkan oleh difabel perempuan bukan hanya terkait dengan program dan kebijakan pemerintah namun juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Penerimaan atas kedifabelan yang mereka punyai dan semangat membangun diri bahwa menjadi difabel tidak berbeda dengan non difabel menjadi modal paling mendasar bagi perempuan difabel untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Diskriminasi dan stigma tidak menjadi hal yang dijadikan permasalahan yang serius.

“bodo amat (sambil tertawa), sing penting kita bisa makan setiap hari” (Ibu N)

“soalnya di atas umur 40 tahun seperti saya ini sudah kebal terhadap dunia”

Perlu memang untuk melakukan kajian yang mendalam apakah sikap yang demikian adalah sebuah sikap yang dikembangkan karena adanya resistensi atas ketidakadilan yang diterima oleh perempuan difabel selama bertahun-tahun ataukah muncul dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak untuk diterima lepas dari apakah menjadi difabel ataukah bukan difabel. Namun, kesadaran bahwa ada masalah yang perlu untuk dipecahkan karena munculnya kesadaran bahwa diskriminasi bahkan kekerasan itu tidak benar untuk dilakukan telah tumbuh di kalangan perempuan difabel.

“iya SAPDA dan lembaga pemerintah gitu kan... akhirnya mereka berani untuk.. untuk muncul berani melaporkan.. bahwa mereka mengalami kekerasan juga” (Ibu C)

Pilihan untuk menjadi difabel yang mandiri muncul dari pengalaman dan juga advokasi yang dilakukan oleh lembaga non profit yang bergerak di isu difabel dalam hal ini khususnya SAPDA. Mandiri menjadi strategi bagi perempuan difabel untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka juga bisa berkarya sebagai sebuah sikap untuk menepis stigma dan diskriminasi yang melingkupi mereka.

“kita membuktikan..ya..bahwa kita punya karya, kita punya dedikasi” (Ibu K)

Kesimpulan

Apa yang dilakukan oleh SAPDA dan anggotanya adalah sebuah upaya menangkis pandangan yang melemahkan mereka baik yang berasal dari masyarakat umum maupun dari kalangan difabel sendiri. Dengan melakukan advokasi terutama dalam merubah cara pandang masyarakat dan penyandang disabilitas sendiri agar tercipta kondisi yang memberdayakan penyandang disabilitas baik dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun mendorong penyandang disabilitas sendiri agar mau bergerak mandiri, SAPDA telah menciptakan anggota-anggotanya untuk bergerak mandiri sehingga muncul penghargaan kepada penyandang disabilitas seperti halnya orang yang tidak memiliki disabilitas.

Lepas dari mulai munculnya kesadaran politis difabel perempuan dengan tergabungnya mereka ke dalam SAPDA namun satu hal yang masih menjadi pekerjaan bersama mereka. Bahwa kondisi difabel khususnya difabel perempuan lebih baik saat ini karena giatnya wacana inklusivitas di Indonesia saat ini namun permasalahan diskriminasi dan stigma secara umum masih terjadi. Isu kelas juga menjadi isu yang perlu untuk dihadapi karena stigma dan diskriminasi kepada perempuan difabel menjadi lebih berat bagi mereka dari kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itulah kesadaran politis lewat advokasi yang dilakukan oleh SAPDA diharapkan lebih meluas jangkauannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barbuto, R, & Napolitano, E. 2014. *Women with Disabilities: From Discrimination and Violence Towards an Ethics of Reciprocity*. Modern Italy, 19 (2), 161-168.
- Basuki, Udiyo. 2012. Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas. *Sosio-Religia* Volume 10, No. 1, Februari 2012.
- Fominaya, Cristina Flesyer. 2010. *Collective Identity in Social Movement Central Concepts and Debate*. *Sociology Compas* 4/6. 393-404
- Komardjaja, Inge. 2010. *Perempuan Penyandang Cacat dan Lingkungan Binaan yang Penuh Hambatan*. . *Jurnal Perempuan : Mencari Ruang Untuk Difabel*. Vol. 65.
- Moleong, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shakespeare, Tom. 1993. *Disabled People's Self Organisation : A New Social Movement*. *Disability, Handicap, and People* Vol. 8. No 3. 249-265.
- Thohari, Slamet. 2010. *Menormalkan yang Dianggap Normal: Difabel Dalam Lintasan Sejarah*.

Jurnal Perempuan : Mencari Ruang Untuk
Difabel. Vol. 65.

Ulfa, Nadlirotul. 2015. Gerakan Perempuan
Penyandang Disabilitas: Mengenai Strategi
SAPDA dalam Memperjuangkan Eksistensi
Perempuan Penyandang Disabilitas di DIY.
Skripsi.

Perempuan Dayak Mali Dalam Bingkai Kearifan Lokal

Nikodemus Niko

¹Program Studi Sosiologi Pascasarjana FISIP, Universitas Padjadjaran Bandung
e-mail: nicoeman7@gmail.com

Abstrak

Kearifan lokal tak dapat dipisahkan dengan kehidupan perempuan Dayak Mali di Kalimantan Barat. Berbagai ritual yang sudah menjadi budaya yang turun temurun mereka langungkan dalam rangka keberlanjutan generasi dan keberlanjutan alam. Tulisan ini menceritakan kehidupan perempuan Dayak Mali yang tetap mempertahankan budaya, adat dan alam. Studi lapangan dilakukan di Desa Cowet, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan data lapangan berupa observasi partisipatif. Kemudian dilengkapi dengan data sekunder dari buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan Dayak Mali masih mempertahankan adat, budaya dan tradisi lokal dalam menjaga kelestarian lokalitas. Namun, dalam proses merawat tradisi ini perempuan Dayak Mali menghadapi tantangan yang lebih kompleks seperti; pemiskinan dan marjinalisasi yang erat kaitannya dengan budaya politik maskulin.

Kata kunci: Perempuan, Dayak Mali, Kearifan Lokal

PENDAHULUAN

Berakar dari zaman globalisasi ini, masyarakat pedesaan mulai bergeser kepada kehidupan yang semi-modern. Sistem sosial masyarakat mengalami perubahan ke arah yang sedikit lebih maju, seperti; sudah menggunakan sistem modern dalam bertani, yang mana awalnya masyarakat menggunakan sistem tradisional. *International Monetary Fund* (IMF) mendefinisikan globalisasi sebagai “*The increasing integration of economies around the world, particularly through trade and financial flows. The term sometimes also refers to the movement of people (labour) and knowledge (technology) across international borders*” (Granter, 2009).

Mengacu pada pengertian globalisasi menurut IMF tersebut dan berdasarkan pengamatan penulis, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat di Desa Cowet sama sekali belum tersentuh oleh arus modernisasi global. Kondisi masyarakat yang masih tradisional dan ekonomi masyarakat masih dibawah rata-rata (banyak terdapat masyarakat miskin). Pada perkembangannya masyarakat di Desa Cowet secara umum bertani padi dan menyadap pohon karet (*motong 'k*) sebagai mata pencaharian utama. Terdapat pula diantara mereka yang bekerja di luar daerah (merantau) untuk mencari penghidupan layak.

Etnis Dayak subsuku Dayak Mali hidup di sepanjang pedesaan di Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Subsuku Dayak Mali di beberapa desa memiliki kultur dan adat yang berbeda-beda, seperti gaya berbicara, bahasa dan upacara adat. Namun, kearifan lokal berladang di semua desa, memiliki kesamaan. Hampir di semua desa berladang dengan sistem berpindah, mereka menyebutnya *umek taun 't* yang artinya ladang. Ladang ini terbagi lagi menjadi dua sebutan; *nangot* (ladang di dataran rendah) dan *deret* (ladang di dataran tinggi).

Terdapat lebih dari 3.000 orang penduduk yang bermukim di Desa Cowet, 95% adalah suku Dayak Mali dan 5% adalah suku Melayu (Data Monografi Desa Cowet, 2014). Perempuan di Desa Cowet masih tertinggal dalam hal pendidikan, hanya 1 diantara 10 anak muda di Desa Cowet yang berhasil melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi (Niko, 2016). Kebanyakan diantara mereka bekerja ke kota setelah tamat di bangku Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah.

Rata-rata perempuan Dayak Mali hanya menamatkan pendidikan di bangku SD. Tidak ada Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di desa mereka, hanya ada di ibu kota kecamatan yang jaraknya sangat jauh. Selain keterbatasan biaya sekolah, jarak antara desa dengan kecamatan juga menjadi alasan mereka tidak mengenyam pendidikan.

Dalam tulisannya Niko (2015) mengungkapkan bahwa perempuan Dayak Mali di Dusun Manang, Desa Cowet rata-rata setelah tamat SD, lalu kemudian bekerja di kota dan menikah. Situasi ini sudah seperti budaya yang terjadi secara turun temurun, bahwasannya masih terdapat pemikiran; perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, perempuan hanya akan menjadi pengurus rumah tangga, dan perempuan tidak boleh melebihi laki-laki (dalam hal pengambilan keputusan). Peribahasa mereka menyebutkan “*nyah ani nana sekulah ango-ango, kunkuna nga' ka' dapo'k badah'a*” (*perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, bagaimanapun juga akan tetap di dapur*).

Perempuan Dayak Mali kemudian terkungkung dalam tradisi. Mereka ikut merawat dan menjaga tradisi yang dibangun berlandaskan maskulinitas, menguntungkan pihak lain (laki-laki). Sehingga dalam implementasi struktur kepemimpinan desa, laki-laki memegang jabatan sebagai kepala di semua bidang. Perempuan-perempuan hanya dilibatkan sebagai pembantu sub-bidang, itu pun hanya di sektor BPD (Badan Perwakilan Desa). Sedangkan, jabatan struktural seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, kepala-kepala dusun di 6 dusun jabatan kepala di pegang oleh kaum laki-laki.

Undang-Undang Desa telah mengakomodasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan masuknya perspektif gender dalam kewajiban Kepala Desa yang diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf (e) bahwa Kepala Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender (Saptandari, 2016). Namun, mandat UU hanya menjadi dokumen mati tanpa implementasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ingin mengetahui sisi kehidupan perempuan Dayak Mali yang masih mempertahankan tradisi dan budaya lokal, yang secara tidak langsung memiskinkan dan memarjinalkan. Kemudian politik gender berkibar dalam pemerintahan tingkat desa, yang mana perempuan menjadi gender nomor dua dalam struktur pemerintahan. Bahwasannya terdapat lokalitas masyarakat yang menegaskan bahwa kaum perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari observasi partisipasi di lapangan dan wawancara. Sedangkan data sekunder berupa sumber dari buku, jurnal, dan internet. Pada studi

ini, penulis tinggal bersama masyarakat di Desa Cowet untuk mengamati aktivitas sehari-hari perempuan Dayak Mali secara langsung. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah perempuan Dayak Mali yang bermukim di Desa Cowet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sepenggal Kehidupan Perempuan Dayak Mali

Arus globalisasi tidak banyak membawa perubahan pada struktur tradisional masyarakat Dayak Mali di Desa Cowet. Meski pada dasarnya tradisi dan budaya lokal masyarakat sedikit demi sedikit sudah bergeser ke arah yang lebih maju. Sebagian masyarakat sudah bisa menggunakan *hanphone*, sudah ada televisi meski dinyalakan dengan mesin *genset/diesel*. Desa Cowet merupakan satu-satunya Desa di Kecamatan Batang Tarang yang belum dialiri listrik negara (Tribunnews, 2016).

Tradisi lokal masih melekat pada kehidupan perempuan Dayak Mali. Perempuan Dayak Mali bangun lebih pagi dari kokok ayam jantan. Mereka menimba air, menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak mereka, sebelum mereka berangkat ke hutan dan ladang untuk bekerja; mencari nafkah. Mereka berangkat ke sawah atau ladang dan kebun karet sebelum matahari memancar sinar. Mereka mengais rejeki dengan menyadap pohon karet, kemudian mereka ke sawah dan mencari ranting-ranting kayu dan di bawa pulang ke rumah; untuk mereka memasak (*kempara*).

Mereka pulang dari hutan sebelum tengah hari, agar dapat menyiapkan makan siang untuk keluarga dan membersihkan perabotan rumah tangga. Ketika tengah hari, mereka gunakan untuk bersantai dan bercerita dengan tetangga. Setelah lewat jam 12 siang, perempuan Dayak Mali pergi ke ladang untuk *pengiri* ataupun *royong* (*pengiri* atau *royong* adalah bekerja bersama-sama di ladang). Mereka pulang sebelum jam 5 sore agar dapat menyiapkan makan malam untuk keluarga mereka. Begitu setiap hari terus berlanjut dengan pekerjaan yang sama. Hal ini juga menjadi teladan bagi anak-anak mereka, agar bekerja membantu orang tua. Sejak usia dini, baik laki-laki maupun perempuan Dayak, dalam hidup keseharian, pengenalan alam sekitar kehidupan kami menjadi prioritas utama (Riwut, 2011).

Beban ganda pekerjaan yang mereka lakoni sudah menjadi hal yang biasa bagi perempuan Dayak Mali. Kultur dan adat mereka sudah turun temurun dari nenek

moyang mereka sejak dahulu kala, jadi tidak ada masalah sama sekali jika mereka sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai pencari nafkah. Bahkan mereka tidak menyebut hal itu sebagai beban ganda, melainkan sudah menjadi kewajiban seorang perempuan atau kewajiban sebagai istri. Kehidupan sosial mereka pun tidak pernah memperlmasalahakan beban kerja ganda yang dilakoni oleh perempuan Dayak Mali. Justru akan menjadi pergunjangan jika ada perempuan yang tidak bekerja di sawah.

Degradasi kesadaran gender ini memicu berbagai permasalahan terjadi, termasuk didalamnya stereotype. *Gender experts have argued that gender segregation and the different qualities of girls' and boys' peer group contribute to the strengthening of potentially harmful gender stereotype and lay the groundwork for difficulties in later other-gender relationship* (Underwood, 2004). Contoh konkret stereotype yang terjadi pada perempuan pedesaan adalah perempuan harus bekerja; pekerjaan rumah tangga dan penopang ekonomi keluarga, perempuan tidak perlu sekolah tinggi, perempuan harus ke sawah dan ladang. Jika tidak dikerjakan, maka akan muncul stereotype baru; “perempuan malas.”

Kondisi miskin ini memaksa perempuan Dayak Mali untuk pasrah hidup dalam lingkaran kemiskinan, sehingga mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang baik. Kemiskinan yang terjadi pada perempuan Dayak Mali masih terjadi secara tradisional. *Traditionally, poverty has been defined as a discrete characteristic. Given a particular indicator of welfare, a certain line or standard is drawn, and an individual or household falls on one side or the other so that it will make analysis of poverty takes place at two extremely different levels* (Wardhana, 2010). Keluarga miskin di Desa Cowet tidak menganggap dirinya miskin, karena masih dapat menghasilkan makanan (sayuran dan lauk-pauk) dari hutan dan alam.

Peran perempuan Dayak Mali sangat besar dalam menjaga alam. Sebelum membuka lahan hutan untuk dijadikan ladang, terdapat ritual *besentek* yang artinya adalah memberi makan kepada hutan. Dalam hal ini perempuan lah yang biasanya melakukan ritual ini. Perempuan yang menyediakan *rimah* (sesajen) dari rumah dan membawanya ke lokasi pembukaan lahan. Terdapat ikatan psikologi yang kuat antara perempuan dan alam, dimana ritual-ritual lama masih mereka pertahankan hingga jaman modern saat ini. Tradisi seperti ini secara tidak langsung menjaga keseimbangan ekosistem alam; manusia menghormati alam, menjaga hubungan baik dengan alam.

Berladang dan *noreh* karet merupakan bagian dari budaya masyarakat Dayak Mali untuk keberlangsungan dan keberlanjutan hidup. Konsep berladang tradisional dilakukan dengan menerapkan ladang berpindah-pindah. Sedangkan *noreh* karet dilakukan di kebun karet masing-masing atau ada juga yang menerapkan sistem bagi hasil dengan keluarga mereka yang tidak memiliki kebun karet. Kondisi inilah yang dimaksud bergantung pada alam, karena tanpa hasil alam keberlangsungan hidup masyarakat akan terganggu. Berarti bahwa merusak alam sama dengan mengganggu kehidupan masyarakat, yang didalamnya terdapat kearifan lokal.

“Tiap elemp ampus motong, lalu mayan tok umek. Ngak ayek jengen ani laba inan anak-anak ken? Biar sensara turangk, nen penting anak-anak ken man laba” (Setiap pagi saya berangkat noreh, kemudian langsung ke sawah. Jika tidak begitu apa yang dapat anak-anak saya makan? Biarlah raga sengsara [mencari nafkah], yang penting anak-anak saya bisa makan)—(Lina, 28 Tahun) Perempuan Dayak Mali.

Semua perempuan Dayak Mali yang diwawancara memiliki jawaban yang sama, bahwa aktivitas sehari-hari mereka hanya menyadap pohon karet di pagi hari dan ke sawah di siang hari. Disisi lain, tekanan kapitalis (pemilik modal) membelenggu mereka dengan turunnya harga komoditas karet, yang merupakan sumber penghasilan utama. Harga jual karet hanya Rp. 4.500 perkilogram, sementara mereka hanya dapat menghasilkan 3-4 kilogram setiap harinya. Disamping itu, berdasarkan observasi penulis harga sembako di pedesaan melambung tinggi; gula pasir Rp. 20.000 perkilogram, minyak goreng Rp. 14.000 perkilogram, kopi hitam Rp. 6.500 per-*ons*, bawang putih Rp. 40.000 perkilogram (bawang merah tidak dijual karena mahal), telur Rp. 2.500 perbutir, mie instan Rp. 2.500 perbungkus, garam makan Rp. 2.000 perbungkus, Micin 500 gram Rp. 3.500 perbungkus.

Keluarga perempuan Dayak Mali berpenghasilan sehari hanya Rp. 15.000—Rp. 20.000, mereka tidak dapat membeli banyak barang, sementara keperluan rumah tangga harus terpenuhi. Kemudian keperluan lain seperti kebutuhan sekolah anak-anak mereka, akan menjadi beban baru. Belum lagi jika musim penghujan, perempuan Dayak Mali tidak dapat *noreh* karet, karena air karet akan mencair bersama air hujan. Relevansi ini merupakan ketergantungan kehidupan perempuan Dayak Mali terhadap alam. Meski harga komoditas karet murah, mereka tetap *noreh* sebagai tanda bahwa mereka masih menjaga kearifan lokal. Perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak, enggan untuk meninggalkan kampung halaman mereka.

Tingginya harga sembako di Desa Cowet, merupakan bukti konkret ketidakseimbangan politik daerah. Pemerintah daerah tidak mampu mengontrol harga pasar di wilayah-wilayah pedesaan. Sebagai akibat masyarakat yang hidup miskin di pedesaan akan terlilit hutang dan berlutut dalam kondisi kemiskinan. kondisi ini akan menciptakan masyarakat miskin baru di wilayah pedesaan Kalimantan Barat.

Marjinalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur bahkan negara (Fakih, 1996). Kaum perempuan di Desa Cowet menjadi termarjinalkan dalam struktur pemerintahan desa. Perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Hanya satu orang perempuan di Desa Cowet yang menjadi staf di BPD (Badan Perwakilan Desa). Hal ini tidak sejalan dengan mandat UU Desa yang mensyaratkan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

SIMPULAN

Perempuan Dayak Mali masih terbingkai dalam kondisi lokalitas. Meski kearifan lokal yang masih mereka rawat tersebut secara tidak langsung mengikat mereka dalam kemiskinan dan marjinalisasi. Ketidaksadaran perempuan Dayak Mali ini menjadi jalan pelanggaran maskulinitas yang kemudian menjadi lokalitas. Marjinalisasi perempuan Dayak Mali dalam struktur pemerintahan desa merupakan situasi konkret kurangnya pelatihan dan pengawasan dalam implementasi UU Desa. Pegawai di kantor desa mulai dari Kepala Desa hingga staf kebingungan dalam mengimplementasikan perspektif gender dalam struktur pemerintahan desa. Dengan demikian perlu adanya pendampingan atau peningkatan kapasitas aparatur desa, melibatkan perguruan tinggi atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2014. *Data Monografi Desa Cowet, Kecamatan Balai*. (Tidak dipublikasikan)
- _____. 2016. *Ini Daftar 37 Daerah di Sanggau yang Belum Dialiri Listrik*. Diakses tanggal 8 Oktober 2016 dari: <http://pontianak.tribunnews.com/2016/06/27/ini-daftar-37-daerah-di-sanggau-yang-belum-dialiri-listrik>
- Fakih, M. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Granter, E. 2009. *Critical Social Theory and the End of Work*. England: Ashgate Publishing Limited.
- Niko, Nikodemus. 2015. *Pengembangan Model Pembelajaran Keaksaraan Fungsional Dengan*

Menggunakan Pendekatan Akret Berbasis *Life Skill* Pada Perempuan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah CISOC*. Vol. 1 (2) : 19-26.

- Niko, Nikodemus. 2016. Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat. *Jurnal Perempuan*. Vol. 21 (88) : Hal. 83-95.
- Riwut, N. 2011. *Bawin Dayak: Kedudukan, Fungsi, dan Peran Perempuan Dayak*. Yogyakarta: Galang Press.
- Saptandari, P. 2016. Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Perempuan*. Vol. 21 (88) : Hal. 130-148.
- Underwood, M. K. 2004. *Gender and Peer Relations: Are the Two Gender Cultures Really All That Different? Children Peer Relation: From Development to Intervention*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Wardhana, D. 2010. *Multidimensional Poverty Dynamics in Indonesia (1993-2007)*. The University of Nottingham.

Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Kemasyarakatan Pasca Reformasi

Erna Herawati
(Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Padjadjaran
e.herawati@unpad.ac.id)

Abstrak

'Ibuisme negara' adalah ideologi gender bentukan Orde Baru yang menempatkan perempuan dalam peran idealnya bagi negara, yaitu sebagai istri, pendamping dan pendukung suami, sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anaknya, dan sebagai aktor yang bertanggung jawab menyiapkan generasi penerus bangsa. Negara membentuk organisasi-organisasi perempuan yang bertujuan membantu perempuan mencapai peran idealnya; antara lain PKK, Dharma Wanita, dan organisasi para istri lainnya. Kegiatan dalam organisasi itu, meski terjadi di ruang publik (di luar rumah), tetap mengenai domestik (rumah tangga) sehingga menjadi sebuah kegiatan publik semu. Menjelang dua dekade berakhirnya Orde Baru, bagaimana bentuk kegiatan kemasyarakatan bagi perempuan? Bagaimana partisipasi perempuan dalam kegiatan tersebut? Bagaimana perempuan memaknai partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Paper ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menampilkan hasil penelitian yang saya lakukan di sebuah kelurahan di Kota Bandung. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif dengan model etnografi. Hasil temuan saya menunjukkan bahwa di era pasca reformasi di tingkat akar rumput dan di dalam setting perkotaan, 1) beragam kegiatan baru yang menawarkan ruang baru bagi perempuan untuk turut berpartisipasi banyak bermunculan, tetapi 2) kegiatan-kegiatan yang mewarisi konsep ibuisme negara juga masih tetap bertahan dan diminati oleh perempuan, 3) perempuan memiliki keleluasaan dalam memilih kegiatan di masyarakat dan cenderung berpartisipasi dalam beberapa kegiatan sekaligus (multiple-participation), 4) Multiple-participation bukan sekedar untuk menyalurkan aspirasi saja, tetapi alat untuk aktualisasi diri bagi perempuan dalam membangun identitas sosial baru yang lebih jamak; bukan sekedar sebagai ibu dan istri saja, tetapi sebagai aktivis sosial dan warga masyarakat.

Kata kunci: Perempuan, Ibuisme, Partisipasi, Identitas, Reformasi

PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru (Orba), negara Republik Indonesia memiliki kontrol yang sangat besar pada warganya, terutama perempuan. Negara menciptakan

ideologi gender yang ditujukan sebagai dasar untuk mengatur dan membentuk sosok perempuan ideal yang dibutuhkan oleh negara yaitu 'ibu' dan 'istri'. Ideologi yang populer disebut sebagai 'ibuisme negara' ini dikampanyekan secara intensif oleh dan bahkan diwujudkan secara nyata oleh negara melalui pembentukan organisasi-organisasi yang menjadi wadah untuk mendidik perempuan menjadi ibu dan istri sesuai harapan negara, semisal PKK, Dharma Wanita, Persit Kartika Chandra Kirana, Bhayangkari, dan lain-lain (Suryakusuma, 2011).

Pada masa Orba, para feminisme Indonesia menentang dan mengkritik ideologi gender yang diciptakan negara. Mereka menganggap ideologi ciptaan Orba bias gender dan merugikan perempuan karena menutup kesempatan dan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan lain yang lebih berdampak pada peningkatan derajat keberdayaan perempuan, misal partisipasi dalam kegiatan politik dan ekonomi. Namun, suara para feminis tak cukup kuat untuk mereformasi ideologi tersebut. Saat Orba runtuh, barulah mereka mendapatkan kesempatan lebih besar lagi untuk mengkampanyekan ideologi tandingan, yaitu kesetaraan gender. Kini, telah hampir dua dekade pasca runtuhnya Orba; bagaimana bentuk kegiatan kemasyarakatan bagi perempuan? Bagaimana partisipasi perempuan dalam kegiatan tersebut? Dan bagaimana perempuan memaknai partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan tersebut? Paper ini akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menampilkan sebuah contoh fenomena di tingkat akar rumput dan dalam setting masyarakat perkotaan, yaitu di Kelurahan Kebon (pseudonym), Kota Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model etnografi untuk menelusuri dan mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan Kebon. Teknik pengumpulan data saya

lakukan dengan cara FGD, partisipasi observasi, dan wawancara mendalam. FGD saya lakukan untuk mendata aneka bentuk kegiatan kemasyarakatan yang populer di kalangan para perempuan di Kelurahan Kebon dan yang paling banyak diikuti perempuan. Partisipasi observasi saya lakukan untuk mengamati amati dan mengikuti secara intensif kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang populer dan banyak diikuti oleh perempuan yaitu PKK, Posyandu, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Majelis Taklim, dan WPA (Warga Peduli AIDS). Wawancara mendalam saya lakukan pada para perempuan dewasa yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut atau populer disebut 'kader'.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Kebon terletak di pusat Kota Bandung, tidak jauh dari alun-alun dan masjid agung yang menjadi ikon kota Bandung. Luas kelurahan sekitar 85 hektar. Wilayah administratif kelurahan dibagi menjadi 12 rukun warga (RW) dan 85 rukun tetangga (RT). Menurut data monografi kelurahan 2010, jumlah penduduk di kelurahan ini 11603 jiwa, dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Kelurahan ini menduduki peringkat sebagai kelurahan terpadat penduduknya di Kota Bandung menurut sensus 2010. Pendidikan penduduk, sebagian besar tamat SMP dan SMA dan hanya sebagian kecil tamat akademi. Sebagian besar penduduk masuk dalam kategori sosial-ekonomi rendah. Mata pencaharian penduduk umumnya sebagai pedagang kecil-kecilan di pasar tradisional dan sepanjang pinggiran jalan sekitar kelurahan, wirausaha skala rumahan, karyawan di industri kecil sekitar kelurahan, buruh, dan karyawan supermarket yang terletak juga tak jauh dari kantor kelurahan. Kurang dari 1% penduduk berprofesi sebagai pegawai negeri.

Wilayah kelurahan sebagian besar berupa perkampungan padat kumuh. Bentuk perumahan umumnya semi permanen dan bertingkat yang dibangun di bantaran anak sungai Cikapundung. Sungai yang mulai dangkal dan penuh sampah selalu meluap saat hujan lebat dan luapannya menggenangi areal perumahan sepanjang bantaran sungai. Gang-gang sempit yang hanya muat dilalui satu sepeda motor dan berbentuk serupa labirin yang berkelak-kelok di dalam kampung menjadi satu-satunya jalur transportasi di wilayah yang kumuh. Banyak rumah dibangun di atas jalan gang sehingga gang berbentuk serupa kolong panjang di sepanjang perkampungan yang gelap dan harus diberi lampu karena sinar matahari tak dapat

menembus gang. Selain gelap, sirkulasi udara di sepanjang gang tidak lancar dan menyisakan bau pengap dan lembab. Sempitnya rumah-rumah tidak memungkinkan untuk membuat MCK sehingga warga membangun beberapa titik fasilitas MCK umum di dalam kampung. Ruang publik sangat terbatas di dalam kampung. Lorong-lorong gang yang agak lebar dan terang dan balai RW menjadi ruang publik tempat warga bersosialisasi.

Di Kelurahan Kebon terdapat aneka kegiatan kemasyarakatan yang terbuka untuk diikuti oleh kaum perempuan. Para perempuan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan adalah para ibu rumah tangga. Keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut bersifat sukarela dan didasari oleh keinginan mereka untuk berkiprah di masyarakat sebagai kader. Perempuan yang bekerja sangat jarang mengikuti kegiatan di masyarakat karena mereka biasanya berangkat sangat pagi dan pulang jam 6 sore, atau bahkan jika bekerja di pabrik mereka pulang larut malam. Perempuan bekerja biasanya hanya mengikuti satu jenis kegiatan saja, yaitu arisan PKK yang biasanya dilakukan satu bulan sekali dan diselenggarakan pada hari minggu. Pada saat diskusi kelompok terfokus dengan para kader, mereka menyebutkan 5 kegiatan yang paling populer dan paling banyak mereka ikuti, yaitu 1) PKK (termasuk di dalamnya arisan, Posyandu, PAUD, 2) Majelis Taklim, dan 3) Warga Peduli AIDS. Kegiatan ini memiliki jadwal yang berbeda-beda sehingga mereka dapat mengatur keikutsertaannya dalam setiap kegiatan tersebut.

Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK)

Di Indonesia, PKK merupakan kegiatan kemasyarakatan paling populer, merambah hingga pelosok pedesaan dan wilayah miskin perkotaan, seperti halnya di Kelurahan Kebon. PKK adalah organisasi perempuan bentukan pemerintah Orde Baru (Orba), seperti halnya organisasi sejenis yaitu Dharma Wanita (organisasi bagi istri pegawai negeri), Persit Kartika Chandra Kirana (organisasi istri TNI AD) dan Bhayangkari (organisasi bagi istri polisi). Pada masa Orba organisasi ini bersifat semi-formal dan wajib diikuti oleh semua perempuan sehingga anggotanya banyak dan tersebar di sluruh penjuru tanah air. PKK memiliki jumlah anggota terbanyak karena mewadahi semua perempuan, terlepas dari status kepegawaian suaminya. Perempuan anggota Dharma Wanita, Persit Kartika Chandra Kirana dan Bhayangkari juga menjadi anggota PKK di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Setelah Orba runtuh, organisasi-organisasi ini tidak ikut bubar. Hanya saja keikutsertaan perempuan dalam organisasi-organisasi ini tidak lagi bersifat wajib

seperti pada jaman Orba. Saat ini, PKK tetap menjadi organisasi perempuan terbesar di Indonesia, meskipun organisasi-organisasi perempuan baru terus bermunculan dan menarik minat perempuan untuk berpartisipasi.

Sebelum membahas lebih detail mengenai kegiatan PKK dan partisipasi perempuan di Kelurahan Kebon dalam kegiatan tersebut, saya akan membahas terlebih dahulu sejarah organisasi ini secara singkat, sejak Orba hingga pasca reformasi; tujuannya untuk memberi gambaran mengenai karakteristik organisasi perempuan yang sangat legendaris ini dan membandingkan bentuk kegiatan dan bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan ini sejak Orba hingga pasca reformasi. Saya hanya membahas sejarah PKK dan tidak membahas organisasi perempuan semi-formal lainnya karena perempuan di Kelurahan Kebon tidak ada yang berpartisipasi dalam organisasi tersebut.

Sejarah pembentukan PKK diawali dari acara seminar ekonomi rumah tangga yang diselenggarakan oleh Bagian Pendidikan dan Lembaga Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan di Bogor pada 1957. Seminar melibatkan berbagai instansi yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian menghasilkan ide pendidikan untuk perempuan. Pada 1960, Gubernur Provinsi Jawa Tengah menjadikan PKK bagian dari rencana pembangunan daerah. 'Pertiwi', salah satu organisasi istri pejabat di masa itu, diberi tugas menyebarluaskan informasi mengenai PKK. Pusat latihan PKK dibentuk di seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Tahun 70-an, kabupaten mendanai seluruh kegiatan di pusat latihan PKK di wilayahnya. Menteri Dalam Negeri mengusulkan agar PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 1971. Sejak 1973, PKK menjadi bagian dari program Lembaga Sosial Desa (LSD); dan pada 1980 lokasi kelembagaannya dialihkan dari Kementerian Sosial ke Kementerian Dalam Negeri. PKK memperoleh dukungan dana langsung dari kantor Presiden dalam skema Dana Inspres. Pada 1982, PKK menjadi salah satu seksi LKMD dan dipimpin isteri kepala desa, yang merangkap sebagai Ketua II LKMD. Sejak itu, semua istri pegawai pemerintah lokal resmi menjadi anggota PKK. Program PKK juga direvisi yaitu dengan menambahkan kursus penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai urutan pertama. PKK menjadi urusan resmi negara ketika menjadi bagian dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1983 (Mulyasari dan Shaw, 2012). Pada awalnya PKK didorong oleh semangat pergerakan perempuan pada

masa perjuangan kemerdekaan untuk memperjuangkan aspirasi perempuan. Namun, di masa Orde Baru, PKK berubah menjadi sebuah organisasi di bawah pemerintah nasional dan menjadi alat negara dalam beberapa hal

Ide dasar PKK yang semula bertujuan memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi mengalami perubahan menjadi organisasi korporatis negara untuk mewadahi, menggerakkan, dan mengontrol kegiatan perempuan yang bukan istri ABRI dan pegawai negeri. Kontrol tersebut terlihat sangat jelas dengan perubahan kata 'pendidikan' dalam singkatan PKK menjadi 'pembinaan' pada 1984. Tujuan dari perubahan tersebut sangat terkait dengan kepentingan politis Orde Baru, yaitu menghimpun suara untuk Partai Golongan Karya dalam Pemilu Saat menjelang Pemilu, seluruh anggota PKK dikerahkan untuk menghadiri kampanye Golkar. PKK juga menjadi alat untuk menggerakkan perempuan kelas ekonomi rendah. Setiap menjelang siding umum MPR, para anggota PKK wajib mendengarkan ceramah mengenai kewaspadaan negara dari pemerintah dan ABRI. PKK juga menjadi alat negara untuk melaksanakan program-program 'pembangunan' seperti Keluarga Berencana. BKKBN meminta kader PKK menjadi tenaga sukarela untuk merekrut calon-calon peserta KB dan mengajaknya ke pusat-pusat layanan KB. Begitu pula peran kader PKK dalam kegiatan Posyandu sangatlah besar. Kesibukan-kesibukan yang diberikan oleh negara pada anggota PKK membuat mereka tak dapat melaksanakan sepuluh program Pokok yang pernah ditetapkan saat pembentukan PKK pertama kali. Program-program tersebut hanya sekedar menjadi tempelan di kantor kelurahan dan tidak pernah terwujud (Rahayu, 2005).

Selain itu yang lebih penting lagi dalam konteks isu gender, PKK menjadi wadah untuk sosialisasi ideologi gender ciptaan Orde Baru, yaitu 'ibuisme negara'. Ibuisme negara adalah sebuah ideologi gender yang menekankan peran perempuan ideal sebagai istri dan ibu. Konsep ini mengakar pada tradisi priyayi Jawa yang dikombinasikan dengan tradisi kaum borjouis di masa kolonialisme Belanda. Orde baru mengibaratkan bangunan sosial kenegaraan seperti sebuah keluarga, di mana peran Ibu adalah melengkapi status kekuasaan Bapak. Bapak memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol Ibu sampai ke level seksualitas, melalui sistem-sistem kenegaraan. Peran Ibu, dalam negara adalah bertugas melayani dan mendukung Bapak yang menjalankan roda pemerintahan negara. Penerapan nyata dari control Bapak atau negara pada Ibu atau perempuan diwujudkan dalam pembentukan organisasi-organisasi bagi para istri yaitu PKK yang diperuntukan bagi semua istri/perempuan/ibu), Dharm

Wanita (organisasi bagi para istri pegawai negeri), Bhayangkari (organisasi bagi istri polisi), Persit Kartika Chandra Kirana (Organisasi bagi istri prajurit militer angkatan darat). Organisasi-organisasi ini bersifat semi-formal dan di dukung oleh negara sebagai wadah resmi bagi para perempuan (istri) untuk menunjukkan peran dan partisipasinya bagi keberlangsungan negara, melalui perannya sebagai ibu dan sebagai istri. Para feminis Indonesia sejak masa Orde Baru mengkritik ideologi gender yang diciptakan oleh pemerintah

Orba yang diwujudkan dalam pembentukan organisasi perempuan seperti PKK dan Dharma Wanita. Kegiatan dalam organisasi-organisasi tersebut, menurut para feminis telah mereduksi peran perempuan sebagai warga negara (Suryakusuma, 2011). Selain itu, di kegiatan PKK secara umum menekankan pada ide: 'perempuan menghabiskan waktu di dalam rumah, mengurus anak tanpa mengkhawatirkan persoalan penghasilan keluarga' karena mengakar pada konsep peran perempuan dalam keluarga priyayi. Konsep ini tentu saja kurang dapat mengakomodasi aspirasi para perempuan kelas non-priyayi yang harus bekerja paruh waktu atau bahkan penuh waktu dan selalu merasa khawatir akan kondii keuangan mereka. Para ibu bekerja seringkali tak dapat membawa anaknya ke Posyandu atau menghadiri arisan PKK karena bersamaan dengan waktu bekerja. Seringkali, para perempuan non-priyayi, selain termarginalkan dari kegiatan PKK, juga terstigma karena dianggap tidak menjalankan peran 'ibuisme'.

Runtuhnya Orde Baru dan datangnya masa reformasi telah mendorong terciptanya ruang-ruang baru di masyarakat bagi partisipasi perempuan. Perubahan besar juga terjadi dalam organisasi semi-formal bentukan Orba seperti PKK, Dharma Wanita, dan sebagainya. Organisasi tersebut masih bertahan tetapi mengalami beberapa perubahan dalam prinsip-prinsip kegiatannya. Lies Marcoes (2002) menunjukkan salah satu contoh kasusnya pada perubahan nama PKK di awal era reformasi. PKK berubah nama dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Kata pendidikan dan pemberdayaan jelas memiliki makna yang berbeda sehingga tujuan dari PKK pun diredifinisi ulang mengikuti perubahan kata. Penekanan dari kegiatan PKK tidak lagi pada upaya mendidik perempuan tetapi pada upaya memberdayakan perempuan guna mewujudkan keluarga yang sejahtera. Para kader memaknai posisi politik organisasi PKK 'tak lagi seperti dulu'. Organisasi PKK tetap berada dalam hirarki birokrasi, tetapi jabaran ketua tidak selalu mengikuti jabatan suami. Di beberapa kelompok PKK, ketua organisasi tidak selalu dijabat oleh istri kepala lembaga (Rahayu, 2005).

Pasca reformasi, PKK tetap menjadi organisasi terbesar yang mewadahi kegiatan perempuan. Namun, masih tetap seperti masa Orde Baru, semua kegiatan PKK bersifat top-down atau bersifat sekedar melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan PKK yang paling menonjol setelah reformasi hanyalah pada sifat kegiatan saja, yang dulunya wajib saat masa Orba, kini menjadi tidak wajib bagi semua perempuan yang menikah. Namun, ternyata PKK tetap menjadi organisasi yang dipilih oleh banyak perempuan. Hal ini juga terlihat di Kelurahan Kebon. Hampir seluruh perempuan yang telah berkeluarga di kelurahan tersebut mengaku menjadi anggota PKK. Tingkat keanggotaan PKK, dikelompokkan menjadi dua: kader dan anggota biasa. Kader adalah anggota PKK yang memegang tanggungjawab untuk kegiatan tertentu dalam kelompok dan biasanya mereka melakukan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya secara intensif. Kader juga mewakili kelompok PKK dalam acara-acara PKK di tingkat kelurahan. Anggota aktif adalah mereka yang selalu mengikuti kegiatan tetapi tidak seintensif para kader. Mereka biasanya terlibat dalam kegiatan rutin di dalam kelompok, tetapi hanya sesekali berperan serta dalam kegiatan-kegiatan di tingkat kelurahan.

Kegiatan PKK di Kelurahan Kebon dibagi menjadi lima kelompok kerja mengikuti pembagian kelompok kerja PKK Pusat yaitu: 1) Pokja I, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong; 2) Pokja II, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pendidikan dan keterampilan; 3) Pokja III, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pangan, sandang serta perumahan dan tatalaksana rumah tangga; 4) Pokja IV, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat; dan 5) Pokja V, mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan fungsi pada bidang pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kehidupan berkeoperasi.

Kegiatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mikro adalah tiga kegiatan yang paling intensif di Kelompok PKK Kelurahan Kebon. Kegiatan kesehatan meliputi Posyandu Balita dan Lansia dan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Posyandu saat ini merupakan kegiatan unggulan PKK, selain PAUD. Posyandu dilaksanakan setiap bulan di setiap RW. Posyandu ada dua tipe yaitu Posyandu untuk Balita dan Posyandu untuk lansia. Biasanya kegiatan kedua Posyandu ini dilakukan secara bersamaan di pagi hari pada hari kerja karena petugas kesehatan dari Puskesmas juga turut datang di

Posyandu untuk mengontrol kegiatan.

Arisan merupakan ciri khas kegiatan PKK sejak masa Orba dan masih bertahan hingga saat ini. Bahkan para anggota PKK di Kelurahan seringkali mengidentikkan kegiatan PKK sebagai kegiatan arisan. Arisan dilakukan setiap bulan di Balai RW. Jumlah anggota PKK di setiap RW dapat mencapai ratusan orang sehingga kelompok arisan PKK dibagi menjadi 3. Setiap kelompok arisan terdiri atas sekitar 40 orang. Pada setiap arisan, masing-masing anggota menyetorkan uang arisan sejumlah Rp 100.000 pada bendahara arisan. Pada setiap bulan, uang setoran yang berjumlah sekitar 4 juta rupiah diundi dan dibagi untuk 4 orang. Masing-masing mendapatkan satu juta rupiah.

PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini. Kegiatan ini tergolong baru sebagai bagian dari PKK karena baru dicanangkan oleh pemerintah pada sekitar 2006. Tujuan kegiatan PAUD adalah untuk merangsang perkembangan kognisi, afeksi, dan psikomotorik anak-anak usia balita. Kegiatan ini tidak ditujukan untuk mempersiapkan anak usia dini masuk taman kanak-kanak, tetapi hanya sebagai wadah bermain dalam bimbingan dan juga kegiatan *parenting* bagi para orang tua bersama kader. Sejak dicanangkannya program PAUD, para kader PKK menyelenggarakan kegiatan PAUD seminggu dua kali, Senin dan Jumat, di balai RW. Setiap RW bergiliran memakai balai RW untuk kegiatan PAUD. Sebelum membuka PAUD para kader mengikuti pelatihan PAUD yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Keikutsertaan balita dalam PAUD bersifat sukarela. Hanya orang tua yang memiliki komitmen penuh yang mengikutsertakan anaknya dalam PAUD. Orang tua diminta menunggu anaknya saat PAUD dan bersama-sama dengan kader belajar *parenting*. Saat ini jumlah peserta PAUD di wilayah Kelurahan Kebon telah mencapai lebih dari 200 anak.

Para kader PKK menyebutkan bahwa sebelum dan sesudah reformasi, tidak banyak yang berubah dalam kegiatan PKK di wilayah mereka, kecuali perubahan berupa tambahan program-program baru, sistem pelaporan yang mesti diberikan pada Puskesmas (terkait kegiatan Posyandu, KB dll), dan sedikit insentif dari pemerintah yang diberikan secara berkala pada kader PKK yang mengurus Posyandu. Jumlah insentif hanya sekitar 300 ribu rupiah per kelompok Posyandu RW setiap 3 bulan.

Majelis Taklim

Kegiatan Majelis Taklim adalah kegiatan kemasyarakatan yang populer di Kota Bandung,

termasuk di Kelurahan Kebon. Hampir semua warga di Kelurahan Kebon adalah Muslim, sehingga majelis taklim juga menjadi kegiatan pilihan para perempuan di kelurahan tersebut. Pada umumnya, peserta majelis taklim adalah para perempuan yang sudah usia lanjut, meskipun ada pula beberapa perempuan yang masih berusia muda yang juga turut menjadi anggota majelis taklim. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat di beberapa masjid yang terletak di wilayah kelurahan. Agenda rutin majelis taklim meliputi membaca Al Qur'an dan ceramah agama oleh seorang Ustadz atau Ustadzah.

Partisipasi perempuan dalam majelis-majelis taklim di Kota Bandung telah menjadi tren sejak beberapa tahun terakhir. Para anggota majelis taklim di Kelurahan Kebon menyatakan bahwa mereka tidak hanya menjadi anggota kelompok majelis taklim di kelurahan mereka sendiri tetapi juga sering mengikuti kegiatan majelis taklim di luar wilayah Kelurahan Kebon. Lokasi Kelurahan Kebon sangat dekat dengan Masjid Agung Bandung, yang memiliki kegiatan majelis taklim besar. Pada setiap hari Minggu pagi, sebuah majelis taklim diselenggarakan oleh DKM Masjid Agung. Para perempuan Muslim dari Kelurahan Kebon berbondong-bondong menghadiri kegiatan tersebut. Bahkan, tak jarang, mereka juga mengikuti acara-acara sejenis, seperti pengajian-pengajian akbar di beberapa wilayah di Kota Bandung dan Kabupaten sekeliling Bandung.

Partisipasi perempuan Muslim dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di Kota Bandung dan Jawa Barat pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Julian Millie (2011) yang melakukan penelitian intensif mengenai partisipasi perempuan Muslim dalam kegiatan pengajian di Kota Bandung. Millie menemukan bahwa perempuan Muslim di Bandung setidaknya menghadiri empat hingga enam pengajian rutin dalam seminggu. Artinya, mereka hampir setiap hari mengikuti pengajian. Mobilitas perempuan Muslim untuk menghadiri majelis taklim dan pengajian-pengajian akbar di Bandung juga sangat tinggi. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan juga memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan masyarakat. Artinya, jika perempuan harus bernegosiasi dengan pasangan dan keluarga untuk mendapatkan izin mengikuti kegiatan kemasyarakatan lain, tidak demikian halnya dengan pengajian, meskipun frekuensi kegiatan sangat sering. Mereka langsung mendapatkan izin bahkan didukung oleh para suami dan anak apabila menyatakan akan pergi ke luar rumah untuk mengikuti pengajian. Bahkan, beberapa kali perempuan-perempuan di Kelurahan Kebon mengikuti pengajian akbar hingga ke Tasikmalaya, Bekasi, dan Jakarta. Mereka menyewa kendaraan dan pergi secara

berombongan seperti layaknya piknik. Millie menyatakan bahwa tingginya partisipasi perempuan Muslim dalam kegiatan keagamaan telah menjadikan kegiatan ini sebagai arena baru perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di ranah publik. Ia menemukan bahwa jumlah peserta pengajian perempuan lebih dari dua kali lipat jumlah peserta pengajian laki-laki.

Warga Peduli AIDS

Kota Bandung memiliki jumlah orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) terbanyak di Propinsi Jawa Barat. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung mencatat setidaknya lebih dari 3000 orang telah terinfeksi virus HIV pada 2015. Sejak 2006, warga Kota Bandung telah menunjukkan kepedulian dan partisipasi mereka dalam upaya merespon epidemi HIV dengan membentuk kelompok Warga Peduli AIDS atau dikenal dengan singkatannya: WPA. Berbeda dengan PKK yang kegiatannya bersifat *top-down*, WPA adalah kegiatan yang bersifat *bottom-up* karena berasal dari inisiatif para warga. Bentuk inisiatif semacam ini pertama kali muncul di Indonesia di Kota Bandung. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bahkan menjadikan inisiatif WPA di Bandung sebagai percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan epidemi HIV. Kelompok WPA bukan merupakan organisasi semi-formal seperti PKK, tetapi informal. Keanggotaannya bersifat sukarela. Hampir semua anggota WPA adalah perempuan dan para kader kesehatan PKK meskipun keanggotaan kelompok ini tidak secara khusus diperuntukkan bagi perempuan. Jumlah anggota laki-laki sangat sedikit.

Kelompok WPA di Kelurahan Kebon sangat populer di kalangan pegiat penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bandung karena kegiatannya berbeda dengan kelompok-kelompok lain. Kegiatan WPA di kelompok lain biasanya hanya fokus pada penyebarluasan informasi mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV dengan membuat acara-acara penyuluhan HIV bagi warga di kantor kelurahan dan mengundang staf Komisi Penanggulangan HIV Kota Bandung dan para aktivis dari LSM pegiat penanggulangan HIV di Kota Bandung sebagai narasumber. Namun, kelompok-kelompok WPA di wilayah lain belum pernah melakukan kegiatan yang melibatkan para ODHA di wilayah mereka sendiri seperti yang dilakukan oleh Kelompok WPA Kelurahan Kebon. Kelompok WPA di Kelurahan Kebon telah melakukan pendampingan langsung pada belasan warga ODHA di wilayah mereka selain melakukan penyuluhan- penyuluhan pada warga di kelurahan tersebut. Secara umum, bentuk kegiatan

WPA sangat berbeda dengan kegiatan kemasyarakatan yang lain. Tidak ada jadwal pertemuan rutin diantara para anggota seperti halnya kegiatan PKK atau majelis taklim. Kegiatan WPA beragam, meski tidak rutin jumlahnya cukup banyak. Selain memberikan pendampingan pada warga yang ODHA, kader WPA juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan HIV dan AIDS di Kota Bandung. Penyebarluasan informasi mengenai HIV dan AIDS pada warga lebih sering dilakukan secara sangat informal, yaitu saat nongkrong di gang-gang di dalam perkampungan, atau saat ada acara-acara pertemuan rutin PKK, kader menyisipkan informasi mengenai HIV dan AIDS selama 15 menit sebelum atau sesudah acara Arisan, Posyandu, dan PAUD. Kader WPA sengaja tidak membuat acara penyuluhan yang sifatnya masal seperti di kelompok WPA di Kelurahan lain, selain karena keterbatasan biaya juga karena mereka beranggapan bahwa informasi yang diberikan secara personal, sedikit demi sedikit tetapi secara terus menerus lebih efektif daripada penyuluhan massal yang insidental.

WPA Kelurahan Kebon dibentuk pada 2010 dan mula-mula hanya beranggotakan 6 orang; 4 perempuan dan 2 laki-laki. Kini anggota kelompok sudah mencapai 20 orang yang tersebar di hampir seluruh RW. Pada mulanya, keenam orang ini mengetahui dan peduli dengan persoalan HIV dan AIDS saat beberapa warga di kelurahan tersebut meninggal dalam waktu yang tidak terpaut jauh pada 2010. Salah satu dari enam orang tersebut, Yulia, keponakannya juga meninggal. Ia berinisiatif menanyakan pada petugas Puskesmas yang sempat melakukan pemeriksaan pada warga yang meninggal, termasuk keponakannya. Berdasarkan keterangan petugas Puskesmas, kesemuanya meninggal karena terserang penyakit infeksi yang biasa terjadi pada penderita AIDS. Saat itu, pertama kali ia dan beberapa warga mendengar mengenai penyakit tersebut dan penyebabnya. Ia dan beberapa warga yang peduli dengan kejadian tersebut sangat terkejut saat mengetahui bahwa AIDS disebabkan oleh HIV yang disebarluaskan secara cepat melalui penggunaan narkoba suntik. Ia dan beberapa warga mengetahui dengan persis bahwa wilayah Kelurahan Kebon telah menjadi salah satu tempat peredaran dan jual-beli narkoba di Kota Bandung, terutama narkoba suntik. Mereka sangat prihatin dan khawatir jika penyakit tersebut akan menyebar pada anak-anak muda di kelurahan tersebut karena mereka mengetahui banyak anak muda yang menggunakan narkoba suntik di wilayah mereka.

Keenam warga tersebut kemudian berinisiatif untuk

mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai penyakit tersebut dan cara pencegahannya. Mereka menghadiri setiap acara-acara penyuluhan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh LSM maupun lembaga-lembaga pemerintah. Setelah memahami betul persoalan HIV dan AIDS, mereka pun sepakat untuk membentuk kelompok Warga Peduli AIDS, dan mereka menyebut diri mereka sebagai kader WPA. Menurut Yulia, salah satu kader WPA, kegiatan WPA sangat intensif apabila ada kasus atau kejadian terkait HIV dan AIDS yang menimpa warga. Biasanya jika ada kasus, para kader akan sangat sibuk. Mereka dengan sukarela membawa warga yang sakit dan terindikasi HIV atau AIDS ke rumah sakit mendapat perawatan. Mereka juga menunggui warga yang sakit tersebut apabila harus diopname di rumah sakit.

Kegiatan ini tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah maupun Komisi Penanggulangan AIDS, meski mereka memiliki jejaring yang kuat dengan lembaga tersebut dan juga LSM HIV di Kota Bandung. Para kader menggunakan uang pribadi mereka secara sukarela untuk membiayai kegiatan mereka, seperti membayar uang transportasi bagi warga yang terinfeksi HIV dan harus ke rumah sakit tapi tidak memiliki biaya, atau memfotokopi brosur untuk penyuluhan HIV atau membiayai transport mereka sendiri saat harus menghadiri acara-acara terkait HIV dan AIDS di Kota Bandung. Namun, para kader menyatakan bahwa mereka melakukan kegiatan di WPA dengan dasar keikhlasan untuk membantu para tetangga mereka, meski penghasilan mereka pun tidak seberapa banyak dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Makna Partisipasi

Selain kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang saya kemukakan di atas, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang diikuti oleh para perempuan di Kelurahan Kebon. Pada saat diskusi dan wawancara, hampir semua kader menyebutkan bahwa mereka berpartisipasi pada lebih dari 5 kegiatan sekaligus. Bahkan ada beberapa kader yang mengikuti sepuluh kegiatan sekaligus. Para kader mengakui bahwa tak mudah untuk mengatur jadwal kegiatan yang cukup banyak. Suami dan anak-anak mereka pada awalnya menyatakan keberatan apabila kader terlalu sering berada di luar rumah. Namun, para kader berupaya memberi pengertian suami dan anak-anak mereka agar menyetujui kegiatan mereka di luar rumah. Menurut para kader, mereka sangat ingin melakukan kegiatan di luar rumah untuk menambah pengalaman dan membangun jejaring. Jumlah pengalaman dan keluasan jejaring ternyata memiliki nilai berharga bagi kader. Ratna, salah seorang kader WPA, yang juga anggota

PKK, dan ibu rumah tangga mengungkapkan:

“Saya sejak muda sudah suka berkegiatan di masyarakat. Sejak belum menikah, selain aktif di karang taruna, saya sudah aktif di Posyandu. Padahal umumnya orang ikut kegiatan Posyandu kalau sudah menikah dan punya anak. Tapi pada dasarnya saya memang suka. Entah kenapa, saya suka mencari pengalaman yang baru, dan saya suka bertemu dengan orang. Semakin banyak kegiatan yang saya ikut, semakin banyak pengalaman yang saya dapat. Makanya saya merasa cocok di WPA ini. Saya bisa ikut pelatihan-pelatihan di LSM, tambah pengalaman tambah teman. Pengalaman dan teman itu sangat berharga buat saya. Nggak dapat uang nggak papa yang penting dapat pengalaman dan teman baru. Saya tidak bisa membayangkan kalau hanya di rumah saja setiap hari, bosan dan miskin pengalaman”.

Pada saat diskusi banyak kader yang menyatakan setuju dengan pendapat Ratna. Mereka rata-rata menyebut mengejar pengalaman dan memperluas jejaring sosial baru merupakan tujuan utama mereka mengikuti aneka kegiatan di masyarakat. Menurut para kader, banyaknya pengalaman dan keluasan jejaring sosial adalah sebuah prestise sosial bagi mereka, seperti penuturan Ningsih, salah seorang kader PKK:

“Pengalaman dan jejaring itu penting sekali artinya buat saya. Sebab, bagi saya orang yang lebih kaya pengalaman dan punya banyak teman itu lebih kaya daripada yang hanya punya uang tetapi tidak punya pengalaman dan teman. Kalau kita kaya pengalaman otomatis kaya pengetahuan, dan dengan pengetahuan itu kita memiliki hal yang lebih tinggi dari orang lain.”

Para kader yang berpartisipasi dalam kegiatan WPA menyatakan bahwa kegiatan di WPA memberikan pengalaman yang paling banyak dibanding dengan kegiatan lain yang mereka ikuti, misal PKK. Di WPA para kader berkesempatan mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan pencegahan dan penanggulangan HIV yang secara rutin diselenggarakan oleh LSM maupun lembaga pemerintah.

Partisipasi perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan, meski berdampak positif bagi perempuan, seringkali mendapat penilaian sosial yang kurang baik. Penilaian itu justru seringkali datang dari sesama perempuan. Yulia, salah seorang kader menceritakan:

“Saya memang ikut dalam banyak kegiatan di kelurahan. Suami saya mendukung partisipasi saya dalam aneka kegiatan. Anak-anak saya juga sudah besar dan mereka tidak keberatan saya aktif di luar rumah. Tapi, saya justru sering dikomentari negative oleh tetangga gara-gara saya sering terlihat sibuk di luar rumah. Kadang saya ikut pelatihan yang mengharuskan saya nginep di hotel. Saya sering mendengar orang bilang saya keluar masuk hotel. Hahaha. Tapi saya cuek saja. Mereka tidak mengetahui detail kegiatan saya. Lagi

pula saya tak mesti laporan pada mereka”.

Berdasarkan ungkapan-ungkapan yang dikemukakan oleh para kader di atas, dapat diambil simpulan bahwa partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan memiliki makna yang penting bagi mereka. Semakin banyak kegiatan yang mereka ikuti, semakin besar maknanya bagi mereka, karena memberikan pengalaman dan jejaring yang lebih luas. Penghargaan yang tinggi pada pengalaman, pengetahuan, dan jejaring sosial menyebabkan kader berkeinginan untuk memupuk pengalaman dan jejaring sosial mereka dengan harapan menunjukkan identitas baru mereka di masyarakat, yaitu sebagai aktivis sosial yang berpengalaman banyak dan berjejaring luas. Kepercayaan diri tersebut juga membuat mereka tidak terlalu acuh pada komentar orang lain mengenai partisipasi mereka dalam banyak kegiatan.

SIMPULAN

Hasil temuan saya menunjukkan bahwa di era pasca reformasi di tingkat akar rumput dan di dalam setting perkotaan, 1) beragam kegiatan baru yang menawarkan ruang baru bagi perempuan untuk turut berpartisipasi banyak bermunculan. Di Kelurahan Kebon, WPA merupakan salah satu kegiatan baru yang muncul pasca reformasi dan memberi ruang yang lebih besar pada perempuan untuk berpartisipasi. Bahkan WPA memberikan kesempatan pada perempuan untuk mendesain sendiri kegiatan mereka. Namun, meski kegiatan baru mulai bermunculan, kegiatan yang mewarisi konsep ibuisme negara, seperti PKK, tetap bertahan dan diminati oleh perempuan. Hal ini terbukti dengan jumlah anggota PKK yang masih tetap terbesar dibandingkan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Terlepas dari segala kritik negatif terhadap PKK oleh para feminis, PKK tetap memiliki potensi yang luar biasa yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan perempuan untuk mendorong program-program pro perempuan yang responsif gender (Soetjipto dan Adelina, 2013). Di era pasca reformasi perempuan memiliki keleluasaan dalam memilih kegiatan di masyarakat dan cenderung berpartisipasi dalam beberapa kegiatan sekaligus. Partisipasi pada aneka kegiatan sekaligus, bukan sekedar untuk menyalurkan aspirasi saja, tetapi alat untuk aktualisasi diri bagi perempuan dalam membangun identitas sosial baru yang lebih jamak; bukan sekedar sebagai ibu dan istri saja, tetapi sebagai aktivis sosial dan warga masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada para kader PKK, Posyandu, PAUD, Warga Peduli AIDS, dan anggota Majelis Taklim Kelurahan Kebon atas kesediaan dan berpartisipasi dalam penelitian saya ini.

DAFTAR PUSTAKA

(Paper)

- Aslichati, L. 2011. Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Saran Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 7: 1-7*
- Marcoes, Lies.2002. Women's Grassroots Movements in Indonesia: A Case Study of the PKK and Islamic Women's Organisations in Women in Indonesia: Gender, Equity and Development by Kathryn Robinson and Sharon Bessel (Ed).
- Millie, J. 2011. Islamic Preaching and Women's Spectatorship in West Java. *The Australian Journal of Anthropology (TAJA)* Vol 22 hal 151-169 \
- Mulyasari, F., & Shaw, R. (2012). Civil society organization and disaster risk reduction in Indonesia: role of women, youth, and faith-based groups. *Community-based disaster risk reduction, community, environment and disaster risk management, 10*, 131-150.
- Rahayu, 2005. Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan Sejak 1980-an. Prosiding Konferensi 'Warisan Otoritarian Indonesia', 17-19 November 2005, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

(Buku)

- Soetjipto,A; Adelina, S. 2013. *Suara dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK.Tangerang*: Penerbit Margin Kiri
- Suryakusuma, J. 2011. *Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru (State Ibuism)*. Jakarta: Komunitas Bambu

Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik VS Budaya Masyarakat Indonesia

Randi

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

randy.iboe@gmail.com

Abstrak - Keterlibatan perempuan dalam bidang politik telah menjadi perhatian masyarakat dunia, dapat dilihat pada indikator MDG tahun 2015, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Suara perempuan sangat diperlukan untuk membuat keputusan program pembangunan pemerintah. Permasalahan perempuan di Indonesia cukup kompleks, pembangunan yang tidak sensitif gender, konstruksi budaya tentang perempuan, hingga minimnya keterlibatan perempuan di bidang politik. Data menunjukkan tahun 2009-2014 representasi perempuan dari 560 anggota di DPR RI, 18% perempuan dan 82% laki-laki, kurang dari 30%, hal ini menyebabkan ketimpangan dalam setiap pengambilan keputusan, seperti program KB tahun 1980 yang hanya diperuntukkan untuk perempuan. Adapun fokus dalam tulisan ini, akan membahas bagaimana budaya menjadi hambatan (*agama, adat*) keterlibatan perempuan di bidang politik. Mengingat lembaga tradisional yang sudah membudaya, sulit mobilitas dalam pembangunan dan kemampuan tidak sesuai dengan kehidupan politik pada tingkat nasional, seperti budaya Indonesia yang mengidentikkan perempuan hanya berada dirana domestik, sehingga menghambat perempuan agar dapat terjun dirana politik, tulisan ini akan mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat legislatif, agar setiap pembangunan sensitif gender. Kuota 30% perempuan di parlemen menunjukkan pemerintah perhatian dan bertanggung jawab terhadap keterlibatan perempuan, tetapi kuota tersebut tidak terpenuhi, pemerintah harus konsen terhadap hambatan yang dihadapi perempuan, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam rangka untuk menjelaskan penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif, studi kajian pustaka

Kata Kunci: partisipasi, perempuan, politik, gender, budaya

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang ikut serta dalam mendorong kesetaraan gender dan upaya pemberdayaan perempuan melalui undang-undang. UUD 1945 secara formal sebenarnya telah menjamin partisipasi

perempuan Indonesia dalam sektor publik, negara menolak diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap warga negaranya, negara mengakui hak dasar setiap warga negara, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan dapat diterapkan secara baik.

Perbedaan gender tidaklah menjadi sebuah masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender Inequalities*) (Fakih, 1996). Perempuan dalam pasar tenaga kerja atau arena publik, pengalaman pribadi sebagai persoalan “politik” dan “publik” menjadi penggerak dalam setiap perubahan sosial (Holzner, 2016). Perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia tentunya dibutuhkan sebuah kebijakan yang sensitif gender, sehingga kelak tidak ada aktor perempuan dan laki-laki yang dirugikan dalam kebijakan tersebut. Keputusan yang diambil harus mewakili gender. Menurut Olympe De Gouges (1791) bahwa perempuan dilahirkan dengan hak-haknyasama dengan hak-hak laki-laki. Perempuan juga ingin dicintai, ingin dihargai dan diakui, ingin dihitung dan mendapatkan status dalam kelompoknya (Kartono, 1992) contoh kasus Program Keluarga Berencana (KB) 1980, perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan baru, program KB hanya diperuntukkan kaum perempuan, sehingga kaum perempuan merasa dirugikan.

Legislatif adalah lembaga yang dibentuk oleh negara, yang anggotanya adalah mewakili setiap wilayah di Indonesia. Lembaga negara yang berwenang dalam setiap kebijakan. Peran politik perempuan dan laki-laki sangat berdampak dalam pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi. Sesuai dengan indikator target MDG tahun 2015, bahwa MDG mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dimana data menunjukkan bahwa proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR meningkat secara data kuantitatif.

Ketertinggalan perempuan di berbagai sektor, khususnya di bidang politik, masih terkait atau merupakan implikasi dari budaya masyarakat yang masih menempatkan laki-laki dalam posisi yang superior daripada perempuan (Rajab, 2005) dengan posisi laki-laki yang terlebih dahulu berada di sektor

publik, maka banyak kebijakan terdahulu yang tidak memperhatikan hak-hak kaum perempuan. Dominasi partisipasi laki-laki dalam politik dapat dilihat pada kepengurusan partai, sebagian besar kepengurusan partai adalah laki-laki baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini menunjukkan ketimpangan dalam demokrasi yang terjadi di Indonesia. Marginalisasi kaum perempuan dalam bidang politik tidak terlepas dari adanya pengaruh budaya masyarakat yang masih menganggap kaum perempuan hanya berada di sektor domestik. Salah satu contoh budaya Jawa kecenderungan masyarakat Indonesia yang masih sangat kental mengenai penghambat partisipasi perempuan dalam politik yaitu perempuan harus di pingit dalam istana, pesantren dan perguruan. Berdasarkan kandungan nilai-nilai subkultur, kelompok sosial, dan pelembagaan pendidikan humaniora, dapat ditemukan tiga *loci* pendidikan humaniora dalam masyarakat Jawa tradisional, yaitu pesantren, perguruan dan istana (Kuntowijoyo, 2006). Pengaruh tiga *loci* ini dalam pembentukan perempuan sangat besar.

Kesempatan perempuan untuk terlibat dalam politik semakin luas, dimana 30% suara perempuan diparlemen. Tetapi yang menjadi pertanyaan penulis mengapa dengan luasnya kesempatan perempuan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat berada di sektor publik tidak menjadikan perempuan justru banyak terjun ke dunia politik, sehingga berdasarkan data, untuk kuota 30% tersebut tidak terpenuhi. Secara tidak langsung maka setiap kebijakan yang diambil akan mengalami ketimpangan. Disinilah penulis ingin menganalisis mengapa perempuan tidak melibatkan dirinya dalam politik dan budaya yang masih menjadi penghambat partisipasi perempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan mengapa menggunakan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam bidang politik dan apakah budaya masyarakat Indonesia akan menjadi penghambat perempuan agar dapat berada di ranah politik. Obyek penelitian ini adalah perempuan dalam politik di Indonesia. Data yang diperlukan adalah data statistik jumlah partisipasi perempuan dalam bidang politik, yang terkait dengan obyek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder. Adapun sumber data sekunder berupa dokumen, arsip, surat-surat, buku, yang berkaitan langsung dengan partisipasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia. Studi pustaka yang dilakukan selama 1 bulan yaitu sejak 2 september sampai 2 oktober, dimana didapat dari berbagai sumber bacaan dari berbagai

kategori: sumber-sumber referensi umum, buku-buku ajar, artikel lepas, e-jurnal dan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi perempuan dibidang Politik di Indonesia

Partisipasi perempuan dalam pertumbuhan dunia politik sangatlah penting, sebab dalam pembangunan harus melibatkan gender yaitu laki-laki dan perempuan, sehingga dalam pembangunan akan sensitif gender. Ada banyak contoh pembangunan yang tidak sensitif gender seperti setelah orde baru, dalam menahan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia maka dilakukan sebuah program yaitu Keluarga Berencana (KB) tahun 1980, program ini hanya melibatkan kaum perempuan saja, seolah-olah melonjaknya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh perempuan, padahal dalam kelahiran seorang anak tentunya tidak terlepas dari peran seorang ayah. Pandangan inilah yang menyebabkan program KB dirasakan tidak menyelesaikan masalah, tetapi disisi lain menyebabkan masalah yaitu ketidakadilan yang dirasakan oleh para perempuan di Indonesia pada waktu itu. Kemudian barulah disadari bahwa tidak hanya perempuan yang terlibat melainkan melibatkan laki-laki juga. Kesadaran ini harus ditumbuh kembangkan agar meminimalisir ketidakadilan gender.

Di Indonesia perempuan sudah di beri kebebasan dalam dunia politik tetapi partisipasi perempuan tetap rendah. Hal ini dapat ditimbulkan dari berbagai sebab, baik pendidikan perempuan yang masih rendah, kemudian pengaruh budaya masyarakat Indonesia yang masih kental, budaya patriarki, semua tergantung dengan keputusan kepala keluarga atau laki-laki yang berkuasa di dalam rumah. Dengan terbuka kesempatan perempuan tidak menutup kemungkinan partisipasi perempuan meningkat secara drastis.

Menghadapi dominasi nilai-nilai budaya patriarki dan situasi diskriminatif, agenda perempuan dalam politik hendaknya dimulai dari kegiatan-kegiatan penyadaran (awarnes rising). Terutama mengubah cara pandang dan pola pikir (mindset) seluruh masyarakat (laki-laki dan perempuan) tentang prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum dan keadilan (Mulia, 2007:35)

Kebebasan dalam dunia politik telah membawa perubahan dalam sudut pandang masyarakat tentang laki-laki dan perempuan, dimana keterbukaan terhadap perempuan untuk tidak hanya berada di dunia domestik

tetapi dapat juga berada di dunia publik. Menyuarakan agar setiap pembangunan tepat sasaran yaitu kedua aktor. Menciptakan kesadaran masal tentang pentingnya keterlibatan perempuan dunia politik, dengan terjunnya perempuan ke dunia politik setiap pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan akan sensitif gender, tidak hanya mementingkan pembangunan yang memihak kepada laki-laki tetapi juga kepada perempuan begitupun sebaliknya. Kesadaran pemerintah Indonesia telah menjadikan Indonesia harus melibatkan minimum 30% perempuan dalam parlemen yang termuat dalam Undang-Undang No.12/2003 tentang Pemilihan Umum.

Tabel 1
Representasi Perempuan di DPR-RI

DPR tahun dan periode	Seluruh anggota	Jumlah Perempuan	Jumlah laki-laki
1915-1949 Komite Nasional Pusat	21	-	21
1949-1950 DPR RIS	150	3	147
1950-1956 DPRS	235	9 (3,8%)	225
1956-1960 Hasil Pemilu 1955	272	17 (6,25%)	255
1960-1966 DPR Gorong Royong	283	26 (9,19%)	257
1966-1971 DPR orde Baru	350	37	313
Penyegaran	414	29	385
1971-1977 DPR hasil pemilu 1971	460 (360 dipilih + 100 diangkat)	36 (7,8%)	424
1977-1982 DPR	460 (360 dipilih + 100 diangkat)	36 (7,8%)	424
1982-1987 DPR	460 (400 dipilih + 100 diangkat)	39 (8,5%)	421

1987-1992 DPR	500 (400 dipilih + 100 diangkat)	65 (13%)	435
1992-1997 DPR	500 (400 dipilih + 100 diangkat)	62 (12,5%)	438
1997-1999 DPR	500 (400 dipilih + 100 diangkat)	62 (12,5%)	438
1999-2004 DPR	462	46 (9%)	416
2004-2009 DPR	550	63 (11,8%)	487
2009-2014 DPR	560	101 (18%)	459

Sumber: Aisyah Amini, dalam Mulia (2007) data KPU, Katikasari, dan diolah

Dari data diatas dari tahun ke tahun perkembangan keterlibatan perempuan dalam dunia politik cukup mengalami peningkatan hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan yang semakin baik, tidak hanya dari pendidikan tetapi dari segi pengalaman, perempuan cukup berkompeten dalam bidang politik, dapat kita lihat banyak tokoh politik perempuan yang cukup sukses dalam dunia politik yaitu, Sri Mulyani, Susi Pujiati, Puan Maharani, Ce Popong dll. Kiprah perempuan dalam dunia politik sekarang ini tidak diragukan lagi tentang kualitasnya, tetapi masih ada sebagian perempuan yang belum berani terjun langsung ke dunia politik, karena tidak hanya sisi baiknya dunia politik juga penuh dengan masalah seperti tindak korupsi yang dilakukan oleh Anggelina Sondakh, Melinda, Ratu Atut dan lain-lain, masing banyak lagi perempuan yang di bui karena terjun ke dunia politik. Kualitas para wakil rakyat dinilai sangat buruk, memperjuangkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu disbanding kepentingan umum (Olla, 2014). Politik adalah suci tetapi dalam proses pelaksanaannya penuh dengan kemunafikan, korupsi, kehilangan moral dan saling menjatuhkan. Sehingga politik menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang, terutama bagi kaum perempuan yang secara realitas dianggap lemah.

Hambatan Umum Partisipasi Perempuan Indonesia dalam Bidang Politik

Perempuan selalu dihadapkan dengan permasalahan ketidakadilan, kaum perempuan merasa di marginalkan, dianggap hanya dapat bergerak di ruang domestik dan sedikit sekali untuk dapat bergerak di ruang publik. Tentunya permasalahan ini akan terus ada jika belum adanya yang dinamakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam tahun 1974 konferensi tentang pengintegrasian ke dalam ekonomi nasional yang diselenggarakan di Wesley College, dan Biro Woman in Development (WID) mulai dibuka di USAID, dimana memusatkan perhatian kepada isu-isu yang berkenaan dengan partisipasi perempuan dalam program pembangunan. Hal ini disebabkan oleh orientasi kebijakan masa lalu yang tidak memperhatikan kaum perempuan terutama data mengatakan bahwa perempuan dalam politik. Perpolitikan di Indonesia yang didominasi oleh kaum laki-laki (Fakih, 1996).

Kebijakan-kebijakan politik di masa Orde Baru juga sangat menyudutkan perempuan. Sebagai contoh proyek Keluarga Berencana, penanganan akses-akses negatifnya kurang mendapat perhatian, sementara peserta (*akseptor*) KB mayoritas perempuan (Mulia, 2007). Sehingga tidak heran kaum perempuan menyuarakan kepeduliannya terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan perempuan. Partisipasi perempuan harus dipertimbangkan didalam setiap perencanaan pembangunan (Bappenas, 2007). Secara kita sadari bahwa realitas politik pada saat ini memarginalkan kaum perempuan di dunia politik formal. Ada banyak hal yang menyebabkan termarginalnya kaum perempuan dari dunia politik yaitu; *pertama*, adanya legitimasi keagamaan yang mendukung diskriminasi gender, *kedua*, adanya hegemoni negara dalam meminimalkan peran perempuan dalam ranah politik, dan *terakhir*, budaya politik Indonesia yang menganut patriarki (Mulia, 2007).

Adapun menurut Mulia (2007) permasalahan yang dihadapi perempuan Indonesia: *pertama*, hambatan Ideologi dan Psikologi, nilai-nilai budaya, pandangan, stereotip dalam masyarakat yang dibentuk (dikonstruksi) dari budaya patriarki dan bias gender dalam menafsirkan ajaran agama, serta semakin menguatnya fundamentalisme semuanya menempatkan laki-laki sebagai pemimpin, penentu dan pengambil keputusan dalam kedudukan superior, sedangkan perempuan dikondisikan dan ditempatkan di lingkup domestik, untuk bertanggungjawab, urusan yang berkaitan dengan melahirkan dan membesarkan anak, serta urusan kerumahtanggaan. Wanita lebih suka yang praktis, lebih langsung, dan lebih meminati segi-segi kehidupan konkret, serta segera, seperti pekerjaan rumah tangga, kehidupan sehari-hari dan kejadian-kejadian yang

sedang berlangsung disekitar rumah tangganya (Kartono, 1992). Kehidupan domestik dianggap lebih tepat untuk kaum perempuan. *Kedua*, hambatan sumber daya manusia (SDM), secara pendidikan kaum perempuan memiliki pendidikan rendah, karena ada anggapan dari masyarakat bahwa perempuan hanya bisa “di kasur, di sumur, dan di dapur” setelah menikah, sehingga perempuan tidak begitu menguasai sendi-sendi perpolitikan, tetapi sumber daya manusia (SDM) laki-laki tidak kalah bermasalah, dimana sedikit sekali laki-laki yang berkualitas di Indonesia, dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan, banyak kaum laki-laki yang terjun kepolitik dan tersandung kasus korupsi. Dalam hal ini perempuan memiliki masalah yang cukup serius. Dunia politik selalu dipersepsikan untuk para laki-laki, dimana dunia yang kejam, merupakan bukan tempat yang aman dan nyaman untuk perempuan, pembersihan politik memperlihatkan pihak politik yang berkuasa membersihkan pemerintahannya dari oknum-oknum politik yang menentang kekuasaannya (Shadily, 1993), hal ini menyebabkan perempuan semakin tidak tertarik terhadap dunia politik, bahkan membenci dunia politik dan urusan kepemimpinan. Sehingga dapat dirasakan sekarang keterlibatan perempuan sangatlah sedikit dibandingkan dengan laki-laki. *Ketiga*, hambatan kelembagaan dan struktural, secara umum sikap maskulin ditunjukkan dalam sistem politik di Indonesia, peraturan yang bersifat diskriminatif dan bias gender. Akses perempuan untuk dapat memimpin sangat sedikit dan selalu disbandingkan dengan laki-laki. Kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional “*top down*” dan sistem pemerintahan yang tidak peka/sensitif gender. Dengan melibatkan perempuan tentunya pembangunan akan sensitif gender, karena dalam pengambilan keputusan tidak jarang laki-laki selalu mendominasi sehingga dalam pembangunan akan terjadi ketimpangan. *Keempat*, hambatan ketersediaan data, ketiadaan data perempuan dalam pengambilan keputusan legislatif, Eksekutif, Yudikatif, terutama di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dan Sub-distrik. Data yang dimaksudkan adalah data tentang perempuan yang potensial di tingkat nasional, dan kesulitan dana dalam kampanye.

Tidak hanya ke empatal tersebut menjadi permasalahan tetapi konstruksi agama dan budaya menjadi masalah. Dimana tidak dalam islam perempuan sudah dikonstruksikan untuk tidak terlalu agsif, memimpin, salah satu contoh kecil adalah yang harus menjadi wali adalah laki-laki. Agama dan budaya masyarakat Indonesia sangat berkaitan erat, dimana dalam menentukan budaya, masyarakat mengikatnya kedalam agama, contoh dalam agama islam yang harus memimpin adalah laki-laki., kerena perilaku politik

mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif, dan ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan (Mulia, 2007). Pandangan inilah yang harus dihapuskan untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

Hambatan Budaya Masyarakat Indonesia

Budaya patriarki masih sangat kental dalam masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan strategis keluarga dalam konteks budaya patriarki sangat diwarnai dominasi laki-laki. Perempuan atau isteri pada umumnya hanya mengikuti keputusan-keputusan yang diambil oleh suaminya. Menurut Kartono (1992) bahwa secara psikologik kebanyakan perempuan kurang berminat pada masalah-masalah politik; terlebih politik yang menggunakan cara yang licik, munafik, dan kekerasan. Sikap tersebut disebabkan karena tindak politik itu dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai etis dan perasaan halus perempuan. Dibanding dengan perasaan laki-laki dianggap kuat dalam menghadapi setiap lawan politik. Anggapan inilah yang telah membudaya dalam masyarakat, sehingga perempuan harus berpikir dua kali untuk dapat berada di ranah politik. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat yang isinya memarginalkan kaum perempuan, kaum perempuan dianggap tidak berdaya ketika berada didalam ranah publik. Masyarakat Indonesia selalu mengaitkan perempuan dengan ruang domestik saja, sehingga muncul kesadaran dari seorang perempuan Jawa R.A Kartini yang memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Pelajaran yang sangat berharga telah kita dapatkan dari sosok R.A Kartini, perempuan Jawa yang diharuskan dipingit dan tidak boleh menempuh pendidikan. ini adalah kesalahan tempoh dulu budaya yang memarginalkan perempuan. Proses pembelajaran masyarakat Jawa pada saat itu pesantren dan perguruan sehingga menurut Kuntowijoyo (2006) pesantren dan perguruan mewakili tradisi-tradisi yang melampaui batas-batas kelompok sosial dalam masyarakat, sekalipun ada kalahnya tradisi itu juga mewakili oleh kelompok yang secara sempurna mendukung cita-cita kultural suatu tradisi. Keputusan yang diambil berdasarkan patriarki adalah keputusan yang mewakili kultursuatu tradisi.

Berdasarkan data tidak hanya tempoh dulu, banyak perda yang masih menganggap perempuan masih dianggap lemah dan tidak layak berada di ruang publik, seperti perda-perda di tabel 2; sebagian besar perda tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarki masih ada di Indonesia, budaya yang memarginalkan kaum perempuan secara pekerjaan, pendidikan dan kepemimpinan.

Tabel 2. Perda dan Surat Edaran Tentang Perempuan

Perda	Tentang
Perda Kabupaten Gowa No. 7 Tahun 2003	Tentang larangan perempuan berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa ditemani muhrimnya
Perda Tangerang No. 8 Tahun 2005	Tentang pelanggaran, mencurigai, menangkap, perempuan di tempat umum karena diduga melacur
Qanun Provinsi Aceh No. 14 tahun 2003	Tentang larangan berkhalwat
Perda Kota Bandar Lampung No. 15 tahun 2002	Tentang Larangan Pembuatan Prostitusi dan Tuna Susila
Perda Kabupaten Lahat No. 3 tahun 2002	tentang larangan Pembuatan Pelacuran dan Tuna Susila,
Perda Kota Mataram No. 12 tahun 2003	Tantang pencegahan maksiat
Perda Kotamadya Kupang No. 39 tahun 1999	Tentang Penertiban Tempat Pelacuran
Surat Edaran Bupati Pamekasan, Jawa Timur No. 450 tahun 2002	Tentang kewajiban berjilbab bagi karyawan perempuan
Surat Edaran Bupati Maros, Sulsel Tertanggal 21 oktober 2002	Tentang kewajiban berjilbab tentang kewajiban berjilbab bagi karyawan pemerintah
Perda Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/Sos/2001	Perda tentang mewajibkan para pelajar perempuan mengenakan baju kurung dan jilbab
Perda Solok, Sumbar tahun 2000	Perda tentang mewajibkan para pelajar perempuan mengenakan baju kurung dan jilbab
Intruksi Walikota Padang, No.451.422/Binsos-III/2005 tertanggal 7	Tentang perintah wajib jilbab dan busana Islami bagi orang islam dan anjuran memakainya untuk non-muslim

Sumber: Mulia (2007), diolah

Perda di atas menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perempuan cukup tinggi, namun dalam setiap

perda tersebut diperuntukkan bagi kaum perempuan. Sehingga ruang gerak perempuan terbatas, dan perempuan yang dianggap sumber masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya dalam setiap kebijakan dipengaruhi oleh agama dan budaya masyarakat yang masih kental. Pikiran sosiologis dalam Kuntowijoyo (2006) tentang hubungan agama yang dalam masyarakat berfungsi sebagai pembentuk dunia (*world-construction*) dan pelestari dunia (*world maintenance*) juga dapat menyebabkan orang menjadi terasing, karena untuk membentuk dan melestarikan, agama mempunyai daya mengasingkan dan meniadakan pengasingan itu. Perempuan adalah korban pengasingan yang secara realitas sosiologis perempuan termarginalkan, dalam prosesnya memiskinkan kaum perempuan, marginalisasi terjadi di berbagai tempat pekerjaan, pendidikan, masyarakat atau kultur dan bahkan negara (Fakih, 2013). Ketika berbicara politik tentunya tidak terlepas juga dari agama, partai di Indonesia pun terbentuk berdasarkan keagamaan, seperti PKB, PKS. Meskipun Indonesia secara Undang-Undang telah mengakui dan menginginkan keterlibatan perempuan dalam politik, tetapi pada realitasnya partisipasi perempuan masih sangat rendah dan tidak mencukupi kuota 30% yang telah ditentukan.

Kultur patriarki di Indonesia dipengaruhi oleh agama, sehingga menyebabkan ketidakadilan gender dalam masyarakat Indonesia. Tetapi bukan semata kita memandang agama adalah pembatas perempuan untuk dapat berada di ranah domestik, seperti perempuan dalam peradaban Islam, kaum perempuanlah yang pertama kali mengakui Islam dan kenabian Muhammad, dan perempuanlah yang berperan dalam perjuangan Islam kalah itu. Menghormati Hak Asasi Manusia adalah salah satu konsep politik yang terpenting adalah penghargaan dan penghormatan terhadap manusia. Tetapi tidak serta merta hak asasi manusia dapat dipenuhi, karena masih ada hak-hak orang lain yang mesti kita hormati. Dalam hal ini hak laki-laki dalam dunia politik telah mendominasi, dan mengklaim politik adalah maskulin (Mulia, 2007). Bahwasanya perempuan pada hakikatnya mampu bekerja sama baiknya dengan kaum laki-laki (Kartono, 1992). Politik membutuhkan aktor perempuan dan laki-laki sebagai agen yang akan merencanakan, membuat, dan kontrol terhadap pembangunan, dengan tidak memarginalkan salah satu aktor yaitu perempuan dan laki-laki. Bukan hal yang mudah dalam menggeser paradigma lama. Dibutuhkan kerja keras dan keinginan masyarakat Indonesia untuk merubah semua pandangan yang memarginalkan perempuan di berbagai sektor.

Membangun Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik

Meningkatkan partisipasi perempuan berarti meningkatkan secara kuantitatif jumlah perempuan dalam parlemen dan meningkatkan kualitas perempuan baik secara pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Mendorong kebebasan perempuan untuk berada di ruang publik. Demokrasi dinyatakan sebagai Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik tentunya akan berdampak baik terhadap negara itu sendiri, sehingga dalam setiap keputusan akan sensitif gender. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik tentunya dibutuhkan suatu pergeseran paradigma tentang perempuan. Cara berpikir yang terbuka terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh perempuan dalam ruang publik. Perubahan cara berpikir ini sangat penting dalam percepatan pembangunan di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang turut serta dalam menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) dan perjanjian mengenai Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*). Dengan turut sertanya Indonesia dalam kesepakatan global tersebut maka Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, sehingga pembangunan yang diinginkan adalah pembangunan direncanakan secara responsif gender. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang berdasarkan hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang muncul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengakses dan memanfaatkan intervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan (Bappenas, 2007). Dalam Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990) perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia (*woman is equal to man in human dignity*). Menurut Undang-Undang 1945 perempuan dan laki-laki sama secara formal.

Dengan perjanjian global tersebut masyarakat Indonesia sudah seharusnya merubah sudut pandang tentang perempuan, perempuan yang selalu dipandang lemah dan tidak layak berada di ruang publik. Berbagai sendi pemerintahan yang berkaitan dalam pembuatan kebijakan dalam pembangunan. Seharusnya melibatkan perempuan. Hegemoni kultural yang mengklaim dunia politik adalah dunia maskulin harus mampu dihentikan oleh perempuan untuk melibatkan diri secara aktif dan mandiri dalam dunia politik, politik adalah ruang bersama dalam mengambil setiap kebijakan untuk keajahteraan hidup manusia baik perempuan maupun

laki-laki harus melibatkan kedua belah pihak tanpa adanya marginal disalah satu pihak (Mulia, 2007). Sesuai dengan Pancasila yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Dari kajian diatas bahwa budaya masyarakat Indonesia bukan penghalang dalam setiap pembangunan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya responsif gender dalam setiap perencanaan pembangunan. Sudah seharusnya pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perempuan, baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan politik. Sesuai dengan perjanjian yang telah diikuti di tingkat global dan mewujudkan cita-cita Bangsa yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Partisipasi perempuan dalam bidang politik cukup rendah dengan tidak tercukupinya quota 30% di parlemen. Dengan menghargai hak-hak kaum perempuan, membuka seluas-luasnya kepada perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik, hal ini adalah wujud dari pencapaian cita-cita bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perencanaan pembangunan yang responsif gender dilakukan dengan mempertimbangkan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mengingat pembangunan di Indonesia sedikit sekali yang responsif gender, kemudian hambatan budaya yang dihadapi perempuan Indonesia adalah satu permasalahan yang harus diselesaikan dengan menghargai hak-hak perempuan, stereotip gender yang melekat pada perempuan dan laki-laki dapat berdampak terhadap setiap pembangunan yang dilakukan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Allah SWT, yang telah melancarkan dalam tulisan ini, terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan dalam kelancaran pendidikan saya, sehingga saya dapat mengikuti seminar nasional. Terima kasih teman Pasca Sosiologi 2015 yang bersedia memberikan masukan dan saran terhadap tulisan ini, terima kasih kepada Fahima Saifudin dan heni ismiati yang telah membantu dalam

editing abstract dalam Bahasa Inggris. Tentunya tulisan ini tidak luput dari kesalahan maka dengan ini penulis menerima seluas-luasnya kepada pembaca atas saran dan masukan yang bermanfaat untuk saya kedepannya. Terima kasih untuk semua panitia yang telah bekerja keras untuk dapat melaksanakan kegiatan ini, termasuk akan membuat proceeding tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan. ISSN : 1410 – 153X, No. 46, 2006, Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama, Jakarta, Januari 2006.
- Jurnal politica, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), vol.4 no.1, hal 001-156, Jakarta Mei 2013, ISSN 2087-7900.
- Kartikasari, Dian. 2013. Artikel Keterwakilan Perempuan, Ketidakeadilan dan Kebijakan Keadilan ke depan oleh Disampaikan dalam Konferensi INFID, Pembangunan Untuk Semua, Jakarta 26-27 November 2013
- Bappenas. 2007. *Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender Untuk Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Bappenas
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press
- Holzner, Brigitte dan Ratna Saptari. 2016. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial (Sebuah pengantar studi perempuan)*. Jakarta: Kalyanamitra
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wicana
- Kartono, Kartini. 1992. *Psikologi Wanita (Mengetahui Gadis Remaja dan Wanita Dewasa)*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia)*. Yogyakarta: Kibar Press
- Olla, Paulinus Yan. 2014. *Spiritualitas Politik (Kesucian Politik dalam Perspektif Kristiani)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rajab, Budi. 2005. *Profil Perempuan dalam Lembaga Politik (Kajian tentang keterlibatan perempuan dalam partai politik di kabupaten dan kota Cirebon)*. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Shadily, Hassan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

ⁱ Jurnal politica, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), vol.4 no.1, hal 001-156, Jakarta Mei 2013, ISSN 2087-7900.

BIAS GENDER DALAM PEMBERITAAN AKTIVITAS POLITIK KAUM PEREMPUAN DI MEDIA

Eni Maryani

Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran)
e-mail: emaryani@gmail.com/eni.maryani@unpad.ac.id

Agus Setiawan

Program Studi Manajemen Komunikasi, Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

.Detta Rachmawan

Program Studi Manajemen Komunikasi, Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Abstrak

Aktivitas kaum perempuan di bidang politik selalu menarik perhatian karena menyangkut beberapa aspek yaitu budaya, politik dan komunikasi. Saat ini di level internasional kita banyak membaca liputan tentang Hilary Clinton sebagai calon presiden Amerika Serikat. Di level lokal baru-baru ini, masyarakat kita diramaikan dengan pemberitaan tentang Nara Masista dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York, September 2016. Ramainya perbincangan terkait aktivitas politik kedua perempuan tersebut menarik untuk dibahas dari sudut pandang gender sebagai sebuah isu tentang bias gender dalam pemberitaan aktivitas politik perempuan di media. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui analisis isi, wawancara mendalam dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat bias gender dalam pemberitaan tentang kaum perempuan di media yang direpresentasikan melalui penggunaan bahasa verbal maupun beragam simbol-simbol dalam budaya patriarki.

Kata kunci ; gender, perempuan, politik, patriarki dan media

PENDAHULUAN

Bulan September 2016, sebagian masyarakat Indonesia ramai membicarakan pemberitaan media tentang Nara Masista Rakhmatia. Nara adalah salah seorang diplomat Indonesia dalam Forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di New York, Amerika pada Sesi ke-71

KTT PBB yang digelar pada tanggal 13-26 September. Sejalan dengan pemberitaan Nara, beberapa bulan terakhir, dalam rangka pemilihan presiden Amerika, Hilary Clinton juga menjadi bahan pemberitaan dalam aktivitasnya sebagai kandidat presiden Amerika.

Kedua perempuan tersebut merupakan sosok yang berada diluar mainstream sosok perempuan dalam masyarakat patriarki maupun pandangan *malestream*. Merujuk pada posisi tersebut muncul pertanyaan tentang pemberitaan media terkait aktivitas politik Rakhmatia sebagai diplomat dan Clinton sebagai kandidat presiden.

Perempuan di dalam masyarakat umumnya hidup dalam ketidakadilan gender yang mengkontruksi dirinya. Gender adalah kontruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Kontruksi sosial yang bias gender adalah ketika masyarakat menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Perempuan bukan manusia lain dari laki-laki akan tetapi dia ada untuk kepentingan laki-laki dan tidak berlaku sebaliknya.

Nilai-nilai ini tertanam cukup lama dan telah melampaui beragam generasi. Secara tradisional perempuan terikat dalam beragam nilai yang mengsubordinasi dirinya dalam beragam nilai. Mereka ada dalam batasan ketat terkait nilai kepantasan maupun kebenaran yang diwariskan dari generasi kegenerasi. Batasan tersebut hadir karena dia perempuan. Perempuan yang berani mendebat laki-laki terutama suaminya dinilai tidak pantas atau tidak sopan. Perempuan yang keluar malam sendirian akan dinilai

bukan perempuan baik-baik, karena dalam masyarakat hal itu tidak dibenarkan.

Berdasarkan segala batasan yang ditetapkan secara budaya dan stigma yang dilekatkan pada perempuan maka ruang kehidupan kemudian dipilah-pilah, mana yang dapat dimasuki perempuan mana yang tidak. Secara umum ruang dan beragam aktivitas di ranah publik bukan untuk perempuan. Perempuan tempat idealnya adalah di ruang domestik, baik keberadaan dan aktivitasnya. Pemilahan ranah ini akhirnya juga terkait dengan isu yang dilekatkan sebagai urusan atau bidang laki-laki atau perempuan.

Masyarakat Barat menurut Beasley (1999) dalam Fajari (2010,12) memiliki formulasi *malestream* sebagai oposisi biner seperti dalam tabel berikut ;

TABEL 1. FORMULASI MALESTREAM

Oposisi Biner		Oposisi Biner	
Man	Woman	Freedom	Bondage
Subject	Object	Active	Passive
Culture, Society	Nature	Public	Private
Human	Animal	General, Universal	Particular
Reason	Emotion	Politic, Law Morality	Personal, Familia, Biological
Logic	Intuition	Presence	Absence
Selfhood, Being	Otherness, Non-being	Light	Dark
Independence	Dependence	Good	Evil
Autonomy	Interconnection, Nurture		

Politik adalah salah satu isu yang dalam batasan budaya bukan untuk perempuan. Politik adalah isu publik yang layaknya dikelola oleh laki-laki. Begitu pula beragam aktivitas politik yang bukan bernilai domestik. Tidaklah mengherankan apabila kemudian perempuan yang terkait dengan isu politik masih minim begitu pula keberadaanya di ruang publik.

Afirmatif action adalah salah satu kebijakan yang memberi peluang bagi perempuan berkiprah di dunia politik atau secara khusus di parlemen. Kebijakan tersebut ditetapkan terkait dengan minimnya perempuan yang menjadi anggota parlemen. Menurut penelitian *Woman Research Indonesia* (WRI, 2009) kebijakan afirmatif action, secara signifikan menaikkan prosentasi perempuan di Parlemen.

Walaupun dalam penelitian yang sama WRI menyatakan beberapa hambatan yang dihadapi caleg

perempuan yaitu 1) perempuan sudah kalah start dalam politik dengan laki-laki, 2) perempuan memiliki beban yang berlapis milik perempuan (privat, publik dan komunitas), 3. Perempuan umumnya memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, 4). Pendidikan politik yang dimiliki perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, 5) terdapat label nilai patriarki lewat budaya dan agama terhadap perempuan (WRI, 2009).

Perempuan dalam budaya patriarki pada umumnya dikonstruksikan secara sosial dan politik untuk menyanggah peran, mengemban karakter serta berperilaku pada “ruang gerak” yang dinamai ranah privat (pribadi). Kadarnya memang bervariasi dari yang ekstrim eksklusif hingga yang lebih moderat serta yang lebih cair berfusi. Walaupun kadarnya berbeda-beda, namun semuanya tetap bersifat menghambat dalam arti tidak membiasakan perempuan untuk mampu berkiprah pada ranah publik. Ada semacam hadangan sosial-politik yang membuat perempuan harus menggandakan modal dan daya yang harus dikeluarkan lebih berat dan pelik dibandingkan dengan laki-laki saat memasuki dunia politik (.

Simone De Beauvoir dalam salah satu tulisan di bukunya menggambarkan sosok manusia perempuan. Filsuf Perancis itu mengungkapkan ‘*one is not born, rather becomes a women*’ perempuan tidak semata-mata dilahirkan, perempuan adalah proses menjadi (Prabasmoro dalam Tong, 2006: xiv).

Proses “menjadi” seperti yang dikemukakan oleh De Beauvoir menggambarkan dinamika seorang manusia menjadi perempuan, karena seorang perempuan lebih terikat pada berbagai proses konstruksi sosial tentang dirinya. Beragam hambatan yang dimiliki mereka berkelindan dengan potensi yang mereka miliki dan dinamikanya sangat tergantung dari konteks sosial tempat mereka berada. Oleh karena itu proses ‘menjadi’ dipahami bukan sesuatu yang bersifat general akan tetapi sangat dinamis, kontekstual dan tidak dapat menafikan perempuan sebagai ‘diri’.

Berdasarkan beberapa studi dan pemikiran sebelumnya maka keberadaan perempuan dan laki-laki dimaknai secara berbeda baik dalam kerangka pemikiran yang bias gender dalam masyarakat patriarki. Hal ini terbukti dengan beragam batasan yang dilekatkan pada perempuan. Selain itu terdapat pandangan laki-laki dan perempuan dalam oposisi biner yang saling berlawanan antara laki-laki dengan perempuan seperti dalam kata-kata *reason-emotion, independence-dependence*.

Realitas yang terjadi terkait dengan partisipasi

perempuan dalam politik menurut penelitian WRI menunjukkan tingkat yang lebih rendah dari laki-laki. Hal ini disimpulkan oleh WRI salah satunya karena perempuan sudah kalah start dari laki-laki. Pemahaman tersebut melahirkan kebijakan *afirmatif action* untuk perempuan dalam politik.

Studi ini melihat aktivitas politik perempuan dari sudut pandang yang berbeda. Studi ini melihat bagaimana media mengangkat perempuan dalam aktivitas politiknya. Melalui studi ini diharapkan ditemukan data-data tentang nilai-nilai patriarki dan formulasi *malestream* yang mewarnai pemberitaan kasus Nara Masista Rakhmatia (diplomata Indonesia) dan Hilary Rodham Clinton (kandidat presiden Amerika Serikat).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini bersifat kualitatif dengan teknik analisis isi. Analisis isi yang dilakukan bersifat naratif. Analisis isi dilakukan terhadap berita di media online dengan pertimbangan memiliki sebaran yang cukup massif dan cepat.

Unit observasi dalam penelitian ini adalah berita media online tentang Nara Masita dan Hilary Clinton pada tanggal 29 September 2016. Pemilihan berita dilakukan berdasarkan pemilihan berita pada berita yang muncul dalam halaman pertama hasil *googling* di google sebagai *search engine* yang paling banyak digunakan. Unit analisis adalah framing berita di media online tentang aktivitas politik perempuan.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis isi teks berita yang terpilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Studi literatur juga digunakan untuk memperoleh data dukung yang dapat memperkaya data yang diperoleh dari pemberitaan media untuk memperkuat analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap pemberitaan aktivitas politik perempuan dalam kasus pemberitaan di media online tentang Rakhmatia dan Hilary.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melakukan analisis terhadap pemberitaan Nara Masista Rakhmatia dan Hilary Clinton di media online. Analisis terhadap kasus tersebut digunakan untuk melihat bias gender dalam kedua pemberitaan terhadap kedua isu tersebut.

Pemberitaan Nara Masista Rakhmatia

Terdapat ribuan berita terkait dengan kata Nara Masista Rakhmatia - diplomat, saat kita melakukan pencarian melalui *search engine, google*.

Pemberitaan tentang Nara yang kemudian banyak yang membicarakan dan menjadi viral di media sosial adalah terkait jawaban Nara terhadap tuduhan adanya pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua dan Papua Barat di Forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di New York, Amerika pada Sesi ke-71 KTT PBB. Tuduhan itu dilontarkan oleh dua Presiden dan empat Perdana Menteri dari enam Negara Pasifik yakni Vanuatu, Solomon Island, Nauru, Tonga, Tuvalu dan Marshall Island. Selama tidak kurang dari 4 menit Nara menjawab tuduhan tersebut dan menjelaskan posisi serta komitmen Pemerintah Indonesia terhadap upaya penegakan HAM¹.

Penelitian ini memilih 10 berita terawal dalam list hasil mesin pencari Google. Berita terkait dengan isu tersebut mencakup berita-berita dari media online yaitu newsth.com solo.tribunnews.com, beritatagar.id, detik.com, babatposts.com aktualita.co, okzone.com, masterberita.com, dan liputan6.com.

Pemberitaan yang terpilih adalah judul berita media online tanggal 29 September 2016, tentang Nara Masista Rakhmatia adalah sebagai berikut.;

- 1) "Inilah Nara Masista Rakhmatia, Diplomat Cantik RI yang Sukses 'Tampar' Mulut 6 Pemimpin dunia di PBB (newsth.com).
- 2) "Mengenal Nara Masista Rakhmatia Diplomat Indonesia yang Lawan Serangan Delegasi 6 Negara Pasifik (solo.tribunnews.com).
- 3) Nara Masista , Diplomat Muda di Simpang Pujian dan Kritik (beritatagar.id).
- 4) "Nara Masista Rakhmatia Diplomat RI di PBB ini bikin Netizen terkesima" (babatpost.com).
- 5) "Profil Nara Masista Rakhmatia, Diplomat Indonesia yang Memarahi 6 Negara di PBB" (aktualita.co).
- 6) Nara Rakhmatia, Diplomat cantik Indonesia 'ini tampar' 6 Pemimpin Negara. (okezone.com).
- 7) "Kemlu : Diplomat Muda Nara Rakhmatia Tunjukan Ketegasan Kedaultan RI". (detiknews.com).
- 8) "Nara Masista Rakhmatia, Cewek Cantik Yang berani 'hajar' "6 pemimpin dunia" (www.masterberita.com).

[1] ¹ www.newsth.com//berita-"Inilah Nara Masista Rakhmatia, Diplomat Cantik RI yang Sukses""Tampar' Mulut 6 Pemimpin dunia di PBB

- 9) "5 Fakta Nara Masista, Diplomat Muda yang jadi Singa Podium di PBB" (Liputan6.com).
- 10) "5 Gaya Mencuri Perhatian Nara Rakhmatia Diplomat Cantik Indonesia". (Liputan6.com).

Empat dari 10 berita tertanggal 29 September 2016 di media online yang diobservasi dan membuat pemberitaan dengan judul yang memuat kata 'Cantik'. Tiga pemberitaan menyebut Nara sebagai 'Diplomat Cantik' dan terdapat satu judul pemberitaan yang menyebut Nara dengan kata 'Cewek cantik' dalam judul pemberitaannya.

Selanjutnya terdapat tiga pemberitaan yang menggunakan kata 'diplomat muda' untuk menyebut Nara dalam judulnya. Dua pemberitaan menyebut nara sebagai Diplomat Indonesia dan satu pemberitaan menyebutnya Diplomat RI.

Kata cantik menjadi sesuatu yang dianggap sangat penting untuk dilekatkan pada seorang diplomat perempuan. Kata 'cantik' menjadi kata keterangan untuk kata sebelumnya yaitu 'diplomat'. Sebagai sebuah profesi seorang diplomat bukanlah profesi peran 'kecantikan' menjadi sangat signifikan profesi di bidang hiburan misalnya artis, Diplomat adalah profesi yang mengharuskan kemampuan cukup tinggi baik dari penguasaan bahasa bebrapa asing maupun kecerdasannya untuk memahami kebijakan atau isu di bidang politik, ekonomi, budaya sebuah Negara atau hubungannya dengan Negara lainnya.

Artinya sosok Nara lebih dilihat sebagai perempuan dengan beragam stigma atau nilai yang dilekatkan pada tubuh perempuannya. Apakah secara fisik dia tergolong cantik atau tidak? Sebagai perempuan Nara dipandang sebagai objek yang perlu dinilai dari segi kecantikannya dibanding dengan kemampuan atau potensinya yang diwujudkan dalam status Nara sebagai Diplomat. Merujuk pada nilai-nilai patriarki maka Nara adalah seorang perempuan yang dinilai dari keberadaannya sebagai objek tontonan yang lebih dinilai dari aspek daya tarik fisiknya bukan 'kecerdasan'nya.

Pengakuan pada Nara sebagai diplomat juga lebih dilihat dari aspek usianya. Disatu sisi sebutan 'diplomat muda' dapat diartikan pujian. Akan tetapi disisi lain sebutan diplomat muda juga menjadikan kata 'muda' sebagai keterangan untuk kata diplomat yang sekali lagi tidak mencerminkan prestasi. Selain muda juga digunakan kata-kata junior yang keduanya baik muda atau junior bila dilekatkan pada sebuah profesi tidak mencerminkan 'prestasi atau keahlian'.

Kata muda dan junior bila dilekatkan kepada sebuah profesi menjadi kata yang justru mengurangi kredibilitas dari kemampuan seseorang dalam profesi tersebut. Diplomat muda atau diplomat junior menandai bahwa sebagai diplomat Nara dianggap belum matang atau ahli karena masih muda atau junior. Seseorang yang dikenal dalam profesi tertentu dan disebut sebagai senior umumnya merujuk pada keahlian yang dianggap sudah mempunyai seperti jurnalis senior, mahasiswa senior, pegawai senior dan lain-lain.

Begitu pula sebutan lain terkait dengan profesi Nara sebagai diplomat yaitu Diplomat RI. Kata RI dan Indonesia juga menjadikan Nara dalam profesinya tidak punya makna terkait dengan keahliannya. Kata "RI atau Indonesia" setelah kata diplomat hanya menjelaskan Negara diplomat tersebut.

Artinya secara linguistik dan gramatikal maka ditemukan 'kata-kata' yang dipilih media online dalam pemberitaannya tentang sosok Nara sebagai diplomat bersifat bias gender. Sebagai perempuan walaupun diplomat akan tetapi mereka tetap dinilai dari 'daya tarik fisiknya'. Sebagai Diplomat Nara juga bukan seorang yang 'ahli' karena masih muda atau belum matang dan juga masih 'junior'. Penulisan Nara Diplomat Indonesia atau RI, menegaskan bahwa sosok Nara hanya salah seorang diplomat dari Indonesia.

Pemberitaan liputan6.com pada tanggal 29 september 2016 tentang Nara dalam dua pemberitaannya membuat judul pemberitaan dengan menggunakan kata '5 fakta' dan '5 gaya, menarik untuk dianalisis dari perspektif gender.

Terkait 5 fakta tentang Nara yang kemudian diungkapkan dalam pemberitaan liputan6.com adalah fakta tentang Nara dengan urutan sebagai berikut ; 1) riwayat pendidikan, 2) sudah memiliki pasangan, 3) jenjang karir, 4) aktif di berbagai lembaga penelitian, dan 5) memiliki kemampuan bahasa asing yang mumpuni. Berdasarkan urutan yang disusun terkait fakta tentang Nara maka setelah diungkapkan pendidikan Nara yang kemudian dianggap sangat penting berikutnya adalah fakta bahwa Nara sudah punya pasangan.

Apabila merujuk pada point pertama terkait dengan pendidikan, pertanyaan yang bisa diajukan adalah apakah implikasi keberhasilan atau latar belakang pendidikan Nara yang mengagumkan, lulusan UI dan dua universitas di Luar Negeri kemudian menjadi dasar keberhasilan selanjutnya dari Nara yaitu 'sudah memiliki pasangan'? Sehingga 'sudah memiliki pasangan' harus diungkapkan setelah orang tahu fakta

pendidikan Nara. Mengapa setelah fakta tentang pendidikan Nara yang selanjutnya diungkapkan bukan jenjang karirnya, keaktifannya di berbagai lembaga penelitian atau kemampuan bahasa asingnya yang mumpuni?.

Berdasarkan urutan pengungkapan fakta tentang 'sudah memiliki pasangan' yang diletakan di urutan kedua setelah pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa pemberitaan ini banyak memuat nilai-nilai patriarki. Pemberitaan ini dapat dimaknai memberikan kerangka konstruksi bias gender yang berlaku dimasyarakat patriarki bahwa 'fakta penting yang menentukan nilai perempuan' termasuk yang pintar atau memiliki pendidikan yang sangat mengagumkan adalah menjadi seorang isteri dan memiliki anak. Jika Nara berpendidikan tinggi dan kebetulan belum menikah atau belum mampu melahirkan anak maka runtuhlah 'nilai Nara' karena dia tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat terhadap perempuan. Karena itu fakta 'sudah memiliki pasangan harus menempati' urutan pertama setelah keterangan pendidikan Nara.

Diletakannya fakta 'sudah memiliki pasangan' dalam urutan kedua setelah fakta 'riwayat pendidikan' juga menjadikan fakta sebelumnya yaitu 'riwayat pendidikan Nara yang mengagumkan, menjadi tidak penting. Mengapa tidak penting? Fakta 'riwayat pendidikan' menjadi tidak penting karena walaupun disebut pertama akan tetapi tidak menjadi dasar Nara untuk mendapatkan fakta 'sudah memiliki pasangan'. Tidak ada relevansinya antara hebatnya 'riwayat pendidikan' Nara dengan fakta bahwa Nara 'sudah memiliki pasangan'. Karena fakta 'sudah memiliki pasangan' bukan ditentukan dari keberhasilan pendidikan yang ditempuh atau kecerdasan seseorang.

Pemberitaan berjudul; '5 fakta...' dalam analisis gender merupakan berita dengan ideologi patriarki mengenai 'perempuan ideal' dalam masyarakat. Perempuan ideal dalam masyarakat patriarki adalah perempuan yang menjadi isteri dan menjadi ibu atau memiliki anak. Bagi masyarakat patriarki peran sebagai isteri dan ibu adalah pencapaian terbaik perempuan. Nilai perempuan tidak ditentukan oleh pendidikan yang dapat ditempuh, karir yang dapat dicapai, maupun keahlian yang dimiliki. Pemberitaan dengan judul '5 fakta tentang Nara...' merupakan proses yang bersifat ideologis terkait dengan transformasi nilai-nilai patriarki tentang peran perempuan dalam masyarakat.

Selain berita tentang '5 fakta' tentang Nara Liputan6.com dalam hari yang sama juga mengunggah berita tentang Nara dengan judul "5 Gaya Mencuri Perhatian Nara Rakhmatia Diplomat Cantik Indonesia". Judul pemberitaan liputan 6.com ini secara terbuka

langsung menyatakan bahwa apa yang dilakukan Nara hanyalah sebuah 'gaya' untuk menarik perhatian. Peristiwa itu tidak diletakan dalam kerangka peristiwa politik antar negara yang cukup penting.

Sebagai diplomat Nara tidak dilihat sedang menjalankan tugas negara dalam menjaga integritas dan kedaulatan negaranya dalam pergaulan antar bangsa. Masih terdapat anggapan bahwa Pemerintah Indonesia belum dapat mengatasi atau menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua akan tetapi sebagai Diplomat Nara harus menyikapinya. Nara menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi usaha untuk mengupayakan penegakan HAM lebih banyak dibanding negara yang menggugat Indonesia, seperti diungkapkan dalam jawabannya di forum tersebut ;

Indonesia sudah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen utama HAM, semuanya terintegrasi dalam sistem hukum nasional kami dibanding hanya empat oleh negara Kepulauan Solomon, dan lima oleh negara Vanuatu.

Sebagai diplomat Nara menjalankan tugasnya dan cara yang diambilnya adalah menjelaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi upaya penegakan HAM dalam pergaulan internasionalnya. Sebagai Diplomat tidak mungkin Nara mengancam pemerintahnya sendiri di forum internasional. Secara formal dia menegaskan bahwa forum tersebut bukan saatnya untuk membahas isu yang dipertanyakan.

Apa yang dilakukan Nara jelas bukan sekedar gaya akan tetapi mewakili negaranya dalam hubungan internasional pada forum resmi antar bangsa. Aktivitas Nara adalah aktivitas politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Akan tetapi pemberitaan liputan6.com sebagai media mengkonstruksinya sebagai sesuatu yang tidak bernilai politis akan tetapi sekedar 'gaya' untuk menarik perhatian. Frame berita itu seolah-olah lebih cocok untuk seorang perempuan yang lebih dilihat dari ke-belia-annya dan kecantikannya. Karena belia dan cantik lebih sesuai dilekatkan pada sosok seorang perempuan yang kemudian digunakan 'untuk' menarik perhatian atau menjadi tontonan. Begitulan peran perempuan dimaknai dalam nilai-nilai budaya patriarki atau formulasi *malestream* yang bias gender.

Selanjutnya pemberitaan berjudul "Nara Masista, diplomat muda di simpang pujian dan kritik" juga menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Pemberitaan ini pada dasarnya memiliki frame yang hampir sama dengan penyebutan Nara sebagai 'diplomat muda' atau 'diplomat junior'. Pada pemberitaan berjudul "Nara Masista, Diplomat Muda di Simpang Pujian dan Kritik", isi pemberitaan disusun dengan framing berita

yang menempatkan posisi Nara sebagai diplomat memiliki banyak kelemahan dan bukan sesuatu yang layak dipuji. Di dalam isi berita tersebut, pada awal pemberitaan, redaksi menuliskan ;

“Alih-alih dijawab seorang pejabat senior, Indonesia justru memberikan kesempatan pada diplomat belia untuk menyampaikan sikap pemerintah. Nara pun berbicara selama lebih kurang empat menit di hadapan majelis”

Kata “alih-alih” dalam bahasa Indonesia hampir sama dengan arti pernyataan ‘bukannya dilakukan oleh...akan tetapi justru dilakukan oleh...’. Dengan kata lain penggunaan kata ‘alih-alih’ untuk membahas situasi Nara adalah menandai adanya situasi yang seharusnya tidak terjadi. Secara tidak langsung pemberitaan itu sudah membuat frame bahwa seharusnya pihak Indonesia tidak meminta Nara untuk berbicara mewakili jawaban Indonesia dalam forum tersebut. Tentu saja selain karena Nara adalah diplomat yang masih ‘belia’. Kata belia juga digunakan untuk menggantikan kata muda yang lebih merujuk pada ‘perempuan’ dibanding laki-laki. Artinya Nara adalah perempuan ‘belia’ yang belum pantas mendapat kesempatan sepenting itu.

Diawali dengan kerangka ideologi seperti itu maka kutipan-kutipan dari beberapa pendapat yang dimuat dalam berita tersebut semakin menegaskan framing berita yang dibangun. Kutipan pertama adalah status facebook seorang perempuan bernama Alina. Isi berita menuliskan hal berikut.

“dalam statusnya, Alina memuji strategi diplomasi pemerintah Indonesia, dengan mengirim seorang diplomat junior untuk menjawab kritik dari enam kepala pemerintahan. Alina pun menyebut penampilan Nara bak angin segar, yang menunjukkan kaderisasi diplomat di Kemlu berjalan baik”.

Selanjutnya dikatakan bahwa status Alina Mahamel (tanpa keterangan tentang Alina ini siapa) menjadi viral yang mendapat likes dari 1500 orang dan di share oleh 700 orang. Akan tetapi setelah kutipan pendapat Alina tersebut, pemberitaan dilanjutkan dengan kutipan status facebook Made Supriatma yang disebutkan sebagai peneliti yang langsung menyerang keputusan untuk menggunakan Nara sebagai pembicara dalam forum tersebut.

Pemaparan Redaksi tentang apa yang diungkapkan Made dalam statusnya adalah sebagai berikut :

“Lebih kurang, Made mengatakan, Indonesia telah melakukan penghinaan kepada negara-negara Pasifik dengan menampilkan diplomat junior

untuk menjawab pernyataan para kepala pemerintahan negara-negara”

Selain kutipan di atas masih terdapat 4 alinea yang berisi pandangan Made yang mengkritik tampilnya Nara dan juga hal yang disampaikan oleh Naras, dalam forum PBB tersebut.

Belum cukup dengan mengutip pandangan Made sebagai seorang peneliti yang dipertentangkan dengan pendapat atau pujian Alina -yang bukan siapa-siapa-, terhadap Nara, selanjutnya dirujuk pula pendapat dua pelawak yang cukup dikenal yaitu Arie Kriting dan Ernst Prakarsa.

Walaupun mereka berdua bukan peneliti atau pengamat hubungan internasional maupun politik, akan tetapi publik lebih mengenal Arie Kriting dan Erns Prakarsa dibanding Alina Mahel. Redaksi kemudian mengutip pendapat Arie Kriting yang meremehkan Nara dalam ungkapan berikut:

"Nona ini sudah pernah ke Papua? Sudah riset? Kalau memang bangsa kita, sebaik itu mengenai HAM, Munir masih hidup," sindir @Arie_Kriting, yang dikenal dengan gaya komedi khas Indonesia Timur.

Selanjutnya sindiran terhadap tidak pantas apa yang Nara lakukan dipuji atau dianggap sebagai sebuah hal yang membanggakan sebagai prestasi seorang diplomat muda yang cerdas, dimuat pula kutipan dari tulisan Erns Perkasa di media sosial, yang menggugat kebenaran ucapan Nara dalam forum tersebut, dalam tulisan berikut :

"Komitmen Indonesia terhadap HAM tidak perlu dipertanyakan lagi, *she said*. Justru rapor paling merah Jokowi sampai saat ini adalah soal HAM,"

Analisis terhadap sepuluh pemberitaan tentang Nara Masista Rakhmiati telah mengungkapkan beberapa tanda, symbol, dan peristiwa yang mengkonstruksi makna perempuan yang layak dikau dan dikembangkan di dalam masyarakat.

Pemberitaan Hilary Clinton

Analisis terhadap pemberitaan Hilary Rodham Clinton di media online mencakup berita-berita berikut ;

- 1) Hillary Clinton's Beijing Speech on Women Resonates 20 Years Later
- 2) Donald Trump's Stamina Attack on Hillary Clinton Stirs Talk of Gender Bias
- 3) Fox New Reporter Jennifer Griffin Blasts Donald Trump's Claims of Widespread Media Bias For Clinton
- 4) 'Nasty Woman' is an Insult We Know Only too Well

5) US Newspapers Overwhelmingly Favor Clinton, none Back Trump.

Hillary Diane Rodham Clinton, atau Hillary Clinton, adalah politisi dari Partai Demokrat yang kini juga menjadi kandidat presiden Amerika Serikat. Bila nanti ia memenangkan pemilihan presiden pada hari Selasa, 8 November 2016, maka ia akan tercatat sebagai Presiden perempuan pertama yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Sebelum akhirnya maju menjadi kandidat presiden, ia juga pernah menjabat sebagai sekretaris negara pada kepemimpinan era presiden Barack Obama.

Pada tahun 1995, saat ia diberi kesempatan oleh United Nation (UN) untuk berpidato dalam konferensi perempuan sedunia bertajuk "Fourth World Conference on Women: Action for Equality, Development and Peace" di Beijing, China, ia memberikan salah satu pernyataan yang cukup kontroversial dan terkenal yaitu "hak asasi manusia adalah hak perempuan, dan hak perempuan adalah hak asasi manusia"².

Pernyataan Hillary Clinton tersebut merupakan salah satu pernyataan yang menunjukkan posisinya dalam isu gender dan feminisme. Selepas pidato tersebut beritanya yang berkembang di Amerika Serikat menunjukkan beberapa tanggapan yang berbeda. Beberapa media menulis bahwa apa yang dikatakannya merupakan sebuah hal yang berani dan menginspirasi, akan tetapi ada pula media-media yang mengatakan bahwa ia hanya mengatakan hal tersebut demi sebuah ketenaran dan juga kepentingan politik. Beberapa politis konservatif bahkan menuduh dirinya sebagai seorang "feminis radikal" dan mengatakan bahwa ia membawa beberapa agenda tentang perempuan yang dianggap tabu.

Setelah menyatakan diri untuk maju sebagai kandidat presiden dari partai demokrat, pemberitaan mengenai dirinya meningkat dengan sangat tajam. Beberapa berita dari media yang dikenal memiliki agenda konservatif terkadang menyudutkan dirinya sebagai seseorang yang tidak mengurus keluarganya dengan baik. Misalnya dengan mengeluarkan beberapa isu terutama terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh suaminya yang juga presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Bill Clinton. Seringkali pula media-media konservatif ini memberikan pernyataan mengenai kapabilitas Hilary sebagai seorang

perempuan yang dianggap tidak akan mampu mengurus berbagai permasalahan politik.

Masih terdapat beberapa pemberitaan dan komentar politis mengenai Hillary Clinton yang bersifat bias gender. Hal ini juga terutama dikarenakan adanya beberapa komentar dari Donald Trump yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial secara terbuka mengenai beberapa keburukan Hillary Clinton. Misalnya saja, ketika beberapa waktu lalu Hillary diberitakan mengalami masalah kesehatan, Donald Trump mengeluarkan pernyataan bahwa Hillary "tidak terlihat" seperti presiden, dan tidak akan memiliki stamina untuk mengalahkan ISIS atau pihak-pihak lain yang akan mengancam Amerika Serikat. ia membandingkan Hillary dengan dirinya yang "lebih pantas" untuk menjadi presiden. Pemberitaan tentang Hillary saat itu memperlihatkan bahwa Trump dan beberapa media yang konservatif lainnya menyerang Hillary sebagai seseorang yang dianggap lemah secara fisik dibandingkan dengan Donald Trump³. Namun menariknya, meskipun Trump dikenal memang sering mengeluarkan pernyataan yang bernada merendahkan, saat ini, salah satu narasi yang sedang dibangun oleh Donald Trump adalah bahwa pemberitaan media sangat bias dalam mendukung pencalonan Hillary Clinton. Ia mengatakan bahwa media banyak membentuk citra positif Hillary dan sebaliknya menjelek-jelekkan dirinya⁴.

Dalam acara debat presiden (19/10) yang banyak ditayangkan secara langsung oleh media, Donald Trump kembali mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversial dengan mengatakan Hillary sebagai "Nasty Woman" atau seorang "Perempuan yang buruk"⁵. Meskipun saat itu pernyataannya tidak ditanggapi langsung oleh Hillary, namun beberapa saat setelah debat berakhir banyak media yang kemudian kembali menyerang Trump sebagai seseorang yang gemar melakukan intimidasi yang bersifat bias gender. Hal ini memperlihatkan bahwa saat ini beberapa media besar di Amerika Serikat mulai melakukan pemberitaan yang terkesan positif dan perlahan menghilangkan bias-bias terkait gender dalam pemberitaan Hillary Clinton.

Salah satu media terbesar di Amerika Serikat, New York Times (NYT) misalnya, telah secara terbuka menyatakan diri untuk mendukung pencalonan Hillary. Dalam tulisannya, NYT memberikan pernyataan mengenai berbagai nilai positif yang dimiliki oleh

² <http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2015/09/05/20-years-later-hillary-clintons-beijing-speech-on-women-resonates/>

³ <http://www.dailynews.com/government-and-politics/20160823/donald-trumps-stamina-attack-on-hillary-clinton-stirs-talk-of-gender-bias>

⁴ <http://people.com/tv/fox-news-reporter-jennifer-griffin-blasts-donald-trump-claims-media-bias-favoring-hillary-clinton/>

⁵ <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/20/nasty-woman-insult-hillary-clinton>

Hillary Clinton dan juga mengatakan bahwa saat ini sangat penting bagi masyarakat untuk mendukung dirinya menjadi presiden perempuan pertama dan mengalahkan Donald Trump sebagai kandidat presiden dari partai republikan. Secara spesifik NYT mengatakan bahwa dukungan mereka bersumber dari kapabilitas intelektual Hillary dan pengalamannya selama berkarir di pemerintahan maupun organisasi publik lainnya.

"Our endorsement is rooted in respect for her intellect, experience, toughness and courage over a career of almost continuous public service, often as the first or only woman in the arena" (NYT Editorial Board)

Namun saat ini mulai muncul beberapa kecurigaan mengenai bias media yang besar kepada Hillary Clinton. Dalam penelusuran berita terkait dirinya yang dilakukan melalui *Search Engine GOOGLE* selama bulan oktober, beberapa pemberitaan mengenai Hillary Clinton kini mulai banyak didominasi oleh pemberitaan positif mengenai dirinya. Mengikuti jejak NYT yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Hillary, beberapa media besar lain di Amerika Serikat seperti Washington Post, NBC News, Boston Globe, CBS News, dll juga saat ini mulai membuat frame pemberitaan yang mendukung Hillary dan menyudutkan Trump. Misalnya saja terlihat dari beberapa judul *Headline* yang sama⁶.

Beberapa hal yang telah dipaparkan di atas memperlihatkan bagaimana realitas politik sangat mempengaruhi pemberitaan yang terjadi di media. Meskipun saat ini semakin jarang media yang memberitakan Hillary dengan sentimen negatif dan bersifat bias gender, dapat dikatakan bahwa hal tersebut belum tentu disebabkan oleh adanya pengetahuan dan kesadaran gender yang cukup baik pada beberapa media di Amerika Serikat, namun lebih kepada situasi politik terkait pemilihan presiden yang saat ini sedang berlangsung.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap beberapa pemberitaan media online yang telah dipaparkan maka dapat dimaknai bahwa pemberitaan tentang Nara Masista Rakhmatia maupun Hilary Clinton masih sarat dengan symbol-simbol dan tanda-tanda yang bias gender serta mengandung nilai-nilai patriarki.

Perempuan cerdas seperti Nara dan aktivitasnya di Forum PBB, didalam pemberitaan media online umumnya belum berhasil mendapat penilaian yang

memadai dilihat dari pendidikan yang berhasil dia tempuh sebagai dasar keberhasilannya, kemampuannya membangun karirnya, kompetensi, keahliannya dan kecerdasannya sebagai diplomat dalam menjalankan tugasnya.

Keberhasilan Nara adalah karena dia telah memiliki pasangan atau menjadi seorang isteri, dan telah melahirkan dua anak serta memiliki kecantikan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menarik perhatian atau tontonan dengan gayanya. Keberadaan Hilary sebagai kandidat presiden juga sering dikaitkan dengan tugasnya sebagai ibu yang harus mengurus keluarganya, dan juga keberadaannya sebagai isteri dari Bill Clinton.

Pemberitaan tentang Nara dan Hilary menyiratkan makna bahwa kemampuan atau keberhasilan seorang perempuan dalam ranah politik yang dianggap sebagai ranah kaum laki-laki di dalam masyarakat patriarki, kadangkala masih sulit diterima.

Perempuan lebih sulit untuk dapat diakui keberhasilannya diluar perannya sebagai ibu atau isteri didalam masyarakat. Perlu waktu yang cukup lama untuk dapat mengubah pemberitaan media yang negatif menjadi lebih positif tentang politisi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Prabasmoro, Priyatna. Aquarini, 2006. *Kajian Budaya Feminis: Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Fajaria, Indah, *Posfeminis Era Spice Girls; Analisis atas Sepuluh lirik lagu dan Penampilan panggung Spice Girls*. [http://lib.ui.ac.id/file?File%20digital%2026623-Posfeminis%20era-Abstrak.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?File%20digital%202026623-Posfeminis%20era-Abstrak.pdf)
- Chozick, A. (2016, September 5). *New York Times*. Diambil dari New York Times Politics: http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2015/09/05/20-years-later-hillary-clinton-beijing-speech-on-women-resonates/?_r=0
- Colvin, J. (2016, Agustus 23). *Dailynews.com*. Diambil dari <http://www.dailynews.com/government-and-politics/20160823/donald-trumps-stamina-attack-on-hillary-clinton-stirs-talk-of-gender-bias>
- Mahdawi, A. (2016, October 20). *Guardian*. Diambil dari <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/oct/20/nasty-woman-insult-hillary-clinton>
[news.okezone.com/.../Nara_Rakhmatia, Diplomat cantik Indonesia 'ini tampar' 6 Pemimpin Negara](http://news.okezone.com/.../Nara_Rakhmatia,_Diplomat_cantik_Indonesia_'ini_tampar'_6_Pemimpin_Negara)

⁶ <https://www.rt.com/usa/362298-media-endorsing-hillary-clinton/>

- solo.tribunnews.com/.../m“Mengenalkan Nara Masista Rakhmatia Diplomat Indonesia yang Lawan Serangan Delegasi 6 Negara Pasifik”
- Synder, B. (2016, Oktober 10). *RT News*. Diambil dari <https://www.rt.com/usa/362298-media-endorsing-hillary-clinton/>
- Triggs, C. (2016, October 19). *Fox News*. Diambil dari <http://people.com/tv/fox-news-reporter-jennifer-griffin-blasts-donald-trump-claims-media-bias-favoring-hillary-clinton/>
- www.aktualita.co/29/9/2016/“Profil Nara Masista Rakhmatia, Diplomat Indonesia yang Memarahi 6 Negara di PBB”
- www.babatpost.com./29/9/2016/ Berita › “Nara Masista Rakhmatia Diplomat RI di PBB ini bikin Netizen terkesima”
- <https://beritagar.id/artikel/berita/29/09/2016/>”Nara Masist, Diplomat Muda di Simpang Pujian dan Kritik”
- news.detik.com/indeksfokus/29/9/2016/Kemlu : Diplomat Muda Nara Rakhmatia Tunjukan Ketegasan Kedaultan RI.
- www.liputan6.com.tag/29/9/2016/“Gaya Mencuri Perhatian Nara Rakhmatia Diplomat Cantik Indonesia.
- www.liputan6.com.tag/29/9/2016/“Fakta Nara Masista, Diplomat muda yang jadi singa Podium di PBB.
- www.masterberita.com ›” Nara Masista Rakhmatia, Cewek Cantik Yang berani ‘hajar “6 pemimpin dunia”
- www.newsth.com/.../berita-“Inilah Nara Masista Rakhmatia, Diplomat Cantik RI yang Sukses”“Tampar’ Mulut 6 Pemimpin dunia di PBB
- Women Research Insitute, 2009, Studi Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif 2009 di DPR RI, DPRD Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram dan DPRD Kabupaten Minahasa Utara. http://www.wydii.org/Downloads/Ringkasan_Laporan_Penelitian_Perempuan_dan_Politik.pdf
- Women Research Institute, 2011, Representasi Politik Perempuan, <http://wri.or.id/publikasi/jurnal/114-representasi-politik-perempuan#.WApp0pN96Dc>

**Dampak Pemberdayaan Perempuan dalam Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
(Studi Kasus Kualitas Sikap dan Perilaku Perempuan dalam Membina Tumbuh Kembang Anak dan Remaja di Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut)**

Nina Karlina
Mas Halimah
Administrasi Publik, FISIP UNPAD
karlina_nina@yahoo.com

Abstrak

Desa Sindang Sari adalah desa yang berada dikaki Gunung Cikuray wilayah Kecamatan Cigedug. Desa ini merupakan desa unggulan Kabupaten Garut dalam program peningkatan peranan wanitanya. Ada tiga kelompok pedesaan yang dinilai pada program peningkatan peranan wanita ini. Desa yang berada di wilayah pegunungan, perkotaan dan wilayah pantai. Desa Sindangsari termasuk desa yang berada di wilayah pegunungan, Program P2WKSS merupakan suatu program yang dilaksanakan dalam upaya menciptakan, meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan keluarga dan lingkungan sosial yang melibatkan seluruh masyarakat baik itu laki-laki terlebih lagi perempuan. Salah satu tujuan dari program ini diantaranya untuk meningkatkan status kesehatan perempuan, meningkatkan status pendidikan perempuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dampak dari pemberdayaan perempuan ini memberi perubahan sikap dan perilaku perempuan menjadi lebih baik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan teori dari Mardikanto tentang Langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat, yaitu: seleksi wilayah, sosialisasi pembedayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan proses pemandirian masyarakat. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), pendekatan intepretasi, dan studi pustaka. Dalam tes validitas data, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan check, re-check, and crosscheck untuk data yang diperoleh dari teori, metodologi, dan persepsi penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Desa Sindang Sari lebih dioptimalkan pada usaha ekonomi produktif. Peningkatan status kesehatan apalagi pendidikan belum berjalan dengan optimal. Indikator keberhasilan program lebih dominan melihat

peningkatan pendapatan, belum mengukur lebih optimal pada kualitas sikap dan perilaku perempuan sebagai individu dan sebagai ibu. Bahkan terjadi perubahan sikap dan perilaku karena ada perubahan peran dalam keluarga.

Kata kunci : *dampak pemberdayaan, perempuan, program P2WKSS, sikap, perilaku* ,

PENDAHULUAN

Perempuan Indonesia perlu ditingkatkan perannya dalam pembangunan mengingat 49,9 % dari jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Dari jumlah perempuan tersebut, 65 % berada pada usia produktif 15 – 64 tahun dan belum berperan optimal karena kualitas hidupnya yang masih rendah. Potensi perempuan merupakan asset nasional yang besar, yang harus dapat dikembangkan untuk membangun Indonesia. Jika penduduk perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya, maka akan menjadi beban bangsa serta mengurangi nilai hasil pembangunan yang telah dan akan dicapai.

Optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berperan dalam pembangunan. Pembangunan yang berperspektif gender berdasarkan pada prinsip utama kesamaan memperoleh akses, peran, kontrol dan manfaat serta kesempatan berpartisipasi dalam program pembangunan harus menjadi perhatian bersama.

Delapan target pembangunan millenium yang tertera dalam Deklarasi Millenium

- Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.
- Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
- Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- Menurunkan Angka Kematian Bayi.
- Anak dan ibu Bersalin.

- Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya.
- Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
- Mengembangkan kemitraan global.

Salah satu upaya pemerintah bersama masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).

Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat desa dan/atau kelurahan, dengan perempuan sebagai penggerak. Sejalan dengan hal ini berbagai tuntutan program pembangunan Pemberdayaan Perempuan, kesejahteraan dan Perlindungan Anak menjadi mandat lembaga, serta tuntutan MDGs dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang harus dituntaskan, maka program P2WKSS perlu direvitalisasi.

Tujuan Umum Program Terpadu P2WKSS adalah meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan status kesehatan perempuan
2. Meningkatkan status pendidikan perempuan
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam usaha ekonomi produktif
4. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelestarian lingkungan hidup
5. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan masyarakat
6. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam pemahaman wawasan kebangsaan

Sasaran program P2WKSS adalah perempuan dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah (Pra Sejahtera/KS I alasan ekonomi) dengan jangkauan program meliputi 100 kepala keluarga dengan prioritas rawan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Kriteria KK binaan adalah keluarga yang benar-benar miskin, berpendidikan rendah (terutama tidak mampu baca-tulis) memiliki perilaku kurang sehat..

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang gencar melakukan pembinaan P2WKSS.. Desa Sindang Sari adalah desa yang berada dikaki Gunung Cikuray wilayah Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut. Desa ini merupakan desa

unggulan Kabupaten Garut dalam program peningkatan peranan perempuannya. Ada tiga kelompok pedesaan yang dinilai pada program peningkatan peranan perempuan ini. Desa yang berada di wilayah pegunungan, perkotaan dan wilayah pantai. Desa Sindangsari termasuk desa yang berada di wilayah pegunungan, Kabupaten Garut memilih desa Sindang Sari sebagai desa binaan dalam Program P2WKSS dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga mengakibatkan SDM Masyarakat rendah pula;
2. Masih banyaknya rumah warga masyarakat yang tidak layak huni;
3. Sebagian besar masyarakat belum mempunyai jamban keluarga;
4. Halaman rumah yang belum tertata, kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan;
5. Masih terdapatnya lingkungan yang kumuh;
6. Kesadaran masyarakat terhadap swadaya dan Gotong Royong masih rendah;
7. Kurangnya pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan;
8. Sarana Air bersih masih kurang;
9. Kurang tergalinya potensi masyarakat maupun potensi alam untuk meningkatkan ekonomi keluarga (Usaha Ekonomi Keluarga)

Penelitian terdahulu yang dipelajari peneliti adalah tentang Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan (Studi di Lereng Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta) yang dilakukan oleh Hastuti dan Dyah Respati pada tahun 2009. Menurut Hastuti dan Dyah. 2009, diperlukan model pemberdayaan perempuan miskin agar perempuan miskin secara aktif mampu berpartisipasi dalam pemanfaatan sumberdaya perdesaan. Penguatan perempuan miskin merupakan inti pemberdayaan perempuan dan akan optimal apabila perempuan diberi kesempatan setara dengan laki-laki dalam pemanfaatan sumberdaya perdesaan. Pada tahap penelitian tahun pertama dilakukan pengembangan dan uji coba model pemberdayaan perempuan miskin berbasis pemanfaatan sumberdaya perdesaan daerah penelitian. Setelah model dikembangkan selanjutnya dilakukan implementasi ke wilayah penelitian. Dari implementasi model dilakukan analisis sebagai bagian dari umpan balik penelitian agar model yang dikembangkan efektif dengan jangkauan wilayah lebih luas untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan miskin berbasis pemanfaatan sumberdaya perdesaan.

Penelitian terdahulu yang kedua adalah tentang Studi Terhadap Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Garut oleh Amelia Hayati pada tahun 2007. Amelia Hayati, 2007 mengemukakan dalam penelitiannya bahwa semua pengusaha batik Garutan adalah perempuan, karena perempuan dikenal ekun, pandai memanfaatkan waktu luang dan kesempatan, gigih berusaha untuk menambah pendapatan keluarga, pandai dalam pengelolaan keuangan, pemasaran dan pengelolaan perusahaan kecil yang bersifat rumah tangga. Sehingga pemerintah memberdayakan perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus untuk meningkatkan PAD.

Penelitian yang ketiga mengenai pemberdayaan perempuan dalam program P2WKSS ini, penulis mempelajari tulisan thesis Dea Angkasa Putri Supardi 2014 dengan judul "*Pemberdayaan Perempuan Dalam Program P2WKSS di Desa Kejiwan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon*" Dea menjelaskan bahwa Desa Kejiwan merupakan desa juara 1 tingkat Nasional dalam Program P2WKSS nya. Dalam thesis Dea dikemukakan bahwa semua indikator tujuan Program P2WKSS sudah cukup baik, tetapi yang menjadi permasalahannya ternyata setelah Desa Kejiwan ini ditinggalkan oleh para pendamping program, kebiasaan buruk dilakukan lagi termasuk kemandirian perempuannya dalam berusaha menjadi menurun kembali.

Dea (2014) mengemukakan dalam kesimpulan bahwa kembalinya para perempuan ke pola hidup yang lama dikarenakan program P2WKSS yang tidak berkesinambungan dan proses pemandirian masyarakat yang seharusnya dilakukan pemerintah secara bertahap sampai benar-benar meninggalkan desa tersebut dalam kondisi yang sudah mandiri dan taraf hidup masyarakatnya pun meningkat, pada kenyataannya tidak dilakukan. Proses pemandirian masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab BPPKB sebagai leading sector program P2WKSS dengan melibatkan kader-kader PKK Desa dan memanfaatkan UPTD-UPTD terkait sebagai fasilitator. Sehingga proses pemberdayaan tidak terputus sampai program P2WKSS selesai tapi dapat terjadi kesinambungan. Selain itu, konsep pemerintahan milik masyarakat dalam reinventing government dimana lebih baik memberikan kewenangan pada masyarakat untuk melayani sendiri dari pada pemerintah yang memberikan pelayanan juga dapat tercipta.

Menurut Dea 2014, Hambatan dari perubahan sosial di Desa Kejiwan, diantaranya: cultural barriers (hambatan budaya), social barriers (hambatan sosial), organizational barriers (hambatan organisasional), dan psychological barriers

(hambatan psikologis). Berdasarkan hasil penelitian, hambatan organisasional inilah yang berperan sangat penting dalam keberlangsungan program P2WKSS pada saat implementasi atau pasca program selesai karena komunikasi dan pemandirian masyarakat yang terputus setelah program selesai dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dengan pemerintah desa Kejiwan. Dalam hal ini pemerintah gagal menciptakan komitmen pada masyarakat untuk tetap konsisten melakukan perubahan sosial.

Penelitian ini sebenarnya karena ketertarikan dari hasil penelitian ketiga thesis diatas yang hasilnya lebih mengedepankan pemberdayaan perempuan dengan cara meningkatkan kemandiriannya dalam menambah pendapatan keluarga. Jadi aspek ekonomi menjadi indikator dalam keberhasilan program. Penulis melihat pemerintah kabupaten kota lebih fokus mencapai tujuan P2WKSS dengan perbaikan fisik dan meningkatkan kemandirian perempuan dengan meningkatkan kemampuan perempuan mencari pendapatan untuk keluarga. Padahal dalam tujuan P2WKSS sebelum ekonomi yang produktif ada tujuan diatasnya yaitu peningkatan status kesehatan dan status pendidikan perempuan.

Desa Sindang Sari merupakan desa unggulan Kabupaten Bandung seperti halnya Desa Kejiwan di Kabupaten Cirebon. Penulis ingin mengetahui :

1. Bagaimana tahapan pemberdayaan perempuan dalam program P2WKSS di desa Sindang Sari kecamatan Cigedug Kabupaten Garut yang dilakukan oleh BPPKB kabupaten Garut?
2. Dampak apakah yang terjadi setelah pemberdayaan perempuan yang lebih menekankan kepada usaha ekonomi produktif dan keterlibatan dalam pembangunan fisik di desa Sindang Sari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut?

Konsep pemberdayaan merupakan konsep perubahan yang direncanakan (planned change). Perubahan sosial merupakan kajian dinamika sosial. Istilah perubahan sosial diambil dari bahasa Inggris, yaitu social change. Pada awalnya, perubahan sosial didefinisikan oleh Ibnu Khaldun dalam Martono sebagai berikut, "Masyarakat secara historis bergerak dari masyarakat nomaden menuju masyarakat (yang tinggal) menetap (disebut sebagai masyarakat kota)." (Martono, 2012 : 1-2).

Wan Hasim dalam Garna mengartikan, "Perubahan sosial sebagai sebaran penyesuaian yang berlaku kepada pola-pola interaksi antara individu-individu sebagai unit sosial dalam sebuah masyarakat." (Garna, 1992 : 13). Selanjutnya Moore dalam

Anwar mengartikan, “Perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial meliputi pola-pola perilaku dan interaksi sosial, termasuk norma, nilai, dan fenomena kultural.” (Anwar: 2007 : 51).

Adapun menurut Martono, “Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan.” (Martono, 2012 : 2). Mengenai perubahan sosial ini Sztompka menjelaskan, “konsep dasarnya mengenai perubahan sosial menyangkut tiga hal, yaitu: pertama, studi mengenai perbedaan; kedua, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda; dan ketiga, pengamatan pada sistem sosial yang sama. (Martono, 2012 : 2).

Selanjutnya Martono menjelaskan bahwa, “Untuk dapat melakukan studi perubahan sosial, kita harus melihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi objek yang menjadi fokus studi. Kedua, studi perubahan harus dilihat dalam konteks waktu yang berbeda, dengan kata lain harus melibatkan studi komparatif dalam dimensi waktu yang berbeda. Ketiga, objek yang menjadi fokus komparasi tersebut haruslah objek yang sama.” (Martono, 2012 : 2-3).

Martono juga menjelaskan, “Dimensi waktu dalam studi perubahan sosial meliputi konteks masa lalu (past), sekarang (present), dan masa depan (future).” (Martono, 2012 : 3). Studi perubahan sosial mengamati perubahan dengan kondisi masa lalu dan masa sekarang. Studi perubahan sosial juga dapat meliputi kondisi masa depan (future) atau melakukan proyeksi tentang masa yang akan datang dengan studi penelusuran sejarah, serta didukung dengan berbagai data (statistik) yang tersedia mengenai kondisi masa lalu dan sekarang.

Agar masyarakat mampu melakukan perubahan sosial, Hagen berpendapat bahwa, “Proses perubahan berkaitan erat dengan individu yang kreatif, yang menciptakan sejenis hubungan sosial khusus sepanjang waktu, untuk itu perubahan sosial takkan terjadi tanpa ada perubahan kepribadian.” (Anwar, 2007 :51). Teori Hagen tersebut, menempatkan pendidikan sebagai posisi yang strategis dalam perubahan sosial atau pembangunan. Menurut Hagen, “titik awal dari perubahan sosial adalah pendidikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan peran individu dan masyarakat melalui pemanfaatan potensi dirinya.” (Anwar, 2007:

Dalam melakukan pemberdayaan, Mardikanto menjelaskan ada empat tahap dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Seleksi Lokasi/Wilayah Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang

disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar memilih lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.
3. Proses Pemberdayaan Masyarakat Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:
 - a. Mengidentifikasi dan Mengkaji Potensi Wilayah Permasalahan, Serta Peluang-Peluangnya Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Proses ini meliputi:
 - Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya;
 - Persiapan penyelenggaraan pertemuan;
 - Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan;
 - Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
 - b. Menyusun Rencana Kegiatan Kelompok, Berdasarkan Hasil Kajian, Meliputi:
 - Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah;
 - Identifikasi alternative pemecahan masalah yang terbaik;
 - Identifikasi sumber daya yang tersedia untuk pemecahan masalah;
 - Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.
 - c. Menerapkan Rencana Kegiatan Kelompok Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk

dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

- d. Memantau Proses dan Hasil Kegiatan Secara TerusMenerus Secara Partisipatif (Participatory Monitoring And Evaluation/Pme) PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan tujuannya. PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian, dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaannya) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.
4. Pemandirian Masyarakat Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud self organizing dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat secara perlahan akan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Kapan waktu pemunduran tim fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan masyarakat. Walaupun tim sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai penasihat atau konsultan bila diperlukan oleh masyarakat. (Mardikanto, 2012: 125-127).

Pemahaman studi perempuan, di satu sisi dapat dilihat sebagai bidang kajian yang fokus kajiannya tentang perempuan di sisi lain dapat dilihat juga secara historis. Yaitu ketika muncul kesadaran akan ada hubungan-hubungan asimetris berdasarkan jenis

kelamin. Apabila demikian maka studi tentang perempuan menurut Supramudyo¹ dapat diidentifikasi sebagai:

1. Studi untuk memperoleh pemahaman tentang perkembangan hubungan-hubungan asimetris berdasarkan jenis kelamin, ras, dan kelas dalam masyarakat.
2. Studi untuk mencari strategi yang dapat merubah situasi hubungan asimetris kepada hubungan-hubungan yang lebih simetris. (Wibawa, 2009: 204).

Gender menurut Supramudyo, diartikan sebagai "sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan, dikonstruksi secara sosial dan kultural, membentuk relasi sosial yang membedakan fungsi, peran, dan tanggung jawab masing-masing jenis kelamin." (Wibawa, 2009: 206). Dalam perkembangan yang positif, keadilan gender terjadi ketika kedua belah pihak bisa saling mendukung untuk mencapai suatu konsensus dan kondisi kesetaraan. Tetapi yang lebih sering terjadi menurut Supramudyo adalah bias gender, dimana terjadi kondisi ketidakadilan yang dapat bersifat: Hubungan Asimetri Pria-Wanita dalam Politik dan Birokrasi. Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer.

1. Langsung, yaitu perbedaan perlakuan secara terbuka dan berlangsung, baik disebabkan perilaku/sikap, norma/nilai, maupun aturan yang berlaku.
2. Tidak langsung, seperti: peraturan sama, tapi pelaksanaannya menguntungkan jenis kelamin tertentu.
3. Sistemik, yaitu ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan yang bersifat membeda-bedakan. (Wibawa, 2009: 206).

METODE

Penelitian ini dilakukan di desa Sindang Sari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut. Desa Sindang sari memiliki luas Wilayah 300,080 hektar dengan kontur tanah pegunungan atau dapat diklasifikasikan sebagai tipe desa pegunungan yang terdiri dari 2 dusun, 3 Lingkungan 7 RW, dan 34 RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Cintanagara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukahurip, sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Ciparay, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Cisarupan. Jumlah penduduk Desa Sindang Sari sebanyak 6.727 jiwa dengan perempuan 3332 jiwa dan laki-laki 3395 jiwa yang terbagi dalam 420 kepala keluarga (KK). Di Desa Sindang sari merupakan tipe desa tertinggal dengan lokasi binaan P2WKSS sebesar 316 ha. Perempuan 206 jiwa dan laki-laki 218

jiwa. Rt binaan sebanyak 2 RT dan 1 RW. Jumlah KK binaan 144 KK. Keluarga Pra KS 108 KK. Keluarga KS tahap I berjumlah 4 KK, Keluarga KS II tidak ada dan Keluarga KS III + plus III berjumlah 2 KK.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantive yang berdasarkan data. Adapun rancangan penelitian bersifat deskriptif, yaitu menemukan fakta dengan interpretasi yang melukiskan sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil temuan. Pendekatan kualitatif dipakai untuk mengungkapkan secara komprehensif dan alami mengenai bagaimana pemberdayaan perempuan dalam program P2WKSS di desa Sindang Sari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut. Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data, sedangkan fokus penelitian ada pada peran informan dan pengalaman informan dan cara mereka memandang pemberdayaan perempuan. Informan juga dapat menggambarkan fenomena yang terjadi, hubungan sebab akibat, kecenderungan, dan budaya yang berkembang dalam proses pemberdayaan perempuan.

Peneliti juga mengedepankan aspek obyektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Selain itu merahasiakan identitas informan, sehingga konsekuensi dari hasil penelitian ini tidak berdampak pada informan yang telah memberikan informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini didapat berasal dari observasi langsung, catatan wawancara, rekaman wawancara, dan foto kegiatan yang dikemas dalam bentuk dokumen dan catatan peristiwa yang kemudian diolah menjadi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Perempuan di Desa Sindang Sari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut

a. Seleksi Lokasi/Wilayah

Desa Sindang Sari disahkan menjadi desa binaan P2WKSS Kabupaten Garut tahun 2015 melalui Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 147/Kep.227 Bappeda/2012 Tentang Penunjukan Desa Sindang Sari Kecamatan Cigedug Sebagai Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2015

Berdasarkan wawancara dengan informan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Garut, seleksi

lokasi P2WKSS Kabupaten Garut karena Kabupaten/Kota lain biasanya menunjuk lokasi yang tergolong sudah cukup baik dan sudah setengah jadi untuk dibina. Sedangkan seleksi lokasi P2WKSS di Kabupaten Garut dipilih daerah yang benar-benar daerah tertinggal dilihat dari lingkungan infrastruktur desanya, pemerintahan desanya, dan kualitas sumber daya manusianya (kesehatan, ekonomi, dan pendidikan masyarakat).

b. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan informan BPMPD Kabupaten Garut, sosialisasi program P2WKSS di Desa Kejiwan dilakukan secara bertahap, yakni:

1. Tahap pertama, sosialisasi di lingkungan tim koordinasi program P2WKSS Kabupaten Garut.
2. Tahap kedua, sosialisasi dilakukan bersama Tim Pelaksana Program P2WKSS,
3. Tahap ketiga, sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan seluruh Tim Koordinasi Program P2WKSS, Tim Pelaksana Program P2WKSS, dan masyarakat.

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam sosialisasi program P2WKSS. Menurut informan BPMPD, seluruh tahapan di atas merupakan tahapan inti dari proses sosialisasi pemberdayaan. Setiap tahapan sosialisasi tidak dilakukan hanya sekali, bila diperlukan dapat dilakukan beberapa kali terutama tahap sosialisasi kepada masyarakat sampai masyarakat betul-betul memahami apa maksud dan tujuan dari program P2WKSS tersebut.

Dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat, materi yang disosialisasikan antara lain:

1. Penyadaran masyarakat akan permasalahan yang ada di Desa Sindang Sari ;
2. Sosialisasi maksud, tujuan, dan rangkaian program P2WKSS; dan
3. Sosialisasi tim koordinasi dan tim pelaksana program P2WKSS.

Menurut informan Sekretaris TP PKK Kabupaten Garut, yang pertama dilakukan dalam tahap sosialisasi terhadap masyarakat adalah penyadaran terhadap masyarakat bahwa terdapat masalah yang harus diselesaikan baik dalam dirinya, keluarganya, maupun lingkungan desanya. Kemudian masyarakat diajak untuk berpikir memiliki masa depan yang lebih baik dengan kondisi ideal sesuaidengan apa yang digambarkan oleh tim sosialisasi. Selanjutnya masyarakat diberikan motivasi untuk melakukan perubahan terhadap dirinya, keluarganya, dan lingkungan desanya. Penyadaran yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Potensi Alam dan Sumber Daya Manusia

Dalam tahap penyadaran terhadap potensi alam dan sumberdaya manusia, masyarakat diberikan pemahaman mengenai kondisi Desa Sindang Sari yang memiliki kontur pegunungan serta apa yang bisa dimanfaatkan dari kondisi desa seperti itu. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai sumber daya manusia Desa sindang sari yang berpotensi besar untuk dapat mengembangkan desanya bila berpartisipasi saling bergotong dalam pembangunan desa.

2. Kesetaraan Gender

Dalam tahap penyadaran masyarakat akan kesetaraan gender, masyarakat diajak untuk berpikir agar lebih menghargai seorang perempuan, seperti: perempuan bukanlah subordinat laki laki, perempuan memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan perlindungan perempuan dari praktik-praktik Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pemberian pemahaman kesetaraan gender ini dilakukan terhadap perempuan dan laki-laki di Desa sindang sari namun dengan tanpa melupakan kodrat perempuan seperti: menstruasi; melahirkan; peran dan fungsi perempuan sebagai seorang istri atau pendamping suami; serta peran seorang ibu yang harus merawat dan mendidik putra-putrinya.

3. Perilaku Masyarakat

Menurut informan BPMPD Kabupaten Garut, yang tersulit dalam tahapan sosialisasi adalah memberikan penyadaran tentang perilaku masyarakat yang kurang baik. Perbedaan cara pandang serta standar kehidupan orang desa dengan orang perkotaan dan pemerintah merupakan salah satu kendala yang biasa ditemukan ketika sosialisai program P2WKSS. Kebanyakan masyarakat memiliki perilaku sebagai berikut:

- Cenderung menyerah pada keadaan, ditandai dengan: pendidikan sebagian besar masyarakat desa lulusan SD, miskin, dan tergolong daerah tertinggal;
- Merasa nyaman dengan kondisi yang tidak ideal, seperti: lingkungan rumah yang tidak terjaga kebersihannya, satu atap dengan hewan ternak, lingkungan desa yang penuh genangan air kotor.
- Tidak memiliki motivasi dan upaya yang kuat untuk merubah hidupnya menjadi jauh lebih baik. Menurut informan KK binaan P2WKSS, mereka ingin hidup lebih sejahtera namun terbentur keadaan sulit ekonomi, pendidikan rendah, dan rendah aksesibilitas terhadap sumber-sumber ekonomi sehingga akhirnya membuat mereka menyerah kepada keadaan. Mencari nafkah hanya untuk memenuhi kebutuhan primer hidup sehari-hari

tanpa dapat meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik.

Dalam sosialisasi P2WKSS masyarakat diajak untuk merubah kehidupannya dan dibina untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Setelah masyarakat sadar akan berbagai permasalahan di desanya, bagian tersulit lainnya dalam proses pemberdayaan adalah merubah perilaku masyarakat. Menurut informan BPMPD Kabupaten Garut, merubah kondisi dari sekedar sadar menjadi sebuah perilaku dan kebiasaan baru dalam masyarakat membutuhkan waktu dan strategi yang disesuaikan dengan budaya

setempat. Menurut informan BPMPD Kabupaten Garut, fokus pembinaan P2WKSS kepada perempuan didasarkan pada peran perempuan di dalam rumah tangga sebagai manajer keluarga. Melalui program P2WKSS ini diharapkan mampu memberikan perubahan signifikan di lingkungan masyarakat desa yang diawali dari 144 KK binaan P2WKSS.

4. Penyadaran Masalah Kesehatan

Berdasarkan informasi dari informan PKK Provinsi, masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah yang langsung dapat terukur oleh tim penilai P2WKSS Provinsi karena dapat dilihat secara kasat mata. Masalah kesehatan desa Sindang Sari terlihat dari kebiasaan yang tidak mengutamakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat, seperti: membuang air besar di sembarang tempat, menjemur pakaian di depan rumah, dan menyimpan binatang ternak di dalam rumah.

Menurut informan PKK Kabupaten Garut, penyadaran masalah kesehatan merupakan jalan masuk untuk penyadaran bidang lainnya. Masalah kesehatan merupakan contoh yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Perbandingan contoh kondisi ideal lingkungan keluarga yang sehat dengan kondisi nyata kehidupan sehari-hari masyarakat membuat masyarakat tergerak bahwa ada masalah yang harus diselesaikan di desanya.

5. Penyadaran Masalah Ekonomi lain

Masyarakat pada dasarnya sadar bahwa kehidupan ekonomi mereka harus lebih baik dari sebelumnya. Mereka ingin kehidupan yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Namun memiliki pekerjaan sebagai buruh anyaman bambu, buruh tani, atau pedagang kecil-kecilan saja tidak akan mampu merubah drastis kehidupan mereka menjadi jauh lebih sejahtera. Maka dari itu, pemerintah memberikan bantuan permodalan melalui UP2K (Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga) dan pelatihan pelatihan diantaranya :

- a. Penyuluhan pertanian dan perkebunan
- b. Pelatihan olahan makanan dari hasil lain/sungai, buah2an dan sayuran
- c. Pelatihan packing produk
- d. Pelatihan pembibitan ternak dan unggas
- e. Pembinaan pemamfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan di RT binaan
- f. Pelatiha kerajinan tanah
- g. Pelatihan menjahit/bordir
- h. Pelatihan membuatik
- i. Pelatihan kreasi olahan

a. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Setelah proses sosialisasi selesai, proses selanjutnya adalah masuk pada inti proses pemberdayaan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Wanita menjadi fokus program pembinaan P2WKSS karena wanita merupakan pendamping suami dan pencari nafkah tambahan perlu untuk ditingkatkan perannya. Wanita juga tidak dapat lepas dari kodratnya sebagai ibu yang mendidik putra – putrinya agar dapat meningkat taraf hidupnya di masa yang akan datang, baik dari segi kesehatan maupun kesejahteraannya.

Dari uraian di atas, proses pemberdayaan perempuan sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Kabupaten Garut, tetapi penekanannya masih tetap lebih kearah ekonomi produktif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat sulit untuk merubah pola pikir dan perilaku yang sudah tertanam turun temurun, sehingga pola pemberdayaan perempuan harus dirubah model dan polanya kalau ingin merubah mindset perempuan di daerah miskin. Komitmen perubahan sosial masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dalam program P2WKSS di Desa Sindang Sari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut masih rendah,

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam program P2WKSS di Desa Sindang Sari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut sudah memenuhi tahapan pemberdayaan, yang terdiri dari: Seleksi Lokasi; Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat; Proses Pemberdayaan Masyarakat: Kajian keadaan desa partisipatif, Pengembangan Kelompok, Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi Partisipatif; dan Pemandirian Masyarakat. Hasil yang dicapai oleh

program P2WKSS dalam peningkatan ekonomi produktif dan peningkatan fisik desa mengalami peningkatan yang cukup pesat.

Dari hasil penelitian peningkatan kesehatan dilakukan dengan cara program posyandu, sedangkan memberikan pemahaman gaya hidup yang sehat tidak diberikan secara mendalam, Kondisi ini tidak terlalu buruk di desa Sindang Sari karena keadaan desa di pegunungan yang cenderung lebih asri dibanding didaerah dataran rendah. Tetapi dalam peningkatan status pendidikan perempuan, pola pikir dan perilaku perempuan dalam mendidik anak dan remaja sebagai kewajiban utama seorang perempuan tidak tersentuh. Perempuan diberdayakan lebih optimal dalam peningkatan pendapatan keluarga. Sehingga dampak yang timbul adalah adanya pergeseran fungsi dan peran perempuan dalam keluarga yang apabila disikapi positif akan menjadi tetap baik, tp apabila disikapi negatif oleh kepala keluarga (suami) maka akan ada disfungsi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

PAPER

- Hastuti dan Dyah Respati. 2009. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan (Studi di Lereng Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta)
- Amelia Hayati. 2007. Studi Terhadap Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Garut.
- Dea Angkasa Putri Supardi. Pemberdayaan Perempuan dalam Program P2WKSS di Desa Kejiwan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

BUKU

- Anwar. 2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial melalui Pembelajaran Vocational Skill pada Keluarga Nelayan). Bandung: Alfabeta.
- Asang, Sulaiman. 2012. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas Perspektif Organisasi Publik. Surabaya: Brilian Internasional.
- Ayeni, Victor. 2001. Empowering the Customer: the Citizen in Public Sector Reform (Managing the Public Service Strategies for Improvement Series: No. 13). London: Commonwealth Secretariat.
- Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hikmat, Harry. 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Martono, Nanang. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial : Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 1997. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Zulkarnain. Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (Suatu Tinjauan Sosiologis). Malang: UMM Press. xiii
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1996. Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government). Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima, dan Pemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.
- Sudriamunawar, Haryono. 2012. Pengantar Studi Administrasi Pembangunan. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supromadyo, Gitadi Tegas. 2009. "Hubungan Asimetri Pria-Wanita dalam Politik dan Birokrasi." Dalam Wibawa, Samodra (ed). Administrasi Negara: Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Negara dalam Sistem Kesehatan Masyarakat Seharian-harian pada Masa Kini: Suatu Etnografi tentang Posyandu dan Ibu Rumah Tangga

M. Arief Wicaksono
Departemen Antropologi, FISIP-UI
ariefwicaksono.m@gmail.com

Abstrak

“Ibu rumah tangga” seringkali menjadi isu dan konsep penting dalam mengkaji relasi antara negara dan masyarakat di tingkat mikro. Melalui kaum perempuan di kampung-perkotaan, “wajah” negara berusaha dihadirkan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam hal kesehatan melalui Posyandu (Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu). Posyandu meletakkan kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga, sebagai ujung tombak untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, baik dari segi fisik maupun perilaku sehari-hari. Para ibu rumah tangga tersebut tidak hanya sebagai sasaran program-program kesehatan, tetapi juga sebagai orang yang menjalankan program, yang selanjutnya disebut *Kader Posyandu*. Setiap bulan para kader harus menghadiri rapat-rapat, menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk balita dan lansia, penyuluhan kesehatan, survei ke rumah-rumah, dan membuat data kesehatan di kampungnya, yang tentunya itu semua dilakukan beriringan dengan peran mereka sebagai ibu rumah tangga dan sebagian lagi juga memiliki pekerjaan lain di luar rumah. Penelitian ini ingin menggambarkan bagaimana negara tetap bertahan untuk hadir di masyarakat tingkat lokal pada masa kini khususnya dalam program kesehatan melalui perspektif ibu rumah tangga-kader Posyandu-yang rela bekerja untuk negara tersebut. Penelitian ini juga ingin menjawab pertanyaan, apa yang menjadi alasan bagi ibu-ibu rumah tersebut sehingga mau bekerja untuk negara dalam konteks masa kini. Observasi dan wawancara mendalam dengan para kader posyandu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas. Banyak diantara mereka mengatasnamakan kesukarelaan dalam menjalankan program ini, melalui artikel ini kita akan tahu bagaimana negara dapat menanamkan rasa kesukarelaan tersebut sehingga cita-cita masyarakat sehat dapat terwujud dengan baik melalui peran kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga.

Kata kunci: ibu rumah tangga, perempuan, Posyandu, negara.

PENDAHULUAN

“Inspirasi” datangnya topik ini berasal dari pengalaman pribadi yang pada awalnya mungkin terkesan subjektif, namun memiliki isu konseptual. Suatu pagi di rumah, ketika masa libur kuliah semester genap, dan adik saya yang SMP akan berangkat sekolah, ibu saya bangun pagi-pagi untuk memasak sarapan (hanya) untuk adik saya. Itupun dengan terburu-buru. Sesaat setelah adik saya sarapan dan berangkat ke sekolah, ibu saya langsung meninggalkan dapur. Bukannya berbelanja bahan makanan seperti pagi-pagi biasanya, justru dia mengambil setumpukan map berisi laporan-laporan kegiatan Posyandu. Hari itu, setumpuk laporan yang belum selesai itu harus segera dibereskan, tentunya bersama teman-teman sesama kader Posyandu. Kirakira mendekati jam 12 siang, ibu saya baru pulang ke rumah.

Meminjam pemikiran Victor Turner, mungkin bagi ibu saya itu adalah sesuatu hal yang termasuk *life as lived*, sedangkan bagi saya hal itu adalah *life as experience* (Turner, 1986). Bagi ibu saya, rutinitasnya terkait dengan Posyandu adalah sebuah realitas biasa dalam sehari-hari, namun saya memberikan signifikansi pada hal tersebut. Sebuah konsep yang juga menjadi *entry point* awal dalam menentukan topik ini adalah konsep ibuisme yang ditawarkan oleh Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis (1987) yang kemudian dilanjutkan oleh Julia Suryakusuma (1991) untuk menjelaskan secara deskriptif dan analitis mengenai “pengorbanan diri” perempuan untuk negara yang nimbunan pada masa pemerintahan orde baru. Tentu saya tidak akan mengulangi penggunaan konsep di atas dengan sama dan lapangan penelitian yang berbeda. Justru dengan menggunakan paradigma prosesusal saya ingin melihat bagaimana dinamika dari ibuisme ini di konteks masa kini, masa setelah kurang lebih 18 tahun pascaordebaru.

Penelitian dan makalah singkat yang saya lakukan ini setidaknya akan membahas dua hal. Pertama bagaimana negara tetap dapat menghadirkan dirinya di tingkat masyarakat level mikro, yaitu di kampung-kampung perkotaan, dalam hal mewujudkan masyarakat yang sehat dari segi fisik dan kebiasaan sehari-hari di masa

kini. Kedua, apa yang melandasi kaum ibu-ibu untuk mau membantu dan bekerja demi negara untuk mewujudkan masyarakatnya sendiri yang sehat. Kedua pertanyaan ini secara terbatas hanya mampu saya hadirkan dari perspektif kaum perempuan yang juga merupakan kader Posyandu.

PKK: an Exit Point, Posyandu: an Entry Point

Satu penelitian apik yang banyak membantu saya dalam memperkaya dan mempertajam konsep serta metodologi adalah penelitian Jannice Newberry tentang relasi antara perempuan, negara, rumah tangga, dan kampung di keluarga Jawa. Penelitian ini dilakukannya pada 1992 di sebuah kampung di Yogyakarta, yang kemudian pada 2006 hasil penelitiannya diterbitkan dalam *Back Door Java: State Formation and The Domestic in Working Class Java*. Penelitian Newberry yang tentunya didahului (salah satunya) oleh Suryakusuma penting untuk melihat dinamikanya pada masa kini.

Newberry berusaha untuk memahami di titik mana kategori keluarga berakhir dan kategori rumah tangga dimulai dan saat mana negara dinilai hadir melakukan intervensi. Keluarga seakan menjadi suatu arena tersendiri bagi negara untuk hadir secara interventif satu level di bawah masyarakat. Penetrasi program pemerintah dan ideologi yang diproduksi oleh negara ke dalam kesadaran warga negara di komunitas kampung, yang tipikal di perkotaan Indonesia, dapat dimungkinkan berkat keberadaan keluarga (Warouw, 2013). Penetrasi program pemerintah ke dalam masyarakat melalui keluarga dan rumah tangga lebih diperkuat dengan adanya peran kaum perempuan, khususnya para ibu rumah tangga. Inilah yang juga disebutkan oleh Warouw, bahwa keluarga dalam fungsi seperti ini telah mendomestikasi sekaligus juga menegaskan otonomi kaum perempuan secara sosial-politik. Ini menjelaskan mengapa negara berkepentingan untuk mengatur kaum perempuan.

Rezim orde baru memberikan dimensi waktu tersendiri untuk melihat bagaimana masif (dan efektifnya) rezim dalam mengatur perempuan, khususnya melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tugu-tugu PKK yang berisi paparan sepuluh program pokok PKK¹ hampir selalu dapat dilihat di setiap muka gang-gang di perkampungan. Suryakusuma mencatat soal penempatan diskursus penghayatan dan pengamalan Pancasila ke dalam urutan pertama dari sepuluh program pokok PKK. Dengan demikian, PKK hadir atas nama negara. Selanjutnya, sebagai puncak restu negara terhadap PKK adalah dimasukkannya PKK ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada 1983 (Suryakusuma, 1991).

PKK, yang menurut banyak kalangan lahir dari semangat perjuangan kemerdekaan, terutama dalam konteks pergerakan perempuan, pada masa orde baru telah berubah menjadi sebuah organisasi masyarakat di bawah pemerintah nasional (Branson dan Miller, 1988; Gerke, 1992; Wierenga, 1993). Semua perempuan yang sudah menikah, selanjutnya dipandang sebagai perempuan dewasa. Semua perempuan dewasa secara otomatis merupakan bagian dari PKK, baik sebagai pengurus maupun anggota. Hal tersebut akhirnya berimplikasi munculnya sebuah kategori baru dalam bidang sosial yang didukung oleh negara, yakni *ibu rumah tangga*, dan pengerahan kaum perempuan Indonesia, khususnya kaum perempuan dari kelas bawah, sebagai pekerja kesejahteraan sosial yang **tidak dibayar** (Newberry, 2013:8).

Kegiatan PKK yang bersifat menyeluruh itu, salah satu yang terkenal adalah kegiatan Posyandu (Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu). Banyak kalangan, termasuk Newberry, melihat Posyandu sebagai agenda satu kali sebulan untuk memberikan vitamin kepada anak-anak yang berusia di bawah lima tahun, namun, Posyandu sejatinya lebih kompleks dari kekadar itu. Bersama-sama dengan program koperasi PKK, Posyandu merupakan salah satu yang tergolong cukup sukses bertahan hingga saat ini. Posyandu adalah suatu “institusi” pelayanan kesehatan yang paling mikro dan paling dekat dengan masyarakat. Posyandu diorganisasikan oleh masing-masing kelurahan dan dijalankan oleh masing-masing RW (Rukun Warga). Masing-masing RW memiliki jumlah Posyandu yang berbeda-beda, tergantung dari jumlah penduduk di kampung tersebut. Satu kegiatan terkenal dari Posyandu adalah yang disampaikan oleh Newberry.

Ke Posyandu dibawa semua anak berusia di bawah lima tahun untuk ditimbang dan diberi vitamin serta makanan atau susu gratis. Vitamin serta asupan gizi yang gratis itu merupakan simbolis saja sifatnya karena jumlahnya yang sedikit (satu anak hanya mendapat satu hingga dua bungkus kecil susu bubuk dan sereal) dan hanya diadakan satu kali selama sebulan. Namun demikian, menimbang anak setiap bulan memiliki arti tersendiri bagi kaum ibu-ibu karena ada catatan yang menunjukkan apakah berat badan anak naik atau turun. (Newberry, 2013:9). Di dalam PKK, Posyandu merupakan salah satu dari banyak program kerja. PKK sendiri membentuk kelompok kerja khusus untuk urusan Posyandu ini. Program Posyandu lain yang tekrenal adalah program penyuluhan kesehatan, pendidikan kebiasaan hidup bersih dan sehat (PHBS), pencegahan penyakit tertentu, khususnya yang paling terkenal adalah diare dan demam berdarah, serta satu yang paling masif di masa orde baru adalah program

Posyandu untuk menggerakkan program nasional Keluarga Berencana (KB).

Satu isu yang sangat penting selanjutnya adalah mengenai kesukarelaan. Studi-studi mengenai ibuisme dan “penyelenggaraan negara” di tingkat lokal oleh kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga di masa lalu, atau setidaknya sejak penghujung abad 20 adalah sifatnya yang tanpa imbalan atau sukarela. Hal ini dikonfirmasi oleh Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis yang pertamakali mengenalkan istilah ibuisme untuk merelasikan kombinasi antara tata nilai kaum priyayi elite dengan tata nilai kaum *petite-bourgeois* Belanda untuk membentuk ideologi yang mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu dalam keluarga, kelas, atau negara tanpa mengharapkan imbalan (Nieuwenhuis, 1987:44). Konsep ibuisme negara kemudian dilanjutkan oleh Suryakusuma (1991) untuk menjelaskan peran pemerintah Orde Baru dalam memperkenalkan pengorbanan diri kaum perempuan untuk tujuan-tujuan mereka sendiri.

Hasil kinerja kaum perempuan ibu rumah tangga dalam mewujudkan masyarakat sehat, misalkan secara spesifik adalah dalam persoalan perwujudan program Keluarga Berencana, adalah satu program nasional yang tergolong sangat sukses jika dikaitkan dengan menurunnya angka kematian bayi pada masa itu dan terkait dengan pengendalian jumlah penduduk. Nilai-nilai ideal bagi perempuan di kampung dengan sangat berhasil dapat dikonstruksi dengan baik dan dilanggengkan secara terus-menerus, setidaknya hingga Orde Baru tumbang pada 1998, tapi masih terasa hingga kurang lebih 10 tahun setelah itu. Isu kesukarelaan dan nirimbangan pada masa lalu tersebut ingin saya bawa pada masa kini. Artinya, apakah kaum perempuan dan ibu rumah tangga khususnya masih bertumpu pada kesukarelaan dan tanpa imbalan dalam “membantu” negara menghadirkan dirinya di masyarakat level mikro. Sebab satu isu yang dari dahulu tidak dapat dinafikan khususnya dalam disiplin sosialbudaya adalah paradigma materialis. Materi menjadi konsep penting yang sedikit-banyak selalu mempengaruhi fenomena kebudayaan. Isu materi kemudian menjadi menguat di abad ke-21 ini ketika ekonomi seakan-akan menjadi panglima dalam setiap pembahasan. Ekonomi mengkonstruksi dunia, dengan kata lain, ekonomi mengkonstruksi kebudayaan.

Ibu rumah tangga yang juga merupakan kader Posyandu tentunya dalam keseharian mereka tidak hanya berkesibukan dalam Posyandu semata. Dia juga merupakan ibu rumah tangga yang setidaknya memiliki lima peran domestik: 1) pembantu dan pendukung setia

suami, 2) pengurus rumah tangga, 3) penghasil generasi masa depan, 4) pelaku sosialisasi utama keluarga, dan 5) warga negara Indonesia (terjemahan dari N. Sullivan 1983:2). Di Posyandu sendiri, kesibukan yang dialami bukan hanya satu kali dalam sebulan seperti yang saya uraikan singkat di beberapa paragraf sebelumnya. Selain banyaknya kegiatan Posyandu tersebut, negara juga meminta pertanggungjawaban kaum perempuan sebagai representasi dari dirinya dalam masyarakat di level mikro. Pertanggungjawaban itu berupa laporan dan data-data kesehatan yang harus dibuat setiap bulannya. Laporan sangat kompleks sifatnya sebab meliputi seluruh unsur dan aspek kesehatan masyarakat. Laporan yang banyak tersebut harus dikerjakan oleh sedikitnya dua hingga tiga orang kader setiap Posyandu dan kemudian diteruskan ke pemerintah kelurahan untuk selanjutnya diserahkan pada dinas kesehatan kabupaten atau kota masing-masing. Bisa dibayangkan bahwa semua kesibukan sebagai ibu keluarga, ibu rumah tangga, istri, dan kader Posyandu harus dilakukan secara bersama-sama, salah satu buktinya adalah contoh yang saya kemukakan di awal pendahuluan ini. Baik PKK maupun Posyandu harus sama-sama kita lihat sebagai upaya kepanjangan tangan negara untuk dapat hadir secara terus-menerus di masyarakat. Namun demikian kita perlu tahu juga bagaimana dinamikanya di antara para pelaksana kepanjangan tersebut.

METODE

Metode penelitian yang saya lakukan adalah kualitatif-etnografis. Metode etnografik dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan selanjutnya menjelaskan secara analitik suatu gejala atau fenomena di sebuah lapangan penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang subjek penelitian saya, relasi dan kehidupan antarmereka, serta pandangan mengenai kehidupannya. Penggunaan metode etnografi bertujuan untuk menggali, memahami, mengidentifikasi, mendeskripsikan, memetakan, dan menganalisis bagaimana Posyandu sebagai suatu “institusi” dapat terselenggara di masyarakat level mikro tentunya dengan dimotori oleh kaum perempuan pada umumnya dan ibu rumah tangga pada khususnya.

Dalam konteks penggunaan metode etnografi, pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Posyandu, yaitu kegiatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan bayi di bawah usia lima tahun serta pendataan dan pembuatan laporan kesehatan yang dilakukan oleh para kader Posyandu. Pengumpulan data berupa dokumen-dokumen contoh laporan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Posyandu juga dilakukan. Selain itu saya juga melakukan wawancara mendalam dan

diskusi dengan sejumlah kader Posyandu dan satu orang bidan dari Puskesmasⁱⁱ.

Lokasi penelitian saya, baik ketika melakukan pengamatan maupun melakukan wawancara mendalam adalah di RW 02 Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. RW ini memiliki tiga Posyandu, dan satu fokus penelitian saya adalah berada di satu Posyandu yang tentunya representatif. Di kelurahan Ciptomulyo, Kota Malang tersebut terdapat satu buah Puskesmas dan 17 Posyandu. Rata-rata setiap RW memiliki 3 Posyandu. Posyandu tempat saya meneliti bernama Posyandu Anggrek 02. Sementara itu, wawancara saya lakukan bersama dengan ketua paguyuban Posyandu kelurahan, ketua Posyandu Anggrek 2, dua orang kader Posyandu, dan satu bidan Puskesmas yang kerap membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan Posyandu Anggrek 2. Semua orang yang saya wawancara tersebut juga tak lain merupakan ibu rumah tangga, dan beberapa diantaranya memiliki pekerjaan lain di luar rumah tangga dan kesibukan Posyandu-nya. Tentunya sebelum melakukan wawancara, saya telah merancang susunan pertanyaan terbuka. Beberapa informan sengaja juga saya lakukan wawancara secara bersama-sama, hal ini saya maksudkan untuk *check and re-check*, bahwa informasi satu informan dengan informan lainnya tidak kontradiktif. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun dalam pelaksanaannya dapat berkembang.

Teknik analisis data yang saya gunakan adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data-data dari hasil pengamatan langsung dan wawancara mendalam saya kumpulkan dan saya petakan kemudian saya analisis secara kualitatif berdasarkan pada pedoman kerangka konseptual untuk mendapat gambaran yang deskriptif dan analitik dari fenomena yang sedang saya teliti. Oleh karena itu, fokus analisis kualitatif bersifat khas karena sesuai dengan konteks lapangan masing-masing. Di sisi lain, analisis data juga saya lakukan bersamaan dengan pengumpulan data itu sendiri, terutama saat wawancara. Silang pendapat antarinforman dan informasi “non-visual” juga menjadi bagian tersendiri dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kegiatan Posyandu yang paling terkenal dan paling disadari oleh masyarakat adalah kegiatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan anak balita (bayi di bawah usia lima tahun). Meskipun Posyandu berarti keseluruhan dan kompleksitas kegiatan sistem kesehatan masyarakat yang bukan hanya kegiatan pelayanan kesehatan tersebut, istilah “Posyandu” di masyarakat berarti cenderung merujuk kegiatan yang

satu itu. Di Posyandu Anggrek 2, kegiatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan lansia diadakan setiap hari Selasa pada minggu pertama setiap bulannya. Kegiatan ini dimulai pukul 08.00 pagi hingga kurang lebih pukul 11.00 siang serta bertempat di halaman salah seorang warga yang cukup luas. Pelayanan kesehatan ini diorganisir oleh lima orang kader, mulai dari persiapan logistik seperti bangku dan meja, alat penimbangan, hingga logistik konsumsi.

Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kegiatan dilakukan, para kader tersebut mengingatkan melalui depan rumah-rumah warga dengan berteriak cukup kencang, bahwa ada kegiatan Posyandu. Hal ini disebabkan dua hal, pertama memang untuk mengingatkan para ibu-ibu rumah tangga agar membawa anaknya yang berusia lima tahun atau kurang pergi ke Posyandu, kedua, memang ada beberapa ibu rumah tangga yang enggan membawa anaknya ke Posyandu. Khusus untuk ibu-ibu yang enggan membawa ke Posyandu tersebut, alasannya adalah karena mereka bekerja dan lebih mementingkan urusan rumah tangga, seperti memasak, mencuci baju, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Walaupun hanya satu hingga tiga orang yang tidak membawa anaknya ke Posyandu, namun implikasi yang cukup merepotkan dialami oleh para kader Posyandu. Pembahasan mengenai hal ini akan disampaikan di paragraf-paragraf berikutnya.

Pukul 08.00 tepat, biasanya masih sedikit ibu-ibu yang sudah datang di lokasi kegiatan. Ada lima meja yang berarti lima urutan bagi ibu-ibu untuk mendapat pelayanan kesehatan. Meja pertama adalah registrasi atau pengisian daftar hadir. Meja kedua adalah meja penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita. Ada dua jenis alat timbangan, yaitu timbangan gantung dan timbangan duduk, tergantung dengan ukuran balita. Meja ketiga adalah meja pencatatan ukuran badan. Di sini terdapat catatan dari bulan-bulan sebelumnya sehingga ibu dapat melihat perkembangan berat badan dan tinggi badan anaknya.



Gambar 2.1. Pemberian vitamin oleh bidan Puskesmas
Gambar 2.2. Kegiatan penimbangan berat badan

Jika tidak bertambah atau malah menurun, maka balita tersebut akan mendapat catatan tersendiri dan biasanya akan mendapat asupan tambahan. Di meja empatlah asupan tambahan diberikan. Di meja empat ini, ada susu untuk balita dan ibu hamil dan biskuit sereal. Setiap tiga bulan sekali ibu-ibu dan balita mereka juga akan mendapatkan makanan lain ketika Posyandu mereka ada jadwal memasakⁱⁱⁱ. Di meja lima, adalah meja untuk konsultasi tentang kesehatan. Di sini, terdapat satu orang bidan dari Puskesmas yang akan melayani konsultasi. Selain melayani konsultasi, bidan dari Puskesmas terkadang (saat pada jadwalnya) juga melakukan penyuluhan kesehatan (misalkan penggunaan daun kelor untuk obat, pencegahan demam berdarah, dan lain sebagainya). Bidan dari Puskesmas juga membawa obat-obatan dan vitamin, terkadang juga membawa vaksin untuk imunisasi.

Lima kader, laki-laki dan lansia: Suatu krisis ketenagaan

Posyandu Anggrek 2 sebenarnya memiliki enam orang kader. Namun karena satu orang kader harus ikut suaminya tinggal di luar kelurahan, maka kader tersebut harus meninggalkan perannya di Posyandu. Dari lima kader yang tersisa, tiga diantaranya merupakan lansia dan satu diantaranya adalah laki-laki. Bagaimana bisa? Saya tidak ingin membahasnya dalam konteks gender, tetapi fenomena adanya satu orang kader laki-laki merupakan bukti dan indikasi dari apa yang juga



Gambar 2.3. Kader Posyandu Anggrek 2 pada tahun 2015

disampaikan oleh kader-kader Posyandu lainnya: kurangnya orang. Bu Saripah (63) merupakan ketua kader Posyandu Anggrek 2. Dirinya sudah 20 tahun menjadi bagian dari Posyandu. Awalnya Bu Saripah adalah anggota Posyandu, baru sejak tahun 2011 dirinya menjadi ketua. Ketika ditanya mengapa masih aktif di Posyandu, pengakuannya tak lain adalah karena sulit mencari kader pengganti. Berbeda dengan masa lalu, dimana *state ibuism* sangat kental, bahkan ibu lurah (istri kepala kelurahan) bersama dengan ibu RW (istri ketua RW) turun dan memantau langsung pelaksanaan Posyandu. Tidak pernah ada kekosongan dan kekurangan kader karena Ibu RW sangat dekat dengan masyarakatnya dan siap mencarikan kader pengganti jika ada salah satu kader berhalangan. Namun sekarang, rezim pengaturan perempuan tidak terlalu mengatur seperti masa lalu. Ibu RW di RW 02 terkesan tidak aktif dan tidak pernah terlibat dalam acara-acara yang diselenggarakan di RW, seperti arisan, koperasi, dan tentunya Posyandu.

Kini, ideologi *state ibuism* tampak memausuki titik nadirnya. Artinya, negara harus berupaya dua kali lebih efektif untuk terus hadir secara terus-menerus di masyarakat level mikro, di lorong-lorong kampung. Beberapa alasan sulitnya mencari kader pengganti adalah pengetahuan warga, khususnya kaum perempuan dan ibu rumah tangga, tentang administrasi kesehatan cukup rendah. Para ibu-ibu rumah tangga mengaku bisa jika diminta untuk menimbang berat badan, namun menjadikannya itu semua ke dalam laporan yang sistematis merupakan kendala tersendiri. Gejala melurnya *state ibuism* tidak hanya melanda dalam fenomena sulitnya mencari kader Posyandu, tetapi juga dapat dilihat dari ibu-ibu rumah tangga yang enggan membawa balitanya ke Posyandu. Hal ini sungguh kontradiktif jika dicerminkan dengan nilai-nilai ideal seorang ibu rumah tangga di masa lalu (khususnya dalam konteks di Jawa), yang salah satunya adalah untuk menghasilkan generasi masa depan bangsa yang sehat dan cerdas. Para suami cenderung tidak (bahkan sangat tidak) terlibat dalam kesibukan Posyandu. Mereka juga tidak pernah (menurut pengakuan ibu rumah tangga) menanyakan apakah berat badan anaknya naik atau turun, bahkan diantara mereka juga tidak pernah tau kapan jadwal kegiatan pelayanan kesehatan dari Posyandu diberikan.

Solusinya, adalah mengandalkan kedekatan organik yang berbasis pada kekerabatan. Ibu Saripah yang sudah cukup lansia dan bahkan kakinya terlalu sakit jika harus berjalan jauh, terutama jika harus berjalan ke kantor kelurahan yang jaraknya cukup jauh dari kampung, meminta anaknya, Dwi Lestari (30) untuk menjadi kader Posyandu bersama dirinya.

Hubungan pertalian darah, yang terkait dengan tempat tinggal bersama, jauh lebih penting dalam susunan kehidupan sosial (Gibson: 1995:129).

Dwi memiliki satu orang anak berusia 2,5 tahun dan merupakan karyawan di sebuah toko grosir pakaian. Dirinya mengaku sering izin untuk tidak atau terlambat masuk toko karena alasan kesibukan Posyandu. Setiap bulan, juga ada rapat rutin yang dilaksanakan setiap hari Kamis minggu terakhir pada pagi hari. Rapat ini adalah rapat koordinasi dan evaluasi yang dipimpin langsung oleh pihak kelurahan. Koordinasi yang bersifat administratif ini kemudian melahirkan struktur administratif yang menentukan garis-garis koordinasi “maya” antara masyarakat dan tata pemerintahan tingkat lokal. Namun jika ditarik lebih panjang ke atas, garis-garis ini menjadi nyata dalam konteks hubungan administratif antara pemerintah lokal (kelurahan) dan pemerintah kota atau kabupaten.

Kelompok-kelompok masyarakat yang bertetangga dibentuk dan dibuat untuk saling kerja sama dan mengawasi. Seorang ibu yang tidak membawa balitanya ke Posyandu akan ditegur oleh ibu lain yang membawa balitanya ke Posyandu. Di masa lalu, idealnya seorang ibu yang mendapat teguran tersebut umumnya merasa punya *cap bukan ibu ideal*, namun kini, ibu-ibu yang tidak membawa balitanya ke Posyandu merasa cuek saja dan yang mengingatkan mereka bukan ibu-ibu tetangganya sendiri, melainkan kader Posyandu. Artinya kedekatan oragnik antaribu rumah tangga untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang ideal, setidaknya dalam hal kesehatan, pada masa kini sudah menemui titik luntarnya. Masyarakat pedesaan-perkampungan ideal “abad berapa pun sekarang sekarang selalu tampak telah pudar atau sedang dalam proses memudar” (Roseberry, 1989:57).

Dari SK ke Insentif, dari Data ke Lomba

Tampaknya untuk terus menghadirkan dirinya di masyarakat, negara tidak harus menghadirkan dirinya di tengah-tengah mereka, atau dengan kata lain, negara tidak perlu mendatangkan para aparat kesehatan resmi di dinas kesehatan untuk turun ke kelurahan-kelurahan. Yang dilakukan negara untuk menghadirkan dirinya adalah dengan menjadikan beberapa orang dari masyarakat itu sendiri sebagai negara. Karena menyadari pentingnya peranan kaum perempuan dan ibu rumah tangga untuk menjadi kader Posyandu yang terus mereproduksi masyarakat sehat, negara meneguhkan keberadaan mereka, dengan kata lain, mengakui posisi mereka secara resmi di struktur negara. Oleh karena itu, melalui pemerintah kota dengan dikoordinasikan oleh dinas kesehatan, para kader Posyandu tersebut diteguhkan posisinya atau

diresmikan perannya dengan diberikan surat keputusan (SK) pengangkatan resmi yang ditandatangani langsung oleh walikota. Adanya surat keputusan pengangkatan ini dilakukan pemerintah kota Malang dan diterima para kader Posyandu Anggrek 2 dan juga tentunya kader Posyandu lain sejak tahun 2015.

Di kelurahan Ciptomulyo, terdapat 141 kader Posyandu yang secara resmi diberikan SK oleh negara. Artinya, 141 orang tersebut telah memiliki peran yang lebih dari ganda, mereka sebagai kader Posyandu, sebagai “negara”, dan sebagai masyarakat itu sendiri. Para kader Posyandu yang memiliki SK tersebut sangat senang saat mereka harus menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh instansi yang lebih tinggi, biasanya diselenggarakan oleh pemerintah kota. Di sana, seluruh kader Posyandu se-kota berkumpul dan itulah yang disebut paguyuban kader Posyandu kota. Para ibu rumah tangga tersebut, di luar konteks perannya sebagai kader Posyandu, dapat memperluas jaringan mereka.

Melalui peresmian peranan kaum perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan dilihat sebagai perantara antara dunia adat (nilai-nilai kemasyarakatan) dengan nilai-nilai ideologi negara, seperti misalnya nilai-nilai yang menggalakkan peranan ibu rumah tangga untuk terus menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang ideal menurut nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh negara. Penempatan perempuan seperti itu, sebenarnya secara makro, menempatkan mereka dalam posisi simbolik dan praktis yang besar. Bayangkan, tanpa harus hadir di tengah-tengah masyarakat, melalui para ibu rumah tangga-kader Posyandu tersebut, negara sudah tidak perlu lagi memusingkan masalah ancaman kematian bayi. Di tangan ibu rumah tangga itulah, masalah itu sudah dapat ditangani.

Menjadikan ibu rumah tangga sebagai “instrumen” negara untuk memasyarakatkan ideologinya secara resmi (bukan secara sukarela seperti yang terjadi pada masa orde baru), berarti memiliki implikasi materialis dari sisi para kader. Ada sebabnya mengapa SK yang diberikan kepada kader Posyandu menjadi sesuatu yang berharga bagi ibu rumah tangga-kader Posyandu tersebut. Hal ini tak lain dan tak bukan karena berhubungan dengan insentif yang diterima oleh para kader Posyandu. Insentif ini diberikan setiap bulan. Bu Jumayah (52) dan bu Dwi Lestari (30) mengaku mendapat Rp. 95.000,- setiap bulannya dari pemerintah sebagai insentif dan “uang lelah” atas pengabdian mereka pada negara dalam Posyandu. Jumlah tersebut walaupun tidak banyak dan terkesan simbolik saja,

namun bagi ibu rumah tangga kelas menengah, seperti yang banyak terdapat di lokasi penelitian saya, merupakan sesuatu yang berarti. Hal ini dibenarkan oleh Bu Siti Aminah (53), ketua paguyuban Posyandu sekelurahan, bahwa sejak adanya keputusan pemerintah kota memberikan surat keputusan pengangkatan kader Posyandu sebagai “kader negara”, banyak ibu rumah tangga yang tergiur untuk mau menjadi kader Posyandu, namun permasalahannya tidak berhenti sampai di situ. Para ibu rumah tangga yang tergiur tersebut, hanya tergiur karena alasan SK dan insentif semata, namun secara kinerja, mereka tidak dapat dikatakan baik, bahkan buruk. *“banyak yang ingin menjadi kader Posyandu, tapi tidak ada niat sama sekali. Banyak dari mereka yang sudah diterima menjadi kader, dan mendapat SK, setelah tau bahwa tugasnya cukup banyak, mereka keluar, dan kami pun (kader Posyandu lainnya), kerepotan mencari pengganti.”*, kata bu Siti Aminah.

Pertemuan kader ‘resmi’ Posyandu yang diadakan dua sampai tiga bulan sekali di tingkat kota, menjadi yang ditunggu-tunggu oleh para kader Posyandu. Pertemuan tersebut biasanya dilakukan di gedung-gedung pertemuan yang cukup elite. Para ibu rumah tangga juga menggemari yang berbaur “priyayi-priyayi”, bersalaman dan bertemu dengan istri wali kota sebagai ketua penggerak utama PKK, bagi mereka adalah kebanggaan tersendiri. Di dalam dimensi inilah, ibuisme seakan menguat lagi, namun perlu diingat, hanya secara terbatas sifatnya, yaitu karena SK dan insentif. Pertemuan kader resmi Posyandu se-kota merupakan sarana sosialisasi dan pendidikan bagi mereka. Di sini, berbagai penyuluhan tentang kesehatan diselenggarakan, untuk selanjutnya mereka teruskan hingga ke masyarakat level mikro. Rumah menjadi area yang ideal bagi nilai-nilai negara dapat masuk, tentunya melalui ibu rumah tangga.

Pendidikan dan penyuluhan bagi para ibu rumah tangga-kader ‘resmi’ Posyandu itu pada akhirnya membutuhkan kekuatan rumah tangga, keluarga, dan kekuatan moral kaum perempuan sebagai landasan yang memperlancar bagi proyek-proyek politik yang lebih besar, penyuluhan dan pendidikan kaum perempuan untuk rumah tangga menjadi alasan bagi perluasan pekerjaan rumah tangga pribadi mereka hingga ke bidang pengelolaan secara rasional masyarakat umum (Newberry, 2013:174). Memang, peran perempuan di bidang rumah tangga, memberi mereka “hak dan kewajiban untuk terlibat dalam urusan-urusan masyarakat yang lebih luas” (Steinschneider 1994:13). Ibuisme yang seakan mampu menguat (dikuatkan) dengan SK dan insentif tersebut pada akhirnya kembali memudar ketika ternyata para ibu rumah tangga-kader

Posyandu itu tahu bahwa Posyandu merupakan sesuatu yang kompleks yang rumit.

Tidak hanya berhenti pada SK dan insentif, satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk memastikan agar roda mewujudkan masyarakat sehat dapat terus berputar adalah dengan mengadakan lomba-lomba. Salah satu kegiatan Posyandu yang paling rumit dan menyusahkan para ibu rumah tangga-kader Posyandu adalah membuat laporan bulanan mengenai data kesehatan di kampungnya. Jumlah laporan yang harus dibuat jumlahnya ada 31 buku. Laporan tersebut harus dikerjakan oleh dua hingga tiga orang kader, dan waktu pengerjaannya jelas memakan waktu yang tidak sedikit. Inilah mengapa di awal-awal tadi, saya mengatakan bahwa jika ada satu ibu rumah tangga saja yang tidak membawa balitanya ke Posyandu, maka berimplikasi ketiadaan catatan. Artinya, jika ada laporan yang kosong, maka akan mempengaruhi validitas laporan keseluruhan, dan ini jelas membuat citra suatu Posyandu menjadi diragukan.

Laporan-laporan yang banyak tersebut kompleks sifatnya, diantaranya adalah laporan perkembangan berat dan tinggi badan balita, laporan kesehatan ibu hamil, laporan kesehatan ibu hamil dan menyusui, laporan KB, laporan mengenai jentik nyamuk, laporan mengenai kondisi rumah sehat, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, negara hadir dalam bentuk kertas-kertas dan tabel-tabel. Mungkin, kita (dan saya pada awalnya) memandang bahwa kertas dan tabel yang banyak tersebut secara *fetish*, atau memandangnya begitu dan biasa saja, namun ternyata dibalik kertas dan tabel tersebut, sesungguhnya ada negara yang sedang memantau. Laporan-laporan itu dibuat oleh kader Posyandu, dan pada tenggat waktu tertentu pada setiap bulan, harus diserahkan kepada ketua kader Posyandu di tingkat RW dan kelurahan untuk akhirnya diperiksa. Jika ada kesalahan sedikit saja, maka harus diulang. Makanya dalam pengisian, para kader biasanya menggunakan pensil terlebih dahulu.



Gambar 2.4. Sebuah piagam penghargaan yang diterima oleh Posyandu Angrek 2

Laporan kesehatan kampung merupakan wujud pertanggungjawaban yang diberikan oleh kader Posyandu kepada negara yang telah memberikannya insentif. Di masa orde baru, laporan yang dibuat tidak sebanyak ini. Menjadi logis jika, negara pada akhirnya memberikan para kader Posyandu, walaupun sedikit, sejumlah insentif untuk mendapat laporan-laporan mengenai kondisi kesehatan kampungnya. Laporan-laporan itu setelah terhimpun seluruh kelurahan, setiap tahunnya diikutkan lomba. Lomba-lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah kota melalui dinas kesehatan kota memiliki *prestige* tersendiri bagi para kader jika berhasil dimenangkan. Di satu sisi, laporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban, di sisi lain, laporan dibuat untuk keperluan lomba. Lomba-lomba itu hanya simbolik sifatnya, tidak ada tindak lanjutnya, namun para kader selalu berlomba-lomba untuk memenangkan Posyandunya.

Everyday State – Monthly State?

Setidaknya sejak masa orde baru, PKK dan Posyandu jelas menempatkan kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga berada di garis depan dalam pembangunan Indonesia, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Peranan mereka dalam masyarakat, pada konteks-konteks tertentu menjadi negara dan pemerintahan itu sendiri, yang menjadikan diri mereka sebagai kepanjangan dari program-program pemerintah yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui aktivitas formal dan informal kaum perempuan, dan untuk membantu menciptakan masyarakat kampung yang ideal. Secara signifikan, proses pembentukan negara sebagai proses penyebaran kekuasaan negara sehari-hari melalui bentuk-bentuk pemerintahan ini dapat terlaksana jika para kaum perempuan dan kader Posyandu itu menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan dan tujuan mereka dan masyarakatnya. *Everyday State* yang saya maksud di sini adalah bagaimana negara terus mengadirkan dirinya di lorong-lorong kampung, tentunya di konteks masa kini.

Pada konteks masa lalu, *everyday state* tampak sangat intensif sebab negara secara efektif mampu membumikan secara masif nilai-nilai ideologinya, tentunya dengan cara rezim tersendiri. Secara bersamaan, negara pada waktu itu juga mampu mengolaborasikan nilai-nilai ideologi tersebut dengan nilai-nilai ideal masyarakat Jawa: gotong royong. Konsep gotong royong seakan menjadi instrumen yang sangat berguna untuk membuat masyarakat terus bekerja mewujudkan kondisi mereka sendiri yang sehat. Oleh karena itu, pada masa lalu negara cukup berlandaskan pada kesukarelaan kaum perempuan untuk bertugas atas nama mereka.

Menjadi problematis ketika 18 tahun pasca orde baru yang sangat dominan dan berorientasi pada pembangunan, ideologi pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat itu memudar. Masyarakat kini cenderung berpandangan bahwa pembangunan adalah dari dan oleh negara, untuk masyarakat. Ibu Saripah yang sudah puluhan tahun menjadi kader Posyandu dan inilah juga yang dikonfirmasi oleh Bu Kridiana (34), seorang bidang Puskesmas kelurahan, bahwa Posyandu adalah milik masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai gotong royong, secara ideologi dan instrumental pada masa kini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Satu hal yang merupakan cenderung menjadi kekurangan negara, adalah sifatnya yang cenderung menyamakan antarmasyarakat.

Negara berharap, dengan menggunakan romantisme masa lalu mengenai gotong royong sebagai model ideal, dapat meningkatkan nilai gotong royong tersebut di kalangan warga masyarakat dan mengukuhkan keyakinan bahwa masyarakat lokal adalah masyarakat yang mandiri, dan, tentu saja bersamaan dengan itu, untuk meningkatkan campur tangan dan pengawasannya terhadap masyarakat lokal. Masyarakat ideal menurut pandangan negara itu didasarkan pada asumsi kesetaraan yang cenderung menafikan karakteristik tiap-tiap masyarakat. “Kota dan negara selalu berubah dan harus dipahami dalam konteks sejarah masing-masing. Gambaran-gambaran tentang pedesaan Jawa dan masyarakat ideal karena itu adalah cara negara dan rakyat melihat masa lalu dan masa depan” (Newberry 2013:53).

Maka melalui paragraf ini saya ingin menawarkan istilah, jika dahulu *everyday state* dapat dimungkinkan karena rakyat bekerja secara gotong royong dan organik mewujudkan diri mereka yang ideal, kini mungkin *everyday state* itu berubah menjadi *monthly state*. Negara seakan-akan hanya hadir dalam konteks ruang dan waktu tertentu, dalam RW 02 misalnya, negara hanya hadir pada hari Selasa minggu pertama setiap bulannya, yaitu ketika program pelayanan kesehatan untuk balita diadakan. Atau, negara hadir ketika rapat-rapat koordinasi yang dilakukan setiap bulan. Bahkan lebih parahnya, negara hanya hadir ketika diadakan lomba-lomba tertentu.

SIMPULAN

Tampaknya, ideologi ibuisme yang pada masa orde baru terbangun dengan masif, pada konteks masa kini menjadi semakin pudar. Negara tidak bisa dihadirkan sehari-hari jika hanya mengandalkan pada kesukarelaan kaum perempuan dan ibu rumah tangga seperti pada masa lalu. Usaha untuk mewujudkan masyarakat yang ideal, khususnya dalam hal kesehatan, harus

memperhatikan dinamika setiap masyarakat sebagai sasaran pembangunan. Para ibu rumah tangga yang menjadi kader Posyandu, meskipun mengaku mau bekerja untuk negara dalam konteks sukarela, sebenarnya dibalik itu mereka mau bekerja salah satunya karena alasan SK dan insentif sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada negara. Hal ini mengisyaratkan adanya repsirositas atau hubungan timbal balik antara kader Posyandu dan negara. Selain itu, lomba-lomba yang diadakan pemerintah juga menjadi salah satu yang membuat “motor” pengawasan negara terhadap masyarakat lokal dapat terus berjalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada para informan yang telah memberikan waktunya untuk bersedia diwawancarai, yaitu Ibu Saripah, ketua Posyandu Anggrek 2, Ibu Jumakyah dan Ibu Dwi Lestari, anggota dan sekretaris Posyandu Anggrek 2, Ibu Siti Aminah, ketua paguyuban Posyandu kelurahan Ciptomulyo, dan Ibu Krisdiana Sulistya, bidan Puskesmas kelurahan Ciptomulyo. Saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada Posyandu Anggrek 2 karena memperbolehkan saya melakukan pengamatan. Selain itu, terima kasih juga para pengajar di Departemen Antropologi FISIP-UI, khususnya untuk Profesor Achmad Fedyani Saifuddin atas diskusi-diskusi kritisnya baik selama di kelas maupun secara personal.

DAFTAR PUSTAKA

Djajadiningrat-Nieuwenhuis, Madelon. 1987. *Ibuisms and Priyayization: Path to Power? Dalam Indonesian Women in Focus: Past and Present*

¹1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2) gotong royong, 3) pangan, 4) sandang, 5) perumahan dan tata laksana, 6) pendidikan dan ketrampilan, 7) kesehatan, 8) pengembangan kehidupan berkoperasi, 9) kelestarian lingkungan hidup, dan 10) perencanaan kesehatan

ⁱⁱ Puskesmas, kependekan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu organisasi pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan, satu tingkat di atas Posyandu. Puskesmas bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten. Dalam hal ini, Puskesmas memiliki

Notions, diedit oleh Elsbeth Locher-Scholten dan Anke Neihof hal. 43-51. Dordrecht, Belanda: Foris Publication.

Geertz, Hildred. 1961. *The Javanese Family*. NY: Free Press of Glencoe.

Gibson, Thomas. 1995. *Having Your House and Eating It: Houses and Siblings in Ara, South Sulawesi*. Dalam *About the House: Levi-Strauss and Beyond*, diedit oleh Janet Carsten dan Stephen Hugh Jones, hal. 129-148. Cambridge, Inggris: Cambridge University.

Koentjaraningrat. 1961. *Some Social-Anthropological Observations on Gotong Royong Practices in Two Villages of Central Java*. Diterjemahkan oleh Claire Holt. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Newberry, Jannice. 2013. *Back Door Java: Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa*. Diterjemahkan oleh Bernadetta Esti Sumarah dan Masri Maris. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sullivan, Nancy. 1983. *Indonesian Women in Development: State Theory and Urban Kampung Practice*. Dalam *Women's Work and Women's Roles: Economic and Everyday Life in Indonesia, Malaysia, and Singapore*. Diedit oleh Leonore Manderson, hal. 147-172. Canberra: Development Studies Centre.

Suryakusuma, Julia. 1991. *State Ibuisms: The Social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order*. *New Asian Visions* 6(2): 46-71

Turner, Victor M. Dan E. M. Burner (Penyunting). 1986. *The Anthropology of Experience*. Urbana: University of Illionis Press.

fungsi pembinaan dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Posyandu

ⁱⁱⁱSetiap tiga bulan sekali, selain mendapat sereal dan susu, ibu dan balita yang hadir di kegiatan pelayanan kesehatan juga mendapat makanan berat, yaitu makanan bernasi, biasanya adalah sup sayur. Kegiatan memasak dikoordinasikan oleh ibu-ibu di tingkat RT, dipimpin oleh ibu RT, istri ketua RT.

Politik Kekerabatan dan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Rina Hermawati

Departemen Antropologi FISIP Unpad
rina.antrop@gmail.com

Nunung Runiawati

Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad
nruniawati@yahoo.com

Abstrak

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung semakin meneguhkan politik kekerabatan di Indonesia. Politik kekerabatan merupakan strategi untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan keluarga atau kerabat pada jabatan-jabatan politik secara formal maupun informal. Berbagai daerah di Indonesia seperti Banten, Cimahi, Bantul, Kendal, Indramayu, Bali dan sebagainya menjadi contoh jelas dari menguatnya politik kekerabatan ini. Artikel ini akan menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan menguatnya politik kekerabatan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait kasus-kasus pemilihan kepala daerah. Hasil kajian menunjukkan menguatnya politik kekerabatan disebabkan karena semakin memburuknya institusionalisasi kepartaian pada umumnya, dan melemahnya kemampuan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada khususnya. Politik kekerabatan menjadi pilihan yang menarik bagi parpol untuk memenangkan posisi-posisi politik karena adanya keunggulan-keunggulan elektoral yang nyata dari tokoh kekerabatan yang sedang menjabat, seperti popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan mobilisasi massa. Politik kekerabatan ini memberi peluang menguatnya nepotisme, patron klien, patrimonialisme, dan sistem rekrutmen yang tidak transparan dengan berbagai turunannya. Bahkan, politik kekerabatan merupakan bahaya laten terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, perlu penguatan fungsi partai politik khususnya fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat menjadi agenda yang tidak bisa dilupakan.

Kata kunci : politik kekerabatan, partai politik, rekrutmen, kaderisasi, demokrasi

PENDAHULUAN

Sistem pemilihan kepala Daerah secara langsung tentunya membawa berbagai macam konsekuensi bagi

perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu fenomena yang semakin menguat adalah dominannya politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hasil penelusuran harian Kompas pada tahun 2013 menunjukkan terdapat 57 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai hubungan kerabat atau keluarga dengan pejabat lain. Mereka tersebar di 15 provinsi yaitu Lampung, Sulawesi Selatan, Banten, Sulawesi Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Maluku (Kompas, 18 Oktober 2013).

Menguatnya politik kekerabatan ini dapat dijelaskan dari berbagai perspektif. Pendekatan neo patrimonialisme menyebutkan bahwa politik kekerabatan merupakan eksekusi negatif dari otonomi daerah yang menjadikan demokrasi terbayak oleh sirkulasi hubungan inti genealogis berdasarkan relasi kekeluargaan maupun di luar garis genealogis yang memiliki kepentingan terhadap pelanggaran kekuasaan family (Djati, 2013).

Pendekatan lainnya menyebutkan politik kekerabatan disebabkan karena adanya warisan feodalisme yang masih menancap kuat dalam masyarakat. Feodalisme yang dimaksud bukan hanya penguasaan sumber daya ekonomi saja, tetapi juga terbentuknya loyalitas dalam masyarakat dengan melibatkan para tokoh informal. Tokoh informal tersebut pada umumnya memiliki massa besar yang digunakan untuk menopang kekuasaan keluarga. Mutualisme tersebut dibangun atas mekanisme pertukaran kepentingan, yaitu tokoh informal mendapatkan aksesibilitas terhadap pembuatan kebijakan publik, sedangkan keluarga bisa mengikat loyalitas pemilih melalui pengaruh tokoh informal.

Pendekatan yang ketiga, politik kekerabatan sebagai bentuk politik predator. Studi pendekatan ini dilakukan oleh Asako (2010) dan Mc Coy (1994) yang menganalisis tumbuhnya politik kekerabatan/dinasti politik justru karena adanya koalisi bisnis-politik di tingkat lokal. Dalam hal ini jejaring keluarga telah

menguasai berbagai proyek pembangunan daerah yang kemudian dibagi-bagikan kepada kroni-kroninya. Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, nampak bahwa munculnya politik kekerabatan dapat dipandang sebagai eksekusi negatif dari otonomi daerah, budaya feodalisme dan koalisi bisnis-politik di tingkat lokal.

Kecenderungan politik kekerabatan yang berkembang di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari fungsi partai politik, karena bagaimanapun juga, mekanisme rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa anggota keluarga politik sekaligus merupakan pengurus partai politik sehingga memperkuat politik kekerabatan. Kajian ini akan menggambarkan peran parpol dalam melahirkan politik kekerabatan dan bagaimana implikasinya bagi demokrasi di Indonesia.

Politik Kekerabatan Ditinjau dari Aspek Antropologi

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar.

Menurut Chony dalam Ali Imron (2005:27), sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja karena adanya ikatan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga, tetapi karena adanya hubungan darah". Selain itu Chony juga mengungkapkan bahwa kunci pokok sistem perkawinan adalah kelompok keturunan atau lineage dan garis keturunan atau descent. Anggota kelompok keturunan saling berkaitan karena mempunyai nenek moyang yang sama. Kelompok keturunan ini dapat bersifat patrilineal atau matrilineal. Sedangkan Keesing dalam Ali Imron (2005:27) menjelaskan bahwa sistem kekerabatan adalah hubungan berdasarkan pada model hubungan yang dipandang ada antara seorang ayah dengan anak serta antara seorang ibu dengan anak. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial, yang merupakan sebuah jaringan hubungan kompleks berdasarkan hubungan darah atau perkawinan.

Kajian antropologi politik melihat kekerabatan sebagai bagian penting dalam sistem politik masyarakat. Hasil kajian Fortes dan Evans Pritchard dalam bukunya *African Political Systems* (1940) membahas praktik

politik masyarakat ke dalam tiga tipe. Pertama, masyarakat yang mempunyai kekuasaan terpusat, hirarki administratif dan lembaga hukum yang ditetapkan dengan jelas. Struktur administratif berisikan struktur politik dan karenanya memiliki sebuah pemerintahan yang menyerupai negara. Dalam struktur kekuasaan, tugas dan wewenang politik tertata dengan rapi mulai dari tingkat tertinggi sampai pada struktur kelompok yang paling rendah/kecil. Kedua, sistem politik dengan struktur politik yang tidak mempunyai kekuasaan pusat, mesin administratif atau pengadilan dengan kekuasaan untuk menjatuhkan keputusan tidak tertata dengan jelas, dimana dalam struktur politik tugas dan wewenang tidak tertata secara rapi sehingga kadang disebut masyarakat tak bernegara. Dalam masyarakat seperti ini garis keturunan dipergunakan sebagai kerangka satuan politik, sehingga perilaku politik terikat sangat kuat dengan dan tercakup oleh sistem pertalian keluarga. Ketiga, kelompok komunitas kecil yang keseluruhannya dipersatukan oleh ikatan kekeluargaan, kelompok masyarakat tersebut terbentuk berupa gerombolan keluarga atau keluarga pengembara yang hidupnya kadang berpindah dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan ketersediaan makanan, baik makanan untuk kebutuhan kelompok maupun makanan untuk kebutuhan ternak.

Kajian lainnya Evans Pritchard tentang struktur politik bangsa Nuer di Sudan menemukan bahwa struktur politik bangsa Nuer sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang berkaitan dengan ekologi. Dalam analisisnya tentang mata pencaharian dengan lingkungan alam tempat tinggal, kondisi geografis bangsa Nuer menyebabkan mereka menyebar di suatu daerah yang luas. Jika tiba musim hujan bangsa Nuer menetap di desa karena tersedia air dan rumput yang cukup untuk ternak. Sedangkan jika musim kemarau tiba bangsa Nuer meninggalkan desa-desa mereka dan tinggal di perkemahan dimana terdapat rumput dan air yang cukup untuk ternak. Semakin besar kelompok pengembara, ikatan kekerabatannya cenderung melemah karena dalam setiap kelompok kecil bersaing secara politik untuk menguasai air dan rumput untuk ternak. Semakin kecil kelompok pengembara semakin kuat ikatan kesatuan mereka. Keadaan itu menunjukkan struktur sosial mereka didasarkan atas lineage, yaitu kelompok kekerabatan yang unilineal, dimana silsilah keturunan dapat diketahui dengan jelas.

Berdasarkan dua uraian kajian tersebut, nampak bahwa praktik politik kekerabatan telah dikenal sejak lama dalam sistem politik di Afrika dan bangsa Nuer di Sudan. Politik kekerabatan ini tidak hanya berlaku

pada masyarakat desa yang penuh dengan ikatan kekerabatan, akan tetapi dapat berlangsung pula pada masyarakat perkotaan. Eric Wolf dalam studinya tentang arti dan peran keluarga dalam percaturan politik ia menemukan bahwa politik keluarga dapat pula berlaku di beberapa Kota Austria dan Pulau Sicilia. Kelompok keluarga yang memiliki lahan yang luas telah mendirikan pabrik yang dikelola dengan sistem keturunan. Pimpinan pabrik diangkat dari keluarga inti. Politik keluarga nampak ketika terjadi rencana pengalihan lahan oleh pemerintah dalam rangka pelebaran jalan dan perluasan kota. Kelompok keluarga akan berkoalisi untuk mempertahankan lahannya. Dimulai dengan mengumpulkan sejumlah harta kekayaan untuk menebus sebagai jaminan kepada pemerintah, sampai pada tuntutan hukum di pengadilan. Bahkan pada tingkat tertentu mereka berkumpul dan berbaris menjadi benteng dan perisai hidup guna mempertahankan lahan pabriknya.

Politik kekerabatan ini terus dipelihara dan dikembangkan dalam politik kekinian masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Dal Bo mengenai politik kekerabatan di Amerika Serikat, Pablo Querubin dan Mendoz mengenai politik kekerabatan di Philipina menunjukkan hasil yang sama bahwa kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Hasil penelitian Dal Bo menunjukkan bahwa seorang legislator yang kerabatnya telah menduduki jabatan politik, mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih. Atau dengan kata lain, seseorang yang berkuasa, mempunyai peluang yang lebih besar untuk mempertahankan kekuasaannya dan lebih memungkinkan untuk membentuk politik kekerabatan. Hal ini disebabkan karena political capital yang terkait dengan mesin politik dapat diwariskan dalam keluarga. Oleh karena itu, fenomena politik kekerabatan tetap eksis sampai saat ini.

Partai Politik dan Politik Kekerabatan

Partai politik memiliki peranan penting bagi bekerjanya mekanisme demokrasi. Hal ini berkaitan dengan fungsi partai politik untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, melakukan pendidikan politik kepada rakyat, melakukan rekrutmen politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan, memformulasi dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif dan menjadi penengah antara

kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakan-kebijakannya.

Dalam era pemilihan kepala daerah, tantangan terbesar partai politik saat ini adalah melakukan rekrutmen yang benar untuk mengisi jabatan-jabatan politik, khususnya dalam konteks desentralisasi, dimana kepala dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik menjadi aktor yang menentukan proses pencalonan kandidat kepala daerah. Namun demikian, peran politik ini seolah-olah hanya terjadi pada saat pencalonan kandidat saja. Proses pemenangan kandidat selanjutnya ditentukan oleh popularitas kandidat itu sendiri dengan dukungan tim-tim sukses bentukan para kandidat.

Popularitas calon kandidat menjadi dasar pertimbangan utama dalam menentukan pilihan partai politik. Tokoh-tokoh populer yang berasal dari kalangan selebriti, artis, pengusaha besar, birokrat, atau tokoh patronase lokal menjadi pigur yang banyak diminati partai politik. Sistem parpol menjadi kurang memiliki insentif untuk melahirkan calon-calon pemimpin lokal melalui sistem kaderisasi yang bagus. Biasanya kader-kader parpol ini akan kalah populer dibandingkan dengan kalangan selebriti maupun pesohor lainnya.

Pemilukada selama ini telah membuat proses pelembagaan parpol dan pengelolaan parpol menjadi semakin problematis. Di sisi lain, secara internal partai politik mengalami berbagai dalam membangun institusinya karena minimnya sumber daya yang dimiliki partai politik (keuangan, sumber daya manusia dan fasilitas fisik lainnya). Di sisi lain, pemilukada menuntut partai politik memiliki kader yang siap memenangkan pertarungan dari Pemilukada.

Kedua hal tersebut menyebabkan partai politik tergiring untuk mendukung kandidat-kandidat yang diajukan oleh para petahana (*incumbent*) yang masih memiliki banyak *political resources* dan otoritas formal atau yang sudah tidak mungkin lagi maju berkompetisi karena aturan pembatasan masa jabatan. Ikatan kekerabatan dengan para *incumbent* atau tokoh sentral parpol jelas saja membuat nepotisme menjadi menonjol. Para petahana memang memiliki banyak keunggulan elektoral untuk memenangkan kompetisi politik lokal. Selain tentunya sudah dikenal luas, mereka ini bisa mempolitisasi birokrasi dengan iming-iming mutasi maupun promosi untuk mendukung kemenangan calon yang dinominasikannya. Dengan demikian, politik kekerabatan sesungguhnya menjadi strategi partai politik untuk merebut ataupun mempertahankan kekuasaan.

Dengan demikian, upaya meminimalisasi politik kekerabatan bisa dimulai dengan cara membangun institusi partai politik. Secara umum, dapat dikatakan bahwa masalah pokok yang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia berhubungan dengan lima isu utama: (1) kapasitas organisasional (seperti misalnya kemampuan memobilisasi dan mengelola sumber-sumber finansial, personel, dan material); (2) memelihara integrasi (seperti misalnya kemampuan mencegah perpecahan internal sebagai akibat dari hadirnya perbedaan dalam tubuh partai); (3) mempraktikkan demokrasi secara internal (misalnya menegakkan mekanisme yang demokratis dalam pengambilan keputusan penting); (4) kemampuan memenangkan pemilu (seperti misalnya dalam menentukan isu-isu kampanye dan rekrutmen kandidat anggota parlemen), dan; (5) pengembangan ideologi partai seperti misalnya dalam menentukan posisi partai terhadap isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka membangun institusi partai politik yang sehat, Randall dan Svasand (dalam Harjanto, 2011) menyebutkan bahwa pelebagaan parpol melibatkan setidaknya empat variabel penting yaitu *systemness*, *decisional autonomy*, *value infusion*, dan *reiftcation*. *Systemness* merujuk pada pengelolaan infrastruktur parpol dan dinamika internalnya. *Decisional autonomy* terkait dengan hubungan parpol dan eksternalnya, khususnya menyangkut otonomi politik dan finansial, keterkaitannya dengan massa, dan kemampuan parpol untuk otonom dari permainan politik di tingkat nasional dan lokal. *Value infusion* mirip dengan pemahaman di atas, terkait dengan dimensi *attitudinal* pelebagaan parpol dimana nilai-nilai ideologis yang dapat menarik dan melekat pada para anggota atau pendukung menjadi perhatian utama dan terakhir, *reiftcation* terkait dengan kemampuan parpol untuk menanamkan suatu citra atau *brand name* tertentu di benak para pemilih. Dalam mencapai kelembagaan partai politik ini diperlukan undang-undang kepartaian yang mampu mendorong, memfasilitasi, dan menjamin eksistensi partai politik untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya.

Budaya Politik Masyarakat

Faktor lainnya yang mempengaruhi semakin berkembangnya politik kekerabatan adalah budaya politik masyarakat. Almond dan Verba (1984) mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola

orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu.

Lebih jauh, Almond mengklasifikasikan budaya politik menjadi tiga tipe yaitu :

1. budaya politik parokial dimana kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada sekali terhadap sistem politik. Kelompok ini aka ditemukan di berbagai lapisan masyarakat.
2. budaya politik kaula adalah mereka yang berorientasi terhadap sistem politik dan pengaruhnya terhadap outputs yang mempengaruhi kehidupan mereka seperti tunjangan sosial dan hukum. Namun mereka tidak berorientasi terhadap partisipasi dalam struktur inputs.
3. budaya politik partisipan adalah individu yang berorientasi terhadap struktur inputs dan proses dan terlibat didalamnya atau melihat dirinya sebagai potensial terlibat, mengartikulasikan tuntutan dan membuat keputusan.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut.

No	Budaya Politik	Uraian/Keterangan
1.	Parokial	<p>a. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek <i>input</i>, obyek-obyek <i>output</i>, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.</p> <p>b. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.</p> <p>c. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.</p> <p>d. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem</p>

		<p>politik.</p> <p>e. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.</p> <p>f. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.</p>			<p>obyek umum, obyek-obyek <i>input</i>, <i>output</i>, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.</p> <p>b. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek <i>input</i> dan <i>output</i> sistem politik)</p> <p>c. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik</p> <p>d. Masyarakat berperan sebagai aktivis.</p>
2.	Subyek/Kaula	<p>a. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek <i>output</i> dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek <i>input</i> secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.</p> <p>b. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah.</p> <p>c. Hubungannya terhadap sistem politik secara umum, dan terhadap <i>output</i>, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.</p> <p>d. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur <i>input</i> yang terdiferensiasikan.</p> <p>e. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.</p>			
3.	Partisipan	<p>a. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai</p>			

Diantara ketiga tipe budaya politik tersebut, budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat *efficacy* atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukkan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (*trust*) antar warga negara. Oleh karena itu dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.

Budaya politik partisipan juga memungkinkan warga untuk memilih pemimpinnya dengan rasional, mengutamakan visi dan misi kandidat ketimbang hubungan-hubungan yang bersifat patrimonial. Dalam rangka mewujudkan budaya politik partisipan, maka perlu adanya upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1984. Budaya Politik : Tingkah Laku Politik Dan Demokrasi Di Lima Negara. Jakarta: Bina Aksara
- Djati, Warsito, Raharjo. 2013. Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi. Dinasti Politik di Aras Lokal. Jurnal Sosiologi Masyarakat Indonesia Volume 18 No 2
- Haryanto, Nico. 2011. Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. Analisis CSIS Volume 43 No 2, 138-159
- Nurul, Qolbi, Izazy. Sisi Lain Politik Dinasti. Majalah Sosial Universitas Indonesia, Jakarta 2011
- Zuhro, Siti. 2009. Demokrasi Lokal : Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal. Yogyakarta: Ombak

KONTRIBUSI PERAN POLITIK *TUAN GURU* DALAM DEMOKRASI LOKAL DI KALIMANTAN SELATAN

Mukhtar Sarman
Universitas Lambung Mangkurat
mochtar_sar@yahoo.co.id

Abstrak - Bagi masyarakat dari suku Banjar di Kalimantan Selatan, secara tradisional *Tuan Guru* adalah tokoh masyarakat yang dimuliakan karena dianggap sebagai pemangku kekuasaan di ranah spiritual. Hal itu ada kaitannya dengan peran penting *Tuan Guru* dalam segala aspek kehidupan sosial ‘orang Banjar’, dari sejak mereka dilahirkan hingga ketika meninggal dunia. Dalam perkembangan mutakhir, ternyata peran *Tuan Guru* itu juga merambah ke dunia politik, karena adanya ‘undangan’ para elit politik yang melihat potensi dukungan suara yang dimiliki oleh *Tuan Guru*. Masalahnya adalah, kehadiran *Tuan Guru* dalam dunia politik dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai tindakan yang mencemarkan peran *genuine*-nya sebagai pemangku kekuasaan di ranah spiritual. Paling tidak, itulah yang sedikit banyak terperagakan dalam dinamika Pilkada Langsung sebagai sistem politik yang diterapkan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah di Indonesia pasca Orde Baru. Padahal dalam tataran ideal, seharusnya peran politik *Tuan Guru* bisa sangat signifikan dalam proses demokratisasi di ranah lokal.

Kata kunci: *Tuan Guru*, ranah spiritual, demokrasi lokal, Pilkada Langsung, politik sedekah.

PENDAHULUAN

“Orang Banjar” (dalam bahasa lisan diucapkan sebagai *Urang Banjar*) adalah sebutan untuk penduduk yang kini bermukim di Kalimantan Selatan, atau orang yang merasa dirinya sebagai kelompok etnis Banjar. Merujuk pada JJ Ras, sebagaimana dikutip oleh Hasan (2007:106-111), asal usul suku ini berasal dari konsentrasi koloni Melayu yang pertama terdapat di daerah Tabalong, yang kemudian berkembang menjadi suku Banjar, yang disebutnya sebagai *Bandjar on the coast*. Mereka ini bermigrasi dari Indonesia bagian Barat pada permulaan abad pertama Masehi. Mereka memasuki bagian Timur “Teluk Besar” pada lereng-lereng kaki Pegunungan Meratus. Pada wilayah tua

inilah golongan Melayu berbaur dengan kelompok Olo Maanyan dan orang-orang Bukit, dan mendirikan Kerajaan Tanjung Pura yang mungkin terletak di daerah Tanjung kabupaten Tabalong sekarang.

Istilah “Banjar” ditemukan dalam *Hikayat Banjar* dengan asal kata “Bandarmasih”, yang umum dipakai untuk menyebut “Negeri Bandarmasih”. Disebutkan nama Bandarmasih disebabkan nama orang besar yang ada di Banjar kala itu adalah Patih Masih. Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung pedukuhan atau desa, yang terletak di atas air sepanjang sungai. Nama Patih Masih adalah nama sebutan dari Patih Oloh Masih yang artinya Patih orang Melayu sebagai sebutan yang ditujukan kepada kepala suatu kelompok etnis di daerah Kalimantan (Saleh, 1975:17).

Budaya Banjar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Bahkan Islam menjadi dasar budaya Banjar. Dalam sejarahnya budaya Banjar pernah bersentuhan dengan budaya Jawa ketika kerajaan Banjar menjadi *vasal* kerajaan Demak. Juga secara kultural pernah bersentuhan dengan budaya Sumatera, terutama Aceh, ketika tokoh-tokoh agamanya seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin al-Raniry menjadi guru intelektual dan spiritual masyarakat Banjar melalui ajaran *tasawuf wihdatul wujud* dan kitab *Sirathal-Mustaqim* (Usman, 1994:164).

Merunut pada sejarahnya, agama Islam adalah ‘agama negara’ untuk Kesultanan Banjar (Ideham dkk, 2007).¹ Oleh karena itu bagi sebagian besar penduduk di Kalimantan Selatan, sebagai keturunan dari rakyat Kerajaan Banjar, status agama Islam itu lebih sebagai “agama keturunan” dan mereka tidak pernah mempertanyakan lagi kenapa harus beragama Islam. Sebagai agama keturunan, warga masyarakat Banjar belajar agama Islam sejak masih sangat belia, dan salah satu hal yang diajarkan adalah: *mereka wajib menghormati orangtua dan guru-guru agamanya*. Di ranah sosial, guru agama yang wajib

¹ Islam adalah “agama resmi” pada masa Kerajaan Banjar (1526-1905), dan karena itu hampir otomatis setiap penduduk di wilayah Kerajaan Banjar adalah penganut Islam. Pada masa kini, tidak ada data statistik yang menyebutkan orang Banjar itu ada yang beragama lain kecuali Islam. Tetapi sebenarnya ada fakta sejarah bahwa orang Banjar itu semula beragama Hindu, dan “sisa” orang Banjar macam itu di masa kini masih dapat ditemukan pada

kelompok masyarakat yang bermukim di sekitar pegunungan Meratus. Sungguh pun demikian, penduduk di sekitar pegunungan Meratus itu seringkali kurang diakui sebagai *Urang Banjar*, karena sebutan stigmatisnya adalah “orang Bukit” (alias ‘orang gunung’), dan pada umumnya mereka masih menganut animisme atau agama Hindu kuno, dan sebagian malah kemudian beragama Kristen.

dimulihkan itu muncul dalam personifikasi “orang alim” yang disebut *Tuan Guru*.²

Pentingnya peranan *Tuan Guru* dalam struktur sosial orang Banjar tidak terlepas dari banyak rangkaian tradisi kehidupan sosial masyarakat di Kalimantan Selatan amat tergantung pada peran *Tuan Guru*. Peran *Tuan Guru* muncul misalnya dalam upacara perkawinan hingga ritual ketika orang sudah meninggal dunia. Ketika dalam acara akad pernikahan niscaya menghadirkan *Tuan Guru* untuk memimpin “*ijab kabul*” — biasanya kalau orangtua mempelai wanita tidak berani untuk melakukannya sendiri. Ketika memberi nama anak, disebut *batasmiyah*, juga menghadirkan *Tuan Guru*, minimal untuk membacakan doa atas pemberian nama tersebut. Bahkan ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga, seringkali suami isteri minta nasihat *Tuan Guru*, dan *Tuan Guru* itulah yang acapkali mampu mendamaikan rumah tangga yang retak. Supaya usaha dagang lancar, banyak kalangan pedagang pergi ke *Tuan Guru* untuk berkonsultasi, atau minta ‘*amalan penglaris*’. Juga ketika ada masalah pekerjaan di kantor, saran *Tuan Guru* lebih didengarkan. Bahkan ketika kehilangan barang, karena dicuri orang yang tidak diketahui identitasnya, *Tuan Guru* juga menjadi solusi yang lebih dipercaya *ketimbang* polisi. Tak terkecuali kalau ditimpa musibah, misalnya sakit panas atau kesurupan dengan asumsi karena pengaruh makhluk ghaib, *Tuan Guru* dipercaya lebih handal untuk mengatasinya daripada dokter spesialis atau psikiater. Dengan kata lain, dari segala aspek kehidupan, warga masyarakat bisa minta bantuan *Tuan Guru*. Dan karena itulah, wajar kalau kemudian *Tuan Guru* merupakan tokoh yang dipercaya punya kapasitas spiritual yang mumpuni dan dihormati masyarakat pada umumnya.

Dilihat dari pelapisan sosial, *Tuan Guru* inilah yang mendapatkan kehormatan tertinggi dalam struktur sosial masyarakat Banjar tradisional. Pada tingkatan yang lebih rendah muncul kemudian status mereka yang termasuk dalam kategori “orang kaya” (Banjar: *urang sugih*), kaum pegawai (atau ‘orang kantor’), dan akhirnya kaum *jaba* (alias ‘orang kebanyakan’ atau rakyat biasa). Dalam preferensi masyarakat Banjar tradisional, orang kaya itu biasanya melekat pada “orang dagang” atau yang pekerjaannya berniaga atau punya perusahaan dagang. Tetapi dalam perkembangan mutakhir, sebutan “orang kaya” itu terutama untuk menunjukkan oknum yang

memiliki banyak aset dan properti, dan tidak selalu harus “orang dagang”. Bahkan masyarakat Banjar masa kini agak mafhum apabila kategori orang kaya itu juga melekat pada pejabat pemerintah. Istilah “*jaba*” itu arti harfiahnya adalah “orang awam”, dan semula ditujukan kepada kelompok masyarakat yang kurang begitu menguasai ilmu agama kecuali sekadar bisa shalat. Tetapi secara kultural, kaum *jaba* itu maksudnya adalah sebutan untuk rakyat yang dalam bekerja mencari nafkah tidak tergantung pada pemerintah, seperti misalnya petani, pedagang kecil, pengrajin, dan lain-lain.



Gambar 1. Pelapisan Sosial pada Masyarakat Banjar Tradisional dan Perubahannya

Dalam perkembangan kemudian, yakni setelah kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin terbuka dan stratifikasi sosial semakin tidak jelas garis pembatasnya, struktur sosial *Urang Banjar*ipun menjadi cair dan tercampur-campur. Meskipun *Tuan Guru* tetap memiliki posisi terhormat, dan dihormati semua orang, namun dalam stratifikasi masyarakat kontemporer mengalami perubahan yang signifikan. Mereka yang mendapat kuasa karena jabatan politik (penguasa) diam-diam melakukan hegemoni budaya terhadap entitas lain, termasuk kalangan orang alim (lihat Gambar 1). Hal itu diduga ada kaitannya dengan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh Pemerintah, sebagai tempat berhimpunnya para ulama, yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Perubahan itu semakin kasat mata pasca Orde Baru tatkala semua orang merasa berhak untuk dipilih menjadi pejabat publik (baca: Kepala Daerah) melalui mekanisme Pilkada Langsung, dan berusaha “memanfaatkan” wibawa para *Tuan Guru* untuk kepentingan politiknya.

yang kadangkala juga mengajarkan kitab kuning tetapi dalam pengertian teks klasik untuk ilmu pengetahuan Islam yang ortodoks. *Tuan Guru* tidak selalu memiliki pesantren, seperti Kiai di pulau Jawa, karena tempat mengajar ‘murid-muridnya’ hanya dilakukan di rumah dia tinggal, atau di *surau* dekat rumah tinggalnya (Sebagai perbandingan lihat Martin van Bruinessen, 1995. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Penerbit Mizan, Bandung).

² Secara tradisional masyarakat Banjar sebenarnya lebih mengenal sebutan “Tuan Guru” daripada Kiai. *Tuan Guru* adalah mereka yang mengajarkan kitab (sebutan buku cetakan dalam bahasa dan huruf Arab Melayu), dan murid-muridnya tidak terbatas pada kelompok tertentu. Kitab yang dibaca para *Tuan Guru* itu biasanya disebut ‘kitab kuning’, karena kertas bukunya berwarna kuning, yang diimpor dari Timur Tengah. Sedangkan sebutan Kiai, karena pengaruh kultur Nahdlatul Ulama yang diserap dari bahasa Jawa, adalah sebutan yang melekat pada pemilik pondok pesantren,

Persentuhan Tuan Guru dengan Dunia Politik

Tidak ditemukan informasi, sejak kapan *Tuan Guru* bersentuhan dengan dunia politik, dan menjadi bagian dari *political society*. Tetapi jikalau membaca sejarah perkembangan ulama di Indonesia membangun kekuatan politik melalui organisasi massa, misalnya Nahdlatul Ulama (“Kebangkitan Ulama”), maka *Tuan Guru* sebagai eksponen ulama dapat diduga mulai berkiprah dalam dunia politik sejak Nahdlatul Ulama didirikan tahun 1926. Dalam sejarahnya, kalangan ulama NU berpolitik didasarkan pada keinginan untuk memperkuat kredibilitas dari eksistensi Islam tradisional yang secara kultural berbasis pada “tradisionalisme Islam”, dan basis sosio-ekonominya ialah petani (pemilik tanah) di pedesaan (lihat Latif, 2005:285-6).

Kiprah *Tuan Guru* dalam organisasi Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan dapat dilacak dari cikal bakal NU yang dalam sejarahnya bermula di Martapura, ketika Haji Abdul Kadir atau dikenal juga dengan sebutan “*Tuan Guru Tuha*”, seorang guru madrasah Darussalam, memprakarsai berdirinya NU di Martapura pada tahun 1927 (Saleh dkk, 1979). Namun, salah seorang tokoh NU dari Kalimantan Selatan yang diakui kiprahnya di tingkat nasional tak pelak lagi adalah Kiai Haji Idham Chalid, yang berasal madrasah *Rakha* (“Rasyidiyah Khalidiyah”), semacam pondok pesantren, dari Hulu Sungai Utara. Mantan guru *Rakha* ini tercatat memangku banyak jabatan politik, antara lain menjadi Wakil Perdana Menteri II dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo (1956-1957), dan menjabat Ketua MPR/DPR-RI (1971-1977) (lihat Mandan, 2008).

Ketika Orde Baru berkuasa, para ulama, termasuk *Tuan Guru* yang berpolitik, kiprahnya terkonsentrasi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan hasil fusi dari beberapa partai Islam di Indonesia. Namun setelah rezim Orde Baru tumbang, dan pada tahun 1999 dibuka keran pendirian partai-partai politik oleh Pemerintah, bermunculanlah partai-partai politik baru yang mengaku berbasis Islam. Partai Islam tersebut misalnya PKB, PKS, PBB, PBR, dan sebagainya. *Tuan Guru*, yang berpolitik, umumnya memilih berkiprah di PPP dan PKB. Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan.

Perihal struktur sosial masyarakat Banjar tradisional menyangkut aspek religiusitas itu perlu diidentifikasi karena dalam jagat politik masyarakat Banjar masa kini, terutama dari kalangan masyarakat awam, posisi orang alim (baca: ulama) tetap amat penting, sekurang-kurangnya sebagai tempat bertanya (dan minta fatwa) tentang figur kontestan mana yang sebaiknya mereka dukung atau pilih. Itu pula sebabnya, dalam kancah pertarungan politik antar elit, orang alim yang dihormati biasanya

berada dalam posisi netral, karena mereka berusaha memegang teguh keyakinan bahwa tugas ulama itu seharusnya berfungsi bagai pelita bagi seluruh umat.

Kekuasaan Pesantren dan Peran Tuan Guru

Mekanisme Pilkada Langsung adalah sistem politik nasional yang berlaku di tingkat lokal untuk memilih Kepala Daerah dengan melibatkan secara langsung rakyat sebagai pemilihnya. Sistem tersebut merupakan produk reformasi politik pasca Orde Baru yang diakui sebagai suatu kebijakan monumental, karena sebelumnya dalam kekuasaan rezim Orde Baru hal itu sungguh tidak bisa dibayangkan bisa terjadi.

Sebuah kontestasi politik seperti halnya Pilkada Langsung adalah sebuah arena pertarungan kekuatan sumberdaya finansial dan sekaligus arena pertarungan kultural. Persaingan politik berdasarkan kekuatan sumberdaya finansial sangat kentara dalam proses politik pencitraan untuk membangun simpati publik. Sedangkan sebagai arena kultural dikaitkan dengan fakta bahwa antar kontestan berusaha keras membangun jaringan sosial terhadap basis-basis kekuasaan kultural. Untuk hal yang terakhir itu selanjutnya berkaitan dengan sebuah jagat spiritualitas yang panggunanya ada di pondok pesantren. Sebagai penguasa spiritualnya ada pada diri seorang *Tuan Guru* yang mengasuh pondok pesantren tersebut.

Tuan Guru dalam preferensi masyarakat tradisional yang bermukim di Kalimantan Selatan adalah bagai pelita di malam gelap, dan secara spiritual berfungsi menerangi jiwa-jiwa yang butuh pencerahan. Karena itu, peran *Tuan Guru* lebih banyak memberi gizi bagi kehidupan nirfisik masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan rohani mereka. Seturut dengan hal itu, *Tuan Guru* dianggap penting, dan beraura kebaikan, terutama bagi mereka yang mencari kehidupan rohaniah; dan relatif dijauhi oleh mereka yang mengutamakan kehidupan duniawi atau tidak peduli dengan akhirat.

Tuan Guru adalah tipikal pemimpin spiritual. Untuk mencapai status *Tuan Guru* itu seseorang biasanya harus menapak mulai dari peran sebagai penceramah agama — sering secara populer disebut *da'i*. Secara tradisional, *Tuan Guru* adalah sebutan yang diberikan masyarakat, yang diukur dari pengakuan atas kapasitas ilmu agama (Islam) seseorang, dan bukan karena status pendidikan formalnya. Itulah sebabnya, seorang *da'i* bisa saja berpendidikan formal *tsanawiyah* (setara sekolah menengah pertama) atau berpendidikan sarjana agama dari suatu perguruan tinggi. Bagi masyarakat awam, latar belakang pendidikan formal itu faktor pembeda yang

signifikan.³ Yang penting, seorang da'i atau penceramah itu piawai memberikan cemarh agama yang menarik hati. Kepiawaian sebagai penceramah akan teruji waktu, dan biasanya setelah pengakuan dari masyarakat diperoleh, dia bisa beranjak menjadi Guru.

Seperti terlukis pada Gambar 2, kedudukan Guru biasanya lebih tinggi daripada seorang penceramah. Guru itu sendiri bisa berarti "guru mengaji" atau sebagai "guru agama" di madrasah. Seseorang yang berstatus sebagai Guru itu dianggap masih harus banyak belajar (istilah yang dipakai biasanya adalah *menyauk*) dari *Tuan Guru*, yang biasanya punya keahlian khusus — misalnya ahli tafsir, ahli hadits, ahli fiqh, dan lain-lain. *Tuan Guru* ini umumnya mempunyai pondok pesantren, baik yang berpola tradisional (*salafiyah*) ataupun mengacu pada pola pendidikan modern (*khalafiyah*), atau boleh jadi mengasuh pondok pesantren berpola campuran. Di atas para *Tuan Guru* ini berada posisi *Tuan Guru Besar*. *Tuan Guru Besar* biasanya hanya satu orang di wilayah tertentu, tetapi bisa juga tidak ada sama sekali karena dianggap tidak ada mumpuni. *Tuan Guru Besar* ini adalah gurunya para *Tuan Guru*, dan kerap kali dia tidak bermukim di pondok pesantren tertentu. Kadangkala *Tuan Guru Besar* hanya menggelar pengajian (berupa majelis taklim) di rumah tempat tinggalnya, dan segenap muridnya — dari berbagai kalangan dan level, termasuk *Tuan Guru* — datang ke tempat pengajian itu. Guru Ijai di Sekumpul Martapura, misalnya, dianggap setara dengan *Tuan Guru Besar*, dan wilayah kekuasaan spiritualitasnya meliputi Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur.⁴ Setelah Guru Ijai meninggal, yang dianggap oleh masyarakat sebagai *Tuan Guru Besar* adalah Guru Bakhiet dari pondok pesantren Nurul Muhibbin, Barabai (Hulu Sungai Tengah).⁵ Para pengikutnya percaya bahwa *Tuan Guru Besar* itu, seperti halnya Guru Ijai dan Guru Bakhiet, punya kelebihan daripada *Tuan Guru* pada umumnya karena menguasai "ilmu bathin" (*tasawwuf*) yang tinggi.

Tuan Guru Besar	Gurunya Tuan Guru
Tuan Guru	Pakar suatu bidang ilmu tertentu
Guru	Menguasai ilmu <i>fiqh</i> dan <i>ushul fiqh</i>
Da'i/Penceramah	Penceramah untuk kalangan awam atau kelompok <i>jaba</i>

Gambar 2. Klasifikasi guru agama Islam di lingkungan masyarakat Banjar

Salah satu penciri kultural dari *Tuan Guru* dan *Tuan Guru Besar*, menurut pandangan awam, adalah kecintaan mereka pada kalangan "*habib*" — sebutan untuk orang alim yang dianggap merupakan keturunan dari Nabi Muhammad melalui puteri beliau, yakni Fatimah az-Zahra. Karena itulah banyak *Tuan Guru* seringkali dianggap menjadi bagian dari keluarga *habib* (*Mulhaq Habib*), walaupun yang bersangkutan bukan keturunan Nabi. Biasanya, *Tuan Guru Besar* menunjukkan sikap tidak mau bersentuhan dengan dunia politik — walaupun tidak menolak siapapun yang datang untuk ikut pengajian atau sekadar datang bersilaturahmi dengannya. Itulah rupanya prasyarat masyarakat untuk mengakui seseorang sebagai gurunya *Tuan Guru Besar*. Tetapi untuk kualifikasi *Tuan Guru* sampai kalangan *da'i*, prasyarat itu tidak berlaku. Termasuk kalau misalnya yang bersangkutan terjun ke dunia politik, dan menjadi "Kiai politik" karena mengurus partai politik.

Kendati tidak jelas benar siapa yang menjadi perintisnya, peran politik *Tuan Guru* pengelola pondok pesantren di Kalimantan Selatan sebenarnya muncul secara signifikan untuk dua ranah kekuasaan spiritual. *Pertama*, *Tuan Guru* tertentu dipercaya memiliki kekuatan supranatural, seolah-olah sebagai pemegang mandat kuasa alam ghaib. Karena posisinya itu, *Tuan Guru* kemudian dimintai bantuan (oleh kontestan tertentu) untuk mendukung kelancaran upayanya meraih kekuasaan di ranah

³ Mengapa masyarakat awam tidak begitu peduli soal asal-usul pendidikan formal da'i atau penceramah itu lebih banyak didasarkan fakta sosial bahwa *Tuan Guru*, sebagai tokoh panutan masyarakat tradisional, pengetahuan agamanya tidak diperoleh melalui bangku sekolah, melainkan dari proses "berguru duduk" alias belajar kitab dari Tuan-Tuan Guru yang menguasai keahlian khusus di bidang ilmu agama tertentu. Kemampuan seseorang dalam penguasaan ilmu agama tidak ditentukan oleh proses pendidikan yang diukur dari "waktu atau masa pendidikan", tetapi lebih ditentukan oleh kedalaman pengetahuannya atas kitab-kitab agama, serta pengakuan dari *Tuan Guru* senior.

⁴ Bukti bahwa Guru Ijai dianggap *Tuan Guru besar*, ketika dia meninggal, begitu banyak *Tuan Guru* yang melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan ribuan jemaah, ada yang mengatakan sampai ratusan ribu, berjejal menyesaki kompleks Sekumpul, sampai membludak ke jalan raya hingga beberapa kilometer, ketika menghantar Guru Sekumpul itu dikebumikan.

⁵ Setelah menjadi semacam *Tuan Guru Besar*, Guru Bakhiet (KH Muhammad Bakhiet) pindah ke Paringin (Kabupaten Balangan) untuk membangun pesantren yang lebih luas, karena jemaah yang datang menghadiri majelisnya telah lebih besar dari seribu orang setiap kali kali pengajian.

publik.⁶ *Kedua*, sebagai pengelola pesantren, dan diasumsikan memiliki massa pendukung eksklusif (berupa santri dan keluarganya) yang signifikan, *Tuan Guru* dimintai dukungannya agar bisa menambah jumlah pemilih yang kelak akan berpihak kepada kontestan yang dekat dengannya.

Untuk kasus peran *Tuan Guru* sebagai ‘perantara jagat spiritualitas’, bantuan yang dibutuhkan oleh para kontestan adalah tindakan yang menyangkut kekuatan *ghaib* yang bersifat mistik. Misalnya, seseorang kontestan ingin agar dirinya lebih berkharisma. Dalam kaitan itu sang *Tuan Guru* bisa membantu kontestan dengan cara melakukan ritual “mandi” agar oknum yang bersangkutan bersih (suci) jiwa raganya. Ritual selanjutnya adalah oknum tersebut kemudian ‘diisi’ batinnya dengan sesuatu amalan tertentu yang dimaksudkan untuk meningkatkan kewibawaannya. Tidak ada yang salah dalam laku semacam ini, terkecuali bahwa seolah-olah ada jalan pintas untuk memunculkan kharisma agar seseorang tampak lebih berwibawa di ruang publik. Meminjam kerangka analisis Anderson (2000), kharisma dan wibawa adalah persoalan bagaimana memaknai arti ‘kuasa’ (*power*) yang dibayangkan bisa diperoleh dari alam *ghaib* dan melekat begitu saja pada diri pemimpin sebagai ‘orang terpilih’ — dan ia biasanya menjadi bagian dari makna kultural kekuasaan pada masyarakat Jawa. Dalam kultur Jawa, seorang pemimpin itu dipercaya memiliki kharisma yang unik dan tidak perlu penjelasan rasional mengapa kharisma ada dan melekat begitu saja pada diri sang pemimpin. Kharisma itu dibutuhkan pemimpin untuk memberikan perlindungan bagi segenap rakyat yang dipimpinya.⁷ Tetapi, dalam kultur masyarakat Banjar, kharisma yang dilekatkan pada seseorang pemimpin adalah kesantunan spiritual karena yang bersangkutan menunjukkan sifat-sifat kenabian,⁸ dan karena itu memang agak berbeda dengan deskripsi Anderson yang mengaitkannya dengan kepercayaan-kepercayaan Jawa tradisional tentang kekuatan mistik dan kesaktian. Oleh karena itu pula, sebenarnya agak kurang masuk akal jika sampai ada

yang mengandaikan kharisma dan kewibawaan personal itu bisa diperoleh dengan jalan pintas. Namun rupanya para kontestan yang bertarung dalam kontestasi Pilkada Langsung Kalimantan Selatan rupanya tak peduli dengan kejanggalan logika tersebut.

Apakah mereka yang telah “dimandikan” oleh *Tuan Guru* niscaya mendapatkan kemuliaan sosial, yang dimulai dengan munculnya dukungan publik yang signifikan untuk dirinya sebagai seorang kontestan yang bertarung dalam kontestasi Pilkada Langsung? Kebetulan belum pernah ada yang mencoba mengevaluasi (atau lebih tepatnya, tidak bisa), misalnya, apakah setelah dimandikan itu seseorang kontestan lalu mendapatkan kenaikan tingkat elektabilitasnya secara luar biasa. Tidak pernah diragukan, dan hampir semua orang mafhum belaka, bahwa alasan utama seseorang memanfaatkan pendekatan spiritual itu lebih pada upaya meningkatkan rasa percaya dirinya. Tetapi yang pasti, biasanya para kontestan selama masa kampanye politik dalam rangka Pilkada Langsung memang tampak lebih *shaleh* dan cenderung lebih rajin *shalat*. Karena itu bagi orang-orang yang dekat dengannya boleh jadi merasakan kesejukan religius tersendiri yang unik.

Pada sisi lain, eksistensi *Tuan Guru* sebagai pengasuh pondok pesantren diasumsikan memiliki massa fanatik yang signifikan. Tetapi, sebenarnya tidak ada jaminan bahwa ketika seseorang *Tuan Guru* pengelola pondok pesantren menyatakan ‘mendukung secara moral’ kepada seseorang kontestan lalu semua santri dan keluarga santri itu akan turut mendukung secara politik kepada kontestan tertentu. Pola patrimonialitas santri di pondok-pondok pesantren di Kalimantan Selatan agak berbeda dengan misalnya pondok pesantren di Jawa dan Madura.⁹ Dalam kultur pondok pesantren di Kalimantan Selatan pada umumnya, yang berpola madrasah dengan banyak guru, anak-anak santri memang (wajib) taat kepada para gurunya di madrasah, tetapi sebatas taat dalam urusan menuntut

⁶ Sebagai catatan: jenis *Tuan Guru* ini adalah mereka yang dipercaya menguasai ilmu *tarekat* berbasis *tasawuf* yang menghasilkan pemahaman tentang aspek mistis keagamaan, dan dengan kemampuan ilmunya itu yang bersangkutan bisa memberikan semacam “kekuatan supranatural” kepada seseorang yang berkenan dibantunya. Tidak semua *Tuan Guru* memiliki ilmu tersebut, dan karena itu pula tidak semua *Tuan Guru* dikunjungi untuk tujuan semacam itu (*sumber*: hasil diskusi saya dengan akademisi IAIN Antasari Banjarmasin, dan hasil pengamatan peneliti sendiri).

⁷ “Kharisma” dalam kultur Jawa ini dalam hal-hal tertentu serupa dengan yang dibayangkan Max Weber sebagai “kualitas tertentu dari kepribadian individu yang menyebabkannya berbeda dengan orang awam dan dianggap diberkati dengan kekuatan atau kualitas supranatural, adi-manusiawi, atau paling tidak kualitas khusus yang luar biasa (Lihat Sung Ho Kim, 2004. *Max Weber's Politics of Civil Society*. [Cambridge University Press], halaman 85). Perbedaannya adalah, dalam pembayangan Weber profil

kekuasaan kharismatik itu nyaris selalu melekat pada kediktatoran, sedangkan dalam tradisi Jawa, meskipun juga otoriter tetapi pemimpin kharismatik ala Jawa itu cenderung melindungi kawulanya.

⁸ Sifat-sifat kenabian itu adalah: jujur, amanah, fathanah, dan lain-lain, yang tidak semua orang bisa menunjukkannya dalam perilaku hidup keseharian. Secara riil sifat-sifat tersebut hanya dapat diperagakan oleh sedikit orang. Biasanya yang agak mampu melakukannya hanya orang-orang “alim” yang rajin beribadah.

⁹ Dalam kultur pesantren di Jawa, dan terutama menyangkut peran Kiai di Madura, santri cenderung manut apa saja yang diperintahkan oleh Kiai pengasuh pondok, termasuk dalam konteks “perintah” untuk mendukung sesuatu entitas politik tertentu (Lihat Martin van Bruinessen, 1995. *Kitab Kuning*. Penerbit Mizan, Bandung. Lihat juga A. Latief Wiyata, 2001. *Proses Demokratisasi di Indonesia: Kasus Pemilihan Bupati Sampang, Madura periode 2000-2005*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat “Kawula Saras”, Jember).

ilmu dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan ibadah untuk bekal ke akhirat. Pada sisi lain, para orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren biasanya tidak sepenuhnya lepas tangan (dan karena itu selalu menengok anaknya tiap saat dibutuhkan) dan kerap kali akan menarik kembali anaknya dari lingkungan pondok pesantren manakala dianggap *manyalaya* (bahasa Banjar: berperilaku tidak lazim). Di sisi lain, bagi para orangtua (dan juga menjadi persepsi para guru madrasah), urusan politik adalah urusan dunia yang tidak pantas menjadi ranah kehidupan bagi anak-anak santri. Karena dua alasan itu, sebenarnya agak berlebihan jika mengandaikan pondok pesantren sebagai lahan subur yang dapat digarap untuk mendapatkan dukungan suara pemilih dalam kontestasi politik.

Namun demikian, bagi para kontestan yang sedang bertarung dalam Pilkada Langsung, alasan mengapa pondok pesantren dijadikan arena kultural ternyata juga lebih dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan *shawab* dari *Tuan Guru* tertentu.¹⁰ Adanya kesan bahwa kontestan tertentu yang ‘dekat’ dengan para *Tuan Guru*, apalagi *Tuan Guru* tertentu yang sudah tersohor, menjadikan seseorang kontestan kemudian membayangkan dirinya ikut mendapatkan aura wibawa keshalehan yang terpancar dari sosok *Tuan Guru* tersebut, dan bukan karena pondok pesantren yang diasuhnya. Tetapi untuk bisa disebut dekat dengan sang *Tuan Guru*, tidak ada cara lain kecuali dengan cara masuk ke dalam lingkungan pesantren. Unikinya, ternyata tidak semua kontestan dapat dengan mudah mendapatkan *shawab* sang *Tuan Guru*. Dalam kaitan itulah lalu muncul peran penting “perantara *Tuan Guru*”.¹¹ Oknum ini bisa berstatus sebagai anggota pengelola pondok pesantren yang bersangkutan, atau anggota keluarga *Tuan Guru*, atau bahkan bukan kedua-duanya tetapi dapat berhubungan langsung dengan sang *Tuan Guru*.

Hubungan diadik antara kontestan dengan *Tuan Guru* pengasuh pondok pesantren itu tidak mungkin terjadi begitu saja, terutama bagi oknum kontestan yang sebelumnya memang tidak pernah masuk ke lingkungan pesantren sang *Tuan Guru*. Karena itu, harus ada oknum perantara yang menghubungkan mereka. Itulah sebabnya ketika seseorang kontestan

bermaksud memberikan sesuatu bantuan kepada pondok pesantren tertentu, jangan tanyakan kepada sang *Tuan Guru* pengasuh pondok apakah dia berkenan menerimanya. *Tuan Guru* pengasuh pondok pesantren pada umumnya tidak pernah berurusan dengan hal-hal teknis pemberian dana yang dilakukan oleh kontestan, karena urusan tersebut merupakan porsi peran dari perantara *Tuan Guru*. Oknum perantara itulah yang akan memberikan informasi tentang apa saja yang “patut” diberikan untuk pondok pesantren yang diasuh oleh sang *Tuan Guru*. Bagi sang *Tuan Guru*, tidak ada alasan baginya untuk menolak pemberian sumbangan untuk pembangunan pondok pesantrennya — karena asumsinya dia tidak pernah meminta sesuatu.¹² Oknum perantara itu pula yang kerap kali mengatur kapan pertemuan khusus dengan sang *Tuan Guru* dapat dilangsungkan, antara lain karena begitu padatnya acara rutin *Tuan Guru* memberikan pengajaran.

Pokok persoalannya kemudian, apakah kontestan yang diketahui publik “didukung” oleh *Tuan Guru* tertentu itu lantas memenangkan kontestasi Pilkada Langsung? Ternyata, tidak ada jaminannya. Sungguh pun demikian, bagi setiap kontestan, rupanya potensi dukungan pesantren dan ‘perlindungan’ *Tuan Guru* itu tak bisa diabaikan, betapapun tidak ada jaminan bahwa hal itu niscaya berpengaruh signifikan terhadap dukungan publik kepadanya. Logika situasional itu terkondisikan lantaran jumlah pesantren, dan juga orang yang dapat dikategorikan sebagai *Tuan Guru* itu, jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas di seantero Kalimantan Selatan.¹³ Memahami kondisi obyektif kultur masyarakat yang memuliakan *Tuan Guru*, para kontestan yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada Langsung mau tidak mau harus percaya dengan asumsi bahwa barang siapa dekat, atau lebih tepatnya memperoleh “dukungan” *Tuan Guru*, maka besar kemungkinan akan didukung oleh massa pendukung *Tuan Guru* tersebut. Minimal para santrinya, yang beberapa di antaranya berjumlah ribuan orang.

Meskipun setiap pesantren, terutama yang berpola *salafiah* ada *Tuan Guru*-nya, sebenarnya dalam masyarakat politik tidak setiap pengasuh pondok

¹⁰ Yang dimaksud dengan “*shawab*” di sini adalah semacam aura spiritual. Diasumsikan, seseorang bisa masuk dalam radar spiritual itu jika dianggap sebagai bagian dari pusat aura spiritualnya, yakni diri sang *Tuan Guru*. Hal itu diakui secara implisit oleh beberapa kontestan yang mencoba memanfaatkan pondok pesantren dan berusaha dekat dengan *Tuan Guru* tertentu dalam rangka kintestasi Pilkada Langsung di Kalimantan Selatan.

¹¹ Perantara *Tuan Guru* itu sebenarnya adalah “orang dekat” *Tuan Guru*. Jika selalu mengikuti kemana saja sang *Tuan Guru* pergi, maka sebutannya adalah “*khadam*” atau pembantu, yang secara teknis bisa juga berfungsi sebagai “pengawal *Tuan Guru*”, ajudan, atau sopir pribadinya.

¹² Pertimbangan *Tuan Guru* biasanya merujuk pada hadits riwayat Bukhari: “Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya

yang bukan karena mengharap-harap dan meminta-minta, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya.”

¹³ Menurut data tahun 2000, pesantren di Kalimantan Selatan jumlahnya mencapai 137 buah dengan jumlah *Guru* dan *Tuan Guru* pimpinan pesantren mencapai 1.694 orang dan jumlah santri sebanyak 41.179 orang (sumber: Kantor Wilayah Departemen Agama, Kalimantan Selatan). Menurut data Aswaja NU, perkembangan jumlah pesantren di Kalimantan Selatan meningkat pesat, karena pada tahun 2014 saja jumlah pesantren sudah mencapai 206 buah, yang terbanyak di Kabupaten Banjar (35 buah) dan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (30 buah).

pesantren itu diakui sebagai *Tuan Guru* yang patut dimintai *shawab*-nya. *Tuan Guru* yang kerap kali dimintai dukungan spiritualnya adalah *Tuan Guru* yang popularitasnya melintas batas kabupaten. Pada Pilkada Langsung tahun 2005, *Tuan Guru* semacam itu misalnya adalah Guru Bakri di Kabupaten Banjar,¹⁴ dan Guru Danau di Kabupaten Hulu Sungai Utara.¹⁵ Sedangkan pada Pilkada Langsung tahun 2010, muncul nama baru, yakni Guru Bahrhan dari desa Jamil,¹⁶ dan Guru Zuhdi di Banjarmasin.¹⁷

Tersebab karena itu, para kontestan Kepala Daerah yang bertarung dalam kontestasi Pilkada Langsung cenderung memilih “cara lazim” dengan cara berkunjung ke pesantren-pesantren yang dipimpin oleh *Tuan Guru* kesohor. Bersilaturahmi untuk minta doakan agar niatnya kesampaian tentu tidak ada ruginya, karena semua *Tuan Guru* niscaya akan memberikan doa restunya kepada siapa saja yang datang bersilaturahmi. Tetapi dengan bukti diterima dengan tangan terbuka oleh para *Tuan Guru*, dia bisa merekayasa kepada publik — misalnya melalui iklan di surat kabar lokal — bahwa dialah yang paling direstui oleh *Tuan Guru*. Bahwasanya rekayasa pencitraan itu dalam realitasnya tidak berpengaruh terhadap opini publik, adalah hal lain.

Namun demikian, godaan politik nampaknya tidak selalu dapat dihindari oleh semua *Tuan Guru*. Pada musim kampanye dalam rangka Pilkada Langsung, terbukti cukup banyak *Tuan Guru*, dan para Habib,¹⁸ muncul di panggung politik yang menampilkan diri sebagai pendukung kontestan tertentu. Pilkada Langsung Kalimantan Selatan tahun 2005 dan tahun 2010 memberikan deskripsi yang sangat jelas bahwasanya peran *Tuan Guru*, sebagai pemangku kekuasaan di ranah spiritualitas, adalah sangat penting adanya. *Tuan Guru* boleh jadi tidak pernah terlibat langsung dalam pusaran rebutan kekuasaan, tetapi dialah figur yang menentukan dalam memberikan referensi bagi rakyat yang memiliki hak pilih dan sedang dirayu oleh para kontestan agar hanya memilih dirinya dalam kontestasi Pilkada Langsung.

Tetapi ‘perang aura kesalehan’ itu ternyata tidak signifikan terhadap perolehan suara kontestan yang

menggunakan tameng *Tuan Guru* atau tokoh Habib. Tidak ada korelasi antara banyaknya *Tuan Guru* yang mendukung seseorang kontestan dengan perolehan suaranya di hari pemungutan suara. Diam-diam bahkan muncul opini yang berkembang dalam masyarakat yang kritis, bahwa para *Tuan Guru* dan Habib itu hanya sekadar dimanfaatkan untuk tujuan politik oleh para kontestan. Justru karena itu kontestan yang menggunakan *Tuan Guru* atau Habib sebagai ‘pendukung spiritual’ malah kurang mendapatkan apresiasi dari kelompok pemilih yang kritis. Namun, dengan adanya fakta beberapa kontestan Kepala Daerah tetap saja mengandalkan peran spiritual para *Tuan Guru*, paling tidak telah memberikan deskripsi bahwa proses pematangan demokrasi (baca: proses demokratisasi) yang diandaikan berbasis pada gerakan masyarakat yang rasional sedikit banyak dihambat oleh ketidaksiapan para elit politik untuk berkompetisi secara terbuka atas dasar kapabilitas personal masing-masing kontestan. Hal itulah yang terjadi dalam Pilkada Langsung di Kalimantan Selatan tahun 2005, 2010, dan 2015.

Realitas Perubahan yang Terjadi

Dalam sistem Pilkada Langsung diasumsikan peran partisipasi politik rakyat amatlah penting dan menentukan nasib kontestan yang bertarung dalam kontestasi Pilkada. Adalah sebuah kelaziman apabila para kontestan berdaya upaya meraih simpati masyarakat pemilih dengan berbagai cara, baik melalui cara yang dibolehkan oleh norma sosial dan aturan main kontestasi, ataupun cara-cara di luar itu. Cara-cara di luar norma sosial dan aturan main kontestasi misalnya adalah penggunaan uang untuk mendapatkan simpati publik, entah dalam rangka menyuap pemilih ataupun untuk membeli dukungan politik, yang biasa disebut sebagai praktik ‘politik uang’.

Politik uang diakui telah menjadi elemen yang menentukan dalam praktik politik di Indonesia selama era transisi demokrasi (Aspinall, 2005:270), bahkan seakan-akan menjadi hal yang niscaya (Sarman, 2016). Dari perspektif hubungan diadik

¹⁴ Guru Bakri alias KH Ahmad Bakri adalah pemimpin pondok pesantren Al Mursyidul Amin, Kabupaten Banjar. Mulai terkenal di seantero Kalimantan Selatan setelah mengisi pengajian mingguan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, masjid terbesar di ibukota Kalimantan Selatan, dan sering diundang ceramah agama di berbagai daerah kabupaten.

¹⁵ Guru Danau alias KH Asmuni adalah pemimpin pondok pesantren Darul Aman, Babirik, Amuntai. Guru Danau ini mulai terkenal karena sering mengisi ceramah pada acara-acara yang digelar oleh pejabat pemerintah daerah berbagai kabupaten. Nama Guru Danau makin populer setelah Guru Ijai dan Guru Bakri meninggal dunia.

¹⁶ KH Bahrhan seringkali dipanggil Guru Bahrhan Jamil, karena berasal dari desa Jamil, Kecamatan Labuhan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. KH Bahrhan terkenal karena

kalau memberikan ceramah agama selalu banyak disampiri dengan candaan dalam bahasa daerah yang menurut jamaahnya sangat lucu dan menghibur.

¹⁷ Guru Zuhdi alias Akhmad Zuhdiannoor adalah Tuan Guru yang berusia muda (lahir tahun 1972), putera dari KH Muhammad, pimpinan pondok pesantren Al Falah, Banjarbaru. Pondok pesantren itu diketahui mempunyai santri ribuan orang, berasal dari segala pelosok Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Guru Zuhdi dianggap sebagai pewaris KH Muhammad, sang ayahandanya.

¹⁸ Tuan Guru memang tidak sama dengan Habib. Tetapi karena Habib juga dipercaya masyarakat sebagai orang *shaleh* dan atau menguasai pemahaman ilmu agama Islam yang tinggi, selain juga diketahui sebagai keturunan Nabi Muhammad; biasanya Habib dimuliakan, setara dengan seorang Tuan Guru.

antara kandidat yang butuh dukungan suara dan kontestan pemilik suara, terjadinya relasi politik uang itu sebenarnya dibingkai oleh pola klientelisme. Merujuk pada penelitian di Afrika, India, Amerika Latin dan Jepang, Kitschelt dan Wilkinson (2007) memberikan gambaran tentang karakter patronase dalam hubungan partai dan pemilih. Dalam banyak sistem politik hubungan konstituen dan politisi banyak didasarkan pada bujukan materi yang langsung ditargetkan untuk kelompok kecil warga yang politisi tahu menjadi sangat responsif terhadap sisi pembayaran dan bersedia untuk menyerahkan suara mereka untuk harga yang tepat. Kenyataan di lapangan menunjukkan akuntabilitas klientelistik merupakan transaksi atau pertukaran langsung suara warga negara dengan imbalan pembayaran tunai, atau janji berupa akses terhadap pekerjaan, barang dan jasa. Kitschelt dan Wilkinson menunjukkan masalah utama yang cenderung dilematis dari klientelisme dan patronase berupa kompensasi yang dapat dinikmati kedua pihak — politisi mungkin tidak ingin menindaklanjuti janji-janji mereka untuk memberikan layanan publik setelah mereka terpilih, dan pemilih mungkin tidak ingin memilih politisi yang menjadi kandidat karena telah menerima layanan tersebut. Diduga karena dialektika politik seperti itu, klientelisme biasanya cenderung menurun seturut dengan berbagai alasan penurunan kemiskinan yang membuat orang (kontestan) lebih mahal untuk membeli dukungan publik (rakyat pemilih) (Lihat Kitschelt and Wilkinson, 2007: 15-6). Memang politik klientelistik di banyak tempat mampu meningkatkan dukungan suara pemilih. Hal itu dibuktikan juga oleh Wantchekon dalam penelitiannya di Benin, Afrika Barat, dan secara signifikan berkorelasi negatif dengan pendapatan, pendidikan dan kualitas perumahan serta ukuran populasi masyarakat (Wantchekon, 2003: 399-422). Dengan kata lain, teori klientelisme tidak lain adalah ‘politik pelindung’ yang diformulasikan dalam bentuk transfer pendapatan atau barang publik yang disalurkan oleh politisi untuk mengikat kelanjutan dukungan pemilih; dan hal itu dimaknai di Indonesia sebagai ‘politik uang’. Padahal politik uang secara formal biasa didefinisikan sebagai “pembelian suara” (*vote buying*) (Girling, 1997:70, 72).

Praktik politik uang itu dari sudut pandang norma sosial (dan agama) barangkali bukanlah perbuatan terpuji, untuk tidak mengatakannya sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu sesungguhnya ia merupakan sebuah anomali, apabila praktik politik uang tersebut terjadi pada lingkungan masyarakat yang agamis. Jika dalam masyarakat yang agamis praktik politik uang itu bisa terjadi, meskipun hanya

dalam lingkungan komunitas tertentu, maka patut dipertanyakan: mengapa dalam masyarakat yang agamis praktik politik uang itu bisa diterima sebagai tindakan yang dianggap tidak menyalahi norma sosial?

Masyarakat Banjar yang merupakan mayoritas penduduk di Kalimantan Selatan,¹⁹ dipercaya sebagai tipikal masyarakat yang agamis (Daud, 1997; Hasan, 2007). Namun demikian, pada masyarakat ini terbukti tidak pernah menolak “politik uang”, dan mereka cenderung antusias menerima sumbangan uang dan barang dari para kandidat yang bertarung dalam kontestasi Pilkada (Sarman, 2014; Sarman, 2015).

Untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut kita harus memahami preferensi masyarakat tentang apa hakikat “pemberian seseorang” dan apa maksud yang diutarakan dari pemberian itu. Dalam preferensi sosial masyarakat Banjar, seseorang yang suka memberi itu adalah orang yang dermawan, dan seorang dermawan itu adalah orang baik. Hal itu sering disampaikan oleh para *Tuan Guru* tentang sifat baik yang dimiliki seseorang sesuai dengan tuntunan agama. Barangkali karena telah memahami preferensi masyarakat tradisional itu, para politisi melihat peluang untuk memanipulasinya dalam rangka politik pencitraan. Muncullah kemudian modus “politik sedekah”. Politik sedekah pada dasarnya adalah politik uang juga adanya. Tetapi dengan alibi “bersedekah”, para kandidat dan politisi memberikan sejumlah uang, atau barang, kepada kelompok konstituen yang dijadikan sebagai kelompok target. Biasanya tidak ada pernyataan politik dari pihak kontestan yang menyertai pemberian sedekah tersebut, seolah-olah sudah sama-sama mengerti apa maksudnya. Karena itu tidak ada alasan bagi kelompok target untuk menolaknya. Apalagi mereka dapat merujuk pada fatwa *Tuan Guru* yang biasanya menjelaskan bahwa suatu pemberian yang bermanfaat dari seseorang itu tidak pantas untuk ditolak.

Mengingat secara kultural masyarakat Banjar sangat menaruh hormat pada ulama, strategi kampanye politik yang “menjual” nilai-nilai religiusitas itu akan teruji pada figur personal yang dijual. Dalam hal menjual nilai-nilai religiusitas itu memang kontestan tidak menciptakan “sesuatu yang baru”, melainkan sekadar mereproduksi nilai-nilai lama. Tetapi tersebut karena nilai-nilai lama itu demikian kuat mempengaruhi preferensi masyarakat, maka reproduksi nilai-nilai yang terjadi seolah-olah menyatakan bahwa “versi baru” adalah versi lama yang telah dimodifikasi. Dalam kaitan itu penggunaan istilah “membonceng” mungkin terlalu

¹⁹ Data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa kelompok etnis Banjar ini merupakan 74,34% dari total 3.613.992 jiwa penduduk di provinsi Kalimantan Selatan (BPS, 2010).

kasar, tetapi saya tidak menemukan istilah lain yang lebih tepat, bahwa para kontestan yang menggunakan priviles isu religiusitas tersebut sebenarnya hanya memanfaatkan preferensi masyarakat awam yang memuliakan *Tuan Guru* dan orang-orang shaleh belaka. Bahwasanya masyarakat tradisional sampai tergiring untuk bersimpati kepada kontestan yang memanfaatkan strategi politik tersebut, hal itu tidak terlepas dari kondisi obyektif bahwa mereka adalah kelompok awam yang tidak terbiasa menggunakan nalar kritis untuk menilai kredilitas seseorang kontestan, apakah benar-benar merupakan figur orang shaleh atau sekadar *mendompleng* aura keshalehan para alim ulama di sekitarnya.

Wacana yang berkembang dalam masyarakat awam di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa warga sebenarnya tidak paham makna substansial politik uang. Sebagai contoh, mereka dengan senang hati menerima bantuan uang dari kontestan yang biasanya dibutuhkan untuk pembangunan sarana sosial dan tempat ibadah. Bahkan, cukup lazim apabila kelompok pemilih, terutama dari kalangan masyarakat miskin, yang mengucapkan terima kasih atas bantuan sembako (sembilan bahan pokok) dari tim sukses atas nama kontestan tertentu menjelang hari pemungutan suara. Hal itu terjadi selain bantuan itu memang dibutuhkan, juga *Tuan Guru* sebagai anutan masyarakat, tidak pernah memberikan fatwa yang dapat dimaknai sebagai tuntutan larangan atas penerimaan pemberian semacam itu. Bahkan kalangan masyarakat awam dapat menyaksikan pesantren yang dipimpin oleh beberapa *Tuan Guru* justru menerima bantuan dari para kontestan yang bertarung dalam kontestasi Pilkada. Ini menandai tidak cukup memadainya kompetensi warga untuk memegang hak pilih berdasarkan pengetahuannya tentang bagaimana kontestasi politik yang merupakan implementasi ujaran-ujaran demokrasi.

Dalam kasus khusus yang terjadi dalam komunitas tertentu, praktik politik uang malah dibungkus dengan kegiatan ritual agama. Sebagai contoh ilustrasi,²⁰ seorang tokoh masyarakat lokal mengorganisir kelompok masyarakat dalam komunitasnya untuk melakukan “shalat hajat” bagi kontestan tertentu.²¹ Maksudnya, kelompok masyarakat tersebut digiring untuk mendoakan kontestan tertentu agar sukses dalam pertarungan politiknya. Tidak jelas benar apakah warga yang

diorganisir itu benar-benar melaksanakan shalat hajat seperti yang dijanjikan oleh tokoh masyarakat yang mengorganisir mereka. Faktanya kemudian, dukungan pemilih dari komunitas tersebut pada hari pemungutan suara persis sebesar jumlah yang dijanjikan oleh tokoh masyarakat kepada kontestan tertentu yang “mensponsori” shalat hajat.

Karena bekerjanya logika budaya dan logika agama yang tidak selalu sejalan dengan logika demokrasi elektoral, kewajiban hukum untuk menyelenggarakan Pilkada Langsung terjebak dalam begitu luasnya persoalan yang disebut sebagai wilayah abu-abu (*grey area*). Ada persoalan *khilafiah* — maksudnya, wacana yang potensial mengundang pertentangan pendapat — yang muncul di tataran praksis, ketika semangat politik demokratis itu ingin ditunjukkan dalam bentuk membangun simpati massa. Agenda demokratisasi semakin tak jelas ketika energi publik teralokasikan untuk menentukan siapa benar dan siapa salah, bukan untuk mengembangkan etika publik yang memberikan kepercayaan untuk menghindari praktik-praktik yang inkonsisten dengan etika politik demokratis yang hendak diacu bersama.

Tersebab karena itu harus diakui bahwa para kontestan yang bertarung dalam kontestasi politik seperti Pilkada Langsung dihadapkan pada realitas yang cenderung dilematis. Bahwa mereka harus mendapatkan simpati massa — yang idealnya merupakan suatu proses komunikasi politik yang panjang — namun waktu yang tersedia untuk merekayasa munculnya simpati itu hanya terbatas melalui kampanye politik selama masa Pilkada Langsung yang durasinya pendek sekali. Tidak ada penjelasan logis yang dapat menjustifikasi bahwa dalam waktu singkat warga masyarakat yang berada dalam posisi sebagai kelompok pemilih ‘akan terkesan’ pada seseorang kontestan, padahal tidak ada sesuatu tindakan yang dilakukan oleh kontestan yang dapat memberikan kesan positif. Karena alasan tersebut, tampaknya memang tidak ada pilihan lain bagi para kontestan, bahwa apapun kendalanya, mereka harus berupaya memberikan “kesan positif” sebagai seseorang yang layak didukung publik. Masalahnya adalah, tidak ada instrumen politik yang secara personal dapat dilakukan seseorang kontestan untuk mempengaruhi persepsi pemilih secara demokratis dalam waktu singkat. Semua kontestan boleh saja menjanjikan “perubahan” yang

memberi bantuan riil berupa uang dalam jumlah yang sepatasnya niscaya akan mereka dukung.

²⁰ Contoh kasus ini terjadi di sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; dan melibatkan salah seorang tokoh masyarakat lokal, dan berhubungan dengan salah satu tim sukses kontestan. Tokoh masyarakat lokal tersebut “menjamin” akan ada dukungan masyarakat sebesar jumlah yang dibutuhkan, asalkan ada ongkos yang perlu dibayar untuk diberikan kepada warga yang akan memberikan dukungan. Alasan tokoh masyarakat tersebut, warga dalam komunitasnya tidak mengenal secara personal kontestan yang bertarung dalam kontestasi politik. Karena itu, daripada suara mereka sia-sia, maka siapa saja yang

²¹ “Shalat hajat” adalah shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap Muslim yang punya ‘hajat’ atau permintaan khusus kepada Tuhan. Sesuai dengan hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah: “Barangsiapa yang memunyai kebutuhan (hajat) kepada Allah atau salah seorang manusia dari anak-cucu adam, maka wudhulah dengan sebaik-baik wudhu. Kemudian salat dua rakaat (salat Hajat), lalu memuji kepada Allah, mengucapkan salawat kepada Nabi”.

²⁰ Contoh kasus ini terjadi di sebuah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; dan melibatkan salah seorang tokoh masyarakat lokal, dan berhubungan dengan salah satu tim sukses kontestan. Tokoh masyarakat lokal tersebut “menjamin” akan ada dukungan masyarakat sebesar jumlah yang dibutuhkan, asalkan ada ongkos yang perlu dibayar untuk diberikan kepada warga yang akan memberikan dukungan. Alasan tokoh masyarakat tersebut, warga dalam komunitasnya tidak mengenal secara personal kontestan yang bertarung dalam kontestasi politik. Karena itu, daripada suara mereka sia-sia, maka siapa saja yang

dibayangkan akan menguntungkan publik, tetapi tidak ada instrumen yang menggaransi bahwa janji perubahan itu akan menjadi referensi kelompok pemilih untuk mendukung seseorang kontestan.

Lahirnya politik sedekah bisa saja dimaknai sebagai akibat dari logika situasional yang muncul karena para kontestan tidak ingin kalah dalam kontestasi dan berdaya upaya dengan segala cara untuk mengamankan peluang kemenangannya. Namun di sisi lain, hal itu boleh jadi juga karena para kontestan yang melakukannya sadar betul tidak mungkin mengubah pola pikir konstituen yang terikat dengan norma agama yang melarang menerima ‘suap’, tetapi tidak akan menampik pemberian yang dibungkus dengan dalih sedekah. Fenomena tersebut dapat dibaca sebagai kuatnya nilai-nilai struktural — yakni tuntunan agama melalui peran *Tuan Guru* — mengerangkai tindakan sosial masyarakat, dan ia telah mendarah daging dalam segala interaksi sosial mereka; namun bukan berarti kekuatan nilai struktural yang telah diinternalisasi secara sosiokultural itu tidak bisa dimanipulasi dan diubah apabila menemukan justifikasinya dalam modus lain yang diserupakan maknanya.

Hal itulah yang terjadi dalam kasus Pilkada Langsung di Kalimantan Selatan tahun 2005, tahun 2010, dan tahun 2015. Politik uang itu ternyata dibungkus pelbagai simbol kultural dan, bahkan kaidah-kaidah agama, misalnya dalam konteks betapa mulianya orang dermawan yang memberikan sedekah. Karena itu boleh jadi pelaku politik uang di mata masyarakat awam disetarakan dengan kaum dermawan — dan artinya, pantas dimuliakan. Paling tidak, walaupun politik uang dalam realitasnya telah terpraktikkan dengan pelbagai modusnya, namun ia tidak dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang asing atau bertentangan dengan norma sosial yang sudah mereka kenal sebelumnya. Apalagi kalangan masyarakat pemilih tidak pernah diberi pengetahuan yang benar tentang, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘politik uang’; dan mengapa ‘politik uang’ itu harus ditolak dalam konteks kontestasi politik seperti halnya Pilkada Langsung.

KESIMPULAN

Adanya fakta bahwa aktor kontestan cenderung menggunakan tokoh pesantren (*Tuan Guru*) untuk menjaring dukungan massa, memberikan justifikasi bahwa *Tuan Guru* telah menjadi elit yang diasumsikan mampu mengontrol sumberdaya yang ada dalam masyarakat. Kalau hal itu adalah realitas politik yang ada dalam masyarakat, maka perlu ada kategorisasi baru dalam teori politik, bahwa sebenarnya elit itu juga bisa berasal kalangan pemilik simbol religiusitas dan penguasa ranah spiritualitas — selain yang sudah dikenal dalam khasanah ilmu

politik, yaitu mereka yang berasal dari kalangan penguasa politik dan berasal dari kalangan penguasa ekonomi. Karena sejatinya sosok *Tuan Guru* bukanlah elit yang berasal dari ranah politik dan ranah ekonomi; terlepas dari kasus, bahwa bisa saja seorang *Tuan Guru* kemudian menjadi penguasa (politik) atau kaya raya (secara materi).

Di lain pihak, karena posisinya yang kadangkala terlalu dekat dengan aktivitas politik, umumnya *Tuan Guru* cenderung tidak mampu menunjukkan integritas personalnya dalam mengaktualisasikan kompatibilitas ilmu agamanya sebagai solusi dari praksis demokrasi yang bermuara pada aspek-aspek patologis. Paling tidak dalam konteks masalah tersebut, nyaris tidak pernah terdengar fatwa dari para *Tuan Guru* bahwa politik uang (dalam segala macam bentuk dan modusnya) itu haram hukumnya, dan barang siapa yang terlibat dalam praktik tersebut sama dengan melakukan suatu tindakan tercela dan berdosa karenanya.

Dari paparan pada artikel ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi peran politik *Tuan Guru*, sebagai elit dan panutan masyarakat, sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam proses demokratisasi lokal. Dalam banyak hal, mereka cenderung hanya dimanfaatkan oleh elit politik dan kandidat yang sedang bertarung dalam kontestasi politik. Padahal dengan posisi perannya, *Tuan Guru* sangat potensial dalam hal mendukung proses demokrasi politik menjadi lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan salah satu bagian dari disertasi saya di UGM Yogyakarta. Karena itu saya ucapkan terima kasih atas segala masukan yang saya terima dari Prof Dr Purwo Santoso (promotor) dan Dr J. Nicolaas Warouw (co-promotor).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, 2000. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Aspinall, Edward, 2005. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. (Stanford University Press, California).
- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati (eds), 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. (PolGov Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).
- Boix, Charles, 2003. *Democracy and Redistribution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre, 1989. “Social Space and Symbolic Power.” *Sociology Theory* 7:14-25.

- Cunningham, Frank, 2002. *Theory of Democracy: A Critical Introduction*. London, Routledge.
- Daud, Alfani, 1977. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Erb, Maribeth and Priyambudi Sulistiyanto (eds), 2009. *Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Geddes, Barbara, 2007. "What Causes Democratization?" dalam Charles Boix dan Susan C. Stokes (Eds), 2007. *The Oxford Handbook of Comparative Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Girling, John 1997. *Corruption, Capitalism and Democracy*. (Routledge, London).
- Hadiz, Vedi R., 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Hasan, Ahmadi, 2007. *Adat Badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ideham, M. Suriansyah dkk, (Editor), 2007. *Sejarah Banjar*. (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin).
- Kim, Sung Ho, 2004. *Max Weber's Politics of Civil Society*. (Cambridge University Press).
- Kitschelt, Herbert and Steven Wilkinson, 2007. "Citizen-politician Linkages: An Introduction", dalam Herbert Kitschelt and Steven Wilkinson (eds), *Patron, Client and Policies: Pattern of Democratic Accountability and Political Competition*. (Cambridge University Press).
- Latif, Yudi, 2005. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Latif, Yudi, 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Liddle, William, 2012. *Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Mandan, Arif Mudatsir (ed.), 2008. *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Marger, Martin, 1987. *Elites and Masses: An Introduction to Political Sociology*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.
- Morlino, Leonardo dan G. Palombella, 2010. *Rule of Law and Democracy: Inquiries into Internal and External Issues*. Leiden-Boston, Brill.
- Mosca, Gaetano, 1939. *The Rulling Class*. New York: McDonald Hill Book Company. Buku ini versi Inggris yang diedit oleh A. Levingston dari karya Mosca (1884), *Teorica Dei Governi e Governo Parliamentare*.
- Pareto, Vilfredo, 1935. *Mind and Society*. New York: Harcourt, Brace. Buku ini merupakan versi Inggris yang diedit oleh A. Levingston dari karya asli Pareto (1923), *Trattato di Sociologica Generale*.
- Saleh, Idwar, 1975. *Sejarah Singkat Mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah Sekitarnya sampai tahun 1950*. Banjarmasin: Kanwil Depdikbud Kalsel
- Saleh, Idwar dkk, 1979. *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1928)*. Banjarmasin: Kanwil Depdikbud Kalsel.
- Sarman, Mukhtar, 2005. *Menuju Puncak Kekuasaan: Catatan Ringan dari Pilkada Kalimantan Selatan Tahun 2005*. (ISBN: 979-3381-06-0).
- Sarman, Mukhtar, 2008. *KPUD Undercover: Catatan Kaki Mencari Calang*. (ISBN: 979-164583-3).
- Sarman, Mukhtar, 2009. *Pileg Overdosis: Catatan Pemilu Legislatif 2009*. (ISBN: 979-338191-6).
- Sarman, Mukhtar, 2009. *Mencari Sang Pemimpin: Renungan untuk Pilkada Kalsel*. (ISBN: 979-3381-87-9).
- Sarman, Mukhtar, 2010. *Pilkada-Kada: Waham Seputar Pilkada Kalsel 2010*. (ISBN: 978-979-3381-37-4).
- Sarman, Mukhtar, 2014. *Banalitas Kontestasi Politik: Refleksi Pemilu Legislatif 2014 di Kalimantan Selatan*. (ISBN: 978-602-71307-2-2).
- Sarman, Mukhtar, 2015. *Pilkada Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*. (ISBN:978-602-73740-0-3).
- Sarman, Mukhtar, 2016. *Praksis Demokrasi yang Rumpang: Kasus Pilkada Langsung di Kalimantan Selatan*. Disertasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Scott, James, 2007. "Power, Domination and Stratification: Towards a Conceptual Synthesis". *Sociologia*, 55:25-39.
- Sorensen, Georg, 2008. *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*. Colorado: Westview Press.
- Usman, Gazali, 1994. *Kerajaan Banjar (Sejarah Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam)*. Banjarmasin: Penerbit Universitas Lambung Mangkurat.
- van Bruinessen, Martin, 1995. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi*

- Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Wantchekon, Leonard, 2003. "Clientelism and Voting Behavior: Evidence from a Field Experiment in Benin," *World Politics*, 55(3), 399-422.
- Wiyata, A. Latief, 2001. *Proses Demokratisasi di Indonesia: Kasus Pemilihan Bupati Sampang, Madura periode 2000-2005*. Jember: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat "Kawula Saras".

Tuan Tanah dan Lurah : Relasi Politik Lokal *Patron-Client* di Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dalam Kurun Waktu 2007-2013

Annisasesrimaftuchin
Antropologi - FIB Universitas Brawijaya
Email :annimaftuchin@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai pola - politik pedesaan yang ada dan diterapkan di Desa Sukorejo Gondanglegi Malang. Relasi politik yang mengarah pada bentuk subsisten memberi peluang tersendiri bagi Lurah Desa Sukorejo untuk terpilih dalam periode kepemimpinan yang kedua. Sejak 2006 suara dan dukungan terus digalakan agar posisi lurah mampu dipertahankan. Padahal, dalam sekali pemelihan lurah, calon lurah harus mengeluarkan dana sebesar 300 Juta untuk para pendukungnya sedangkan, gaji yang diterima lurah di Sukorejo kisaran Rp.1.500.000- Rp.2.000.000,- dan tiga hektar tanah bengkok. Hal ini tentu menjadi ancaman ekonomi tersendiri bagi si calon lurah ketika dinyatakan gagal terpilih. Akan tetapi, kegagalan dapat diminimalisir ketika strategi patron-klien digunakan oleh Lurah Abdi. Pola patron-kliensebelumnya telah dijabarkan oleh James C. Scott sebagai pola yang cukup umum digunakan dalam budaya pertanian subsisten seperti di Desa Sukorejo Gondang Legi Malang. Dari paparan pola patron-kliendijelaskan bahwa dalam kebudayaan pertanian pedesaan Jawa, terdapat model resiprositas politik yang dijumpai antara tuan tanah dan masyarakat petani disekitarnya. *Patron-klien* yang diterapkan di Desa Sukorejo mengaitkan keberadaan tuan tanah sebagai basis kekuatan utama lewat sistem pertukaran atau resiprositas sepadan. Tentunya pola politik seperti ini memiliki keunikan tersendiri, dimana terdapat pola hubungan politik yang berbeda dari pola politik pada umumnya. Melalui metode penelitian etnografi ulasan data yang disajikan didasarkan atas pengamatan secara langsung baik melalui wawancara maupun observasi partisipasi. Kaitan metode penelitian etnografi dalam memaparkan pembahasan politik Desa Sukorejo, analisis difokuskan pada bagaimana pola dan korelasi sosial-budaya dibangun dalam relasi patron-klien antara tuan tanah dan kepala Desa Sukorejo dalam kurun waktu 2007-2013? Dari fokus permasalahan tersebut, analisis diarahkan pada pola dan model serta kaitan sebab akibat yang terjadi dari proses relasi politik di Desa Sukorejo Gondanglegi Malang.

Kata Kunci :Patron-Client, Politik Desa, Resiprositas, Subsisten, Tuan Tanah

PENDAHULUAN

Ranah lokal pedesaan Jawa selalu lekat kaitannya dengan pertanian subsisten. Kesuburan tanah dan pola irigasi yang dekat dengan sumber air menempatkan sawah sebagai asset utama. Tidak hanya menyokong perekonomian penduduk, sawah juga menjadi bagian

utama dalam regulasi pemerintahan desa. seorang lurah atau kepala desa memiliki hak atas kelola sawah desa dan upah yang bulanan yang diberikan pemerintah pusat. Fenomena ini terlihat jelas pada pola politik lokal dan budaya keseharian masyarakat Desa Sukorejo Gondanglegi Kabupaten Malang.

Desa Sukorejo merupakan desa yang berarada di Kecamatan Gondanglegi. Desa ini memiliki wilayah pertanian yang sangat luar dibanding desa lainnya. Dari data morfologi penduduk dijelaskan luas area pertanian yang terdiri dari 125 hektar persawahan padi; 1,5 hektar kebun sayuran; 2 hektar kebun buah-buahan; 15 hektar kebun tebu dan 15,028 hektar tanah kas atau bengkok desa. Rincian luas tanah tersebut mempengaruhi produktivitas pangan di Kecamatan Gondanglegi. Selain itu, keberadaan tanah khas desa atau yang dinamai tanah "bengkok" desa menjadi pertanda masih aktifnya pola pemerintahan dengan tata cara lokal disana.

Pembahasan mengenai perpolitikan lokal di daerah pedesaan sebelumnya telah juga di bahas oleh Rohmawati (2005) dan Halili (2009). Tulisan Rohmawati menjelaskan tipikal politiki desa yang ada di Desa Masin masih menggunakan *money* politik dimana sokongan suara secara langsung dibeli lewat uang. Semakin banyak dana yang dikeluarkan akan semakin banyak dukungan yang didapatkan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Halili (2009) dalam praktek uang yang dilakukan oleh masyarakat Madura. Praktek-prektek politik lokal dipedesaan memang lebih dekat dengan pola *money* politik, namun tidak hanya pola politik yang mempengaruhi relasi politik elit desa. Dalam pola politik Desa Sukorejo, relasi sosial politik lebih menekankan pada kaitan budaya pertanian.

Kajian tentang budaya petani yang dijelaskan oleh Scott (1981) memetakan relasi antara tuan tanah dan petani kecil dalam ikatan relasi 'patron-klien'. Hal tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip resiprositas dan subsistensi yang berpangkal dari kekuasaan di dalam masyarakat. Pola tersebut digambarkan secara langsung dalam relasi politik desa Sukorejo. Gambaran dasar yang terlihat dari pola resiprositas dan subsistensi yang mencipakan hubungan 'patron-kline' dapat terlihat dari keberadaan tanah bengkok atau tanah khas desa. tanah bengkok atau tanah khas desa merupakan tanah hak guna yang diberikan kepada apatur ata pamong desa sebagai upah pengganti gaji. Struktur administrasi yang demikian memaksa setiap apratur desa masuk dalam pelaku prinsip-prinsip resiprositas dan subsisten. Terlebih dalam ada relasi antara buruh tani dan apparatur

desa. Dibeberapa desa pola patron-klien juga diwujudkan dalam prinsip sewa menyewa lahan bengkok. Praktek tersebut melibatkan apparatur desa sebagai pemegang hak kelola dengan para petani penyewa lahan. Di desa Sukorejo sendiri Prinsip resiprositas sebenarnya diwujudkan lewat relasi buruh dan petani. Dari prinsip tersebut setiap juragan tanah memiliki banyak pegawai dan tentunya memperkuat kedudukan dan pola kuasa juragan tersebut di Desa Sukorejo. Keunikan inilah yang melatar belakangi pola perlotikan di desa Sukorejo.

Titik permasalahan ditonjolkan untuk melihat korelasi politik desa yang didasarkan atas prinsip resiprositas dan subsistensi dapat dilihat lewat peraturan penggunaan tanah bengkok dalam UU No.5. Tanah bengkok dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah diatur dalam Ketentuan-Ketentuan Konversi pada Pasal VI menjadi Hak Pakai yaitu:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggadu, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.ⁱ

Pemakaian hak guna lahan yang digunakan oleh aparatur desa memiliki wewenang yang utuh dan dilindungi oleh Negara. Persoalan yang dipertanyakan adalah mengenai bagaimana korelasi antara hak guna tanah dengan perpolitikan desa yang dijalankan oleh Lurah Abdi pada pemilihannya yang ke-2 tahun 2007. Hal ini memungkinkan terbentuknya relasi patron-klien baru antara penguasa desa dan lurahnya. Kejadian ini memperlihatkan bahwa posisi lurah memiliki kelas prestis yang cukup tinggi mengingat luas tanah bengkok desa untuk lurah adalah 3 Hektar dari 15,058 Hektar tanah kas desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi, dimana pengamatan dan wawancara (*open interview and indepth interview*) dilakukan dengan melakukan kontak langsung dengan masyarakat sukorejo. Metode ini menuntut peneliti untuk tinggal dan membaur dengan masyarakat layaknya anggota masyarakat itu sendiri. Hal tersebut berfungsi dalam mendengarkan dan merespon data yang dipaparkan oleh masyarakat secara maksimal. Pola ini merupakan bentuk penggalan informasi dari native's point of views yang merupakan komponen utama (Fettersman, 2010;

Simatupang, 2013:93-94). Diperkuat dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur berupa e-book, Jurnal dan buku penunjang sehingga dapat memperkuat gambaran politik desa sukorejo yang sedang dijalankan. Sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga data sudah jenuh. Akitivitas analisis data ini meliputi *data reduction, display data, dan conclusion drawing* (Sugiyono, 2012: 232).

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan konsep patrol-klien Scott (1981) dan teori Galtung yang mengemukakan bahwa "*power deriving from something one is, power deriving from something one has and something power deriving from position from structure*" sebuah kekuasaan dapat diperoleh jika memang kekuasaan itu mutlak ada, kekuasaan juga dapat di peroleh dengan sebuah kekayaan dan kekuasaan diperoleh karena adanya posisi structural (Anshoriy, 2008, hlm 15).

Konsep 'patron-klien' sebenarnya menempatkan Lurah Abdi sebagai Klien dari seorang Juragan Tanah yang memiliki depo penggilingan padi disana. Patrol klien ini memanfaatkan akses suara dimana kekayaan dan kekuasaan melatar belakangi hubungan resiprositas antara mereka. Scott (1981) menjelaskan bahwa relasi Patrol-Klien memiliki ikatan yang cukup kuat untuk hak-hak dan kewajiban timbal balik, yang memberi kekuatan sosial kepada ikatan-ikatan tertentu. Hal inilah yang tergambar dalam pola perpolitikan lurah Abdi di Desa Sukorejo Godanglegi Kabupaten Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu Lokal 2007

Lurah Abdi merupakan keturunan Pendalungan yang berasal dari probolinggo dan menetap di Sukorejo mengikuti sang istri. Istri Pak Abdi merupakan penduduk asli Sukorejo, hal tersebut dipaparkan oleh Pak Sholikin (44 th). Pak Sholikin menjelaskan "*Abdi iku duduk wong kene tapi wong Pendalungan sing asli kene kui bojone*" Abdi itu bukan penduduk sini melainkan orang Pendalungan yang asli sini itu Istrinya (wawancara, 26 Juni 2013). Lurah Abdi menjabat selama dua periode sejak 2005 menggantikan lurah yang saat itu terlibat kasus 'Tukar Guling'ⁱⁱ.

Saat menjabat menggantikan Pak Purdopo, Pak Abdi lebih konsisten membawa ritme perpolitikannya pada model perpolitikan Islam. Sejak mulai menjabat tahun 2000, dia berambisi untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan Islamiah lewat beberapa organisasi yang dibentuknya. Salah satu organisasi tersebut adalah Resco (Remaja Sukorejo), organisasi tersebut mulai berkiprah dibeberapa sektor dari mulai kegiatan *Dhiba'an*ⁱⁱⁱ hingga pengajian Istighosah. Tak hanya itu sistem pemerintahan tanpa pungutan memangang

mejadi misi utamanya. Hal ini dijelaskan oleh Pak Ramin (62 th) sebagai berikut :

“ Abdi iku wonge apik soale gak enek pungutan blasi i lak arep ngurus opo-opo. lak yalone neh yo mesti akeh sing milih, tapi iki wez terakhir dadi yo embuh sopo gantine ” (wawancara, 26 juni 2013)

Abdi itu orangnya baik soalnya ndak ada pungutan kalau misalnya mau ngurus kepentingan apa-apa. Kalau nyalonkan lagi pasti banyak yang memilih, tapi ini sudah masa jabatannya yang terakhir jadi ya ndak tahu siapa gantinya.



Gambar 1. Aktifitas Tiba'an RECO

Sumber : Dokumen Pribadi

Pola pemerintahan yang berbasis Islam mendapat dukungan dari sebagian penduduk Sukorejo dan mendapat kecaman bagi sebagian penduduk yang kontra terhadap lurah Abdi. Keberadaan kelompok kontra sebenarnya didasari akibat minimnya eksistensi kebudayaan Jawa bagi mereka yang tidakbukan merupakan anggota kaum fanatik Islam. Akan tetapi, bagi mereka yang kontra mereka harus memilih Lurah Abdi dalam pemilu lokal 2007. Hal tersebut dikarenakan adanya prinsip resiprositas dan subsitensi yang berjalan disana. Keberadaan juragan yang tidak sebanding dengan buruh membuat penguasaan suara untuk pemilihan lurah Abdi sangat terlihat kuat. Fakta ini didukung oleh penjelasan Pak Widiaji (38 th) yang menerangkan:

“ Disini itu perbandingan juragan dan buruh itu tidak sebanding. Buruh e luweh akeh timbang juragane. Orang-orang disini itu lebih memilih aspirasi juragan dari pada memilih aspirasi sendiri karena ketakutan kalau nanti di pecat lha mau makan apa, Mbak... ”(wawancara, 27 Juni 2013).

Kepemimpinan Lurah Abdi yang didapat dari menggantikan posisi Pak Purdopo kemudian muai berakhir pada 2007. Saat itu perebutan posisi lurah ditempatkan sebagai satu proses inisiasi yang sangat prestis bagi masyarakat Desa Sukorejo. Mereka yang dianggap Juragan saling mencalonkan diri menjadi lurah. Fenomena pencalonan Jabatan ini sebeanrnya dilatarbelakangi oleh penguasaan hak guna pakai tanah bengkok selebar 3 Hektar untuk jabatan Lurah. Fakta ini

diceritakan langsung oleh Pak Misran (64th) yang menerangkan:

“Nek kene ki memang kesubure ora enek seng ngalahne, sumbere akeh desone makmur. Mangkane nek kene bengkok kanggo perangkat deso ombo- ombo ,disek iki lak miturut ceritane onok wong tuek jluk ngombe nek kulon kali ra di wenehi ning etan kali di wenehi ngombe dadi lan sedane mbah-mbah kui mau. Ceritane ngunu mangkane nek kene ki pangkat lurah kui digawe rebutan lawong tanah bengkok e wae ambane ra enek sing ngalahne 3hektar”.

Motif hak tanah bengkok inilah yang kemudian menggiurkan Lurah Abdi untuk mencalonkan diri kembali pada 2007. Saat itu Calon yang diusung adalah Pak Abdi, Pak Purdopo dan Pak Widiaji. Dari tiga tersebut dua diantaranya merupakan calon terkuat karena mengeluarkan dana kampanye secara besar-besaran. Pak Abdi saat itu memilih menggunakan sokongan dukungan dari komunitas Islamnya. Tindakan tersebut semata-mata ditujukan untuk memperoleh dukungan para kantong-kantong suara yang mayoritas berasal dari tuan tanah.

Tuan Tanah dengan Calon Lurah

Praktek politik yang dijalankan Lurah Abdi selama masa pergantian jabatan adalah menjalin relasi dengan tuan tanah yang ada di Desa Sukorejo. Sebelumnya ikatan ini belum pernah dilakukan bahkan lurah Abdi baru mengenal sosok tuan tanah didesa tempat tinggalnya selama dia menjabat sabagai Lurah pada periode pertama. Sosok tuan tanah tersebut sebenarnya sudah tidak asing bagi masyarakat Desa Sukorejo. Hal ini dikarenakan ayah darituan tanah ini dulunya merupakan Lurah Desa sukorejo^{1v}.

Nama Kaji Zen disebut-sebut menggantikan ayahnya Kaji Aziz menjadi tuan tanah di daerah Desa Sukorejo. Kepemilikan tanah yang cukup luas ditambah dengan gudang beras serta depo penggilingan padi membuat Kaji Zen menjadi tumpuan perekonomian bagi sebagian besar masyarakat Desa Sukorejo. Hampir 50 % dari masyarakat Sukorejo berprofesi sebagai buruh tani dan pekerja di gudang beras dan sawah Kaji Zen. Selain itu, Kaji Zen juga sangat disegani oleh masyarakat Desa Sukorejo, hal ini karena sifat kedermawanan Kaji Zen kepada warga. Pola patron-klien yang dibangun oleh Kaji Zen memposisikan menekankan ide moral dan resiprositas, hak-hak dan kewajiban timbal balik^v. Tentunya barang dan jasa yang dipertukarkan bersifat tidak sama. Contoh paling nyata adalah Kaji Zen memiliki banyak buruh maka buruh Kaji Zen memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Kaji Zen sebagai Patronnya. Peluang inilah yang kemudian didekati oleh Lurah Abdi sebagai calon lumbung suara bagi pencalonannya yang kedua. Pak Sami'i yang merupakan sopir Kaji Zen menjelaskan :

“*Lak Pak Zen sing nyalonne yo ra enek musuhe mbak wong iku bose, la Abdi iku opo yo iso dadi lak ra onok bose kui. La aku iki kan burue Kaji Zen mbak yo'an, kadang kon nyopiri nyonyae belonjo. Apik lo mbak Kaji Zen i ngerti wong cilik*” (Wawancara, 29 Juni 2013).

Kalau Pak Zen yang nyalon dapat dipastikan ndak ada lawannya karena dialah bosnya, nah Abdi itu apa bisa jadi lurah kalau ndak ada bosnya. Saya ini kan buruhnya Kaji Zen juga, Mbak. Baik lo, Mbak Kaji Zen itu, pengertian sama rakyat kecil.

Beberapa warga mengatakan bahwa relasi yang dibangun Kaji Zen dan Lurah Abdi sebenarnya berlatar belakang fanatisme Islam. Hal tersebut terjadi karena kebiasaan Lurah Zen yang selalu menjadi donator dalam setiap pembangunan mushola di Desa Sukorejo. Peristiwa ini diceritakan oleh Pak Misran yang menjelaskan bahwa “*Kaji Zen iku wong apik nduk, ger enek pembangunan mushola ora tau absent. Mbuh watu, krikil, semen opo boto mesti sing nyukupi kaji Zen*” Kaji Zen itu orang baik, Nduk, tiap ada pembangunan mushola ora tau absent. Entah Batu, krikil, semen atau Batu bata pasti yang memenuhi Kaji Zen (wawancara, 1 Juli 2013).

Adanya pemanfaatan kekuatan suara dari moral dan resiprositas antara klien-klien yang dimiliki oleh Kaji Zen untuk Lurah Abdi, dilatarbelakangi oleh kedekatan Lurah Abdi dengan Kaji Zen dalam Satu organisasi Islam RECO (Remaja Sukorejo)^{vi}. Dari organisasi ini kemudian Lurah Abdi terlibat Utang Piutang dengan Kaji Zen. Menurut keterangan dari beberapa buruh Kaji Zen, Lurah Abdi saat itu meminjam dana sebesar seratus juta dengan Jaminan Bengkok Lurah seluas 3 Hektar. Dari transaksi tersebut akhirnya Kaji Zen Mengerahkan kekuatan Kliennya untuk memenangkan Lurah Abdi kembali lewat dukungan suara. Hal ini juga dijelaskan oleh calon Lurah lainnya pada pemilihan 2007. Pak Widi (38) yang menjelaskan :

“*Disini itu karakteristiknya mbak seumpama ada si A ini punya sawah, punya kebun tebu otomatis butuh banyak sekali pegawai secara otomatis punya banyak orang. [...] Disini itu ada orang yang paling disegani, Mbak namanya Kaji Zen anaknya Kaji Aziz. Beliau itu wakil keluarga, Mbak, apalagi Kaji Zen ini orangnya dermawan kalau warga butuh apa-apa itu beliau ada. Kalau kaji zen nyalon ya ndak ada berani nglawan tapi kanyaknya ndak wong ngurusi tanahe wae sak munu mbane. Nah kemarin itu yang Pak Abdi itu di dukung sama Kaji Zen*” (wawancara, 27 Juni 2013).



Gambar 2. Foto sawah tebu seluas 3 hektar yang merupakan bengkok lurah

Sumber : Dokumen Pribadi

Penjelasan lainnya juga di jelaskan oleh Pak Sami'i (62 th), beliau menguatkan argumentasi dari pola perpolitikan Lurah Abdi yang sebelumnya diterangkan oleh Pak Widi. Pak Sami'i mengatakan :

“*Ngene mbak abdi kui pancen wong pendalungan, la lak jenenge bos bolone lak akeh a dadi abdi iku di kenalne lewat bolo nyalur bolo neh akhire dadi akrab. La sing ngolah tebune iku lak Boz Zen to, perjanjianne kan abdi utang nek gone Bos Zen lunasan ne sawah tebu jatah lurah kui. Asline aku ra pati srek karo abdi, aku biyen dukung Widi, tapi mergo perintahe bos milih Abdi yo piye meneh akhire menggok lak ra manut bose yo dadi masalah. Akeh- akeh iku ngono, Mbak, podo miker weteng dari pada pilihane dewe, mergo iso menang iku yo soko sokongange karyawane Pak Zen ki sing akeh- akeh dadi buruh nek sawah ceritane ngunu.*” (Wawancara, 29 Juni 2013).

Jadi gini, Mbak Abdi itu memang orang pendalungan, nah yang namanya bos itu kan koneksinya banyak, jadi Abdi itu dikenalkan lewat teman ke teman akhirnya jadi akrab. Nah yang mengelola tebu jatah lurah itu kan Bos Zen to, perjanjiannya kan Abdi hutang ke Bos Zen pembayarannya Sawah tebu jatah lurah. Sebenarnya saya ndak terlalu mendukung Abdi, saya dulu mendukung Widi tapi karena perintah bos jadi milih Abdi, mau gimana lagi, Mbak, orang-orang lebih memikirkan urusan perut dibanding pilihan suara hati mereka. Dia bisa menang itu karena dukungan yang diberikan Pak Zen itu banyak dan mayoritas mereka jadi buruh sawah, gitu ceritanya.

Perjajian penyewaan sawah yang dilakukan oleh Kaji Zen dan Lurah Abdi adalah selama lima tahun. Sedangkan satu tahun diakhir masa jabatan sawah tersebut dikelola oleh Lurah Abdi sendiri. Total utang 100 juta sebenarnya bukan total yang sangat besar untuk ukuran modal pencalonan lurah di desa Sukorejo. Dalam pencalonan lurah Sukorejo modal yang di butuhkan berkisar 300 juta. Modal kampanye tersebut digunakan untuk memperkuat dukungan di masyarakat. Akan tetapi strategi yang di jalankan oleh lurah Abdi menggandeng

Kaji Zen sebagai Mitra politiknya mampu memangkas pengeluaran kampanye hingga 200 juta^{vii}.

Lurah Abdi sebenarnya merupakan wirausahawan yang cukup terpandang di Desa Sukorejo. Lurah Abdi memiliki toko material bangunan di Desa Sukorejo. Aksesnya yang luas membuat Lurah Abdi memiliki jaringan politik yang cukup kuat terutama di kalangan kaum ekonomi kelas atas di Desa Sukorejo Gondanglegi Malang. Sehingga, alur inilah yang memudahkan Lurah Abdi mendapat suara terbanyak dari dua calon lainnya.

Situasi Pemilihan Lurah 2007

Sepanjang jejak rekam perpolitikan di Desa Sukorejo, desa tersebut memiliki budaya pemilihan umum yang cukup unik. Selain besarnya modal yang diperuntukan dalam pencalonan Lurah dan Jaminan tanah bengkok lurah yang cukup luas, tradisi carok juga muncul disana. Kebudayaan yang cenderung mengarah ke pendalungan akibat banyaknya warga Madura yang bermigrasi ke Sukorejo, membuat akulturasi budaya tidak dapat dihindari. Pada pemilihan umum sebelumnya atau tepatnya pada masa pencalonan Lurah Purdopo tahun 2002, terjadi bentrok yang berujung pada terjadinya tradisi kekerasan carok, namun saat itu dapat diantisipasi oleh tuan tanah Desa Sukorejo atau dalam hal ini adalah Kaji Zen. Peristiwa tersebut diceritakan oleh mantan calon lurah 2007 yakni Pak Widi. Pak Widi menjelaskan, pada saat pemilihan umum dengan calon Pak Purdopo atmosfer perpolitikan desa memanas. Hal tersebut tidak hanya terjadi saat pemilihan umum 2002 saja melainkan juga pada pemilihan umum tahun 2012. Pak Widi menerangkan :

“Dulu, Mbak, pas waktune Pak Purdopo pernah ada yang hampir carok, kan disini itu ada masyarakat Maduranya juga, Mbak jadi ya tegang-tegang kalau pas pemilihan umum. Kalau ndak seneng gitu pasti bentrok, pas saya nyalon dulu juga tegang-tegang, Mbak. Sebulan sebelum pemilihan itu udah panas hawane”(Wawancara, 3 Juli 2013).

Tata cara pemilihan lurah atau pencoblosan lurah tidak menggunakan lembar suara bergambar foto melainkan dengan menggunakan kertas bergambar buah. Hal ini dilakukan untuk melestarikan tradisi dan mengurangi konflik antara calon yang satu dengan lainnya. Saat pemilu 2007 ketegangan terjadi, namun dapat diminimalisir akibat adanya relasi patron-klien yang turut dimainkan disana. Pada Pertarungan perpolitikan tahun 2007 konflik lebih terlihat lewat harmonisasi sosial masyarakat Sukorejo yang terganggu. Hal ini di praktikan lewat tidak saling menyapanya antar tetangga.

Pada tahun pemilihan 2007 terdapat tiga calon kepala desa yang akan bertarung demi mendapatkan kursi jabatan 2007-2013. Calon tersebut terdiri dari Purdopo, Abdi dan Widiaji. Saat itu, konsentrasi suara terfokus pada dua calon yaitu Widi dan Abdi. Widi mendapat banyak perolehan suara. Mereka yang memilih Widi

saat itu merupakan warga Sukorejo yang tidak termasuk Klien dari Kaji Zen. Hal tersebut juga mencakup tiga suara yang datang dari pamong desa. Perolehan suara yang di dapat Pak Widi saat itu hampir menyamai Lurah Abdi. Sayangnya perolehan suara lurah Abdi lebih banyak 16 suara dari pada Pak Widi. Dari total pemilih 2724 Jiwa, Lurah Abdi mendapat perolehan suara sebanyak 1.370, sedangkan Pak widi 1354 suara dan Pak Purdopo sebanyak 0 suara^{viii}. Dari perolehan tersebut Lurah Abdi unggul dan menjabat kembali sebagai Lurah untuk periode 2007-2013.

Pasca Pemilihan Lurah

Motif politik dengan prinsip moral dan resiprositas yang dijalankan oleh Lurah Abdi tidak berhenti begitu saja. Setelah dirinya terpilih menjadi Lurah di periode yang kedua, Lurah Abdi memecat tiga pamong Kelurahan. Permasalahan tersebut terjadi akibat ketika pamong tersebut menolak menyumbangkan suaranya untuk Abdi pada pemilihan kepala desa tahun 2007. Tiga pamong itu adalah Mahmudi, Marsio dan Yamudi. Keterangan pencopotan tiga pamong tersebut di jelaskan oleh Pak Misran sebagai berikut *“ ancene enek telu sing di copot pas abdi njabat sing kaping loro iki, enek telu Mahmudi, Marsio dan Yamudi gara-gara ne milih widi pas kui ”* memang ada tiga orang yang di pecat saat abdi menjabat untuk kedua kalinya, tiga orang tersebut adalah Mahmudi, Marsio dan Yamudi gara-gara memilih widi saat itu (Wawancara, 1 juli 2013).

Perombakan susunan pamong juga ditegaskan oleh mbah sirat penjaga jembatan Sukorejo-Kepan. Salah satu keponakan Mbah sirat merupakan anggota pamong yang dicopot jabatannya. Mengenai perang pamong yang diberhentikan dari jabatannya adalah bagian keuangan dan dua pesuruh lurah. Mbah Sirat menjelaskan :

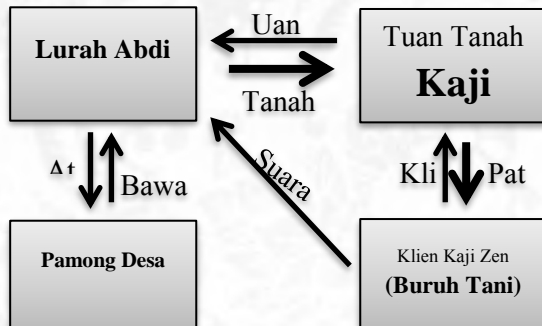
“ Enek sing di copot salah sijine keponakanku dewe jenenge yamudi, kabehen telu sing di copot Yamudi bagian duit, Marsio pesuruh karo Mahmudi. Kuwi dicopote gara-gara ora milih pak abdi dadi lurah neh kanggo sing kaping loro tapi milih wong liyo” (Wawancara, 2 Juni 2013)

Ada yang dig anti salah satunya ponakan saya amanya yamudi, semuanya ada tiga yang di pecat Yamudi bagian keuangan, Marsio pesuru dan Mahmudi. Dicotpot karena tidak memilih Pak Abdi untuk jadi lurah yang kedua kalinya tapi memilih orang lain.

Pola politik yang dibangun berdasarkan prinsip moral dan resiprositas dalam bentuk Patron-Klien sebenarnya tidak hanya terjadi pada proses pra-pemilu. Patron-klien juga di perankan oleh Lurah Abdi terhadap para bawahannya. Dalam persoalan pemecatan tiga pamong yang tidak memilihnya dalam pemilihan tahun 2007 terjadi tidak harmonisan atau kekacauan dalam konsep patron-klien di bidang politik desa. Hal ini didasari pada sifat keterpihkan sebagai satu kewajiban moral atas

bawahan kepada atasan. Pengaruh kebudayaan kaum petani memperlihatkan konsep patron-klien tidak hanya bekerja pada ranah ekonomi saja, namun juga terbawa dalam Bagian kebudayaan yang lain seperti pada pola politik yang diperankan Lurah Abdi.

Gambaran konsep sederhana antara relasi patron klien yang di bangun oleh Lurah Abdi sebenarnya dipengaruhi konsep kelas. Kesusaan dan kekayaan menjadi asset mendasar yang digunakan pada tipe politik Lurah Abdi. Hal ini dapat dilihat pada bagan sederhana berikut:



Gambar 3. Bagan Relasi Patro-Klien Lurah Abdi

Perpolitikan yang dijalankan Lurah Abdi secara umum mengaitkan relasi Patron-klien yang cukup luas. Adanya ikatan piutang dengan Kaji Zen melibatkan relasi patron-klien yang dimiliki Kaji Zen. Hal ini kemudian disalurkan dalam bentuk suara untuk lurah Abdi. Bentuk dukungan suara dari para Buruh Kaji Zen, diposisikan sebagai kewajiban moral yang timbul secara otomatis dari ikatan Patron-klien yang dibangun sebelumnya. Sedangkan, relasi patron-klien juga diposisikan dalam kuasa kepemimpinan sebagai lurah sebelumnya oleh Lurah Abdi. Ikatan kuasa antara bawahan dan atasan harusnya terjalin sebagaimana moral dan repositas yang ada pada konsep Patron-Klien. Ketika kewajiban moral dan resiprositas tersebut tidak terpenuhi maka akan timbul sanksing sosial yang salah satunya dipraktekan dalam kasus pemecatan tiga Pamong.

SIMPULAN

Kekuatan kuasa sebenarnya menciptakan suatu sinkronisasi atas pengaturan wewenang lintas kelas. Hal tersebut terjadi dalam bentuk-bentuk yang bervariasi. Tentunya bentuk tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang disana. Di Desa Sukorejo hal ini diwujudkan dalam bentuk relasi politik yang kental dengan budaya subsisten kaum tani, dimana kuasa tuan tanah menjadi suatu kunci pemulusan hajat atau niat yang diinginkan. Teori Galtung dalam Anshoriy (2008) yang mengemukakan bahwa *kekuasaan dapat diperoleh jika memang kekuasaan itu mutlak ada*, dapat dilihat bagaimana relasi antara tuan tanah dan lurah terjalin.

Galtung juga menambahkan bahwa *kekuasaan juga dapat diperoleh dengan sebuah kekayaan dan kekuasaan diperoleh karena adanya posisi struktural*.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ikatan resiprositas antara Lurah dengan pamongnya. Secara struktural Lurah memiliki kuasa lebih tinggi sehingga pengambilan keputusan bisa didasarkan secara objektif maupun subjektif. Pengambilan keputusan akibat tidak memberikan suara dengan sanksi di pecat merupakan pengambilan keputusan secara subjektif dengan latar belakang budaya yang ada di Desa Sukorejo. Maka relasi sosial Patron-Klien yang dipraktekan dalam bentuk relasi ataupun structural yang digambarkan oleh Scott (1981) merupakan bentuk dari kuasa dari kelas atas untuk kelas bawah. Hal ini juga diperkuat oleh pandangan Radcliffe Brown dalam buku Koentjoroningrat (2007) yang menjelaskan Suatu struktur sosial merupakan total dari jaringan hubungan antara individu-individu, atau lebih baik person-person dan kelompok-kelompok person. Dimensinya ada dua, yaitu: hubungan diadik, artinya antarapihak (yaitu person atau kelompok) kesatuan dengan pihak kedua, tetapi juga diferensial, antara satu pihak dengan beberapa pihak yang berbeda-beda, atau sebaliknya (Koentjoroningrat, 2007).

UCAPAN TERIMAKASIH

Tulisan ini ditulis berdasarkan catatan penelitian tugas kuliah yang dilakukan pada 2013. Mengingat penelitian ini menggunakan metode Etnografi tentunya peneliti membutuhkan tempat tinggal di Desa Sukorejo. Selayaknya ucapan terimakasih saya ucapkan untuk para informan yang telah ikut berperan memberi informasi dan data yang dibutuhkan dalam pembahasan topik tulisan ini. Ucapan terimakasih yang pertama ditujukan untuk segenap jajaran Perangkat Desa Sukorejo, utamanya kepada Miftakhul Abdi selaku pemberi izin penelitian ini. Selanjutnya Ucapan terimakasih ditujukan kepada Pak Solikhin, Pak Widiaji, Pak Purdopo, Pak Ramin, Pak Sami'i dan Mbah Sirat yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancara. Ucapan terimakasih saya berikan kepada Keluarga Bapak Misran yang telah rela menjadi induk semang saya selama menjalankan penelitian. Selain itu, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Dosen Antropologi yang telah membimbing jalanannya penelitian ini selama dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halili. (2009). Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)*, Volume 14 nomor 2, 99-112.
- Rohmawati, A. (2005). Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan komunikasi Unikom*.
- Tobing, A. A. (2009). *Eksistensi Tanah Bengkulu Setelah Perubahannya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Ssalatiga*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Anshoriy, H. N. (2008). *Dekonstruksi Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Fettersman, D. M. (2010). *Etnography Step- by-Step*. Washington DC: Sage publications.
- Koentjaraningrat. (2007). *Sejarah Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (1980). *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI-Press.
- Scott, J. C. (1981). *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.
- Simatupang, L. (2010). *Pagelaran : Sebuah Mozaik Paenelitian Seni Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

ⁱ Lihat di Tobing, A. A. (2009). *Eksistensi Tanah Bengkulu Setelah Perubahannya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Ssalatiga*. Semarang: Universitas Diponegoro. Hlm. 37

ⁱⁱ Kasus 'Tukar Guling' merupakan kasus yang dilakukan oleh Lurah Purdopo dalam kasus tersebut terjadi kesalahan pahaman antara lurah dan rakyatnya. Permasalahan yang terjadi saat itu adalah menukaran tanah bengkok dengan tanah milik warga untuk pembangunan sekolah SMP. Dari sini elektabilitas Pak Purdopo sebagai lurah secara drastis menurun hingga dilengserkan dari jabatan lurah dan digantikan oleh Pak Abdi.

ⁱⁱⁱ *Dhiba'an* adalah shalawat yang dilagukan dan diiringi dengan suara rebana

^{iv} Menurut keterangan warga tuan tanah tersebut merupakan anak dari Kaji Aziz. Sosok Kaji Aziz sendiri merupakan tuan tanah yang memiliki tanah terluas di Desa Sukorejo pada Masa itu. Kaji Aziz sendiri awalnya Menjabat menjadi lurah, namun masa jabatannya tak lebih dari satu tahun. Hal tersebut terjadi karena Kaji Aziz saat itu terlibat penggelapan ribuan pupuk BIMAS. Kasus penggelapan tersebut dilakukan oleh teman Kaji Aziz dibawah nama Kaji Aziz. Dari kejadian tersebut Kaji Aziz melarang keturunannya menjadi lurah di Desa Sukorejo.

^v Hal tersebut sama contohnya dengan penelitian Scott pada petani di Filipina, dimana pola persekutuan diantara perseorangan pada umumnya ditafsirkan dalam rangka resiprositas atau faham 'setiap jasa diterima, di

minta atau tidak dibalas' Dimana rasa malu (*hiya*) dan rasa hutang dudi (*utang na loob*) merupakan daya pergerakannya. Lihat di buku Scott, J. C. (1981). *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES. hlm. 256.

^{vi} Keterlibatan Kaji dalam organisasi masyarakat baru dimulai paca abahnya atau Kaji Azis Meninggal. Sebelumnya Kaji Zen tidak pernah terlihat aktif di organisasi Desa Sukorejo.

^{vii} Calon lain seperti Pak Widi Aji menghabiskan modal pencalonan lurah sebanyak 300 juta. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup besar hingga membutuhkan waktu pemulihan ekonomi selama enam tahun. Membaca taktik politik yang dijalankan Lurah Abdi, Pak Widi juga menggunakan trik tersebut dalam pencalonan sebagai lurah pada masa pemilihan 2012. Terlebih ada ikatan keluarga yang akan terjalin dengan keluarga Kaji Zen. Hal ini diutarakan langsung oleh Pak Widi sebagai berikut : "*ini sebentar algi kan pemilihan mbak biasanya jarak setahun itu suasananya sudah panas mbak antar tetangga itu sudah tidak saling menyapa, tapi alhamdulillah kemarin itu teman-teman yang akan nyalon itu sudah saya dan teman-teman termasuk juga Pak Zen ikut untuk memberi pesan jangan bilang-bilang dulu nanti saja kalau sudah dekat*" (Wawancara, 27 Juni 2013).

^{viii} Informasi ini didapat dari data pemilihan desa yang diinformasikan secara lisan oleh Carik desa yaitu Pak Sholikin.

PERAN OPINION LEADER DALAM MASYARAKAT TRANSISI (Studi di Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang)

Agus Rahmat

Dosen Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
agusrahmat.fikom@gmail.com

Hendarmawan

Guru besar Program Studi Geologi Universitas Padjadjaran

Edy Suryadi

Dosen pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas padjadjaran

Cipta Endyana

Dosen Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran

Abstrak

Peran *opinion leader* di desa-desa pada awalnya menjadi tempat bertanya atas segala hal (bersifat folimorfik), akan tetapi hasil kajian akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa terjadi pergeseran sifat folimorfik dari para *opinion leader*. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana peran *opinion leader* pada masyarakat transisi seperti Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. Guna mengungkap masalah penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan teknik sosiometri. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum *opinion leader* di Desa Mekarsari tidak lagi diposisikan sebagai polimorfik. *Opinion leader* khususnya kiyai atau alim ulama (*opinion leader* agama) tetap menjadi tokoh atau titik sentral untuk permasalahan agama, tetapi mulai berkurang untuk menjadi rujukan dalam permasalahan rumah tangga dan permasalahan sosial ekonomi. Untuk permasalahan keluarga dan sosial ekonomi, masyarakat lebih banyak meminta pendapat pada anggota keluarga (keluarga besar), baru ke para pemimpin formal di desa atau tetangga yang dianggap/kerabat dekat. Sementara untuk permasalahan keamanan, *opinion leader* didominasi oleh aparat pemerintah (pemimpin formal di desa), dan untuk permasalahan kesehatan *opinion leader* dikuasai oleh petugas kesehatan yang ada di desa. Implikasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memperoleh penerimaan dan keberhasilan program pengembangan masyarakat, para pelaku perubahan tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu kelompok pemuka saja (pemuka agama) akan tetapi perlu menyesuaikan jenis atau bidang kegiatan

dengan kelompok *opinion leader* yang ada di masyarakat.

Kata kunci: desa, *opinion leader*, agama, keluarga, sosial ekonomi, keamanan, kesehatan

Latar Belakang

Kajian mengenai kepemimpinan telah lama dilakukan para ahli, dan saat inipun kajian terhadap aspek ini tidak berkurang, ini berarti bahwa kajian terhadap kepemimpinan termasuk kepemimpinan dalam masyarakat desa merupakan kajian yang tetapi menarik. Salah satunya alasan terkait yang dengan posisi dan peran yang dimainkannya, yaitu sebagai “pejaga pintu” bagi masyarakatnya. Sebagai “penjaga pintu” dalam masyarakat ada dua hal yang dilakukan yaitu, menjadi orang yang memelihara atau menjaga masyarakat dari perubahan, kedua para pemimpin sekaligus juga menjadi pelaku perubahan bagi masyarakatnya sendiri. Seperti dikemukakan Van den Ban & Hawkin bahwa *opinion leader* “...mengukuhkan atau menolak perubahan yang ingin dilaksanakan oleh orang lain, dengan kata lain persetujuan atau penolakan atas suatu perubahan ditentukan oleh *opinion leader* (1999;133).

Ini berarti bahwa para pemimpin menjadi orang-orang yang banyak diminta nasihat atas persoalan kehidupan (Dalam konteks penelitian ini selanjutnya pemimpin disebut *opinion leader*), termasuk kaitannya dengan kehadiran ide atau pemikiran baru, kegiatan atau program baru yang masuk ke wilayahnya, bahkan barang-barang baru yang diadopsi masyarakat umum, termasuk kehadiran orang-orang (pembawa ide-ide) baru di wilayahnya. Satu hal yang biasanya muncul

nasihat/pemikiran dari para pemimpin ini adalah pandangan-pandangannya yang seringkali berlandas pada tradisi atau sistem nilai yang kuat, dalam posisi seperti ini nampak betul bahwa masyarakat desa merupakan masyarakat yang berciri *sacred society*, yaitu masyarakat yang terdominasi dan bertahan dalam struktur masyarakat yang totalitarian, *hierarchical*, dan tertutup oleh dogma tertentu.

Dalam masyarakat desa, seseorang yang menduduki posisi sebagai *opinion leader* banyak diminta pemikiran untuk berbagai aspek persoalan seperti agama, sosial, budaya, bahkan persoalan keluarga. Masih teringat jelas bagaimana peran ulama dalam penerimaan program Keluarga Berencana di Indonesia (*family planning program*), kejadian ini menunjukkan bahwa untuk keputusan yang bersifat pribadi pun, masyarakat banyak merujuk pada para *opinion leader*, dan masyarakatnya menempatkan ulama sebagai *opinion leader* yang *polymorphy* (*opinion leader* dalam banyak aspek).

Fenomena yang teramati serta konsep yang ada memperlihatkan bahwa tidak ada sebuah masyarakat dengan sistem budayanya termasuk yang tradisional berada dalam kondisi yang statis. Hal yang sama terjadi dalam peran pemimpin opini yang lambat laun semakin pudar. Banyak faktor yang menjadi penyebab seperti meningkatnya atau perkembangan media massa, dan meningkatnya tingkat melek huruf masyarakat. Temuan Saidin Ernas dalam kajiannya menunjukkan bahwa, banyak pesantren yang mengalami penurunan kualitas karena kiai atau pimpinan pesantrennya lebih sibuk berpolitik. Pesantren yang terlampau aktif dalam peran politiknya (*political oriented*) sangat mungkin akan ditinggal oleh santrinya. Sebab orang tua santri yang kritis akan lebih memilih pesantren yang lebih menjaga independensinya terhadap politik praktis. Pada titik ini, dapat disimak bahwa masyarakat yang sebelumnya sangat menghormati pesantren dan selalu mengikuti anjuran dan arahan pesantren mempunyai dasar untuk menentang legitimasi fatwa pesantren, khususnya dalam isu-isu sosial dan politik, terutama dalam kasus pemilu.

Perubahan peran *opinion leader* dalam masyarakat diasumsikan lebih terlihat dalam sebuah masyarakat desa transisi seperti Desa Mekarsari. Penempatan Desa Mekarsari sebagai desa transisi terkait dengan peraturan daerah Kabupaten Sumedang nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031 yang menempatkan wilayah ini sebagai salah satu wilayah untuk kawasan permukiman Perkotaan Bandung Raya. Sejalan dengan kondisi ini adalah pendapat dari

Lazarfeld dan Menzel bahwa apabila masyarakat tradisional berada dalam massa peralihan menuju masyarakat modern. Salah satu syarat yang paling penting dalam komunikasi adalah pengalihan informasi yang terjadi antara sumber informasi dengan penerima informasi

Berdasar kondisi sebagai mana dideskripsikan maka menarik untuk dilakukan kajian mengenai peran *opinion leader* di Desa Mekarsari sebagai salah satu desa Transisi.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan situasi atau peristiwa atau penelitian observasional seperti yang dikemukakan oleh Wood (dalam Rahmat, 2004:25). Hal ini membawa konsekuensi pada peneliti untuk melakukan pengumpulan informasi aktual secara rinci yang dipandang peneliti akan mampu melukiskan gejala yang dicari mengenai siapa yang menjadi *opinion leader* di lingkungannya, mengidentifikasi masalah yang ada pada diri mereka dan lingkungannya, mulai dari agama, sosial, ekonomi, keamanan bahkan kesehatan, serta menemukan pada siapa mereka membicarakan masalah tersebut.

Guna memperoleh data yang diharapkan, peneliti menggunakan metode survey yang dilengkapi dengan kuesioner sebagai bahan peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang dikaji. Serangkaian langkah yang dilakukan peneliti untuk mengungkap data adalah :

1. Memilih tema dan permasalahan yang ada di lokasi ;
2. Membuat pertanyaan dan pembatasan masalah
3. Membuat kerangka pemikiran didasari teori dan konsep penelitian
4. Menentukan alat atau teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner
5. Menggunakan sampling dalam hal ini nara sumber
6. Mendapatkan data yang diperlukan dari lokasi kajian
7. Analisa temuan
8. Mendapatkan jawaban dari penelitian yang telah dilakukan

Penentuan informan kunci dilakukan secara acak, namun tetap memperhatikan beberapa hal berikut: pertama, warga Desa Mekarsari yang dibuktikan melalui data kependudukan desa; kedua, subyek penelitian bersedia menerima kehadiran peneliti;

berkemampuan dan bersedia menjawab pertanyaan penelitian. Informan atau responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga dengan alasan karena merekalah pemegang keputusan yang ada di keluarga.

Landasan Konsep

Beberapa konsep utama yang demikian kuat relevansinya dengan tema penelitian ini, adalah: perubahan relasi dalam sistem sosial; kedua terkait dengan konsep peran; dan ketiga, terkait dengan konsep *opinion leader*.

Konsep peran merujuk pada pemikiran dari beberapa ahli seperti Banton (1965), Katz & Kahn (1966), **Bauer** (2003) juga **Robbins** (2001). Pemikiran para ahli ini terangkum melalui pendapat Levinson dalam Soekanto (2009:213) yang pada intinya konsep peranan mencakup tiga hal, pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat; kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; tiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Dalam kaitan dengan tiga hal yang dikatakan Levinson, memiliki relevansi dengan pemikiran Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam **Bauer**, 2003: 58 mengenai persepsi dari peran atau *role perceptions*.

Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu

Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebut mengenai lima hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan peran, yaitu: pertama, peran itu bersifat impersonal atau posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya; kedua, peran itu berkaitan dengan perilaku kerja yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu; tiga, peran itu sulit dikendalikan; empat, peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama; lima, peran dan pekerjaan (*jobs*) itu

tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Masyarakat merupakan hasil proses sosial sekaligus berproses secara berkesinambungan. Membahas masyarakat sebagai sebuah proses sosial memiliki cakupan yang demikian luas, karena didalamnya akan terkait dengan banyak hal seperti interaksi juga stratifikasi sosial, serta banyak hal lainnya, namun demikian diyakini bahwa bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial. Salah satu teori yang memiliki kaitan erat dengan interaksi sosial dan dekat dengan tema kajian adalah dialektika relasional, salah satu asumsi dari relasi sosial disebutkan bahwa hubungan tidak bersifat linear, artinya karena manusia memiliki keinginan-keinginan yang seringkali kontradiktif maka relasi ini bersifat fluktuatif (berubah-ubah), selanjutnya kontradiktif ini mendorong manusia untuk berupaya mengelolanya melalui hubungan dengan cara yang berbeda-beda, akan tetapi kedua hal ini selalu muncul dalam suatu hubungan.

Pemikiran mengenai keniscayaan proses dalam interaksi manusia dalam sebuah masyarakat juga bisa ditelusuri melalui pemikiran Leslie Baxter dan WK Rawlins (1988), bahwa hidup berhubungan dicirikan oleh ketegangan-ketegangan atau konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang mencoba memaksakan keinginannya satu terhadap yang lain.

Konsep ketiga yang demikian penting dalam penelitian ini adalah *opinion leader*. Istilah *opinion leader* sebagai sumber informasi dan pengambil keputusan dicetuskan pertama kali oleh Lazarsfeld sebagai hasil *opinion leader* adalah kemampuan mempengaruhi sikap atau perilaku seorang secara informal sesuai dengan kehendak si pemimpin melalui hubungan sosial yang dibina (Depari, 1988:104). Nurudin (2004:154) dalam bukunya mengenai sistem komunikasi Indonesia mengungkapkan bahwa: *opinion leader* adalah mereka yang memiliki otoritas yang tinggi dan yang menentukan sikap dan perilaku pengikutnya.

Bagi Floyd Ruch seorang *opinion leader* memiliki beberapa syarat, yaitu: *social perception*, yang berarti bahwa seorang pemimpin dipersyaratkan memiliki ketajaman dalam menghadapi situasi; memiliki *ability in abstract thinking*, yang artinya pemimpin dipersyaratkan memiliki kecakapan secara abstrak terhadap masalah yang dihadapi; serta seorang pemimpin dipersyaratkan memiliki *emotional stability*, yaitu kemampuan yang terkait dengan stabilitas emosi yang ditunjukkan seperti tidak mudah tertekan pengaruh terutama dari luar yang tidak

diyakini dan bertolak belakang dengan keyakinan masyarakat).

Konsep *opinion leader* banyak dikaitkan dengan kondisi masyarakat di pedesaan karena tingkat *media exposure*-nya dan tingkat pendidikannya yang masih rendah. Akses dari media lebih memungkinkan dari mereka yang mempunyai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Melalui seorang *opinion leader*-lah informasi yang datangnya dari media diketahui oleh masyarakat awam. Secara tidak langsung, *opinion leader* merupakan perantara berbagai informasi yang diterima dan diteruskan kepada masyarakat setempat, oleh karenanya mereka ini sangat dipercaya dan dijadikan panutan serta menjadi tempat bertanya dan meminta nasehat dalam segala hal.

Pengaruh *opinion leader* dalam masyarakat menjadi strategis terkait dengan kemampuan dari orang-orang ini mempengaruhi berpikir dan perilakunya anggota masyarakat lainnya. Schiffman dan Kanuk (2000: 395) mendefinisikan *opinion leadership (word of mouth munication)* sebagai suatu proses dimana seseorang (*the opinion leader*) secara informal mempengaruhi tindakan-tindakan dan sikap orang lain. Pendapat senada juga muncul dari Eliashberg dan Shugan (dikutip juga oleh Bertrandias dan Goldsmith) mengungkapkan bahwa pemimpin opini adalah orang yang dikenali oleh sebuah kelompok, atau oleh orang lain, sebagai orang yang mempunyai keahlian dan pengetahuan dan yang juga dipertimbangkan sebagai sumber yang layak untuk informasi dan nasihat. Bertrandias dan Goldsmith (2006) mengutip pengertian pemimpin opini dari beberapa penulis, di antaranya adalah Rogers dan Cartano yang mendefinisikan pemimpin opini sebagai orang yang berusaha mengarahkan sejumlah pengaruh terhadap keputusan orang lain Bertrandias dan Goldsmith (2006) menyimpulkan bahwa *opinion leader* dari beberapa ahli yang pada intinya merupakan orang yang berusaha mengarahkan sejumlah pengaruh terhadap keputusan orang lain.

Dilihat dari penguasaan materinya, *opinion leader* dapat digolongkan menjadi dua, pertama, monomorfik (*monomorphic*) yakni jika *opinion leader* hanya menguasai satu permasalahan saja. *Opinion leader* semacam ini hanya mampu mengatasi satu permasalahan yang ada di masyarakat, kedua, polimorfik (*polymorphic*) yakni jika *opinion leader* menguasai lebih dari dua permasalahan. Pemimpin opini semacam ini mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat (Nurudin, 2004:163).

Temuan Penelitian

1. Karakteristik Wilayah Kajian

Secara administratif, Desa Mekarsari merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukasari. Dilihat dari luas wilayah, Desa Mekarsari merupakan desa yang paling kecil yaitu 287 Ha. Luas ini terbagi atas lahan sawah yang mencapai 76 Ha, lahan bukan sawah seluas 133 Ha dan lahan non pertanian mencapai 78 Ha. Sementara dilihat dari keadaan permukaan dan ketinggian, Desa Mekarsari merupakan wilayah yang berada di lereng gunung dan berbukit dengan ketinggian mencapai 874 meter di atas permukaan laut (mdpl).

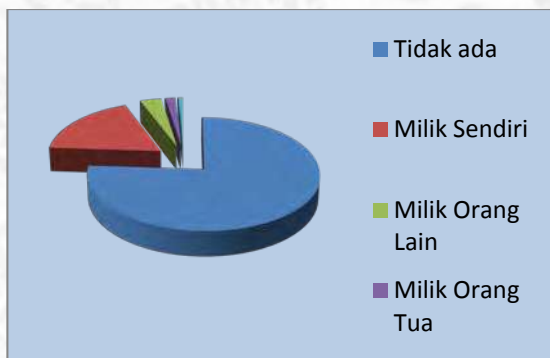
Desa Mekarsari terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RT). Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan di Desa Mekarsari relatif sedikit. Dari 9 aparat yang ada di Desa Mekarsari hanya ada 1 perempuan.

Sedangkan dilihat dari demografi (kependudukan), Desa Mekarsari mencapai 3.627 orang. Yang terdiri dari 1.848 orang laki-laki dan 1.780 orang perempuan. Jika jumlah penduduk ini dikaitkan dengan luas wilayah yang hanya 2,87 km, maka tingkat kepadatan di Desa Mekarsari mencapai 590.

Dilihat dari tingkat pendidikannya Desa Mekarsari berada pada kategori desa yang sama dengan desa-desa lainnya yang selama ini dipersepsi, yaitu desa dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Hal lain yang dinilai penting dalam memahami masyarakat desa (termasuk Desa Mekarsari), adalah pemahaman atas aspek kepemilikan, hal ini dikarenakan kepemilikan bagi masyarakat desa berkaitan erat dengan status. Peter L Berger dalam Suyono (2008) menulis bahwa "*by the use of various symbols one keep on showing the world where one has arrived*", yaitu orang senantiasa memperlihatkan kepada orang lain apa yang telah diraihinya dengan memakai simbol status yang berfungsi untuk memberitahu status yang diduduki seseorang.

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang kehidupannya sangat terikat dan sangat tergantung dari tanah (*earth-bound*). Oleh karena itu penting juga bagi peneliti untuk melihat kepemilikan tanah pertanian di wilayah kajian ini. Data mengenai kepemilikan lahan pertanian di Desa Mekarsari ditunjukkan melalui diagram berikut:



Berdasar atas data penelitian nampak bahwa masyarakat Desa Mekarsari merupakan masyarakat pertanian, namun mereka yang berprofesi sebagai petani kebanyakan berada pada posisi sebagai buruh tani atau petani penggarap.

Kepemilikan tanah pertanian yang sempit, bahkan berkedudukan lebih sebagai buruh dan petani penggarap dikatakan Chamhuri Siwar (2004) sebagai karakteristik dari petani tradisional. Secara lengkap ia mengatakan bahwa “dari segi tanah, pertanian tradisional lazimnya dilakukan pada tanah yang berukuran sempit, bahkan sebagian besar tidak mempunyai sawah dan menjadi penyewa atau buruh (2004, 35).

2. *Opinion leader*

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang ada di desa berkisar pada: lemahnya posisi sumber daya alam; lemahnya posisi sumber daya manusia di dalam pedesaan; kurangnya penguasaan teknologi yang menyebabkan masyarakat pedesaan sukar mendapatkan informasi; lemahnya infrastruktur dan lemahnya aspek kelembagaan di dalam pedesaan; sulit untuk mendapatkan pekerjaan; kurangnya pengetahuan sosial sehingga mudah ditipu oleh masyarakat kota; konflik/pertengkarannya yang biasanya berkisar dari masalah sehari-hari/rumah tangga; kontroversi yang disebabkan dari perubahan konsep adat istiadat dan kebudayaan; kompetisi dan persaingan yang negatif bila menunjukkan sifat iri.

Dari sekian banyak permasalahan atau persoalan yang ada di desa, berdasarkan hasil observasi, ada lima permasalahan yang paling banyak dihadapi dengan mereka. Kelima permasalahan ini selanjutnya menjadi perhatian utama peneliti untuk mengetahui kepada siapa mereka (masyarakat) mendiskusikan atau meminta pendapat guna memampukan diri menghadapi permasalahan tersebut. Kelima permasalahan ini adalah: permasalahan yang terkait

dengan persoalan agama; permasalahan yang terkait dengan ekonomi; permasalahan keluarga; keamanan dan kesehatan.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 120 kepala keluarga menunjukkan bahwa orang yang dimintai pendapat atas kelima permasalahan yang dihadapi tersebar melalui diagram berikut :

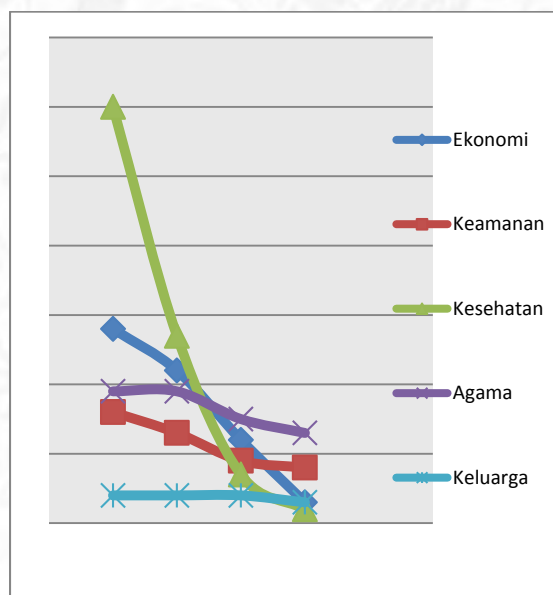


Diagram tersebut memperlihatkan kondisi berikut:

- *Opinion leader* pada masyarakat Desa Mekarsari sudah mulai terdiferensiasi. Ini berarti bahwa *opinion leader* di Desa Mekarsari demikian banyak sesuai dengan bidang atau persoalan (monomorfik), ada orang yang menjadi *opinion leader* untuk persoalan ekonomi, ada warga yang menjadi *opinion leader* di bidang keamanan, atau *opinion leader* bidang kesehatan serta yang lainnya. Namun demikian ada juga orang yang menjadi *opinion leader* dalam beberapa permasalahan (polimorfik).
- *Opinion leader* yang bersifat polimorfik kebanyakan menyangkut permasalahan agama, permasalahan keluarga dan permasalahan ekonomi.
- *Opinion leader* bidang ekonomi dan keluarga kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga besar individu (anggota masyarakat) yang memiliki permasalahan.
- *Opinion leader* yang bersifat monomorfik, banyak untuk permasalahan kesehatan dan keamanan.
- *Opinion leader* yang memiliki tingkat konsentrasi paling tinggi ada pada permasalahan kesehatan, ini berarti bahwa jumlah *opinion leader* bidang kesehatan tidak sebanyak permasalahan lainnya.

- *Opinion leader* yang relatif banyak atau tersebar adalah *opinion leader* bidang keluarga.
- *Opinion leader* di bidang ekonomi menunjuk relatif lebih terkonsentrasi di banding ketokohan atau *opinion leader* di bidang agama walaupun tidak setersebar dalam masalah keluarga.

Pembahasan

Opinion leader pada masyarakat Desa Mekarsari mulai terdiferensiasi, sehingga *opinion* di desa ini lebih bersifat monomorfik. Ada beberapa alasan yang bisa dipahami mengapa hal ini terjadi. Salah satunya terkait dengan aksesibilitas masyarakat atas informasi. Perkembangan media massa seperti televisi, radio telah menjadikan masyarakat mengetahui banyak hal secara bersamaan dengan para *opinion leader*.

Tidak dinafikan bahwa dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Mekarsari merupakan masyarakat yang berpendidikan rendah, akan tetapi untuk mengakses informasi dari televisi dan radio tidak membutuhkan pendidikan tinggi karena televisi dan radio bisa diakses oleh masyarakat yang buta huruf sekalipun.

Sebagai sebuah konsekuensi dari kondisi ini maka upaya untuk memperoleh dukungan program pemberdayaan masyarakat, tidak lagi bisa mengandalkan beberapa para *opinion leader* seperti jaman dahulu, melainkan membutuhkan pendekatan pada banyak pihak (para pemuka pendapat), tergantung jenis atau macam pemberdayaan, beda jenis atau macam pemberdayaan maka beda orang-orang yang didekatinya.

Namun demikian sebagai sebuah desa, Desa Mekarsari masih tetap menyisakan *opinion leader* yang bersifat polimorfik. Kelompok *opinion leader* yang masih banyak menduduki sebagai *opinion* polimorfik kebanyakan pada kelompok agama.

Opinion leader kelompok agama di Desa Mekarsari, paling utama berkaitan dengan upaya penyelesaian perbedaan paham keagamaan pada level praksis bukan yang prinsip seperti persoalan aqidah, walaupun sudah jarang akan tetapi persoalan seperti ini kadang muncul. Melalui komunikasi yang bersifat antar pribadi dan dengan jenis komunikasi dari mulut ke mulut/tanpa bermedia (Schiffman dan Kanuk (2000: 395)) persoalan agama ini disiskusikan masyarakat dengan orang yang ditokohkan oleh dirinya dengan pemuka agama baik yang berkedudukan sebagai Ustad, Haji, atau pengurus Dewan Keluarga Mesjid.

Walaupun tidak semua, banyak tokoh agama yang juga banyak ditanya untuk urusan keluarga, ketika persoalan keluarga sudah tidak bisa diselesaikan masyarakat di level awal. Bagi masyarakat Desa Mekarsari, permasalahan keluarga merupakan salah satu permasalahan yang relatif tertutup dibicarakan dengan orang lain. Ketika persoalan ini muncul masyarakat biasanya membicarakannya dalam lingkup keluarga. Anggota keluarga yang dituakan biasanya yang diminta pendapat terkait dengan persoalan keluarga. Persoalan yang tidak bisa diselesaikan pada lingkup keluarga inilah yang hanya dimintakan pendapatnya ke pemuka agama, atau masyarakat yang berkeinginan untuk meminta *second opinion* yang meminta pendapat pada tokoh agama terkait dengan permasalahan keluarga yang dihadapinya.

Komunikasi untuk urusan rumah tangga berkaitan dengan persoalan kepercayaan, yaitu hanya akan dibicarakan dengan orang yang benar-benar bisa dipercaya oleh si pemilik permasalahan. Kondisi ini merupakan hal yang alami, karena komunikasi dengan orang-orang yang dipercaya akan menjadikan lebih baik. Goldaber (1990) mengatakan bahwa komunikasi dengan orang yang dekat akan lebih baik dan sehat dibanding dengan yang lain.

Persoalan keluarga dalam masyarakat desa tidak banyak dibicarakan dengan orang lain selain dengan mereka yang benar-benar dipercaya, Robert dan O'Relly (1974) dalam Goldhaber (1990) berpendapat bahwa kepercayaan merupakan faktor penting untuk mewujudkan komunikasi yang terbuka.

Persoalan ekonomi relatif tertutup untuk dibicarakan dengan orang lain, akan tetapi bagi masyarakat Desa Mekarsari, ketertutupan persoalan ekonomi tidak seperti ketertutupan dalam masalah keluarga. Kondisi ini berarti bahwa persoalan ekonomi khusus ekonomi keluarga, biasanya dibicarakan di lingkungan keluarga atau tetangga yang dianggap sudah dekat. Dalam berkomunikasi memang orang akan merasa tenang ketika berkomunikasi dengan orang yang berstatus sama (Mehrabian dalam Goldabher 1990) dan kurang tenang jika berkomunikasi dengan orang yang berstatus lebih tinggi (Goldhaber, 1990).

Untuk persoalan ekonomi yang tidak bisa diselesaikan dengan orang-orang dekat, baru dikomunikasikan dengan orang lain *opinion leader* baik tokoh agama maupun tokoh ekonomi yang ada di sekitarnya.

Opinion leader yang lebih bersifat monomorfik adalah kelompok pemuka pendapat dalam bidang

kesehatan. Mereka-mereka yang ditokohkan oleh masyarakat untuk urusan kesehatan hanyalah anggota masyarakat yang dalam pekerjaan kesehariannya bertalian dengan kesehatan, seperti bidan, perawat kesehatan atau pegawai puskesmas yang bertempat tinggal di desa tersebut. Ini berarti bahwa untuk persoalan kesehatan, masyarakat di Desa Mekarsari lebih menggunakan kepemimpinan pendapatnya berdasar pada rasional dibanding kharismatik dan tradisional.

Opinion dalam bidang keamanan di Desa Mekarsari berada pada tenaga keamanan desa dan para aparat desa termasuk ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga. Kondisi ini bisa diartikan bahwa *opinion leader* bidang keamanan mendekati *opinion leader* di bidang kesehatan, hanya saja untuk *opinion leader* di bidang keamanan banyak juga yang merangkap dengan *opinion leader* dalam aspek ekonomi.

Kesimpulan

Masyarakat Desa Mekarsari merupakan masyarakat yang dinamis, termasuk dalam penentuan *opinion leader*. Masyarakat ini sudah memilah peran *opinion leader* berdasar rasio atau bidang keahlian dari orang-orang yang ditokohkannya, walaupun dalam hal-hal tertentu *opinion leader* agama dipakai untuk aspek lain seperti persoalan keluarga dan ekonomi.

Sebagai konsekuensi dari terdiferensiasinya *opinion leader* dalam masyarakat maka upaya perubahan masyarakat membutuhkan pendekatan pada banyak pihak di masyarakat yang tidak lagi terkonsentrasi pada tokoh-tokoh agama seperti halnya pada jaman dahulu yang terkonsentrasi pada tokoh-tokoh di kelompok agama.

Daftar Pustaka

- Asnudin, Andi. 2010. Pendekatan partisipatif dalam pembangunan proyek infrastruktur Perdesaan di Indonesia. *Jurnal SMARTek*
- Baxter, L. A. (2004). A tale of two voices: relational dialectics theory. *The Journal of Family Communication*.
- Burt, R.S. 1992. "Excerpt from The Sosial Structure of Competition", dalam *Structure Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, MA, and London: Harvard University
- Coleman, J. 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge Mass: Harvard University Press
- Goldhaber, Gerald M, terjemahan Omardin Haji Ashari (1990), *Komunikasi Dalam Organisasi*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Malaysia
- Haryanto, Dany dan G. Edwi Nugrohadhi. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2011. *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pelling, M., & High, C. 2005. "Understanding adaptation: What Can Social Capital Offer Assessments of Adaptive Capacity?". *Global Environmental Change* 15(4)
- Rogers, Everet M dalam Terjemahan Alimandan. 1960. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Pedesaan*. New York: Apleton-Crosft, INC
- Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset Leo
- Van den Ban, A.W & H.S. Hawkins, (1999), *Penyuluhan Pertanian*, Yoigyakarta, Kanisius
- West, Richard, dan Turner, Lynn H. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. PT. Salemba Humanika, Jakarta

Kepemimpinan Lokal Dalam Pengembangan Masyarakat Desa

Rudi Saprudin Darwis
Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

e-mail: rudi.darwis@unpad.ac.id

Abstrak

Pengembangan masyarakat lokal menempatkan keberadaan kepemimpinan lokal sebagai salah satu komponen penting. Pemimpin lokal yang diturut dan dipercaya oleh masyarakat mempunyai kekuatan yang besar untuk menggerakkan masyarakat dalam proses pembangunan. Tulisan ini akan menggambarkan kepemimpinan lokal sebagai salah satu nilai dalam masyarakat pada proses pengembangan masyarakat desa serta perubahan kepemimpinan yang terjadi seiring dengan perubahan masyarakatnya. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus. Adapun kasus yang dijadikan subyek studi adalah kasus pengembangan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Gambaran mengenai nilai kepemimpinan lokal tersebut akan dideskripsikan melalui tiga dimensi kepemimpinan, yaitu dimensi legitimasi, dimensi visibilitas, dan dimensi pengaruh. Hasil studi menunjukkan bahwa seiring dengan gencarnya program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan menjadikan desa sebagai ujung tombak penyelenggara pembangunan membuat masyarakat desa menjadi terbiasa dengan dibentuknya organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada pengembangan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang membentuk lembaga pengelola desa wisata sebagai lembaga yang memiliki legitimasi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan program dan kegiatan desa wisata. Dari dimensi visibilitas, pengakuan kepemimpinan diberikan masyarakat kepada seseorang sesuai dengan bidangnya setelah dapat menunjukkan karya nyata dalam pembangunan. Dari dimensi pengaruh, pemimpin lokal dapat memiliki pengaruh yang melampaui bidang garapannya karena keberhasilan dalam bidangnya sehingga akan dipandang mampu mengelola bidang lainnya. Atas dasar hasil studi ini maka direkomendasikan bahwa untuk mengelola

pembangunan desa dibutuhkan pemimpin yang multi-talenta.

Kata Kunci: kepemimpinan, lokal, legitimasi, visibilitas, pengaruh, pengembangan masyarakat

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah pendekatan yang partisipatif, pengembangan masyarakat telah dipergunakan sejak lama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelenggarakan program bantuna di negara-negara berkembang. Namun penggunaan model pengembangan masyarakat di negara-negara sedang berkembang ini dikritik oleh Ng (1988, dalam Popple, 1995:60) karena dipandang menempatkan masyarakat lokal dalam posisi subordinan dalam sistem kolonisasi yang dominan. Meskipun begitu, pengembangan masyarakat kembali mendapatkan perhatian seiring dengan menguatnya pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) sebagai respon terhadap pendekatan pertumbuhan yang terlalu menekankan pada kemajuan ekonomi secara makro.

Rothman dan Tropman (1996) menegaskan pentingnya prakarsa dalam pengembangan masyarakat ketika menjelaskan *locality development*, yaitu: "suatu cara untuk memperkuat warga masyarakat dan untuk mendidik mereka melalui pengalaman yang terarah agar mampu melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka sendiri pula". Keterlibatan dalam kegiatan pengembangan masyarakat akan memberikan pembelajaran kepada warga masyarakat tentang bagaimana permasalahan masyarakat dapat ditangani. Menegaskan tentang pentingnya kedudukan masyarakat dalam pengembangan masyarakat, Soetomo (2008:82) menyatakan ada beberapa hal yang prinsipil dalam pengembangan masyarakat, yaitu: (1)

fokus perhatian ditujukan pada komunitas sebagai suatu kebulatan, (2) berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan masyarakat, (3) mengutamakan prakarsa, partisipasi, dan swadaya masyarakat.

Bila memperhatikan karakteristik komunitas yang dimaksud dalam konsep ini maka konsep ini menunjuk pada pada sebuah lingkungan masyarakat setempat (*locality/community*), yang biasanya masih memiliki norma-norma sosial tentang konsensus, homogenitas, dan harmoni (identik dengan masyarakat perdesaan). Selanjutnya, secara prinsipil maka terdapat kandungan operasional dalam konsep *Locality Development* (Wibhawa dkk., 2015), yaitu:

- a. Kepemimpinan lokal. Dengan sistem kemasyarakatan lokal yang relatif masih bersifat organis dengan pola interaksi harmonis, maka dalam perencanaan dan implementasi program pengembangan masyarakat perlu dipertimbangkan keberadaan pemimpin-pemimpin masyarakat sebagai representasi masyarakat lokal itu sendiri.
- b. Jaringan Hubungan antar Kelompok (*Intergroup relations*). Dalam praktik pengembangan masyarakat, sesungguhnya yang dihadapi dan dikembangkan adalah kelompok-kelompok warga masyarakat sehingga menjadi sebuah jaringan kerja yang sinergis.

Kegiatan pengembangan masyarakat membutuhkan kepemimpinan lokal yang kuat. Untuk membangun kepemimpinan lokal yang kuat, menurut Priyandono (2011) perlu memadukan sumberdaya yang dimiliki individu seperti pengetahuan, keahlian, kompetensi, pengalaman, dan visi kepemimpinan dengan sumberdaya yang dimiliki organisasi baik material maupun non material (teknologi, piranti, bangunan, sistem, aturan, norma, konvensi, dan nilai).

Dalam memahami fenomena kepemimpinan pada suatu masyarakat lokal, maka lokus yang dapat dijadikan kasus dalam memahami fenomena tersebut adalah masyarakat perdesaan. Sebagai bentuk dari komunitas yang ditandai dengan keberadaannya pada suatu wilayah geografis tertentu maka masyarakat desa memiliki keterikatan yang kuat diantara mereka sebagai suatu kesatuan. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai fenomena kepemimpinan di pedesaan, Usman (2010) membahasnya dalam tiga dimensi yaitu: dimensi legitimasi, dimensi visibilitas, dan dimensi pengaruh.

Dimensi legitimasi melihat posisi-posisi pemimpin

dalam organisasi sosial perdesaan. Dimensi ini menunjuk kepada dasar dari pengakuan seseorang sebagai pemimpin dalam masyarakat. Seseorang diakui kepemimpinannya dalam masyarakat desa karena kedudukannya sebagai pemimpin dalam suatu organisasi di perdesaan atau karena kharisma yang dimiliki secara personal sehingga berpengaruh terhadap masyarakat. Seiring dengan semakin banyaknya introduksi inovasi pembangunan dalam masyarakat perdesaan melalui berbagai program dari pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah, orang-orang yang menduduki posisi sebagai pemimpin dalam kegiatan pembangunan ataupun aktivitas kemasyarakatan semakin banyak.

Situasi demikian membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menempati posisi yang lebih tinggi dalam struktur masyarakat. Warga masyarakat yang tadinya bukan siapa-siapa dalam struktur kekuasaan dalam masyarakat, dapat memiliki *power* dan pengaruh dalam masyarakat dengan menjadi pemimpin dalam suatu organisasi yang dibentuk karena adanya program tertentu. Hal ini dalam pandangan Usman (2010) menjadi penyebab terjadinya pergeseran kepemimpinan dalam masyarakat perdesaan, yaitu para pemimpin formal menjadi lebih dominan dan para pemimpin informal menjadi terpinggirkan. Dengan gambaran tersebut, corak kepemimpinan dalam masyarakat juga menjadi banyak dan beragam sehingga berimplikasi terhadap visibilitas dari kepemimpinan pada masyarakat desa.

Dimensi visibilitas melihat tingkat kepemimpinan seseorang, baik pengakuan dari massa yang dipimpin maupun dari pemimpin-pemimpin lainnya. Usman (2010) menjelaskan lebih jauh bahwa dalam dimensi visibilitas seorang pemimpin digolongkan sebagai *visible leader* apabila kepemimpinannya diakui oleh massa yang dipimpin dan pemimpin-pemimpin lainnya. Namun apabila ia hanya diakui oleh massa yang dipimpin namun tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin lain, ia dikategorikan sebagai *symbolic leader*. Apabila ia hanya diakui oleh pemimpin-pemimpin lain namun tidak diakui oleh massa yang dipimpinnya akan digolongkan sebagai *concealed leader*.

Dalam pengamatan Usman, pembangunan yang dilaksanakan secara sentralistik oleh pemerintah pusat mendorong terjadinya pemberian peran yang lebih besar kepada para pemimpin formal karena mereka dipandang sebagai pihak yang mampu menjadi agen pembangunan bagi pemerintah yang akan memfasilitasi

tujuan pemerintah. Selain itu, mereka juga dipandang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan keinginan masyarakat kepada pemerintah. Pandangan yang demikian semakin mempertegas dominasi pemimpin formal dan merambah berbagai sektor dan membuat pemimpin informal cenderung semakin kecil perannya dan kurang diperhitungkan kecuali mereka yang memiliki kharisma yang sangat kuat dalam masyarakat.

Dimensi pengaruh melihat kepemimpinan seseorang berdasarkan bidang yang menjadi ajang kepemimpinannya. Pengaruh yang dimaksud disini berbeda dengan kewenangan (*authority*), yaitu kekuasaan yang diberlakukannya diperoleh melalui persetujuan. Menurut Usman (2010), corak kepemimpinan di perdesaan dapat dikategorikan dalam dua sifat, yaitu *monomorphic* (berpengaruh pada satu bidang) dan *polymorphic* (berpengaruh dalam berbagai bidang sekaligus). Para pemimpin formal di perdesaan lebih banyak menyanggah kepemimpinan yang bersifat *polymorphic*. Regulasi mengenai pemerintahan desa memberikan peran yang besar kepada para pemimpin formal. Mereka tidak hanya menjadi administrator pemerintahan desa namun juga menjadi agen pembangunan dan dinamisator pembangunan desa.

Berbeda dengan para pemimpin informal yang lebih banyak menyanggah kepemimpinan yang bersifat *monomorphic*. Para pemimpin informal di perdesaan semakin banyak berkonsentrasi hanya pada aktivitas bidang tertentu. Seperti yang disampaikan oleh Gertz ataupun Horikoshi (dalam Usman, 2010) para ulama senderung menjadi lebih memperhatikan aktivitas keagamaan. Aktivitas mereka kurang menyentuh persoalan sosial politik, sehingga menjadi sulit untuk dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap aktivitas pemerintah desa.

Perkembangan tersebut masih terus berlanjut seiring dengan berkembangnya iklim demokrasi dalam kehidupan politik masyarakat desa. Mekanisme dalam suksesi kepemimpinan yang semakin rasional mempertegas pentingnya legalitas formal dalam mendudukan keberadaan seorang pemimpin pada struktur kekuasaan masyarakat. Pemberian pengakuan secara formal kepada seseorang sebagai pemimpin tidak hanya menegaskan kedudukannya dalam struktur kekuasaan namun juga menunjukkan adanya kewenangan yang diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan ataupun membuat kebijakan yang diperlukan.

Penyelenggaraan pengembangan masyarakat pada masyarakat perdesaan, sebagai salah satu bentuk pembangunan akan berkontribusi terhadap dinamika politik pada masyarakat lokal. Program pengembangan masyarakat disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari kondisi masyarakat lokal, termasuk di dalamnya kondisi sosial politik yang meliputi komponen struktur kekuasaan dalam masyarakat. Namun di sisi lain, dalam implementasinya, introduksi program pengembangan masyarakat dapat mempengaruhi struktur kekuasaan mengingat pada dasarnya kegiatan pengembangan masyarakat merupakan sebuah upaya perubahan sosial.

METODE

Untuk memahami kepemimpinan lokal masyarakat desa pada penyelenggaraan pengembangan masyarakat desa, kajian dilakukan dalam kasus program desa wisata di Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Agar pemahaman terhadap kepemimpinan lokal dapat diperoleh secara mendalam, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data mengenai kepemimpinan lokal dihimpun menggunakan teknik wawancara dan observasi terhadap situs yang berlangsung dalam masyarakat. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengetahui kondisi kepemimpinan dalam masyarakat pada program desa wisata, baik itu dari kalangan masyarakat umum maupun tokoh-tokoh masyarakat.

Adapun sumber data utama adalah *community development worker* (CD worker) dalam program desa wisata sebagai pihak yang paling memahami dinamika sosial politik masyarakat di Desa Sukaratu pada pelaksanaan program desa wisata. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai teknik selanjutnya dilakukan *cross check* satu sama lain sehingga menghasilkan data yang *valid* dan *reliable*. Analisis data dilakukan meliputi tiga komponen analisis dari Miles dan Huberman (1985) yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Sesuai dengan tujuan penelitian, selanjutnya data dianalisis berdasarkan tiga dimensi kepemimpinan, yaitu dimensi legitimasi, dimensi visibilitas, dan dimensi pengaruh sehingga dapat menggambarkan kepemimpinan pada masyarakat Desa Sukaratu dalam pelaksanaan program desa wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program desa wisata sebagai bentuk pengembangan masyarakat dilaksanakan melalui tahapan tertentu. Tahapan kegiatan pengembangan masyarakat yang digunakan sebagai acuan dalam menguraikan proses

pengembangan masyarakat yang potensinya sudah teridentifikasi adalah model proses pengembangan masyarakat yang disampaikan oleh Jim Cavaye (2004) karena karakteristik tahapan proses yang dirumuskannya dimulai dari kesiapan masyarakat untuk melakukan perubahan, sesuai dengan Program Desa Wisata di Desa Sukaratu yang telah digagas sebelum proses pengembangannya dilakukan. Keberadaan para pemimpin lokal sudah diperhitungkan keberadaannya sejak tahap penyiapan ini. Dalam tahap awal ini, proses penyiapan masyarakat dilakukan melalui upaya permintaan dukungan dari stakeholders pemerintah lokal dengan memperhatikan kondisi motivasi masyarakat, kepemimpinan lokal, dan kesadaran masyarakat. Setelah dari hasil penjajagan ditemukan bahwa pengembangan desa wisata memiliki kemungkinan untuk ditindaklanjuti, maka untuk merealisasikan gagasan tersebut pekerja sosial menyampaikannya kepada kepala desa selaku pihak penguasa wilayah. Disadari bahwa untuk melakukan pengembangan masyarakat dibutuhkan ijin dan dukungan secara formal dari pemerintah Desa Sukaratu, khususnya kepala desa selaku penguasa wilayah agar program yang akan dilakukan dapat berkelanjutan. Selain itu, yang juga menjadi pertimbangan adalah karena pengembangan desa wisata dapat menimbulkan perubahan yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang akan terjadi dalam proses pengembangan desa wisata perlu untuk tetap berada dalam pemantauan pemerintah lokal. Karena itu, keterlibatan pemerintah lokal dalam pengembangan masyarakat sangat penting.

Kemajuan yang diharapkan dapat tercipta dari pengembangan desa wisata membutuhkan tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan membutuhkan adanya kepemimpinan lokal yang akan menjalankan peran mengarahkan dan memandu upaya perubahan secara kolektif. Kepemimpinan yang ada pada masyarakat Desa Sukaratu terdiri dari kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Yang termasuk ke dalam kategori pemimpin formal contohnya adalah kepala desa. Mereka menjadi pemimpin sebagai hasil dari proses formal ataupun informal dan ditetapkan melalui keputusan atau ketetapan formal dalam bentuk surat keputusan. Masyarakat Desa Sukaratu menunjukkan kesediaan untuk dipimpin oleh mereka yang sudah ditetapkan secara formal. Ketidaksukaan dan ketidaksetujuan terhadap pemimpin formal tidak ditunjukkan secara terbuka melalui suatu penentangan. Sebagai pemimpin formal, mereka dihormati dan dipercaya oleh masyarakat Desa Sukaratu untuk

melakukan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin wilayahnya.

Dapat terjadi proses yang agak berbeda untuk penentuan ketua RT/RW yang walaupun penetapannya formal namun proses pemilihannya seringkali dilakukan secara informal. Pemilihan ketua RT/RW dapat dilakukan secara aklamasi berdasarkan pertimbangan kepercayaan, bahkan dapat ditetapkan secara sepihak oleh peserta pemilihan terhadap orang yang mereka percaya walaupun tanpa kehadiran yang bersangkutan. Hal ini dilakukan biasanya karena orang tersebut dipandang mampu dan cakap memimpin masyarakat; walaupun dalam prosesnya akan dipengaruhi oleh adanya pertimbangan subyektif.

Untuk pemimpin informal di Desa Sukaratu menunjuk kepada para tokoh masyarakat. Mereka yang disebut tokoh adalah orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap warga masyarakat lainnya karena karisma yang dimilikinya atau karena penguasaan dia pada bidang tertentu, seperti tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh budaya, dan tokoh politik. Meskipun tidak ditetapkan secara formal, para tokoh memiliki pengaruh terhadap masyarakat dengan tingkat pengaruh yang berbeda terhadap berbagai kelompok masyarakat. Keberadaan tokoh informal ini tidak dapat diabaikan karena mereka memiliki daya tawar yang cukup besar untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

Nilai tentang kepemimpinan lokal memberikan gambaran mengenai pemimpin yang dikehendaki, cara penentuan seseorang menjadi pemimpin, dan cakupan kewenangan yang akan dimiliki pemimpin lokal. Keberadaan pemimpin dalam masyarakat lokal sangat strategis karena akan menentukan arah dan orientasi dari pembangunan. Sebagai pihak yang sudah mendapatkan mandat dari masyarakat, seorang pemimpin memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai hal yang dipandang perlu guna mencapai arah perubahan yang dia rencanakan. Perencanaan yang dibuat tentunya telah mempertimbangkan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Jenis pemimpin lokal yang ada pada masyarakat Desa Sukaratu terdiri dari pemimpin formal dan pemimpin informal. Yang termasuk ke dalam kategori pemimpin formal contohnya adalah kepala desa. Mereka menjadi pemimpin sebagai hasil dari proses formal ataupun informal dan ditetapkan melalui keputusan atau ketetapan formal dalam bentuk surat keputusan.

Masyarakat Desa Sukaratu menunjukkan kesediaan untuk dipimpin oleh mereka yang sudah ditetapkan secara formal. Ketidaksukaan dan ketidaksetujuan terhadap pemimpin formal tidak ditunjukkan secara terbuka melalui suatu penentangan. Sebagai pemimpin formal, mereka dihormati dan dipercaya oleh masyarakat Desa Sukaratu untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin wilayahnya. Kriteria yang menjadi dasar masyarakat dalam menentukan pimpinan adalah pemimpin yang peduli terhadap masyarakat serta dapat memberikan kontribusi kepada kemajuan desa.

Dapat terjadi proses yang agak berbeda untuk penentuan ketua RT/RW yang walaupun penetapannya formal namun proses pemilihannya seringkali dilakukan secara informal. Pemilihan ketua RT/RW dapat dilakukan secara aklamasi berdasarkan pertimbangan kepercayaan, bahkan dapat ditetapkan secara sepihak oleh peserta pemilihan terhadap orang yang mereka percaya walaupun tanpa kehadiran yang bersangkutan. Hal ini dilakukan biasanya karena orang tersebut dipandang mampu dan cakap memimpin masyarakat; walaupun dalam prosesnya akan dipengaruhi oleh adanya pertimbangan subyektif. Proses informal seperti ini sering dilakukan dalam menentukan pemimpin suatu organisasi lokal. Ketika tim pengelola desa wisata dibentuk pertama kali, kepala desa saat itu menunjuk salah satu kerabatnya untuk memimpin tim tersebut. Kondisi ini tidak dipersoalkan oleh anggota tim pelaksana lainnya mengingat kecakapannya dan kedekatannya dengan kepala desa. Mereka menghargai keputusan kepala desa untuk hal tersebut.

Untuk pemimpin informal di Desa Sukaratu, pemimpin informal di Desa Sukaratu menunjuk kepada para tokoh masyarakat. Mereka yang disebut tokoh adalah orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap warga masyarakat lainnya karena karisma yang dimilikinya atau karena penguasaan dia pada bidang tertentu, seperti tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh budaya, dan tokoh politik. Meskipun tidak ditetapkan secara formal, para tokoh memiliki pengaruh terhadap masyarakat dengan tingkat pengaruh yang berbeda terhadap berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya, orang yang dianggap tokoh oleh satu pihak dalam masyarakat akan dianggap bukan sebagai tokoh oleh kelompok masyarakat lainnya, sehingga untuk tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh budaya jumlahnya bisa banyak. Namun untuk tokoh agama, tidak banyak warga masyarakat yang ditokohkan di

Desa Sukaratu, yaitu hanya pemimpin Pondok Pesantren yang berada di desa tersebut. Karakteristik masyarakat Desa Sukaratu yang agamis membuat tokoh agama memiliki pengaruh yang cukup besar.

Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan dapat disajikan gambaran kepemimpinan lokal di Desa Sukaratu dalam pengembangan desa wisata berdasarkan dimensi legitimasi, dimensi visibilitas, dan dimensi pengaruh. Berdasarkan dimensi legitimasi, pemimpin formal yang legitimasinya berdasarkan regulasi pemerintah adalah kepala desa. Salah satu bentuk kewenangan dari pemimpin formal ini adalah melayani segala bentuk keperluan masyarakat yang menyangkut kepentingan umum. Punggawa ratu adalah salah satu organisasi yang mendapat perhatian lebih dari pemimpin formal Sukaratu, karena aktivitasnya dalam membantu mengembangkan potensi yang dimiliki Desa Sukaratu melalui program desa wisata. Dukungan yang diberikan oleh pemimpin formal ini adalah memberikan legalitas kegiatan wisata yang dikelola oleh punggawa ratu melalui surat keputusan (SK) yang dikeluarkannya.

Keberadaan pemimpin non-formal di Sukaratu masih cukup banyak dan sangat dihormati oleh masyarakat. Kewenangan yang dimiliki tokoh non-formal ini tidak sama dengan pemimpin formal yang didapat dari pemilihan umum, karena sampai saat ini belum ada mekanisme yang jelas terkait pengangkatan atau pengukuhan seorang individu dapat dinyatakan sebagai tokoh. Pengukuhan tokoh yang disandang oleh seorang individu seperti muncul dengan sendirinya tanpa ada mekanisme pemilihan. Mereka ditokohkan oleh masyarakat ada yang dilatarbelakangi oleh keturunan, seperti yang terjadi pada tokoh agama. Kemudian ada pula yang dilatarbelakangi karena aktivitas kesehariannya menguasai dan tidak jauh dari bidang kehidupan yang bersangkutan, seperti tokoh tani, pendidikan dan lainnya

Keterampilan dari para tokoh masyarakat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh lembaga punggawa ratu dalam membantu merealisasikan tujuannya melakukan pengembangan masyarakat melalui program wisata. Setiap tokoh dilibatkan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya, sehingga pada pelaksanaannya mendapat dukungan dari berbagai tokoh karena terjadi sinergitas antara keterampilan yang dimiliki para tokoh dengan layanan wisata yang diberikan. Misalnya ketika wisatawan ingin mengikuti aktivitas pertanian yang ada di Sukaratu, maka tokoh tani akan dengan senang hati

memberikan arahan dan menunjukan berbagai macam cara bertani yang ada di Sukaratu kepada wisatawan.

Dimensi visibilitas merupakan gambaran bagi pemimpin yang kepemimpinannya diakui oleh massa yang dipimpinnnya, ataupun dari pemimpin lainnya. Gambaran untuk pemimpin seperti ini banyak disandang oleh pemimpin formal seperti kepala desa, karena system pemilihan terhadap kepemimpinannya dilakukan secara langsung dan dengan mekanisme yang jelas. Sehingga kepemimpinan dia mendapat pengakuan secara jelas baik dari masyarakat (massa) ataupun pemimpin lain, pemimpin seperti ini dapat digolongkan sebagai *visible leader*.

Bagi pemimpin non-formal memang ada juga yang melakukan pemilihan ketuanya dengan mekanisme yang jelas, tapi individu yang terlibat jumlahnya lebih sedikit jika diandingkan dengan pemilihan pemimpin formal. Individu yang terlibat dalam pemilihan pemimpin non-formal biasanya bukan masyarakat umum, tapi orang-orang yang hanya memiliki loyalitas terhadap kelompok berdasarkan kesamaan profesi, pekerjaan atau hobi. Pemimpin lokal yang cenderung sebagai *symbolic leader* (pemimpin symbol) seperti ini banyak ditemukan pada kelompok LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan kelompok-kelompok hobi (pancing, motor). Khusus bagi kelompok LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kondisinya di Desa Sukaratu masih samar-samar sehingga ha ya diketahui tokohnya tapi tidak bayak diketahui siapa saja anggotanya. Begitu juga dengan kelompok hobi, mereka memiliki anggota dengan ketuanya tapi status kepemimpinannya belum diterima oleh masyarakat umum. Kemudian untuk pemimpin lain yang hanya diakui oleh pemimpin lain dan tidak banyak memperoleh pengakuan massa, maka ia digolongkan sebagai *concealed leader* (pemimpin tersembunyi), contoh pemimpin seperti ini banyak di temui pada kelompok tokoh tani sukaratu dan tokoh pemuda

Selanjutnya, dalam dimensi pengaruh, pengaruh yang diberikan oleh para pemimpin yang ada di Sukaratu lebih banyak dirasakan oleh kelompok masanya saja karena ada kecendrungan pelayanan yang diberikan oleh pemimpin ini lebih mengutamakan masa atau pengikutnya. Seperti halnya tokoh agama yang akan dirasakan pengaruhnya oleh para pengikutnya, begitu juga dengan adanya ketua kelompok tani yang akan sangat dirasakan pengaruh layanannya oleh anggota kelompok tani. Akan tetapi jika dikembalikan kepada besarnya pengaruh tokoh masyarakat yang ada di

Sukaratu, tokoh agama menjadi salah satu tokoh yang sangat besar pengaruhnya dalam bidang-bidang sosial kemasyarakatan.

Pengaruh serupa juga dimiliki oleh tokoh punggawa ratu yang aktivitasnya menjangkau bidang-bidang kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas, tidak terbatas pada aktivitas yang berkaitan langsung dengan program desa wisata. Aktivitas dalam kegiatan desa wisata yang memanfaatkan berbagai potensi masyarakat mengharuskan pengelola desa wisata berhubungan dengan berbagai kalangan serta dituntut untuk mampu mempengaruhi berbagai pihak Desa Sukaratu agar mendukung dan berkontribusi dalam program desa wisata. Secara tidak langsung, pengelola desa wisata ini dapat memberikan pengaruh dalam berbagai kehidupan masyarakat desa yang sudah jauh melampaui peran sesungguhnya sebagai pengelola desa wisata.

SIMPULAN

Kepemimpinan dalam menyelenggarakan program desa wisata didasarkan kepada legalitas formal melalui ketetapan dari pemerintah desa sebagai penguasa wilayah. Keberadaan para pemimpin formal dan non formal lainnya diakui dan diotimalkan perannya dalam mendukung pencapaian program. Jangkauannya yang luas dan aktivitas pengelola desa wisata yang melingkupi aspek-aspek bidang kehidupan masyarakat yang pokok pada saat menjalankan fungsinya mengakibatkan pengaruhnya menjadi semakin luas di masyarakat; bahkan melampaui bidang garapan yang semestinya.

Legitimasi formal serta adanya bukti pencapaian yang nyata dan dapat dirasakan masyarakat mengakibatkan kepemimpinan pengelola desa wisata mendapatkan pengakuan yang luas dalam masyarakat. Situasi tersebut memberikan keleluasaan kepada pengelola desa wisata dalam mengembangkan programnya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pemimpin yang memiliki kemampuan *multy-talent* dalam mengorganisasikan pembangunan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

(Paper)

Priyandono WA. 2011. Teori Strukturasi dalam Kepemimpinan Lokal. *Transformasi* Volume 14 Nomor 21 Halaman 69-74 melalui <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarti cle&article=114806> [16/10/2016]

(Buku)

- Miles, Mathew B dan Huberman, Michael. 1985. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Poole, Keith. 1995. *Analysing Community Work: Its Theory and Practice*. Buckingham : Open University Press.
- Tropman, John E. & Erlich, John L. & Rothman, Jack. 1996. *Strategies of Community Intervention*. Illinois : F.E. Peacock Publisher, Inc
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wibhawa, Budhi Dkk. 2015. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*. Jatinangor: Unpad Press

(Lainnya)

- Cavaye, J. 2004. Understanding Community Development, Cavaye Community Development.
melalui http://vibrantcanada.ca/files/understanding_ommunity_development.pdf [2 /02/2014]

Flood and Culture: A Student Perspective

Debora Mely Marcia Hutajulu
Public Relation, Humanities, President University
marciahutajulu@gmail.com

Ayu Santika Ardiprimesa
International Relation, Humanities, President University

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDG) adalah program internasional yang dimaksudkan untuk menciptakan keberlangsungan pembangunan di negara-negara di dunia secara berkelanjutan. Program SDG ini merupakan proyek jangka panjang yang harus dicapai pada tahun 2030 mendatang. Di dalam proyek SDG tercantum tujuh belas poin yang membahas tentang permasalahan umum yang sering menjadi topik hangat di masyarakat, salah satunya adalah perubahan cuaca yang sangat dirasakan oleh semua negara, tidak hanya Indonesia, tercantum pada poin ke tiga belas. Perubahan cuaca membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dampak yang diberikan oleh perubahan cuaca yang terjadi di Indonesia bukan hanya berdampak kepada masyarakat Indonesia sendiri tetapi juga pada negara-negara lain. Banjir, sebagai akibat dari perubahan cuaca sudah merupakan hal yang dimaklumi terjadi di Indonesia. Tetapi, perlu diingatkan kembali bahwa penyebab utama banjir yang sering terjadi adalah akibat ulah manusia sendiri. Penggunaan spanduk bertuliskan larangan dan hukuman bukanlah lagi cara yang tepat untuk digunakan di era globalisasi ini untuk membuat masyarakat sadar untuk menjaga lingkungan. Kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia dan menjadi budaya. Untuk itu, melalui makalah ini kami akan menganalisis apa yang menjadi acuan masyarakat dapat mengubah kebiasaan mereka melalui ketertarikan mereka dengan cara mempengaruhi persepsi masyarakat dalam menyerap informasi dan memanfaatkan media masa sebagai media dalam penyampaian pesan.

Kata Kunci: Banjir, budaya, media, ketertarikan, perubahan cuaca.

PENDAHULUAN

As we know, Sustainable Development Goals (SDG) is a world program that is created to protect what is needed to be protected and to achieve a sustainable development in every sector of government planning.

SDG consists of seventeen points that cover all of the world's issues: no poverty; zero hunger; good health and well-being; quality education; gender equality; clean water and sanitation; affordable and clean energy; decent work and economic growth; industry, innovation, and infrastructure; reduced inequalities; sustainable cities and communities; responsible consumption and production; climate action; life below water; life on land; peace, justice and strong institution; and partnership for the goals. From that many points, in this paper we would like to focus more on the Climate Change issue as stated in the point thirteenth in SDG.

Climate change as the effect from the global warming becomes the most important issue across the globe. Since we live on earth and if we do not keep it safe, human beings like us, will suffer that could lead to death and then potentially go extinct. If it is not us, who else? And if it is not now, then when?

The effects brought by climate change are very serious because it is related to the existence of human being in this planet, earth. Due to climate change the weather that has been already predicted by the experts is now changing and cannot be predicted, as what is happening in Indonesia. For instance, drought comes at an unexpected time that leads to lack of clean water which will have a strong impact on human lives, animals and plants. It also causes many wildfires to forest and other dry places. The rainfall activity also becomes unpredictable. Through the exaggerated rainfall, flood happens frequently. Especially when the land or a construction cannot handle the water anymore due to the decrease of water absorption areas, that will then lead to effecting the water flow circle. This is an example of what happens in Indonesia.

As we know that the human population is always increasing and the place where we live today which is earth is getting older. It creates worries for some scholars and expert when they think further into the future concerning the future of human lives. It is also investigated more deeply by an expert named Thomas Malthus which in his famous book (1798) titled "Essay on the Principle of Population" regarding population

that grows exponentially. In this book he proposes a principle that stated, "Human populations grow exponentially (i.e., doubling with each cycle) while food production grows at an arithmetic rate (i.e. by the repeated addition of a uniform increment in each uniform interval of time). Thus, while food output was likely to increase in a series of twenty-five year intervals in the arithmetic progression 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on, population was capable of increasing in the geometric progression 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, and so forth. This scenario of arithmetic food growth with simultaneous geometric human population growth predicted a future when humans would have no resources to survive on." According to Malthus's principle, the authors think that the existence of human being is very dependable on the existence of the earth, which automatically brings the climate change as a threat to the human lives and also come into one conclusion that we have to keep our earth safe so it will be safe place where the basic human needs can be fulfilled well.

Flood is really a serious problem in Indonesia, since it always happen annually and the appropriate solutions are still not found and the issue seems to be deliberately ignored. Unfortunately, flood problem caused by garbage can be found in many places in Indonesia. Even if Indonesian people know that this problem needs to be solved as soon as possible. Moreover, the impact of flood can affect all of human activities and always disserve, both physically and materially.

There are many causes of flood, but we as human beings are actually a determinant actor of the flood itself. Through our own opinion and from what we have already seen, the way of saving our environment is not attractive and effective enough for the public to also join the action. This causes the lack of contribution and action from children and teenagers.

The action that people have done is controlled by their culture and knowledge. What makes people have interest in something is strongly affected by their background. Our mind separates into two levels, conscious and subconscious level. According to Joseph Murphy on his book *The Power of Your Subconscious Mind*, our conscious mind is the reasoning mind that means we are aware of our surrounding, on what we do and choose (choosing the clothes that we like, writing a paper, choosing our partner in life, etc.). While, our subconscious mind recognize what happens under our awareness. For instance, blinking and breathing. Subconscious mind does not differentiate the good or bad idea, it works for both sides. What you are doing is the right thing based on your own experience and

culture. The subconscious mind works if things are logically accepted by our brain and once it is accepted, our mind will begin to follow it. "You think with your conscious mind and whatever you habitually think sinks down into your subconscious mind" (2010, p.13). Subconscious is a set of mental process that are inaccessible to consciousness but that influence judgements, feelings, and behavior (Wilson, 2004, p.23).

Since our object is children and teenager it is necessary to be able to understand what will make them become more aware of keeping the environment, especially to prevention of flood. As we know and are aware of, nowadays international regime in terms of diplomacy of a state is not using hard power anymore, it tends to use more soft power, or Smart Power. In using soft power, South Korean is the most appropriate success example to be analyzed. Korean Pop Lovers or K-Pop Lovers is a predicate for those people who like Korean Drama, Actors, Music, even Lifestyle. We cannot denied that South Korea has been very successful in promoting their culture through films, dramas, singer, etc. Indonesia also become one of the country with many K-Pop Lovers, which can be seen from many TV station that have Korean Dramas on their schedule. Most K-Pop Lovers tend to follow the Korean style. Most of K-Pop Lovers are teenagers, and including the teenagers in Indonesia. How the Korean Waves got the attention from Indonesian teenager leads to the decrease in Indonesian national culture. Korean Popular (K-Pop) is the example of popular culture in 21st Century era. As Tom Nakayama and Judith Martin explain in their book titled *Intercultural Communication in Contexts*, that Popular Culture is an ever-present cultural products designed for profitable consumption, almost everyone in a social group knows it, and usually in the form of mainstream music, movies, television, and romance novel. Based on this explanation, we agree that Korean Pop (K-Pop) is a popular culture in the 21st century era and this example of K-Pop may become our guidance to change teenager's mindset of maintaining our environment to prevent flood happen. We see that using something like attractive way may become one of the solution to help the government to give a comprehensive explanation to be successful in decreasing flood problem in Indonesia.

The way of the government implant the message about protecting the environment seems like they did not find the result to solve the problem. Using media can be a solution to help the government since nowadays media plays an important role in everyday life of human activities, as a tool for human to communicate. Media can control how the audience think and influence the

audience to have similar understanding with the sender of information. Agenda-setting theory gives chance for the sender to control what the audience need to think about by emphasizing on certain issues that will be aired on the mass media. When the agenda of the mass media has already been controlled by the sender then the sender need to frame the presentation of the issues in the media using framing theory. Like what is explained in the article Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models, Journal of Communication that framing is the process to present information by the journalist or communicator in a way that resonates with the message underlying the presentation that will be interpret by the audience. Sometimes this process claimed to manipulate the audience, while actually this theory only tells the information from the perspective of the media owner's own interest (Scheufele & Tewksbury, 2007).

As stated in book titled Mass Communication Theory by Baran & Davis, in Social Marketing Theory; are theories concerning about the promotion of socially valuable information, useful for social change. This theory pays attention on the activity of the audience to find out what are the information that are needed by the audience. This theory identifies the social system and psychological barriers to the information influenced by the mass media. This social marketing theory has some key features; first, we need to promote the campaign and make people become aware of the candidates. Second, we need to target the messages to the specific audience, because people have different interest. We need to segment the audience based on their interest to make it easier to persuade them. Even if the message is not delivered well to the audience, there will still be images and impression cultivated in the audience memories. Many of the campaigns have failed to attract the audience, it is because it did not give stimulating action or the campaign did not prove into action directly that left only words in the audience memories. So, based on this theory, we think that another solution to the government as the representative of society to increase the attractiveness of the socialization about environment is by looking up to the interest of the public.

METODE

This research will using the qualitative analysis method. We will analyze the situation that become our concern in this research as our base on giving the solution that will be explained in the Chapter III Analysis and Interpretation Data. This research will targeting the government as the subject of the research to implement the solution given to the object of the

research. We collect the data from analyzing the theories that connected to the case. Internet is the instrument of this research.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Floods that happens frequently in Indonesia is due to many factors. Due to climate change, the activities of rainfall and drought becomes unpredicted and out of hand. While the rain keeps pouring down to the land, our land capability cannot handle the high of the water being poured down. Unfortunately, Indonesian land does not have a good construction to handle all the high intensity of water. Not only because of the land construction but also because of the flow of water being disturbed by the human activities. Flood mostly happens in big cities in Indonesia because it is the place for rural people to get a better job, better education, and to achieve a better life. People that cannot find a place to stay and does not have enough money to afford a house for living chose to stay under the bridge or place near the river. These people usually throws away their garbage straight into the river nearest to them. The garbage that is thrown into the river will then disturb the water circulation in the river. To add to that, the water caused by the rainfall will further increase the water level which will end up causing flood. From that point, we can see how humans can affect the flow of water.

The increase of human population in Indonesia because of the urbanization or the increasing of birth population does not only directly affects the continuance of human life itself. However, it also has a big impact to the circulation of water in the land that in the end will also impact the human activities. The increase of human population in Indonesian each year leads to the increasing of human waste. For example in Jakarta, floods always happen annually when the Ciliwung river is overflow and in Bandung floods always happen annually (especially in Bale Endah region) when the Citarum river is overflow.

After all this time, government have used many ways to ask the citizens to care for their environment, but no change can be seen or detected. This culture, such as throwing garbage everywhere, already ingrained in people's mind and cannot be change that easily. The government needs a strategy to step by step change that culture. Without knowing who the audience is and what they are interested in, using only seminars, announcement or flyer that the government used all this time will not be an effective way to change the people's way of living, especially the younger generation.

There are some effective way that the government can learn from to attract the society, such as Korea as one of the country that success to promote their culture across the world. As one of the popular culture, Korean culture is a very interesting topic that discuss in all over the country from many range of age, not only teenagers. They promotes their culture not only through their music (girl and boy band) that influence the teenage lifestyle, but also through drama that also reach attention among parents. Nowadays, not only the entertainment that seek from Korean, but also the culture itself. The Korean national history now become an interesting topic because of their national history that used in the drama that watched by people all over the world. Using the Korean traditional dress is the 'must' thing to try when people go to Korea. Korean foods are very popular, for example like "Kimchi" a traditional side dish that always in the menu when Korean people eat. Not only the traditional food, the fast food that sold in the supermarket, like Korean noodles or many people called "Ramyeon" in many kinds of flavors and banana milk also become popular and sold in many countries. The most trending topic when talking about Korea now is the fashion style and beauty product. Korea now become the destination to buy beauty product. Korea also famous for its plastic surgery practice that transformed many Korean actors and actresses to have an ideal beauty face.

This thoughts first emerged because of the looks of Korean people in the drama or music video that already famous in the teenager's world. Tourism to the Korea has been growing by double digits over the past five years since 2012, around 75 per cent of it driven by Asian visitors and given economic contribution to Korea, said one of the marketing development of Seoul Metropolitan Government, Peter Kim Eyunpyo. The effect from Korean music and drama not only felt by the Indonesian people, but also from across the world, especially Middle East people. For instance is the Cambodian people that felt the real impact on Korean culture. According to the Korean Embassy in Phnom Penh, capital city of Cambodia, more Cambodian women are marrying Korean men, with just a handful of marriages in 2003 going up to almost 1,000 each year in 2012. All this phenomena happen because of the viral of Korean drama and music. It helps all aspects of Korean known internationally by the public.

Learning the way Korean industry to promote their culture, we can see how they use beauty and body goals to promote their culture through music, drama, and lifestyle, we have to know our audience first to achieve our goals in persuading their thoughts. After knowing the target audience then we need to know what the

audience interest in and what kind of activities that they like.

From the case explained in the introduction authors came out with two solutions that can be used. As target of this research, the government because the government as the leaders of the citizens (object of this research), representative of people's voice to lead the actions to protect and build a better environment for our life. The object on this research only focusing on the people in the circle area of what the authors called children and teenagers age because in this age they still can easily persuaded consciously or unconsciously. Also, this age groups are the one that will become the next generation of Indonesia's leaders. But, it doesn't mean that the other age groups cannot be persuaded through the activities.

Many of the communication activities nowadays attract the audience but didn't success on making the audience interpret the message in their daily life. As what stated in the social marketing theory, the campaign itself need a stimulating action to make the audience move to do what the messages in the campaign told about. But, we need to remember that this campaign will not change the behavior of Indonesian people instantly, because to change people habit, culture, needs long time to accomplish like how the Indonesian people action to throw trash everywhere from long time ago become their culture, ingrained. This campaign needs to be used for minimum in a whole 1 (one) year. The solutions that the authors will use is using the campaign that will be explained below:

First, using the mass media as a tool to build the perception of the audience as what the sender wants the audience to understand.

Using the encoding and decoding model where the government put the message that they want the audience to understand in the encoding process. Making the audience to have the same understanding with the sender is not that hard. The important point that need to achieve through this campaign is that the audience need to be standing in the same side of the sender or we can say the audience perception is in the sender control. To make it easier and more effective to get the interest from the audience, using the social marketing theory the government needs to decide the target audience first and then classified them. In this way we classified the audience into two groups based on their interest in media:

First, Children (5 – 12 years old), to this groups the

government can implanting the message through cartoon or fantasy movies. Like what the 'upin dan ipin' cartoons that attract the children attention or 'barbie' movies or even the series. Children like to imitate what the cartoons say and did. Like the word 'Marvellous' like what 'Jarjit' (one of the characters in 'Upin dan Ipin') always say or the Barbie's styles that become the source to imitate. Making another cartoons that teach the children how to protect the environment (cleaning the house, planting trees, throw the trash in the trash bin, etc.) and giving them some moral issues.

Second, Teenagers (13 – 25 years old), in this age group their interest already start to change from cartoons into more real story to be talk to. They started to give attention to their surroundings and their appearances. Boys/girls, fashion, beauty product become their topic to discuss in their social groups. Series of drama or telenovela can be used to attract their attention by delivering stories about careers, dreams, schools, relationship, friendship, fashion, etc. Besides the stories, using the strategy that Korean culture used to attract the audience from all over the world according to what analyzed above, by using ideal type of man/woman through their looks or body shape. Using a character that are in the dreams of every man/woman, for example a good looking man, have a masculine body (has a great muscle body), always using a shirt and pomade in his hair, work as a doctor, has a good personality or the kind of 'bad boy' personality.

On using the mass media, not all the time the message from the sender can be accepted by the audience because they have their own perception. The media need to know how to interrupt in the middle of making meaning process in the audience mind. By setting up the topic that will be discuss in the media, by making the theme in each episode in the cartoons/drama that watched by the target audience can be a help to control what the audience will discuss or remember. What messages need to implant first in the cartoons or drama that could be accepted by the audience step by step. After the media controls the agenda the execution of the agenda also needs to be convincing. The characters or the presenter in the drama or cartoons need to play their character well. This process also can be help through their appearance of the characters (clothes and make up) and the background of the media frame that made as reality. After the campaign thorough mass media (entertainment), now is left to the audience on how they decode the cartoons/dramas and have the same understanding on the message delivered by the sender.

Second, making a national color theme.

Back when we were kids, when we were in kindergarden, we learn about colors. We have a mindset that green is for trees and blue is for water or sky. We can use this method to deliver our message which is to keep the environment by not littering. This national color theme used as the continuous action from the campaign using mass media above. Meaning of this national color theme is to use colors to play with human subconscious mind. As we know, our subconscious mind control our movement under our knowledge. After influencing the people's thoughts now the campaign takes part in the daily life of the audience. Colors can be used to trigger our subconscious mind by making the audience remember again on what the character was doing in the cartoon/drama (pointing at the activities to protect our environment). The colors that will be used are the green and blue colors. Using blue color which by our mindset, by our subconscious mind is already accepted, blue stands for water means flood as the main concern on this research. Green color stands for trees as in environment that we need to protect. This colors will be used in the pamphlet, banner, advertising, brochure, etc. as the main colors on their advertising tools. So, this method may become one of the solution to share the message on how important to keep the environment clean, especially for children since we cannot denied that the children is the young generation who will lead this country later on and since children mindset is still fresh and pure, we can utilize it by giving them any kind of positive mindset to always keep the environment clean by throwing rubbish into trash bin. This colors will be used in the pamphlet, banner, advertising, brochure, etc. as the main colors on their advertising tools.

Besides from the two ideas of campaign above, the activities that the government used all this time also need some continuous action as the practical action to stimulate the audience mind. The strategy to increase people's awareness will not only playing with people's mind by framing their thoughts. Many of the University's student we know doing protest and demonstration to criticize the government activities that didn't give any result. Transferring that demonstration activities to a better one that more practical and utilizing the students to conduct some event which will give a real and very beneficial impact for the environment, for example conducting a Tree Planting Program than only criticizing will help the government to achieve those goals. By utilizing this opportunity, university students has been giving a real impact to the society which is good for their future since after they are graduated for their university, they have to be

assimilate with the society and by conducting an event like that, it will be their preparation before entering the society in term of jobs seeking.

SIMPULAN

Based on our analysis about culture and flood in Indonesia, we conclude that flood problem in Indonesia can be solved by utilizing culture as the media to make Indonesian people especially children and teenager aware to keep the environment clean to be more further to save the human lives from the danger of climate change.

DAFTAR PUSTAKA

- How Korean culture stormed the world. (2012, November 30). Retrieved October 18, 2016, from <http://www.scmp.com/news/asia/article/1094145/how-korean-culture-stormed-world>
- Manepong, Chuthatip dan John Christopher Walsh. 2013. A New Generation of Bangkok Street Vendors: Economic Crisis as Opportunity and Threat. *Cities* 34:37-43
- Population and Natural Resources module: Conceptual Framework. (2011, September 8). Retrieved October 18, 2016, from http://cgge.aag.org/PopulationandNaturalResources1e/CF_PopNatRes_Jan10/CF_PopNatRes_Jan108.html
- Ejupi, V., Siljanovska, L., & Iseni, A. (2014). the mass media and persuasion. *European Scientific Journal*, 10(14), 636.
- Harris, K. S. (n.d.). *Strangers to Ourselves: Discovering the Adaptive Unconscious* by Timothy Wilson. Harvard University Press, 2002. Retrieved October 17, 2016, from <http://human-nature.com/nibbs/03/wilson.html>
- Judith Martin & Tom Nakayam. *Intercultural Communication in Contexts* (p.352). Published by McGraw-Hill. 2010.
- Murphy, J. (2010). *The power of your subconscious mind*. Mineola, NY: Dover Publications.
- Pallaver, M., & London School of Economics and Political Science. (2011). *Power and its forms: Hard, soft, smart* [pdf]. Retrieved from http://etheses.lse.ac.uk/220/1/Pallaver_Power_and_Its_Forms.pdf
- S. J., Baran, & D. K., Davis. (2012). Media and Society: The Role of Media in the Social World. In *Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future* (6th ed., pp. 284-286). Boston, United States: Wadsworth.
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models. *Journal of Communication*, 57, 11-12.

IMPLEMENTASI KOMUNIKASI LINGKUNGAN MELALUI RITUAL *HAJAT LAUT* DI KABUPATEN PANGANDARAN

Iriana Bakti
Susie Perbawasari
Kokom Komariah

Program Studi Ilmu Humas, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
irianabaktipr@gmail.com

Abstrak

Hajat laut merupakan salah satu ritual yang dilakukan oleh masyarakat (khususnya) nelayan di Kabupaten Pangandaran. Dalam pelaksanaannya, *hajjat laut* ini bukan semata-mata bentuk rasa syukur nelayan kepada Tuhan dengan menyediakan aneka ragam asesoris ritual untuk dilarung, tetapi bentuk ritual dan sesajinya, serta doa/mantranya merupakan/memiliki makna tertentu bagi kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan nelayan mengikuti *hajjat laut*, makna *hajjat laut* menurut nelayan, dan perilaku komunikasi nelayan ketika melaksanakan *hajjat laut*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur dari dokumen dan buku yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian, alasan informan mengikuti *hajjat laut* adalah karena tradisi turun-temurun, untuk melestarikan kebudayaan, dan untuk mencari berkah. Makna *hajjat laut* menurut informan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, permohonan keselamatan kepada Tuhan, dan silaturahmi. Perilaku komunikasi yang dilakukan nelayan dalam *hajjat laut* merupakan komunikasi ritual, yang bersifat verbal dan nonverbal yang berlangsung secara dialogis melalui rapat (urun rembug) dengan para tokoh masyarakat. Perilaku komunikasi verbal berupa pembacaan ayat suci, pembacaan doa dan mantra, perilaku komunikasi nonverbal berupa penggunaan pakaian adat, larung sesaji, berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan. *Hajjat laut* merupakan implementasi komunikasi lingkungan yang dilandasi oleh penghormatan kepada tradisi nenek moyang untuk melestarikan budaya lokal yang sarat dengan makna syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan keberkahan rizki dan wujud silaturahmi antar nelayan.

Kata kunci: komunikasi lingkungan, komunikasi ritual, *hajjat laut*, kearifan lokal, silaturahmi, nelayan.

PENDAHULUAN

Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat bagian selatan yang menjadi daerah kunjungan wisata baik pengunjung domestik maupun asing. Salah satu suguhan wisatawan di Pangandaran adalah wisata alam berupa pantai yang eksotik, juga ritual *hajjat laut* yang selalu diselenggarakan setiap tahun di bulan Muharam. Ritual *hajjat laut* merupakan aset kebudayaan yang disimbolkan sebagai ungkapan rasa syukur para nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ritual *hajjat laut* ini penuh dengan simbol-simbol yang mengandung banyak makna yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang terlibat langsung di dalam ritual tersebut. Hal ini disebabkan, *hajjat laut* merupakan kebiasaan turun-temurun yang bersifat formal, sukarela, dan sarat dengan nilai-nilai transendental, sehingga membentuk suatu perilaku yang terpolakan dengan tujuan mensimbolisasi suatu pengaruh dalam kehidupan sosial. Ritual *hajjat laut* merupakan aktivitas komunikasi, namun bukan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan, melainkan, "communication is linked to terms such as 'sharing', 'participation', 'association', 'fellowship', and 'the possession of a common faith'." (Carrey, 1992). Jadi komunikasi dalam kaitannya dengan ritual *hajjat laut* lebih kepada fungsi komunikasi itu sendiri, yaitu untuk saling dengan berbagi, membangun partisipasi, membangun perkumpulan, membangun persahabatan, dan mempertegas sebuah keyakinan yang dimiliki bersama.

Hajjat laut sebagai komunikasi ritual dilakukan oleh berbagai elemen yang ada di Pangandaran, baik dari kalangan pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, nelayan, dan sebagainya menjadi sebuah perkumpulan yang satu sama lain berkerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, dan dilandasi oleh keyakinan yang sama bahwa ritual ini merupakan implementasi rasa syukur mereka terhadap rizki yang telah Tuhan berikan kepada masyarakat Pangandaran, bukan untuk persembahkan kepada Nyi Roro Kidul.

Keyakinan terhadap iman yang sama ini dapat dilihat dari peran pemuka agama (islam) dalam pelaksanaan ritual tersebut dengan melaksanakan khutbah dalam pengajian, yang menandakan dan mempertegas bahwa *hajat laut* lebih dekat dengan nilai kerohanian yang harus dilestarikan, walaupun dalam pelaksanaan ritual tersebut ada pembacaan mantra, namun menurut sesepuh mantra tersebut bukan sesuatu yang bersifat mistik, tapi lebih kepada pembacaan syair yang indah dan menyentuh hati.

Ritual *hajat laut* merupakan implementasi komunikasi lingkungan, karena di dalamnya terdapat suatu aktivitas yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan alam (laut), yaitu ketika larung sesaji di tengah laut, di mana perlengkapan ritual berbahan alami dapat menjadi makanan ikan dan membusuk di laut, sehingga dapat memicu tumbuhnya terumbu karang, Inilah yang menjadikan keunikan dari simbolisasi komunikasi ritual *hajat laut* di Pangandaran, sehingga penulis tertarik untuk mengujinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, dan studi kepustakaan. Informannya Wakil dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan nelayan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan mengikuti ritual hajat laut

Para informan memiliki alasan tersendiri dalam mengikuti ritual hajat laut di Pangandaran, seperti dinyatakan oleh pihak pemerintah, menyatakan, “alasan pelaksanaan hajat laut sebagai langkah pelestarian kebudayaan masyarakat nelayan untuk mendukung pariwisata di Pangandaran”.

Seorang tokoh agama yang menyatakan, alasan mengikuti hajat laut, “untuk meluruskan dan menjaga agar tidak menyimpang dari ajaran islam yang sebenarnya, jadi alasannya lebih kepada wujud rasa syukur atas segala rizki yang telah Allah berikan kepada masyarakat Pangandaran”.

Alasan yang sama dinyatakan pula oleh seorang tokoh masyarakat, Purnama Siliwangi, “alasan dilaksanakannya hajat laut merupakan syukuran nelayan atas apa yang telah diberikan tuhan yaitu berupa ikan dan hasil laut lainnya”.

Demikian juga seperti yang dinyatakan oleh wakil dari nelayan, “alasan dilaksanakan hajat laut sebagai rasa syukur kepada tuhan atas rezeki yang telah diberikan

selama setahun ini berupa hasil tangkapan ikan yang melimpah, padahal mereka tidak pernah menanam bibit ikan”.

Berdasarkan pendapat para informan di atas, alasan dilaksanakannya hajat laut di Pangandaran dapat dikategorikan sebagai upaya pelestarian budaya dalam mendukung pariwisata, meluruskan akidah islam, dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Makna hajat laut

Ritual hajat laut di Pangandaran memiliki makna sebagai berikut, sebagaimana dinyatakan oleh wakil pemerintah (Sony Agusman), hajat laut dimaknai sebagai “salah satu atraksi wisata yang dimanfaatkan Pemkab Pangandaran untuk menarik wisatawan. Kami mengundang wisatawan untuk datang menyaksikan kemeriahan Hajat Laut yang menjadi kultur masyarakat pesisir”.

Sementara menurut tokoh agama: “Tak seluruh masyarakat Pangandaran berkeyakinan islam masih banyak lapisan masyarakat terlebih pemuka adat yang begitu mempercayai berbagai mitos yang terkandung dalam hajat laut, sehingga dengan adanya laut dan penyatuan ideologi dengan berbagai kalangan menunjukkan toleransi yang tinggi yang dapat terlihat di kalangan masyarakat Pangandaran. Dengan perkembangan islam yang pesat di Pangandaran sehingga hajat laut memiliki pergeseran makna yang lebih sesuai dengan ajaran islam tanpa harus kehilangan keunikannya yang selama ini dapat mengundang wisatawan dan setiap acaranya pun dapat dijelaskan secara akal, meski mitos itu tak akan pernah luntur dari benak masyarakat namun secara perlahan fungsi hajat laut mulai berpindah dari persembahan kepada para dewa – dewi menjadi ajang berbagi dan silaturahmi para nelayan”.

Tokoh masyarakat (Purnama Siliwangi), menyatakan “bahwa hajat laut pada zaman dahulu merupakan suatu upacara untuk persembahan kepada para dewa - dewi mengingat pada masa itu islam belum masuk ke Indonesia, dan masih dipengaruhi oleh ajaran hindu - budha dan kepercayaan animisme dinamisme. Seiring berjalannya waktu, ajaran islam mulai masuk, dan perlahan mulai merubah *mindset* para nelayan. Bahwa hajat merupakan syukuran nelayan atas apa yang telah diberikan tuhan yaitu berupa ikan dan hasil laut lainnya”.

Adapun menurut nelayan (Fuad Husain) menyampaikan, “hajat Laut merupakan tradisi masyarakat nelayan sebagai bentuk rasa syukur atas berkah hasil laut yang didapat, meskipun nelayan

Pangandaran sedang menghadapi krisis tangkapan, hal itu tidak menyurutkan niat untuk berterimakasih kepada Sang Pencipta. Sebaliknya ia berharap, doa-doa yang dipanjatkan para nelayan bisa membuka pintu rejeki, dan agar semua penduduk pantai mendapat keselamatan ketika mereka mencari ikan yang ada dipantai selatan tanpa merusaknya”

Berdasarkan pendapat di atas, hajat laut di Pangandaran dapat dimaknai sebagai “atraksi wisata untuk menarik wisatawan, sebagai rasa syukur kepada Tuhan, pembuka pintu rizki, dan silturahmi”.

Perilaku komunikasi

Perilaku komunikasi yang muncul dalam kegiatan ritual hajat laut dapat dilihat pada saat ritual tersebut dilaksanakan, di mana menurut Soni Agusman, “kegiatan hajat bumi diawali dengan rapat berupa urun rembug dengan berbagai pihak untuk membentuk panitia, menentukan tema dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan,”. Sementara itu menurut tokoh agama, “dalam rapat ditentukan kepanitiaan dan tugas masing-masing orang, saya sendiri ditugaskan memimpin doa”. Pendapat yang sama disampaikan oleh tokoh masyarakat dan nelayan yang intinya “untuk melaksanakan hajat laut ada rapat dan urun rembug dengan berbagai pihak”.

Persiapan Larung Sebelum para nelayan membawa sesaji ke tengah laut, dilakukan pembacaan Ayat Suci Al Qur’an dan pembacaan Yasin, kemudian dialukan doa bersama sebagai bentuk penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menyiapkan sejumlah jempana (sesaji) yang berisi imbi-imbian, jajanan pasar, buah-buahan, dan kepala kerbau atau kambing untuk diturunkan dan dihanyutkan ke laut.

Pada tahap pelaksanaan, jempana tersebut satu persatu mulai diturunkan dari perahu untuk kemudian ditenggelamkan di tengah laut. Dalam pelaksanaan tersebut, tokoh masyarakat dan nelayan dengan pakaian hitam-hitam yang turut ke tengah laut untuk melakukan larung sesaji, sedangkan wakil dari pemerintah dan tokoh agama memperhatikan di pinggir pantai. Mereka berloncatan ke tengah laut mendekati jempana utama yang tenggelam dengan membawa ember untuk mengambil air laut di sekitar jempana yang tenggelam itu untuk diguyurkan ke perahu masing-masing, dengan harapan mendapat keberkahan dalam menangkap ikan selama satu tahun ke depan. Setelah selesai, merekapun pulang dengan harapan apa yang dilakukannya sebagai implementasi berntuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

PEMBAHASAN

Para informan pada saat terlibat dalam ritual hajat laut memiliki alasan masing-masing, yang disebabkan oleh lingkungan di mana mereka beraktivitas. Informan yang berasal dari lingkungan pemerintahan/dinas terkait dalam menjelaskan alasan mengikuti hajat laut disesuaikan dengan posisinya di di dinas tersebut, yaitu Dinas Pariwisata, maka dia menjelaskan alasan mengikuti hajat laut sebagai “upaya pelestarian budaya dalam mendukung pariwisata”, demikian juga informan yang berasal dari lingkungan agama menjelaskan alasan mengikuti hajat laut disesuaikan dengan latar belakangnya sebagai pemuka agama islam, yaitu “meluruskan akidah agama islam”, sedangkan informan yang berasal dari lingkungan sosial (tokoh masyarakat dan nelayan) menyatakan alasannya adalah “rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Faktor lingkungan yang berpengaruh pada alasan mengikuti kegiatan ritual hajat laut dapat melahirkan berbagai motif, di mana Schutz (dalam Haryanto, 2012: 149), “membedakan dua tipe motif, yakni motif ”dalam kerangka untuk” (*in order to*) dan motif “karena” (*because*). Motif pertama berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa datang. Motif kedua merupakan pandangan retrospektif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu” .

Dengan demikian, informan yang menyatakan alasan mengikuti hajat laut sebagai “upaya pelestarian budaya dalam mendukung pariwisata”, dan “meluruskan akidah agama islam” menurut Schutz berarti motifnya ”dalam kerangka untuk” (*in order to*), sedangkan informan yang menyatakan alasannya “rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa” berarti motifnya karena (*because*).

Ritual hajat laut di Pangandaran dimaknai berbeda pula oleh informan. Perbedaan dalam memaknai ritual tersebut disebabkan oleh pengalaman mereka selama dirinya berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya. Munculnya pengalaman pada diri informan ini merupakan keterlibatan secara sadar yang di lingkungan di mana ia hidup dan berinteraksi, yang pada akhirnya terbentuk stok pengetahuan yang menjadi dasar pembentukan makna hajat laut. Menurut Schutz (dalam Raho, 2007: 137-138):

“Stok pengetahuan ini dipelajari dan diperoleh individu melalui proses sosialisasi di dalam dunia sosial dan budaya di mana dia hidup. Tetapi kemudian stok pengetahuan tersebut menjadi

realitas bagi aktor di dalam dunia yang lain karena kemana saja ia pergi membawa stok pengetahuan itu di dalam dirinya”.

Berdasarkan stok pengetahuan tersebut, maka hajat laut dimaknai secara personal (*erlebnis*) dan interpersonal (*erfahrung*), yang menurut Gadamer. (2004: 53): “*erlebnis* biasa diterjemahkan sebagai ”pengalaman yang dihidupi“ (*lived experience*), sedangkan *Erfahrung* diterjemahkan sebagai „pengalaman hidup“ (*life experience*). *Erlebnis* bersifat personal, sedangkan *erfahrung* bersifat sosial. *Erfahrung* memiliki dimensi sosial dan kesejarahan. Pada *erfahrung*, pengalaman personal (*erlebnis*) berpartisipasi dalam „pembentukan makna“. Dengan demikian, makna ritual hajat laut sebagai “atraksi wisata untuk menarik wisatawan, rasa syukur kepada Tuhan, pembuka pintu rizki, dan silturahmi” terbentuk berdasarkan pengalaman yang dihidupi personal (*erlebnis*) yang diperkuat oleh Littlejohn (2005: 37) “bahwa individu secara aktif mengartikan pengalaman mereka dan memahami dunia berdasarkan pengalaman pribadi” „dan pengalaman hidup (*erfahrung*)”.

Ritual hajat laut merupakan aktivitas komunikasi, namun bukan penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, tetapi lebih kepada fungsi komunikasi itu sendiri, yaitu untuk saling berbagi, dan mempertegas sebuah keyakinan yang dimiliki bersama. Dalam ritual hajat laut, dimana sekelompok orang melakukan aktivitas yang beraroma agama (pembacaan ayat suci Al-Quran, dan doa yang islami), dan kepercayaan (pembacaan mantra), tidak ada yang saling mendominasi, mereka sama-sama melakukan ritual didasarkan pada suatu keyakinan yang sama, yaitu bentuk syukur atas rizki yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pendapat James W. Carey (1992) (dalam Hardiman, 2016: 15) yang mengatakan bahwa “dalam perspektif komunikasi berkaitan dengan berbagi, partisipasi, perkumpulan/asosiasi, persahabatan, dan kepemilikan akan keyakinan yang sama”.

Aktivitas saling berbagi dalam ritual hajat laut bisa dilihat sejak rapat, dan persiapan ritual, dimana komunikasi berlangsung secara dialogis (urun rembug), saling berbagi ide, sehingga lahir tema ritual hajat laut. Ritual hajat laut dilaksanakan oleh panitia yang melibatkan berbagai komponen masyarakat di Pangandaran dan ini menunjukkan asosiasi/ perkumpulan, dimana terdapat pembagian tugas dan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan keyakinan yang sama pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamad (2006: 2-3), “Komunikasi ritual berhubungan erat dengan kegiatan berbagi,

berpartisipasi, berkumpul, bersahabat dari suatu komunitas yang memiliki satu keyakinan sama”.

Ritual hajat laut sebagai implementasi komunikasi ritual merupakan acara rutin tahunan dan sudah berlangsung sejak dahulu. Menurut Mulyana (2011:27), “Komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai *rites of passa*”., sehingga menurut Hamad (2006: 2-3), “pola komunikasi yang dibangun ibarat upacara sakral/suci dimana setiap orang secara bersama-sama bersekutu dan berkumpul (misalnya melakukan doa bersama, bernyanyi dan kegiatan seremonial lainnya)”.

Pada tahap pelaksanaan ritual hajat laut, para peserta dengan berpakaian hitam-hitam melarung jempana (sesaji) ke tengah laut, dan ketika jempana tersebut tenggelam, para peserta dengan penuh sukacita mengambil air di tempat jempana tersebut tenggelam untuk disiramkan kepada perahunya. Pakaian hitam jempana yang berisi buah-buahan, jajanan pasar, dan kepala kerbau merupakan simbol simbol yang mengandung makna ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, sehingga menurut Susanti (2015, 7), “komunikasi ritual dapat dimaknai sebagai proses pemaknaan pesan sebuah kelompok terhadap aktivitas religi dan sistem kepercayaan yang dianutnya. Dalam prosesnya selalu terjadi pemaknaan simbol-simbol tertentu yang menandakan terjadinya proses komunikasi ritual tersebut”.

Ritual hajat laut, selain merupakan implementasi dari komunikasi ritual, juga merupakan implementasi dari komunikasi lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan bahan-bahan ritual yang alami, dan kepala kerbau/kambing yang semuanya dilarung di tengah laut sampai tenggelam, tidak akan merusak lingkungan alam di laut, sebab isi jempana menjadi makanan ikan, tengkorak kerbau yang tenggelam menjadi pemicu tumbuhnya terumbu karang. Ini adalah sebuah ekspresi lingkungan dan sekaligus juga pesan tentang lingkungan yang sesuai dengan konsepsi komunikasi lingkungan, yang menurut Corbett (2006) dalam Jurin et al. (2010:14):

“diekspresikan dalam nilai nilai, kata kata, tindakan, dan praktek sehari hari, mengakar secara budaya dan sejarah, dan terbungkus dalam paradigma sosial yang dominan yang memberikan nilai instrumental dan kepercayaan, dan keberadaannya untuk melayani manusia”.

Ritual hajat laut di Pangandaran yang telah berlangsung lama dan selalu dilaksanakan secara turun-temurun yang bersumber dari nilai-nilai religius dan petuah nenek moyang yang telah diadaptasi dengan perkembangan zaman merupakan kearifan lokal yang harus dilestarikan, karena Menurut Witular (2007), dalam Permana (2010: 1):

“Kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu”.

Dengan demikian, ritual hajat laut merupakan bentuk penegasan para pelakunya terhadap kebiasaan turun-temurun yang dilandasi oleh keyakinan yang sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyana (2011: 25):

“Mereka yang berpartisipasi dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama mereka”.

SIMPULAN

Simpulan dari pembahasan ritual hajat laut di Pangandaran adalah sebagai berikut:

Alasan informan mengikuti hajat laut adalah karena tradisi turun-temurun, untuk melestarikan kebudayaan, dan untuk mencari berkah, yang dilandasi oleh motif “dalam rangka untuk” (*in order to*), berupa upaya pelestarian budaya dalam mendukung pariwisata, dan meluruskan akidah islam, dan motif “karena” (*because*) berupa rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Makna hajat laut menurut informan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, permohonan keselamatan kepada Tuhan, dan silturahmi, merupakan makna yang muncul berdasarkan stok pengetahuan yang diperoleh selama dirinya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga makna tentang ritualhajat laut tersebut merupakan bentukan dari makna personal dan interpersonal.

Perilaku komunikasi yang dilakukan nelayan dalam hajat laut merupakan komunikasi ritual, yang bersifat verbal dan nonverbal yang berlangsung secara dialogis melalui rapat (urun rembug) dengan para tokoh masyarakat. Perilaku komunikasi verbal berupa pembacaan ayat suci, pembacaan doa dan mantra, perilaku komunikasi nonverbal berupa penggunaan pakaian adat, larung sesaji, berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan. Hajat laut merupakan implementasi komunikasi lingkungan yang dilandasi oleh penghormatan kepada tradisi nenek moyang untuk melestarikan budaya lokal yang sarat dengan makna syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan keberkahan rizki dan wujud silaturahmi antar nelayan, yang diekspresikan dalam nilai-nilai, kata kata, tindakan, dan praktek sehari hari, mengakar secara budaya dan sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Carey, James W, 1992, *Communication as Culture: Essays on Media and Society*, Routledge, Newyork.
- Gadamer, Hans-Georg. 2004, *Truth and Method (Continuum Impacts)*. Continuum. Oxford.
- Hamad, Ibnu. 2006. *Communication as Discourse*. Makalah. Jakarta: Tahun 2006.
- Hardiman, 2016, Tradisi *Katoba* Ssebagai Media Komunikasi Ttradisional Dalam Masyarakat Muna. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 20 No.1, Agustus 2016: 11-30
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial* Jogjakarta: AR-RUZ MEDIA.
- Jurin, Richard R., Donny Roush, and Jeff Danter, 2010. *Environmental Communication*. Second Edition: London New York: Springer Science+Business Media.
- Littlejohn, Stephen W., and Karen A. Foss, 2005. *Theories of Human Communication*, Belmont, CA: Thomson Higher Educatio
- Mulyana, Deddy, 2011. *Ilmu Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permana, R. Cecep Eka, 2010. *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Dalam Mitigasi Bencana*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Raho, Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Susanti, Elvi. “Komunikasi Ritual Tradisi Tujuh Bulanan (Studi Etnografo Komunikasi Bagi Etnis Jawa di Desa Pengarungan Kecamatan Torgamab Kabupaten Labuhanbatu Selatan”, dalam *Jurnal FISIP* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Pola Komunikasi dan Budaya Sehat Pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Di Perdesaan

Asep Suryana

Prodi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
asepsuryanakachya@yahoo.com

Putri Trulline

Prodi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Abstrak

Upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis. Berbagai program dibuat, dikembangkan dan diimplementasikan. Outputnya bervariasi. Salah satu program yang ditujukan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang dilaksanakan mulai tahun 2007. Program ini difokuskan sebagai upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, khususnya rumah tangga sangat miskin (RTSM). Melalui program ini, RTSM didorong agar mau dan mampu mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (a) Mengidentifikasi faktor-faktor perilaku sehat pada rumah tangga sangat miskin di perdesaan, (b) Mendeskripsikan pola komunikasi kesehatan pada rumah tangga sangat miskin di pedesaan, (c) mengidentifikasi keterlibatan pemerintah dalam membudayakan hidup sehat pada masyarakat miskin di perdesaan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *Focus Group Discussion (FGD)*. dengan subjek kajian adalah keluarga sangat miskin yang bertempat tinggal di desa Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat,. dengan kriteria subjek penelitian: subjek termasuk kategori keluarga sangat miskin, peserta program Keluarga Harapan, memiliki wawasan dan pengalaman hidup sehat. Selain FGD, untuk menganalisis temuan hasil kajian, juga dilakukan observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) perilaku sehat pada rumah tangga sangat miskin di perdesaan menunjukkan adanya variasi, (b) pola komunikasi

kesehatan pada rumah tangga sangat miskin di perdesaan memperlihatkan adanya pola komunikasi yang positif yang mendukung budaya sehat dan pola komunikasi yang negatif, yang pesimistis terhadap tercapainya budaya sehat , (c) adanya keterlibatan pemerintah dalam membudayakan hidup sehat pada masyarakat miskin di perdesaan, melalui berbagai program yang banyak melibatkan institusi baik di pusat maupun di daerah.

Kata Kunci: Pola Komunikasi, Budaya Sehat, Rumah Tangga Sangat Miskin (KSM), Program Keluarga Harapan, Perilaku Sehat, Focus Group Discussion (FGD).

PENDAHULUAN

Kendala yang dihadapi dalam upaya pembangunan kesehatan di Indonesia antara lain kondisi kemiskinan yang masih melekat pada sebagian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan, penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik masing-masing daerah. Untuk itu wewenang yang lebih besar didelegasikan kepada daerah untuk mengatur sistem pemerintahan dan rumah tangga sendiri, termasuk di bidang kesehatan. Kondisi demikian terjadi juga di Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, dimana kemiskinan masih menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Indikator kemiskinan tersebut terlihat dari jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin sebanyak 88.432 RTSM, serta bantuan pemerintah yang diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yang semula 10.848 RTSM, untuk tahun 2014 ditambah 700 kepala keluarga

RTSM (Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS, 2012).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah berorientasi pada kepedulian terhadap masyarakat yang kondisi perekonomiannya perlu dibantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai, yang sifatnya edukatif, dengan memberikan syarat bahwa mereka (peserta PKH) diharuskan berinteraksi dengan dua hal pokok, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nilai pembangunannya adalah memutus rantai kemiskinan serta membangun kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sumedang masih tinggi. Persentasenya masih di atas rata-rata provinsi dan pusat. Dari persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran di provinsi dan pusat rata-rata 8 persen, di Kabupaten Sumedang mencapai 12 persen. Khusus untuk tingkat pengangguran sebesar itu, dari jumlah angkatan kerja rata-rata per tahun 64.000 orang. Tak hanya masalah kemiskinan dan pengangguran saja, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Sumedang pun, terendah ketimbang daerah kabupaten tetangganya, seperti Garut, Subang, Indramayu dan Majalengka. LPE Kabupaten Sumedang hanya 4,82, sedangkan empat kabupaten tetangganya rata-rata di atas 5 (Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS), 2012).

Untuk menjelaskan pola komunikasi dan budaya sehat Rumah Tangga Sangat Miskin di Perdesaan, maka teori yang dijadikan acuan kajian adalah Teori Lawrence Green, yang mengemukakan bahwa terdapat dua determinan masalah kesehatan, yaitu faktor perilaku (*behavioral factors*) dan faktor non perilaku (*non behavioral factors*). Faktor perilaku kesehatan sendiri terdiri dari 3 faktor utama, yaitu: (1) Faktor-faktor predisposisi (*disposing factors*), (2) faktor-faktor pemungkin (*enabling factors*), dan (3) Faktor-faktor penguat (*reinforcing factors*). Faktor predisposisi adalah faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang, seperti: pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Faktor pemungkin adalah faktor yang memfasilitasi perilaku atau tindakan, seperti adanya sarana dan prasarana untuk terjadinya perilaku kesehatan, misalnya: Puskesmas, Posyandu, rumah sakit, tempat pembuangan sampah, tempat olah raga, makanan bergizi, dan lain-lain. Adapun faktor penguat adalah faktor yang mendorong terjadinya perilaku sehat, seperti adanya contoh yang dapat dijadikan model imitasi (Notoatmodjo, 2005).

Teori yang lainnya adalah teori Snehandu B.Karr, yang menjelaskan tentang faktor penentu perilaku kesehatan, yang terdiri dari 5 faktor, yaitu: (1) Adanya niat (*intention*) untuk bertindak terkait adanya rangsangan dari luar, (2) adanya dukungan dari masyarakat sekitarnya (*social support*), (3) terjangkaunya informasi (*accessability of information*), (4) adanya otonomi atau kebebasan pribadi (*personal autonomy*), dan (5) adanya kondisi dan situasi yang memungkinkan (*action situation*) (Notoatmodjo, 2005). Satu lagi adalah Teori WHO, yang menetapkan faktor utama penentu perilaku kesehatan adalah: (1) pemikiran dan perasaan (*thoughts and feeling*), (2) adanya acuan atau referensi dari seseorang yang dipercaya (*personal references*), (3) sumberdaya yang tersedia (*resources*), yang merupakan pendukung untuk terjadinya perilaku kesehatan seseorang atau masyarakat, dan (4) Sosiobudaya setempat (*culture*) yang berpengaruh terhadap terbentuknya perilaku kesehatan seseorang (Notoatmodjo, 2005). Terkait dengan ketiga teori tersebut maka Notoatmodjo (2005) menyimpulkan bahwa perilaku kesehatan manusia diawali dengan berbagai pengalaman dan lingkungan (faktor eksternal), baik fisik maupun nonfisik. Pengalaman dan lingkungan selanjutnya diketahui, dipersepsikan, diyakini, yang kemudian menimbulkan motivasi, niat untuk bertindak, yang pada akhirnya berwujud perilaku (Notoatmodjo, 2005).

Kosa dan Robertson mengatakan bahwa perilaku kesehatan individu cenderung dipengaruhi oleh kepercayaan orang yang bersangkutan terhadap kondisi kesehatan yang diinginkan dan kurang berdasarkan pada pengetahuan biologi. Memang kenyataannya demikian, tiap individu mempunyai cara yang berbeda dalam mengambil tindakan penyembuhan atau pencegahan yang berbeda meskipun gangguan kesehatannya yang sama. Pada umumnya tindakan yang diambil berdasarkan penilaian individu atau mungkin dibantu oleh orang lain terhadap gangguan tersebut. Penilaian semacam ini menunjukkan bahwa gangguan yang dirasakan individu menstimulasikan dimulainya suatu proses sosial psikologis. Proses semacam ini menggambarkan berbagai tindakan yang dilakukan si penderita mengenai gangguan yang dialami dan merupakan bagian integral interaksi sosial pada umumnya (Marimbi, 2009)

H.Ray Elling (1970) (Dalam Notoatmodjo, 2005) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor sosial yang berpengaruh pada perilaku kesehatan, yaitu: (1) *Self concept*, yang ditentukan oleh kepuasan dan atau ketidakpuasan seseorang terhadap dirinya sendiri. Hal ini terutama ketika ingin memperlihatkan dirinya kepada orang lain. Melalui konsep diri, seseorang akan

menerima keadaan dirinya atau berupaya untuk mengubahnya sesuai dengan yang diharapkannya; (2) *Image* kelompok berpengaruh terhadap *image* individu, sehingga perilaku yang diwujudkan oleh seseorang juga akan dibentuk oleh perilaku kelompoknya. Selain kedua aspek tersebut, juga (3) aspek identifikasi individu kepada kelompoknya (Foster, 1973), dapat memberikan keamanan psikologis dan kepuasan dalam pekerjaan. Identifikasi dapat dinyatakan dalam keluarga besar seseorang, dalam kelompok teman, kelompok kerja, dan lain-lain. Adapun aspek budaya yang mempengaruhi status kesehatan dan perilaku kesehatan seseorang menurut Foster (1973) antara lain: (1) tradisi yang ada pada suatu masyarakat, berdasarkan hasil-hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kesehatan seseorang, baik yang sifatnya positif maupun negatif. (2) sikap fatalisme, yakni suatu paham yang beranggapan bahwa segala kejadian alam dan manusia berada diluar kuasa manusia untuk mengubahnya dan berada dalam kuasa penuh suatu prinsip sebab mutlak dan punya kesadaran (<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-fatalisme/>), (3) nilai yang berlaku pada suatu masyarakat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Nilai-nilai tersebut, ada yang mendukung kesehatan ada pula yang merugikan, (4) etnosentrisme, yaitu sikap seseorang yang memandang bahwa kebudayaan masyarakatnya paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan orang lain, (5) unsur budaya dipelajari pada tingkat awal dalam proses sosialisasi. Kebiasaan seseorang yang diperolehnya sejak kecil, cenderung sulit untuk berubah. Demikian pula pengaruhnya terhadap perilaku kesehatan.

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) adalah bagian dari komunitas yang tinggal pada suatu lokasi dengan kondisi sebagaimana yang digambarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu rumah tangga yang tidak jelas berapa pengeluaran untuk hidupnya, tidak jelas kriterianya, tidak diketahui dengan pasti, berapa uang yang dikeluarkan per harinya. Piven dan Cloward (1993). Serta Swanson (2001) dalam Suharto (2009, 15) menjelaskan bahwa konsep kemiskinan mencakup tiga dimensi, yaitu kekurangan materi, rendahnya pendapatan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan sosial seperti pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu kemiskinan itu tercermin baik dari ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok (materi) dan ketidaklayakan penghasilan mereka, maupun rendahnya akses terhadap sumberdaya.

Indikator kemiskinan menurut Bappenas (2006) adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan,

terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga (<http://m-newsdaerah.blogspot.co.id/2014/12/inilah-kriteria-kemiskinan-di-indonesia.html>). Adapun menurut Keluarga Sejahtera, indikator rumah tangga sangat miskin itu adalah keluarga prasejahtera dengan kondisi belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Oleh karena itu, RTSM itu: (a) belum bisa melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga; (b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga belum dapat makan 2 (dua) kali sehari atau lebih; (c) Seluruh anggota keluarga belum memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; (d) Bagian yang terluas dari lantai rumah masih dari tanah, serta (e) Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB belum bisa membawanya ke sarana/petugas kesehatan. (<http://m-newsdaerah.blogspot.co.id/2014/12/inilah-kriteria-kemiskinan-di-indonesia.html>)

Apabila mengacu pada definisi dan indikator yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, Keluarga Sejahtera (KS), serta para ahli, maka betapa posisi menjadi keluarga atau rumah tangga sangat miskin itu sangat mengengaskan dan menciutkan hati. Apakah pada kehidupan mereka sehari-hari tidak ada kesempatan untuk merasakan kebahagiaan, kesenangan, sukaria, termasuk menikmati pola komunikasi dan budaya bersih. Dalam penelitian ini diungkap tentang makna pola komunikasi dan budaya sehat pada RTSM yang merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: “ Bagaimanakah pola komunikasi dan budaya sehat Rumah tangga Sangat Miskin (RTSM) di Perdesaan? ”.

Tujuan penelitian ini adalah : (a) Mengidentifikasi faktor-faktor perilaku sehat pada rumah tangga sangat miskin di perdesaan, (b) Mendeskripsikan pola komunikasi kesehatan pada rumah tangga sangat miskin di pedesaan, (c) mengidentifikasi keterlibatan pemerintah dalam membudayakan hidup sehat pada masyarakat miskin di perdesaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu

pengetahuan tentang fenomena komunikasi kesehatan pada rumah tangga sangat miskin dengan berbagai aspek yang melatarbelakangi dan makna yang terkandung dalam setiap aspek yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan rumah tangga sangat miskin terkait dengan kesehatan yang dihadapinya. Dengan pemahaman ini diharapkan dapat menanggulangi berbagai permasalahan yang ada didalam masyarakat, seperti kesehatan rumah tangga sangat miskin, sehingga pembangunan masyarakat madani dapat direalisasikan. Secara praktis hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi kepada institusi-institusi yang menyelenggarakan aktivitas pemberdayaan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, seperti Departemen kesehatan, LSM-LSM yang beroreintasi kesehatan, serta siapapun yang peduli terhadap sesama manusia

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Melalui teknik ini akan terungkap pemaknaan berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Melalui FGD juga bisa dihindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap fokus masalah yang diteliti (Bungin, 2003:131). Asumsi-asumsi yang menyertai FGD antara lain: (a) keterbatasan individu selalu tersembunyi pada ketidaktahuan kelemahan pribadi tersebut; (b) masing-masing anggota kelompok saling memberi pengetahuan satu dengan lainnya dalam pergaulan kelompok; (c) setiap individu dikontrol oleh individu lain sehingga ia berupaya agar menjadi yang terbaik; (d) kelemahan subyektif terletak pada kelemahan individu yang sulit dikontrol oleh individu yang bersangkutan, dan (e) intersubjektif selalu mendekati kebenaran yang terbaik (pada saat itu) (Bungin, 2003:131-132).

Menurut Bungin (2003:132), melalui FGD akan dihasilkan pemikiran yang lebih sempurna jika dibandingkan dengan pemikiran individual. Pemikiran individu selalu dibatasi oleh bingkai pikir pribadi (*frame of reference*), sehingga seseorang itu menjadi egois, berpikir sempit, berpikir terbatas, bahkan menghalangi progresivitas individu. Oleh karena itu, individu hanya akan memahami fenomena dari sisi dimana individu itu berada. Melalui FGD, dimana banyak hadir orang, akan menolong individu dari kelemahan kritikalnya. Oleh karena itu, pemaknaan yang dihasilkan melalui FGD adalah pemaknaan intersubjektif, dimana dalam konteks ini, bisa jadi peran

subjektivitas lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada besarnya peran kelompok dalam proses-proses diskusi.

FGD digunakan untuk tujuan menghimpun data sebanyak-banyaknya dari informan kelompok. Melalui FGD informasi yang ditangkap peneliti adalah informasi kelompok, sikap kelompok, pendapat kelompok, dan keputusan kelompok terhadap sebuah fenomena (Bungin, 2003:133). Oleh karena itu, kebenaran informasi yang diperoleh melalui FGD merupakan kebenaran intersubjektif. Hal ini karena selama diskusi berlangsung, masing-masing peserta tidak hanya memperhatikan pendapatnya sendiri, melainkan ia juga harus mempertimbangkan apa yang dikemukakan peserta FGD yang lainnya.

Subjek dan Objek Riset

Dalam riset ini, yang menjadi subjek adalah para peserta PKH yang berjumlah 10 orang dengan kriteria sebagai berikut: (1) telah menjadi peserta PKH minimal 3 tahun, (2) memahami dengan baik berbagai program pemerintah yang terkait dengan kesehatan, (3) pengalaman dalam keikutsertaannya dalam program-program pemerintah, terutama kesehatan, (4) berpendidikan minimal SMP, (5) tokoh otoritas terhadap kasus yang didiskusikan; (6) masyarakat awam yang tidak tahu menahu dengan masalah tersebut namun ikut merasakan persoalan sebenarnya.

Unit Analisis

Melalui FGD, aspek-aspek yang akan dianalisis meliputi: (1) faktor-faktor perilaku sehat pada rumah tangga sangat miskin di perdesaan, (2) pola komunikasi kesehatan pada rumah tangga sangat miskin di pedesaan, (3) keterlibatan pemerintah dalam membudayakan hidup sehat pada masyarakat miskin di perdesaan.

Prosedur Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (a)Sejumlah besar data dipilah-pilah dan direduksi menjadi beberapa tema dan kategori; (b) menulis paragraf panjang, karena bukti harus mendukung pernyataan dan penulis perlu menunjukkan perspektif yang majemuk, (c) bersifat holistik, memandang gambaran lebih besar, gambaran keseluruhan, serta dimulai dengan sebuah upaya untuk memahami keseluruhan,(d) mengamati hubungan-hubungan di dalam sebuah sistem atau budaya; (e) merujuk kepada proses yang personal, tatap muka, dan langsung; (f) difokuskan pada upaya untuk memahami *setting* sosial yang terjadi, tanpa harus membuat prediksi tentang *setting* itu; (g) peneliti mengembangkan sebuah model yang menyerupai apa yang terjadi di *setting* sosial (h) memasukan *informed*

consent decision dan responsif terhadap permasalahan etika; (i) menyediakan ruang untuk deskripsi peran peneliti sebagaimana juga deskripsi bias peneliti dan rujukan ideologisnya, (j) memerlukan analisis yang berkelanjutan terhadap data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi faktor-faktor perilaku sehat pada rumah tangga sangat miskin di perdesaan

Perilaku kesehatan adalah respons seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sehat-sakit, penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehat-sakit seperti lingkungan, makanan, minuman, dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perilaku kesehatan itu adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang, baik yang dapat diamati (*observable*) maupun yang tidak dapat diamati (*unobservable*), yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (Notoatmodjo, 2005: 46). Kasl dan Cobb (1966) mengemukakan bahwa perilaku kesehatan adalah “suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu yang meyakini dirinya sehat untuk tujuan mencegah penyakit atau mendeteksinya dalam tahap asimtomatik” (Notoatmodjo, 2005).

Bertolak dari FGD yang dilakukan dengan informan, maka faktor-faktor perilaku sehat yang terdapat pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) adalah: (1) Upaya pengobatan keluarga ketika sakit, (2) upaya mendapatkan informasi bagian tubuh yang sakit dari keluarga yang sakit, (3) Upaya alternatif untuk menyembuhkan sakit ketika pengobatan secara mandiri belum ada hasilnya, (4) Untuk kesembuhan dari sakit, lebih percaya hasil pengobatan dokter ketimbang pengobatan dari paraji/dukun, (5) Masalah kesehatan dibicarakan dalam keluarga, (6) Jika sakit, pertama-tama yang dilakukan adalah membeli obat warung yang sesuai dengan apa yang dirasakan, (7) Jika sakit lama sembuhnya, maka berobat ke ahli pengobatan alternatif, karena kurang percaya pengobatan dokter, (8) apabila ada yang sakit di rumah, maka biasanya menanyakan apa yang terasa, dan segera membawanya ke puskesmas, (9) kesenangan berbincang tentang kesehatan dengan tetangga, (10) Kepercayaan terhadap kesehatan tergantung pada cara-cara mengelola hidup dan lingkungan, (11) bertanya kepada dokter di puskesmas ketika ada keluhan sakit, (12) memperhatikan kebersihan MCK walaupun dalam kondisi yang sangat sederhana, (13) membersihkan halaman rumah dari sampah-sampah yang berserakan, (14) membuka jendela dan pintu di waktu pagi hari, supaya udara segar masuk kedalam rumah, (15) membersihkan debu yang menempel pada perabotan yang ada didalam rumah, (16) menggali lobang untuk menimbun sampah, (17) menanam pohon palawija di

halaman rumah untuk keperluan sehari-hari, (18) membawa anak ke posyandu untuk diperiksa kesehatannya, (19) memeriksakan diri apabila ada pemeriksaan gratis diposyandu, seperti pemeriksaan terhadap tekanan darah, kadar gula darah, asam urat, berat badan, dan lain-lain; (20) dalam keterbatasan, berupaya untuk memberi makanan-makanan yang bergizi kepada anak-anak mereka.

Adapun aspek-aspek yang dapat disimpulkan dari konsekuensi perilaku sehat menurut RTSM adalah: (a) kesehatan jasmani dan rohani merupakan aspek yang penting dalam hidup, (b) informasi tentang kesehatan sangat diperlukan dan penting dalam rangka menjaga tubuh dari serangan penyakit, (c) tubuh yang sakit selain dapat disembuhkan oleh obat dari dokter juga bisa melalui pengobatan alternatif, (d) sehat itu berkaitan dengan pengelolaan hidup dan lingkungan, (e) kehadiran lembaga-lembaga yang berorientasi kesehatan seperti posyandu merupakan aspek yang penting, karena dapat membantu memelihara kesehatan ibu dan anak, (f) makanan dan minuman perlu diperhatikan kesehatannya karena berkaitan dengan sakit dan atau sehat.

Adapun pendapat informan terkait dengan manfaat budaya hidup sehat adalah: (1) dapat bekerja secara optimal, karena tubuh dan pikiran bisa fokus pada pekerjaan, (2) pikiran dapat konsentrasi pada apa yang dikerjakan, (3) berpikir dan menilai sesuatu dari sisi yang positif, sehingga tidak menimbulkan dan memberatkan beban pemikiran, (4) penampilan terlihat segar dan bugar, (5) berinteraksi dengan orang lain tanpa beban dan terasa lebih akrab, (6) merasa lebih percaya diri ketika berhadapan dengan siapapun, (7) melihat keadaan keluarga walaupun terbatas merasa bahagia, (8) walaupun dalam keadaan sederhana, merasa tenang berada dirumah sendiri, (9) tidur terasa nyenyak dan tenang, walaupun dalam keterbatasan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa perilaku sehat pada rumah tangga sangat miskin di perdesaan menunjukkan adanya variasi, perilaku tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut: perilaku yang berkaitan dengan sehat-sakit, perilaku yang berkaitan dengan pengobatan, perilaku yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, perilaku yang terkait dengan pola makan dan minum

Deskripsi pola komunikasi kesehatan pada rumah tangga sangat miskin di pedesaan

Komunikasi kesehatan merupakan bagian dari komunikasi antar-manusia yang berfokus pada bagaimana seorang individu dalam suatu kelompok/masyarakat menghadapi isu-isu berhubungan dengan kesehatan serta berupaya untuk memelihara kesehatannya (Northouse and Northouse, 1985, dalam Notoatmojo, 2005). Renata Schivo (2007)

mendefinisikan komunikasi kesehatan sebagai “*Health communication is a multifaceted and multidisciplinary approach to reach different audiences and share health-related information with the goal of influencing, engaging, and supporting individuals, communities, health professionals, special groups, policymakers and the public to champion, introduce, adopt, or sustain a behavior, practice, or policy that will ultimately improve health outcomes.*” Sementara itu, Dutta (2009: 60. Dalam Mulyana, 2016: 53) mengatakan bahwa “*health communication can be defined as the study of communication principles, processes, and messages directed toward the development of micro-meso- and macro scale health solution.* Menurut Notoatmojo (2005:147-148), fokus dalam komunikasi kesehatan adalah transaksi spesifik pada isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi tersebut. Transaksi yang berlangsung antar ahli kesehatan dan antara ahli kesehatan dengan klien merupakan perhatian utama dalam komunikasi kesehatan.

Gambaran tentang Pola komunikasi kesehatan pada Rumah Tangga Sangat Miskin pada lokasi penelitian berdasarkan FGD yang dilakukan adalah sebagai berikut: (a) menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, (b) petugas kesehatan memberikan penjelasan dengan penuh kesabaran, (c) Petugas kesehatan dalam memberikan penjelasannya senantiasa menggunakan contoh-contoh yang memudahkan pemahaman warga masyarakat, (d) masalah kesehatan dianggap penting, sehingga apabila ada yang tidak dipahami, maka segera bertanya kepada petugas kesehatan, (e) Petugas kesehatan senantiasa memberi dorongan kepada masyarakat untuk memperhatikan kesehatan diri dan kesehatan lingkungan, (f) Petugas kesehatan dalam menjelaskan materi kesehatannya selain berbicara juga menggunakan brosur yang menarik, (g) masalah kesehatan dibicarakan dengan tetangga, (h) pembicaraan tentang kesehatan juga dilakukan di dalam rumah dengan anggota keluarga, (i) sumber informasi tentang kesehatan diperoleh juga di Puskesmas, dengan cara membaca poster-poster tentang kesehatan, (j) Selain berbicara, petugas kesehatan juga menggunakan alat-alat bantu untuk lebih memudahkan penjelasannya, seperti menggunakan poster, lembar umpan balik, foto-foto, video, leaflet, booklet, dan lain-lain, (k) Penyampaian pesan kesehatan oleh petugas kesehatan dilakukan baik melalui komunikasi tatap muka, secara kelompok melalui pertemuan-pertemuan secara informal di rumah anggota PKH, maupun dalam bentuk pertemuan resmi, seperti penyuluhan di kecamatan, (l) Pesan-pesan tentang kesehatan dikemas dengan baik, sehingga mudah dipahami dan dipraktikkan.

Selain aspek-aspek yang dapat menghasilkan pola komunikasi yang positif, berdasarkan FGD yang dilakukan dikemukakan juga pola komunikasi kesehatan yang bersifat negatif, sehingga dapat menghambat budaya sehat, yaitu: (1) Pesimis. Yakni kepasrahan dengan penyakit yang diderita, karena tidak punya uang untuk pengobatan, (2) partisipasi masyarakat kurang dalam aspek kesehatan, (3) Rasa tanggungjawab masyarakat terhadap kesehatan masih kurang, (4) Kebiasaan buruk yang merusak kesehatan, seperti merokok, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat pengawet, pewarna, dan perasa, (5) Kebiasaan buruk dalam bentuk buang air sembarangan, buang sampah sembarangan, berternak dekat dengan rumah, (6) Tingkat pendidikan rendah, sehingga tidak memahami dengan baik tentang kesehatan, (7) Pelayanan kesehatan yang tidak bersahabat, (8) sarana prasarana di puskesmas yang masih terbatas, (9) keterbatasan dokter/paramedis dalam melayani pasien, (10) faktor kebiasaan dalam menangani kesehatan, yaitu ke dukun/ paraji (11) Sarana dan prasarana untuk menyampaikan pesan kesehatan masih terbatas, (12) Dukungan pemerintah untuk penyuluhan kesehatan yang maksimal masih kurang.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pola komunikasi kesehatan pada rumah tangga sangat miskin di perdesaan memperlihatkan adanya pola komunikasi yang menunjang kesehatan, yaitu komunikasi yang berorientasi pada budaya hidup sehat dan pola komunikasi yang pesimistis, yakni komunikasi yang cenderung melihat kesehatan atau budaya sehat sebagai sebuah kondisi yang sulit untuk dicapai

Identifikasi keterlibatan pemerintah (diwakili oleh petugas kesehatan dan lembaga kesehatan) dalam membudayakan hidup sehat pada masyarakat miskin di perdesaan.

Pemerintah Republik Indonesia sudah lama berupaya untuk membudayakan hidup sehat pada masyarakat miskin di perdesaan. Berbagai program hidup sehat, telah, sedang dan akan dilaksanakan, dan yang menjadi target adalah seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat termiskin yang hidup di perdesaan.

Berdasarkan FGD yang dilakukan, informan mengemukakan bahwa sistem pelayanan kesehatan yang ada diwilayahnya, terkait dengan aspek-aspek: (1) petugas kesehatan dinilai pandai, (2) petugas kesehatan dinilai dapat dipercaya, (3) petugas kesehatan dinilai lincah, (4) petugas kesehatan dinilai mudah bergaul, (5) petugas kesehatan dinilai sebagai orang yang menyenangkan, (6) petugas kesehatan dinilai sebagai orang yang humoris, (7) petugas kesehatan dinilai sebagai orang yang penyayang, (8)

petugas kesehatan dinilai sebagai orang yang dapat dipercaya kata-katanya, (9) petugas kesehatan dinilai dapat menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, (10) petugas kesehatan dinilai sebagai orang yang terbuka dan senang berdiskusi, (11) petugas kesehatan dinilai sebagai orang yang mampu memberikan solusi, (12) petugas kesehatan dinilai sebagai orang yang memiliki semangat yang tinggi.

Terkait dengan eksistensi kelembagaan kesehatan milik pemerintah, maka rumah tangga sangat miskin (RTSM) memberikan penilaian sebagai berikut: (1) Dinas kesehatan dapat memberikan pesan yang jelas (2) dinas kesehatan dinilai dapat dipercaya, (3) dinas kesehatan dinilai dapat memberikan pesan yang benar, (4) dinas kesehatan dinilai dapat memberikan pesan yang lengkap, (5) dinas kesehatan dinilai meyakinkan, (6) dinas kesehatan dinilai kontekstual, (7) dinas kesehatan dinilai bertanggungjawab, (8) dinas kesehatan dinilai peduli terhadap masyarakat, (9) dinas kesehatan dinilai dapat diandalkan, (10) dinas kesehatan dinilai sebagai lembaga terbuka dan senang berdiskusi, (11) dinas kesehatan dinilai sebagai lembaga yang mampu memberikan solusi, (12) dinas kesehatan dinilai sebagai lembaga yang memiliki semangat yang tinggi.

Berdasarkan identifikasi melalui FGD yang dilakukan terhadap informan maka dapat dikemukakan bahwa adanya keterlibatan pemerintah dalam membudayakan hidup sehat pada masyarakat miskin di perdesaan, melalui berbagai program yang banyak melibatkan institusi baik di pusat maupun di daerah. Keterlibatan tersebut diwakili oleh lembaga kesehatan seperti Puskesmas dan Petugas Kesehatan yang dalam pekerjaan sehari-harinya melayani dan mendampingi masyarakat terkait dengan kesehatan.

SIMPULAN

(a) perilaku sehat pada rumah tangga sangat miskin di perdesaan menunjukkan adanya variasi, perilaku tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut: perilaku yang berkaitan dengan sehat-sakit, perilaku yang berkaitan dengan pengobatan, perilaku yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, perilaku yang terkait dengan pola makan dan minum (b) pola komunikasi kesehatan pada rumah tangga sangat miskin di perdesaan memperlihatkan adanya pola komunikasi yang menunjang kesehatan, yaitu komunikasi yang berorientasi pada budaya hidup sehat dan pola komunikasi yang pesimistis, yakni komunikasi yang cenderung melihat kesehatan atau budaya sehat sebagai sebuah kondisi yang sulit untuk dicapai (c) adanya keterlibatan pemerintah dalam membudayakan hidup

sehat pada masyarakat miskin di perdesaan, melalui berbagai program yang banyak melibatkan institusi baik di pusat maupun di daerah. Keterlibatan tersebut diwakili oleh lembaga kesehatan seperti Puskesmas dan Petugas Kesehatan yang dalam pekerjaan sehari-harinya melayani dan mendampingi masyarakat terkait dengan kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran serta kepada Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, juga Ketua Program Studi Manajemen Komunikasi, yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Juga Kepada Panitia Pelaksana Seminar Nasional "Politik dan Kebudayaan" Departemen dan Program Studi Anthropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang telah berkenan untuk menerima kami untuk melakukan presentasi dalam seminar tersebut. Terimakasih atas semua dukungan dan kesediaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry, Dianne. 2004. *Risk, Communication and Health Psychology*. Open University Press. New York
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. RajaGrafindo. Jakarta.
- . 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. RajaGrafindo. Jakarta.
- Foster, G.M. 1973. *Traditional Societies in Technological Change*.
- Marimbi, Hanum. (2009). *Sosiologi Dan Antropologi Kesehatan*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Mulyana, Deddy. 2016. *Health and Therapeutic Communication. An Intercultural Perspective*. Rosda. Bandung.
- Niven Neil, 2002. *Psikologi Kesehatan*. EGC. Jakarta
- Notoatmodjo, Soekijo. 2005. *Promosi Kesehatan, Teori dan Aplikasi*. Rineka Cipta. Jakarta
- Parker, Jerry P and Esther Thorson. 2009. *Health Communication in The New Media Lanscape*. Spring, New York
- Schiavo, Renata. 2007. *Health Communication, From Theory to Practice*. John Willey & Sons, San Franscisco
- Singarimbun, Masri dan Sopyan Effendi. *Metode Survei*. LP3ES, Jakarta
- Suharto, Edi . 2009. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.

- Thomas, Richard. 2006. *Health Communication*.
Spring. USA
- Thompson, Teresa L; Alicia Dorsey, Katherine I
Miller, and Roxanne Parrott. 2003. *Handbook
of Health Communication*. Lawrence Erlbaum
Associates. Mahwah, New Jersey

Sumber lain:

- (<http://data.tnp2k.go.id/?q=category/data/program>).
(psikstikma.blogspot.com/.../pembangunan-kesehatan-di-indonesia.html).
(<http://dewantinurulaini.blogspot.com/2009/03/indikator-keberhasilan-pembangunan.html>).
Badan Pusat Statistika (BPS), 2015.
Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)
Badan Pusat Statistik (BPS) 2012
Kompas, 18 November 2011: 45
<http://m-newsdaerah.blogspot.co.id/2014/12/inilah-kriteria-kemiskinan-di-indonesia.html>(<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-fatalisme/>),

Menyelaraskan Kebijakan Kesehatan bagi Penderita Thalasemia di Kota Palangkaraya (Kesehatan sebagai Produk Politik dan Kebudayaan)

Saputra Adiwijaya dan Katriani Puspita Ayu

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang dialami oleh penderita Thalasemia yang ada di kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam bagian riset ini juga digunakan metode kualitatif – deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan keadaan pasien thalasemia ketika mereka menjalani perawatan, menjalani transfusi darah, dan pengobatan dari pihak Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah. Data didapat dari Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus melalui metode wawancara dan ditunjang dengan referensi buku, jurnal yang relevan. Hasil dari riset ini menemukan bahwa ideologi politik suatu pemerintahan dapat menentukan derajat kesehatan masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Penderita thalasemia belum tertangani dengan baik, karena produk kebijakan untuk penderita thalasemia maupun pola pelayanan yang diberikan tidak berjalan dengan baik. Hal ini misalnya terlihat tidak adanya bangsal khusus untuk penderita thalasemia. Belum adanya kepedulian pengambil keputusan di bidang kesehatan khususnya untuk penyakit generatif, belum adanya sosialisasi pentingnya donor darah bagi masyarakat, belum adanya organisasi seperti POPTI (Perhimpunan Orangtua Penderita Thalasemia Indonesia), atau perwakilan YTI (Yayasan Thalasemia Indonesia) ataupun kesadaran dari pihak berwenang dalam mendata pasien thalasemia yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Maka kemudian sangat diperlukan formulasi kebijakan bidang kesehatan khususnya untuk penderita thalasemia, selain itu juga selalu memperhatikan perilaku hidup sehat bagi masyarakat dan didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai, layanan yang optimal bagi penderita thalasemia dengan selalu memberikan pendampingan yang sifatnya motivasi agar tetap optimis menjalani kehidupan. Fasilitas dan layanan kesehatan yang baik akan menciptakan masyarakat yang sehat, agar semua penyakit dapat tertangani dengan baik, khususnya penyakit generatif seperti Thalasemia.

Kata kunci: thalasemia, kebijakan kesehatan, fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, masyarakat sehat.

PENDAHULUAN

Pemahaman mendasar dalam menata kehidupan masyarakat dalam suatu negara tak lepas dari pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah hal yang mutlak diperlukan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena salah satu bagian utama dari suksesnya sebuah negara salah satu di antaranya adalah pelayanan yang optimal kepada masyarakat dari pemerintah. Tujuan pelayanan kepada masyarakat secara sederhana dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada masyarakatnya yang berdaulat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh ideologi politik yang kuat, yang tentunya dianut oleh masing-masing negara. Dengan kata lain jika pelayanan pemerintah optimal dan baik maka masyarakat yang menjadi merasa nyaman dan dihargai sebagai manusia seutuhnya tanpa membedakan berbagai macam kelas, ras, agama, golongan, hingga jenis kelamin.

Dalam perkembangannya proses pelayanan ini ditopang dengan pembangunan yang bukan hanya secara fisik namun juga mental, sehingga ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat sehingga cita-cita yang menjadi arah negara atau tujuan negara tercapai sepenuhnya. Di dalam pembangunan yang ideal tentunya memerlukan pelayanan optimal, masyarakat berhak menikmati hasil pembangunan yang akan terus berkembang dan masyarakat wajib untuk mendukung pembangunan dan mengawasi prosesnya. Jika kemudian ada hal yang tidak tepat maka harus ada koreksi dari semua pihak agar hasil yang ingin dicapai tetap pada jalurnya, disertai pula dengan adanya transparansi.

Pelayanan kepada masyarakat banyak sekali ragamnya, dari pendidikan, sosial, hukum, kependudukan, kesehatan, dan lain sebagainya. Penelitian ini memfokuskan pada pelayanan kesehatan yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat terutama masyarakat yang termasuk dalam kategori tidak mampu atau miskin. Masih banyak keluhan atas layanan kesehatan di masyarakat, baik itu dari sisi administrasi hingga pelayanan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Secara khusus pelayanan kesehatan bagi penyakit generatif seperti thalasemia masih belum mendapat perhatian khusus. Rumah sakit umum daerah Doris Sylvanus di Palangka Raya merupakan salah satu rumah sakit yang belum memiliki sentra khusus untuk menangani penyakit thalasemia. Dengan berkembangnya penyakit

halassemia, idealnya penanganan penyakit ini harus mendapat penanganan yang intensif karena kebutuhan akan transfusi serta obat-obatan pasca transfusi. Belum ada kebijakan khusus yang menopang terbentuknya unit thalasemia di RSUD Doris Sylvanus. Belum terjamah pula pasien penderita thalasemia dalam pelayanan kesehatan Jampiheltas dari BPJS. Dalam peraturan daerah juga belum ada secara khusus menyebutkan tentang penanganan pasien thalasemia dan belum terjawab kebutuhan penderita melalui layanan kesehatan di rumah sakit maupun lembaga kesehatan lainnya seperti PMI, dan Puskesmas.

Di tengah perkembangan teknologi kedokteran dan berbagai macam temuan obat penyembuh namun pelayanan juga harusnya bisa lebih optimal. Sudah seharusnya berbagai macam terobosan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan misalnya dengan lebih memberikan pelayanan kesehatan terpusat dan terjangkau yang di implementasikan oleh pemerintah daerah masing-masing, atau memberikan fasilitas pelayanan kesehatan tambahan bagi beberapa penyakit yang dianggap sulit untuk disembuhkan seperti thalasemia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasari pada penyelidikan atas suatu fenomena sosial dan masalah penderita thalasemia di Palangkaraya. Pendekatan kualitatif membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata nara sumber, laporan terinci dari pandangan *key informan*, dan melakukan studi pada situasi yang dialami oleh penderita thalasemia. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci, dan dalam penelitian ini empati peneliti menjadi penting untuk masuk dalam kehidupan pasien thalasemia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mewawancarai utamanya pasien thalasemia di Palangka Raya, dan beberapa pihak yang terkait dengan penyediaan pelayanan kesehatan bagi penderita thalasemia. Diantaranya adalah pihak Rumah Sakit Doris Sylvanus, PMI Palangka Raya, Dinas Kesehatan Provinsi Palangka Raya, POPTI, DPRD sebagai regulator dan BPJS sebagai penyedia layanan Jampiheltas. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak dengan menggunakan pedoman wawancara agar mengkonstruksi subjek penelitian dengan lebih detail dan jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai agar dapat melihat makna yang tersembunyi, memahami interaksi

sosial pasien thalasemia dengan lingkungan sekitarnya, meneliti perkembangan sejarah kebijakan kesehatan yang berkenaan dengan penyakit thalasemia di Kota Palangka Raya.

Selain melalui wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dari kegiatan pengobatan dan transfusi darah pasien thalasemia baik di Rumah sakit Umum Daerah Doris Sylvanus maupun di PMI Palangka Raya. Dengan observasi, peneliti dapat melihat langsung permasalahan pasien thalasemia dan proses pengobatan yang harus dijalani baik oleh pasien maupun oleh keluarga pasien yang menemani selama proses berlangsung. Data sekunder diambil dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah dan PMI untuk dilakukan proses triangulasi data tentang ketersediaan layanan, pengobatan, dan kebijakan rumah sakit dalam menangani penyakit thalasemia.

Kesehatan sebagai produk kebudayaan

Selain menjadi produk politik, kesehatan juga merupakan produk dari kebudayaan. Melalui perspektif antropologi, kebudayaan merupakan sebuah sistem kognitif yang di dalamnya mencakup ilmu pengetahuan sekaligus kepercayaan yang berada dalam pikiran setiap individu. Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Aspek kesehatan lebih banyak berhubungan dengan aspek perilaku manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Aspek perilaku manusia pada umumnya ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma budaya masyarakat. Oleh karenanya kebudayaan akan selalu dinamis, ini disebabkan oleh sistem ide, pengetahuan, dan kepercayaan serta nilai-nilai dalam suatu sistem masyarakat berubah pula sesuai perubahan zaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak, sedangkan perwujudannya adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Salah satunya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, seni, pola hidup yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Esensi dari nilai-nilai budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perwujudan hidup sehat sebagai langkah pragmatik, hal ini merupakan bagian budaya yang dapat ditemukan pada sistem budaya masyarakat lokal. Produk dari budaya ini dapat dilihat dari pola hidup sehat dapat ditelusuri melalui komponen pemahaman tentang sehat, sakit, cacat dan kematian, nilai yang dilaksanakan dan dipercaya serta diyakini sesuai dengan pemahaman masyarakat.

Pemahaman terhadap keadaan sehat dan keadaan sakit dapat berbeda di setiap masyarakat tergantung dari kebudayaan yang dimiliki. Berkenaan dengan permasalahan kesehatan, sistem ide dan budaya yang dimiliki masyarakat akan berpengaruh terhadap perilaku yang berbeda-beda dalam menjaga kesehatan dan cara-cara penyembuhan.

Penyakit generatif merupakan jenis penyakit yang pada umumnya belum diketahui sebab maupun cara penyembuhannya. Thalasemia sebagai salah satu penyakit generatif menjadi salah satu penyakit yang diyakini terjadi dikarenakan kesalahan genetika antara pembawa atau *carrier* baik dari ayah maupun ibu. Dalam kemajuan teknologi saat ini, budaya dari penanganan penyakit ini diserahkan sepenuhnya pada kemajuan dunia medis yang memberi opsi lebih bervariasi. Karena penyakit thalasemia bukan merupakan penyakit yang disebabkan gaya hidup yang tidak sehat maupun virus ataupun bakteri, sehingga sejak ditemukan cara penyembuhan melalui transfusi darah, penyakit ini dapat ditangani secara berkala walaupun tidak dapat menyembuhkan secara tuntas. Secara khusus budaya bukanlah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kesehatan seorang individu maupun masyarakat, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti; gender, pendidikan, serta pembangunan politik, sosial maupun ekonomi.

Pembangunan Manusia dalam SDGs

Sebagai pelaku pembangunan, masyarakat membutuhkan tuntunan dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan dalam hidup. Sebagai makhluk sosial dan budaya, masyarakat sebagai aktor utama pembangunan saat ini sedang disiapkan untuk mencapai pembangunan multi dimensi yang tertuang dalam delapan butir utama dalam Millenium Development Goals (MDG'S) 1990 – 2015. Salah satu tujuan utamanya adalah memerangi penyakit berbahaya dan endemik seperti HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit-penyakit lainnya seperti penyakit thalasemia yang merupakan penyakit generatif. Agenda MDGs diimplementasikan melalui berbagai macam program yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing negara. Di Indonesia ada kalangan yang menilai bahwa ke delapan agenda PBB tersebut tercakup dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berbunyi:

”.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Dari uraian alinea ke-empat ini tercermin bahwa tujuan berbangsa dan bernegara mencakup terwujudnya

kesejahteraan, kecerdasan bagi semua warga negara, baik secara individual, nasional, maupun global. Kesejahteraan dan kecerdasan tidaklah dimaknai secara sederhana namun lebih luas lagi misalnya terpenuhinya kebutuhan bidang ekonomi, sosial-politik, atau pun pendidikan, termasuk dalam hal mental dan spiritual.

Sedangkan SDGs atau *sustainable development goals*, merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDGs melanjutkan konsep MDGs di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Tiga tujuan utama Indonesia yang di rangkum oleh Menteri Sosial Republik Indonesia (RI) Khofifah Indar Parawansa, yaitu : mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua ,mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan, dan menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Tujuan SDGs adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Sebagai ganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir 2015, SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga 2030. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. Lima pondasi dari SDGs yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Salah satu tujuan yang merupakan rujukan bagi pemberdayaan bidang kesehatan adalah tujuan ketiga, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Politik Kesehatan di Indonesia

Bambra et al (2005), dan Fahmi Umar (2008) mengemukakan alasan kesehatan adalah alat politik karena bidang kesehatan yang rentan adanya disparitas derajat kesehatan masyarakat, dimana sebagian penikmat kesehatan dapat menjangkau layanan yang baik dan sebagian lagi tidak. Navarro et al (2004) dan Beckfield, J. and Krieger, N.(2009) menyatakan bahwa ideologi politik suatu pemerintahan dapat menentukan derajat kesehatan masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan yang diambil dan oleh karenanya, diperlukan keadilan atau perataan. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa kesehatan adalah bagian dari politik karena derajat kesehatan ditentukan oleh kebijakan yang dapat diarahkan dan mengikuti kehendak intervensi kebijakan politik. Secara teori, politik kesehatan adalah kebijakan pemerintah di bidang

kesehatan yang didasari oleh hak yang paling fundamental, yaitu sehat merupakan hak warga negara. Sehingga pengambilan keputusan politik bidang kesehatan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sebaliknya politik juga dipengaruhi oleh kesehatan dimana jika derajat kesehatan masyarakat meningkat maka akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini tentunya kebijakan yang diambil haruslah pro rakyat dimulai dari:

1. Peraturan pemerintah dalam bidang kesehatan meliputi undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan peraturan lainnya.
2. Kebijakan pemerintah dalam bentuk program adalah segala aktifitas pemerintah baik yang terencana maupun yang insidental dan semuanya bermuara pada peningkatan kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan dan masyarakat agar tetap sehat dan sejahtera, baik fisik, jiwa, maupun sosial.
3. Sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung fisik dan mental yang sehat, sehingga mampu berkompetisi paling optimal. Tanpa didukung dengan kesehatan fisik dan mental yang baik, sumberdaya manusia tidak akan mampu berkompetisi dengan optimal. Secara tradisional kesehatan diukur dari aspek negatifnya seperti angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian. Melalui paradigma sehat, kesehatan sudah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai terbebas dari penyakit, tetapi sebagai sumberdaya yang memberi kemampuan kepada individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat untuk mengelola bahkan merubah pola hidup, kebiasaan, dan lingkungannya.
4. Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit swasta maupun pemerintah. Hal ini berdasarkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berada pada situasi krisis, termasuk sektor kesehatan telah membuat masyarakat terutama masyarakat golongan miskin bertambah menderita karena semakin sulit menjangkau fasilitas kesehatan milik swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini, rumah sakit sebagai organisasi sosial bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit harus dapat berfungsi sebagai rumah sehat yang melaksanakan kegiatan promotif bagi kesehatan pasien, staf rumah sakit, dan masyarakat di wilayah cakupannya serta pengembangan organisasi rumah sakit menjadi organisasi yang sehat.
5. Transparansi, transparansi tidak hanya dalam penggunaan anggaran bidang kesehatan namun juga berhubungan dengan kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak tenaga medis kepada pasien. Selain itu juga transparansi ini berkaitan dengan program-program kesehatan yang harus tepat sasaran bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan evaluasi

menyeluruh baik itu penggunaan anggaran, ketepatan program, SDM yang berhubungan dengan program-program yang telah dikerjakan hingga adanya sanksi yang tegas jika ada penyelewengan

Kebijakan-kebijakan Kesehatan di Indonesia

Sejak pemerintahan Republik Indonesia berdiri kebijakan bagi masyarakat miskin sudah banyak digulirkan, secara sederhana hal ini dimaknai sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Berbagai kebijakan dan program pun dilaksanakan misalnya pada masa orde baru ada istilah Inpres (Instruksi Presiden) dengan membangun sekolah-sekolah dasar, kemudian ada bantuan ternak dengan istilah Banpres (Bantuan Presiden). Semua kegiatan dari program dan bantuan ini daptlah dimaknai sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Ketika reformasi tahun 1998, dan terbentuk pemerintahan baru maka berbagai kebijakan dan program juga banyak digulirkan mengganti kebijakan yang lama, dan ditambah lagi dengan adanya otonomi daerah maka kebijakan pemerintah pusat diharapkan bersinergi dengan kebijakan pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan program bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat miskin.

JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat)

Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Sumber dana Jaminan Kesehatan berasal dari pemerintah pusat (APBN) melalui mekanisme dana Bantuan Sosial. Jaminan Kesehatan diperuntukkan untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan Kesehatan ini dimulai tahun 2005 dengan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat kemudian mengalami perubahan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan tidak ada perubahan cakupan masyarakat miskin. Tujuan umum penyelenggaraan Jamkesmas yaitu meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Pada bagian lain Jamkesmas merupakan sebuah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat

terpenuhi. Program ini dijalankan oleh Departemen Kesehatan sejak 2008. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah. Selain itu Jamkesmas juga bertujuan agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2009 program ini mendanai biaya kesehatan untuk 76,4 juta penduduk, jumlah ini termasuk sekitar 2,650 juta anak terlantar, penghuni panti jompo, tunawisma dan penduduk yang tidak memiliki kartu tanda penduduk.

Peserta yang dijamin dalam program Jamkesmas tersebut meliputi masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Selain itu sasaran dari program ini juga tuna wisma, ibu-ibu hamil dan penderita Thalasemia Mayor yang sudah terdaftar pada Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI) atau yang belum terdaftar namun telah mendapat surat keterangan Direktur RS sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Pengobatan Thalasemia. Dapat dilihat bahwa program Jamkesmas ini langsung merujuk pada pasien thalasemia sehingga dapat dilihat kebijakan ini menyoar langsung pada kebutuhan penderita sekaligus layanan melalui organisasi yang menaungi pasien thalasemia.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat propinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota.

BPJS ini merupakan sebagai penyelenggara sedangkan nama programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional atau disebut juga dengan JKN, peserta JKN adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan adanya JKN, maka seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya. Dan juga kepesertaannya bersifat wajib tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah. Sedangkan manfaat dalam mengikuti program JKN adalah bahwa layanan JKN mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Program JKN mengeluarkan program Jampheltas untuk memberikan layanan bagi pasien thalasemia. Kebijakan ini diharapkan dapat mampu memberikan layanan yang berkelanjutan baik pada saat transfusi maupun pengobatan. Keberadaan produk kebijakan ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah pada masyarakat penderita thalasemia. Namun demikian, sampai saat ini ada beberapa daerah yang belum menggunakannya dengan alasan belum ada keputusan dari peraturan daerah untuk pengalihan dari Jamkesmas, baik itu secara teknisnya, ataupun berbagai macam hal yang dianggap belum sinkron dari pelaksanaannya di lapangan.

Masyarakat Sehat

Erich Fromm berpendapat bahwa kita tidak hanya dipengaruhi dan dibentuk oleh kekuatan naluri biologis, namun juga mengemukakan bahwa kepribadian dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya. Penekanan Fromm pada faktor sosial dari kepribadian bisa dikatakan mengutamakan aspek sejarah. Menurut Fromm, manusia dapat menemukan kejadian-kejadian sejarah pada akar dari kesepian, keterasingan dan terabainya seseorang. Untuk menemukan tujuan dalam hidup, perlu menghilangkan perasaan-perasaan terasing dan mengembangkan perasaan saling memiliki. Sebaliknya, meningkatnya kebebasan yang di dapatkan dapat meningkatkan kesendirian dan keterasingan. Kepribadian sehat menurut Eric Fromm adalah teori yang menggunakan pendekatan sosial psikologis dimana pemusatan perhatiannya pada penguraian cara-cara dimana struktur dan dinamika-dinamika masyarakat tertentu membentuk para anggotanya sehingga karakter para anggota tersebut sesuai dengan nilai yang ada pada masyarakat

Dengan keadaan ini oleh Fromm dikatakan bahwa kehidupan di era modern sangat menuntut setiap individu untuk mengikuti kelompok masyarakat di mana individu tersebut berada, penyesuaian individu pada kelompoknya terjadi pada "ruang sosial" sebagai praktik-praktik logis yang ditapkan dan diharapkan oleh masyarakat. Kecenderungan tersebut, sudah terlebih dahulu dibaca oleh Fromm dalam *Masyarakat yang Sehat*, sebagai pola sosial yang menggejala. Gejala psikis dari individu agaknya kurang diperhatikan oleh mayoritas masyarakat di luar

individu, hal ini yang akhirnya memicu kerawanan mental pada individu, baik yang sudah terkena patologi fisik dan mental maupun tidak terkena keduanya. Sulit untuk membuat individu bisa memulai eksistensinya sendiri, apabila tidak ada ketersediaan ruang eksistensi individu di tengah kelompok sosialnya, karena ketika kita mengacu pada pemikiran Fromm, tentang gejala pola sosial yang berlaku di tengah masyarakat, maka sangatlah susah mencari ruang diskusi tentang apa yang diinginkan oleh individu tersebut.

Pada pasien thalasemia, perasaan keterasingan dan terabaikan karena menjadi pribadi yang berbeda dari individu di sekelilingnya merupakan perasaan yang sering dirasakan. Hal ini merujuk pada gejala psikis dari penderita thalasemia yang merasa tidak diperhatikan oleh mayoritas masyarakat sekitarnya. Penderita thalasemia akan memiliki perbedaan secara fisik dari individu sehat pada umumnya, seperti kulit yang menghitam, pertumbuhan tubuh yang tersendat, bagian dada yang membesar, wajah yang pucat dan badan yang gampang kelelahan. Karena perbedaan inilah maka penderita thalasemia merasa eksistensinya di dalam kelompok masyarakat berbeda. Perlu ditilik lebih lanjut keinginan dari individu yang sakit ini agar mendapat ruang di masyarakat. Sehingga penting bagi penderita untuk dibentuk psikis dan karakternya sesuai dengan struktur dan dinamika masyarakat agar termotivasi menjadi sehat dan ambil bagian dari masyarakat. Keterpurukan dan keterasingan yang dimiliki oleh penderita akan menutup pandangan masyarakat akan kebutuhan mereka untuk dapat diterima di masyarakat sebagai individu yang sehat. Selanjutnya dibutuhkan pula perasaan cinta kasih, empati dan perhatian yang dapat meningkatkan kualitas hidup penderita thalasemia melalui motivasi kepada anggota keluarga yang juga didukung oleh organisasi sosial yang menaungi penderita thalasemia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara khusus di Palangka Raya, penderita thalasemia sejak 2010 – 2015 mengalami kondisi fluktuatif hal ini menunjukkan masih belum optimalnya penanganannya maka untuk menangani kasus thalasemia di Palangka Raya, Rumah Sakit Umum (RSUD) dr. Doris Sylvanus Palangka Raya membentuk Tim Thalasemia dari berbagai unsur tenaga medis seperti dokter penyakit dalam, dokter anak, laboratorium, dan keperawatan. Berikut data pasien thalasemia yang dirawat inap maupun jumlah pasien yang meninggal sejak 2010 hingga 2015.

Jumlah Pasien	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rawat Inap	192	131	115	235	98	63
Meninggal	-	-	1	1	20	1

Sumber : dr. Doris Sylvanus, 2010-2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pasien fluktuatif dikarenakan pasien yang ada pada data di atas tidak melakukan perawatan lanjutan di rumah sakit dr. Doris Sylvanus Kota Palangka Raya atau dengan kata lain bahwa mereka tidak melaporkan dirinya secara rutin. Jika dilihat dari data tahun 2010 – 2012 penderita yang tercatat mengalami penurunan, kemudian ada kenaikan secara drastis di tahun 2013, kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2014-2015. Kemudian ada data pasien yang meninggal dunia terbanyak di tahun 2014 sebanyak 20 orang, sementara di tahun 2012, 2013, dan 2015 jumlah yang meninggal hanya 1 orang. Data pasien yang meninggal ini merupakan data pasien yang meninggal di rumah sakit dr. Doris Sylvanus kota Palangka Raya pada saat sedang menjalani perawatan. Dari data di atas yang fluktuatif ini bisa dikatakan bahwa baik pasien maupun pihak di rumah sakit dr. Doris Sylvanus belum sepenuhnya maksimal untuk saling bersinergi, hal difahami bahwa kesadaran pasien untuk melaporkan diri ke rumah sakit dr. Doris Sylvanus kota Palangka Raya masih rendah sementara pihak rumah sakit masih belum sepenuhnya bisa melayani atau mencari pasien penderita thalasemia untuk didata atau dipanggil jika memang sudah waktunya menjalani perawatan. Hal lain juga adalah tidak adanya sentra khusus thalasemia di RSUD dr. Doris Sylvanus sehingga informasi tentang penanganan penyakit ini juga masih minimum. Selain itu keberadaan perhimpunan penderita thalasemia seperti POPTI (Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalasemia Indonesia) juga belum maksimal di Palangka Raya belum terbentuk. Perhimpunan ini idealnya bertujuan untuk meringankan beban orang tua penderita thalasemia karena ada media komunikasi sesama orang tua penderita Thalasemia. Namun absennya geliat perhimpunan ini dan kurangnya jejaring antara kelompok ini dengan pihak rumah sakit dan pemerintah daerah membuat pasien-pasien thalasemia terabaikan kebutuhannya.

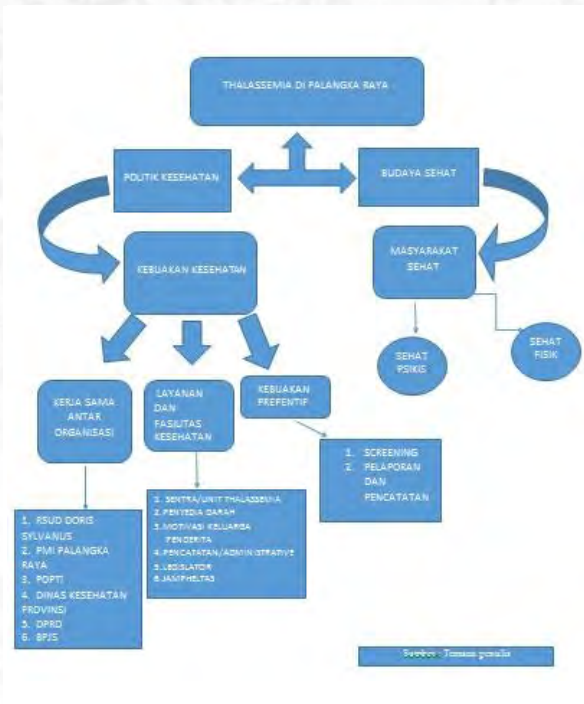
Tabel 1

Jumlah Total Pasien Thalasemia di Palangka Raya
Tahun 2010 - 2015

	Tahun

Bagan 1

Hubungan antar Lembaga dalam Kebijakan Kesehatan sebagai Produk Politik dan Budaya



Koordinasi antar organisasi dalam kebijakan kesehatan thalassemia

Palang Merah Indonesia (PMI) selain melayani aspek pelayanan kesehatan masyarakat juga berkaitan dengan aspek sosial, organisasi, dan aspek interpedensi, baik nasional maupun internasional. PMI di tingkat provinsi dituntut untuk membangun jaringan yang sangat luas melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah, kerjasama antar pemerintah, serta membangun jaringan sesama PMI baik nasional maupun internasional. PMI melaksanakan tanggung jawab penyediaan darah bagi kebutuhan masyarakat ditunjuk sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980 tentang transfusi darah dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.478/Menkes/Per/X/1990 tentang upaya kesehatan di bidang transfusi darah. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab tersebut dilaksanakan PMI dengan membentuk Unit Transfusi Darah (UTD) sebagai pelaksana teknis mulai dari tingkat pusat hingga di Kabupaten dan Kota (PMI Pusat, 1998).

PMI Palangka Raya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia darah untuk memenuhi kebutuhan akan transfusi darah yang dapat terjadi kapan saja seperti untuk korban kecelakaan yang dalam kondisi gawat darurat yang membutuhkan transfusi darah, pasien operasi mayor hingga penderita penyakit darah seperti thalassemia. Namun ketersediaan stok darah di PMI Palangka Raya sering kali tidak mencukupi kebutuhan di masyarakat. Hal ini karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat donor darah. Selain itu, pendataan pendonor dan

penerima donor juga belum dilakukan secara sistematis. Dikarenakan pencatatan yang masih belum akurat sehingga tidak dapat di perkirakan kebutuhan akan darah bagi penderita thalassemia setiap bulannya. Hal ini menjadikan PMI tidak dapat berfungsi secara maksimal dalam menyediakan darah bagi penderita thalassemia yang secara kontinu membutuhkan darah. Koordinasi dengan pihak RSUD juga sebatas kebutuhan darah yang sifatnya situasional sehingga secara umum ketersediaan yang kurang juga belum dapat mendukung kebutuhan RSUD setiap saat.

Selain pihak RSUD dan PMI yang berperan besar dalam melayani kebutuhan darah dan obat-obatan bagi penderita thalassemia, pihak keluarga pasien juga perlu di motivasi untuk meringankan beban orang tua penderita. Keberadaan POPTI (Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia) menjadi media komunikasi sesama orang tua penderita Thalassemia. Dibentuk khusus untuk mengurangi meningkatnya penderita Thalassemia karena dari para orang tua penderita informasi tentang bagaimana thalassemia bisa dibagikan untuk masyarakat. Keberadaan POPTI di Palangka Raya secara khusus geliatnya belum terlihat. Masih banyak orang tua yang sungkan menjadi bagian dari POPTI. Beberapa orang tua yang aktif berusaha merangkul orang tua lain agar dapat membagi beban ataupun derita pasien secara bersama-sama dengan tujuan menjauhkan si pasien dari keterpurukan, kesendirian dan perasaan terabaikan. Menurut Fromm, perasaan-perasaan tersebut harus dijauhkan agar individu dapat merasa sehat secara psikis dan tentunya akan mempengaruhi kesehatan fisik pula.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas dari POPTI, maka upaya terpadu telah berusaha dilakukan dan disosialisasikan, antara lain mengupayakan pengadaan darah, peralatan medis dan obat-obatan yang diperlukan atas dasar keterjangkauan secara tepat waktu dan berkesinambungan. Karena pasien thalassemia tidak bisa menunggu ketersediaan darah maupun obat-obatan. Selain itu para orang tua juga berinisiatif mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sekaligus mempromosikan pentingnya donor darah baik bagi pendonor maupun penerima donor. Peran serta dan dukungan moril dari seluruh lapisan masyarakat dirasa penting untuk melakukan pengecekan darah secara dini agar mengetahui pembawa sifat Thalassemia atau tidak. Hal ini merupakan upaya POPTI dalam mensosialisasikan pentingnya *screening*/pengecekan darah sebagai *carrier* dalam upaya menanggulangi dan mengurangi penderita thalassemia.

Sinergi antara setiap lembaga yang terkait dalam kebijakan kesehatan sangat esensial karena kerjasama yang solid dan koordinasi antar lembaga dapat merepresentasikan kebutuhan pasien-pasien dengan

penyakit akut seperti thalasemia. Peran dan kewenangan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dalam revisi PP No. 38 Tahun 2007 (tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota) dan PP No. 41 Tahun 2007 (tentang Organisasi Perangkat Daerah) menjanjikan keterlibatan langsung dinas kesehatan provinsi sebagai regulator, dan memiliki fungsi ganda sebagai regulator sistem kesehatan sekaligus sebagai operator pelayanan kesehatan. Fungsi ganda ini menjadi semakin kuat apabila Rumah Sakit Daerah kembali menjadi UPT Dinas Kesehatan. Ketiadaan sentra khusus thalasemia di RSUD Doris Sylvanus seharusnya menjadi perhatian khusus dinas kesehatan propinsi Kalimantan Tengah dalam menyikapi fluktuatifnya pasien-pasien thalasemia yang melakukan transfusi darah di RSUD tersebut. Idealnya, dinas propinsi dapat menjadi pelaksana langsung perda kesehatan di rumah sakit dan sekaligus menjadi pihak yang mengetahui kebutuhan layanan kesehatan. Sinergi antara RSUD Doris Sylvanus dan dinas kesehatan provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan informasi jumlah pasien thalasemia, dan kebutuhan akan donor darah serta obat-obatan pendukung penyembuhan pasien.

Pihak lain yang juga vital dalam kebijakan kesehatan adalah DPRD sebagai badan perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi harus mampu menggali serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah untuk kemudian dituangkan ke dalam Perda yang memiliki kekuatan memaksa sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. Salah satu kebutuhan yang mendesak saat ini adalah perda bidang kesehatan yang masih jarang menjadi perhatian khusus. DPRD melalui fungsi legislasinya dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembentukan perda serta dituntut untuk menghasilkan suatu perda yang mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah serta pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu item penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah bidang kesehatan adalah dapat direalisasikan layanan kesehatan yang prima terhadap setiap lapisan masyarakat, baik untuk penyakit akut, endemik, maupun penyakit generatif. Sayangnya, belum ada perhatian khusus pada penyakit generatif karena dianggap tidak terjadi pada kebanyakan orang. Pada kenyataannya, sangat diperlukan perda yang esensinya mewakili kebutuhan pasien thalasemia. Urgensi muatan materi Perda tentang kesehatan belum terwakilkan khususnya untuk penyakit-penyakit generatif seperti thalasemia. Perda yang berkaitan dengan kebutuhan pasien thalasemia dan pelayanan pengobatannya hendaknya diprioritaskan. Selanjutnya, DPRD dapat memaksa keberadaan sentra atau unit khusus thalasemia di

RSUD agar dapat menjadi layanan pertama dan terpadu.

Sementara itu dengan adanya lembaga baru BPJS di sistem kesehatan, peran pengawasan seharusnya diperkuat. Penderita thalasemia bisa menghabiskan dana rata-rata sekitar 7-10 juta rupiah per bulan untuk pengobatan. Secara khusus untuk pasien thalassemia telah dijamin melalui program Jampelthas melalui keputusan Menteri Kesehatan RI no. 1109/menkes/Per/VI/2011. Pasien thalasemia yang tercakup dalam program Jampelthas berjumlah 1.665 orang dari 4420 orang penderita thalassemia yang ada di Indonesia. Proses untuk memperoleh Jampelthas hanya membutuhkan surat keterangan rekomendasi dari dokter yang menangani, kemudian akan diberikan kartu jaminan oleh Yayasan Thalassaemia Indonesia (YTI)/POPTI yang diberikan kepercayaan untuk mencetak dan mengeluarkan kartu jampelthas.

Namun dalam hal ini tidak semua masyarakat sadar akan manfaat dari layanan ini, karena hingga saat ini pasien thalassemia di Palangka Raya secara khusus belum tersosialisasikan dengan baik, dengan kata lain bahwa pihak rumah sakit pasif dalam menunggu pasien yang datang, pada bagian lain penderita pun jika tidak melapor dan memeriksakan diri juga tidak dapat didata. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu dibenahi yaitu dalam penanganan pasien thalassemia di Palangka Raya, termasuk diantaranya pemberdayaan orang tua pasien thalasemia, mekanisme Jampelthas, dan kelembagaan antara RSUD Doris Sylvanus dan POPTI. Khusus untuk penanganan pasien thalassemia RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya akan melalui mekanisme ODC (*One Day Care*), dimana pasien thalassemia menjalani rawat inap dan transfusi darah pada ruangan khusus yang hanya memberikan layanan perawatan satu hari. Didalamnya termasuk pelayanan obat-obatan serta bimbingan dari dokter dan perawat kepada yang benar-benar penderita, ataupun keluarga penderita. Sosialisasi pencegahan juga penting untuk menekan angka pertumbuhan penyakit ini agar tidak meningkat di masa yang akan datang. Cara paling efektif adalah dengan melakukan screening tes darah dan studi genetika bagi calon pasangan pengantin agar dapat mengetahui sifat pembawa gen thalassemia sejak dini. Pasien thalassemia harus berkonsultasi dengan dokter dan konselor genetika untuk mengurangi resiko terjadinya penurunan kelainan genetik kepada anak-anaknya.

KESIMPULAN

Pentingnya pembangunan manusia sebagai salah satu motor penggerak pembangunan dipengaruhi oleh berbagai aspek. Dimensi kesehatan merupakan faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa penyakit masih belum menjadi

perhatian utama dalam layanan kesehatan di rumah sakit. Thalasemia sebagai penyakit bawaan yang disebabkan oleh gangguan pembentukan hemoglobin adalah penyakit generatif. Penyakit ini diturunkan melalui ayah atau ibu yang membawa gen thalassemia. Karena penyakit ini belum ada sistem pengobatan permanen selain transfusi darah, maka sudah seharusnya pasien thalasemia menjadi perhatian lembaga kesehatan dimana pasien berada. Karena jumlah pasien yang fluktuatif dan banyaknya jumlah pasien yang tidak terdaftar atau melakukan pengobatan ke rumah sakit secara berkala, maka sulit dilakukan pendataan. Absennya sistem pendataan dan pencatatan menyebabkan informasi tentang pasien atau penderita thalasemia sangat minim di Palangka Raya, sehingga dibutuhkan sinergi antar banyak lembaga dalam perwujudannya kebijakan kesehatan yang berpihak pada pasien thalasemia.

Beberapa lembaga yang terkait dalam aktualisasi kebijakan kesehatan adalah pihak Rumah Sakit Umum Daerah, Palang Merah Indonesia, POPTI, Dinas Kesehatan, DPRD, dan BPJS sebagai penyedia jaminan layanan kesehatan Jampheltas. Secara politis, regulator yang memiliki kekuatan memaksa perda dan dapat mengalokasikan dana maupun fasilitas kesehatan untuk menangani kasus-kasus thalassemia di Palangka Raya. Selain itu pentingnya sosialisasi screening bagi pasangan yang akan menikah perlu diimplementasikan oleh agen-agen kesehatan agar dapat memutus tali rantai thalassemia sejak awal. Dan karena masyarakat sehat merupakan suatu cita-cita dan tujuan kesejahteraan bagi masyarakat, diperlukan sehat secara psikis maupun fisik agar tercipta masyarakat yang mampu menjadi agen pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari peran penderita thalassemia sebagai bagian dari masyarakat yang juga berhak atas layanan kesehatan yang optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan dapat berkontribusi dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambra, C., Fox, D. and Scott-Samuel, A. (2003) *A New Politics of Health. Politics of Health Group*, Liverpool
- Beckfield, J. and Krieger, N.(2009) *Epi + demos + cracy: linking political systems and priorities to the magnitude of health inequities – evidence, gaps, and a research agenda*, *Epidemiologic Reviews*, **31**, 1, 152–77.
- Feist, Jest dan J, Feist Gregory. (2014) *Teori Kepribadian Sehat*. Salemba Humanika: Jakarta
- Fromm, Erich (1956), *Sane Society*, First published by Routledge & Kegan Paul in the United Kingdom

- Moleong, Lexy J.(2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nagtimin, Rusli. H.M., (2005) *Dari Hippo Crates sampai Winslow dan pengembangan ilmu kesehatan masyarakat selanjutnya*. Makassar
- Navarro, V. (2002) *The Political Economy of Social Inequalities—Consequences for Health and Quality of Life*. Baywood, Amityville, New York.
- Navarro, V. and Shi, L. (2001) *The political context of social inequalities and health*. *International Journal of Health Services*, **31**, 1–21.
- Navarro, V., Muntaner, C., Borrell, C., Benach, J., Quiroga, A., Rodríguez-Sanz, M., et al. (2006). *Politics and health outcomes*. *Lancet*, **368**, 1033–1037.
- Tylor, E.B. 1974. *Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom*. New York: Gordon Press. First published in 1871. [ISBN 978-0-87968-091-6](#)
- Umar, Fahmi, 2008, *Horison Baru kesehatan masyarakat di Indonesia*

Kemiskinan Dan Balita Gizi Buruk di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

Rahma Syafitri

Program Studi Sosiologi Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji
rsyafitri77@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan balita gizi buruk yang terjadi akibat kemiskinan keluarga dengan menelusuri upaya keluarga balita gizi buruk dalam memenuhi asupan gizi pada balita. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik dan diskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan observasi dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner). Adapun populasi yang dapat dijadikan responden adalah masyarakat Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap yang berjumlah 315 KK, sedangkan sampel yang diambil sebesar 78 responden. Penelitian ini pada dasarnya akan menguji hipotesa antara kondisi kemiskinan keluarga, dan asupan gizi yang didapat didalam keluarga sebagai variabel pengaruh dengan status balita dalam hal ini yang akan dicermati yang berstatus gizi buruk sebagai variabel terpengaruh. Hasil penelitian ini menunjukkan dari perhitungan uji Korelasi Product Moment dapat dibuktikan bahwa ada hubungan antara kondisi kemiskinan keluarga dengan status gizi balita (balita gizi buruk) (Hk Diterima). Begitu juga dibuktikan bahwa ada pengaruh asupan gizi keluarga dengan status gizi balita (Hk diterima). artinya, dengan kata lain semakin tinggi asupan gizi balita maka akan semakin baik status gizi balita begitu juga sebaliknya apabila semakin rendah asupan gizi keluarga akan semakin rendah status gizi balita yang berakibat pada adanya gizi buruk. Adapun hasil penelitian dengan wawancara dan observasi mendalam tentang pola asupan gizi pada keluarga miskin tergambar bahwa keluarga miskin sangat jarang dapat memenuhi pola asupan gizi yang telah ditetapkan Dinkes, permasalahannya karena keterbatasan penghasilan yang hanya cukup untuk makan sedangkan gizi dan kandungan makanan tidak pernah diperhatikan oleh ibu rumah tangga sebagai pengatur bahan konsumsi keluarga.

Kata kunci: Balita gizi buruk, Kemiskinan keluarga, Pola makan, asupan gizi, MPASI, KEP, ASI, BBLR dan BGM

PENDAHULUAN

Persoalan kesehatan erat kaitan dengan terpenuhinya kebutuhan makan. Makanan yang dibutuhkan adalah makanan yang seimbang susunan zat gizi (nutrient). Ketidakseimbangan atau bahkan kekuarangan zat gizi berakibat pada keadaan kurang gizi. Apabila kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama maka dampak selanjutnya adalah semakin rentannya sistem kekebalan tubuh yang ditandai mudahnya terserang penyakit akibat kondisi gizi yang semakin memburuk.

Adapun kelompok yang paling rentan terhadap gizi ini adalah balita. Dinas kesehatan propinsi Bengkulu (2008 :12) menyebutkan usia balita antara 0-59 bulan, artinya kondisi kesehatan yang rentan dapat dibawa sejak bayi lahir. Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) salah satu penyebabnya karena ibu hamil yang menderita kekurangan gizi. Kondisi ini dapat mengakibatkan pertumbuhan janin terganggu terutama pertumbuhan dan perkembangan mental anak, serta berpengaruh pada penurunan kecerdasan.

Semua usaha pemenuhan kebutuhan kesehatan termasuk di dalamnya persoalan makan dan gizi tidak terlepas dari persoalan ekonomi, artinya persoalan kesehatan (gizi) dan ekonomi (kemiskinan) bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan timbal balik. Sebagaimana disebutkan Soekirman (2007:3) sebagai berikut:

Kurang gizi berpotensi sebagai penyebab kemiskinan melalui rendahnya pendidikan dan produktivitas. Sebaliknya, kemiskinan menyebabkan anak tidak mendapatkan makanan yang bergizi yang cukup sehingga kurang gizi dan seterusnya. Kemiskinan merupakan penghambat keluarga untuk memperoleh akses terhadap ketersediaan makanan yang bergizi, seimbang dan layanan dan informasi kesehatan.

Hendrizal (dalam Wawasan Koran Sore, Sabtu, 26 Januari 2008) menyebutkan bahwa, menurut laporan UNICEF pada tahun 2006 jumlah anak di bawah usia lima tahun (balita) yang bergizi buruk di Indonesia mencapai 2,3 juta jiwa. Ini berarti naik sekitar 500.000

jiwa dibandingkan dengan data tahun 2004/2005 sejumlah 1,8 juta jiwa. Di luar 2,3 juta penderita gizi buruk masih ada 5 juta lebih yang mengalami gizi kurang. Jumlah gizi buruk dan gizi kurang ini sekitar 28% dari total balita diseluruh Indonesia. Dari jumlah balita penderita gizi buruk sekitar 10 % yang berakhir dengan kematian.

Kondisi diatas juga terdapat di Propinsi Bengkulu, dimana dari profil kesehatan propinsi Bengkulu tahun 2009 dari jumlah balita yang ada sekitar 189.221 ada 2.825 anak yang mengalami gizi buruk. Adapun dari tiap kabupaten yang paling banyak penderita gizi buruk pada kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 1.592, lalu disusul dengan Rejang Lebong sebanyak 262 balita, Kaur sebanyak 196 balita, Kepahyang sebanyak 183 balita, Muko-muko 149, Kota Bengkulu 94 dan Bengkulu Selatan 16 balita. Jumlah ini masih dimungkinkan bertambah karena kondisi ekonomi yang semakin sulit, terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah yang sulit untuk membeli susu sebagai makanan tambahan bagi anak balita.

Kecamatan Kerkap (salah satu kecamatan yang ada di Bengkulu Utara) pada tahun 2009 mempunyai 11.487 balita dan ada 3.171 balita yang ditimbang berat badannya. Dari 3.171 balita yang ditimbang beratnya ada 345 yang tercatat mengalami gizi buruk (profil kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara). Maka penelitian akan memfokuskan hanya disalah satu desa yaitu desa Penyangkak yang terdata memiliki 10 kasus balita yang terindikasi gizi buruk (Buku pemantauan Balita Posyandu desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara 2009)

Berdasarkan pokok pemikiran yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk menggali lebih lanjut mengenai permasalahan gizi buruk dan kemiskinan. Adapun penelitian sebelumnya yang pernah ada seperti yang dilakukan oleh Yusra (2003) dengan Judul, “Perilaku Gizi Wanita Nelayan Sehubungan Dengan Tingginya Prevalensi Busung Lapar Di Sumatera Barat”. Kemudian juga ada penelitian Yuli Heirina Hamid (2001) “Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Dan Status Gizi Balita Pada Keluarga Pra Sejahtera”. Maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana keluarga miskin dalam memberikan asupan gizi pada balita yang terindikasi gizi buruk. Serta upaya pemerintah dalam mengatasi kasus balita gizi buruk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- Apakah kaitan antara kondisi keluarga miskin dan asupan gizi yang diberikan berpengaruh pada status gizi balita (balita gizi buruk) ?

Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kaitan antara kondisi keluarga miskin dan asupan gizi yang diberikan berpengaruh pada status gizi balita. Kemiskinan keluarga dilihat dari penghasilan keluarga terutama para petani buruh yang penghasilan hariannya tidak tetap dan sangat ditentukan oleh musim. Sedangkan kebutuhan anak balita tetap setiap hari harus ada terutama pada balita yang masih di bawah usia 5 tahun untuk memberikan asupan makanan. Oleh karena itu dapat diketahui pola keluarga miskin dalam memberikan asupan makanan pada balita

METODE

Metode penelitian dalam tulisan ini merupakan metode kuantitatif tentang kaitan antara kemiskinan dan balita gizi buruk studi kasus yang dilaksanakan di desa Penyangkak, Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mendapatkan responden maka dilakukan penarikan populasi dan sampel. Jumlah sampel yang diambil secara proporsional dan representatif berdasarkan hasil pendataan seluruh populasi desa Penyangkak berjumlah 315 KK dan jumlah anak balita ada sekitar 88 anak. Jumlah sampel yang diambil ada 78 responden. Bahan dan alat yang digunakan meliputi daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah dipersiapkan (disusun) sebelumnya. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah disiapkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan meliputi: umur ibu rumah tangga, pekerjaan, tingkat pendidikan ibu rumah tangga, kondisi kemiskinan keluarga, asupan gizi keluarga, dan kondisi balita gizi buruk. Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik (Singarimbun:1989: 64). Maka peneliti dalam menganalisa data primer yang terkumpul dengan cara perhitungan statistik yang menggunakan paket komputer SODA (Sistem Online Dietary Analysis). Hubungan antar variabel yang dianalisa dengan korelasi *product moment (rank product moment correlations)* (steel dan Torrie, 1987).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data Hasil Penelitian

Data penelitian yang disajikan di sini adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner terhadap 78 orang responden. penelitian ini dilakukan di desa Penyangkak yang dimulai pada bulan September sampai dengan 30 Oktober 2010. Data-data yang diperoleh diantaranya mengenai :

Karakteristik Responden

Karakteristik responden meliputi umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan per bulan. Dari 78 responden dalam penelitian ini terdiri dari ibu-ibu muda yang paling banyak persentasenya sekitar 55,1% berusia 20-30 tahun. Responden ibu-ibu muda ini cukup banyak di desa Penyangkak, hal ini dikarenakan banyaknya penduduk desa Penyangkak melakukan pernikahan pada usia muda, yaitu lebih kurang 16 tahun ke atas. Pernikahan pada usia 16 tahun merupakan hal yang biasa bagi masyarakat desa Penyangkak karena pada umur tersebut anak perempuan dianggap sudah siap untuk membentuk rumah tangga. Apabila pada usia lebih di atas 16 tahu, atau lebih kurang 24 tahun sudah dianggap gadis tua dan tidak laku lagi. Pernikahan pada usia lebih kurang 16 tahun dilakukan biasanya karena anaknya hanya sekolah sampai tamat SD atau SLTP, sedangkan responden yang menamatkan pendidikan setingkat SLTA dan Perguruan Tinggi biasanya menikah pada usia lebih kurang 20 tahun.

Dari 78 orang responden rata-rata hanya menjadi ibu rumah tangga saja dan membantu suami berkebun atau berladang. Namun ada juga yang bekerja sebagai buruh pemecah batu atau menjadi wiraswasta serta Pegawai Negeri Sipil. Responden yang Aktivasnya banyak di kebun atau di ladang, serta ada yang menjadi buruh adalah mereka yang hanya menamatkan pendidikan di SD atau SLTP. Ditinjau dari jenis pekerjaan, dan menurut besarnya pendapatan per bulan, sebagian besar responden berada pada kelompok pendapatan kurang dari Rp.500.000,-, informasi ini apabila digali dengan cukup dalam dengan wawancara yang harus memakan waktu. Di mana peneliti berusaha dekat secara emisional dan harus hati-hati karena sebagian besar responden keberatan menyebut nominal secara langsung. Hal tersebut dapat terungkap jika kita mulai menyinggung harga barang yang terus merangkak naik sedangkan pendapatan mereka jarang yang bertambah besar

Uji Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 78 orang responden, maka dapat diketahui frekuensi jawaban masing-masing responden. Jawaban yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji korelasi product moment (r_{xy}). Dari perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan Harga Kritik r (tab) pada taraf signitifikan 5% diterima atau ditolak. Selanjutnya perhitungan akan dilanjutkan dengan uji korelasi partial untuk mengetahui hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent yang dikontrol oleh variabel r , yang hasil perhitungannya akan

dikonsultasikan test signifikansi partial pada taraf signifikan 5 % dapat di lihat pada lampiran.

Dari hasil penelitian atau skoring terhadap 42 item pertanyaan sesudah ditabulasikan diperoleh hasil total skor dari jawaban responden pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Total Skor Jawaban Responden
Variabel Jumlah Kuadrat Sel
 X_i 37571838111
 X_2 190446656
 Y 3192130752
 $X_i Y$ 153972

$\bar{X}_2 Y$ 77956

$X_i X_2$ 91948

Sumber : penelitian primer 2010

Dimana :

X_1 = Variabel pengaruh (kemiskinan keluarga)

X_2 = Variabel Pengaruh (asupan gizi)

Y = Variabel terpengaruh (status gizi)

PEMBAHASAN

Studi ini membahas hubungan antara variabel pengaruh dengan variabel terpengaruh. Variabel pengaruh terdiri dari Kondisi kemiskinan keluarga (X_i), Asupan gizi (X_2). Sedangkan variabel terpengaruh adalah status gizi anak (Y). Setelah diketahui total skor masing-masing variabel analisa diteruskan dengan menggunakan rumus product moment. Ringkasan hasil uji Korelasi Product moment tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Ringkasan Korelasi Product Moment
Korelasi r hitung Tabel (5%) Keterangan
Hipotesis
 $r_{X_1 Y}$ 0.375 0.232 Signifikan Hk diterima
 $r_{X_2 Y}$ 0.257 0.232 Signifikan Hk diterima
 $r_{X_1 X_2}$ 0.334 0.232 Signifikan Hk diterima
Sumber : penelitian primer 2010

Setelah diketahui bahwa hubungan antara variabel X_1 , X_2 dan Y dalam uji korelasi *product moment* adalah signifikan. Dari uji statistik tersebut maka diketahui hasil hitungnya lebih besar dari pada harga tabel dengan taraf 5% ini berarti bahwa terdapat hubungan signifikan antara kemiskinan keluarga dengan status gizi. Begitu juga variabel asupan gizi dengan status gizi balita juga terdapat hubungan yang signifikan pada taraf 5%. Sementara itu untuk variabel kemiskinan keluarga dengan asupan gizi keluarga juga terdapat hubungan yang signifikan pada taraf 5%.

Langkah selanjutnya adalah menguji keeratan hubungan tersebut dengan menggunakan korelasi parsial. Ringkasan hasil korelasi parsial tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3

Ringkasan Hasil Korelasi Parsial

Korelasi r hitung r tabel (5%) Keterangan

r_{X1Y} 0.317 2.000 Signifikan

r_{X2Y} 0.151 2.000 Signifikan

Sumber: Penelitian primer 2010

Dari hasil uji statistik tersebut dapat diketahui bahwa apabila hubungan variabel kondisi kemiskinan dan status gizi dikontrol oleh variabel asupan gizi maka harga hitungnya lebih besar dibanding harga tabel, berarti bahwa hubungan antar variabel status dengan tindakan dikontrol oleh variabel asupan gizi sangat erat. Sementara itu apabila variabel asupan gizi dengan tindakan kontrol oleh variabel kondisi kemiskinan maka harga hitung lebih kecil dibanding harga tabel, ini berarti hubungan antara ke tiga variabel tersebut lemah.

1. Hubungan kemiskinan keluarga (XI) dengan status gizi balita (Y)

Dari perhitungan uji korelasi product moment, diketahui bahwa ternyata ada korelasi antara kemiskinan keluarga dengan status gizi balita (Hk diterima), artinya kondisi kemiskinan keluarga berpengaruh terhadap status gizi balita, kemiskinan keluarga membuat ibu sebagai pihak yang mengelola makanan untuk anggota keluarga untuk benar-benar berhemat. Tuntutan kebutuhan yang banyak sedangkan penghasilan yang ada terbatas.

Rendahnya tingkat pendapatan bergantung pada jenis pekerjaan yang menjadi pilihan yang diduga mempunyai keterkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sehingga untuk mengakses peluang pekerjaan dengan upah yang lebih baik relatif sulit. Sebagaimana hasil penelitian Gunawan dan Sugiyanto (2005:8) ditinjau dari aspek pendidikan kelompok miskin berpendidikan rendah (SD ke bawah) sebesar 69,4%. Hal ini juga sesuai dengan kondisi di desa Penyangkak rata-rata responden yang kondisi penghasilannya terbatas atau tidak tetap kebanyakan berasal dari tingkat pendidikan yang rendah yaitu hanya tamat SD saja. Mereka hanya mampu bekerja kasar seperti menjadi buruh tani atau pemecah batu. Dimana kalau buruh tani hanya diupah sebesar Rp 10.000 - Rp.15.000,- sedangkan pemecah batu butuh waktu paling tidak setengah bulan sampai sebulan agar dapat terkumpul dan dapat dijual. Minimal toke baru mau membeli setelah terkumpul satu- dua kwintal yang harganya berkisar Rp. 100.000 – Rp. 150.000/ kwintalnya.

Melihat kondisi seperti ini lanjut Gunawan dan Sugiyanto keluarga miskin untuk untuk keluar dari permasalahan kemiskinan relatif sulit. Pada kasus ini, pendapatan (hasil), keterampilan dan pendidikan yang rendah merupakan suatu rantai. Keduanya saling berkaitan dan saling berpengaruh. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan pandangan dan saling berpengaruh. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan pandangan dari Jalaludin Rachmat (dalam Gunawan dan Sugiyanto,2005 : 8), bahwa produktivitas yang rendah, pendapatan yang rendah menyebabkan pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah mengakibatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang rendah, kualitas SDM yang rendah menyebabkan produktivitas yang rendah dan terus begitu. Rangkaian tersebut sering disebut sebagai vicious circle atau lingkaran kemiskinan.

Dari realitas diatas, keluarga miskin masih tetap bertahan hidup dalam berbagai kondisi termasuk dalam kondisi krisis sekalipun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sekecil apapun mereka mempunyai potensi untuk survive. Mereka pada dasarnya bukan masyarakat yang malas bekerja. Menurut Gunawan dan Sugiyanto (2005:10) mobilitas pekerjaan mereka relatif tinggi sehingga menuntut alokasi waktu untuk bekerja rata-rata lebih dari 10 jam perhari. Dan dari hasil penelitiannya juga diketahui 38,10% responden mencari penghasilan tambahan. Jenis pekerjaan untuk memperoleh penghasilan tambahan cukup bervariasi, antara lain bekerja sebagai buruh, pedagang, peternak, perajin, tukang kayu, nelayan dan jasa.

Begitu juga dengan masyarakat miskin yang tinggal di desa Penyangkak banyak diantara mereka mencari pekerjaan tambahan agar mencukupi kehidupan keluarga mereka. Bahkan anak mereka pun menjadi potensi untuk membantu mencari nafkah. Contohnya pada keluarga yang menjadi buruh tani, ayah merupakan pencari kerja yang memiliki peluang kerja paling luas dalam merumput atau menyadap karet, sedangkan ibu dalam berbagai faktor seperti menjaga bayi atau balita, merawat balitanya ketika sakit, hamil dan melahirkan tidak dapat bekerja.

Ketidakhadiran ibu dalam bekerja sangat mempengaruhi jumlah peluang merumput yang di dapat. Jika jumlah tenaga kerja adalah 2 orang maka lahan yang luasnya berada di bawah 1 ha dapat diselesaikan dalam jangka waktu setengah hari saja, dengan demikian buruh tani dapat memiliki peluang untuk merumput 2 kali di lahan yang berbeda. Jika buruh tani dalam 1 hari dapat menyelesaikan merumput di dua lahan maka jumlah pendapatan yang diterimapun akan lebih besar. Hilangnya 1 pencari kerja yang menyebabkan hilangnya pula 1 peluang kerja bagi

keluarga miskin.

Penghasilan keluarga gizi buruk berasal dari pekerjaan tani yang merupakan pekerjaan pokok kepala rumah tangga responden. Adapun pekerjaan sampingan biasa yang diambil oleh ibu rumah tangga. Mereka biasanya memecah batu yang dilakukan didepan rumah. Biasanya batu-batu tersebut diangkut oleh anak dan bapak dari sungai ketika mereka mandi setidaknya dua kali sehari, baik pagi maupun sore hari. Lalu ibulah yang bertugas memecahkan batu, pekerjaan ini dilakukan setelah ibu menyelesaikan pekerjaan di rumah.

Dari sekian banyak jenis pekerjaan sampingan hampir semuanya dilakukan oleh si ibu. Pada prinsipnya bagi keluarga balita gizi buruk pekerjaan apa saja yang penting halalakan mereka terima seperti mengecat pagar rumah tetangga atau membantu merumput pekarangan warga lain yang mampu. Pekerjaan mereka sangat variatif dan tergantung dengan peluang yang ada pada mereka.

Adapun penghasilan keluarga balita gizi buruk secara keseluruhan tidak dapat ditetapkan perbulannya sebab setiap keluarga jumlah penghasilannya tidak menentu. Dari penelitian diketahui sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sifat pengeluarannya harian. Penghasilan yang diperoleh selalu dikeluhkan serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi ada pengeluaran yang sifatnya mendadak maka mereka tidak mempunyai tabungan.

Adapun kebutuhan-kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, yang meliputi beras, sayur mayur, lauk, minyak serta kebutuhan dapur lainnya merupakan hal yang diutamakan ada, walaupun terkadang kalau memang tidak ada uang mereka biasanya berhutang ke warung dan membayarnya kalau sudah punya uang. Uang yang didapat dari merumput oleh suami diserahkan seluruhnya pada istri. Biasanya para istri akan melihat ketersediaan beras lalu sayur dan lauk. Kemudian kebutuhan sandang meliputi kebutuhan pakaian yang biasanya hanya dapat diusakan dibeli setahun sekali khususnya untuk moment idul fitri. Adapun papan sebagai kebutuhan pokok, rata-rata keluarga miskin tinggal menetap di rumah keluarganya atau menyewa, walaupun mereka sudah punya rumah sendiri kondisinya masih minim dan semi permanen.

Prioritas pemenuhan kebutuhan makan keluarga terbesar masih terletak pada kebutuhan akan beras, sebab beras adalah makanan pokok bagi keluarga balita gizi buruk dan bagi seluruh penduduk desa Penyangkak.

Upah yang didapat oleh keluarga balita gizi buruk digunakan untuk membeli beras ataupun untuk membayar utang di warung. Lauk pauk yang mereka seperti tempe, tahu, ikan asin dan ikan teri dibeli dari warung terdekat atau kalau ada tukang sayur. Sedangkan telur jarang mereka konsumsi walaupun ada hanya untuk balita mereka sekali-kali. Adapun daging, ikan dan ayam lebih sulit lagi mereka dapatkan. Walaupun pernah hanya diberi dari sisa lauk saat ada yang pesta di desa itupun kalau kenal dan membantu pelaksanaan pesta atau ada di momen-momen tertentu misalnya di hari raya kurban.

Untuk itu orang tua berusaha keras agar anak mereka tetap makan walaupun dengan jumlah yang terbatas, disebabkan untuk mengolah makanan sebagian besar harus di beli sedangkan kemampuan keluarga terbatas dalam membeli untuk konsumsi makanan setiap hari. Lalu dalam upaya mencegah anak berstatus gizi buruk, ibu tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang penting gizi. Kebiasaan makan yang penting kenyang, menyebabkan ibu cenderung tidak melakukan tindakan pemberian makanan yang bergizi untuk anak. Namun pengetahuan tersebut tidak harus dipengaruhi oleh tingkat pendidikan responden. Hal itu dikarenakan walaupun responden berpendidikan SD dan SLTP tetapi mereka bisa saja memiliki pengetahuan yang tentang gizi seimbang. Walaupun pengetahuan tersebut dapat diperoleh dan proses pengalaman responden, dan apabila sang ibu mau mengikuti sosialisasi posyandu memberikan informasi kepada masyarakat serta sudah masuknya media cetak dan elektronik di desa Penyangkak. Jadi kondisi kemiskinan keluarga akan sangat menentukan status gizi balita.

Pada keluarga yang miskin ibu dan ayah sibuk mencari penghasilan, terkadang mereka tidak terlalu memperhatikan jenis makanan, variasi atau gizi yang terdapat dalam pemenuhan kebutuhan makanan karena keterbatasan ekonomi. Apalagi ibu juga tidak punya pengetahuan yang benar terhadap pola asuh dan kesehatan keluarga. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat ibu dan ayah tidak terlalu memperhatikan kesehatan tempat tinggal karena banyak kesibukan yang harus mereka selesaikan. Lalu terkadang karena keterbatasan mereka harus pandai-pandai membagi waktu antara mengasuh dan mencari tambahan belanja. Ditambah lagi mereka biasanya lalai ikut menimbang bayi mereka ke posyandu yang ada di desa. Berdasarkan info dari kader posyandu dan buku pantauan bulanan hanya 45 % warga yang punya balita rutin ke Posyandu sedangkan sisanya mereka merasa tidak terlalu penting dan menganggap kalau anak mereka sehat-sehat saja.

2. Hubungan Asupan gizi (X2) dengan status gizi balita (Y)

Makanan yang dibutuhkan adalah makanan yang berguna untuk kesehatan terutama bagi balita, sebab dalam siklus manusia balita berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat dan salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi kondisi kesehatan balita adalah makanan yang diberikan. Adapun makanan yang diberikan adalah makanan yang kandungan zat gizinya seimbang yang punya nilai sangat penting (Marsetyo, 1991:2)

Balita dapat memperoleh asupan gizi yang berasal dari dalam tubuh ibu yang mana asupan itu diperoleh balita sedang masa disusui dan asupan yang berasal dari makanan yang diberikan pada balita. Perbedaan usia menyebabkan perbedaan dalam ketentuan dalam pemilihan dan penentuan jenis-jenis makanan yang mesti dan tidak boleh dimakan, kuantitas dan kualitas makanan. Asupan gizi keluarga sangat ditentukan oleh makanan yang diolah oleh ibu rumah tangga, hampir setiap rumah tangga yang menjadi responden kebutuhan makannya ditentukan oleh ibu rumah tangga. Pemilihan dan pengolahan makanan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan keluarga dan keterampilan ibu dalam mengolah makanan.

Melihat kebutuhan seorang bayi akan ASI eksklusif maka kesehatan ibu posisinya menjadi penting. Dalam buku Praktis Ahli Gizi yang ditulis oleh jurusan gizi Malang (2005: 4), menyebutkan bahwa pada saat menyusui ibu memerlukan tambahan energi dan zat-zat gizi, dibutuhkan pula lebih banyak cairan, menambah konsumsi kalsium dan zat besi yang tinggi. Ibu yang sehat akan menghasilkan ASI yang berkualitas, sebab pada masa seorang anak hanya menerima ASI saja (ASI eksklusif) maka apa yang dimakan ibu itulah yang menjadi serapan ASI bagi anaknya sehingga selama masa menyusui ibu mesti memperhatikan masalah menu makanan dan frekuensi makan.

Dari perhitungan uji statistik product moment, diketahui bahwa ternyata ada korelasi antara asupan gizi keluarga terhadap status gizi balita (Hk diterima), dengan kata lain semakin tinggi asupan gizi balita maka akan semakin baik status gizi balita begitu juga sebaliknya apabila semakin rendah asupan gizi keluarga akan semakin rendah status gizi balita. Dimana kaitan asupan gizi balita sangat ditentukan oleh asupan gizi yang diperoleh dari ibunya. Apabila ibu selama menyusui tidak memenuhi unsur-unsur makan ibu, maka unsur gizi akan diambil dari tubuh ibu sendiri sendiri sehingga dapat menyebabkan ibu mudah menderita penyakit defisiensi yang akut.

Kurangnya produktivitas ASI dan terganggunya kondisi kesehatan adalah dua hal yang saling berkaitan. Yuliani (2006:5) menyebutkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi produktivitas ASI antara lain adalah status gizi dan makan/ minum yang dikonsumsi. Status gizi erat kaitannya dengan persoalan makan dan minum. Sementara itu persoalan makan dan minum memiliki efek pada kondisi sehat dan sakit seseorang. Makan dengan menu, gizi dan pola yang baik menjadikan makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat membantu fungsi kerja dari sebuah sistem kehidupan bernama tubuh manusia termasuk didalamnya sistem produktivitas ASI. Padahal pada usia 0-6 bulan setiap anak dianjurkan hanya mendapatkan ASI eksklusif. Namun pada keluarga yang asupan gizinya terbatas, dan ibu sebagai sentral asupan gizi bayi juga mendapatkan asupan gizi yang seadanya, tanpa ada penambahan konsumsi selama hamil dan menyusui menyebabkan ASI ibu kurang berkualitas. Bahkan terkadang tidak keluar sehingga bayi yang seharusnya hanya mendapatkan ASI juga diberikan asupan gizi lain seperti madu, pisang dan susu formula.

Pada dasarnya frekuensi makan yang baik bagi seorang anak pada usia pertumbuhan yang sangat pesat adalah 3 kali sehari, namun sebagian besar balita gizi buruk memiliki frekuensi makan 2 kali. Hal ini disebabkan para ibu baru selesai masak ketika hari telah tinggi sekitar pukul 10.00 wib, sehingga di pagi hari balita hanya di beri ASI/ susu. Lalu anak makan siang bersamaan dengan jadwal makan orang tua mereka. Kalau ada kecukupan uang saja balita diberi makanan tambahan, seperti biskuit, roti dll. Namun jika tidak balita hanya diberi makanan seadanya, sesuai dengan makanan yang ada di keluarga. Sehingga akibatnya balita yang kekurangan gizi dan tidak pernah mendapatkan asupan gizi yang berimbang dalam jangka waktu yang lama akan berdampak pada status balita. Status gizi buruk akan dapat disandang jika anak sudah memiliki tanda berat badan yang tidak berimbang dengan umur selama 3 bulan berturut-turut, maka harus ditangani segera dengan pemberian makanan tambahan yang bergizi berimbang.

Seperti yang disampaikan gizi buruk adalah kondisi tubuh yang tampak sangat kurus karena makanan yang dimakan setiap hari tidak dapat memenuhi zat gizi yang dibutuhkan, terutama kalori dan protein (Astuti,2005:1), sehingga terjadi ketidakseimbangan antara berat badan, tinggi badan dengan umur. Konsep ini sejalan dengan Nancy (2005:3) yang menyebutkan gizi buruk (severe malnutrition) diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur atau panjang badan dengan rujukan (standar yang telah ditetapkan). Bila berat badan menurut umur sesuai

dengan standar anak tersebut gizi baik, sedikit di bawah standar di sebut gizi buruk. Perbandingan antara umur, berat badan dan tinggi badan pada balita dapat dipantau saat penimbangan balita di Posyandu, yang hasil perkembangannya tiap bulan tertera pada lembaran Kartu Menuju Sehat (KMS).

Namun sangat disayangkan terkadang masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan ekonomi, menyebabkan mereka sibuk mencari penghasilan dan ketika kesibukan mencari nafkah sesuai dengan observasi peneliti membuat mereka tidak terlalu memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang kurang tentang gizi berimbang dan kondisi kesehatan anak yang tidak pernah dikontrol maka status gizi anak tidak pasti. Status gizi anak yang tidak pernah diketahui inilah biasanya lama-kelamaan baru diketahui gizi buruk jika pola asuh dan pemerintah khususnya badan tidak mendekatkan diri untuk memberi pemahaman dan pendekatan agar mengikuti program posyandu.

Sekarang sudah saatnya masalah gizi anak balita ini ditangani dengan lebih terintegrasi, melibatkan unsur masyarakat dan organisasi setempat, dengan meningkatkan kesadaran pentingnya penimbangan bulanan untuk mendeteksi kemungkinan adanya gangguan pertumbuhan yang akan menjadi tanda awal terjadinya masalah gizi. Bila hal ini dapat dilasanakan dengan baik, maka gangguan pertumbuhan dapat diatasi lebih dini dan masalah gizi buruk tidak akan muncul. Harus disadari bahwa anak balita merupakan calon generasi penerus bangsa, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan.

Bila kita kaji dari hasil temuan kasus lalu dikaitkan dengan sebab-akibat timbulnya masalah gizi buruk, kejadian masalah gizi buruk bukan semata-mata tanggung jawab Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan di daerah. Masalah ini jelas disebabkan oleh berbagai faktor yang pada akhirnya mengerucut sehingga si anak tidak mendapat asupan gizi yang cukup selama kurun waktu yang lama. Mungkin karena ketiadaan pangan di rumah tangga, yang apabila dikaji penyebabnya akan sangat banyak dan tidak berkaitan dengan sektor kesehatan. Atau mungkin karena kelalaian orangtua dalam pengasuhan bayi dan anak balita, sehingga asupan gizi untuk anak tidak terawasi dengan baik, sehingga timbul masalah gizi buruk.

3. Pola Asupan Gizi Pada Keluarga Miskin

Pemberian asupan makanan pada keluarga miskin dalam penelitian yang dilakukan di desa Penyangkak dapat digambarkan dengan melihat menu makan dan frekwensi makan pada balita sesuai dengan standar Dinkes atau sebaliknya, maka dapat digambar sebagai

berikut:

1. Pada anak umur 0-6 bulan (ASI Eksklusif)

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan anak-anak yang balita gizi buruk yang teridentifikasi di desa tidak mendapat ASI eksklusif. Mereka paling lam 2-4 bulan dalam memberikan ASI. Hal tersebut bukan karena sang ibu tidak mau memberikan ASI eksklusif namun ASI sang tidak keluar setelah 4 bulan. Hal tersebut terjadi karena asupan makanan yang ada dalam tubuh sang ibu juga kurang. Akhirnya terpaksa mereka memberikan makanan tambahan seperti madu atau susu formula.

2. Pada anak umur 7-12 bulan

Berdasarkan penelitian dapat digambarkan pada keluarga miskin anak-anak mereka yang berusia 7-12 bulan diberi makana nasi tim, susu formula dan tepung beras. Namun yang sering diberikan pada balita adalah tepung beras atau nasi tim. Kandungan yang diberikan dalam pemberian makan tambahan ini juga seadanya tidak ada variasi atau ragam makanan. Frekwensinya hanya sekitar 3 – 4 kali sehari.

3. Pada anak umur 12- 24 bulan

Pada umur ini sebenarnya anak sudah diharuskan lebih banyak mengkonsumsi berbagai jenis dan variasi makanan. Namun makanannya masih diolah secara lembik. ASI masih diberikan namun tidak sesering ketika bayi. Anak-anak biasanya oleh ibu sudah diberikan makanan apa saja yang dia bisa makan. Misalnya gorengan itu diberikan juga oleh ibu, atau kerupuk. Sebenarnya hal tersebut tidak masalah jika hanya sekali-kali, namun yang terjadi sering ibu hanya memberikan makanan yang disukai anak asal dia tidak cengeng dari pada mengusahakan makanan yang sehat dan berimbang.

4. Pada anak umur 24-60 bulan

Pada usia ini asupan gizi anak sangat tergantung dengan asupan gizi keluarga. Apa yang disediakan ibu itulah yang akan di makan oleh seluruh anggota keluarga. Ada yang terkadang apabila ada kelebihan uang memberikan makanan selingan seperti bubur kacang ijo dan bikuit namun hal tersebut jarang terjadi.

Maka hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya dari Antoni (2005:470) bahwa anak-anak yang tinggal di desa Penyangkak yang kondisi ekonomi yang miskin kebanyakan tidak memenuhi standar gizi atau susunan pola makan yang telah ditetapkan oleh Dinkes. Alasan utamanya adalah keterbatasan ekonomi untuk pemenuhan asupan makanan yang ideal. Lalu ketidakpahaman tentang asupan gizi berimbang serta kondisi kesehatan ibu yang juga tidak pernah

diperhatikan dengan baik.

Permasalahan kesehatan semacam gizi buruk adalah permasalahan yang multifaktor yang tidak hanya sekedar permasalahan ekonomi yang kemudian perbaikan ditataran ekonomi sehingga menjadi selesai. Keberadaan lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan dimana keluarga bertempat tinggal turut membantu dalam pengentasan kemiskinan dan gizi buruk. Keluarga miskin seperti keluarga gizi buruk merupakan bagian dari masyarakat yang kompleks memiliki keterlibatan dengan berbagai komponen masyarakat yang ada di dalamnya.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dan hasil pembahasan data penelitian, dari perhitungan uji Korelasi Product Moment dapat dibuktikan bahwa ada hubungan antara kondisi kemiskinan keluarga dengan status gizi balita (balita gizi buruk) (Hk Diterima). Intinya, kondisi kemiskinan keluarga dapat mempengaruhi status gizi. Karena anak yang kekurangan gizi biasanya berawal dari keluarga yang pendapatannya kurang sehingga makanan yang disediakan seadanya, dengan prinsip yang penting kenyang tanpa pernah peduli dengan kandungan protein, vitamin serta hal-hal didalamnya. Menyebabkan anak yang berada dalam kondisi ekonomi sulit juga sulit mendapatkan akses kesehatan yang memadai, sehingga tubuh anak yang masih mudah terserang penyakit. Anak-anak inipun ketika sakit ditangani dengan pengobatan sederhana yang tidak banyak mengeluarkan uang. Maka kondisi inilah yang rentan menjadikan anak mendapatkan status gizi kurang karena berat badannya jarang naik dan jauh dari berat badan ideal.

Selanjutnya dari perhitungan uji statistik Product Moment, dibuktikan bahwa ada asupan gizi keluarga dengan status gizi balita (Hk diterima). artinya, dengan kata lain semakin tinggi asupan gizi balita maka akan semakin baik status gizi balita begitu juga sebaliknya apabila semakin rendah asupan gizi keluarga akan semakin rendah status gizi balita. Dimana kaitan asupan gizi balita sangat ditentukan oleh asupan gizi yang diperoleh dari ibunya. Apabila ibu selama menyusui tidak memenuhi unsur-unsur makan ibu, maka unsur gizi akan diambil dari tubuh ibu sendiri sendiri sehingga dapat menyebabkan ibu mudah menderita penyakit defisiensi yang akut. Pembuktian tersebut menunjukkan hipotesa kerja (Hk) peneliti terbukti

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih pada program studi Antropologi Universitas Padjajaran untuk memberikan kesempatan agar tulisan ini di presentasikan dalam seminar nasional dengan tema “Budaya dan Politik”.

DAFTAR PUSTAKA:

- Antoni, Herwan.2005.Hubungan Pola Makanan Pendamping ASI dengan Pertumbuhan dan Perkembangan Motorik Kasar Bayi. Sains Kesehatan. Jurnal. Bengkulu: Universitas Bengkulu
- Apriansyah, Joni. 2006. Kemiskinan Petani Penggarap. Skripsi. Bengkulu : Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bengkulu.
- Hamid, Yuli Heirina.2001. Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga dan Status Gizi Balita pada Keluarga Pra Sejahtera. Jurnal Mon Mata. Banda Aceh: Lembaga Penelitian Syiah Kuala
- Wiyono,Nur Hadi.2007. Isu-Isu terkini Tentang Kependudukan : September-Oktober 2007. Warta Demografi. Depok: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
- Yusra.2003.Perilaku gizi wanita Nelayan Sehubungan dengan Tingginya prevalensi Busung Lapar di Sumatera Barat. Jurnal Pemberdayaan Perempuan. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI
- Anonim, 2010.Data Penduduk Desa Penyangkak 2010. Desa Penyangkak. Bengkulu
- Departemen Kesehatan RI.2008.Buku Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu. Jakarta
- Departemen Kesehatan RI.2008. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta
- Dinas Kesehatan.2009. Profil Kesehatan Propinsi Bengkulu 2008. Bengkulu
- Dinas Kesehatan.2010. Profil kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara. 2009.Bengkulu
- Anonim, 2005. Busung Lapar dan Hunger Paradox.www.mail.archive.com
- Astuti,Marfuah Panji.2005. Ciri-ciri Kurang Gizi.www.gizi.net
- Gunawandan Sugiyanto.2005.Kondisi Keluarga Fakir Miskin.www.depsos.go.id
- Hendrizal.2008.Gizi Buruk Apa Akarnya? Dalam Wawasan Koran Sore Sabtu 26 Januari 2008.
- Khomsan, Ali.2003. Pangan dan Kemiskinan.www.suarapembaharuan.com
- Nayla. 2006. Beda Kurang Gizi dan Gizi Buruk. www.artikel.seputar.bayi.blogspot.com

- Nancy, Yeti dan M. Thoha Arifin. 2005. Gizi Buruk, Ancaman Generasi Yang Hilang. www.io.jepang.org/article
- Soekirman. 2007. Gizi Buruk, Kemiskinan, dan KKN. www.gizi.net
- Tatang, S. 2002. Hubungan Otak Kosong dengan Gizi Buruk dalam Hari-hari Umum Sore Sinar Harapan Jumat 25 Januari 2008
- Barnard, A. 2011. *Social Anthropology and Human Origins*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barth, F. 2003. In F. Barth, A. Gingrich, R. Parkin, & S. Silverman, *One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology*. (p. 19). Chicago: The University of Chicago Press.

FORMASI WACANA KEWARGANEGARAAN PASCA-REFORMASI

Caroline Paskarina

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

e-mail: caroline.paskarina@unpad.ac.id

Abstrak

Tulisan ini ingin mengungkapkan formasi wacana kewarganegaraan pascareformasi di Indonesia. Pascareformasi, wacana tentang kewarganegaraan justru tidak banyak dibicarakan, seolah ada keterputusan dengan masa-masa sebelumnya, yakni masa kolonial, masa awal kemerdekaan, dan masa Orde Baru yang menempatkan wacana kewarganegaraan sebagai bagian dari strategi politik untuk menguatkan legitimasi kekuasaan negara atas nama nasionalisme. Tulisan ini berasumsi bahwa wacana kewarganegaraan pascareformasi telah mengalami dekonstruksi sebagai akibat dari berkembangnya gagasan komunitas politik dalam konteks demokratisasi. Seiring meluasnya kebebasan dan persamaan, wacana kewarganegaraan diartikulasikan dengan berbeda, sebagai bagian dari isu kesetaraan gender, kepedulian sosial, kebangkitan lokalitas, bahkan pengakuan hak asasi manusia. Kewarganegaraan tidak lagi sekedar menyangkut suatu identitas berhadapan dengan identitas lain, tetapi banyak identitas yang berupaya membentuk kesatuan kepentingan tanpa menghilangkan perbedaan di antaranya. Dengan menggunakan analisis diskursus, studi ini bertujuan memetakan beragam diskursus kewarganegaraan yang berkembang pascareformasi di Indonesia. Metode ini dapat menggambarkan pola-pola penciptaan makna tentang kewarganegaraan, mengungkap wacana dominan dan wacana tandingan yang membentuk diskursus kewarganegaraan. Tulisan ini menawarkan perspektif untuk melihat kewarganegaraan sebagai identitas politik yang dibentuk melalui permainan bahasa (*language game*) yang mencerminkan pertarungan interpretasi yang diartikulasikan oleh berbagai kepentingan. Perspektif ini menjadi alternatif untuk mengatasi kegagapan liberalisme dalam menjelaskan kewarganegaraan sebagai salahsatu identitas di antara beragam identitas lain, dan bukan juga sebagai identitas tunggal yang mengatasi identitas-identitas lain, seperti dalam perspektif republikanisme. Pemahaman akan kewarganegaraan sebagai identitas yang senantiasa dikonstruksi ulang memberi peluang untuk menempatkan formasi identitas kewarganegaraan sebagai bagian dari upaya membangun budaya demokrasi yang peka akan nalar di balik formasi wacana tersebut.

Kata Kunci: identitas politik, kewarganegaraan, wacana

PENDAHULUAN

Reformasi telah membawa begitu banyak perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang mengarah pada menguatnya demokratisasi. Berbagai praktik yang otoriter dikritisi dan diubah, termasuk juga dalam hal pembentukan identitas kewarganegaraan (*citizenship*) yang sebelum masa reformasi dilakukan melalui indoktrinasi. Pascareformasi, wacana tentang kewarganegaraan justru tidak banyak dibicarakan, seolah ada keterputusan dengan masa-masa sebelumnya, yakni masa kolonial, masa awal kemerdekaan, dan masa Orde Baru yang menempatkan wacana kewarganegaraan sebagai bagian dari strategi politik untuk menguatkan legitimasi kekuasaan negara atas nama nasionalisme.

Pada masa pra- dan awal kemerdekaan, wacana kewarganegaraan ditempatkan dalam kerangka *nation-building* bersama-sama dengan wacana nasionalisme dan patriotisme. Adanya musuh bersama menjadi jargon utama yang memudahkan pembentukan identitas kewarganegaraan dilakukan, yakni identitas sebagai warga negara Indonesia berhadapan dengan identitas sebagai warga negara lain. Meskipun demikian, tidak mudah untuk membangun identitas 'Indonesia' ketika berhadapan dengan identitas etnik yang sebelumnya telah ada. Pertemuan di antara keragaman identitas ini yang membuat proses menjadi 'Indonesia' tidak pernah sepenuhnya bersifat dikotomis.

Pembentukan identitas 'Indonesia' sebagai negara-bangsa diilustrasikan oleh Ben Anderson (1983) sebagai komunitas terbayangkan, yang menyatakan bahwa sebelum terbentuknya sebuah identitas negara-bangsa, telah eksis sebuah ide yang membayangkan tendensi ke arah persatuan bangsa melalui beberapa faktor pemersatu. Kendati batas-batas geografisnya ditinggalkan oleh penaklukan Belanda, tetapi komunitas terbayangkan Indonesia telah tercipta jauh sebelum pendudukan Belanda. Karena itu, Ben Anderson (1983: 12) percaya bahwa pembentukan

identitas harus dipahami bukan dengan mengaitkannya dengan ideologi politik yang dijalankan secara sadar diri, tetapi dengan sistem budaya yang luas yang mendahuluinya, di luar dari prosesnya.

Pada masa Orde Baru, negara berperan lebih dominan dalam proses pembentukan identitas kewarganegaraan. Proses ini masih berada dalam kerangka *nation building* yang dilekatkan dengan wacana modernisasi (pembangunan) politik. Modernisasi menuntut homogenisasi budaya politik. Jika homogenitas ideologis ini tidak ada, negara harus menjadi ujung tombak dalam menanamkan 'budaya umum' di antara warga negaranya yang beraneka ragam (Hefner, 2007). Konsekuensinya, pembentukan identitas nasional menuntut penggantian sejumlah besar otoritas politik tradisional, religius, familial, dan etnis dengan sebuah otoritas politik nasional yang sekuler dan tunggal (Huntington, 1968: 34). Tanpa pemangkas solidaritas-solidaritas etnorelijius yang dipromosikan oleh negara, pembentukan identitas nasional dan persatuan bangsa seakan terancam (Hefner, 2007).

Negara memperoleh justifikasi untuk menggunakan pendekatan *top down* dalam membangun identitas tunggal kewarganegaraan untuk kepentingan penguatan persatuan dan kesatuan. Meskipun, di dalam praktiknya, proses ini memunculkan resistensi, baik yang bersifat manifes maupun laten, dari identitas-identitas lain yang termarginalkan.

Wacana pluralisme kembali menguat ketika pada dekade 1990-an dan 2000-an, globalisasi dan demokratisasi mengalami pasang naik. Wacana ini dipicu oleh meningkatnya mobilitas manusia antarnegara yang muncul bersamaan dengan kebangkitan kembali etnis di masyarakat-masyarakat industrial maju dan menguatnya kembali etnorelijius di banyak bagian dunia yang sedang berkembang (Hefner, 2007). Identitas-identitas budaya semakin banyak mewarnai relasi antarwarga negara, mendorong negara untuk memikirkan kembali pola pengelolaan isu-isu kewarganegaraan, demi memelihara keharmonisan relasi sosial. Kewarganegaraan menjadi identitas yang lebih cair, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih beragam untuk mengelolanya dengan lebih inklusif.

Berangkat dari dinamika yang berlangsung dalam periode-periode di atas, juga dengan melihat berbagai kecenderungan yang berkembang dewasa ini, jelas bahwa kewarganegaraan bukan semata isu politik tetapi justru merupakan produk konstruksi yang lahir sebagai respon terhadap konteks yang berkembang. Kendati ada banyak literatur dan studi yang membahas tentang kewarganegaraan (Hefner, 2007; Kymlicka dan

Norman, 1994; Kymlicka, 2003; Bosniak, 2001; Scott dan Lawson, 2001), tetapi yang belum banyak yang menggunakan analisis wacana untuk memahami konstruksi wacana kewarganegaraan. Tulisan ini menawarkan perspektif untuk melihat kewarganegaraan sebagai identitas politik yang diungkapkan dalam teks, yang mencerminkan pertarungan interpretasi yang diartikulasikan oleh berbagai kepentingan. Pemahaman akan kewarganegaraan sebagai identitas yang senantiasa dikonstruksi ulang memberi peluang untuk menempatkan formasi identitas kewarganegaraan sebagai bagian dari upaya membangun budaya demokrasi yang peka akan nalar di balik formasi wacana tersebut.

Untuk menguraikan hal tersebut, tulisan ini akan terlebih dahulu membahas konsep dasar kewarganegaraan, selanjutnya memetakan wacana kewarganegaraan yang berkembang di Indonesia pascareformasi dengan menggunakan kasus-kasus yang muncul sebagai ilustrasi. Pada bagian akhir, disampaikan simpulan berupa pembelajaran yang dapat diambil dari perkembangan wacana kewarganegaraan tersebut bagi penguatan budaya demokrasi di Indonesia.

METODE

Untuk menegaskan bahwa konsep kewarganegaraan bukan konsep yang alamiah, tetapi merupakan konstruksi yang senantiasa ditentukan oleh perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik, maka tulisan ini menggunakan metode analisis wacana untuk mengungkapkan makna di balik konstruksi kewarganegaraan itu. Wacana diartikan sebagai seperangkat aturan dan praktik yang menentukan pemaknaan dalam suatu wilayah tertentu (Foucault, 1972). Memahami kewarganegaraan sebagai praktik diskursif dapat menyediakan alat analisis untuk secara kritis menyingkap makna di balik berbagai kepentingan yang melatarbelakangi produksi dan reproduksi teks tentang kewarganegaraan. Analisis wacana bertujuan mengungkapkan bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut diekspresikan dan membentuk makna dari praktik kewarganegaraan.

Penulis mengkaji sejumlah teks yang termuat dalam literatur untuk mengidentifikasi pernyataan-pernyataan yang membentuk cara pikir dan hal-hal yang dikaitkan dengan kewarganegaraan. Teks yang menjadi unit analisis dipilih secara acak dari bidang ilmu sosial dan politik, yang memuat tentang kewarganegaraan sebagai topik utama. Teks-teks ini diperoleh dari jurnal ilmiah

dan e-book yang diakses secara bebas melalui internet. Untuk mengaitkan dengan konteks Indonesia pascareformasi, digunakan kasus-kasus kewarganegaraan yang muncul dalam pemberitaan media massa. Pernyataan yang tertuang dalam bentuk teks tersebut menunjukkan posisi tentang keanggotaan sebagai warga negara, identitas, nilai, partisipasi, dan pengetahuan-pengetahuan yang membentuk ekspresi keyakinan tentang kewarganegaraan, yang selanjutnya mencerminkan makna dari kewarganegaraan sekaligus memilah mana makna yang lebih dapat diterima dan mana yang tidak (Johnstone, 2002). Pilihan-pilihan dan klaim-klaim tersebut mengarah pada produksi, reproduksi, dan kontestasi dari makna tentang kewarganegaraan.

Analisis tekstual dipakai untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sebagai berikut: (a) klaim yang dinyatakan oleh pengarang; (b) pilihan kata (kosa kata, slogan, gaya penulisan) yang dipakai pengarang; (c) nilai-nilai politik yang terkandung dalam teks; dan (d) konteks yang melatarbelakangi teks tersebut. Dengan menganalisis dimensi-dimensi tersebut, tulisan ini ingin mengungkapkan apa yang ingin dinyatakan oleh pengarang teks tersebut, apa ekspresi atau istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi identitas kewarganegaraan, serta nilai-nilai apa yang ingin diperjuangkan oleh para penulis teks tersebut. Setelah menganalisis hal-hal tersebut, dapat diidentifikasi pola-pola wacana kewarganegaraan, yang dapat menggambarkan bagaimana kewarganegaraan dideskripsikan, perbedaan-perbedaan dalam klaim tentang bagaimana seharusnya karakteristik warga negara yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, kewarganegaraan mengandung sejumlah unsur, yakni: (a) memberi status keanggotaan bagi individu di dalam unit politik tertentu; (b) memberi identitas politik bagi individu; (c) membentuk seperangkat nilai, yang umumnya diinterpretasikan sebagai komitmen bagi kebaikan bersama dari unit politik tertentu; (d) mencakup partisipasi dalam proses politik; serta (e) meliputi upaya-upaya memperoleh dan menggunakan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, dokumen, struktur, dan proses pemerintahan (Enslin, 2000). Kewarganegaraan, dengan begitu, mencakup pemberian keanggotaan, identitas, nilai, dan hak-hak untuk berpartisipasi berdasarkan pengetahuan politik tertentu.

Konsep lainnya dikemukakan oleh Marshall (dalam Katz, 2001) yang membagi lingkup kewarganegaraan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni kewarganegaraan

sipil, kewarganegaraan politik, dan kewarganegaraan sosial. Kewarganegaraan sipil meliputi hak-hak individu untuk berpendapat, menganut keyakinan tertentu, dan hak kepemilikan. Konsep ini lahir sebagai implikasi dari sistem kapitalisme yang memberikan jaminan perlindungan kepemilikan individual, persamaan hukum, dan kebebasan sipil. Kebebasan politik mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti menjadi anggota dari lembaga-lembaga politik, atau memilih anggota dari lembaga-lembaga tersebut. Konsep ini lahir sebagai konsekuensi dari berkembangnya demokrasi perwakilan dan munculnya kelas menengah baru yang berperan penting dalam demokratisasi. Konsep kewarganegaraan sosial mulai berkembang pada abad ke-20 mencakup perwujudan hak-hak yang lebih luas, mulai dari hak untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi dan keamanan hingga hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Konsep ini lahir sebagai konsekuensi dari berkembangnya praktik negara kesejahteraan yang mengubah relasi antara negara dan warga negara.

Konsep-konsep di atas menunjukkan bahwa definisi dan ruang lingkup kewarganegaraan yang terus mengalami perkembangan secara dinamis, menjadi semakin kompleks. Dinamika ini juga turut mewarnai kontestasi makna yang lahir dari pergeseran ruang lingkup kewarganegaraan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 2 (dua) kategori wacana yang saling berkontestasi dalam membentuk konsep kewarganegaraan di Indonesia pascareformasi. Wacana dominan dibangun oleh dua kerangka konseptual, yakni *civic* republikan dan liberal. Sementara itu, wacana tandingan muncul melalui sejumlah diskursus kritis yang antara lain dibangun di atas klaim-klaim feminis, rekonstruksionis, kultural, dan transnasional.

Pada bagian ini akan diuraikan karakteristik dari setiap wacana dan bagaimana masing-masing membentuk konstruksi makna kewarganegaraan yang berkembang di Indonesia.

Wacana Dominan: Pengakuan Negara

Wacana kewarganegaraan yang dibangun di atas klaim *civic* republikan mengedepankan nilai-nilai kecintaan kepada tanah air dan pengabdian kepada komunitas politik formal (pemerintah atau negara). Sebagai anggota dari suatu komunitas politik, identitas warga negara dibentuk melalui pengenalan akan pengetahuan tentang karakteristik yang membentuk warga negara yang baik, antara lain ditandai oleh komitmen terhadap negara, penghormatan terhadap simbol-simbol negara, dan aktif berpartisipasi untuk kepentingan bersama, yang terutama dilakukan melalui pemberian suara

dalam pemilihan umum, bergabung dalam partai politik, atau aktivitas-aktivitas sipil lainnya). Teks-teks utama yang mendukung wacana *civic* republikan ini dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen regulasi negara, mulai dari Konstitusi hingga peraturan perundang-undangan yang lebih operasional.

Karakter utama dari wacana ini adalah patriotisme yang dimanifestasikan melalui berbagai bentuk aktivitas sipil, baik melalui yang bersifat formal melalui pengabdian dalam institusi-institusi kenegaraan maupun melalui berbagai aktivitas sosial untuk kepentingan umum (Etzioni, 1993; Ravitch dan Viteritti, 2001). Nilai-nilai ini yang melandasi berbagai praktik untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Maraknya kemunculan figur-figur politisi yang mengedepankan simbol-simbol patriotisme merupakan fenomena yang menjadi bukti bahwa wacana *civic* republikan masih kuat mendominasi konsepsi kewarganegaraan di Indonesia pascareformasi. Konsepsi ini juga marak dipraktikkan oleh pemerintahan Orde Baru bahkan melalui institusi yang sistemik, antara lain melalui kurikulum Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, penataran P4, dan penyelenggaraan upacara bendera di seluruh instansi resmi pemerintahan. Namun, berbeda dengan praktik di masa Orde Baru yang cenderung *state-centered* dan menggunakan pendekatan indoktrinasi, wacana *civic* republikan di masa pascareformasi mengalami revitalisasi melalui munculnya isu kedaulatan negara dan kebanggaan akan kejayaan bangsa.

Wacana Indonesia sebagai negara maritim, misalnya yang dimunculkan oleh pemerintahan Jokowi, dapat menjadi ilustrasi revitalisasi wacana *civic* republikan untuk membangun kembali identitas nasional berdasarkan warisan kejayaan historis yang digabungkan dengan potensi sumber daya (laut) bagi kejayaan masa depan. Dalam konteks persaingan global, kemunculan wacana negara maritim turut berperan menumbuhkan jiwa patriotisme terutama ketika berkompetisi dengan negara-negara lain dalam hal pengelolaan sumber daya. Karena itu, besarnya dukungan publik terhadap keberanian Menteri Perikanan dan Kelautan dalam memperjuangkan eksistensi Indonesia di wilayah perairan sesungguhnya bukan semata menggambarkan prestasi Menteri Susi Pujiastuti, tetapi juga membuktikan bahwa identitas kebangsaan dapat dibentuk melalui aksi-aksi patriotik yang membangkitkan memori akan kejayaan di masa lampau.

Formasi wacana kewarganegaraan yang dibangun di atas klaim *civic* republikan sangat menekankan pada

mode partisipasi yang bersifat kooperatif dan suportif terhadap institusi kenegaraan formal. Hal ini dijustifikasi oleh kewajiban warga negara untuk mematuhi berbagai peraturan yang dibuat oleh negara dan menghormati institusi-institusi formal kenegaraan. Konsep 'tanggung jawab' seringkali dihadapkan dengan konsep 'hak', sehingga berbicara tentang kewarganegaraan dalam konteks *civic* republikan menyangkut hubungan negara dengan warganya dalam hal perwujudan hak dan tanggung jawab (kewajiban) warga negara. Kesetiaan warga negara untuk memenuhi tanggung jawabnya lebih penting ketimbang pemenuhan hak-hak karena tujuan dari kewarganegaraan adalah untuk mencapai kepentingan bersama, bukan sekedar pemenuhan hak-hak warga negara.

Pada sisi yang lain, wacana dominan kewarganegaraan juga dibangun di atas klaim politik liberal, yang mengedepankan pengakuan atas kebebasan individual. Berbeda dengan *civic* republikan yang lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban warga negara, wacana liberal justru mengutamakan hak-hak individu untuk membentuk, memperbaharui, dan mengejar hasratnya akan kehidupan yang baik dengan tetap memperhatikan penghormatan akan hak-hak orang lain (Abowitz dan Harnish, 2006). Pengakuan akan hak-hak individu ini mengarah pada pengakuan akan kesetaraan atau kemampuan semua orang, khususnya mereka yang semula termarginalkan untuk sepenuhnya melaksanakan kebebasannya dalam masyarakat.

Dalam wacana ini, identitas kewarganegaraan dikonstruksi dalam konteks komunitas politik yang lebih sempit, dengan fokus yang lebih besar pada prosedur untuk menjamin proses pemerintahan dan kebijakan yang lebih adil dan inklusif (Gutmann, 2000). Formasi wacana kewarganegaraan yang bercorak liberal lebih menekankan pentingnya kemandirian individu untuk melaksanakan kebebasan, hak, dan kewajibannya (McLaughlin, 1992; Shafir, 1998), sehingga klaim utama yang menandai konstruksi identitas kewarganegaraan dalam formasi wacana liberal adalah otonomi, yang diartikan sebagai sikap kritis warga negara terhadap segala bentuk otoritas (Kymlicka, 1999). Karena itu, kemampuan untuk berpikir dan bertindak rasional menjadi sangat penting untuk membangun identitas kewarganegaraan. Kapasitas ini menjadi penting karena warga negara diharapkan menjadi subjek yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan (Benhabib, 1992; Habermas, 1996; Cohen, 1996; Gutmann dan Thompson, 1996). Untuk itu, identitas warga negara yang baik menurut formasi wacana liberal adalah individu-individu yang mandiri, berpikir terbuka,

memiliki kapasitas untuk menghormati hak-hak orang lain, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam ruang publik (Rawls, 1993; Galston, 1991). Dalam konteks ini, kemunculan berbagai ruang publik yang memanfaatkan media *online* menandai praktik kewarganegaraan dalam perspektif deliberatif ini.

Formasi wacana kewarganegaraan dalam konstruksi wacana dominan menunjukkan negara sebagai arena utama dalam mengampu kewarganegaraan. Negara menjadi institusi yang memberikan pengakuan akan identitas warga negara, baik dalam lingkup yuridis formal, maupun dalam lingkup politik. Kewarganegaraan dalam formasi wacana dominan adalah soal pengakuan hak dan kewajiban para anggota suatu negara untuk berpartisipasi aktif dan kritis demi mendukung keberlangsungan tata kelola pemerintahan. Kasus-kasus kewarganegaraan yang muncul di Indonesia pascareformasi masih berkuat pada persoalan pembentukan identitas nasional dan status keanggotaan sebagai warga negara. Hal ini tergambar jelas dalam kasus Archandra Tahar dan Gloria Himmel yang menjadi perdebatan karena status dwi kewarganegaraannya. Kendati keduanya dinilai memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi Indonesia, tetapi argumentasi yuridis-formal yang menguat dalam perdebatan tentang status kewarganegaraan keduanya menunjukkan bahwa isu keanggotaan masih menjadi persoalan krusial dalam wacana kewarganegaraan di Indonesia. Dalam formasi ini, kendati mulai ada keberimbangan dalam relasi kekuasaan antara negara dan warga negara, tetapi isu-isu kewarganegaraan yang diakui terbatas pada perwujudan dari hak dan kewajiban yang bersifat politik.

Wacana Tandingan: Pengagenan Kewarganegaraan

Pada sisi lain, muncul formasi wacana kewarganegaraan yang dikonstruksi atas dasar klaim yang berbeda. Wacana kritis memunculkan berbagai isu baru yang mempertanyakan kembali tentang keanggotaan, identitas, dan keterlibatan sebagai esensi kewarganegaraan. Wacana ini mencoba menggali agenda-agenda liberal dari kebebasan manusia dengan berfokus pada pengeksklusian yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan gender, budaya, etnisitas, kebangsaan, ras, seksualitas, atau strata sosial-ekonomi. Wacana tandingan ini diperkuat oleh klaim-klaim feminis, kultural, rekonstruksionis, dan transnasionalis.

Klaim feminis antara lain muncul dalam tulisan Noddings (1992) yang menunjukkan bahwa berbagai studi tentang kehidupan, kerja, dan kontribusi sosial kaum perempuan telah membawa pergeseran dalam studi-studi sosial, termasuk dalam hal kajian

kewarganegaraan. Dalam literatur-literatur posmodern dan dekonstruksionis, para feminis juga menekankan konstruksi *difference* dan kekuasaan sebagai aspek-aspek sentral dalam teorisasi kewarganegaraan untuk mengubah secara radikal konsepsi 'perempuan' dalam dunia politik. Mouffe (1992) menekankan pentingnya memahami kewarganegaraan bukan sebagai identitas tunggal, tetapi sebagai pluralitas dari ikatan-ikatan khusus dan untuk penghargaan terhadap kebebasan individu. Klaim feminis mempertanyakan ulang sentralitas negara-bangsa sebagai pengampu kewarganegaraan dan ketunggalan identitas yang melahirkan kriteria tertentu yang justru membatasi perempuan untuk masuk ke dalam kriteria tersebut karena praktik-praktik pemilahan yang patriarkhis.

Klaim kebudayaan mempertanyakan bagaimana etnisitas, budaya-budaya minoritas, dan kelompok-kelompok budaya lainnya menganggap kewarganegaraan sebagai peran dan identitas yang harus ditebus dengan 'harga' atau pengorbanan yang sangat mahal. Hal ini terjadi karena identitas kewarganegaraan seringkali diperoleh melalui asimilasi yang malah menghilangkan identitas kultural yang semula ada. Seperti juga klaim feminis yang mengkritisi ketunggalan identitas kewarganegaraan, klaim kultural juga mempertanyakan ulang proses pembentukan identitas tersebut yang berlangsung melalui proses asimilasi. Proses ini justru mengabaikan heterogenitas identitas yang telah ada jauh sebelum identitas nasional dibentuk oleh negara. Klaim ini memperlakukan konstruksi identitas nasional yang justru menjadi penyebab hilangnya perbedaan-perbedaan kultural. Wacana dominan yang dibangun di atas klaim modernitas politik seringkali menyebabkan identitas-identitas tradisional terpinggirkan dalam proses lahirnya identitas nasional. Formasi wacana kewarganegaraan yang dibentuk oleh klaim kultural mencoba menempatkan kewarganegaraan dan keanggotaan warga negara secara politik sebagai aktivitas yang penuh dengan pertarungan dalam ranah budaya, representasi, penyebutan, bahasa, hak-hak minoritas, dan inklusivitas. Konstruksi identitas kewarganegaraan, dengan begitu, adalah proses yang dibentuk oleh upaya-upaya untuk memperoleh pengakuan sebagai bagian dari identitas suatu negara-bangsa.

Klaim konstruksionis menggunakan argumen-argumen progresif untuk mempertanyakan mengapa partisipasi aktif dan kritis dari masyarakat demokratis telah diabaikan dalam konseptualisasi kewarganegaraan yang bercorak liberal. Klaim ini terutama berfokus pada warga negara yang termarginalkan dalam proses politik dan berupaya memperjuangkan hak dan posisi tawar

dari kelompok-kelompok marginal dengan merekonstruksi strata sosial. Klaim ini menggeser formasi wacana kewarganegaraan ke ranah sosial-ekonomi, mencakup hak-hak untuk memperoleh pekerjaan, jaminan keamanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Wilson, 1994). Identitas kewarganegaraan dalam klaim ini dibentuk sebagai kapasitas warga negara untuk mempertanyakan ulang dan mengkritisi mengapa institusi-institusi formal kenegaraan tidak berfungsi optimal bagi seluruh warga negara.

Wacana tandingan juga dibangun atas dasar klaim transnasionalis yang mengkonstruksi identitas kewarganegaraan dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional. Warga negara dalam klaim ini adalah individu yang mengidentifikasi dirinya bukan hanya berdasarkan kebangsaannya tetapi juga dengan komunitas-komunitas lain melintasi batas-batas teritorial negara. Konsepsi keanggotaan menjadi lebih cair dan membuka peluang yang lebih luas bagi partisipasi warga negara dalam berbagai asosiasi lokal dan global. Kekuasaan yang lebih luas bagi warga negara dan sebaliknya peran negara yang lebih kecil merefleksikan argumen populis yang mendasari klaim transnasionalis, seperti juga pada klaim-klaim lain yang mendasari wacana kritis tentang kewarganegaraan. Isu diaspora merupakan ilustrasi kasus yang dapat digunakan untuk menggambarkan kebangkitan klaim transnasionalis dalam konstruksi identitas kewarganegaraan Indonesia saat ini. Dengan makin maraknya fenomena migrasi dan mobilitas penduduk Indonesia melampaui batas-batas wilayah negara, keberadaan para diaspora di berbagai penjuru dunia menjadi potensi sekaligus tantangan yang memerlukan pengelolaan komprehensif.

Formasi wacana tandingan yang dibangun di atas klaim-klaim kritis tidak hanya mempertanyakan ulang konsepsi dasar kewarganegaraan, seperti siapa yang memenuhi syarat sebagai warga negara? Apa dasar mereka mendapatkannya? Apakah ia terkait dengan negara-bangsa, atau mereka berkembang melebihi batas-batas negara bangsa itu? Formasi wacana tandingan juga menggeser konstruksi kewarganegaraan sebagai produk dari kapasitas agen dalam merespon dinamika perubahan sosial-ekonomi di tingkat lokal dan global. Pemikiran ini berpendapat bahwa kewarganegaraan itu dapat dicapai melalui 'pengagenan' (*agency*) kewarganegaraan itu sendiri, yang pada dasarnya memiliki identitas yang berbeda-beda. Sebagai sebuah pendekatan, hak-hak yang dimaksudkan juga dikembangkan dari hak-hak sipil dan politik, hingga juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk pula hak untuk berpartisipasi,

baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Kymlicka dan Norman, 1994). Dengan demikian, konsep itu telah berkembang melebihi batas-batas negara bangsa yang selama ini dianggap sebagai pengampu kewarganegaraan, dan menempatkan peran penting aktor-aktor non-negara dalam 'peng-aku-an' (*claiming*), monitoring dan penguatan hak-hak itu sendiri (Nyamu-Musembi 2002).

Berbagai sumber yang dirujuk itu menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami bagaimana hak dan kewargaan dibentuk oleh konteks sosial, politik dan budaya yang berbeda. Demikian pula, konsepsi hak dan kewargaan yang universal itu telah dijumpai oleh relasi-relasi kekuasaan, hirarki sosial, dan seringkali kompetisi identitas, yang secara sekaligus dapat melibatkan sebagian suara dan identitas dan menyingkirkan yang lain. Pada saat yang sama, perlawanan-perlawanan yang dilakukan warga negara di berbagai pelosok dunia untuk mengartikulasikan dan menyatakan persepsi mereka dan mempraktekkan kewarganegaraan dalam kehidupan mereka sehari-hari, meski telah dilindungi hukum dan mekanisme yang disediakan negara tidak akan cukup tanpa kehadiran aktor-aktor non-negara itu sendiri.

SIMPULAN

Wacana kewarganegaraan pascareformasi telah mengalami dekonstruksi sebagai akibat dari berkembangnya gagasan komunitas politik dalam konteks demokratisasi. Seiring meluasnya kebebasan dan persamaan, wacana kewarganegaraan diartikulasikan dengan berbeda, sebagai bagian dari isu kesetaraan gender, kepedulian sosial, kebangkitan lokalitas, bahkan pengakuan hak asasi manusia. Kewarganegaraan tidak lagi sekedar menyangkut suatu identitas berhadapan dengan identitas lain, tetapi banyak identitas yang berupaya membentuk kesatuan kepentingan tanpa menghilangkan perbedaan di antaranya.

Ada sejumlah poin simpulan penting yang perlu digarisbawahi. Masih terdapat dominasi dari klaim-klaim *civic* republikan dan liberal dalam wacana kewarganegaraan di Indonesia saat ini, seperti tergambar dari masih kuatnya kaitan antara kewarganegaraan dengan peran negara sebagai institusi formal yang memberi pengakuan atas identitas kewarganegaraan. Meskipun demikian, harus diakui bahwa mulai muncul pandangan-pandangan kritis terhadap praktik-praktik formal tersebut, yang muncul sebagai konsekuensi dari menguatnya *civil society* dan aktor-aktor supra negara. Klaim-klaim yang dibangun

di atas kerangka berpikir feminis, kultural, dan rekonstruksionis turut berperan melahirkan bentuk-bentuk baru agensi *civic*, identitas, dan keanggotaan dalam konsep kewarganegaraan. Bahkan, klaim transnasionalis juga turut memperkaya wacana kewarganegaraan dengan menyilangkan konsep geografis negara dengan kosmopolitanisme dan transnasionalisme, yang membentuk makna dan praktik-praktik baru dalam berwarga negara.

Wacana kritis dan kosmopolitan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang identitas (siapa sesungguhnya warga negara itu?), keanggotaan (siapa yang menjadi anggota suatu negara, bagaimana dengan batas-batas negara dalam konteks transnasional), dan kapasitas agensi (bagaimana seharusnya warga negara yang baik berperilaku). Pertanyaan-pertanyaan ini diperdebatkan di seluruh dunia oleh para ilmuwan dan aktivis, para pemikir politik, dan organisasi-organisasi supra negara lainnya. Meskipun demikian, wacana kritis ini masih sebatas perdebatan atau isu-isu semata, belum mewarnai kebijakan-kebijakan formal yang mengatur tentang kewarganegaraan. Implikasinya, secara formal praktik pengaturan kewarganegaraan masih merujuk pada pola-pola konvensional, padahal dalam perdebatan sehari-hari, isu kewarganegaraan sudah sangat beragam dan meluas seperti yang ditunjukkan oleh wacana kritis.

Temuan tersebut menegaskan perlunya membuka ruang bagi masuknya pendekatan-pendekatan baru ke dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan kewarganegaraan. Kebijakan-kebijakan ini dalam lingkup yang komprehensif, mencakup mulai dari kurikulum pendidikan kewarganegaraan hingga pada berbagai ragam pengaturan praktik kewarganegaraan kekinian, misalnya dalam hal pengelolaan diaspora atau ragam identitas etnis-religius yang hingga kini masih terabaikan.

---***---

DAFTAR PUSTAKA

(Paper)

- Abowitz, K.K., dan J. Harnish. 2006. Contemporary Discourse of Citizenship. *Review of Educational Research*, Vol. 76 (4): 653-690.
- Kymlicka, W., dan W. Norman. 1994. Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory. *Ethics*, 104, 352-381.
- McLaughlin, T. H. 1992. Citizenship, diversity and education: A philosophical perspective. *Journal of Moral Education*, 21(3), 235-250.

[1] Anderson, B. R. O'G. 1983. *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

- Benhabib, S. 1992. *Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics*. New York: Routledge.
- Bosniak, L. 2001. Dalam T. A. Aleinikoff dan D. Klusmeyer (Eds.), *Citizenship Today: Global Perspectives and Practices* (hal. 237-252). Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace
- Cohen, J. 1996. Dalam S. Benhabib (Ed.), *Democracy and difference: Contesting the boundaries of the political* (hal. 95-119). Princeton: Princeton University Press.
- Enslin, P. 2000. Dalam M. Leicester, C. Modgil, dan S. Modgil (Eds.), *Politics, Education and Citizenship* (hal. 149-150). New York: Falmer Press.
- Etzioni, A. 1993. *The spirit of Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda*. New York: Crown Publishing.
- Foucault, M. 1972. *Archeology of Knowledge*. New York: Harper Colophon Books.
- Galston, W. A. 1991. *Liberal purposes; Goods, virtues and duties in the liberal state*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Gutmann, A. 2000. Dalam L. M. McDonnell, P. M. Timpane, dan R. Benjamin (Eds.), *Rediscovering the Democratic Purposes of Education* (hal. 73-90). Lawrence: University Press of Kansas.
- Gutmann, A., dan Thompson, D. 1996. *Democracy and Disagreement*. Cambridge: Harvard University Press.
- Habermas, J. 1996. Dalam S. Benhabib (Ed.), *Democracy and difference: Contesting the boundaries of the political* (hal. 21-30). Princeton: Princeton University Press.
- Hefner, R.W. 2007. *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Huntington, S. P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. London: Yale University Press.
- Johnstone, B. 2002. *Discourse Analysis*. Malden, MA: Blackwell Publishers.
- Katz, M. B. 2001. *The price of Citizenship: Redefining the American Welfare State*. New York: Metropolitan Books/Henry Holt.
- Kymlicka, W. 1999. Dalam M. Halstead dan T. H. McLaughlin (Eds.), *Education in Morality* (hal. 79-101). New York: Routledge
- _____. 2003. *Kewargaan Multikultural*. Jakarta: LP3ES.
- Mouffe, C. 1992. Dalam J. Butler dan J.W. Scott (Eds.), *Feminists theorize the political* (hal. 369-384). New York: Routledge.
- Noddings, N. 1992. *The challenge to care in schools*. New York: Teachers College Press.
- Nyamu-Musembi, C. 2002. Dalam Gaventa, J. *Introduction; Exploring Citizenship, Participation and Accountability*, IDS Bulletin Vol. 33, No. 2, 2002. Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex.
- Rawls, J. 1993. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.
- Ravitch, D., dan Viteritti, J. P. (Eds.). 2001. *Making Good Citizens: Education and Civil Society*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Scott, D., dan H. Lawson. 2001. Dalam A. Ross (Ed.), *Learning for a Democratic Europe* (hal. 349-356). London: Children's Identity and Citizenship in Europe.
- Shafir, G. 1998. Dalam G. Shafir (Ed.), *The citizenship debates: A reader* (hal. 1-28). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Wilson, W. J. 1994. Dalam B. V. Steenbergen (Ed.), *The condition of citizenship* (hal. 49-65). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM MEMBANGUN BUDAYA DEMOKRASI DI INDONESIA

Siti Witianti
Ratnia Solihah

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran

siti.witianti@unpad.ac.id

Abstrak

Civil society Organization (CSO) merupakan salah satu bagian kelembagaan politik yang penting dan diakui keberadaannya. CSO merupakan sektor publik yang mengedepankan kepedulian sosial atau personal di samping negara dan swasta. Terbukanya ruang di awal masa reformasi menyebabkan peran CSO mengalami puncaknya.

Peran CSO merupakan peran politik, karena bekerja untuk kepentingan umum dan berorientasi kepada upaya meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi. Peran politik *civil society* tersebut tidak hanya menjadi aktor yang dapat memfasilitasi proses demokratisasi dan mempertahankan demokrasi di suatu negara, tetapi juga ada anggapan organisasi *civil society* bisa menjadi perusak dalam proses demokratisasi tersebut. Peran CSO dalam demokratisasi adalah menyebarkan nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi politik, *human right*, keadilan, keterbukaan dan lainnya. Sehingga tujuan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan secara konseptual peran *civil society organization* dan menganalisis praktik bagaimana organisasi *civil society* di Indonesia pada masa reformasi memainkan perannya sebagai agen demokrasi.

Tulisan ini merupakan kajian literatur yang akan menganalisis informasi berdasarkan literatur yang terkait dengan judul makalah ini. Literatur yang dimaksud berupa buku dan media massa yang menulis tentang peran *civil society* di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pada saat peran organisasi *civil society* di Indonesia masih kurang sesuai sasaran, tidak semua organisasi bekerja dengan tujuan menanamkan nilai-nilai demokrasi, akan tetapi bekerja secara pragmatis untuk kepentingan kelompok tertentu atau kelompoknya sendiri, sehingga wajar jika muncul anggapan masyarakat yang mengatakan *cs* sebagai perusak demokrasi itu sendiri. Sehingga dengan maraknya *civil society* tidak berbanding lurus dengan derajat demokrasi secara esensial. Dengan demikian, masih banyak yang harus dibenahi dari peran *civil society* untuk mengembalikan perannya secara seutuhnya.

Kata Kunci: *Civil society, CSO, Budaya Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia*

PENDAHULUAN

Perkembangan *civil society* pada masa Orde Baru dirasakan tidak mendukung demokratisasi di Indonesia, eksistensi *civil society* sebagai kelompok menengah yang independen dan kritis terhadap penyelewengan negara tidak tampak di masa Orde Baru. Pada era tersebut tidak nampak partisipasi aktif dari *civil society* dalam perumusan kebijakan, tidak ada kebebasan pers, tidak ada kebebasan berkumpul dan berserikat, dan tidak tampak pula *civil society* yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Sehingga pemerintah Orde Baru dapat berkuasa secara otoriter dan sesuka hati. Akan tetapi, di akhir rejim Orde Baru berkuasa di Indonesia, telah tumbuh kelompok-kelompok menengah yang mulai kritis dan menempatkan dirinya sebagai oposisi pemerintah sampai akhirnya mampu meruntuhkan rejim Orde Baru.

Pada awal reformasi, kajian tentang *civil society* menjadi kajian yang cukup menarik bagi para akademisi dan peneliti baik di dalam ataupun di luar negeri untuk mengamati peran *civil society* di Indonesia terutama dikaitkan dengan proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia pada saat itu.

Pada masa reformasi, *Civil society Organization (CSO)* dianggap sebagai salah satu bagian kelembagaan politik yang penting dan diakui keberadaannya. CSO merupakan sektor publik yang mengedepankan kepedulian sosial atau personal di samping negara dan swasta. Terbukanya ruang di awal masa reformasi menyebabkan peran CSO mengalami puncaknya. Kelompok-kelompok tersebut ada yang tumbuh dengan modal dan program sendiri, ada yang membawa misi donor, dan ada juga yang menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah, bahkan ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan bentukan pemerintah.

Peran CSO merupakan peran politik, karena bekerja untuk kepentingan umum dan berorientasi kepada upaya meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi. Peran politik *civil society* tersebut tidak hanya menjadi aktor yang dapat memfasilitasi proses demokratisasi dan mempertahankan demokrasi di suatu negara, tetapi juga organisasi *civil society* bisa menjadi perusak dalam proses demokratisasi tersebut ((Hadiwinata, Juli 2005: 15).

Dalam perjalanannya, peran politik *civil society* di Indonesia pada saat proses demokratisasi sedang berjalan justru tampak kehilangan arah saat merasa kehilangan musuh bersama, berupa *state otoritarianism*. Berbagai persoalan yang muncul terkait dengan peran politik *civil society* setelah beberapa tahun reformasi berlangsung ternyata menunjukkan adanya *distrust* terjadi di kalangan LSM yang selama ini dipadankan sebagai komponen utama *civil society*.

Partisipasi politik sangat penting dalam sebuah negara demokrasi, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses kebijakan dan di dalam pembangunan ditujukan untuk menjaga agar tujuan pembangunan dan implementasi kebijakan tersebut bermaksud untuk mensejahterakan masyarakat. Intensitas yang menurun dari peran politik *civil society* di era reformasi dibandingkan dengan di masa transisi menuju demokrasi di Indonesia menjadi perhatian para pengamat politik, sehingga menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas lembaga *civil society* di Indonesia agar dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai aktor demokrasi.

Perkembangan masyarakat sipil di Indonesia pada saat ini sudah memasuki tahap konsolidasi demokrasi, dimana peran *civil society organization* berada pada tahap memperkuat demokrasi di Indonesia melalui upaya-upaya menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi di Indonesia, yang tidak hanya terbatas pada pemilihan umum saja.

Terbukanya peluang bagi tumbuh kembangnya lembaga *civil society* terutama LSM dan ORMAS di Indonesia merupakan suatu hal yang baik bagi demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Putnam, meskipun dalam praktiknya sebagaimana kajian Bob Sugeng terhadap *civil society* di Indonesia, tidak semua ormas dan LSM tidak selamanya mendukung demokratisasi. Untuk itulah penting rasanya untuk meninjau kembali fungsi dan peran masyarakat sipil terutama dalam rangka demokratisasi di Indonesia.

METODE

Kajian tentang peran *civil society* dalam membangun demokrasi di Indonesia, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode ini dianggap tepat dengan tujuan penelitian, yang akan mendeskripsikan Peran Civil society dalam membangun demokrasi di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dalam hal ini penulis melakukan kajian literatur dan dokumentasi yang terkait dengan Peran Civil society dalam membangun demokrasi di Indonesia. Hasil dari kajian literatur dan referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian, penulis analisis dan kemudian melakukan pembahasan dengan menginterpretasikan data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi dan Budaya Demokrasi

Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin.

Menurut Henry B. Mayo sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala serta didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan dilaksanakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. (Mahfud, 2003: 20). Terdapat beberapa pengertian budaya demokrasi:

1. Budaya Demokrasi adalah poAa pikir, pola sikap, dan pola tindak warga masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan antar manusia yang berintikan kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesamaderajatan, dan kompromi.
2. *International Commision of Jurist* (ICJ), demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh wn melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yg bebas.
3. *Abraham Lincoln*, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
4. *Giovanni Sartori*, memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorangpun dapat memilih dirinya sendiri, tak seorangpun dapat menginvestasikan dia dgn kekuasaannya, kemudian tidak dapat juga untuk merebut dari kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat
5. Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah.

Unsur-unsur budaya demokrasi adalah :

1. Kebebasan, adalah keleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermamfaat untuk kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Bukan kebebasan untuk melakukan hal tanpa batas. Kebebasan harus digunakan untuk hal yang bermamfaat bagi masyarakat, dengan cara tidak melanggar aturan yang berlaku.
2. Persamaan, adalah Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan martabat yang sama. Di dalam masyarakat manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, politik, mengembangkan kepribadiannya masing-masing, sama haknya untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Solidaritas, adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerjasama dengan orang lain. Solidaritas sebagai perekat bagi pendukung demokrasi agar tidak jatuh kedalam perpecahan.

4. Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran. Toleran artinya bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dll) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri.
5. Menghormati Kejujuran, adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran, agar hubungan antar pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih-benih konflik di masa depan.
6. Menghormati penalaran, adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Kebiasaan memberipenalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak cara untuk mencapai tujuan.
7. Keadaban, adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahir-batin atau kebaikan budi pekerti. Perilaku yang beradab adalah perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain yang tercermin dalam sopan santun, dan beradab.

Prinsip-prinsip demokrasi secara umum meliputi :

- a. Kekuasaan suatu negara sebenarnya berada di tangan rakyat atau kedaulatan ada di tangan rakyat.
- b. Masing-masing orang bebas berbicara, mengeluarkan pendapat, beda pendapat, dan tidak ada paksaan.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah :

- a. Kedaulatan di tangan rakyat
- b. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
- c. Pemerintahan berdasar hukum (konstitusi)
- d. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- e. Pengambilan keputusan atas musyawarah
- f. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik

Pengertian *Civil society*

Perez Diaz menekankan makna *civil society* pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, dimana satu sama lainnya saling menopang. Ada pula pandangan *civil society* sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian.

Istilah *Civil society* pertama kali diperkenalkan oleh Adam Ferguson seorang pemikir dari skotlandia, sejak saat itu diperbincangkan dalam diskursus politik dalam mencari bentuk masyarakat yang ideal. Dengan menempatkan *civil society* dalam kerangka demokrasi maka pengertian *civil society* dipahami sebagai penegakan nilai-nilai demokrasi (Yusron, 2009:19).

Dengan demikian agenda untuk membangun *civil society* termasuk menciptakan ruang gerak bagi komponen masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan hidup

guna mencapai kesejahteraan tanpa penindasan baik fisik maupun sistemik.

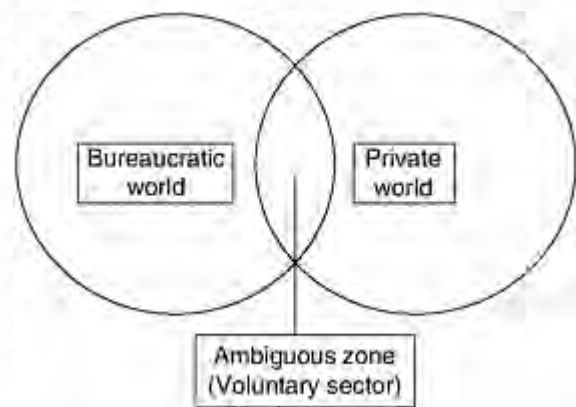
Oleh karena itu, *civil society* merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial, misalnya keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan-gerakan sosial yang ada dalam negara, namun sifatnya independen terhadap negara. Itulah yang disebut dengan *civil society*. (Eisenstadt dalam Lipset, 1995: 240). Jadi, *Civil society* adalah sebuah masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen.

Carothers and Ottaway (2000: 9) mendefinisikan *civil society* sebagai berikut:

“an intermediate associational realm between state and family populated organizations which are separate from the state. Enjoy autonomy in relation to the state and are formed voluntarily by members of the society to protect or extent their interests or values”

Definisi tersebut mengatakan bahwa *civil society* merupakan perantara antara negara dengan masyarakat, yang terdiri dari organisasi non negara yang dibentuk secara sukarela, bertujuan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai yang mereka patuhi. CSO sendiri selanjutnya dijelaskan mencakup serikat buruh, asosiasi bisnis, koperasi, asosiasi pengusaha, kelompok agama, asosiasi perdagangan, kelompok rekreasi dan *think tank*.

Kedudukan dan Peran *civil society* dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 1
Posisi CS dalam Hubungannya dengan Birokrasi dan Privat sektor

Sumber: Bob Hadiwinata, *Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*, Routledge Curzon Research on Southeast Asia, 2003

Bersama-sama dengan pasar dan demokrasi, *civil society* adalah salah satu 'trio ajaib' dari masa perkembangan yang muncul pada tahun 1980 dan sekarang mendominasi model konvensional untuk masalah dari tahun 1990-an. Sebagai elemen ketiga dari reaksi komprehensif terhadap negara-negara berkembang dari tahun 1960-an dan 1970-an, *civil society* adalah mitra sosiologis pasar di bidang ekonomi dan

demokrasi di ranah politik. Dengan demikian, *civil society* adalah pelengkap analitis penting bagi dikotomi negara pasar.

Menjaga keseimbangan politik antara negara adikuasa dengan masyarakat yang tertekan adalah prioritas penting bagi kekuatan politik, *civil society* telah menjadi alat intelektual yang berguna dalam konteks terpisah di Amerika Selatan, Afrika sub-Sahara dan Taiwan.

Civil society sering berfungsi sebagai gambaran kontra yang ideal, seperti perwujudan kebajikan sosial menghadapi wakil politik: ranah kebebasan versus ranah paksaan, partisipasi terhadap hierarki, pluralisme dibandingkan kesesuaian, spontanitas dibandingkan manipulasi, kemurnian dibandingkan korupsi. Batasam tentang *civil society* lainnya dikemukakan oleh beberapa ahli berikut dalam tulisan Gordon White yang dimuat dalam bukunya Burnell Peter sebagai berikut:

Pertama, Lise Rakner, *civil society* sebagai organisasi yang benar-benar berinteraksi dengan Negara sebagai lawan, misalnya, untuk organisasi masyarakat terpencil, kelompok kekerabatan, beberapa masyarakat religius dan kelompok-kelompok swadaya yang terletak di masyarakat pedesaan yang berdiri terpisah dari negara dan menghindari semua kontak dengan negara

Kedua, Jean-François Bayart menggambarkan *civil society* dengan gagasan antagonisme antara negara dan masyarakat, membatasi istilah untuk organisasi-organisasi sosial yang mewujudkan masyarakat dalam hubungan dengan negara yang selalu bertentangan.

Ketiga, Hugh Roberts menyamakan masyarakat sipil dengan masyarakat politik dalam arti hubungan tertentu antara negara dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kewarganegaraan, hak, representasi dan aturan hukum. Karena itu, menjadi hampir tidak bisa dibedakan dari konsepsi standar dari sistem politik demokrasi liberal.

Keempat, Marxis menyamakannya *civil society* dengan 'masyarakat borjuis' dengan alasan bahwa secara historis munculnya 'masyarakat sipil' telah disertai munculnya kapitalisme dan, dalam tulisan Marx, istilah *bürgerlich* dapat diterjemahkan sebagai 'borjuis' dan 'sipil'.

Kelima, Rakner dalam paradigma 'Teori modernisasi' dengan membatasi masyarakat sipil untuk organisasi-organisasi modern seperti serikat perdagangan, kelompok Kristen, bisnis atau asosiasi profesi, mengkonversi 'sipil' menjadi sinonim virtual 'modern'.

Keenam, Seorang Analis dalam tradisi US analisis politik pluralis cenderung melihat *civil society* dalam hal analisis kelompok kepentingan konvensional, seringkali bertumpu pada gagasan eksplisit dari proses politik sebagai pasar dan hasil politik sebagai mewakili kesetimbangan yang

dihasilkan dari interaksi yang aktor sosial dalam *civil society*.

Istilah *Civil society* juga telah dibajak dalam mengejar berbagai proyek pembangunan atau politik. Teori pembangunan neopopulis dan praktisi memuji kebaikan akar rumput LSM sebagai paradigma partisipasi sosial dan blok bangunan potensi demokrasi; liberal ekonomi mendukung kasus mereka untuk deregulasi dan privatisasi dengan menekankan bagaimana langkah-langkah ini berkontribusi pada munculnya kelas bisnis untuk mengimbangi dan mendisiplinkan kepatuhan negara; berdasarkan biaya pemotong melihat pelimpahan fungsi pemerintah dengan organisasi sukarela sebagai cara ideologis untuk mengurangi belanja negara; pemikir konservatif melihatnya sebagai cara melestarikan solidaritas sosial tradisional dalam menghadapi gangguan yang disebabkan oleh pasar; dan sosialis radikal nol dalam pada potensi

Hubungan *Civil society* dan Demokrasi

Sebagaimana dikemukakan Gordon White (dalam Burnell 2004) Gagasan *civil society* merupakan pusat diskusi demokratisasi karena menimbulkan isu sentral tentang peran kekuatan sosial dalam mendefinisikan, mengendalikan dan melegitimasi kekuasaan negara.

Dalam perdebatan pembangunan, ia sipil, dalam bentuk modern, dapat memainkan peran politik penting tidak hanya dengan menghancurkan pemerintahan otoriter dan berkontribusi terhadap pembentukan dan pemeliharaan suatu pemerintahan yang demokratis, tetapi juga meningkatkan kualitas pemerintahan dalam negara itu.

Kita dapat mengidentifikasi empat cara di mana ini mungkin terjadi.

1. *Civil society* tumbuh dapat mengubah keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat dalam mendukung, sehingga berkontribusi untuk jenis 'oposisi seimbang' diadakan untuk menjadi ciri khas rezim demokratis.
2. *Civil society* yang kuat dapat memainkan peran disiplin dalam kaitannya dengan negara dengan menegakkan standar moralitas publik dan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas politisi dan administrator.
3. *Civil society* memainkan peran yang berpotensi penting sebagai perantara atau (dua arah) transmisi-belt antara negara dan masyarakat dengan cara-cara yang kondisi hubungan antara warga negara dan sistem politik formal. dalam sebuah skenario optimis, masyarakat sipil yang aktif dapat berfungsi untuk meningkatkan kinerja politik yang demokratis dengan mengirimkan tuntutan dan mengartikulasikan kepentingan sektor penduduk. masyarakat sipil dapat memfasilitasi komunikasi politik antara negara dan masyarakat, berfungsi sebagai prinsip representasi alternatif komplementer untuk pemilihan umum

berkala dan sebagai mekanisme tambahan untuk memperkuat akuntabilitas demokratis.

4. *Civil society* dapat memainkan peran konstitutif dengan mendefinisikan kembali aturan permainan politik di sepanjang garis demokratis. Hal ini dapat dipahami dari segi pragmatis, dalam arti bahwa organisasi *civil society* tertentu melihatnya dalam kepentingan mereka untuk mengamati seperangkat aturan karakteristik permainan politik demokrasi liberal yang kompetitif dan karena itu dapat saling bersepakat untuk mengabadikan aturan-aturan meskipun mungkin ada gelar tereduksi dari ketidakpastian tentang hasil yang spesifik dan implikasi untuk setiap kelompok tertentu. Adam Przeworski ia mengatakan bahwa demokrasi mengkonsolidasikan kepatuhan dalam kelembagaan kerangka yang merupakan keseimbangan strategi desentralisasi semua kekuatan politik yang relevan. Sementara Przeworski cenderung untuk mengurangi faktor normatif, penulis lain berpendapat bahwa masyarakat sipil menciptakan dan memelihara seperangkat norma-norma demokrasi baru yang mengatur perilaku negara dan karakter hubungan politik antara negara dan 'ruang publik' dari masyarakat dan warga negara.

Dwayne Woods berpendapat, 'masyarakat di banyak negara Afrika berusaha untuk mengartikulasikan prinsip akuntabilitas politik yang mengikat negara elite karakteristik prinsip yang ditemukan di negara-negara demokratis Barat dan radikal bertentangan dengan bentuk sebelumnya akuntabilitas berdasarkan

Civil society merupakan suatu prasyarat dalam negara demokrasi. Keterkaitan *civil society* dengan demokrasi dijelaskan Carothers and Ottaway sebagai berikut:

“civil society consists only of voluntary associations that directly foster democracy and promote democratic consolidation. These are associations that specifically seek interaction with the state, whether to advocate interests of citizens, to oppose nondemocratic behavior of the state, or to hold states accountable to citizens for their actions”

Civil society sebagai elemen *governance* yang dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah dan berdasarkan peran tersebut budaya demokrasi yang sesungguhnya dapat dibangun. Oleh karena itu, perkembangan CS merupakan kunci kepada pembangunan demokrasi. Demokrasi memerlukan partisipasi aktif dan berkesinambungan dari warga negara yang terorganisasi dalardim urusan-urusan publik, ketimbang hanya pemberian suata secara periodik oleh individu-individu warga negara yang tidak terorganisasi.

Menurut Kasfr (dalam Burnell, 2004)) upaya masyarakat sipil untuk mendorong reformasi politik dengan membatasi kekuasaan negara justru bisa membahayakan peluang demokrasi, dengan mengurangi kemampuan negara untuk mengatur masyarakat sipil dan kapasitasnya untuk melakukan penyeimbang sangat dibutuhkan dan pendamai dari persaingan kepentingan dalam masyarakat. Intinya

bahwa menurut pendapat tersebut posisi negara harus tetap kuat dalam mendorong terwujudnya nilai-nilai demokrasi.

Menurut Gordon White (dalam Burnell, 2004: 20), implikasi politik dari *civil society* bukan hanya untuk transisi menuju demokrasi, tetapi juga kemampuan rezim demokrasi untuk mengatasi secara efektif masalah utama kemiskinan, pembangunan, eksploitasi dan ketidaksetaraan, dan pembunuhan sosial yang mereka sebabkan, kerusakan ekologi, pengangguran struktural, ketidakstabilan sosial-politik, dan kurangnya kedaulatan nasional.

Peran Civil society dalam Demokrasi

Terdapat beberapa peran *civil society* dalam demokrasi. Peran CS dalam Demokrasi terdiri dari:

- a. *balancing the power between state and society in support of the latter (a representative role);*
- b. *exerting greater pressure on politicians and state officials to be more accountable for their actions (a disciplinary role);*
- c. *connecting the state and society by way of articulating people's interests and facilitating political communication, and acting as complementary representative to periodic elections (an intermediary role);*
- d. *perpetuating democratic norms as the rules of the political game (a constitutive role).*

(White 1996: 185-187)

Selain itu dijelaskan juga peran *civil society* sebagai peran pelengkap pemerintah dan sektor privat terdiri dari:

- 1) *Building voice and accountability*
CS membantu membangun negara yang efektif dan akuntabel dan mendukung upaya-upaya perubahan. CS menyediakan masyarakat arena untuk berasosiasi, berefleksi dan bertindak.
- 2) *Policy Formulation:*
CS memiliki peran penting dalam memberdayakan dan mewakili kelompok miskin dan marignal dalam perumusan kebijakan pada level Pusat dan Daerah
- 3) *Monitoring Services and budget:*
CS memainkan peran untuk memperbaiki layanan-layanan negara melalui monitoring, tuntutan transparansi dan akuntabilitas, dan menjamin akses yang inklusif terhadap layanan-layanan tersebut
- 4) *Conflict Resolution:*
CS dapat menjadi saluran suara rakyat dan pemerintah
- 5) *Global Advocacy:*
karena banyaknya keputusan-keputusan penting dibuat pada level global, CS dapat memainkan peran penting dalam advokasi global.

Pendapat Robert Putnam yang dikutip oleh Bob Sugeng Hadiwinata (dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No 1, Juli 2005) mengatakan bahwa, *civil society* yang dipahami sebagai segala bentuk kelompok sosial yang terorganisir dan terbuka bagi semua kalangan, menganut prinsip sukarela dan tumbuh secara mandiri, merupakan inti dari demokrasi. Tanpa *civil society* yang tumbuh dengan

subur maka demokrasi tidak dapat dipertahankan. Karena bagi Putnam, *civil society* merupakan tempat perbedaan kepentingan yang dinegosiasikan sehingga kehadirannya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam merepresentasi kepentingan dan sekaligus memperluas partisipasi politik.

Civil society merupakan aktor negara yang diakui keberadaannya dan dianggap perlu keterlibatannya dalam penyelenggaraan pemerintah. Linz dan Stepan (dalam Jurnal CIVIC, Vol.1 No. 3 Desember 2003) menyatakan bahwa *kehadiran civil society* adalah bagian yang penting untuk menciptakan konsolidasi demokrasi, selain juga kehadiran birokrasi yang efektif, kehadiran masyarakat ekonomi yang juga kondusif dan taat terhadap aturan hukum secara bersama-sama.

Kehadiran *civil society* yang dijamin kebebasannya juga menopang bagi keberlangsungan partai politik, terutama untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Tugas *civil society* adalah menghasilkan gagasan-gagasan yang konstruktif dalam pembangunan dan juga memonitor aparat negara serta kelompok-kelompok ekonomi.

Gagasan masyarakat sipil menjadi pusat dalam diskusi demokratisasi karena melahirkankan isu sentral tentang peran kekuatan sosial dalam mendefinisikan, mengendalikan dan legitimasi kekuasaan negara. Dalam perdebatan tentang pembangunan, ia berpendapat bahwa pertumbuhan masyarakat sipil, dalam bentuk modern setidaknya, dapat memainkan peran politik penting tidak hanya dengan menghancurkan pemerintahan yang otoriter dan berkontribusi terhadap pembentukan dan pemeliharaan suatu pemerintahan yang demokratis, tetapi juga dengan meningkatkan kualitas pemerintahan dalam negara itu.

Kita dapat mengidentifikasi empat cara di mana ini mungkin terjadi (Burnell, Peter dan Peter Calvert, 2004:16-19). Pertama, masyarakat sipil tumbuh dapat mengubah keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat.

Keseimbangan kekuasaan antara negara dan masyarakat sipil bervariasi. seperti berikut:

- negara totalistik rezim sosialis di mana negara mengatur segalanya dan masyarakat sipil tidak ada.
- Ada rezim otoriter seperti yang saat ini di banyak negara Amerika Latin dan Asia Timur sampai saat ini
- Variasi ini jelas penting ketika datang untuk melihat peran masyarakat sipil dalam membina dan memelihara demokrasi dalam konteks nasional tertentu.

Kedua, ia berpendapat masyarakat sipil yang kuat dapat memainkan peran disiplin dalam kaitannya dengan negara dengan menegakkan standar moralitas publik dan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas baik politisi dan administrator. Ini bersandar pada versi moto Lord Acton yang korup kekuasaan dan kekuasaan mutlak itu mutlak, sehingga perubahan dalam keseimbangan kekuasaan jauh dari hegemoni negara terhadap masyarakat sipil.

Ketiga, masyarakat sipil memainkan peran penting sebagai perantara antara negara dan masyarakat dengan cara-cara dimana kondisi hubungan antara warga negara dan sistem politik secara formal dalam sebuah skenario optimis, masyarakat sipil yang aktif dapat berfungsi untuk meningkatkan kinerja politik demokratis dengan mengirimkan tuntutan dan mengartikulasikan kepentingan penduduk, masyarakat sipil dapat memfasilitasi komunikasi politik antara negara dan masyarakat, sehingga berfungsi sebagaimana prinsip representasi alternatif komplementer untuk pemilihan umum berkala dan sebagai mekanisme tambahan untuk memperkuat akuntabilitas demokratis.

Dengan demikian, dapat mengerahkan efek disiplin pada masyarakat dengan menyalurkan dan pengolahan tuntutan yang berbeda dan memberikan kontribusi. Aspek yang ditekankan oleh teori-teori elitis demokrasi yang menekankan peran penting yang dimainkan oleh para pemimpin organisasi masyarakat sipil dalam menunjang stabilitas dan efektivitas rezim demokratis.

Dalam skenario yang lebih pesimis, masyarakat sipil dapat bertindak untuk meningkatkan tekanan pada negara di luar batas toleransi, dengan demikian berkontribusi pada krisis *governability*; mungkin juga polarisasi konflik antara kepentingan sosial dan memberikan kontribusi pada ketidakstabilan dan pembusukan politik.

Keempat, masyarakat sipil dapat memainkan peran konstitutif dengan mendefinisikan kembali aturan permainan politik yang demokratis. Adam Przeworski berpendapat bahwa demokrasi mengkonsolidasikan kepatuhan semua kekuatan politik yang relevan. Sementara Przeworski cenderung untuk memangkas faktor normatif, penulis lain berpendapat bahwa peran konstitutif masyarakat sipil melampaui kepentingan organisasi ke ranah normatif, yaitu bahwa masyarakat sipil menciptakan dan memelihara seperangkat norma-norma demokrasi baru yang mengatur perilaku negara dan karakter hubungan politik antara negara dan 'ruang publik' dari masyarakat dan warga negara. Dwayne Woods berpendapat, bahwa masyarakat sipil di banyak negara Afrika berusaha untuk mengartikulasikan prinsip akuntabilitas politik yang mengikat elit negara.

Peran Masyarakat Sipil Indonesia dalam Membangun Budaya Demokrasi di Indonesia

Gordon White (dalam Burnell and Calvert, 2005: 8) yang mengatakan adanya peran politik yang dimainkan oleh masyarakat sipil dapat memfasilitasi atau menghambat demokratisasi. Artinya bahwa keberadaan organisasi-organisasi masyarakat sipil sebagai reaksi dari kebebasan demokrasi tersebut tidak selamanya membawa dampak yang positif di suatu negara. Sehingga proses demokratisasi menjadi tidak berjalan dengan lancar.

Pendapat tersebut faktanya terjadi di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian tentang peran politik *civil society* telah dilakukan oleh Bob Sugeng Hadiwinata yang

dipublikasikan dalam jurnal sosial politik UI tahun 2003, dalam penelitian tersebut Bob Sugeng mengangkat tentang kenyataan adanya dua sisi peran politik *civil society* di Indonesia dalam proses demokratisasi. Penelitian ini, dilakukan pada saat pembahasan tentang *civil society* sedang hangat-hangatnya di bahas dan pesatnya perkembangan *civil society* di Indonesia.

Peran masyarakat sipil di Indonesia telah mengalami pasang surut, di masa orde lama organisasi masyarakat sipil mulai lahir dan mulai memahami perannya, akan tetapi masuk ke dalam masa orde baru, eksistensi masyarakat sipil di Indonesia mengalami masa yang sangat suram, sistem politik yang sentralistis menyebabkan masyarakat sipil tidak dapat berkembang dan menjalankan fungsi dan perannya, akan tetapi sistem politik yang otoriter ini dalam perjalanannya menuai reaksi dari masyarakat.

Pada masa akhir orde baru banyak masyarakat memiliki pendidikan formal yang tinggi dan wawasan politik yang semakin luas dan mulai mempengaruhi masyarakat untuk berani melawan rejim yang otoriter, sehingga jatuhnya rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun lamanya. Dan selama masa tersebut tidak banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat karena negara sangat dominan.

Setelah rejim orde baru jatuh, akhirnya kita memasuki masa transisi dimana masyarakat mulai diperkenalkan dengan budaya demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan oleh kelompok-kelompok *civil society* tersebut mendorong mereka untuk ikut aktif di dalam pembaguan, sehingga organisasi masyarakat sipil pun semakin menjamur di masa itu.

Perlawanan organisasi masyarakat sipil pada masa orde baru dan masa transisi sangat jelas yaitu melawan musuh bersamanya yakni pemerintah yang otoriter, adalah pada awal reformasi. Presiden BJ Habibie pada saat itu mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan terbentuknya organisasi kemasyarakatan, sehingga pertumbuhan organisasi-organisasi kemasyarakatan semakin menjamur. Seperti halnya terjadi pada negara-negara berkembang lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa *civil society* merupakan salah satu elemen yang dianggap penting dalam proses demokrasi secara umum demokratisasi, bagaimana mereka menjalankan tugasnya sebagai agen demokrasi. Indonesia memiliki kekhasan dalam menanamkan konsep demokrasi ala Indonesia, kita menganut demokrasi pancasila yang menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan.

Peran *civil society* lah yang seharusnya mengembang tugas untuk untuk *civil society* juga harus menanamkan nilai-nilai Demokrasi secara umum, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, hak asasi manusia.

Fenomena gerakan *civil society* senantiasa

berbanding terbalik dengan kekuasaan rejim. Bilamana negara kuat, memiliki kecenderungan melakukan penetrasi dan kooptasi, juga sebaliknya, *civil society* tumbuh subur tatkala kekuasaan negara melemah. *Civil society* seringkali dipahami sebagai konstruksi ruang politik, yaitu suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Apabila ditelaah lebih mendalam, *civil society* menyiratkan pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat masyarakat dapat melakukan transaksi komunikasi secara bebas.

Organisasi *civil society* di Indonesia hingga saat ini sangat berkembang, Mulai organisasi dengan pengelolaan yang tradisional sampai kepada organisasi yang sangat modern, mulai dari kelompok profesi, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok agama, kelompok yang berdasarkan suku, kelompok yang berdasarkan agama dan lain sebagainya turut serta mengawal jalannya demokrasi di Indonesia.

CSO memiliki tiga peran penting di dalam hubungannya dengan pemeritahan yang pertama adalah peran advokasi, dalam hal ini cso melakukan pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan kepada masyarakat atas suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini seharusnya cso menjadi perantara antara pemerintah dengan masyarakat.

Di samping itu juga masyarakat sipil harus turut serta dalam proses perumusan, kebijakan. Indonesia menjalankan proses kebijakan partisipatif dimana masyarakat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Akan tetapi. Pelaksanaan Perumusan kebijakan partisipatif ini belum berjalan dengan baik, dikarenakan keterlibatan mereka dalam perumusan kebijakan tidak membawa dampak yang baik. Disini dibutuhkan komitmen dari kedua belah pihak antara pemerintah dengan masyarakat. terutama pemerintah untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi, sehingga mendorong terwujud nilai-nilai demokrasi.

Peran kedua adalah *empowerment*, dalam hal ini cso memiliki peran untuk memberdayakan masyarakat agar terwujud masyarakat yang berdaya serta memahami akan hak dan kewajibannya hidup di negara demokrasi, kondisi tersebut dapat mendorong proses demokratisasi berjalan dengan lancar.

Peran ketiga adalah menjalankan kontrol sosial. Organisasi civil di Indonesia memiliki peran untuk mengontrol kinerja pemerintah dan menuntut pengawas pemerintah menjadi pemerintahan yang akuntabel. selain itu yang perlu dilakukan melakukan pengawawan terhadap para wakil rakyat yang duduk di dewan.

Pertumbuhan civil society di Indonesia tidak hanya mendorong kemajuan demokrasi di Indonesia, tetapi ada beberapa kelompok masyarakat yang pada akhirnya menghambat demokrasi. Seperti kelompok-kelompok yang bersengketa dan berperang.

Jurnal

Jurnal CIVIC, Vol.1 No. 3 Desember 2003

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 9 No 1, Juli 2005

SIMPULAN

Demokrasi sudah menjadi pilihan Indonesia untuk dijadikan sistem politik di negara itu, untuk itu nilai-nilai ke arah terwujudnya demokrasi yang ideal harus ada yang mengawalinya dan menjadi agen dalam demokratisasi. Yang dalam hal ini adalah seharusnya dilakukan oleh civil society.

Untuk itu perlu ada pemberdayaan terhadap organisasi civil society agar mampu melaksanakan tugas negara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Burnell, Peter and Peter Calvert. 2005. *Civil Society in Democratization*. Frank Cass London, Portland, Or
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikam, AS. 2015. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta, LP3ES
- Fernández, R. 2008, 'Civil society organizations that work for development... and also for democracy Notes on the political role of CSOs', in *Civil Society and Development Effectiveness*, eds B. Tomlinson & R. Fernández, Canadian Council for International Cooperation (CCIC), Quezon City, Philippine.
- Gaffar, Affan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Hadiwinata S, Bob. 2003. *Politics of NGOs in Indonesia : Developing Democracy and Managing a Movement* RoutledgeCurzon Research on Southeast Asia
- Pramusinto, Agus dan Wahyudi Kumorotomo. 2009. *Governance reform di Indonesia: Mencari arah kelembagaan politik yang demokratis dan Birokrasi yang Profesional*. Gavamedia. Yogyakarta
- Ottaway, M. & Carothers, T. 2000, 'The Burgeoning World of Civil Society', in *Funding Virtue: Civil Society Aid and Democracy Promotion*, eds M. Ottaway & T. Carothers, Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C.
- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suharko 2005. *Merajut Demokrasi; Hubungan NGO-Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*. Penerbit Tiara wacana. Yogyakarta
- White, G. 1996, 'Civil Society, Democratization and Development', in *Democratization in the South: The Jagged Wave*, eds R. Luckham & G. White, Manchester University Press, New York, pp. 178-219.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah Dimensi: Akuntabilitas dan Transparansi. Insan Cendikia*. Surabaya

Self-Adaptation of Children Beggars toward Violence on Street Memahami Adaptasi dan Self Logotherapy Anak-anak Pengemis dalam Memandang Lingkungan Jalanan di Sekitar Makam Sunan Gunung Jati Cirebon

Atwar Bajari

Dosen Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
E-mail: atwar.bajari@unpad.ac.id, atwarbajari@gmail.com

Abstract

Begging is an act susceptible for street children and child beggars. The street life for street and beggars children, are unsafe and unfriendly environment to their growth and development. Analysis of Phenomenology and Logotherapy of Viktor Frankl provide perspective, that in situations of stress and suffering, like the lives of homeless and beggars child, bring a distinctive style adaptation. If the actors have the ability to recognize and survive, they will come out as individuals that are adaptive to the environment. This study aims to explain the meaning of children about begging and the behavior of their adaptation to the environment and the adults in the study location. The results showed that some consciously imitated the adult behaviors in begging. Competition and violence in the begging, undergo a process of change of meaning in the children perspective. Competition, violence and begging is regarded as a way of life and their destiny.

Keywords: Begging, Logotherapy, Viktor Frankl, Phenomenology, and Suffering.

PENDAHULUAN

Anak memiliki daya adaptasi yang khas yang bisa berkembang dalam konteks apapun. Walaupun mereka sedang memasuki masa sosialisasi diri, ternyata memiliki kemampuan untuk berkembang. Sebagian besar melalui proses imitasi dari perilaku orang dewasa. Demikian halnya dengan anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang tidak beruntung seperti jalanan, terminal, rumah perlindungan anak, dan lain-lain.

Sebagai ilustrasi, perkembangan anak-anak di Uganda, dimana Uganda dikenal sebagai negara dengan anak-anak dan pemuda dengan populasi terbesar, mereka memiliki masalah dengan perkembangan anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang kumuh. Namun pada kenyataannya mereka telah mencari jalannya sendiri dengan turun ke jalan dan mengemis untuk hidup mereka.

Tidak jauh berbeda dengan di Uganda, yaitu kehidupan anak-anak yang miskin di Indonesia. Ada sebuah petikan dalam tulisan Kompasiana yang menyebutkan sebuah petikan riset dari BPS dan ILO. Meminjam hasil survei pekerja anak Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 2009. Jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 4,1 juta anak atau 6,9 persen dari 58,7 juta anak Indonesia yang berusia 5-17 tahun. Kalau kita melihat di lapangan, jumlah pekerja anak bisa lebih besar dari data yang dikeluarkan oleh BPS tersebut. Hampir semua sektor pekerjaan orang dewasa, memiliki buruh anak atau pekerja di bawah umur. Buruh penangkapan ikan, buruh pabrik pada skala kecil, buruh bangunan, sampai pada pekerja seks komersial yang memperjualbelikan anak-anak.

Sebagian di antara mereka, anak-anak Indonesia turun ke jalan untuk mencari uang. Pekerjaan di jalan yang paling mudah bagi anak-anak adalah mengemis, mengamen, menyemir sepatu, jual koran, dan ojek payung. Dari aspek ini saja sudah nampak perilaku yang berbeda dengan anak-anak seusianya. Mereka mengembangkan kemampuan secara mandiri dengan mengemis, menyanyi, sampai tindakan memaksa untuk mendapatkan uang.

Masalah besar yang menjadi pemicu anak turun ke jalan adalah kemiskinan. Hubungan kemiskinan dengan munculnya kebiasaan mengemis atau mencari makan dengan meminta mudah dijelaskan. Urusnya bermula pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Namun demikian, beberapa riset menjelaskan, beberapa negara memiliki kasus dimana kebiasaan mengemis juga disebabkan faktor di luar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Sebuah riset di Pakistan melukiskan perspektif berbeda. Terdapat sebuah kultur, dimana mengemis berkaitan dengan ritual atau keyakinan dalam kepercayaan atau agama. Seperti yang dikemukakan oleh Nadia Azam (2014), bahwa; asal-usul mengemis di Pakistan memiliki beberapa proposisi, bahwa seseorang terlibat dalam tindakan mengemis karena masalah; (1) Ekonomi, (2) Agama, dan (3) Pemerintahan yang korup. Jika faktor ekonomi dan pemerintahan yang korup, sudah banyak yang menjelaskan, maka faktor tradisi dalam agama,

merupakan tawaran alternatif hipotesis yang unik dalam menjelaskan fenomena mengemis. Tradisi yang dimaksud adalah kebiasaan memerikan sedekah kepada kaum dhuafa, telah menyebabkan ketergantungan.

Hasil studi yang sama, juga disebutkan dalam laporan Emily Delap (2009) pada negara-negara Albania, India dan Senegal. Delap menyebutkan setidaknya ada enam faktor penjelas seorang anak terjun menjadi pengemis atau menjadi terlantar. Dalam laporannya yang berjudul, "Begging for Change, Research findings and recommendations on forced child begging in Albania/Greece, India and Senegal," bahwa kelima faktor tersebut yaitu; (1) Migrasi, (2) Kemiskinan, (3) Keterbatasan pada akses pendidikan yang berkualitas, (4) Moral dan Tradisi Agama dalam Memberi Sedekah, (5) Diskriminasi, dan (6) Kekerasan, Pelecehan, dan Penelantaran.

Jika hal ini dipakai untuk menjelaskan konsep mengemis di Indonesia, dalam kasus anak jalanan mengemis di lingkungan keraton, tempat wisata ziarah, dan lokasi peribadatan, maka akan memiliki kedekatan proposisi ilmiah. Fenomena mengemis di lingkungan yang telah disebutkan tadi jumlah cukup besar. Anak-anak berkeliaran meminta sedekah, baik dengan memaksa maupun dengan memberikan jasa yang mereka bisa.

Dalam mengemis, hakekatnya anak-anak berada dalam posisi rentan dengan peluang besar terjadinya kekerasan dan tekanan. Kekerasan verbal, fisik, sampai pelecehan banyak ditemukan dalam dunia anak jalanan. Bentrokan fisik antar kelompok anak serta dengan orang dewasa tidak bisa dihindari. Secara psikis mereka mengalami gangguan yang tidak terelakan.

Seperti yang dikemukakan dalam laporan badan PBB (Human Rights Watch, 2014), bahwa; Pernah suatu malam, pada saat dia sedang tidur, tiba-tiba empat orang polisi menyergap dan memukulinya tanpa rasa kasihan. Juga demikian dengan teman-temannya dipukuli pada saat mereka tidur. Lalu seorang polisi mebentaknya, apakah diantara kalian ada yang memiliki uang? Mosses teman Stepehen menyerahkan sebanyak 500 Shiling (20 USD). Polisi mengambilnya dan kemudian membiarkan mereka. Tindakan itu selalu terjadi setiap malam.

Namun demikian, anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan kekerasan. Pada akhirnya mereka melakukan proses adaptasi yang panjang dan memiliki cara pandang yang berbeda tentang peran diri dan pemaknaan mereka terhadap lingkungan. Penyesuaian diri menjadi kata kunci yang kuat yang didahului pergeseran dan kreativitas mengembangkan makna atau pemahaman. Dalam hal inilah bedah analisa dari perspetif subjektif

Fenomenologi dan penyadaraan model Logoterapi menjadi relevan dan penting untuk dibahas. Bedah analisis akan menghasilkan pemahaman dan kategori cara pandang anak tentang penyesuaian diri dan pemaknaan terhadap lingkungan jalanan mereka.

Logoterapi dari Viktor Frankl, memiliki sebuah keyakinan bahwa memahami dan menemukan makna melebihi batas-batas situasi dan kondisi apapun. Makna hidup ditemukan di setiap hidup dan dalam kondisi apapun ketika semua orang mengalaminya. Hidup tidak pernah akan berhenti untuk memiliki makna, bahkan dalam penderitaan dan kematian sekalipun.

Logoterapi (Afif, 2008), menjabarkan sebuah harapan kehidupan manusia yang lebih berharga dan bermakna. Kodrat manusia dalam Logoterapi dibangun diatas tiga asumsi dasar, yakni: (a) kebebasan bersikap dan berkehendak (*the freedom to will*); (b) kehendak untuk hidup bermakna (*the will to meaning*); dan (c) tentang makna hidup (*the meaning of life*).

Konsep kebebasan berkehendak (*the freedom to will*) memiliki sudut pandang bahwa pada dasarnya antitesa terhadap asumsi manusia yang ditentukan (deterministik). Frankl menyebut pandangan prinsip ini sebagai "pan-determinisme". Pan-determinisme adalah perspektif yang tidak menghormati kemampuan manusia untuk mengambil sikap demi mendapatkan atau meraih derajat yang diinginkannya. Frankl melawan asumsi behaviorisme dengan menyatakan perilaku manusia tidak sepenuhnya dikondisikan dan ditentukan oleh lingkungan.

Dalam konteks ini peneliti bertujuan untuk menjelaskan cara anak-anak pengemis di lingkungan Makam Sunan Gunung Jati memahami dirinya sebagai pengemis anak-anak. Pemahaman ini sifatnya mendalam dan "dialami" dalam keseharian yang kemudian dipilih secara bebas (proses logoterapi anak-anak). Kemudian berupaya menjelaskan pola-pola pemahaman tentang diri mereka dalam proses penyesuaian dalam lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan anak. Serta menjelaskan pemahaman tentang cara-cara atau strategi bertahan dalam lingkungan tersebut.

METODE

Fenomenologi merupakan studi yang membedah makna subjektif individu, dalam hal ini anak-anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis. Metode ini memiliki kekuatan untuk menjelaskan pemaknaan anak-anak terhadap dunia keseharian mereka. Sedangkan Logoterapi model fenomenologi Viktor Frankl menjadi lebih tajam pada pembahasan kreativitas anak-anak mengubah makna penderitaan menjadi sesuatu yang berbeda. Hakekatnya, usaha itu dipilih supaya mereka lebih bergembira, positif dalam melihat kelemahan, dan

membuat mereka menjadi tenang menghadapi keseharian, walaupun hakekatnya mereka adalah berbeda.

Penelitian ini dilakukan terhadap anak-anak yang mengemis di lingkungan wisata ziarah. Bagi anak-anak ziarah adalah kebiasaan yang memberikan rezeki melalui sedekah sebagai bagian dari ritual ziarah. Peneliti mencoba mewawancarai dan terlibat dalam permainan, obrolan, dan pengamatan langsung dengan anak-anak pengemis di lingkungan makam Sunan Gunung Jati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisata agama atau lebih dikenal dengan ziarah, tidak hanya sekedar menyajikan ritual ibadah. Seperti diketahui dalam kepercayaan sebagian umat Islam, berziarah ke makam para wali atau tokoh-tokoh besar, merupakan perjalanan sakral yang mengandung nilai-nilai transedental.

Namun demikian, ritual ziarah menyisakan sebagian kegiatan masyarakat untuk mendapatkan berkah sebagai sampingan ritual. Mereka mencari nafkah melalui sedekah para peziarah. Di satu sisi hal itu dianggap menyempurnakan kegiatan ritual untuk para peziarah. Namun, di sisi yang lain telah menimbulkan tindakan pengemis, meminta-minta, dan mungkin juga ketidaknyamanan bagi para peziarah.

Bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan miskin, mengemis di lokasi ziarah adalah sumber penghasilan yang bisa menyambung hidup mereka. Dengan fakta yang sudah cukup panjang yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kegiatan ziarah dengan aktivitas mengemis, sehingga memunculkan satu komunitas yang tidak semata-mata mengemis, tetapi komunitas dengan dinamika sosial yang cukup rumit.

Komunitas anak-anak jalanan yang bekerja mengemis di lokasi ziarah, adalah sub-komunitas jalanan yang memiliki dinamika sosial yang khas. Misalnya mereka memiliki relasi pertemanan, kompetisi, dan konflik yang seringkali membahayakan keselamatan mereka. Kondisi tersebut adalah bagian dari dinamika sosial mereka. Bahkan, jika dianalisis lebih dalam, konflik adalah perilaku sosial yang cukup dominan dibandingkan bentuk relasi lainnya.

Anak-anak miskin terjun mengemis dan bergaul dalam lingkungan yang keras dan kasar. Setiap hari mereka berebut uang recehan dari para peziarah, yang dilempar ke jalan yang ramai dan berebutan dimana membahayakan keselamatan mereka karena berlangsung dalam keramaian lalu lintas.

Anak jalanan yang bergerombol di lingkungan Makam Sunan Gunung Jati mengumpulkan uang dengan cara menunggu tawur/curakan. Mereka mengantarkan tamu ke lokasi-lokasi wisata dengan harapan balas jasa berupa uang dari tamu yang dibantuannya. Keadaan seperti ini, tidak lebih dari kegiatan mengemis dalam konteks keiatan religius.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa pendapat yang muncul pada anak-anak yang menjadi *key informant*. Mereka tidak semata-mata mengemis tetapi mendo'akan dan ikut berbahagia dengan orang-orang yang berbagi rejeki (peziarah) di lokasi ziarah. Secara nyata di lapangan memang hal itu dapat diterima, karena sebagian besar peziarah datang untuk memberikan sedekah dengan sukarela, ikhlas dan senang hati.

Momen-momen yang dimanfaatkan secara penuh oleh anak-anak untuk mengemis biasanya hari Minggu, malam Jum'at Kliwon pada setiap bulan, hari Maulid, Grebeg Syawal pada hari pertama sampai hari ketiga setelah hari Raya Idul Fitri, dan hari-hari besar Islam lainnya.

Hasil penelitian terhadap anak-anak pengemis menunjukkan tentang makna yang dikonstruksi anak-anak pengemis dalam menghadapi sulit dan kerasnya kehidupan di lokasi ziarah di sekitar Makam Gunung Jati. Makna tersebut disusun berdasarkan argumen atau alasan anak-anak turun mengemis.

Mampu Mengurangi Beban Orang Tua

Aktivitas anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis di lingkungan makam Gunung Jati yaitu, berusaha mencari uang dengan cara: (1) meminta sedekah kepada peziarah, (2) menunggu orang melempar uang yang lewat atau tawur atau curak, dan (3) membantu mengantarkan peziarah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan harapan mendapatkan upah dari jasa tersebut.

Sebagian besar anak yang ditemui dan menjadi informan melakukan seluruh kegiatan tersebut. Mereka telah menjalankan aktivitas tersebut rata-rata lebih dari tiga tahun.

Namun demikian, setiap anak ketika ditanyakan mengenai apa yang melatarbelakangi tindakan tersebut, jawaban cukup beragam. Walaupun jika ditarik "alasan utama" turun mengemis adalah mencari uang untuk berbagai kebutuhan. Tetapi, setiap anak membuat ilustrasi pemaknaan individual tentang aktivitas mereka. Hal ini menunjukkan pemaknaan mereka sendiri tentang tindakan dan pengalaman yang di alami selama berada di jalan berkaitan dengan mengemis.

Pada kategori pertama, di antara mereka ada yang memaknai bahwa turun mengemis hakekatnya adalah ingin mendapatkan uang sedekah. Namun dibalik usaha mencari uang tersebut mereka merasa menjadi individu yang telah berusaha memenuhi kebutuhan sendiri serta mengurangi beban orang tua. Mereka tidak menuntut uang jajan. Mereka telah memiliki otoritas terhadap apa yang telah mereka usahakan. Uang itu tidak perlu dipertanggungjawabkan pada orang tua mereka. Seorang anak mengatakan bahwa, "*Makan ya dari sini pak. Pulang ke rumah... kalau ada nasinya di makan, kalau gak ada ya cari sendiri pak.*"

Sebenarnya mereka mengetahui bahwa pekerjaan itu di larang, tetapi tetap dilakukan, karena mengemis telah memberikan uang dan memiliki teman yang menyenangkan. Di samping itu, walaupun dilarang turun mengemis oleh orang tua, namun jika uang yang didapatkan cukup banyak, mereka berbagi dengan orang tua.

Mencari Uang untuk Membayar Ongkos Sekolah

Jika sebagian anak *ngadang* (mencari) duit curak dengan mengemis untuk tujuan memenuhi kebutuhan sendiri, sebagian yang lain, mengemis adalah upaya mengumpulkan uang untuk membayar uang sekolah. Pada aspek ini mereka berusaha menggunakan uang hasil mengemis, untuk ongkos sekolah tiap hari, membayar spp (pada saat penelitian anak-anak wajib membayar spp).

Tidak dipungkiri memang, hampir seluruh anak-anak yang menjadi pengemis dalam penelitian ini adalah anak-anak yang masih bersekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, mengemis memiliki fungsi ganda bagi sebagian besar anak-anak; bermain dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian mereka seperti sekolah. Misalnya ada kalimat, "*Seneng, nameng ya alesannya ya banyak temen. Bercanda lah, rame. Bantu orang tua, ya bantu buat ongkos sekolah.*" Demikian juga dengan kalimat, "*Jadinya ya iseng-iseng aja, buat ini tambahan jajanan, buat bayar sekolah ya membantu sepuluh ribu sih. Sehari minimal 5000.*"

Dipaksa Orang Tua/Orang Lain untuk Mengemis

Pada kasus seperti ini, seorang anak dalam kondisi tidak berdaya untuk turun ke jalan karena di paksa orang tua untuk mengemis. Mereka menjadi "pekerja" bagi orang tuanya untuk mencari uang. Kasus ini terjadi pada seorang *key informant* yang bernama Ahmad. Ahmad masih berstatus sebagai pelajar kelas tiga di MTS Negeri kabupaten Cirebon. Bapaknya, Pak Sutedja bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan Ibunya, Ibu Donia ibu rumah tangga. Bagi Ahmad, turun ke jalan didorong oleh keinginan orang tua, terutama Bapaknya

agar Ahmad tidak tergantung pada orang tua dalam hal keuangan.

Ahmad menghabiskan waktunya di lokasi Watu Tameng dan nameng kurang lebih empat sampai enam jam sehari. Pada hari libur lebih dari enam jam nongkrong di Watu Tameng. Bahkan, jika malam Jum'at Kliwon atau hari-hari sibuk peziarah, jam mereka bisa bergerombol sampai jam tiga atau jam empat subuh.

Menurut Ahmad hal itu dilakukan setiap hari. Mengemis sepanjang hari bagi dirinya tidak menjadi masalah, yang paling penting Ahmad bisa mencari rejeki dan tidak tergantung pada orang tua seperti yang disarankan oleh bapaknya.

"Di jalan kalau pagi tuh jam 10-jam setengah dua belas pulang, terus jam 3 sampai sore. Terus main voli, sampai mahrib hampir tiap hari. Orang menyebutnya anak jalanan, gak masalah, orang cari rejeki kok. Gak ada enjoy aja pak. Uang Ya enggak dikasih ke orang tua. Orang tua tahu, malah saya disuruh sini pak. Katanya ya dari pada kamu minta uang orang tua kamu cari uang sendiri sana."

Jika diringkaskan kembali, anak-anak turun ke jalan dan mengemis, tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini tidak terpenuhi oleh orang tuanya. Mereka berusaha untuk menutupi kebutuhan dasar dan melepaskan beban orang tua. Selanjutnya, mayoritas dari mereka, turun ke jalan demi membantu orang tua menutupi atau memenuhi kebutuhan sekolah. Mereka terbiasa mendapatkan uang dan memanfaatkan uang itu untuk membeli buku, ongkos sekolah, atau keperluan sekolah lainnya. Sedangkan pemaknaan peran diri terakhir yaitu, anak turun ke jalan karena didorong oleh orang tua, karena secara ekonomis orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Diskusi Peran dan Penyesuaian Diri Anak Pengemis

Fungsi-fungsi keluarga yang lebih besar, terutama dalam memenuhi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak, sebagai generasi penerus keluarga, jika diperluas, menurut Soekanto (2004: 2) menjadi: (1) Pengatur hubungan seksual yang seyogyanya diperankan oleh ayah-ibu sebagaimana pasangan yang telah dilegalkan oleh norma-norma yang berlaku. (2) Wadah tempat berlangsungnya sosialisasi, yakni proses di mana anggota-anggota masyarakat yang baru mendapatkan pendidikan untuk mengenal, memahami, mentaati, dan menghargai kaidah-kaidah serta nilai-nilai berlaku. (3) Unit terkecil dalam masyarakat yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomis, dan (4) Unit terkecil dalam masyarakat tempat anggota-anggotanya mendapatkan perlindungan bagi ketenteraman dan perkembangan jiwanya.

Namun demikian, jika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan konsekuensi tertentu. Misalnya perpecahan atau perceraian, dan terbengkalainya anggota-anggota keluarga yang memiliki posisi lebih rentan, dalam hal ini anak. Anak akan menjadi korban sebagai pihak yang paling banyak dirugikan manakala keluarga tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga sepenuhnya.

Munculnya fenomena anak jalanan atau anak terlantar, merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari keadaan keluarga yang tidak mampu memenuhi; fungsi pemenuhan dasar (bilogis), fungsi psikologis (kebutuhan kasih sayang atau afeksi) dan fungsi pemenuhan kebutuhan sosial. Kondisi tersebut, telah mendorong anak-anak mencari bentuk kelompok dan hubungan sosial dalam upaya mendapatkan hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh keluarga.

Dalam permasalahan anak jalanan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar oleh keluarga, akibat ketidakmampuan secara ekonomis, telah mendorong anak-anak turun ke jalan dan berusaha mendapatkan kebutuhan tersebut dari anggota kelompok atau orang-orang dewasa lain yang ditemui selama mereka berada di jalanan. Mereka memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, berbagi perasaan dan solidaritas dan belajar bertindak atau mengambil keputusan, dengan komunitas di jalanan. Mereka belajar sesuatu, mengambil keputusan dan bertindak dengan cara-cara yang didapatkan dari komunitas jalanan. Di samping juga mereka membangun interaksi dengan menggunakan prinsip-prinsip, aturan, nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas jalanan.

Manakala fungsi-fungsi pemenuhan kebutuhan anak tidak dapat dilakukan oleh keluarga, mereka "menemukan" keluarga kedua yakni anggota kelompok di jalanan. Melalui interaksi sosial jalanan, mereka mendapatkan "pesona" interaksi dengan komunitas tersebut, seperti; anggota kelompok anak jalanan, pengamen jalanan, preman, petugas keamanan, pengemudi, pedagang kaki lima, penumpang bis, pedagang asongan, dan individu-individu lain yang memiliki kepentingan selama berada di jalan.

Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa cara pandang dunia dari anak-anak telah melahirkan proses adaptasi secara kreatif dan mandiri. Mereka terlantar dan bekerja mengemis, karena hanya itu yang mereka ketahui untuk memenuhi kebutuhan dasar, psikologis/afeksi dan sosial. Mereka tidak meratapi dan terkungkung dalam ketidakmampuan. Mereka tidak belajar untuk menyesali tetapi beberapa anak secara belajar memecahkan masalah yaitu dengan mengemis.

Dalam analisa Logoterapi, dimensi ini disebut dengan pemahaman atas ketidakberdayaan/ketertindasan. Namun tidak mematikan semangat untuk mencari perubahan dan peluang terlepas dari ketidakberdayaan dengan upaya yang mereka pikirkan dan perbuat secara mandiri dan kreatif. Seperti dalam proposisi Logoterapi bahwa, manusia dimana dalam kondisi ketertindasan/ketidakberdayaan tetap memiliki; (a) kebebasan bersikap dan berkehendak (*the freedom to will*); (b) kehendak untuk hidup bermakna (*the will to meaning*); dan (c) tentang makna hidup (*the meaning of life*).

Logoterapi Frankl sebagai salah satu bentuk fenomenologi atas hidup, menjelaskan bahwa manusia berusaha menemukan makna dengan prinsi-prinsip; (1) Hidup memiliki makna dalam semua keadaan, bahkan dalam situasi yang paling menyedihkan, (2) Motivasi utama manusia untuk hidup adalah kehendak manusia itu sendiri untuk menemukan makna dalam kehidupannya, (3) Manusia memiliki kebebasan untuk menemukan makna dalam apa yang dikerjakannya, dan apa yang dialaminya, atau setidaknya di dalam pendirian yang mereka pilih ketika mereka dihadapkan pada situasi penderitaan (*suffer*) yang tidak bisa diubah.

Proses sosialisasi dan penyesuaian yang didahului dengan pemaknaan mereka, kelompok individu jalanan memiliki aturan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip sendiri. Mereka bisa disebut komunitas dengan kultur yang dapat dibedakan dari subkultur lainnya. Dalam hal ini seperti gangster, *skinheads*, lesbian, dan kaum homoseks, dan *hipies*. Interaksi kelompok-kelompok orang di jalanan memiliki sistem atau hubungan dengan nilai-nilai yang mereka miliki, kepentingan yang mereka miliki, bahkan sistem simbol dan bahasa yang digunakan demi memelihara penyesuaian atau adaptasi demi keberlangsungan hidup mereka.

Sebagai sebuah komunitas, ketika anak jalanan berinteraksi dengan kelompok tersebut mereka akan membangun makna tentang orang-orang tersebut dan mereka sendiri membangun makna mengenai dirinya. Disinilah peran pemaknaan subyektif dan obyektif menjadi muncul manakala terjadi kontak di antara keduanya, (Berger dan Luckman tentang Teori Realitas Sosial (Horton dan Hunt, 1984: 17-18).

Interpretasi subyektif yang berkembang pada anak sehubungan dengan interaksi yang terjadi dengan subkultur jalanan di satu pihak dan kondisi atau keadaan keluarga di lain pihak akan mengkonstruksi anak tentang definisi diri. Mengapa demikian? Anak dalam perkembangan masa remaja dan menjelang memasuki usia remaja akan mementingkan proses definisi diri demi perkembangan selanjutnya, yaitu menetapkan diri pada masa dewasa. Mereka

menghadapi sebuah fase “kebingungan” tentang siapa dirinya dan mau ke mana dirinya.

Proses definisi diri atau pemaknaan, merupakan tahapan perkembangan anak secara psikososial. Dalam tahapan ini mereka berusaha membangun otonomi, kemandirian, dan sebagai inti kelompok, dengan kesadaran batinnya untuk menjadi “AKU”. Seperti yang dikemukakan oleh Erikson dalam perkembangan psikososial anak dengan teorinya yang diberi nama “Delapan Tahapan Kehidupan Erikson”, bahwa seseorang yang sedang mencari identitas diri sedang berusaha “menjadi seseorang” yang berarti, berusaha mengalami diri sendiri sebagai “AKU” yang bersifat sentral, mandiri, unik, yang mempunyai sesuatu kesadaran akan kesatuan batinnya, sekaligus juga berarti menjadi “seseorang” yang diterima dan diakui oleh orang banyak (Horton and Hunt, 1984: 111-112, dan Desmita, 2005: 211).

Hal ini bisa dilihat dalam fakta di lapangan bahwa, hampir seluruh anak-anak jalanan yang menjadi subyek penelitian, baik di lokasi wisata Kabupaten Cirebon maupun pengamen dan tukang parkir di Kota Cirebon, menganggap dirinya sebagai individu yang hidup di jalanan dengan mengedepankan alasan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makan, minum, pakaian, dan kebutuhan sekolah. Bagi anak-anak, hal yang lumrah bahwa penghasilan mereka digunakan untuk kebutuhan makan-minum sehari-hari, merokok, belanja pakaian dan membayar iuran dan ongkos sekolah. Bahkan beberapa di antara mereka memberikan sebagian penghasilan tersebut bagi kepentingan keluarga, yakni kebutuhan harian orang tua yang sebagian dipenuhi oleh anak-anak mereka dari hasil mengamen maupun mengemis di jalanan.

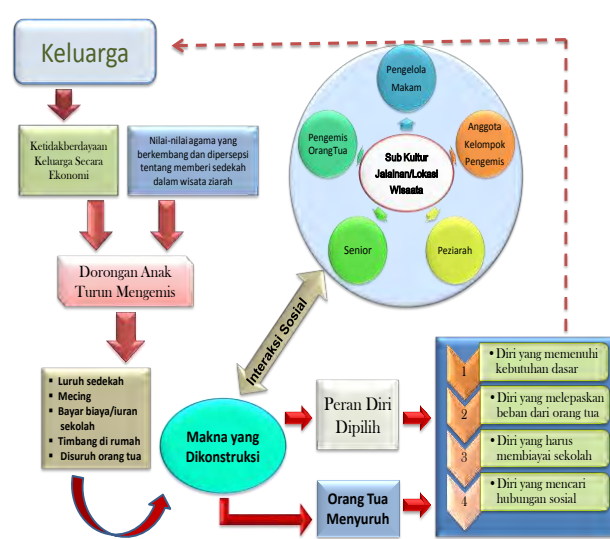
Namun tidak berarti bahwa dengan penghasilan yang cukup, sentralisasi, otonomi, kemandirian dan individualitas anak jalanan, menyebabkan tindakan/kelakuan seperti penggunaan penghasilan dilakukan berdasarkan kata hati mereka. Kuatnya pengaruh orang dewasa, senior dan *peer-group* jalanan, menyebabkan mereka menjadi memiliki kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan seorang anak yang disadari. Mereka terbiasa menggunakan penghasilan mereka untuk kebutuhan yang tidak lazim bagi seorang anak, misalnya merokok adalah kebutuhan dasar bagi anak jalanan. Kemudian sadar adanya kebutuhan untuk menyuap atau memberikan sebagian penghasilan kepada senior, adalah bagian dari kebutuhan mereka. Selanjutnya minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obat terlarang adalah bagian dari kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi anak-anak setelah mereka belajar dari orang-orang di sekitarnya.

Kondisi di mana anak berada dalam kebingungan akibat ketidakmampuan ekonomi di satu sisi, dan keadaan riil yang ditemui anak di jalanan manakala berinteraksi dengan aturan, prinsip dan nilai-nilai atau kultur jalanan di pihak lain, membuat anak-anak memiliki identifikasi diri yang berbeda dengan anak-anak yang berkembang dalam lingkungan normal. Anak-anak memiliki sikap proaktivitas dan resiliensi untuk menjadi AKU atau DIRI yang unik jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Mereka memaknai secara spesifik tentang peran diri yang harus dijalankan agar mampu bertahan di antara dua kepentingan itu. Pertama menjawab masalah dalam keluarga dan kedua, menyesuaikan diri untuk menghadapi situasi dan kondisi di jalanan.

AKU sebagai DIRI yang mampu menjawab masalah-masalah yang muncul dalam keluarga yakni akibat ketidakmampuan secara ekonomi, dan AKU sebagai DIRI yang mencoba beradaptasi dengan kultur jalanan, telah berhasil mendefinisikan dirinya. Mereka memiliki makna yang berbeda mengenai peran dirinya dalam menghadapi semua permasalahan. Makna PERAN DIRI dalam penyesuaian jalanan yang dikembangkan oleh anak-anak pengemis tersebut secara visual dapat dilihat pada gambar 1 tentang model peran diri anak-anak pengemis.

Model yang dikembangkan pada anak-anak pengemis di lokasi wisata ziarah Kabupaten Cirebon, dorongan anak turun ke jalan tidak semata-mata ketidakmampuan orang tua, tetapi juga karena faktor eksternal berupa nilai-nilai yang berkembang dalam lokasi wisata religius mengenai kewajiban bersedekah. Sedekah adalah elemen penting ketika peziarah berdo'a dan menjalankan ritual ziarah. Kondisi ini berkembang terus-menerus sehingga sedekah menjadi hal yang lazim bahkan cenderung dianggap “harus” menurut kacamata pengemis. Persepsi atas harus bersedekah juga di dorong oleh keyakinan agama yang menilai baik terhadap orang-orang yang memberikan sedekah.

Dalam hal ini, ada pertemuan antara keterdesakan pada kebutuhan ekonomi di satu pihak dan pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui usaha mengumpulkan uang sedekah. Sedekah dianggap cara yang mampu menjawab kebutuhan pengemis dan anak-anak terhadap sumber pendapatan. Pertemuan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan menjadi dua faktor yang sangat kuat yang menyebabkan mereka turun ke jalan untuk mengemis. Sehingga istilah-istilah yang muncul ketika menjelaskan alasan anak-anak maupun orang tua mengemis, senantiasa berkaitan dengan kepentingan mendapatkan uang sedekah seperti; *luru sedekah*, *mecing*, *ngadang curak* atau *ngadang tawur* dan lain-lain.



Gambar 1. Model Penyesuaian Peran Diri Anak-anak Pengemis selama di Jalanan dan di Lokasi Wisata Ziarah

Faktor-faktor pendorong untuk turun mengemis dan benturan-benturan pada saat interaksi sosial dengan orang-orang dewasa, telah membentuk makna peran diri mereka. Makna peran diri yang dikonstruksi yakni DIRI yang memenuhi kebutuhan dasar, DIRI yang melepaskan beban orang tua, DIRI yang memenuhi kebutuhan sekolah, DIRI yang mencari hubungan sosial, serta DIRI yang didorong terpaksa akibat orang tua.

SIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil pembahasan, adalah sebagai berikut:

1. Anak-anak pengemis memaknai secara berbeda dalam melihat situasi, setting dan perilaku orang-orang jalanan. Kondisi di mana anak berada dalam keadaan kritis akibat ketidakmampuan ekonomi di satu pihak, dan keadaan riil yang diterima dan ditemui anak di jalanan manakala mereka berinteraksi dengan aturan, prinsip dan nilai-nilai jalanan atau kultur jalanan di pihak lain, membuat anak-anak memiliki identifikasi diri yang berbeda dengan anak-anak yang berkembang dalam lingkungan yang normal. Anak-anak memiliki sikap proaktivitas dan resiliensi untuk menjadi AKU atau DIRI yang unik jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya.
2. Anak-anak berusaha membangun pemahaman dimana mengemis bagi mereka adalah tindakan yang baik dan menolong diri mereka. Sehingga mengemis dianggap sebagai tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, membantu orang tua, membayar biaya sekolah (jika masih sekolah) dan suruhan orang tua sebagai konversi dari sekedar melakukan tindakan yang tidak menghasilkan.

3. Terdapat pertemuan antara keterdesakan pada kebutuhan ekonomi di satu pihak dan pemenuhan kebutuhan ekonomi di lain pihak melalui usaha mengumpulkan uang sedekah. Sedekah dianggap cara yang mampu menjawab kebutuhan pengemis dan anak-anak terhadap sumber pendapatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi sebagai atasan, rekan-rekan dosen Fikom Unpad, tim Promotor pada saat menyelesaikan studi doktoral karena paper ini adalah bagian dari tugas akhir studi tersebut. Demikian halnya kepada anak-anak *key-informant* yang sekarang tumbuh dan berkembang menjadi remaja jalanan. Mereka telah memberikan cerita dan informasi yang berharga untuk tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afthonul Afif, "Kebermaknaan Hidup Versi Logoterapi," Rubrik Ide Koran Tempo, Minggu 10 Oktober 2004, Afthonul Afif diunduh dari <https://psikotikafif.wordpress.com/2008/06/25/21/>
- Bajari, Atwar., *Dinamika Komunikasi dan Perilaku Sosial Anak Menyimpang*, Bandung: Humaniora, 2012.
- Cuff, E.C., and G.C.F. Payne., *Perspective in Sociology*, London: George Allen and Unwin, 1981.
- Desmita., 2005. *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005
- Emily Delap, "Begging for Change, Research Findings and Recommendations on Forced Child Begging in Albania/Greece, India and Senegal," *Research Report*, Anti-Slavery International, 2009
- http://www.kompasiana.com/rivel/pekerja-anak-dan-kemiskinan_55182bfa813311ad689de7ca
- Human Rights Watch, "Where Do You Want Us to Go? Abuses against Street Children in Uganda," Uganda: Human Right, 2014.
- Jeremias Marseille, "The Spiritual Dimension in Logotherapy: Viktor Frankl's Contribution to Transpersonal Psychology," *The Journal of Transpersonal Psychology*, 1997, Vol. 29, No.1 diakses dari <http://www.atpweb.org/jtparchive/trps-29-97-01-001.pdf>
- Koswara, Iwan., Hari Muharam, dan Atwar Bajari., *Jejaring Penanganan Anak Jalanan, Sebuah Kajian Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Jalanan di Garut, Sumedang, dan Bandung.*, Bandung: Jurnal Pengabdian, Vol. 11 No. 5., LPM Unpad, Juni 2003.

- Kuswarno, Engkus, "Dunia Simbolik Pengemis Kota Bandung, Studi tentang Konstruksi Sosial dan Manajemen Komunikasi Para Pengemis di Kota Bandung," Bandung: *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2004
- Lembaga Manajemen Komunikasi, Program Ilmu Komunikasi, "Studi Longitudinal Penanganan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah," Jakarta: *Laporan Penelitian*, Program Pascasarjana UI, 2002
- LPM Unpad, "Jejaring Penanganan Anak Jalanan, Sebuah Kajian Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Jalanan di Garut, Sumedang, dan Bandung", Bandung: *Jurnal Pengabdian*, Vol. 11 No. 5., LPM Unpad, Juni 2003.
- Nadia Azam, "Beggarrization: Beggary as an Organized Crime in Pakistan," *Thesis*, University of Kansas, Desember, 2014.
- Tjandraningsih, Indrasari, dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, Bandung: AKATIGA, 2002.
- Unicef dan Pemerintahan Kota Cirebon, *Lingkungan Protektif bagi Anak, Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak 2003*, Bandung: Unicef, 2003.
- Soeprapto, Riyadi., H.R., 2002. *Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*, Malang: Averoes Press.
- Soekanto, Soerjono, 2004. *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, Jakarta: Rineka Citra.

Homofobia dalam Film *Dallas Buyers Club* (2013)

Novia Adibatus Shofah

Magister Kajian Sastra dan Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga
e-mail: novadibatus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membongkar film *Dallas Buyers Club* sebagai salah satu dari wahana politik budaya yang menyimpan pertarungan identitas melalui representasi kaum heteronormatif dan kaum non heteronormatif dalam film *Dallas Buyers Club*, ternyata diketahui adanya misi homofobia yang tetap unggul melalui pelabelan kaum non heteronormatif di film tersebut. Posisi teori semiotika Roland Barthes yaitu pada pembedahan fragmen gambar film yang berperan ketika peneliti mengungkap bagaimana kaum heteronormatif dan kaum non heteronormatif direpresentasikan melalui segala hal yang tampak secara visual pada gambar film. Kemudian, guna mengungkap adanya misi homofobia di dalam film *Dallas Buyers Club*, maka teori Queer dimanfaatkan peneliti sebagai teori lanjutan guna membongkar misi homofobia yang merupakan salah satu dari isu Queer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data semiotika Roland Barthes yang mengungkap segala sesuatu yang tampak secara visual pada gambar film *Dallas Buyers Club* yang mengandung isu Queer. Hasil penelitian membuktikan bahwa *Dallas Buyers Club* menghadirkan pertarungan identitas antara golongan heteronormatif dan non-heteronormatif dalam wahana politik budaya yang ternyata dimenangkan oleh kaum heteronormatif melalui adanya pelabelan negatif yang direpresentasikan terhadap kaum non heteronormatif di tengah-tengah kaum heteronormatif. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya misi untuk melanggengkan homofobia di tengah-tengah kaum heteronormatif yang menilai kaum non heteronormatif sebagai pembawa tindak anarkis, tidak tertib, dan penentang hukum. Implikasi dari penelitian ini diketahui melalui makna implisit di balik misi homofobia di dalam film tersebut, yaitu adanya kebebasan untuk memperlakukan kaum non heteronormatif misalnya dengan cara-cara yang negatif karena kaum non heteronormatif lah yang memiliki label negatif. Melalui penelitian ini, pembaca diharap lebih kritis dalam menanggapi isu di tengah-tengah masyarakat melalui media.

Kata Kunci: film, kaum heteronormatif dan kaum non heteronormatif, pelabelan negatif, queer, homofobia, semiotika

PENDAHULUAN

Film adalah salah satu media yang hadir sebagai wahana politik budaya. Film menghadirkan berbagai macam wacana berdasarkan penggambaran sosial budaya dan suasana politik. Oleh karena itu, peneliti dapat menyebutkan film merupakan budaya media yang di dalamnya terdapat persaingan antara yang dominan dengan yang tidak dan antara yang berkuasa dengan yang lemah yang kemudian menimbulkan pertentangan. Melalui kajian budaya, maka akan dapat digali lebih dalam apa saja dampak serta cara menyikapi sebuah teks yang mengusung pertentangan, apakah pertentangan tersebut melibatkan ideologi, atau identitas, atau politik kebudayaan (Kellner, 2010:77).

Dalam hal ini, penelitian ini memilih objek film *Dallas Buyers Club* sebagai objek penelitian. *Dallas Buyers Club* adalah film yang disutradarai oleh Jean-Marc Vallée dan tayang perdana pada 22 November 2013. Film *Dallas Buyers Club* yang bergenre biografi dan drama diproduksi oleh Truth Entertainment di Amerika Serikat. Pemain utamanya adalah tokoh Ron Woodroof sebagai seorang heteroseksual dan tokoh Rayon sebagai seorang gay (Amazon, 2013).

Film yang berdurasi 116 menit ini menghadirkan isu menarik yang disesuaikan dengan latar film tersebut yaitu pada tahun 1985 adanya pelabelan negatif terhadap dunia gay yang digambarkan dekat dengan penyakit AIDS. Pelabelan negatif terhadap kehidupan kaum gay dimaksudkan untuk tetap melanggengkan heteroseksual sebagai kehidupan yang benar dan normal, sehingga citra negatif harus ada untuk memberikan kesan homofobia di dalam masyarakat. Telah diketahui bahwa, dalam penelitian ini yang merupakan kajian budaya dimana jelas berbeda dengan studi budaya. Jika studi film hanya berpusat terhadap posisi penonton, analisis tekstual, makna ditentukan melalui proses produksi, dan pembaca yang pasif serta penuh dengan ketidaksadaran, maka kajian budaya film lebih terhadap pencarian makna yang yang diperoleh melalui konsumsi pembaca yang secara aktif dan penuh kesadaran (Storey, 2010:86).

Dallas Buyers Club berlatar pada tahun 1985 di Amerika. Film ini menceritakan perjuangan Ron sebagai seorang tukang listrik dan cowboy untuk bertahan hidup karena penyakit AIDS yang dideritanya. Dikarenakan pada saat itu dokter masih belum

menemukan obat yang baik untuk tubuh pengidap AIDS, maka Ron berusaha membeli obat secara ilegal hingga membuat kesehatannya terus menurun. Hingga akhirnya ia dipertemukan dengan seorang kenalan kepada dokter yang berstatus ilegal (atau dicabut izin prakteknya) untuk mendapatkan obat yang mujarab. Tujuan Ron yang semula mengkonsumsi obat untuk bertahan hidup ternyata membelok terhadap penjualan obat hingga membuat komunitas club bersama kenalan gaynya yaitu Rayon. Ternyata, melalui Rayon itulah bisnis Ron menjadi berkembang karena para konsumennya kebanyakan adalah orang-orang gay kenalan si Rayon. Rayon adalah seorang laki-laki yang memiliki orientasi seksual sesama jenis. Dia mengidap AIDS dan dikucilkan dari keluarga. Ketika bertemu dengan Ron, Rayon merasa memiliki teman baik dan menjalani kehidupan barunya tetap sebagai seorang gay.

Permasalahan yang diangkat dalam film Dallas Buyers Club adalah pelabelan negatif terhadap kaum gay yang digambarkan dekat dengan penyakit AIDS, penentang aturan hukum, dan jauh dari keluarga maupun teman. Permasalahan tersebut digambarkan oleh kaum heteroseksual yang diwakili oleh tokoh Ron dan kaum non heteroseksual yang diwakili oleh tokoh Rayon. Melalui penggambaran yang terkesan negatif tersebut misi kaum heteroseksual untuk menciptakan homofobia menjadi sangat terlihat, namun makna implisit apakah di balik misi homofobia yang akan menjadi temuan dalam penelitian ini. Penggambaran label negatif ditandai dengan kehidupan Ron sebagai seorang heteroseksual yang dekat dengan seorang gay yaitu Rayon harus berurusan dengan hukum karena penjualan obat AIDS yang ilegal dan kehidupan Rayon yang digambarkan menderita akibat penyakit AIDSnya dan pilihan hidupnya untuk menjadi gay menjadi dikucilkan keluarga dan teman sekitar.

Penelitian ini akan mengungkap homofobia sebagai bagian dari pembangunan isu queer melalui teori semiotika Roland Barthes mengenai telaah fragmen gambar dalam film yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu, (1) lapisan informasional, (2) lapisan simbolis, dan (3) makna ketiga.

Melalui penelitian ini terungkap bahwa penanaman label negatif terhadap kaum gay sudah ditanamkan di dalam masyarakat heteronormatif sejak dulu. Pada zaman dahulu, masyarakat heteronormatif sudah diberi peringatan akan bahaya yang terjadi apabila berhubungan dengan cara yang menyimpang, yaitu akan mendatangkan penyakit. Padahal yang akan terkena penyakit tidak hanya seorang homoseksual saja, namun seorang heteroseksual juga akan berpotensi terkena penyakit. Namun, yang menjadi fokus terhadap bahaya penyakit adalah kaum homoseksual. Selain itu juga diperlihatkan pula bahwa masyarakat yang tinggal di lingkungan homoseksual juga akan berkecenderungan hidup di bawah bayang-bayang kejahatan dan berurusan dengan hukum. Melalui

pelabelan negatif seperti itu akhirnya masyarakat heteroseksual menjadi homofobia, yaitu adanya rasa takut untuk ikut campur di dalam kehidupan seorang gay. Homofobia yang berarti adanya ketakutan terhadap kaum homoseksual. Rasa takut yang ditanamkan adalah melalui pelabelan negatif dan secara tidak sadar kaum heteronormatif akan bertindak waspada meski harus dengan cara-cara negatif agar tidak menghirup kehidupan kaum homoseksual. Jadi sebenarnya, misi homofobia ditanamkan untuk menenggelamkan kekuatan kaum non heteronormatif agar identitas yang satu-satunya layak hadir dan eksis di masyarakat hanyalah kaum yang beridentitas heteronormatif. Itulah maksud dan tujuan film Dallas Buyers Club hadir dengan membawa label gay yang sangat negatif serta merugikan.

Untuk menganalisis film guna mendapatkan suatu makna yang tersirat, maka diperlukan pemahaman atas teori yang dapat membedah setiap informasi yang terlihat dalam gambar film, maka penelitian ini memanfaatkan teori fragmen gambar film Roland Barthes. Terdapat tiga tahapan untuk mencapai tahap terakhir yaitu mitos.

1. Lapisan informasional

Pada tahapan pertama, segala sesuatu yang tampak secara visual di dalam gambar harus dimaknai secara denotatif. Adapun segala sesuatu yang harus dianalisis dalam tahap ini adalah latar, kostum, tata letak, karakter, kontak, gerak laku tokoh, sudut pengambilan gambar maupun kamera, pengambilan angle, juga berpengaruh terhadap hasil makna denotatif. Setelah mengetahui segala aspek dalam lapisan informasional maka selanjutnya adalah menuju tahap untuk mengetahui makna konotatif yang dihasilkan.

2. Lapisan simbolis

Pada tahapan ini, segala sesuatu yang tampak pada gambar film diinterpretasi hingga menghasilkan sebuah makna kedua, yaitu konotasi. Makna yang dihasilkan pun berdasarkan latar belakang, kondisi sosial, dan pengetahuan si pemberi makna. Segala aspek yang berbau simbolis dalam gambar film memiliki makna lain yang lebih mendalam daripada kelihatannya saja (*surface meaning*). Maka dalam tahap kedua ini disebut juga sebagai tahapan mencari *deep meaning*.

3. Makna ketiga

Di balik makna kedua yang dihasilkan melalui hasil interpretasi, ternyata menyimpan sebuah mitos yang nampaknya terselubung dan tersirat. Segala sesuatu yang bermakna dalam memiliki tujuan ataupun maksud lain di balik pemaknaan yang dihasilkan. Maka, pada tahapan terakhir inilah akan diketahui mitos yang terkandung pada gambar film (Barthes, 1990:41-67).

Sebelum melangkah jauh menuju Queer, maka peneliti akan memaparkan perbedaan antara LGBT dan Queer. LGBT atau *Lesbian Gay Bisex Transgender* adalah suatu istilah yang hadir di tengah-tengah rezim modern di bidang biologi. LGBT hanya berpusat terhadap bagaimana sex yang dimiliki seseorang menjalankan hubungan intim secara tidak semestinya atau dalam bahasa kasarnya adalah mengidap kelainan sex. Ada tiga kata yang harus diingat perbedaannya apabila berbicara mengenai Queer, yaitu sex, gender, dan seksualitas. Sex adalah jenis kelamin. Gender adanya performativitas seseorang yang memiliki sex laki-laki dan perempuan. Performativitas yang dimaksud adalah merujuk kepada Judith Butler yang mengemukakan pendapatnya bahwa seseorang yang ber-sex perempuan bisa menjadi seorang feminin dan maskulin di saat yang berbeda, begitu juga dengan seseorang yang ber-sex laki-laki, bisa berlaku feminin dan maskulin tergantung dengan keadaan budaya (Sugiarti, 2002: 4-9).

Kemudian seksualitas adalah kecenderungan untuk berlaku menjadi homososial atau homoseks. Seseorang yang bersex laki-laki dapat memiliki kekaguman terhadap seorang laki-laki juga ketika berinteraksi secara sosial, namun tidak selalu ingin menyalurkan hasratnya untuk berhubungan seksual, maka seseorang tersebut sudah dapat dipastikan memiliki gaya seksualitas yang aneh, yaitu di satu sisi mengagumi sesama jenis, namun di satu sisi juga bernafsu dengan lawan jenis. Jadi, dalam seksualitas, selalu ada permainan-permainan antara sex dan gender, ada kekuasaan yang mengatur di dalam sana (Foucault, 2008:119).

Pada mulanya, queer adalah keanehan dalam orientasi seks, namun kemudian tidak dianggap suatu keanehan lagi, sebab orientasi seksual yang non heteronormatif bukanlah hal yang menyimpang, tapi natural. Queer tidak memandang konstruksi tradisional gender yaitu heteronormatif, konsep yang benar dan diikuti seluruh masyarakat bahwa laki-laki berhubungan dengan perempuan, maupun sebaliknya. Queer menganggap bahwa orang yang memiliki sex perempuan tidak harus memiliki ketertarikan terhadap laki-laki, maupun sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan queer tidak melihat sex sebagai penentu gender. Salah satu pencetusnya adalah Judith Butler yang menganggap bahwa gender adalah hal yang fluid karena identitas gender didapat melalui tindakan-tindakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sarah Salih:

“Butler does claim that gender identity is a sequence of acts.” (Salih, 2002:45)

Dapat disimpulkan bahwa Butler tidak setuju jika sex seseorang sebagai penentu gender. Seseorang yang terlahir memiliki kelamin perempuan maka harus bergender feminin, sedangkan yang terlahir memiliki kelamin laki-laki maka harus bergender maskulin. Sehingga gender yang terbentuk menjadi penentu

orientasi seksual, laki-laki berhubungan dengan perempuan dan begitu sebaliknya. Hal tersebut dapat bertolak belakang dengan konsep Butler, bahwa identitas gender didapat melalui tindakan-tindakannya. Jadi, seorang perempuan tidak harus bergender feminin dan memiliki orientasi seksual dengan laki-laki, namun perempuan dapat juga bergender maskulin dan memiliki orientasi seksual dengan perempuan juga. Gender merupakan sesuatu yang tidak alami, sehingga tidak mengharuskan seorang perempuan menunjukkan keperempuanannya atau feminin, namun dapat menunjukkan identitasnya sebagai perempuan maskulin. Atau seorang laki-laki yang tidak harus dan wajib menunjukkan sifat kelaki-lakiannya atau maskulin, namun dapat juga memilih identitas sebagai laki-laki feminin (Salih, 2002:46).

Adanya hal demikian membuat jelas kaum heteronormatif menjadi terancam karena keberadaan kaum non heteronormatif. Sehingga muncullah homofobia yaitu pandangan masyarakat heteroseksual yang ketakutan terhadap hubungan sesama jenis. Ketakutan yang tercipta di dalam masyarakat heteroseksual tetap eksis karena pemberian label negatif terhadap kaum homoseksual yaitu intimidasi, pelecehan, ketidakadilan dalam masyarakat, dan tindak perilaku negatif lainnya. Keberadaan kaum gay yang dipenuhi dengan pandangan negatif serta perlakuan yang berbeda membuat mereka lebih memilih untuk menyimpan identitas yang sesungguhnya. Penolakan homoseksual di dalam masyarakat yang dominan yaitu masyarakat heteroseksual dikarenakan adanya penanaman homofobia. Homofobia yang diciptakan oleh masyarakat heteroseksual digunakan sebagai alat untuk membentengi diri mereka akan ancaman homoseksual. Sehingga masyarakat heteroseksual secara berkelanjutan masih memberikan tekanan terhadap kaum homoseksual (Rahardjo, Homophobia dan Kita, 2009:11-13).

Pada dasarnya, homofobia sendiri mayoritas diperlihatkan oleh kaum pria dari wanita. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dengan ego maskulinitasnya bermain sehingga ia tidak mau terlihat lemah dan seperti perempuan. Hal tersebut merupakan penolakan keras dari seorang laki-laki yang heteroseksual terhadap kaum homoseksual. Homofobia akan selalu berada di masyarakat yang heteroseksual karena adanya heteroseksisme. Heteroseksisme adalah ideologi yang menganggap bahwa hubungan seksual yang benar adalah yang berada di bawah perlindungan hukum, yaitu hubungan yang heteroseksual. Sehingga pandangan mengenai sisi lain dari homoseksual akan selalu berlabel negatif karena homoseksual masih belum memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk melawan heteroseksisme. Homofobia tercipta dari masyarakat secara tidak sadar dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah homoseksual adalah sesuatu yang langka, tidak lazim, dan aneh, kemudian homoseksual berlawanan dengan agama sehingga dianggap dosa besar, dan homoseksual adalah

hubungan yang tidak terpuji dan bermanfaat. Oleh karena itu banyak penolakan atas kaum homoseksual hingga sekarang (Rahardjo, 2007:194-197).

Pada kaum homoseksual, tidak sepenuhnya ketika berinteraksi di masyarakat selalu bertindak feminim, namun ada kalanya berlaku maskulin. Begitu juga pada kaum heteroseksual, ada kalanya seseorang yang ber-sex laki-laki menjadi terlihat lemah akibat suatu budaya, maka dapat disimpulkan bahwa seorang yang ber-sex laki-laki maupun perempuan tidak akan selalu bergender feminim atau maskulin, dalam hal ini gender adalah fluid, cair, begitu juga dengan seksualitas, sehingga melahirkan keanehan-keanehan. Maka muncullah istilah Queer yang lebih menyangkup semuanya di antara ketiga aspek tadi (sex, gender, seksualitas), sehingga homofobia yang sebenarnya masih ditanamkan di masyarakat hanyalah suatu pertahanan untuk melanggengkan kekuasaan kaum heteronormatif, dengan berdalih bahwa yang benar dan beradab hanyalah yang tetap, padahal gender bersifat fluid.

METODE

Sumber data pokok dalam penelitian ini adalah film Dallas Buyers Club (2013) yang didapat peneliti melalui tempat penyewaan film di kota Lamongan. Alasan dipilihnya film Dallas Buyers Club (2013) sebagai sumber data karena dalam film ini mengungkap tujuan lain di balik pelabelan negatif kehidupan kaum homoseksual yaitu penanaman pandangan homofobia. Sumber data pendukungnya adalah referensi kepustakaan yang mendukung pemahaman atas salah satu dari konsep Queer, yaitu homofobia dan teori semiotika Rolland Barthes mengenai telaah fragmen gambar film.

Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode simak catat karena objek yang digunakan yakni film sehingga menyimak dan menonton film kemudian mencatat hal-hal yang menunjang data penelitian. Prosedur pengumpulan data yakni:

- a. Memutar film Dallas Buyers Club (2013)
- b. Mencari dan mencatat data-data yang menunjukkan salah satu konsep dari isu queer yaitu homophobia.

Penelitian ini akan mengungkap homofobia sebagai bagian dari isu queer melalui teori semiotika Rolland Barthes mengenai telaah fragmen gambar dalam film yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu, (1) lapisan informasional, (2) lapisan simbolis, dan (3) makna ketiga. Sehingga melalui teknis analisis fragmen gambar film akan diketahui makna sesungguhnya dalam film ini yaitu penanaman pandangan homofobia. Berikut teknis analisis yang dilakukan:

1. Mengungkap makna denotatif dari segala aspek di dalam lapisan informasional film Dallas Buyers

Club (2013) atau yang disebut dengan semiotika tingkat pertama

2. Mengungkap makna konotatif yang dihasilkan melalui interpretasi lapisan informasional film Dallas Buyers Club (2013) atau yang disebut dengan semiotika tingkat kedua
3. Mengungkap mitos atau makna ketiga dari hasil interpretasi yang dilakukan melalui hasil deskriptif, hasil interpretasi, dan hasil eksplanasi yang kemudian diketahui makna ketiga di dalam film Dallas Buyers Club (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membuktikan bahwa film Dallas Buyers Club (2013) menyimpan misi untuk menanamkan pandangan homofobia, maka peneliti melakukan pemaknaan secara denotatif, konotatif, dan menghasilkan sebuah mitos melalui teori Rolland Barthes mengenai telaah fragmen gambar film.

Untuk mengetahui bagaimana pelabelan negatif terhadap tokoh Ron dan Rayon, maka aspek pertama dalam telaah fragmen gambar film yaitu lapisan informasional dimanfaatkan untuk mengetahui latar latar (*setting*), kostum, tata letak, karakter, kontak atau relasi antar tokoh, dan gerak-laku tokoh dalam film Dallas Buyers Club (2013), kemudian lapisan simbolik serta makna ketiga yang didapat. Latar film Dallas Buyers Club (2013) adalah pada tahun 1985 di Amerika Serikat. Kostum yang digunakan oleh para tokoh terutama tokoh Ron sebagai tokoh utama dalam film Dallas Buyers Club (2013) adalah pakaian ala *cowboy*. Kostum yang digunakan terlihat santai dan *casual*. Hal tersebut menandakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh tokoh dekat dengan kebebasan dan selalu mengikuti alur tanpa adanya peraturan.

Sedangkan tata letak seperti pengambilan gambarnya adalah *close up* untuk memperlihatkan kepada penonton bahwa apa yang sedang diperlihatkan harus fokus terhadap tokoh tersebut. Sedangkan sudut pengambilan kamera dalam film Dallas Buyers Club (2013) adalah *small angle*.



Gambar 1: Close up dan Small angle

Pengambilan gambar dengan small angle serta pose dari tokoh yang tersenyum sinis meski sedang terluka menggambarkan bahwa film ini ingin membuat penonton fokus terhadap tokoh utama tersebut yang memiliki permasalahan hukum. Meskipun tokoh tersebut memiliki hukum, namun yang terlihat adalah kejantanan dan ketangguhan tokoh. Hal ini merupakan penggambaran film dalam melancarkan misinya untuk menanamkan homofobia. Meski tokoh utama tersebut yaitu Ron bukan seorang homoseksual dan ia telah berada di lingkungan orang homo, maka besar kemungkinan untuk ikut terlibat di dalam label negatif. Melalui gambar ini dapat disimpulkan bahwa akan selalu berbahaya untuk dekat-dekat atau berkumpul dengan seorang homoseksual. Yaitu ditandai dengan luka fisik pada tokoh Ron.

Lapisan informasional selanjutnya yang perlu dikaji adalah relasi antar tokoh serta gerak lakunya.



Gambar 2:
dari kiri ke kanan (Rayon seorang gay-teman Ron-Ron)

Seorang gay yaitu tokoh Rayon digambarkan dalam gambar film bahwa ia mendapat penolakan terhadap orang heteroseksual (teman Ron) bahkan hanya untuk sekedar berjabat tangan. Melalui gambar film tersebut terlihat bahwa pada film ini, pelabelan negatif terhadap kaum homoseksual selalu diperlihatkan.

Dari mimik tokoh tengah terlihat bahwa ia malu dan risih mengetahui ada seorang laki-laki yang berkostum perempuan, dan juga berbicara seperti perempuan. Perasaan malu, selalui identik dengan perempuan karena sisi feminimnya. Namun, tanpa disadari, tokoh tengah pun juga memiliki rasa malu yang merupakan salah satu dari ciri feminim. Maka dapat diketahui bahwa, baik seorang bersex laki-laki maupun perempuan akan tidak selalu bisa tetap bergender feminim saja atau maskulin saja, pasti akan selalu ada kombinasi diantara keduanya. Karakteristik malu dimiliki oleh seseorang yang bersex laki dan perempuan, perasaan marah dan menunjukkan keberaniannya juga dapat dimiliki oleh laki maupun perempuan. Maka kaum heteronormatif pun dapat bisa dikatakan Queer akibat gender yang fluid tidak kaku, namun kaum heteronormatif masih menyangkalnya sampai saat ini. Hal tersebut terlihat melalui penokohan tokoh diatas. Latar fragmen gambar film berada di pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan dikenal sebagai

tempat para perempuan, namun disini yang dihadirkan bukan para perempuan, namun seorang tokoh gay dan laki-laki. Maka dapat disimpulkan bahwa, antara laki-laki, gay, dan transgender pun berhak berada di tempat atau kekuasaan perempuan untuk tetap bisa melangsungkan hidup.



keamanan

Kaum heteronormatif dikenal dengan pihak penguasa atas kaum lainnya karena diakui oleh suatu bangsa. Maka, apapun bentuk kriminal yang dilakukan oleh kaum heteronormatif akan dimaklumi dan bahkan diberi bantuan. Seperti pada potongan kisah pada film Dallas Buyers Club, tokoh Ron adalah penjudi dan akrab dengan seks bebas. Tokoh Ron yang merupakan seorang laki-laki berorientasi sex dengan perempuan memiliki koneksi dengan pihak keamanan sehingga mendapat perlindungan ketika sedang melakukan tindak kriminal. Lain halnya dengan kaum non heteronormatif. Penyakit AIDS di dalam film seperti sepaket dengan kaum non heteronormatif. Padahal sesuai dengan alur ceritanya, fous cerita dari film diawali oleh seorang lelaki normal yang mengidap penyakit AIDS. Jelas terlihat motif sesungguhnya yang ingin dihadirkan dalam film ini, yaitu pelabelan negatif terhadap kaum non heteronormatif.



Gambar 4 : Ron (normal) – Rayon (Gay, Transgender)
Tokoh Ron yang sudah terjebak di dalam label negatif membuat ingin membantu sesama untuk menemukan

solusi menghadapi penyakit AIDS. Sebuah komunitas dibangunnya untuk mempermudah para pengidap AIDS. Tokoh Ron sebagai seorang laki-laki normal digambarkan memiliki power dan pemimpin, sedangkan tokoh Rayon digambarkan sebagai seorang gay dan juga transgender, tidak memiliki power, dan bergantung kepada tokoh Ron. Motif bantuan yang ditawarkan tokoh Ron menyimpan makna lain bahwa orang-orang yang mengidap AIDS terutama orang gay dan transgender perlu mendapat bantuan untuk menanganinya, dan yang bisa membantunya adalah orang normal. Namun dibalik bantuan tersebut, orang heteronormatif bersuara bahwa hanya dengan cara yang menyakitkan saja yang bisa digunakan untuk membantu kaum non heteronormatif. Hal tersebut ditandai dengan niatan salah seorang tokoh Dokter yang mengaku membuat obat tersebut untuk diuji cobakan dulu. Melalui fragmen gambar tersebut terlihat bahwa bantuan yang diberikan oleh orang normal kepada orang gay atau transgender tidaklah melalui solusi yang membuat lebih baik, namun justru menyakitkan dan menyengsarakan.

Setelah mengetahui bagaimana telaah fragmen gambar film memperlihatkan pelabelan negatif dari tokoh homoseksual di mata masyarakat heteroseksual dan pelabelan negatif juga terhadap tokoh heteroseksual yang berhubungan dekat atau sekedar berdekatan secara sosial juga akan mendapatkan bahaya, yaitu kekerasan fisik, penyakit mematikan, serta intimidasi. Melalui pelabelan negatif seperti hal di atas maka secara tidak sadar penonton memiliki penanaman pandangan akan homofobia bahwa untuk tidak dekat-dekat dengan homoseksual agar dapat hidup dengan baik.

SIMPULAN

Film Dallas Buyers Club (2013) menghadirkan tokoh sentral yang penuh dengan masalah. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh tokoh sentralnya yaitu Ron yang seorang heteroseksual yang dekat-dekat dengan seorang homoseksual adalah adanya penyakit AIDS, penyerangan fisik, kemudian urusan hukum. Sedangkan pada tokoh Rayon dihadirkan sebagai tokoh gay yang jauh dari keluarga (dikucilkan), selalu mendapat intimidasi, dan penolakan terhadap orang-orang sekitar. Tokoh-tokoh tersebut digambarkan dengan label yang negatif.

Setelah menganalisis film Dallas Buyers Club (2013) melalui teori semiotika Roland Barthes mengenai telaah fragmen gambar film dan teori Queer yang mengungkap konsep homofobia, maka diketahui maksud atau tujuan sebenarnya yang ingin diungkap dalam film Dallas Buyers Club (2013). Melalui pelabelan negatif dari orang yang berhubungan dekat dengan seorang homoseksual, maka secara tidak sadar membuat penonton film Dallas Buyers Club (2013) memiliki pandangan baru untuk tidak dekat-dekat atau masuk dalam dunia homoseksual karena bahaya di dalam dunia homoseksual sangat berbahaya bahkan

mematikan, pandangan tersebut adalah homofobia di dalam konsep Queer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amazon. (2013, november 22). *IMDb Movies*. Retrieved June 2, 2016, from IMDb: <http://www.imdb.com/title/tt0790636/#>
- Barthes, R. (1990). *Image/Music/Text*. London: Fortana Press.
- David Graddol dan Joan Swann. (1989). *Gender Voices: Telaah Kritis Relasi Bahasa-Gender*. Pasuruan: Pedati.
- Foucault, M. (2008). *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kellner, D. (2010). *Budaya Media: Cultural Studies, Identitas, dan Politik antara Modern dan Postmodern*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rahardjo, W. (2007). Homophobia dan Penolakan Masyarakat serta Hubungannya dengan Bicultural Identity pada Cover Homoseksual. *Jurnal Penelitian Psikologi Nomor 2 Volume 12*, 194-197.
- Rahardjo, W. (2009). Homophobia dan Kita. *Jurnal Penelitian Psikologi Nomor 1 Volume 14*, 11-13.
- Salih, S. (2002). *Judith Butler*. London: Routledge.
- Storey, J. (2010). *Cultural Studies dan kajian budaya pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sugiarti, T. H. (2002). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Vallée, J.-M. (Director). (2013). *Dallas Buyers Club* [Motion Picture].

Benturan Kekuasaan: Polisi, Arema, dan Aremania

Indhar Wahyu Wira Harjo

Staff Pengajar Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

indhar.wahyu@ub.ac.id

Abstrak

Relasi antara negara, korporasi, dan *civil society* tidak lagi bersifat saling medominasi. Hubungan semacam itu dapat diamati pada peristiwa pelarangan konvoi Aremania (kelompok pendukung klub sepak bola Arema Malang). Pawai kendaraan bermotor Aremania sebelum dan setelah pertandingan Arema acapkali menjadi masalah bagi arus lalu lintas di Malang Raya. Pelanggaran aturan lalu lintas, kemacetan jalan hingga perusakan kendaraan lain merupakan persoalan yang sering terjadi saat arak-arakan kendaraan Aremania dari dan menuju stadion. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Polisi Resort Kota Malang untuk melarang konvoi di hari ulang tahun Arema pada 11 Agustus 2016. Tulisan ini bermaksud mengurai praktik saling mempengaruhi yang melibatkan polisi, pengurus Arema dan Aremania. Konsep tiga dimensi kekuasaan dari Steve Lukes digunakan sebagai koridor ulasan, lebih lanjut metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis framing model Mondigliani diimplementasikan dalam penelitian ini. Penelitian menunjukkan **pertama** terdapat perbedaan tujuan para pihak mengenai konvoi perayaan ulang tahun Arema. Polisi berkepentingan mengatur Aremania agar tidak menyelenggarakan konvoi dengan argumen ketertiban umum dan regulasi lalu lintas. Di sisi lain, pengurus Arema bermaksud merayakan ulang tahun Arema secara besar-besaran bersama Aremania. Sedangkan Aremania berkeinginan melakukan konvoi untuk mempertahankan tradisi dan memeriahkan hari jadi Arema. **Kedua**, tujuan para pihak tersebut tidak ada satupun yang terwujud di hari itu. Tarik ulur argumen tersebut akhirnya melahirkan praktik yang berbeda dari tuntutan para pihak. Perayaan ulang tahun Arema pada tanggal 11 Agustus dilakukan dengan lomba-lomba, tasyakuran, bedah buku dan konser musik. Kegiatan ini tetap saja memunculkan mobilitas besar-besaran Aremania menuju tempat penyelenggaraan acara. Konvoi akhirnya juga diperbolehkan, namun dilakukan pada hari Minggu 14 Agustus dalam acara 'napak tilas' dengan rute sekitar 23 km. Simpulan dari kondisi tersebut menunjukkan kegagalan negara untuk

mengatur perilaku warga. Di sisi lain, hal ini mengilustrasikan pula keredupan kekuatan *civil society*, sebab *civil society* harus bekerja sama dengan korporasi untuk mengubah regulasi negara.

Kata Kunci: sepak bola, *civil society*, *suporter*, kebijakan, korporasi dan negara.

PENDAHULUAN

Relasi antara negara, korporasi dan *civil society* menampilkan pola-pola yang tidak ajeg. Salah satu diantara ketiga entitas tersebut dapat menjadi pihak yang dominan satu sama lain. Dominasi salah satu pihak kepada pihak lain bukan menjadi kondisi ideal dalam negara demokrasi. Relasi yang menunjukkan keunggulan salah satu pihak dinilai tidak merepresentasikan prinsip egalitarian yang menjadi prinsip penting dalam negara demokrasi.

Relasi timpang antara negara, korporasi dan masyarakat sipil merupakan permasalahan yang mendesak untuk dikaji dalam negara demokrasi. Tulisan ini berupaya mengurai silang sengkabut negara, korporasi, dan masyarakat sipil dalam isu perayaan ulang tahun klub sepak bola Arema. Pemilihan isu ini dilakukan dengan mempertimbangkan posisi penting sepak bola dalam dunia sosial. Sepakbola memberikan kontribusi yang besar untuk peningkatan kesadaran manusia terhadap dunia (Richard Giulianotti & Robertson, 2004, p. 558).

Penelitian ini bermula dari kegagalan institusi negara dalam mengatur perilaku warga negara. Polisi sebagai instrumen penting dari negara bermaksud melarang konvoi kendaraan bermotor yang dilakukan Aremania (*suporter klub sepak bola Arema*) pada saat perayaan hari ulang tahun Arema di wilayah Malang Raya. Akan tetapi, aturan yang diberlakukan Polisi Resort Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang itu tidak berdampak secara signifikan. Aremania tetap melakukan arak-arakan kendaraan bermotor pada pesta perayaan ulang tahun tersebut.

Fokus penelitian ini berada pada pembingkaihan diskursus yang dilakukan atas kebijakan pelarangan konvoi dan penolakannya. Pembingkaihan diskursus pelarangan konvoi tersebut mewarnai sejumlah media massa lokal yang beredar di Malang Raya. Harian Malang Post, Surya Malang, dan Radar Malang secara intensif memuat berita perihal kebijakan tersebut. Secara spesifik, isu tersebut telah dipublikasikan sejak tanggal 09 Agustus 2016, dua hari sebelum ulang tahun klub berlogo kepala singa. Pemberitaan itu menuai sejumlah penolakan dari Aremania. Penolakan tersebut terutama disalurkan melalui jejaring sosial, sebagai upaya untuk mengimbangi penyebaran diskursus yang dilakukan polisi dan manajemen Arema di sejumlah surat kabar lokal. Sehingga tulisan ini bermaksud menelaah praktik saling mempengaruhi yang melibatkan polisi, pengurus Arema dan Aremania sebagai aktor-aktor penting.

Kontrol yang dilakukan negara terhadap pendukung kesebelasan memang bukan hal yang baru. Perlakuan semacam ini telah terjadi di Inggris sejak 1989, pemerintah mengawasi stadion, perkelahian dan nyanyian-nyanyian yang terdapat di dalamnya (Foer, 2006, p. 91). Selain menjadi sasaran kontrol negara, sepakbola dapat pula menjadi anasir pembentuk nasionalisme negara. Kondisi semacam ini dapat diamati di negara Spanyol sejak abad ke-20, pada saat sepakbola di dikaitkan dengan komponen-komponen yang membangun nasionalisme (Llopis Goig, 2008, p. 61). Sepak bola pun telah menjadi ranah yang strategis bagi korporasi untuk meraih keuntungan bisnis. Keadaan semacam ini dapat terlihat dari kehadiran penonton di stadion pada pertandingan sepak bola Amerika Serikat sejak tahun 1991 (Welki & Zlatoper, 1994, p. 494).

Riset-riset tersebut di atas menunjukkan relasi yang bersifat deterministik antara negara, *supporter* sepak bola dan klub sepak bola. Tulisan singkat ini berupaya untuk mengambil posisi yang berbeda dengan kajian-kajian itu. Uraian di sini akan didasari dengan gagasan negara, korporasi dan masyarakat sipil berpotensi untuk mempengaruhi satu sama lain. Kerangka konsep yang digunakan untuk mengulas data yang diperoleh ialah cara pandang tiga dimensi kekuasaan yang digagas Steven Lukes. Cara pandang ini melihat praktik kuasa tidak sekedar berujung pada *decision making*, namun juga berhubungan dengan *nondecisions making* dan *control over political agenda* (Lukes, 2005, p. 25).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis framing model William Gamson dan Mondigliani. Gagasan mereka terutama menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain (Eriyanto, 2002, p. 217). Cara pandang inilah yang dijadikan sebagai pijakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini diperoleh dari media masa dan media sosial yang memuat pembicaraan tentang perayaan ulang tahun Arema yang ke 29. Fokus penelitian diarahkan pada pembingkaihan diskursus yang dilakukan media massa terhadap kepentingan polisi, manajemen Arema dan Aremania dalam momentum perayaan hari ulang tahun Arema. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi di media massa dan jejaring sosial *twitter*. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan langkah kerja yang dirancang Gamson dan Mondigliani. Langkah kerjanya secara spesifik menganalisis data mulai dari diskursus yang dibentuk oleh media massa hingga diskursus yang dibangun oleh masyarakat (Gamson & Modigliani, 1989). Pada penelitian ini, diskursus dari media massa diperoleh dari media massa lokal yang beredar di Kota Malang. Data diperoleh dari berita perayaan ulang tahun ke-29 Arema yang dipublikasi di *website* Radar Malang, Malang Pos, dan Surya Malang. Sedangkan diskursus masyarakat diperoleh dari jejaring sosial *twitter* yang memperbincangkan tentang perayaan ulang tahun Arema yang ke-29.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MEMOSISIKAN PARA PIHAK YANG BERSETERU

Upaya Polres Malang untuk mengelola pergerakan masa pada saat perayaan ulang tahun ke-29 Arema didasari sejumlah pertimbangan. Antisipasi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang kerap muncul ketika terjadi pergerakan Aremania dalam jumlah besar. Permasalahan yang sering terjadi pada saat konvoi Aremania diantaranya adalah kemacetan lalu lintas, peningkatan jumlah kecelakaan di jalan raya, hingga kerusakan kendaraan bermotor.

Perayaan pada tanggal 11 Agustus tersebut diprediksi melibatkan para Aremania dari seluruh wilayah Malang Raya. Kehadiran Aremania yang berjumlah ribuan di jalanan wilayah Malang Raya tentu saja akan memadati semua ruas jalan dan menyebabkan kemacetan lalu-lintas (Mashita, 2016; Satrio, 2016). Mobilitas Aremania secara besar-besaran ini acap kali merepotkan pengguna jalan yang tidak terlibat dalam arak-arakan, mereka harus menepi dan berhenti untuk memberikan jalan bagi rombongan Aremania yang sedang melintas.

Selain permasalahan kemacetan jalan, konvoi kendaraan bermotor juga meningkatkan peluang kecelakaan lalu lintas. Hal ini bisa terjadi sebab pawai kendaraan bermotor semacam itu seringkali memunculkan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran tersebut dianggap menjadi pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran aturan lalu lintas yang dinilai sebagai pemicu kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada saat konvoi antara lain tidak mengenakan helm pengaman untuk pengendara kendaraan beroda dua, menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut orang, dan mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat yang lengkap dan sah (Mashita, 2016; Ramadhan, 2016; Wahyunik, 2016d).

Problem yang tidak kalah krusial berkaitan dengan ancaman perusakan kendaraan bermotor. Pada saat pawai kendaraan bermotor para Aremania, pengguna jalan yang lain tak jarang menjadi sasaran perusakan. Kejadian semacam ini jamak terjadi pada kendaraan bermotor dengan plat nomor dari kota sebelah, Surabaya. Pengemudi kendaraan dengan kode plat berhuruf 'L' seringkali khawatir melintas di jalan wilayah Malang Raya pada saat arak-arakan Aremania berlangsung. Konon kendaraan dari kota tersebut dianggap sebagai musuh yang perlu dihantam sebab salah satu klub sepakbola asal Surabaya merupakan rival abadi Arema. Meskipun ada pula mobil plat 'L' yang dirusak ternyata bukan milik warga Kota Surabaya, melainkan orang Malang yang membeli mobil di Surabaya (Wahyunik, 2016c). Kekerasan semacam ini dapat terjadi atas dasar perbedaan nilai-nilai yang mengikat pendukung klub sepakbola, lebih lanjut gangguan semacam ini juga terjadi berdasar perbedaan sosiodemografi (Zani & Kirchner, 1991, p. 5). Dalam konteks ini berarti bahwa kekerasan yang terjadi bermula dari perbedaan nilai-nilai yang dianut Aremania dan Bonekmania (pendukung klub sepakbola asal Surabaya) dan perbedaan sosiodemografi antara Kota Malang dan Surabaya. Aremania menganut nilai yang tampak dalam slogan 'Salam Satu Jiwa: Arema',

sedangkan Bonekmania mempercayai jargon 'Salam Satu Nyali: Wani'.

Permasalahan yang berpeluang terjadi pada saat terjadi arak-arakan kendaraan bermotor Aremania mendorong Polres Kota Malang untuk melakukan penertiban. Upaya penertiban tersebut dilakukan dengan jalan memberlakukan larangan pawai kendaraan bermotor pada hari Kamis, 11 Agustus 2016. Pada hari itu, Aremania tidak diperkenankan melakukan konvoi keliling kota untuk merayakan hari kelahiran klub *Singo Edan*. Kebijakan tersebut disampaikan oleh jajaran Kepolisian Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu pada saat sosialisasi kepada perwakilan Aremania pada tanggal 09 Agustus di Aula Polres Malang (Hartik, 2016; Wahyunik, 2016a; Zuk, 2016).

Kebijakan yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Malang Raya ini dapat dipandang sebagai upaya negara untuk mengatur tindakan warganya. Kebijakan yang disepakati oleh tiga resort di wilayah Malang Raya itu dimaksudkan untuk memberikan batasan atas perilaku kolektif yang hendak dilakukan Aremania. Dasar atas pemberlakuan kebijakan tersebut ditekankan pada pertimbangan bahwa tanggal 11 Agustus 2016 bertepatan dengan hari Kamis yang berarti masih ada aktivitas sekolah dan kerja bagi warga Kota Malang (Zuk, 2016).

Kebijakan itu dilakukan sebagai strategi preventif untuk mencegah sejumlah permasalahan yang berpotensi terjadi pada saat perayaan ulang tahun Arema diselenggarakan. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya negara untuk mengatur perilaku pendukung klub sepakbola. Negara memiliki tentara dan polisi untuk memaksa warga negara (Duke & Crolley, 2014, p. 4), sehingga dalam hal ini polisi idealnya memiliki kekuatan untuk memaksa Aremania membatalkan rencana konvoi pada hari ulang tahun Arema. Alih-alih mendapatkan kepatuhan, ternyata regulasi itu justru menghadirkan perlawanan dari pihak manajemen Arema dan ribuan Aremania.

Perbincangan yang melibatkan tiga Kapolres di wilayah Malang Raya, manajemen Arema dan Aremania berlangsung sengit. Pertemuan yang diselenggarakan secara tertutup di Aula Polres Kota Malang tersebut berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Pertemuan itu tak kunjung memunculkan konsensus yang disepakati para aktor yang terlibat di dalamnya. Pihak Kepolisian bersikukuh untuk membatasi konvoi yang hendak dilakukan Aremania pada perayaan ulang tahun *Singo Edan*. Sedangkan kubu manajemen bersama perwakilan Aremania bersikeras melakukan arak-arakan pada hari Kamis 11 Agustus 2016.

Manajemen Arema bersama Aremania berusaha mempertahankan argumen yang memungkinkan terjadinya mobilitas rombongan Aremania keliling Malang Raya. Gagasan yang dipertahankan keduanya berkisar pada pelestarian tradisi perayaan ulang tahun yang selama ini telah dilakukan (Wahyunik, 2016a). Tradisi perayaan ulang tahun yang dimaksud ialah perayaan yang dilakukan secara terpusat di sekitar Kantor Arema dan dilanjutkan dengan pawai keliling wilayah Malang Raya. Pawai tersebut dari tahun ke tahun selalu melibatkan ribuan Aremania dari seluruh penjuru Malang Raya.

Konvoi yang melibatkan ribuan Aremania memang bukan menjadi satu-satunya agenda manajemen untuk merayakan ulang tahun Arema kali itu. Sejumlah kegiatan telah dirancang sebagai rentetan perayaan hari jadi klub kebanggaan warga Malang. Kegiatan tersebut telah direncanakan dengan kegiatan-kegiatan pemutaran film dokumenter Arema, pertunjukan kembang api, lomba mewarna, bazar, lomba desain t-shirt *official* Arema, tasyakuran, bedah buku, *talk show*, dan pertunjukan musik. Sejumlah acara tersebut direncanakan berawal dari hari Rabu 10 Agustus hingga 14 Agustus 2016 (Permana, 2016; Rekohadi, 2016a). Kegiatan yang dipusatkan di sekitar kantor Arema tersebut menjadi daya tarik luar biasa bagi Aremania dari seluruh Malang Raya. Alhasil, kendati konvoi kendaraan secara resmi dilarang, pergerakan para Aremania dari dan menuju pusat perayaan ulang tahun tersebut sudah mirip dengan konvoi itu sendiri.

Kegiatan-kegiatan yang telah dirancang manajemen Arema untuk merayakan hari jadi berorientasi pada partisipasi sebanyak mungkin dari Aremania. Atas dasar gagasan itu, manajemen Arema berupaya keras untuk menolak kebijakan membatasi konvoi yang dilakukan Aremania di hari perayaan ulang tahun yang ke-29. Larangan Polres Kota Malang itu memang tidak berimbas bagi kelangsungan manajemen Arema secara langsung. Namun manajemen Arema menilai kebijakan tersebut dapat berdampak negatif bagi kelangsungan acara-acara yang telah disiapkan jauh-jauh hari.

Pernyataan yang disampaikan perihal larangan konvoi sontak ditentang pihak manajemen Arema dan Aremania. Penolakan Aremania atas kebijakan pihak kepolisian dapat dipahami, sebab mereka menilai konvoi merupakan bagian dari tradisi yang perlu dipertahankan. Namun bagaimana dengan ketidaksetujuan manajemen Arema atas regulasi itu? Apakah keputusan itu bersentuhan dengan kebutuhan manajemen Arema?

Manajemen memperjuangkan dan memfasilitasi keinginan Aremania untuk melakukan konvoi sebab suporter merupakan aset yang sangat berharga bagi klub sepakbola. Suporter menjadi aset penting sebab mereka memiliki investasi personal dan emosional berjangka panjang pada klub (R. Giulianotti, 2002, p. 33). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa keterikatan personal dan emosional jangka panjang Aremania kepada Arema menjadi kekayaan yang penting dipertahankan. Sehingga loyalitas Aremania kepada Arema perlu dipertahankan dan direproduksi oleh manajemen Arema. Sebagai bentuk konkret atas upaya tersebut, manajemen Arema harus berupaya menyokong penolakan terhadap kebijakan larangan konvoi yang menyasar Aremania.

Diperlukan sejumlah argumen kuat dimunculkan untuk mempertahankan gagasan suporter sebagai aset di atas. Gagasan lain yang patut dipertimbangkan ditemukan dari situs jejaring sosial *twitter*. *Twitter* dimanfaatkan Aremania untuk meluapkan ketidaksetujuannya atas pelarangan konvoi menyemarakkan ulang tahun ke-29 kesebelasan Arema. Salah satu pernyataan dari Aremania berikut ini dapat menjadi penjelasan menarik mengenai upaya manajemen 'memfasilitasi' Aremania untuk melakukan konvoi pada 11 Agustus. Akun *twitter* @lazir_ongisnade menuliskan keluh kesahnya pada tanggal 10 Agustus 2016. Pernyataan tersebut dituliskan sebagai berikut: "@AremafcOfficial @we_aremania jangan salahkan kami bila kanjuruhan sepi aremania... Wong dihari jadi arema kami aremania dilarang konvoi *cox*". Pernyataan tersebut menunjukkan ancaman kepada manajemen Arema apabila konvoi pada saat perayaan ulang tahun *Singo Edan* dilarang. Ancaman itu berhubungan dengan boikot yang hendak dilakukan Aremania pada pertandingan kandang sepakbola Arema di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Konvoi menjadi bentuk perayaan yang diinginkan oleh Aremania, suporter *Singo Edan* menyebutnya sebagai tradisi. Konvoi sebagai tradisi menyemarakkan hari ulang tahun itu menjadi bagian dari kebahagiaan Aremania (Wahyunik, 2016a). Konvoi maka dari itu dilihat sebagai kepingan kebahagiaan Aremania untuk merayakan dari lahir klub sepak bola kebanggaannya. Sehingga pada saat konvoi dilarang oleh pihak kepolisian, Aremania beramai-ramai menolak keputusan itu.

Penolakan Aremania terhadap kebijakan pelarangan konvoi berakhir 'indah'. Polisi memang bersikukuh pada keputusan untuk melarang Aremania melakukan arak-arakan kendaraan bermotor di hari Kamis tanggal 11 Agustus. Namun dan Aremania boleh melakukan

konvoi pada hari Minggu 14 Agustus 2016 dengan tajuk 'napak tilas'. Napak tilas ini menjadi angin segar bagi Aremania yang berkeinginan mempertahankan tradisi merayakan ulang tahun Arema dengan jalan mengadakan pawai keliling wilayah Malang Raya.

Napak tilas tidak memperlihatkan kekuatan polisi dalam mengatur tindakan Aremania. Di *event* ini, pada akhirnya justru pihak kepolisian harus turun tangan untuk melakukan pengawalan pada arak-arakan yang dilakukan Aremania pada tanggal 14 Agustus tersebut. Polisi yang dilibatkan dalam perayaan ini bertugas melakukan pengawalan rombongan Aremania sedari Stadion Gajayana di Kota Malang menuju Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang dengan panjang rute perjalanan berkisar 23 km (Rekohadi, 2016b). Jumlah aparat kepolisian yang ditugaskan mengamankan dan menertibkan acara tersebut tercatat sebanyak 750 personel (Wahyunik, 2016b).

PERSETERUAN PARA PIHAK YANG BERKEKUATAN MUMPUNI

Peristiwa pelarangan konvoi perayaan hari ulang tahun Arema ke-29 menunjukkan relasi sosial yang menarik. Keterlibatan polisi, manajemen Arema dan Aremania dalam sengkabut implementasi kebijakan ini menunjukkan praktik kekuasaan melibatkan sejumlah aktor yang berkepentingan. Pertautan praktik kuasa yang dilakukan para aktor dalam peristiwa ini menunjukkan upaya untuk saling mempengaruhi pihak-pihak yang dinilai memiliki kepentingan dalam perayaan hari ulang tahun Arema.

Kebijakan yang dirancang Polres Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu merepresentasikan kekuatan dari institusi negara dalam mengatur perilaku warga negara. Kebijakan itu bermula dari kepentingan yang dimiliki pihak kepolisian untuk memanipulasi perilaku Aremania saat merayakan hari jadi klub sepak bola Arema. Polisi menginginkan dan merancang strategi agar Aremania tidak melakukan konvoi keliling Malang Raya pada hari itu. Kekuasaan institusi negara pada konteks ini didorong untuk bekerja dalam pola yang bersifat koersif.

Cara kerja kekuasaan ternyata tidak sekedar berorientasi pada pemaksaan. Kekuasaan bukan sekedar upaya memaksa orang lain agar melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilakukannya. Namun kekuasaan juga beroperasi dengan jalan mempengaruhi, membentuk atau menentukan keinginan seseorang (Lukes, 2005, p. 27). Pada konteks ini, pihak kepolisian berupaya untuk menjalankan

kekuasaan yang dimilikinya dengan cara mempengaruhi Aremania agar tidak melakukan arak-arakan pada tanggal 11 Agustus. Polisi berusaha untuk membentuk kebutuhan Aremania yang melakukan perayaan ulang tahun *Singo Edan* dengan menekankan pada *urgensi* menciptakan keamanan dan mempertahankan ketertiban umum di wilayah Malang Raya.

Strategi polisi untuk mencapai tujuannya untuk mengatur konvoi Aremania diwujudkan dalam kebijakan bersama polisi di Malang Raya. Polres Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu memiliki kesepakatan untuk melarang Aremania melakukan mobilitas massal pada tanggal 11 Agustus. Pengambilan keputusan tersebut melibatkan manajemen Arema dan perwakilan Aremania yang dilakukan pada tanggal 09 Agustus di Aula Polres Kota Malang. Pada tahapan ini, kekuasaan dioperasikan dalam proses pengambilan keputusan. Praktik kuasa yang difokuskan pada perilaku dan proses pengambilan keputusan semacam ini dapat dikategorikan sebagai cara pandang kekuasaan satu dimensi (Lukes, 2005, p. 29).

Selain praktik kuasa yang dijalankan polisi, peristiwa ini juga memperlihatkan strategi kekuasaan yang dilakukan oleh manajemen Arema. Berbeda dengan pihak kepolisian yang lebih menekankan pada pengaturan perilaku dan pengambilan keputusan, praktik kuasa yang dijalankan manajemen Arema beroperasi pula pada proses yang *non decision-making*. Manajemen Arema terlibat dalam perumusan kebijakan perihal perayaan dirgahayu *Singo Edan* dengan pihak kepolisian. Akan tetapi praktik kuasa yang dijalankan manajemen Arema tidak berhenti di ranah pengambilan keputusan saja.

Di satu sisi, manajemen Arema turut membentuk perilaku Aremania pada pesta perayaan ulang tahun yang ke-29. Pembentukan perilaku sebagai bentuk praktik kuasa itu dijalankan dengan 'menentukan' kebutuhan Aremania. Manajemen Arema berusaha untuk membentuk dan menentukan kebutuhan dengan cara menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencapaian prestasi dan hiburan. Manajemen Arema telah menyiapkan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian prestasi seperti lomba mewarna dan lomba mendesain t-shirt *official* Arema. Selain kegiatan yang berorientasi pada prestasi, kebutuhan Aremania pada saat merayakan ulang tahun klub andalannya dalam bentuk acara hiburan semacam pertunjukan musik, pemutaran film dokumenter, dan nonton bareng pertandingan Arema. Upaya menentukan kebutuhan Aremania dengan logika semacam ini menunjukkan

praktik kuasa yang bersifat *nondecision-making*. Sehingga pola praktik kuasa yang dilangsungkan manajemen Arema ini dapat dikategorikan sebagai cara pandang kekuasaan dua dimensi (Lukes, 2005, p. 29). Cara pandang kekuasaan dua dimensi ini mencoba memahami praktik kuasa dalam koridor *decision-making* sekaligus *nondecision-making*.

Kebijakan pihak kepolisian Malang Raya melarang konvoi Aremania ini menunjukkan jalinan yang menarik saat diulas dalam koridor relasi kuasa. Polisi bermaksud menjalankan praktik kuasa pada Aremania dengan menyuntikkan kepentingannya ke dalam keputusan yang melarang arak-arakan. Polisi mendesak Aremania menghindari konvoi seperti yang diinginkan dengan harapan agar ketertiban dan keamanan lalu lintas di Kota Malang dapat dijaga. Untuk membuat dan menjalankan kebijakan tersebut, polisi melibatkan manajemen Arema dan perwakilan Aremania. Akan tetapi pelarangan itu pada akhirnya dinegosiasikan sehingga memunculkan kebijakan baru yang dikenal dengan sebutan 'napak tilas'.

Napak tilas sebagai sebuah keputusan dipengaruhi oleh kepentingan polisi, manajemen Arema dan tentu saja Aremania. Napak tilas tidak mengakomodir kepentingan polisi untuk meniadakan konvoi untuk merayakan ulang tahun Arema. Napak tilas ini sedianya bukan pula menjadi agenda dalam kegiatan pesta hari jadi yang dirancang manajemen Arema. Napak tilas ini juga tak menjadi pemenuhan keinginan Aremania untuk turun ke jalan pada tanggal 11 Agustus. Napak tilas ini memperlihatkan dimensi lain dari jalannya kekuasaan dalam bentuk negosiasi antaraktor pada proses *decision-making*.

Negosiasi antaraktor yang terlibat dalam peristiwa ini memperlihatkan relasi yang menarik. Polisi, manajemen Arema dan Aremania memiliki tujuan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tujuan tersebut mendorong para pihak untuk saling mempengaruhi, mengarahkan, dan membentuk kepentingan pihak lain agar tujuannya tercapai. Ketiga pihak yang terlibat dalam tarik-ulur kebijakan ini mencoba mempengaruhi pihak-pihak yang lain dengan berbagai cara.

Polisi yang memiliki tujuan melarang konvoi kendaraan bermotor berusaha sekuat tenaga mempengaruhi manajemen Arema dan Aremania. Ketika mengorientasikan tujuannya untuk membentuk perilaku Aremania melalui kebijakan, polisi memperlihatkan praktik yang berada dalam koridor *decision-making*. Praktik kuasa dalam dimensi ini bermaksud untuk mengarahkan perilaku orang lain agar sesuai dengan

tujuannya sendiri, kendati orang tersebut sebenarnya tidak mau melakukan hal itu. Sehingga pada tahapan ini polisi terlihat sedang menga

Kebijakan pihak kepolisian Malang Raya tidak serta merta dipatuhi oleh keduanya. Alih-alih mematuhi arahan polisi, manajemen Arema dan Aremania justru mengkritisi kebijakan tersebut. Manajemen Arema dan Aremania melakukan peninjauan pada kebijakan itu sehingga pada akhirnya polisi melakukan perubahan atas kebijakan itu.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuasaan selain memuat dimensi *decision-making* dan *nondecision-making* juga mengandung unsur kontrol terhadap agenda politik. Inilah yang dipahami sebagai cara pandang kekuasaan tiga dimensi (Lukes, 2005, p. 29). Manajemen Arema dan Aremania melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diberlakukan sehingga berpeluang untuk menegosiasikan kebijakan yang akan diimplementasikan. Alhasil, *event* napak tilas muncul sebagai bentuk *decision-making* dan *nondecision-making* yang lahir dari *control over political agenda*.

SIMPULAN

Napak tilas yang dilakukan Aremania menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan negara untuk mengatur perilaku masyarakat sipil berakhir percuma. Kekuasaan yang dimiliki institusi negara dalam mengimplementasikan kebijakan terbukti tidak mampu mengarahkan perilaku masyarakat. Alih-alih memberikan koridor dalam perilaku, tujuan institusi untuk mengatur perilaku yang diwujudkan dalam kebijakan tersebut justru ditentang oleh korporasi dan organisasi masyarakat sipil. Penentangan terhadap kebijakan itu memperlihatkan kontrol atas regulasi yang ditetapkan negara. Kontrol itu berhasil dilakukan sampai pada tingkat merubah kebijakan yang telah diberlakukan. Di sisi lain, peristiwa napak tilas ini mengilustrasikan pula keredupan kekuatan masyarakat sipil dalam mengontrol kebijakan negara. Pada konteks ini masyarakat sipil harus bekerja sama dengan korporasi untuk mengubah regulasi negara. Korporasi seolah-oleh menempatkan diri sebagai mediator dalam peristiwa ini. Namun secara faktual, korporasi memfasilitasi masyarakat sipil sebab memiliki kepentingan untuk mempertahankan loyalitas masyarakat sipil terhadapnya. Sehingga peristiwa ini menggambarkan silang-sengkarut kepentingan dan kekuasaan para aktor yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan kondisi semacam ini, relasi antara negara,

masyarakat sipil dan korporasi dapat diorientasikan kepada model hubungan yang bersifat saling menguntungkan. Relasi antara tiga elemen penting itu pada akhirnya tidak mesti berada dalam koridor yang bersifat dominatif dan eksploitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Duke, V., & Crolley, L. (2014). *Football, Nationality and the State*. New York: Routledge. Retrieved from
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Foer, F. (2006). *Memahami Dunia Lewat Sepak Bola*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Gamson, W., & Modigliani, A. (1989). Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power : A Constructionist Approach. *American Journal of Sociology*, 95(1), 1–37.
- Giulianotti, R. (2002). Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs: A Taxonomy of Spectator Identities in Football. *Journal of Sport & Social Issues*, 26(1), 25–46.
<https://doi.org/10.1177/0193723502261003>
- Giulianotti, R., & Robertson, R. (2004). The globalization of football: A study in the glocalization of the “serious life.” *British Journal of Sociology*, 55(4), 545–568.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2004.00037.x>
- Hartik, A. (2016). Tidak Ada Konvoi Aremania pada Puncak HUT Ke-29 Arema - Kompas.com. Retrieved October 17, 2016, from <http://bola.kompas.com/read/2016/08/10/07180088/Tidak.Ada.Konvoi.Aremania.pada.Puncak.HUT.Ke-29.Arema>
- Llopis Goig, R. (2008). Identity, nation-state and football in Spain. the evolution of nationalist feelings in Spanish Football. *Soccer & Society*, 9(1), 56–63.
<https://doi.org/10.1080/14660970701616738>
- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mashita, N. (ed). (2016). Awas...Aremania konvoi, Malang Raya macet - LensaIndonesia.com. Retrieved October 17, 2016, from <http://www.lensaIndonesia.com/2016/04/17/awas-aremania-konvoi-malang-raya-macet.html>
- Permana, R. W. (2016). Malang - Merdeka.com | Ini rangkaian acara peringatan ulang tahun Arema ke-29. Retrieved October 17, 2016, from <http://malang.merdeka.com/aremania/ini-rangkaian-acara-peringatan-ulang-tahun-arema-ke-29-1608105.html>
- Ramadhan, L. A. (2016). Banyak Pelanggar, Konvoi Aremania Ditertibkan Polisi - beritajatim news. Retrieved from http://beritajatim.com/olahraga/264516/banyak_pelanggar_konvoi_aremania_ditertibkan_polisi.html
- Rekohadi, D. (2016a). HUT Arema, Napak Tilas Akan Digelar Minggu 14 Agustus, Ini Rutenya . . . - Surya Malang. Retrieved October 17, 2016, from <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/08/09/hut-arema-napak-tilas-akan-digelar-minggu-14-agustus-ini-rutenya>
- Rekohadi, D. (2016b). Ulang Tahun, Arema Gelar Konvoi Napak Tilas Gajayana -Kanjuruhan - Halaman 2 - Surya. Retrieved October 17, 2016, from <http://surabaya.tribunnews.com/2016/08/09/ulang-tahun-arema-gelar-konvoi-napak-tilas-gajayana-kanjuruhan?page=2>
- Satrio, F. A. (2016). Arema: Jalanan Macet Konvoi Aremania, Relawan Turun Membantu | Malang TIMES. Retrieved October 17, 2016, from <http://www.malangtimes.com/baca/11938/20160417/160832/jalanan-macet-konvoi-aremania-relawan-turun-membantu/>
- Wahyunik, S. (2016a). Aremania Ingin Konvoi saat Rayakan HUT Arema, tapi Polisi . . . - Surya Malang. Retrieved October 17, 2016, from <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/08/09/aremania-ingin-konvoi-saat-rayakan-hut-arema-tapi-polisi>
- Wahyunik, S. (2016b). Ini Jumlah Polisi yang Jaga di Perayaan HUT Arema ke-29 - Surya Malang. Retrieved October 17, 2016, from <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/08/10/ini-jumlah-polisi-yang-jaga-di-perayaan-hut-arema-ke-29>
- Wahyunik, S. (2016c). Polisi Tangkap Dua Suporter Perusak Mobil di Kota Malang - Surya. Retrieved October 17, 2016, from <http://surabaya.tribunnews.com/2016/04/05/polisi-i-tangkap-dua-suporter-perusak-mobil-di-kota-malang>
- Wahyunik, S. (2016d). Polisi Tidak Beri Kelonggaran Aremania Konvoi dan Tilang Pelanggar - Surya Malang. Retrieved October 17, 2016, from <http://suryamalang.tribunnews.com/2016/04/06/polisi-tidak-beri-kelonggaran-aremania-konvoi-dan-tilang-pelanggar>
- Welki, a. M., & Zlatoper, T. J. (1994). US Professional Football: The Demand for Game-Day Attendance in 1991. *Managerial and Decision Economics*, 15(5), 489–495. <https://doi.org/10.1002/mde.4090150510>

- Zani, B., & Kirchler, E. (1991). When violence overshadows the spirit of sporting competition: Italian football fans and their clubs. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 1(July 1990), 5–21. <https://doi.org/10.1002/casp.2450010104>
- Zuk. (2016). Ultah Arema, Polisi Larang Konvoi-Page2 radarmalang.jawapos.com. Retrieved October 17, 2016, from <http://radarmalang.com/read/2016/08/11/2217/-ultah->

PERILAKU PEMILIH DAN BUDAYA POLITIK DALAM PEMILU DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Ratnia Solihah

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran
ratniasolihah91@yahoo.co.id

Siti Witianti

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil kajian tentang Perilaku Pemilih dan Budaya Politik dalam Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perilaku pemilih dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi, budaya politik dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi serta relasi antara perilaku pemilih dan budaya politik dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi. Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan berdasarkan kajian literatur dan dokumentasi yang terkait dengan perilaku pemilih dan budaya politik dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa corak perilaku pemilih dalam pemilu pasca reformasi mengalami perubahan dari pemilu yang satu ke pemilu yang lainnya. Begitu juga budaya politik dari para pemilih dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi secara keseluruhan mengalami perubahan. Walaupun budaya politik bercorak "patronclient" masih terlihat, namun pasca reformasi juga terdapat kelompok penganut budaya politik yang berlawanan tetapi dinamis, yaitu kelompok *defenders* yang cenderung mempertahankan status serta kelompok *innovators* yang berusaha mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Budaya politik yang masih bercorak "patronclient" dan perilaku pemilih yang semata-mata bercorak *voluntary* serta transaksi material pada akhirnya menyuburkan terdapatnya *disconnect electoral*. Tantangan ke depan adalah bagaimana mewujudkan budaya politik kewarganegaraan dan adanya perilaku politik yang bercorak transaksi kebijakan. Hal tersebut akan memungkinkan adanya kontrak politik atau perjanjian yang lebih baik antara wakil dan terwakil.

Kata kunci: perilaku, pemilih, budaya, politik,

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan bagian penting dalam demokrasi. Jika diartikan secara sederhana, pemilu adalah cara individu warga negara melakukan aktivitas politik ataupun kontrak politik dengan orang lain atau partai politik yang diberikan mandat atau wewenang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan rakyat atau pemilih. Di berbagai negara, pemilihan umum

merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif, dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pemilu yang demokratis salah satunya dicirikan dari adanya komponen pemilih yang semakin plural seiring dengan semakin kompleksnya pemilu. Ini artinya pemilih adalah pendukung utama yang sangat penting dalam proses pemilu yang demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, setiap pemilih dalam pemilu tidak akan terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, politis maupun budaya pada saat itu, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan mereka, inilah yang disebut perilaku pemilih (*voter behavior*). Dilihat dari kondisi tersebut, karakteristik pemilih Indonesia saat ini mengalami perubahan, dimana pemilih terbagi ke dalam beberapa corak, baik dalam bentuk hubungan ideologis, hubungan keagamaan, latar belakang sosial budaya, bahkan dalam bentuk hubungan kepentingan yang sifatnya pragmatis dengan calon atau kandidat yang dipilihnya dalam pemilu.

Kajian tentang perilaku pemilih dalam pemilu banyak dilakukan dalam berbagai pendekatan atau perspektif. Beberapa kajian tentang perilaku pemilih dalam perspektif sosiologis antara lain dilakukan oleh Mulyawarman, dan Ricky Rianto Kadir. Dari perspektif pilihan rasional dilakukan oleh Muhammad Ferdiansyah Zidni dan Ali Nurdin. Kajian tentang perilaku pemilih dalam pendekatan sosial budaya dilakukan oleh IB Gede Surya Pradipta dan Ni Wayan Sri Suprapti, Kajian perilaku pemilih dari aspek psikologi politik antara lain dilakukan oleh Rahmaturrizqi, Choirun Nisa, dan Fathul Lubabin Nuqul.

Kajian tentang pemilu dan pemilihan kepala daerah di Indonesia, bahkan di beberapa daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia juga sudah banyak dilakukan. Secara umum para peneliti terdahulu mengkaji pemilihan kepala daerah dalam tinjauan sosiologis, yuridis formal (hukum), dan administrasi. Adapun dalam tinjauan politis para peneliti banyak

melakukan kajian pemilihan kepala daerah dengan menggunakan perspektif *institutionalisme* dan *behavioralisme* (perilaku, *rational choice*, *games theory*). Metode penelitian terdahulu umumnya menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus untuk daerah kabupaten/kota/provinsi yang telah lama ada di Indonesia (sebagai contoh, Aspinal, 2009; Macrae, 2009; Faiz, 2011; Suhartono dkk, 2013; Arianto, 2013; Firmansyah 2013; Trihartono, 2014) serta metode survey untuk penelitian yang menggunakan metode kuantitatif (misalnya, Irmayani, 2005; Romli, 2008; Hendrik, 2008; Nasution, 2009; Sholihin, 2009; Azis, 2010; Junaidi, 2011; Shahab, 2013; Rizkiyansyah, 2013; Sugiyanto, 2013; Asni, 2013 dan 2014; Subekti, 2014; Muhaling, 2014; Perludem, 2014; Strachan, 2014; Nurdin, 2014), survey popularitas maupun survey elektabilitas pemilihan kepala daerah menjelang, pada saat dan sesudah pemilihan kepala daerah (seperti, INSTRAT tentang Hasil Survey Elektabilitas Pilkada Jawa Barat Tahun 2013, Charta Politika tentang survey Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2013, LSI tentang survey Pilkada Bangka Belitung Tahun 2013 dan survey Pilkada Kalimantan Barat Tahun 2013).

Kajian lainnya tentang pemilu dan pilkada dalam perspektif neo-institutionalisme juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti (antara lain, Pratikno, 2007; Lindawaty, 2012; Andrias dan Nurohman, 2013; Djati, 2013; Wahyudi, 2009; Hertanto dan Sulaeman, 2013, Irawan dkk, 2013; Margono, 2015). Dalam kajian tersebut, aspek institusi (partai politik, lembaga politik, organisasi sosial, lembaga penyelenggaraan pemilu, bawaslu), aspek perilaku politik (perilaku peserta pilkada/kontestan, perilaku partai/tim sukses, perilaku masyarakat) serta norma (peraturan perundang-undangan tentang pemilu/pilkada dan aturan tentang penyelesaian sengketa atau kasus-kasus pemilu/pilkada) menjadi fokus kajian dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada, baik dalam tahapan pra pemilu/pilkada, saat pemilu/pilkada maupun pasca pemilu/pilkada.

Dalam tulisan ini, penulis membahas hasil kajian literatur tentang perilaku pemilih dan budaya politik dalam pemilu, dimana dalam pandangan penulis kajian tersebut merupakan salah satu kajian yang sangat menarik, karena perilaku pemilih dalam pemilu mencerminkan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara atau daerah. Selain itu, antara perilaku pemilih dan budaya politik berrelasi satu sama lain dalam sistem politik, khususnya dalam konteks pemilu atau pilkada sebagai salah satu bagian dari komponen berkembangnya demokrasi di suatu negara atau daerah.

Perilaku pemilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik atau kandidat yang akan dipilihnya. Perilaku pemilih secara umum dapat dibagi menjadi dua macam perilaku, yaitu perilaku yang baik atau yang normal dan perilaku yang tidak baik atau menyimpang. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, perilaku normal adalah perilaku politik yang mengikuti tata cara dan aturan main dalam berpolitik, sementara perilaku politik menyimpang adalah pola perilaku politik yang tidak mengikuti aturan main. Bahkan dalam hal ini mungkin mereka melakukan berbagai perilaku yang membuat pihak atau orang lain terganggu dan terintimidasi. Sebagai contoh adalah perilaku kekerasan politik yang sering terjadi di tengah kampanye pemilu, seperti bentrok antara pendukung parpol, intimidasi pendukung partai politik lain atau antara pendukung kandidat yang satu dengan yang lain yang berujung pada konflik dan permusuhan.

Menurut Ramlan Surbakti, perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat, dalam rangka proses pembuatan pelaksanaan dan penegakan keputusan politik (Surbakti, 1992: 12). Tidak semua individu atau kelompok masyarakat itu mengerjakan kegiatan politik. Karena ada pihak yang memerintah dan ada pula yang mentaati perintah, yang satu mempengaruhi dan yang lain menentang dan hasilnya berkompromi. Yang lain menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi, berunding dan tawar-menawar, yang satu memaksakan keputusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan. Yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya (yang merugikan masyarakat), sementara pihak lain berusaha memaparkan kenyataan yang sebenarnya dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi.

Perilaku politik menurut pendapat Ramlan Surbakti dibagi 2 (dua), yaitu: Pertama, perilaku politik lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakan keputusan politik. Kedua, Perilaku politik warga negara maupun individu kelompok yang berhak mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pemerintah menyangkut kehidupan warga negara tersebut. Salah satu perilaku politik yang dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk pemilihan umum. Dalam pemilihan umum masyarakat berpartisipasi untuk memilih para wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka (Surbakti, 1992: 15).

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, namun terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Para pemilih dapat saja memilih seorang calon baik calon kepala daerah maupun calon anggota dewan, karena dianggap sebagai representatif dari keagamaan. Namun dapat juga ia memilih karena ikatan kepartaian dan juga mewakili kelompoknya. Atau ada juga pemilih yang memilih calon karena ikatan emosional misalnya taat dan kepatuhan terhadap seseorang dengan ikatan loyalitas terhadap figur bersangkutan.

Perilaku pemilih merupakan salah satu bentuk dari perilaku politik anggota masyarakat. Aktivitas politik baik yang bersifat sederhana maupun yang hebat merupakan bentuk nyata dari sikap dan kognisi yang dimiliki oleh seseorang. Secara bebas perilaku politik menurut Arifin Rahman(2001:50) dapat diartikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi kongkritnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur politik atau budaya politik.

Gabriel Almond mengatakan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga pemerintah dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan pengakuan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Perilaku politik yang menarik dikaji adalah perilaku pemilih artinya perilaku orang yang memilih hak pilih dalam setiap pemilihan umum. Pemilih sebagai pihak yang paling menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu, kualitas anggota legislatif, pimpinan eksekutif di pusat maupun di daerah serta kualitas demokrasi memiliki berbagai kecenderungan yang dimunculkan oleh hal yang bersifat psikologis, ekonomis, informatif dan relasi lainnya.

Kematangan pemilih akan mempengaruhi tingkat perilaku pemilih. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan potensi internal seperti pendidikan, kualitas dan kuantitas informasi, interaksi dengan perilaku politik dan kemampuan memilih dari berbagai alternatif yang ada berperan dalam membentuk perilaku pemilih. Perilaku pemilih ini juga mencerminkan budaya politik dari masyarakat, yang dalam konteks perilaku pemilih dan budaya politik dalam pemilu di pasca reformasi mengalami perubahan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini, akan dibahas tentang perilaku pemilih dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi, budaya politik dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi serta relasi antara perilaku pemilih dan budaya politik dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi.

METODE

Dalam kajian ini, penulis menggunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana metode ini dianggap tepat dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan tentang perilaku pemilih dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi, budaya politik dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi serta relasi antara perilaku pemilih dan budaya politik dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi.

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi kepustakaan melalui kajian literatur dan dokumentasi yang terkait dengan perilaku pemilih dan budaya politik dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi. Dari kajian literatur dan berdasarkan berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian, penulis menyusun instrumen penelitian yang menjadi bahan untuk analisis kajian ini.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan perspektif, teori dan konsep-konsep yang antara lain digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap-sikap tertentu. (Schwandt dalam Creswell, 2010: 95).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Pemilih dalam Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan (Firmanzah, 2007: 102).

Perilaku pemilih dapat ditujukan dalam memberikan suaradan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi anggota legislatif, presiden dan wakil presiden maupun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilu secara langsung.

Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan rasional (Asfar, 2006: 137-144).

Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda); jenis kelamin (laki-perempuan); agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang

cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi- organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi; maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang (Asfar, 2006: 137).

Pendekatan psikologis menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi-terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan perilaku memilih (politik) seseorang. Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang-sebagai refleksi dari kepribadian seseorang-merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat (Asfar, 2006: 140).

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politikpun maka masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke OPP yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian (Asfar, 2006: 143).

Dalam menentukan pilihannya, pemilih dibedakan dalam 2 (dua) bentuk orientasi, yaitu Orientasi *Policy-Problem Solving* dan Orientasi Ideologi. Ketika pemilih menilai seorang kontestan dari kacamata *policy-problem-solving*, yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana kontestan mampu menawarkan program kerja atau solusi bagi suatu permasalahan yang ada. pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaanterhadap masalah nasional atau daerah dan kejelasan-kejelasan program kerja partai politik atau kontestan pemilu yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih. Sedangkan pada pemilih yang cenderung mementingkan ideologi suatu partai atau kontestan, akan mementingkan ikatan "ideologi" suatu partai

atau kontestan, yang akan menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, norma, emosi dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai atau kontestan pemilu, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya ke partai atau kontestan tersebut. (Wibawanto, "Menangkan Hati dan Pikiran Rakyat". Yogyakarta: Pustaka. 2005).

Selain itu, pemilih juga dibedakan atas pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih skeptis. Pada Pemilih Rasional, pemilih memiliki orientasi yang tinggi terhadap *policy-problem-solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.

Sementara itu, proses untuk menjadi jenis pemilih kritis bisa terjadi melalui 2 hal yaitu pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai/kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem partai ideologi dengan kebijakan yang dibuat.

Pemilih tradisional memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dll, dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka

menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

Sedangkan pemilih skeptis tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Walaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/Negara.

Bila kita telusuri, perilaku pemilih dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi, dapat ditemui beberapa kategori perilaku pemilih sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

Perilaku pemilih dalam pemilu 1999, lebih bercorak pemilih tradisional, pemilih kritis dan pemilih rasional. Dilihat dari orientasinya, pada pemilu tahun 1999 cenderung pada kesamaan ideologi dengan calon yang akan dipilihnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada pemilu 1999, perilaku pemilih masih dipengaruhi oleh aspek-aspek psikologis dan sosiologis masyarakat yang bersangkutan. Namun pada pemilu 1999 ini juga muncul perilaku pemilih yang kritis dan rasional yang dimotori oleh para intelektual dan aktivis politik yang muncul bersamaan dengan gagasan demokrasi dalam politik dan pemerintahan. Perilaku politik yang bercorak kritis dan rasional di pada pemilu 1999 lebih berorientasi pada *policy-problem solving* yang ditawarkan oleh partai yang dipilihnya dalam pemilu.

Pada pemilu 2004, perilaku pemilih mengalami pergeseran seiring dengan adanya perubahan sistem pemilu legislatif maupun sistem pemilu presiden, dimana untuk memilih anggota parlemen digunakan sistem pemilu Proporsional dengan varian Proporsional Daftar (terbuka). Untuk memilih anggota DPD digunakan sistem pemilu lainnya, yaitu *Single Non Transverable Vote* (SNTV). Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan Mayoritas (Pluralitas) dengan varian *Two Round System* (Sistem Dua Putaran). Dengan perubahan sistem pemilu tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perilaku pemilih yang lebih berperilaku rasional serta mulai muncul sikap pemilih yang pragmatis. Dalam situasi tersebut, muncul transaksi-transaksi antara para pemilih dengan yang dipilihnya, terutama yang berbentuk transaksi material yang dianggap lumrah oleh kedua belah pihak. Namun dalam pemilu ini juga, pemilih yang bercorak tradisional masih terlihat, terutama para

pemilih yang masih loyal terhadap ideologi dan partai politik yang didukungnya.

Pada pemilu 2009, perilaku pemilih tidak jauh berbeda dengan perilaku pemilih dalam pemilu 2004, namun sudah mulai berkembang ke arah pemilih yang rasional, pemilih kritis dan pemilih skeptis. Namun para pemilih yang rasional lebih dipengaruhi oleh sikap pragmatis yang ditunjukkan dengan adanya transaksi politik yang dilakukan oleh para pemilih dengan yang dipilihnya, baik secara langsung dengan kandidat ataupun melalui tim suksesnya. Pada pemilu 1999 ini juga masih terlihat pemilih yang bercorak tradisional yang loyal terhadap partai atau tokoh yang dipilihnya, tanpa memandang *policy-problem – solving* yang ditawarkan partai politik atau kandidat yang dipilihnya.

Pada pemilu 2014, para pemilih lebih bercorak rasional, bercorak kritis, dan bercorak skeptis. Pemilih rasional dalam pemilu 2014 cenderung rasional dalam arti apa yang dilakukan oleh pemilih untuk bertujuan untuk memberikan keuntungan material bagi mereka (pilihannya), dimana dalam perilakunya dipengaruhi oleh sikap *patron client* antara pemilih yang yang dipilihnya atau antara Wakil dan Yang Diwakilinya. Selain itu, pada pemilu 2014 muncul pula perilaku pemilih yang kritis, yang dilakukan oleh aktivis dan intelektual politik yang masih bertahan untuk melakukan dan mengawal pemilu yang bersih, jujur, adil dan berintegritas di tengah-tengah kondisi politik dipandang kurang baik. Sementara itu, perilaku pemilih yang skeptis juga banyak ditunjukkan oleh pemilih yang merasakan tidak adanya perubahan ke arah yang lebih dengan dan tanpa adanya pemilu, dengan melakukan golput saat pemilu berlangsung.

Budaya Politik dalam Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya (Budiardjo, 2008: 58-59).

Kegiatan politik warga negara, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambkannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat

dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan dan kepemimpinan.

Dengan kata lain, budaya politik suatu bangsa dapat didefinisikan sebagai pola distribusi orientasi-orientasi yang dimiliki oleh anggota masyarakat terhadap objek-objek politik atau bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantaramasyarakat itu. Lebih jauh dinyatakan, bahwa warga Negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik (2006: 25). Budaya politik selalu *inhern* pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup dalam sistem politik tradisional, transnasional, maupun modern.

Dalam pendekatan perilaku politik, terdapat interaksi antaramanusia satu dengan lainnya yang akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi budaya politik seseorang. Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik.

Menurut Almond dan Verba (1984: 16) tipe-tipe orientasi politik dapat dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu:

- (1) Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lagu kebangsaan negara.
- (2) Orientasi afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranannya yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu.
- (3) Orientasi evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpisahkan-pisah tetapi saling terkait

atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Misalnya, seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi, diwarnai, atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya, pengetahuan orang tersebut tentang sesuatu simbol politik, misalnya, dapat pula membentuk atau mewarnai perasaannya terhadap simbol politik itu. Boleh jadi, pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan (Alfian dan Sjamsuddin, 1991: 22).

Pada hakekatnya kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dari sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif, dan sejumlah nilai yang membatasi tindakan-tindakan politik, maka kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subjektif bagi politik. Karena kebudayaan politik merupakan salah satu aspek dari kehidupan politik, maka jika kita ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu kelompok masyarakat secara bulat dan utuh, maka kitapun dituntut melakukan penelaahan

terhadap sisinya yang lain (Alfian dan Sjamsuddin, 1991: 23).

Berkaitan dengan sistem politik, kebudayaan politik masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem, di samping itu kebudayaan politik lebih mengutamakan dimensi psikologis suatu sistem, seperti sikap, sistem kepercayaan, atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam suatu masyarakat sekaligus harapan-harapannya. Variabel yang ada bisa berawal dari suasana psikologis seseorang, argumentasi umum dalam jajaran psikologi sosial, dan terminal terakhir bertumpu pada status sosial-ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai determinan pembentukan orientasi, sikap, dan tingkah laku politik (Alfian dan Sjamsuddin, 1991: 24).

Alfian (1986: 244-245), menganggap bahwa lahirnya kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat dalam arti luas. Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari. Adapun nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan erat dengan atau bagian dari nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama. Alfian, menempatkan faktor lingkungan budaya sebagai salah satu faktor penentu orientasi politik seseorang disamping sejumlah faktor lainnya.

Almond dan Verba mengemukakan tiga tipe budaya politik yang berkembang dalam suatu masyarakat/bangsa, yaitu tipe parokial, subjek dan partisipan (Almond dan Sidney Verba, 1984: 14-22):

1) Tipe budaya politik parokial

Orang/masyarakat yang bertipe budaya politik parokial bercirikan tidak memiliki orientasi (atau pandangan sama sekali, baik berupa pengetahuan (kognisi), sikap (afeksi) dan penilaian (evaluasi) terhadap objek politik (sistem politik). Ini berarti yang bersangkutan bersifat acuh tak acuh terhadap objek politik. Objek politik yang paling utama adalah pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Objek politik yang lain adalah pemilu DPRD, DPR, DPD dan Presiden, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota), pemilihan Kepala Desa, pemilihan anggota BPD, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Namun, walaupun tidak/kurang peduli terhadap objek politik, orang/masyarakat yang bertipe budaya politik parokial, tetap peduli terhadap nilai-nilai primordial seperti adat istiadat, etnis dan agama.

2) Tipe budaya politik subjek.

Orang/masyarakat yang bertipe budaya politik subjek, bercirikan memiliki orientasi terhadap output (hasil/pelaksanaan kebijakan publik) yang sangat tinggi, tetapi orientasi terhadap input (pembuatan kebijakan publik) dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik sangat rendah. Ini berarti dalam tipe budaya politik subjek, kepatuhan/ketaatan yang tinggi terhadap berbagai peraturan pemerintah tetapi tidak disertai sikap kritis (menunjukkan kelemahan dan kekuatan/kebaikan suatu peraturan). Dengan kata lain peran yang dilakukan bersifat pasif.

3) Tipe budaya politik partisipan. Tipe budaya politik partisipan, bercirikan di mana seseorang/masyarakat memiliki orientasi terhadap seluruh obyek politik secara keseluruhan (input, output) dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik. Ini berarti seseorang/masyarakat bertipe budaya politik partisipan disamping aktif memberikan masukan atau aktif mempengaruhi pembuatan kebijakan publik (input) juga aktif dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik (output). Juga memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa dirinya sebagai aktor politik berkemampuan mempengaruhi kehidupan politik bangsa dan negaranya. Orang/masyarakat yang bertipe budaya politik partisipan disamping berperan aktif dalam proses politik juga tunduk pada hukum dan kewenangan pemerintah.

4) Tipe budaya politik campuran atau kewarganegaraan.

Dalam kenyataan, sulit ditemukan dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa berbudaya politik menurut satu tipe tertentu. Misalnya, hanya berbudaya politik partisipan, atau subjek atau parokial. Ini berarti sistem politik, yang secara dominan berbudaya politik partisipan, juga di

dalamnya memiliki budaya politik parokial dan subjek. Oleh karena itu yang kita temukan dalam kenyataan budaya politik suatu masyarakat atau bangsa bersifat campuran. Ini berarti dalam masyarakat dapat kita temukan budaya politik campuran: parokial – subjek; subjek – partisipan; dan parokial – partisipan.

Tipe budaya politik yang yang berkembang di Indonesia Pasca Reformasi, dapat ditelusuri dari beberapa hal berikut:

Pasca reformasi, dengan amandemen UUD 1945, maka pengembangan kelembagaan negara terutama antara eksekutif dengan legislatif dikembangkan pada posisi yang sama kuat. Posisi yang sama kuat ini dimaksudkan dalam rangka pengembangan hubungan kelembagaan negara yang bersifat check and balance. Caranya Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi di pilih oleh rakyat secara langsung. Kekuasaan membuat undang-undang berada di DPR, sedangkan eksekutif hanya sebatas berhak mengajukan RUU. Pengesahan UU oleh Presiden tidak mengikat secara hukum, karena apabila Presiden tidak mengesahkan dalam batas waktu yang telah ditentukan UU itu tetap berlaku.

Selain itu, Kelembagaan negara untuk mendukung negara demokrasi dan negara hukum juga berkembang dengan pesat. Saat ini kita mengenal Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Ombusmen Nasional. Begitu pula secara kelembagaan mulai diperkuat proses demokrasi, misalnya dengan Pilkada langsung, pemekaran provinsi maupun kabupaten. Tetapi ironisnya baik eksekutif maupun legislatif tampak semakin oligarkis (mengutamakan kelompok). Hal ini dapat dilihat pada berbagai kebijakan publik yang diambil tampak kurang berorientasi pada kepentingan rakyat. Menghadapi kondisi yang demikian rakyat tidak tinggal diam. Mereka kemudian merespon dengan berbagai aktivitas untuk memperjuangkan kepentingannya. Rakyat menuntut agar negara dikelola sesuai dengan tujuan bernegara, yang paling penting yaitu mensejahterakan rakyatnya. Kondisi demikian inilah yang tampaknya menyebabkan mengapa tipe budaya politik partisipan yang berkembang sejak tumbangannya pemerintahan orde baru semakin menguat.

Dengan kata lain tipe budaya politik parokial dan tipe budaya politik subjek yang secara dominan berkembang pada masa sebelum era reformasi mulai bergeser ke arah berkembangnya tipe budaya politik partisipan. Bukti kearah berkembangnya tipe budaya politik partisipan dalam masyarakat dewasa ini, antara lain ditandai maraknya : masyarakat

memberikan input terhadap berbagai RUU. Seperti input masyarakat terhadap RUU Perlindungan terhadap Saksi, RUU Penyiaran, RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, dan sebagainya. Begitu pula berbagai kritik, protes terhadap kebijakan pemerintah ketika menaikkan BBM, impor beras, dan sebagainya.

Dalam konteks pemilu pasca reformasi, budaya politik pemilih mengalami perubahan yang cukup besar dari mulai pemilu tahun 1999 sampai dengan pemilu tahun 2014.

Dalam 10 tahun terakhir pasca reformasi 1998, masih adanya *disconnect electoral* sebagaimana terjadi pada pemerintahan Orde Baru, dimana terjadinya pergantian kekuasaan dan sebaran kekuasaan ke sejumlah kekuatan politik, termasuk adanya desentralisasi, tidak lantas bermakna pudarnya kekuasaan yang bercorak oligarkis. Realitas semacam itu, tidak bisa terjadi semata-mata karena pemimpin yang terpilih lebih mementingkan diri sendiri atau kelompok (partai). Budaya politik para pemilih juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya realitas semacam itu (Marijan, 2015: 128-129).

Jauh hari sebelum jatuhnya pemerintahan Orde Baru, William Liddle (1988) menempatkan budaya politik Indonesia di dalam konteks transformasi dari budaya politik tradisional ke budaya politik modern. Budaya politik tradisional dipengaruhi oleh oleh beragam etnis, agama, dan budaya-budaya lokal lainnya. Sementara itu di dalam budaya politik modern dipengaruhi oleh budaya politik Barat. Di dalam budaya politik tradisional, budaya politik Jawa sangat dominan. Di dalam budaya politik demikian relasi antara pemimpin dan yang dipimpin bercorak *patron client*. Sementara itu, relasi antara pemimpin dan yang dipimpin di dalam budaya politik Barat lebih bercorak saling mengontrol dan berdasarkan prinsip rasionalitas. Yang dipimpin memberikan otoritas kepada pemimpin, sementara yang memimpin harus responsif dan akuntabel (1998: 1).

Transformasi atau perubahan budaya politik dari pemilih dalam pemilu pasca reformasi tandai oleh dua kelompok penganut budaya politik yang berlawanan tetapi dinamis, yaitu *dependers* dan *innovators* (Liddle, 1996). Di dalam kelompok pertama cenderung mempertahankan *status quo*. Dalam hal ini Liddle memberikan gambaran sebagai berikut: “*A supporting cast of tens of believers, many of whom are mobilise against change, the cultural and social inertia that typically accompanies long-held beliefs, a high degree of ‘recoverability’ or capacity to adapt to new situations; and powerful networks of social forces and institution with an interest in their preservation* (Liddle, 1996: 159).

Sementara itu, kelompok *innovators* berupaya melakukan improvisasi dan perubahan-perubahan guna mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis. Dalam pandangan Liddle, Kelompok ini terdiri dari para aktivis dan intelektual, serta sejumlah aparatur negara yang memiliki perhatian terhadap perubahan-perubahan.

Relasi Perilaku Pemilih dengan Budaya Politik dalam Pemilu Pasca Reformasi

Jatuhnya pemerintahan Suharto di tengah krisis ekonomi (krisis moneter) tahun 1998 berarti pula kemenangan pendukung budaya politik *innovators*. Namun kemenangan ini lebih berfokus terjadinya perubahan-perubahan kepemimpinan dan corak sistem politik ke arah yang lebih demokratis. Sementara budaya politik para pemilih secara keseluruhan tidak mengalami perubahan-perubahan besar sebagaimana perubahan kepemimpinan dan kelembagaan. Pola *patronclient* dalam perilaku pemilih pada awal reformasi hingga saat ini masih cukup kuat, meskipun harus diakui, dalam tahun-tahun belakangan telah mengalami perubahan-perubahan. Implikasi dari masih kuatnya budaya politik semacam itu telah membuka ruang bagi wakil untuk melakukan *ignoren* terhadap orang-orang yang diwakilinya. Adanya *disconnect electoral* yang terjadi merupakan refleksi dari belum tumbuh kuatnya budaya politik kewarganegaraan (*civic cultural*) yang memungkinkan adanya *civicengagement* atau relasi yang lebih baik antara pemimpin dan yang dipimpin.

Selain itu, *disconnect electoral* itu tidak lepas dari perilaku pemilih, khususnya para pemilih yang relatif rasional, yang terjadi pada pemilu tahun 1999, 2004 dan pilkada-pilkada. Pada pemilu 1999, perilaku pemilih cenderung bercorak “*voluntary*” (sukarela). Hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat di dalam pemilu yang cukup intens. Dilihat dari tingkat partisipasi, kehadiran pemilih ke bilik-bilik suara pada pemilu 1999 merupakan yang tertinggi kalau dibandingkan dengan pemilu lainnya yang dilakukan secara demokratis pada tahun 1955 da tahun 2004. Kesukarelaan juga terlihat dari antusiasme pemilih memberikan sumbangan, baik uang, tenaga maupun material lainnya, kepada partai-partai yang mereka dukung. Corak “*vouluntary*” ini tidak terlepas dari harapan, ketika partai-partai mereka memperoleh kekuasaan, akan terdapat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Pada pemilu 2004, perilaku pemilih sudah mengalami perubahan. Antusiasme pemilih yang terlibat dalam pemilu jauh berkurang. Kalaupun terlibat, tidak lepas dari “*transaksi-transaksi material*”. Tidak sedikit, para pemilih datang ke tempat-tempat kampanye karena memperoleh imbalan kaus atau “*uang transportasi*”. Kecenderungan demikian semakin kuat

ditemui pada pilkada-pilkada yang dilakukan sejak 1 Juni 2005. Transaksi model demikian menghasilkan relasi antara wakil dan terwakil secara terputus, karena transaksi itu selesai ketika calon atau wakil memberikan “materi” dan terwakil menentukan pilihannya (Marijan, 2015: 130-131).

Adanya pergeseran corak perilaku pemilih semacam itu tidak lepas dari penilaian bahwa para wakil yang mereka harapkan bisa melakukan perubahan-perubahan tidak bisa berbuat banyak. Kalaupun ada perubahan-perubahan, yang mamperoleh banyak keuntungan adalah para wakil itu sendiri. Adanya fakta tentang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para wakil rakyat pasca pemerintahan Orde Baru, berbeda degan semangat reformasi yang digerakkan pada saat menjatuhkan pemerintahan Orde Baru pada awal tahun 1998. Pasca reformasi, terdapat harapan kuat, pawa wakil rakyat bisa memfungsikan dirinya sebagai “*delegates representation*”, yaitu memperjuangkan kebijakan-kebijakan Negara sebagaimana dikehendaki oleh para konstituen (Andeweg dan Thomassen, 2005: 509). Harapan demikian berbeda dengan apa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Ketika itu para wakil rakyat lebih banyak memfungsikan diri sebagai “*trustees representation*”, yakni bergerak sendiri seolah-olah memperoleh kepercayaan penuh dari para pemilihnya. Di dalam situasi demikian, para wakil rakyat tidak merasa perlu melakukan konsultasi dengan para konstituen.

Realitas tersebut mendorong munculnya pandangan bahwa “kalau para wakil memperoleh keuntungan material, mengapa para pemilih tidak?”. Memperoleh kaos, dan uang transportasi ketika menghadiri kampanye merupakan bagian dari keuntungan yang berusaha dinikmati oleh para pemilih itu. Selain itu, tranksaksi-transaksi material juga terlihat dari tuntutan sebagai pemilih untuk memperoleh sumbangan dari para wakil, antara lain banyaknya sumbangan yang diinginkan dari konstituen dalam bentuk proposal-proposal (Marijan, 2015: 131).

Di dalam negara yang demokratis, adaya transaksi antara wakil dan terwakil memang harus terjadi. Tetapi, bentuk transaksinya adalah bahwa para pemilih ikut memberikan otoritas kepada para wakil dan para wakil berusaha membentuk kebijakan-kebijakan politik yang disesuaikan dengan preferensi para pemilih. Agar transaksi demikian terjadi, maka perlu dibukanya ruang-ruang publik yang memungkinkan para pemilih bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para wakil. Selain itu, para wakil dituntut memiliki responsibilitas dan akuntabilitas kepada publik.

Secara politik, penilaian-penilaian apakah transaksi itu telah berjalan atau tidak dilakukan pada saat

pemilu. Anthony Downs mengemukakan bahwa pemerintah akan berusaha memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya, khususnya kekuasaan di dalam mengalokasikan dan mendistribusikan kekuasaan, untuk memperoleh simpati dari para pemilih. Disamping dimaksudkan sebagai langkah untuk memenuhi janji-janji yang pernah diucapkan sebelum menjabat, orientasi kebijakan seperti itu dimaksudkan sebagai bukti kepada para pemilih bahwa para *incumbent* itu memang layak untuk dipilih. Dalam kerangka semacam itu, manakala para wakil dinilai mampu memenuhi transaksi-transaksi yang ada, akan dipilih kembali. Sebaliknya, manakala tidak berhasil, atau bahkan mengingkari janji-janji yang telah dikemukakan sebelumnya, mereka akan dihukum atau tidak akan dipilih kembali (dalam Marijan, 2015: 132).

Selain itu, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atau para wakil, tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penghukuman dengan tidak dipilih kembali dalam pemilu. Ketidakpuasan juga melahirkan *distrust* (ketidakpercayaan) para pemilih yang memicu pada suatu keputusan untuk tidak ikut dalam pemilu dan terlibat dalam partisipasi publik lainnya. Dalam situasi demikian, proses perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia tidak saja belum mampu melahirkan budaya politik kewarganegaraan (*civic culture*). *Performance* para wakil yang tidak baik juga telah menghambat pertumbuhan budaya politik semacam itu. *Disconnect electoral* terus terjadi karena baik para wakil maupun terwakil (pemilih dan yang dipilih) sama-sama dijangkiti oleh budaya *ignorance* atau bercorak apatis. Dalam hal ini sebagian pemilih yang melakukan golput termasuk kelompok yang apatis ini.

Selain itu, di kalangan pemilih juga terdapat fenomena munculnya kembali kelompok “*dependers*”, dimana dalam konteks ini muncul pandangan bahwa situasi pada masa Orde Baru itu lebih baik dan telah membuat sebagian pemilih merindukan kembali format politik pemerintahan pimpinan Soeharto itu. Kerinduan itu bahkan memperoleh pembenaran ketika mendapati perilaku elit politik yang tidak lebih baik dari elit politik Orde Baru, berikut konflik dan biaya tinggi yang mengiringi proses demokratisasi (Marijan, 2015: 133).

Realitas tersebut berimplikasi pada kelompok *innovators* yang masih harus terus berusaha mewujudkan apa yang menjadi harapannya, yaitu menjadikan demokrasi yang lebih baik dalam sistem politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya melalui berbagai perubahan desain kelembagan, aturan main dalam pemilu dan partisipasi politik masyarakat, serta kebijakan-kebijakan publik yang memungkinkan terdapatnya

pemerintahan yang responsif dan akuntabel, yang sampai saat ini belum berjalan dengan baik, sehingga masih perlu dibenahi kekurangan-kekurangannya.

SIMPULAN

Perilaku pemilih dalam pemilu di Indonesia pasca reformasi, dapat dilihat melalui perilaku pemilih pada pemilu 1999, pemilu 2004, pemilu 2009 dan pemilu 2014, yang secara representatif dapat dikategorikan sebagai pemilih yang bercorak tradisional, pemilih kritis, pemilih rasional dan pemilih skeptis. Dilihat dari orientasinya, pada pemilu tahun 1999 cenderung pada kesamaan ideologi dan loyalitas terhadap partai yang akan dipilihnya. Pada pemilu 1999 ini juga muncul perilaku pemilih yang kritis dan rasional yang dimotori oleh para intelektual dan aktivis politik yang muncul bersamaan dengan gagasan demokrasi dalam politik dan pemerintahan. Perilaku politik yang bercorak kritis dan rasional di pada pemilu 1999 lebih berorientasi pada *policy-problem solving* yang ditawarkan oleh partai yang dipilihnya dalam pemilu. Pada awal masa reformasi juga nampak perilaku pemilih yang bersifat *voluntary* (sukarela)

Pada pemilu 2004, perilaku pemilih mengalami pergeseran seiring dengan adanya perubahan sistem pemilu legislatif maupun sistem pemilu presiden, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perilaku pemilih yang lebih berperilaku rasional serta mulai muncul sikap pemilih yang pragmatis. Dalam situasi tersebut, muncul transaksi-transaksi antara para pemilih dengan yang dipilihnya, terutama yang berbentuk transaksi material yang dianggap lumrah oleh kedua belah pihak. Namun dalam pemilu ini juga, pemilih yang bercorak tradisional masih terlihat, terutama para pemilih yang masih loyal terhadap ideologi dan partai politik yang didukungnya.

Pada pemilu 2009, perilaku pemilih tidak jauh berbeda dengan perilaku pemilih dalam pemilu 2004, namun sudah mulai berkembang ke arah pemilih yang rasional, pemilih kritis dan pemilih skeptis. Namun para pemilih yang rasional lebih dipengaruhi oleh sikap pragmatis yang ditunjukkan dengan adanya transaksi politik yang dilakukan oleh para pemilih dengan yang dipilihnya, baik secara langsung dengan kandidat ataupun melalui tim suksesnya. Pada pemilu 2009 ini juga masih terlihat pemilih yang bercorak tradisional yang loyal terhadap partai atau tokoh yang dipilihnya, tanpa memandang *policy-problem solving* yang ditawarkan partai politik atau kandidat yang dipilihnya.

Pada pemilu 2014, para pemilih lebih bercorak rasional, bercorak kritis, dan bercorak skeptis. Pemilih rasional dalam pemilu 2014 cenderung rasional dalam arti apa yang dilakukan oleh pemilih

sebagian besar bertujuan untuk memberikan keuntungan material bagi mereka (pemilihnya), dimana dalam perilakunya dipengaruhi oleh sikap *patron client* antara pemilih yang yang dipilihnya atau antara Wakil dan Yang Diwakilinya. Selain itu, pada pemilu 2014 muncul pula perilaku pemilih yang kritis, yang dilakukan oleh aktivis dan intelektual politik yang masih bertahan untuk melakukan dan mengawal pemilu yang bersih, jujur, adil dan berintegritas di tengah-tengah kondisi politik dipandang kurang baik. Sementara itu, perilaku pemilih yang skeptis juga banyak ditunjukkan oleh pemilih yang merasakan tidak adanya perubahan ke arah yang lebih baik dengan dan tanpa adanya pemilu, dengan melakukan golput saat pemilu berlangsung.

Budaya politik dalam pemilu di Indonesia di awal pasca reformasi juga masih ditunjukkan dengan peralihan dari budaya politik yang cenderung tradisional menuju modern. Budaya politik pemilih terbagi atas beberapa kategori, dimana yang pada masa Orde Baru cenderung parokial dan subyektif, pasca reformasi mengalami perubahan menuju budaya politik subyektif dan budaya politik partisipan.

Pada pasca reformasi, perilaku pemilih masih memperlihatkan budaya politik *patron client* pada pemilih tradisional yang loyal pada ideologi dan partai politik. Demikian juga budaya politik *patronclient* nampak pada pemilih rasional yang fragmatis, dimana perilaku tersebut tercermin dalam hubungan antara pemilih dengan yang dipilihnya atau antara wakil dan terwakil yang melakukan transaksi politik layaknya hubungan antara *patron* dan *client*. Sementara itu, pasca reformasi juga memunculkan kelompok penganut budaya politik yang berlawanan tetapi dinamis, yaitu kelompok *defenders* yang cenderung mempertahankan status quo serta kelompok *innovators* yang berusaha mewujudkan demokrasi yang lebih baik.

Relasi antara perilaku pemilih dan budaya politik antara lain dapat dilihat melalui perilaku pemilih yang semata-mata bercorak *voluntary* (sukarela) mauun yang bercorak rasional pragmatis dengan budaya politik yang masih bercorak *patron client* serta transaksi material dalam pemilu yang pada akhirnya menyuburkan terdapatnya *disconnect electoral*. Oleh karenanya, tantangan ke depan adalah bagaimana mewujudkan budaya politik kewarganegaraan dan adanya perilaku politik yang bercorak transaksi kebijakan. Hal tersebut akan memungkinkan adanya kontrak politik atau perjanjian yang lebih baik antara wakil dan terwakil.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin. 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti

- Almond , Gabriel A.dan Sidney Verba. 1984.*Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*. Surabaya:Pustaka Eureka.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Poliik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kantaprawira. Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Liddle, R. William. 1988. *Politics and Culture in Indonesia*. The Ohio State University. Centre for Political Institute for Social Research.
- Marijan, Kacung. 2015. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman, Arifin. 2001. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Wibawanto, Agung. 2005. *Menangkan Hati dan Pikiran Rakyat*. Yogyakarta: Pembaharuan.

Politik Kepercayaan: Sebuah Relasi Sosial dan Budaya dalam Perdagangan Komoditas di Pedesaan Sumatra

Amilda

Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
amildasani@yahoo.com

Abstrak

Hubungan antara penjual dan pembeli tidak semata didasarkan pada perhitungan keuntungan semata. Hubungan keduanya tidak hanya memuat pertukaran hasil produksi dalam kepentingan ekonomi tetapi juga memuat kontrak-kontrak sosial yang mengikat antara penjual dan pembeli. Kontrak sosial tersebut memuat nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakatnya. Tulisan ini akan memfokuskan pada bagaimana relasi personal yang terbangun antara petani selaku penjual dan pedagang pengepul sebagai pembeli dalam perdagangan kelapa. Data yang digunakan dalam tulisan ini diperoleh dengan menggunakan metode etnografi dalam rangka memahami bentuk-bentuk hubungan personal yang terjadi dalam perdagangan kelapa antara petani dan pedagang. Hubungan personal antara petani dan pedagang didasarkan pada nilai kepercayaan dan kesetiaan. Petani mempercayai pedagang untuk menjualkan produk kelapa mereka sedangkan pedagang mengharapkan kesetiaan petani untuk tetap menjual kelapa mereka kepadanya. Karakteristik komoditas juga mempengaruhi bentuk hubungan antara petani dan pedagang. Ketergantungan antar keduanya mendorong petani dan pedagang menjaga hubungan, dengan memberikan harga yang lebih baik untuk menjamin ketersediaan kelapa dengan kualitas baik; sedangkan petani berharap tetap dapat menjual kelapa mereka yang berkualitas rendah dengan harga yang baik. Tulisan ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan tidak bersifat antisosial dan impersonal, perdagangan memuat berbagai interaksi yang bersifat pribadi dan subyektif dari para pelakunya.

Kata kunci: perdagangan, komoditas, petani, pedagang, personal, pedesaan, sumatra

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di pedesaan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perdagangan. Sangat sulit untuk mengatakan bahwa kehidupan perekonomian di pedesaan bersifat tradisional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan tidak berorientasi pada perdagangan baik bersifat lokal, nasional, bahkan global. Petani tidak dapat mengelak untuk masuk dan terlibat dalam komersialisasi yang berkembang di pedesaan. Hasil pertanian petani menjadi komoditas yang diperdagangkan tidak hanya di tingkat lokal

bahkan hingga internasional. Keterlibatan pertanian dalam perdagangan, baik di tingkat lokal maupun global sebagai dampak dari masuknya komersialisasi di pedesaan (Abdullah, 1989; Alexander, 1987; Geertz, 1977; Mulyanto, 2009; Kutaneegara, dkk, 1989; Mai & Buchholt, 1987).

Keterlibatan petani dalam komersialisasi tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah kolonial Belanda, dimana petani diperkenalkan dengan tanaman perdagangan dan menempatkan petani Indonesia dalam lingkaran ekonomi dunia pada abad 19. Menurut Houben (2000:74), pada masa tersebut unsur-unsur dasar sistem ekonomi timpang mendapat bentuknya melalui sistem tanam paksa, ditandai dengan berkembangnya perkebunan di Jawa (lihat juga Bremen, 1997; Asba, 2007; Mai dan Buchholt, 1987; Lindblad, 1998).

Kegiatan perdagangan di pedesaan bukan sekedar tindakan ekonomi dimana terjadi perpindahan barang dari pembeli ke penjual di pasar. Kegiatan pasar di pedesaan menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat; masyarakat tidak hanya melayani kegiatan pertukaran tetapi juga menjadi arena pertunjukan hubungan politik, sosial, dan budaya (Mai & Buchholt, 1987); dan hubungan sosial yang terbangun di pasar bertujuan untuk mendukung hubungan perdagangan tersebut (Alexander & Alexander, 1997).

Artikel ini akan mendiskusikan praktek-praktek perdagangan yang terbangun antara petani sebagai produsen dan pedagang pengepul sebagai pembeli, di mana kegiatan tidak hanya bersandar pada perhitungan ekonomi semata, tetapi lebih dipengaruhi oleh makna sosial dan budaya. Muara dari praktek komersial tersebut adalah untuk memberikan keuntungan masing-masing pihak. Tarik-menarik kepentingan ekonomi antar keduanya menghasilkan persaingan antar aktor-aktor yang terlibat di pasar. Penggunaan simbol budaya menjadi strategi petani dan pembeli dalam usaha menyamakan strategi ekonomi.

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa nilai sosial dan budaya berkontribusi dalam pembentukan karakteristik pasar di mana kepentingan masing-masing pihak berkontribusi mempengaruhi dan membentuk pasar.

Praktek perdagangan antara petani dan pembeli ditentukan oleh karakteristik komoditas. Komoditas dengan kualitas produknya dapat dengan mudah dibedakan atau diukur sehingga praktek perdagangan antara petani dan pembeli menjadi sangat longgar dimana petani dan pembeli dapat dengan mudah berpindah pembeli atau petani lain. Komoditas yang mana kualitasnya hanya dapat diketahui jika sudah diproses maka sifat perdagangan lebih permanen dalam bentuk hubungan kepercayaan guna menjamin ketersediaan komoditas dengan kualitas yang baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan yang dapat merugikan pembeli. Nilai kepercayaan ini menjadikan hubungan antara petani dan pedagang bersifat sangat personal. Praktek perdagangan tidak hanya dibangun antar keduanya didasarkan seberapa tinggi harga yang diperoleh petani, ukurannya tetapi ditentukan oleh seberapa pemurah seorang pembeli dan seberapa setianya seorang petani.

Usaha petani dan pembeli untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka dengan membangun kepercayaan dari masing-masing pihak dalam merupakan bentuk strategi politik perdagangan masing-masing individu melibatkan kehormatan dan berbagai bentuk investasi sosial dalam praktek-praktek ekonomi lokal. Makna yang hadir dalam praktek-praktek ekonomi tersebut merupakan hasil dari bentukan sosial dari pada hasil dari mekanisme penawaran dan permintaan (Bourdieu, 1977:177-178). Ketika praktek-praktek ekonomi, termasuk didalamnya perdagangan, sebagai hasil dari bentukan sosial, ia memuat kepentingan-kepentingan politik dimana terdapat ruang-ruang ketidaksetaraan dalam praktek-praktek ekonomi tersebut, dimana pertukaran tidak hanya bersifat materi tetap juga kesadaran politik dari kedua pihak dengan menggunakan tolak ukur moralitas.

Praktek ekonomi yang dilakukan oleh petani dan pembeli, tidak hanya sebatas kalkulasi keuntungan materi sesaat, keduanya juga melakukan investasi-investasi sosial sejak awal terjadinya transaksi hingga memunculkan tarik-ulur kepentingan yaitu kepentingan petani dengan tolak ukur moralitasnya dan kepentingan pembeli juga dengan tolak ukur moralitas yang berbeda. Perbedaan ini berkaitan dengan nilai-nilai yang melingkupi keduanya berbeda, petani memiliki konstruksi nilainya tentang seorang pembeli yang baik; begitu pula seorang pembeli juga memiliki konstruksi nilai tentang penjual yang baik. Kedua konstruksi nilai ini bertemu dalam praktek-praktek ekonomi di pasar.

METODE

Tulisan ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi dengan subyek penelitiannya adalah petani kelapa selaku produsen yang menjual hasil produk pertanian mereka dan

pedagang pengepul selaku pembeli. Penggunaan desain etnografi dalam rangka memahami makna dari berbagai praktek perdagangan yang dilakukan oleh petani dan pembeli. Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data yang memuat berbagai praktek perdagangan antara petani kelapa dan pembelinya. Proses pengumpulan data tersebut menggunakan teknik pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Analisis data menggunakan analisis etnografi; meliputi tahap analisis domain yaitu melakukan identifikasi beberapa kategori-kategori penting dari pengetahuan budaya petani kelapa seperti mata pencarian, kekerabatan, kebudayaan materi, hubungan sosial, dan sistem kepercayaan. Kategori-kategori tersebut kemudian diuji kembali untuk menemukan kategori-kategori lain dengan menanyakan pertanyaan struktural kepada informan guna mengetahui bagaimana petani mengorganisasikan pengetahuan yang mereka miliki. Tahap kedua adalah melakukan analisis taksonomi agar dapat melihat struktur internal yang terdapat dalam kategori-kategori utama tersebut dengan melakukan identifikasi individu-individu yang terlibat dalam kegiatan perdagangan kelapa seperti petani, pedagang, tukang petik, dan lain-lain. Tahap ketiga dilakukan analisis komponen dengan cara mencari berbagai kemiripan dari berbagai kategori (domain dan taksonomi), kemudian memfokuskan pada berbagai perbedaan dengan menggunakan prinsip kontras. Pemilihan berbagai kontras yang ditemukan, kemudian dikelompokkan sebagai dimensi kontras dan memasukkan semua informasi ke dalam satu paradigma lengkap terhadap satu komponen budaya.

Data pada artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada Januari 2015 hingga Januari 2016 dengan berlokasi di kawasan Delta Upang, sebuah wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah ini dikenal sebagai daerah penghasil kelapa yang penting di Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perdagangan Kelapa di Sumatra

Sejarah perdagangan komoditas di Sumatra menunjukkan bahwa kelapa sebagai komoditas kurang mendapat porsi penting pada pasar komoditas baik di tingkat lokal maupun nasional. Kelapa sebagai komoditas kalah dengan ekspor lada yang banyak ditanam di daerah Sumatra terutama di daerah Aceh (Marsdem, 2013:88). Di Sumatra Barat, kopi menjadi komoditas penting yang banyak ditanam oleh penduduk di daerah perbukitan seperti di Agam, dan Limapuluh Koto; sedangkan di kawasan Sumatra Timur, Sumatera Selatan dan Jambi, tanaman karet menjadi komoditas penting di wilayah ini pada pertengahan abad ke-19 (Poerwanto, 2002).

Kelapa adalah jenis tanaman yang dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia, diperdagangkan masyarakat pada tingkat lokal sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng dan bahan dasar pembuatan makanan untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi masyarakat. Tanaman kelapa mulai menjadi komoditas yang penting pada akhir abad ke-19 setelah minyak nabati menjadi bahan baku yang penting bagi produk sabun dan mentega. Permintaan pasar Eropa terhadap kelapa dalam bentuk kopra mendorong pemerintah Hindia Belanda menggalakkan tanaman kelapa di Nusantara. Daerah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku menjadi wilayah penghasil kelapa yang penting di era kolonial (Hunger dalam Asba, 2007:30). Heersink (1994) menyebutkan pada periode 1927-1950, Indonesia menjadi negara pengeksport kopra terbesar di dunia dengan total ekspor 465 ribu ton dengan luas areal tanaman kelapa mencapai 27,4% dari total luas lahan perkebunan di Indonesia. Sepertiga jumlah total ekspor kopra dunia dihasilkan oleh wilayah Hindia Belanda dan kopra menjadi ekonomi penting di kawasan Indonesia bagian Timur terutama di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku. Peningkatan produksi kopra yang pesat di Indonesia Timur tidak diikuti dengan peningkatan jumlah produksi kopra di wilayah Indonesia Barat terutama Sumatra Barat dan Kalimantan Barat.

Minyak kelapa dan kopra menjadi komoditas penting di Sumatra Barat pada akhir abad ke-19, banyak ditanam oleh masyarakat setempat terutama di wilayah pesisir pantai, wilayah Padang dan Pariaman (Asba, 2007:49). Pada tahun 1870-an, masyarakat Sumatra Barat mulai membuat kopra untuk diperdagangkan dan Sumatra Barat menjadi daerah pengeksport kopra yang utama di Sumatra. Kopra dari wilayah ini lebih banyak dikirim ke Padang dan Jawa sebagai bahan baku pabrik minyak insulide dan sisanya diekspor ke Singapura dan Jepang. Pada tahun 1920, produksi kopra Sumatra Barat mulai menurun disebabkan penduduk lebih menaruh perhatian pada tanaman karet.

Daerah penghasil kelapa lain di Sumatra adalah daerah Pulau Tujuh di Riau. Perdagangan kelapa di pulau ini ditandai dengan berdirinya perusahaan Syarkah al-Ahmadi atau Ahmadi & Co. yang sangat terkenal sebagai perusahaan pribumi pertama di Kepulauan Riau pada tahun 1906. Bauke Jan Haga (1920) menyebutkan sebagian besar wilayah ini ditanami kelapa, sehingga pulau ini memiliki potensi besar produksi kopra, namun produksinya terus menurun karena penduduk Pulau Tujuh mengabaikan perawatan terhadap tanaman kelapa mereka dan hanya menghasilkan kopra dengan kualitas rendah sehingga menanam kelapa tidak dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Melayu Pulau Tujuh.

Catatan sejarah tentang budidaya kelapa dan perdagangan kopra di Sumatera Selatan diungkapkan oleh Wellan (1932:275) terutama di daerah Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Produk kelapa dan kopra dari wilayah ini lebih dari 50% dihasilkan dari daerah Jambi kemudian diikuti Lampung dan Bengkulu. Produksi kelapa Jambi terus meningkat pada tahun 1928-1929 (Wellan, 1932:276). Produk kelapa di wilayah Palembang hanya diperdagangkan di tingkat lokal, sedangkan di wilayah Jambi, sejak 1929, kelapa menjadi salah satu komoditas penting selain karet. Kopra dari Jambi diekspor ke Singapura sedangkan kopra dari Lampung dan Bengkulu dikirim untuk memenuhi kebutuhan kopra di Pulau Jawa. Kehadiran perkebunan kelapa dalam skala luas di wilayah Sumatera Selatan berada di wilayah pesisir Jambi.

Lambatnya perkembangan tanaman kelapa sebagai komoditas dikarenakan rendahnya harga kopra yang dihasilkan petani. Rendahnya kualitas tersebut karena kopra diproduksi dari buah kelapa yang belum terlalu tua dan proses pengeringan yang kurang sempurna dan biasanya dijual dalam bentuk kopra campur. Selain memproduksi kopra, penduduk pribumi juga melakukan perdagangan kopra dan kelapa sebagai pedagang pengumpul, dengan membeli kopra dan kelapa dari petani, kemudian menjual kembali kopra dan kelapa kepada pedagang Cina (Wellan, 1932:278).

Perdagangan kelapa di tingkat lokal

Pohon kelapa di mana-mana, merupakan gambaran umum di wilayah Delta Upang. Di sepanjang tepi-tepi parit atau kanal terlihat gundukan kelapa yang telah dikupas, tinggi menggunung menunggu untuk dijual. Ketika kelapa sudah diturunkan dan dikupas, maka harus segera dijual agar kualitasnya tidak turun, yang akan mempengaruhi harga yang akan diterima petani.

Perdagangan kelapa di tingkat lokal didominasi oleh pedagang Bugis, mereka menjadi pedagang pengepul kelapa yang penting, banyak pedagang kecil atau agen menjual kembali kelapa yang mereka beli dari petani kepada pedagang pengepul besar. Agen biasanya ada di tiap desa, beberapa petani yang memiliki jumlah kelapa yang agak banyak setiap panen dan memiliki sedikit modal, akan membeli kelapa tetangganya, namun jumlahnya tidak akan menguntungkan jika langsung dijual ke Palembang, maka mereka akan menjual lagi kepada pedagang pengepul besar yang disebut dengan bos kelapa. Terkadang, bos kelapa akan memodali para agen untuk membeli kelapa petani dalam rangka memperbanyak pasokan kelapa mereka. Peran agen menjadi penting untuk menjamin pasokan kelapa yang harus disetorkan ke pedagang besar di Palembang setiap minggunya.

Kelapa di wilayah ini diperdagangkan dalam dua jenis produk yaitu kelapa bulat dan kopra. Permintaan kedua

produk tersebut saling berlawanan; di saat harga kelapa bulat tinggi maka harga kopra akan turun, begitu pula sebaliknya. Permintaan kelapa bulat dan kopra sangat ditentukan oleh kondisi cuaca, di musim kemarau harga kelapa bulat akan tinggi karena produksi kelapa menurun, selain itu banyak parit yang kering sehingga sulit untuk mengeluarkan kelapa. Pada musim penghujan, harga kelapa bulat turun karena pasokan kelapa melimpah sebaliknya harga kopra meningkat karena ketiadaan sinar matahari sehingga pasokan kopra berkurang. Harga kelapa dan kopra juga ditentukan oleh ketersediaan tenaga tukang petik. Ketepatan dalam waktu petik akan menentukan kualitas harga kelapa, selain itu petani juga harus jeli untuk melihat harga, ketika harga tinggi, kelapa harus sudah dipetik dan diturunkan agar mendapat keuntungan lebih. Keterlambatan dalam memetik dapat merugikan petani sendiri.

Secara tradisional, petani di Delta Upang menjual kelapa dalam bentuk kopra kering untuk ekspor dan kelapa bulat bagi pasar-pasar tradisional sekitar Palembang. Pada tahun 2013 permintaan terhadap kelapa bulat mulai meningkat seiring dengan permintaan dunia untuk kelapa bulat, terutama dari Cina, dimana perusahaan kelapa di Palembang setiap minggunya harus mengirimkan 10-15 kontainer kelapa bulat. Kelapa-kelapa tersebut dipasok dari daerah pesisir timur Sumatera Selatan termasuk kawasan Delta Upang. Sejak itu permintaan kelapa bulat terus meningkat dan harga kelapa bulat semakin baik di pasaran dimana harga paling rendah ditingkat petani mencapai Rp 1.600,-/butir. Kelapa-kelapa dengan kualitas super akan dijual sebagai kelapa bulat, sedangkan kelapa yang tidak lolos sortiran akan dibuat menjadi kopra basah atau kelapa cukil dan dijual ke pabrik pembuatan santan instan. Dengan adanya permintaan pasar ini, petani memiliki pilihan untuk memaksimalkan keuntungannya.

Pasar komoditas kelapa dan mekanismenya

Secara umum terdapat dua pola perdagangan kelapa di wilayah ini yaitu petani yang terikat dengan pedagang tertentu dan petani yang menjual bebas kelapanya dengan mempertimbangkan harga. Perbedaan ini menghasilkan praktek-praktek berdagang yang berbeda. Petani yang terikat dengan pedagang tertentu di setiap panen, ia harus menjual atau setor kelapanya kepada pedagang tersebut; sebaliknya petani yang jual bebas, ia bebas memilih kepada siapa ia akan menjual hasil panennya. Sebagian besar petani di wilayah Delta Upang adalah petani yang terikat dengan pedagang, sehingga artikel ini akan lebih fokus pada praktek-praktek perdagangan yang dilakukan oleh petani dengan pembelinya, atau yang mereka sebut dengan bos kelapa.

Ketika kelapa harus diturunkan, petani akan memberitahukan bos kelapa dimana akan menjual kelapanya, ia akan meminjam sejumlah uang untuk biaya panen. Kelapa-kelapa yang telah diturunkan dan dikupas kemudian ditimbun di tepi parit, kemudian petani akan menghubungi bosnya untuk memberitahukan bahwa kelapa siap untuk diangkat. Bos kelapa akan mengirim ketek untuk mengangkut dan memindahkan kelapa-kelapa tersebut ke tongkang yang berlabuh di sepanjang kanal-kanal primer. Sebelum kelapa dipindahkan dari ketek ke tongkang, kelapa-kelapa tersebut akan disortir. Kelapa yang berukuran kecil, pangkalnya berjamur, atau telah tumbuh *tumbung*nya akan dipisahkan sebagai kelapa BB atau sortiran. Kelapa sortiran ini menjadi tanggung jawab pembeli, karena petani biasanya menjual secara borongan semua kelapa yang ada. Pada tahap ini pembeli menghadapi resiko jika banyak kelapa sortiran maka ia akan rugi. Setelah kelapa disortir, maka petani akan menerima bon atau nota berupa jumlah kelapa yang ia setorkan; dan nota tersebut akan menjadi pegangan pembeli untuk melakukan pembayaran setelah kelapa tersebut dijual ke Palembang.

Setelah bos kelapa berhasil menjual kelapa di Palembang, petani akan mencairkan nota tersebut dan menerima pembayaran atas kelapa mereka. Ketika pembayaran terjadi, bos kelapa tidak akan memotong uang petani, bagi petani yang memiliki hutang, pembeli akan bertanya apakah akan dipotong hutang atau tidak; jika petani menyatakan potong hutang baru ia akan memotong hutangnya sebagian atau seluruhnya, jika sebaliknya maka bos kelapa tidak akan memotong uang tersebut. Ikatan hutang antara bos kelapa dan petani merupakan hal yang biasa terjadi; bila petani memerlukan uang maka ia akan menghubungi bosnya untuk meminjam uang dan akan dibayar ketika panen berikutnya. Bos kelapa selaku pembeli pun akan bersikap pemurah untuk memberikan hutang kepada petani dengan pertimbangan jika petani memiliki hutang maka petani akan terikat kepadanya untuk tetap menyeter kelapanya. Bagi pedagang jaminan ketersediaan stok kelapa menjadi penting karena mereka harus memenuhi kontrak kepada bos kelapa di Palembang untuk menyeterkan kelapa dalam jumlah tertentu setiap minggunya. Bos kelapa akan memberikan pinjaman kepada petani tanpa bunga dan petani akan menyeterkan kelapanya paling tidak hingga petani melunasi hutangnya. Setelah itu petani bebas untuk menentukan kepada siapa ia akan menjual kelapanya.

Kesetiaan Vs Kejujuran

Pasar komoditas kelapa merupakan rantai perdagangan yang panjang, dimana petani selaku produsen memperoleh keuntungan yang terendah dalam rantai tersebut. Petani adalah produsen yang memasok komoditas dalam rantai tersebut namun mereka tidak memiliki kontrol terhadap harga sehingga petani

memiliki keterbatasan modal untuk berproduksi. Untuk dapat berproduksi petani harus berhutang kepada pembelinya. Berhutang menjadi hal yang umum dilakukan petani kelapa. Dalam pasar komoditas hubungan antara petani dan pembeli didasarkan oleh ikatan kredit dan langganan. Seorang petani akan berhutanga pada pembeli maka ia akan menyerahkan hasil panennya kepada pemberi pinjaman. Bentuk ikatan ini memberikan jaminan kepada pembeli akan ketersediaan pasokan komoditasnya; bagi petani dengan adanya pinjaman tersebut mereka dapat berproduksi.

Hubungan kredit yang diberikan pembeli kepada petani tidak sekedar transaksi ekonomi berupa kredit dan komoditas; transaksi tersebut mengungkapkan simbol moralitas antara petani dan pembelinya. Petani memiliki pemaknaannya sendiri tentang sosok seorang pembeli yang baik, bukan semata diukur dari harga yang diberikan atas produk petani, seorang pembeli dituntut untuk menjadi tempat berlindung dari para petani yang menyerahkan produknya.

Bagi petani kelapa di Pantai Timur Sumatera Selatan, sosok seorang bos kelapa dipandang sebagai orang yang memiliki kekayaan lebih dibandingkan petani sehingga ia dituntut untuk menjadi orang yang pemurah tidak berhitung dalam membantu petaninya ketika mereka mengalami kesulitan. Semakin pemurah seorang bos kelapa maka ia akan dapat menjaga petani yang menyetorkan kelapanya untuk tidak pindah kepada bos lain. Berhutang sebagai bentuk hubungan ekonomi dan sosial antara petani dan bos kelapa, terkadang petani tidak berhutang banyak, hanya Rp 500.000,00 saja, yang dapat ia bayar ketika ia menerima pembayaran kelapanya, tapi ia tidak mau melunasinya meskipun jika panen setiap 3 bulan ia mengeluarkan 5.000 kelapa dengan penghasilan paling sedikit Rp 8.000.000/3 bulan. Berhutang menjadi simbol ikatan antara petani dengan bos kelapanya. Tindakan petani untuk berhutang terkadang tidak dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan tetapi ia menjadi simbol dari adanya nilai kepercayaan di antara keduanya.

Nilai kepercayaan tersebut ditandai dengan kepercayaan bos kelapa kepada petani bahwa petani akan melaksanakan kewajiban ekonomi dengan tidak menjual produk kelapanya ke pedagang lain, sebagai ekspresi kesetiannya kepada bos kelapa yang telah memberikan pinjaman kepadanya. Dengan memperoleh ikatan kesetiaan dari petani memberikan jaminan ketersediaan komoditas pembeli. Nilai kepercayaan petani kepada bos kelapa jika ia selalu tepat dengan janjinya, ketika orang petani datang ke bos kelapa untuk meminjam sejumlah uang untuk membayar tenaga tukang petik, kupas, dan angkut maka kelapanya benar-benar segera diturunkan dan disetorkan kepada bos kelapa. Ketepatan ini tidak hanya menguntungkan

pembeli tetapi juga menguntungkan petani, ia akan menghasilkan kelapa dengan kualitas baik, berarti petani juga akan menerima harga yang tinggi pula.

Sistem pembayaran pada pasar kelapa di tingkat petani bersifat tunda, petani akan menyerahkan terlebih dahulu kelapanya kepada pembeli, kepastian akan harga dan pembayarannya baru dilakukan setelah bos kelapa berhasil menjual kelapa tersebut, mendorong petani untuk memilih kepada siapa mereka akan menjual kelapanya kepada orang yang mereka percaya. Fenomena Haji Ambo, seorang bos kelapa menampung kelapa lebih dari 1000 orang petani menunjukkan prinsip kepercayaan tersebut. Petani merasa lebih senang menjual kelapanya kepada Haji Ambo karena ia dipandang sebagai bos kelapa yang 'lurus' selalu tepat dalam pembayaran dan perhitungan. Para petani yang menyerahkan kelapanya merasa lebih nyaman berdagang dengannya, ia terbuka dengan harga, ketika petani menyerahkan kelapanya ia akan menyatakan harga kelapa di Palembang. Ia juga tepat dalam pembayaran, ia selalu membawa kelapa ke Palembang pada hari Selasa malam; pada hari Kamis, petani akan antri membawa bon pembayaran mereka di loket pembayaran Haji Ambo untuk mencairkan uang mereka. Bagi petani yang kelapanya berangkat pada hari Kamis, mereka dapat mencairkan uangnya pada hari Sabtu. Kepastian pembayaran ini menjadi ukuran bahwa sang bos kelapa adalah orang yang dapat dipercaya, ia tidak pernah menahan uang petani. Petani pun menerima pembayaran sesuai dengan perhitungan yang dilakukan sebelumnya. Dengan sikap berdagang yang lurus tersebut menempatkan Haji Ambo sebagai pedagang kelapa besar dan memiliki petani setia menyerahkan kelapanya dari sejak pertama kali ia mulai berdagang kelapa di tahun 1999.

Kesetiaan petani juga ditentukan bagaimana seorang bos kelapa memperlakukan petani, kesalahan sedikit saja dalam perkataan dapat membuat bos kelapa kehilangan langganannya. Seorang petani menceritakan alasannya pindah dari bos kelapa lamanya karena sang bos menanyakan kelapanya kenapa ia belum turun juga sedangkan uang untuk panen sudah ia terima tiga hari yang lalu, namun cara ia menagih tersebut di pasar yang ramai. Petani tersebut tersinggung lalu mengembalikan uang tersebut hari itu juga, ketika panen ia mendatangi Haji Ambo apakah bersedia membeli 5.000 kelapanya. Sejak itu ia selalu menyetor kelapanya kepada Haji Ambo, ada sampai sekarang ia merasa diperlakukan baik, meskipun kadang harga yang diberikan lebih murah dari bos kelapa yang lain.

Komponen pasar terpenting adalah harga, bagi petani kelapa harga tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kepada siapa mereka akan menjual kelapanya. Permainan harga oleh pembeli umumnya dengan tujuan untuk memikat petani meninggalkan

pembeli lamanya. Biasanya pembeli baru yang mulai berdagang akan menawarkan harga yang tinggi dengan harapan petani akan meninggalkan pembeli langganannya. Strategi ini kerap tidak berhasil karena petani umumnya sudah terikat hutang dan emosional dengan pembeli lamanya. Menurut petani, jika pembeli baru menawarkan harga tinggi hanya sesaat saja setelah itu harga akan kembali normal lagi, kalau pun selisih tidak lebih dari Rp 100,-/butir. Ketika petani menjual kelapanya ke pembeli lain, pembeli langganannya akan menganggap dia tidak setia dan ia tidak akan dipercaya lagi, untuk ke depannya akan sulit untuk meminta pinjaman.

Selain harus bersikap lurus, seorang bos kelapa juga dituntut untuk menjadi pelindung bagi petani langganannya. Petani akan meminjam kepada bos kelapa ketika ia dan keluarganya menghadapi kesulitan keuangan dari biaya berobat hingga membangun rumah. Seorang petani menceritakan bahwa ia merasa sangat berhutang budi kepada bos kelapanya, yang mau meminjamkan uang cukup besar untuk biaya berobat suaminya padahal ia hanya punya kelapa 3.000 butir sekali panen, sudah 2 tahun bosnya tidak pernah memintanya melunasi hutang tersebut, si petani saja yang meminta sang bos untuk memotong hutangnya setiap kali ia menerima hasil panen kelapa. Usaha bos kelapa menanam budi ini menjadikan ia seorang yang sangat dihormati oleh para petani yang menyertakan kelapa kepadanya. Jika si bos memiliki kegiatan seperti akan mengadakan sedekah tongkang, maka akan banyak yang membantu. Begitu pula sebaliknya, jika keluarga petani memiliki hajatan maka sang bos yang pertama diharapkan memberikan bantuan.

Hubungan yang dilandasi oleh nilai kepercayaan ini tidak berarti keduanya mengalahkan kepentingan masing-masing. Kepercayaan dan kesetiaan petani kepada bos kelapanya tidak terlepas dari kepentingan ekonomi mereka, ikatan permanen antara petani dan bos kelapanya dapat memberikan jaminan kepada petani tetap ada pembeli meskipun kelapa yang mereka hasilkan berkualitas jelek. Seorang petani menceritakan ketika ia bermasalah dengan tukang petiknya sehingga kelapanya terlambat dipanen dan sangat tidak layak untuk dijual. Ia kemudian menghadap bos kelapa untuk menanyakan apakah ia mau membeli kelapanya yang sudah terlambat 4 bulan. Sang bos menyatakan petik saja biar nanti dibuat kopra. Walaupun dihargai lebih murah tapi ia masih mendapatkan hasil dari kelapanya. Petani tersebut juga mengakui bahwa bosnya akan rugi jika membeli kelapanya karena ia harus mengeluarkan biaya untuk membuat kopra, sedangkan harga kopra sedang turun. Pada situasi seperti ini seorang bos kelapa yang baik akan hadir menolong petaninya meskipun untuk itu berarti ia harus mengurangi keuntungannya. Namun tidak semua bos seperti yang diharapkan petani, ada juga bos yang sulit

untuk dimintai pinjaman jika bukan berkaitan dengan kelapa; karena terikat dengan hutang dan kedekatan keluarga sebagian dari mereka memaksa mereka tetap setia dengan bosnya.

Tarik menarik permainan kepercayaan antara petani dan pembeli tidak selalu berjalan mulus. Konflik kepentingan diantara keduanya hubungan keduanya berakhir. Bagi petani, ketidakjujuran dalam perhitungan jumlah kelapa dipandang sebagai kesalahan terbesar seorang bos kelapa, karena ia telah mendapatkan 10% dari seluruh kelapa yang disetorkan oleh seorang petani. Selisih perhitungan tersebut karena petani memegang perhitungan dari tukang petik yang ia bayar sedangkan pembeli berpatokan pada perhitungan dari tukang ketek yang mengangkut kelapa petani ke tongkang untuk disortir. Hubungan yang kurang bagus antara bos kelapa dengan tukang ketek akan merugikan petani, jika selisih perhitungan lebih dari 100 butir, maka petani akan dirugikan.

Bagi bos kelapa, petani juga kerap nakal, tidak jujur dalam menjual hasil panennya. Kelapa harus dipanen paling lambat setiap 3 bulan sekali, ketika petani memerlukan uang dan hutangnya di bos kelapa sudah banyak, pilihannya adalah menjual kelapa kepada bos lain yang menawarkan harga lebih tinggi, dengan cara ini petani dapat memperoleh uang lebih banyak. Ketika ia menghadap bosnya, ia akan mengatakan tidak ada tukang petik. Politik petani ini bukan berarti bos kelapa tidak mengetahuinya. Jika kelapa terlambat dipanen maka buahnya akan jadi kelapa BB atau sortiran karena sudah terlalu tua, ketika masa panen berikutnya ternyata kelapanya bagus, berarti petani telah berlaku curang. Kecurangan tersebut akan direkam oleh bos kelapanya.

Permainan politik kepercayaan

Hubungan yang terbangun antara petani dan pembelinya ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pasar komoditas kelapa di wilayah Pantai Timur Sumatra, pasar komoditas kelapa dibangun oleh masyarakat Bugis. Orang-orang Bugis berperan penting dalam rantai perdagangan kelapa, dari petani selaku produsen, pedagang pengepul, hingga pedagang akhir yang melakukan ekspor; serta peran pengusaha Cina yang memberikan modal kepada mereka. Karena dibangun oleh orang-orang Bugis, nilai budaya merekapun mempengaruhi bentuk hubungan antara pelaku dalam pasar tersebut. Salah satu nilai penting dalam struktur sosial masyarakat Bugis adalah hubungan *ajoareng-ajo*. *Ajoareng* adalah seorang patron yang dituntut untuk melindungi pengikutnya atau *ajo*. Sebagai seorang patron, ia akan menuntut pengikutnya untuk setia kepadanya dan percaya bahwa ia akan mampu melindungi mereka. Prinsip kepercayaan ini menjadi penting dalam praktik-praktik ekonomi petani pasar komoditas di pedesaan.

Berbagai praktik-praktik bertransaksi antara petani dan bos kelapanya mengandung nilai-nilai kepercayaan, kesetiaan, dan perlindungan. Nilai-nilai tersebut bukan berarti tanpa kepentingan masing-masing, seorang petani kelapa memainkan nilai kepercayaan dan kesetiaan tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi pribadinya, memperoleh pinjaman yang diperlukan untuk modal produksi dan kebutuhan keluarga lainnya; petani juga memperoleh jaminan pembelian atas komoditas mereka dengan harga yang baik meskipun dengan kualitas yang rendah. Dengan menjaga kepercayaan tersebut, petani terlepas dari resiko kerugian yang besar ketika mereka menghadapi fluktuasi harga yang kerap tidak dapat diprediksi oleh petani.

Seorang bos kelapa juga memegang nilai kepercayaan dari petani, yang mempercayakan kelapa mereka sehingga pembeli memperoleh jaminan ketersediaan komoditas dan keuntungan yang lebih dari persen yang diperoleh dari setiap kelapa yang disetorkan oleh petani. Kepercayaan tersebut juga memuat tanggung jawab pembeli untuk menanggung segala resiko atas kelapa yang berkualitas rendah dan akan mengurangi keuntungan dari pembeli karena ia harus mengolah kelapa-kelapa sortiran tersebut agar laku di jual. Tuntutan moral seorang pembeli sebagai imbalan dari keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut menjadikan seorang pembeli sebagai patron bagi para petani yang menyerahkan kelapanya, ditandai dengan sikap pemurah yang kadang dalam perhitungan ekonomi tidak mungkin dilakukan karena tidak memberikan keuntungan materi, bahkan membuat pembeli mengalami kerugian.

Berbagai praktek-praktek transaksi di pasar komoditas di pedesaan menunjukkan transaksi tersebut juga bermakna sebagai arena politik dari masing-masing aktornya dalam usaha mencapai tujuan. Seorang petani menetapkan nilai kepercayaan dalam menentukan apakah ia akan bertransaksi dengan seseorang untuk jangka panjang atau tidak; begitu pula dengan pembeli, ia akan menilai seorang petani yang akan ia berikan pinjaman uang berdasarkan nilai kepercayaan. Meskipun menerapkan nilai moralitas yang sama namun keduanya mengusung kepentingan yang berbeda, petani berhadap dengan memperoleh kepercayaan pembeli, ia sedang berinvestasi untuk memperoleh kemudahan memperoleh pinjaman untuk modal produksi, jaminan akan pasar bagi komoditas mereka yang bermutu rendah, serta bantuan ketika mereka menghadapi masalah keuangan lainnya, seperti musibah atau pendidikan anak. Pembeli berusaha menjaga nilai kepercayaan petani dalam usaha memperoleh jaminan ketersediaan pasokan komoditas mereka dengan kualitas yang baik; jaminan ini akan memberikan keuntungan bagi pembeli. Untuk menjaga kepercayaan tersebut seorang petani menerapkan

prinsip-prinsip moral yang memungkinkan ia memperoleh kepercayaan petani, meliputi sikap lurus dalam perhitungan dan pribadi. Pembeli juga bertindak sebagai patron dengan memberikan perlindungan dan bantuan kepada petani. Menjaga kepercayaan tersebut bagi keduanya merupakan bentuk investasi sosial, yang akan menjamin kepentingan ekonomi masing-masing.

Pasar komoditas di pedesaan tidak bekerja dalam mekanisme pasar yang sesungguhnya. Kontrak-kontrak ekonomi seperti pemberian kredit, harga, permintaan, berlangsung dalam konteks sosial dimana kegiatan ekonomi menyatu dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Berbagai tindakan dan perhatian yang dilakukan petani dan pembeli dalam bertransaksi menghasilkan budaya pasar komoditas di pedesaan. Dalam budaya pasar ini, nilai kepercayaan menjadi modal sosial dan budaya yang penting dalam melakukan transaksi. Transaksi komoditas yang dilakukan oleh petani dengan pembelinya tidak dapat hanya dilihat sebagai transaksi ekonomi semata, juga melibatkan transaksi terhadap kepercayaan dan segala bentuk investasi sosial yang mengikutinya.

Transaksi tersebut merupakan bentuk negosiasi antara rasionalitas petani untuk memperoleh jaminan terhadap pasar komoditas dan modal produksi dengan rasionalitas pembeli untuk memperoleh jaminan pasokan komoditas dan keuntungan dari perdagangan tersebut. Rasionalitas ekonomi petani memuat budaya petani yang diekspresikan dalam praktek-praktek ekonomi mereka bahwa mereka berada pada struktur terendah dalam rantai perdagangan dimana mereka sebagai produsen komoditas namun mereka memperoleh keuntungan paling rendah. Struktur sosial ini yang mendorong petani melakukan praktek-praktek negosiasi dengan menggunakan media simbolik berupa nilai kepercayaan untuk mengaburkan struktur tersebut sehingga petani memiliki posisi tawar demi kepentingan mereka. Ketika pembeli bertransaksi dengan petani, mereka tidak mungkin untuk mengedepankan orientasinya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, mereka harus membungkus kepentingan tersebut dengan menggunakan simbol-simbol nilai budaya, dimana seorang pembeli harus memperoleh kepercayaan petani dengan cara menempatkan dirinya sebagai sosok yang 'lurus' dan 'pemurah' untuk membantu petani. Strategi ini bertujuan menumbuhkan kepercayaan petani untuk memasok produk mereka.

SIMPULAN

Kegiatan perdagangan di pedesaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Perdagangan di pedesaan tidak hanya berkaitan dengan transaksi berupa harga, keuntungan, komoditas, tetapi

ia juga melibatkan nilai kehormatan dan ukuran moralitas sebagai bentuk investasi sosial. Berbagai usaha yang dilakukan oleh petani dan pembeli bertujuan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka dengan membangun kepercayaan dari masing-masing pihak melalui negosiasi-negosiasi dari berbagai kepentingan individu. Negosiasi-negosiasi tersebut menggunakan simbol-simbol budaya untuk mengaburkan kepentingan kapital dari masing-masing individu dengan berpegang pada nilai menjaga kepercayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari tulisan disertasi penulis dalam rangka menyelesaikan pendidikan program doktoral Antropologi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Drs. H. Haryo S. Martodirdjo, Dr. Selly Riawanti, M.A., dan Dra. Prihartini Ambaretnani, M.Sc., Ph.D., atas kritik dan sarannya sehingga dapat membangun konsep dalam penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada para informan yang telah dengan kemurahan hati untuk memberikan informasi dan mengajarkan penulis tentang banyak hal selama kegiatan lapangan berlangsung. Terima kasih disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan yang telah memberikan beasiswa untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1994. "The Muslim Businessman of Jatinom Religious Reform and Economic Modernization in a Central Javanese Town". *Disertasi*. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
- Alexander, Jennifer, 1987. *Trade, Trader and Trading in Rural Java*. Singapore: Oxford University Press.
- Asba, A. Rasyid. 2007. *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Braadbaart, Okken. 1993. "Vertical Integration in Javanese Vegetable Marketing" dalam Huub de Jonge & Willem Walters (eds.). *Commercialization and Market Formation in Developing Societies*. (p. 140-161). Saarbrücken-Fort Lauderdale: Verlag Breitenbach Publishers..
- Bourdieu, Pierre. 1977. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Breman, J. 1997. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20* (terjemahan). Jakarta: Grafiti/KITLV.
- Dewey. Alice G. 1962. *Peasant and Marketing in Java*. New York: Free Press of Glencoe, Ins.
- Evers, Hans-Dieter, 1994. "The Emergence of Trade in a Peasant Society: Javanese Transmigrants in Kalimantan" dalam Hans-Dieter Evers & Heiko Schrader. *The Moral Economy of Trade Ethnicity and Developing Markets*. (p. 76-87). London: Routledge.
- Geertz, Clifford. [1963] 1977. *Penjaja dan Raja Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haga, B.J. 1920. "De Klappercultuuren Copra Haldel in Poelae Toejoeh (Riow). *Koloniale Studien*, 4-2, pp. 314-342.
- Heersink, Christiaan G. 1994. "Selayar and the Green Gold the Development of Coconut Trade on an Indonesian Island (1820-1950). *Journal of Southeast Asian Studies*, 25, 1 (March), pp. 47-69.
- Houben, Vincent J.H. 2000. "Perkebunan-perkebunan Swasta di Jawa Barat Abad ke-19 Sebuah Kajian Ulang" dalam J. Thomas Lindblad. *Sejarah Ekonomi Modern: berbagai tantangan baru* Cet. I. (p. 73-98). Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Jongen, Huud de. 1993. "Credir, Trust and Knowledge" dalam Huub de Jonge & Willem Walters (eds.). *Commercialization and Market Formation in Developing Societies*. Saarbrücken-Fort Lauderdale: Verlag Breitenbach Publishers. pp. 116-139.
- Kutanegara, Pande Made, Anna Marie Wati, & Marcelinus Molo. 1989. *Pedagang dan Perdagangan di Jatinom*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- Lindblad, J. Thomas. 1998. "Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa, 1910-1940" dalam J. Thomas Lindblad (ed.). *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*. (p. 333-369). Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mai, Ulrich & Helmut Buccholt. 1987. *Peasant Pedlars and Professional Trader, Subsistence Trade in Rural Market of Minahasa Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.
- Marsden, William. 2013. *Sejarah Sumatra*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Mulyanto, Dede, dkk. 2009. *Kapitalisasi dalam Penghidupan Pedesaan*. Bandung: AKATIGA.
- Poerwanto, Bambang. 2002. *Peasant Economy and Institution Changes in late Colonial Indonesia*. Paper presented International Conference on Economic Growth and Institutional Change in

- Indonesia in the 19th and 20th Centuries.
Amsterdam, February, 25-26.
- Unnevehr, Laurian J. 1984. "Marketing dan Price Formation" dalam Walter P. Falcon, William O. Jones, Scott R. Pearson. *The Cassava Economy of Java*. (p. 136-163). California: Stanford University Press.
- Wellan, J.W.J. 1932. *Zuid-Sumatra Economisch over Zich van de Gewesten Djambi, Palembang, de Lampoengsche Districten en Benkoelen*. Wageningen (Holland): H. Veenman & Zonen.

Manfaat Perubahan Politik Terhadap Identitas Budaya Pecinan Kekinian

Lya Dewi Anggraini
(Interior Desain, Sekolah Tinggi Desain Indonesia)
e-mail: gototheant66@gmail.com

Abstrak - Mengantisipasi akulturasi, perubahan nilai, idealisme, gaya hidup, struktur sosial, dan aspek-aspek budaya yang lain, penelitian ini menekankan munculnya perubahan-perubahan dalam Pecinan, kantong urban yang tersebar di banyak kota dan negara, sebagai produk perubahan dalam politik. Transformasi lingkungan masal ini akan ditinjau secara keseluruhan melalui pengamatan terhadap ciri-ciri fisik dalam skala urban. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan dampak perubahan politik yang bermanfaat terhadap identitas budaya Pecinan masa kini di beberapa kota di negara-negara di Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea. Metode yang digunakan adalah pengamatan langsung di lapangan dan analisis struktural terhadap tampak muka dan tapak bangunan di masing-masing negara. Hasilnya menunjukkan beberapa ciri, yang secara menakutkan sama, sebagai karakteristik muka dan struktur urban Pecinan kekinian lintas negara. Wajah khas Pecinan ditunjukkan secara khusus dengan warna, penggunaan alat-alat penanda komersil, dan dekorasi, yang mengacu pada identitas budaya Cina. Struktur khas wilayahnya dicirikan oleh hubungan langsung dan kuat antara bangunan-bangunannya dengan jalan melalui cara tertentu. Implikasi penelitian ini adalah, meskipun memaksakan munculnya perubahan besar pada lingkungan, dalam hal ini Pecinan, perubahan dalam politik di masing-masing negara telah secara efektif berpengaruh positif, yaitu mendorong penyampaian identitas budaya masyarakat keturunan Cina secara terbuka dan berani untuk mencapai kemakmuran dan meneruskan keberadaannya.

Kata kunci: *Pecinan kekinian, wajah kota, struktur kota, identitas budaya, perubahan politik*

PENDAHULUAN

Budaya Cina yang dibawa (diteruskan) keluar negerinya sebenarnya sangatlah beragam, tidak homogen. Migrasi bangsa Cina ke luar negeri terutama ke Asia telah berlangsung selama berabad-abad. Paling sedikit enam kelompok dialek warga Cina berbagai provinsi Tenggara Cina telah bermigrasi ke kepulauan Indonesia yang menghasilkan komunitas Tionghoa yang kuat selama masa pemerintahan Hindia Belanda (1600-1942), dua gelombang pendatang terbesar terjadi pada periode 1860-1890 dan 1900-1930 yang sebagian besar bermukim di Jawa (Suhandinata, 2009: 31). Gelombang pendatang Cina dari masa ke masa juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Gelombang imigran Cina sebelum perang dunia II adalah para

petani dan pengrajin yang setengah terpelajar, gelombang pendatang yang baru jauh lebih berpendidikan tinggi dan profesional serta sangat aktif dan gesit (Lianhe Zaobao 30 Juli 2001 dalam Chan, 2006:2) yang berdampak pada pola organisasi dan hubungan sosial. Para pendatang dari Cina ini melalui proses enkulturasi dan akulturasi, berusaha tetap mempertahankan identitasnya dengan berbagai cara. Salah satu usaha para imigran Cina untuk mempertahankan identitasnya adalah membentuk komunitas virtual melalui internet yang menurut Wong (2003 dalam Chan, 2006: 4), termasuk di dalamnya komunitas Pecinan, yang cenderung bertujuan untuk membangun komunitasnya di negara yang didiaminya, bukan untuk menekankan keterikatan politik atau emosional dengan negara asalnya, Cina. Pecinan, sebutan untuk permukiman pendatang dari Cina adalah bentuk lain dari usaha mempertahankan identitas kebudayaannya, yang akhirnya juga menjadi bagian dari identitas kota, di mana Pecinan tersebut berada. Sebagai kelompok masyarakat, mereka memerlukan identitas, pengakuan bagi keberadaan dirinya yang dinilai dari kekhasannya yang menonjol yang berbeda dari lingkungan sekitarnya, melalui bentuk-bentukan fisiknya, ciri visual, karena bentuk merupakan sarana komunikasi yang cukup efektif untuk memancarkan citra diri seseorang (Dana, 1990: 4-6). Pecinan masa kekinian telah diakui memiliki potensi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas kota. Berbagai isu mewarnai motivasi dibangkitkannya kembali Pecinan yang telah lama terbentuk hingga pembentukan Pecinan yang baru. Sebagai negara tetangga yang selalu tak mau kalah bersaing dengan Jepang, pemerintahan kota Korea berencana membangun Pecinan terbesar di dunia yang menimbulkan kontroversi (Juliet Song untuk Epoch Times, 3 Juli 2016).

Tulisan ini menekankan perubahan-perubahan politik yang memengaruhi perubahan pada Pecinan hingga masa kekinian, sebagai bagian dari wajah dan struktur kota tempatnya berada. Perubahan, perbedaan atau kesamaan yang diamati langsung adalah keberadaannya pada saat ini, dengan latar belakang sejarah terbentuknya yang berbeda-beda, perhatian utama dalam menganalisis Pecinan di beberapa kota di Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, dan Singapura. Tidak hanya sekedar membandingkan, tulisan ini bertujuan untuk mencari benang merah, kaitan dalam perubahan-perubahan tersebut, yang terjadi di masing-masing Pecinan, di negara yang berbeda-beda.

METODE

Mengantisipasi munculnya berbagai isu dan permasalahan terhadap citra Pecinan, penelitian ini diawali sejak tahun 2009. Salah satu faktor yang memengaruhi pengalaman seseorang terhadap tempat yang baru adalah struktur fisik lingkungan spatial, yang diwakili oleh pola jalan-jalannya yang beragam di masing-masing negara yang dialami melalui jalan kaki atau berkendara keliling secara aktif selama waktu tertentu dengan motivasi belajar dan mengamati tanda-tanda di jalan (Ng, 1998: 58). Penulis tinggal selama beberapa waktu untuk mengamati langsung situasi dan kondisi Pecinan di masing-masing negara antara 2009-2013 menjadi cara untuk mendapatkan data primer. Rekaman gambar dipelajari yang dapat mewakili keseluruhan suasana dan karakteristik Pecinan. Peta wilayah diambil dari berbagai sumber internet untuk perbandingan lokasi, letak dan bentuk tapak bangunan, serta peruntukannya. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, buku-buku, hasil-hasil penelitian tentang Pecinan di negara-negara yang diamati dan informasi dalam berbagai sumber, yaitu buku dan media massa, yang memberitakan perkembangan politik dari sejarah terbentuknya hingga berita terbaru yang mendukung perubahannya. Rekaman gambar tampak muka dan tapak bangunan kemudian dianalisis secara struktural pada setiap elemen-elemennya yang telah dipisahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korea mengalami masa panjang pendudukan bangsa Han dari Cina selama berabad-abad yang membentuk dan mengatur struktur kota mula-mula dan pola budaya masyarakatnya. Masa pendudukan yang panjang ini memengaruhi sikap masyarakat Korea yang cenderung ingin melindungi diri dari ketergantungan dan pengaruh kuat Cina di masa kini. Dengan terbukanya kembali hubungan dengan Cina melalui peresmian hubungan diplomatik masa Dinasti Ching tahun 1884, aliran barang mulai membanjiri Korea kembali, diikuti meningkatnya jumlah pendatang dan munculnya "Little China". Pertumbuhan yang cukup penting tercatat tahun 1948 saat pendudukan Jepang berakhir dan masyarakat Korea mulai membentuk pemerintahan demokrasi hingga 1949 saat pemerintah Cina melarang penduduknya bepergian ke luar negeri. Lima puluh tahun kemudian.

Penyebutan "Pecinan" dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu cara politik untuk menandai sebuah distrik atau kawasan tertentu. Meskipun pada hakekatnya para keturunan Cina yang bermukim di Indonesia pada mulanya menyebar dan menyatu dengan penduduk setempat, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sekitar abad ke-17, tahun 1677.

Demikian pula alasan pemberian nama "Chinatown" di beberapa negara, di Jepang, memiliki alasan politik, yaitu memudahkan kontrol pemerintah terhadap penduduk melalui pembagian wilayah, sejak pelabuhan-pelabuhan Jepang dibuka terhadap negara-negara asing sekitar abad ke-19, berakhirnya Periode Edo, bermulanya Periode Meiji tahun 1867. Para pendatang dari Cina ke negara-negara tersebut secara alamiah menyatu dengan penduduk setempat melalui proses akulturasi budaya, sehingga secara visual, mereka membangun rumahnya pun tidak menonjolkan diri. Bahkan budaya Cina telah diterima dan memperkaya budaya setempat yang sulit dipisahkan. Pemberian nama-nama dalam bahasa aslinya pun tidak lagi dianggap asing karena telah diterima dan masuk dalam bahasa sehari-hari.

Ketika pemerintahan beralih tangan, terjadilah perubahan politik yang mengakibatkan perubahan pada situasi urban wilayah tempat tinggal para pendatang dari Cina pada masa ini. Di Indonesia, para keturunan Cina ini dianggap mengancam bahkan ada usaha-usaha pemusnahan. Mereka dengan paksaan disatukan dalam kantong-kantong permukiman di wilayah urban dengan penjagaan dan pengawasan yang ketat. Generasi berikutnya dan mereka yang selamat dan berhasil melarikan diri ke wilayah lain, terus membawa kerinduan untuk tetap mengkomunikasikan jati dirinya, dengan berbagai cara, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, semacam kebutuhan dasar untuk diterima di masyarakat sekaligus bangga dengan keturunan atau asal usulnya.

Pergantian pemerintahan yang berlangsung terus-menerus di Indonesia ditanggapi dengan berbagai perubahan dalam manifestasi fisik wilayah keturunan Cina ini. Puncak perubahannya di Indonesia adalah masa peralihan kepemimpinan negara sejak tahun 1998 hingga 2000-an, yang menandai berakhirnya masa penindasan budaya Cina. Perlahan-lahan di berbagai wilayah kantong-kantong Pecinan mulai bermunculan berbagai atraksi berbau budaya Cina, disusul dengan memanfaatkan lokasi dan nama Pecinan yang telah dikenal, mereka munculkan berbagai bentuk visual yang telah diasosiasikan oleh masyarakat luas dengan budaya Cina. Lengkap dengan makanan dan barang-barang Cina yang khusus. Meskipun hal-hal tersebut bukanlah inti budaya Cina, namun dengan motivasi utama memanfaatkan budaya untuk menaikkan manfaat finansial.

PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK

Pada masa kolonial belanda, gelombang orang-orang cina berdatangan ke Batavia (Jakarta pada masa itu) untuk mencari penghidupan. Kondisi yang berulang

dan tak terkendali, sehingga menimbulkan kerusakan ekonomi dan sosial ini, mendesak pemerintah kolonial untuk mengeluarkan undang-undang *Wijkenstelsel* yang memisahkan dan membatasi wilayah permukiman orang Cina dari pribumi dan suku bangsa lain (Pratiwo, 2010: 34). Kemudian Pemerintah Belanda melarang kedatangan para imigran dari Cina, menyulut pemberontakan yang disusul pembantaian orang Cina tahun 1740 di dalam benteng kota Batavia, disusul pembakaran rumah-rumah toko mereka (Heuken, 2016: 88). Peristiwa tersebut menyebabkan orang-orang Cina yang ketakutan banyak yang melarikan diri ke daerah-daerah lain di pulau Jawa (Pratiwo, 2010: 10-11). Beberapa tahun kemudian, permukiman orang Cina mulai muncul di luar tembok kota Batavia (Heuken, 2016: 95). Ketika pemerintah kolonial Belanda melaporkan kepada pemerintah Cina, tidak ditanggapi, dianggap mereka telah melupakan leluhurnya dengan menetap, lahir, dan besar di luar Cina. Sehingga orang-orang Cina di Indonesia tidak dapat kembali ke Cina, dan harus bertahan di Indonesia, atau memilih pindah ke negara lain. Sistem getto tersebut baru dicabut tahun 1905 (Suhandinata, 2009). Peristiwa politik lain yang berpengaruh adalah masa orde baru ketika budaya Cina dianggap berhubungan dengan komunis, dan masa reformasi,

	Indonesia	Jepang	Korea	Malaysia	Singapura
Terbentuknya permukiman mula-mula	Puncak bangsa Cina dengan Asia Tenggara (1403-1424)	Periode perang saudara (1336-1573)	Koloni 100 bangsa Cina Han (100 SM – 313) dan Pemerintahan Tiga Kerajaan (50 SM-668)	Kebangkitan Malaka (1403-1411)	Perubahan nama Melayu, Temasek, menjadi Danmaxi (1550-an)
Perubahan awal wilayah permukiman	Pertempuran wilayah antara pribumi dan asing (1500-an)	Perang Onin mendorong terbentuknya kelompok 'machi' (1467-1477)	Terbukanya kembali hubungan dengan Cina (1884)	Puncak masa perdagangan dengan Cina (1570-1640) hingga dominasi warga Cina (1740)	Dominasi warga Cina (1740 disusul bersatunya Singapura dan Malaysia di bawah koloni Inggris-India (1826-1941)
Pemisahan permukiman dalam wilayah kota	Pemerintah Hindia Belanda (1600-1942)	Pemerintahan Jepang (1603-1867)	Pendudukan Jepang (1910-1945)	Konfrontasi Beijing melawan Malaysia (1963-1965)	Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pengaruh pemerintahan dalam negeri yang mengubah karakter permukiman	Pemerintahan Orde Baru (1965-1998) pelarangan identitas Cina	Restorasi Meiji (1868-1912) pemulaan Jepang modern	Perang Korea (1950–1953) dan terbentuknya Demokrasi Rakyat (1948-sekarang)	Kerusuhan rasial di Kuala Lumpur (1964, 1969)	Pembangunan bangsa untuk integrasi berbagai kelompok etnis tahun 1956 (1947-1990)
Kebangkitan hingga masa kekinian	Pemerintahan terbuka (2001-sekarang)	Gempa bumi Kanto (1923)	Proyek pembaruan kota (1998-sekarang)	Dibukanya kembali hubungan diplomatik dengan Cina (1975-sekarang)	Kemerdekaan dari koloni Inggris (1965-sekarang)

ketika undang-undang dan keputusan-keputusan pemerintah yang mengesampingkan orang-orang dan budaya Cina dicabut.

TABEL 1. PERUBAHAN POLITIK

STRUKTUR KOTA PECINAN

Akulturas budaya, perubahan nilai-nilai, idealisme, gaya hidup, struktur sosial, dan aspek-aspek budaya yang lain tak terelakkan lagi terjadi di lingkungan sekitar kita setiap hari (Rapoport, 2005: 11). Orang seakan-akan ditempatkan pada lingkungan tertentu yang kemudian memengaruhi mereka, padahal kenyataannya, dalam kondisi apapun, oranglah yang memilih dan menyeleksi lingkungannya, dan proses seleksi habitat ini adalah aspek paling penting dari pengaruh lingkungan terhadap orang (Rapoport 2005: 20). Terhadap budaya, dan peran budaya, lebih jauh lagi Rapoport mengatakan budaya sebagai cara hidup yang memasukkan idealisme, norma-norma, aturan-aturan, perilaku sehari-hari, dan lain sebagainya. Definisi budaya berikutnya adalah sebuah sistem skema yang diturunkan secara simbolis dari generasi ke generasi, melalui enkulturasi (atau sosialisasi) kepada keturunannya dan akulturasi oleh para pendatang. Tidak hanya bahasa, misalnya, namun juga lingkungan fisiknya. Sehingga peran budaya yang pertama adalah menjadi rancangan kehidupan, dan yang kedua menyediakan kerangka makna bagi benda-benda yang ada di sekitar kita (Rapoport, 2005: 78).

Permukiman orang-orang Cina pada masa sebelum penjajahan telah menyebar dan tidak begitu menonjol baik di kota maupun di pedesaan, menjadi terpusat, padat, dan terbatas oleh tembok-tembok kota dan batas-batas wilayah tertentu pada masa kolonialisme (Heuken, 2016: 248).

Setelah hubungan dagang berabad-abad lamanya terjadi antara Cina ke negara-negara di Asia Tenggara, permukiman mereka di negara-negara tuan rumah tersebut telah terintegrasi dengan baik, dan tidak lagi dianggap sebagai kelompok yang terpisah (Suhandinata, 2009: 27). Selanjutnya, bahkan perdagangan internal maupun eksternal yang terjadi di wilayah Asia Tenggara masa menjelang tahun 1740 telah menandai dominasi warga Cina pendatang di Singapura dan Malaysia hingga masa kini (Suhandinata, 2009: 29). Mulailah masa pendudukan Inggris di Malaysia dan Singapura karena perdagangan dengan Cina pada pertengahan terakhir abad ke-18. Tahun-tahun inilah menandai titik yang menentukan dalam hubungan antara Asia Tenggara, Cina, dan Eropa (Suhandinata, 2009: 29). Meskipun sikap bermusuhan mulai muncul antara bangsa Eropa terhadap warga Cina, Singapura dan Malaysia menjadi lebih tergantung pada peran para pendatang Cina.

Kota-kota di Asia umumnya memiliki pertumbuhan kota yang terkesan lebih tidak beraturan, bahkan lebih tepatnya kacau. Pengaruh laju pertumbuhan penduduk

yang pesat, telah memengaruhi pertumbuhan bangunan dan pelebaran wilayah kotanya (Narumi, 1986: 59-60). Kota-kota di Jepang, memiliki konsep berkelompok berdasarkan area dan memusat yang mirip dengan kota-kota di banyak negara Asia, terutama Indonesia dan Korea. Sistem alamat (pemberian nomor rumah) di Jepang berpusat pada potongan area-area, aglomerasi unit-unit yang lebih kecil, disebut 'machi' yang pola keseluruhan organisasinya lebih mirip sarang burung (Narumi, 1986: 72), terkesan tak beraturan dan cenderung tidak berorientasi pada jalan. Ini mirip seperti sistem pembagian RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten atau kota di Indonesia yang masih digunakan sebagai sistem pemberian alamat atau nomor rumah yang diandalkan, meskipun nama jalan tetap digunakan (Anggraini, 2003).

Disandingkan dengan pola kota-kota di Barat yang terkesan lebih teratur dengan sistem 'axial' yang linier yaitu berpusat pada jalan sebagai acuannya (Narumi, 1986: 73), atau yang lebih dikenal dengan sistem 'block', dapat dikatakan bahwa struktur kota-kota Barat terbangun dari sekelompok individual (Narumi, 1989: 60), sedangkan struktur urban kota-kota Asia lebih menunjukkan kelompok-kelompok penduduk atau unit rumah tangga sebagai unit dasarnya (Surjomihardjo, 2008: 11; Narumi, 1986: 72-73). Struktur urban di kota-kota di Asia memiliki sistem area yang bertingkat dan memusat, dari wilayah besar yang terbagi dalam area-area yang lebih kecil, yang terdiri dari rumah-rumah, kemudian terdiri dari individu-individu. Pusat kota terletak pada lapangan kota yang luas yang dikenal sebagai alun-alun (di Indonesia) (Handinoto, 1996: 13; Handinoto & Soehargo, 1996: 13; Pratiwo, 2010: 28-30; Heuken, 2016: 27) atau sekolah dasar (di Jepang), yang berfungsi sebagai penghubung, tempat berkumpul atau pusat kegiatan masyarakat (Narumi, 1986: 70; Zahnd, 2008:17).

Struktur kota-kota yang memusat tersebut juga merupakan salah satu bentuk usaha politik pemerintah untuk mengendalikan masyarakat, untuk berbagai tujuan, misalnya saat terjadi bencana, selain juga dimanfaatkan sebagai pusat organisasi warga, untuk pertemuan dan pengungsian (Narumi, 1986: 70-71) atau untuk menunjukkan keseimbangan dengan alam (Adishakti, 1997: 72), kekuasaan atau kekuatan pemerintahan di mana istana selalu terletak segaris (Zahnd: 2008: 17; Adishakti, 1997: 71). Politik segregasi diterapkan pemerintah Jepang untuk mengendalikan penduduknya memanfaatkan struktur kota tersebut dimulai pada era Tokugawa (1600-1868) yang bertahan sampai era Jepang baru (Bellah: 1985: 15-16) berdasar kelas-kelas masyarakat pada masa lalu seperti kelompok hunian untuk samurai, dipisahkan

dari kelompok petani dan pedagang, di mana unit kelompok rumah-rumah milik samurai ditandai sebagai 'cho', sedangkan kelompok orang biasa ditandai 'machi' (Narumi, 1989: 62-66). Pada masa pemerintahan VOC, Inggris, hingga kolonial Hindia Belanda berakhir (1614-1942), pemisahan permukiman-permukiman berdasarkan etnisitas di Indonesia berlangsung secara bertahap, hingga puncaknya ketika diberlakukan undang-undang Wijkenstelsel (Pratiwo, 2010: 34), yang setelah dihapuskan tahun 1915, menjadikan Pecinan bagian dari struktur kota sebagai pusat ekonomi yang kuat bahkan makin melebar (Pratiwo, 2010: 38; Adishakti, 1997: 79).

Secara umum, Pecinan di daerah amatan memiliki karakteristik yang mirip. Bentuk tapak bangunan-bangunan yang berkelompok cenderung sempit dan memanjang, dan berorientasi terhadap jalan, sehingga dengan mudah dapat dikenali. Juga, dari lokasinya terhadap kota, selain dekat dengan bentuk-bentuk alam, seperti sungai, atau di sekitar pasar, area Pecinan telah menjadi pusat perdagangan kota yang bertahan hingga sekarang, bahkan menjadi penggerak perekonomian di saat masa-masa krisis di masing-masing negara.

TABEL 2. CIRI-CIRI STRUKTUR KOTA PECINAN

1. Pola	Mula-mula menyebar, lalu mengelompok atau sebaliknya dengan bentuk tapak sempit memanjang
2. Letak	a. Menempati area pasar dan sekitarnya yang menjadi pusat perdagangan b. Terletak di dalam atau tengah kota yang menjadi pusat perekonomian
3. Orientasi	a. Memperhatikan arah matahari dan batasan-batasan lingkungan dan alam, seperti sungai b. Orientasi ke dalam
4. Jalan	a. Jalan-jalan besar atau kecil diberi nama sesuai ciri khas wilayahnya atau jenis perdagangannya b. Rumah-rumah menghadap ke jalan di depan dan belakang diberi nomor sesuai urutan dari ujung jalan
5. Aktivitas	a. Pemisahan ruang publik terhadap ruang privat sangat jelas, tidak ada pembauran b. Pemanfaatan jalanan untuk aktivitas formal skala komunitas atau publik sangat tinggi

Di beberapa kota yang diamati, hubungan antara bangunan dengan jalan berbeda-beda, namun dalam aktivitas ditemukan kesamaan, yaitu dalam penggunaan dan pemisahan atau pembagian ruang publik dan privat, yang sangat jelas. Yaitu area depan bangunan dengan area jalan. Jalanan digunakan utamanya untuk kegiatan-kegiatan untuk publik, seperti acara-acara khusus ulang tahun atau perayaan-perayaan penting dimana tarian Barongsai diselenggarakan. Kemudian, publik atau konsumen disediakan tempat untuk menikmatinya sambil duduk di meja dan kursi yang sengaja ditata di jalanan sempit

depan bangunan-bangunan tersebut. Kecuali di Jepang dan Korea, yang kurang memungkinkan karena cuaca yang dingin dan terus berganti sepanjang tahun, di Singapura, Malaysia, dan Indonesia, aktivitas publik mulai memanfaatkan jalanan, meskipun aktivitas sosial lebih cenderung berpusat di dalam ruangan (berorientasi ke dalam). Hal ini berbeda dengan kebiasaan masyarakat pribumi Jawa misalnya yang cenderung mengizinkan pemanfaatan ruang publik, jalan atau gang umum, untuk kegiatan mulai sosial hingga yang lebih pribadi (berorientasi keluar) (Zahnd, 2008: 109).

WAJAH KOTA PECINAN

Wajah permukiman masyarakat Cina pendatang pada awalnya mengikuti dan terintegrasi dengan kebudayaan masyarakat setempat atau gaya arsitektur yang populer, sehingga sulit dibedakan (Pratiwo, 2010: 78-79) dan tidak menonjol dari segi arsitektur, padat, menjadi kumuh, tergusur, atau hancur karena pembakaran atau pembongkaran (Heuken, 2016: 247).

Salah satu perubahan yang menyolok adalah penggunaan warna dominan merah dan kombinasinya dengan hijau dan kuning atau emas. Kemudian penggunaan beberapa atribut lain seperti papan nama, lampion, karakter Cina, dan tentu saja dekorasi bentuk-bentuk karakter dalam legenda Cina, yang telah dikenal masyarakat. Kemudian berbagai kegiatan berupa atraksi Barongsai dalam menyambut Tahun Baru Imlek ataupun acara-acara lain seperti ulang tahun tokoh masyarakat, atau ulang tahun kemerdekaan, dan lain sebagainya. Dengan diselenggarakannya di jalanan di latar belakang bangunan-bangunan ruko di Pecinan, situasi malam hari atau pun siang hari Pecinan menjadi semarak, menarik, dan menghidupkan terutama bagi pengunjung. Selain itu, dibukanya jalanan hanya untuk para pejalan kaki mengundang para pengusaha restoran untuk meletakkan meja kursinya di jalan yang makin mengundang para pengunjung untuk duduk sejenak menikmati suasana sambil menyantap hidangan khas Pecinan yang mengundang selera. Selain Jepang dan Korea, situasi semacam itu banyak ditemui di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Penggunaan warna, emblem, dekorasi, dan lambang-lambang tersebut merupakan salah satu cara mengkomunikasikan identitas diri atau kelompoknya. Penemuan tersebut sesuai dengan teori Lynch (1992: 9) yang menyebutkan bahwa *imageability* atau kemampuan menangkap citra kota sebagai kualitas sebuah obyek fisik yang memberikan kemungkinan terbesar untuk membangkitkan citra yang kuat dalam diri pengamat, melalui bentuk, warna, atau pengaturannya.

TABEL 3. CIRI-CIRI WAJAH PECINAN

1. Dekorasi	banyak menggunakan lambang naga, dan bunga teratai serta berbagai ukiran khas budaya Cina
2. Warna	menggunakan warna-warna merah, hijau, dan kuning atau emas
3. Penanda komersil	beragam benda-benda khas Cina dimanfaatkan sebagai penanda, seperti lampion gantung,dll
4. Simbol/karakter Cina	muncul pada penulisan nama toko dan barang atau makanan
5. Bukaan pintu dan jendela	menjadi sangat terbatas dan cenderung tertutup dengan pengamanan ganda
6. Atap bubungan melengkung landai dan bertumpuk	tidak digunakan lagi namun mengadopsi gaya arsitektur Eropa atau setempat
7. Hiasan tepi dinding pemisah	tetap dipertahankan dan menjadi satu-satunya penanda khas rumah-rumah di Pecinan

Di Singapura, orang-orangnya pun tidak terbiasa duduk-duduk di jalanan. Namun, beberapa usaha pemerintah untuk menghidupkan kembali perkampungan di wilayah kota yang cukup tua ini mulai memasukkan beberapa kegiatan masyarakatnya. Meskipun sayangnya komersialisasi telah mengambil alih peran Pecinan menjadi tanpa nilai-nilai budaya, kecuali sekadar tempelan pada fisik bangunannya dengan warna-warni yang mencolok, dan barang-barangnya, untuk menarik pengunjung. Demikian pula membuka kantong Pecinan untuk mengundang pengunjung dengan menawarkan restoran terbukanya, di mana pengunjung bisa memilih duduk di depan deretan bangunan khas Pecinan, di bawah langit sambil menikmati suasana sekitar. Kecuali warna-warni dan lampion-lampion, serta makanan khas Cina, sulit untuk menentukan apakah orang-orangnya berasal atau berkebudayaan Cina.

Sama halnya dengan Pecinan di Korea, di mana mereka sama-sama bersaing untuk memperoleh pembeli dan menarik sebanyak mungkin pengunjung ke wilayah mereka. Mereka memanfaatkan jalanan sebagai tempat meletakkan berbagai atribut khas Cina. Lampion-lampion dan dekorasi berkarakter legenda Cina daratan. Lengkap dengan bau-bauan makanan khas Cina.

Perubahan penggunaan jalan ini adalah salah satu tanggapan terhadap perubahan politik bahkan di negara asalnya, di Cina, di mana jalan merupakan tempat khusus para pejabat yang akan melaluinya, sehingga rumah-rumah penduduk tidak boleh memiliki bukaan yang langsung terhadap jalanan di depannya. Toko-toko pun harus terpisah dari jalan. Hal ini di Indonesia,

terutama di Jawa, sangat berbalikan dengan hubungan langsung masyarakat Jawa dengan jalan, ditandai dengan penggunaan jalan sebagai ruang komunal untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang bersifat publik hingga semi-privat. Ruang yang boleh digunakan untuk bertemu seseorang, bercakap-cakap, duduk, makan, bahkan tidur. Gang-gang atau jalanan di Jawa, khususnya telah menjadi bagian dari ruang komunal. Sehingga ketika salah seorang melaluinya, ia wajib mengucapkan salam atau meminta izin, seolah-olah jalan yang dilaluinya milik orang yang sedang duduk atau berdiri di situ.

Sementara di negara asalnya di Cina, jalanan adalah tempat khusus yang cukup sakral yang arah dan pembagiannya diatur yang berakhir pada sebuah tempat penyembahan, kuil atau kelenteng. Sehingga beraktivitas di jalan sangatlah dibatasi penggunaannya, yaitu yang bertujuan di atas tujuan sehari-hari. Orang-orang penduduknya tidak akan memanfaatkan jalan sebagai ruang komunal. Mereka lebih memilih ruangan di dalam bangunan untuk bertemu dan melakukan kegiatannya sehari-hari. Mereka tidak memiliki budaya untuk mengobrol sambil duduk atau makan atau tiduran di jalan.

Demikian pula di Jepang, jalanan bukanlah tempat yang biasa digunakan untuk duduk-duduk atau berinteraksi sosial. Pada masa Edo, ketika Samurainya berjaya, jalan adalah tempat mereka berpatroli dan bepergian setiap tahunnya ke tempat-tempat pertemuan. Penduduk setempat dilarang melihat apalagi menonton mereka. Sehingga jendela dan pintu-pintu rumah mereka pun serba tertutup. Tidak ada orang atau penghuninya yang dibiarkan duduk-duduk di luar mengobrol atau bersantai apalagi saat para Samurainya lewat. Inilah cara menghormati. Jalanan di Jepang juga menjadi semacam jalur untuk memandangi pemandangan atau ikon budaya di kejauhan, sehingga jalannya harus bersih dan lancar untuk orang berjalan mengikuti arah pandangannya yang lurus. Kecuali saat festival, ketika orang-orang berkerumun, tapi tempat-tempat makan hanya sebatas didirikan di tepi-tepi jalan. Para pembelinya biasanya berdiri cukup sebentar untuk membiarkan orang berikutnya lewat.

Rencana dibangunnya Pecinan sebagai kawasan bisnis yang baru yang menghubungkan Korea dan Cina dan telah disetujui Juni 2016, ternyata menuai pro dan kontra. Tidak semua pendatang Cina menyetujuinya. Seorang keturunan Cina yang lahir di Korea Masyarakat Cina pendatang yang telah lama bermukim di negara yang didiaminya, mengisahkan bahwa norma-norma budaya tradisional Cina yang terbentuk berabad-abad lamanya, yang agung dan luhur, telah

dihancurkan oleh komunisme dalam kurun puluhan tahun (Wong dalam Song, 2016).

Tahun 2008, Jepang mempunyai rencana membangun Pecinan yang baru di tengah kota Tokyo yang juga menimbulkan kontroversi. Alasan pembangunan adalah jumlah pendatang Cina yang paling banyak terdapat di kota tersebut, bahkan dibandingkan dengan kota Yokohama, tempat Pecinan terbesar. Kekhawatiran pun mengikuti rencana tersebut, yang berkaitan dengan keamanan masyarakat. Namun tahun 2014 keberatan-keberatan masyarakat telah mengubah rencana tersebut menjadi komunitas Cina online (Miki Takajiro untuk Nippon.com, 20 Agustus 2015).

Dalam penelitian tentang identitas budaya mahasiswa pendatang Cina secara virtual di Singapura, Chan mendapati bahwa komunitas Cina yang dibangun secara virtual mungkin saja atau mungkin juga tidak menawarkan pilihan identitas yang berbeda bagi anggota-anggotanya yang dimiliki secara etnis atau nasional karena dibatasi oleh kebijakan politik pihak manajemen (Chan, 2006: 24). Di lain pihak, komunitas virtual ini memunculkan identitas budaya Cina keseluruhan melalui motif naga dan melalui penggunaan istilah *huaren* yang menunjuk pada identitas etnis Cina tanpa ada konotasi politik. Tidak hanya pendatang dari Cina daratan, tetapi juga dari Taiwan atau yang lahir di Singapura. Berbeda dengannya, asosiasi imigran Cina secara fisik cenderung lebih membatasi identitas budayanya secara tunggal dalam satu organisasi, misalnya berdasar dialek/lokalitas, atau identitas Cina keseluruhan (Chan, 2006: 25). permasalahan politik dalam negeri juga memengaruhi peraturan dalam organisasi, terutama dalam menggerakkan dan mengatur protes/demonstrasi (Chan, 2006: 27).

Peran orang-orang Cina jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda dan Inggris hingga masa pendudukan mereka di daerah-daerah kolonial, terutama memiliki misi perdagangan. Orang Belanda dan Inggris yang tiba sekitar tahun 1600 menemukan koloni kaum Tionghoa yang luas dan sangat berbeda di pelabuhan-pelabuhan Asia seperti Hoi An, Patani, Banten, dan Phnom Penh, serta Manila. Di Banten pada tahun 1600 jumlah warga Tionghoa mencapai 3.000; mereka tinggal di permukiman yang terpisah di luar tembok kota di mana mereka terkonsentrasi hingga mendominasi perdagangan internal di seluruh kepulauan nusantara (Suhandinata, 2009: 28-29).

Pengaruh Eropa dan Cina di Asia Tenggara telah menjadi makin menentukan di tahun-tahun pertengahan abad ke-18 melalui kemitraan, namun

kemudian persaingan mulai muncul disusul sikap bermusuhan terhadap warga Tionghoa dari bangsa Eropa, pribumi, bahkan sesama Tionghoa sendiri (Suhandinata, 2009: 29)

Tidak hanya perdagangan, kondisi politik di negeri asal mereka, Cina, dan usaha menyatukan orang Tionghoa di Indonesia, telah memberi dampak perubahan-perubahan politik di Indonesia (Suhandinata, 2009: 40). Beberapa perkumpulan politik orang Tionghoa di Indonesia membiayai gerakan nasionalis pribumi yang menjamur sekitar dasawarsa pertama abad ke-20, sehingga membuat gusar otoritas pemerintahan kolonial (Williams dalam Suhandinata, 2009: 41). meskipun demikian, evolusi kelas kapitalis Tionghoa di Jawa makin mendorong kelompok tersebut jauh dari masyarakat pribumi dan bertentangan perkembangan politik arus utama kaum pribumi.

Akulturas budaya, secara psikologis, adalah proses perubahan internal yang dialami pendatang (imigran) ketika berhubungan langsung dengan warga setempat, yang berkaitan erat dengan identitas sosial dan kompetensi budayanya, hasilnya adalah perubahan dalam pola-pola budaya aslinya bagi kedua kelompok tersebut. Proses ini terus-menerus terjadi selama individu tersebut menghadapi perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh warna kulit, bahasa, latar belakang budaya, dan sebagainya (Padilla, 2003: 35-36). Dua hal pembangun akulturas adalah kesadaran budaya dan loyalitas etnis yang terutama terjadi pada kelompok minoritas (Padilla 2003: 38-39). Ada kemungkinan seorang pendatang memilih untuk tidak berubah, bukan karena minat atau kecenderungan pribadinya, namun lebih disebabkan oleh kondisi politik, sosial dan/atau ekonomi (Marin, 1993 dalam Padilla 2003: 39). dalam lingkungan geopolitik yang sama, tidak dapat diharapkan hasil yang sama karena adanya proses akulturas tersebut. Dilaporkan juga tingginya kesulitan psikologis yang dialami pendatang karena usaha mengidentifikasi budayanya dengan kuat (Nguyen, Messe, dan Stollak, 1999 dalam Padilla 2003: 40) sebagai usaha untuk menghadapi penolakan dari budaya setempat, yang sebenarnya malah makin melebarkan perbedaan antara dua budaya. Jadi, proses akulturas budaya dipastikan akan terjadi antara dua individu atau kelompok individu yang berbeda latar belakang budayanya dalam jangka waktu yang panjang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial dan ekonomi setempat, yang hasilnya belum tentu sama bahkan di wilayah yang mirip karena kebebasan memilih individu/kelompok tersebut.

Ada tujuan-tujuan, motif, dan kebutuhan-kebutuhan pendatang yang menjadi pertimbangan karena mereka

berusaha untuk sukses di negara baru tempat mereka bermigrasi (Padilla 2003: 42). setelah memahami proses sosial mereka, salah satu indikator lain dalam akulturas budaya adalah menjadi kompeten dalam budaya, yaitu kemampuan yang dipelajari untuk berguna dalam budaya tuan rumah dalam nilai-nilai, kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, tata cara, dan bahasa, sehingga mereka dapat diterima sebagai "orang dalam". kemudian ada identitas sosial yang tercermin melalui perilaku atau perwujudan fisik secara kelompok dalam skala yang lebih besar. Seseorang akan berpikir, meraskan, dan bertindak sebagai anggota dari kelompok, institusi, atau budayanya (Padilla 2003: 43). selalu ada kebutuhan untuk memiliki identitas sosial (etnis, agama, atau nasional), untuk masuk dalam sebuah kelompok sosial (inklusi) di samping tetap mempertahankan perbedaan sebagai kelompok etnis tertentu (diferensiasi).

Dalam sebuah penelitian tentang *sense of community*, perasaan berkomunitas, penduduk kota pinggiran di Kalifornia, terungkap bahwa urbanisasi wilayah pinggir kota yang luas wilayahnya, padat, dan terdiri dari beraneka ragam etnis, rasa memiliki komunitas kurang dapat dirasakan dalam skala besar, sehingga mereka terus-menerus menginginkan komunitas yang lebih kecil, namun idealisme tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan (Wilson & Baldassare, 1996: 39).

SIMPULAN

Kaum Tionghoa dalam menanggapi perkembangan politik sejak awal abad ke-20, telah berjuang untuk kepentingan sosial, hukum dan politik tanpa langsung menentang otoritas penjajah. Hal ini tercermin pada lokasi permukiman mereka yang mengikuti aturan-aturan pemerintah kolonial, dengan menempati area-area terbatas, terkonsentrasi di kota. Kedua, terhadap pemberlakuan pajak muka bangunan yang lebih tinggi mengakibatkan lahan muka rumah menjadi makin sempit, di beberapa wilayah lain tercermin pada penyatuan muka bangunan untuk dua atau tiga buah konstruksi rumah yang terpisah, mengaburkan jumlah lantai bangunan dengan permainan atap dari tampak muka bangunan dan bukaan atas yang kecil. Ketiga, banyak bangunan yang didirikan dengan penampilan mengikuti gaya arsitektur bangunan Eropa.

Perkembangan Pecinan mula-mula tidak disebabkan oleh pengaruh politik, bahkan jauh dari pengaruh politik seperti diungkapkan oleh Zahnd (2010: 29). Keberadaan Pecinan yang mula-mula berintegrasi dengan struktur kota tradisional yang berkembang secara alamiah. Kemudian, dalam perkembangannya,

oleh karena campur tangan dan desakan politik pemerintahan eksternal maupun internal, telah membangkitkan idealisme masyarakat etnis Cina untuk membentuk komunitas tersendiri yang menonjolkan identitas budaya Cina asalnya. Masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu di Indonesia, atau Inggris, yaitu di Singapura dan Malaysia, maupun timbulnya perang yang terus-menerus dan perpecahan di antara bangsa sendiri, yaitu di Jepang dan Korea, telah menyebabkan perubahan utama pada awal sebelum masa kemerdekaan atau keterbukaan, yaitu awal masa modern, yang melandasi perubahan-perubahan penting hingga terbentuknya citra Pecinan kekinian. Meskipun dikhawatirkan telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik dengan tujuan menaikkan keuntungan finansial, beragam perubahan politik yang terjadi telah secara efektif memberikan pengaruh positif yang mendorong penyampaian ekspresi budaya Cina sebagai bagian dari citra Pecinan kekinian secara terbuka dan berani.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://incheon.roadplanner.ru/eng/chin/chinkod.html>
(akses 10/11/2016)
- <http://www.theepochtimes.com/n3/2106313-controversy-erupts-over-plans-to-build-worlds-largest-chinatown-in-korea> (akses 10/11/2016)
- <http://www.nippon.com/> (akses 10/11/2016)
- Armstrong, Charles K. 2009. *A Timeline Of Korean History*. Columbia University (<http://afe.easia.columbia.edu>) (akses 10/10/2016)
- Anderson, K. 1990, 'Chinatown Re-Oriented': A Critical Analysis Of Recent Redevelopment Schemes In A Melbourne and Sydney Enclave, *Australian Geographical Studies* [Now Geographical Research], 18(2): 137-154.
- Anggraini, Lya D. 2005. Machiya, Townhouses In Japan: A Type In The Homogeneity. *Report to Environmental Engineering Osaka University*.
- Chan, Brenda, 2006. Virtual Communities And Chinese National Identity. *Journal Of Chinese Overseas* Vol 2 (1) May 2006: 1-32.
- Chen, Cong, Kim, Joonho, Mitsuhashi, Nubuo, Dan Fujimoto, Nobuyoshi. 2007. Life-Style Of The Inhabitants Derived From The Spatial Composition Of Qilou House And District: Study On The Residential Environment Of Qilou District In Guangzhou City, China Part 1. *Japan Architectural Planning* Januari 2007 No. 611, 23-29.
- Narumi, Kunihiro. 1986. Metropolitan Neighborhoods In Japan And The West: Nested Systems Versus Axial Systems. *Senri Ethnological Studies* 19: 59-75.
- Narumi, Kunihiro. 1989. The Difficult-To-Understand Japanese Addressing System. *Monthly Journal Of Science Kagaku Asahi* April 1989.
- Ng, Fan Cheuk. 1998. Canada As A New Place: The Immigrant's Experience. *Journal Of Environmental Psychology* 18: 55-67.
- Padilla, Amado M. Dan Perez, William. 2003. Acculturation, Social Identity, And Social Cognition: A New Perspective. Sage Publication. *Hispanic Journal Of Behavioral Sciences*, Vol. 25 (1), Februari 2003: 35-55.
- Wilson, Georjeanna dan Baldassare, Mark. 1996. Overall "sense Of Community" In A Suburban Region: The Effects Of Localism, Privacy, And Urbanization. *Journal Of Environment And Behavior*, Vol. 28 No.1, Januar 1996: 27-43.
- Adishakti, Laretna T. 1997. *A Study On The Conservation Planning Of Yogyakarta Historic-Tourist City Based On Urban Space Heritage Conception*. Kyoto University. Unpublished Dissertation.
- Bellah, Robert N. 1985. *Religi Tokugawa: Akar-Akar Budaya Jepang*. Jakarta: Gramedia.
- Dana, Djefry W. 1990. *Ciri Perancangan Kota Bandung*. Jakarta: Gramedia.
- Handinoto. 1996. *Perkembangan Kota Dan Arsitektur Kolonial Belanda Di Surabaya (1870-1940)*. Kerja Sama Dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra, Surabaya. Yogyakarta: Andi.
- Handinoto dan Soehargo, Paulus H. 1996. *Perkembangan Kota Dan Arsitektur Kolonial Belanda Di Malang*. Kerja Sama Dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Petra, Surabaya. Yogyakarta: Andi.
- Heuken, A. 2016. *Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Lynch, Kevin. 1992. *The Image Of The City*. Massachusetts: MIT Press.
- Pratiwo. 2010. *Arsitektur Tradisional Tionghoa Dan Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rapoport, Amos. 2005. *Culture, Architecture, and Design*. Chicago: Locke Science Publishing Company.
- Suhandinata, Justian. 2009. *WNI Keturunan Tionghoa Dalam Stabilitas Ekonomi Dan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 2008. *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Zahnd, Markus. 2008. *Model Baru Perancangan Kota Yang Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius.

Sketsa Pariwisata di Aceh: Dari Regulasi Berbasis Syar'i Hingga Resistensi Masyarakat dalam Apologi Rekreasi (Studi Kasus di Kota Lhokseumawe)

Pangeran P.P.A. Nasution, S.Sos., M.A
Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Malikussaleh
pangeran9688@gmail.com, arruida@gmail.com

Andry Ruida Hasi, S.H.
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Pariwisata sebagai arena industri tentu berkontribusi bagi pemerintah maupun kehidupan masyarakat. Manfaat kepariwisataan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, secara ekonomi, sosial budaya, bahkan pendidikan sekalipun, dalam lingkup nasional maupun daerah. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sesungguhnya memiliki potensi pariwisata begitu berlimpah. Tidak hanya memiliki daya tarik wisata alam di sepanjang garis pantai aceh dengan pesona (selat) malaka yang begitu indah, kehidupan sosio-religi masyarakat Aceh yang Islami merupakan potensi geliat wisata yang membutuhkan kreasi indsutri. Namun begitu, kenyataannya pariwisata di Aceh seolah lelah menentukan identitasnya untuk andil sebagai ikon pariwisata di Indonesia. Asumsi telaah isu dalam tulisan ini meliputi dua aspek utama yang dianggap menjadi kendala bagi meleatnya kepariwisataan di Aceh. Pertama, berbicara tentang regulasi, khususnya peraturan pemerintah daerah Aceh berdimensi Islami (*Qanun*) yang terkesan menahan laju perkembangan pariwisata di aceh. Kedua, tidak patut diabaikan bahwa tren aspirasi kepariwisataan pada sebagian masyarakat Aceh telah mengalami perubahan. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mengemukakan bagaimana regulasi kepariwisataan dengan semangat syariat yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Aceh dimaksud, mendapatkan resistensi masyarakat dengan aspirasi budaya kepariwisataan yang berbeda, –dalam ‘apologi rekreasi’. Tulisan ini disajikan berdasarkan data yang diperoleh dengan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan via wawancara (*indepth*) dengan kategori informan: wisatawan, pelaku usaha di sekitar lokasi wisata, dan pihak pemerintah terkait. Penelitian dilakukan di

beberapa lokasi wisata populer di Kota Lhokseumawe. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur terkait, termasuk regulasi/*qanun* oleh Pemerintah Aceh di bidang pariwisata. Gagasan naratif dalam tulisan ini mengacu pendekatan budaya pop dan studi tubuh sosial sebagai poros simpul analitik, dengan padanan representasi dan rekomendasi pengembangan kepariwisataan di Aceh pada bagian akhir tulisan.

Kata kunci: Pariwisata, *Qanun*, Aspirasi Budaya, Resistensi, Apologi Rekreasi

PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan kawasan perniagaan strategis yang berada di Pulau Sumatera, terletak di antara Samudera Hindia dan Selat Malaka. Hikayat sejarah mengabarkan bahwa sebelum pemerintah kolonial Belanda mengalahkan Aceh pada tahun 1903, Aceh merupakan entitas politik yang independen. Selama berabad-abad, Aceh dipimpin dan dikendalikan oleh para suksesi Sultan Ali Mughayat Syah, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-19, Aceh mengalami kemajuan signifikan di bidang politik dan ekonomi. Aceh menjadi salah satu pusat perdagangan besar di Asia Tenggara dan mengendalikan pelabuhan-pelabuhan besar di seluruh wilayah Sumatera Utara dan Semenanjung Melayu (Reid, 1969:3).¹ Namun bagaimanapun, kekuatan Aceh secara bertahap menurun sebagai akibat dari konflik internal dan persaingan antara kekuatan kolonial Inggris dengan

¹ Reid, A. 1969. *The Contest for North Sumatra, Atjeh, the Netherlands and Britain 1858–1898*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. Hlm.3.

Belanda untuk menguasai sumber daya Aceh yang berlimpah.

Periode kolonial Belanda luruh dalam garis edar sejarah, berganti oleh masa kolonial Jepang di Aceh yang berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945. Sebagaimana pendahulunya (Belanda), pihak Jepang juga memerintah wilayah Aceh melalui bangsawan lokal. Ketika Jepang kalah, revolusi sosial pecah antara bangsawan tradisional yang mendukung kembalinya Belanda dengan para pemimpin agama yang pro-kemerdekaan Republik Indonesia. Akar perpecahan antara para pemimpin rakyat Aceh berhubungan dengan pertikaian panjang dalam kepentingan penguasaan tanah, peradilan dan otoritas administratif yang telah dimulai selama Perang Aceh, dan terus berlangsung selama masa penjajahan. Selama periode revolusi sosial, banyak bangsawan tradisional dan keluarga mereka yang terbunuh maupun dipenjara oleh pasukan pro-kemerdekaan yang dipimpin oleh para pemimpin agama, dan kemudian menciptakan struktur sosial baru di Aceh berdasarkan kesatuan dalam Islam di bawah kepemimpinan para pemimpin agama (Kell, 1995:9).²

Jika merunut narasi historis tentang kehidupan sosial-politik di Aceh, akan ditemukan proyektif sejarah mengapa ada perasaan bahwa status Aceh berbeda dari wilayah suku bangsa atau provinsi lain di Indonesia. Pertama, Aceh menolak penjajahan lebih lama dari hampir seluruh wilayah lainnya di Indonesia, dan penjajahan di Aceh berakhir dalam periode relatif sangat singkat. Kedua, revolusi sosial yang terjadi pada Desember 1945 hingga Maret 1946 secara permanen mengubah struktur sosial pada rakyat Aceh dengan dalih dominasi pemimpin agama dan sadar kelas yang menyertainya. Ketiga, selama revolusi kemerdekaan, diklaim bahwa pihak kolonial Belanda yang meninggalkan wilayah Aceh, dan Aceh menetapkan dirinya dengan status independen yang dimiliki sejak masa pra-kolonial. Tidak hanya itu, pada tahun 1947, Presiden Soekarno membujuk Aceh untuk bergabung dengan Republik Indonesia, menjanjikan bahwa Aceh akan diberikan otonomi dalam Indonesia, dan memungkinkan untuk menerapkan Hukum Islam. Keempat, atas dasar bujuk-janji tersebut, Aceh memberi kontribusi besar untuk Republik Indonesia yang masih berusia sangat muda kala itu. Dapat dikatakan, rakyat Aceh membiayai pembelian pesawat pertama bagi Indonesia, mendanai pembentukan pos diplomatik di Singapura, India dan PBB, dan

memberikan kontribusi keuangan bagi kas Indonesia ketika republik baru ini hampir bangkrut (Ricklefs, 1993).³

Aceh merupakan provinsi dengan sumberdaya alam yang berlimpah, namun ironis, wilayah bangsa ini tidak luput dari catatan sejarah konflik yang menyertainya. Pemberontakan oleh kelompok pasukan bersenjata lokal (*indigenous armed militia*) terhadap pemerintah Republik Indonesia merupakan benih konflik yang ditaburkan sejak awal periode kemerdekaan, pada tahun 1940-an dan 1950-an. Pada periode pemerintahan selanjutnya, masa kepemimpinan Soeharto, wilayah Aceh dikembangkan dari provinsi yang dianggap 'miskin' menjadi provinsi dengan pertumbuhan perekonomian tercepat di Indonesia. Namun, sebagian besar elit pemimpin masyarakat Aceh percaya bahwa mereka tidak mendapatkan bagian proporsional dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Pandangan tersebut memicu perasaan anti-Jakarta dan juga meningkatkan popularitas Gerakan Aceh Merdeka (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh. Selama periode Soeharto (1966-1998), ada tiga isu politik dan ekonomi yang penting dan berkontribusi terhadap kerusakan hubungan antara Aceh dan Pemerintah Indonesia di masa Orde Baru: eksploitasi ekonomi, persaingan yang sedang berlangsung di Aceh antara pemimpin agama dan kaum bangsawan tradisional, dan perubahan politik serta ekonomi secara cepat yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru (lihat Sugiarti dan Purwadi, 2010).

Pasca runtuhnya rezim pemerintahan Soeharto disertai bergulirnya bandul reformasi dengan dinamikanya tersendiri mengantarkan Aceh pada momentum perdamaian yang digelar dalam MOU-Helsinki di tahun 2005. Pada level tertentu, gelombang damai di Aceh membawa kehendak Islamisasi dengan anatomi, batas-batas, dan geliat kekuasaan di Aceh pasca MOU-Helsinki. Tercipta elit pemerintahan baru di Aceh yang mengaku otonom dan mendesak independensi dengan arsitektur pemerintahan yang mencitrakan ketakwaan melalui UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), dan juga berbagai peraturan daerah (Perda) bermetomni Islami yang dikenal dengan istilah *Qanun*. Regulasi berbasis syariah ini merevitalisasi dan mendikte masyarakat Aceh pada gaya hidup Islami yang meliputi cara pandang, penampilan, dan berbagai selebrasi terhadap beraneka aspek material dan praktik kehidupan yang mengandung nilai-nilai

² Kell, T. 1995. *The Roots of Acehnese Rebellion* (1989–1992). Ithaca, NY: Cornell University. Hlm. 9.

³ Ricklefs, M.C. 1993. *A History of Modern Indonesia since C1300*. London: Macmillan. Hlm. 220.

Islami atau 'peng-Islam-an' (lihat Kokoschka, 2009:226).

Bercerita tentang Pariwisata Beregulasi Syar'i

Regulasi berbasis syariah ini tidak luput dalam menentukan masa depan kepariwisataan di Aceh. Perkembangan pariwisata yang berkontribusi secara ekonomi, membutuhkan partisipasi dan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting terhadap perkembangan dan pengelolaan kepariwisataan. Pemerintah Aceh sebagai regulator tidak terlepas dari kewajibannya untuk memajukan pariwisata dengan mengeluarkan produk regulasi yang mendukung dan membangun pariwisata

Ironisnya, *qanun* tentang kepariwisataan di Aceh yang berazaskan syariah juga tidak luput dari penolakan oleh masyarakat dalam beragam bentuk resistensi. *Qanun* pariwisata seakan mengekang keleluasaan masyarakat dalam berpariwisata. Ada persepsi oleh masyarakat bahwa regulasi tersebut menghambat pariwisata di Aceh. Tidak hanya itu, masyarakat memiliki tren aspirasi budaya kepariwisataan sebagai *leisure time* yang tidak membutuhkan kehendak religitas sebagaimana dipatutkan oleh pemerintah Aceh dalam *Qanun* kepariwisataan di Aceh.

Dari uraian tersebut, maka tulisan ini akan memaparkan tentang gambaran (sketsa) pariwisata di Aceh, terutama di Kota Lhokseumawe, berkaitan dengan keberadaan *qanun* kepariwisataan di Aceh yang mendapatkan resistensi dari masyarakat dengan tren aspirasi wisata dalam apologi rekreasi sebagai imaji budaya populer yang berkembang.

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan, wawancara, pengamatan non-partisipan, dan dokumentasi. Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi awal serta referensi yang mendukung pemahaman terhadap fokus kajian, dan juga untuk memperkuat analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Berbagai sumber informasi awal ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, thesis maupun disertasi, berbagai hasil laporan penelitian, dokumen pemerintah, dan berbagai informasi dari berbagai media berita (cetak maupun elektronik).

Selanjutnya, konstruksi data diperoleh dari wawancara terhadap informan biasa (pangkal) dan informan kunci (*key informants*). Pemilihan informan kunci ditentukan dengan konteks informasi yang hendak digali. Sebagaimana dikemukakan oleh Spradley (2007), bahwa para informan ditentukan berdasarkan beberapa syarat minimal: enkulturasi penuh, keterlibatan langsung informan dengan suasana budayanya, latar belakang budaya yang berbeda dengan peneliti, ketercukupan waktu, dan non analitik.

Wawancara ditujukan untuk mengungkap informasi yang terkait dengan kejadian, sejarah dan persepsi. Oleh karenanya, wawancara juga dilakukan untuk merekam informasi yang dianggap mampu memberi gambaran historis atas fenomena yang berlangsung selama beberapa kurun waktu. Pengamatan terlibat (*partisipant observation*) juga menjadi metode pengumpulan data yang digunakan, terutama untuk mengamati berbagai perilaku, tindakan, dan peristiwa lainnya yang terkait dengan aktivitas kepariwisataan. Terakhir, metode dokumentasi di sini dimaksudkan kepada perolehan data (visual) dengan penggunaan peralatan (bantu) kamera dan berbagai peralatan bantu lainnya. Peralatan kamera digunakan untuk mendokumentasikan perilaku atau berbagai praktik budaya yang relevan dengan fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata merupakan fenomena kemasyarakatan, yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan sebagainya yang dipandang sebagai kegiatan ekonomi dan tujuan utama pengembangan pariwisata adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun daerah/negara (Pitana & Gayatri, 2005:31).

Selanjutnya, pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, membuat masyarakat setempat mengalami metamorfosa dalam berbagai aspeknya. Dampak pariwisata merupakan wilayah kajian yang paling banyak mendapatkan perhatian dalam literatur,

terutama dampak terhadap masyarakat lokal (Pitana & Gayatri, 2005:109).

Smith dan Eadington (1992:xiii; dalam Pitana & Gayatri, 2005:7) juga memaparkan bahwa pariwisata adalah institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan dunia modern yang dapat dipelajari. Pariwisata mempunyai sejarah dan literatur, mempunyai struktur internal dengan prinsip-prinsip operasinya, dan sangat sensitif terhadap pengaruh eksternal, baik kejadian alam maupun budaya. Semua itu dapat dianalisis secara ekonomi maupun transaksi sosial.

Dalam hubungannya dengan pariwisata, motivasi wisatawan terbagi ke dalam empat kategori (Pitana dan Gayatri, 2005:58):

1. Motivasi fisik, yaitu motivasi yang berkaitan dengan aktifitas fisik, misalnya olah raga, rekreasi pantai, hiburan yang menyegarkan, dan motivasi lainnya yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan.
2. Motivasi budaya, yaitu motivasi yang dapat diidentifikasi melalui hasrat untuk mengetahui tentang budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Termasuk juga ketertarikan akan berbagai objek peninggalan budaya (monumen bersejarah).
3. Motivasi interpersonal/motivasi yang bersifat sosial, motivasi yang berkaitan dengan hasrat untuk menemui orang baru, mengunjungi teman atau keluarga, menjauhkan diri dari rutinitas atau mencari pengalaman baru yang berbeda.
4. Motivasi karena fantasi, yaitu adanya fantasi bahwa di daerah lain seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan dan *ego-enhancement* yang memberikan kepuasan psikologis.

Keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh kuatnya faktor-faktor pendorong (*push factor*) dan faktor-faktor penarik (*pull factor*). Faktor pendorong dan penarik ini sesungguhnya merupakan faktor internal dan eksternal yang memotivasi wisatawan untuk mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan. Menurut Sharpley (1994) dan Wahab (1975; dalam Pitana dan Gayatri, 2005:58) menekankan bahwa motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam studi

tentang wisatawan dan pariwisata karena merupakan pemicu dari proses perjalanan wisata, dan motivasi ini acap kali tidak disadari secara penuh oleh wisatawan itu sendiri. Dengan demikian, kepariwisataan Indonesia semestinya dikelola dalam semangat populis dan berbasis budaya. Kepariwisataan dibangun dengan berlandaskan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Betapa tidak, pariwisata merupakan salah satu aktivitas sosial-ekonomi manusia yang dominan sepanjang peradaban manusia. Kepariwisataan telah menjadi satu mata rantai industri dengan beragam permasalahan yang menyertainya: sosial, politik, ekonomi, keamanan, ketertiban, keramah-tamahan, budaya, kesehatan, dan berbagai persoalan lainnya.

Berbicara tentang kepariwisataan di Aceh, Kota Lhokseumawe merupakan kota terbesar kedua di Aceh yang memiliki potensi lokasi pariwisata yang meliputi garis pantai hingga pebukitan. Beberapa di antaranya adalah Waduk pusong, Taman Wisata Bukit Guha Jepang, Pantai Ujong Blang, Pulau Semadu, dan Pantai Rancong. Beragam destinasi wisata tersebut terus bergeliat dan hendak berbenah. Lhokseumawe ditetapkan statusnya menjadi kota yang otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001. Secara geografis, wilayah Kota Lhokseumawe mempunyai luas wilayah 181,06 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Selat Malaka
- Batas Selatan : Kabupaten Aceh Utara
- Batas Timur : Kabupaten Aceh Utara
- Batas Barat : Kabupaten Aceh Utara

Penduduk Kota Lhokseumawe yang berjumlah 148.301 jiwa tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Blang Mangat. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Muara Dua (113,7 km²) sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Banda Sakti (11,24 km²). Ibukota Lhokseumawe berada di Kecamatan Banda Sakti yang ditandai dengan kegiatan perdagangan yang sangat menonjol di daerah ini sedangkan kegiatan industri berada di Kecamatan Muara Dua. Selain itu, Kecamatan Blang Mangat memiliki potensi pertanian dan sumber daya alam.

Dinamika pariwisata di Kota Lhokseumawe menawarkan ketakjuban kemajuan ekonomi dan keeksotisannya menjadi rangkaian daya tarik dengan suguhan berbagai cawan persoalan yang tidak akan

dengan mudah dapat terselesaikan. Patut untuk lebih berhati-hati dalam menentukan posisi kita ketika hendak menyatakan bahwa kepariwisataan ini membawa dampak negatif, atau justru kehadirannya memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Sikap mawas dimaksud akan hadir dalam tulisan ini, terlebih karena tulisan ini berupaya memahami suatu fenomena kepariwisataan melalui perspektif antropologi, sebagai pendekatan keilmuan yang menawarkan sudut pandang berbeda. Tidak seperti bidang ilmu ekonomi misalnya, lebih sering membicarakan tentang kepariwisataan dalam kaitannya dengan penguatan sumber daya ekonomi negara, dan cenderung melihatnya dengan pendekatan maupun analisis yang lebih bersifat makro.

Hikayat Pariwisata yang Ter-Islam-kan

Regulasi terkini yang mengatur kepariwisataan di Aceh mewujud dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013. Beberapa pasal tertentu dalam *qanun* tersebut menjadi perhatian utama sebagai latar telaah atas resistensi budaya kepariwisataan yang sekaligus merupakan aspirasi masyarakat terhadap pariwisata di Aceh. Pasal 2 dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Aceh harus berazaskan: a) Iman dan Islam, bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh harus sesuai dengan tuntunan agama Islam; b) kenyamanan; c) keadilan; d) kerakyatan; e) kebersamaan; f) kelestarian; g) keterbukaan; dan h) adat, budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya pada Pasal 3, penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan: a) melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; b) mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata; c) memperluas lapangan kerja dan pemeratakan kesempatan berusaha; dan d) meningkatkan Pendapatan Asli Aceh menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi penyelenggaraan kepariwisataan Aceh kemudian diatur dalam Pasal 4: a) mensyukuri nikmat Allah SWT; b) meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air; c) meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani; d) menambah pengetahuan dan pengalaman; dan e) membangun jiwa kewirausahaan.

Jenis usaha jasa pariwisata yang diatur dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013, Pasal 13 meliputi: a) jasa wisata syariat, seperti wisata tarikat dan zikir, atraksi seni sufistik, pengobatan tradisional, dan wisata syariat Islam lainnya; b) jasa biro perjalanan wisata; c) jasa pramuwisata; d) jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran; e) jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; f) jasa konsultan pariwisata; g) jasa informasi pariwisata; h) jasa makanan dan minuman; i)

jasa penyediaan akomodasi; j) jasa spa; dan k) jasa wisata kesehatan. Selanjutnya terkait dengan objek dan daya tarik wisata, dalam pasal 17 disebutkan bahwa pengusaha objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan: a) nilai-nilai Islam; b) adat-istiadat, serta kearifan lokal; c) kehidupan ekonomi dan sosial budaya; d) kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan e) kelangsungan usaha pariwisata.

Semakin besar bilangan pasal yang mengatur ternyata menegaskan Islamisasi kepariwisataan di Aceh. Pasal 82 dalam *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013 tentang 'larangan di tempat-tempat wisata' mengatur bahwa setiap orang dilarang: a) meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya; b) melakukan perbuatan asusila; c) berjudi/maisir; dan/atau d) merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata. *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013 juga mengatur tentang ketentuan pidana dalam industri kepariwisataan di Aceh, yakni pada Pasal 84: 1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam qanun ini, dikenakan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan peraturan perundang-undangan lainnya; 2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam qanun ini, yang sanksinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha yang didahului dengan peringatan tertulis. Terakhir pada Pasal 85, bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diancam pidana dan/atau denda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pariwisata sebagai Budaya Massa: Resistensi Masyarakat dalam Apologi Rekreasi

Regulasi kepariwisataan berbasis syariah (syar'i) ini dapat dikatakan sebagai representasi aspirasi kepariwisataan oleh para elit pemerintah Aceh dengan kehendak Islamisasi, –bukan sebagai pilihan bagi

wisata populer melainkan kepatutan (ketertiban moral; keimanan) bagi masyarakat dalam berwisata. Wisata populer yang dulu (secara historis) dan kini (dalam konteks sosial tertentu) dapat sangat berbeda pada masa dan tempat yang berbeda. Wisata menjadi ikonik ketika meraih popularitas melalui karya dan praktik haruslah relatif mudah dan menarik perhatian pelaku wisata lintas ras, asal, usia, gender, bahkan paham keagamaan sekalipun. Kehadiran wisata populer semestinya dapat diterima secara kolektif dari berbagai latar individu dalam menikmati, menggunakan, berperan serta, mereproduksi, atau mendistribusi ulang pengalaman kewisataan kepada yang lain.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai representasi Pemerintah Aceh merupakan bagian dari kelompok politis yang berorientasi elitis dan memandang rendah terhadap budaya wisata populer. Pemerintah Aceh dengan Qanun kepariwisataan terkesan was-was dan gamang dalam mengelola kepariwisataan di Aceh sementara masyarakat sebagai pelaku wisata bersikap mendua, sebagian berkeinginan mengekskalasi diri (sosial) dengan mengikuti perkembangan terbaru dalam imaji wisata populer; sementara kelompok lainnya merasa sungkan bahkan tersinggung oleh hiruk-pikuk wisata syariah. Sepintas dapat dikatakan kepariwisataan telah berwatak politis. Wisata populer sulit mendapatkan status terhormat dari kelompok elit (pemerintah) dengan beragam karakter politiknya.

Wisata populer dianggap sebagai aspirasi budaya massa yang 'tak santun' melalui imaji industri hiburan. Dianggap hanya hendak mengejar laba wisata, kaum elite atau Pemerintah Aceh terkesan cenderung merendahkan wisata sebagai 'budaya pop' (lihat Macdonald, 1998:22; Strinati, 1995:10), –budaya rendahan, massif, dangkal, imitatif, dan seragam (Strinati, 1995:21). Wisata sebagai budaya populer selalu dianggap bermasalah oleh para pemimpin politik, pendisiplin moralitas dan sosial. Mereka berpandangan bahwa seharusnya masyarakat memperhatikan ihwal yang lebih mencerahkan dan bermanfaat ketimbang berwisata dengan imaji budaya populer (lihat Strinati, 1995:41)

Wisata dengan imaji budaya populer dianggap bermasalah, realita yang tak dikehendaki ataukses modernisasi yang sering dianggap sebagai tanggung jawab negara (Foulcher, 1990). Pemerintah Kota

Lhokseumawe dengan Qanun No. 8 Tahun 2013, memuat pandangan tentang wisata oleh masyarakat Aceh sebagai imaji budaya populer merupakan tiruan buruk berselera-rendah yang merujuk budaya populer kaum Eropa dan Amerika. Sebagaimana diungkap dalam kajian Gerke (2000), bahwa umumnya orang Indonesia dianggap cenderung menyerupai gaya hidup sebagai tiruan murahan dari gaya hidup 'sesungguhnya' pada masyarakat kelas sosial atas di Eropa dan Amerika. Gerke (2000) juga mengatakan bahwa hanya relatif sedikit masyarakat kelas menengah di Indonesia yang dapat menjalani gaya hidup kaum perkotaan di Eropa dan Amerika. Sebagian besar tidak dapat mengonsumsi barang-barang yang tergolong pantas bagi kelas menengah.

Qanun Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang kepariwisataan oleh sebagian masyarakat juga dianggap bias maskulin. Aspek material dan konseptual seputar wisata dengan imaji budaya populer merupakankses modernisasi, ekonomi, dan agama yang dianggap sebagai kegiatan tentang dan untuk para lelaki. "Ter-gender-kan-nya pariwisata" di Aceh dapat dilihat dalam Pasal 83, bahwa: 1) Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata; 2) Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam; 3) Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan; 4) Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan; 5) Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/ atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/ mabuk-mabukan dan maisir/judi; 6) Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat. Pengaturan tentang busana muslim dimaksud lebih ditujukan kepada kaum perempuan. Artinya, upaya penertiban lebih dimaksudkan kepada perempuan yang dianggap sumber problem kesusilaan dalam kepariwisataan. Perlakuan kepariwisataan berbias gender/termaskulinkan menambah dominasi lelaki bahwa gender di luar mereka dinilai lebih rendah.

Kenyataan pariwisata di Lhokseumawe cenderung tidak kondusif. Pada tahun 2015 sempat terjadi insiden pengrusakan bahkan hingga pembakaran tempat hiburan wisata di Kota Lhokseumawe. Sebagian masyarakat dan pemimpin masyarakat setempat melakukan pembakaran terhadap salah cafe di lokasi

wisata *Rancong*, pengrusakan dan pembakaran usaha karaoke yang berada di lokasi wisata di Kota Lhokseumawe, dan penggusuran warung-warung penjual makanan di lokasi wisata *Pusong Lama*. Khusus untuk penggusuran di *Pusong Lama*, ada pihak yang berkeberatan penggusuran tersebut dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan nomor gugatan 29/PDT-G/2016/PN-LSM.

Pembakaran yang terjadi di cafe di lokasi wisata *Pusong* menjadi semacam ketidakpastian kondusifnya pariwisata di Kota Lhokseumawe, antara mengembangkan suatu destinasi wisata atau membiarkan kehendak suatu golongan tertentu yang terkesan dipaksakan. Terjadi kesimpangsiuran atas insiden tersebut dengan opini dan isu-isu keagamaan (moral dan asusila) yang merangsek kondusifnya kepariwisataan di Kota Lhokseumawe. Begitu pula yang terjadi pada insiden pengrusakan dan pembakaran tempat karaoke di Kota Lhokseumawe.

Dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013, pasal 82, ada diatur mengenai larangan yang dilakukan oleh para wisatawan di lokasi usaha jasa pariwisata: di tempat-tempat wisata setiap orang dilarang meminum minuman keras dan mengonsumsi barang yang memabukkan lainnya; melakukan perbuatan asusila; berjudi/maisir; dan/atau merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Ironisnya, pasal 82 sepertinya menjadi 'rasionalisasi instrumental' oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan masyarakat dan kepentingan agama tertentu membunyikan dugaan pelanggaran oleh para pelaku usaha pariwisata. Apa yang dikecam sebagai pelanggaran oleh sekelompok orang tersebut belumlah terbukti kebenarannya, namun dengan semena-mena terjadi tindakan kekerasan, pengrusakan dan bahkan pembakaran. Insiden itu tentu dapat mengakibatkan kemunduran industri pariwisata di Aceh, terutama di Lhokseumawe. Para pelaku usaha bidang jasa pariwisata ragu untuk membuka atau mengembangkan usahanya, dan membuat investor juga mengalami kondisi yang serupa.

Apa yang dianggap bermasalah bisa bersumber dari wawasan yang dipilih, dan juga berasal dari tekanan orang lain. Banyak orang bersempadan pada ceruk pemikiran dalam menampung atau mendamaikan berbagai gairah, cita-cita, tekad, dan pantangan yang

bisa namun tidak selalu saling bertentangan. Insiden kepariwisataan yang terjadi di Lhokseumawe memperlihatkan paranoia akut tentang keberadaan perempuan dan ke-maksiat-an yang bertentangan dengan kehendak ke-syariat-an.

Dunia wisata di Aceh pun terbelah dalam dikotomi gender yang merupakan pembagian usang antara 'kehendak maskulin dan kepatuhan feminin'. Politik identitas yang termaktub dalam Qanun kepariwisataan di Aceh semakin sulit menengahi tuntutan massa atas kegembiraan dan hiburan dimiliki oleh kaum lelaki yang melegitimasi kenikmatan pariwisata yang bersifat feminin. Rangkaian pariwisata berlatar maskulin itu tampil dan berdamai dengan bangkitnya Islamisasi kepariwisataan di Aceh. Perempuan sebagai pelaku wisata merupakan penikmat jasa wisata kelas kedua di Aceh, bersifat 'privat' ataupun 'domestik', dan membutuhkan ruang wisata tertutup selayaknya tuduhan oleh para elit (pemerintah) terhadap wisata sebagai budaya massa itu sendiri (lihat Pambudy, 2003; O'Connor dan Klaus, 2000:379-82).

Resistensi hegemoni *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013 oleh masyarakat secara umum tampil melalui rentetan apologi rekreasi. 'Menjadi lebih populer' merupakan alih rupa dari rekreasi yang dalam konteks pariwisata menyiratkan pengertian tentang peluang khusus maupun keterampilan baru, guna menikmati kesenangan dengan mengonsumsi identitas wisata (budaya pop). Keterlibatan teknologi media terkini (media sosial dan lainnya), orientasi gaya wisata yang sedang menjadi tren (lihat Gerke, 2000; Heryanto, 1999b; Van Leeuwen, 2011). Pandangan ini dapat dipahami lebih jauh dari gagasan Nordholt (2011: 435), bahwa semenjak akhir masa penjajahan, bagi mayoritas penduduk asli kelas menengah di Indonesia, menjadi populer dan kekinian merupakan gaya hidup yang menggairahkan. Di Indonesia kini, imaji populer dan kekinian dalam kehidupan sehari-hari berperan membedakan seseorang dari masyarakat tradisional (sebagai 'yang lain' bagi kaum modern). Imaji itu juga membedakan pandangan umum tentang sesama warga yang masih 'terbelakang' di masa kolonial maupun pasca kolonial. Imaji dimaksud menjadi atribut penanda yang memisahkan kelas menengah dari status sebagai warga negara yang dulu tertindas di era Orde Baru, dari mayoritas bangsa ini yang kurang beruntung

(kaum miskin perkotaan dan rakyat pedesaan), secara nyata maupun yang dibayangkan, –menjadi anggota masyarakat yang berorientasi Islami pada masa pasca Orde Baru, dan berlanjut hingga kini.

Dalam konteks kepariwisataan di Aceh, orientasi Islamisasi dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 muncul dengan pertentangan antara ketakwaan moral berbasis agama dan daya rusak industri rekreasi. Beberapa pandangan yang dapat dirujuk dalam menjelaskan Islamisasi kepariwisataan di Aceh, memperlihatkan kecenderungan penjelasan gejala ini sebagai peristiwa komersialisasi kehidupan kaum Muslim dan komodifikasi simbol-simbol agama (Hew, 2013; Murray, 1991; Muzakki, 2007; Suryakusuma, 2008). Kesan pemikiran yang dapat dikembangkan selanjutnya, bahwa gerakan Islamisasi pariwisata berupaya menjinakkan industri rekreasi/hiburan dan menjadikannya sebagai kendali pemanjaan diri para penikmat wisata di Aceh. Pandangan tentang kejayaan Islamisasi dalam menaklukkan dunia yang sekuler, termasuk terhadap industri hiburan yang secara global didominasi oleh gaya rekreasi Eropa dan Amerika.

Istilah Islamisasi memang tidaklah dapat digunakan sesederhana itu, dan tidak didefinisikan sekadar proses perubahan sosial yang diusung dan didukung oleh suatu gerakan tunggal di antara komunitas Muslim yang taat. Gerakan yang bertujuan untuk memperoleh ruang lebih luas bagi pelaksanaan agama atau pernyataan keimanan dalam urusan-urusan kehidupan sosial budaya, dan menjadi agenda politik berkelanjutan.

Dalam gerakan Islamisasi tersebut, semakin problematis ketika berbagai pihak yang tidak memiliki motivasi religius, dan entitas budaya massa lainnya (ekspansi kapitalisme global terhadap barang dan jasa, perkembangan dalam teknologi media), –turut mengambil peran dalam proses Islamisasi yang kompleks. Ciri khas utama berbagai proses Islamisasi yang kompleks adalah terjadinya perluasan cara pandang, penampilan, dan perayaan secara massif terhadap unsur-unsur material dan beragam praktik yang mudah dipahami, mengandung nilai-nilai Islami atau ‘ter-Islam-kan.

Bagi masyarakat di Propinsi Aceh dengan kehidupan sosio-religi Islam yang dominan, sepertinya kini ketaatan beragama dan bergaya dalam wisata populer sama menariknya dan tidak selalu saling bertentangan. Ketaatan beragama dan kesenangan dalam berwisata lebih tersedia sebagai pilihan ketimbang menjadi fanatik dengan berpihak dan mengabaikan salah satunya. Tidak seperti pandangan di masa lalu yang memandang ketaatan dan rekreasi dalam bingkai paradoksal. Muslim Aceh terus berupaya menemukan cara (meskipun tidak ayal dangkal) dalam mendamaikan pandangan tradisi yang seringkali ditentang dengan agama dan budaya populer. Agama dan kapitalisme tidak hanya dapat hidup berdampingan dan memiliki keterkaitan, bahkan dalam risalah tertentu beraliansi hingga mendukung tindakan-tindakan kolektif yang berkelanjutan.

Selanjutnya, masyarakat Aceh melakukan perlawanan senyap terhadap pemerintahan yang ‘fundamentalisme’ agar permisif terhadap kehendak masyarakat yang gandrung kesenangan (*fun-loving society*) (lihat Bayat, 2007b:435). Melalui poros analitik Bayat yang menemukan gerakan ‘post-Islami’ sebagai kondisi dan proyek tematik, Islamisasi merupakan fase eksperimen atas energi dan sumber daya yang terkuras habis. Menanggapi kondisi semacam itu, kalangan Muslim terlibat dalam proyek post-Islami yang ‘bukan anti Islam, bukan non-Islami, namun tidak juga sekuler’ (Bayat 2007a:19). Mewakili upaya menyatukan religiusitas atas hak-hak keimanan dan kebebasan dalam praktik kehidupan. Islam dan kemerdekaan menekankan hak daripada kewajiban, keragaman sebagai pengganti suara otoritas tunggal, kesejarahan ketimbang teks keagamaan, serta masa depan ketimbang masa lalu. Proyek ini hendak menyatukan pilihan individu dan kebebasan, antara Islami dan Budaya Populis (Bayat, 2002)

Kondisi dan proyek merupakan aspirasi-aspirasi budaya yang dapat diperbandingkan, bukan berkuat sebagai penyebab. Apapun istilah yang diminati, ketakwaan religius populer di Lhokseumawe, merepresentasikan masyarakat Aceh dalam mengartikulasikan komitmen korektif terhadap gagasan utopia Islam yang berlandaskan syariah. Mereka dengan ketakwaan seperti ini tidak pernah memberikan kepercayaan mereka sepenuhnya secara

berlebihan kepada elit politik/pemerintah, dan terus bereaksi terhadap dogma dan retorika kepentingan elit pemerintah.

Dalam banyak peristiwa, adopsi hukum syariah di Aceh cenderung bersifat simbolis, tanpa penegakan yang serius dan konsisten di sisi pemerintah daerah. Lemahnya penegakan hukum ini telah membuat frustrasi kelompok Islamis yang lebih aktif dan telah mendorong kelompok-kelompok untuk main hakim sendiri. Beberapa anggota dari kelompok yang sama, atau kelompok Islami lain, diketahui telah mengambil manfaat dari situasi ini untuk melakukan pemerasan dengan dalih perlindungan. Kelompok-kelompok milisi ini kerap tampil sebagai Muslim yang taat, mengumandangkan teriakan-teriakan Islami, terkadang secara fisik mengintimidasi komunitas muslim lain yang dianggap bagian dari musuh politik mereka.

Mengingat bahwa konflik yang terjadi secara fundamental bukan merupakan persoalan agama, melainkan persoalan politik, kemakmuran, dan moralitas, maka kemungkinan besar faktor-faktor non-religius akan menentukan bagaimana konflik tersebut akan terselesaikan.

Di Aceh kini, sebagaimana di berbagai tempat lain, benturan besar antara kapitalisme dan komitmen terhadap ketakwaan beragama tidaklah kentara. Agama dapat menawarkan keteduhan bagi orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dan politik serta tanpa perwakilan atau kuasa dalam meraih keadilan. Bagi orang kaya urban yang kritis terhadap keajegan pemerintah, agama dapat berperan sebagai titik berangkat bagi pembangkangan ketika seluruh kran politik resmi telah ditutup. Bagi mereka yang sedang berkuasa, dikelilingi oleh kemiskinan, korupsi, dan kekerasan yang disponsori oleh negara, ketakwaan dapat membantu memulihkan kecemasan tentang status mereka, mengurangi rasa bersalah, atau menetralkan persepsi publik tentang kerakusan diri. Apakah usaha-usaha itu sukses atau tidak, itu persoalan lain.

SIMPULAN

Kenyataan pariwisata yang terjadi Aceh, regulasi *Qanun* Nomor 8 Tahun 2013 belum tersampaikan dengan baik

dan menyeluruh kepada masyarakat. Minimnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, dan keengganan masyarakat untuk mencari tahu mengenai regulasi menyebabkan tidak terlaksananya semua tujuan dan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Aceh melalui *qanun* tersebut.

Makna Islamisasi pariwisata di Aceh tidak bersifat beku ataupun tunggal, dan tak seorang pun dapat mengendalikan maknanya yang beragam dan kadang bertolak belakang. Lebih dari sekadar menggambarkan ketegangan antara hasrat untuk meraih kemakmuran dan penghargaan moral selama proses Islamisasi dalam kepariwisataan, juga penting memahami potensi insiden, konflik, hingga negosiasi dan upaya-upaya rekonsiliasi terhadap pihak-pihak dengan ideologi yang bertentangan. Masyarakat dengan tren aspirasi budaya kepariwisataan sebagai *leisure time*, tidak membutuhkan kehendak religitas sebagaimana dipatutkan oleh pemerintah Aceh dalam *qanun* kepariwisataan di Aceh. Sementara itu, pemerintah Aceh cenderung memandang aspirasi wisata populer pada masyarakat sebagai budaya massa dengan imaji industri hiburan yang 'tidak santun' dan mendukung ragam kemaksiatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada sivitas akademika pada Program Studi Antropologi, FISIP, Universitas Malikussaleh, atas dukungannya terhadap keikutsertaan penulis dalam kegiatan ilmiah ini. Penulis juga berterima kasih kepada saudara Mochammad Wahyu Ghani, S.I.P., M.I.Kom., atas diskusinya yang bermanfaat dalam pengayaan 'halal dan haramnya' kepariwisataan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

(Paper)

- Bayat, Asef. 2002. What is Post-Islamism. *ISIM Newsletter* (16):5.
- _____. 2007a. Islam and Democracy: What is the Real Question?. *ISIM Papers*, 8. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- _____. 2007b. Islamism and the Politics of Fun. *Public Culture*, 19(3/Fall): 433-459.
- Murray, Alison. 1991. "Kampung Culture and Radical Chic in Jakarta". *Review of Indonesian and Malayan Affairs*, 25(Winter): 1-16.
- O'Connor, B. dan Klaus, E. 2000. "Pleasure dan Meaningful Discourse: An Overview of Research Issues", *International Journal of Cultural Studies*, 3 (3): 369-387.

- Pambudy, Ninuk. 2003. "Inul di Dalam Budaya Pop", *Kompas*, 5 Mei.
- Suryakusuma, Julia. 2008. "Interest in a Jilbab?", *Tempo*, 3 (IX), 16-22. September.
- (Buku)**
- Foulcher, Keith. 1990. "The Construction of an Indonesian National Culture: Patterns of Hegemony and Resistance", dalam A. Budiman (ed.) *State and Civil Society in Indonesia*. (p. 301-320). Clayton: Center of Southeast Asian Studies.
- Gerke, Solvay. 2000. "Global Lifestyles under Local Conditions: the New Indonesian Middle Class", dalam Chua Beng-Huat (ed.) *Consumption in Asia: Lifestyles and Identities*. (p. 135-158). London: Routledge.
- Heryanto, Ariel. 1999. "The Years of Living Luxuriously", dalam *Culture and Privilege in Capitalist Asia*. (p. 159-87). London dan Newyork: Routledge.
- Hew, Wai-Weng. 2013. "Expressing Chinese Muslim Preachers", dalam SM Sai dan CY Hoon (ed.), *Chinese Indonesian Reassessed; History, Religion and Belonging*. (p. 178-199). London: Routledge.
- Kokoschka, Alina. 2009. "Islamizing the Market? Advertising, Products, and Consumption in an Islamic Framework in Syria", dalam J. Pink (ed.), *Muslim Societies in the Age of Mass Consumption*. (p. 225-240). Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars.
- Macdonald, Dwight. 1998. "A Theory of Mass Culture", dalam J. Storey (ed.), *Cultural Theory and Popular Culture*. (p. 22-36). Athens: The University of Georgia Press.
- Muzakki, Akh. 2007. "Islam as Symbolic Commodity: Transmitting and Consuming Islam through Public Sermons in Indonesia", dalam P. Kitiarsa (ed.). *Religious Commodifications in Asia: Marketing Gods*. (p. 205-219). London: Routledge
- Pitana, I.G., dan Gayatri, Putu G. 2005. *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-dampak Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Reid, A. 1969. *The Contest for North Sumatra, Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Ricklefs, M.C. 1993. *A History of Modern Indonesia since C1300*. London: Macmillan.
- Strinati, Dominic 2004. *An Introduction to Theories of Popular Culture*. London: Routledge.
- Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi*. Diterjemahkan oleh M. Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiarti, E., dan Purwadi, B. 2010. "Anak Keluarga Korban Konflik Aceh: Collective Memory Masyarakat Aceh". *Laporan Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (Hibah Pekerti)*. Tahun Anggaran 2010. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Van Leuween, Lizzy. 2011. *Lost in Mall: an Ethnography of Middle-class Jakarta in the 1990s*. Leiden: KITLV Press.

Sex Tourism dalam Paradigma Pembangunan Pariwisata Perkotaan

Widyastuti
Perencanaan Kepariwisata ITB
widyastuti.widy22@gmail.com

Abstrak

Dunia industri pariwisata yang mengandalkan jasa, menjadi jembatan yang potensial bagi daerah yang mengalami kemunduran ekonomi kearah peningkatan pendapatan sehingga dapat menjadi devisa daerah/ negara yang berfungsi untuk menaikkan kesejahteraan dan kestabilan pembangunan. Pasangnya arus urbanisasi, menimbulkan berbagai *multiplier* efek dalam pembangunan perkotaan yang salah satu acuannya mengarah pada pembangunan pariwisata. Pariwisata perkotaan, yang pada dasarnya merupakan suatu *sense* jasa yang menjual konsumsi kesenangan/*pleasure* dan tidak mendasarkan pada fungsi pertanian, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi salah satu andalan suatu kebijakan dalam peningkatan pendapatan khususnya dalam koridor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari adanya fenomena *sex tourism* di kota besar terhadap pembangunan pariwisata perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa observasi, wawancara dan studi literatur untuk pengumpulan data. Hasil studi dari penelitian ini mencakup pada pembangunan pariwisata perkotaan, maka muncullah suatu tarikan yang dapat menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung dan membelanjakan uangnya dalam *sense of pleasure* di atmosfer perkotaan. Beragam-macam dari tarikan ini menghasilkan produk yang beragam, salah satunya yakni dengan adanya industri jasa seks yang dikemas dalam industri pariwisata. Ibarat koin yang bermata dua, *sex tourism* hadir sebagai satu bentuk tarikan yang berfungsi sebagai angin segar sekaligus sebagai catatan hitam dalam pembangunan pariwisata perkotaan. Implikasi kedua mata koin ini kemudian berdampak pada sektor ekonomi dan tatanan sosial perkotaan yang multikultur.

Kata Kunci : pariwisata perkotaan, *sex tourism*, industri pariwisata, devisa, pembangunan pariwisata

PENDAHULUAN

Pola keberagaman interaksi dan aktivitas sosial manusia, bermula pada banyaknya percampuran budaya yang dibawa oleh berbagai jenis budaya yang kemudian hidup

dan diadopsi di suatu tempat. Hal ini kemudian bermuara pada iklim yang majemuk, yang mana kemudian dikenal oleh banyak orang sebagai sifat alamiah kota. Merujuk pada sifat alamiah kota yang bersinggungan dengan industri pariwisata ini, menurut Law (1996: 1), bahwa kota merupakan jenis destinasi pariwisata yang paling penting di dunia sejak tahun 1980-an. Dalam fenomena kepariwisataan dunia, pertumbuhan kota dipandang sebagai suatu proses kompleks yang terkait dengan budaya, gaya hidup, dan sekumpulan permintaan yang berbeda terhadap liburan dan perjalanan (Page, 1995: 1).

Dalam industri pariwisata, kota dilihat sebagai suatu destinasi dengan multimotivasi, tidak seperti resor-resor pada umumnya (Law, 1996: 3). Orang-orang datang ke suatu kota dengan memiliki berbagai tujuan, misalnya: bisnis, kegiatan hiburan dan rekreasi, mengunjungi keluarga dan kerabat, atau urusan pribadi lainnya. Seringkali, mereka mengunjungi kota untuk lebih dari satu alasan (Adriani: 2000). Berbagai unsur kehidupan kota ini, kemudian mendatangkan implikasi pada suatu bentuk sifat baru dari turunannya yakni perkotaan, yang melihat bahwa iklim keheterogenitasan ini tidak hanya dalam bentuk ruang (bentuk kota), melainkan sebagai suatu bentuk sifat yang lebih fleksibel, bukan berbentuk geografis atau administrasi.

Kawasan Perkotaan

Di awal telah dijelaskan bahwa kota secara spasial, dapat berarti suatu wilayah dengan letak geografis dan batas administratif yang jelas. Tulisan ini, mengadopsi turunan dari konsep kota tersebut yakni berupa keadaan sifat dari suatu wilayah yang kemudian tidak berupa ruang lagi. Kawasan perkotaan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Pedoman RDTR Kota). Page (1995) mengungkapkan bahwa kawasan perkotaan muncul sebagai akibat dari proses urbanisasi. Selanjutnya, mengacu pada definisi kawasan perkotaan tersebut, maka 'perkotaan' memiliki pengertian yang menunjukkan sifat kekotaan, yaitu yang mempunyai

kegiatan utama bukan pertanian, tetapi permukiman, pusat kegiatan ekonomi dan jasa (Adriani: 2000).

Pariwisata Perkotaan

Mengenai pariwisata perkotaan ini, ada beberapa pendapat para ahli yang merujuk pada aktivitas pariwisata perkotaan, antara lain:

Klingner (2006: 1) mendefinisikan pariwisata perkotaan secara sederhana sebagai sekumpulan sumber daya atau kegiatan wisata yang berlokasi di kota dan menawarkannya kepada pengunjung dari tempat lain.

... "a set of tourist resources or activities located in towns and cities and offered to visitors from elsewhere".

Definisi lain dikemukakan oleh Inskeep (1991: 163) yang menekankan pada peran pariwisata dalam perkotaan sebagai berikut:

... "urban tourism.....a very common form of tourism takes place in large cities where tourism may be important but is not a primary activity of the urban area".

Mullins (1991) juga mengatakan bahwa *tourism urbanisation* sebagai urbanisasi yang didasarkan pada penjualan dan konsumsi kesenangan/*pleasure*. Dalam perkembangannya, *tourism urbanisation* kemudian menumbuhkan bentuk-bentuk khusus dari pariwisata perkotaan. Bentuk umum dari pariwisata yang memanfaatkan unsur-unsur perkotaan (bukan pertanian) dan segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan kota (pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi) sebagai daya tarik wisata. Beberapa poin penting yang diperhatikan dalam pariwisata perkotaan ini, antara lain:

- Pariwisata perkotaan tidak selalu harus berada di wilayah kota atau pusat kota.
- Pariwisata perkotaan dapat berkembang di wilayah pesisir, misalnya, dengan mengembangkan hal-hal yang terkait perkotaan sebagai daya tarik wisatanya.
- Berbeda dengan kota wisata. Kota wisata adalah kota yang memang dibangun untuk pariwisata dan wisatawan, mengandalkan pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian kota.

Konsep pariwisata perkotaan yang saat ini berkembang di dunia sedikitnya ada enam konsep, yaitu *tourist-historic city*, *cultural city*, *resort city*, *fantasy city*, *creative city*, dan *urban ecotourism*. Mengutip dari tulisan Adriani (2000), berikut penjelasan singkat dari masing-masing konsep pariwisata perkotaan tersebut:

Tourist-historic city (kota wisata sejarah)

Konsep kota wisata sejarah merupakan konsep pariwisata perkotaan yang menjadikan sejarah sebagai daya tarik wisatanya. Komponen-komponen dari kota wisata sejarah ini antara lain lingkungan dengan arsitektur sejarah dan morfologi perkotaan, even sejarah dan akumulasi artefak budaya, keberhasilan artistik yang merupakan bahan baku dari konsep ini (Ashworth dan Tunbridge, 1990: 72).

Cultural city (kota budaya)

Konsep kota budaya seringkali diidentikkan dengan kota sejarah atau kota heritage. Konsep kota budaya jauh lebih luas dibandingkan dengan kota sejarah atau *heritage*. Komponen-komponen kota yang menjadi daya tarik wisata utama bagi kota-kota budaya adalah: 1) museum dan wisata *heritage*, 2) distrik-distrik budaya (pecinan, kampung arab), 3) masyarakat etnis, 4) kawasan hiburan, 5) wisata ziarah, 6) trail sastra (Evans dalam Richards dan Wilson, 2007: 61).

Fantasy city

Konsep kota fantasi muncul pada akhir abad ke-19 di Amerika (Page, 2003: 44) di Amerika. Konsep yang paling terkenal adalah Hannigan Fantasy City. Hannigan (1998 dalam Page, 2003: 44-45)) mengidentifikasi enam karakteristik Fantasy City:

1. Fokus pada *themocentricity*, didasarkan pada tema yang ditentukan.
2. *The city is aggressively branded*, tercermin dari strategi pemasaran dan produk-produknya.
3. *Day and night operation is a common feature*, tidak seperti pusat perbelanjaan yang operasi waktu siangnya besar.
4. *Modularisation of products*, di mana keberagaman komponen dirangkai untuk menghasilkan berbagai pengalaman yang lebih luas.
5. *Solipsisicity*, dimana kota secara ekonomi, budaya, dan fisik terpisah dan terisolasi dari lingkungan sekitarnya dalam suatu 'kota ilusi'.
6. *Postmodernity*, di mana kota dibangun dengan teknologi simulasi, realitas virtual, dan sensasi pertunjukan. Kota menarik sumber inspirasi utama dari model Disney, yang secara luas ditiru. Model Disney memunculkan konsep gambar-gambar bergerak dan taman hiburan ke dalam dunia fantasi menggunakan teknologi yang menciptakan kondisi hiperrealitas.

Creative city (new urban tourism) (Richard and Wilson, 2008). Konsep kota kreatif mulai dikembangkan pada tahun 1990 di Inggris dan selalu dikaitkan dengan pariwisata budaya. Kota kreatif merupakan bentuk generasi baru dari pariwisata perkotaan.

Urban ecotourism

Urban ecotourism merupakan konsep pariwisata perkotaan yang berwawasan lingkungan. Konferensi Internasional tentang Urban Ecotourism pada tahun 2004 menghasilkan deklarasi tentang urban ecotourism. Isi deklarasi tersebut menyatakan bahwa *urban ecotourism* dikembangkan untuk tujuan:

- Memulihkan dan mengkonservasi warisan alam dan budaya, termasuk lanskap alam dan keanekaragaman hayati dan juga budaya asli.
- Memaksimalkan manfaat lokal dan melibatkan masyarakat kota sebagai pemilik, investor, tamu, dan pemandu.
- Memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan penduduk tentang lingkungan, sumber daya *heritage*, serta keberlanjutan.
- Mengurangi jejak ekologis.

Berdasarkan pada beberapa definisi konsep pariwisata perkotaan di atas tersebut, maka konsep *sex tourism* pada tulisan ini merujuk pada salah satu aspek konsep pariwisata perkotaan yakni *fantasi city*.

Sex Tourism

Definisi Sex Tourism merujuk pada UNWTO:

Sex tourism as trips organized from within the tourism sector, or from outside this sector but using its structures and networks, with the primary purpose of effecting a commercial sexual relationship by the tourist with residents at the destination.



Gambar 1. Pekerja seks di etalase brothel
Sumber : sexselvesandsociety.wordpress.com

Pada prakteknya, sex tourism merupakan bagian dari suatu bentuk aktivitas transaksi seksual komersial yang melibatkan beberapa aktor, peran aktor dan sistem. Aktivitas ini dikenal juga dengan istilah prostitusi/pelacuran, yang dalam bahasa Inggris disebut *prostitution*. Prostitusi didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Konteks

pelacuran, dalam prakteknya sendiri mengandung tiga unsur yang meliputi: pembayaran, promiskuitas, dan ketidacacuhan emosional (Truong, 1992). Khususnya di Indonesia, pelacuran dianggap sebagai suatu pekerjaan yang tidak sah dan umumnya dianggap miring bagi masyarakat luas (Hull, 1997). Tercatat dalam sejarah, bahwa pelacuran di Indonesia secara tersirat telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan di Jawa (Hull, 1997). Transformasi terjadi pada masa penjajahan ketika pelacuran dilegalkan oleh pemerintah VOC sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan bagi para tentara, dan para pekerja asing yang singgah di nusantara (Ibid).

Dampak Pariwisata

Swarbrooke (1999), bahwa ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari industri pariwisata, yang mana dampak pada masyarakat dalam kehidupan sosial dan juga berpengaruh terhadap alam serta lingkungan.

TABEL 1. DAMPAK PARIWISATA

Dampak	Ekonomi	Lingkungan	Sosial
Positif	- Foreign Exchange Earnings - Contributions To Government Revenues - Employment Generation - Infrastructure Development - Development of Local Economies	-Conservation of important natural areas - Conservation of archeological and historic sites - Improvement of environment - Enchantment of the environment - Improvement of infrastructure - Increasing environmental awareness	- Conservation of cultural heritage -Cross-cultural exchange - Renewal of cultural pride
Negatif	- Leakage - Enclave Tourism - Infrastructure Cost - Increase in Prices (Inflation) - Economic Dependence - Seasonal Characteristics	- Pollution of environment - Waste disposal problems - Damage to archeological and historic pride	- Overcrowding and loss of amenities for residents - Cultural impacts - Social problems

Sumber: Swarbrooke. Sustainable Tourism Management. 1999

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas *sex tourism* sebagai salah satu wisata jasa yang ditawarkan kepada wisatawan, yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan pariwisata perkotaan. Namun di sisi lain, aktivitas *sex tourism* ini juga menjadi salah satu bentuk kriminalitas dan catatan hitam bagi pariwisata perkotaan. *Sex tourism* disini dinilai seperti koin yang memiliki dua sisi dan pisau yang bermata tajam. Kedua sisi koin ini, berimplikasi positif dan negatif bagi tatanan masyarakat dan pembangunan perkotaan. Sementara itu, *sex tourism* juga seperti pisau yang bermata tajam, karena ketabuan bagi sebagian besar masyarakat, yang dalam hal ini merupakan masyarakat Indonesia. Adanya fenomena ini seringkali jarang dibahas untuk dicari solusinya, sehingga *sex tourism* tetap tumbuh dan menjamur, sekalipun telah muncul peraturan daerah yang berusaha untuk menanggulangi dampak dari adanya aktivitas ini. Akan tetapi hal tersebut lebih pada tindakan untuk menghilangkan ruang untuk mengakses wisata jasa ini, bukan pada tindakan untuk mengkoordinir para individu yang terlibat di dalamnya. Komponen yang dijadikan variabel dalam penelitian ini, meliputi aktivitas *sex tourism* di kota-kota besar di dunia maupun di Indonesia, dampak positif dan negatif dari *sex tourism* ini berkaitan dengan pembangunan pariwisata perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang manaciri dari metode kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa teks naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data. Kemudian, data dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dengan pendekatan interpretatif terhadap subjek selanjutnya dianalisis (Denzin dan Lincoln, 2009:2). Objek dari penelitian ini meliputi aktivitas *sex tourism* yang terjadi di beberapa kota-kota besar di Asia, Eropa dan Amerika yang terkenal dengan aktivitas *sex tourism*nya sebagai salah satu faktor penarik pertumbuhan pariwisata perkotaan, seperti Hongkong, Amsterdam, dan lainnya. Sebagai perbandingan, kemudian dikomparasikan dengan kota-kota besar di Indonesia, yang juga terkenal dengan aktivitas *sex tourism*nya sebagai salah satu aktivitas yang menjadi magnet pada pertumbuhan pariwisata perkotaan di Indonesia. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah para pelaku yang terlibat dalam industri *sex tourism*, yang meliputi para pekerja seks, mucikari dan individu lainnya yang terkait dengan aktivitas tersebut. Karakteristik subjek dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan subyek diambil sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Karakteristik tersebut adalah:

individu yang berprofesi sebagai pekerja seks baik yang terkoordinir maupun yang tidak terkoordinir oleh sistem, mucikari atau perantara, dan individu lain yang bersinggungan dengan aktivitas *sex tourism* ini. Jumlah subjek penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, hal ini merujuk pada Poerwandari (2001), bahwa jumlah subjek penelitian Penelitian kualitatif, fokus penelitiannya terletak pada kedalaman dan proses, cenderung dilakukan dengan jumlah kasus yang sedikit. Terkait dengan tema penelitian ini yang juga bersinggungan dengan hal sensitif dan tabu di masyarakat, maka untuk identitas subjek adalah rahasia. Adapun lokasi penelitian untuk pengambilan data primer dalam penelitian ini, peneliti mengambil sample di tiga kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung dan Surabaya. Alasan pada penentuan ketiga kota besar di Indonesia ini, terkait dengan subjektivitas peneliti, merujuk bahwa ketiga kota ini memiliki lokalisasi maupun bekas lokalisasi yang cukup dikenal oleh masyarakat luas, dan ketiganya merupakan tiga kota terbesar di Indonesia.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dengan pengambilan data primer dan data sekunder. Data Primer pada penelitian ini, menggunakan teknik observasi, merujuk pada Moleong (2005), berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan orang-orang yang diamati, observasi dibedakan menjadi dua jenis, yakni observasi partisipan dan observasi non partisipan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk observasi non partisipan dimana peneliti hanya mengamati tingkah laku subjek tanpa ikut aktif dalam kegiatan subjek, karena peneliti hanya sebagai pengamat. Observasi ini bertujuan untuk cross-check fenomena di lapangan dan untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas *sex tourism* sebagai salah satu faktor pembangkit dari pariwisata perkotaan. Sementara untuk pengambilan data sekunder, dilakukan dengan studi literatur, yang bertujuan untuk pengambilan data tanpa mengamati langsung dan sebagai penunjang dari data primer. Studi literature bersumber dari buku, jurnal/artikel dan dari media internet. Studi literatur dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas *sex tourism* di beberapa kota besar di Asia, Eropa dan Amerika, terkait keeksistensinya sebagai salah satu faktor penarik bagi pariwisata perkotaan.

Instrumen dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara, berupa pertanyaan terbuka (*interview guide*). Terkait dengan penelitian kualitatif, yang mana peneliti juga termasuk sebagai salah satu instrumen penelitian, hal ini seperti dikemukakan oleh Nasution (1990), bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah peneliti

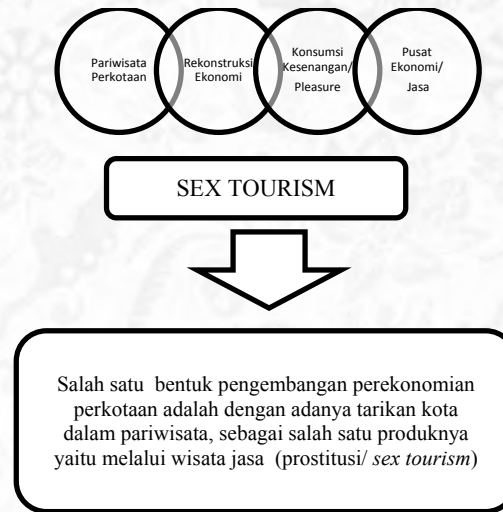
sebagai instrumen utama, didukung pedoman wawancara dan catatan kecil observasi (*field notes*). Pedoman wawancara sebagai pertanyaan terbuka dikembangkan dan diperdalam di lapangan untuk *cross check*.

Pada bagian analisis data penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dan interpretatif. Hal ini merujuk bahwa analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengatur secara sistematis pedoman wawancara, data kepustakaan, kemudian memformulasikan secara deskriptif, selanjutnya memproses data dengan tahapan reduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan. Miles dan Herberman (dalam Putra, 2009: 53).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata Perkotaan dan Industri Jasa

Melihat pada sudut pandang suatu iklim perkotaan, yang mana di dalamnya hidup berbagai macam heterogenitas masyarakat yang saling berbau satu sama lain, kemudian terjadinya interaksi sosial diantara mereka. Pembangunan pada dasarnya memerlukan sumber daya yang bersifat sinergis dan saling menopang, selain itu juga diperlukan sumber pendapatan yang mampu menjadi dasar energi bagi suatu kota atau daerah dalam penghidupannya. Salah satu bentuk pengembangan suatu ruang untuk segi penghidupannya adalah dengan menghasilkan suatu tarikan yang mampu menjadi magnet bagi pengunjung atau orang luar agar berkunjung dan memberikan dampak positif. Merujuk pada sektor pariwisata, dalam hal ini orang luar yang dimaksud adalah para wisatawan yang datang ke suatu tempat untuk menghabiskan energinya berupa materi yang kemudian berdampak pada sisi positif bagi perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Tulisan ini mengangkat isu yang dilematis dalam penghidupan pariwisata perkotaan, yakni merujuk pada jenis industri jasa yang tidak mengandalkan pada sektor pertanian maupun alam, melainkan pada bentuk konsumsi kesenangan/ *pleasure* yang kemudian menjadi sumber pendapatan suatu daerah/ kota juga masyarakatnya. Jenis industri yang mampu menarik wisatawan dengan magnet yang kuat dalam koridor pariwisata perkotaan ini, merujuk pada industri jasa wisata seks (*sex tourism*) yang berkembang di beberapa tempat baik di kota, daerah pinggiran, maupun pesisir yang mengandalkan sifat pariwisata perkotaan sebagai sumber penghasilannya. Dalam konteks restrukturisasi perekonomian global dan deindustrialisasi di beberapa kota di dunia, pariwisata dan pengembangan pariwisata berperan penting dalam memperbaiki perekonomian kota yang mulai menurun (Law, 2000).



Gambar 2. Alur keterkaitan pariwisata perkotaan dengan *sex tourism*

Sumber: Analisis peneliti

Sex Tourism Sebagai Suatu Bentuk Tarikan Pariwisata Perkotaan

Pengembangan pariwisata perkotaan bagi suatu tempat/ kawasan memerlukan suatu bentuk tarikan (magnet) berupa produk wisata jasa yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung dan datang ke tempat tersebut. Merujuk pada sifat perkotaan sendiri yang mana terdapat segala macam aspek yang heterogen baik dari segi masyarakat, budaya dan tatanan sosial. Maka salah satu upaya yang relevan dilakukan adalah dengan mengembangkan diversifikasi produk yang tidak homogen dan “menjual” ke wisatawan. Salah satu bentuk tarikan yang dapat dikembangkan yakni dengan produk wisata jasa yang mampu menarik massa wisatawan dengan mudah dan efisien. Segala macam bentuk kebutuhan sifat “perkotaan” ini kemudian bermuara pada pariwisata perkotaan. Diagram di bawah ini, merangkum bagaimana beberapa aspek yang disebutkan sebelumnya saling berkaitan dengan pariwisata perkotaan.



Gambar 3. Keterkaitan faktor dengan pariwisata perkotaan

Sumber: Analisis Peneliti

Diversifikasi produk dalam menarik perhatian wisatawan merupakan salah satu bentuk sarana yang diupayakan produsen (pemilik modal/ pemerintah setempat) untuk dapat menarik massa para wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat tersebut. Produk pariwisata yang umumnya *intangible*, menjual beraneka macam jasa atau kesenangan yang variatif dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Salah satu bentuk jasa dalam industri pariwisata adalah adanya transaksi prostitusi yang di dalamnya terdapat aktivitas *sex tourism*. Produk jasa ini, telah menjadi salah satu bentuk tarikan awal atau bahkan menjadi ikon pariwisata sebuah tempat dalam menarik para wisatawan. Penelitian Truong (1992) mengenai industri pariwisata seks di Thailand, menjelaskan bahwa industri ini telah mampu menarik sejumlah besar wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung dan menghabiskan *leisure time* nya di Thailand. Hal ini berdampak pada penghasilan faktor ekonomi daerah setempat dan para pekerja yang bergantung pada industri ini.

Sex Tourism di Indonesia vs Sex Tourism di Dunia

Sex tourism di dunia pariwisata sendiri, merupakan salah satu bagian dari industri jasa komersial yang merujuk pada unsur *pleasure/* kesenangan. Dengan demikian, melihat aspek dari sifatnya maka *sex tourism* masuk kepada sifat pariwisata perkotaan (*urban tourism*) yang menjual konsumsi kesenangan dan tidak ada kaitannya dengan lahan pertanian. Pada beberapa kasus, *sex tourism* jarang diangkat untuk menjadi salah satu hal yang serius dan perlu dikritisi, mengingat bahwa hal ini merupakan suatu ketabuan yang sudah menjadi “rahasia umum”, karena dianggap bertentangan dengan norma asusila dan norma agama, terlebih bagi budaya timur, termasuk Indonesia. Di Indonesia, *sex tourism* tumbuh menjamur dan menjadi salah satu bentuk ladang mata pencaharian bagi beberapa individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, tidak hanya bagi pekerja seks. Berbeda dengan di beberapa Negara di Eropa seperti Belanda dan Polandia misalnya, yang mana industri *sex tourism* legal dan para

pekerja seksnya menjadi salah satu profesi yang legal, sehingga pengawasan dan kontrolingnya lebih terjaga. Hal ini berfungsi berpengaruh terhadap kontroling sosial, kriminalitas dan penyebaran penyakit menular akibat aktivitas tersebut yang lebih terpantau dan dapat diantisipasi. Sementara di Indonesia, *sex tourism* lebih terkesan “terselubung” dan *underground*. Industri ini tumbuh menjamur tanpa pengawasan dan kontroling, di satu sisi karena beberapa aturan pemerintah daerah sudah menghapuskan adanya lokalisasi, sehingga kini kemudian dianggap ilegal. Hal ini merujuk bahwa aktivitas *sex tourism* ini bertentangan dengan norma agama dan asusila, bertentangan dengan budaya timur. Sisi lain, aktivitas ini tetap ada dan tumbuh makin subur tanpa pengawasan yang ketat. Undang-undang terkait *sex tourism* di Indonesia, merujuk kepada beberapa aturan pemerintah daerah terkait penghapusan lokalisasi dan undang-undang pornografi yang menjadi dasar pijakan terkait aktivitas ini, tetapi, penghapusan dan ketabuan tersebut justru menjadi boomerang yang berimplikasi lebih negatif, karena kontroling sosial bagi masyarakat, termasuk individu lebih tidak terkendali dan seperti tidak mendapat perhatian. Sebagai salah satu buktinya adalah dengan semakin mudanya usia anak yang dilacurkan dari tahun ke tahun (ECPAT, 2013). Bisnis prostitusi anak, trafficking anak yang dewasa ini masuk ke dalam salah satu kriminalitas dalam jaringan kejahatan internasional (karena bertentangan dengan HAM), melibatkan korban yang makin muda usianya. Sebagian korban yang merupakan usia di bawah 18 tahun ini, merupakan perempuan yang kemudian dijadikan komoditas untuk bisnis *sex tourism*, baik yang terorganisasi maupun yang tidak terkoordinasi. *Sex tourism* ini hidup dan tumbuh dalam iklim perkotaan dan merupakan magnet yang kuat untuk menarik wisatawan datang berkunjung ke suatu tempat ke suatu tempat tersebut. *Sex tourism* di Negara-negara Eropa, Asia dan Amerika tidak selalu murni menjual hanya sebatas seks, akan tetapi selalu disisipkan pada industri hiburan yang lain ataupun pada wisata jenis lain dengan tujuan untuk menjadi nilai lebih bagi minat dan ketertarikan wisatawan. Begitu juga halnya dengan yang terjadi di Indonesia, bisnis ini menjadi parasit yang menempel di sektor jasa lain, termasuk pada jenis pariwisata lainnya. Bagaimanapun, permintaan pasar akan bisnis ini semakin meningkat dan selalu dibutuhkan.

Sex Tourism: Angin Segar Pariwisata Perkotaan

Davidson dan Taylor (1994) pada penelitiannya pada LSM ECPAT, mengenai *sex tourism* di Thailand menerangkan bahwa pada tahun 1989, lebih dari empat juta wisatawan mengunjungi Thailand, dan angka ini kemudian meningkat pesat selama dekade terakhir. Pada tahun 1999, sekitar 8.652.000 wisatawan mengunjungi Thailand, dan pada tahun 2002 jumlah itu meningkat

menjadi sekitar 10.873.000. Wisatawan yang mengunjungi Thailand pada setiap tahunnya, sekitar 60% adalah laki-laki, dan LSM memperkirakan bahwa 70% dari wisatawan laki-laki di Thailand adalah wisatawan yang mencari “fantasi” *sex tourism* dalam transaksinya ke negara tersebut. Tidak hanya di Asia Tenggara dengan Thailand sebagai salah satunya, fenomena *sex tourism* juga telah mengangkat beberapa “ikon” pariwisata jenis ini pada beberapa negara lain seperti Brazil, negara-negara di Afrika dan Pulau Karibia (Davidson dan Taylor, 1994).

Sex tourism dari sisi positifnya, merupakan salah satu bentuk pendongkrak perekonomian beberapa negara miskin-berkembang untuk pemenuhan devisa negara/daerah, sehingga tetap dipertahankan dan menjadi suatu bentuk komoditas utama. Tidak hanya di negara berkembang, bahkan negara-negara maju di Eropa seperti di Belanda misalnya, menjual *sex tourism* sebagai suatu bentuk lifestyle bagi setiap wisatawan yang datang. Beberapa negara di Asia dan Eropa memulai “karir” pariwisata perkotaannya dari bisnis *sex tourism*. Dampak positif tersebut terangkum dalam beberapa point berikut ini:

- Pajak yang besar dari usaha ini, masuk sebagai devisa negara. Berikut beberapa usaha sejenis yang dikenal “hitam”. Contoh: kasino di Vegas, *sex tourism* di Thailand dan beberapa negara berkembang di Amerika Selatan. (Altindag, 2013) (Truong, 1992) (Hull, 1997).
- Pembangunan infrastruktur negara berkembang mengandalkan dari pajak dari usaha ini (Truong, 1992).
- Upah yang besar bagi para penyalur di usaha ini, sehingga bisa berinvestasi pada usaha jenis lain serupa property.
- Beberapa negara mempertahankan *sex tourism* di wilayahnya untuk menarik wisatawan datang, sekalipun pelaku pekerja seks nya bukan dari lokal negara tersebut (*sex tourism* kelas atas)

***Sex Tourism* Dalam Pariwisata Perkotaan: Suatu Momen Yang Dicari!**

Selain dampak positif yang dihadirkan wisata jasa *sex tourism* dalam atmosfer kehidupan perkotaan, dalam dunia pariwisata internasional, kedatangan wisatawan mancanegara ke suatu negara lain, selain karena urusan pekerjaan atau lainnya, juga mencari eksplorasi dari jasa *sex tourism* di suatu negara tersebut. Merujuk pada kutipan dari *Annals of Tourism Research*, Vol. 26, No. 2, pp. 251- 266, 1999.

...In contrast to tourists visiting destinations where they seek sexual gratification, even less is known about prostitutes traveling to their workplace. Even so a large number of {{internationals}} are working in strip joints, massage parlors, brothels, and walking the streets in most countries (Leheny 1995; Maurer 1991; Schmitz 1987b; Symanski 1981). Often they are sought by sex seekers and brothel owners, as they providean {{exotic}}touch. (Hanson1997)

...that all the motivations for holiday taking—relaxation, fantastical escape, family bonding, adventure, doing something different—y apply equally to visiting a sex worker... (Ryan, 2000)

Dilema *Sex Tourism*

Sex Tourism/ Prostitution : Catatan Hitam Pariwisata

Pembahasan sebelumnya, melihat pada dampak positif yang dihadirkan oleh *sex tourism* sebagai suatu bentuk industri jasa yang menjual *pleasure* kepada konsumennya dan sebagai sumber devisa bagi pariwisata perkotaan. Selanjutnya pembahasan berikut akan melihat bagaimana perkembangan *sex tourism* dalam atmosfer pariwisata perkotaan yang kemudian memberi segenap ruang negatif yang berimbas pada struktur sosial dan kriminalitas.

Mengutip dari Opperman (1999), mengenai tarikan pariwisata dengan produk *sex tourism* di negara-negara Eropa dan negara berkembang, bahwa bentuk industri pariwisata jasa jenis ini, erat kaitannya dengan adanya ketergantungan antara suatu bentuk hubungan korelasi antara wisatawan-pelaku usaha (pekerja seks/ germo).

On one side are those that intend to reveal the male sex tourist flows from the developed to the developing countries. Very often they highlight child exploitation and/or place sex tourism in the context of the exploitation of developing countries .

(Ackermann and Filter 1994; Graburn 1983; Latza 1987; Maurer 1991; Meyer 1988; Launer 1993; O|Grady 1992; Reinhardt 1989; Renschler 1987a; Schoning-Kalendar 1989; Thiemann 1989). Kondisi ini kemudian digambarkan dalam ilustrasi berikut ini.



Gambar 3. Korelasi antara Prostitusi dan *Sex Tourism*
Sumber: Martin Oppermann (*Annals of Tourism Research*, Vol. 26, No. 2, pp. 251-266, 1999)

Pada beberapa penelitian dan makalah ilmiah yang membahas mengenai *sex tourism* dalam industri pariwisata, menerangkan bahwasanya industri jasa serupa ini menjadi sangat penting sebagai suatu bentuk “magnet” yang mampu menarik para wisatawan untuk datang berkunjung. Sisi lain, industri ini juga seringkali menjadi catatan buruk yang merusak citra positif tempat tersebut. Beberapa hal penting yang berkaitan antara *sex tourism* dengan keberadaan suatu tempat dan industri pariwisata, adalah sebagai berikut:

- Setiap Kota besar memiliki tempat lokalisasi. Baik di negara berkembang maupun di negara maju.
- Beberapa Lokalisasi legal, diakomodir negara/daerah dan dikenai pajak
- Beberapa lokalisasi legal sering ada sidak dan pungutan liar di luar pajak
- Para “oknum” nakal yang memungut “upeti” dari setiap lokalisasi secara ilegal
- Beberapa lokalisasi kemudian ditutup dan menjadi ilegal. Hal ini berimbas pada penyebaran spot prostitusi dan tidak adanya kontrol terhadap aktivitas ini maupun para pelaku di dalamnya.
- Adalah tidak mungkin memerangi hal ini secara menyeluruh bahkan sampai ke akar
- Baik *seks tourism* maupun prostitusi selalu menjadi benalu yang “dibutuhkan” dan menempel pada usaha induk.

***Sex Tourism* sebagai Suatu Bentuk Kriminalitas?**

Sebagai sebuah produk jasa yang juga memiliki implikasi negatif pada suatu tatanan sosial, *sex tourism* tidaklah hadir secara otonom. Industri ini kerap kali melibatkan beberapa investor modal yang juga memiliki kepentingan dan bergerak di bidang usaha lain (Truong, 1992). Serupa dengan hal tersebut, *sex tourism* tidaklah hanya bersifat lokal dan berdiri di satu daerah saja. Jaringan bisnis ini telah saling berkaitan seperti rantai dan mengakar dengan skala kepentingan yang lebih besar. Senada dengan penelitian Oppermann (1999), bahwasanya industri ini melibatkan jaringan yang luas dan juga saling *memback-up* satu sama lain. Industri ini juga memiliki multi rantai dengan industri lain seperti bisnis hiburan malam, peredaran narkoba, trafficking yang melibatkan para distributor (germo) mulai dari skala kecil sampai pada mafia kelas atas. Adanya bentuk sistem penguasaan sekelompok orang yakni yang diposisikan sebagai para “bos” terhadap para pekerja langsung (pekerja seks misalnya) dalam industri ini, memperlihatkan adanya eksploitasi para kaum marginal atas yang dominan. Selain itu, keterkaitan *sex tourism* dengan bisnis peredaran narkoba yang melibatkan para oknum aparat “pemerintah” dan para mafia yang saling bersinggungan, turut melahirkan suatu bentuk kriminalitas baru dalam kehidupan sosial. Hal ini tentu saja mencoret citra positif pariwisata perkotaan di tempat tersebut.

Sex tourism identik dengan eksploitasi kaum marginal, individu maupun kelompok. Baik *sex tourism* maupun prostitusi selalu melibatkan multi rantai yang terkait dengan usaha lainnya, seperti: perjudian, peredaran narkoba, human trafficking dan pembunuh bayaran.

Beberapa bentuk aktualisasi budaya menolak *sex tourism* di daerahnya, sebagai suatu “*image*” yang kotor karena bertentangan dengan pola hukum normatif dan nilai luhur agama setempat. Adanya ketidakseimbangan pola upah dalam sistem kerja ini (Truong, 1992)

Razia yang berkaitan dengan usaha ini, hanya bersifat formalitas dan hanya menyisir pelaku usaha ini di tingkat bawah (pinggir jalan) dan melindungi yang lebih “*high class*”.

Mengenai kaitan antara *sex tourism* dengan bentuk kriminalitas ini, berikut bentuk studi kasus yang terjadi di negara-negara Eropa. Tabel berikut ini menjelaskan hasil kuantitatif dari beberapa kasus kriminalitas dari pariwisata perkotaan di beberapa negara Eropa, yang mana *sex tourism*/ prostitusi adalah bagian salah satunya.

Table 1: Summary Statistics

Variable	N	Mean	Std. Dev.
Tourism Revenue per 10 residents	239	4,700.99	6,435.02
Tourists per 10 residents	248	7.38	7.37
Violent crime rate*	249	212.70	215.74
Homicide rate*	212	3.39	4.32
Rape rate*	257	7.05	5.81
Robbery rate*	257	70.16	70.43
Assault rate*	253	130.62	183.05
Share of population in urban areas	258	67.26	11.46
Hospital beds per 1,000 residents	258	6.71	2.26
GDP per capita	258	19,879.49	17,983.94
Exchange Rate	258	67.10	205.17
Consumer price index	258	79.19	19.93

Summary statistics pertain to 35 European countries for the time period between 1996 and 2003. Countries are listed in Table 2. The table presents summary statistics of observations (country-years) that enter into the regressions at least once. The means of the variables of interest for the relevant sample are provided for each regression in the output tables.

* Definitions of crimes: All crime rates are per 100,000 residents of a country. Homicide: intentionally killing of person; Rape: sexual intercourse with a person against their will; Robbery: stealing with (threat of) force; Assault: inflicting bodily injury to another person. Violent crime rate is the sum of homicide, rape, robbery and assault rate

Gambar 4. Tabel jumlah statistik kriminalitas pariwisata perkotaan di negara-negara Eropa
Sumber: Altindag, 2013

Selain itu, berikut merupakan ulasan beberapa studi ilmiah mengenai dampak dari kriminalitas yang melibatkan pariwisata perkotaan, yang mana *sex tourism*/ prostitusi menjadi salah satu bagian dari penyumbang masalah tersebut.

The impact of crime on tourism is economically significant. For example, for an average country with a population of 25 million, a 10% increase in aggregate violent crime rate leads to about \$140 million (in 2000 dollars) decline in international tourism revenue. Using Siegfried and Zimbalist (2000)'s locally-owned entertainment venue multiplier of 1.5 as a lower bound, the economic impact of such an increase in violent crime rate is estimated to be at least \$200 million. (Altindag, Duha T. *Crime and International Tourism*. 2013. Forthcoming in the Journal of Labor Research)

Kriminalitas yang diakibatkan oleh adanya industri *sex tourism* ini selalu menyeret hukum dan mengambil perhatian pada tatanan politik. Beberapa negara-negara di Eropa dan Asia menganggap hal ini serius karena seringkali *sex tourism* melibatkan anak-anak untuk menjadi pekerja seks, selain itu hukum yang melindungi anak-anak di bawah umur ini seringkali tumpul karena usia mereka yang disamakan. Serupa dengan negara-negara lain, Di Hongkong sebagai salah satu negara maju yang ada di Asia timur, *sex tourism*/ prostitusi juga ikut mengambil andil dalam terjadinya kriminalitas di negara tersebut.

Crime then is a threat to social order and development as well as a problem of individual pathology or risk. The level of investment by the state in "law and order" reflects

the political salience of public order and crime issues. Hong Kong supports a relatively large public and private policing establishment. In the last two decades about 12 percent of annual government expenditure was devoted to the maintenance of security, an outlay that is exceeded only by spending on health and education.

Against lawful authority [escape, resist arrest, false report]	3599	4.4	959	1.3
Serious Immigration offences	1741	2.1	2072	2.9
Criminal damage	4876	6.0	5883	8.2
Disorder/Fighting	1195	1.4	1235	1.7
Unlawful Society	1041	1.3	906	1.3
Misc. Crimes [lending, gambling, public order]	1185	1.4	1276	1.8
Preventive Crime [loitering, weapons, pawning]	3763	4.6	1019	1.4
Other Crime	24308	29.2	17317	24.1
All Crime	81808	100	71962	100
Detected	39170	(47.9)	33139	(46.2)
All crime rate per 10000	1438.7		1076.1	

Table 1a: Recorded "minor" offences

	1989		1998	
	No.	%	No.	%
Minor Narcotics [possession]	3775	6.8	6719	14.9
Prostitution related	233	0.4	987	2.2
Pornographic literature	not available	not available	1314	2.9
Harwiking	5294	9.5	6427	14.3
Obstruction	26040	46.9	10949	24.4
Common Assault	not available	not available	1469	3.3
Minor Immigration	not available	not available	4050	9.0
Drunk and Disorderly	not available	not available	329	0.7
Other minor offences	18751	33.8	11634	25.9
All "Minor" Offences	55446	100	44952	100

Tabel 2. Angka Kriminalitas di Hongkong tahun 2000
Sumber : Dr. Roderic Broadhurst (*Working paper prepared in part for the Hong Kong Social Services Council - Social Indicators Project 2000*)

I.

SIMPULAN

Sex tourism tumbuh dan berkembang pada iklim perkotaan dan telah mampu menghasilkan tarikan-tarikan yang besar bagi para wisatawan yang berdampak pada kriminalitas dan beberapa aktivitas yang bertentangan dengan hukum normatif lainnya (seperti *trafficking*, perjudian, pencurian, pemerkosaan, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, Sisi lain, *sex tourism* ini juga dibutuhkan sebagai salah satu faktor penarik bagi pariwisata perkotaan untuk sumber devisa daerah dan sebagai sarana penghidupan perekonomian bagi masyarakat sekitar.

Pembangunan pariwisata perkotaan pada dasarnya juga berfungsi sebagai daya tarik suatu daerah untuk dikenal ke publik dan sebagai suatu bentuk branding. Memang angka kriminalitas di suatu tempat tidak selalu karena dampak pariwisata, yang di dalamnya termasuk *sex tourism*. Namun, pariwisata menjadi salah satu bagian yang berperan besar dalam perkembangan suatu kota.

DAFTAR PUSTAKA

(Paper)

- Altindag, Duha T. 2013. Crime and International Tourism. AUWP 2014-01.
- Broadhurst, Roderic. 2000. Working Paper Prepared in Part for The Hong Kong Social Services Council - Social Indicators Project. HongKong.
- Davidson and Taylor. 1994. Sex Tourism in Thailand. Research paper for the Department of Sociology, University of Leicester, U.K., published by ECPAT.
- Eadington, W.R., 1991. "Economic and Tourism" dalam *Annals of Tourism Research* (8) 41 - 56.
- Frechtling, Douglas C. 2010. The Tourism Satellite Account "A Primer". *Annals of Tourism Research* Vol. 37, No. 1, pp. 136-153. USA: The George Washington University.
- Oppermann, Marthin. 1999. *Annals of Tourism Research*, Vol. 26, No. 2, pp. 251-266. Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

(Buku)

- Hull, Terrence., Endang S, Gavin W. Jones. 1997. Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lean, William. 1969. *Economics of Land Use Planning: Urban and Regional*. London: The Estates Gazette Limited.
- Muhammad Nasir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Murray, Allison. 1994. Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta. Jakarta: PT. Pustaka LP3S.
- Ryan, Christ. 2003. "Recreational Tourism". Great Britain: the Cromwell Press.
- Sinclair, M.T. 1997. *Gender, Work, and Tourism*. London and new York: Routledge.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Swarbrooke. 1999. *Sustainable Tourism Management*. New York : CAB International Publishing.
- Taylor, Jacqueline Sanchez edited by Stroma Cole and Nigel Morgan. 2010. *Tourism and Inequality : Problems and Prospects*. CAB International.
- Ryan, Chris and C Michael Hall. Sex tourism: marginal people and liminalities. 2000. Routledge, London. Paperback, ISBN 0-415-19510-1.
- Truong, Thanh Dam. 1992. Sex, Uang dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran Asia Tenggara. Jakarta: LP3S
- Yoeti, Oka. A. 2008. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Kompas.

**STRATEGI PROMOSI PARIWISATA KOTA BANDUNG.
(Studi Kasus Aktivitas Bandung Creatif City Forum (BCCF) Dalam melakukan Promosi
Pariwisata Kota Bandung Melalui Industri Kreatif)**

Iwan Koswara
Duddy Zein
Manajemen Komunikasi FIKOM UNPAD
iwankoswara17@gmail.com

Abstrak

Industri pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi suatu negara dalam mendorong peningkatan pendapatan devisa. Begitupun dengan Indonesia, industri pariwisata merupakan sektor vital yang menjadi harapan untuk peningkatan pendapatan negara. Sejalan dengan itu Kota Bandung sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Barat, tentu saja tidak ketinggalan dalam melakukan promosi wisata ini. Di bawah kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil, geliat Kota Bandung ini semakin gencar dan ekspresif untuk terus mengkampanyekan Bandung sebagai destinasi pariwisata. Kota Bandung yang sarat dengan SDM yang inovatif dan kreatif, telah banyak memunculkan industri-industri kreatif, dan salah satu komunitas yang selalu aktif dan kreatif mengusung industri kreatif ini adalah komunitas Bandung Creatif City Forum (BCCF). Berdasarkan fenomena inilah penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan tujuannya adalah untuk mengetahui: 1). Strategi apa yang diterapkan BCCF dalam melakukan promosi pariwisata melalui Industri kreatif, 2). Kebijakan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan promosi pariwisata melalui Industri Kreatif 3). Bagaimana implementasi kegiatan promosi pariwisata Kota Bandung yang dilakukan oleh BCCF. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan analisis kajian yang digunakan adalah studi kasus berdasarkan metode, data, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas BCCF, sangat menunjang sekali terhadap pengembangan industri-industri kreatif di Kota Bandung. Ini terbukti dengan bertambahnya wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke Kota Bandung, pembangunan berbagai jenis usaha industri kreatif semakin banyak, peluang tenaga kerja semakin bertambah, serta sarana prasarana terus diperbaiki dan dipersiapkan untuk menunjang aksesibilitas pariwisata.

Kata kunci: Strategi Promosi, Pariwisata, BCCF, Industri Kreatif, Bandung

PENDAHULUAN

Daya saing antar negara sangat tinggi terutama pada era globalisasi saat ini. Forum ekonomi dunia atau *The World Economic* memberikan pengumuman pada Mei 2015 mengenai daya saing pariwisata Indonesia yang berhasil naik ke peringkat 50 dari 141 negara yang sebelumnya menempati posisi 70 di tahun 2013. Peningkatan pariwisata Indonesia dilihat dari jumlah kunjungan, yang mana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Pebruari 2015 mencapai 786,7 ribu kunjungan atau naik 11,95% dibandingkan jumlah kunjungan wisman Pebruari 2014, yang tercatat 702,7 ribu kunjungan dan jika dibandingkan dengan Januari 2015, jumlah kunjungan wisman Pebruari 2015 naik sebesar 8,80% Ayni dan Alhazami (2016). Pembangunan Indonesia menitikberatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor industri terutama industri pariwisata. Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Sektor pariwisata harus terus ditingkatkan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pendorong laju pertumbuhan ekonomi, pariwisata juga memiliki penawaran yang cukup besar dari sektor pasar. Pariwisata memiliki fungsi sebagai pasar, antara lain sebagai pasar primer, pasar sekunder, dan pasar tersier. Pasar primer merupakan pasar utama dan mempunyai peran paling penting bagi perkembangan pariwisata, yakni memenuhi keinginan dan kebutuhan wisatawan terhadap unsur pokok pariwisata. Pasar yang dimaksud mencakup pasar akomodasi, pasar transportasi, pasar biro perjalanan, pasar pemandu wisata, serta pasar atraksi atau pertunjukan wisata.

Sementara itu pasar sekunder juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya memenuhi keinginan dan kebutuhan wisatawan terhadap unsur pendukung pariwisata. Pasar ini meliputi pasar barang cinderamata, penukaran uang, rental kendaraan, juga asuransi perjalanan. Sedangkan yang dimaksud dengan pasar tersier adalah kualitas peningkatan layanan pada wisatawan. Pasar tersier ini meliputi jasa fotografi,

buku panduan wisata, pengiriman barang, serta perhotelan Arifin dan Gemiharto (2016).

Besarnya potensi pariwisata yang kita miliki tentu harus diimbangi dengan kualitas SDM yang tinggi dan pengelolaan pariwisata. Hal ini penting demi terciptanya pariwisata sebagai pengembangan potensi ekonomi dan budaya yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, tidaklah mudah dalam pengelolaan sektor pariwisata ini, pengelolaan pariwisata modern menuntut manajemen bisnis yang profesional. Dalam manajemen pariwisata modern seluruh hal yang terkait dengan pariwisata harus dipetakan berdasarkan jenis usaha yang dapat dikelola dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut, Kota Bandung sebagai salah satu Kota dan Ibu kota Provinsi Jawa Barat, yang banyak melahirkan insan-insan inovatif dan kreatif, telah membangun suatu komunitas yang bergiat dalam sektor industri kreatif, yakni Bandung Creatif City Forum (BCCF) atau perkumpulan komunitas kreatif kota Bandung adalah sebuah forum dan organisasi lintas komunitas kreatif yang dideklarasikan dan didirikan oleh berbagai komunitas kreatif Kota Bandung pada tanggal 21 Desember 2008. Sebagai organisasi resmi, BCCF telah menjelma menjadi sebuah organisasi mandiri yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan komunitas kreatif di Kota Bandung khususnya. Lahirnya BCCF ini tidak lepas dari campur tangan Walikota Bandung sebagai penggagas dan sekaligus ketua pertama yang memimpin komunitas tersebut sebelum terpilih menjadi Walikota Bandung periode 2013-2018. Di mana aksesibilitas BCCF ini memiliki peran penting dalam menunjang aspek pariwisata Kota Bandung (BCCF, 2015).

Dalam situasi kompetisi sector pariwisata yang semakin tinggi, Kota Bandung dituntut untuk meningkatkan daya saing dari semua aspek, karena dengan meningkatkan daya saing ini, Kota Bandung diharapkan dapat menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Bandung. Dengan demikian tentunya gerak langkah atau aktivitas BCCF, sangat diharapkan sekali dalam mendongkrak sektor pariwisata ini, sebagai salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Oleh karena itu, penulis memandang penting tentang keberadaan BCCF, dalam kiprahnya bersama pemerintah Kota Bandung untuk mengembangkan program pariwisata Kota Bandung. Berdasarkan hal ini pula, penulis merumuskan permasalahan kajian ini yakni “Bagaimana Strategi BCCF dalam mempromosikan Pariwisata Kota Bandung melalui industri kreatif”. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui: 1). Strategi apa yang diterapkan BCCF dalam melakukan promosi pariwisata melalui Industri Kreatif, 2). Kebijakan apa yang dilakukan Pemerintah

Kota Bandung dalam melakukan promosi pariwisata Kota Bandung melalui Industri Kreatif 3). Bagaimana implementasi kegiatan promosi pariwisata Kota Bandung yang dilakukan oleh BCCF.

KAJIAN TEORI

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas. Berkelanjutan diartikan sebagai suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumberdaya yang terbarukan. Pesan besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan sumberdaya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta dan kreativitas. Dalam ekonomi kreatif itu sendiri terdapat bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif (Departemen Perdagangan RI, 2008). Menurut Howkins (Warta Ekonomi, No.12/Tahun XX/9 Juni 2008) ekonomi kreatif merupakan segala kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas (kekayaan intelektual), budaya dan warisan budaya maupun lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Ekonomi kreatif merupakan 1). Pengembangan konsep berdasarkan kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 2). Pemanfaatan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan bahkan tak terbatas, yaitu: 1). Ide, 2). Gagasan, 3). Bakat atau Talenta, dan 4). Kreativitas (Bidang Perekonomian Pemkot Bandung 2015). Simatupang (2007) menjelaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan sistem kegiatan lembaga dan manusia yang terlibat dalam produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang bernilai kultural, artistik, dan hiburan. Pelanggan mempunyai ikatan estetika, intelektual, dan emosional yang memberikan nilai terhadap produk kreatif di pasar (Bappeda Kota Salatiga, 2010). Jerusalem (2009), menjelaskan bahwa industri kreatif adalah industri yang mempunyai keaslian dalam kreatifitas individual, ketrampilan dan bakat yang mempunyai potensi untuk mendatangkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja melalui eksploitasi kekayaan intelektual (Bappeda Kota Salatiga, 2010). Hardjowisastro (2009) mengemukakan bahwa Industri Kreatif dapat diartikan sebagai sebuah industri yang mempunyai ide-ide baru, SDM yang kreatif dan juga mempunyai kemampuan dan bakat yang terus dikembangkan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Demikian pula Dewi (2009) menjelaskan bahwa industri kreatif berasal dari ide yang merupakan

sumber daya yang selalu terbaharukan. Berbeda dengan industri yang bermodalkan bahan baku fisik, industri kreatif bermodalkan ide-ide kreatif, talenta dan keterampilan (Bappeda Kota Salatiga, 2010).

Menurut United Nations Conference on Trade and Development/UNCTAD (2008) dalam Jerusalem (2009), industri kreatif adalah: (1) siklus kreasi, produksi, dan distribusi dari barang dan jasa yang menggunakan modal kreativitas dan intelektual sebagai input utamanya; (2) bagian dari serangkaian aktivitas berbasis pengetahuan, berfokus pada seni, yang berpotensi mendatangkan pendapatan dari perdagangan dan hak atas kekayaan intelektual; (3) terdiri dari produk-produk yang dapat disentuh dan intelektual yang tidak dapat disentuh atau jasa-jasa artistik dengan muatan kreatif, nilai ekonomis, dan tujuan pasar; (4) bersifat lintas sektor antara seni, jasa, dan industri; dan (5) bagian dari suatu sektor dinamis baru dalam dunia perdagangan (Bappeda Kota Salatiga, 2010).

Beberapa penelitian terkait dengan ekonomi kreatif dapat dikemukakan sebagai berikut. Kathrin Muller, Christian Rammer, dan Johannes Truby (2008) mengemukakan tiga peran industri kreatif terhadap inovasi ekonomi dalam penelitiannya di Eropa. *Yang pertama*, industri kreatif adalah sumber utama dari ide-ide inovatif potensial yang berkontribusi terhadap pembangunan/inovasi produk barang dan jasa. *Kedua*, industri kreatif menawarkan jasa yang dapat digunakan sebagai input dari aktivitas inovatif perusahaan dan organisasi baik yang berada di dalam lingkungan industri kreatif maupun yang berada di luar industri kreatif. *Terakhir*, industri kreatif menggunakan teknologi secara intensif sehingga dapat mendorong inovasi dalam bidang teknologi tersebut. Industri kreatif digambarkan sebagai kegiatan ekonomi yang berkeyakinan penuh pada kreativitas individu.

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap penguatan pondasi dan pilar ekonomi kreatif (tahun 2009-2014), dan tahap akselerasi ekonomi kreatif (2015-2025). Sasaran jangka panjang pengembangan ekonomi kreatif nasional sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) Insan kreatif dengan pola pikir dan *moodset* kreatif; (2) Industri yang unggul di pasar dalam dan luar negeri, dengan peran dominan wirausahawan lokal; (3) Teknologi yang mendukung penciptaan kreasi dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia; (4) Pemanfaatan bahan baku dalam negeri secara efektif bagi industri di bidang ekonomi kreatif; (5) Masyarakat yang menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan mengkonsumsi produk kreatif lokal; (6) Tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi oleh lembaga

pembiayaan terhadap industri di bidang ekonomi kreatif sebagai industri yang menarik.

Strategi Promosi

Sehubungan dengan pariwisata modern, yang sangat kompleks dan kapitalistik serta dijalankan dengan manajemen bisnis yang akurat dan terukur, Bungin (2015) menyatakan bahwa peran komunikasi menjadi sangat penting, dengan demikian keberhasilan usaha pariwisata modern mensyaratkan keefektifan komunikasi pariwisata. Menurut Bungin, komunikasi pariwisata mencakup komponen pemasaran, wisatawan, aksesibilitas, SDM dan kelembagaan, pemilik modal, dan destinasi. Seluruh komponen tersebut menjadi satu kesatuan produk pariwisata di sebuah destinasi yang dikemas dalam suatu *brand* destinasi.

Ditegaskan oleh Bungin (2015) bahwa *brand* bukanlah logo atau simbol. *Brand* adalah indikator *values* atau nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. *Brand* merupakan aset yang menciptakan *values* atau nilai kepada pelanggan dengan memperkuat kepuasan dan loyalitasnya. Ketika bauran pemasaran dilakukan, sebenarnya yang dibangun dan dikembangkan adalah sebuah *brand* (Kertajaya, 2007 dalam Bungin 2015). Untuk mengenalkan *Brand* tersebut tentunya dibutuhkan sebuah strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan atau bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran pada prinsipnya merupakan “Ujung Tombak” bagi organisasi untuk memperkenalkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengarahkan pengambilan keputusan audiens (konsumen) tentang produk, merek dan nama organisasi, sehingga audiens bertindak sesuai dengan tujuan organisasi (Shimp, 2003). Dengan demikian tujuan utama komunikasi pemasaran adalah untuk mempengaruhi dan meraih khalayak sasaran dalam melakukan keputusan pembelian. Oleh karenanya kemampuan komunikasi sangat diperlukan dalam penyampaian promosi kepariwisataan, karena pariwisata merupakan aset yang juga harus dijual kepada masyarakat (wisatawan). Berkaitan dengan komunikasi pemasaran pariwisata ini, maka sesungguhnya apa yang dikomunikasikan atau disampaikan kepada khalayak sasaran adalah pesan sebuah *brand*, oleh sebab itu strategi *branding* yang dibangun merupakan strategi promosi yang tepat untuk mengenalkan sebuah produk/jasa kepada khalayak sasaran. Dengan demikian *brand* yang kuat merupakan alat pemasaran produk yang tangguh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan riset yang menggunakan berbagai sumber

data. Sebanyak mungkin data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Cresswell (2003) mendefinisikan studi kasus sebagai berikut: “*an exploration of a bounded system or case (or multiple cases) overtime through detailed, in depth data collection involving multiple sources of information rich in context.*”

Teknik Pengumpulan Data: Penelitian ini menggunakan sumber data kualitatif yang berasal dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari teknik yang berbeda. Kedua data ini diperoleh melalui wawancara terbatas, serta studi kepustakaan dan dokumentasi. Untuk data penelitian lapangan diperoleh melalui wawancara kepada nara sumber dan informan terkait.

Teknik Validasi Data: Validasi data ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan guna memperoleh data penelitian yang akurat. Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan, kejelasan pengamatan, dan triangulasi.

Teknik Analisis Data: Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis data meliputi tiga alur kegiatan yakni; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (2005:16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah *brand* mampu menjalankan fungsinya dan memberikan keuntungan bagi produsen dan konsumen. Menurut Kotler produk yang memungkinkan konsumen untuk memilih di antara berbagai alternatif, dapat di-*branding*-kan, termasuk tempat atau lokasi geografis. Setiap lokasi atau tempat dapat di-*branding*-kan dengan mengkomunikasikannya berdasarkan keunikan atau identitasnya. Usaha mem-*branding*-kan tempat atau lokasi sudah ada sejak jaman dahulu. Berawal di Eropa dengan konsep *selling* yang kemudian terus berkembang dan berubah menjadi *destination branding* yaitu usaha merancang suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan target *market*. Sehingga lokasi atau tempat itu dapat melekat di benak konsumen (Keller, 2003:32-33, dalam Puspita dan Fajrini, 2016). Seiring dengan pendapat di atas, Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata yang setiap akhir pekan dikunjungi wisatawan, tentunya tidak tinggal diam untuk terus mempromosikan diri sebagai daerah atau tempat wisata yang menarik, dan salah satu daya tarik wisata di Kota Bandung adalah adanya Industri kreatif. Keberadaan industri kreatif di kota Bandung tidak bisa lepas dengan hadirnya sebuah komunitas yang bergiat dalam sektor industri kreatif yaitu; Bandung Creative City Forum (BCCF), adalah sebuah forum dan organisasi lintas komunitas kreatif yang

dideklarasikan dan didirikan oleh berbagai komunitas kreatif di Kota Bandung pada tanggal 21 Desember 2008. Sebagai organisasi resmi, BCCF telah menjelma menjadi sebuah organisasi mandiri yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan komunitas kreatif di Kota Bandung khususnya. Dalam setiap aktivitasnya, BCCF menggunakan pendekatan pendidikan berbasis kreativitas, perencanaan dan perbaikan infrastruktur kota sebagai sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif dan menciptakan wirausaha-wirausaha kreatif baik perorangan atau komunitas. Pada akhirnya forum ini turut serta menginisiasi pengembangan *strategi branding* dan membangun *network* yang seluas-luasnya sebagai upaya kolektif demi mentahbiskan kota Bandung sebagai kota Pariwisata dengan industri kreatifnya yang siap berkolaborasi sekaligus berkompetisi secara global (BCCF, 2015). Seiring dengan kiprahnya dalam industri kreatif, keberadaan komunitas BCCF, telah memberikan kontribusi penting terhadap sektor pariwisata Kota Bandung. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang dibangun oleh BCCF dalam mempromosikan pariwisata Kota Bandung? Penggunaan visual dan pesan yang tepat merupakan syarat utama keberhasilan dari sebuah program promosi. Tahapan-tahapan komunikasi dan strategi pesan disusun berdasarkan pencapaian kesadaran atas keberadaan sebuah produk atau jasa (*awareness*), menumbuhkan sebuah keinginan untuk memiliki atau mendapatkan produk (*interest*), sampai dengan mempertahankan loyalitas pelanggan (*loyalty*). Dalam kajian komunikasi tahapan tersebut dikenal dengan rumusan AIDDA (*Attention, Interest, Desire, Decision, Action*). Sedang dalam kajian disiplin perilaku konsumen (*consumer behaviour*) dikenal istilah *Three Component of Attitude Model CAC*, yaitu: *Cognitive* (pengetahuan), *Affection* (perasaan), dan *Conative* (kecenderungan untuk berperilaku). Tujuan komunikasi secara umum adalah untuk mencapai sejumlah perubahan, seperti: perubahan pengetahuan (*knowledge*), perubahan sikap (*attitude change*), perubahan perilaku (*behaviour change*), dan perubahan masyarakat (*social change*). Penjualan produk baru dapat terjadi apabila telah terjadi minimal adanya perubahan sikap pada tataran *conative*, atau munculnya suatu kecenderungan untuk melakukan sesuatu. Kecenderungan melakukan sesuatu itu adalah kecenderungan untuk membeli produk atau memanfaatkan jasa yang ditawarkan. Perencanaan strategi *marketing communication* meliputi sejumlah strategi pesan dan visual, yang secara bertahap mengikuti alur perubahan, dan perubahan tersebut harus diukur secara tepat melalui riset komunikasi pemasaran (*marketing communication research*) (Soemanagara, 2012:5).

Berdasarkan hal tersebut maka langkah strategi (promosi) yang dibangun oleh BCCF yakni dengan melakukan strategi *branding (Brand Campaign)*. *Branding* adalah istilah lain dari sebuah aktivitas manajemen kampanye produk/jasa. Kesuksesan yang diraih oleh usaha kampanye ini didasarkan atas kemampuan tim marketing dalam menentukan strategi promosi dan distribusi produk secara simultan. Bagi BCCF menempatkan produknya sebagai salah satu national *brand* harus memiliki perencanaan yang matang. Dengan demikian distribusi menjadi patokan penting bagi tim promosi dalam menentukan langkah strategis yang tepat. Terdapat jenjang atau tahapan penting dalam promosi atau kampanye sebuah *brand* yang dilakukan oleh BCCF ini, yaitu:

1. **Brand Recognition** Pada tahapan ini, sebuah *brand* yang diusung oleh BCCF memasuki tahapan pengenalan produk baru menjadi produk yang familiar di mata publik, setiap saat *brand* muncul dengan tema sama dan dilakukan berulang-ulang sehingga *brand* mudah diingat oleh konsumen. Sebagai satu produk yang menarik untuk dicoba disini produk menghadapi kemungkinan kegagalan apabila produk yang dipromosikan tidak tersedia dalam pasar. Berapa investasi yang dibutuhkan dan kemampuan produk dalam memenangkan pasar bersumber kepada kemampuan pemain atau distributor itu sendiri yang dapat mempengaruhi kebijakan para petinggi BCCF dalam proses intervensi terhadap kegiatan promosi lokal. BCCF mampu melihat kebutuhan publik terhadap produk-produk kreatif yang diciptakan oleh para wirausahawan di Kota Bandung sebagai aset yang layak untuk diperdagangkan dalam skala nasional maupun global, sehingga peluang tersebut menjadi hal yang sangat strategis untuk menangkap situasi pasar yang sangat menggiurkan.
2. **Brand Preference** Sebuah *brand* yang diusung oleh BCCF dalam tahapan ini adalah di mana konsumen telah melewati sejumlah pengalaman terhadap produk yang ia pilih dari berbagai pengalaman produk yang ada di sekitarnya. Produk yang dirasanya cukup memenuhi kebutuhan menjadi *preference* dari berbagai alternatif produk, konsumen cenderung melakukan uji coba terhadap produk lain dan produk yang bersifat alternatif, di sini produk-produk baru memiliki peluang untuk mendapat kesempatan memasuki pasar, pengalaman yang baik terhadap sebuah produk baru membantu mereka untuk mencapai kepuasan dari alat pemuas yang telah ada. Di sinilah mengapa

BCCF selalu melakukan inovasi-inovasi baru terhadap produk, menambah kualitas produk dan penampilan produk sebagai upaya menjaga mitra konsumen dan pelanggan terhadap produk mereka dan agar para pelanggan tidak beralih ke produk lainnya. *Preference* yang ingin dicapai BCCF dalam benak konsumen menjadi bagian yang terpenting. Para *brand manager* BCCF ketika mereka menemukan fakta ini dalam pasar melalui studi yang mereka lakukan, berusaha mempertahankan keberadaan produk mereka di pasar dan meningkatkan promosi produk dalam berbagai *event* dan *campaign* yang dilakukan.

3. **Brand Insistance.** Pada tahapan ini konsumen melakukan pengambilan keputusan secara bulat untuk mengonsumsi produk BCCF kesekian kalinya. Konsumen lebih banyak mengenal kelebihan produk ini dengan beragam inovasi yang ditawarkan. Pengalaman mereka pada penggunaan produk lain dengan *brand* yang sama juga berakhir dengan pengalaman yang menyenangkan sehingga muncul kekuatan keyakinan dalam diri mereka untuk selalu menggunakan dan mencoba produk lain dalam kelompok *brand* yang sama. Pada akhirnya, kepuasan-kepuasan yang mereka dapatkan dari penggunaan beberapa produk dalam satu *brand* yang disuguhkan oleh BCCF menyebabkan tumbuhnya kepercayaan konsumen kepada BCCF sendiri sebagai forum yang menghasilkan produk berkualitas dan memiliki jaminan yang tinggi.
4. **Lovely Brand/Brand Satisfy.** Tahapan terakhir dari proses strategi *branding* ialah *lovely brand* atau *brand satisfy*, konsumen benar-benar merasa puas terhadap pengalaman yang dialami berulang-ulang dari penggunaan satu atau beberapa produk dalam *brand* yang diusung BCCF. Kebulatan tekad dan konsistensi yang telah mereka miliki pada tahapan *brand insistence* teruji secara berkali-kali menyebabkan mereka yakin bahwa produk dari sebuah *brand* memberikan mereka kepercayaan yang kuat bahwa mereka selalu terpuaskan oleh produk-produk tersebut. Produk BCCF yang telah menempatkan dirinya pada *lovely brand* mendapat keuntungan yang sangat besar, karena mereka telah menciptakan bibit-bibit wirausahawan kreatif yang berjumlah besar. Konsumen akan memberikan pendapat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh rekan mereka dan memberikan saran penggunaan produk yang menurutnya paling baik.

Dalam menunjang pengembangan sektor pariwisata, BCCF membentuk suatu media *networking* yang bernama CEN (*Creative Entrepreneur Network*) yang merupakan salah satu strategi *branding* dalam memasarkan produk-produk kreatif yang dihasilkan oleh para wirausahawan kreatif Kota Bandung. Keberadaan CEN tersebut adalah untuk mewadahi berbagai jenis wirausaha kreatif komunitas yang terdapat di Kota Bandung. Di mana nantinya CEN dapat menjadi sebuah pusat berjejaring antar pelaku ekonomi kreatif, menyediakan acara-acara untuk berjejaring, membangun keterampilan dan pengetahuan bagi wirausahawan lokal melalui workshop, seminar, klinik bisnis, dan sebagainya, yang mana hal ini sangat membantu para wirausahawan Kota Bandung untuk terus mengasah kreativitasnya dalam menciptakan beragam produk-produk yang mampu bersaing di pasaran global. serta menjadikan Kota Bandung sebagai kota Pariwisata dengan Industri kreatifnya (BCCF, 2015). Di lain pihak kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Bandung terhadap promosi pariwisata melalui industri kreatif, tentunya sangat mendukung terhadap pengembangan industri kreatif sebagai daya tarik pariwisata, hal tersebut dilakukan melalui penetapan enam indikator kreativitas Kota Bandung: 1). Kebijakan Kreatif, 2). Infrastruktur Kreatif, 3). Hukum, Etika dan HKI, 4). Sistem Pendukung Kreatif, 5). Kapasitas Kreatif, dan 6). Kontribusi Ekonomi. Dengan mengacu kepada Keppres Nomor 6 tahun 2009. Tentang pengembangan ekonomi kreatif, mengenai 15 sub sektor industri kreatif yakni: 1). Periklanan, 2). Arsitektur, 3). Pasar seni dan barang antik, 4). Kerajinan, 5). Desain, 6). Fashion, 7). Film, Video dan Fotografi, 8). Permainan interaktif, 9). Musik, 10). Seni pertunjukan, 11). Penerbitan dan percetakan, 12). Layanan komputer dan piranti lunak, 13). Radio dan televisi, 14). Kuliner, 15). Riset dan pengembangan. Sehingga dengan kebijakan ini diharapkan tercapainya Kota Bandung yang aktual, adaptif, informatif dan representatif (Bidang Perekonomian Sekertariat Daerah Kota Bandung 2016). Sementara itu implementasi kegiatan promosi pariwisata yang dilakukan BCCF. adalah membuat berbagai kegiatan (*event*) untuk mengenalkan Kota Bandung melalui serangkaian penawaran dan promosi produk-produk industri kreatif. Seperti beberapa *event* yang telah dilaksanakan, yaitu pada tahun 2010, BCCF membuat Program Semarak Bandung yaitu rangkaian kegiatan kreatif dengan tujuan untuk mengintervensi ruang publik kota Bandung berupa Reka Kota, Nyala Bandung Gedung Merdeka & Bragakeun Bragaku. Setelah itu pada tahun 2011, BCCF bekerjasama dengan United Nations *Environment Programme* (UNEP) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia turut mensukseskan program TUNZA *International*

Children and Youth Conference on Environment yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung. Sebagai catatan penting bahwa dari program TUNZA tersebut lahirlah sebuah deklarasi yang bernama Babakan Siliwangi *World City Forest* yang menetapkan bahwa kawasan Babakan Siliwangi Bandung adalah Hutan Kota Dunia yang wajib untuk dijaga secara bersama-sama. Deklarasi ini telah disepakati & ditandatangani bersama oleh Walikota Bandung, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dan UNEP. Pada saat yang bersamaan diresmikan pula sebuah jembatan hutan (*forest walk*) di kawasan Babakan Siliwangi sebagai simbol bahwa sejatinya masyarakat Kota Bandung dapat mengakses hutan dengan mudah sekaligus menegaskan harapan warga Bandung untuk selalu mempertahankan hutan Babakan Siliwangi sebagai ruang hijau kota tanpa bangunan (BCCF, 2015).

Ruang-ruang publik bagi komunitas pun menjadi salah satu upaya yang diinisiasi oleh BCCF untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kota Bandung. Pada tahun 2011, BCCF menyediakan sebuah ruang kreatif yang bernama *Bandung Creative Hub* (BCH) atau yang lebih dikenal dengan nama Simpul *Space I*, yang bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 329 Bandung. Tahun 2012, BCCF meresmikan sebuah ruang publik lain yaitu Simpul *Space II* yang beralamat di Jalan Purnawarman No. 70 Bandung. Ruang kreatif ini tentunya akan memfasilitasi segala macam program yang diusung oleh komunitas seperti Pameran, Diskusi, Workshop, Ekskursi, Presentasi, Pertemuan Komunitas dan lain sebagainya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap berbagai *event* yang diselenggarakan oleh BCCF, Presiden Jokowi, tepatnya pada 12 Januari 2014, melakukan kunjungan ke BCCF di Jl. Taman Cibeunying Selatan Nomor 5 Bandung, untuk melihat berbagai kegiatan serta produk industri kreatif hasil dari aktivitas komunitas kreatif Bandung.



Gambar 1 : Kunjungan Presiden Jokowi ke BCCF

Di mana semua program yang hadir diharapkan mampu memiliki nilai dan pesan kreativitas dalam

balutan kebersamaan. Pada akhirnya BCCF memiliki harapan ke depan agar suatu saat ruang-ruang tersebut dapat menjadi pengikat simpul-simpul kreativitas dan kolaborasi individu, komunitas, maupun organisasi yang memiliki semangat kreatif yang tak pernah lekang oleh masa. Demi nama Bandung, sebuah kota kreatif, kota wisata yang selalu haus akan perubahan (BCCF, 2015).

SIMPULAN

Strategi promosi pariwisata yang dilakukan BCCF sebagai wadah kreativitas masyarakat Bandung dengan program CEN (*Community Entrepreneur Network*)–nya mampu menstimulasi Sektor Pariwisata Kota Bandung melalui pengembangan industri kreatif dengan membangun jejaring komunitas *entrepreneur* yang berfokus pada hasil karya industri kreatif, dengan menggunakan strategi *Brand Campaign* melalui beberapa tahapan strategi *branding* yaitu: (1) *Brand Recognition*, (2) *Brand Preference*, (3) *Brand Insistence*, (4) *Lovely Brand/Brand Satisfy*. Dan hal ini didukung pula oleh kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Bandung melalui 6 Indikator Kota kreatif. Sedangkan Implementasi promosi pariwisata adalah melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan (event).

Untuk menunjang dan meningkatkan sektor pariwisata Kota Bandung, maka sebaiknya pengembangan BCCF dalam mengekspansi berbagai produk kreatif yang dimilikinya melalui CEN, perlu senantiasa didukung oleh pihak Pemerintahan Kota Bandung, dengan kerjasama yang kontinyu, serta berbagai bantuan yang mempermudah penyelenggaraan event-event untuk menarik kunjungan wisatawan baik domestik, maupun mancanegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin. Burhan. 2015. Komunikasi Pariwisata Tourism Communication, Pemasaran dan Brand Destinasi. Jakarta. Kencana
- Creswell. John W. 2003. Research Desain Qualitative and Quantitative Approaches. Sage Publication
- Fill. Chris, 2009. Marketing Communication, Frame works, Theories and Applications. London. Prentice Hall
- Kertajaya. Hermawan. 2004. On Brand. Bandung .Mizan
- Kotler. Philip dan Garry Armstrong. 2012. Principle of Marketing Edisi 14. New Jersey. Prentice Hall
- Moleong. Lexy .J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya

- Shimp. Terence A. 2008. Periklanan dan Promosi. Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu. Jakarta. Erlangga.
- Soemanagara, Raden. 2012. *Strategic Marketing Communication* (Konsep Strategis dan Terapan). Bandung: Alfabeta
- Ayni. Nuzul dan Alhazami. 2016. Pengaruh Komunikasi Kepemimpinan, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Parongpong. Prosiding Konferensi Nasional *The Power Of Communication*.
- Arifin. H. Suprpto dan Gemiharto. Ilham. 2016. Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Tradisional Desa Cibubur Kecamatan Samarang Garut Jawa Barat. Prosiding Konferensi Nasional *The Power Of Communication*.
- Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN)*, Kementerian Perdagangan RI, Warta EksporDitjen PEN/WRT/04/I/2015 edisi Januari
- Puspita. Yesi dan Fajrini. Nurkhalia. 2016. City Branding Sawahlunto (Proses rebranding kota Sawahlunto dari Kota Industri Tambang Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya). Prosiding Konferensi Nasional *The Power Of Communication*.
- Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung 2016
- Bandung Creative City Forum (BCCF) 2016 <http://www.republika.co.id/> diakses pada 15 Oktober 2016 pukul 12: 14 WIB
- <https://bandungcreativecityforum.wordpress.com/> diakses pada 15 Oktober 2016 pukul 12:17 WIB
- <http://infobandung.co.id/> diakses pada 14 Oktober 2016 pukul 21: 30 WIB

Peningkatan citra Pangandaran melalui Kearifan Lokal oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Priyo Subekti
Hanny Hafiar
Dadang Sugiana

Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
priyo.subekti@gmail.com

Abstrak

Panorama alam yang disuguhkan di Pangandaran memiliki daya tarik tersendiri, sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi yang dimiliki Pangandaran di bidang pariwisata sangat beragam antara lain, wisata pantai, cagar alam, *Green Canyon*, dan Jojogan. Semua potensi tersebut menjadi sorotan utama bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan citra Pangandaran melalui kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa; 1) Pemerintah berusaha untuk merubah karakter orang Pangandaran menjadi lebih baik lagi, agar wisatawan asing maupun lokal merasa nyaman ketika mereka berwisata ke Pangandaran dan membuat wisatawan ketagihan untuk datang lagi ke Pangandaran. 2) pemerintah mengadakan program-program yang bertujuan untuk menjadikan Pangandaran menjadi Kabupaten yang berbudaya Khas dan masyarakatnya agamis yang terkenal di media cetak maupun sosial (*online*). 3) Humas Kabupaten Pangandaran berperan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. 4) Masalah teknis yaitu jaringan komunikasi. Penyebarluasan informasi salah satunya melalui jaringan internet. Tidak semua daerah di Pangandaran tercover oleh jaringan yang dapat mengakses internet. 5) Karakteristik masyarakat yang berbeda secara sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang menjadikan tingkat penerimaan informasi menjadi berbeda beda. Dan masih percaya kepada hal hal yang gaib atau mitos di masyarakat terhadap tempat di pangandaran yang di anggap wingit sehingga tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat wisata umum.
Kata Kunci: Pangandaran, Humas Pemerintah, Kearifan Lokal, Pariwisata, potensi wisata, media massa

PENDAHULUAN

Pemerintah Pangandaran sebagai sebuah kabupaten baru yang resmi dimekarkan pada 25 Oktober 2012, mencoba menjadikan Pantai Pangandaran sebagai daerah wisata nasional yang betemakan ekowisata. Kabupaten yang beribukota di Kecamatan Parigi ini terdiri dari sepuluh kecamatan, yaitu Cigugur, Cijulang, Cimerak, Kalipucang, Langkap Lancar, Mangunjaya, Padaherang, Pangandaran, Parigi dan Sidamulih. Pangandaran terkenal dengan destinasi pariwisatanya. Panorama alam yang disuguhkan di Pangandaran memiliki daya tarik tersendiri, sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Potensi yang dimiliki Pangandaran di bidang pariwisata sangat beragam antara lain, wisata pantai, cagar alam, *Green Canyon*, dan Jojogan. Semua potensi tersebut menjadi sorotan utama bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran saat ini.

Daya Tarik Wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata, Drs. Muhlis, potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah pariwisata baik objek wisata pantai maupun gunung. Terdapat banyak objek wisata favorit yang bisa dinikmati baik oleh turis mancanegara maupun domestic. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dan masih bisa dikembangkan yaitu: Pantai Pangandaran, Taman Wisata Alam (cagar alam pananjung), Pantai batu hiu, pantai Batu Karas, pantai madasari, pantai karapyak, dan wisata sungai yaitu cukang taneuh (*green canyon*), citumang, dan santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas yang bervariasi

dan cukup lengkap, restoran, dan tempat hiburan lainnya. Sedangkan menurut pedagang kaki lima di pinggir pantai, potensi yang bisa dijual di kawasan wisata Pangandaran adalah kuliner, *banana boat*, perahu dan keramah-tamahan penduduk lokal.

Berdasarkan kebijakan Bpk. Jeje Wiradinata sebagai Bupati Pangandaran, bagi seluruh jajaran kelembagaan Kab. Pangandaran menyatakan ingin mewujudkan Kabupaten pangandaran sebagai daerah tujuan wisata dunia. Hal yang paling ditonjolkan adalah karakter. Karakter adalah sifat seseorang. Karakter yang baik, yang menonjolkan ciri khas budaya pangandaran. Karakteristik seseorang yang menerima dengan senang hati (*welcome*) dan saling menghargai merupakan kearifan lokal yang Pemerintah Kab. Pangandaran galakkan. Untuk mencapai pangandaran sebagai daerah wisata yang mendunia dan berkarakteristik yang baik yaitu salah satu caranya dengan program pendidikan gratis dan pemeliharaan terhadap ekosistem terutama pantai dan kawasan laut. Selain itu masyarakat pangandaran dibekali dengan pendidikan guna membangun karakteristik yang baik sebagai identitas daerah wisata.

Seiring dengan terus berkembangnya pariwisata, terjadilah perubahan pada komponen lingkungan sebagai penyangganya. Menurut Inskeep (1991) pengembangan pariwisata menimbulkan 2 tipe dampak, dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dapat berupa konservasi kawasan alam, konservasi lokasi sejarah dan arkeologi serta bentukan khas, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan infrastruktur, peningkatan kesadaran lingkungan. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa polusi air, polusi udara, polusi suara, polusi pemandangan, masalah pengolahan limbah, penurunan ekologi, bencana lingkungan, kerusakan situs-situs bersejarah dan arkeologi, serta permasalahan guna lahan.

Dalam penelitian yang dilakukan Hidayat (2011: 34) mengemukakan adanya penurunan yang signifikan jumlah kunjungan wisatawan kawasan Pangandaran dalam kurun waktu 2000 – 2005. Kerusakan lingkungan dan penurunan jumlah wisatawan, yang ditandai dengan dihilangkannya Pangandaran dari paket-paket wisata anggota ASITA menunjukkan bahwa Pangandaran telah memasuki fase stagnasi, sehingga daerah wisata tersebut memiliki dua pilihan, memasuki fase penurunan atau memperbaiki diri menuju fase pertumbuhan kedua (rejuvenasi).

Kebijakan pariwisata memberikan filsafat dasar untuk pembangunan dan menentukan arah pengembangan pariwisata di destinasi tersebut untuk masa depan. Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada

aktivitas wisata. Dalam pelaksanaan pengembangan, perencanaan merupakan faktor yang perlu dilakukan dan dipertimbangkan (Hidayat, 2011: 35).

Pengembangan pariwisata di wilayah Pangandaran didukung oleh program Destination Management Organization (DMO) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada tahun 2013, target DMO dalam hal kelembagaan adalah penguatan internal kelembagaan dalam menyusun sistem dan mekanisme keorganisasian, melakukan kolaborasi dan harmonisasi program dengan pemerintah provinsi dan koordinasi dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Hasil dari DMO dalam hal kelembagaan yang sudah tercapai adalah adanya penguatan aparatur pemerintah Pangandaran mengenai kepariwisataan, dukungan pemerintah provinsi, kerja sama kolaboratif dengan Pemkab Pangandaran dalam pelaksanaan program, munculnya inisiatif pemangku kepentingan dalam kegiatan dan penguatan kelembagaan desa. Sedangkan target DMO dalam hal program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kapasitas desa sebagai desa wisata, optimalisasi diseminasi informasi, pengembangan industri kreatif, penataan destinasi dan pengembangan acara lokal sebagai awal pengembangan acara Pangandaran. Dari target tersebut yang sudah dicapai antara lain terlaksananya pelatihan pengembangan kapasitas, tersusunnya design, strategi dan rencana aksi (DSRA), terlaksananya upaya peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan desa, pengembangan potensi wisata baru menjadi produk wisata alternatif, pengembangan acara, gerakan bersama penataan kawasan dan pelaksanaan pengenalan produk wisata baru.

Kearifan lokal menurut UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB I Pasal 1 butir 30 adalah adalah “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.

Ardhana (dalam Apriyanto, 2008: 4) menjelaskan bahwa: menurut perspektif kultural, kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Termasuk berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, bertingkah laku dan bertindak yang dituangkan sebagai suatu tatanan sosial.

Selanjutnya Ridwan (2007: 2) memaparkan: Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

Adapun menurut Keraf (2010: 369) bahwa kearifan lokal adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan kearifan tradisional di sini adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.

Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Konsumen, Bapak Nito menyatakan, sudah banyak peran yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata diantaranya penataan lahan untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan Pariwisata Pangandaran dengan menertibkan para pedagang yang berada di depan pasar Pananjung. Penertiban pedagang di kawasan tersebut dilakukan agar kawasan pantai bisa langsung terlihat dari arah jalan tol. Penertiban pedagang-pedagang tersebut dilakukan dengan cara relokasi ke beberapa titik yaitu ke kawasan bekas tanah Dinas Sosial, Pananjung Sari, wilayah dekat Star Meridian, dan Pasar Seni. Sebanyak 100 pedagang dari 1465 sudah direlokasi ke kawasan boulevard. Biaya yang dihabiskan untuk merelokasi para pedagang mencapai Rp 40,4 miliar.

Karena itu Pemerintah Kabupaten Pangandaran harus memikirkan cara untuk menjaga kearifan lokal dan ekosistem pangandaran untuk meningkatkan citra pangandaran sebagai daerah wisata nasional. Pangandaran harus menentukan pilihan ditinggalkan wisatawan/pasar atau segera memperbaiki diri

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan situasi atau peristiwa atau penelitian observasional seperti yang dikemukakan oleh Wood (1997, dalam Rahmat, 2004: 25). Lebih jauh Rahmat mengemukakan bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk: (1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, (3) membuat perbandingan atau evaluasi, (4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Rahmat, 2004: 25).

Narasumber dalam penelitian ini adalah: 1) Soni Agusman S.H Ketua Bagian Humas 2015 dan Ketua Bidang Destinasi Wisata 2016; 2) Drs. Muhlis (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran); 3) Bapak

Nito (Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Konsumen). Pengumpulan data menggunakan 1) Wawancara mendalam; 2) Observasi; 3) Studi Pustaka. Narasumber dipilih menggunakan sample purposif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam hal ini kepala humasnya selaku ujung tombak dalam melakukan sosialisasi berbagai program kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan citra positif Kabupaten pangandaran sebagai daerah wisata nasional. Untuk itu peran pemerintah dalam hal ini Humas dan jajarannya adalah sebagai jembatan antara pemerintah dengan pihak eksternal baik itu media maupun masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh kepala Humas Kabupaten Pangandaran yaitu:

a) Humas harus menjadi sumber informasi untuk masyarakat; b) Humas menginformasikan berita yang bergejolak dan berusaha menyaringnya agar bisa diserap baik oleh masyarakat. c) Mengkoordinasikan informasi melalui media cetak atau elektronik d) Harus bisa memilah-milah mana informasi yang harus di publikasikan dan tidak dipublikasikan. e) Harus bisa melihat ke semua sisi (menyerap dan mengolah informasi)

Dalam mensosialisasikan dan menerapkan program kebijakan pemerintah kabupaten Pangandaran seorang humas melakukan verifikasi berita yang menimbulkan esensi di masyarakat, kemudian melaporkan hasil dokumentasi dan menyaring berita yang akan di publikasikan dan di konsumsi masyarakat serta menyebarkan informasi ke manca Negara atau Nusantara tentang pariwisata dan potensi wisata di wilayah Pangandaran.

Lattimore dalam (Lubis, 2012: 52) mengemukakan Fungsi paling dasar humas dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri. Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.

Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait dengan pembentukan Pangandaran sebagai kota wisata antara lain:

1) Pendidikan gratis

Pemerintah daerah kabupaten pangandaran berupaya memberikan dana kepada sekolah/madrasah sebagai pendamping BOS Pusat dan BPMU Provinsi yang diberikan kepada sekolah/madrasah Negeri maupun Swasta dimana besarnya dana bantuan yang diterima sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang memiliki Kartu Keluarga Kabupaten Pangandaran di masing-masing sekolah/madrasah dikalikan satuan biaya bantuan. Tujuannya mewujudkan layanan pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang bermutu, terjangkau, dan terbuka bagi semua masyarakat Pangandaran dan kedepannya bukan hanya peserta didiknya saja yang diperhatikan, tetapi tenaga pendidik dan kependidikannya juga akan diperhatikan.

2) AMS (Ajangan Masuk Sekolah)

Dalam rangka mewujudkan pangandaran berkarakter, pemerintah menyelenggarakan program AMS dan lembaga islam lainnya menyetujui hal tersebut, meskipun terdapat berbagai polemik tentang bagaimana pelaksanaan program tersebut.

3) Pelayanan Kesehatan gratis

Pusat kesehatan masyarakat yang tersebar di Kabupaten Pangandaran berlakukan layanan kesehatan gratis pada masyarakat setempat. Hal itu atas dasar langkah, upaya sekaligus keberanian DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran di bidang kesehatan. Layanan kesehatan gratis tersebut tentu saja disambut baik masyarakat Pangandaran.

4) UNPAD masuk ke Pangandaran

5) Pemerintah Kabupaten menjalin kerjasama dengan media massa yaitu sutrat kabar dan radio yang nantinya akan bekerja di seputar penyiaran: a)

Meliput destinasi wisata Mendokumentasikan semua objek wisata yang ada pangandaran. b) Memberitakan wisata pangandaran Menyebarkannya melalui media cetak ataupun media sosial (online.) c)

Melaporkan tentang pariwisata pangandaran Memberikan laporan kepada Humas Pemerintah Kabupaten mengenai situasi Pangandaran terkini dan hasil liputannya, agar dapat disaring dan disebarluaskan.

Dalam setiap implementasi program kebijakan tentunya ada tolak ukur indikator keberhasilan program. Cutlip, Center, dan Broom (2009) menyatakan bahwa struktur evaluasi terhadap kegiatan kehumasan idealnya bersifat komprehensif, dengan mengukur/ memeriksa persiapan, implementasi, dan dampak dari kegiatan tersebut. Sedangkan, Grunig dan Grunig (2001 dalam Yin dan Krishnan 2012) juga menyatakan bahwa evaluasi tidak hanya sebatas mengukur efektifitas dari sebuah program/ kegiatan kehumasan, namun juga mengukur kontribusi program/ kegiatan tersebut bagi efektifitas organisasi secara keseluruhan. Maka, humas pemerintah seharusnya tidak hanya menghitung output dari kegiatan media relations berupa jumlah

pemberitaan, namun mengevaluasi tercapai tidaknya tujuan dengan menghitung outcome yang dihasilkan dari pemberitaan tersebut pada publik instansi pemerintah.

Penerapan evaluasi kegiatan media relations yang ideal oleh humas pemerintah dilakukan dengan mengukur ketepatan penyebaran informasi melalui media massa, apakah telah berhasil menjangkau publik hingga berhasil menimbulkan partisipasi publik atau tidak. Dengan kata lain, terdapat gap antara fenomena yang terjadi di pemerintahan Indonesia dengan kajian teoritis mengenai penerapan evaluasi. Oleh karena itu, peneliti melihat isu mengenai penerapan evaluasi kegiatan media relations oleh humas pemerintah menjadi menarik untuk dianalisis.

Berikut beberapa indikator keberhasilan program pemerintah menurut kepala humas Kabupaten Pangandaran:

- 1.) Seluruh sekolah dari SD,SMP,SMA di Pangandaran di gratiskan oleh Pemerintah.
- 2.) Berdirinya Unpad Multikampus Pangandaran & subsidi bagi putra putri daerah.
- 3.) Ajangan Masuk Sekolah
- 4.) Dibangunnya Rumah Sakit dan Puskesmas di sekitar wilayah Pangandaran yang menyediakan Pelayanan kesehatan gratis.
- 5.) Membangun puskesmas dengan fasilitas yang berbasis bintang tiga seperti ruangan rawat inap menggunakan AC
- 6.) Dibangunnya rest area di sekitar daerah wisata
- 7.) RTH di pinggir pantai (Rencana Tata Ruang Hijau)
- 8.) Peningkatan keamanan daerah wisata
- 9.) Pembinaan pemandu wisata secara rutin
- 10.) Melaksanakan kegiatan jumat bersih setiap intansi di pinggir pantai

Beberapa metode yang dilakukan oleh humas dalam melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah kabupaten Pangandaraan yang berkenaan dengan ekowisata dan kearifan lokal yaitu:

a) Menggunakan saluran komunikasi yang ada di masyarakat seperti: PKK, Kelompok tani, aparat desa dan saluran komunikasi lainnya. Saluran komunikasi atau forum komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh humas menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun hanya sekedar berbagi permasalahan yang ada. Selain itu juga forum ini dijadikan sebagai salah satu agenda untuk menyampaikan berbagai informasi dari pemerintah yang harus disampaikan kepada setiap masyarakat desa. Apalagi jika kegiatan tersebut tetap sudah terjadwal akan memudahkan humas untuk mengatur waktu dan agenda dalam rangka mengadakan pertemuan dengan warga terkait dengan pemebrian informasi dan hearing.

b) Menggunakan kearifan lokal setempat yaitu mengadakan Taraweh Keliling (Tarling) memanfaatkan momen Ramadhan untuk mensosialisasikan kegiatan dan program pemerintah. Dengan memanfaatkan momen tarawih yang notabene warga paling banyak berkumpul untuk melaksanakan ibadah tarawih maka pihak humas dapat memberikan informasi berupa peraturan, bantuan, kegiatan, dan lain sebagainya. Informasi ini kemudian dapat disebarakan oleh warga yang ikut taraweh kepada warga lainnya.

c) Selain tarling, pemerintah juga menggunakan momen pagelaran senin badud dan mengadakan perlombaan kuliner makanan 'kampung'

Pemerintah Kabupaten Pangandaran cukup berhasil dalam memperbaiki infrastruktur, sarana, dan prasarana di wilayahnya, khususnya di kawasan wisata. Hal ini cukup mempengaruhi peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Pangandaran, sayangnya kenaikan jumlah wisatawan tidak berbanding lurus dengan penghasilan penduduk lokal khususnya para pedagang. Mereka terlihat kurang memiliki strategi bisnis yang baik. Hal ini terlihat dengan kurangnya cara promosi para pedagang untuk menarik perhatian konsumen. Mereka cenderung pasrah terhadap penghasilan yang diterimanya walaupun hanya sedikit. Padahal, ada banyak cara lain dalam menarik perhatian wisatawan, misalnya dengan meningkatkan kualitas dagangannya, mempercantik dan menjaga kebersihan toko, melakukan permainan harga dan sebagainya..

SIMPULAN

Terbentuknya karakteristik para pelaku wisata dan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang beretika sopan santun dan murah senyum dan mempunyai ciri khas tersendiri sebagai tujuan wisata dunia. Diharapkan Pangandaran akan menjadi Kabupaten dengan objek wisatanya yang mendunia. Dengan harapan seperti itu, maka pemerintah berusaha untuk terus merubah karakter orang Pangandaran menjadi lebih baik lagi, agar wisatawan asing maupun lokal merasa nyaman ketika mereka berwisata ke Pangandaran dan membuat wisatawan ketagihan untuk datang lagi ke Pangandaran. Dalam proses perwujudan dari hal tersebut, pemerintah mengadakan program-program yang bertujuan untuk menjadikan Pangandaran menjadi Kabupaten yang berbudaya Khas dan masyarakatnya agamis yang terkenal di media cetak maupun sosial (online).

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanto, Y. dkk. (2008). "Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan". Makalah Pada PKM IPB, Bogor.

- Cutlip, S.M., Center, A.H. & Broom, G.M. 2009, *Effective Public Relations* (terjemahan), 9 th edn, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hidayat, Marceilla. 2011. *Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat)*. *Tourism and Hospitality Essentials (THE) Journal*, Vol. 1, No. 1, 2011 – 33.
- Inskeep, Edward (1991). *Tourism Planning: An Integrated Sustainable Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold
- Keraf, A.S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Lubis, Evawani Elysa. 2012. *Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012: 1 – 73
- Ridwan, N.A. (2007). "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal". *Jurnal Studi Islam dan Budaya*. Vol.5, (1), 27-38
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Yin, P.L.P., Krishnan, K. 2012, 'Evaluation Research on Public Relations Activities Among Public Relations Practitioners in Malaysian Corporations: An Exploratory Study', *The Journal of the South East Asia Research centre for Communications and Humanities*, vol.4, no.1, pp. 41-61, [journal on-line], accessed 23 February 2013, Available at: [http://search.taylors.edu.my/journalonline/Vol%204%20Issue%201/3%20PR%20Evaluation%20\(rev\)\(edSP\)\(RV\)\(rev1\).pdf](http://search.taylors.edu.my/journalonline/Vol%204%20Issue%201/3%20PR%20Evaluation%20(rev)(edSP)(RV)(rev1).pdf)

PENCAK SILAT AS A SPECIAL CULTURAL TOURISM POTENTIAL: A CASE ON LEMBAGA PEWARISAN PENCAK SILAT (PENCAK SILAT INHERITANCE INSTITUTE) – BANDUNG

Dindin Dimiyati
Ilmu Komunikasi, Fakultas Humaniora, Universitas President
dindin.dimiyati@president.ac.id

Muhamad Farhan
Program Studi Magister Kajian Pariwisata, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada

Abstract

PencakSilat has been a part of Indonesian culture for centuries; however there are no official historical records yet now on when this martial arts started attaching to the Indonesian culture. There are no written records either when the arts began spreading beyond Indonesia e.g. Europe and the USA. The term PencakSilat covers what is understood as the fighting arts or traditional self-defence from West to East of the country e.g. Pencak is mostly used in Java, while Silat or Silek is commonly accepted in Sumatera. Since the arts has been the inseparable part of the Indonesian culture, there are a lot of foreigners coming to the country only to either start to learn or enhance their skills as it happens in Thailand for Muay Thai. This is the focus of the paper which presents and discusses pencaksilat as a special interest tourism which is based on culture. Qualitative research methodology was applied by using observation and interviews as methods of gathering the data. Informants were those practicing pencaksilat actively from various styles (aliran) and they are foreign students as well as local ones. The research was descriptive in nature and was conducted from March to July 2016. The research has revealed that pencaksilat meets three aspects of a cultural tourism object which has potentials to attract tourists: ideas, activities and artefacts. To meet the criteria, the tourism object has to possess uniqueness, authenticity, originality and variety/diversity. By learning roots of pencaksilat from its homeland, the tourists have proven to give higher appreciation to this intangible heritage than the one they had prior to their coming.

Keywords – culture, heritage, intangible, pencaksilat, tourism

Abstrak

Pencak Silat telah menjadi bagian dari budaya Indonesia selama berabad-abad; Namun tidak ada

catatan sejarah resmi sampai sekarang kapan seni bela diri ini mulai melekat pada budaya Indonesia. Tidak ada catatan tertulis pula kapan seni ini mulai menyebar di luar Indonesia misalnya Eropa dan Amerika Serikat. Istilah Pencak Silat meliputi apa yang dipahami sebagai seni pertempuran atau bela diri tradisional, dari ujung barat sampai ke ujung timur negeri ini, misalnya kata Pencak banyak digunakan di Jawa, sedangkan Silat atau Silek umumnya diterima di Sumatera. Karena seni bela diri ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia, banyak orang asing yang datang ke negeri ini baik hanya untuk memulai belajar atau meningkatkan keterampilan mereka seperti yang terjadi di Thailand untuk Muay Thai. Fokus dari paper ini adalah menyajikan dan membahas pencak silat sebagai wisata minat khusus yang didasarkan pada budaya. Metodologi penelitian kualitatif diterapkan dengan menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Informan adalah mereka berlatih pencak silat aktif dari berbagai aliran baik mahasiswa asing maupun orang-orang lokal. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dari Maret-Juli 2016. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pencak silat memenuhi tiga aspek dari obyek wisata budaya yang memiliki potensi untuk menarik wisatawan: ide, kegiatan, dan artefak. Untuk memenuhi kriteria, obyek pariwisata harus memiliki keunikan, keaslian, orisinalitas dan keragaman. Dengan belajar akar pencak silat langsung dari sumbernya, para wisatawan telah terbukti memberikan apresiasi yang tinggi terhadap warisan budaya takbenda ini dibandingkan dengan sebelum mereka datang.

Kata Kunci: *pencaksilat, budaya, pariwisata, tak benda, warisan*

INTRODUCTION

Tourism in Indonesia has got a lot of potentials in terms of providing good impacts for positive and significance changes for the people. Tourism can create new employment and extend opportunities for Indonesian to have better economic condition. It can automatically increase people's income and the country's foreign exchange. When it happens, some programmes set up by the government such as poverty reduction, welfare improvement or job opportunities for jobless will be hopefully assisted.

It has been noted for the two decades that changes in excursion patterns of the tourism world from mass tourism to individual or small group one-occur due to increasing 'wish' of tourists to get new experiences in their life such as those in Malaysia, Thailand, the Philippines and Singapore. Such tourists are commonly willing to expand their horizons and knowledge by exploring certain activities during their travel, in which they also can enrich their spiritual and psychological experiences. This is what is called special interest tourism (Parikesit & Hernowo, 1997) or New Tourism (Damanik & Weber, 2005).

Indonesia is a cultural rich country which can make its culture as a unique selling point to boost its economic development. At the same time, the country is also expected to be able to support its local culture preservation through tourism activities. Each local culture with its local genius can be sustainably preserved through sustainable tourism development as declared by UNESCO and UN-WTO in their joint resolution in 2002.

Culture, as Fandeli (2005:30) mentions, has got a potential to be special interest tourism and for the last two decades it has been noted that there are quite many developing countries planning to develop such a tourism in which the following components or aspects exist:

1. Rewarding: appreciation on a tourism resort/object
2. Enriching: increase of knowledge and skills on a tourism activity
3. Adventure: involvement of tourists in some adventures during their visit
4. Learning: process of education during tourists' visit on the spot.

Martial arts as a part of culture or local genius is a distinctive tourism attraction for foreign tourists although the created market is quite segmented. Take a

look at Japan, which is a source of martial arts tradition in the world. Among those visiting this country for Sakura, castles or drinking tea tradition, there are people coming to only to learn self defence. From this self defence, those learners then will learn other parts of the Japanese culture that, in turn, may attract them to know further these Japanese stuff besides self defence. Self defence or martial arts for Japan has become a window to let people beyond Japan get informed on anything beyond the arts.

Another case is Thailand, which was recorded to place the 4th rank of the top ten tourism destination in Asia and the Pacific in 2014 as released by UN-WTO. Tourism Authority of Thailand on its official website formally includes Muay Thai as a cultural exploration tourism programme. Muay Thai, a traditional self defense, has been well known in Indonesia and other parts of the world. Tourism Authority of Thailand even explains:

"Muay Thai, or Thai boxing, is the national sport of Thailand. Once a skill that was essential for survival in battle, Muay Thai is now one of the most popular fighting sports in the world. Fighters from all corners of the globe travel to Thailand to train in Muay Thai, and it is no longer uncommon for Muay Thai fights in Bangkok or the countryside to feature foreign fighters on the fight bill."

Indonesia is also a country which is rich with traditional traditions. When Thailand has got Muay Thai or Japan has got Judo, Kendo, Karate and Jiu Jitsu to 'sell', Indonesia has also got its own traditional martial arts to promote – pencak silat. Unfortunately, this traditional self defense is assumed not to be popular among young generation of Indonesia due to lack of proper documentary which will become rich resources to explore while what has been developed mostly only on oral tradition. Toto Sucipto, Head of Cultural Values Preservation Board (*Kepala Badan Pelestarian Nilai Budaya*), in an interview with Tempo on 22nd August 2015 commented: *"...besides lack of good continuous documentary, there are not many academic studies on pencak silat. It is one of the barriers making the arts difficult to recognise as an intangible heritage."* One of few academic efforts in pencak silat is Ian Douglas Wilson who did a research about history, culture and practice of pencak silat in West Java for his dissertation in 2002. In addition to this, O'ong Maryono (a researcher and practitioner of the arts) highlights lack of training modules as a weakness in developing pencak silat.

Overcoming any possible barrier has actually been an unwritten agenda among pencak silat practitioners and lovers. They have made a quite many efforts introduce, popularise and strengthen the existence of the arts to young generation and to the world. *Persaudaraan Angkringan Silat (PAS)* dan *Tanggungjawab Project* hold an annual gathering which always invites thousands of pencak silat practitioners from Indonesia, Europe and the USA to come to Yogya. On 28-31 Mei 2015, they held *Jambore Pencak 2015* that invited about 7500 practitioners and tens of pencak silat schools (*paguron*) from Bandung, Jakarta, Surabaya, Kalimantan and Europe. This 5th international scale-event, fully supported by the Sultan of Yogyakarta, attracted tourists to witness some street performance which they can only watch once a year. Anis Baswedan as the Minister of Education and Culture in 2015 came to the event and showed his support in developing pencak silat in Indonesia (*Tempo.co*, 15 Februari 2015).

Following such event, there was another one held in Bandung on 12 December 2015 when more than a thousand pencak silat practitioners from 25 schools (*paguron*) from Indonesia and other foreign countries gathered for a festival and workshop called *Temu Pendekar Internasional (International Pendekar Meeting)*. The organizer of the event was *Masyarakat Pencak Silat Indonesia/MASPI (Indonesia Pencak Silat Society)* that has got also some regular agenda to promote the arts so that any event made will also give additional values to local tourism (*Pikiran Rakyat Online*, 12 December 2015).

The researchers, therefore, believe that our local genius called pencak silat will contribute to the development of Indonesian tourism such as in Thailand and Japan. The focus of the research was to examine potentials that pencak silat has as a tourism attraction due to the inseparable parts of Indonesian culture. The research does not discuss all pencak silat styles which are believed to have 600 styles all over Indonesia, but only to talk about the main *Sundanese* styles which have been an appeal of foreign people to learn for years. Since *Lembaga Pewarisan Pencak Silat/GARIS PAKSI (Pencak Silat Inheritance Institute)* is an independent organization which focuses its activities on preservation, research, training and documenting of the arts from West Java, therefore the researchers chose it as a source of those Sundanese pencak silat styles.

Based on those facts, the researchers explored what pencak silat could do to be a special cultural tourism

attraction. Therefore, we had to address two research questions set up:

1. What are the components of pencak silat as a tourism attraction?
2. How can pencak silat be a special interest cultural tourism?

Tourism is a complex activity involving social economic cultural technological aspects in which people release their tension for fun or enjoy their leisure. Tourism is a multidisciplinary academic study and engages both national and international private and public sectors (Damanik & Weber, 2006; Murphy, 1985; Pitana, 2005; Leiper, 1995).

Tourism offers tourists/visitors products (goods and travel destination e.g. temples or palaces) and services or tangible and intangible items for consumption (Freyer, 1993). When we discuss quality of tourism products, Damanik and Weber (2005:13) point out four dimensions to be available: uniqueness, authenticity, originality and diversity.

Uniqueness means it is the only that exists in one place e.g. komodo which is only available in Indonesia. Authenticity is concerned with simplicity, natural exotic setting and level of attraction of a tourism resort or product e.g. Balinese dance which was originally intended for ritual ceremonies (Kontogeorgopoulos, 2003; West and Carrier, 2004). Originality talks about how pure a tourism product is such as a hotel which adopts local values in its architecture design or how employees of the hotel dress by wearing traditional clothes in their daily activities. Diversity represents various products and services offered to tourists or visitors. Forms of diversity can be beauty of nature and cultural artefacts offered at the same time to the tourists coming to the site. The main intention of this diversity is to make the tourists stay longer and gain more experiences during their stay.

A key of tourism activity which invites people to come and to stay is attraction, either tangible or intangible. This attractiveness is classified into three types: natural resources, culture and imitation. These classifications usually become a crucial consideration in developing a tourism resort plan (Goeldner & Ritchie, 2012; Damanik & Weber, 2006; Gunn, 1988; Mill & Morrison, 1998).

Referring to pencak silat which has a potential to be a tourism attraction, it can be classified as a cultural tourism and this cultural tourism breaks down into three items: ideas, activities and artifacts. Cultural tourism proposes new experiences to tourists such as

aesthetic, intellectual, emotional, or psychological ones because they usually participate actively in getting such experiences. In this case, cultural tourism can be categorized as special interest tourism. Special interest tourism is commonly based on tourists' own motivation in seeking new original unique insights of life, fun or entertainment in other countries (Damanik & Weber, 2006; Fandeli, 2005; Arjana 2015; Kruja & Gjyrezi, 2011; M. Robinson dan M. Novelli, 2005).

METHOD

This research was qualitative in nature with descriptive method in exploring and revealing information. The researchers applied in depth interview and participatory observation to obtain the data from Abah Gending Raspuzi (the founder and of GARIS), Feri Herlian, Feri Pedro, Kamil Irmasnyah and Galih Iman (a practitioner of Betawi style). Three foreign students from France, Brunei and Hawaii gave their testimony. The researchers tried collecting literature studies which connected pencak silat and special interest cultural tourism, besides gathering data from the program set up by GARIS PAKSI (Cresswell, 2004; Sugiyono, 2012). The research was conducted from March to July 2016.

RESULT AND DISCUSSION

Forty countries have been registered as the members of PERSILAT (Persekutuan Pencak Silat Antar Bangsa/International Pencak Silat Federation), the only international pencak silat organization which was founded on 11 March 1980. This is a symbol of recognition of the world to the existence of pencak silat as one of acknowledged martial arts.

During observation, it was found out that Pasundan (west java) as one of the prominent sources of pencak silat in Indonesia. Abah Gernding Raspuzi, the founder of Garis Paksi, described that his organization focused on preserving and developing aliran (styles) from west java such as Cimande, Cikalong, Sera, Sabandar, Ulin Makao (which is actually from Banten). Those styles as a complete system have their own philosophy, strategy and techniques of fighting. Roots of origins of the styles can still be traced that the sources of knowledge and skills of the arts will be able to get explored.

Every pencak silat school or style has its own tradition in accepting new students and this ritual is a process of asking or confirming that a new candidate of student is eligible to start to learn. In Cimande, this ritual is called *Talek*. Wilson (2002) records this process: "...After the oath has been taken the teacher squeezes

beetle vine juice into the eyes of the student, an act known as 'dipeureuh'. This is symbolic of the student's entry into a new world, and their commitment towards "seeing things clearly".



Picture 1. Ritual of *peureuhan* in Cimande

Another distinctive attribute attached to pencak silat from west java is *ibing* (dance) which is different from other styles from Sumatera, Central or East Java. In west java, music is not just a background when practitioners perform on stage. Music has to follow those practitioners when they perform techniques that technique movement is in harmony with rhythm of the instruments. There are patterns of silat dance e.g. *tepak dua*, *tepak tilu*, *paleredan*, *gonjing* etc. Feri Pedro added that common attributes in pencak silat are loose clothes (*kampret & pangsi* in Sundanese), belts, head cover (*iket* in Sundanese) and weapons such as knives, kerambit, blades, kujang and rattan sticks. Those loose clothes usually become uniform during training and he emphasized that common color for the uniforms is black. Gabriel Facal (France) and Ruslie Bujang (Brunei) who once had learned Garis Paksi system sent their testimony through on line conversation, admitting authenticity of the roots of the system. They learned the development version but in the end of the lessons they were informed the original forms of the system. Since one of the missions of Garis Paksi is actually 'purifying' pencak silat which has been long spread beyond Indonesia, therefore Abah Gending went to France, Ireland, Las Palmas, and Germany to give a workshop on Sundanese pencak silat from 2nd to 24th April 2016. Galih Iman, as a Betawi style practitioner, put a high respect on efforts of Garis Paksi in preserving traditional values of Sundanese pencak silat by systematic grading of lessons.



Picture 2.Attributes in pencak silat: Claudio Conti from Las Palmas

Picture 3.Kerambit as a weapon in pencak silat

Culture based tourism can give benefits to the tourists in terms of recognising and interacting with object of tourism through a series of activities as testified by the following two foreign students. Brian Higgins (Hawaii) testified that he obtained values through his training and experience with Garis Paksi such as being open minded to new principles and lessons, respect to all religions and faith, respect to people, desire for peace and confidence to defend one's life and family, idea of **pusaka** or passing on information to another generation for their benefit of values and information. Gabriel Facal (France) then supplemented that philosophical values of balancing life in making and

maintain social relationship were the ones he gained during his study in Garis Paksi.



Picture 4.Travis Heller (USA) after taking oath in Tarikolot Cimande-Bogor

Looking at facts found during observation, pencak silat is eligible to be a special interest tourism. Pencak silat possesses unique sides which are not available in other martial arts systems such as music accompanying performers with special patterns of rhythm. The martial arts has been proved to be originally genuine from Indonesia. The country as the source of this traditional self defense provides cultural attraction in every part of the archipelago. Every style offers distinct philosophy, techniques, applications and aesthetical sides. Talking about the applications, Edwin Hidayat Abdullah -an *entrepreneur*, pencak silat practitioner and traditional pencak silat preservation activist –in his *Miracle of Silat* (2013) notes that silat applies in daily life and he admits that he is successful due to his silat comprehension on applying strategy to run his business, just like The Arts of War - Tsun Zu. Silat is not just a fighting art in battles, but it is a fighting art in facing various people in business. He applies what is believed as way of life.

Appreciation on benefits gained during and after practicing pencak silat has met the criteria of becoming the special interest tourism, which is based on culture. This martial arts is getting more and more popular at the moment. Cecep Arif Rahman, Iko Uwais and Yayan Ruhian who starred *Merantau*, the

Raid 1 & 2, and *Star Wars: the Force Awakens* have given more added values to pencak silat. Recently, Ben Afflect has shown his silat fighting choreography in *the Accountant*. The arts, now, is not a hidden or secret fighting system anymore although it used to be so in some places of Indonesia a few decades ago. The researchers assume that no aggressive promotion is urgently needed for external market because the market is solid already. In this case, great opportunities are widely open for Indonesian tourism world if this is professionally managed. Those foreign practitioners will finally try to find where the roots of what they learn belong. They will seek authenticity, originality and real culture of the arts.

Travel agents can commence to think of offering holiday or travelling packages in which pencak silat as an intangible heritage is also included. The forms are various, from enjoying art performing of pencak silat to learning it with duration of days, weeks or months. Economic values will automatically and mutually be created between travel agents and traditional pencak silat practitioners. By professional management, the agents are expected to participate in preserving national heritage and, at the same time, practitioners as well as social environment will benefit from economic enhancement or empowerment.

This potential just needs to be developed and demand a solid cooperation between private and public sectors. Support from pencak silat related organizations and their practitioners is hopefully required. The only question to close this paper is when to start?

CONCLUSION

1. Pencak silat is an almost forgotten intangible heritage which actually has the potential to develop as a source of foreign exchange of Indonesia.
2. It is classified as a special interest tourism which is quite marketable for Indonesian tourism besides natural resources and other cultural artifacts because the market, in fact, is already available.
3. The government and private sectors should put serious efforts and attention on developing pencak silat as the special interest tourism.

ACKNOWLEDGMENT

1. The researchers would like to thank *Abah Gending Raspuzi* for his availability in providing all data needed.

2. Next appreciation is sent to those who have become informants during data collection and let the researchers reveal their names on the paper.
3. *Abah Azis Asy'arie* (a Cikalong *guru*), *Mas Andityas Praba* (a Cikalong Practitioner) and *Bang Galih Iman* (Paseban & Pengasinan Betawi style practitioner): Thank you for nice discussion during the initial process of the research.

REFERENCES

Paper

Kruja Drita, dan Gjyrezi Albana, 2011, *The Special Interest Tourism TURIZAM* Vol.1, p. 77-89

Parikesit, Danang dan Hernowo. 1997. *Prospek dan strategi pengembangan wisata minat khusus di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional Gegama, 8 September 1997 di Yogyakarta

Nashir, Haedar. 2010. *Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens. Sosiologi Reflektif Volume 7 Nomor 1 Oktober 2012:1-9*

Books

Aj Orhid, 2010, *Bunga Rampai Pencak Silat*. unpublished

Creswell, J.W., 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Damanik, J. Dan Weber, H.F., 2006, *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*, Yogyakarta. Andi

Fandeli, Cahfid, dan Nurdin, Muhammad, 2005, *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi Di Taman Nasional*, Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada in a cooperation with Pusat Studi Pariwisata dan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup

Gunn, Clare, 2002, *Tourism Planning, fourth edition, basic concept cases*, New York, Routledge.

Goeldner, Charles R. 2012, *Tourism : principle, practice, philosophies*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.

I Gusti Bagus, Arjana, 2015, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta, Rajawali Press

Mill, R.C. dan Morisson, M.L., 1998, *The Tourism System*. Prentice Hall

Novelli Marina, 2005, *Niche Tourism : Contemporary issues, trends and cases*. Jordan Hill, Oxford

Pitana, I.G dan Gayatri, P.G., 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta, Andi

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta

UNWTO. 25 June 2015, *UNWTO Tourism Highlights 2015 Edition*.

Wilson, Ian Douglas, 2002 *The Politics of Inner Power: The Practice Of Pencak Silat in West Java*, Thesis : Western Australia, School of Asian Studies Murdoch University

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan

Internet

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/23/058694233/agar-aliran-silat-cimande-dan-cikalong-tak-diklaim-malaysia> (accessed on 3 September 2015)

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/15/079642621/jadi-sesepuh-silat-menteri-anies-saya-deg-degan> (accessed on 28 Januari 2015)

<http://www.pikiran-rakyat.com/seni-budaya/2015/12/12/353392/helaran-dan-temu-pendekar-pencak-silat-internasional> (accessed on 28 Januari 2015)

<http://iogjajapanweek.com/> (accessed on 3 September 2015)

Video Proposal Ensiklopedi Silat Indonesia

https://www.youtube.com/watch?v=7l2j_cXtkzg (accessed on
3 September 2015)

<http://www.tourismthailand.org/See-and-Do/Activities/Thai-Boxing>
(accessed on 3 September 2015)

<http://kbbi.web.id/potensi> (accessed on 3 September 2015)

Global Tourism Challenges: Menuju Pariwisata Berbasis Syariah

Bagus Irawan

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura, Jalan raya
Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
bagus.irawan@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Perkembangan pariwisata terutama di negara berkembang seperti Indonesia, terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Tak ubahnya, sebuah komoditas ekonomi yang menjanjikan, pada akhirnya menjadi trend ekonomi dunia. Trend ekonomi pariwisata saat ini, tak lepas dari mudahnya informasi, dan tentunya perkembangan infrastruktur dalam bidang pariwisata yang semakin memadai. Pariwisata sebagai komoditas ekonomi terbesar, dan tengah menjadi industri jasa, ternyata menjadi kendala dalam perkembangannya di Indonesia. Masyarakat dengan ragam suku bangsa, budaya, dan adat istiadat menjadi salah satu sumber perkembangan pariwisata menjadi terhambat di sejumlah daerah wisata. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka kebijakan pariwisata tidak lagi berbenturan dengan kepentingan setiap daerah. Pariwisata syariah diharapkan mampu memberikan peluang perjalanan wisata yang lebih nyaman kepada pemeluk agama Islam, yang juga sebagai agama mayoritas di Indonesia. Standarisasi produk barang, dan jasa menjadi tumpuan untuk memperbesar peluang penerapan konsep pariwisata syariah dengan label halal, dan tentunya regulasi menjadi salah satu alat kebijakan. Konsep standarisasi dalam bentuk konsumsi massa adalah salah satu bentuk wajah kapitalisme fordisme. Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka, dengan alasan untuk lebih jauh menangkap situasi seputar pariwisata global, yang erat kaitannya dengan perkembangan pariwisata di Indonesia. Hasil dari penulisan ini nantinya dapat digunakan sebagai rujukan untuk memahami potensi pengembangan pariwisata, dan pariwisata syariah, dan mampu menjadi sebuah rekomendasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan bidang ekonomi pariwisata.

Kata Kunci : Pariwisata Syariah, Komoditas Ekonomi, Fordisme, Halal, Pariwisata

PENDAHULUAN

Pariwisata *syariah* selama satu dekade ini menjadi perbincangan hangat dikalangan kaum intelektual bahkan di kalangan pebisnis pariwisata. Konsep wisata syariah ini sebenarnya bukanlah hal yang baru mengingat pariwisata berbasis syariah ini telah diperkenalkan pada tahun awal milenium kedua. Namun hal tersebut kurang mendapatkan respon yang dari masyarakat dan pemerintah Indonesia khususnya. Karena kata 'syariah' ini yang identik dengan wisata religi atau ziarah (Andriani dkk, 2015: 22). Konsep pariwisata dengan pendekatan islam ini, bukan berarti tidak kompetitif mengingat persaingan pasar global yang terus menggeliat terutama di bidang ekonomi pariwisata. Pariwisata adalah salah satu komoditas ekonomi terbesar di dunia yang mendapatkan tempat yang luar biasa bahkan beberapa catatan seperti Global Paradox, John Naisbitt mengatakan dalam globalisasi, pariwisata merupakan industri terbesar di dunia, pariwisata adalah penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi global (Naisbitt dalam Gelgel, 2009: 24).

Pariwisata dengan jargon *pleasure place*, mendapatkan posisi tawar yang lebih seksi, daripada kebanyakan peluang konsumsi yang lain. Peminatan terhadap komoditas jasa dalam pasar global terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan, termasuk kebijakan 'murah' menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan sebuah pilihan produk jasa seperti pariwisata ini (Mannaserian, 2012:201). Persaingan pariwisata tidak hanya terjadi di ruang lingkup nasional namun, juga sampai kepada ruang lingkup negara bahkan sampai kepada persaingan antara negara maju dan negara berkembang. Mulai dari tawaran paket wisata, bebas visa, eksotisme destinasi wisata, wana wisata, budaya yang eksentrik, festival budaya, upacara agama, hingga wisata berbasis islam atau biasa dikenal dengan wisata syariah. Di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, telah cukup lama memberikan konsep wisata ini, dan beberapa negara Timur Tengah juga memberikan konsep yang sama, untuk menarik minat wisatawan. Seiring dengan semakin banyaknya, dan perkembangan pemeluk agama Islam negara-negara di

seluruh dunia, membuka peluang yang lebih, untuk menawarkan industri wisata syariah ini (Andriani, 2015).

Lebih jauh lagi, melihat peluang dan potensi wisata syariah terutama di Indonesia ini menjadi hal yang tidak mustahil mengingat Indonesia, sebagai pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Keinginan untuk mengembangkan konsep wisata syariah terus menggelora. Berbagai penelitian tentang wisata syariah tengah banyak dilakukan seperti penelitian Alim dkk, tentang *Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di Jawa Tengah Dan Yogyakarta*. Dengan pendekatan kuantitatif didapatkan bagaimana respon masyarakat terhadap konsep wisata syariah, sebesar 79% responden kurang memahami tentang konsep wisata syariah ini. Anggapan wisata syariah sebagai bentuk wisata religi atau wisata kerohanian ini mendominasi sejumlah jawaban responden, minimnya pengetahuan dan pemahaman terkait wisata syariah menjadi hal yang mendominasi jawaban responden dalam penelitian. Produk pariwisata syariah akan mengalami pertumbuhan yang positif apabila situasi pemaknaan, dan pemahaman wisata syariah menjadi lebih baik lagi. Sebanyak 32% responden tidak memberikan pendapat tentang konsep pariwisata syariah, dan sisanya 26% responden tidak memberikan tanggapan terkait kebutuhan dan kesesuaian pariwisata syariah (Alim dkk, 2015: 5-7). Penelitian dengan ruang lingkup kajian perspektif hunian atau kamar hotel berbasis syariah dilakukan oleh Suwardono. Penelitian ini menunjukkan adanya permintaan yang positif terhadap hotel atau penginapan berbasis syariah di Kota Semarang. Setidaknya 52% responden mendapatkan informasi dari pengelola swasta tentang hotel berbasis syariah, dengan jumlah kamar 114 dari hotel syariah yang ada di Kota Semarang. Peminatan terhadap produk pelayanan hotel semacam ini, memberikan indikasi dan peluang untuk menempatkan produk wisata syariah sebagai bagian dari pilihan paket wisata. Dengan metode kuantitatif dalam perspektif ekonomi, usaha pemerintah dan swasta juga tidak lepas dari peran masyarakat yang juga ikut mendukung adanya konsep wisata syariah yang lebih baik lagi (Suwardono, 2015: 69-73).

Pekerjaan untuk memberdayakan potensi pariwisata syariah juga giat dilakukan pemerintah, walaupun sempat ragu karena potensi ini ditengarai kurang menjanjikan, dan masih dianggap belum mampu mewadahi gelora pariwisata secara umum. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya, nama "wisata syariah" menurutnya kurang menjual di pasar wisata Indonesia, yang disampaikan pada kesempatan *Halal Tourism dan Lifestyle 2015* di NTB di hadapan Masyarakat Ekonomi Syariah (Andriani, 2015). Dalam penelitian yang berjudul kajian *Pengembangan Wisata Syariah*, yang dikelola oleh deputi pengembangan

kebijakan pariwisata, di bawah kementerian pariwisata Indonesia, memberikan beberapa catatan penting dalam sebuah hasil penelitian, salah satunya dari kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan terminologi 'wisata syariah'. Hasil FGD dan wawancara menunjukkan bahwa *penggunaan istilah "wisata syariah" dinilai kurang tepat karena terkesan kaku dan kurang menjual untuk menjadi "branding" pariwisata yang menyoal segmen wisatawan muslim. Penggunaan kata syariah harus sangat hati-hati karena berkaitan dengan pemberlakuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari...* (Andriani, 2015: 155). Aceh sebagai percontohan konsep wisata syariah, dan sekaligus menjadi salah satu lokasi dalam kajian ini. Melihat kesiapan Aceh sebagai destinasi wisata syariah masih butuh upaya dan dukungan dari berbagai kalangan untuk fokus dalam pembentukan *image*, dan ruang lingkup destinasi, serta manajemen pariwisata syariah.

Beberapa hal terkait dengan kajian dalam ruang lingkup wisata syariah telah cukup banyak dilakukan. Namun, belum mampu memberikan sebuah jawaban terkait dengan upaya pengembangan wisata syariah itu sendiri. Tulisan ini mencoba untuk mencari sebuah bentuk korelasi, dengan sebuah pendekatan studi pustaka dengan interpretasi dari sejumlah karya ilmiah baik itu berupa penelitian, buku dan kajian ilmiah yang terkait dengan pariwisata global dan wisata syariah yang ada. Melihat, dan mencoba memahami lebih jauh konsep pariwisata global, dengan berbagai kemungkinan termasuk di antaranya konsep pariwisata yang seringkali kontradiktif dengan budaya dan politik ketimuran Indonesia, penerimaan terhadap wisatawan, komersialisasi daerah pariwisata, dampak pariwisata, budaya dan akibatnya.

METODE

Metode kualitatif digunakan sebagai upaya untuk menggali sebuah pengalaman subyektif, dengan pendekatan studi pustaka. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah memberikan sebuah uraian yang jelas dengan interpretasi penulis, Studi kepustakaan adalah bagian dari usaha penelitian untuk mencari berbagai sumber penelitian terutama sumber-sumber tertulis baik itu berupa informasi dari buku, catatan, penelitian, jurnal dan hal apapun yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian yang relevan dan empiris (Zed, 2008: 4-10). Sesuai dengan tipe penelitian ini, penulis melakukan sebuah interpretasi data yang telah dihimpun melalui salah satu dokumen resmi dari Organization of Islamic Cooperation, dengan judul *Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC Member Countries*. Sumber ini menyajikan data-data terkait dengan perkembangan pariwisata syariah di negara-negara dengan penduduk muslim yang melakukan perjalanan wisata, dari berbagai situasi

termasuk makanan halal, hotel halal, destinasi halal, transportasi dan hal-hal yang berhubungan dengan potensi dan kebijakan terkait dengan pariwisata syariah secara global. Dengan menggunakan teknik analisis komparasi (Zed, 2008) dari sumber data seperti data statistik atau data angka (Chotari, 2004: 7), mencoba melihat kondisi relevan, dan realistis tentang situasi, dan kesiapan wisata syariah di Indonesia. Penelitian dengan menggunakan pendekatan studi pustaka atau *library research* dalam penelitian sosiologi, memiliki kekurangan salah satunya adalah, ruang lingkup kajian, dan teknik analisis data yang terbatas (Estabrook, 1985:464)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bukan rahasia lagi, potensi wisata Indonesia begitu melimpah dan beragam. Potensi wisata tropis sungguh menjanjikan, mulai dari pantai, gunung, budaya, sejarah hingga religi tersaji lengkap di Indonesia. Iklim yang hangat serta, kondisi geografis yang menunjang adalah salah satu hal yang menjadi peluang yang bagi industri pariwisata. Bali sebagai daerah kawasan Timur Indonesia adalah salah satu contoh nyata kesuksesan pariwisata level internasional. Namun Bali hari ini bukan begitu saja, lantas mampu mendulang sukses, tetapi Bali sebagai destinasi wisata favorit dunia telah mengalami berbagai prosesnya untuk menjadi seperti sekarang. Melihat kesuksesan tersebut berbagai daerah juga turut ikut andil untuk berkompetisi dikacah pariwisata, nasioanl mulai dari Lombok, Aceh, Jatim, Bandung, Jakarta, Jogja, dan daerah lain di Indonesia. Pariwisata sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan tentu saja digarap serius oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat mengingat potensi ekonomi global dalam pariwisata telah memberikan sumbangan relevan terhadap kemajuan perekonomian dunia (Manaserian, 2012). Pariwisata memperkejakan 240 juta orang di seluruh dunia, atau satu dari setiap pekerja, 10,6% dari angkatan kerja global. Pariwisata adalah penyumbang ekonomi terkemuka di dunia menghasilkan 10,2% produk nasional bruto (Gelgel, 2009). Globalisasi selalu bermakna organisasi transnasional atau gerakan pertumbuhan peningkatan pekerja, kemudian dilanjutkan dengan perkembangan luar biasa dari industri budaya seperti musik, film, seni, bahasa, dan juga pariwisata (During, 2005: 23).

Geopolitik Indonesia yang bervariasi, merupakan bagian dari sebuah dinamika sosial. konsep wisata global yang luar biasa ini ternyata tidak semua kalangan mampu memberi penerimaan yang sama. Maksudnya; banyak pertentangan terkait dengan keberadaan wisatawan, dan perbedaan budaya yang mencolok antara wisatawan dan penduduk lokal, sehingga perkembangan wisata dalam konsep global seringkali mengalami hambatan terutama di sejumlah daerah di Indonesia, pengaruh akan sangat terasa terutama

dengan daerah yang memiliki adat istiadat yang sangat kuat, kebiasaan yang bersifat tradisional, dan tentu saja berbeda sama sekali dengan kebiasaan di negara atau daerah asal wisatawan (Yoety, 1999: 8-9). Dari situasi tersebut, masyarakat pada akhirnya mencoba melihat pengelolaan wisata dengan cara yang lebih bijak salah satunya adalah dengan pariwisata syariah. Pariwisata syariah sendiri meliputi, *...tourism activities by Muslims in seaside destinations for the purposes of relaxation and entertainment in hospitality enterprises that apply Islamic principles. The categorization of tourism related goods and services that are designed, produced, and presented to the markets could be considered under Islamic or Halal tourism* (Duman dalam Aminul dan Kärkkäinen, 2013: 3). Aktivitas pariwisata syariah tidak mencakup produk halal saja, tetapi juga pelayanan yang berbasis prinsip Islam, dan berbagai hal termasuk manajemen marketing yang tunduk dalam peraturan dan prinsip Islam.

Dengan penduduk mayoritas pemeluk agama Islam, prinsip pariwisata syariah diharapkan mampu memberikan peluang dalam kompetisi diranah persaingan pariwisata global yang terus mengalami kemajuan yang signifikan. Sejumlah data menyebutkan tentang potensi dan kemungkinan pariwisata syariah ini menjadi trend ekonomi.

Tabel 1. Peluang dan Perkiraan Kedatangan Wisatawan Muslim Periode 2010-2020

Tahun (Lonjakan Pariwisata)	2010	2014	2020
Lonjakan Kedatangan Wisatawan Muslim (jutaan)	0, 90	1,16	1,74
Lonjakan Belanja Dari Kedatangan Wisatawan Muslim (Dalam Jutaan US)	984	1, 328	1, 795

Sumber : Crescent Rating dalam Comcec, 2016: 72)

Data di atas memberikan penjelasan tentang peluang, dan perkiraan kedatangan wisatawan muslim dari seluruh dunia. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa, adanya kedatangan wisatawan muslim, merujuk pada kesiapan segala hal yang terkait dengan kedatangan wisatawan muslim tersebut. Setidaknya dengan kedatangan wisatawan ini, kesiapan seperti infrastruktur, manajemen, paket wisata, regulasi pemerintah, politik dan budaya tentu harus mampu mengikuti trend perkembangan kedatangan wisatawan ini. Ditinjau dari beberapa penelitian sebelumnya, bahwa pengetahuan atas pariwisata syariah masih minim mengingat lemahnya edukasi kepada calon wisatawan terutama dalam negeri untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep wisata syariah (Andriani, 2015).

Selain daripada itu seiring dengan perkembangan konsep pariwisata syariah, produk halal di Indonesia tengah terus memberikan label halal oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada produk-produk konsumsi. Pentingnya memberikan sebuah *brand image* dalam produk halal juga tidak berhenti dalam sektor formal, tetapi juga sektor informal seperti sertifikat halal pada produk di pasar tradisional. Misalnya rumah pemotongan hewan yang dikelola oleh masyarakat sebaiknya diberikan label halal, produk UMKM dan produk-produk berbasis ekonomi kerakyatan juga perlu memberikan peran dalam kancah persaingan produk halal dalam negeri. Namun produk halal, hanya berhenti pada produk konsumsi. Tempat makan, restaurant, atau tempat destinasi belum ada label halal, kebanyakan fokus pada produk barang bukan jasa. Jasa hanya berhenti kepada salah satu produk yakni perbankan syariah, sepanjang pengetahuan penulis perbankan syariah ada beberapa variasi produk seperti saham syariah, dan koperasi syariah. Konsep syariah dalam perbankan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980an.

Hotel atau penginapan dengan label halal belum banyak berdiri, tentu saja pelayanan hotel juga menyertai konsep syariah juga. Promosi paket wisata berbasis syariah juga belum banyak dilakukan oleh pemerintah, dan swasta mengingat belum banyak yang mengetahui tentang *branding* wisata syariah (Comcec, 2016: 76). Lebih jauh lagi, dengan semakin banyaknya kedatangan wisatawan muslim atau wisatawan non-muslim tentu memiliki dampak tertentu terhadap masyarakat. Pariwisata sendiri menurut E. Guyer Freuler merumuskan pariwisata dalam artian modern merupakan fenomena dari zaman saat ini yang didasarkan atas kebutuhan akan menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam, dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa, dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan transportasi (Yoety, 1999: 2).

Pariwisata sendiri tidak membatasi tentang peluang perjalanan wisata itu sendiri termasuk kepentingan urusan dagang, rekreasi, konvensi, olahraga, dan budaya (Spillane, 2000: 29), maka dari itu keinginan wisatawan menjadi hal yang menjadi prioritas dalam kegiatan ekonomi yang berbasis pariwisata. Telah disebutkan, motivasi wisata cenderung berkisar pada teori *push* dan *pull*. Teori ini mengasumsikan bahwa perjalanan wisatawan dan memilih tujuan mereka berasal dari dorongan yang berbeda, dan menarik variabel motivasi. Pada dasarnya, hal ini adalah dua langkah proses yang melibatkan faktor pendorong yang memotivasi seseorang untuk meninggalkan rumahnya, dan faktor-faktor yang menarik individu untuk

melakukan perjalanan ke tempat yang khusus. Faktor dorongan menawarkan wawasan ke rangsangan internal dimana turis atau wisatawan melakukan perjalanan dan berguna dalam menjelaskan keinginan untuk pergi berlibur. (Belo dan Etzel, 1985; Crompton, 1979; Goossens, 2000; Kozak 2002) Klenosky (2002, p.385) menyatakan bahwa "...faktor *push* merujuk pada masukan khusus dalam hidup kita yang mengarah pada keputusan untuk berlibur (yaitu, melakukan perjalanan di luar lingkungan yang normal kita sehari-hari)..."(Alghamdi, 2007: 81-96).

Pariwisata sebagai suatu industri global, aspek yang mendapat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata adalah aspek ekonomi. Terkait dengan aspek ekonomi pariwisata dikatakan sebagai suatu industri, bahkan kegiatan pariwisata dikatakan sebagai suatu kegiatan bisnis yang berorientasi dalam penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan (Outra dalam Gelgel, 2009: 22-23). Sebagai suatu industri, tentu produk pariwisata adalah, konsumen, permintaan, dan penawaran. Dalam bisnis pariwisata konsumennya adalah wisatawan, kebutuhan dan permintaan-permintaan wisatawanlah yang harus dipenuhi oleh produsen dalam industri pariwisata (Gelgel, 2009: 24).

Some of the challenges Indonesia's tourism industry faces include the development of infrastructure to support tourism across the archipelago, and the impact of tourism development on the life of local people. Despite the optimism of officials, there are concerns by some segments of the travel industry that advancement for Islamic tourism could alienate other visitors who want to sunbathe or relax on the beach with a drink. But the local government insists it can promote "shariah tourism" without affecting the existing industry, and that party hotspots in the area will remain unaffected. (Comcec, 2016: 77)

Pernyataan dalam penelitian di atas memberikan sebuah catatan penting, bahwa tantangan Indonesia menghadapi industri pariwisata secara global tidak hanya pembenahan infrastruktur karena kontur daerah atau wilayah geografis yang bervariasi saja, namun semakin tingginya kunjungan wisatawan ke Indonesia juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Greenwood dalam tulisan Pitana dan Gaytri melihat, secara evolusi hubungan antara wisatawan dan masyarakat lokal menyebabkan terjadinya proses komoditas dan komersialisasi dari keramahtamahan masyarakat lokal. Pada awalnya wisatawan dianggap "tamun" dalam pengetahuan tradisional, dengan keramahtamahan tanpa motif ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan bertambahnya jumlah wisatawan, maka hubungan berubah menjadi resiprositas dalam artian ekonomi, yaitu tujuan komersialisasi. Apabila

sampai melewati batas-batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat lokal, maka hubungan bisa menjadi anomi. Dan masyarakat lokal sudah mulai agresif terhadap wisatawan, mengarah kepada eksploitasi dalam setiap transaksi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Pada fase-fase seperti ini, banyak ditemui tindakan kriminal terhadap wisatawan (Pitana dan Gayatri, 2005: 83).

Lebih jelas Doxey (Pitana dan Gayatri, 2005) memberikan tahapan penerimaan atau persepsi masyarakat, terhadap wisatawan:

1. *Euphoria*. Kedatangan wisatawan diterima dengan baik dengan sejuta harapan. Hal ini biasa terjadi tahap awal perkembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata
2. *Apathy*. Masyarakat menerima wisatawan sebagai suatu yang lumrah, dan hubungan antara masyarakat dengan wisatawan didominasi oleh hubungan komersial. Fase ini umumnya menekankan pada aspek pemasaran pariwisata.
3. *Annoyance*. Titik kejenuhan sudah hampir dicapai, dan masyarakat mulai merasa terganggu dengan kehadiran wisatawan. Perencanaan umumnya berusaha meningkatkan sarana dan prasarana, tapi belum ada usaha membatasi pertumbuhan
4. *Antagonism*. Masyarakat secara terbuka sudah menunjukkan ketidaksenangannya, dan melihat wisatawan sebagai sumber masalah. Pada fase ini perencanaan baru menyadari akan pentingnya perencanaan menyeluruh. Dalam situasi yang ekstrim, maka wisatawan akan dipersepsi secara negatif oleh masyarakat lokal.

Tahapan-tahapan inilah yang nantinya ditemukan ketika tahapan pariwisata itu terjadi, maka sebelum lebih jauh ketahapan penerimaan atau persepsi masyarakat terhadap wisatawan tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah, *elite* lokal dan pemangku kepentingan untuk bersinergi satu sama lain. Politik dalam hal ini melihat bahwa kepentingan yang ada merupakan peluang dalam bentuk komoditas ekonomi, regulasi yang humanis serta negasi diperlukan untuk memberikan peluang, dan kesempatan dalam perkembangan pariwisata tentunya.

Gerakan keagamaan dengan memberikan label halal dalam setiap produk barang dan jasa (standar) adalah upaya politik dalam bentuk yang lebih apik, dengan semakin menguatkan asumsi bahwa kepentingan mayoritas dalam artian kalangan mayoritas mencoba mendominasi komoditas pariwisata ini dengan *branding* pariwisata syariah. Komoditas pariwisata dengan standar produk, termasuk produk massa, untuk pemasaran yang lebih luas dan pasar dengan target

tertentu, kualitas yang hampir sama dengan komoditas dan konsisten, standarisasi memastikan sebagai bentuk produk komoditas dan termasuk di dalamnya kualitas pelayanan yang terstandar (Wang, 2000: 192).

Kemunculan gaya hidup baru seperti pariwisata ini adalah bentuk dari budaya konsumsi baru (Wang, 2000:112). Kemunculan pariwisata sebagai kebijakan keuangan murah berdasar paket wisata (Manasserian, 2012) adalah bentuk transformasi struktur gaya hidup kelas sosial penerima upah. Lebih tepatnya disebut sebagai *fordisme*, adalah sebuah konsep ekonomi monopolistik dengan penerapan produksi massal, mangacu kepada bentuk akumulasi intensif, yakni bentuk kapitalisme yang sukses abad ke-20. Hal ini ditandai pula dengan adanya kemunculan masyarakat konsumen modern, perubahan sosial dan perubahan budaya. Transformasi relasi produksi sosial yang dimunculkan oleh relasi produksi tersebut menjadi langgeng karena perkembangan bentuk monopolistik yang khas. Hal ini terlihat pada hegemoni yang luar biasa di sebagian besar kehidupan sosial, yang membangun fokus utama pada aliansi segitiga antara modal-kerja-negara (Lee, 2015: 124).

SIMPULAN

Komoditas ekonomi seperti pariwisata, secara global adalah bentuk kapitalisme. Termasuk bagaimana menempatkan pariwisata ke dalam sebuah bentuk masyarakat dengan pemeluk agama mayoritas Islam seperti Indonesia. Meskipun konsep pariwisata berbasis syariah, namun standarisasi produk barang, dan jasa, dalam bentuk konsumsi massa adalah salah satu konsep kapitalisme *fordisme*. Hal ini ditandai dengan mudahnya akses informasi serta peluang untuk memberikan lebih banyak informasi terkait dengan program wisata seperti wisata syariah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghamdi, Abdulraheem. 2007. *Explicit And Implicit Motivation Towards Outbound Tourism: A Study Of Saudi Tourists*. Tesis (non publish). The University Of Glasgow, School Of Business And Management as a thesis for degree of doctor of philosophy in marketing
- Aminul, Islam Md dan Laura Kärkkäinen. 2013. *Islamic Tourism As A Prosperous Phenomenon In Lapland*. Thesis Published. Rovaniemi University Of Applied Sciences School Of Tourism And Hospitality Management.
- Suwardono, Harijanto. 2015. *Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan Di Kota Semarang (Kajian Dari Perspektif Syariah)*. Tesis Diterbitkan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Andriani Dkk. 2015. *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta: Asisten Deputi Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata
- Alim, Haidar Dkk. 2015. *Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta*. PKM-P published. Universitas Diponegoro
- Comcec. 2016. *Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sides in the OIC Member Countries*. Turkey: Comce Coordinator Office
- Chotari, C. R. 2004. *Research Methodology, Methode and Techniques*. Second Edition. New Delhi: New Age International
- During, Simon. 2005. *The Cultural Studies Reader*, Second Edition. London and New York: Routledge.
- Estbrook, Leigh. 1986. *Library Research in Sociology: A Student Manual of Information Retrieval and Utilization Skills*. United States: Wyndham Hall Press
- Gelgel, I Putu. 2009. *Industri Pariwisata Indonesia dalam globalisasi perdagangan jasa implikasi hukum dan antisipasinya*. Bandung: PT Refika Aditama
- Lee, Martin J. 1993. *Kebudayaan, Konsumsi, dan Komoditas, Sebuah Kajian Politik Budaya Konsumen*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. 2015. Bantul: Kreasi Wacana
- Manasserian, Tatoul. 2012. Global Financial Epidemic: Challenges And Lessons Learned dalam buku Brian De Schaine (ed) *The World Economy Today: Major Trends And Developments First Edition*. Armenia: Research Center Alternative.
- Spillane, James J. 2000. *Ekonomi Pariwisata, sejarah dan prospeknya*. Yogyakarta
- I Gede Pitana dan Putu G Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi offset
- Yoety, Oka A. 1999. *Komersialisasi Seni Budaya dalam Pariwisata*. Bandung: Angkasa
- Wang, Ning. 2000. *Tourism And Modernity A Sociological Analysis*. United Kingdom: Pergamon

Reactive Strategy and Personal Image: A Guide for 'Awkarin'

DittaHumammy
Hanifah Amalia Sabri,
Mohamad Shihab

Communication Studies Program President University
dittahumammy28@gmail.com

Abstrak

Sebagai bagian dari budaya digital, vlog menjadi populer dikalangan remaja. Vlog adalah cara baru untuk menulis blog, yang menggantikan teks dengan video sebagai isinya. Dalam rangka menarik pemirsa pada channel mereka, vloggers menciptakan karya-karya yang unik dan beragam untuk di upload melalui video-sharing platform. Namun, vlogger bernama Awkarin telah mengejutkan netizen Indonesia. Karin Novilda atau akrab disapa Awkarin adalah mahasiswa 19 tahun di sebuah universitas swasta di Jakarta. Awkarin mengupload videonya yang mengandung unsur vulgar, kata-kata kasar, dan konten yang tidak pantas untuk remaja di bawah 17 tahun. Tidak hanya di saluran YouTube-nya, Awkarin juga berbagi video yang tidak pantas dan foto di akun media sosialnya yang lain seperti di Instagram dimana ia memiliki lebih dari 1 juta pengikut. Dengan banyaknya pengikut social media Awkarin yang berasal dari beragam latar belakang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia khawatir bahwa dia akan memberikan pengaruh negative kepada anak-anak sehingga mereka meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menanggukhkan salurannya. Dalam usia muda, situasi ini pasti akan berdampak ke citra dirinya di masa depan jika tidak ada tindakan pemulihan diambil. Oleh karena itu, pendekatan public relations harus digunakan. Di sini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif tentang isu-isu gender di media social dan menguraikan praktek dari strategi Public Relations. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengusulkan strategi PR agar citra dari sosok Awkarin menjadi positif dimata publik.

Kata Kunci: budaya digital, pencitraan, public relations, media sosial, vlogging, Awkari

INTRODUCTION

In this century, technology is developing rapidly, not only as a tool but recently technology became one of the most important parts of human life. It is proved by the widely use of digital media which becomes apart of today's technology. Two of the most famous social media recently are YouTube and Instagram.

Today, teenagers are very addicted to social media, quoted by teknologi.metrotvnews.com (EllavieIchlasa: 2016), around 75% of teenagers under 13 years old are already using social media. Social media offer different sensations from time to time, for now the trend is 'vlog'. Vlog or Video Blogging is an activity with the same purpose of writing a story or a message, but it delivers by video then they upload it through media sharing platform called YouTube. There are lot of variances of 'Vlogger' in Indonesia, they compete each other to create a unique and interesting content for their vlog in order to get a good response from netizen in the form of likes and subscribers. Besides, there are also activities with the same purpose as vlogging by posting a photos on a social media account named Instagram. Moreover, many people are gaining popularity among netizens through Instagram that usually called as 'Celebgram'.

Recently, Indonesia has been shaken by the news of celebgram and vlogger named Karin Novilda.k.aAwkarin, 19-years-old student in a private university in Jakarta. Awkarin freely upload videos and photos on her social media accounts with vulgar content that display an affection toward her ex-boyfriend named Gaga, a 16-years-old high school student that considered as an 'adult' content. Instead of the vulgar content, Awkarin often saying a harsh words which considered as uneducated. The way Awkarin dress that seen on the video and photo on her YouTube and Instagram increasingly make netizens especially parents being worried about that. The reason is that the parents worried about their children who may be affected by the video and photos of Awkarin to follow that. Netizens also argue that the video intimacy of Awkarin and Gaga regarded as a 'relationship goal' which will be cool to follow.

As a result of the problem, Awkarin reported by the Indonesian Commission for Child Protection (KPAI) to the Ministry of Communication and Information (Diskominfo) to suspend her channel on the basis of worrying actions in social media that can give a negative impact for her followers which has been reached millions of people. Summarized from detik.com(RiniFriastuti: 2016), the meeting results of

Awkarin with KPAI are, KPAI explained to Awkarin that besides the sake of entertainment every content must also have educational dimension, but in reality there are full of negative elements that could interfere the process of future development of children. Awkarin also admitted her actions that were inappropriate and apologize for it. She promised to remove the inappropriate content and will post the content which is more educational, and committed not to repeat it in the future.

Awkarin with all the negative sensation was inevitable, but it cannot be denied also that Awkarin is smart and creative. Awkarin have earned the highest ranking of national exam (UN) in Junior High School (SHS) in Riau Province with 37.9, such an almost perfect score. Instagram feeds of Awkarin was very unique and interesting, it can be seen from the order of photos, colour, and caption stated entirely very creative and organized. Awkarin also have started doing business since SHS and still continuing until today. She even could pay her own tuition fees and buy expensive items for her parents. Creativity, tenacity, and intelligence of Awkarin exposed outside all of the bad things that she ever did. It is all show that she has tremendous potential and talent as a youth. Moreover Awkarin proved to have a special attraction where she could become famous and be a trendsetter among teenager with approximately 1.1 million followers on her social media accounts.

The existence of Awkarin in this context has become an interesting one when we associated with politic democracy and gender issues. Studied from the writing of Madalina Epure (2014) she stated that for radical feminists, men as a group are the main enemy to be tackled, defeated and wistfully, perhaps even subjugated by women and this would lead to a matriarchal society, and one has to wonder if that would not make the women just as bad as the men they so vehemently criticize. Here, the gender issues appear is radical feminism whereby the rights of women are limited by men. Hellen Clark (2008) believe that the more are social, cultural, and attitudinal problem which prevent woman from enjoying full equality with men. As the impact, woman cannot fully express themselves as men. Besides, public opinion assume themselves as a democratic society while they tend to limit the freedom of expression of its own society.

Cultural factors is one of the reason of discrimination against women. This is because male (masculine) is always in the first priority among societies, a men is superior and female is inferior. However, sexism applied when a fault decided by the gender. The theory stated are suitable with the reality nowadays since

Awkarin has an interconnection between sexism, culture, and democratic public. In fact, Awkarin who upload sexy pictures that shows her beautiful body shape is considered as a wrongdoing even as a 'fault', while many men actually considered as 'cool' when they upload photos with sexy pose showing their muscle-bib. Our country is a democratic country, but Awkarin who expresses her freedom by publishing their own photos and video through her 'personal account' at social media has been getting too much condemnation. However, social acceptance is very important when you are a teenager. As if when you are a teenager, you must be want to try everything that seems as a cool things ever in your teen life and you will be happy when everybody know it.

With that bad reputation, Awkarin in her young age is feared will give the bad impact for her future if no recovery action applied. And the most unfortunate thing that might be happen is all of her charm, creativity, and potential talent will be useless because no one will trust her. Therefore, some approach in the form of personal branding by Public Relations is need to be applied soon. Alipour, Hossein; Jahan, Mehdi Hazrati; Jamaati-e-Somarin, Shahzad (2015) argue that "personal branding is the process whereby people and their careers are marked as brands and it differs from reputation management and impression management with its purpose". However, according to Kleppinger, Courtney A. Cain, Jeff (2015) "when social media is part of the hiring equation, it can become a deciding factor to the benefit of candidates with a strong digital brand". While usually, branding efforts require extensive financial support for promotion to create brand awareness and afterwards brand loyalty, but with social media and its ideological and technological structure could give the opportunity to the people to promote themselves as brands in a relatively cheap and efficient manner (Karaduman: 2013).

Essentially, in this article, we will elaborate further and proposing the Public Relations (PR) Strategy for Awkarin based on the analysis of gender issues and the culture as well as the politic democracy and other evidences which come from the previous cases and/or issues. Our analysis is to arrive at a new result, that is, Awkarin need a new personal image that could be acceptable by public. With proactive and reactive strategy wrapped by persuasion concept, hence this personal branding aims to create the personal image of Awkarin become positive in the eyes of the public for the sake of a better future.

METHODOLOGY

In this article, authors use the method of qualitative analysis. Authors will elaborate and analyze the practical strategy of public relations in handling the issue of Awkarin that related to Gender Issues, Culture, and Politic Democracy. Here, the authors focus on the public and Awkarin as the object of analysis. The authors collect the data by studying the literature review and another case that related to this problem. Social media and internet are become the instrument of this analysis research.

RESULTS AND ANALYSIS

From this case, authors did some research related to the culture, politic and human right, hence there are some findings about theory that could related to Awkarin's case.

Gender issues, is interdisciplinary and cross-national in scope focusing on gender and gender equity. And one of gender issues that could relate to this case is *feminism*. *Feminism* is a women rights that limited by men.

In the case of Awkarin, she wears inappropriate clothes while she is an Asian whereby Asian stereotype of a woman who wear an open clothes is a 'bad girl' even though it is her rights to wear anything. It is all limited by men because Asian prefer to not wearing that since it will distance them from any harm caused by men.

We can relate it with case of rapes in Indonesia, wildly known there is a high percentage of rape cases in this country. Though the suspect will get penalty by law but the victim will have the long-term effect that will be traumatic for them. Even though the woman always being the victim, not so many cases also said that the woman is the suspect because exposing too much skin from her clothes that lead to the crime. While it is the rights of women to wear anything they concern, especially in this country which is a democratic country. According to feminism it is not right to put the blame on women only because the way she dress and also this is a democratic nation which the society could express themselves. And because of that the author thought that this could be applied on Awkarin's case, since it is her rights to dress the way she is because it's the way she is expressing her style.

Social Cultural is a human population viewed in its ecological context and as one of the many subsystems of a larger ecological system. But there is also some problem regardsocial, cultural, and attitudinal problem which prevent woman from

enjoying full equality with men. Therefore it needs the *social-acceptance* to understand and pursue the equality in society. The author thinks that the social-acceptance could be apply for the case of Awkarin, because she has been misjudged for her style and scandal.

Sexism is a gender discrimination or prejudice based on a person's sex or gender. Sexism can affect any gender, but it is particularly documented as affecting women and girls. Because society always looking for suspect to be blame not to find the solution of the problem.

And from this theory author find that Awkarin has got discrimination since she is still a teenager. She is known as the 'drama queen' and a 'bad girl' because of her posts on her social media, meanwhile when a boy that has the same age with Awkarin or even younger everyone call it as 'cool' when he post their muscle with nude pose but when Awkarin post her picture to show her body shape because she has been working on it everyone call it as 'a bad girl' and even 'a fault'. The society discriminate her with the reason that she is still a young girl and should not be act that way while now we are living in the new generation of digital culture where everyone can access and express themselves freely.

Politic, for the relation with politic the author use the theory of Democracy where Indonesia is a democratic nation but the public didn't really apply the definition of democracy because the public is still think in an old-fashioned way.

Indonesian Commission for Children Protection (KPAI) called Awkarin due to her posts and contents in YouTube and Instagram that regarded as a problem for children and make the parents worry while those are her private account. Since she published it in her private account then only the one who want to access that can see it, thus it is totally different with TV that the broadcasting rights belong to public. Therefore, the authors thought that KPAI should not do that to Awkarin, but should find the solution of it. The authors think that Awkarin is not fully at fault because she has right to post anything on her social media but indeed she need to be aware about the content that she wants to share.

One of the example for this case is about the singer Syahrini or also known as Princess Syahrini who wildly known as a 'drama queen' in Entertainment Industry that always show off her wealth. Because of that she gain many of haters for make a lot of sensational in entertainment industry, but behind those all sensational issues she prove herself by showing her talent with her

songs and she also succeed with her business. The relation with Awkarin's case from the authors' point of view is that both of them got misjudged because of showing what they have, where they are living in the country that apply democracy who highly respect the freedom of expression.

Therefore, what Awkarin needs is a PR because she actually has a potential especially in getting attention and become trendsetter. From author's point of view she has talent and has her own credibility in her knowledge of art and creativity. To accomplish author's purpose to make a guide of personal branding for Awkarin author will use the persuasive concept, because with persuasive concept it focus on the content to influence people, thus we will apply the PR strategy below.

Reactive strategy:

Ronald D. Smith in his book explain that Reactive mode is happen when the organization getting the accusations and criticisms. And to respond to those forces the organizations should develop and maintain the objective of organizations such as gaining public understanding, maintaining and restoring reputation, and re-building trust and support.

Diversionsary response strategies: From Ronald D. Smith in his book *Strategy Planning for Public Relation* explain that several diversionsary strategies could be used to communication planners. They include concessions, ingratiation, disassociation and relabeling, all of which are attempts to shift the gaze of the public from the problem related with the organization. And from those strategies the authors choose concession, ingratiation and disassociation as the strategy to re-branding the image of Awkarin because the authors think it suit for the case of Awkarin.

Concession is a strategy that trying to re-build the relationship with its public by giving something it wants. And it should be valued for both public and organization to aims the generating favorable publicity for an organization under fire. From general definition concession is a contractual right to carry on a certain kind of business or activity in an area. And this strategy could relate to authors' purpose to re-branding Awkarin's image by using her link with her clients of endorsement.

In authors' opinion Awkarin can use this concession strategy to fulfill all the orders of endorsement from her clients to show that Awkarin is professional, before she was known as a 'bad girl' these days, people known her as a celebgram with a creative and unique feeds on her Instagram. The public that authors' means in this

concession strategy is the clients of Awkarin who wanted their product being promoted on Awkarin's feeds in Instagram, beside Awkarin's creative and unique feeds she also has a lot of followers that the public or clients think that would help to increase the selling. There was also an issue that Awkarin haven't upload or do the endorsement from the due date of clients because of her controversial video as a 'drama queen' on YouTube, with that the authors propose that Awkarin can use this concession strategy to rebuild her relationship with her public or her clients by giving what the public or her clients wants with upload the pictures of endorsement 6 times per day, and each from different endorsement with the same background and theme.

This concession strategy has been applied on the scandal of Malaysia Airlines MH370 who got shoot in the midair of Ukraine 2 years ago, the victim's family demand for compensation to Malaysia Airlines and after a long process each family of the victims got compensation 1,8 billion rupiahs from totals of 298 victims.

Disassociation is the second strategy that authors use from Diversionsary Responses Strategy. It is a strategy that attempts to distance an organization from the wrongdoing associated with it. This can be effective when an accident occurred not because of organizational policy but because policy was not observed, especially when the organization was suffering ties with the cause of problem. And in this case Awkarin is still 19 years old and regarding social acceptance theory, teenager wants to looks like a cool kid so they can be accepted in their society.

Authors' opinion proposes that Awkarin should make the video blogging of her daily life and do meet and greet with fans since she already joined an agency (*Takis Entertainment*). It could answer the curiosity of netizen with her lifestyle and since she joined an agency it wouldn't look as a '*pencitraan*' if she do a meet and greet with her fans. And when editing the video blogging it needs filter for the vulgarity, smoking and clubbing and do the audio sensor for the inappropriate words, and with her her joined an agency she need to refrain herself to show anything freely like she used to because it will damage the agency's image and she need to keep her image professional because she work under contract and has new responsibility now.

Ingratiation is the last strategy that the authors propose from Diversionsary Responses Strategy, it is an attempts to manage the negative situation by charming its public or 'tossing a bone', giving something relatively significance to the organization in attempt to turn the

spotlight away from the accusation and criticism. And from the point of view of psychology, ingratiation is a psychological technique in which an individual attempts to influence, manipulate or control another by becoming more attractive or likeable to their target. This term was coined by social psychologist *Edward E. Jones* (1964). This psychological technique has several methods that the authors' think one of its methods could be useful for Awkarin's case, Self-Presentation is one of the techniques that could be used, it is a technique in which the ingratiation¹ emphasizes their own attributes in order to be seen positively in the eyes of the target individual. Because the author's purpose is to re-branding the image of Awkarin to be better in the eyes of public and the method is by persuading the public with self-presentation technique.

From author's point of view, Awkarin or Karin Novilda is a smart girl and has a creative ideas about art. It show on her feeds on her Instagram, where she take the picture, the lightning, angle and even the theme for each of her photos show that she know about art and has interest on it. And for her YouTube channel she once explain on her video that she is the one who edit her video blogging, she did not pay for the experts to edit her video when she earn enough to pay it, authors' opinion think that she also has the skill on editing video and love to do it because she is full of ideas and creativity. With this ingratiation strategy authors' propose that following with the music video of Bad Girl she has to come up with new concept and idea to charm the public and her fans and to show that Awkarin is full of ideas. She already charm her fans and public with her creative feeds on Instagram because her feeds on Instagram were known as unique and she is the one behind those ideas so she also needs to apply that on her video blogging to show people that she is creative and has her own style.

The example for this case that concluded from *Kompasiana.com* (TrieYas:2015) is when Sammy Simorangkir has to lose his position as Kerispatih's vocalist since he got caught using narcotics in 2010. One year later on 3rd February 2011 he was released and soon after he have to go to the rehabilitation for several months to clear his addiction toward those addictive drugs. After that he come back to the entertainment industry as a solo singer. From author's opinion Sammy succeed on using the ingratiation strategy by charming public with his self-writing songs as a solo singer after his scandal with narcotics, he show that he really loves to sing and it is his passion and it shows when all of his

songs become hit in Indonesia music industry. Even though Sammy has been kicked out from Kerispatih, he still maintain the relationship with the member of Kerispatih. They even held a concert together on April 2014, showing that they're still in a good terms.

Proactive Strategy is a Public Relations strategies initiated by the organization are called proactive strategies. These can be the most effective strategies because they are implemented according to the planning of the organization, rather than because of a need to respond to outside pressure and expectations from publics. And it is an approach that enable an organization to launch a communication program under the conditions and according to the timeline that seem to best fit the organization's interests.

Coalition and Alliances is when two or more organizations join together in a common purpose, the combined energy offers a real opportunity for strategic communication initiatives. Since Awkarin has joined an agency, the agency have to start to make plan to maintain the popularity of Awkarin and with alliances concept the agency could gain more profit and also make a new relation with other agencies or organizations. Alliances tend to be informal, loosely structured, and perhaps small working relationships among organizations. Authors choose this concept because Awkarin is not a real 'Artist' who work under a big company and the agency she recently joined is also still a small agency.

Authors propose that Awkarin could make an alliances with YouTuber and Celebgram Chandraliow, because it would help the image of Awkarin since Chandraliow is a credible YouTuber and celebgram and he is creative and well-known as an editor and director in his agency. They can share their thought and ideas as the content of their collaboration video. Beside with Chandraliow as YouTuber, Author propose that Awkarin could also work together with models to increase the sales of her endorsement and with singer other than Young Lex to show that she has another talent.

Rectifying Behavior is the theory when the organization does something to repair the damage done to its publics. Awkarin's name recently have been popular since her video confession which after that she got the title of 'drama queen' and also with her feeds on Instagram that show vulgarity which lead to the complaint of parents to the KPAI that it would give a negative impact to the children, because she has a lot of followers. And from four types of concept of rectifying behavior author

¹Ingratiator: Individuals or Organization that use the method

choose corrective action as the concept for the personal branding of Awkarin.

Corrective Action is a taking steps method to contain a problem, repair damage and or prevents its recurrence. It can serve the mutual interest of both the organization and its public. It is if an organization in a position to fix a problem. Now with Awkarin has joined TAKIS Entertainment agency, this agency need to take this concept because it will help to clean the image of Awkarin and could increase the popularity of this agency if they succeed on doing this concept.

Authors propose that for the corrective action concept Awkarin can start by wearing a proper clothes, she was known as her vulgarity for words and clothes because she often wear the clothes that showing much of her skin. The agency could step in and control the way she dress because she is under the contract and there should be manager and her own stylist to manage her clothes, but still has the style of Awkarin.

According Ronald D. Smith (2005:112) for this case example authors choose the Johnson & Johnson's scandal when their product is the cause of the death because of Tylenol element on their product. Though it was not because the company negligently responsible for the product tampering. Johnson & Johnson's recalled all the product and then introduced a new triple-seal safety packaging that soon became the industry standard.

CONCLUSION

In this era, there is a new culture that could be accessed in everywhere, it is called as digital culture. Everyone tend to use digital media even addicted to it until it become the important part of their life. Although technology and media has been increasing but feminism still exists. Awkarin's case is one of example of feminism that appears caused by media digital and social media. As a country that believe in democratic, we still find many limitation in conveying our thoughts, feelings, even in expressing our self.

Society needs guidance in using and responding digital media. Because digital media created in purpose to help people in doing their activities and hoping that many creations could come after, not make a negative activities and/or limiting the others creation. In the end, this article aims for handling theAwkarin's caseby some public relations strategies and approaches nor hope itmight be applied also for the other same case in the future.

REFERENCE

- Alipour,Hossein; Jahan,MehdiHazrati; Jamaati-e-Somarin, Shahzad. 2015. A Review on Personal Branding and Social Media. *Journal of Current Research in Science*Vol. 3 (6): 11-14
- Amalia, Ichlasa, Ellavie. *Teknologi.metrotv.com*. "Survei: 75% Anak Dibawah 13 Tahun Sudah Gunakan Sosial Media". 2016 Retrieved October 14,2016 from: <http://teknologi.metrotvnews.com/read/2016/02/10/482269/survei-75-anak-di-bawah-13-tahun-sudah-gunakan-media-so>
- Clark, Helen, Hon. 2008. *All Human Beings are Born Free and Equal in Dignity and Rights*. New Zealand: The Ministry of Foreign Affairs and Trade/Manatō Aorere
- Duman, Fatih. 2012. The Roots of Modern Feminism: Mary Wollstonecraft and the French Revolution. *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 2 (9): 75-88
- Epure, Madalina. 2014. Critically Assess: The Relative Merits of Liberal, Socialist and Radical Feminism. *Journal of Research in Gender Studies* Volume 4(2): 514-519
- Friastuti, Rini. *Detik.com*. "KPAI danKominfoAdakanPertemuandenganAwkarin, IniHasilnya". 2016. Retrieved October 13, 2016 from <http://news.detik.com/berita/d-3310183/kpai-dan-kominfo-adakan-pertemuan-dengan-awkarin-ini-hasilnya>
- James, Carrie; Davis, Katie; Flores, Andrea; Francis, John M; Pettingill, Lindsay; Rundle, Margaret; Gardner, Howard. 2010. *Young People, Ethics, and the New Digital Media*. *Contemporary Readings in Law and Social Justice* Vol. 2 (2): 220
- Jones, E.E. 1964. *Ingratiation: A Social Psychological Analysis: Century Psychology Series*. Meredith Publishing Company.
- Smith, R. D. (2005). *Strategic planning for public relations*. Mahwah, NJ, London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Yas, Trie. *Kompasiana.com*"Lepas Dari Narkoba Dan Kerispatih, Sammy SimorangkirSemakinBersinar". 2015. Retrieved October 12, 2016 from: http://m.kompasiana.com/lannang/lepas-dari-narkoba-dan-kerispatih-sammy-simorangkir-semakin-bersinar_55638e43b3927332178dcb28

IKLAN POLITIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH PARTAI GOLKAR PADA PEMILU LEGISLATIF

Ramadhan Wengku Arizal
Heny Hendrayati

Prodi Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia
e-mail: ramadhan93arizal@gmail.com

Abstrak - Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah turunnya tingkat raihan suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif. Permasalahan ini harus segera diatasi karena jika tidak Partai Golkar akan semakin tidak diminati dan kembali kalah raihan suara dari partai lain pada Pemilu selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran iklan politik terhadap keputusan memilih serta bagaimana pengaruh iklan politik terhadap keputusan memilih pada Partai Golkar. Aspek atau variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu iklan politik dan keputusan memilih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif dengan metode *explanatory survey*, yaitu metode survey untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini yaitu pemilih pemula Mahasiswa UPI yang berjumlah 5054 orang dan sampel berjumlah 100 responden. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik penarikan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis koefisien korelasi *pearson product moment* dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan politik pada Partai Golkar berada pada kategori sedang dan keputusan memilih berada pada kategori tinggi. Hasil perhitungan korelasi, variabel iklan politik terhadap keputusan memilih memiliki hubungan yang positif dengan klasifikasi sedang. Hasil perhitungan analisis regresi sederhana diketahui bahwa keputusan memilih dipengaruhi oleh iklan politik sebesar 28,1%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 71,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Saran untuk peneliti berikutnya yaitu diharapkan peneliti melakukan studi terhadap pemilih pemula dengan variabel dan penelitian yang berbeda.

Kata Kunci: Iklan Politik, Keputusan Memilih, Metode Survey, Partai Golkar, Pemilu Legislatif, Pemilih Pemula, Penelitian Deskriptif, dan Penelitian Verifikatif

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia semakin hari semakin menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan diamati, masyarakat sudah dianggap semakin dewasa dalam menyikapi perkembangan demokrasi di Indonesia. Saat ini bangsa Indonesia telah melewati suatu babak baru dalam pelaksanaan demokrasi, di mana pemilihan umum mulai dari pemilihan legislatif sampai pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden boleh terlaksana dengan aman, jujur dan adil. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung dengan memilih kandidat-kandidat yang baik dari calon legislatif maupun calon eksekutif, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih sendiri kandidatnya.

Di dalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di Indonesia ini. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodisasi seperti terlihat pada tabel 1.

PERIODESASI DEMOKRASI	TAHUN
Masa Revolusi	1945-1950
Masa Demokrasi Liberal	1950-1959
Masa Demokrasi Terpimpin	1959-1966
Masa Demokrasi Orde Baru	1966-1998
Masa Demokrasi Reformasi	1998-Sekarang

Tabel 1: Perkembangan Demokrasi di Indonesia,
Sumber: hilalfarisy.wordpress.com.

Pemilihan Umum tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu

Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan Umum yang diadakan sebanyak dua kali yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.

Setelah pemilu pertama tahun 1955, Indonesia baru melakukan pemilu kembali pada tanggal 5 Juli 1971, pertama di jaman Orde Baru dibawah pemerintahan Presiden Kedua Indonesia Soeharto. Pada pemilu kali ini, terdapat 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat yang berpartisipasi.

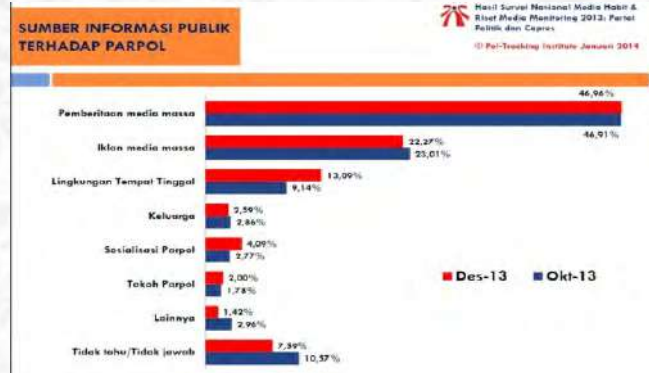
Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak sebelas kali. Jumlah partai politik yang menjadi peserta pada setiap Pemilu yang telah dilaksanakan selalu berbeda-beda. Terkecuali pada tahun 1977-1997 hanya ada 3 partai politik yang menjadi peserta Pemilu yaitu Partai Golkar, PDI dan PPP. Hal tersebut merupakan akibat dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

Pasca reformasi tahun 1998 Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia banyak mengalami perubahan mendasar yang terjadi dalam sistim ketatanegaraan Indonesia, dengan persaingan partai partai lain dan para pemilih yang semakin kritis Suara Partai Golkar pun cenderung turun drastis seperti terlihat pada tabel 2.

TAHUN	JUMLAH SUARA	PRESENTASE
1999	23.741.749	22,44%
2004	22.480.757	21,58%
2009	15.037.757	14,45%
2014	18.432.312	14,75%

Tabel 2: Data Perolehan Suara Partai Golkar Pada Skala Nasional, Sumber: www.indobarometer.com

Data tabel 2 diatas menunjukkan setelah keruntuhan orde baru suara partai golkar turun drastis karena pemilih yang semakin kritis dan inovasi kampanye partai-partai lain yang menarik para pemilih khususnya pemilih pemula yang semakin tahun semakin bertambah. Seperti kampanye melalui iklan yang menurut survei Pol Tracking pada Januari 2014 Peran media dan iklan melalui media cukup efektif dalam mempengaruhi opini dan persepsi publik. Iklan menempati urutan kedua setelah pemberitaan media massa sebagai sumber informasi publik terhadap parpol seperti yang terlihat di gambar.



Gambar 1: Sumber informasi publik terhadap parpol, Sumber: *Pol Tracking Indonesia Januari 2014*

Untuk itu Partai Golkar harus menerapkan strategi pemasaran politik yang tepat sasaran dan harus peka melihat perkembangan masyarakat saat ini terutama pemilih pemula terutama pada kemasan iklan yang menarik. Sebab kalangan muda atau pemilih pemula sangat tertarik terhadap popularitas seseorang yang kerap muncul di media massa khususnya televisi melalui pengemasan iklan yang menarik.

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. bagaimana deskripsi iklan politik partai golkar menurut mahasiswa upi ?
2. bagaimana gambaran keputusan memilih di kalangan mahasiswa upi ?
3. sejauh mana pengaruh iklan politik partai golkar terhadap keputusan pemilih pada mahasiswa upi ?

A. Manajemen Pemasaran

Pemasaran merupakan hal terpenting dalam sebuah organisasi bisnis maupun non-bisnis karena pemasaran sangat berperan dalam mengembangkan ataupun mempertahankan suatu organisasi. Pemasaran juga merupakan aktivitas pokok yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk terus menjaga kelangsungan hidupnya dan berkembang ke skala yang lebih lagi dengan tujuan akhir memperoleh laba.

Menurut Kotler dan Keller (2012:5), *“Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others”*. Artinya pemasaran adalah proses sosial yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.

Pengertian pemasaran menurut *American Marketing Association (AMA)* yang dikutip Kotler dan Keller (2012:5) yaitu: *“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating,*

communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large". Artinya pemasaran adalah kegiatan dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya.

B. Periklanan (Advertising)

Pengertian periklanan menurut Kotler dan Keller (2012:478) adalah, "*Advertising is any paid form of non personal presentation and promotion of ideas, goods, or service by an identified sponsor*". Artinya periklanan adalah segala bentuk penyajian yang bukan pribadi dan usaha promosi mengenai ide-ide, produk atau jasa yang dilakukan oleh orang tertentu.

Menurut Moriarty *et.all* (2011:6) Iklan adalah jenis komunikasi pemasaran yang mengacu kepada semua bentuk teknik komunikasi yang digunakan pemasar untuk menjangkau konsumennya dan menyampaikan pesannya. Iklan adalah salah satu komponen komunikasi dari bauran pemasaran

Sedangkan menurut Shimp (2003:38). Periklanan adalah suatu bentuk dari komunikasi massa atau komunikasi *direct to consumer* yang bersifat *non personal* dan dibiayai oleh perusahaan bisnis, organisasi nirlaba, atau individu yang diidentifikasi dengan berbagai cara dalam pesan iklan tersebut. Pihak pemberi dana tersebut berharap untuk menginformasikan atau membujuk para anggota dari khalayak tertentu.

Dari beberapa pengertian iklan diatas dapat disimpulkan bahwa iklan dibuat dengan tujuan untuk menarik perhatian dan mendorong atau membujuk pembaca iklan agar memiliki atau memenuhi permintaan pemasang iklan. Selain itu, semua iklan dibuat dengan tujuan yang sama yaitu untuk memberi informasi dan membujuk para konsumen untuk mencoba atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut, dapat berupa aktivitas mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan.

Untuk membuat periklanan yang dapat menggugah keinginan yang besar maka pelaku pemasaran tersebut harus memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembelian. Kotler dan Keller (2012:504) mengemukakan adanya lima keputusan utama dalam membuat program periklanan, yaitu :

1. Misi (*Mission*): apakah tujuan periklanan ?
2. Uang (*Money*): berapa banyak yang dapat dibelanjakan ?
3. Pesan (*Message*): pesan apa yang harus disampaikan ?
4. Media (*Media*) : media apa yang akan digunakan ?
5. Pengukuran (*Measurement*) : bagaimana mengevaluasi hasilnya ?

C. Perilaku Konsumen

Menurut Kotler (2012:151) perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menghabiskan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumennya.

Menurut Swastha (2011:10) Perilaku konsumen (*consumer behavior*) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan kegiatan tersebut, sedangkan Menurut Solomon (2010:31) "*consumer behavior is the study of the processes involved when individuals or group select, purchase, use, or dispose of products, service, ideas, or experiences to satisfy needs and desires*". Artinya bahwa studi tentang proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau menentukan produk, layanan, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Menurut Kotler & Amstrong (2008:185), ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pengambilan keputusan yaitu pemahaman masalah, pencarian informasi, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu.

D. Keputusan Memilih

Pada dasarnya keputusan memilih dalam pemilu sama dengan keputusan memilih konsumen atau pembeli (*a voter is a buyer*). Keputusan merupakan pilihan yang dibuat melalui berbagai alternatif pilihan yang ada. Pilihan yang dibuat merupakan suatu objektif dari pembuat keputusan dengan melihat akibat dari pilihan yang dibuatnya.

Menurut Firmanzah (2012:115-118), ada tiga faktor yang mempengaruhi keputusan memilih. Ketiga faktor tersebut yaitu:

1. Kondisi Awal
Kondisi awal diartikan sebagai karakteristik yang melekat pada diri si pemilih seperti keadaan sosial budaya pemilih, nilai tradisional pemilih, level pendidikan & ekonomi pemilih dan sebagainya.
2. Media Massa
Kemampuan media massa untuk mendistribusikan informasi merupakan kekuatan untuk pembentukan opini publik. Opini publik sendiri sangat ditentukan oleh seberapa besar informasi yang diberikan kepada masyarakat. Informasi tersebut dapat berupa data, informasi dan berita di media, ulasan ahli, permasalahan terkini, dan perkembangan dan tren situasi.

3. Partai Politik atau Kontestan
Faktor-faktor seperti *track record* dan reputasi, *marketing* politik, program kerja, dan sistem nilai dari partai politik mempengaruhi penilaian dari pemilih. Selain itu, atribut kontestan seperti reputasi, *image*, citra, latar belakang, ideologi, dan kualitas para politisinya akan mempengaruhi penilaian masyarakat atas partai bersangkutan

Dan menurut Schiffman & Kanuk (1997), tiga model sikap dalam pengambilan keputusan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Kognitif yaitu pengetahuan dan persepsi seseorang yang di dapat dari kombinasi pengalaman langsung terhadap suatu obyek dan informasi yang relevan dari berbagai sumber. (tingkat kesadaran konsumen/pemilih atas keberadaan suatu produk/partai tertentu).
2. Afektif yaitu emosi atau perasaan konsumen dalam menilai suatu merek atau produk tertentu. (tingkat minat dan keinginan terhadap produk/partai tertentu).
3. Konatif yaitu kesukaan atau kecenderungan perilaku atau tindakan seseorang atau suatu obyek tertentu. (tingkat kecenderungan konsumen/pemilih dan membeli produk/partai tertentu).

Bergman and Wickert (1999) dalam Nursal (2004), menyebutkan bahwa seorang pemilih akan membuat satu keputusan untuk menggunakan hak pilihnya karena beberapa hal:

1. Adanya rasa ketertarikan dan kepuasan terhadap kandidat.
2. Banyaknya jumlah kandidat. Alasan ini muncul karena pemilih memiliki banyak pilihan
3. Tayangan media yang menyajikan hal-hal positif yang dilakukan partai politik.
4. Keyakinan bahwa proses pemilihan pemimpin politik dianggap sama pentingnya dengan proses pengawasan. Keyakinan ini menjadi penting sebagai bukti bahwa masyarakat tidak apatis, atau tidak pesimis terhadap proses pemilihan pemimpin politik.

Seperti halnya dunia bisnis maupun dunia usaha, dunia politik juga terdiri dari produsen dan konsumen. Sebagai produsennya adalah partai-partai atau kontestan individu yang menjadi pihak yang menghasilkan produk politik. Sebagai konsumennya adalah para pemilih yang akan memilih para kandidat peserta Pemilu. Produk politik yang ditawarkan adalah merupakan janji-janji dan kontrak politik pada saat kampanye. Banyaknya partai politik maupun kandidat yang menjadi peserta pemilu membuat para pemilih kebingungan dan sulit untuk menentukan pilihan, apalagi di kalangan pemilih pemula yang masih kurang pengetahuan mereka akan kandidat maupun partai

politik itu sendiri sehingga menyebabkan para pemilih pemula menjadi pemilih yang tidak menyalurkan pilihan mereka. Iklan salah satu informasi yang sangat membantu partai politik maupun para kandidat untuk menginformasikan hal-hal penting kepada para pemilih, tapi iklan tersebut harus dikemas secara menarik dan dapat menarik perhatian para pemilih. Menurut Moriarty et.al (2011:6) Iklan adalah jenis komunikasi pemasaran yang mengacu kepada semua bentuk teknik komunikasi yang digunakan produsen untuk menjangkau konsumennya dan menyampaikan pesannya.

METODE

Menurut Sugiyono (2014:2) bahwa “metode penelitian ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Sugiyono (2010:11) menjelaskan bahwa, “penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel secara mandiri, baik itu satu variabel maupun lebih, secara mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya”. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh deskriptif atau gambaran mengenai iklan politik dan keputusan memilih pada Partai Golkar.

Penelitian verifikatif dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto (2010:15), “penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan”, yaitu mengenai pengaruh iklan politik terhadap keputusan memilih pada Partai Golkar.

Berdasarkan jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan dengan pengumpulan data di lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *explanatory survey*, yaitu metode survey untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Metode survei digunakan sebagai upaya untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden. Survei informasi dari sebagian populasi (sampel responden) dikumpulkan langsung di tempat kejadian secara empirik, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh Nana Syaodih (2008:82) bahwa: “Survei digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil”.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausalitas. Menurut Rangkuti (2007:24) menyatakan desain kausalitas bertujuan untuk mengetahui variabel yang menjadi penyebab atau

variabel pengaruh (variable independen) dan variabel yang menjadi akibat atau variabel terpengaruh (variabel dependen) serta mengetahui hubungan atau keterkaitan antara variabel-variabel tersebut. Adapun hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pengaruh iklan politik terhadap Keputusan Memilih pada Partai Golkar.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UPI angkatan 2014 yang sekaligus sebagai pemilih pada pemilu legislatif yang memilih Partai Golkar dengan jumlah populasi yang tidak terbatas (*infinity*).

Jumlah sampel yang diambil berdasarkan rumus *infinity* Dengan tingkat kepercayaan 95 % dan standar deviasi populasinya 0,25 maka didapat jumlah sampel untuk diteliti sebesar 96 orang dan dibulatkan menjadi 100.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran mengenai variabel Iklan Politik yang diterapkan menggunakan tiga dimensi diantaranya yaitu *Mission*, *Message*, dan *Media*. Berdasarkan pada hasil pengolahan data kuesioner yang telah disebar, maka dapat dilihat tanggapan mengenai variabel Iklan Politik Partai Golkar adalah sebagai berikut

Tabel 1. Rekapitulasi Gambaran Iklan Politik Golkar

No	Indikator Iklan Politik	Jumlah Pertanyaan	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	<i>Mission</i>	3	899	299
2	<i>Message</i>	5	1495	299
3	<i>Media</i>	2	677	338
Total		10	3071	937

Berdasarkan Tabel 1 mengenai gambaran Iklan Politik Partai Golkar di kalangan pemilih pemula mahasiswa UPI angkatan 2014, secara keseluruhan memperoleh skor 3071. Dapat terlihat bahwa dimensi yang paling tinggi dan dianggap baik oleh responden adalah indikator *media* dengan skor 338, hal tersebut dikarenakan Partai Golkar telah berhasil menayangkan iklan melalui *media* dan dapat mudah ditemukan oleh para pemilih. Kedua dimensi terakhir yaitu *mission* dan *message* sama-sama memperoleh skor 299 dan dianggap kurang baik oleh responden, hal tersebut dikarenakan responden yang sebagian besar adalah pemilih pemula masih kurang memahami tujuan dan isi pesan dari iklan Partai Golkar.

Tabel 2 Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Keputusan Memilih Partai Maupun Caleg

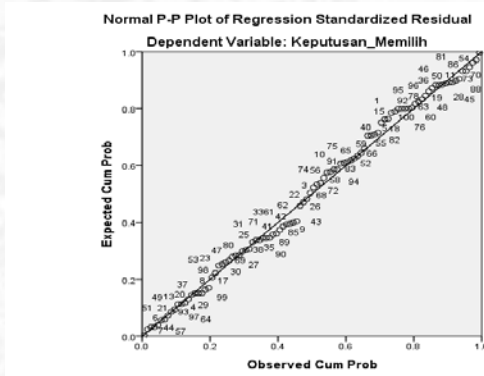
No	Indikator Keputusan	Jumlah Pertanyaan	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Ketertarikan	3	1037	346
2	Jumlah Kandidat	2	651	325
3	Keyakinan	3	1151	384
Total		8	2839	1055

Berdasarkan tabel 2 mengenai gambaran Keputusan Memilih di kalangan pemilih pemula mahasiswa UPI angkatan 2014, secara keseluruhan memperoleh skor 2839. Dapat terlihat bahwa indikator yang mendapatkan skor paling tinggi oleh responden adalah dimensi keyakinan dengan skor 384, hal tersebut dikarenakan Pemilih memilih caleg berdasarkan prestasi, kontribusi, dan individual caleg maupun partai tersebut, serta mayoritas responden sudah yakin dengan pilihannya sendiri, karena mayoritas responden adalah mahasiswa yang mahasiswa pada umumnya sudah bisa memilih berdasarkan pilihan mereka sendiri dan juga berdasarkan penilaian masing-masing individu terhadap caleg pilihannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun.

Dimensi dengan skor tertinggi kedua adalah ketertarikan dengan skor 346, dan indikator yang memperoleh skor terkecil pada variabel ini adalah jumlah kandidat dengan skor 325. Semakin banyak jumlah caleg yang mengikuti Pemilu mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pemilu, serta membuat pemilih menjadi lebih selektif juga dalam memilih calegnya.

Pengujian statistik pada penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi sederhana, dimana data yang digunakan sebagai variabel bebas X adalah Iklan Politik dan variabel terikat Y adalah keputusan memilih.

Suatu data dikatakan berdistribusi normal, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya suatu data dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal. Penulis melakukan uji normalitas dengan bantuan *IBM SPSS Statistics 22*. Sebelumnya, ubah terlebih dahulu data yang berskala ordinal menjadi data berskala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval (MSI)*. Berikut adalah grafik p – plot hasil pengolahan data statistik yang tersaji pada gambar 1



Gambar 1 : Normal Probability Plot, Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics 22,2015.

Pada gambar 1 di atas menunjukkan bahwa sebaran data terletak dari kiri bawah ke arah kanan atas menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian model regresi menunjukkan bahwa persyaratan normalitas sudah terpenuhi.

Pada gambar 1 di atas menunjukkan bahwa sebaran data terletak dari kiri bawah ke arah kanan atas menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian model regresi menunjukkan bahwa persyaratan normalitas sudah terpenuhi.

Tabel 3 Output Korelasi,

Correlations			
		Keputusa n_Memilih	Iklan_Polit ik
Pearson Correlation	Keputusan_ Memilih	1	0.53
	Iklan_Politik	0.53	1
Sig. (1- tailed)	Keputusan_ Memilih	.	0
	Iklan_Politik	0	.
N	Keputusan_ Memilih	100	100
	Iklan_Politik	100	100

Pada tabel 3 didapat hasil koefisien korelasi sebesar 0.530 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 pada pengujian terhadap 100 responden. Untuk taraf signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Iklan Politik dengan variabel keputusan memilih.

Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen) maka digunakan analisis korelasi sederhana

Tabel 4: Output Pengaruh Iklan Politik Terhadap Keputusan Memilih

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. Change
1	.530 ^a	0.281	0.274	4.193	0.281	38.342	1	98	0

a. Predictors: (Constant), Iklan_Politik

b. Dependent Variable: Keputusan_Memilih

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics 22,2015.

Berdasarkan pada Tabel 4 didapat nilai R sebesar 0,530 yang menunjukkan tingkat hubungan antara gabungan antar variabel Iklan Politik dengan variabel Keputusan Memilih, tabel angka korelasi 0,530 berada pada interval koefisien 0,40 - 0,599 yang menunjukkan tingkat hubungan yang sedang.

Sedangkan nilai R-square atau koefisien determinasi adalah 0,281 Artinya 28,1% Keputusan Memilih Partai Golkar dipengaruhi oleh Iklan Politik. Sedangkan sisanya (100% - 28,1% = 71,9%) dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai R Square semakin besar, maka menunjukkan bahwa model yang dirumuskan untuk menjelaskan Keputusan Memilih pada Partai Golkar dapat dikatakan baik.

Tabel 5: Output Koefisien Regresi,

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient s	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	11.426	2.071	5.518	0
	Iklan_Politik	0.394	0.064	6.192	0

a. Dependent Variable: Keputusan_Memilih

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2015.

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} iklan politik sebesar 6,192 dengan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,661 dari perolehan derajat kebebasan (df)=n-2 (100-2=98). Oleh karena itu maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif antara iklan politik terhadap keputusan memilih.

Berdasarkan hasil pengolahan data regresi linear sederhana pada tabel 3, maka persamaan prediksi untuk Keputusan Memilih atas Iklan Politik maka didapatkan

hasil regresi berupa nilai $a = 11,426$ dan $b = 0,394$ yang dapat ditulis kedalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11,426 + 0,394 X$$

Pada persamaan tersebut nilai B konstan adalah 11,426. Artinya, jika Iklan Politik diabaikan maka nilai Keputusan Memilih adalah sebesar 11,426. Koefisien regresi pada variabel Iklan Politik adalah 0,394 artinya apabila Iklan Politik dinaikkan sebesar satu satuan maka nilai Keputusan Memilih akan meningkat sebesar 0,394.

Dari hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi antara variabel iklan politik dan keputusan memilih adalah sebesar 0,544 dengan tingkat signifikansi 0,000, hasil tersebut berada dalam interval 0,40 – 0,599 yang termasuk ke dalam tingkat hubungan yang sedang. Selanjutnya dalam perhitungan regresi linier sederhana diperoleh persamaan regresi linier keputusan memilih atas citra partai yaitu $Y = 14,262 + 0,495X$. Hal ini berarti setiap perubahan satu satuan iklan politik maka nilai keputusan memilih akan berubah sebesar 0,495. Hal ini menunjukkan apabila terjadi peningkatan iklan politik maka akan meningkatkan keputusan memilih sebesar 0,495 dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi R^2 diperoleh hasil R -Square sebesar 0,296. Hasil koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel iklan politik berpengaruh terhadap keputusan memilih pemilih pemula mahasiswa UPI. Nilai R^2 berarti bahwa 0,296 keputusan memilih partai Golkar dipengaruhi oleh iklan politik Partai Golkar dan sisanya sebesar 0,704 dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa iklan politik berpengaruh terhadap keputusan memilih. Hal ini sesuai dengan pendapat Dudek (2007:2) yang mengatakan bahwa iklan politik secara singkat dideskripsikan sebagai penyiaran yang bersifat informatif dan persuasif dengan tujuan untuk meraih pemberi suara dan memberikan mereka pilihan politik yang meliputi partai politik, kandidat dan program. Sedangkan menurut Linda Lee Kaid dalam Putra (2007) menjelaskan iklan politik adalah proses komunikasi dimana seorang sumber (biasanya kandidat dan atau partai politik) membeli atau memanfaatkan kesempatan melalui media massa guna menjelaskan pesan-pesan politik dengan sengaja untuk mempengaruhi sikap, kepercayaan dan perilaku politik khalayak.

SIMPULAN

Deskripsi iklan politik pada Partai Golkar yang terdiri dari indikator *mission*, *message*, dan *media* berada pada kategori sedang. Dimana indikator *media* merupakan dimensi yang mendapatkan penilaian cukup baik

daripada dimensi lainnya dari para mahasiswa UPI, dan juga keragaman penggunaan media mendapatkan penilaian cukup baik dari para mahasiswa UPI, namun kesesuaian desain, warna, dan gambar dalam iklan Partai Golkar masih dianggap sedikit kurang baik, sementara indikator *mission* dan *message* mendapatkan penilaian yang kurang baik dari para responden yang artinya tujuan dan pesan dalam iklan Partai Golkar belum bisa tersampaikan secara baik kepada para pemilih. Gambaran Keputusan Memilih pemilih pemula mahasiswa UPI yang terdiri dari indikator ketertarikan, jumlah kandidat, dan keyakinan berada pada kategori tinggi. Dimana indikator keyakinan merupakan indikator yang mendapatkan skor tertinggi dimana para pemilih melihat dari kualitas dan prestasi caleg dan partai tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara iklan politik terhadap keputusan memilih Partai Golkar pada pemilih pemula Mahasiswa UPI. Sehingga dapat diketahui bahwa keputusan memilih dipengaruhi oleh iklan politik. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan memilih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan iklan politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih Program Studi Manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia yang telah menjadi tempat saya menimba ilmu selama 4 tahun dan dapat menghasilkan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

(Buku)

- Adman Nursal. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu: Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Afdal Makkuraga Putra. "Emosionalitas dan *Negativity* dalam Iklan Politik Pilkada", *Jurnal Media Watch*, 31 Agustus 2007
- Arif Sugiono. 2005. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam Pilkada: Perspektif Political Marketing. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*. No.05/TH.XXXI V MEI 2005. LMFE Universitas Indonesia.
- Bauer, H.H dan Herrmann, A. 1996. *Political Marketing: an information-economic analysis*. *European Journal of Marketing*. No. 30.P.159-172.
- Bilson Simamora, 2004. "Panduan Riset Perilaku Konsumen". Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Butler, P dan Collins, N, 1993. *Political Marketing: Structure and Process*. *European Journal of Marketing*. No.28. P.19-34.
- Dudek, Patrycja. 2007. *Negative Political Advertising: Parliamentary Election 2007 Campaign TV Spots*
- Engel, J. F. Blackwell dan R, D, Miniard, 2005. *Consumer Behavior*. 11th Ed. Forth Word, Texas. The Dryden Press.
- Firmanzah. 2004. "Peran Ilmu *Marketing* dalam Dunia Politik – Menuju *Marketing* Politik di Indonesia ?".
- Firmanzah. 2007. *Marketing* Politik – Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning ideologi politik di era demokrasi". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kotler, Philip dan Gary Amstrong, 2008, *Principles of Marketing*, Pearson Global Edition

- Kotler, Philip dan Kelvin Lane Keller, 2012, "*Marketing Management*", 14e Global Edition, Pearson 2012'
- McNair, Brian. 2011. "*An Introduction Political Communication*", fifth edition. London: Routledge
- Moriarty. S., N. Mitchell, dan W. Wells, 2011. "*Advertising*". Edisi ke 8. Terjemahan Tri Wibowo B.S. Penerbit Kencana, Jakarta
- Pol Tracking Indonesia. Januari 2014. "Menangkap Tren *Tone* Berita Dan Elektabilitas"
- Transparency International* Indonesia. Februari 2014. "Persepsi Pemilih Pemula pada Pemerintah, Korupsi, dan Pemilu Nasional 2014"
- Schiffman, Leon G dan Kanuk, Leslie Lazar, 2004. "*Behavior. Prentice Hall. International Edition.*
- Sugiyono.2012. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung Alfabeta
- Sugiyono.2014. "Metode Penelitian Bisnis". Bandung: Alfabeta
- Yuni Retnowati. 2012. "Efektifitas Iklan Dalam Meraih Partisipasi Politik

Public Relations dan Pencak Silat Tradisional

Mohammad Shihab
I Nyoman Musiasa

Program Studi Ilmu Komunikasi President University
shihab@president.ac.id

Abstrak

Pencak silat is a culture of Indonesia. It has been emerging in Indonesia in recent years because of some issues. The primary issue is that traditional pencak silat is dying in its homeland, Indonesia. The number of people who learn traditional pencak silat is decreasing. Meanwhile, some countries have claimed that pencak silat originated from their lands. To prevent traditional pencak silat from dying, public relations may be an option. How does public relations become helpful to put the public back to pencak silat? A literature study has been performed. In-depth interviews were organized to gain insights from an organization focused on traditional pencak silat. The study offered both online and offline PR approaches. The community may take the advantages of action strategies to build engagement with the public. The spirit of Pencak Silat may also be shared through direct communication with audiences. Finally, all activities must be published on online media to strengthen internet publicity.

Keywords: culture, pencak silat, public relations, internet, social media

Pencak Silat dan Public Relations

Sejak ribuan tahun yang lalu, pencak silat di Indonesia dipercaya telah dipraktikkan oleh orang India dan Cina di Sumatera yang sedang melakukan perjalanan di Indonesia dan terus berkembang hingga kini (Sertori, 2007; Lesmana, 2002). Namun, perkembangan pencak silat Indonesia terancam mengalami hambatan dan kepunahan bila tidak ada tindakan dari masyarakat (Republika Online, 2012; Tribun Jabar, 2014). Apalagi masyarakat luar negeri sangat aktif mempelajari bahkan mengklaim pencak silat mereka lebih asli dari negeri asalnya.

Semangat untuk menarik banyak peminat untuk mempelajari pencak silat menjadi sulit terwujud apabila persepsi masyarakat masih menganggap pencak silat identik dengan kekerasan yang sempat ramai diberitakan oleh media nasional. Untuk memperkenalkan dan mempopulerkan pencak silat di kalangan masyarakat, pendekatan hubungan masyarakat (public relations) menjadi hal yang vital. PR merupakan kegiatan

komunikasi yang bertujuan menumbuhkan hubungan baik. Selain itu, pendekatan PR juga dapat digunakan untuk menjaring partisipasi masyarakat ke dalam misi yang organisasi jalankan (Soemirat & Ardianto, 2010).

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa partisipasi publik dapat dipengaruhi oleh citra organisasi. Citra berkaitan erat dengan persepsi publik menjadi tujuan utama dari kegiatan PR. Dalam konteks PR, citra adalah sebuah objek yang dikomunikasikan oleh individu, kelompok, atau organisasi kepada publiknya. Carrol menyebut citra organisasi (corporate reputation) sebagai sebuah pesan yang menggambarkan karakter organisasi saat ini dan dikomunikasikan secara terus menerus kepada publiknya (Carrol, 2013). Bagaimana cara publik melihat sebuah organisasi, maka itulah citra organisasi tersebut.

Citra organisasi yang baik berkontribusi pada perilaku publik. Peter dan Olson menyatakan jika seseorang puas terhadap produk, jasa, atau merek maka ia akan terus menggunakannya. Bahkan menurutnya, pengguna tersebut akan membagikan pengalaman yang menyenangkan tentang produk, jasa atau merek tersebut kepada orang lain (Kusdiyanto, 2008). Untuk itu, pendekatan PR yang strategis dibutuhkan untuk membawa pencak silat lebih dekat kepada masyarakat sekaligus membentuk citra yang baik di mata publik.

Para ahli telah menawarkan banyak cara mengelola dan merumuskan strategi PR yang dapat digunakan untuk membentuk citra positif. Smith merumuskan langkah-langkah menyusun strategi PR ke dalam empat fase yakni riset formatif, perumusan strategi, pemilihan taktik-taktik, dan evaluasi (Shihab, 2015). Riset formatif perlu dilakukan oleh setiap organisasi untuk mengidentifikasi situasi internal maupun eksternal organisasi. Riset ini penting dilakukan agar perencanaan strategi tepat sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Tahap perencanaan strategi berikutnya yakni perumusan strategi dan taktik PR. Smith membagi strategi PR ke dalam dua kelompok, strategi reaktif dan proaktif. Strategi reaktif sering dijalankan pada saat organisasi sedang mengalami krisis. Sementara itu, strategi proaktif dilaksanakan sesuai kondisi dan waktu yang tepat bagi kepentingan organisasi. Strategi proaktif mengandung

strategi-strategi yang nyata (action strategies) dan komunikatif (communication strategies). Masing-masing strategi akan melahirkan taktik-taktik komunikasi. Taktik-taktik ini yang secara langsung bersentuhan dengan persepsi dan perilaku manusia, seperti website, rilis berita, tur organisasi, dan baliho/spanduk, dan sebagainya.

Pelaksanaan strategi yang telah direncanakan kemudian harus dievaluasi. Smith menyatakan PR wajib mengevaluasi program komunikasi yang telah berjalan dengan mengukur efektivitas setiap taktik dan melihat apakah sasaran telah tercapai. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan atau umpan balik (feedback) bagi perencanaan strategi selanjutnya. Seluruh tahapan strategi PR Smith ini dikenal dengan 'Sembilan Langkah PR Strategis' (The Nine Steps of Strategic PR).

Pendekatan PR strategis di atas dapat diimplementasikan ke berbagai organisasi, termasuk organisasi nirlaba yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, makalah ini akan menawarkan strategi PR yang dapat digunakan oleh organisasi pencak silat tradisional untuk membentuk citra positif dan mengajak masyarakat berpartisipasi lebih lanjut dalam kegiatan pencak silat.

Metodologi

Makalah ini dikembangkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah realitas dalam suatu kelompok masyarakat dengan menggunakan serangkaian analisis induktif terhadap teks-teks yang ada (Vanderstoep & Johnston, 2009). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan yang terlibat dalam organisasi pencak silat. Selain itu, data kemudian diperkaya dengan studi pustaka yang berasal dari berbagai sumber yang relevan. Data yang telah dikumpulkan sesuai relevansinya (coding) kemudian dikelompokkan (categorizing) berdasarkan tema yang telah ditentukan. Hasil pengelompokkan akan membantu penulis untuk mengembangkan narasi-narasi teoritis hasil dari pengumpulan data (Shihab, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Gregory (2010) menyatakan citra baik organisasi akan mendorong publik untuk mencoba produk/jasa terbaru, berinvestasi, dan mempercayai iklannya. Selain itu, citra yang baik juga membuat publik memiliki keinginan untuk bekerja sama dan mendukung organisasi di masa sulit. Dengan demikian, citra yang baik bagi organisasi akan mendorong publik untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru organisasi serta menciptakan kesetiaan publik terhadap organisasi.

Komunikasi strategis menjadi kunci penting bagi organisasi untuk menanamkan citra di dalam persepsi publik. Mengapa komunikasi sangat penting? Menurut Gregory (2010), komunikasi merupakan kendaraan untuk menggalang dukungan dari publik kunci dengan memastikan bahwa visi dan nilai-nilai organisasi dipahami oleh para publik kunci.

Selanjutnya, Gregory (2010) menyebutkan bahwa komunikasi dapat mendukung terjalannya hubungan yang baik dengan publik kunci. Publik kunci ini memiliki peran yang besar bagi organisasi karena mereka yang menentukan baik atau buruknya nasib organisasi.

Bagi organisasi pencak silat tradisional, mengidentifikasi publik penting agar strategi PR tepat sasaran. Berbagai pemangku kepentingan yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi PR untuk organisasi silat tradisional meliputi organisasi induk pencak silat IPSI, seluruh komunitas pencak silat yang memiliki kesamaan visi dan misi, media massa, dan masyarakat umum sebagai partisipan yang akan disasar. Kemudian, instansi pemerintah bidang kepemudaan, olahraga, seni dan budaya juga perlu diajak berkomunikasi sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan dalam pelestarian pencak silat sebagai budaya Indonesia.

Dengan tujuan membentuk citra positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pencak silat tradisional, organisasi dapat mengadopsi strategi PR proaktif yang dikemukakan oleh Smith (Shihab, 2015). Menciptakan partisipasi publik (*audience participation*) Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi merupakan langkah awal yang dapat digunakan organisasi untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diciptakan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membuat masyarakat merasakan secara langsung produk dan jasa yang ditawarkan oleh organisasi (Smith, 2005). Untungnya, pencak silat merupakan ilmu bela diri yang dapat ditampilkan di depan publik atau secara langsung dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat. Inilah peluang bagi organisasi silat tradisional untuk menarik minat masyarakat dengan menciptakan penampilan di depan publik.

b.

Penampilan pencak silat dapat dilakukan oleh organisasi itu sendiri maupun berpartisipasi dalam acara khusus (special event) yang diadakan oleh pihak ketiga seperti festival silat, festival budaya, dan acara-acara lainnya.

Special event sangat bermanfaat untuk menciptakan partisipasi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan penerimaan dari publik kunci. Special event terdiri dari berbagai jenis sebagaimana dijabarkan oleh Smith (2005) seperti program kesenian, kompetisi (lomba dan pertandingan),

kegiatan masyarakat (festival, pameran, pawai), perayaan hari-hari penting (nasional, agama, etnis, dll). Selain itu, kegiatan tersebut juga dapat berupa perayaan ulang tahun atau sejenisnya, dan kegiatan yang berorientasi pada proses seperti pembukaan, peresmian, peletakan batu pertama, dan lain sebagainya (Smith, 2005).

Untuk mempopulerkan pencak silat tradisional, organisasi dapat menyelenggarakan festival tahunan pencak silat, workshop dan pameran jurus silat dalam rangka ulang tahun organisasi, hingga lomba koreografi antar aliran.

Strategi ini telah dilakukan oleh organisasi Garis Paksi Indonesia, salah satu organisasi silat tradisional di Jawa Barat (Shihab, 2015). Organisasi ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam workshop silat berbiaya terjangkau dengan bekerja sama (coalition) dengan sesama komunitas pencak silat. Tentunya, tidak semua teknik silat diajarkan kepada masyarakat sehingga untuk mempelajari lebih lanjut, para peserta workshop perlu mendaftar dan mengikuti latihan reguler.

c. Memberikan sponsor (*sponsorship*)

Sponsorship bisa menjadi cara untuk membangun kesadaran (awareness) masyarakat terhadap organisasi. Sponsor tidak selalu berbentuk pendanaan. Sebagai alternatifnya, organisasi dapat mengalokasikan sebagian atau seluruh sumber dayanya untuk mendukung sebuah kegiatan atau acara. Sumber daya yang diberikan bisa berbentuk dukungan tenaga penyelenggara (co-organizer), seperti membantu menyelenggarakan workshop silat dalam rangkaian acara festival kebudayaan. Sebagai imbalannya, identitas organisasi ditampilkan dalam seluruh materi publikasi acara.

d. Pemberian penghargaan dan bantuan

Strategi ini secara khusus menasar para praktisi silat. Penghargaan dapat diberikan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan organisasi, seperti konsistensi pelatihan, prestasi pengembangan dan lain sebagainya. Bantuan juga dapat diberikan kepada guru-guru silat yang secara ekonomi perlu mendapatkan bantuan. Hal ini dapat meninggalkan kesan yang baik bagi komunitas-komunitas pencak silat di mana guru-guru tersebut mengajarkan silat. Selain itu, cara ini juga dapat melahirkan informasi yang sarat nilai berita (Smith, 2005).

Strategi akan berjalan dengan sia-sia apabila tidak didukung dengan strategi komunikasi. Smith mengemukakan tiga strategi komunikasi proaktif yaitu publisitas, menyediakan informasi bernilai berita, serta komunikasi yang transparan.

Publisitas merupakan teknik untuk mendapatkan publikasi melalui pemberitaan di media massa. Di mata audiens, pemberitaan di media massa merefleksikan

informasi yang lebih terpercaya bila dibandingkan dengan informasi melalui saluran media yang dimiliki organisasi (Smith, 2005). Untuk mendapatkan publisitas, Smith menyarankan organisasi memanfaatkan kehadiran tokoh yang dikenal publik atau wartawan dalam kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Selain mengundang wartawan, strategi mendapatkan publisitas juga dapat dilakukan dengan menyelenggarakan konferensi pers, resepsi media, dan kunjungan media (Nababan, 2013). Nababan dalam penelitiannya tentang publisitas Wisata Budaya Tjong A Fie Mansion menyatakan pengelola situs wisata selalu melibatkan media dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Ini dilakukan agar kegiatan terliput, terpublikasikan, dan masyarakat mengetahui informasi berkaitan dengan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, publisitas media massa perlu dimulai oleh organisasi silat agar aktivitas dan kegiatannya diketahui oleh publik.

Strategi komunikasi yang kedua adalah dengan memberikan informasi yang bernilai berita. Strategi ini membutuhkan kecermatan organisasi untuk mengidentifikasi informasi apa yang menjadi penting untuk diketahui oleh publik dan menarik bagi para jurnalis. Informasi ini dapat berupa tips dan trik melumpuhkan lawan dengan jurus silat, keunikan aliran silat, metode pelatihan, hingga informasi-informasi lainnya yang bernilai berita (news value). Informasi-informasi seperti ini disampaikan dalam bentuk press release yang dikirim ke berbagai media, mulai dari media milik sendiri, media komunitas, media lokal, hingga ke media nasional. Organisasi juga perlu menulis rilis di media-media jurnalisme warga seperti Kompasiana (Kompas), Indonesiana (Tempo), forum-forum online, dan media lainnya yang kontennya berasal dari para pengguna (user-generated content). Dengan menulis di media jurnalisme warga, artikel rilis memiliki kesempatan besar untuk dipublikasikan melalui media sosial dengan puluhan ribu audiensnya.

Seluruh tulisan yang dikirim kepada wartawan maupun yang ditulis di media jurnalisme warga juga perlu dipublikasikan melalui media organisasi seperti website dan media sosial lainnya yang saat ini populer. Organisasi bisa memanfaatkan Facebook Page yang khusus didesain untuk kepentingan bisnis. Facebook Page bersifat terbuka untuk diikuti oleh komunitas maya (netizen) di Facebook. Selain mengisi Facebook Page-nya dengan informasi yang berkaitan dengan produk dan jasa khas organisasi, Facebook Page juga dapat diisi dengan selingan informasi lain yang berkaitan dengan tema olahraga dan bela diri, kebudayaan, kesehatan dan kebugaran, dan gaya hidup. Hal ini bertujuan agar Facebook Page tetap terisi dengan informasi secara berkala.

Langkah ini pun telah penulis terapkan untuk Garis Paksi Indonesia. Di setiap artikel yang dikirim atau ditulis, penulis meninggalkan saluran kontak resmi apabila pembaca ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pencak silat di organisasi ini.

Garis Paksi Indonesia juga memiliki media organisasi dalam bentuk website, Twitter, Facebook Page, dan Instagram yang diisi dan diperbarui secara berkala (Shihab, 2015). Sejak dimulainya strategi ini, komunikasi antara masyarakat umum dan organisasi ini pun perlahan-lahan mengalami peningkatan.

Kesimpulan

Organisasi harus mengembangkan strategi aksi dan strategi komunikasi untuk membentuk citra dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Strategi aksi yang dapat dilakukan antara lain menciptakan tampilan yang menarik perhatian dan partisipasi publik, membangun citra dan kesadaran publik melalui sponsorship, memberikan penghargaan dan bantuan kepada publik spesifik. Strategi aksi ini juga harus dipadukan dengan strategi komunikasi untuk mendapatkan publisitas di media massa dengan menyelenggarakan kegiatan dan memberikan informasi yang keduanya memiliki nilai berita. Komunikasi kepada masyarakat juga diperkuat melalui saluran-saluran media sosial populer dan media jurnalisme warga.

Saran

Implementasi strategi PR bagi organisasi yang bergerak dalam pengembangan pencak silat tradisional membutuhkan personel yang memahami tata cara mengelola kegiatan PR. Untuk menciptakan eksistensi organisasi di komunitas maya, penulis menyarankan organisasi memiliki satu personel yang aktif di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, dan blog untuk membuat dan mengembangkan media-media online organisasi.

Daftar Pustaka

- Carrol, C. E. (2013). *The Handbook of Communication and Corporate Communication*. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Gregory, A. (2010). *Planning and Managing Public Relations Campaign: A Strategic Approach* (3rd Ed.). Philadelphia: Kogan Page Limited.
- Kusdiyanto. (2008). Citra Perguruan Tinggi Swasta Di Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah. *ENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 12 No. 2, 150-160.
- Lesmana, F. (2002). *Panduan Pencak Silat Jilid 1*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Nababan, C. R. (2013). Analisis Program Publisitas Wisata Budaya Tjong A Fie Mansion Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan Domestik. *Jurnal Ilmu Komunikasi 'Flow'*.
- Republika Online. (2012, September 19). 169 Aliran Silat Sumbar Terancam Punah. Diakses pada Februari 18, 2014, dari Republika Online Web site: <http://www.republika.co.id/berita/senggang/seni-budaya/12/09/19/makrjr-169-aliran-silat-sumbar-terancam-punah>
- Republika Online. (2013, Agustus 18). Perlu Strategi Pasarkan Pencak Silat di Luar Negeri. Diakses pada Desember 02, 2013, dari Republika Online: <http://www.republika.co.id/berita/olahraga/arena-olahraga/13/08/18/mrqgoa-perlu-strategi-pasarkan-pencak-silat-di-luar-negeri>
- Riel, C. B., & Fombrun, C. J. (2007). *Essentials of Corporate Communication (Implementing practices for effective reputation management)*. New York: Routledge.
- Sertori, T. (2007, September 06). What is Pencak Silat? Diakses pada Februari 18, 2014, dari The Jakarta Post Website : <http://www.thejakartapost.com/news/2007/09/06/what-pencak-silat.html>
- Shihab, M. (2015). *Public Relations Dan Pembentukan Citra Organisasi: Studi Pada Perkumpulan Pencak Silat Garis Paksi Jawa Barat* (Tesis). Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Smith, R. D. (2005). *Strategic Planning for Public Relations* (2nd Ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Soemirat, S., & Ardianto, E. (2010). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: Rosda.
- Vanderstoep, S. W., & Johnston, D. D. (2009). *Research Methods for Everyday Life*. San Francisco: Jossey-Bass.

Pemanfaatan Pagelaran Wayang Golek sebagai metode Kampanye Politik Pasangan Sabdaguna dalam Pemilukada Kabupaten Bandung periode 2016-2021

Yanti Setianti, Priyo Subekti, Yogaswara Sunandar
Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
Email: yantisetianti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tahap identifikasi masalah kampanye yang dilakukan tim Sabdaguna melalui wayang golek. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, serta studi pustaka, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap identifikasi masalah dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Tahap pengelolaan kampanye dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kampanye melalui wayang golek. Tahap perencanaan dengan melakukan budgeting, konsolidasi internal dan eksternal, segmentasi dan sasaran, positioning dan publikasi. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan kampanye melalui cerita wayang golek dengan komunikasi verbal dan non verbal secara implisit dan eksplisit. Sementara itu, tahap evaluasi melalui wayang golek belum dilaksanakan dengan baik oleh tim Sabdaguna.

Peneliti menyimpulkan Tim Sabdaguna telah melaksanakan tahapan identifikasi masalah dan pengelolaan Kampanye melalui wayang golek. Namun, tahap evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal oleh Tim Sabdaguna. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan membuat pengukuran terencana dalam efektifitas kampanye melalui wayang golek. Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi penelitian-penelitian lainnya di bidang komunikasi politik dan PR politik terutama di ranah komunikasi dengan menggunakan media wayang golek dan teknik pencitraan yang baik. Penelitian ini pun diharapkan dapat mendorong penelitian berikutnya dengan memberikan masukan bagi calon pasangan kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan umum kepala daerah mengenai bagaimana kampanye melalui media wayang golek dalam menghadapi pemilukada.

Kata kunci: kampanye politik, wayang golek, sabdaguna, budaya, komunikasi, kearifan lokal

PENDAHULUAN

Ketatnya persaingan dalam berkampanye politik adalah sesuatu hal yang lazim dilakukan dalam pemilihan kepala daerah dalam mendapatkan dukungan suara. Kesempatan seorang calon kepala daerah untuk memenangkan pemilihan secara langsung pun bergantung pada penggunaan beragam media dalam kampanye politik yang dilakukannya. Upaya dilakukan agar media yang digunakan menjadi efektif dan mempersuasi khalayak banyak untuk memilih kepala daerah.

Dadang M Naser dan Gun-Gun Gunawan adalah salahsatu kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bandung yang telah memenangkan Pemilukada tahun 2015 untuk jabatan periode 2016-2021. Pada tanggal 22 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menetapkan pasangan Dadang M. Naser dan Gun Gun Gunawan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2015 setelah mendapat perolehan suara terbanyak yaitu 64,28 persen dari total suara sah. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Bandung, perolehan suara pasangan Sabdaguna itu mengungguli pasangan Sofyan Yahya – Agus Yasmin (24,95%) dan pasangan Deki Fajar – Dony Mulyana Kurnia (10,77 %).

Sabdaguna berangkat dari non partai/independen sehingga tim sabdaguna dibentuk oleh relawan-relawan Dadang M Naser dan Gun Gun Gunawan yang tidak profit oriented atau sukarela. Sehingga orang-orang yang menjadi tim Sabdaguna adalah orang yang sudah mengenal sepak terjang Dadang M Naser pada periode pertama sebagai Bupati Kabupaten Bandung. Para relawan ini tidak dibayar oleh tim pemenang pasangan Sabdaguna, hanya bermodalkan persuasi dengan memaparkan kesamaan visi dan misi kepada relawan yang ingin membantu.

Menurut Rogers dan Storey (1987) dalam Venus (2009:7) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Merujuk pada definisi ini maka setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal, yakni (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, (2) jumlah khalayak sasaran yang besar, (3) biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu dan (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Karakteristik lain dari kampanye yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampaian sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye (*campaign makers*), sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat.

Penyelenggara kampanye umumnya bukanlah individu melainkan lembaga atau organisasi. Lembaga tersebut dapat berasal dari lingkungan pemerintahan, kalangan swasta atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Terlepas siapa pun penyelenggaranya, kampanye selalu memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan tersebut sangat beragam dan berada antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Menurut Pfau dan Parrot dalam Venus (2009:10) apapun tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavioral*).

Menurut Venus dalam Manajemen Kampanye (2009:4-6) banyak yang sering mempersamakan kampanye dengan propaganda. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena keduanya memang merupakan wujud tindakan komunikasi yang terencana dan sama-sama ditujukan untuk mempengaruhi khalayak. Kampanye dan propaganda juga sama-sama menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Jadi pada kenyataannya memang ada beberapa kemiripan diantara kedua konsep tersebut. Bedanya, istilah propaganda telah dikenal lebih dulu dan memiliki konotasi yang negatif, sementara istilah kampanye baru memasyarakat pada tujuh puluh tahun terakhir serta memiliki citra yang positif dan akademis. Tetapi kehadiran konsep kampanye bukanlah pengganti kata propaganda yang mulai dijauhi orang sejak perang

dunia kedua. Kedua konsep tersebut secara akademis memang berbeda.

Sayuti dalam bukunya Komunikasi Pemasaran Politik (2014:101-107), Kampanye politik merupakan usaha terorganisasi yang berusaha untuk memengaruhi proses-proses pembuatan keputusan di dalam kelompok spesifik. Di dalam alam kehidupan demokrasi, kampanye politik juga disebut dengan kampanye pemilihan umum.

Tujuan kampanye politik pun sangat spesifik bergantung pada jenis pemilihan umumnya. Kampanye politik menjelang pemilihan umum presidensial ditujukan untuk memengaruhi calon pemilih agar memutuskan untuk memilih calon presiden tertentu. Demikian juga dalam kampanye politik pemilihan umum kepala daerah, ditujukan untuk memengaruhi calon pemilih agar memutuskan untuk memilih calon kepala daerah tertentu.

Kampanye politik dilakukan untuk pemilihan wakil rakyat di parlemen dan untuk melakukan referendum. Kampanye politik pada pemilihan wakil rakyat di parlemen ditujukan untuk memengaruhi pilihan rakyat agar tertuju kepada calon tertentu, sedangkan pada pemilu untuk referendum, kampanye ditujukan untuk menggiring pemilih pada salah satu dari dua pilihan yang tersedia, misalnya apakah suatu wilayah akan memisahkan diri dari negara induknya atau tetap menjadi bagian dari negara tersebut. Pemilihan umum yang terakhir ini pernah dilaksanakan Indonesia dalam penyelesaian krisis Timor Timur. Kampanye politik yang paling sering terjadi di dunia belakangan ini adalah kampanye politik pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah).

Kampanye merupakan sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, dukungan rakyat, khalayak calon pemilih. Kampanye dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisasi untuk dalam suatu kelompok khalayak. Kampanye tentu saja dapat juga dilakukan guna memengaruhi penghambatan, atau pembelokan pencapaian.

Sayuti pada bukunya Komunikasi Pemasaran Politik (2014:108-110), kampanye politik umumnya dilakukan dalam bentuk pertemuan dan rapat-rapat umum yang berisi berbagai pidato, pembicaraan penyampaian slogan-slogan, atau dalam bentuk penyebaran barang-barang cetakan dan barang rekaman berisikan kalimat-

kalimat ajakan, bujukan, gambar-gambar, atau suara dan simbol-simbol. Semua bentuk kampanye tersebut secara garis besar berisikan pesan persuasif yang secara langsung mengajak pendengar, pemirsa, atau pembaca untuk menjatuhkan pilihannya kepada kandidat atau partai politik tertentu dalam sesi pemilihan umum yang tertentu pula.

Jenis komunikasi kampanye politik pada umumnya dan pada dasarnya dirancang sebagai komunikasi satu arah. Adapun sesi debat kandidat atau debat partai politik peserta pemilu sebagaimana yang belakangan dilakukan dan dimediasi oleh stasiun televisi dan disiarkan secara langsung pun tetap menggunakan jenis komunikasi satu arah, yaitu dari media televisi dan atau radio (katakanlah demikian) kepada khalayak, dan tidak mencakup arah sebaliknya (jenis komunikasi dua arah).

Pesan-pesan dari suatu kampanye politik lazimnya memuat gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para kandidat atau partai politik kepada para khalayak calon pemilih. Pesan tersebut lazimnya berisi butir-butir pembicaraan mengenai berbagai soal kebijakan. Butir-butir pembicaraan yang memuat gagasan-gagasan utama kampanye tersebut penyampaiannya diulang berkali-kali agar menciptakan kesan akhir mendalam pada calon pemilih. Dalam banyak pemilihan umum, partai oposisi (pembangkang) kandidat cenderung tidak menyampaikan pesannya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan dan pribadi yang tidak berkenaan dengan inti perbincangan, alih-alih lebih lazim dengan menggunakan kontra-persuasi yang ditujukan pada meng-counter citra politik berkuasa yang menjadi lawannya.

Kesuksesan yang dilakukan tim Pemenangan Sabdaguna bukan semata-mata keberuntungan saja, tetapi membuat strategi kampanye politik yang sesuai dengan regional Kabupaten Bandung dengan berlandaskan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 tahun 2015. Diantara yang dilakukan adalah Rapat umum, rapat terbatas, tatap muka (*face to face*), seni budaya, olahraga, sosial, media sosial, iklan radio, iklan tv, dan alat peraga kampanye. Kampanye yang ditetapkan ini bukan saja dilakukan pasangan Sabdaguna, tetapi juga dilakukan oleh setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 2016-2021.

Tim relawan Sabdaguna terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang beragam profesi dari usia muda hingga tua. Walaupun berangkat dari jalur independen,

Sabdaguna didukung oleh 4 partai politik yaitu PKS, Golkar, Gerindra, dan PPP. Selain itu, sebagian seniman lokal di Kabupaten Bandung juga menjadi relawan dan simpatisan Sabdaguna sehingga kampanye yang dilakukan melalui kesenian daerah seperti halnya yang paling dominan adalah pagelaran wayang golek. Karena seniman wayang golek dalang Dadan Sunandar Sunarya dan Deden Kosasih Sunarya adalah salahsatu simpatisan Sabdaguna.

Selama ini telah menjadi anggapan masyarakat luas bahwa wayang golek adalah media komunikasi tradisional. Anggapan seperti itu tentunya berangkat dari proses kesejarahannya yang dijalankan para pewaris aktifnya, terutama para dalang yang menjadi agen komunikasinya. Dalang dimasa lalu dan sampai kini masih lebih banyak memiliki sikap ketradisional yang menonjol sebagai sikap yang diwarisi secara turun temurun. Tradisi lisan yang dijalankan dalam kehidupan para dalang memberikan ciri tersendiri dalam gaya komunikasinya.

Pagelaran wayang golek memiliki karakteristik bentuk pertunjukan yang kuat ketradisionalnya. Wayang golek sebagai seni tradisional sudah diakui menjadi warisan budaya yang tak diragukan lagi. Wayang golek dikenal dan didukung oleh masyarakat Jawa Barat. Wayang golek dapat dipahami sebagai seni pertunjukan yang paling memasyarakat karena keakrabannya yang senantiasa hadir sebagai wajah kesenian sunda yang khas.

Wayang golek di Jawa Barat, sejak dulu sampai sekarang selalu melekat dengan nama dalangnya, baik itu di dalam pertunjukan semalam suntuk maupun pertunjukan padat (berdurasi terbatas). Kehadiran wayang golek yang selalu dilekatkan dengan nama dalang sering muncul menjadi pertanyaan pertama dari calon penonton. Bukan hal yang baru tetapi kelaziman masyarakat ketika mendengar kabar adanya pertunjukan wayang golek. Bagi penonton wayang golek yang fanatik, nama dalang adalah jaminan bagi mereka untuk mendapatkan kepuasan. Mereka merasa yakin bahwa mereka akan mendapatkan pertunjukan wayang golek yang menarik dan menghibur.

Media tradisional wayang golek sendiri selain menjadi media hiburan bagi rakyat Jawa Barat menjadi sebuah media yang dipergunakan untuk kepentingan kampanye atau sosialisasi program pemerintah. Seperti yang pernah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

yang mensosialisasikan programnya melalui “Gubernur Saba Lembur” dengan dalang kondang Asep Sunandar Sunarya pada tahun 2012. Hal serupa juga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Dadang M Naser dan Gungun Gunawan pada Pemilu tahun 2015.

Wayang golek dipakai oleh tim pemenangan Sabdaguna sebagai bagian media kampanye di berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung. Karena sifat relawan bebas berkampanye dan tidak melanggar hukum ketentuan waktu kampanye, maka dalam praktiknya, berkordinasi dengan tim pemenangan Sabdaguna dalam pemanfaatan pagelaran wayang golek di berbagai tempat di Kabupaten Bandung. Selain itu, dilatarbelakangi dengan banyaknya permintaan ke kantor tim pemenangan Sabdaguna dari berbagai kalangan masyarakat di tiap kecamatan untuk menghadirkan pagelaran wayang golek di daerahnya masing-masing.

Kampanye adalah bagian yang inheren dari kegiatan pemilu langsung. Karena itu, kampanye harus direncanakan dan dibuatkan strategi dan teknik, baik yang menyangkut materi kampanye maupun model kampanye. Penggunaan wayang golek sebagai salah satu media kampanye politik memiliki nilai tambah, terutama di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena wayang golek telah menjadi sebuah “gaya hidup” masyarakat Sunda dalam upaya mencari hiburan. Nilai tambah dari pertunjukan wayang golek yakni para pedalang dapat menyisipkan pesan-pesan kampanye, baik secara eksplisit maupun implisit, tergantung pada bagaimana cara pengemasan yang diinginkan sang pemangku hajat (dalam penelitian ini adalah calon bupati dan wakil bupati).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Di sini, “deskriptif” diartikan melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Pada hakikatnya, metode deskriptif mengumpulkan data secara univariat.

Penelitian deskriptif ditujukan untuk (1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, (2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, (3) membuat perbandingan atau evaluasi, (4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang

sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menerapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Tipe utama penelitian deskriptif mencakup penilaian sikap atau pendapat tentang individu, organisasi, peristiwa, atau prosedur; demikian juga tentang jajak pendapat politik dan survei penelitian pasar. Penelitian deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data survei dan non survei, hanya saja penelitian eksperimental kurang efektif. Cooper dan Emory bahkan mengatakan bahwa penelitian deskriptif menuntut kemampuan meneliti yang tinggi yang lebih ideal dibanding penelitian penjelasan dan menuntut standar yang sama tingginya, baik menyangkut desain maupun pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan pagelaran wayang golek sebagai salahsatu media kampanye politik pasangan “Sabdaguna” dalam pemilu tahun 2015. Oleh karena itu, penelitian ini lebih cocok menggunakan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bulan Maret 2015, Dadang M Naser secara personal membentuk tim kecil dalam upaya komunikasi dua arah terkait diskusi konsep dan program kampanye yang efektif dan awal mula pembentukan tim besar dalam rangkaian menempuh pemenangan Sabdaguna periode kedua. Tim kecil ini beranggotakan lima orang yang diantaranya Iman Salman Sag.,Msi, Subhansah, H. Sugianto Sag.,Msi, Cecep Suhendar Spd.,Msi, dan Deden Deni Nugraha Spd.

Sebelum Merumuskan perencanaan, langkah pertama yang dilakukan dalam pengelolaan kampanye adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga dapat dilakukan perencanaan yang matang. Melakukan kampanye politik sebagai salah satu upaya meraih massa sebanyak-banyaknya, diperlukan orang-orang yang mampu melakukan strategi komunikasi yang baik pula dengan menyebarkan pesan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu salahsatunya dari tim simpatisan relawan Sabdaguna yang berasal dari seniman lokal Kabupaten Bandung melakukan kampanye yang dilakukan melalui kesenian daerah seperti halnya yang paling dominan adalah pagelaran wayang golek sebagai alat organisasi penyebar pesan.

Kampanye politik melalui pagelaran wayang golek pada pemilu Kabupaten Bandung adalah bagian dari rangkaian kampanye yang dilakukan tim Sabdaguna

yang pada tahap pelaksanaannya dilaksanakan oleh tim simpatisan Sabdaguna. Perencanaan strategi kampanye politik tidak hanya dilakukan oleh tim kampanye utama, perencanaan kampanye juga dilakukan oleh masing-masing tim kampanye Sabdaguna di kecamatan dan kelurahan asalkan tetap dalam pantauan tim kampanye utama.

Wayang golek sebagai salahsatu kampanye politik dipilih oleh tim kecil Sabdaguna terkait sepak terjang Dadang M Naser dalam mensosialisasikan program-program pembangunan Kabupaten Bandung kepada masyarakat pada jabatan Bupati periode 2010-2015.

Masyarakat kabupaten Bandung yang notabene masih mencintai budaya lokal wayang golek, dijadikan sebuah alat untuk melancarkan kampanye politik tim Sabdaguna dalam meningkatkan *brand awareness* kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Pemilihan media sebagai saluran kampanye dilakukan dengan mengukur dan menganalisis kesempatan untuk melihat format dan isi pesan kampanye, nilai respons, biaya per penayangan pesan kampanye, akibat yang ditimbulkan dan kriteria lainnya.

Dalang yang dikenal masyarakat biasanya selalu dilekatkan dengan nama grup kesenian "Giriharja". Giriharja adalah salahsatu sentra dalang wayang golek yang sudah terkenal di Jawa Barat. Di antara dalang yang terkenal di dunia pedalangan dari Giriharja di antaranya adalah Dadan Sunandar Sunarya dan Deden Kosasih Sunarya. Animo masyarakat terhadap wayang golek dipengaruhi oleh figur seorang dalangnya.

Identifikasi masalah yang dilakukan Sabdaguna melalui data primer di lapangan terkait pengalaman sebagai panitia penyelenggara wayang golek. Subhansah menganalisis kampanye yang dilakukan pasangan Sabdaguna bersama tim kampanyenya yang pada dasarnya dimulai dari tahap identifikasi kampanye politik melalui pagelaran wayang golek pada pemilukada Kabupaten Bandung Periode 2016-2021:

1. Tingginya minat masyarakat Kabupaten Bandung terhadap wayang golek sebagai salah satu syarat pelancaran kampanye Sabdaguna.
2. Pengukuran kredibilitas dalang sebagai aktor kampanye untuk menyampaikan pesan kampanye Sabdaguna agar memberikan pesan persuasif.
3. Korelasional cerita wayang golek yang dinamis dengan berbagai kepentingan khususnya kepentingan kampanye Sabdaguna.

4. Kemudahan perijinan kegiatan wayang golek dan kondusif dibandingkan dengan pentas musik yang memiliki banyak aturan dalam perijinan kegiatan.
5. Penonton wayang golek bersifat heterogen dari berbagai kalangan dan berbagai usia dan tidak dipatok oleh suatu kepentingan politik apapun pada masa kampanye, sehingga fleksibel mendatangkan masyarakat dari dekat maupun jauh karena fungsinya sebagai hiburan yang merakyat dan bebas ditonton oleh masyarakat manapun. Selain itu, penonton wayang golek biasanya adalah orang-orang yang sudah mempunyai hak pilih suara.
6. Adanya peraturan PKPU mengenai beberapa publikasi yang dibatasi dilakukan oleh pasangan calon, sehingga untuk menyiasati keefektifan media yang murah dan diterima masyarakat agar bisa mempersuasi untuk memilih Sabdaguna dipilahlah wayang golek.

Menurut Ostergaard pada Venus (2009: 14-15) sebuah rancangan program kampanye untuk perubahan sosial yang tidak didukung oleh temuan-temuan ilmiah tidaklah layak untuk dilaksanakan. Alasannya karena program semacam itu tidak akan menimbulkan efek apapun dalam menanggulangi masalah sosial yang dihadapi. Karenanya, lanjut pakar kampanye ini, sebuah program kampanye hendaknya selalu dimulai dari identifikasi masalah secara jernih. Langkah ini disebut juga tahap pra kampanye.

Identifikasi yang dilakukan tim kecil Sabdaguna terkait dengan kesenian wayang golek dimulai pada pagelaran yang ditampilkan di setiap event Pemerintah Kabupaten Bandung dan beberapa hajatan pribadi. Kesenian sunda wayang golek digemari oleh masyarakat sunda khususnya di Kabupaten Bandung dengan melihat animo warga yang menyaksikan pagelaran wayang golek. Poin keduanya wayang golek adalah media massa tradisional yang komunikatif dibandingkan dengan kesenian sunda lainnya sehingga efektif untuk menyisipkan pesan kampanye pada cerita wayang golek karena cerita wayang golek berkorelasi dengan kampanye Sabdaguna.

Pertimbangan wayang golek sebagai media yang dimanfaatkan kampanye Sabdaguna adalah dukungan relawan dan pagelaran wayang golek lebih kondusif dan aman dari awal sampai akhir pagelaran bahkan bisa mengembangkan bagi pelaku UKM untuk menjajakan hasil produksinya pada setiap ada pagelaran wayang golek diadakan, berbeda dengan pagelaran pentas musik yang banyak peraturan, sehingga perijinannya pada

pihak keamanan dan pihak setempat lebih mudah dan murah dilakukan.

Pemilihan dalang sebagai aktor politik dilakukan karena secara pribadi kedekatan dengan dalangnya dan mengukur keinginan masyarakat yang menginginkan pagelaran wayang golek dengan dalang Dadan Sunandar Sunarya dan dalang Deden Kosasih Sunarya

Langkah pertama yang harus dilakukan sumber kampanye (*campaign makers* atau *decision maker*) adalah mengidentifikasi masalah faktual yang dirasakan. Penulis menganalisis tingginya animo masyarakat Kabupaten Bandung terhadap kesenian Wayang Golek dikarenakan wayang golek sebagai media hiburan rakyat yang dinamis berkembang di tengah derasnya modernisasi. Cerita wayang golek bisa berintegrasi secara dinamis dengan isu-isu kekinian dan kepentingan yang membeli jasa wayang golek itu sendiri. Pada dasarnya media wayang golek bisa menjelaskan pesan yang disampaikan melalui ceritanya.

Merujuk pada pernyataan Groenendael pada Nalan (2015:3) Dalang hanya mengartikulasikan hal-hal yang bermakna bagi masyarakat yang masih menjadi bagian integral dunia makna audiensnya, sehingga peranan sosial dalang bisa sebagai “pelayan masyarakat”. Dalang sebagai “pelayan masyarakat” menjadikannya selalu berusaha menemukan cara-cara dan teknik-teknik mendalang hingga pada akhirnya menjadi gaya mendalang yang khas setiap dalang.

Para dalang menyadari bahwa wayang adalah alat komunikasi mereka yang khas. Menurut Suryana dalam Nalan (2015:4) wayang golek seperti jenis wayang lainnya, adalah alat komunikasi yang lengkap, yaitu alat komunikasi pandang-dengar, yang telah akrab sejak lama dengan audiensnya. Aneka tuntunan dikemas dalam tuturan para dalang. Semua jenis wayang, sejak awal, berfungsi sebagai wahana penyampaian tuntunan di samping sebagai tontonan. Karena itu, audiens pertunjukan wayang golek bisa menikmati dua sajian: sajian yang berupa nilai-nilai (tuntunan) dan hiburan/tontonan.

SIMPULAN

Pada tahap identifikasi masalah, tim pemenangan Sabdaguna melakukan analisis situasi dengan melakukan peninjauan langsung kelapangan. Analisis tersebut menggambarkan permasalahan yang dihadapi,

yakni wayang golek sebagai media komunikasi tradisional masih dicintai oleh masyarakat Kabupaten Bandung dan aksesibilitas dalam melakukan pagelaran wayang golek dengan memanfaatkan fungsinya sebagai media komunikasi untuk menyalurkan pesan kampanye pada cerita wayang golek

DAFTAR PUSTAKA

- Nalan, Arthur S. 2015. Asep Sunandar Sunarya – Dalang Wayang Golek Intelek.
Sayuti, Solatun Dulah. 2014. Komunikasi Pemasaran Politik. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
Venus, Antar. 2009. Manajemen Kampanye. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

BUDAYA POLITIK, KOMUNIKASI POLITIK, DAN TRANSISI DEMOKRASI PASCA ORDE BARU

Dede Mariana
Ari Ganjar Herdiansyah,
Diah Fatma Sjoraida
Heru Riyanto
Universitas Padjadjaran
d.mariana@unpad.ac.id

Abstrak

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru Soeharto, Indonesia memasuki era transisi demokrasi yang sangat masif yakni beralihnya seluruh tatanan politik dan pemerintahan dari sistem otoriter ke sistem demokratis. Sistem demokratis tersebut selanjutnya akan menjadi alas atau landasan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh bangsa Indonesia di tengah-tengah arus globalisasi. Pertanyaannya, mampukah bangsa Indonesia melewati era transisi demokrasi tersebut dengan baik. Apakah transisi demokrasi tersebut disertai dengan perubahan budaya politik secara signifikan, yakni bergesernya budaya politik parokial dan/atau subjek ke budaya politik partisipan. Serta bagaimanakah pola-pola komunikasi politik yang menyertai perubahan budaya politik di era transisi demokrasi tersebut. Makalah ini akan berupaya membahas ketiga hal tersebut di atas selama transisi demokrasi di Indonesia serta implikasinya bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia.

Kata kunci: budaya politik, komunikasi politik, transisi demokrasi, sosial, ekonomi, dan budaya

Pendahuluan

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru Soeharto, Indonesia memasuki era demokrasi dan demokratisasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Indonesia pasca pemerintahan Soeharto memasuki era transisi demokrasi. Demokrasi sebagai dikembangkan di Indonesia dimaknai sebagai pengaturan kembali kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di dalam individu-individu melalui perjuangan memperebutkan suara pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan.

Pemaknaan yang mengacu pada demokrasi prosedural ala Schumpeterian ini memandang penting 3 (tiga) elemen dasar demokrasi¹, yakni *pertama*, partisipasi

politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, yang dilakukan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sehingga tidak satu pun kelompok yang dikesualikan. *Kedua*, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. *Ketiga*, adanya jaminan kebebasan sipil dan politik berupa kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Secara prosedural, ketiga elemen pokok tersebut dilembagakan dalam pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Pemilu merupakan arena kompetisi untuk menentukan pejabat-pejabat publik di eksekutif maupun legislatif. Partai politik dan parlemen merupakan dua institusi politik utama yang menjadi wadah artikulasi dan agregasi kepentingan publik. Titik tekan yang terlampaui besar pada dimensi prosedural ini menimbulkan kritik karena dalam praktiknya menyebabkan terabaikannya dimensi-dimensi lain dalam demokrasi, seperti dimensi kebebasan sipil, budaya politik, dan legitimasi demokrasi.

Pertanyaannya, mampukah bangsa Indonesia melewati era transisi demokrasi tersebut dengan baik. Apakah transisi demokrasi tersebut disertai dengan perubahan budaya politik secara signifikan, yakni bergesernya budaya politik parokial dan/atau subjek ke budaya politik partisipan. Serta bagaimanakah pola-pola komunikasi politik yang menyertai perubahan budaya politik di era transisi demokrasi tersebut.

¹ Mariana, Dede. 2007. Makalah. *Demokrasi di Indonesia: Problematika dan Aktualisasi*.

Budaya Politik dan Transisi Demokrasi

Memasuki era transisi demokrasi yang dijalankan di Indonesia pasca pemerintahan Soeharto mengacu pada demokrasi prosedural ala Schumpeterian yang menekankan kepada 3 (tiga) elemen dasar demokrasi², yakni *pertama*, partisipasi politik yang dilakukan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil. *Kedua*, kompetisi yang luas antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif secara reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. *Ketiga*, jaminan kebebasan sipil dan politik berupa kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Kritik terhadap konsep dan praktik demokrasi prosedural ini, bahwa optimisme dalam menciptakan kepastian-kepastian membuat konsep demokrasi prosedural mengabaikan faktor-faktor di luar dimensi pemilu dan partai politik, seperti budaya politik dan legitimasi demokrasi. Budaya politik menyangkut pola keyakinan, nilai-nilai, ide-ide, sentimen, dan sikap-sikap suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem tersebut. Sedangkan legitimasi demokrasi meliputi dua tingkatan, yakni *pertama*, keyakinan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik yang memungkinkan. *Kedua*, keyakinan pada demokrasi bukan sebagai bentuk pemerintahan ideal tapi sebagai pilihan yang lebih disukai dibandingkan sistem lain yang pernah dicoba (Diamond, 2003; Mariana, 2007).

Secara teoritik terdapat tiga tipe budaya politik, yakni: budaya politik parokial, kaula/subjek, dan partisipan (Masoed, 2007; Kantaprawira, 2006). Budaya Politik Parokial, yakni budaya politik dengan tingkat partisipasi yang rendah. Umumnya budaya politik ini terdapat di dalam masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Menurut Mochtar Masoed dan Colin Mc. Andrew (2007), di dalam budaya politik parokial: orang-orang tidak mengetahui sama sekali adanya pemerintahan dan politik. Hingga kesadaran politik mereka menjadi sangat minimal dan ditentukan oleh para pemimpinnya. Ciri-cirinya: apatis, lingkupnya sempit dan kecil, pengetahuan politik rendah, masyarakat sederhana dan tradisional, adanya ketidakpedulian dan menarik diri dari kehidupan politik, anggota masyarakat condong tidak berminat terhadap obyek politik yang luas, kesadaran anggota masyarakat mengenai danya pusat kewenangan dan

kekuasaan dalam masyarakatnya rendah, dan tidak ada peranan politik bersifat khusus.

Budaya Politik Kaula/Subjek, yakni budaya politik masyarakat yang sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, namun masih relatif pasif. Di dalam budaya politik kaula/subjek, orang-orang secara pasif patuh terhadap para pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, akan tetapi mereka tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan umum. Budaya politik kaula/subjek memiliki tingkat perhatian pada sistem politik sangat rendah. Ciri-cirinya: masyarakat menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah, sedikit warga memberikan masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun dapat menerima apa yang berasal dari pemerintah, menerima putusan-putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi, terlebih lagi ditentang, sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak dapat berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, warga menaruh kesadaran, minat, dan perhatian pada sistem politik secara umum dan khusus terhadap obyek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadaran sebagai aktor politik masih rendah.

Budaya politik partisipan, yakni budaya politik yang ditandai adanya kesadaran politik yang sangat tinggi. Di dalam budaya politik partisipan, masyarakat cenderung mengorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik baik terhadap struktur dan proses politik maupun administratif. Budaya politik partisipan ditandai adanya kesadaran dirinya dan orang lain sebagai anggota aktif di dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat dengan budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecilnya partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan di dalam berlangsungnya sistem politik tersebut. Begitupula, di dalam budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima secara langsung keputusan-keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung jawab.

Ciri-ciri budaya politik partisipan: warga menyadari hak dan tanggungjawabnya, serta dapat mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya; tidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat memberikan penilaian dengan penuh kesadaran terhadap semua obyek politik, baik secara keseluruhan: input, output, maupun posisi dirinya sendiri; kehidupan politik sebagai sarana transaksi, misalnya: layaknya sebagai penjual dan pembeli, warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat juga menolak menurut penilaiannya

² Mariana, Dede. 2007. Makalah. *Demokrasi di Indonesia: Problematika dan Aktualisasi*.

sendiri; menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.

Dengan demikian budaya politik yang diperlukan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis adalah budaya politik partisipan. Namun, di Indonesia di dalam praktiknya di era transisi demokrasi ini dengan merujuk kepada ciri-ciri masing-masing budaya politik, masih menunjukkan kehadiran ketiga tipe budaya politik tersebut, yakni: untuk daerah-daerah dengan corak masyarakat tradisional maka budaya parokial dan/atau parokial-subjek/kaula tampak lebih dominan, sementara untuk daerah-daerah yang sudah menunjukkan kemajuan maka budaya politik partisipan sudah mulai tampak. Apabila, dilihat secara geografis daerah-daerah perdesaan masih menunjukkan budaya politik parokial dan/atau parokial-subjek/kaula, sementara daerah-daerah perkotaan menunjukkan budaya politik partisipan.

Uniknya, di wilayah perkotaan pun, dapat ditemukan kecenderungan budaya politik parokial dan/atau parokial-subjek/kaula. Mengingat wilayah perkotaan di Indonesia biasanya merupakan wilayah-wilayah yang secara sosial budaya dihuni oleh warga perdesaan yang berpindah ke kota sebagai migran. Jadi di dalam konteks Indonesia, tidak selamanya wilayah kota itu benar-benar dihuni oleh warga kota dengan budaya politik partisipan.

Secara instrumental, demokrasi mendorong kebebasan melalui tiga cara, *pertama*, pemilu yang bebas dan adil yang secara inheren mensyaratkan hak-hak politik tertentu untuk mengekspresikan pendapat, berorganisasi, oposisi, serta hak-hak politik mendasar semacam ini tidak mungkin hadir tanpa pengakuan terhadap kebebasan sipil yang lebih luas. *Kedua*, demokrasi memaksimalkan peluang bagi penentuan nasib sendiri, di mana setiap individu hidup di bawah aturan hukum yang dibuatnya sendiri. *Ketiga*, demokrasi mendorong otonomi moral, yakni kemampuan setiap warga negara membuat pilihan-pilihan normatif, sehingga pada tingkat yang paling mendalam, demokrasi mendorong kemampuan untuk memerintah sendiri (Dahl, 1989; Mariana, 2007).

Ketiadaan keyakinan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan terbaik yang mungkin diterapkan menjadi penyebab belum terlembagakannya demokrasi di Indonesia selama masa transisi. Penerapan demokrasi prosedural yang cenderung artifisial juga menjadi penyebab tidak terbentuknya konsensus mengenai demokrasi di berbagai kalangan masyarakat. Kegagalan demokrasi prosedural untuk menjelaskan kemunculan bentuk-bentuk partisipasi dan kompetisi semu serta mengapa-

demokrasi tidak serta merta mewujudkan kesejahteraan juga menjadi alasan belum terbentuknya keyakinan masyarakat akan demokrasi. Keterbelahan sosial dan ekonomi, yakni: kemajemukan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa dan sistem nilai dan keyakinan (sistem religi), serta kesenjangan ekonomi yang ditunjukkan oleh timpangnya tingkat pendapatan masyarakat secara individu maupun kelompok, telah turut mendorong ketidaksetaraan (*unequality*) antar individu maupun kelompok-kelompok masyarakat, yang di dalam sistem demokrasi sejatinya menuntut kesetaraan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut di dalam mengakses urusan-urusan bersama (publik). Kondisi ini berlanjut menimbulkan ketimpangan di dalam mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi di dalam praktik demokrasi.

Penyimpangan pada praktik demokrasi terjadi akibat pengabaian demokrasi prosedural terhadap kondisi-kondisi struktur sosial-ekonomi³ yang bersifat mendua: membatasi pilihan-pilihan politik dari elit pro demokrasi atau justru sebaliknya. Dalam ranah ekonomi, oleh Yushihiro Kuno, dualisme ekonomi ini disebut sebagai kapitalisme semu atau *olrh Terquist* (1990)⁴ disebut dengan kapitalisme rente. Dualisme ekonomi ini tercermin, antara lain pada terbentuknya struktur ekonomi berbasis etnis atau suku. Sedangkan dalam ranah politik, dualisme ini mengarah pada fenomena kembalinya negara patrimonial dan politik identitas dalam tata politik Indonesia modern. Nasikun (1998) melihat fenomena ekonomi-politik Indonesia ini sebagai bentuk perkawinan antara dua watak yang paling dasar dalam dua sistem ekonomi, yakni kapitalisme dan feodalisme. Fenomena perkawinan antara demokrasi modern, kapitalisme dengan feodalisme ini tentu saja menimbulkan sejumlah keraguan, apakah demokrasi bisa dilahirkan melalui "rahim" kapitalisme-feodalistik? Atau sebaliknya, demokrasi justru melahirkan penguatan feodalisme dan 'pembajakan' institusi dan prosedur demokrasi oleh kekuatan politik yang mempunyai akar feodalistik? Kondisi-kondisi ini pada akhirnya melahirkan sistem demokrasi yang memberi ruang adanya hegemoni oleh kekuatan-kekuatan kelompok masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih tinggi terhadap kelompok masyarakat lainnya. Tentu ini bertentangan atau berlawanan dengan prinsip-prinsip dan tujuan demokrasi itu sendiri. Meskipun pada akhirnya kondisi ini mengokohkan apa yang disinyalir oleh Robert Michael⁵, sebagai hukum besi oligarki, yakni suatu kondisi dimana "setiap kita memilih sistem demokrasi, maka pada waktu bersamaan cepat atau lambat, kita

3 AA GN Ari Dwipayana. 2004. *Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*. Yogyakarta: IRE Press, hal. 5.

4 Mariana, Dede. 2007. Makalah. *Demokrasi di Indonesia: Problematika dan Aktualisasi*.

5 Robert Michels. 1911. *Political Parties*. London: Penguin Books.

akan dihadapkan kepada sistem oligarki di dalam praktiknya”.

Dari sisi aktor, kegagalan demokrasi digambarkan oleh Olle Tornquist sebagai fenomena ‘pembajakan’ demokrasi. Ia menjelaskan bagaimana ruang publik yang dibuka melalui liberalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi sudah ‘dibajak’ oleh orang-orang yang tidak mempunyai sedikit kehendak pun untuk membangun akuntabilitas dan transparansi. Bentuk demokrasi di Indonesia saat ini, yang dijabarkan oleh Tornquist sebagai ‘demokrasi kaum penjahat’ menguntungkan para pejabat, kaum elit, dan para koruptor lokal, orang yang sering disebut sebagai *status quo*. Yang diinginkan oleh penguasa lama dan para *hardliners* adalah suatu negara yang lemah.

Birokrasi masih tetap didominasi oleh orang-orang yang dididik di bawah rezim otoriter, yang banyak terlibat korupsi, sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melayani kepentingan publik. Bahkan hal ini meluas ke birokrasi yang menjadi bagian dari organisasi meso struktur politik, yakni: lembaga-lembaga politik baru yang dilahirkan pasca rezim soeharto, seperti: komisi-komisi negara ataupun lembaga non struktural lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 hasil amandemen, yakni: Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, serta turunannya.

Orang-orang tersebut, yang hidup nyaman ketika zaman Orde Baru, saat ini masih tetap mempunyai kekuasaan, walaupun di bawah tatanan politik baru dan berasal dari partai yang berbeda-beda. Selain mereka, muncul pula aktor-aktor baru dalam pentas politik yang memanfaatkan peluang demokratisasi untuk kepentingan mereka. Inilah yang disebut dengan ‘para penumpang gelap’ (*free riders*). Banyak di antara mereka yang menggunakan bahasa demokrasi dan otonomi, atau paling tidak mempergunakan kelemahan demokrasi di mana hubungan mendasar dari kekuasaan masih tetap tidak tertata. Sistem kekuasaan semacam itu memperkuat adanya ketidaksamaan dan ketidakadilan pada saat ini. Akibatnya, banyak orang merasa tidak diuntungkan dengan adanya demokrasi.

Pengabaian terhadap dimensi liberalisasi, budaya politik, dan legitimasi demokrasi serta fenomena ‘pembajakan’ demokrasi oleh para *free riders* menimbulkan konsekuensi terbangunnya model demokrasi semu (*pseudo democracy*), sebagai sebuah kecenderungan di mana keberadaan lembaga-lembaga politik demokratis secara formal, seperti pemilu multipartai menyebabkan dominasi kekuatan otoriter menjadi tidak kasat mata. Secara sederhana, demokrasi

semu berawal dari konsensus di antara para aktor politik untuk menggunakan prosedur dan institusi demokrasi modern secara formal, namun substansi permainan berada di luar skenario yang diinginkan oleh demokrasi murni.

Kebijakan politik, baik nasional maupun lokal masih mendistorsi upaya-upaya pemulihan ekonomi, padahal secara historis, pengalaman di negara-negara lain demokrasi justru mendorong pertumbuhan ekonomi. Idealnya, demokrasi akan mengarah pada pencapaian kesejahteraan karena demokrasi akan memperluas akses publik untuk memperoleh barang-barang publik (*public goods*), seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, perluasan kesempatan kerja, dll. Namun, yang terjadi sekarang, sepertinya penerapan demokrasi di Indonesia belum menunjukkan keterkaitan dengan pencapaian kesejahteraan.

Kegagalan demokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan ini disebabkan oleh dua hal⁶, yakni anomali dalam sistem dan perilaku aktor yang terlibat. Praktik demokrasi yang dijalankan sekarang ini baru sebatas prosedural dan formal, masih jauh dari substansial. Indikasinya, institusi demokrasi yang ada hanya dikuasai segelintir elit politik sehingga praktik demokrasi bergeser menjadi oligarki elit-elit strategis. Politik desentralisasi yang dijalankan baru sebatas elit dan parpol, belum sampai ke massa atau rakyat/warga, sehingga otonomi daerah cenderung oligarkhis pelaksanaannya. Kondisi ini mengakibatkan akses rakyat/warga terhadap pengambilan keputusan strategis, misalnya dalam penetapan APBN dan APBD hampir tidak ada. Artinya, rakyat masih tetap ada di pinggiran di dalam proses berpemerintahan dan tetap menempati posisi marginal.

Sementara dari dimensi perilaku aktor politik, orientasi para pelaku politik sekarang ini cenderung mengalami pergeseran, dari yang semula didasari oleh orientasi ideologis menjadi sekedar orientasi pragmatis yakni untuk memperoleh kekuasaan dan menggunakannya untuk kepentingan kelompoknya. Secara substantif, tidak ada pelebagaan budaya demokrasi baik di kalangan elit maupun massa. Sekalipun pada praktiknya, proses politik dapat diibaratkan seperti transaksi (pertukaran sumberdaya), namun yang terjadi saat ini, transaksi tersebut lebih banyak menguntungkan segelintir elit. Masyarakat tidak memperoleh kemudahan untuk mempengaruhi secara langsung penyediaan barang dan jasa publik yang akan mereka nikmati. Keluhan dan aspirasi hanya dapat disalurkan melalui perwakilan (partai politik dan anggota legislatif), sementara kedua agen perantara tersebut pada praktiknya belum sungguh-sungguh

⁶ Mariana, Dede. 2007. Makalah. *Demokrasi di Indonesia: Problematika dan Aktualisasi*.

berperan sebagai representasi rakyat. Karenanya, kebijakan yang dilahirkan dari proses politik ini pun hanya mencerminkan preferensi para elit, bukan preferensi publik secara umum. Masyarakat tidak berdaya untuk dapat mengakses dan memilih pejabat dan barang publik yang diinginkan selain yang disodorkan oleh partai dan yang dipengaruhi oleh kelompok kepentingan.

Belajar dari berbagai keterbatasan model demokrasi prosedural, maka diperlukan sebuah kerangka eksplanasi tentang perkembangan demokratisasi di Indonesia yang tidak hanya bisa menghindari 'jebakan' tradisi politik formal, tetapi lebih sensitif terhadap dimensi-dimensi kebebasan sipil, budaya politik, dan legitimasi demokrasi. Untuk menjamin agar transisi ke demokrasi di Indonesia dapat terkonsolidasi dengan baik, maka perlu segera diantisipasi masalah-masalah yang muncul agar transisi tidak mengarah pada kebuntuan. Masalah-masalah tersebut adalah⁷:

1. Masalah kontekstual, yang biasanya mewujud berupa pemberontakan massa; konflik etnis komunal; tingkat kemiskinan yang ekstrem; ketimpangan sosial ekonomi yang mencolok; inflasi yang kronis; hutang luar negeri yang besar; terorisme; serta keterlibatan negara secara ekstensif dalam perekonomian.
2. Masalah transisi, yang dipengaruhi oleh kecenderungan balik ke otoritarian karena aktor utama dari transisi itu merupakan tokoh-tokoh yang masih merupakan bagian dari rezim otoritarian atau sistem demokrasi digantikan oleh bentuk-bentuk pemerintahan otoriter yang baru. Di Indonesia, transisi tidak dijalankan dengan benar-benar karena tidak ada pakta atau kompromi antara kelompok *status quo* dengan kelompok pro demokrasi untuk memberantas semua bentuk penghadangan gerak ke demokrasi dan tidak adanya kesepakatan antara kelompok reformasi dengan kelompok *status quo* untuk mengagendakan sejumlah perubahan signifikan ke arah demokrasi.
3. Masalah sistemik, dipicu oleh kegagalan sistemik dari rezim-rezim demokratis untuk beroperasi secara efektif memperlemah legitimasi mereka; ambruknya perekonomian internasional; bergesernya suatu kekuatan besar demokratis atau demokratisasi ke arah otoriterisme dapat memicu aksi efek bola salju serupa di negara-negara lain; dll.

Di Indonesia, masalah sistemik yang masih terjadi adalah keseluruhan sistem yang dibangun dengan KKN oleh Soeharto selama Orde Baru yang telah

mengalami pembusukan, menjadikan transisi kehilangan daya geraknya ke demokrasi karena tidak ada penginstalasian yang kuat terhadap lembaga tersebut atau merekonstruksikannya kembali menjadi lebih cocok dengan demokrasi.

Karena itulah, transisi demokrasi di Indonesia memerlukan waktu yang lama untuk sukses dalam mewujudkan demokrasi. Di samping disebabkan oleh berbagai persoalan sistemik, transisional, dan konsensual yang diwariskan oleh pemerintahan Habibie dan pemerintahan setelahnya, yakni: Gus Dur, Megawati, dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belum mampu ditangani secara baik, juga disebabkan oleh instalasi demokrasi yang melahirkan pemerintahan yang lemah karena tidak memiliki basis partai politik yang kuat. Namun demikian, transisi demokrasi masih memiliki peluang untuk terus diperjuangkan dengan mengatasi permasalahan tersebut dan melakukan sejumlah langkah strategis untuk membenahi struktur dan kultur berdemokrasi, antara lain: *pertama*, menumbuhkan kultur demokrasi di kalangan elit maupun massa/warga melalui pendidikan politik kewargaan (*civic education*) yang kritis terhadap pemerintahan dan elit-elit, yang dapat menyadarkan akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga. *Kedua*, *rule of law* dan penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif, sehingga ada kepastian dan ketegasan aturan main yang mengikat para pelaku. Penegakan hukum diperlukan agar *trust* (kepercayaan) publik dapat dipulihkan dan legitimasi pemerintah dapat diperkuat. *Ketiga*, menumbuhkan *moral hazard* dalam praktik politik, pemerintahan, dan pembangunan, agar perilaku elit politik dan elit ekonomi semakin dekat dengan tujuan pokok, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial (*social justice*). Etika politik harus menjadi agenda utama untuk dijalankan oleh para pejabat publik, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif maupun lembaga-lembaga yang mengurus urusan-urusan publik. Dengan kata lain, perlu ada keberpihakan politik dan kedewasaan berpolitik, khususnya dari para elit sebagai pendorong demokratisasi⁸.

Komunikasi Politik di Era Transisi Demokrasi

Praktik komunikasi politik selalu mengikuti sistem politik yang berlaku. Peralihan Orde Baru ke Reformasi menandai Pergeseran sistem politik dari otoriter menuju demokrasi, hal ini tentu berpengaruh besar terhadap pola komunikasi politik yang terjadi.

Dalam pemerintahan yang demokratis, menurut menurut M. Alwi Dahlan (1999), komunikasi adalah unsur esensial bagi demokrasi, melekat pada konsep demokrasi itu sendiri. Mengutip Almond dan Coleman

⁷ Samuel Huntington. hal 210.

⁸ Mariana, Dede. 2007. Makalah. *Demokrasi di Indonesia: Problematika dan Aktualisasi*.

(1960: 12-17) bahwa demokrasi sebagai sistem politik dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan dari komunikasi. Lebih lanjut dikatakan Almond dan Coleman bahwa semua fungsi yang dilakukan dalam sistem politik - sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan aturan, penerapan aturan, pengadilan atas pelaksanaan aturan – dilakukan dengan cara komunikasi.

Cerita komunikasi politik di era orde baru tentu tidak mungkin diterapkan di era reformasi saat ini. Tatahan sistem politik saat ini sangat masif mendorong demokratisasi. Menurut Soleh (2014)⁹ tidak ada lagi ruang bagi memonopoli komunikasi. Prinsip check and balance antar lembaga negara, badan-badan pemerintah, lembaga hukum serta pengawasan dari media massa dan *civil society* telah bekerja secara seimbang untuk menopang demokratisasi. Dengan demikian, komunikasi politik pemerintah diarahkan memenuhi kaidah-kaidah demokrasi, yang mengedepankan transparansi dan ruang dialog. Kebijakan-kebijakan strategis yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat diperdebatkan baik melalui jalur formal di lembaga-lembaga resmi maupun di masyarakat yang terekam media massa maupun media sosial.

Komunikasi politik dapat dipahami dari berbagai perspektif, seperti yang disampaikan Perloff (2013:30) yang melihat dari sisi efek/dampaknya, bahwa komunikasi politik sebagai proses dimana bahasa dan simbol yang digunakan baik oleh para pemimpin, media, atau warga negara memberikan dampak politik baik disengaja ataupun tidak pada aspek kognisi, sikap dan perilaku individu atau menghasilkan kebijakan publik bagi bangsa, negara atau komunitas.

Kartaprawira (1983:64), melihat komunikasi politik pada sisi kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang ada di masyarakat, baik intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik pemerintah.

Menurut Rauf dan Nasrun (1993: 32-33) melihat komunikasi politik dari dua dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai sebuah kegiatan politik dan sebagai kegiatan ilmiah. Sebagai kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kegiatan ini bersifat empirik, karena dilakukan secara nyata dalam kehidupan sosial. Sedangkan sebagai kegiatan ilmiah, komunikasi politik adalah salah satu kegiatan politik dalam sistem politik.

⁹ <http://restorasinews.com/detailpost/dinamika-komunikasi-politik-pemerintah-di-era-demokrasi>. Diakses tanggal 15 oktober 2016.

Komunikasi Politik pada dasarnya melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Atas dasar itu menurut Rauf dan Nasrun (1993) fungsi komunikasi politik dapat dikategorikan menjadi dua, yakni :

1. Fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah /suprastruktur politik atau disebut pula dengan istilah *the government political sphere*.
2. Fungsi yang berada pada struktur masyarakat /infra struktur politik yang disebut pula dengan istilah *the socio political sphere*.

Pada tingkatan pada struktur masyarakat /infrastruktur akan terjadinya proses fungsi sosialisasi seta edukasi yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi yang terdapat di dalam masyarakat. Sedangkan tingkatan pada isi komunikasi yang dilaksanakan pada pemerintahan /suprastruktur antara lain :

1. Seluruh kebijakan menyangkut kepentingan umum
2. Meningkatkan loyalitas dan integrasi nasional
3. Menumbuhkan dinamika dalam motivasi dan integritas mental
4. Menerapkan kebijakan-kebijakan serta undang-undang dan perundang-undangan dalam hidup bernegara
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional

Perubahan sistem politik dari era orde baru ke reformasi menandai pergeseran sistem politik dari otoriter menuju demokrasi berimbang pada komunikasi politik yang terjadi. Dalam konteks pemerintahan, menurut Soleh (2014) setidaknya terdapat lima variable yang menambah tinggi pergerakan atau dinamika komunikasi politik pemerintah saat ini, yakni 1) sistem pemerintahan presidensial yang sepatutnya menguatkan komunikasi politik pemerintah; 2) produk hukum perundang-undangan yang sebagai alas formal komunikasi politik; 3) praktik otonomi daerah yang mempengaruhi hubungan pusat dan daerah; 4) Kooptasi media massa oleh elit politik; 5) keterbatasan sumber daya manusia di elit pejabat dalam mengemas komunikasi politik.

Era reformasi melahirkan semangat keterbukaan dalam segala bidang yang menjadi spirit baru untuk perubahan, termasuk pula di dalamnya bidang politik. Ibarat keran air yang dibuka mendadak, partai-partai politik tumbuh subur mencoba mengeluarkan suaranya yang pernah dibungkam. Kelompok reformis maupun yang mengaku reformis turun gunung meramaikan

jagad perpolitikan nasional. Para politisi ini kemudian seolah menemui dunia politik yang sebenar-benarnya. Dunia politik di mana retorika serta propaganda silih berganti sekaligus bertubi-tubi menyapa masyarakat yang haus akan perubahan.

Para politisi mencari pengaruh dengan melakukan kegiatan komunikasi. Dalam konteks Indonesia, komunikator politik memengaruhi konsep dan pilihan masyarakat, disebabkan *political level* yang ada di negara masih sebatas *cultural politic*. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih rendah, dan belum merata. Kategori komunikator politik menurut Dan Nimmo (2000:30-35) adalah politikus, yang bertindak sebagai komunikator politik, komunikator profesional dalam politik dan aktivis atau komunikator paruh waktu.

Daniel Katz (dalam Nimmo, 2000:30) membedakan politikus ke dalam dua kelompok yang berbeda berkenaan dengan sumber aktivitas kepentingan politik pada proses politik, yaitu politikus ideolog dan politikus partisan. Analisis yang sangat menarik ditulis oleh Vitaloka (2012)¹⁰, dalam mencermati perilaku komunikasi politik politisi Indonesia pasca era reformasi. Menurut vitaloka sebagian besar politisi di negeri ini, pasca reformasi, kerap mendengungkan demokrasi yang dibalut dengan kesantunan dan tak lagi berjalan dengan semangat yang sama seperti halnya di awal reformasi.

Semangat reformasi dalam kancah politik pada awal sangat kental dengan perjuangan untuk perubahan. Komunikasi politik yang dibangun pun mengarah pada perbaikan, atau jika mengutip pernyataan Gertz di atas, para politisi ideolog. Sebut saja para pengusung Deklarasi Ciganjur yang digagas oleh mahasiswa pada awal reformasi. Terasa benar semangat demokrasi dalam komunikasi politiknya meski tak menutup kemungkinan masing-masing pihak tentu membawa pula kepentingan-kepentingan kelompoknya di dalam jalinan komunikasi tersebut. Amien Rais yang mewakili perlawanan kaum intelektual di era Orde Baru, Megawati sebagai simbol “wong cilik”, Gusdur sebagai pemersatu umat, dan Sri Sultan Hamengkubuwono yang mewakili tokoh reformis dari partai penguasa kala itu membangun sebuah komunikasi yang memiliki harga di hadapan publik.

Berkebalikan dengan peristiwa bertahun-tahun lalu itu, saat ini, pola komunikasi yang dibangun oleh politisi terkesan begitu pragmatis dengan mengedepankan kepentingan kelompok. Berbagai dagelan politik kerap dipertontonkan kepada masyarakat seperti kasus Century, papa minta saham dan lain sebagainya.

Pencitraan politik menjadi primadona dalam membangun komunikasi politik di Indonesia pasca reformasi dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Pada perkembangannya, komunikasi politik yang dilakukan oleh para politisi tidak memberikan edukasi banyak bagi publiknya. Komunikasi politik dalam dunia politik kultural dengan demikian belum mementingkan apa isi pembicaraan, namun baru sekadar siapa yang berbicara.

Tidak semua politisi melakukan komunikasi politik hanya demi memperbaiki citranya semata masih cukup banyak pula bertebaran politisi ideolog. Namun, kekuatan yang mereka miliki tak sekuat para politisi yang begitu terbuai dengan pencitraan yang dilakukannya.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A., Coleman, James A. Eds. (1960). *The Politics of the Development Areas*. Princeton University Press. Princeton.
- Dahl, Robert. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press.
- Dryzek, John. 2000. *Deliberative Democracy And Beyond : Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press
- Dwipayana, AA GN Ari. 2004. *Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*. Yogyakarta: IRE Press,
- Harjanto, N.T. Budi. 1998. “Studi Pembangunan Politik : Dari Modernisasi Ke Demokratisasi”. Dalam *ANALISIS CSIS* Tahun XXVII No. 2, April – Juni
- Kartaprawira, Rusadi. 1983; 2006. *Sistem Politik di Indonesia*. Bandung: Dunia Baru.
- Legowo, Tommi A. 1994. “Demokratisasi: Refleksi Kekuasaan yang Transformatif” *Analisis*. Tahun XXIII No. 1.
- Liddle, R. William. 2005. *Revolusi dari Luar: Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute.
- Ling, L.H.M dan Chih-yu Shih. 1998. “Confusionism with a Liberal Face: The Meaning of Democratic Politics in Post-Colonial Taiwan”. *The Review of Politics* Vol. 60 No. 1.
- Mariana, Dede. 2007. Makalah. *Demokrasi di Indonesia: Problematika dan Aktualisasi*.

¹⁰ <http://silentnotenough.blogspot.co.id/2012/04/komunikasi-politik-era-reformasi.html>. Diakses tanggal 15 oktober 2016.

- Masoed, Mochtar dan Collin McAndrew. 2006. *Perbandingan Politik*. Yogyakarta: GAMA Press.
- Michels, Robert. 1911. *Political Parties*. London: Penguin Books
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik*. Remaja Rosdakarya. Bandung: Rosda Karya.
- Rauf, Maswadi dan Nasrun, Mappa. (1993). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sahdan, Gregorius. 2004. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca-Soeharto*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah*. (Edisi Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Internet :

- <http://restorasinews.com/detailpost/dinamika-komunikasi-politik-pemerintah-di-era-demokrasi>. Diakses tanggal 15 oktober 2016.
- <http://silentnotenough.blogspot.co.id/2012/04/komunikasi-politik-era-reformasi.html>. . Diakses tanggal 15 oktober 2016.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dalam *Meme*: Sebuah Analisa Isi Terhadap *Meme-meme* di Dunia Maya

Nuning Kurniasih

Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
nuning.kurniasih@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa gambar, isi pesan, tujuan dan tanggapan *netizen* terhadap *meme-meme* yang beredar di dunia maya (*internet memes*). Metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisa isi terhadap 40 *meme* yang terkait Pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) gambar-gambar yang dimunculkan dalam *meme* berupa tokoh yaitu calon gubernur, tokoh-tokoh di balik partai pengusung dan artis; kegiatan, program atau kondisi wilayah DKI Jakarta; komik dan foto masyarakat lainnya, (2) pesan yang disampaikan dalam *meme* mencakup profil calon gubernur pilihan, perbandingan di antara para calon gubernur, janji-janji atau pernyataan dari para calon gubernur, janji-janji atau pernyataan dari tokoh partai pengusung, pesan untuk berpartisipasi di dalam pemilihan gubernur dan sindiran terhadap para tokoh, (3) tujuan *netizen* menampilkan *meme* adalah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan gubernur, untuk hiburan, menunjukkan kreativitas, sindiran/satire, kritik sosial, menyampaikan informasi lebih dari sekedar teks dan menunjukkan kapasitas para calon serta mengajak *netizen* lain mendukung calon gubernur tertentu, (4) tanggapan *netizen* terhadap *meme* yang berkembang adalah bervariasi, cenderung untuk memuat atau membagikan *meme-meme* yang dapat memperkuat dukungannya terhadap calon gubernur tertentu, *netizen* merasa terhibur dengan adanya *meme-meme* yang menghibur atau bersifat humor, memberikan doa dan pernyataan membangun ketika setuju dengan pesan dalam sebuah *meme*, memberikan tanggapan sarkasme ketika menemukan *meme* satire dan kritik sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi didalam pemilihan media alternatif untuk penyampaian pesan dalam kampanye pemilihan kepala daerah.

Kata kunci: pemilihan gubernur, *meme*, media informasi, kreativitas, media sosial

PENDAHULUAN

Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta akan dilaksanakan pada tahun 2017. Namun demikian, sejak awal tahun 2016, antusiasme masyarakat menyambut Pilgub tersebut sudah terasa. Di dunia maya, terutama di media sosial, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berhasil menarik perhatian, tidak hanya bagi warga

DKI Jakarta, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara umum. Perhatian dari masyarakat dunia maya (*netizen*) ditandai dengan banyaknya pesan, baik berupa status ataupun tanggapan terhadap para calon gubernur dan proses pemilihannya. Sebagaimana pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah lainnya, Pilgub DKI Jakarta juga memunculkan kreativitas *netizen* dalam menyampaikan pesan. Salah satu kreativitas adalah dengan munculnya *meme-meme* terkait Pilkada DKI Jakarta.

Meme berasal dari kata *mimeme* yang digunakan untuk menjelaskan evolusi kebudayaan. Istilah ini mulai diperkenalkan Richard Dawkins pada tahun 1976. Menurut Brodie (2005), *meme* tanpa sadar menjangkiti manusia dan menyebar ke otak seperti virus.

Dalam politik, pesan kritis pada *meme* di jejaring sosial "Path" digambarkan melalui humor satir dengan menggunakan tanda visual dan tanda verbal yang dianalisis melalui ikon, indeks dan simbol (Pusanti & Haryanto, 2015). Di Instagram, ada lima motif yang melatarbelakangi pengguna Instagram memasang *meme*, yaitu motif ingin tahu, motif menghibur, motif cinta, motif ekspresi, dan motif harga diri. Dengan *meme-meme* ini, mereka merasa diperhatikan dan memberikan informasi kepada *followers*, serta mendapatkan pengalaman baru (Nugraha, Sudrajat, & Putri, 2015).

Dalam proses Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, sampai dengan bulan Oktober 2016 ini ada beberapa momen menarik yaitu diawali dengan munculnya tokoh-tokoh yang berminat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, antara lain Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Yusril Izha Mahendra, Adiyaksa Dault, Sandiaga Uno, Rizal Ramli dan Ahmad Dhani. Kemudian pengumuman calon gubernur oleh partai pengusung. Pada momen ini masyarakat dikejutkan oleh dua calon yang muncul, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan. Dalam perjalanan selanjutnya, masyarakat juga ramai menanggapi pernyataan Ahok terkait Surat Al Maidah Ayat 51 serta pengangkatan Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dikaitkan dengan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kini menjadi salah satu calon gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Momen-momen ini mendapat perhatian luar biasa dari masyarakat dunia maya. Banyak *meme* yang

dimunculkan *netizen* di internet terkait momen-momen tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa gambar dan isi pesan yang terdapat pada *meme-meme* Pilgub DKI Jakarta 2017, tujuan dibuatnya *meme-meme* Pilgub DKI Jakarta 2017, serta tanggapan netizen terhadap *meme-meme* Pilgub DKI Jakarta yang beredar di internet tersebut, terutama terkait empat momen sebagaimana telah diuraikan di atas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam pemilihan media alternatif untuk penyampaian pesan dalam kampanye pemilihan kepala daerah atau kepala pemerintahan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisa isi. Analisa ini mencakup teknik untuk menganalisa teks secara sistematis (Mayring 2000). Studi kualitatif analisis isi dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkuantifikasi kata-kata dalam teks dengan tujuan untuk memahami penggunaan kata secara kontekstual. Pendekatan analisa isi secara kualitatif mencakup analisa isi yang tersembunyi yang merujuk pada interpretasi (Hsieh and Shannon 2005).

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menganalisa gambar dan isi pesan pada *meme-meme* yang beredar di internet. *Meme-meme* itu sendiri biasanya menyebar secara viral sehingga kemungkinan besar, *meme* yang beredar di semua platform internet, termasuk di media sosial adalah *meme* yang sama. Dari banyaknya *meme* yang beredar, peneliti membatasi *meme* yang terkait empat hal, yaitu (1) kehadiran para tokoh yang meramaikan bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017, (2) pengumuman calon gubernur DKI Jakarta oleh partai pengusung, (3) tanggapan terhadap pernyataan Ahok yang mengutip Al Quran Surat Al Maidah ayat 51 dan (4) momen pengumuman Ignasius Jonan sebagai menteri ESDM yang dikaitkan dengan dengan Anies Baswedan. Dengan pembatasan tersebut, peneliti mengambil contoh 40 *meme* yang merupakan hasil penelusuran melalui *search engine* google dengan kata kunci "Meme Pilgub DKI Jakarta 2017"..

Selanjutnya, peneliti melakukan observasi lebih lanjut terhadap blog pribadi atau akun media sosial yang memuat dan menyebarkan *meme-meme* tersebut untuk mengetahui tujuan dibuatnya *meme* Pilgub DKI Jakarta dan tanggapan *netizen* terhadap *meme-meme* tersebut. Untuk lebih meyakinkan interpretasi peneliti terhadap hasil analisa isi, peneliti juga melakukan wawancara (interaksi langsung) dengan beberapa *netizen*. Pengolahan data dilakukan melalui koding sehingga menghasilkan kata kunci, dan selanjutnya diinterpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar-gambar dan Isi Pesan pada Meme Pilgub DKI Jakarta 2017

Pada awal bursa bakal calon Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, *netizen* mengangkat tiga tokoh yang dianggap layak memimpin Jakarta. Ketiga tokoh tersebut adalah Ahok, Ridwan Kamil (Walikota Bandung) dan Tri Rismarini (Walikota Surabaya). *Meme-meme* yang berkembang di internet berisi gambar ketiga tokoh tersebut dengan membandingkan prestasi dan kapasitas masing-masing dalam memimpin daerahnya. *Meme-meme* tersebut antara lain sebagai berikut:

Meme 1-4



Keterangan: Meme dari Berbagai Sumber di Internet

Pada *meme* 1 dan 2, netizen membandingkan sosok Ahok dan Ridwan Kamil, dimana Ridwan Kamil dinilai sebagai pribadi yang lebih santun tutur katanya daripada Ahok. Pada *meme* 3, pembuat *meme* mengatasnamakan *Jaklovers* yang meminta Risma sebagai wali kota terbaik dunia agar mau memimpin Jakarta. Pada *meme* 1 dan 2, sudah jelas maksud dari pembuat *meme* adalah mendukung Ridwan Kamil untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, sedangkan pada *meme* 3, mendukung Risma untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Pada *meme* 4, netizen berpendapat bahwa ketiga tokoh tersebut, baik Ahok, Ridwan Kamil maupun Risma bisa menjadi pemimpin di wilayahnya masing-masing sehingga tidak perlu bersaing untuk DKI I. *Meme* 4 menunjukkan dukungannya kepada Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Isi pesan yang terdapat pada keempat *meme* ini dapat ditangkap langsung oleh siapapun yang melihatnya.

Ketika Ridwan Kamil mengumumkan tidak akan maju ke Pilgub DKI Jakarta, kemudian muncul *meme* berisi gambar Ridwan Kamil dan istrinya Atalita Kamil dalam bentuk katun yang diunggah oleh seorang warga Surabaya dengan akun *ahmad_syahirul_basyir* dan diunggah ulang dalam Facebook Ridwan Kamil pada 1 Maret 2016 dengan judul "Behind the scene. Karena wanita selalu benar" (Lihat Lampiran Meme 5). Dalam *meme* tersebut diceritakan ketidaksetujuan istri Ridwan

Kamil apabila Ridwan Kamil maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Isi meme tersebut, tentu hanya sebuah guyonan untuk menghibur.

Meme berisi gambar dan kartun juga muncul untuk menggambarkan para tokoh yang ingin mencalonkan diri atau yang mungkin dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta seperti Yusril Izha Mahendra, Adiyaksa Dault, Sandiaga Uno, Rizal Ramli dan Ahmad Dhani (lihat Lampiran Meme 6). Yusril Izha Mahendra dan Ahmad Dhani mendapatkan sebuah *meme* sindiran yang berkenaan dengan kegagalan rumah tangga keduanya. Dalam *meme* tersebut ditampilkan gambar keduanya dengan teks “Yus** dan Dha** mimpin warga Jakarta? Mimpin rumah tangga sendiri saja gagal”(lihat Lampiran Meme 7). *Meme* ini sepertinya dibuat oleh orang yang tidak mendukung keduanya maju menuju DKI 1.

Meme lainnya berbentuk modifikasi gambar diri para bakal calon gubernur menyerupai artis atau pemeran film (lihat Lampiran Meme 8), tokoh senior dari partai pendukung bakal calon gubernur, serta kegiatan atau kondisi wilayah DKI Jakarta.

Berkaitan dengan pengumpulan dukungan untuk Ahok maju menjadi calon independen. Banyak *meme* yang berisi wajah masyarakat umum memegang kertas berisikan “Saya pilih Ahok karena ...” dan “Saya Gak Mungkin Pilih Ahok karena ...”. Pesan yang disampaikan di dalam *meme-meme* ini lebih banyak sebagai hiburan, seperti “Saya gak mungkin pilih Ahok karena saya sudah punya pacar”, “Saya gak mungkin pilih Ahok, soalnya kata Anang, jangan memilih aku” (lihat Lampiran Meme 9). Namun ada juga pesan dalam *meme* tersebut yang menuliskan tidak mungkin memilih calon tertentu karena perbedaan agama. Dalam hal ini pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat *meme* sepertinya adalah sama seperti teks yang disampaikan.

Kecewaan sebagian netizen karena Ahok tidak memilih jalur independen juga tak lepas dari kreativitas pembuat meme, dimana nama “Teman Ahok” diplesetkan menjadi “Teman Kapok” dalam sebuah *meme* bergambar kaos dengan teks “*Shold Out. Teman Kapok. Takut Independen 2017. Balikin KTP Gua*” (lihat Lampiran Meme 10). Selanjutnya muncul *meme-meme* Ahok dengan “seteru” politiknya seperti dengan Lulung Lunggana dan Habiburrahman yang sejak awal meragukan Ahok maju lewat jalur independen.

Pada saat diumumkan tiga calon gubernur oleh para partai pengusung, pencalonan Agus Harimuri Yudhoyono (AHY) berhasil mengambil perhatian *netizen*. *Netizen* dikejutkan oleh keputusan AHY mundur dari TNI untuk maju menuju DKI 1. *Netizen* pun menduga bahwa keputusan AHY semata-mata untuk memenuhi keinginan kedua orang tuanya, yaitu

Soesilo Bambang Yudhoyono(SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono. Meme-meme yang muncul berupa kepatuhan AHY kepada orang tua (lihat Lampiran *Meme* 11), sindiran terhadap ungkapan yang pernah disampaikan oleh SBY saat menjabat sebagai Presiden bahwa tidak tepat apabila ada TNI yang bercita-cita ingin menjadi bupati, walikota, gubernur, pengusaha, dll (Handr, 2009) (lihat Lampiran *Meme* 12), meme lucu sekaligus sindiran dengan teks “Papa jahaaat” (lihat lampiran *Meme* 13) untuk menunjukkan keheranan netizen mengapa SBY tidak memilih puteranya yang sudah berkarir di politik yaitu Edhi Baskoro Yudhoyono dan meme untuk membandingkan putera SBY dengan putera Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rangkabuming yang memilih menjadi pengusaha daripada politikus (lihat Lampiran *Meme* 14) hingga membandingkannya dengan Norman Kamaru, seseorang yang memutuskan berhenti menjadi polisi untuk menjadi artis.

Namun demikian, banyak juga *meme* yang mendukung AHY dalam Pilgub DKI Jakarta. Dalam *meme-meme* yang beredar, AHY digambarkan sebagai sosok yang tampan, sehingga disandingkan dengan bintang Korea (lihat Lampiran *Meme* 15), santun, nasionalis dan agamais (lihat Lampiran 16).

Sementara itu, Anies Baswedan yang diusung oleh partai yang bersebrangan dengan partai yang didukungnya pada Pemilihan Presiden 2014, memunculkan meme kilas balik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 (lihat Lampiran Meme 17). Disini netizen ingin mengungkapkan bahwa mereka masih ingat momen Pilpres 2014 dan mempertanyakan konsistensi terhadap pernyataan sang calon gubernur.

Ditetapkannya tiga calon gubernur DKI juga memunculkan meme dengan gambar perbandingan *hardware* dari tiga merek yang saat ini banyak dipergunakan oleh masyarakat dan dapat menggambarkan kapasitas masing-masing calon (lihat Lampiran Meme 18). Ketika para calon gubernur dan wakil gubernur melakukan pemeriksaan kesehatan, mereka melakukan foto bersama, foto inipun kemudian dimodifikasi oleh *netizen*. Ada yang mengganti wajah salah satu calon wakil gubernur, Silviana Murni dengan wajah Jonru, Ratna Sarumpaet, hingga artis Tika Panggabean.

Pilgub DKI Jakarta juga dimeriahkan oleh artis pendukung, seperti Sophia Lacuba yang diangkat menjadi salah seorang juru bicara Tim Ahok, ramalan feng shui, serta bakal calon yang tidak jadi diusung dengan teks “Yang rame dan yang jadi” (lihat Lampiran Meme 19).

Selanjutnya muncul meme-meme yang menunjukkan program dari calon gubernur, seperti meme dari

pendukung Anies Baswedan, menampilkan gambar sang calon gubernur, calon wakil gubernur dan para *sesepuh* pendukung pasangan calon dengan teks “Jakarta yang baik itu adalah maju kotanya, bahagia warganya. Ada adab di kota ini. Adab harus dikembalikan di kota ini” (lihat Lampiran Meme 20). Terkait kata “adab” yang ada dalam teks tersebut, beberapa komentator meme menduga bahwa kata itu ditujukan untuk salah satu calon gubernur.

Polemik pernyataan Ahok berkaitan dengan Surat Al Maidah Ayat 51, memunculkan *meme* antara lain yang menjadi viral dengan gambar Nusron Wahid terkait pernyataannya tentang tafsir Al-Quran (lihat Lampiran Meme 21) dan Yusuf Mansur, menanggapi pernyataan Nusron Wahid. *Meme* lainnya adalah gambar Ahok yang sedang diwawancara oleh wartawan dengan teks “*Breaking News*. Ahok batal nyalon”. Tentu saja *meme* ini bukan dalam arti batal nyalon sesungguhnya, melainkan hanya sebagai upaya pendukung Ahok meredakan ketegangan politik dimana akibat dari polemik tersebut, ada beberapa pihak yang memintanya mundur. Masih dalam yang *meme* sama ada teks lanjutan yaitu “Ahok memilih untuk tidak memotong rambutnya di salon”.

Terakhir, dilantiknya kembali Ignasius Jonan sebagai menteri di kabinet Jokowi, memunculkan kreatifitas *netizen* yang menghubungkannya dengan mantan menteri yang menjadi calon gubernur, Anies Baswedan. Dalam *meme* yang beredar, *netizen* berpendapat, seandainya Anies dapat sedikit sabar, mungkin akan diangkat lagi sebagai menteri sebagaimana Jonan (lihat Lampiran meme 23).

Tujuan Disebarkannya Meme Pilgub DKI Jakarta 2017 oleh Netizen

Berdasarkan pemaparan pada bagian 3.1., dapat dilihat bahwa pesan yang disampaikan dalam *meme* politik dapat berupa sesuatu yang serius ataupun sebuah humor. Menurut Dr Sophie Lecheler, *meme* memiliki peran penting untuk masa depan kampanye, *meme* dapat digunakan sebagai taktik persuasif dalam kampanye dengan potensi pendekatan akar rumput. *Meme* juga menawarkan cara baru bagi partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan opini politiknya (Shifman, 2013).

Setidaknya ada tiga motif mengapa seseorang membuat *meme*, yaitu sebagai ekspresi diri, aktualisasi diri dan ingin mendapat tanggapan dari orang lain (Shao, 1999). *Meme* memiliki implikasi terhadap dunia politik karena sifatnya yang mudah dibuat dan disebar. *Meme* menjadi media kritik politik yang efektif dengan cara yang kreatif. *Meme* politik dapat membuat politik lebih inklusif dan mudah diakses terutama bagi anak muda yang aktif dan antusias mengkonsumsi budaya pop

(Plevriti, 2014).

Berdasarkan analisa terhadap *meme-meme* Pilgub DKI Jakarta 2017 dan hasil interaksi terhadap beberapa *netizen*, dapat disimpulkan bahwa tujuan *netizen* membuat atau menyebarkan *meme* Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah (1) sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses politik di DKI Jakarta (lihat Lampiran Meme 24). Dalam foto bersama ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tertulis “calonnya saja damai, warganya koq rebut”. Dari *meme* ini terlihat, *netizen* ingin agar masyarakat berpartisipasi dalam Pilgub dengan cara yang damai, (2) untuk hiburan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya *meme* humor politik, (3) menunjukkan kreativitas, dengan memodifikasi foto atau gambar, (4) sindiran/satire, (5) kritik sosial, (6) menyampaikan informasi lebih dari sekedar teks, (7) menunjukkan program atau hasil kinerja, (8) menunjukkan kapasitas dengan mengupas kelebihan dan kelemahan para calon dibandingkan calon lainnya, dan (9) mengajak *netizen* lain mendukung calon gubernur tertentu.

Tanggapan Netizen terhadap Meme Pilgub DKI 2017

Untuk mengetahui tanggapan *netizen* terhadap *meme* Pilgub DKI Jakarta 2017, peneliti melakukan observasi langsung terhadap tulisan yang dibuat oleh *netizen* melalui beberapa blog pribadi dan akun media sosial yang memuat *meme-meme* tersebut.

Dari hasil observasi tersebut diketahui bahwa *netizen* cenderung untuk memuat atau membagikan *meme-meme* yang dapat memperkuat dukungannya terhadap calon gubernur tertentu. *Netizen* memuat dan membagikan *meme-meme* yang berisi pesan positif terhadap calon yang didukungnya dan memuat atau membagikan pesan yang bernada negatif untuk calon yang tidak didukungnya. Beberapa *netizen* memuat *meme* sebagai pengantar untuk mendiskusikan calon tertentu.

Netizen merasa terhibur dengan adanya *meme-meme* yang menghibur atau bersifat humor. *Netizen* memberikan doa dan pernyataan membangun ketika setuju dengan pesan dalam sebuah *meme*. *Netizen* memberikan tanggapan sarkasme ketika menemukan *meme* satire dan kritik sosial. Tidak jarang *netizen* terlibat pertengaran secara online ketika mendapati *meme* dan tanggapan yang tidak sesuai dengan pendapat pribadinya. Pertengaran yang dimulai dengan komentar-komentar di media sosial ini, pada beberapa kasus membuat pertemanan di media sosial terputus.

SIMPULAN

Meme politik memberikan implikasi dalam dunia politik. Masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dengan mengekspresikan opininya melalui *meme* politik. *Meme* politik dapat mengindikasikan dukungan dan penolakan kepada seorang calon. Apabila hal ini dikelola dengan baik akan menghasilkan strategi kampanye kreatif dan efektif, terutama untuk meraih publik yang aktif di dunia maya dan terbiasa dengan budaya pop.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penulis di media sosial yang aktif memberikan tanggapan dan berdiskusi tentang *meme* politik Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

LAMPIRAN

Meme 5-8



Keterangan: Meme dari Berbagai Sumber di Internet

Meme 9-12



Keterangan: Meme dari Berbagai Sumber di Internet

Meme 13-16



Keterangan: Meme dari Berbagai Sumber di Internet

Meme 17-20



Keterangan: Meme dari Berbagai Sumber di Internet

Meme 21-24



DAFTAR PUSTAKA

- BLACKMORE, S. (2000). THE POWER OF MEMES. IN S. AMERICAN, *BRAIN TO BRAIN, MEMES PROLIFERATE THROUGH SOCIETY, BLINDLY EVOLVING AS THEY GO AND SHAPING OUR CULTURE, SAYS THE AUTHOR.* (Pp. 65-73). US: SCIENTIFIC AMERICAN, INC.
- Brodie, R. (2011). *Virus of the Mind: The New Theory of Meme Reissue Edition.* USA: Hay House, Inc.
- Chick, G. (1999). What's in a Meme? The Development of the Meme as a Unit of Culture. *The Annual Meeting of the American Anthropological Association as part of the session, "Perceiving Culture: Unit Definition in Cultural Anthropology.* US: American Anthropological Association .
- Coscia, M. (2013). Competition and Success in the Meme Pool: a Case Study on Quickmeme.com. *Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media* (pp. 100-109). US: Association for the Advancement of Artificial Intelligence (www.aaai.org).
- Dawkins, R. (2006). *The Selfish Gene.* New York: Oxford University.
- Handr. (2009, Desember 22). *Presiden: Perwira TNI-Polri Jangan Bercita-cita Jadi Gubernur.* Retrieved from AntaraNews: <http://www.antaranews.com/berita/166820/presiden-perwira-tni-polri-jangan-bercita-cita-jadi-gubernur>
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *QUALITATIVE HEALTH RESEARCH, Vol. 15 No. 9, November, 1277-1288.*
- Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. *Forum: Qualitative Social Research Vol.1 No.2, Art. 20 - June.*

- Nugraha, A., Sudrajat, R. H., & Putri, B. P. (2015). Fenomena Meme di Media Sosial: Studi Etnografi Virtual Posting Meme pada Pengguna Media Sosial Instagram. *Jurnal Sositologi | Vol. 14, No 3, Desember*, 273-245.
- Plevriti, V. (2014). *Satirical User-Generated Memes as an Effective Source of Political Criticism, Extending Debate and Enhancing Civic Engagement*. UXS: The University of Warwick.
- Pusanti, R. R., & Haryanto. (2015). Representasi Kritik dalam Meme Politik (Studi Semiotika Meme Politik dalam Masa Pemilu 2014 pada Jejaring Sosial "Path" sebagai Media Kritik di Era Siber). *Jurnal Komunikasi Massa Program Studi Ilmu Komunikasi Fisip UNS, diakses melalui http://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL%20ONLINE%20REPRESENTASI%20KRITIK%20DALAM%20MEME%20POLITIK_ROSA%20REDIA-D1212069.pdf*, 1-19.
- Shao, G. (1999). Understanding the Appeal of User - Generated Media: a Uses and Gratification Perspective. *Internet Research, Vol. 19 Iss: 1*, 7-25.
- Shifman, L. (2013). *Memes in Digital Culture*. Cambridge MA: The MIT Press.
- Wijayanto, E. (2013). *Memetics: Perspektif Evolusionis Membaca Kebudayaan*. Depok: Kepik.

PR Politik Sebagai Salah Satu Strategi Komunikasi Politik Jokowi Pada Awal Masa Pemerintahannya.

Evie Ariadne Shinta Dewi
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
eviea@unpad.ac.id

ABSTRAK

Secara teoretik, kinerja komunikasi politik suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh penerapan strategi komunikasinya. Pemilihan strategi komunikasi politik secara tepat tidak bias dilepaskan dari budaya komunikasi politik yang berlaku. Sepanjang pemerintahan Jokowi, terdapat beberapa persoalan komunikasi, terutama komunikasi internal diantara para menteri, maupun eksternal antara presiden & para menteri dengan publiknya. Beberapa pernyataan menteri mengundang kontroversi di masyarakat dan berbalik menjadi tuduhan kepada presiden yang dianggap tidak sanggup mengelola komunikasi. Akibatnya hal ini cenderung menimbulkan opini public yang negatif pada pemerintah. Secara konseptual, Public Relations (PR) Politik, merupakan salah satu strategi komunikasi politik yang menggunakan konsep dasar public relations, yaitu membangun *two-way communication* dan mengoptimalkan kemampuan “mendengar”. Tulisan ini mencoba mengelaborasi penggunaan strategi PR Politik dalam berbagai komunikasi presiden pada masa awal pemerintahannya. Tujuan studi deskriptif ini untuk menggambarkan bagaimana strategi PR Politik dapat menjadi solusi agar komunikasi politik Jokowi lebih baik. Metodologi yang digunakan adalah desk research dan literature review, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data berupa dokumen, tulisan media, dan teks pidato, dengan berlandaskan pada konsep *Political Public Relations*. Hasil penelitian menunjukkan PR Politik tepat digunakan oleh negara demokratis seperti Indonesia, karena tujuan demokrasi sejalan dengan tujuan PR, yaitu membangun hubungan yang responsif dengan seluruh konstituen didasarkan pada saling pengertian dan komunikasi dua arah. Namun komunikasi politik Jokowi masih belum banyak menggunakan strategi PR Politik.

Kata Kunci : Budaya Komunikasi Politik, Demokrasi, Komunikasi Politik, *Political Public Relations*, *Presidential Public Relations*, *two-way communication*.

PENDAHULUAN

Dua tahun sudah pasangan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla memegang tampuk pemerintah tertinggi di Indonesia, setelah 70,99 juta orang memilihnya sebagai presiden dan wakil presiden pada helat demokrasi akbar pemilu tahun 2014. Saat pemilu, dapat dicermati bahwa di balik tingginya intensitas kegiatan kampanye kedua pasang calon presiden dan wakil presiden tersebut, ada tim komunikasi yang kerjanya justru paling menentukan efektifitas pesan yang disampaikan pada para pemilih. Para ahli (konsultan) komunikasi masing-masing pasangan berlomba memetakan tiga faktor penting dalam mengelola komunikasi politik yang efektif, yaitu : formulasi pesan, pemilihan media, serta penentuan target audience. Semakin piawai para pakar tim komunikasi kedua pasangan kandidat meramu pesan dan memilih media yang tepat bagi setiap publik yang terfragmentasi secara spesifik, maka akan semakin efektif komunikasi tersebut. Salah satu indikator efektifitas komunikasi politik adalah terjadinya *share meaning* (kesepahaman) antara komunikator (kandidat) dengan komunikan (pemilihnya) tentang pesan yang disampaikan dalam kampanye tersebut. Muara dari tercapainya kesepahaman dikenal dengan istilah efek komunikasi politik, yang bentuknya secara konkrit berupa tindakan politik (*political action*) pemilih yang berbondong-bondong memberikan suaranya di TPS saat proses pemungutan suara berlangsung.

Kiprah tim komunikasi ini, seyogyanya tidak terhenti saat salah satu pasangan memenangkan kontestasi dan dilantik sebagai pemimpin pemerintahan, melainkan tetap merancang dan membangun sistem komunikasi politik yang strategis untuk mendukung kinerja kepemimpinan presiden dan wakil presiden sepanjang masa pemerintahannya. Ringkasnya, presiden harus mempunyai *grand design* komunikasi politik strategis agar semua kebijakan yang dibuatnya dapat dipahami publik dan secara otomatis memperoleh dukungan mayoritas publik. Semakin efektif komunikasi politik presiden (dan wakilnya) maka akan semakin efektif pula penerapan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Denton dan Woodward : “*the crucial factors make communication “political” is not the source of message, but its content and*

purpose” (dalam McNair, 2007), ini artinya, dalam komunikasi politik Jokowi, bukan soal *source* atau sumber pesan (harus presiden), melainkan *content* (isi pesan) dan *purpose* (tujuan pesan) yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam arti harus ada orang profesional atau ahli dalam memformulasikan isi pesan, menentukan tujuan dan target sasaran pesan serta pemilihan media dan strategi yang tepat. Maka disinilah signifikansi peran tim komunikasi politik presiden dipertaruhkan kinerjanya.

Tulisan ini berusaha mengelaborasi pentingnya penerapan *Political Public Relations* sebagai strategi komunikasi politik presiden Jokowi dalam mengakselerasi komunikasinya sebagai presiden baik dengan para menterinya maupun dengan masyarakat luas.

Komunikasi politik, didefinisikan oleh Brian McNair (2007: 4) dalam bukunya *An Introduction to Political Communication*, sebagai “komunikasi yang disengaja dalam semua bentuk komunikasi yang berisi pesan-pesan politik yang dilakukan oleh para aktor politik (politisi, pemerintah, media, dll) melalui media dan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran politik tertentu.” Merujuk pada kutipan ini, karena komunikasi politik merupakan komunikasi yang disengaja (bukan kebetulan ataupun spontan saja), maka tim komunikasi presiden perlu benar-benar merancang dan mengelola berbagai bentuk komunikasi untuk lebih mengefektifkan komunikasi politik Jokowi.

Penulis mencermati, pada awalnya komunikasi presiden nampak masih belum memiliki format yang memadai, salah satu aspek misalnya terlihat dari beberapa kali pidato, Jokowi masih belum bisa mengelola gesturalnya. Atau contoh lain pada saat pidato pertamanya usai terpilih sebagai pemenang pemilu pada Oktober 2014, kertas catatan kecil konsep pidatonya tersembul dari balik jas, sehingga terlihat kurang elegan. Namun demikian, persoalan gestural sudah tidak nampak lagi pada saat pidato di hadapan para tamu delegasi asing mancanegara saat pembukaan APEC (November 2014), Jokowi nampak confidence berpidato dalam bahasa Inggris, kendati *grammar*nya dinilai kurang apik oleh sebagian publik akademik. Dan terakhir, pidato terbaiknya (baik isi maupun gestural) muncul saat peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) April 2015, kendati sayangnya para netizen justru lebih banyak memperhatikan penampilan walikota Bandung Ridwan Kamil (sebagai tuan rumah KAA) dibanding dengan isi pidato presiden yang sangat bagus tersebut.

Secara teoretis, di negara demokratis, implementasi komunikasi politik dapat dioptimalkan dengan menggunakan strategi *Public Relations* (PR). Mengapa PR?, hal ini dapat ditelusuri dari hal yang

paling mendasar, yaitu adanya kesamaan antara tujuan demokrasi dan tujuan PR. Seperti dinyatakan Tench & Yeomans, 2006, dalam bukunya *Exploring Public Relations*, “*in a very real sense, the purpose of democracy itself closely matches the purpose of public relations. Successful democratic government maintain responsive relationships with constituents, based on mutual understanding and two-way communication. Democracy is or should be a two-way process, giving multiple opportunities for members of the public to communicate their own interest and concerns to government at all levels, to influence and sometimes transform public policy.*”

Kutipan ini menjelaskan bahwa suksesnya sebuah pemerintahan demokratis ditentukan oleh bagaimana membangun hubungan yang responsif dengan seluruh konstituen, yang didasarkan kepada komunikasi dua arah (*two-way communication*) dan saling pengertian (*mutual understanding*). Hal ini berarti pemerintah harus menyadari betul bahwa demokrasi selayaknya merupakan proses dua arah dimana rakyat memiliki kesempatan beragam untuk mengkomunikasikan kepentingan dan kepedulian mereka (terhadap suatu program atau subjek kebijakan) untuk dapat mempengaruhi dan bahkan kadang-kadang mentransformasi kebijakan pada setiap tingkatan pemerintahan.

Komunikasi politik dengan menggunakan PR sebagai strategi komunikasi dikenal dengan istilah *political public relations* (PR Politik), yang didefinisikan oleh Stromback (2011) sebagai “*the management process by which an organization or individual actor for political purposes, through purposefull communication and action, seeks to influence and to establish, build and maintain beneficial relationships and reputations with its key publics to help support its mission and achieve its goals.*”

Oleh karenanya, PR Politik secara sederhana dapat diartikan sebagai proses manajemen dimana organisasi atau aktor individu demi tujuan politis, melakukan aksi komunikasi untuk memengaruhi dan memantapkan, membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan serta memperoleh reputasi dari publik-publik kunci untuk membantu mencapai misi dan sasaran yang telah ditetapkan.

Konsep PR Politik, sebetulnya sudah ada sejak tahun 64 SM pada saat Quintus Tullius Cicero menawarkan nasihat politik pada saudaranya Marcus Tullius Cicero yang akan mengikuti pemilihan anggota Consul di Roma. Saat itu, Quintus menyatakan bahwa untuk memenangkan pemilihan, ada dua hal penting yang harus dicermati, yaitu : 1) *the support of your friend* dan 2) *the favor of the people*. Hal ini berarti bahwa kandidat harus mempelajari konstituennya secara rinci, mulai dari mengetahui motif mereka,

mengenali teman-teman dan kelompoknya serta lebih banyak mendengarkan apa yang dikatakan rakyat agar dapat mengetahui apa yang paling disukai oleh rakyat.

Selain konsep *Political Public Relations*, dalam perspektif komunikasi politik, dikenal juga konsep *Presidential Public Relations*, yaitu terminology yang terkait dengan pengelolaan komunikasi presiden dengan menggunakan strategi PR Politik, dimana inti kerjanya adalah *persuasion* (membujuk) yang disampaikan melalui berbagai bentuk komunikasi verbal seperti pidato. Hal ini ditegaskan dalam beberapa pernyataan ahli PR seperti “*Public relations is a paramount to political power in American democracy*” (McKinnon, Tedesco, Lauder, 2001), atau “*Presidential power is the power to persuade*” (Neustadt, 1990), “*Just as PR is geared fundamentally toward persuasion*” (Miller, 1989), “*Presidential persuasion now involves communicating through public speaking and engaging in media relations to reach various audiences to achieve their policy agendas*” (Kernell, 1997), dan “*President and their staff target policies and publics so as to maximize their opportunities for influence*” (Edwards, 2009).

METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasarkan pada *desk research*, bukan penelitian terhadap objek riset berupa fenomena yang mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara mendalam dan pengamatan berperanserta. Tulisan ini lebih bertumpu pada *study literature*, oleh karenanya, metode pengumpulan data lebih banyak berupa telaahan kajian teoretis atas konsep-konsep komunikasi politik, strategi komunikasi, *political public relations* dan *presidential PR* yang penulis lakukan secara mandiri.

HASIL & PEMBAHASAN

Mencermati komunikasi politik Jokowi-JK, sejak awal dilantik sebagai presiden hingga dua tahun masa pemerintahannya kini, memang masih memerlukan banyak optimalisasi terutama dalam konteks *two way communication* dan membangun *mutual understanding* dengan seluruh target audience.

Namun demikian, penulis paham untuk mewujudkan dua hal tersebut bukan perkara mudah bagi pimpinan pemerintahan yang baru berkarya. Seperti halnya dialami oleh institusi manapun, pasca kontestasi, saat mengawali kerja kolektif mengelola negara, presiden dituntut benar-benar dapat mengkonsolidasikan berbagai *vested interest* (partai pendukung dan juga oposan) dan mensinergikan sistem yang berlaku di tiga ranah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) secara

simultan. Pada titik ini kinerja komunikasi politik menjadi bagian integral dalam upaya mengakselerasikan kebijakan yang diambil presiden dan para menteri.

Terkait hal terakhir ini, secara konseptual, tim komunikasi presiden perlu memahami pentingnya *Political PR* dalam konteks demokrasi, karena seperti dikemukakan oleh Franz Ronneberger, (2008), dalam *Encyclopedia of Political Communication Vol 1&2*, bahwa “*maintain that public relations is constitutive for the functioning of a democratic system because it helps to publicly articulate the diverging interests within a democratic society and thus allows for a reconciliation of these interests and for integration.*”

Dari rujukan di atas, nampak jelas bahwa PR, tidak saja membuat berfungsinya sebuah sistem demokrasi, bahkan PR dapat membantu mengartikulasikan beragam kepentingan yang tumbuh di masyarakat demokratis. Selain itu, lebih jauh PR juga dapat memungkinkan tercapainya rekonsiliasi dan integrasi dari berbagai kepentingan yang ada.

Dalam konteks komunikasi politik presiden Jokowi, penulis mencermati terjadi perubahan yang signifikan, terutama saat istana menetapkan Teten Masduki sebagai orang yang dipercaya presiden bertanggungjawab untuk (salah satunya) mengelola dan memelihara komunikasi politik dengan seluruh audience.

Progres kinerja komunikasi politik presiden setidaknya dapat dicermati dari semakin terkelolanya arus *in and out information* serta *media management* yang nampak makin baik, kendati pada beberapa kasus sempat mengalami *noise* (gangguan), dan itu wajar terjadi dalam sebuah proses komunikasi politik.

Progres kinerja komunikasi politik presiden ini, semakin mengemuka ketika kepada media (setelah sempat terjadi “ketegangan” antara Jokowi dengan petinggi partai pendukungnya (PDIP) yang mengingatkan Jokowi tidak lebih dari seorang petugas partai yang harus loyal kepada partainya kendati sekarang sudah jadi presiden Indonesia), saat itu Jokowi menyatakan bahwa “buat saya, yang penting itu hubungan pemerintah dan partai berjalan baik, biar masyarakat tenang.”

Pernyataan ini menyiratkan betapa pentingnya membangun *two-way Communication* yang efektif dan tercapainya *mutual understanding* antara pemerintah dengan partai politik sehingga rakyat tidak disuguhi dengan drama perang pernyataan yang alih-alih menentramkan malah membuat rakyat menjadi tidak simpati.

Dalam teori *Relationship Management*, kata kunci “hubungan” dalam pernyataan Jokowi tersebut merupakan aspek utama dalam perspektif *political PR*, seperti dinyatakan Ledingham, J.A. & Bruning, S.D.(eds) dalam bukunya, *PR as relationship management: a relational approach to the study and practice of public relations* (2000). Dalam konteks inilah tim komunikasi presiden yang dikomandoi oleh Teten Masduki memiliki peran signifikan dalam mengelola hubungan antara presiden dengan wakilnya, para menteri, DPR, partai politik, institusi media, perwakilan negara lain, NGO nasional dan internasional, serta para *opinion leaders* lainnya, yang kesemuanya bermuara pada terciptanya saling pengertian harmonis sehingga rakyat menjadi lebih tenang dalam kondisi dan situasi apapun yang melanda negaranya ini.

Lebih jauh, dalam *political PR*, _yang konsep dasarnya adalah membangun komunikasi dua arah_, maka kemampuan yang diutamakan Jokowi, tidak hanya kemampuan berbicara melainkan juga kemampuan mendengar. “*Public Relations involves two-way communication between an organization and its public. It requires listening to the constituencies on which an organization depends as well as analyzing and understanding the attitudes and behaviors of those audiences. Only then can an organization undertake an effective public relations campaign.*” (IPRA, 2000).

Tim komunikasi presiden tinggal memadukan dua kata kunci, *two-way communication & listening* dengan hasil analisis mereka atas sikap dan perilaku publik terhadap kebijakan-kebijakan presiden.

Kendati wajah *presidential PR* ini ada pada presiden sendiri, namun tentu Jokowi tidak secara individual mempromosikan visi misi pemerintahannya (Nawacita), karena sesungguhnya itu merupakan representasi kinerja aparatnya yang disinergikan dengan kinerja tim komunikasi presiden.

Sejauh ini, dalam perspektif PR Politik, _selain komunikasi melalui Media Sosial_, terdapat dua cara terbaik mengkomunikasikan pesan, mengoptimalkan saling pengertian dan membangun hubungan dengan target audience, yakni melalui pidato presiden dan *going narrow* (blusukan).

Ketika makin hari pidato-pidato Jokowi makin baik, maka langkah berikutnya adalah lebih mengoptimalkan “blusukan”, karena seperti dikatakan Cohen, 2008, “*Go narrow, is the strategy that near-future presidencies may undertake is to target interested and organized groups through their outreach efforts.*”

Sejalan dengan konsep *political PR*, *blusukan* atau *canvassing* ini merupakan upaya *soft diplomacy* yang sebetulnya memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan pidato yang cenderung berlangsung secara satu arah. Dengan menyapa langsung konstituen, Jokowi bisa menyampaikan ide utama tentang sebuah kebijakan, sekaligus mendengar langsung pemikiran khalayak tentang kebijakannya tersebut. Karena secara konseptual, *soft diplomacy* adalah “*attempts to engage directly with the public in round-about ways*”, maka upaya Jokowi sesekali menghadiri pernikahan warga, menyapa petani atau nelayan langsung di lokasi mereka bekerja atau berbicara kepada pelajar tentang bahaya narkoba, akan menautkan hati konstituen dan rakyat secara umum kepada Jokowi.

Disamping Pidato dan Blusukan, mencermati seringnya terjadi “serangan” dari pihak legislatif kepada presiden, maka Jokowi juga dapat menekankan sasaran komunikasi politiknya pada kelompok-kelompok yang dapat memobilisasi anggotanya dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mengkomunikasikan NAWACITA kepada publik media massa dan juga DPR-RI. Dan ini artinya presiden harus memiliki kontrol yang kuat terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan kelompok-kelompok tersebut atau setidaknya dapat memperluas peran *public liaison* dalam tim komunikasinya.

Semua upaya ini dikoordinasikan dan dikelola oleh tim komunikasi presiden seperti dikemukakan Stromback *et al* dalam bukunya *Political Public Relations*,(2011) “*which is designed to facilitate presidential communication with target publics-primarily, the public and news media- and build support, prestige and foster a positive reputation to help presidents achieve his larger goals.*”

SIMPULAN

Mengakhiri tulisan ini, maka menyoal kinerja komunikasi politik presiden dapat dilihat dari kinerja tim komunikasinya, yang keberadaannya secara konseptual bertujuan untuk memfasilitasi presiden menciptakan komunikasi strategis dengan publik terutama media, sehingga bisa mendukung terciptanya reputasi positif presiden yang akan membantu presiden mencapai visi misinya. Dalam konteks ini, penerapan *political PR* sebagai strategi komunikasi politik, menjadi sebuah keniscayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan pengembangan dari materi mata kuliah Komunikasi Politik yang sebelumnya pernah dipresentasikan pada acara diskusi Unpad Merespons. Kemudian melalui diskusi yang tajam dan mendalam dengan dan mendalam dengan dua orang guru penulis yaitu Fachry Ali, MA dan Ir. Muh. Ridlo Eisy materi ini ditulis ulang dalam bentuk makalah. Kepada kedua orang ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih

Daftar Pustaka

- Kriesi, Hanspeter (eds), (2012), *Political Communication in Direct Democratic Campaigns, Enlightening or Manipulating?*, New York:Palgrave Macmillan.
- Ledingham, J.A (2006). Relationship Management: A general Theory of Public e. Relations. In C.H. Botan & V.Hazleton (Eds), *Public Relations Theory II* (pp: 465-483) New.York:Erlbaum.
- McNair, Brian, (2007), *An Introduction to Political Communication, 4th edition*, New York: Routledg
- Stanyer, James, (2007), *Modern Political Communication*, Cambridge UK : Polity Press.
- Stromback, Jesper & Kiousis, Spiro, (eds), (2011), *Political Public Relations, Principles and Applications*, New York : Routledge.
- Voltmer, Katrin (eds), (2006), *Mass Media and Political Communication In New Democracies*, New York : Routledge.
- Yeoman & Tensch, (2006), *Exploring Public Relations*, USA : Sage

Budaya Hoax Politik pada Media Sosial Twitter

Renata Anisa

Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
renata.nisa@gmail.com

Rachmaniar

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media sosial twitter berkaitan dengan pesan yang berisi berita atau informasi yang tidak benar mengenai politik atau disebut Hoax. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal yaitu sasaran dari hoax politik, isu yang dikaitkan dengan hoax politik, dan bagaimana pengguna twitter memberikan respon terhadap hoax politik yang beredar tersebut. Penelitian ini menggunakan virtual etnografi sebagai metode dengan menganalisis berita atau informasi, percakapan, dan respon dari hoax mengenai politik pada media sosial twitter. Dalam proses pengumpulan data, Penelitian ini menggunakan partisipasi observasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran dari hoax yang berkaitan dengan politik adalah politisi, pejabat publik yang tengah menjabat, calon pejabat publik, dan pelaku dunia hiburan. Kini, Hoax dinilai telah menjadi budaya dalam dunia politik.

Hoax yang disebarakan mengenai politisi, pejabat publik yang tengah menjabat, calon pejabat publik dan pelaku dunia hiburan kerap dikaitkan dengan beberapa isu yaitu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 (empat) tipe pengguna twitter dalam menanggapi Hoax mengenai politik. Pertama, pengguna twitter yang memberikan respon secara langsung terhadap Hoax yang beredar dan menyatakan bahwa berita atau informasi tersebut adalah hoax. Kedua, pengguna twitter yang memberikan respon dengan mempertanyakan kebenaran hoax yang beredar. Ketiga, pengguna twitter yang memposting kembali hoax yang beredar dan menghimbau pengguna lainnya untuk tidak mudah mempercayai hoax tersebut. Keempat, pengguna twitter yang memposting kembali hoax tersebut dan menginformasikan bahwa berita tersebut adalah tidak benar dengan memberikan berita atau tautan klarifikasi dari sumber berita yang dapat dipercaya.

Kata Kunci: hoax, politik, twitter, virtual etnografi, media sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan media, khususnya media sosial sangat pesat di Indonesia. Twitter sebagai salah satu media sosial yang populer digunakan masyarakat, kini menjadi salah satu sumber informasi utama.

Berdasarkan data versi situs Sycomos 2016, pengguna Twitter dari negara-negara asia mencapai 7.74% dari total pengguna Twitter di berbagai belahan dunia. Peringkat pertama pengguna Twitter di Asia diduduki oleh Indonesia dengan 2.34%, diikuti Jepang 1.47% dan India 0.97%.

Pengguna twitter di Indonesia adalah yang terbesar di Asia, sehingga berbagai informasi ekonomi, politik, hukum, kesehatan, hiburan, dan informasi lainnya disebarakan melalui twitter setiap saatnya. Namun, informasi-informasi tersebut tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Salah satu pendiri Twitter, yaitu Evan Williams, menekankan twitter sebagai jaringan informasi yang memberikan kabar terkini dari semua orang dan membaginya ke seluruh dunia. Twitter Lahir pada tanggal 21 Januari 2000 di *San Francisco, California*. Tujuannya adalah untuk menyediakan layanan online (bukan chat) untuk teman-teman Anda, keluarga, kolega atau rekan kerja agar selalu terjalin komunikasi dan tetap terhubung meski dipisahkan oleh jarak. Dengan menggunakan Twitter, anda bisa mengirimkan informasi singkat kepada teman-teman Anda yang mengikuti (Following) akun Twitter Anda. Tidak hanya berguna sebagai layanan pembangun komunitas, Twitter juga merupakan alat marketing yang efektif di era bisnis afiliasi di jaman yang berkembang dengan cepat ini. Dan sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan skala internasional yang sudah merambah ke layanan-layanan sejenis Twitter.

Berikut adalah ciri-ciri media sosial:

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu
2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu *gatekeeper* dan tidak ada gerbang penghambat

3. Isi disampaikan secara *online* dan langsung
4. Konten dapat diterima secara *online* dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna
5. Medsos menjadikan penggunaannya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri
6. Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (*sharing*), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (*group*). (Mulyati, 2014:27).

Kelebihan media sosial adalah:

1. Cepat, ringkas, padat dan sederhana
Medsos begitu mudah digunakan (*user friendly*), bahkan pengguna tanpa basis pengetahuan Teknologi Informasi (TI) pun dapat menggunakannya. Yang diperlukan hanya komputer, tablet, *smartphone*, ditambah koneksi internet.
2. Menciptakan hubungan lebih intens
Medsos memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan mitra, pelanggan, dan relasi, serta membangun hubungan timbal balik secara langsung dengan mereka.
3. Jangkauan luas dan global
Melalui medsos, siapa pun bisa mengkomunikasikan informasi secara cepat tanpa hambatan geografis. Pengguna medsos juga diberi peluang yang besar untuk mendesain konten, sesuai dengan target dan keinginan ke lebih banyak pengguna.
4. Kendali dan terukur
Dalam medsos dengan sistem tracking yang tersedia, pengguna dapat mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan melalui respons balik serta reaksi yang muncul. (Mulyati, 2014:31)

Peran, manfaat dan fungsi media social adalah:

1. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan
Berbagai aplikasi medsos dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, medsos juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam medsos berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi dan tendensi. Dalam arti positif, medsos adalah sebuah ensiklopedi global yang tumbuh dengan cepat. Dalam konteks ini, pengguna medsos perlu membekali diri dengan kekritisan, pisau analisa yang tajam, perenungan yang

mendalam, kebijaksanaan dalam penggunaan dan emosi yang terkontrol.

2. Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi
Berbagai aplikasi medsos pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada hasil-hasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan medsos dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi medsos sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan medsos, antara lain membuat blog organisasi, mengintegrasikan berbagai lini di perusahaan, menyebarkan konten yang relevan sesuai target di masyarakat, atau memanfaatkan medsos sesuai kepentingan, visi, misi, tujuan, efisiensi dan efektifitas operasional organisasi.
3. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen
Akan diarahkan dan dibawa ke mana medsos, merupakan domain dari penggunaannya.
4. Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran
Medsos berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. (Mulyati, 2014:33)

Pengertian *hoax* menurut Cambridge English Dictionary adalah "rencana untuk menipu seseorang" sementara menurut Merriam-Webster adalah "trik/siasat agar orang percaya atau menerima sesuatu sebagai yang asli padahal palsu dan sering tidak masuk akal".

Hoax dapat diartikan sebagai informasi yang tidak sesuai dengan faktanya, dengan tujuan agar orang dapat mempercayai informasi tersebut. Hoax kerap muncul di media sosial, hal ini karena pada media sosial tidak terdapat *gate keeper* seperti pada media massa, sehingga ribuan informasi dapat menyebar dengan langsung dan cepat setiap saatnya.

Salah satu informasi hoax yang kerap disebarkan melalui twitter adalah informasi politik, twitter digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan hoax mengenai politik dalam rangka menyerang pemerintah, pejabat publik, politisi maupun lawan politik. Twitter dianggap sebagai media yang cepat dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Menurut hasil pengamatan mediawave perusahaan yang mengembangkan peranti lunak pengukuran media sosial, terdapat 1,055 percakapan mengenai wacana spekulasi wali kota Surabaya yang akan maju menjadi

calon dalam pilkada DKI pada September 2016 dan didominasi oleh #hashtag selamatdatangrisma yang mencapai 1,041 percakapan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi politik adalah salah satu informasi yang kerap diperbincangkan di media sosial twitter, dan hingga saat ini informasi tersebut tidak terbukti kebenarannya. Kini, hoax telah menjadi budaya dalam dunia politik.

Dari contoh informasi hoax diatas, penulis tertarik untuk melihat budaya Hoax politik pada media sosial twitter di lihat dari :

1. Sasaran dari hoax politik
2. Isu-isu yang dikaitkan dengan hoax politik
3. Respon pengguna twitter terhadap hoax politik

METODE

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan tradisi penelitian etnografi virtual. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat empiris (dapat diamati dengan panca indera sesuai dengan kenyataan), dengan pengamatan atas data tidak didasarkan pada ukuran-ukuran matematis yang terlebih dulu ditetapkan peneliti dan harus disepakati (direplikasi) oleh pengamatan lain, tetapi berdasarkan ungkapan subjek penelitian, sebagaimana yang dikehendaki dan dimaknai oleh subjek penelitian. Pendekatan kualitatif menggunakan konsep kealamiah (kecermatan, kelengkapan, atau orisinalitas) data dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Pendekatan kualitatif terutama layak untuk menelaah sikap atau perilaku dalam lingkungan yang agak artifisial, seperti dalam survei atau eksperimen. Peneliti kualitatif lebih menekankan proses dan makna ketimbang kuantitas, frekuensi atau intensitas (yang secara matematis dapat diukur), meskipun peneliti tidak mengharamkan statistik deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi atau presentase untuk melengkapi analisis datanya (Mulyana, 2007:11).

Sementara tradisi penelitian etnografi virtual adalah metode etnografi yang dilakukan untuk melihat fenomena sosial dan kultur pengguna di ruang siber (Nasrullah, 2014: 171).

Studi etnografi virtual merupakan metode etnografi yang dilakukan untuk melihat fenomena sosial dan kultur pengguna di ruang siber. Sebagai sebuah kultur dan artefak kultural, *cyberspace* atau dunia siber bagi peneliti etnografi virtual bisa mendekati beberapa objek atau fenomena yang ada di internet (Nasrullah, 2014: 171-172).

Etnografi virtual mempertanyakan asumsi yang sudah berlaku secara umum tentang internet, menginterpretasikan sekaligus reinterpretasi internet

sebagai sebuah cara sekaligus medium yang digunakan untuk berkomunikasi, merupakan "*ethnography in, of and through the virtual*" – interaksi tatap muka *atau face to face* tidak diperlukan (Hine, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pencarian penulis di media sosial twitter, sasaran dari hoax politik adalah politisi, pejabat publik yang tengah menjabat, calon pejabat publik dan pelaku dunia hiburan (*entertainer*). Media twitter ini digunakan oleh berbagai pihak untuk memperoleh dukungan, menyerang pendukung salah satu pihak, menjatuhkan reputasi individu maupun golongan, mengungkapkan informasi yang belum diketahui oleh publik dan menyebarkan fitnah.

Hoax yang disebar kerap dikaitkan dengan beberapa isu yaitu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Kicauan hoax politik di twitter yang menggunakan isu SARA, terlihat berupaya untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu dan untuk menarik dukungan kepada pihak lainnya. Sementara hoax yang mengangkat isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi individu sehingga menggiring opini publik pada arah yang negatif.

Hal yang menarik terlihat pada Hoax politik yang melibatkan entertainer atau pelaku dunia hiburan. Hoax politik yang disebar berupaya untuk menarik dukungan publik melalui figur publik yang seolah-olah memberikan dukungan pada pihak tertentu. Hoax berupaya untuk mengumpulkan dukungan dari para penggemar atau fans figur publik tersebut.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 4 (empat) tipe pengguna twitter dalam menanggapi Hoax mengenai politik. Pertama, pengguna twitter yang memberikan respon secara langsung terhadap Hoax yang beredar dan menyatakan bahwa berita atau informasi tersebut adalah hoax. Kedua, pengguna twitter yang memberikan respon dengan mempertanyakan kebenaran hoax yang beredar. Ketiga, pengguna twitter yang memposting kembali hoax yang beredar dan menghimbau pengguna lainnya untuk tidak mudah mempercayai hoax tersebut. Keempat, pengguna twitter yang memposting kembali hoax tersebut dan menginformasikan bahwa berita tersebut adalah tidak benar dengan memberikan berita atau tautan klarifikasi dari sumber berita yang dapat dipercaya.

SIMPULAN

1. Sasaran dari hoax politik adalah politisi, pejabat publik yang tengah menjabat, calon pejabat publik dan pelaku dunia hiburan (entertainer).
2. Hoax yang disebarakan dikaitkan dengan beberapa isu yaitu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), korupsi, dan penyalahgunaan wewenang.
3. Respon setiap pengguna twitter dalam menanggapi hoax politik beragam yaitu pengguna twitter yang memberikan respon dan menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Pengguna twitter yang memberikan respon dengan mempertanyakan kebenaran hoax yang beredar. Pengguna twitter yang memposting kembali hoax yang beredar dan menghimbau pengguna lainnya untuk tidak mudah mempercayai hoax tersebut. Dan terakhir, pengguna twitter yang memposting kembali hoax tersebut dan menginformasikan bahwa berita tersebut adalah tidak benar dengan memberikan berita dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Mediawave. 2016. *Dukungan "Netizen" tak Sejalan Dengan Parpol*. Diakses pada 10 Oktober 2016, melalui situs: <http://blog.mediawave.co.id/?p=580>

DAFTAR PUSTAKA

- Hine, Christine. 2001. *Virtual Ethnography*. London: Sage Publication Ltd
- Mulyana, Deddy. & Solatun. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosda Nasrullah, Rulli. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta:Kencana
- Mulyati, Ani. 2014. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI
- Cambride English Dictionary. 2016. *Berita Hoax*. Diakses pada 10 Oktober 2016, melalui situs : <http://perskatharsisuho.blogspot.co.id/2016/08/berita-hoax-hoax-identik-kebohongan.html>
- Evan Williams. 2009. *Apa itu twitter dan cara menggunakannya*. Diakses pada 20 September 2016, melalui situs: <https://motivasee.com/twitter/>
- LPMP Jateng . 2016. *Indonesia Urutan Pertama Pengguna Twitter di Asia*. Diakses pada 20 September 2016, melalui situs: <http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/info-teknologi/321-indonesia-%20%20%20urutan-pertama-pengguna-twitter-di-asia>

REAK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI TRADISIONAL PADA MASYARAKAT CILENGKRANG KECAMATAN UJUNGBERUNG

Feliza Zubair
Lukiati Komala

Prodi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
felizaherison@yahoo.co.id

Abstrak

Ujungberung dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan kesenian, baik tradisional maupun kesenian modern, salah satunya adalah seni *Reak*. *Reak* ditampilkan berupa iring-iringan dengan instrument etnik sunda, *sinden* kuda *renggong*, *sisingaan* dan beberapa penari. Konon, Seni *Reak* lahir sekitar abad ke-12 dimana pada saat itu Prabu Kiansantang menyebarkan agama Islam dan melaksanakan bagi anak-anak, mendapat kendala karena si anak selalu merasa ketakutan. Oleh karena itu, diciptakanlah suatu jenis kesenian "*Reak*". Hal paling prinsip dari pertunjukan ini adalah keramaian atau kemeriahannya. Karena hiruk-pikuk dan sorak-sorai dari pemain dan penonton itulah maka kesenian ini dinamakan "*Seni Reak*" diambil dari kata hiruk-pikuk, atau sorak-sorai gemuruh tetabuhan yang dalam Bahasa Sunda yaitu "*susurakan* atau *eak-eakan*". Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana bentuk komunikasi verbal dan non verbal dalam seni *Reak*, 2) bagaimana pemahaman pelaku seni tentang Seni *Reak*, dan 3) bagaimana kendala yang ada dalam komunikasi melalui seni *Reak*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif dimana peneliti menganalisis kesenian tradisional sebagai kearifan lokal yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk menyalurkan pesan (pesan moral, etika, politik, dan pesan keagamaan). Dari wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan dalam penelitian terungkap bahwa seni *Reak* sebagai media komunikasi tradisional masih cukup efektif untuk menyampaikan berbagai pesan informatif terutama edukatif, melalui komunikasi verbal dan non verbal, seperti tatacara berpakaian pemilihan lagu-lagu dalam seni *Reak* hingga permainan alat-alat musik semua sarat komunikasi. Para pemilik sanggar seni *Reak* umumnya keluarga dan diturunkan secara turun-temurun, dengan tujuan utama adalah memelihara tradisi dan memberikan hiburan. Banyak kendala yang dihadapi dalam pelestarian seni *Reak* terutama biaya operasional antara lain pemeliharaan peralatan dan kuda tunggangan yang digunakan.

Kata Kunci: Seni *Reak*, Komunikasi, Tradisional, kearifan lokal, verbal dan non verbal.

PENDAHULUAN

Studi Literatur

Beberapa penelitian yang menjadi literatur dalam penelitian ini adalah: Penelitian pertama berjudul "*Makna Pesan Kesenian Masamper*" (Studi pada kelompok *Masamper* yang ada di kecamatan Tuminting kota Manado). Penelitian ini dilaksanakan oleh Lestari Sariyani Makasenda, Antonius Boham dan Stefi. H. Harilama, yang menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Adapun penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu ketua-ketua kelompok *Masamper* dan anggota kelompok *Masamper* yang belum paham mengenai sejarah *Masamper* di Kecamatan Tuminting –kota Manado. *Masamper* adalah salah budaya tradisional Indonesia yang tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan oleh masyarakat Sangihe hingga dewasa ini. *Masamper* adalah salah satu media komunikasi tradisional yang berisi ungkapan hati nurani masyarakat yang mengandung nilai etika, moral, patriotik, dan religius yang pada prakteknya mengalami perkembangan menjadi pertunjukan. *Masamper* adalah jenis kesenian yang menggunakan simbol komunikasi karena lagu-lagu/puji-pujian yang disampaikan dalam *Masamper* merupakan pesan-pesan yang dibawakan dalam bentuk nyanyian. Dari sini bisa di melihat bahwa kesenian *Masamper* menyampaikan pesan-pesan melalui simbol-simbol yang ada di dalamnya. Simbol-simbol tersebut berupa pakaian, nyanyian, dan gerakan yang bisa dipadukan dengan suasana yang ada. Hasil penelitian adalah, pesan-pesan yang disampaikan melalui kesenian *Masamper* menggunakan simbol nyayian, gerakan, dan pakaian. Dalam nyayian, telah ditetapkan beberapa tema yang dapat dibawakan dalam setiap pementasan, antara lain: tema pertemuan, pujian rohani, sastra daerah, perjuangan, percintaan, dan tema perpisahan. Sedangkan simbol gerakan hanya sebagai kombinasi dalam setiap penampilan. Simbol pakaian hanya sederhana yaitu menggunakan pakain bebas dalam pementasan biasa dan menggunakan pakaian adat Sangihe dalam perlombaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah *Masamper* secara sosial merupakan sarana komunikasi dengan berbagai pihak yang berisi pesan-pesan sosial yang mengacu pada

aspek kehidupan sepanjang masa yang didalamnya menggunakan simbol-simbol komunikasi.

Penelitian kedua adalah penelitian Dewi Rahma yang berjudul: Makna Pesan Non Verbal Pada Kesenian *Kuda Renggong* di Paguyuban “Saluyu” (Group Mekar Saluyu) di Kecamatan Cileunyi-Bandung, Studi deskriptif mengenai makna pesan non verbal pada kesenian kuda Renggong di Paguyuban Saluyu Kecamatan Cileunyi –Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna nonverbal dalam kesenian *Kuda Renggong* di Paguyuban “Saluyu” (Group Mekar Saluyu), dengan fokus penelitian: Perilaku dalam kesenian kuda renggong, ruang dan waktu. Sub fokus digunakan untuk mengukur fokus dari penelitian ini yang berjudul Makna pesan non verbal dalam kesenian *Kuda Renggong* di Paguyuban Saluyu (Group Mekar Saluyu) Kecamatan Cileunyi-Bandung. Penelitian menggunakan metode deskriptif, adapun informan penelitian adalah pemimpin kesenian Saluyu yang berjumlah tiga orang dan informan pendukung (Ketua desa wisata dan penonton) sebanyak dua orang, Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* dan teknik penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Makna perilaku dalam kesenian kuda *renggong* bisa dilihat dari penggunaan pakaian, gerakan, ekspresi wajah, dan bau-bauan. Ruang dan waktu yang dipakai dalam kesenian kuda renggong dilakukan menurut perhitungan adat istiadat setempat, dalam tempat terbuka dan menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh orang yang punya *hajat*. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seni *Kuda Renggong* tidak hanya dianggap sebagai sebuah seni pertunjukan hiburan saja, tetapi di dalam kesenian tersebut banyak mengandung pesan yang di dalam kegiatannya memiliki banyak makna. Saran penelitian, diharapkan agar masyarakat setempat bisa lebih menaruh perhatian kepada kesenian *Kuda Renggong* dimana kesenian ini merupakan kesenian khas masyarakat Sunda yang merupakan kesenian turun-temurun dan harus tetap dijaga kelestariannya.

Gambaran Penelitian

Sebagai media komunikasi tradisional seni *Reak* hingga saat ini masih tampak terjaga kelestariannya. Hal ini terbukti sebagai salah satu kesenian rakyat Jawa Barat, khususnya di sekitar Ujungberung-Bandung, Cileunyi-Bandung, dan Sumedang (Jawa Barat) kesenian ini masih sering ditampilkan (digelar). Umumnya, kesenian ini diselenggarakan oleh masyarakat, seperti Cileunyi dan Ujungberung, pada acara Sunatan (Sunda; khitan), baik yang dikhitannya laki-laki maupun perempuan. Namun, umumnya, *Reak* ditampilkan ketika khitanan laki-laki. Selain itu, *Reak* pun sering ditampilkan dalam acara-acara syukuran panen atau acara yang terkait

dengan peristiwa sejarah negara Indonesia, seperti 17 Agustus-an. Dalam skala kecil, *Reak* pun dihadirkan pada acara pernikahan, ulang tahun, peringatan akil baligh [9 tahun, atau 13 tahun, atau 15 tahun], dan acara syukuran lainnya. Seni *Reak* sebagai media komunikasi tradisional memiliki potensi untuk menyampaikan berbagai pesan-pesan moral dan etika masyarakat kita baik melalui komunikasi verbal maupun non verbal.

Sebagai pagelaran seni *Reak* sarat akan pesan komunikasi verbal maupun non verbal, baik dari tata upacara yang dilakukan sebelum pagelaran, pakaian, ornamen, bentuk *Reak* hingga isi pesan yang disampaikan sinden dalam tembang (lagu) yang mengiringinya. Untuk itu maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Bagaimana bentuk komunikasi verbal dan non verbal dalam seni *Reak*, Mengamati para pekerja seni dalam pagelaran seni *Reak* di wilayah Cilengkrang banyak yang masih berusia remaja, menarik untuk diketahui apakah mereka memiliki pemahaman yang sama akan keberadaan seni *Reak* dengan para sesepuh mereka, untuk itu tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Bagaimana pemahaman pelaku seni tentang Seni *Reak*.

Sebagai salah satu media komunikasi tradisional yang sarat akan kearifan lokal seni *Reak* saat ini memiliki berbagai kendala terutama dalam menyampaikan berbagai pesan komunikasi. Tantangan yang tentu tidak mudah bagi para pelaku seni *Reak* dimana mereka harus tetap eksis apapun yang terjadi, karena itu tujuan ketiga dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kendala yang ada dalam komunikasi melalui seni *Reak*.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif menurut Rakhmat (1989:34) merupakan penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, maka dalam penelitian ini peneliti memaparkan situasi atau peristiwa dalam pagelaran seni *Reak* sebagai media komunikasi tradisional pada masyarakat Cilengkrang Kecamatan Ujungberung-Bandung.

Melalui pendekatan kualitatif peneliti akan menganalisis kesenian tradisional *Reak* sebagai kearifan lokal yang dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk menyalurkan pesan (pesan moral, etika, politik, dan pesan keagamaan).

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. Menurut Agus Salim (2006:12) sampel *purposif* ditentukan selaras dengan tujuan studi. Pengambilan sampel

dalam penelitian ini ditentukan pada kualitas sampel dan bukan pada jumlahnya. Informan penelitian adalah pemimpin kesenian *Reak* Bungsu Manglayang yaitu bapak Ade Darga, Bapak Agus dan Bapak Adang sebagai pembina mereka dianggap cukup representatif sebagai informan dalam penelitian ini karena sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yaitu memiliki pengalaman yang cukup sebagai pekerja seni *Reak*, memiliki kemampuan dalam mengembangkan seni *Reak* dan memahami berbagai permasalahan seni *Reak*, khususnya di wilayah Ujungberung Bandung.

Herdiansyah (2010: 116) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa teknik tersebut, antara lain wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan *focus group discussion*. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para informan dan juga salah satu wakil masyarakat Bapak Denny Rakhmat, pengguna seni Kuda Renggong sebagai triangulasi sumber pada penelitian ini.

Teknik observasi dilakukan pada saat pagelaran dan ketika melakukan wawancara dengan para informan baik di lokasi *hajatan* maupun di sanggar seni *Reak* Bungsu Manglayang. Melengkapi berbagai analisa dan pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan dokumentasi baik berupa literatur, data-data *online* maupun buku-buku terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media komunikasi tradisional adalah salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan sebagai bagian dari tradisi masyarakat di suatu daerah atau suatu tempat. Komunikasi yang disampaikan berisi berbagai kearifan lokal yang dipadukan dalam bentuk komunikasi verbal maupun non verbal. Seni *Reak* adalah merupakan salah satu dari media komunikasi tradisional tersebut.

Media tradisional sering disebut sebagai media rakyat atau kesenian rakyat, melihat dari sejarah lahirnya, sekitar abad ke-12 berawal dari ide Prabu Kiansantang, putera Prabu Siliwangi, sebagai salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Dalam agama Islam, setiap laki-laki wajib hukumnya untuk dikhitan (*sunat*). Namun, pelaksanaan khitanan bagi anak-anak ini mendapat kendala karena si anak selalu merasa ketakutan untuk dikhitan. Oleh karena itu diciptakanlah suatu jenis kesenian yang disebut “Seni *Reak*” (di Sumedang). Hal yang paling prinsip dari pertunjukan ini adalah keramaian atau kemeriannya agar banyak masyarakat yang menonton, terutama anak-anak. Nama “Seni *Reak*” diambil dari kata hiruk-pikuk, atau

sorak-sorai gemuruh tetabuhan yang dalam Bahasa Sunda yaitu “susurakan atau eak-eakan”.

Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah:

Bentuk komunikasi verbal dalam seni *Reak*

Bentuk komunikasi verbal dalam seni *Reak* disampaikan melalui lagu-lagu yang dibawakan salah satunya *Wangsit Siliwangi* yang memaparkan tentang keadilan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Kendati Prabu Siliwangi bukan beragama Islam, namun beliau sudah menjalankan kaidah-kaidah Islam. Seni *Reak* lahir atas gagasan putra beliau Prabu Kiansantang yang merupakan salah seorang penyebar agama Islam di pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Pesan verbal disampaikan melalui pupuh-pupuh yang sarat kearifan lokal (*Sumedang Larang*), diiringi tetabuhan menghibur anak-anak yang disunat agar tidak merasa takut disunat.

Simbol atau pesan verbal menurut Mulyana (2005) adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal, maka pupuh yang disampaikan lewat tembang *Wangsit Siliwangi* merupakan pesan yang disampaikan oleh komunikator (penembang) kepada komunikan yaitu *audience* penonton pagelaran.

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Adapun komunikasi non verbal dalam seni *Reak* tersampaikan melalui:

- alat yang digunakan dalam pagelaran yaitu *Tilingtit, tong, gerung, bangpak* dan *bedug*. Kelima buah alat ini memiliki makna atau arti yaitu, “*sok indit, tong embung, prak lakukeun solat dimana dur bedug*”.
- Pesan non verbal lainnya disampaikan melalui pakaian serba hitam yang digunakan peserta seni *Reak* yang disebut “*pangsi*”, yaitu merupakan lambang keagungan dan kesederhanaan, merupakan pakaian yang selalu digunakan Prabu Siliwangi.
- Logo sanggar bergambar “*maung*” atau harimau sebagai lambang keperkasaan dan kegagahan dengan slogan: “*Ngagali seni titipan para wali, ngaguar budaya titipan para pujangga*”.
- Tokoh “*Reak*” yang berkepala naga, sebetulnya berangkat dari mitos bangsa Indonesia yang dipengaruhi budaya Hindu, dimana Naga merupakan simbol “*dunia bawah*”, yang bisa baik jika diperlakukan baik, tetapi bisa sebaliknya bila diperlakukan buruk.
- Gerakan yang dilakukan baik oleh *nayaga, sinden* maupun *Reak*, menggambarkan

kekuatan dan kearifan serta keberanian tercermin dalam gerakan silat.

Klasifikasi pesan nonverbal menurut Rakhmat (1994) bahwa pesan non verbal yang menyampaikan pesan kinesik, yaitu pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti, terdiri dari tiga komponen utama: pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural. Pesan fasial menggunakan air muka untuk menyampaikan makna tertentu. Pesan gestural menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasi berbagai makna. Ini tergambar dalam gerakan-gerakan para peserta seni *Reak* serta ekspresi tokoh *Reak* yang merupakan topeng kepala Naga, serta ekspresi yang mencerminkan kegembiraan pada semua peserta.

Pesan nonverbal lainnya dijelaskan Rahmat (1994) adalah: Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Umumnya dengan mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain. Pesan artifaktual yang diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang sering berperilaku dalam hubungan dengan orang lain sesuai dengan persepsinya tentang tubuhnya (*body image*) seperti pakaian, dan kosmetik. Semua penampilan peserta dan ornamen yang digunakan dalam seni *Reak* menggambarkan kearifan lokal seni tradisional ini.

Pesan komunikasi verbal dan non verbal dalam seni *Reak* berbeda-beda, karena seni *Reak* terbagi dalam 3 (tiga) macam: Seni *Reak* Tradisional yang hanya menggunakan alat musik utama dan tidak ada *sinden* (wanita) karena dianggap tabu (bukan muhrim), jadi rombongan seni *Reak* tradisional semua pria, juga tidak menggunakan *toa* (pengeras suara) dan *sound system*. Seni *Reak* yang kedua adalah *Reak* Kreasi dimana dalam pertunjukan ada *sinden*, menggunakan pengeras suara dan diselingi lagu-lagu jaman sekarang, untuk menarik minat penonton. Seni *Reak* yang ketiga adalah *Reak* Kombinasi, dimana dalam pagelaran sudah menggunakan berbagai alat musik modern seperti gitar. Perbedaan ini menggambarkan fleksibilitas dari seni *Reak* sebagai media komunikasi tradisional yang berusaha menyesuaikan pada perkembangan jaman. Tidak mengherankan bila seni *Reak* dapat bertahan hingga saat ini.

Pemahaman pelaku seni tentang Seni Reak.

Pemahaman pelaku seni tentang seni *Reak* adalah meliputi falsafah yang melatarbelakangi pagelaran seni *Reak*. Bapak Ade Darga menjelaskan bahwa seni *Reak* sesungguhnya sarat dengan pesan-pesan moral dan etika. Mulai dari upacara "*ngukus*" atau sesajen sebetulnya lebih kepada sikap syukur kepada yang Gaib yaitu Allah Subhanahuwataala yang kemudian disandingkan dengan doa memohon kelancaran atas

tugas yang akan mereka lakukan, termasuk mendoakan yang memiliki *hajatan* agar semua berada dalam kelancaran. Seni *Reak* dipahami secara umum sebagai hiburan dalam arti *Reak*, *rame*, *eak-eakan* berarti penuh kegembiraan. Ini tujuan utama yang dilaksanakan sejak awal oleh Prabu Kiansantang agar masyarakat khususnya anak-anak yang disunat merasa gembira.

Dalam bukunya yang berjudul: "*The Social Construction of Reality*", Berger dan Luckmann (terjemahan: 2012) menggambarkan suatu situasi komunikasi interpersonal dimana tiap individu saling mengamati namun juga saling merespon kebiasaan mereka satu sama lain sehingga semua peserta komunikasi (partisipan) dapat mengantisipasi dan mengantisipasi diri pada kebiasaan orang lain. Karena kebiasaan ini maka situasi komunikasi dibangun berdasarkan tipe-tipe seseorang (pengkhasan). Dalam penelitian ini seni *Reak* merupakan kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga tercipta pemahaman yang merupakan hasil kesepakatan bersama terhadap seni *Reak*.

Pemahaman yang lebih mendalam adalah tujuan dari seni *Reak* sebagai media pemahaman agama Islam. Pada masa itu mengislamkan Jawa Barat tidak mudah, karena penduduk Jawa Barat sudah memiliki *ageman* dan kearifan budaya sendiri. Maka masuknya agama Islam adalah melalui pendekatan budaya, sehingga lama-kelamaan penduduk tertarik akan ajaran Islam yang dianggap memiliki kearifan yang lebih baik. Misalnya alat musik seni *Reak* yang pokok ada 5 (lima), yaitu *Tulingtit* (kendang paling kecil), *Tong* (kendang agak besar), *Gembung* (kendang lebih besar), *Bangpak* (kendang lebih besar lagi) dan *Bedug* (kendang paling besar). Arti 5 diambil dari makna 5 waktu solat dan 5 rukun Islam, dan disampaikan dalam bahasa penuh kearifan "*Sok indit, tong embung, prak lakukeun solat, dimana dur bedug*".

Pemahaman seni *Reak* sebagai kearifan yang harus dijaga dari berbagai "polusi" budaya yang justru mengotori keluhuran seni "*Reak*" itu sendiri. Dalam seni "*Reak*" etika dan perilaku para pemainnya harus sesuai dengan ajaran Islam dan kearifan Sunda Buhun (Prabu Siliwangi), tidak boleh berperilaku yang kurang baik apalagi mabuk-mabukan. Karena itu anggota sanggar *Reak* Bungsu Manglayang tidak diperbolehkan mabuk-mabukan seperti yang sering dilakukan sanggar *Reak* yang lain.

Dale G. Leathers (1976) dalam *Nonverbal Communication Systems*, menyebutkan alasan mengapa pesan nonverbal sangat signifikan, salah satunya adalah pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Dalam

penelitian ini pesan nonverbal yang disampaikan melalui seni *Reak* memiliki kualitas yang tinggi. Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Ada situasi komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan gagasan dan emosi secara tidak langsung. Sugesti ini dimaksudkan menyarankan sesuatu kepada orang lain secara implisit (tersirat). Semua ini tercermin dalam pagelaran seni *Reak*.

Kendala-kendala yang ada berkaitan dengan kelangsungan seni Reak

Kendala-kendala yang ada berkaitan dengan kelangsungan seni *Reak* sebagai media komunikasi tradisional, terbagi dua yaitu kendala yang dihadapi para pekerja seni *Reak* dalam menjaga kelestarian seni *Reak* dan kendala dalam komunikasi melalui seni *Reak*. Saat ini adalah diperlukannya wadah yang dapat memberikan “perlindungan” bagi para seniman tradisional khususnya seni *Reak*. Untuk melestarikan seni budaya *buhun* diperlukan berbagai usaha dan upaya, namun karena kondisi yang serba terbatas para seniman tradisional khususnya seni *Reak* tidak dapat mewujudkannya, kendala-kendala lain yang dialami adalah keterbatasan ekonomi, persaingan antar sanggar seni, menghadapi “serangan” budaya dari “luar”, perhatian pemerintah yang tidak maksimal (tidak sesuai Perda no.5 tahun 2012). Padahal pemerintah sudah menjanjikan akan melaksanakan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kepada komunitas seniman *Reak*, sayangnya hingga hari ini belum terpenuhi.

Adapun kendala-kendala yang ada dalam komunikasi seni *Reak* baik secara verbal dan nonverbal adalah tidak semua anggota paham akan falsafah seni *Reak*. Belum banyak orang yang paham akan keberadaan seni *Reak* akibat dari kurangnya “gaung” tentang keberadaan seni *Reak* itu sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi verbal dan nonverbal pada seni *Reak* adalah pada pupuh lagu-lagu yang dibawakan *sinden*, slogan, logo, jenis dan warna pakaian para peserta seni *Reak*, serta peralatan musik pengiring yang digunakan dalam seni *Reak*.
2. Pemahaman para pelaku seni *Reak* terhadap seni *Reak* itu sendiri adalah: pertama sebagai media hiburan, sebagai media pendidikan dan sebagai media penyampai pesan moral dan perilaku yang baik.
3. Kendala-kendala yang dihadapi para pekerja seni *Reak* dalam menjaga kelestarian seni

Reak dan kendala dalam komunikasi melalui seni *Reak*. Untuk melestarikan seni budaya *buhun* diperlukan berbagai usaha dan upaya, namun karena kondisi yang serba terbatas para seniman tradisional khususnya seni *Reak* tidak dapat mewujudkannya

Saran

Saran saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlunya wadah bagi pelaku seni *Reak* yang dapat membina keberlangsungan falsafah seni *Reak* sebagai media komunikasi tradisional yang tepat sasaran.
2. Perlu adanya upaya pemerintah untuk melakukan pembenahan setiap sanggar seni *Reak* agar memelihara pakem kesenian tersebut, sehingga tidak mencemari sanggar lain.
3. Perlu upaya meningkatkan peran seni *Reak* sebagai media komunikasi tradisional yang tidak hanya memberikan hiburan saja, namun juga edukasi dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. London: Sage Publication, Inc.
- Deddy Mulyana, 2005, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Denzin, N.K. dan Y.S. 1998. *The landscape of Qualitative Research: Theories and Issues*. London: Sage Publication, Inc.
- Jalaludin Rakhmat, 1994, *Psikologi Komunikasi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Luckman, Berger, 2012. “*The Social Construction of Reality*” (terjemahan), Jakarta, LP3ES.
- Onong Effendy, 1994, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

PERAN ELIT NON-POLITIK DALAM PENINGKATAN DEMOKRASI LOKAL DI BALI: KASUS PROSES PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA

Diana Fawzia, MA
Ilmu Politik, FISIP Universitas Nasional
dianafawzia@yahoo.com

Nursatyo
Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Nasional

Truly Wangsalegawa
Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional)

Abstract

The rejection movement on Benoa Bay Reclamation in Bali is a movement with a purpose of rejecting the act of physical alteration (reclamation; revitalization) in the area of Benoa Bay. The aforesaid rejection is triggered by fear of its negative impact on the development of tourism which marginalized Balinese and violate sacred sites. This movement can be seen as an increase of society participation in the development of local democracy in Bali. Not only regarded as the “adversary” of the state power, but it is also changing the human relations on micro level; the growth on collective awareness. This research aims to obtain depiction on all transpired dynamics of such movement as well as the role played by each of non-political elite element. This research is applying grounded research method with qualitative descriptive approach. Primary data is obtained by way of interview, with secondary data is obtained by references of books, journals as well as mass media. The research finding has shown the role of non-political elite on the movement. The movement which initially suggested by environmental activist in turn has developed onto youth movement from various social background. They have influenced those of keliyan adat (the Leaders of Banjar Traditional) and bendesa (Village Head). The movement has greater impact when it is supported by religious elite and several elite palaces kingdom in Bali.

Keywords – Local Politic, Non-Political Elite, Strategy Role, Social Movement, Benoa Bay Reclamation.

PENDAHULUAN

Kawasan Teluk Benoa yang terletak di Kabupaten Badung, Provinsi Bali merupakan daerah yang memiliki nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya, tidak hanya bagi masyarakat Bali, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Hal itu mengakibatkan

kepentingan setiap unsur masyarakat terhadap kawasan tersebut juga sangat tinggi. Terbukti, ketika pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan besar-besaran pada kawasan tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 51 Tahun 2014 terkait perubahan peruntukan ruang sebagian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari Kawasan Teluk Benoa, konflik kepentingan dari berbagai unsur masyarakat tidak dapat dielakan lagi.

Walaupun pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa keluarnya Perpres 51 Tahun 2014 telah memenuhi kriteria *Good Governance*, yang melibatkan setiap unsur masyarakat, namun keputusan ini mendapat tanggapan berbeda di masyarakat Bali. Hal ini dapat terlihat dari penolakan yang keras berbagai elemen masyarakat, baik oleh pemuka agama, pemuka adat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan bahkan oleh individu-individu yang peduli pada keselamatan Bali.

Hal yang menarik dari peristiwa ini adalah bahwa penolakan masyarakat tidak fokus pada perlawanan terhadap kekuasaan negara, melainkan mengubah hubungan manusia pada tingkat mikro. Kegiatan yang dilakukan lebih banyak berupa interaksi dan perlawanan kebudayaan, yaitu proses terus menerus yang mengambil bentuk sebagai permainan, performa, dan gaya, alih-alih pengorganisasian politik. Pergerakan seperti ini tidak bisa disebut sebagai kelompok penekan biasa, namun disebut sebagai Gerakan Sosial Baru atau *New Social Movement* (NSM).

NSM bisa dikatakan sebagai salah satu ajang demokrasi alternatif bagi negara. Di tengah kehampaan demokrasi prosedural yang berlangsung di daerah-daerah di Indonesia, pasca otonomi daerah, model partisipasi dalam penolakan sebuah kebijakan dengan NSM menjadi sebuah alternatif yang bukan

hanya akan menjawab kejenuhan teori-teori demokrasi yang ada, namun juga memberi warna lain dalam demokrasi di Indonesia.

Walaupun gerakan ini dinamakan sebagai gerakan sosial, namun tidak dapat disangkal bahwa gerakan ini hanya akan terjadi dengan peran elit. Hal ini tampak sebagai sesuatu yang kontradiktif, karena bila dikaitkan dengan konsep demokrasi, elit biasanya dianggap sebagai orang atau kelompok yang melembagakan pengaruh mereka melalui negara dan menentang demokrasi. Maka dari itu, elit yang dimaksud di sini adalah elit non-politik, yaitu elit yang memiliki kekuatan namun tidak mempergunakannya untuk memperebutkan jabatan atau posisi politik tertentu. Elit ini biasanya berupa elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi, dan lain sebagainya.

Dalam kasus penolakan kebijakan reklamasi Teluk Benoa, Bali, terdapat berbagai macam elit non-politik yang terlibat dalam pergerakannya. Elit-elit ini memiliki sumber kekuasaan yang berbeda, karakter yang berbeda, ideologi yang berbeda, jenis pergerakan yang berbeda, namun semuanya bersatu dalam pergerakan untuk menentang kebijakan Teluk Benoa.

Sebagai daerah yang memiliki nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya yang tinggi, dan berpengaruh pada kondisi nasional, dan bahkan internasional, maka proses demokratisasi yang terjadi di Bali ini cukup menarik untuk dijadikan sebagai sebuah model demokrasi alternatif. Demokrasi yang dapat¹ meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah kebijakan tanpa harus secara langsung berhadapan² dengan kekuasaan atau mengakibatkan pergantian kekuasaan. Demokrasi yang melibatkan elit-elit non-politik yang alih-alih bertarung dalam pemilihan³ untuk memenuhi kepentingannya, malah melakukan sosialisasi dan membentuk orientasi politik masyarakat secara mendasar.

Konsep partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang berkembang sebelum era reformasi ini dimaknai sebagai tindakan kolektif yang biasanya bersumber pada basis-basis politik sosial tertentu. Hal ini terjadi akibat sistem politik yang bekerja tidak memberikan tempat bagi aspirasi individual. Aspirasi yang diperhatikan dan kemudian menjadi bahan masukan adalah kepentingan yang sudah diartikulasikan dan diagregasi melalui suatu kelompok, bisa berupa kelompok kepentingan, kelompok penekan, atau partai politik.

Namun sejak saat itu, terdapat pergeseran, sejalan dengan demokratisasi dan desentralisasi, kajian tentang peran aktor dalam proses demokrasi lokal menjadi signifikan, hal ini terjadi karena dua hal. *Pertama*, dalam kaitannya dengan budaya politik lokal, aktor adalah agen budaya. Disatu sisi, aktor merupakan penerus nilai-nilai budaya politik yang tumbuh dan berkembang di ranah lokal, namun disisi lain juga aktor juga merupakan produsen (*creator*) budaya, dimana perilaku politik aktor mempengaruhi perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal. Dengan kata lain, peran aktor merupakan salah satu kunci penting keberhasilan demokrasi karena tingkah laku aktor dan kebijakan yang dihasilkan mempunyai arti penting dan juga berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi. *Kedua*, dalam kaitannya dengan demokrasi, proses transisi politik yang berlangsung di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir telah memberikan wadah, sekaligus menempatkan para aktor baik diranah nasional maupun lokal (Zuhro, 2009: 2). Studi peran aktor dianggap penting karena melalui studi ini dapat dilihat pertarungan antar aktor dalam menentukan apakah proses demokrasi berasal dari atas, bawah, atau tengah (Zuhro, 2009: 17).

Preferensi yang menghubungkan aktor politik lokal tentu tidak lepas dari elit lokal dalam mensikapi, menentukan, dan mempengaruhi proses politik di tingkat lokal. Varma SP dalam "Teori Politik Modern" (2003: 197) mengatakan bahwa, teori elit bersandar pada kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas mencakup: Sekelompok kecil manusia yang kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan Sejumlah besar masa yang ditakdirkan untuk diperintah.

Ketika elit dihubungkan dengan demokrasi lokal, maka saat ini kajian-kajian dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antar elit lokal dalam mendapatkan kekuasaan. Atau dengan kata lain, para peneliti saat ini lebih fokus pada elit-elit politik lokal yang saling berkompetisi dalam memperebutkan kekuasaan, sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian-penelitian tersebut adalah bahwa demokrasi mengalami kegagalan, dimana demokrasi lokal dan desentralisasi bergeser menjadi oligarki elit.

"Praktik demokrasi yang dijalankan saat ini baru sebatas prosedural dan formal. Masih jauh dari substansial. Indikasinya, institusi demokrasi yang ada hanya dikuasai segelintir elit politik sehingga praktik demokrasi bergeser menjadi oligarki elit-elit strategis. Politik desentralisasi yang dijalankan baru sebatas elit dan parpol, belum sampai ke massa atau rakyat/warga, sehingga otonomi daerah cenderung

oligarkis dalam pelaksanaannya” (Mariana dan Pascarina, 2007: 13).

Namun demikian tidak semua penelitian berjalan kearah yang sama. Diana Fawzia dalam penelitiannya “Peran Elit Non-Politik dan Kebijakan Berperspektif Jender: Kasus di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah” (2012) mengungkapkan upaya elit non-politik di daerah dalam mempengaruhi kebijakan untuk mempertahankan kebudayaan lokal melalui kebijakan berperspektif jender. Dalam penelitian tersebut, demokrasi lokal tercermin dari keikutsertaan elit non-politik dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Interaksi antar aktor dalam proses demokrasi, tidak merupakan perebutan kekuasaan, melainkan saling mempengaruhi dalam mengkonstruksi sebuah kebijakan.

Dalam konteks lokal, elit dibagi menjadi dua kategori, yaitu elit politik lokal dan elit non-politik lokal. Nurhasim (2005:12-13) menjelaskan kategorisasi tersebut sebagai berikut:

- 1) *Elit Politik Lokal* merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politik seperti ini seperti: Gubernur, Bupati, walikota, Ketua DPRD, anggota DPRD, dan pimpinan Partai Politik.
- 2) *Elit non-politik Lokal* yaitu seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan memiliki pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non-politik ini seperti: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi, dan lain sebagainya.

Perbedaan tipe elit lokal ini selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar elit politik maupun elit masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah di tingkat lokal. Hubungan ini kemudian yang paling banyak diteliti adalah hubungan yang bersifat konfliktual.

Kedua, Sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Karena

itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam suatu kelompok yang kecil maupun kelompok besar. Perbedaan kepentingan setidaknya akan memperlihatkan motif dalam berkonflik.

Morlino (1989) berpendapat bahwa stabilitas dalam demokrasi sangat dipengaruhi oleh perilaku dan hubungan antara elit politik dan elit non-politik. Bagaimana elit-elit tersebut mengelola komitmen mereka dalam menjaga konsolidasi demokrasi. Konsep konsolidasi demokrasi ini dibawakan oleh Linz dan Stepan (1996), yang menyatakan bahwa konsolidasi demokrasi modern membutuhkan penerimaan dari keseluruhan aturan-aturan, institusi-institusi, dan regulasi-regulasi, yang dikonstruksi dan diterima secara sosial dan politik.

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah seputar model demokratisasi lokal yang dilakukan oleh elit non-politik melalui NSM, yang mencakup:

Elit non-politik yang terlibat dalam NSM bukan merupakan satu kelompok tunggal. Elit-elit ini memiliki perspektif ideologis yang berlainan, membentuk organisasi yang berbeda, dan tujuan politik dan budaya yang berbeda, sehingga perlu dikaji karakteristik dari masing-masing elit non politik yang terlibat dalam gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa ini.

Perbedaan karakter yang dimiliki oleh elit non-politik ini sangat berhubungan dengan sumber daya yang dimilikinya. Maka penting sekali untuk mengkaji mengenai sumber daya apa saja yang digunakan oleh elit non-politik untuk mempertegas tujuan kelompoknya tersebut.

Karena merupakan gerakan sosial, secara teoritis, model demokrasi ini menihilkan peran elit, sehingga belum menjawab secara layak bagaimana kelompok sosial dalam NSM ini diorganisir oleh elit non-politik.

Karena gerakan yang berfokus pada kebaruan kultural dan sosial, sehingga kajian NSM selama ini belum dapat menjelaskan secara rinci bagaimana cara kelompok sosial yang dipimpin oleh elit non-politik ini melakukan interaksi dengan elit negara atau aktor dan elit politik.

Untuk membuat sebuah model dari kasus gerakan sosial dalam penolakan reklamasi Teluk Benoa ini juga perlu diketahui hambatan-hambatan yang ditemukan oleh elit non politik selama melakukan perjuangannya, sehingga dapat terlihat bagaimana fleksibilitas dan kemampuan model ini dalam mempengaruhi sebuah agenda politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *grounded research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap berbagai kelompok masyarakat di Bali yang terkait dalam masalah reklamasi Teluk Benoa, yang mencakup beberapa kategori yaitu Tokoh Agama, Tokoh Desa Pakraman, Akademisi, Pebisnis, Tokoh Pemuda, Seniman, Budayawan dan Aktivistis. Tim Peneliti juga melakukan observasi lapangan ke Teluk Benoa pada tanggal 23 – 27 Mei 2016. Selain itu juga dilakukan penelusuran data sekunder baik dari buku, jurnal maupun berita media massa.

Analisa data dilakukan dengan cara memilah data yang relevan dengan penelitian, kemudian mengelompokkan dalam kategori sesuai dengan rancangan isi laporan dan tujuan penelitian, melakukan analisis terhadap temuan-temuan dan menghasilkan simpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Bali Tolak Reklamasi (BTR) merupakan gerakan yang dapat merubah pandangan tentang dualisme budaya dan politik di Bali. Melalui gerakan ini dapat dibuktikan bahwa masyarakat Bali dapat terlibat dalam kegiatan politik, namun tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang mereka anut selama ini. Gerakan ini sudah berlangsung selama 3 tahun (sejak 2013 s/d 2016) dan dapat dikatakan sebagai gerakan terbesar di Bali setelah reformasi. Gerakan ini bukan hanya merubah pandangan mengenai budaya dan politik di Bali, namun juga merubah struktur kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat Bali.

Untuk dapat memahami perubahan tersebut, perlu kiranya pembahasan mengenai kondisi masyarakat Bali kontemporer

Kondisi Masyarakat Bali Kontemporer

Ledakan pertumbuhan penduduk ditambah meningkatnya transmigran dari luar pulau Bali, membuat kompetisi hidup di Bali menjadi semakin ketat. Diantara masalah-masalah hidup lainnya, survivalitas kini telah menjadi prioritas utama sehingga membawa beberapa perubahan di masyarakat Bali. Hal ini terutama terjadi di wilayah perkotaan dan destinasi pariwisata.

Etos kerja masyarakat Bali saat ini menjadi super sibuk. “*Time is money*” istilah mereka saat ini. Perubahan ini terjadi akibat perubahan mata pencaharian yang begitu drastis dan ledakan angkatan kerja yang mengakibatkan kompetisi menjadi begitu ketat. Libur sehari untuk menengok upacara keluarga misalnya, dapat berakibat hilangnya jatah antrian

mengantar wisatawan di hotel. Hal itu mengakibatkan hampir sudah tidak ada waktu lagi untuk ‘menyama-braya’ atau bertegur sapa. Melihat orang bertegur sapa di jalanan, saat ini, adalah kejadian langka, ajaib, atau malah dipandang aneh. “terlalu basa-basi, lebihan tutur,” kata orang Bali.

Orang Bali saat ini juga cenderung pragmatis. Kalau sudah urusan uang/harta tak ada istilah “lek” (malu, sungkan). Hal ini bisa dilihat dari perilaku para pedagang souvenir di daerah wisata, yang kerap setengah memaksa wisatawan untuk membeli barang dagangannya. Ajakan “Lan dum pada mebedik” (=meskipun sedikit ayo kita bagi bersama) sudah kian jarang terdengar. Individualisme mendominasi kebersamaan. Keuntungan diri sendiri dan kelompok adalah segalanya. ‘Pang kuala untung’ (=yang penting untung), ‘pang kuala maan pis’ (yang penting dapat uang), ‘pang kuala menang’ (=yang penting menang), dan akhirnya ‘pang kuala misi kenehe’ (=yang penting segala ambisi keturunan) menjadi istilah yang banyak didapatkan dari masyarakat Bali saat ini.

Dalam aspek agama, saat ini muncul sekte-sekte baru diantara penganut Hindu sendiri. Kesadaran sebagian masyarakat Bali untuk “kembali ke Hindu murni” yang berpusat di India, justru menimbulkan sekte-sekte. Bahkan konon ada yang sampai tidak ‘mesebelan’ (berdukacita) ketika ada anggota keluarga beda sekte meninggal.

Dalam aspek ekonomi, Bali menjadi semakin tergantung pada industri pariwisata, yang terutama dipicu oleh peningkatan kedatangan turis asing secara langsung. Ledakan turis memberikan dampak langsung pada lingkungan, ekonomi, dan relasi sosial. Terjadi peningkatan tajam jumlah kamar hotel, restoran, toko seni, dan ruko. Akibatnya setiap tahun 1.000 hektar sawah menghilang. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 8%, Bali mengalami transisi dari ekonomi agraris ke ekonomi turis perkotaan.

Namun ada yang tidak berubah di Bali saat ini, yaitu budaya politiknya. Hingga kini, budaya politik masyarakat Bali masih menganut konsep kepemimpinan dan partisipasi yang didasarkan pada budaya konsep paternalistik/*patron-client*. Budaya paternalistik mengacu pada adanya sikap bertindak setelah melihat tindakan atau pilihan orang yang dituakan atau dihormati (pimpinan atau tokoh masyarakat). Masyarakat melakukan tindakan berdasarkan saran, arahan, atau perilaku pemimpin mereka.

Pandangan masyarakat Bali, terutama kalangan orang tua, terhadap politik juga masih cenderung negatif. Politik menjadi hal yang tabu untuk diperbincangkan.

Politik dianggap sebagai sesuatu yang kotor, perlu dihindari, cermin kelicikan, amoral, penuh darah dan kekerasan. Sindrom tabu politik ini tidak dapat dilepaskan dari peristiwa kekerasan politik yang terjadi di Bali pasca tragedi nasional 30 September 1965. Pembunuhan massal terhadap pengurus dan simpatisan PKI di Indonesia, termasuk di Bali, menimbulkan trauma yang mendalam bagi masyarakat Bali. Meskipun demikian, mekanisme penyampaian pendapat dalam lingkup desa atau banjar tetap terjaga melalui paruman (pertemuan) di tingkat desa/banjar yang kemudian akan diteruskan oleh prajuru desa kepada pemerintah.

Sejarah dan Dinamika Gerakan Bali Tolak Reklamasi

Isu tentang reklamasi Teluk Benoa mulai menjadi bahan pembicaraan di masyarakat Bali pada awal tahun 2013, setelah beberapa media santer memberitakan tentang rencana pembangunan sirkuit F1 di kawasan Teluk Benoa. Sejak saat itu kelompok aktivis lingkungan, mulai menelusuri kebenaran rumor tersebut. Akhirnya mereka mendapatkan kebenaran tentang isu rencana reklamasi Teluk Benoa setelah berhasil mendapatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor 2138/02-CL/HK/2012 Tentang Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa pada bulan Juli 2013. SK Gubernur itu memberikan izin kepada PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI) untuk melakukan reklamasi di perairan Teluk Benoa Kabupaten Badung Propinsi Bali seluas 838 Hektar (www.forbali.org).

Setelah SK tersebut menyebar luas di media massa dan juga media sosial, muncul reaksi dari masyarakat yang mempertanyakan sikap pemerintah daerah yang terkesan sembunyi-sembunyi dalam mengeluarkan kebijakan tersebut lantaran SK tersebut dikeluarkan pada 26 Desember 2012. Hal ini lantas mengundang aksi demonstrasi penolakan reklamasi Teluk Benoa dari berbagai kalangan, terutama dari kelompok aktivis lingkungan hidup yang dimotori oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali.

Akibat maraknya penolakan masyarakat tersebut, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika pada 16 Agustus 2013 akhirnya menerbitkan SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa sekaligus mencabut SK Gubernur Bali Nomor 2138/02-C/HK/2012. Dalam SK baru tersebut pemerintah daerah tetap memberikan hak kepada PT. TWBI untuk melakukan kegiatan reklamasi berupa kegiatan studi kelayakan di Teluk Benoa.

Munculnya SK Gubernur Bali yang baru tidak lantas meredakan polemik di masyarakat tentang rencana reklamasi Teluk Benoa. Walhi Bali beserta jaringan

LSM di Bali saat itu tetap bersikeras bahwa SK Gubernur Bali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No 45 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA (Denpasar-Badung- Gianyar- Tabanan), dimana kawasan Teluk Benoa termasuk kawasan konservasi, serta Perpres No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang melarang reklamasi dilakukan di kawasan konservasi.

Saat itu penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa dilakukan oleh jaringan aktivis lingkungan yang telah membentuk aliansi bernama KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup) Bali. Beberapa LSM yang tergabung dalam KEKAL Bali saat itu adalah Walhi Bali, Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) Bali, Bali Outbound Community, BEM Universitas Hindu Indonesia, dan PPMI DK Bali. KEKAL Bali mengadakan aksi demonstrasi pertama untuk menolak reklamasi Teluk Benoa pada 31 Juli 2013 di depan kantor Gubernur Bali. Saat itu peserta aksi hanya berjumlah sekitar 30 orang. (Hasil wawancara dengan informan pemuda STT Banjar)

KEKAL Bali sendiri sebenarnya terbentuk sejak Oktober 2012 untuk merespons kebijakan Gubernur Bali yang menerbitkan izin perusahaan pariwisata alam di kawasan Mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai. KEKAL Bali juga turut menggelar aksi demonstrasi penolakan terhadap pembangunan jalan tol yang dibangun di atas perairan Teluk Benoa yang saat ini menjadi tol Bali Mandara.

Sejak demonstrasi penolakan reklamasi Teluk Benoa yang pertama dilakukan atas nama KEKAL Bali, para aktivis kemudian memperluas jaringan dengan cara menghimpun organisasi LSM lingkungan, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa dan juga grup band musik untuk mendukung aksi mereka. Dari beberapa pertemuan konsolidasi tersebut lahirlah ide untuk membuat nama aliansi baru dengan nama ForBALI yang awalnya diartikan sebagai Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi. Nama ForBALI pertama kali muncul saat mereka melaporkan Gubernur Bali dan DPRD Bali ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi atas keluarnya SK Reklamasi Teluk Benoa pada tanggal 23 Agustus 2013. Proses perubahan dari nama aliansi dari KEKAL menjadi ForBALI praktis hanya berjalan kurang dari 1 bulan.

Dalam dokumen surat ForBALI ke Ombudsman tersebut tertera nama-nama lembaga yang tergabung dalam ForBALI mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan lembaga yang tergabung dalam aliansi KEKAL Bali. Bahkan KEKAL Bali sendiri masuk sebagai bagian dari ForBALI. Adapun lembaga yang tergabung di ForBALI adalah

FRONTIER (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali), KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup Bali), GEMPAR Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi Teluk Benoa), WALHI Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) Bali, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbound Community, Penggak Men Mersi, BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Bali, PPMI DK Denpasar, Eco Defender, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Superman Is Dead, Navicula, Devildice, Dialog Dini Hari, Ganjil, Nymphaea, The Dissland, The Sneakers, The Hydrant, Goldvoice, Rootsradical, The Brews, Blackened, Ripper Clown, Scared of Bumbs, Suicidal Sinatra, Ugly Bastard, Steel Bone Rigid, Rollfast, Suitcase for Kennedy, Tha Kantin, Ska Teenagers Punk, Durhaka, Refugee, Hyena Wants a Party, Patrick The Bastard, The Room, Billy Bob Cats.

Daftar anggota ForBALI tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu organisasi LSM, organisasi mahasiswa, dan grup band musik. Grup band musik yang bergabung memang mayoritas beraliran musik underground. Hal itu menunjukkan bahwa sejak awal ForBALI ingin membentuk persepsi bahwa gerakan mereka adalah gerakan anak muda yang populis.

Sejak saat itu ForBALI terus mengadakan aksi demonstrasi turun ke jalan dan secara bersamaan mengkampanyekan tolak reklamasi Teluk Benoa melalui media sosial seperti website, facebook, twitter, instagram dan youtube. Tuntutan mereka saat itu adalah cabut SK Gubernur Bali Nomor 1727/01-B/HK/2013. Dari waktu ke waktu peserta demonstrasi kian bertambah baik dari segi jumlah maupun variasi kelompok masyarakat, seperti bergabungnya Sekaa Teruna Teruni (STT), banjar adat, dan desa adat. ForBALI juga mengembangkan jaringan ke beberapa provinsi lain seperti DKI Jakarta, Bandung, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat melalui jaringan Walhi dan aktivis lainnya untuk menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Bahkan melalui penampilan beberapa grup band musik seperti Superman Is Dead (SID), Nosstress dan Navicula yang mendapat kesempatan bermain musik di luar negeri, mereka jugamenyelipkan isu penolakan reklamasi Teluk Benoa sehingga isu ini menjadi perbincangan di dunia internasional.

ForBALI sangat memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan juga publikasi gerakan. ForBALI selalu mendokumentasikan dan mengunggah (upload) foto dan video aksi-aksi demonstrasi ke berbagai akun media sosial yang

mereka buat yaitu Twitter (@forBALI13), Instagram (@forBALI13), fanpage Facebook (@forbali13) dan Youtube (ForBALI). Bahkan beberapa musisi Bali yang menolak reklamasi berkolaborasi menciptakan videoklip musik berjudul “Bali Tolak Reklamasi” yang diunggah di laman Youtube ForBALI. Musik tersebut selalu dinyanyikan setiap aksi demonstrasi sehingga menjadi lagu mars ForBALI.

Kuatnya desakan ForBALI menolak reklamasi Teluk Benoa yang disebabkan oleh lemahnya dan saling berlawanan dasar kebijakan peraturan perundang-undangan, akhirnya membuat pemerintah pusat melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres No 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA pada tanggal 30 Mei 2014.

Perpres no.51 tahun 2014 tersebut intinya mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Penerbitan Perpres No 51 Thn 2014 menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres No 45 Thn 2011 serta mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa “sebagian” pada kawasan konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut. Hal tersebut menyebabkan kawasan konservasi di wilayah SARBAGITA menjadi berkurang luasannya. Pasca penerbitan Perpres 51 tahun 2014 kemudian PT. Tirta Wahana Bali International (PT. TWBI) juga mengantongi izin lokasi reklamasi nomor 445/MEN-KP/VIII/2014 dari Menteri Kelautan dan Perikanan di kawasan perairan Teluk Benoa yang meliputi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali seluas 700 hektar.

Keluarnya Perpres no.51 Tahun 2014 menyebabkan isu yang diusung ForBALI dalam aksi demonstrasi berubah dari cabut SK Gubernur Bali 1727 menjadi cabut Perpres no.51 Tahun 2014. Singkatan ForBALI pun mendapat tambahan kata “Teluk Benoa” menjadi Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa untuk menegaskan fokus perjuangan ForBALI hanya pada soal reklamasi Teluk Benoa. (Hasil wawancara dengan informan Koordinator ForBALI)

ForBALI terus meningkatkan intensitas aksi demonstrasi turun ke jalan. Hampir setiap minggu terdapat kegiatan aksi demonstrasi penolakan reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh banjar adat atau desa adat yang mendeklarasikan diri secara resmi bergabung dalam gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa. Aksi-aksi tersebut dikemas dengan parade budaya, melalui penampilan tari-tarian, pawai ogoh-ogoh dan pagelaran musik, serta pemasangan baliho di sudut jalan strategis.

Desa adat yang bergabung dalam gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa pun semakin bertambah jumlahnya. Awalnya hanya 9 desa adat yang bergabung secara resmi menolak reklamasi Teluk Benoa. Lalu pada aksi demonstrasi tanggal 28 Februari 2016 yang diadakan di perairan Teluk Benoa dan tol Bali Mandara tercatat sebanyak 19 desa adat yang bergabung secara resmi. Sebulan berikutnya pada aksi demonstrasi 20 Maret 2016 jumlah desa adat yang bergabung dalam gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa meningkat menjadi 25 desa adat. Pada aksi berikutnya 29 Mei 2016 jumlah desa adat yang bergabung meningkat menjadi 36 desa adat. Pada aksi 25 Agustus 2016, sebanyak 38 desa adat melakukan aksi demonstrasi ke DPRD Provinsi Bali. (Hasil wawancara dengan informan Ketua Pasubayan Desa Pakraman Tolak Reklamasi)

Sejak aksi 20 Maret 2016 para desa adat sudah membentuk sebuah perkumpulan yang bernama Pasubayan Desa Adat/Pakraman Tolak Reklamasi. Sejak saat itu setiap aksi demonstrasi menolak reklamasi Teluk Benoa, nama yang digunakan bukan ForBALI lagi melainkan Pasubayan Desa Adat/Pakraman Tolak Reklamasi. Berdasarkan keterangan dari informan I Wayan Swarsa selaku ketua Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi, proses pembentukan Pasubayan tersebut terjadi pada selang waktu antara aksi tanggal 28 Februari 2016 hingga aksi tanggal 20 Maret 2016:

Bergabungnya desa adat dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa murni keputusan masing-masing desa adat untuk aksi demonstrasi. Bendesa Adat tidak bisa memaksakan desa adatnya untuk bergabung. Setiap desa adat memiliki mekanisme pengambilan keputusan sendiri-sendiri. Terbentuknya Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi menjadikan tongkat komando aksi beralih dari jaringan kelompok aktivis lingkungan kepada masyarakat adat Bali. Hal itu menunjukkan keberhasilan kelompok aktivis lingkungan mentransformasi gerakan aktivis LSM menjadi gerakan sosial masyarakat Bali.

Peran Elit Non-Politik

Dalam hal reklamasi/revitalisasi Teluk Benoa, terdapat dua kelompok masyarakat yang berbeda pendapat. Satu kelompok menolak reklamasi dengan serangkaian argumentasi kritis (pengrusakan lingkungan, pelanggaran kawasan suci, pelanggaran hukum), sementara satu kelompok lagi mendukung revitalisasi dengan argumentasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi masyarakat Bali saat ini lebih mengemuka isu penolakan reklamasi Teluk Benoa sehingga membuat suara kelompok pendukung revitalisasi tidak bergema.

Meningkatnya isu penolakan reklamasi Teluk Benoa, tidak dapat dilepaskan dari peran elit non-politik yang ada. Berikut identifikasi peran elit non-politik dalam isu penolakan reklamasi Teluk Benoa:

Tokoh Agama

Tokoh agama yang terlibat dalam gerakan BTR ini adalah tokoh agama Hindu. Tokoh agama memiliki visi untuk mereformasi lembaga keagamaan yang ada di Bali sehingga tidak hanya berbicara mengenai peribadatan, tapi juga terlibat dalam isu-isu sosial masyarakat. Tokoh agama memiliki modal kultural yang sangat kuat, karena apa yang disabdakan oleh mereka akan dilaksanakan oleh masyarakat karena dianggap sebagai fatwa yang harus diikuti.

Alasan tokoh agama di Bali ikut serta dalam gerakan BTR adalah bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan suci yang perlu dijaga kesuciannya. Aktivitas yang dilakukan oleh tokoh agama ini adalah mengkampanyekan pentingnya memelihara kesucian Teluk Benoa dan mengembalikan Bali pada konsep Tri Hita Karana dengan maksud untuk menjaga keseimbangan antara ketuhanan, kehidupan bermasyarakat, dan keseimbangan alam. Melalui pesamuhan Sabha Pandita, para tokoh agama mengeluarkan keputusan bahwa Teluk Benoa merupakan wilayah suci.

Tokoh Desa Pakraman

Modal utama yang dimiliki seorang Bendesa Adat/Pakraman adalah pengetahuan mengenai adat istiadat dan nilai-nilai sastra agama Hindu Bali. Bendesa adat ini memiliki tingkatan yang sama dengan pendeta/pemuka agama di desa. Hal ini memberikan kekuatan bagi bendesa untuk mempengaruhi dan membuat kebijakan pada masyarakat desanya secara langsung. Selain itu, Bendesa juga memiliki otoritas perijinan usaha di desanya.

Pada dasarnya, desa-desa yang telah menyatakan diri tergabung dalam gerakan BTR tidak memutuskan hal ini sendiri. Keputusan untuk bergabung dalam gerakan BTR dilaksanakan dengan mekanisme demokrasi yang memerlukan waktu yang panjang. Kebanyakan dari desa pakraman yang bergabung dengan gerakan BTR mendapatkan masukan dari Seka Truna-Truni (STT) dan Keliyan yang ada di setiap Banjar di Desanya. Apabila seluruh banjar di desa pakraman tersebut menyatakan diri sudah setuju untuk ikut bergabung dengan gerakan BTR, maka dilaksanakan deklarasi. Tujuan utama dari bendesa ikut serta dalam pergerakan BTR adalah untuk menjaga kesucian Teluk Benoa.

Salah satu bendesa yang paling berpengaruh dalam gerakan ini adalah Bendesa adat Kuta, karena bukan hanya dapat mempengaruhi masyarakat di desanya,

Bendesa ini juga merupakan Bendesa Alit yang membawahi desa-desa lain se-kecamatan, sehingga mampu mengorganisir desa-desa pakraman yang ikut dalam gerakan BTR dalam Pasubayan Desa Pakraman Tolak Reklamasi. Ada hal baru yang dilakukan oleh elit Bendesa ini, yaitu bagaimana bendesa mengorganisasikan desa-desa pakraman yang terlibat dalam gerakan BTR yang sejatinya desa-desa tersebut bersifat otonom.

Akademisi

Pada dasarnya, akademisi di Bali terpecah pada dua opini, pro dan kontra terhadap reklamasi Teluk Benoa. Akademisi-akademisi yang terlibat gerakan BTR rata-rata merupakan akademisi yang masih memegang teguh budaya Bali dan juga sangat menghormati demokrasi, karena itulah yang menjadi alasan akademisi tersebut bergabung dalam gerakan BTR. Mereka mempercayai bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan suci yang harus dilindungi, dan mereka adalah orang-orang yang ingin mempertahankan kearifan lokal Bali.

Modal yang dimiliki oleh akademisi ini bisa dikatakan cukup lengkap, karena mereka memiliki modal sosial, modal kultural, modal ekonomi, dan modal politik yang cukup kuat, sehingga memiliki pengaruh sangat kuat di masyarakat. Dalam pergerakannya, akademisi ini melakukan aktivitasnya dengan cara lazimnya seorang ilmuwan, yaitu terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka advokasi gerakan ini. Selain menjadi narasumber dalam seminar-seminar dan televisi, elit akademisi melakukan pendekatan secara langsung kepada elit politik nasional yaitu dengan menemui menteri KKP dan Menteri Lingkungan Hidup.

Pebisnis

Para pengusaha di kawasan Teluk Benoa merupakan kelompok yang langsung terpengaruh terhadap rencana reklamasi ini dengan alasan persaingan. Selain memiliki modal ekonomi, para pengusaha ini juga rata-rata memiliki modal lain, terutama modal sosial dan modal kultural. Modal sosial biasanya mereka dapatkan karena keterlibatan mereka dalam berbagai organisasi, terutama organisasi para pengusaha, sedangkan modal kultural mereka dapat karena kebanyakan dari para pengusaha ini juga merupakan para pemuka adat.

Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan pemikiran terbuka, komunikatif, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di Bali. Karena itu, alasan mereka ikut dalam pergerakan BTR juga karena alasan tersebut. Mereka menganggap bahwa dengan adanya reklamasi di Teluk Benoa maka akan menyebabkan Bali semakin kehilangan identitas budayanya. Pengusaha ini terlibat dalam gerakan BTR dengan memberikan donasi.

Tokoh Pemuda

Tokoh pemuda merupakan salah satu aktor yang cukup berpengaruh dalam gerakan ini. Pemuda yang menjadi elit dalam pergerakan ini rata-rata merupakan pemuda yang memiliki modal sosial, karena mereka biasanya merupakan ketua dari Sekaa Truna Truni di Banjarnya, sehingga mereka merupakan pemuda yang mengetahui bagaimana melaksanakan adat istiadat dan mekanisme pengambilan keputusan di Banjar maupun di Desanya. Mereka adalah pemuda yang berpikiran terbuka dan berwawasan luas, serta menginginkan perubahan Bali menjadi lebih baik tanpa meninggalkan adat istiadat mereka.

Mereka cukup dekat dengan para aktivis, terutama aktivis '98 yang ikut berperan dalam menumbangkan Orde Baru juga aktivis lingkungan di Bali. Mereka terlibat dalam komunitas taman '65 dan seringkali ikut aksi-aksi dengan tema lingkungan yang dilakukan oleh Walhi sehingga terbentuk ForBALI. Para pemuda inilah yang kemudian mengajak pemuda-pemuda lain di lingkungannya untuk bergabung dalam gerakan ini. Setelah mereka bersepakat, para pemuda ini kemudian mengajukan kepada Banjar dan Desa Pakraman untuk dapat ikut serta dalam gerakan BTR.

Sebagai generasi yang melek teknologi, para pemuda ini juga yang ikut mempromosikan gerakan BTR ini melalui sosial media. Metode yang mereka lakukan adalah cara-cara berjuang yang menyenangkan, sehingga banyak orang yang tertarik dengan gerakan ini.

Pada dasarnya para pemuda ini memiliki kegelisahan akibat kebijakan pariwisata yang diskriminatif dan memarginalkan masyarakat Bali. Mereka tidak merasakan benefit yang ditawarkan oleh pemerintah dari industri pariwisata, mereka menyadari bahwa masih banyak masyarakat di lingkungannya yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, gerakan BTR ini sebenarnya bukan hanya sekedar menyoal penolakan reklamasi, namun mereka mengharapkan adanya perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah sehingga lebih berpihak pada masyarakat Bali dan tidak hanya melindungi atau mementingkan kepentingan pemodal di Bali. Dengan demikian, tujuan mereka ikut serta dalam gerakan BTR bukan hanya karena kerusakan lingkungan yang akan dialami Bali bila melakukan reklamasi di Teluk Benoa, tapi juga akan merusak tatanan sosial di Bali.

Perubahan yang diciptakan oleh para pemuda ini adalah bahwa STT yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai pembantu dalam setiap pelaksanaan upacara adat, kini menjadi lebih aktif dalam merespon isu-isu sosial dan politik di Bali.

3. Seniman

Seniman merupakan salah satu tokoh penting dalam pergerakan ini. Seniman-seniman yang tergabung dalam gerakan BTR biasanya merupakan seniman yang memiliki pandangan yang luas dan berkesenian dalam rangka menyuarakan isu-isu politik dan lingkungan, sehingga biasanya mereka memiliki basis penggemar yang sangat kuat, dan inilah yang menjadi modal mereka untuk menjadi eli dalam gerakan ini. Penggemar mereka yang bukan hanya dari Bali, menyebabkan gerakan ini menjadi terkenal dan diikuti oleh masyarakat di luar Bali, bahkan masyarakat di luar negeripun ikut terlibat dalam gerakan ini akibat dari kampanye yang dilakukan oleh para seniman ini.

Seniman yang ikut melakukan pergerakan bukan hanya musisi, namun juga perupa dan seniman lukis. Mereka terus menyuarakan ide-ide mereka dalam gerakan BTR ini melalui karya-karya mereka.

Para seniman ini biasanya mendapatkan informasi mengenai gerakan ini dari aktivitas mereka di taman '65, selain itu mereka juga sering bergaul dengan para aktivis yang ada di Bali dalam kegiatan pagelaran musik, sehingga mereka selalu mendapatkan update mengenai perkembangan sosial politik di Bali. Para seniman ini biasanya merupakan seniman-seniman yang idealis baik itu idealis dalam bermusik maupun juga dalam pandangan sosial politik. Mereka adalah anak muda-anak muda yang peka terhadap kondisi sosial politik di Bali.

4. Budayawan

Budayawan merupakan salah satu yang terganggu dengan adanya rencana reklamasi Teluk Benoa ini. Budayawan merupakan salah satu tokoh yang dihormati di Bali, sehingga mereka memiliki modal sosial yang cukup untuk dapat mempengaruhi masyarakat di Bali. Kekhawatiran mereka adalah dengan industry pariwisata yang semakin masif di Bali akhir-akhir ini telah merubah wajah Bali yang dulu terkenal karena kebudayaannya menjadi kehilangan "ruh-nya".

Para budayawan selain melakukan kajian-kajian budaya dan banyak membuat tulisan mengenai dampak negatif dengan adanya reklamasi di Teluk Benoa, juga kerap mengadakan pagelaran seni. Salah satu pesan dari budayawan di Bali mengenai reklamasi Teluk Benoa adalah "Mari lawan reklamasi dengan deklamasi", maka dari itu, banyak karya-karya dari budayawan di Bali yang berisi penolakannya terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

5. Aktivis

Yang menjadi motor dalam gerakan BTR ini adalah para aktivis. Salah satu aktivis yang paling berperan adalah aktivis '98 yang juga merupakan aktivis lingkungan. Beliau memiliki modal sosial yang

sangat kuat karena jaringan yang dimilikinya, baik itu di Bali, pada tataran nasional, maupun internasional. Selain itu, sebagai orang Bali asli, beliau diuntungkan karena dengan demikian beliau juga memiliki modal kultural yang cukup untuk dapat mempengaruhi masyarakat Bali. Aktivis ini beranggapan bahwa selama ini kebijakan-kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah telah banyak mengorbankan lingkungan hidup.

Karena sudah aktif dalam penyelamatan lingkungan hidup, maka aktivis ini dapat dianggap sebagai inisiator dari gerakan BTR dengan dibentuknya Komite Kerja Advokasi Lingkungan (Kekal), hingga akhirnya menjadi ForBALI. Kelompok yang dipengaruhi oleh aktivis ini terutama adalah para pemuda dari STT Banjar-banjar, Keliyan Banjar, kelompok aktivis yang lain, makasiswa, seniman, dan budayawan Bali. Jalur pergerakan yang digunakan oleh aktivis ini adalah dengan cara melakukan pendekatan kepada para pemuda, mahasiswa, aktivis, para pengurus STT, dan kelompok musisi yang biasa mengadakan pertemuan di taman '65. Kelompok ini kemudian melakukan aksi-aksi simpatik dan damai dengan bentuk pawai budaya dan pagelaran musik, sehingga semakin banyak yang tertarik dengan gerakan ini. Aktivis ini juga melakukan advokasi kepada para pengurus desa dan mendorong STT dan keliyan Desa sehingga membuat Desa Pakraman ikut bergerak.

Selain melakukan rekrutmen, aktivis ini juga selalu ambil bagian secara langsung untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk meyakinkan mereka untuk segera membatalkan kebijakan reklamasi Teluk Benoa.

Hal baru yang dibawa oleh aktivis ini ke dalam pergerakan BTR adalah strategi baru yang digunakan dalam gerakan tolak reklamasi ini, yakni pendekatan kepada anak muda, mengemas demonstrasi sebagai pawai budaya dan pagelaran musik, memaksimalkan media sosial dalam kampanye serta pada akhirnya menyerahkan komando pada Pasubayan Desa Adat.

Kondisi Sosial Yang Mendukung Gerakan

Membesarnya gerakan Bali Tolak Reklamasi ini, selain dari upaya yang dilakukan oleh elit non-politik, juga didukung oleh kondisi sosial yang terjadi di Bali saat ini:

Pengalaman buruk reklamasi pulau Serangan Reklamasi Pulau Serangan terjadi pada awal tahun 90an. Rencana akan dibangun lapangan golf, resort, lagoon untuk sarana rekreasi air, yacht club, beach club house, pembangunan Superlot yang berupa villa, fasilitas penunjang pariwisata lainnya, serta marina/ferry dan jembatan penyeberangan dari

daratan pulau Bali ke Pulau Serangan. Reklamasi ini berhenti di tengah jalan karena krisis moner 1998. Reklamasi ini menimbulkan dampak buruk ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Hasil studi lapangan Lisa Woinarski (2002) menyatakan terdapat 3 dampak buruk yang ditimbulkan akibat reklamasi pulau Serangan, yaitu dampak lingkungan, dampak sosial budaya dan dampak ekonomi.

2. Kekecewaan Terhadap Pembangunan Pariwisata

Selain menyebabkan ketersingkiran masyarakat Bali dari tanahnya, pembangunan pariwisata Bali juga turut menyingkirkan masyarakat Bali dari pariwisata itu sendiri. Masyarakat Bali tidak dapat menikmati tempat-tempat wisata yang ada. Di wilayah wisata bertaraf internasional dimana banyak turis asing disana, wilayah tersebut berubah menjadi eksklusif hanya bagi turis asing. Banyak pantai yang berada di wilayah perhotelan taraf internasional berubah menjadi *private beach* yang menyebabkan larangan bagi masyarakat lokal Bali untuk berkunjung ke pantai tersebut.

3. Gerakan Ajeg Bali

Setelah tragedi bom Bali 2001 muncul gerakan Ajeg Bali untuk mengembalikan dan melindungi budaya Bali dari pengaruh budaya luar yang dinilai merusak Bali. Orang-orang Bali menganggap dirinya sebagai kelompok minoritas religius, benteng agama Hindu yang terancam oleh ekspansi agresif agama Islam dan Nasrani. Proyek reklamasi Teluk Benoa dilihat sebagai ancaman infiltrasi budaya asing diluar Bali yang akan merusak budaya Bali itu sendiri.

4. Isu kawasan suci Teluk Benoa

Isu tentang kawasan suci Teluk Benoa ini berasal dari tulisan seorang ahli sastra Jawa Bali Kuno bernama Nyoman Sugi B. Lanus. Tulisan Sugi Lanus kemudian ditindaklanjuti oleh ForBALI dengan melakukan riset titik-titik yang menjadi kawasan suci di wilayah Teluk Benoa. Hasilnya, ditemukan 60 titik kawasan suci yang melingkupi wilayah pantai, loloan, campuhan, muntig dan palemahan beberapa desa di sekitar Teluk Benoa.

Munculnya isu kawasan suci Teluk Benoa inilah yang menjadi salah satu dasar keterlibatan desa adat dan juga dukungan tokoh agama hindu di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dalam gerakan tolak reklamasi. Pada pesamuhan Sabha Pandita April 2016, Parisada memutuskan Teluk Benoa sebagai kawasan suci, tanpa disertai tolak reklamasi Teluk Benoa. Keputusan PHDI itu membuat isu tentang kawasan suci menggaung lebih besar dan lebih kuat mempengaruhi masyarakat desa adat Bali.

SIMPULAN

Elit yang berpengaruh di Bali bukan hanya dari kalangan pemuka adat atau pemuka agama. Terbukti bahwa aktivis, seniman, dan tokoh pemuda menjadi

elit-elit yang berperan penting dalam menciptakan gerakan yang besar ini.

Pergerakan ini diinisiasi oleh berbagai jenis elit non-politik yang memiliki berbagai modal, baik itu modal sosial, modal kultural, modal politik, dan modal ekonomi, dengan demikian gerakan ini memiliki cukup kapasitas untuk menjadi gerakan yang besar dan mempengaruhi masyarakat.

Penolakan atas rencana reklamasi di Teluk Benoa yang dilakukan melalui gerakan yang damai dan harmonis dan jauh dari sifat kekerasan. Hal ini yang menyebabkan gerakan ini banyak mendapat simpati dari masyarakat dan berkembang menjadi gerakan yang semakin hari semakin membesar. Gerakan ini juga telah merubah cara pandang masyarakat Bali mengenai bagaimana cara mempertahankan kepentingan masyarakat karena mengangkat berbagai macam isu dan kepentingan masyarakat Bali.

Gerakan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa merupakan gerakan sosial yang tumbuh dan berkembang karena keresahan sosial yang terpendam selama ini terhadap kebijakan pembangunan pariwisata Bali yang massif dan bergantung pada pemodal besar sehingga merusak lingkungan, melanggar kawasan suci dan memarjinalkan masyarakat Bali sendiri.

Terdapat pergeseran ruang lingkup peran dan wewenang dari tokoh adat Bali, baik pemuda STT, keliyan banjar maupun bendesa adat, yang semula hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan upacara adat, berkembang pada isu sosial, ekonomi dan juga politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas dukungan dana hibah penelitian unggulan perguruan tinggi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang bersedia untuk diwawancarai yaitu Prof. Dr. I Wayan P. Windia, Guru Besar Hukum Adat Universitas Udayana; Prof. Dr. I Wayan Ardika, MA, Guru Besar Sastra dan Budaya Universitas Udayana; Dr. Anak Agung Gede Raka, Dosen Sastra dan Budaya Universitas Warmadewa; Drs. I Made Suantina, Dosen FISIP Universitas Warmadewa; Drs. I Nyoman Wiratmaja, M.Si, Dosen FISIP Universitas Warmadewa; I Nyoman Dhamantra, Anggota DPR RI asal Bali; Drs. I Ketut Wiyana, M.Ag, Ketua Pengurus Harian PHDI; I Putu Wirata Dwikora, Ketua Sabha Walaka PHDI; I Wayan "Gendo" Suardana, Koordinator ForBALI; I Nyoman Subudi, Ketua Yayasan Bumi Bali Bagus; I Wayan Swarsa, Bendesa Adat Kuta dan Koordinator Pasubayan Desa Pakraman Tolak Reklamasi; Made Wijaya, SE,

Bendesa Adat Tanjung Bena; Beberapa pemuda STT Banjar Desa Kesiman (Hadhi Kusuma, Adi Aprianta, Tedy Mahendra, Bayu Aditya); Gede Roby: Personil Grup Band Navicula; Man Angga: Personil Grupband Nosstress; Wayan "Jengki Sunarta, Budayawan Bali; I Gusti Wisatawan, Seniman Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Bottomore, TB. 2006. *Elites and Society*. Edisi Terjemahan. Jakarta: Akbar Tandjung Institute
- Dumhoff, G.W. 1990. *The Power Elite and the State: How Policy is Made in America*. New York: Aldine de Gruyter, Hawthorne.
- Foweraker, Joe. 1995. *Theorizing Social Movement*. Colorado: Pluto Press
- Mariana, Dede, dan Caroline Paskarina. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhasim, Moch. 2005. *Konflik antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: LIPI
- Suacana, I Wayan Gede. 2013. *Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa*. Surabaya: Revka Petra Media bekerjasama dengan Warmadewa University Press dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Pengurus Cabang Bali
- Suacana, I Wayan Gede. 2016. *Budaya Demokrasi Dalam Pemerintahan Desa di Bali*. Ponorogo: Penerbit Wade Group
- Varma, SP. 1987. *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pers
- Zuhro, Siti. 2009. *Demokrasi Lokal, Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*. Yogyakarta: Ombak
- Azhar, Muhammad Ali. 2013. *Marginalisasi Masyarakat Di Daerah Pariwisata, Studi Kasus di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.4, No.2, Juli-Desember 2013, hal.166-176
- Fawzia, Diana. 2012. *Peran Elit Bukan Politik dan Dasar Berperspektif Gender: Kajian KES di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah*. Disertasi. Universitas Kebangsaan Malaysia
- Linz, Juan J dan Alfred C Stepan. 1996. *Towards Consolidated Democracies*. Journal of Democracy Volume 7. No 2. Hal 14-33
- Mihardja, Deni. 2013. *Adat, Budaya Dan Agama Lokal, Studi Gerakan Ajeg Bali Agama Hindu Bali*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 7 Nomor 1, Juni 2013, hal 53 - 77
- Morlino, Leonardo dan Tarchi Marco. 1996. *The Dissatisfied Society: The Roots of Political Change in Indonesia*. European Journal of Political Research Volume 30 Issue
- Morlino, Leonardo. 2009. *Legitimacy and The Quality of Democracy*. International Social Science Journal Volume 60, Issue 196
- Pramana, Gede Indra. 2015. *Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2, Juli 2015, hal. 59-72
- Suacana, I Wayan Gede. 2015. *Nilai-nilai dan Parameter Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali*. JURNAL KAJIAN BALI Volume 05, Nomor 01, April 2015, hal 81-106
- Suryawan, I Ngurah. 2010. *Politik Kekerasan (Para Jagoan) dan Dendam di Bali*, Jurnal Antropologi Indonesia 1, hlm. 41-57
- Vergara, Garrido Luis. 2013. *Elites, Political Elites and Social Change in Modern Societies*. Revista De Sociología No. 28. Hal 30-49
- Woinarski, Lisa. 2002. *Pulau Serangan: Dampak Pembangunan pada Lingkungan dan Masyarakat*, Laporan Studi Lapangan, Universitas Muhammadiyah Malang bekerja sama dengan Australian Consortium For In-Country Indonesian Studies,

Perpustakaan Rakyat : Gerakan Emansipatoris dalam Mengembangkan Budaya Membaca dan Wacana Sosial

Dika Sri Pandanari, S.P
Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Pasca Sarjana Universitas Brawijaya
jeannedika@gmail.com

Abstrak

Budaya membaca dan pembentukan wacana sosial sering ditemui pada masyarakat kelas menengah keatas dan kalangan terdidik. Kelas sosial tersebut memiliki kesempatan lebih untuk bernalar, mengkritisi kebijakan maupun mendorong gerakan masyarakat. Selain itu, manusia memiliki naluri keingintahuan yang besar, sehingga ilmu menjadi perihai yang krusial bagi sebagian besar manusia. Beberapa tahun terakhir muncul berbagai komunitas baca dan perpustakaan masyarakat. Gerakan tersebut banyak ditemukan di sekitar kota pendidikan seperti Malang, Yogyakarta dan Bandung. Komunitas dan gerakan masyarakat ini bersifat emansipatoris, memiliki tujuan tertentu yaitu mencerdaskan masyarakat. Aktivitas dari komunitas-komunitas tersebut adalah mendorong masyarakat untuk rajin membaca, menulis atau berdialog. Tumbuhnya komunitas baca dan perpustakaan rakyat merupakan buah kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat umum. Fenomena ini merupakan bentuk sikap politik masyarakat dalam menjawab kebutuhan pengetahuan yang dirasa masih kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosial fenomenologis dan wawancara pihak terkait. Obyek studi utama dalam penelitian ini adalah komunitas baca dan perpustakaan rakyat terutama yang berada di Kota dan Kabupaten Malang. Tujuan utama dari penulisan ini ialah untuk mengkaji latar belakang pertumbuhan gerakan masyarakat tersebut dan implikasinya terhadap budaya membaca serta perkembangan wacana sosial. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa faktor bermunculannya fenomena ini adalah tingginya kesadaran masyarakat atas pentingnya budaya membaca bagi semua orang. Para penggerak umumnya memiliki pengalaman pada bidang ilmu pengetahuan dan ruang publik. Oleh sebab itu gerakan ini berupaya untuk selalu memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan budaya membaca dan berdialog. Bagi para penggerak, menyebarkan ilmu merupakan bentuk perlawanan terhadap kebodohan publik. Implikasi dari sikap politik masyarakat terhadap pendidikan

publik ini adalah terbentuknya jaringan komunitas antar daerah sehingga gerakan semakin meluas. Pengalaman masyarakat merupakan historisitas yang melahirkan kesadaran dan sikap nyata masyarakat demi melawan kemiskinan ilmu.

Kata Kunci: komunitas, perpustakaan, rakyat, emansipatoris, budaya, membaca, wacana, sosial

PENDAHULUAN

Komunitas dan gerakan masyarakat ini bersifat emansipatoris, memiliki tujuan tertentu yaitu mencerdaskan masyarakat. Aktivitasnya mendorong masyarakat untuk rajin membaca, menulis atau berdialog. Tumbuhnya komunitas baca dan perpustakaan rakyat merupakan buah kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat umum. Pertumbuhan perpustakaan rakyat merupakan pergerakan sosial dan walaupun kecil memiliki kekuatan politiknya sendiri. Secara garis besar perpustakaan rakyat mengusahakan masyarakat agar dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan lebih. Sementara itu Francis Bacon menyatakan *science is power*, dengan kata lain ilmu pengetahuan memiliki energinya sendiri untuk merubah sesuatu. Menurut Riyanto (2011,38) ilmu pengetahuan memiliki implikasi dan eksplikasi pada kekuasaan, karena definisi kekuasaan adalah definisi rasional. Kemudian Bakker dan Zubair (1990,23) memaparkan bahwa pengetahuan bercirikan kesadaran akan sebab musabab suatu keputusan, dengan kata lain kesadaran adalah yang membawa manusia kepada pertanggungjawaban atas suatu hal. Oleh karena kesadaran itu, para voluntir kemudian berusaha untuk membangun kesadaran masyarakat untuk ikut membaca, mempermudah akses bacaan dan merangsang kesadaran yang lebih luas lagi. Hal ini sejalan dengan pendapat Michel Foucault (2002,155) bahwa untuk menjadi seseorang intelektual berarti memiliki kesadaran atau menyadari seluruh kedirian kita.

Selain kegiatan membaca, komunitas membaca dan perpustakaan rakyat berusaha juga untuk membuka

suatu ruang publik bagi masyarakat. Ruang publik adalah sarana eksistensi diri dan identitas manusia secara individual untuk diambil sebagai purifikasi politik otentik (Arendt:1959:38). Ruang publik dapat merangsang penggunaan rasio manusia karena oleh karena ruang publik, manusia harus berhadapan dengan manusia lain. Rasionalitas yang ditumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat akan membawa dampak yang baik bagi sekitarnya. Perpustakaan sebagai salah satu sumber literasi merupakan perangkat sempurna untuk menumbuhkan rasionalitas.

Kita dapat menggolongkan rasionalisasi atas dua tingkat : *yang pertama* sebagai suatu proses kognitif yang melepaskan dan mengidentifikasi proses-proses sosial dari konteks 'tindakan'nya yang penuh makna, dan *yang kedua* sebagai suatu proses historis yang lebih luas, dalam mana proses-proses kognitif itu sendiri menjadi bagian dari pandangan-pandangan dunia, sistem-sistem makna dan kerangka untuk bertindak (Eyerman,1996.217)

Masyarakat dapat membaca, namun juga perlu untuk mengutarakan pemikirannya. Ide dan kreativitas memerlukan kesempatan dan ruang. Selain itu, apabila ada pertemuan diantara masyarakat, maka pengetahuan akan mudah diserap karena melalui proses dialogis. Menurut Freire hubungan dialogis sebagai praktek yang asasi untuk kodrat manusia dan untuk demokrasi di satu pihak, dan sebagai syarat epistemologis di lain pihak (2001. 07)

Perpustakaan rakyat dan komunitas literasi berjejaring, berkelompok kembali untuk membangun suatu forum komunikasi. Melalui forum ini semangat mereka saling terjaga. Terbentuknya jaringan ini merupakan pengimplementasian solidaritas antar kelompok. Kerjasama sebagai suatu ciri tindakan dialogis yang berlangsung hanya diantara pelaku-pelaku hanya tercapai melalui komunikasi (Freire,1985.182). Sebelumnya, kelompok – kelompok ini sudah menunjukkan solidaritasnya kepada masyarakat luas, para pembacanya. Solidaritas yang mereka lakukan, sebagai individu lalu menghubungkan diri dengan yang lain (Alisjahbana.1986,103).

Gerakan emansipatoris merupakan gerakan penyelamatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang sadar bahwa orang lain disekitarnya mengalami suatu ketertindasan. Dalam permasalahan sosial, banyak sekali jenis penindasan yang terjadi, terutama penindasan antar kelas. Kelas dalam hal ini bersangkutan dengan hak , kesejahteraan dan 'kesempatan-kesempatan hidup' (Tanter dan Young,1993.142).

Masyarakat Indonesia tidak malas untuk membaca. Hal ini dapat terlihat dari berapa banyak penulis, sastrawan, peneliti yang ada di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga mengkonsumsi berita dari berbagai media tulis baik cetak maupun *on line*. Masyarakat Indonesia, terutama yang memilih untuk hidup secara religius juga mempelajari (membaca) kitab-kitab, buku ajaran mengenai kepercayaan yang mereka anut. Kebutuhan dan keinginan masyarakat di Indonesia cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penerbit yang tersebar di seluruh Indonesia sejumlah kurang lebih 1399 penerbit¹.

Budaya membaca dan pembentukan wacana sosial sering ditemui pada masyarakat kelas menengah keatas dan kalangan terdidik. Kelas sosial tersebut memiliki kesempatan lebih untuk bernalar, mengkritisi kebijakan maupun mendorong gerakan masyarakat. Kelas menengah di Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu kemudian sebagian masyarakat kelas menengah yang mampu membeli buku dan mengakses pengetahuan secara luas berniat membagi ilmu tersebut melalui perpustakaan rakyat. Menurut Tanter dan Young (1993,143) kelas menengah bagi kebanyakan partisipan, merupakan suatu kategorisosial dalam arti sekaligus sebagai gaya hidup dan nilai-nilai: pelopor sekularisasi dan revolusi rasional.

Kesempatan hidup telah dinarasikan dalam Hak Asasi Manusia dimana kesempatan hidup diantaranya adalah kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.". Selain itu, manusia memiliki naluri keingintahuan yang besar, sehingga ilmu menjadi perihai yang krusial bagi sebagian besar manusia. Sehingga siapapun dapat mengusahakan peningkatan kualitas hidup atas dirinya dan orang lain.

Tidak hanya pada kelas menengah saja, namun kelas pekerja juga memiliki kemauan membaca yang besar. Justru minat baca dan keinginan untuk memperoleh pengetahuan menyebabkan masyarakat kelas ini melakukan tindak-tanduk emansipatoris yang kreatif. Demikian maka sesuai dengan pendapat bahwa persatuan kaum tertindas menyangkut solidaritas diantara mereka, tanpa mempedulikan kedudukan mereka masing-masing, persatuan ini pastilah memerlukan adanya kesadaran kelas

¹ Tercatat dalam daftar anggota IKAPI yang tertera pada <http://www.ikapi.org/2013-01-31-06-37-23/typgraphy>

(Freire,1985.190)

Tidak hanya kelas menengah yang mengusahakan namun juga kelas pekerja. Hal ini kembali lagi lahir dari kesadaran bahwa masyarakat sedang berada dalam penindasan dalam rangka memperoleh pengetahuan. Demikian selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Paulo Freire (1985) bahwa hanya jika kaum tertindas menemukan kaum penindas mereka, dan kemudian ikut terlibat dalam usaha terorganisasi bagi pembebasannya, maka mereka mulai dapat mempercayai diri sendiri. Karena aksi kebudayaan sebagai suatu proses keseluruhan dan menyeluruh, mendekati masyarakat secara keseluruhan dan tidak sekedar para pemimpinnya (Freire,1985.148).

METODE

Obyek formal dalam penelitian ini adalah komunitas baca dan perpustakaan rakyat terutama yang berada di Kota dan Kabupaten Malang, sebagai fenomena sentral yang hendak diamati. Sementara obyek materialnya merupakan latar belakang dari komunitas baca tersebut dan bagaimana perpustakaan rakyat ini terbentuk di dalam lokalitasnya masing-masing, serta hulu-hilir gerakan emansipatoris melalui perpustakaan rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosial fenomenologis (mengutarakan kenyataan sosial) dengan data yang diambil melalui proses wawancara pihak terkait. Dengan demikian, penulis berusaha mencari sinkronisasi dan inti dari pertumbuhan gerakan perpustakaan rakyat ini. Metode sosial fenomenologis berusaha mendeskripsikan seluruh perkembangan obyek yang diamati. Selanjutnya analisis dilakukan secara sistematis yang meliputi alasan berdirinya perpustakaan rakyat, perkembangan, dan harapan para pelaku komunitas atau perpustakaan rakyat. Terdapat tiga komunitas dan perpustakaan rakyat yang diwawancarai secara langsung oleh penulis, dan sisanya merupakan data sekunder hasil Forum Group Discussion yang dilakukan bersama pada bulan September 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Malang merupakan salah satu dari kota pelajar selain Bandung dan Yogyakarta. Hal ini menjadikan Malang sebagai kota yang mampu memproduksi intelektual – intelektual muda. Namun bukan berarti bahwa masyarakat Malang sendiri mampu berpikir kritis dan mampu mengakses literasi dengan mudah. Oleh karena itu mulai sekitar tahun 1998 hingga 2016 terus tumbuh komunitas – komunitas literasi dan perpustakaan rakyat. Kota Malang mempunyai dua pusat/pasar buku di daerah kota. Sementara itu tidak kurang dari 5 toko buku besar selalu ramai dikunjungi oleh konsumen. Oleh karena itu, kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berbagi literasi tidak terhambat

Kisah Beberapa Perpustakaan Rakyat di Malang :
Katarsi

Katarsi, perpustakaan rakyat yang baru berdiri pada bulan Agustus 2016 ini. Katarsi mengkhhususkan diri untuk membuka perpustakaan terbuka bagi mahasiswa, khususnya di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Hal tersebut terjadi karena kedua penggagas perpustakaan rakyat ini merupakan mahasiswa dari fakultas tersebut. Terbilang lebih dari 40 buku mengenai pertanian. Sisanya merupakan novel dan buku bergenre umum. Prasetyo dan Narwastu merupakan penggagas Katarsi, mereka memulai perpustakaan rakyat ini karena pengalaman mereka menjadi asisten praktikum selama kuliah. Selama menjadi asisten praktikum, banyak mahasiswa yang kurang memahami permasalahan – permasalahan pertanian. Di dalam kelas, dosen lebih banyak mengemukakan perihal abstrak dibandingkan contoh kasus atau pandangan-pandangan kritis seputar isu agraria. Kecintaan mereka berdua kepada literasi kemudian mendorong mereka untuk membuka perpustakaan rakyat di fakultasnya.

Mereka merasa bertanggung jawab untuk memberi kesadaran kepada teman-teman mahasiswanya agar mau membaca. Selain itu, mereka juga membuka sesi-sesi diskusi. Menurut Prasetyo, membaca dapat memperkaya khasanah mahasiswa, namun kemudian dibutuhkan ruang terbuka bagi mahasiswa untuk berbicara, berdialog sehingga dapat memproduksi ide-ide baru. Prasetyo dan Narwastu tidak menginginkan kehidupan mahasiswa yang jauh dari literasi. Terkadang mereka mengamati beberapa ‘aktivis’ mahasiswa yang berbicara secara bebas tanpa berlandaskan pemikiran yang jelas. Selain itu, sebagian besar mahasiswa justru memilih menyibukkan diri di tengah tugas-tugas perkuliahan sehingga menjauhkan diri dari kepekaan atas sesamanya. Dengan melihat kedua kutub kehidupan mahasiswa seperti ini, maka Katarsi diadakan agar dapat mempertemukan berbagai tipe mahasiswa melalui pendekatan ilmu dan diskusi. Katarsi sendiri dibuka setiap hari di jam aktif kuliah, sehingga siapapun yang berkenan datang dipersilahkan untuk membaca. Pada sore harinya, Katarsi membuka sesi diskusi bebas. Hal ini dilakukan guna menciptakan ruang publik baru dimana seseorang dapat berbicara tanpa perasaan takut salah, atau mendapat intimidasi dari kehadiran dosen atau asisten perkuliahan. Perpustakaan rakyat Katarsi ini menjadi wadah baru bagi mahasiswa disekitarnya untuk bebas memperoleh ilmu dan berpendapat.

Halangan yang terjadi pada saat membuka perpustakaan rakyat ini adalah sumber daya yang kurang. Terkadang Katarsi kehabisan voluntir untuk membuka perpustakaan disaat yang tepat sehingga

pembaca harus menunggu terlebih dahulu. Apabila tidak dapat membuka perpustakaan karena berbagai halangan, terkadang mereka menitipkan koleksi buku Katarsi kepada perpustakaan rakyat lain di sekitar Universitas. Setiap hari Katarsi menerima antara lima hingga 20 pembaca mulai pagi hingga sore. Para pembaca lebih memilih untuk datang ke Katarsi dibandingkan dengan perpustakaan fakultas karena disana mereka bebas membaca dan berdiskusi dengan teman – temannya. Semangat yang membuat Prasetyo dan Narwastu terus berusaha untuk mengembangkan perpustakaan masyarakat adalah semangat berbagi. Bagi mereka, ilmu bukan saja milik pribadi namun merupakan hak dari semua orang.

Gubuk Tulis

Gubuk Tulis merupakan kelompok atau komunitas pencinta buku yang kemudian bersepakat untuk membuat program-program bersama untuk mengembangkan wacana sosial dan literasi. Gubuk Tulis mulai berdiri pada Januari 2016. Kegiatan yang biasa mereka lakukan adalah perpustakaan antar. Koleksi buku yang dimiliki oleh sekitar 30 anggota dipinjamkan secara bebas, katalognya disebar melalui akun media sosial seperti Line, Instagram dan Facebook. Untuk meminjam, calon pembaca hanya perlu menghubungi kontak person tertentu dan buku akan diantar kepada peminjam. Selain itu Gubuk Tulis juga setiap hari mengisi website mereka di gubuktulis.com dan diupdate disemua akun media sosial termasuk Twitter.

Gubuk Tulis juga telah membuat kegiatan diskusi rutin untuk mengangkat isu-isu sosial, sastra dan kesejarahan. Dialog kritis dan membebaskan, yang didahului oleh tindakan, harus dilakukan dengan kaum tertindas pada setiap tahap perjuangan pembebasan mereka” (Freire,1985:47). Bagi Gubuk Tulis baik membaca, menulis ataupun berdialog merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara rutin. Berpikir kritis, secara jenaka atau lugas merupakan kewajiban bagi pemuda dalam menanggapi segala hal yang diterima di dalam konteksnya. Dialog adalah bentuk perjumpaan di antara sesama manusia, dengan perantaraan dunia, dalam rangka menamai dunia (Freire,1985.73), oleh karena itu proses dialog yang diusahakan oleh Gubuk Tulis bermaksud juga untuk membebaskan para pembaca dan partisipan agar lebih mengenal dunia. S

Untuk peminjaman buku, mereka mampu mengantarkan kurang lebih 10 buku perbulannya. Namun untuk membaca *on the spot* di saat-saat diskusi ataupun bisa lebih dari 10 buku tersewa. Komunitas ini berusaha untuk selalu menyadarkan pemuda utamanya mahasiswa untuk terus menjadikan literasi bagian hidupnya. Semangat yang hampir sama dengan Katarsi, adalah bagaimana

mahasiswa mau membaca. Bukan karena tingkat keinginan membaca mahasiswa yang rendah, namun karena membaca dan menulis membawa manusia kepada pengetahuan, dan melalui pengetahuan manusia terselamatkan.

Perpustakaan Anak Bangsa

Perpustakaan Anak Bangsa berdiri pada kisaran tahun 2000, namun pendirinya, Eko Cahyono mulai membuat perpustakaan rakyat di depan teras rumahnya mulai tahun 1998. Alasan awal Eko membangun perpustakaan rakyat adalah karena banyak anaka kecil yang telah tidak bersekolah. Selain itu, Eko mengaku sebagai pecinta buku, dimana ia berharap agar orang lain dapat mencintai literasi seperti dirinya. Selanjutnya ia mulai meminta sumbangan – subangan majalah, koran dan buku e berbagai sumber. Nyaris setiap pintu pelanggan majalah ia datangi demi mendapatkan majalah bekas. Ia juga melakukan pengajuan kepada penerbit – penerbit dan toko buku untuk menambah koleksi perpustakaan.

Perpustakaan rakyat yang ada di rumahnya telah menampung sekitar 58.000 buku dan majalah. Seluruhnya boleh dipinjam secara bebas. Tidak ada batasan jumlah, waktu, biaya anggota maupun syarat – syarat lainnya. Bahkan perpustakaan terbuka 24 jam, sehingga siapapun dapat membaca, berdialog dan mengambil buku sesuai dengan keinginannya. Hal ini Eko lakukan kerana ia menganggap bahwa perpustakaan yang dimiliki oleh instansi-instansi resmi justru menjauhkan masyarakat dari bahan bacaan. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa suatu struktur sosial yang kaku dan menindas niscaya akan mempengaruhi pranata-pranata pengasuhan dan pendidikan anak dalam struktur tersebut (Freire,1985.164).

Eko tidak mempermasalahkan apabila terdapat koleksinya yang hilang karena menurut pendapatnya, buku yang hilang hanyalah buku yang bertemu dengan pemiliknya yang sejati. Selain itu Eko juga sering meminjamkan majalah dan buku bergenre umum untuk dibawa oleh pedagang bakso dan es keliling. Buku yang dibawa adalah buku yang dapat dipinjamkan kepada para pedagang tersebut. Buku pinjaman ini membuat perpustakaan rakyat menjadi perpustakaan berjalan. Oleh sebab itu juga tidak jarang para pedagang justru mendapat untung dari buku yang mereka sewakan.

Beberapa perpustakaan rakyat lainnya

Beberapa perpustakaan rakyat lain yang ada di Malang antara lain adalah Perpustakaan Komunitas Kalimetro, Gubuk Baca Lentera Negeri, Gubuk Cerita, Pojok Baca, Perpustakaan Kampong Mie Ayam, Perpustakaan Kafe Pustaka – Pelangi Sastra, Rumah Aqil dan Kontribusi. Perpustakaan rakyat ini

hanya sebagian dari sekitar 96 perpustakaan lain yang tersebar di Malang. Pembaca yang dituju beragam. Sebagian besar perpustakaan rakyat yang berada di Kota Malang ditujukan untuk kaum muda dan mahasiswa. Sementara itu perpustakaan rakyat yang berada di Kabupaten Malang lebih banyak memiliki koleksi buku yang dapat dikonsumsi oleh keluarga dan anak-anak.

Contoh Tema buku perpustakaan rakyat di Kota Malang antara lain adalah literasi pergerakan, isu-isu dan pergerakan sosial, hukum dan sejarah. Sementara itu koleksi di perpustakaan rakyat di Kabupaten Malang lebih banyak mengandung unsur bisnis praktis, urusan rumah tangga, buku pendidikan anak hingga mode. Karakter koleksi buku yang dimiliki oleh masing – masing komunitas literasi menyesuaikan dengan konteks yang ada. Hal ini terjadi karena baik dari kelas menengah maupun kelas pekerja telah mengerti apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Terkadang bantuan dari pemerintah justru salah sasaran. Seperti bantuan buku untuk perpustakaan rakyat yang ada di daerah Pantai Kondang Merak, Malang Selatan, dimana mayoritas penduduknya merupakan nelayan, justru diberi hibah buku ensiklopedia lengkap yang tidak menarik minat masyarakat.

Kesadaran merupakan salah satu alasan kuat bagi voluntir perpustakaan rakyat untuk terus menyumbang ilmunya. Kesadaran tersebut terdorong oleh kata hati, dimana kata hati merupakan kesadaran individu akan adanya suatu mahkamah dalam dirinya, yang di dalamnya pikirannya tuduh menuduh (Alisjahbana.1986,29). Sehingga melalui kata hati tersebut manusia dapat terdorong untuk kritis sekaligus berlaku kebaikan. Dengan demikian masyarakat memiliki etika, nilai – nilai perilaku yang tersusun dalam ruang pribadinya sekaligus untuk ruang di luar dirinya. Menurut Alisjahbana selanjutnya (1986,127) etik pribadi dan etik sosial merupakan dua tenaga yang amat kuat yang dapat menentukan kelakuan khusus manusia. Nilai emansipatoris, yakni penyelamatan masyarakat dari kebutaan literasi merupakan suatu nilai sosial dan etika yang kemudian diterapkan dalam tidak praktis. Dari hal ini dapat kita perhatikan kembali bahwa pertimbangan untuk membuka perpustakaan rakyat muncul dari dalam dan terangsang oleh fakta di luar diri voluntirnya.

Fenomena tumbuhnya berbagai perpustakaan rakyat harus dilihat melalui paradigma perkembangan kelompok sosial. Dengan kata lain, kita dapat mengamati kesatuan masyarakat sederhana sebagai nilai – nilai yang ada di dalam masyarakat, dalam hal ini yaitu emansipatoris atas ilmu dengan kebiasaan membaca dan membentuk wacana – wacana sosial. Penerapan nilai – nilai ini dapat dikatakan sebagai

penerapan solidaritas atas sesama. Dengan demikian, tumbuhnya perpustakaan rakyat dapat dinyatakan sebagai salah satu benda kebudayaan. Benda kebudayaan solidaritas, menurut Alisjahbana (1986,240) merupakan benda kebudayaan yang menjelmakan nilai solidaritas dalam berbagai bentuk perhubungan sosial. Dengan demikian menurutnya, terdapat perasaan, cinta dan tanggung jawab diantara individu dan kelompok. Fenomena ini merupakan salah satu bukti nyata adanya sikap intersubjektifitas di dalam masyarakat, dimana ‘aku’ merasa bagian dari yang ‘liyan’. Sehingga apa yang ‘aku’ lakukan untuk menyelamatkan diriku adalah dengan menyelamatkan ‘liyan’ juga.

Tujuan dari bermunculannya perpustakaan rakyat rata-rata adalah usaha penyelamatan masyarakat agar dapat bebas menerima pengetahuan dan bebas juga untuk memiliki ruang publik dalam mengutarakan ide dan gagasan. Penindasan yang terjadi dalam hal ini adalah keterkungkungan masyarakat dalam sistem kehidupan lain (misalnya sistem produksi) yang terdiri dari para ibu rumah tangga, petani dan buruh. Selain itu, sistem birokrasi pendidikan tidak dapat diakses oleh seluruh orang. Untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi misalnya, seseorang harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal dibandingkan saat bersekolah di SMA. Selain itu, birokrasi perpustakaan lembaga formal berusaha untuk menjaga buku dengan sangat baik sehingga terkadang sulit untuk calon pembaca untuk mengaksesnya.

Fenomena ini merupakan bentuk sikap politik masyarakat dalam menjawab kebutuhan pengetahuan yang dirasa masih kurang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosial fenomenologis dan wawancara pihak terkait. faktor bermunculannya fenomena ini adalah tingginya kesadaran masyarakat atas pentingnya budaya membaca bagi semua orang. Para penggerak umumnya memiliki pengalaman pada bidang ilmu pengetahuan dan ruang publik. Oleh sebab itu gerakan ini berupaya untuk selalu memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan budaya membaca dan berdialog. Para penggerak umumnya memiliki pengalaman pada bidang ilmu pengetahuan dan ruang publik. Oleh sebab itu gerakan ini berupaya untuk selalu memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan budaya membaca dan berdialog. Bagi para penggerak, menyebarkan ilmu merupakan bentuk perlawanan terhadap kebodohan publik. Implikasi dari sikap politik masyarakat terhadap pendidikan publik ini adalah terbentuknya jaringan komunitas antar daerah sehingga gerakan semakin meluas. Tindakan politik yang berpihak pada kaum tertindas harus merupakan tindakan yang mendidik dalam artian kata yang sesungguhnya, dan karena itu, merupakan tindakan yang dilakukan bersama kaum

tertindas. (Freire,1985.44)

Pengalaman masyarakat merupakan historisitas yang melahirkan kesadaran dan sikap nyata masyarakat demi melawan kemiskinan ilmu. Perpustakaan rakyat merupakan ekspresi ketidakpuasan masyarakat atas penyediaan ilmu oleh instansi-instansi negara dan lembaga formal. Kesulitan dalam mengakses buku dan kakunya birokrasi menghalangi masyarakat untuk bebas memperoleh pengetahuan. Di sisi lain perpustakaan rakyat juga diadakan karena semangat berbagi dan kesadaran bahwa masyarakat harus dibebaskan untuk belajar. Umumnya, mereka yang melakukan usaha mengembangkan ilmu pengetahuan merupakan mereka yang telah mengenyam pendidikan cukup tinggi. Dengan kata lain, pihak – pihak tersebut merupakan bagian dari masyarakat kelas menengah.

Gerakan emansipatoris dilakukan demi memberi kesadaran kaum tertindas terlebih dahulu. Selama kaum tertindas tidak menyadari sebab-sebab keadaan mereka, secara fatalistik mereka menerima pemerasan atas diri mereka (Freire,1985.41)

Perpustakaan rakyat merupakan hasil dari kritisi masyarakat atas keadaan yang terjadi. Secara langsung gerakan ini membawa jalan baru, kebudayaan baru yang menjadi harapan bagi sebagian orang, untuk memperbaiki keadaan hidup masyarakat secara umum. Hal tersebut selaras dengan pendapat bahwa aksi kebudayaan senantiasa merupakan bentuk tindakan yang sistematis dan terencana yang ditunjukkan pada struktur sosial, baik dengan tujuan melestarikan ataupun mengubahnya (Freire,1985.197)

LAMPIRAN

Foto – Foto kegiatan komunitas literasi dan perpustakaan rakyat di Malang.



1. Gubuk Tulis membuka tebar baca di Taman Merjosari, Malang.



2. Gubuk Cerita membuka perpustakaan rakyat di Car Free Day Kota Malang.



3. Perpustakaan Anak Bangsa memiliki kurang lebih 58.000 buku dan majalah.



4. Katarsi membuka perpustakaan rakyat di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.



5. Gubuk Baca Lentera Negeri sedang mendapat kunjungan dari Gubuk Tulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para penggerak literasi di Kota Malang yang tergabung dalam Gubuk Tulis, Taman Baca Anak Bangsa, Katarsi dan komunitas/penyelenggara perpustakaan rakyat lainnya, yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan inspirasi. Selain itu penulis juga mengucapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan oleh para pegiat perpustakaan rakyat untuk wawancara dan mengumpulkan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S.Takdir. 1986. Antropologi Baru. Penerbit Dian Rakyat : Jakarta.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. Metodologi Penelitian Filsafat. Penerbit Kanisius: Jogjakarta.
- Eyerman, Ron. 1994. Cendekiawan Antara Budaya dan Politik Dalam Masyarakat Modern . Yayasan Obor Indonesia: Jogjakarta.
- Foucault, Michel. 2002. Wacana Kuasa/Pengetahuan . Bentang: Jogjakarta.

- Freire, Paulo. 1985. Pendidikan Kaum Tertindas. LP3ES : Yogyakarta.
- , 2001. Pedagogi Hati. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Riyanto, Armada. CM, Prof. Dr. 2011. Aku & Liyan : Kata Filsafat dan Sayap. Widya Sasana : Malang.
- Tanter, Richard dan Kenneth Young. 1993. Politik Kelas Mengengah Indoensia. LP3ES : Yogyakarta.
- Arendt. H. 1959. Human Condition. Chichago University Press

Demokratisasi Buruh dan Kesejahteraan

(Studi Deskriptif Tentang Dinamika Organisasi Buruh dan Tingkat Kesejahteraan Di Kabupaten Bandung)

Suwandi Sumartias

Ikhsan Fuadi

Fakultas Ilmu Komunikasi - Unpad

Suwandi.Sumartias@unpad.ac.id

Sumartias2@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika organisasi buruh dan tingkat kesejahteraan buruh di Kabupaten Bandung. Demokratisasi buruh sejak reformasi tahun 1998 mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif, dengan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya organisasi buruh di tingkat perusahaan dimaknai sebagai wujud demokratisasi dan Hak Asasi Manusia, namun konsep kemitraan dalam relasi kerja seringkali terganggu oleh interpretasi dan pemahaman berbeda antara pengusaha dan buruh. Kurangnya keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi antara buruh dan pengusaha; adanya sikap egois dan arogansi yang berlebihan di antara keduanya. Rasa curiga dan prasangka negatif menjadi faktor utama yang mengganggu relasi produksi. Para buruh menganggap pengusaha tidak punya niat baik untuk menyejahterakan, dan hanya menuntut produktivitas yang tinggi. Sebaliknya, pengusaha menganggap para buruh hanya menuntut dan menuntut hak-haknya dan melupakan produktivitas. Kebutuhan hidup layak dan keadilan masih memerlukan perjuangan yang panjang. Tekanan global dan gaya hidup yang semakin masif telah mempengaruhi perilaku buruh dalam bekerja dan kehidupan sosial para buruh. Rekomendasi penelitian, perlunya ada upaya sinergis dari semua pemangku kepentingan (Pengusaha, Buruh dan Pemerintah) untuk terus mengupayakan kehidupan layak para buruh dan kualitas hidup mereka.

Kata kunci: demokratisasi, organisasi buruh, buruh, kesejahteraan

LATAR BELAKANG

Berkembangnya organisasi pekerja di Indonesia, didorong oleh adanya kebebasan berorganisasi, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 98 ke dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama, akan tetapi baru setelah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 97 kedalam Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan

Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dan kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Dan perubahan terjadi sangat signifikan dari sebelumnya yang menganut sistem *single union* menjadi *multi union*. Jumlah organisasi pekerja atau buruh berjumlah 6 konfederasi, 100 federasi dan 6.808 serikat pekerja tingkat perusahaan di Indonesia. Jumlah itu meliputi 1.678.364 orang anggota serikat pekerja (SP). Sedangkan, di masa orde baru, hanya satu yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Demokratisasi buruh dalam berorganisasi tentunya menjadi tantangan yang luar biasa bagi elemen pengusaha, buruh dan pemerintah. Di era multi serikat pekerja/buruh tidak hanya memerlukan regulasi dan kebijakan yang tepat dan akurat, namun juga perlunya mekanisme dan tatanan dalam upaya menjamin bagaimana sistem keterwakilan dalam LKS Bipartite-Tripartite, serta dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, sehingga bisa memenuhi nilai dasar yang terkandung dalam filosofi kebebasan berserikat dengan perlindungan hak berorganisasi dan berunding bersama untuk kemajuan perusahaan dan juga kesejahteraan buruh.

Banyaknya organisasi buruh sebagai salah satu wujud demokratisasi, seyogyanya mampu menjadi forum komunikasi dan pemberdayaan para buruh untuk yang lebih bermanfaat bagi kehidupan buruh dalam relasi kerja, bukan sebagai gerakan politik praktis yang seringkali menjadi kelompok penekan dalam menghadapi perbedaan dan atau konflik kepentingan dengan pengusaha atau pemerintah. Penguatan hubungan bipartite (buruh-pengusaha) atau tripartite (buruh-pengusaha-pemerintah) lebih penting daripada mobilisasi gerakan buruh dalam bentuk demonstrasi.

Gerakan buruh dalam praksis sosial ekonomi, politik dan budaya tidaklah berhenti di tempat mereka bekerja, juga dalam ruang-ruang publik, seakan merepresentasikan satu kaum yang selama ini belum mendapat perhatian dari para pengusaha dan elite birokrasi (pemerintah). Terpuruknya nasib buruh yang semakin transparan ibarat gunung es, yang mewakili ratusan ribu kaum buruh yang dalam kehidupan sehari-hari sangat memprihatinkan dan belum memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia. Sehingga

gerakan buruh mayoritas bermotifkan perubahan nasib dalam sosial ekonomi, namun di sisi lain gerakan buruh juga tak hanya murni memperjuangkan nasib dan kehidupan buruh dalam konteks sosial ekonomi, namun juga bermotif politik praktis dengan keragaman ideologi, yang bertujuan mendapatkan kekuasaan yang cenderung radikal dan anarkis. Bahkan gerakan buruh juga menampilkan sosok yang sangat instan, dengan adanya gerakan karena solidaritas sesama buruh dan ada juga yang membayarnya. Gerakan buruh masih terus terjadi sebagai wujud adanya masalah dalam hubungan kerja antara para pelaku proses produksi (Buruh-Pengusaha dan Pemerintah). Hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha (bipartit) sering terganggu dengan munculnya berbagai aksi gerakan dalam jumlah dan intensitas yang tinggi, terutama yang dilakukan di luar perusahaan yang melibatkan gabungan organisasi pekerja.

Rumusan Masalah

Bagaimana Eksistensi Organisasi Buruh dalam Konteks Hubungan Industrial yang Harmonis?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Eksistensi Organisasi Buruh dalam Konteks Hubungan Industrial yang Harmonis.

Kajian Pustaka

Dengan jumlah organisasi buruh yang banyak di tingkat perusahaan (Pengurus Unit Kerja) dan maraknya organisasi buruh di luar perusahaan di tingkat cabang, daerah dan pusat menjadi persoalan yang semakin rumit dan potensi konflik hubungan yang selalu mengemuka. Aksi mogok kerja dan atau unjuk rasa buruh yang masif terjadi di berbagai daerah dan nasional, seakan menihilkan makna sesungguhnya dari relasi produksi yang menuntut produktivitas tinggi di satu sisi.

Di sisi lain, kondisi kerja dan kehidupan para buruh masih belum beranjak dari persoalan normatif yang menjadi tuntutan buruh, antara lain masih rendahnya tingkat kesejahteraan buruh dan upah murah para buruh. Rendahnya keterampilan dan kurangnya produktivitas buruh menjadi kendala dalam upaya mewujudkan hubungan bipartite yang harmonis.

Sebaliknya, para buruh menilai pengusaha seringkali tak memiliki niat baik untuk menyejahterakan para pekerjanya, dan hanya mengejar keuntungan. Upah yang mereka peroleh seringkali tidak memenuhi kebutuhan fisik minimum, sementara harga kebutuhan dasar di pasaran terus meningkat, sementara upah yang mereka peroleh tak mampu lagi mengejar tuntutan pasar.

Dalam ranah hubungan industrial, banyak persoalan yang memerlukan pemahaman yang mendalam, khususnya keberadaan buruh dalam hubungan kerja. Giddens (1971) mengemukakan bahwa karya Karl Marx merupakan satu dari kontribusi terpenting bagi studi sosiologi terhadap industri, kendatipun dia tidak secara tegas menyebutkan istilah "Hubungan Industrial". Selanjutnya, Giddens dalam Susetian (2000) mengatakan bahwa premis-premis pertukaran ekonomis, properti privat, dan pengejaran profit dilihat oleh para ekonom sebagai karakteristik natural manusia.

Marx, dalam posisi berlawanan, menyatakan bahwa formasi pertukaran ekonomis adalah hasil dari sebuah proses historis oleh karena itu kapitalisme merupakan bentuk sistem produksi yang khas dalam sejarah manusia, selain masih ada sistem produksi lainnya. Pendapat Marx, menurutnya, kapitalisme hanyalah salah satu tipe sistem produksi di antara sistem produksi lainnya yang telah mendahului dalam sejarah.

Asumsi yang dimiliki oleh ekonomi klasik menurutnya, bahwa modal, komoditi harga, pada prinsipnya tidak tergantung dari mediasi oleh manusia. Sebaliknya Marx beragumen bahwa obyek-obyek fisik membentuk elemen-elemen di dalam suatu rangkaian yang pasti dari hubungan-hubungan sosial. Bottomore (1983) mengatakan bahwa aktifitas-aktifitas produksi menurut Marx harus dipahami melalui hubungan dialektis antara kekuatan produksi dan hubungan-hubungan produksi sebagai basis atau substruktur, di satu sisi, dan di sisi lain elemen-elemen yang berbeda menurutnya, seperti ideologi, hukum, religi, institusi-institusi politik dan budaya merupakan super strukturnya.

Kekuatan produksi, mencakup cara-cara material maupun tenaga manusia dalam produksi. Keduanya menurut Bottomore dalam Susetian (2000) mencakup perkembangan fenomena historis, seperti: permesinan, perubahan-perubahan dalam proses kerja, pembukaan sumber daya energi baru, serta pendidikan bagi kaum pekerja. Marx dalam Giddens (1971) beragumen bahwa: "*Human behaves not only to nature but also to one another in order that they can produce something. To do this they cooperate in such a way and manually do barter. For the shake of production, they involved into a real relationship among one another. So only in here, they carry out the relationships and maintain their behavior against nature and production*". Manusia pada dasarnya tidak hanya bekerja, tetapi satu sama lain dapat memproduksi sesuatu. Untuk melakukannya, mereka bekerja sama dan melakukan barter secara manual. Untuk menghasilkan, mereka terlibat dalam satu hubungan. Untuk itu mereka menjalankan hubungan

dan memelihara tingkah lakunya memperjuangkan kehidupan dan produksinya.

Fungsi buruh dalam hubungan industrial memiliki peran penting, seperti halnya dengan peran pengusaha dan pemerintah. Namun karena sering munculnya perbedaan pemahaman terhadap kepentingan masing-masing pihak di atas, terutama yang berawal dari internal perusahaan, kemudian meluas menjadi masalah sosial ketenagakerjaan di luar perusahaan. Para buruh mewujudkannya dalam bentuk gerakan, sehingga menggambarkan adanya perbedaan pemahaman di antara para buruh itu sendiri, dan tentunya hal ini akan mengganggu hubungan dan proses produksi.

Dunlop (1958:8) mengemukakan, para pelaku atau aktor dalam hubungan industrial meliputi: (1) hirarki para manajer dan para wakil mereka untuk pengawasan; (2) hirarki para pekerja (non-managerial) dan juru bicaranya, dan (3) instansi-instansi pemerintah tertentu dan instansi-instansi swasta tertentu yang didirikan oleh dua para pelaku tersebut yang memperhatikan para pekerja, perusahaan, dan hubungan-hubungan mereka. (*Tripartite Pluralism*). Dunlop (1958:15) menyatakan, "salah satu masalah besar dalam hierarki para pelaku dalam hubungan industrial ini, adalah kesulitan komunikasi dan pengertian sejati antara para ahli tersebut dengan sisa hierarki lainnya". Dalam perspektif Sosiologi Industri, menurut Subagio Sastrodiningrat (1994:11) adalah salah satu cabang sosiologi yang secara khusus mempelajari setiap kegiatan kelompok kerja yang menimbulkan produktivitas. Soerjono Soekanto (1987:1) mengatakan, bahwa sosiologi industri sebenarnya merupakan penerapan baik pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah industri.

Gerakan yang dilakukan para buruh seakan menjadi ciri khas komunitas buruh dalam menuntut dan menyelesaikan berbagai perbedaan kepentingan masing-masing pihak (buruh-pengusaha dan pemerintah) dan sulit dicarikan pemecahannya, baik melalui dialog secara internal perusahaan (birpartit) antara buruh dengan pengusaha, maupun hubungan tripartit. Gerakan (demonstrasi) buruh seakan menjadi *senjata utama dan pamungkas* dalam menyampaikan berbagai kepentingan atau aspirasi dan dapat mem-*pressure* pengusaha dan pemerintah. Dalam hubungan bipartit (buruh-pengusaha) dan tripartit (pemerintah-pengusaha dan buruh) sampai saat ini masih terdapat berbagai persoalan yang menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya tentang bagaimana pemahaman

buruh terhadap gerakan itu sendiri atau perannya dalam hubungan produksi.

Berbagai kajian selama ini menunjukkan, bahwa gerakan buruh disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: persoalan kesejahteraan buruh, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan kepentingan lainnya di berbagai sektor masih menjadi masalah serius. Beberapa pelanggaran hak-hak normatif yang memicu kasus-kasus tuntutan buruh masih belum beranjak dari soal upah, *outsourcing* atau buruh sewa, tenaga kontrak, pemutusan hubungan kerja, dan komponen jaminan kesejahteraan lainnya, hingga kriminalisasi buruh.¹ Perkembangan industrialisasi telah membawa dampak terjadinya perubahan hubungan industrial. Industri tidak hanya dapat dipahami sebagai fenomena di mana mesin-mesin muncul, melainkan juga difahami sebagai fenomena perubahan hubungan kerja, makna kerja, ekonomi politik, sosial budaya, dan lain sebagainya antara para pelaku proses produksi. Dinamika, gejolak dan perselisihan hubungan industrial yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan industri. Tatanan ekonomi internasional yang telah menciptakan struktur modal internasional berkonsekuensi pada pentingnya pemahaman terhadap gerakan buruh secara luas.

Kebijakan umum di beberapa daerah sangat tidak berpihak kepada pekerja/buruh, dan berdasarkan survei angkatan kerja tahun 2005 di Jawa Barat terdapat 7.167.872 buruh, penghasilannya separuh buruh (50%) antara Rp 400.000 – Rp 1 juta. Dan yang berpenghasilan di atas 1 juta rupiah sebanyak 20 % dan 30 % mendapatkan upah di bawah Rp 400.000,- Intensitas gerakan buruh yang sering dilakukan di dalam dan luar perusahaan, pada dasarnya tidak diinginkan oleh semua pihak, karena setiap aksi akan menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit secara materi maupun non materi.

Dasar filosofis hubungan kerja antara pengusaha dan buruh yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila mengisyaratkan adanya hubungan bersifat *partner in production dan partner in profit*, sampai saat ini masih sulit diwujudkan, hal ini tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor nyata internal perusahaan dan eksternal sosial ekonomi, politik, sosiologis, budaya, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah masih adanya pandangan yang keliru terhadap eksistensi buruh dalam konteks hubungan kerja, antara lain adanya anggapan para pekerja sebagai kaum lemah yang *uneducated*, kasar, sehingga berdampak tidak hanya terpinggirkan oleh sistem, juga dipinggirkan oleh cara berpikir yang keliru.

¹ Jenal Abidin, Revitalisasi Gerakan Buruh untuk Kesejahteraan, Kompas, 1 Mei 2006).

Tujuan pengembangan hubungan industrial adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak terkait (buruh-pengusaha) yang dapat meningkatkan produktivitas usaha. Salah satu wujud manajemen hubungan industrial di setiap perusahaan adalah merumuskan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang memuat hak dan kewajiban pekerja serta kewenangan dan kewajiban pengusaha. Hak pekerja merupakan pemenuhan kewajiban pengusaha. Kewajiban pekerja didasarkan pada kewenangan pengusaha untuk mengaturnya; melakukan pekerjaan sesuai dengan penugasan pimpinan menurut disiplin kerja dan dalam waktu kerja yang diaturkan. Seringkali berjalan tanpa memperhatikan kepentingan buruh sebagai manusia yang layak secara ekonomis maupun sosial. Maraknya gerakan dalam era reformasi, termasuk gerakan komunitas buruh (formal dan informal), bukan hanya sebagai indikasi adanya kesadaran masyarakat atas hak-hak dasar untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, gagasan yang bebas dan bertanggung jawab (demokratisasi), namun juga gerakan massa ini dipahami sebagai demonstrasi.

Riset *Polling Centre* (Garin Nugroho, 2006) mengungkapkan bahwa pasca reformasi 1998 di 27 Provinsi menunjukkan lebih dari 60 % masyarakat Indonesia mengartikan demokrasi dari kata demonstrasi karena melihat arak-arakan demonstrasi di jalanan lewat televisi. Aksi gerakan buruh tak dapat dilepaskan dari kehadiran organisasi buruh atau pekerja. Masalahnya, sebagian besar pengurus serikat pekerja tidak profesional di bidangnya, tidak mempunyai latar belakang perjuangan serikat bekerja, kurang mempunyai program kerja dan sasaran yang jelas, kurang mempunyai kemampuan negosiasi. Banyak kasus yang terjadi mengindikasikan bahwa "perjuangan" mereka sangat diragukan untuk kepentingan pekerja. Sebagian mempunyai muatan politik, sebagian lagi lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompok. Tingkah laku serikat pekerja sekarang ini bukan saja terkesan menakutkan, akan tetapi dalam jangka panjang dapat merusak disiplin dan etos kerja para karyawan. Keberadaan gerakan kaum buruh formal dan informal sepanjang sejarah di Indonesia, mengalami berbagai warna seiring dengan situasi politik ideologi, ekonomi, budaya, sehingga persoalan-persoalan hubungan kerja dan aktivitas sosialnya sangat erat dengan berbagai interpretasi para pelaku proses produksi.

Perspektif konflik, antara lain seperti pandangan Karl Marx, bahwa hubungan industrial merupakan hubungan kelas yang bersifat eksploitatif dan berorientasi pada hubungan konflik. Pendapat lainnya, mengatakan bahwa hubungan industrial bukan sebuah

hubungan kelas tetapi hubungan fungsional yang harmonis antara buruh dan pemilik modal.

Konflik adalah suatu proses yang terjadi bila perilaku seseorang terhambat karena perilaku orang lain. Konflik sering terjadi dalam hubungan yang erat (Peterson, 1983). Konflik akan semakin mudah timbul bila interdependensi makin meningkat. Bila interaksi menjadi semakin kerap dan melibatkan berbagai kegiatan dan hal-hal yang semakin luas, peluang untuk munculnya ketidaksesuaian akan semakin besar (Sears, 1985:245).

Marx dan Engels dalam Garna (1992:43-44) mengemukakan dua postulat utama, pertama yaitu determinisme ekonomi yang menyatakan faktor ekonomi adalah penentu fundamental bagi struktur dan perubahan masyarakat, bentuk-bentuk produksi yang bersifat teknologis menentukan organisasi sosial suatu produksi, yaitu relasi-relasi yang mengakibatkan pekerja memproduksi hasil dengan lebih efektif. Kedua, menyentuh mekanisme perubahan (*change*), yang menurut pandangan Marx, perubahan sosial itu harus dipahami dalam arti tiga fase atau tahap yang selalu tampak. Tiga tahap itu merupakan skema dialektik dari Georg Hegel (Garna, 1992:44)

Segala sesuatu yang ada di dunia, dan termasuk masyarakat sendiri, harus melalui tiga tahapan yaitu (1) tesis (*affirmation*); (2) antitesis (*negation*), dan (3) sintesis (*reconciliation of opposites*). Setiap sistem produksi atau ekonomi mulai sebagai suatu tesis, suatu orde yang paling baik. Setelah sistem begitu terbentuk merupakan penghalang terhadap penemuan teknologi baru dan penggunaan pasar pemenuhan bahan mewah; terjadilah konflik antara kuasa-kuasa produksi dengan relasi produksi. Menurut Marx secara umum tahapan perkembangan dari pembentukan ekonomi masyarakat diperlihatkan dalam metode produksi Asiatik, Kuno (*Ancient*), Feodal dan Borjuis. Hubungan produksi borjuis ialah bentuk terakhir proses sosial produksi yang bersifat antagonistik yang ditentang oleh revolusi kaum proletar, yang justru hendak menghabiskan *social formation* dalam masyarakat.

Selanjutnya, menurut Garna (1996: 65), konflik berlaku dalam semua aspek relasi sosial, yang bentuknya seperti dalam relasi antar individu, relasi individu dengan kelompok ataupun antara kelompok dengan kelompok. Karl Marx berpendapat bahwa kepentingan utama kaum borjuis adalah memperoleh keuntungan yang maksimum, sebaliknya kaum proletar perlu gaji yang lebih mengurangi keuntungan majikan, dan manakala majikan tak memenuhi tuntutan pekerja, maka terjadi konflik industri.

Talcott Parsons dalam (Susetiawan, 2000:218), memandang konflik itu sebagai bentuk sosial, yang dengan menggunakan konsep sosialisasi yang

menimbulkan ketegangan dan pertentangan itu dapat menjelaskan konflik. Konflik juga berlangsung sebagai akibat dari interaksi antar individu dan individu dengan kelompok individu yang lebih besar. Dalam proses sosialisasi itu biasanya para individu ditransformasikan berbagai cara penyimpangan (*deviance*) melalui pilihan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, termasuk bagaimana melakukannya

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan analisis datanya kualitatif. Desain penelitian deskriptif dengan pendekatan jenis data kuantitatif dan kualitatif, melalui pemahaman aspek keluasan data lebih dipentingkan sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pendeskripsian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif itu akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi (Suryabrata, 1998).

Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang sekarang berlangsung dengan tujuannya adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Hasil penelitian deskriptif hanya berupa deskripsi mengenai variabel-variabel tertentu yang menggunakan pengolahan statistik yang bersifat deskriptif, dengan menyajikan frekuensi, angka rata-rata, atau kualifikasi lainnya untuk tiap-tiap kategori di suatu variabel

Teknik pengumpulan data digunakan melalui: Wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka. Teknis analisis data: reduksi data; penyajian data dan verifikasi kesimpulan. Informan penelitian yakni Pengusaha (APINDO) di Kabupaten Bandung; Pengurus Unit Kerja Organisasi Buruh Tingkat Perusahaan; Disnaker Kabupaten Bandung' Pengurus Cabang atau Daerah Serikat Buruh/Pekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Organisasi Buruh dalam Konteks Hubungan Industrial yang Harmonis.

Eksistensi kaum buruh sebagai realitas sosial di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan serius, khusus mereka yang berada pada perusahaan-perusahaan atau industri manufaktur. Keberadaan mereka secara sosial ekonomi di satu pihak menjadi

aset yang berharga dalam menunjang keberhasilan industri, namun di sisi lain kehidupan mereka jauh dari kehidupan yang layak sebagai manusia. Penderitaan dan perjuangan kaum buruh seakan menjadi lembaran sejarah kelam bagi bangsa ini, betapa sulitnya untuk menjadi warga yang "merdeka" secara ekonomi, paling tidak dapat hidup layak dan sejahtera untuk para buruh dan keluarganya. Tekanan demi tekanan yang datang dari luar buruh baik secara global dalam wujud pasar bebas dan kepentingan politik praktis para elite negeri, telah memposisikan buruh dalam keadaan serba sulit. Tarik ulur kebijakan dan kepentingan para elite birokrasi berdampak semakin terpuruknya eksistensi kaum buruh dalam perkembangan industri manufaktur.

Dalam kebebasan berserikat bagi kalangan buruh, kenyataannya masih dihadapkan berbagai persoalan yang mendasar dan teknis. Menurut Direktorat KPHI (2012) menemukan antara lain, bahwa kebebasan berserikat di daerah diterima dan dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai kehendak untuk kepentingan para buruh, akan tetapi terindikasi dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan politik, sosial dan lainnya.

Dinamika organisasi buruh sebagai indikasi demokratisasi masih belum memiliki hubungan langsung yang signifikan dengan tingkat kesadaran dan pemahaman dari para pelaku produksi, khususnya di tingkat pengusaha dan buruh (bipartite). Kehadiran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam membina dan mewujudkan hubungan industrial yang profesional dan harmonis seringkali terganggu dengan adanya kepentingan-kepentingan pragmatis dari pihak aparat terkait dengan ketenagakerjaan, perusahaan dan atau buruh. Ketidaktegasan menegakkan dan mengawasi peraturan kerja antara buruh-pengusaha menjadi indikasi minimnya kualitas SDM pemerintah.

Aparat pemerintah seringkali dihadapkan pada kebingungan untuk mediasi jika ada persoalan di tingkat perusahaan, antara pengusaha dan buruh. Untuk menentukan upah minimum buruh tingkat kota/kabupaten dan atau provinsi, seringkali tidak memuaskan para buruh, dan selalu menuai protes para buruh di berbagai daerah, bahkan para buruh melakukan mogok kerja atau unjuk rasa dalam skala besar (nasional). Komponen upah dan harga barang yang dijadikan patokan utama dalam menentukan upah minimum seringkali tidak memuaskan para pekerja, bahkan muncul prasangka buruk, tidak adanya niat baik pemerintah dan pengusaha untuk menyejahterakan para buruh.

Hubungan pengusaha dan buruh seringkali diwarnai dengan hubungan yang kurang harmonis. Para informan (pengusaha) dan buruh, masih dihadapkan pada persoalan cara pandang yang berbeda tentang peran masing-masing dalam relasi kerja yang produktif

dan kondusif. Para pengusaha menilai maraknya pengurus unit kerja (PUK) di tingkat perusahaan, bukan hanya sekedar tempat berorganisasi para pekerja yang demokratis, namun seringkali kurang dioptimalkan sebagai sarana untuk mendorong produktivitas dan harmonisasi dalam bekerja.

PUK seringkali dijadikan organisasi untuk menekan atau melawan pengusaha. Termasuk menjadi perpanjangan tangan para aktivis buruh di luar perusahaan, yang seringkali melakukan unjuk rasa atau mogok kerja, intimidasi, sweeping jika ada persoalan dan atau ketidakpuasan di tingkat perusahaan. Bahkan unjuk rasa atau mogok kerja dijadikan senjata pamungkas untuk melakukan tekanan terhadap pengusaha atau pemerintah, sehingga mengganggu produktivitas perusahaan dan atau sosial kemasyarakatan. Kerugian materi dan non materi yang jumlah besar seringkali mengemuka sedemikian rupa.

Dengan jumlah organisasi buruh yang banyak di tingkat perusahaan (Pengurus Unit Kerja) dan maraknya organisasi buruh di luar perusahaan di tingkat cabang, daerah dan pusat menjadi persoalan yang semakin rumit dan potensi konflik hubungan yang selalu mengemuka. Aksi mogok kerja dan atau unjuk rasa buruh yang masif terjadi di berbagai daerah dan nasional, seakan menihilkan makna sesungguhnya dari relasi produksi yang menuntut produktivitas tinggi di satu sisi.

Berdasarkan data Kemenakertrans RI (2012), secara nasional organisasi buruh atau pekerja yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai berikut: (1) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI hasil Munas); (2) Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (FSPSI Reformasi); (3) Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI); (4) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI); (5) Sarekat Buruh Muslimin Indonesia-SARBUMUSI; (6) Persaudaraan Pekerja Muslimin Indonesia- PPMI; (7) Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia-GASPERMINDO; (8) Federasi Organisasi Pekerja Keuangan dan Perbankan Indonesia- FOKUBA; (9) Kesatuan Buruh Marhaenis-KBM; (10) Kesatuan Pekerja Nasional Indonesia-KPNI; (11) Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia-KBKI; (12) Asosiasi Karyawan Pendidikan Swasta Indonesia-ASOKADIKTA; (13) Gabungan Serikat Buruh Industri Indonesia-GASBIINDO; (14) Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia - ASPEK Indonesia; (15) Serikat Pekerja Keadilan- SPK; (16) Gabungan Serikat Buruh Independen- GSBI; (17) Serikat Pekerja Metal Indonesia - SPMI; (18) Dewan Pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia-KORPRI; (19) Federasi Serikat Pekerja BUMN- FSP BUMN; (20) Serikat Buruh Merdeka "Setiakawan"-SBM; (21) Serikat Pekerja Nasional Indonesia-SPNI; (21) Serikat Pekerja

Tekstil, Sandang dan Kulit-SPTSK; (22) Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia-GOBSI; (23) Asosiasi Karyawan Pendidikan Nasional-ASOKADIKNA; (24) Federasi SP Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan-SPKP; (25) Federasi SP Rakyat Indonesia-SPRI; (26) Federasi Kimia, Energi, Pertambangan-FKEP; (27) Solidaritas Buruh Maritim dan Nelayan Indonesia-SBMNI; (28) Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia-FNPBI; (29) Federasi SP Indonesia-SPI; (30) Federasi Gabungan Serikat Pekerja Mandiri-GSBM; (31) Federasi Perserikatan Buruh Independen-PFBI; (32) Federasi Serikat Buruh Perjuangan-FSBP; (33) Federasi Aliansi Jurnalis Independent-AJI; (34) Federasi Gabungan Serikat Pekerja PT Rajawali Nusantara Indonesia-GSPRNI; (35) Federasi FARKES (Farmasi dan Kesehatan) Reformasi; (36) Federasi SPM (hotel, restoran, plaza, apartemen, katering dan pariwisata)-F-SPM; (37) Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia Baru-GASPERMINDO BARU; (38) Gabungan Serikat Buruh Indonesia 2000-GSBI 2000; (39) Federasi SP KAHUTINDO; (40) Federasi Serikat Pekerja Pariwisata-F SP-PAR; (41) Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi; (42) Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan- F SP-PP; (43) Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerjaan Umum- F SP-BPU; (44) Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Asuransi, Jasa dan Profesi; (45) Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan; (46) Federasi Serikat Pekerja Angkutan Darat, Danau, Feri, Sungai dan Telekomunikasi Indonesia- F SP-ADFE; (47) Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin-F SP-LEM; (48) Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia- F SP SPKSI; (49) Federasi Serikat Pekerja TSK-SPSI; (50) Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan-F SP KAHUT-SPSI; (51) Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-F SP-TI; (52) Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan-F SP-KEP; (53) Federasi Serikat Pekerja Kewartawanan Indonesia-F SP-PEWARTA; (54) Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia-F SP-MI; (55) Kesatuan Pelaut Indonesia-KPI; (56) Federasi Serikat Pekerja Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri-F SP TKI LN; (57) Federasi Serikat Buruh Karya Utama-F SBKU; (58) Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara-F SP BUN; (59) DPP Gerakan Buruh Marhaen; (60) Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia-F SP ISI; (61) Serikat Pekerja Islam-SERPI.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa hubungan industrial diwujudkan melalui penerapan 8 sarana yaitu; serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan per undang undangan ketenagakerjaan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja menjamin hak kaum pekerja untuk menjadi atau tidak menjadi pengurus dan atau anggota suatu organisasi didalam maupun diluar perusahaan. Menurut Ditjen Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada tahun 2012 tercatat masing masing: Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (11.852 buah), Federasi Serikat Pekerja/Buruh (92 buah), Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh (6 buah), Jumlah anggota Serikat Pekerja/Buruh (3.414.455 orang), dan SP/SB BUMN (170 buah).

Kehidupan Para Buruh

Di sisi lain, kondisi kerja dan kehidupan para buruh masih belum beranjak dari persoalan normatif yang menjadi tuntutan buruh, antara lain masih rendahnya tingkat kesejahteraan buruh dan upah murah para buruh. Rendahnya keterampilan dan kurangnya produktivitas buruh menjadi kendala dalam upaya mewujudkan hubungan bipartite yang harmonis. Sebaliknya, para buruh menilai pengusaha seringkali tak memiliki niat baik untuk menyejahterakan para pekerjanya, dan hanya mengejar keuntungan. Upah yang mereka peroleh seringkali tidak memenuhi kebutuhan fisik minimum, sementara harga kebutuhan dasar di pasaran terus meningkat, sementara upah yang mereka peroleh tak mampu lagi mengejar tuntutan pasar.

Dasar perhitungan minimum upah buruh KHL (Kebutuhan Hidup Layak) diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu : Makanan & Minuman (11 items); Sandang (13 items); Perumahan (26 items); Pendidikan (2 item); Kesehatan (5 items); Transportasi (1 item); Rekreasi dan Tabungan (2 item), sehingga total komponen upah sebanyak 60 items.

Dari 60 items upah yang diperoleh para buruh, seringkali dianggap para buruh belum memenuhi kebutuhan hidup layak mereka, sehingga mereka menuntut 80 items tambahan. Dan dalam perundingan tentang penentuan upah minimum, seringkali buruh menilai pengusaha belum berpihak kepada mereka, dan pihak pemerintah pun dianggap tak memihak kepada buruh, namun lebih berpihak kepada pengusaha dalam upaya minimalisasi pengeluaran untuk upah. Sehingga upah buruh dianggap masih rendah dan jauh dari pemenuhan kebutuhan dasar para buruh. Bahkan, jika tidak puas dengan perundingan, para buruh seringkali melakukan mogok kerja dan atau unjuk rasa. Komunikasi di antara pengusaha-buruh seringkali tidak lancar dan menghambat produktivitas perusahaan. Relasi produksi dan kerja tidak hanya dilihat dari aspek keuntungan materi, namun menguat

secara bersamaan adanya rasa bangga dan penghargaan sebagai pelaku produksi relasi kerja dan relasi sosialnya.

Sebagai gambaran tentang kondisi upah para buruh di Jawa Barat tahun 2016, melalui Penetapan UMK Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1322-Bangsos/2015, sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar UMK Jawa Barat 2016

No	Wilayah	UMK/RP	Keterangan
1	Kota Banjar	1.327.965	
2	Kabupaten Cianjur	1.837.520	
3	Kabupaten Cirebon	1.592.220	
4	Kota Cirebon	1.608.945	
5	Kota Sukabumi	1.834.175	
6	Kota Tasikmalaya	1.641.280	
7	Kabupaten Bekasi	3.261.375	
8	Kabupaten Kuningan	1.364.760	
9	Kabupaten Garut	1.421.625	
10	Kabupaten Majalengka	1.409.360	
11	Kota Bandung	2.626.940	
12	Kabupaten Bogor	2.960.325	
13	Kabupaten Tasikmalaya	1.632.360	
14	Kabupaten Ciamis	1.363.319	
15	Kabupaten Pangandaran	1.324.620	Terendah
16	Kabupaten Indramayu	1.665.810	
17	Kabupaten Bandung	2.275.715	
18	Kabupaten Bandung Barat	2.280.175	
19	Kabupaten Sumedang	2.275.715	
20	Kota Cimahi	2.275.715	
21	Kota Depok	3.046.180	
22	Kota Bogor	3.022.765	
23	Kabupaten Sukabumi	2.195.435	
24	Kota Bekasi	3.327.160	
25	Kabupaten Karawang	3.330.505	Tertinggi
26	Kabupaten Purwakarta	2.927.990	
27	Kabupaten Subang	2.149.720	

Dari tabel di atas, tampak bahwa dasar pengupahan para buruh, telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan perhitungan Tim dari Dewan Pengupahan Daerah Jawa Barat. Tim ini terdiri dari wakil pengusaha, buruh, pemerintah, dan akademisi yang melakukan survey pasar untuk menentukan kebutuhan dasar para pekerja. Namun dalam perjalanannya, seringkali mendapat kritik dari para buruh, yang menganggap tim ini bekerja kurang profesional dan proporsional, karena saat survey pasar, harga barang diambil harga yang sangat rendah dan kualitas barang sangat minimalis. Sehingga, UMK yang ditetapkan tidak sepenuhnya diterima. Bahkan seringkali pihak

pengusaha dan pemerintah dianggap kolaborasi untuk menekan harga dasar kebutuhan para buruh. Sementara harga barang dan jasa dalam sehari-hari, jauh dari UMK. Sehingga UMK yang diperoleh masih dianggap terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan layak para buruh. Alih-alih harga di pasaran, seringkali mengikuti hukum pasar bebas, sementara kenaikan upah selalu terlambat.

Di lain pihak, pengusaha dan pemerintah merasa sudah optimal melakukan perannya dalam melayani keinginan dan kebutuhan para buruh, melalui penentuan UMK. Bahkan pengusaha menilai, para buruh selalu menuntut hak yang berlebihan dalam hal upah, sementara kinerja mereka tidak optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Berkembangnya organisasi buruh di berbagai perusahaan sebagai indikator demokratisasi dan HAM sudah menjadi fakta yang tidak bisa dihindari.
2. Organisasi buruh yang ada belum identik dengan meningkatnya kesejahteraan buruh. Bahkan organisasi buruh belum berfungsi optimal sebagai sarana untuk memperjuangkan nasib perbaikan hidup para buruh. Namun masih bernuansa adanya politisasi buruh.
3. Posisi tawar para buruh dalam relasi kerja, masih lemah dan pengusaha masih terlalu dominan.
4. Hubungan yang harmonis dan kesejahteraan buruh masih memerlukan perjuangan bersama secara sinergis antara pengusaha, buruh dan pemerintah.
5. Upah yang mereka terima seringkali tak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak para buruh, karena harga barang dan jasa selalu mengikuti perkembangan pasar bebas.
6. Komunikasi yang terbuka, transparan dan akuntabel menjadi tantangan bersama para pelaku proses produksi yang secara dinamis harus dicermati dan dikawal bersama secara bipartite atau tripartite.

Saran

1. Organisasi buruh sebaiknya bisa berfungsi lebih optimal dalam membantu upaya perbaikan nasib para buruh.
2. Hubungan bipartite dan atau tripartite perlu dioptimalkan, sehingga berbagai persoalan yang muncul bisa dikelola secara profesional dan proporsional.
3. Kesejahteraan dan kemajuan bersama perusahaan merupakan tanggung jawab bersama yang tetap

menjadi tujuan bersama para pelaku proses produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell. Tom. 1994, *Seven Theories of Human Society* (terjemahan), Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Coser, Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. New York : The Free Press.
- Craib, Ian. 1984. *Modern Social Theory, From Parsons to Habermans*. Wheatsheaf Books Ltd.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press, California.
- _____. 1968. *Easy in the Theory of Society*. Standorf, Calif. : Standorf University Press.
- _____. 1986. *Konflik dan konflik dalam masyarakat Industri, Sebuah Analisa Kritik*. (terjemahan), Penerbit Cv. Rajawali, Jakarta.
- Donlop, John T. 1958. *Industrial Relation System*. Illincis : Southern California Univ. Press.
- Sumartias, Suwandi. *Kumpulan artikel dan Jurnal*, 2000-2016.

REPRESENTASI “TEMAN AHOK” SEBAGAI BENTUK IDENTITAS BUDAYA DAN PERLAWANAN TERHADAP OLIGARKI POLITIK

Anang Viki Pratama Hadju

Student of Master of Literature and Culture Studies Faculty of Humanities Universitas Airlangga
anangviki_pratama@yahoo.co.id

Abstrak

Warga DKI Jakarta seolah-olah tercengang lewat pemberitaan nasional, baik media cetak maupun elektronik dengan sekumpulan koalisi anak muda yang menamakan diri mereka sebagai “Teman Ahok”. Kehadiran mereka mampu membuat geger para kaum elite partai politik hanya karena seseorang yang bernama “Ahok”. Hal ini dikarenakan dirinya menyebutkan adanya anggaran siluman di dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015, sehingga dirinya merasa dimusuhi oleh pimpinan DPRD dan akan diancam untuk digulingkan dari posisinya sebagai Gubernur DKI. Penelitian ini ingin menyelami rencana sebagian anak-anak muda tersebut dibalik alasan mereka membentuk suatu perkumpulan gerakan baru ditengah masyarakat perkotaan yang modern di Jakarta yang bersikukuh melawan sistem politik yang masih berbau unsur oligarki di negeri ini. Selain itu, penelitian ini berupaya mendeskripsikan penggunaan media sosial sebagai media untuk menjaring aspirasi dari warga DKI Jakarta untuk memberikan dukungannya terhadap Ahok agar mampu dicalonkan kembali dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pendekatan kajian fenomenologi budaya dengan teknik mencatat dan mengamati aktifitas yang dilakukan oleh pengurus “Teman Ahok” lewat media sosial, seperti situs resmi “Teman Ahok”, Facebook, Twitter, dan Instagram. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwasanya “Teman Ahok” hadir sebagai fenomena baru di Jakarta yang menjadi bagian dari identitas budaya bagi gerakan anak muda jaman sekarang untuk ikut serta memperbaiki kondisi politik nasional dengan cara mereka sendiri (Do it Yourself) dan mereka berhasil membuktikannya sebagai bentuk balasan melawan kaum oligarki yang memiliki modal besar dalam pencalonan kepala daerah.

Kata kunci: warga DKI Jakarta, Teman Ahok, Ahok, identitas budaya, politik, oligarki, dan kepala daerah.

PENDAHULUAN

Sejatinya, sebuah daerah tentunya membutuhkan sosok seorang pemimpin sebagai panutan dalam menjalankan aktifitas ataupun kegiatan. Sebuah daerah memerlukan pemimpin reformis yang mampu menjadi motor penggerak yang mendorong perubahan daerah yang dipimpinnya. Sampai saat ini, kepemimpinan masih menjadi bahan perbincangan yang menarik, karena paling sering diamati namun merupakan fenomena yang sedikit dipahami. Fenomena kepemimpinan di Indonesia menjadi sebuah masalah menarik dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan bernegara. Dalam dunia birokrasi, kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap jalannya institusi dan kelangsungan hidup institusi. Peran kepemimpinan harus memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai negarawan dan memiliki kelebihan-kelebihan tertentu termasuk wawasan keilmuan sebagai seorang pemimpin. Sangat strategis dan penting dalam sebuah insitusi sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan suatu institusi (Thoha, 1999). Maka dari itu, tantangan dalam mengembangkan strategi institusi yang jelas terutama terletak pada ruang lingkup pemerintahan daerah di satu sisi dan tergantung pada kepemimpinan yang ada pada institusi dimana pemimpin institusi ini

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita dari media cetak maupun elektronik nasional tentang peristiwa politik yang terjadi. Secara langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu, tanpa memiliki hubungan baik dengan pengaruh terhadap sistem maupun struktur politik (Gaffar, 1999). Seperti halnya dalam mencari sosok pemimpin di daerahnya membutuhkan partisipasi

politik agar mewujudkan pembangunan politik dan praktik demokratisasi di suatu daerah berjalan dengan baik. Sebagaimana persiapan perhelatan pesta demokrasi (pilkada) di Propinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang. Namun, tidak semua perwujudan demokrasi itu berjalan dengan lancar. Masih banyak polemik mengenai persiapan pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Salah satunya yang menjadi kendala seperti halnya memunculkan sosok pemimpin yang akan maju sebagai peserta calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Warga DKI Jakarta dihebohkan dengan pemberitaan baik media cetak maupun elektronik nasional dimana ada perseteruan sengit antara Gubernur DKI Jakarta sebagai perwakilan pemerintah daerah dengan pihak DPRD Propinsi mengenai pembahasan Rancangan Anggaran Pembahasan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015. Dimana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), selaku Gubernur DKI Jakarta mengatakan adanya anggaran siluman di dalam rancangan APBD DKI 2015. Sehingga, dirinya merasa dimusuhi oleh pimpinan DPRD dan akan diancam untuk digulingkan dari posisinya sebagai Gubernur DKI melalui kesepakatan sembilan fraksi di DPRD untuk mengajukan hak angket (Savitri, 2015). Berawal dari permasalahan tersebut, masyarakat DKI seolah-olah dibuat tercengang kembali oleh pemberitaan media nasional dengan hadirnya sekumpulan koalisi anak muda yang menamakan diri mereka sebagai “Teman Ahok”. Mendengar isu wacana Ahok akan dimakzulkan dari posisinya sebagai Gubernur DKI, mereka mencoba membentuk suatu koalisi anak muda agar mencalonkan Ahok sebagai Gubernur DKI periode kedua tanpa lewat jalur partai politik (independen). Pada akhirnya, kehadiran mereka membuat geger para elite partai politik nasional hanya karena satu nama yang bernama Ahok ini.

Tentunya, “Teman Ahok” ini memunculkan fenomena budaya baru yang hadir di tengah-tengah masyarakat modern seperti di Jakarta, dimana kelompok yang beranggotakan anak-anak muda ini memiliki tujuan yang sama, menentang aspirasi dari masyarakat Jakarta agar memilih Ahok sebagai Gubernur DKI periode kedua. Fenomena budaya yang terbentuk dalam suatu komunitas seperti halnya “Teman Ahok” memiliki pandangan tersendiri dibandingkan komunitas lainnya, dimana di dalam “Teman Ahok” ini tidak ada satupun anggotanya yang bekerja untuk mengharapkan imbalan (tanpa pamrih). Mereka disini melakukannya dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan maupun pengaruh dari siapapun, termasuk pengaruh unsur politik praktis. Hal ini yang membuat peneliti ingin menyelami lebih dalam alasan sebagian anak-anak muda yang tergabung

dalam komunitas ini mengapa mereka membentuk suatu perkumpulan gerakan baru di tengah masyarakat perkotaan yang modern di Jakarta dan apa motif mereka melakukan hal-hal tersebut yang bersikukuh mendukung seseorang maju melalui jalur independen di pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa melalui jalur partai politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini dapat berjalan dengan baik, terarah, dan mendapatkan hasil yang maksimal maka dibutuhkan sebuah metode yang cocok. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dijadikan sebagai objek penelitian, dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam situasi tertentu, sehingga penelitian ini memfokuskan pada subjek dan objek penelitian. Hal ini guna membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat atas fakta-fakta yang ditentukan (Moelong, 1990).

Jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dari beberapa jurnal penelitian dan sumber tertulis lainnya karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Di mana dalam penelitian ini selain data diperoleh dari beberapa informasi dari sumber-sumber di alamat situs secara *online*, data juga bisa diperoleh melalui kajian pustaka atau buku-buku yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, data yang akan diambil adalah berupa data primer, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan teknik mencatat dan mengamati aktifitas yang dilakukan oleh pengurus “Teman Ahok” sebagai objek penelitian ini melalui pemberitaan-pemberitaan lewat alamat situs, seperti situs resmi “Teman Ahok”, Facebook, Twitter, Instagram atau beberapa situs pemberitaan yang terpacu pada pemberitaan mengenai fenomena “Teman Ahok”.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah *Non participant Observation*, yaitu observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati, dimana peneliti mengumpulkan data melalui catatan-catatan pribadi, hasil karya seseorang, hingga beberapa sumber tertulis lainnya (Ostrower, 1998). Teknik ini digunakan karena peneliti melakukan penelitian dengan mencatat dan mengamati perkembangan netizen

terhadap fenomena “Teman Ahok” atas peristiwa yang sedang marak dan hangat dibicarakan.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dalam menganalisis “Teman Ahok” dengan tujuan untuk menginterpretasikan tindakan sosial seseorang atau perkumpulan (komunitas) sebagai sebuah yang bermakna (dimaknai) serta dapat merekonstruksi kembali turunan makna (makna yang digunakan saat berikutnya) dari tindakan yang bermakna pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial. Di dalam pendekatan, fenomenologi ini lebih menekankan pada realitas budaya yang ada dan berusaha memahami budaya lewat pandangan pemilik budaya atau pelakunya (Sudarmanti, 2005). Fenomenologi dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh.

Pembahasan

Pengertian dari komunitas merupakan sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional (Soenarno, 2002). Pengertian Komunitas menurut Kertajaya Hermawan (2008), adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. Dari dua definisidiatas dapat diartikan jika komunitas itu sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa (Wenger, 2002).

Teman Ahok sebagai salah satu contoh komunitas yang berisikan kumpulan warga Jakarta yang menginginkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) agar maju melalui jalur perseorangan (independen). Teman Ahok sendiri bukan ide ataupun murni inisiasi dari Ahok, melainkan oleh lima anak muda yang memiliki pemikiran yang sama, mulai dari Muhamad Fathony, Richard Saerang, Amalia Ayuningtyas, Singgih Widyastono, dan Aditya Yogi Prabowo. Tujuan mereka mendirikan Teman Ahok untuk membantu Ahok maju di Pilkada 2017 melalui jalur independen, hal ini disebabkan Ahok tidak aktif lagi sebagai anggota partai politik manapun karena banyak kebijakan Ahok yang kontroversial dengan kepentingan politik. Salah satu juru bicara dari komunitas Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas mengatakan bahwa komunitas Teman Ahok membantu Ahok maju melalui jalur independen dengan cara

mengumpulkan KTP dari warga Jakarta yang nantinya akan digunakan sebagai bukti ke Mahkamah Konstitusi agar Ahok dapat dicalonkan kembali melalui jalur independen.

Gambar 1. Kelima remaja *founder* dari komunitas



Teman Ahok

Menurut Crow dan Allan (1995), Komunitas dapat terbagi menjadi 3 komponen, yaitu pertama, berdasarkan lokasi atau tempat wilayah, merupakan tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat dimana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Teman Ahok hadir di DKI Jakarta yang notabenehnya adalah ibukota negara Republik Indonesia yang hampir sebagian besar anggotanya merupakan relawan anak muda sesuai dengan misi mereka, menjadi wadah silaturahmi warga DKI Jakarta yang mendukung Ahok untuk bergerak bersama dan saling membantu serta mengorganisir dukungan terhadap Ahok agar tidak tercerai berai. Kedua, berdasarkan minat sekelompok, merupakan orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, maupun berdasarkan kelainan seksual. Anggota yang tergabung dalam Teman Ahok terdiri berbagai macam agama, suku, ras bahkan profesi yang berbeda-beda di Jakarta yang memutuskan untuk bergabung dan mengorbankan waktu dan pekerjaannya untuk membantu Teman Ahok. Dan yang terakhir berdasarkan komuni, merupakan berawal dari ide dasar yang dapat berdirinya komunitas itu sendiri. Teman Ahok merupakan komunitas pertama dan terbesar di Indonesia yang mendukung seseorang maju melalui jalur independen di Pemilihan Kepala Daerah dimana kelima *foundernya* memiliki ide yang sama, mengusung Ahok untuk maju ke Pilkada DKI 2017 tanpa lewat kendaraan partai politik.

Vanina Delobelle (2008) juga menjelaskan bahwa komunitas mempunyai beberapa aturansendiri, yaitu:

1. Saling berbagi: Mereka saling menolong dan berbagi satu sama lain dalam komunitas.
2. Komunikasi: Mereka saling respon dan komunikasi satu sama lain.

3. Kejujuran: Dilarang keras berbohong. Sekali seseorang berbohong, maka akan segera ditinggalkan.
4. Transparansi: Saling bicara terbuka dan tidak boleh menyembunyikan sesuatu hal.
5. Partisipasi: Semua anggota harus disana dan berpartisipasi pada acara bersama komunitas.

Seperti halnya di Teman Ahok yang dihuni oleh beberapa anggota anak muda yang rela untuk melakukan pengorbanan yang tidak sedikit seperti menunda kegiatan perkuliahannya bahkan adapula yang nekat berhenti dari pekerjaannya hanya untuk ikut partisipasi dalam mensukseskan aktifitas yang dilakukan oleh Teman Ahok. Realitanya, seluruh anggota dari komunitas ini sama sekali bersifat sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga siapapun boleh ikut serta untuk bergabung dengan komunitas ini tanpa mendapatkan gaji atau imbalan semata. Setiap anggota Teman Ahok memiliki kedekatan yang sangat erat, baik interaksi maupun komunikasi diantara mereka pun seperti layaknya seorang teman sebaya dan tidak gengsi sekalipun. Karena interaksi dan komunikasi yang terjalin diantara mereka, menimbulkan fenomena baru bagi sebagian masyarakat DKI Jakarta, khususnya anak-anak muda guna membentuk identitas budaya tersendiri dalam bermasyarakat.

Permasalahan identitas merupakan salah satu tema pada kajian budaya yang muncul pada tahun 1990-an. Pembahasan mengenai identitas merujuk pada berbagai macam isu, seperti sosial, politik serta budaya. Berbagai permasalahan yang dibahas mengenai identitas, di antaranya yaitu politik feminisme, etnisitas, hingga masalah seksualitas. Identitas dalam kajian budaya lebih sering disebut sebagai identitas budaya atau identitas kultural. Menurut Stuart Hall (1990), konsep identitas budaya yaitu menyembunyikan identitas pribadi seorang individu di balik identitas kolektif yang ada di sekitarnya. Berdasarkan konsep tersebut, seorang individu dipaksakan memiliki identitas yang sama dengan identitas di sekelilingnya. Individu yang memiliki identitas berbeda dengan sebuah kelompok akan dianggap tidak layak menjadi bagian dari kelompok tersebut. Konsep tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan identitas budaya antar satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Seperti halnya di Teman Ahok, mereka menilai Ahok adalah sosok pemimpin yang layak memimpin DKI Jakarta tanpa memandang berasal darimana sukunya, rasnya, hingga agamanya. Mereka sadar jika di dalam Teman Ahok ini memiliki beberapa anggota yang dari latar belakang yang berbeda-beda. Yang mereka

inginkan adalah bagaimana Ahok bisa menjadi gubernur DKI periode kedua yang segala urusannya dibantu dalam satu wadah kelompok, yaitu Teman Ahok ini. Setiap individu yang ada di dalamnya merasa tidak dipaksa untuk harus mengikuti alur yang ditetapkan oleh pengurus Teman Ahok karena komunitas ini bersifat sukarela, tidak ada peraturan terkait yang mengharuskan anggota-anggotanya untuk menuruti bahkan memaksa mereka untuk melakukan demikian demi pencalonan Ahok ke pilkada. Yang itulah inisiatif dari Teman Ahok sehingga ketika menyikapi semangat dari para anggota Teman Ahok, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai petahana tidak punya pilihan lain kecuali mengapresiasi inisiatif dan memilih jalur independen. Dari inisiatif dan semangat itu, sudah terkumpul satu juta KTP (kartu tanda penduduk) sebagai bukti dukungan masyarakat agar sosok yang dijagokan Teman Ahok itu memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam Pilgub DKI tahun 2017 nantinya. Disini terlihat konsep identitas yang dibentuk manakala seseorang yang ingin tergabung dalam Teman Ahok, secara tidak sadar mereka harus menjatuhkan pilihan politiknya kepada Ahok dan bagi Ahok sendiri mau tidak mau harus menuruti dan menghargai kinerja dari Teman Ahok itu sendiri apabila ingin maju lewat jalur tanpa partai politik.

Stuart Hall dalam *Cultural Identity and Diaspora*, berpendapat bahwa konsep identitas budaya merupakan sesuatu hal yang tidak langsung terbentuk, melainkan sebuah proses yang tidak akan pernah selesai, selalu dalam proses, dan diwujudkan dalam sebuah representasi (Hall, 1990). Identitas dan representasi merupakan dua hal yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Hal tersebut karena identitas individu akan terlihat jika ditunjukkan melalui representasi, seperti yang dikatakan oleh Barker (2012) sebelumnya bahwa identitas ditandai atau direpresentasikan melalui gaya hidup, sikap dan lain sebagainya.

“It is a matter of “becoming” as well as of “being”. It belongs to the future as much as to the past. It is not something which already exist, transcending place, time, history and culture” (Hall, 1990:225).

Menurut Hall dalam kutipan tersebut, identitas budaya bukan hanya merujuk pada masa lalu saja, melainkan apa yang ada pada masa kini dan masa depan. Hal tersebut karena proses “becoming” identitas akan terjadi secara terus menerus sesuai tempat, waktu, sejarah, dan budaya. Hall menegaskan bahwa identitas budaya bukanlah sesuatu yang kaku dan tidak berubah dari waktu ke waktu, melainkan identitas budaya adalah sesuatu yang terus menerus dibentuk berdasarkan kerangka sejarah dan budaya. Teman Ahok sendiri sudah memunculkan fenomena budaya baru yang sangat

berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya, fenomena inilah akan memunculkan polemik tersendiri untuk menimbulkan pengalaman bagi siapa saja yang ikut tergabung dalam komunitas tersebut, tentunya secara tidak sadar pula perlu memahami realitanya. Sebelum memahami realitas, perlu memahami dahulu fenomena budaya itu sendiri dan maknanya seperti apa melalui fenomenologi, khususnya dalam hal kajian budaya.

Fenomenologi sedikit alergi teori. Pendekatan ini lebih menekankan rasionalisme dan realitas budaya yang ada. Fenomenologi menjadikan pengalaman sebenarnya sebagai data utama dalam memahami realitas. Apa yang dapat diketahui seseorang adalah apa yang dialaminya. Apabila dikaitkan dalam kajian budaya, perkembangan pendekatan fenomenologi tidak dipengaruhi secara langsung oleh aliran filsafat, tetapi oleh perkembangan dalam pendefinisian konsep kebudayaan. Dalam hal ini, fenomenolog Edmund Husserl (Muhadjir, 1998) menyatakan bahwa obyek ilmu itu tidak terbatas pada yang empirik (sensual), melainkan mencakup fenomena yang tidak lain terdiri dari persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subyek yang menuntut pendekatan holistik, mendudukan obyek penelitian dalam suatu konstruksi ganda, melihat obyeknya dalam suatu konteks natural, dan bukan parsial. Karena itu dalam fenomenologi lebih menggunakan tata pikir logik daripada sekedar linier kausal. Sehingga, tujuan dari fenomenologi budaya yaitu ke arah membangun ilmu ideografik budaya itu sendiri. Ada beberapa ciri-ciri pokok fenomenologis yang dilakukan oleh peneliti fenomenologis menurut Moleong (2007), yaitu pertama, mengacu kepada kenyataan, dalam hal ini kesadaran tentang sesuatu benda secara jelas. Kedua, memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Yang terakhir memulainya dengan diam.

Mengutip dari situs resmi Teman Ahok, komunitas ini memiliki visi, yaitu menghimpun dukungan dari seluruh warga DKI yang punya keinginan menjadikan Jakarta lebih baik, tertata, manusiawi, dan bebas korupsi di masa depan untuk memenangkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur Terpilih tahun 2017-2022, dengan cara yang demokratis, kreatif, terhormat dan memberikan manfaat edukasi politik bagi warga Jakarta dan seluruh Indonesia. Dari visi tersebut sudah terlihat kenyataannya yang sangat jelas dan memiliki keterkaitan antar anggota di dalamnya, dimana komunitas ini terbentuk karena adanya interaksi yang sama untuk mengusung Ahok maju kembali di periode kedua. Mereka menilai kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI sudah layak diapresiasi dan ingin melihat perubahan

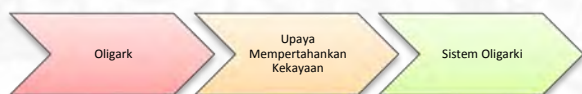
secara signifikan di seluruh kawasan DKI Jakarta. Atas dasar itulah, sesama anggota Teman Ahok dapat berinteraksi satu sama lain, sama-sama belajar berorganisasi, dan saling bekerja sama untuk mensukseskan program pencalonan Ahok. Mereka menilai Teman Ahok ini sebuah komunitas yang seru dan unik di Indonesia dan baru pertama kali hadir di negara ini dimana ada wadah khusus bagi seseorang yang ingin maju tanpa partai politik. Keunikan inilah yang menjadi budaya baru untuk bebas melakukan apapun tanpa adanya aturan-aturan yang bisa mengekang kebebasan seseorang dalam berkreatifitas, sehingga Teman Ahok ini bisa dibilang memiliki identitas budaya secara *Do It Yourself* (DIY).

Budaya *Do It Yourself* (melakukan dengan etikanya sendiri) merupakan salah satu bentuk identitas budaya yang mengacu pada etika yang mandiri dengan menyelesaikan tugas-tugas secara diri sendiri sebagai perlawanan aturan yang ditetapkan dari orang lain/kelompok yang lebih berpengalaman atau mampu menyelesaikan tugas orang lain untuk dirinya sendiri. Budaya jenis ini mempromosikan gagasan bahwa orang biasa bisa belajar untuk melakukan lebih dari yang dia pikirkan itu mungkin terjadi. Tanpa ini, DIY bukan merupakan stigma yang efektif. Istilah ini dapat merujuk pada "melakukan" apa pun, termasuk perbaikan infrastruktur dan perbaikan objek bangunan lainnya, pertolongan pertama terhadap seseorang, dan upaya kreatifitas diri. D.I.Y atau *Do It Yourself* adalah etos atau sikap yang muncul pada kisaran tahun 1970-an, dan kemudian menjadi semakin populer seiring dengan semakin berkembangnya kultur Punk (*hardcore*). Berawal dari keresahan dan kebosanan generasi muda pada saat itu terhadap dominasi budaya *mainstream* yang dianggap membatasi kebebasan untuk berekspresi, etos D.I.Y bergerak menjadi sebuah kultur tandingan (*counter culture*) guna mendobrak kemapanan budaya (Widya, 2010). Teman Ahok salah satu contoh komunitas anak muda terbesar di Indonesia yang ingin merubah citra sistem perpolitikan nasional dengan cara mereka sendiri karena mereka menganggap sistem politik di Indonesia masih belum bisa terlepas dari oligarki kaum elite politik.



Gambar 2. Hasil produk kreatifitas yang dilakukan oleh Teman Ahok.

Dalam memahami sistem oligarki dalam perpolitikan nasional, oligarki bukan semata-mata kekuasaan politik di tangan minoritas kecil elit-elit politik (definisi generik), namun mengalami penyempitan makna ke arah definisi oligarki spesifik. Memahami oligarki sebagai pemusatan kekuasaan pada segelintir elit, terutama elit-elit pemegang modal (kaum borjuis). Oligark yang merupakan sebutan bagi orang yang terlibat langsung dalam sistem oligarki di suatu negara memiliki kekayaan di atas rata-rata bahkan di atas kekayaan rata-rata kekayaan orang kaya sekalipun, atau bisa disebut individu sebagai super kaya (jutaan bahkan milyuner). Masuknya para kaum oligark dalam ranah politik didasarkan pada kegagalan negara dalam menjaga kekayaan mereka, dari berbagai macam ancaman, bahkan ketika ancaman tersebut datang dari negara (Winter, 2011).



Bagan 1: Proses Pertahanan Kekayaan Oligark (Winter, 2011)

Bagan di atas berusaha menjelaskan bahwa logika yang digunakan oleh Winters dalam menjelaskan sistem oligarki. Dalam bukunya yang berjudul *Oligarki*, Winters berusaha membalikkan logika umum yang lazim digunakan dalam menjelaskan oligarki. Bagi sebagian besar kepustakaan terkait oligarki, fokus utama analisis akan terlebih dahulu mendefinisikan oligarki kemudian melacak para oligark pembentuk oligarki tersebut. Namun Winters mencoba membalikinya, dengan terlebih dahulu menjelaskan oligark secara komprehensif kemudian menjelaskan bagaimana oligark tersebut menciptakan sebuah oligarki dalam suatu tatanan politik. Karena itu dapat disimpulkan bahwa oligarki bukan sekedar bagaimana suatu minoritas kecil mendominasi mayoritas, namun oligarki lebih pada bagaimana para individu pemilik kekayaan berupaya mempertahankan kekayaan (Winter, 2011).

Kadar keterlibatan oligark dalam perebutan kekuasaan melalui politik praktis dapat diukur melalui seberapa besar ancaman terhadap kekayaan para oligark. Semakin besar kadar ancaman kekuasaan semakin aktif para oligark dalam perebutan kekuasaan. Kadar keterlibatan oligark dalam politik praktis melalui Pemilu atau Pemilu juga menjadi jawaban atas pertanyaan kritis yang dilontarkan oleh beberapa kalangan yang menyatakan bagaimana mungkin oligark dan demokrasi dapat berjalan dalam satu sistem politik.

Meskipun pada dasarnya oligarki dan demokrasi memiliki dasar kekuasaan berbeda, di mana oligark meletakkan konsentrasi kekuasaan pada kekayaan (klaim terhadap kepemilikan dan kekayaan), sedangkan demokrasi meletakkan konsentrasi pada persebaran kekuasaan nonmaterial (hak, prosedur, dan tingkat partisipasi).

Oligarki dan elit menurutnya berbeda. Keduanya memang menggunakan kekuasaan dan pengaruh minoritas. Namun, kemampuan melakukannya didasarkan pada jenis kekuasaan yang berbeda, yang kemudian berimplikasi pada hasil politik yang berbeda pula. Bukti adanya perbedaan yang mendasar antara elit dan oligarki ini terletak pada pengaruh minoritas pada elit yang selama ini telah ditantang oleh perubahan demokratis, sedangkan Oligarki bahkan belum memiliki kemampuan untuk menyesuaikan. Hal demikian berhubungan dengan sumber daya kekuasaan yang digunakan untuk menjadi seorang elit dan Oligark. Sumber daya kekuasaan yang dimaksud mencakup hak politik formal, jabatan resmi (baik di dalam maupun di luar pemerintahan), kuasa pemaksaan (*coercive power*), kekuatan mobilisasi dan kekuasaan material (kekayaan). Empat sumber daya yang pertama, ketika didistribusikan dengan cara sangat eksklusif atau terkonsentrasi, adalah dasar yang umumnya dikenal sebagai politik "elit." Sumber daya yang terakhir, kekuasaan material adalah basis oligarki (Winter, 2011).

Oligark adalah aktor yang diberdayakan oleh kekayaan sumber daya paling menonjol di antara bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Kekayaan jelas paling serba guna, dalam arti mudah diubah menjadi kepemilikan kekuasaan yang lain. Sehingga dengan itu, elit politik dan oligark dapat dipisahkan secara konseptual. Kategori Oligark dan elit politik bisa saling tumpang tindih dengan kekuasaan oligarkis yang berpotensi mengarah pada kekuasaan elit politik, begitu pula sebaliknya. Namun, keduanya tidak mesti bertumpang tindih. Banyak oligark hanya memiliki sumber daya kekuasaan material, dan banyak elit politik tidak pernah menghimpun kekayaan yang mendatangkan kekuasaan. Dalam suatu sistem politik, Oligark selalu menjadi seorang elit, tetapi seorang elit belum tentu menjadi seorang Oligark (Winter, 2011). Fenomena Teman Ahok semata-mata bukan menjadi perkembangan gerakan antiparpol. Mereka terbentuk sebagai representasi gerakan anak-anak muda untuk menolak oligarki sistem politik Indonesia dimana rakyat Jakarta selama ini merasa sakit hati akan dibohongi dan dikhianati para *elite* politik yang telah mendapatkan kekuasaannya, entah di jalur parlemen maupun eksekutif.



Gambar 3. Aktifitas dari Teman Ahok ketika menyuarakan pendapat di depan arena publik.

Berpacu pada opini dari Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Donny Ardyanto, yang juga Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (www.kompas.com), mengatakan, oligarki didefinisikan sebagai politik pertahanan kekayaan dari kaum oligark. Tujuan oligarki adalah mempertahankan kekuasaan ekonomi dan bahkan menambahnya. Oligark ini sedemikian canggih untuk mempertahankan kepentingan bisnisnya dengan terlibat dalam pembuatan UU dan kebijakan lain. Potret gerakan anak-anak muda “Teman Ahok” ini, menurut Donny, masih dalam tahap menolak sistem politik Indonesia yang berbau oligarki. Pergerakan komunitas anak-anak muda ini menggetarkan jagat perpolitikan baru. Mereka dianggap mendobrak kekuatan politik besar yang selama ini dikuasai para elite partai politik. Aktifitas mereka dapat terlihat melalui jalur komunikasi publik via online, yaitu dapat diakses melalui situs resmi Teman Ahok di www.temanahok.com dimana warga DKI Jakarta dapat berinteraksi bahkan membutuhkan informasi yang valid mengenai pencalonan Ahok di Pilkada DKI 2017.

Melalui situs resmi Teman Ahok, mereka berhasil mengumpulkan ratusan ribu data KTP dari beberapa warga DKI yang ingin mendukung Ahok agar dicalonkan kembali sebagai Gubernur DKI periode kedua. Selain situs resmi tersebut, Teman Ahok juga menghadirkan wadah komunikasi lainnya melalui *social media* resmi milik Teman Ahok, seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram. Para relawan yang tergabung dalam Teman Ahok ini didominasi anak-anak muda, dimana kebanyakan mereka berasal dari generasi yang mahir dalam dunia digital dan internet, atau biasa disebut Gen Y (Generasi Y), yang lahir pada rentang tahun antara 1981-1999 yang kini usianya berkisar 17-35 tahun, tidak tertutup kemungkinan juga adapula generasi tua yang akhirnya ikut bergabung. Di tangan anak-anak muda yang mahir digital, mereka mencoba menghimpun kekuatan dari dunia maya agar bisa ditransformasikan di dunia nyata. Berbagai *tools* berbasis *web* kini telah siap dan telah

mereka miliki untuk diberdayakan sesuai keinginan mereka, sehingga mereka juga memiliki identitas budaya sebagai kelompok *netizen*.



Gambar 4. Salah satu laman resmi dari fitur media sosial milik Teman Ahok.

Masuknya generasi muda ke ranah politik adalah sebuah upaya melawan paradoks. Selama ini, memang ada problem serius antara politik dunia riil dan gerakan media sosial. Teman Ahok melancarkan aksinya melalui media sosial untuk menggalang dukungan publik agar mau menjatuhkan pilihan politiknya ke Ahok. Sesuai dengan misi mereka yaitu memberikan edukasi politik bagi warga Jakarta dan menginspirasi Indonesia untuk berkampanye politik secara kreatif dan terhormat dan menjadi garda terdepan untuk meluruskan berita-berita yang tidak benar atau fitnah terhadap Ahok. Teman Ahok memiliki strategi jitu, unik, dan kreatif ketika banyak *statement-statement* negatif yang mengarah ke Ahok, mereka menginformasikan ke ranah publik dengan gaya informasi anak muda yang mampu diserap dengan baik oleh semua warga DKI. Mereka tidak menggunakan cara klasik seperti partai politik lakukan ketika “mempromosikan” kandidatnya ke masyarakat yang hanya bisa merusak lingkungan dan tentunya membutuhkan modal yang besar serta adanya kontrak politik antara partai politik yang mengusung calon kandidatnya dengan personal yang diusung tersebut.

Hadirnya Teman Ahok tidak salah juga jika membuat kaum elite partai politik merasa geger karena mereka menganggap partai politik belum bisa terlepas dari sistem oligarki ketika siapapun berhak maju ke kompetisi pemilihan kepala daerah tanpa harus adanya mahar politik. selain itu, mereka menganggap partai politik belum mampu melaksanakan regenerasi dalam

hal melahirkan kader-kader terbaik yang layak menjadi seorang pemimpin daerah. Beberapa hasil pengaderan parpol memang membuahkan hasil. Hanya saja, kondisi itu lebih didorong oleh desakan publik. Apabila tidak ada desakan dari publik, belum tentu partai politik akan tetap memasang calon-calon yang berkorelasi dengan pelanggengan kekuasaan para pengurus partai politik tersebut. di tangan anak-anak muda lewat Teman Ahok ini, mulai membangkitkan momentum pergerakan anak muda untuk ikut serta membenahi sistem politik nasional bahkan gerakan mereka bisa direpresentasikan sebagai *shadow parliamen*, bukan sebatas menjadi *voters* dari para politisi.

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan jika Teman Ahok adalah representasi gerakan anak-anak muda untuk melawan para kaum elite partai politik yang memiliki modal besar dalam kancah pertarungan pemilihan kepala daerah. Mereka mampu menjadi alternatif bagi seseorang yang ingin maju sebagai kepala daerah tanpa jalur partai politik. seperti halnya Ahok yang didesak oleh anak-anak muda Teman Ahok ini agar bersedia dicalonkan kembali sebagai Gubernur DKI periode 2017-2022 tanpa adanya mahar politik sekalipun (oligarki). Teman Ahok ini adalah cermin dari identitas budaya anak muda dengan cara mereka sendiri tanpa adanya aturan-aturan yang mengekang kreatifitas mereka ketika ikut serta membenahi sistem politik nasional. Hal inilah yang menjadi fenomena budaya baru dalam masyarakat modern seperti halnya di Jakarta dimana seluruh anggota dari Teman Ahok memiliki visi dan misi yang sangat konkrit untuk memberikan edukasi politik terhadap masyarakat Jakarta dengan cara yang unik dan kreatif sesuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak manapun, yaitu mengusung budaya *Do It Yourself* sebagai cara yang jitu mengambil perhatian masyarakat DKI agar menjatuhkan pilihan politiknya ke Ahok.

Daftar Pustaka:

- Crow, G., & Allan, G. 1995. Community types, community typologies and community time. *Time and Society* 4 (2).
- Ostrower, F. 1998. Nonparticipant observation as an introduction to qualitative research. *Teaching Sociology*, 26(1).
- Soenarno, 2002. Kekuatan Komunitas Sebagai Pilar Pembangunan Nasional. Makalah disajikan pada Seminar Nasional – Kekuatan Komunitas sebagai Pilar Pembangunan. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah. Jakarta
- Sudarmani, Rini. 2005. Memahami "Fenomenologi" Kesadaran Intersubjektif Alfred Schutz". *Jurnal Universitas Paramadina* vol. 4 no. 2.

- Winters, A. Jeffrey. 2011. Oligarchy and Democracy. dalam *Jurnal The American Interest* Volume VII, 2 Holidays (November/December). Washington DC: The American Interest.
- Barker, Chris. 2012. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: SAGE Publication Ltd
- Delobelle, Vanina. 2008. *Community: A Critical Response*. Sandy. Inc.
- Gaffar, Affar. 1999. *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hall, Stuart. 1990. *Cultural Identity and Diaspora*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Moleong, Lexy J.1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Reka Sarasin.
- Thoha. Miftah. 1999. *Perilaku Organisasi, Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT. Rajawali Pers: Jakarta.
- Wenger, Etienne et al. 2002. *Cultivating Communities of Practice*. Harvard Business School Press .
- Widya, G. 2010. *Punk: Ideologi yang Disalahpahami*. Yogyakarta: Garasi House of Book.
- Winters, A. Jeffrey. 2011. *Oligarki terj.*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Widya, G. 2010. *Punk: Ideologi yang Disalahpahami*. Yogyakarta: Garasi House of Book.
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/12/10200331/Fenomena.Teman.Ahok.Saat.Generasi.Y.Menolak.Oligarki.Parpol> ((diakses pada tanggal 11 Oktober 2016)
- <http://m.suarakarya.id/2016/06/22/fenomena-teman-ahok-sebuah-peringatan-bagi-partai-politik> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2016)
- <http://temanahok.com/> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2016)
- <https://id-id.facebook.com/temanahok/> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2016)
- <https://twitter.com/temanAhok> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2016)
- <https://www.instagram.com/temanahokofficial> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2016)
- <https://www.youtube.com/channel/UCtpS6GcD0p6gJ4T9gHu1nJQ> (diakses pada tanggal 11 Oktober 2016)

Lampiran

TEMAN KAHOK

HOME | ARTIKEL | LAPORAN KEUANGAN | BERITA | GALERI | TOKOH | BUKU | KEMERDEKAAN | PERSID | BENTU

PEROLEH | HIGRA

TOTAL PEMASUKAN YANG DIDAPAT

Rp 797.376.000,00

URAIAN ANGGARAN BELANJA (Rp.000.000) yang diperoleh di bawah ini:

Total Pengeluaran Rp 762.978.864,00
Total Balance Rp 34.397.136,00

Jenis	Pendapatan	Pengeluaran	Saldo
Laporan keuangan bulan April 2016	Rp 811.28.000,00	Rp 214.742.000,00	Dibayar
Laporan keuangan Juli 2016	Rp 151.022.000,00	Rp 204.227.000,00	Dibayar
Laporan keuangan semester II 14 Agustus 2016	Rp 132.058.000,00	Rp 229.000.000,00	Dibayar

LAPORAN PENGUMPULAN DONASI (SETARA DENGAN LAPORAN LABA/RUGI) PER 31 MARET 2016	
Penerimaan Donasi Dari Pihak Ke Tiga	-
Pendapatan Dari Penjualan Merchandise	1.302.543,000
Harga Pokok Penjualan	416.813,760
Total Donasi	885.729,240
LAPORAN PENGUNAAN DONASI (SETARA DENGAN LAPORAN ARUS KAS) PER 31 MARET 2016	
ARUS KAS MASUK	
Pendapatan Penjualan Merchandise 31 Maret 2016	1.302.543,000
Total Arus Kas Masuk	1.302.543,000
ATK	3.083.300,00
Persediaan	47.720.000,00
Inventori Penyimpanan Dokumen	-
Inventori Booth	26.379.000,00
Inventori Posko	8.250.000,00
Intangible aset	-
Pengadaan Formulir dan Brosur	31.650.000,00
Perabotan Kantor	-
Interior dan Partisi	-
Perjalanan	17.562.500,00
Donasi Pihak Ketiga	-
Utang Jangka Pendek	-
Biaya Listrik	10.000.500,00
Biaya Telepon	2.131.200,00
Biaya Internet	19.122.000,00
Biaya Honor	76.637.909,00
Beban Rumah Tangga	8.460.200,00
Sewa Kantor	-
Biaya Sewa Kendaraan	5.500.000,00
Biaya Sewa Dan Operasional Booth	275.504.500,00
Biaya Operasional Posko	285.117.750,00
Biaya Transportasi	6.651.000,00
Biaya Pengiriman Formulir	3.603.000,00
Biaya promosi	20.384.500,00
Biaya Meeting	7.248.000,00
biaya lain-lain	4.564.000,00
Total Arus Kas Keluar	859.569.359
Saldo Kas Besar Awal Bulan	206.493.354
Saldo Kas per 31 Maret 2016	649.466.995
Saldo Kas Besar	544.690.248
Saldo Kas Kecil	1.882.900
Saldo Kas di Bank	73.587.000
Saldo Pos Keuangan Lainnya	29.311.847
Total	649.466.995

Gerakan Kesadaran Budaya Anti Korupsi, Intelektual Akademisi Dalam Perspektif *Intellectual Craftsmanship* C. Wright Mills

Arie Wahyu Prananta
wahyubroo@gmail.com

Abstrak

Banyaknya studi tentang gerakan anti korupsi yang menggunakan perspektif penegakan hukum, penindakan dan pendekatan jaringan korupsi serta advokasi, yang semua berparadigma pada ekonomi politik, ini masih mengundang kritik, karena tidak dapat menilik tajam memberikan solusi yang komprehensif. Pada titik inilah, studi yang menggunakan perspektif teoritik yang dapat memposisikan peran intelektual sebagai individu memiliki kesadaran dalam Budaya anti Korupsi dalam dilema etik sebagai aktor kreatif yang mampu memiliki kekuatan untuk secara otonom dan independen, menjadi menarik untuk diangkat. Atau dengan kata lain, melihat peran kaum intelektual tidak semata-mata tidak hanya sebagai “turunan” dari struktur kekuasaan ekonomi dan politik yang melingkupinya, Bermula dari permasalahan ini maka studi ini dimaksudkan bukan hanya untuk sekedar mengaplikasikan teori C. Wright Mills dalam *Sociology Imagination* tentang peran kaum intelektual (*Intellectual Craftsmanship*) terutama di Indonesia saja, melainkan lebih jauh dari itu, untuk melihat dinamika atau kompleksitas teoritik yang muncul ketika terjadi kesenjangan antara teori yang lahir dari akar pemikiran konteks historis dengan realitas sosial yang ada, dan juga untuk melihat fenomena dari konteks yang berbeda dalam kaitannya dengan peran sosiologi intelektual. Tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: Memahami, menemukan dan memaknai kesadaran kaum intelektual (*Intellectual Craftsmanship*) dalam menghadapi tekanan. Dilema etik gerakan anti korupsi berupa kekuasaan dan politik. Memetakan peran gerakan anti korupsi sebagai gerakan kesadaran kaum intelektual baru (*Intellectual Craftsmanship*) gerakan anti korupsi dengan menggunakan pendekatan *public Issue* dan *personal trouble*. Sejak awal studi ini berusaha untuk kritis dalam memaknai dan memahami peran individu (kaum intelektual) dalam sebuah peristiwa teks sejarah, teks sejarah dilihat dalam sebuah imajinasi sosiologi berkaitan dengan korupsi terutama di Indonesia. Studi ini menggunakan paradigma interpretatif dengan metode fenomenologi Alfred Schultz.

Kata kunci: kesadaran, intelektual, korupsi, fenomenologi, interpretatif

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Relasi antara pemerintah, intelektual dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah sejak lama ada. Relasi yang dimaksud di sini adalah pada kesadaran peran kaum intelektual yang sangat sentral, seperti yang dikatakan Benda (1999:27-51). Kesadaran peran intelektual di sini lebih kepada perannya sebagai agen perubah dalam membangun negara, dengan ide-ide yang cemerlang, yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sementara di sisi yang lain bisa juga menjadi sumber permasalahan dan kerusakan. Sejalan dengan permasalahan di atas Kurzman dan Owens (2002:2-25), dalam studinya tentang sosiologi intelektual mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat, kaum intelektual selalu dihadapkan pada dilema etik pada pilihan yang memihak pada kekuasaan, konservatif dan alergi pada perubahan atau memilih posisi menjadi selalu kritis, otonomi dan independen pada pemerintah. Perdebatan dilema etik dalam sebuah wacana memicu sebuah ketegangan dan pilihan antara *Elitism* dan *Egalitarianism* dalam peran seorang intelektual. Tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut: memahami, menemukan dan memaknai kesadaran kaum intelektual (*Intellectual Craftsmanship*) dalam menghadapi tekanan. Dilema etik gerakan anti korupsi berupa kekuasaan dan politik. Memetakan peran gerakan anti korupsi sebagai gerakan kesadaran kaum intelektual baru (*Intellectual Craftsmanship*) gerakan anti korupsi dengan menggunakan pendekatan *public Issue* dan *personal trouble*. Dalam sebuah realita sosial, wacana ini selalu menemui benturan dalam dilema etik antara teori yang ditemukan dan prakteknya. Perbedaan ini memunculkan pertarungan etik. Kaum intelektual kesulitan melepaskan diri terutama di Asia (timur) kaum intelektual sendiri lebih banyak menjadi elite politik dari pada seorang intelektual yang independen, di sinilah kita melihat kaum intelektual di Timur (Asia) menghadapi pertarungan dilema etik antara idealisme keilmuan atau masuk menjadi *Elitisme rezim* yang berkuasa menurut Benda (1927:3). Pendekatan kultural diperlukan untuk menciptakan kesadaran masyarakat, tanpa kecuali, untuk tidak melakukan korupsi. Kesadaran itu diperlukan agar muncul pernyataan dan tekad bersama untuk menyingkalkan

budaya korup tersebut. Korupsi yang sudah menjadi budaya itu harus dirombak secara fundamental untuk menjadi budaya yang jujur, terbuka, dan transparan. Muara korupsi sebenarnya ada pada persoalan moral. Moralitas yang berinspirasi dari sumber nilai dan ajaran mana pun sudah jelas tidak membenarkan korupsi. Hampir semua agama dan institusi yang mengajarkan kebajikan mengharamkan korupsi dalam segala bentuk. Pada tataran ini persoalan sebenarnya sudah selesai. Yakni, tidak ada legitimasi sedikit pun bagi seseorang -secara moral untuk melakukan korupsi. Pendeknya, korupsi itu haram dan dilarang. Namun pada level praktis, kenyataannya tidak demikian. Apa yang diyakini sebagai hal haram dan terlarang masih sering dilakukan dan terus direproduksi, termasuk korupsi. Itulah paradoks dalam masyarakat kita bahwa antara yang diajarkan dan diyakini berbeda seratus delapan puluh derajat dengan apa yang dikerjakan dan dilakoni. Kalau begitu, kesadaran pun tidak cukup jika tidak sampai pada tataran perilaku. Pengetahuan dan pemahaman yang benar tidak selalu melahirkan tindakan yang benar.

Pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang pernyataan bahwa korupsi itu tidak dapat dibenarkan tidak begitu saja menjadikan orang tidak melakukan tindakan tidak benar itu. Di sinilah, struktur dan lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi mengambil perannya. Mengawal kesadaran yang benar menjadi perilaku yang benar. Penggolongan kaum intelektual oleh *Lewis Coser* dalam Soekito (1983:169-170) dibagi menjadi : (1) kaum intelektual yang mengejar kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, (2) Kaum Intelektual yang berusaha untuk membimbing dan menasehati orang-orang yang memegang kekuasaan dan kaum intelektual tersebut tidak memiliki kepentingan dalam kekuasaan tersebut, (3) Kaum intelektual yang membenarkan doktrin-doktrin serta membenamkan diri dalam pertikaian kepentingan dari rezim yang berkuasa serta selalu menyediakan perlengkapan pembenar, (4) Kaum Intelektual yang selalu mengkritik dan mengancam rezim berkuasa, (5) Kaum Intelektual yang putus asa berpaling pada system politik luar negeri berlindung serta berdalih selalu mengatasnamakan kepentingan masyarakat yang menaunginya. Banyaknya studi yang menggunakan perspektif penegakan hukum, penindakan dan pendekatan jaringan korupsi serta advokasi, yang semua berparadigma pada ekonomi politik, ini masih mengundang kritik, karena tidak dapat menilik tajam memberikan solusi yang komprehensif. Bahkan lebih jauh lagi, Faqih (1999 :125) mengatakan bahwa studi-studi tersebut belum dapat melihat peran otonomi dan independensi kaum intelektual yang sepertinya diabaikan, terutama karena dianggap terlalu mengedepankan kekuatan struktur yang membatasi kesadaran peran kaum intelektual.

Dari paparan yang sudah di jelaskan dalam latar belakang tentang peran kaum Intelektual, dapat disimpulkan bahwa peran dalam gerakan kesadaran kaum intelektual gerakan anti korupsi, dapat diangkat sebagai sebuah kajian melalui pendekatan keterlibatan peran individu sebagai aktor kreatif dalam konsep *Imajinasi Sosiologis*, yang mengemukakan tentang adanya *Intellectual Craftsmanship*. Dimana ini menjadi kekuatan penyeimbang dan perubah dalam masyarakat, yang disebabkan oleh kekecewaan terhadap kondisi system yang korup dan tidak kunjung membaik, bahkan semakin kacau akibat konspirasi-konspirasi tritunggal (Militer, Birokrat dan pengusaha) yang membentuk suatu tirani kekuasaan absolut. Walaupun demikian fokus dari studi tetap melihat pada peran individu yang secara kreatif memiliki kesadaran melawan ketidakadilan system yang korup dari tritunggal tersebut diatas. Perspektif dan cara pandang studi ini nantinya berdasarkan pada pemikiran *Mills* yang melihat sebuah kesadaran dari internal kehidupan (inner life) dan kebutuhan kehidupan (external career) berbagai individu. Dengan menggunakan analisis public issue Mills dan personal trouble ini sebagai konsep dasar analisis.

Dalam konteks penegakan kesadaran dilema etik secara empiris, dimana peran Kaum Intelektual mempunyai peran individu dalam memiliki kebebasan, kaum intelektual dalam melihat perannya dari sebuah Makroskopik dan molekular. Makroskopik disini terdiri dari mencoba menampilkan tipe-tipe fenomena historis dimana yang berhubungan dengan keseluruhan struktur sosial dalam berinteraksi, secara sistematis menghubungkan berbagai lingkungan institusional masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan tipe-tipe manusia yang ada (*Issue Umum/Public Issue*). Molekular, ditandai dengan masalah-masalah berskala kecil dengan kebiasaan menggunakan model skala interaksi lebih kecil (permasalahan individu/*Personal Trouble*), Mills didasarkan atas kecenderungan individu untuk terlibat dalam masyarakat dan struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial yang ada. Individu diasumsikan mampu untuk merubah pola-pola yang ada dalam struktur dengan kesadaran sejarah atau pengalaman yang ia refleksikan dalam kehidupannya. Artinya bahwa kebebasan individu dan kesadarannya pada masyarakat dan lembaga ditentukan oleh tingkah laku individu yang sedang dalam keadaan goncang atau kerumitan yang ia alami di lingkungannya. Dalam Bahasa Mills mempertemukan *Public Issue (Makroskopik)* dan *Personal Trouble (molekuler)* dipertemukan dalam sebuah *Imajinasi Sosiologi* merupakan kemampuan untuk menangkap sejarah dan biografi serta daya gunanya dalam masyarakat. *Mills* menambahkan pada tekanan sosial sosiologis terletak di dimensi sejarah dan kesadaran akan pengaruh kekuasaan terhadap struktur sosial.

Studi ini dimaksudkan bukan hanya untuk sekedar mengaplikasikan teori *C. Wright Mills* dalam *Sociology Imagination* tentang peran kaum intelektual (*Intellectual Craftsmanship*) terutama di Indonesia saja, melainkan lebih jauh dari itu, untuk melihat dinamika atau kompleksitas teoritik yang muncul ketika terjadi kesenjangan antara teori yang lahir dari akar pemikiran konteks historis dengan realitas sosial yang ada, dan juga untuk melihat fenomena dari konteks yang berbeda dalam kaitannya dengan peran sosiologi intelektual. Ideologi dan cita-cita *C. Wright Mills* dalam karya fenomenalnya, "*Sociology Imagination*", membayangkan adanya sosok yang disebut sebagai, "*Intellectual Craftsmanship*" yaitu seorang intelektual yang memiliki kesadaran dalam kecermelangan untuk mengaktualisasikan sebuah solusi atas perubahan, dalam fenomena permasalahan sosial yang muncul di masyarakat.

METODE

Konsep kesadaran kaum intelektual gerakan anti korupsi menurut fenomenologi *Alfred Schutz* dipakai untuk melihat sebuah realitas kemunafikan sampai dengan realitas vulgar pada praksis korupsi semakin menegaskan suatu eksistensi realita "kerentanan" yang bergerak semakin kompleks hingga menyentuh pada dimensi realita keahlian yang dianggap sakral, bahkan dimensi tersebut semakin merumitkan visualisasi mayoritas masyarakat oleh pembungkusan secara rapi dengan pemanfaatan (eksploitasi) maksimal nilai-nilai keahlian.

Keterkaitan konsepsi dasar yang dikemukakan *C. Wright Mills* dalam konsep imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi memfokuskan konsep personal trouble dan public Issue adalah tahapan dalam membangun sebuah kesadaran awal, sedangkan selanjutnya adalah inner life dan eskternal career membangun sebuah kesadaran, dan yang terakhir adalah membangun kesadaran terakhir adalah dengan konsep makroskopik dan molekuler untuk mendapatkan kesadaran terakhir yaitu *counciusness*. Dengan Pendekatan metode fenomenologi yang berangkat dalam sebuah history of life dalam life world sangat tepat digunakan dengan 3 landasan antara lain adalah :

- a. Landasan pertama adalah ontology fenomenologi Schutz yaitu konsep-konsep pemikiran dari Weber tentang relevansi nilai, pemahaman (*verstehen*) dan konsep tipe ideal.
- b. Landasan kedua adalah epistimologi *Schutz* yang memandang bahwa penguasaan manusia terhadap makna yang timbul dari motivasi atau disebut dengan makna motivasi, tindakan dan proses pemahaman manusia sebagai makhluk yang berpikir.

- c. Landasan Ketiga adalah aksiologi, sebagai bagian dari metode penelitian kualitatif, penelitian fenomenologi *Alfred Schutz* banyak dipengaruhi *Weberian*, sisi yang sangat kental dari fenomenologi Alfred Schutz banyak melihat konstruksi pemaknaan sangat intersubyektif menjadi sisi kelebihan pendekatan fenomenologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini didapatkan

1. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa bagaimana memahami, menemukan serta memaknai kesadaran kaum intelektual (*Intellectual Craftsmanship*) dalam menghadapi tekanan dilema etik berupa kekuasaan dan politik dalam gerakan anti korupsi, dimana studi ini memilih 7 orang intelektual akademisi dari perguruan tinggi yang terdapat di Jawa Timur dan semuanya adalah PTN, Alasan dari Kriteria ini untuk mendapatkan pemahaman bahwa gerakan budaya anti korupsi harus di mulai dari tempat atau sumber awal dimana para intelektual-intelektual di lahirkan. Sosok yang di temukan dalam studi ini adalah kaum intelektual akademisi yang tidak hanya sebagai pengajar saja tapi mereka rata-rata mempunyai keterlibatan dalam gerakan budaya anti korupsi di kampus yang masuk dalam pusat-pusat studi anti korupsi. Sedangkan dalam memaknai gerakan kesadaran budaya anti korupsi dalam studi ini 7 orang obyek penelitian menyebutkan gerakan kesadaran adalah gerakan yang disebut oleh obyek penelitian sebagai "*kesalehan sosial*", khusus istilah kesalehan sosial ini sebagai sebuah bentuk kesadaran tidak hanya berteori saja di kampus tapi mereka turun ke masyarakat dan menggerakkan semua stake holder di masyarakat untuk melawan korupsi.
2. Memetakan peran gerakan anti korupsi sebagai gerakan kesadaran kaum intelektual baru (*Intellectual Craftsmanship*) gerakan anti korupsi dengan menggunakan pendekatan *public Issue* dan *personal trouble*. Konsep gerakan budaya kesadaran anti korupsi disini para intelektual di kampus yang menjadi obyek penelitian adalah mereka yang memiliki historisitas keluarga (*personal Trouble*), ketika masih kecil menjadi bagian individu keluarga yang sudah sejak awal orang tua mereka punya keterlibatan dalam pengorganisasian di masyarakat yang cukup militan. Seperti pengorganisasi petani dalam reklamng lahan, pengorganisasian buruh dalam menuntut hak dan UMR, serta pengorganisasian pedagang di pasar serta pengorganisasian tenaga kesehatan dan guru honorer. Artinya disini sebagai seorang pengajar background historisitas

orang tua mereka sangat menginspirasi dan tertanam sangat kuat dalam pandangan, prinsip kehidupan mereka yang akhirnya menjadi kebiasaan dan budaya ketika menjadi intelektual akademisi. Prinsip seperti budaya kerja keras dan anti korupsi.

3. Gerakan budaya kesadaran anti korupsi menjadi gerakan yang sangat jarang dilakukan oleh golongan intelektual akademisi. Hal ini disebabkan oleh tekanan dilema etik akan saat gerakan kesadaran anti korupsi bertemu dalam sebuah peran individu sebuah struktur yang terdistimatis yang sangat korup. Pilihan yang akan dihadapi golongan intelektual hanya ada dua macam, yaitu melawan dengan gerakan kesadaran yang harus siap dengan terlempar dari struktur tersebut atau Bahasa yang lugas dalam karya *C. Wright Mills* disebut sebagai golongan intelektual terkucilkan. Pilihan lain adalah mengikuti sistem yang korup dan menjadi kelompok intelektual "pesanan" (coser dalam Sujadmoko dan Soekito, 1983:25). Kedua pilihan ini mengundang pilihan dilema etik yang tidak mudah dilakukan dalam sebuah pilihan pekerjaan yang dilakukan. Dari pilihan tersebut memunculkan konsepsi baru tentang tahapan kesadaran yang dipengaruhi dalam 3 tahapan yaitu:
 1. Awakness (masih dalam wacana), tentang gerakan kesadaran budaya anti korupsi
 2. Awareness (sudah ada dalam Pemikiran), tentang gerakan kesadaran budaya anti korupsi
 3. Conciousness (melakukan dalam sebuah tindakan), tentang gerakan kesadaran budaya anti korupsi dengan mengembalikan pada hakekat kehidupan (Inner life dalam konsepsi Milss, 1959).

SIMPULAN

Dari Hasil Penelitian didapatkan bahwa gerakan kesadaran dalam budaya anti korupsi para intelektual Akademisi dengan perspektif dan pendekatan peran "Intellectual Craftmanship" yang dikemukakan oleh *C. Wright Mills*, sepertinya dalam penelitian ini menerima teori yang diungkapkan oleh *C. Wright Mills* tersebut, hanya menyempurnakan karena karya *C. Wright Mills* dalam karya peran "Intellectual Craftmanship" tidak pernah menjelaskan sejauh mana conciousness. Oleh Karena itu penelitian ini berusaha memperjelas konsepsi yang dikemukakan oleh *C. Wright Mills* (Kesadaran dalam tindakan)

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Z.W. & Boyd, S.E., 2010. Ethical challenges in the treatment of individuals with intellectual disabilities. *Ethics & Behavior*, 20(6), pp.407–418.
- Adisa, W.B., 2014. The Middle Class and Political Transformation in Nigeria: an Appraisal of the Role of Asuu and Nba. , 10(28), pp.383–404.
- Alatas, S.F., 2015. Doing Sociology corruption in South East.
- Autonome, L., Alatas, S.H. & Alatas, S.H., 2006. Resumes/Resumenes. *Current Barratt, E., 2014. C. Wright Mills, power and the power elites – a reappraisal. Management & Organizational History*, 9(1), pp.92–106. Available at: Barratt, E., 2011. Re-Reading C. Wright Mills. *Organization*, 18(5), pp.707–724. Available at: <http://org.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1350508410397223>.
- Barrow, C.W., 2007. Plain Marxists, Sophisticated Marxists, and C. Wright Mills' The Power Elite. *Science & Society*, 71(4), pp.400–430.
- Beamish, R., 2015a. Book Review Symposium: John Scott and Ann Nilsen (eds), C Wright Mills and the Sociological Imagination: Contemporary Perspectives. *Sociology*.
- Beamish, R., 2015b. Book Review Symposium: John Scott and Ann Nilsen (eds), C Wright Mills and the Sociological Imagination: Contemporary Perspectives. *Sociology*. Available at:
- Le Billon, P., 2008. Corrupting Peace? Peacebuilding and Post-conflict Corruption. *International Peacekeeping*, 15(3), pp.344–361.
- Birrell, P.J., 2006. An Ethic of Possibility: Relationship, Risk, and Presence. *Ethics & Behavior*, 16(2), pp.95–115. Available at:
- Bishop, S., 2011. Systematic review The effectiveness of anti-corruption policy What has worked, what hasn't, and. (July).
- Brewer, J.D., 2005. The public and private in C. Wright Mills's life and work. *Sociology*, 39(4), pp.661–677.
- Bridges, A. & Kronick, R., 1999. Writing the rules to win the game - The middle-class regimes of municipal reformers. *Urban Affairs Review*, 34(5), pp.691–706.
- Bridoux, J. & Gebel, A., 2012. Flexibility versus Inflexibility: discursive discrepancy in US democracy promotion and anti-corruption policies. *Third World Quarterly*, 33(10), pp.1945–1963.
- Brown, J.J., 2008. From Friday to Sunday: the hacker ethic and shifting notions of labour, leisure and intellectual property. *Leisure Studies*, 27(4), pp.395–409. Available at: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02614360802334922>.
- Brown, R.A., 2006. Indonesian Corporations, Cronyism, and Corruption. *Modern Asian Studies*, 40(04), p.953. Available at: Budiman,

- A., Roan, A. & Callan, V.J., 2013. Rationalizing Ideologies, Social Identities and Corruption Among Civil Servants in Indonesia During the Suharto Era. *Journal of Business Ethics*, 116(1), pp.139–149.
- Budiman, M., 2011. The middle class and morality politics in the envisioning of the nation in post-Suharto Indonesia. *Inter-Asia Cultural Studies*, 12(4), pp.482–499.
- Bunbongkarn, S., 2001. The role of kaum Intelektualin democratic consolidation in Asia. *Center for International Exchange*, pp.137–144. Available at: Burawoy, M., 2008. Homo Ludens vs. Homo Habitus: Burawoy meets Bourdieu. *Conversations with Pierre Bourdieu: The Johannesburg Moment*, (1958), pp.1–17.
- Burawoy, M., 2009. Open Letter to C. Wright Mills. *Practising Public Scholarship: Experiences and Possibilities Beyond the Academy*, 40(3), pp.18–28.
- Burawoy, M., 2007. Public Sociology: Mills vs. Gramsci. Introduction to the Italian Translation of “For Public Sociology.” *Sociologica. Italian Journal of Sociology Online*, (1), pp.7–13.
- Campbell, N. & Saha, S., 2013. Corruption, democracy and Asia-Pacific countries. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 18(2), pp.290–303. Available at: Canlan, S.T.J.S. & Editor, G.U., 2015. Introduction 50. , 37(1962), pp.1–7.
- Cappuccio, A.D.M., 2012. The relationship between dialect, theatre, and power in Antonio Gramsci. *The Italianist*, 32(1), pp.67–83. Available at: Chang, E.C.C. & Chu, Y.H., 2006. Corruption and trust: Exceptionalism in Asian democracies? *Journal of Politics*, 68(2), pp.259–271.
- Cheang, T., 1987. ASIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION CORRUPTION IN ASIA WITH SPECIAL REFERENCE TO SINGAPORE : PATTERNS AND CONSEQUENCES Jon S . T . Quah. , pp.80–98.
- Cokgezen, M., 2004. Corruption in Kyrgyzstan: the facts, causes and consequences. *Central Asian Survey*, 23(1), pp.79–94. Available at:
- Cole, W.M., 2015a. Institutionalizing a global anti-corruption regime: Perverse effects on country outcomes, 1984–2012. *International Journal of Comparative Sociology*, 56, pp.53–80.
- Cole, W.M., 2015b. Institutionalizing a global anti-corruption regime: Perverse effects on country outcomes, 1984–2012. *International Journal of Comparative Sociology*, 56, pp.53–80.
- Connelly, B.S. & Ones, D.S., 2008. The Personality of Corruption: A National-Level Analysis. *Cross-Cultural Research*, 42(4), pp.353–385.
- Creswel, J.W., 2008. The Selection of a Research Approach. *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Dainotto, R., 2011. Gramsci’s bibliographies. *Journal of Modern Italian Studies*, 16(2), pp.211–224. Available at:
- Dandaneau, S.P., 2009. Sisyphus had it Easy: Reflections of Two Decades of Teaching the Sociological Imagination. *Teaching Sociology*, 37(1), pp.8–19. Available at:
- Davidson, A., 2008. The Uses and Abuses of Gramsci. *Thesis Eleven*, 95(1), pp.68–94.
- Davidson, J.S., 2007. Politics-as-usual on trial: regional anti-corruption campaigns in Indonesia. *The Pacific Review*, 20(1), pp.75–99.
- Davis, J.H., Ruhe, J. a & Ruhe, A., 2012. Perceptions of Country Corruption: Antecedents and Outcomes Perceptions Corruption: and Outcomes of Country Antecedents James. *Journal of Business Ethics*, 43(4), pp.275–288.
- Dungan, J., Waytz, A. & Young, L., 2014. Corruption in the context of moral trade-offs. *Journal of Interdisciplinary Economics*, 26(1-2), pp.97–118.
- Ekman, A., 2015. China’s Emerging Middle Class: What Political Impact? *Asie Visions*, 76(June).
- Evertsson, N., 2013. Political Corruption and Electoral Funding: A Cross-National Analysis. *International Criminal Justice Review*, 23(1), pp.75–94. Available at: <http://icj.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/1057567713476886>.
- Ewins, P. et al., 2006. Mapping the Risks of Corruption in Humanitarian Action. , (July).
- Eyal, G. & Buchholz, L., 2010. From the Sociology of Intellectuals to the Sociology of Interventions. *Annual Review of Sociology*, 36(1), pp.117–137.
- Fadaee, S., 2014. India’s New Middle Class and the Critical Activist Milieu. *Journal of Developing Societies*, 30(4), pp.441–457.
- Faqih, Mansour, 2002), *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, (Yogyakarta: INSIST).
- Faqih, Mansour 1997, *Agama dan Proses Demokratisasi di Indonesia Suatu Analisis Kritis, Nasionalisme Refleksi Krisis Kaum Ilmuwan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.).
- Form, W., 2001. C. Wright Mills: Letters and Autobiographical Writings. *Contemporary Sociology*, 30, pp.327–328.
- Form, W., 2007. Memories of C. Wright Mills: Social Structure and Biography. *Work and Occupations*, 34(2), pp.148–173.
- Frantz, G., 2013. Psychological Perspectives : A Quarterly Journal of Jungian Aging and Individuation. , (August), pp.37–41.
- Frith, C., 2010. What is consciousness for? *Pragmatics & Cognition*, 18(3), pp.497–551. Available at: <http://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/pc.18.3.03fri>.

- Gamber, W., 2005. Away from Home: Middle-Class Boarders in the Nineteenth-Century City. *Journal of Urban History*, 31(3), pp.289–305.
- Geary, D., 2001. The “union of the power and the intellect”: C. Wright Mills and the labor movement. *Labor History*, 42(4), pp.327–345.
- Gephart, M., 2015. Contested meanings in the anti-corruption discourse: international and local narratives in the case of Paraguay. *Critical Policy Studies*, 9(2), pp.119–138. Available at:
- Ghatak, A. & Iyengar, S., 2014. Corruption Breeds Corruption. *Studies in Microeconomics*, 2(1), pp.121–132. Available at:
- Gingerich, D.W., 2009. Ballot Structure, Political Corruption, and the Performance of Proportional Representation. *Journal of Theoretical Politics*, 21(4), pp.509–541.
- Gingerich, D.W., 2013. Yesterday’s heroes, today’s villains: Ideology, corruption, and democratic performance. *Journal of Theoretical Politics*, 26(2).
- Giroux, H. a., 2003. Betraying the Intellectual Tradition: Public Intellectuals and the Crisis of Youth. *Language and Intercultural Communication*, 3(3), pp.172–186.
- Gómez-Vilchis, R.R., 2012. Democratic Transition and Presidential Approval in Mexico. *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, 28(1), pp.43–71. Available at:
- Gong, T. & Wu, A.M., 2012. Does Increased Civil Service Pay Deter Corruption? Evidence from China. *Review of Public Personnel Administration*, 32(2), pp.192–204. Available at:
- Goode, E., 2008. From the Western To the Murder Mystery: the Sociological Imagination of C. Wright Mills. *Sociological Spectrum*, 28(3), pp.237–253. Available at: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02732170801898265>.
- Gramsci, A., 1999. *SELECTIONS FROM THE PRISON NOTEBOOKS OF ANTONIO GRAMSCI*, Available at
- Harrison, E., 2006. Unpacking the Anti-corruption Agenda: Dilemmas for Anthropologists. *Oxford Development Studies*, 34(1), pp.15–29. Available at:
- Heryanto, A. & Hadiz, V.R., 2005. Post-authoritarian Indonesia. *Critical Asian Studies*, 37(2), pp.251–275. Available at:
- Holmen, H. & Jirstrom, M., 2009. Look Who’s Talking!: Second Thoughts about NGOs as Representing gerakan kaum intelektual. *Journal of Asian and African Studies*, 44, pp.429–448.
- Holmes, L., 2012. Corruption in Post-Soviet Russia. *Global Change, Peace & Security*, 24(2), pp.235–250. Available at:
- Hough, D., 2013. The Rise and Rise of the Global Anti-Corruption Movement. *Corruption, Anti-Corruption and Governance*, pp.12–30.
- Ives, P., 2009. Prestige, Faith, and Dialect: Expanding Gramsci’s Engagement. *Rethinking Marxism*, 21(3), pp.366–374. Available at:
- Jain, S.C. & Lehrer, B.R., 2008. Regulating Supply Side Corruption Regulating Supply Side Corruption : American Investors in the Republic of Kazakhstan. , 9868(September).
- Jones, D.M., 1995. Asia ’ s Rising Middle Class : Not a Force for Change.
- Keaney, M., 2001. State Versus Society: the Political Sociology of Irving Louis Horowitz. *Critical Sociology*, 27(3), pp.43–73.
- KEARNEY, J.A., 1987. George Eliot: the Intellectual Vs. Intellect? *English Studies in Africa*, 30(1), pp.17–26. Available at:
- Kenney, D.J.A.Y. & Godson, R.O.Y., 1998. Countering crime and corruption. *Trends in Organized Crime*, 4(200211), pp.2–3.
- Khan, M., 1998. The role of kaum Intelektualand patron-client networks in the analysis of corruption. *Eprints.Soas.Ac.Uk*, pp.1–14. Available at:
- Khandekar, A. & Reddy, D.S., 2013. An Indian summer : Corruption, class, and the Lokpal protests. *Journal of Consumer Culture*, p.1469540513498614.
- Khayatt, A., 2008. The Arab Anti- corruption Organization. *Contemporary Arab Affairs*, 1(3), pp.471–477.
- Khondker, H.H., 2006. Sociology of Corruption and “Corruption of Sociology”: Evaluating the Contributions of Syed Hussein Alatas. *Current Sociology*, 54(1), pp.25–39.
- Kim & Suk, P., 2008. Comparative Governance Reform in Asia: Democracy, Corruption, and Government Trust. , 17(2), pp.155–178. Available at:
- Kimura, E., 2011. Indonesia in 2010: a leading democracy disappoints on reform. *Asian Survey*, 51(1), pp.186–195.
- King, D.Y., 2000b. Corruption in Indonesia: A Curable Cancer? *Journal of International Affairs*, 53(2), pp.109–119.
- Kingsbury, D., 2007. Indonesia in 2006: Cautious Reform. *Asian Survey*, 47(1), pp.155–161.
- Koelble, T. a. & Lipuma, E., 2008. Democratizing Democracy: A Postcolonial Critique of Conventional Approaches to the “Measurement of Democracy.” *Democratization*, 15(1), pp.1–28.
- Koller, A., Mills ’ Anticipation of Habermas ’ Structural Transformation of the Public Sphere. *Social Science Research*, pp.1–23.

- Kolstad, I. & Wiig, A., 2011. Does democracy reduce corruption? *Working Paper - Chr. Michelsen Institute*, 0347(4), pp.1–25.
- Kontler, L.L., 2004. Beauty or Beast, or Monstrous Regiments? Robertson and Burke on Women and the Public Scene. *Modern Intellectual History*, 1(3), pp.305–330.
- Krug, J.F., 2003. Intellectual Freedom and ALA: Historical Overview. *Encyclopedia of Library and Information Science*, (January).
- Kupatadze, A., 2012. Explaining Georgia's anti-corruption drive. *European Security*, 21(1), pp.16–36. Available at: <http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2012.656597>.
- Kupatadze, A., 2015. Political corruption in Eurasia: Understanding collusion between states, organized crime and business. *Theoretical Criminology*, 19(2), pp.198–215..
- Kurzman, L.O. and C., 1993. The Sociology of Intellectuals. *Theory, Culture & Society*, 10(3), pp.69–80.
- Kwon, P.O.Y., 2015. [The Korean Economy and Society under Globalization – ISS3121]. , 36(2014), pp.1–11.
- Langseth, P., 2006. Measuring Corruption. *Measuring Corruption*, pp.7–44.
- Larmour, P. & Wolanin, N., 2001. Corruption and Anti-Corruption.
- LARMOUR, P. & Wolanin, N., 2006. Corruption and anti-corruption. *Economic Theory*, (November), p.p. 286.
- Leite, C.A.D.C. & Weidmann, J., 1999. Does mother nature corrupt? Natural resources, corruption, and economic growth. *IMF Working Paper No. 99/85*, pp.1–34. Available at:.
- Leventoglu, B., 2005. Social Mobility and Political Transitions. *Journal of Theoretical Politics*, 17(0), pp.465–496.
- Li, H., Gong, T. & Xiao, H., 2015. The Perception of Anti-corruption Efficacy in China: An Empirical Analysis. *Social Indicators Research*.
- Li, H., Tang, M. & Huhe, N., 2015. How does democracy influence citizens' perceptions of government corruption? A cross-national study. *Democratization*, (in press), pp.1–27. Available at:.
- Lough, B.J., 2008. Engaging the poor to challenge corrupt governance. *International Social Work*, 51(4), pp.532–543.
- Luo, Y., 2002. Corruption and Organization. , (August 2000), pp.405–422.
- Lynch, M., 2014. Going Global in Asia: Emerging Trends and Economic Insights of Asia Pacific . *Bank of America*, (August), p.8.
- Mace, M.-A. & Ward, T., 2002. Modeling the Creative Process: A Grounded Theory Analysis of Creativity in the Domain of Art Making. *Creativity Research Journal*, 14(2), pp.179–192..
- Maeda, K. & Ziegfeld, A., 2015. Socioeconomic status and corruption perceptions around the world. *Research & Politics*, 2(2).
- Maggs, G. & Greig, A., 1997. C. Wright Mills and the Concept of “Craftsmanship”: Personal Troubles and Public Issues in the Housebuilding Industry. *Labour & Industry: a journal of the social and economic relations of work*, 7(3), pp.67–83..
- Maia, J.M., 2014. History of sociology and the quest for intellectual autonomy in the Global South: The cases of Alberto Guerreiro Ramos and Syed Hussein Alatas. *Current Sociology*, 62(7).
- Martin, J., 2014. Intellectual portraits: politics, professions and identity in twentieth-century England. *History of Education*, 43(6), pp.740–767. Available at:.
- Martin, J., 2010. Stew of Discontent: “Middle Class” Americans’ Economic Populism in The 1990s and Beyond. *Humanity and Society*, 34, pp.350–378.
- Martin, J. & Martin, J., 2008. intellectuals Between ethics and politics: Gramsci ’ s theory of intellectuals. , (October 2014), pp.37–41.
- Meagher, P., 2005. Anti--corruption agencies: Rhetoric Versus reality. *The Journal of Policy Reform*, 8(1), pp.69–103.
- Megill, A., 2004. Intellectual History and History. *Rethinking History*, 8(4), pp.549 – 557.
- Memenuhi, U., Mata, T. & Pendidikan, K., 2011. Fenomena korupsi.
- Mercer, C. & Mercer, C., 2002. Progress in Development Studies NGOs , kaum Intelektualand democratization : a critical review of the literature. , 1, pp.5–22.
- Merli, P., 2010a. Antonio Gramsci, Prison notebooks. *International Journal of Cultural Policy*, 16(1), pp.53–55..
- Merli, P., 2010b. Antonio Gramsci, *Prison notebooks*. *International Journal of Cultural Policy*, 16(1), pp.53–55.
- Michael, B. & Polner, M., 2008. Fighting corruption on the transdnistran border: Lessons from failed and new successful anti-corruption programmes. *Transition Studies Review*, 15(3), pp.524–541.
- Miklian, J. & Carney, S., 2013. Corruption, Justice and Violence in Democratic India. *SAIS Review*, 33(1), pp.37–49
- Miller, E., 2005. Thorstein Veblen, John Dewey, C. Wright Mills, and the generic ends of life. *Journal of Economic Issues*, 39(4), pp.1086–1088..
- Mills, Wright, C, *Sociological Imagination*, Oxford Press, Fourteen Edition, 1962,
- Mills, Wright, C, *The Power Of Elite*, Oxford Press, New Edition, 1956,

- Mills, B.C.W., The Promise of the Sociological Imagination. , pp.1–8.
- Mills, C.W. & Knowledge, U., 1969. The Incoherence of the Intellectual. , (April).
- Mir, R. & Mir, a., 2002. The Organizational Imagination: From Paradigm Wars to Praxis. *Organizational Research Methods*, 5(1), pp.105–125.
- Morgan, M.F., Cuskelly, M. & Moni, K.B., 2014. Unanticipated ethical issues in a participatory research project with individuals with intellectual disability. *Disability & Society*, 29(8), pp.1305–1318..
- Morris, S.D. & Klesner, J.L., 2010. Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence From Mexico. *Comparative Political Studies*, 43(10), pp.1258–1285.
- Mukherjee, R., 2007. Indian Historical Review. , pp.1–3.
- Muller, J.-W., 2006. Julien Benda’s Anti-Passionate Europe. *European Journal of Political Theory*, 5(2), pp.125–137.
- Musila, J.W., 2013. Does Democracy Have a Different Impact on Corruption in Africa? *Journal of African Business*, 14(3), pp.162–170..
- Naidoo, V., 2013. The politics of anti-corruption enforcement in South Africa. *Journal of Contemporary African Studies*, 31(July 2014), pp.523–542..
- Newell, J.L., 2008. Introduction: Corruption and Democracy in Western Europe. *Perspectives on European Politics and Society*, 9(1), pp.1–7..
- Nieto-Galan, A., 2011. Antonio gramsci revisited: Historians of science, intellectuals, and the struggle for hegemony. *History of Science*, 49(4), pp.453–478.
- Noor, M. Al, Rahman, M. & Uddin, M., 2011. Corruption Impacts , Effects and Fluctuations in Ten Distinct Asian Countries. *European Journal of Business and Management*, 3(4), pp.39–56.
- O’Connor, S. & Fischer, R., 2012. Predicting Societal Corruption Across Time: Values, Wealth, or Institutions? *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 43(4), pp.644–659.
- Olsen, W.P., 2010. The anti-corruption handbook. How to protect your business in the global marketplace. , p.172.
- Orjuela, C., 2014. Corruption and identity politics in divided societies. *Third World Quarterly*, 35(5), pp.753–769..
- Paetzold, H. & Blauvelt, A., 2007. The role of the intellectual in postmodern culture.pdf. *Design Beyond Design*, (January 2015), pp.35–51.
- Pellegata, A., 2013. Constraining political corruption: an empirical analysis of the impact of democracy. *Democratization*, 20(7), pp.1195–1218.
- QIZILBASH, M., 2008. Two Views of Corruption and Democracy. *Review of Political Economy*, 20(2), pp.275–291.
- Quah, J.S.T., 2008. Anti-Corruption Agencies in Four Asian Countries: A Comparative Analysis. *Comparative Governance Reform in Asia: Democracy, Corruption, and Government Trust*, 8(2), pp.85–110.
- Quah, J.S.T., 2013. Combating Corruption in Asian Countries : What Lessons Have We Learnt?*. , pp.18–19.
- Quah, J.S.T., 1997. Corruption in Asian Countrues: Can It Be Minimized? *iPublic Administration and Public Policy*, II(1).
- Quazi, R.M., 2014. Corruption and Foreign Direct Investment in East Asia and South Asia : An Econometric Study 1. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 4(2), pp.231–242.
- R, J.W., 2000. Department of Sociology, Eastern Connecticut State University. , pp.147–158.
- Reyes, V.C., 2009. Systemic Corruption and the Programme on Basic Education in the Philippine Department of Education. *Journal of Developing Societies*, 25(4), pp.481–510.
- Rock, M.T., 2009. Corruption and Democracy. *Journal of Development Studies*, 45(1), pp.55–75.
- Rodrigues, U., 2014. This is the published version : Available from Deakin Research Online : Social media ’ s impact on journalism : A study of media ’ s coverage of anti-corruption protests in India.
- Rose-Ackerman, S., 2013. Anti-Corruption Policy: Can International Actors Play a Constructive Role? *University of Pennsylvania Journal of International Law*, forthcoming.
- Rose-Ackerman, S., 1999. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. *Ch 4 Reducing Incentives and Increasing Costs*, p.263..
- Rose-Ackerman, S., 1997. Corruption: Causes, consequences and cures. *Trends in Organized Crime*, 3(1), pp.109–111.
- Rosengarten, F., 2010. On Intellectuals, Engaged and Otherwise (With an Afterword on Thomas Mann’s Use of Intellectual Reflection in the Novella Mario and the Magician). *Italian Culture*, 28(2), pp.157–167.
- Rothstein, B., 2011. Anti-Corruption: The Indirect “Big-Bang” Approach. *Review of International Political Economy*, 18(2), p.228 — 250.
- Saccarelli, E., 2011. the Intellectual in Question. *Cultural Studies*, 25(6), pp.757–782..
- Sage, G.H., 2015. Assessing the sociology of sport: On social consciousness and social movements. *International Review for the Sociology of Sport*, 50(4-5).

- Saha, J., 2010. The Male State: Colonialism, Corruption and Rape Investigations in the Irrawaddy Delta c. 1900. *Indian Economic and Social History Review*, 47(3), pp.343–376
- Said, E.W., 1978. Orientalism. *Race & class*, 27(2), p.1. Available at:
- Said, E.W., 1993. Reith Lectures 1993: Representations of the Intellectual. Lecture 1. , (June), pp.1–8. Available at:
- Scott, J. & Nilsen, A., 2013a. C. Wright Mills and the Sociological Imagination. *Contemporary Perspectives*.
- Scott, J. & Nilsen, A., 2013b. C. Wright Mills and the Sociological Imagination. *Contemporary Perspectives*. , pp.17–44.
- Setiyono, B. & McLeod, R.H., 2010. Gerakan kaum intelektual organisations' contribution to the anti-corruption movement in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(3), pp.347–370.
- Seybold, P., 2012. Radical Ambition: C. Wright Mills, the Left, and American Social Thought. *Socialism and Democracy*, 26(2), pp.156–159.
- Shear, B., 2008. Gramsci, Intellectuals, and Academic Practice Today. *Rethinking Marxism*, 20(1), pp.55–67..
- Shen, C., 2005. Corruption, Democracy, Economic Freedom, and State Strength: A Cross-national Analysis. *International Journal of Comparative Sociology*, 46(4), pp.327–345.
- Shim, D.C. & Eom, T.H., 2009. Anticorruption effects of information communication and technology (ICT) and social capital. *International Review of Administrative Sciences*, 75(1), pp.99–116.
- Stachowicz-Stanusch, A., 2013a. The Relationship between National Intellectual Capital and Corruption: A Cross-National Study. *Journal of Business Economics and Management*, 14(1), pp.114–136. Available at:
- Steves, F. & Rousso, A., 2003. Anti-corruption programmes in post-communist transition countries and changes in the business environment, 1999-2002. *EBRD Working papers*, (85), pp.1–40.
- Soekito, Wiratmo, 1983, *Cendekiawan dan Politik* Penerbit LP3ES, Jakarta
- Studies, A. & Studies, A., 2010. Daniel Geary, Radical Ambition: C. Wright Mills, the Left, and American Social Thought (Berkeley: University of California Press, 2009, £20.95). Pp. 296. , 44.
- Stutchbury, K. & Fox, A., 2009. Ethics in educational research: introducing a methodological tool for effective ethical analysis. *Cambridge Journal of Education*, 39(4), pp.489–504. Available at:
- Summers, J.H., 2006. Perpetual Revelations: C. Wright Mills and Paul Lazarsfeld. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 608(1), pp.25–40.
- Talshir, G., 2005. The intellectual as a political actor? Four models of theory/praxis. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 8(2), pp.209–224..
- Taylor, R.P. et al., 2016. Visualize Your Intellectual Property. , 6308(January), pp.20–33.
- Themudo, N.S., 2014. Government Size, Nonprofit Sector Strength, and Corruption: A Cross-National Examination. *American Review of Public Administration*, 44(3).
- TI, 2013. 2013 Corruption Perceptions Index. *Transparency International*.
- Torenvlied, R. & Klein Haarhuis, C.M., 2008. Polarization and Policy Reform: Anti-Corruption Policymaking in Sub-Saharan Africa. *Journal of Peace Research*, 45(2), pp.223–240. Available at:
- Torsello, D. & Venard, B., 2015. The Anthropology of Corruption. *Journal of Management Inquiry*.
- Travis, F. & Pearson, C., 2000. Pure consciousness: distinct phenomenological and physiological correlates of “consciousness itself”. *The International journal of neuroscience*, 100(1-4), pp.77–89. Available at:
- Trevino, A.J., 2010. Review Essay: The Symbol and Substance of C. Wright Mills: Daniel Geary Radical Ambition: C. Wright Mills, the Left, and American Social Thought Berkeley, CA: University of California Press, 2009, 20.95 cloth (ISBN: 9780520258365), 277 pp. Tom Hayden Rad. *Sociology*, 44(3), pp.577–583..
- Ui, F., 2008. Kebijakan kriminal..., Bagus Sudarmanto, FISIP UI, 2008. , pp.18–24.
- Villalon, R., 2007. Neoliberalism, Corruption, and Legacies of Contention: Argentina's Social Movements, 1993-2006. *Latin American Perspectives*, 34(2), pp.139–156.
- Wang, L.L., 1998. Beyond Identity and Racial Politics: Asian Americans and the Campaign Fund-raising Controversy Beyond Identity and Racial Politics: , 5(January).
- Warsta, M., 2004. CORRUPTION IN THAILAND Swiss Federal Institute of Technology. *Reading*.
- Webb, M., 2013. Disciplining the everyday state and society? Anti-corruption and Right to Information activism in Delhi. *Contributions to Indian Sociology*, 47(3), pp.363–393..
- van Wessel, M., 2004. Talking about Consumption: How an Indian Middle Class Dissociates from Middle-Class Life. *Cultural Dynamics*, 16(1), pp.93–116.
- Wheary, J., 2010. The Global Middle Class is Here: Now What? *World Policy Journal*, 26(4), pp.75–83.
- Wickberg, D., 2001. Intellectual history vs the social history of intellectuals. *Rethinking History*, 5(3), pp.383–395.

- Wilkinson, I., 2012. With and Beyond Mills : Social Suffering and the Sociological Imagination. *Cultural Studies<=> Critical Methodologies*, 12(3), pp.182–191.
- Woodward, C., 1956. Review: THE POWER ELITE , by C . Wright Mills. *Louisiana Law Review*, 17(1), pp.1–7.
- Yadav, V., 2011. Legislative Institutions and Corruption in Developing Country Democracies. *Comparative Political Studies*, 45(8), pp.1027–1058. Available at: .
- Yolles, 2010. Understanding corruption. *Journal of Organisation Transformation & Social Change*, 7(2).
- Yu, C., Chen, C.-M. & Lin, M.-W., 2013. Corruption Perception in Taiwan: reflections upon a bottom-up citizen perspective. *Journal of Contemporary China*, 22(79), pp.56–76.
- Zavadskaya, M. & Welzel, C., 2014. Subverting autocracy: emancipative mass values in competitive authoritarian regimes. *Democratization*, 0347(December), pp.1–26.
- Zhao, L.S., 2008. Anomie Theory and Crime in a Transitional China (1978--). *International Criminal Justice Review*, 18(2), pp.137–157.

REVITALISASI DAN REKONSTRUKSI KEARIFAN LOKAL UNTUK MEMBANGUN HUKUM KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN

Caritas Woro Murdiati Runggandini
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
worofh@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1. Sinkronisasi kearifan lokal dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya hutan; 2. Strategi untuk merevitalisasi kearifan lokal; 3. Strategi untuk merekonstruksi kearifan lokal dalam pembangunan hukum kehutanan yang berkelanjutan. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka/data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder). Terhadap data yang diperoleh melalui penelitian normatif, digunakan alat bantu untuk mempertajam pembahasan dengan mempergunakan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Peraturan perundangan mengenai pengelolaan sumber daya hutan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal. Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya: a). Masih dipergunakannya norma dan nilai kapitalisme dalam pengelolaan sumber daya hutan; b). Sistem pengelolaan sumber daya hutan lebih mementingkan pada aspek ekonomi; c). Belum berubahnya mindset negara dalam pengelolaan sumber daya hutan, sumber daya hutan tetap dianggap sebagai *domein* negara. 2. Strategi merevitalisasi kearifan lokal dilakukan melalui peningkatan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional dan melalui penyusunan program pembangunan bidang kehutanan yang menyesuaikan budaya dan lingkungan setempat; 3. Strategi untuk merekonstruksi kearifan lokal dalam pembangunan hukum kehutanan yang berkelanjutan: a). Kearifan lokal dijadikan sebagai petunjuk arah bagi pembangunan hukum kehutanan, terutama dalam memenuhi nilai-nilai filosofis dan sosiologis; b). Kearifan lokal dijadikan sebagai asas/prinsip dalam pembangunan hukum kehutanan dan mengedepankan paradigma pembangunan berkelanjutan. Adanya pembangunan hukum kehutanan yang berdasarkan pada asas/prinsip hukum yang berasal dari kearifan lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan, akan mewujudkan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: revitalisasi, rekonstruksi, kearifan lokal, masyarakat hukum adat, pembangunan berkelanjutan, hukum kehutanan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, merupakan isu yang sangat penting di era sekarang. Hal ini secara eksplisit termaktub dalam tujuan pembangunan millennium (*Millenium Development Goal/MDG*) yang menjadi fokus dan target bagi negara-negara berkembang hingga tahun 2030. Namun Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, selama bertahun-tahun mengalami *syndrome Dutch Disease*, yaitu perilaku eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk meraup keuntungan sendiri tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam (Arif Satria, 2007:1).

Perspektif negara masih digunakan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, di sini pemerintah menjadi pemain tunggal dalam menetapkan dan mengatur pemanfaatan dan peruntukan sumber daya hutan. Kepada siapa hutan tersebut diserahkan untuk dimanfaatkan, sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan tawar-menawar politik penguasa dengan praktisi bisnis (San Afri Awang, 2005:15). Akibat dari sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lebih mementingkan aspek ekonomi tersebut, menyebabkan terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sebenarnya memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Akan tetapi masyarakat hukum adat tersebut justru seringkali distigmatisasi sebagai suku terasing, komunitas terbelakang, etnis yang kurang bermoral, juga dikambinghitamkan sebagai “maling” ketika mereka mengelola hutannya sendiri yang telah dilakukan secara turun-temurun, hanya atas dasar legalitas penguasaan hutan secara sepihak yang dilakukan oleh Negara (Caritas Woro dan Lukas Rumboko, 2005: 100-101).

Dalam pengelolaan sumber daya hutan, masyarakat hukum adat umumnya masih bertindak sebagai penonton. Jika mereka dilibatkan, sebatas sebagai

objek semata, belum sebagai subjek pengelola hutan yang berperan sebagai mitra yang sejajar dengan pemerintah, perusahaan swasta maupun BUMN. Dari kebijakan tersebut, akhirnya telah melahirkan akumulasi konflik dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan. Padahal tidak dapat dipungkiri, masyarakat hukum adat tersebut umumnya telah memiliki kearifan lokal tertentu yang mampu menjaga kelestarian sumber daya hutan sekitar. Banyak kearifan lokal sebagai produk budaya tersebut patut terus dijadikan sebagai pegangan hidup. Kearifan lokal itu memang berwujud lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal.

Dalam banyak kasus, kearifan lokal dalam mengelola sumber daya hutan sudah punah bersamaan dengan musnahnya biodiversitas yang mengiringi kerusakan lingkungan, yang dilakukan oleh aktor-aktor luar yang datang dan bekerja atas nama pembangunan dan kapitalisme. Tetapi di awal abad ke-21 ini, wacana tentang kearifan lokal telah muncul ke permukaan dan diakui sebagai bagian penting dalam program pembangunan ke depan, termasuk pembangunan hukum (Zulkifli B. Lubis, 2005: 239).

Adanya krisis ekologi akhir-akhir ini, telah menimbulkan kesadaran baru bahwa krisis ekologi bisa diselamatkan dengan kembali kepada kearifan lokal masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, harus ada komitmen politik di tingkat global dan nasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat beserta seluruh kearifan lokalnya. Melalui jalan ini, bukan saja menyelamatkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta seluruh kekayaan dan kearifan lokalnya, melainkan juga menyelamatkan krisis ekologi yang terutama disebabkan oleh kesalahan cara pandang dan perilaku masyarakat modern (Sonny Keraf, 2002: 297). Paradigma pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik, pro kapitalis, *pro power and authority holders* selama ini, mendesak untuk dilakukan perubahan melalui pembangunan hukum kehutanan ke depan yang lebih adil bagi masyarakat hukum adat, *pro poor* dan *pro environment*. Pada dasarnya semua *stakeholders*, termasuk masyarakat hukum adat, memiliki hak yang sama dalam mengelola sumber daya hutan. Pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik juga akan mematikan potensi kearifan lokal masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya hutan yang terdapat di sekitar mereka.

Dalam pembangunan hukum kehutanan, penting menempatkan kearifan lokal masyarakat hukum adat sebagai sumber bahan dan sumber nilai dalam proses pembentukannya. Hukum yang dibuat berdasarkan kearifan lokal sebagai sistem nilai yang dijunjung

tinggi oleh masyarakat, akan efektif dan akan dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut.

Menurut aliran *Sociological Jurisprudence*, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (Lili Rasjidi, 1990: 47). Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the positive law*) dan hukum yang hidup (*the living law*). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum dan (antithesis) Mazhab Sejarah. Sebagaimana diketahui, Positivisme Hukum memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan penguasa (*law is a command of lawgiver*), sebaliknya Mazhab Sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran pertama lebih mementingkan akal, sementara aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, dan *Sociological Jurisprudence* menganggap keduanya sama pentingnya (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995: 110-111).

Eugen Ehrlich dapat dianggap sebagai pelopor aliran *Sociological Jurisprudence*, khususnya di Eropa. Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di lain pihak. Menurutnyanya, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Di sini jelas bahwa Ehrlich berbeda pendapat dengan penganut Positivisme Hukum. Ehrlich ingin membuktikan kebenaran teorinya, bahwa titik pusat perkembangan/pembangunan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri (Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995: 11).

Selanjutnya Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh Negara. Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuensi Ehrlich beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1985: 20-21).

Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, (2011: 15-17), sistem hukum mempunyai tiga komponen, yaitu: struktur; substansi dan kultur hukum. Struktur

sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Kultur hukum ini merupakan sebagian dari kekuatan-kekuatan sosial yang terus-menerus menggerakkan hukum. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum (adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berfikir) yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Dalam pembangunan hukum nasional, juga harus berintikan komponen materi hukum (*legal substance*), aparatur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Selanjutnya Lawrence M. Friedman (2011: 19), menyatakan bahwa sistem hukum mempunyai fungsi terutama untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Alokasi ini, yang tertanam dengan pemahaman akan kebenaran, adalah apa yang umumnya disebut sebagai keadilan. Pembangunan hukum masing-masing Negara tidaklah sama, hal tersebut bersangkutan juga dengan latar belakang pembangunan hukum dan perkembangan masyarakatnya, yang tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya masing-masing bangsa yang sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) dari masing-masing Negara. Jadi membangun hukum Indonesia merupakan perpaduan dari pendekatan yang berorientasi pada nilai (baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan yang hidup dalam masyarakat), pendekatan humanis, pendekatan kultural, pendekatan religius yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (Satjipto Raharjo. (2009: xv-xvi).

Model pembangunan hukum ke depan, bila berlandaskan pada pandangan dari aliran *Sociological Jurisprudence* dan pandangan Lawrence M. Friedman tersebut di atas, akan menghasilkan hukum ke depan yang efektif dan adil. Sebagaimana pandangan dari aliran *Sociological Jurisprudence*, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat, dengan demikian hukum tersebut akan efektif berlakunya di masyarakat tersebut. Kearifan lokal masyarakat hukum adat penting dijadikan sebagai asas dalam pembangunan hukum

ke depan, agar hukum ke depan tersebut efektif di masyarakat. Sedangkan menurut pandangan Lawrence M. Friedman, sistem hukum mempunyai komponen kultur hukum. Kearifan lokal sebagai kultur hukum ini merupakan sebagian dari kekuatan-kekuatan sosial yang terus-menerus menggerakkan hukum. Sistem hukum juga mempunyai fungsi terutama untuk mendistribusikan dan menjaga keadilan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud, 2005: 95).

Data

Data yang dicari dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder adalah berupa:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat; Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan; Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.

Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulam data sekunder melalui studi dokumen atau studi bahan pustaka.

Narasumber

- a. Di lokasi penelitian Propinsi Sulawesi Selatan
Pejabat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan; Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin; Pejabat dari Pemerintah Daerah, Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Pemuka adat dari masyarakat adat Kajang dan Pimpinan dari LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Cabang Sulawesi Selatan.
- b. Di lokasi penelitian Propinsi Bali
Pejabat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali; Dinas Kehutanan Kabupaten Karangasem Bali; Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali Departemen Kehutanan; Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; Kantor Pusat Dokumentasi Bali Dinas Kebudayaan Propinsi Bali; Kantor Dinas Pariwisata Propinsi Bali; Pemerintah Daerah dan Kantor Statistik Propinsi Bali; dan Pemuka adat dari masyarakat adat Tenganan Pegringsingan.

Cara Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis dilakukan proses analisis data. Terhadap data sekunder yang diperoleh melalui penelitian normatif, digunakan alat bantu yang berfungsi untuk mempertajam pembahasan dengan mempergunakan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Interpretasi hukum tersebut terdiri atas penafsiran gramatikal, sistematis (logis), komparatif serta antisipatif (futuristis). Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Setelah data dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya hutan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat.

Pengaturan pengelolaan sumber daya hutan yang eksploitatif dan sentralistik serta berparadigma *State Based Forest Management*, tidak sesuai dengan

prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidaksesuaian tersebut adalah:

- a. Dalam pengelolaan sumber daya hutan masih dipergunakan norma-norma dan nilai-nilai kapitalisme. Praktek norma-norma kapitalisme di Indonesia, sesungguhnya merupakan proses transformasi struktural di sektor kehutanan dalam kerangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui mesin pembangunan yang diberi nama modernisasi. Modernisasi pemanfaatan hutan dalam bentuk ekspansi Hutan Tanaman Industri maupun operasionalisasi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), telah merubah dinamika penguasaan lahan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat desa hutan dan strategi pilihan hidup mereka, yakni dari bercocok tanam dan berburu sebagian lalu menjadi penebang kayu, baik legal maupun illegal.

Penetrasi kapitalisme yang dimotori oleh mesin modernisasi dan dilakukan secara struktural di sektor kehutanan, telah menjadikan posisi masyarakat hukum adat (sebagai petani desa hutan) menjadi terjepit dalam rangka mempertahankan hidup mereka. Bangunan sosial, yang terdiri dari adat-istiadat, tradisi, norma (hukum adat) dan perilaku, pengetahuan lokal atau kearifan lokal dipaksa harus berhadapan dengan budaya kapitalisme yang didukung kekuatan supra struktur, seperti negara. Bangunan sosial tersebut (adat-istiadat, tradisi, norma dan perilaku, pengetahuan lokal atau kearifan lokal) sebagai sistem kekebalan diri masyarakat hukum adat, semakin tergerus oleh ekspansi kapitalis tersebut.

Dalam konteks transformasi struktural bidang kehutanan yang terjadi di Indonesia, banyak unsur telah dihancurkan oleh norma-norma dan nilai-nilai kapitalisme. Hancurnya keyakinan masyarakat hukum adat dan kehidupan sosial budaya mereka adalah fenomena nyata yang dapat dijumpai dalam kehidupan-sehari-hari di beberapa masyarakat hukum adat sebagai masyarakat desa hutan.

Kapitalisme dalam proses penghancuran masyarakat hukum adat sebagai masyarakat desa hutan, melakukan penetrasi dari dua arah atau sektor yang berbeda, *pertama*, sektor pertanian dan *kedua*, sektor kehutanan dengan apa yang dinamakan dengan mesin modernisasi. Efek dari kepungan dan serangan kapitalisme telah melahirkan dualisme perekonomian di masyarakat hukum adat, yakni sistem ekonomi tradisional (baca: subsisten) yang berdampingan dengan sistem ekonomi modern (baca: berorientasi pada mekanisme pasar bebas). Implikasi selanjutnya adalah masyarakat hukum adat sebagai petani desa

hutan menjadi semakin miskin dan terpinggirkan, menjadi buruh di negerinya sendiri. Dampak lain adalah munculnya konflik yang cenderung meningkat, terutama terkait dengan perebutan lahan (tenurial).

Studi kasus yang dilakukan oleh CIFOR-FORDA (2005) di Indra Giri Hulu, Riau dalam Lukas Rumboko Wibowo, et. all. (2009: 18-19), telah membuktikan bahwa efek ganda penetrasi kapitalisme begitu luar biasa, ibarat “bola salju” yang terus melaju menghantam dan menghancurkan sendi-sendi kearifan lokal masyarakat hukum adat. Bangunan sosial dalam bentuk ikatan-ikatan sosial yang berada di bawah kendali ketua adat yang karismatik dan mengandalkan kolektivitas, secara perlahan menjadi runtuh tergerus oleh arus munculnya nilai-nilai individualisme yang dikonstruksikan oleh budaya kapitalisme.

Terjadinya kehancuran hukum adat sebagai pranata lokal menjadi pertanda mulai runtuhnya kepemimpinan lokal dan fenomena ini tidak terlepas dari dinamika interaksi politik di tingkat elit lokal dan nasional. Instrumen politik yang paling efektif dan efisien untuk memuluskan jalan eksploitasi hutan, melalui beberapa strategi yang dijalankan. Strategi *pertama*, diawali inventarisasi dan identifikasi yang dilanjutkan dengan pembuatan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Sebagai akibatnya, banyak tanah-tanah yang dulunya milik komunal masyarakat hukum adat diklaim sebagai tanah negara. Realitas ini memicu konflik yang berkepanjangan sampai saat ini. Strategi *kedua*, pemerintah Orde Baru melakukan penyeragaman desa untuk seluruh kelembagaan asli masyarakat hukum adat dengan diundangkannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Strategi ini adalah bagian untuk memecahkan resistensi masyarakat hukum adat, di bawah kendali ketua adat, yang sebagian besar tinggal dan menguasai sebagian kawasan hutan yang hendak didayagunakan. Munculnya dualisme kepemimpinan lokal dapat dikatakan sebagai awal kehancuran masyarakat hukum adat. Langkah yang lain adalah pengeluaran UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang membuka ruang bagi kiprah para pemodal. Strategi *ketiga* adalah kaum borjuasi birokrasi dan militer didukung oleh pemilik modal atau kapitalis menghancurkan kepemimpinan lokal dari masyarakat hukum adat dengan menciptakan kaki-tangan, baik melalui atau tanpa pihak ketiga (*rent seeker*) di tingkat lokal. Pendekatan yang digunakan para pemodal ataupun pemburu rente (*rent seeker*) adalah melalui lobi-lobi yang merupakan jebakan yang terbukti jitu atau ampuh dalam meredam militansi dan resistensi ketua adat atau tokoh-tokoh informal lainnya.

Adanya strategi politik penghancuran kepemimpinan lokal yang diambil dari studi kasus CIFOR-FORDA di Indra Giri Hulu, Riau dalam Lukas Rumboko Wibowo, et. all (2009: 20), terlihat bahwa kepemimpinan lokal diintervensi melalui berbagai cara dan oleh berbagai aktor, terutama melalui lobi-lobi yang menawarkan norma-norma hedonistic dan janji-janji manis sesaat. Tingkat pendekatan yang dilakukan oleh borjuasi birokrasi, militer dan kapitalis mulai dari pendekatan lunak (*soft*) sampai pendekatan keras (*hard*), seperti penyogokan sampai ke tindak-tanduk kekerasan, seperti ancaman, intimidasi dan penggusuran atau penyitaan secara paksa.

b. Sistem pengelolaan sumber daya hutan lebih mementingkan aspek ekonomi.

Secara konseptual sumber daya hutan memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait satu sama lain, yakni fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi sosial budaya. Sumber daya hutan secara ekonomi diharapkan bisa menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara ekologis, sumber daya hutan diharapkan bisa menjadi salah satu faktor utama terwujudnya keberlanjutan ekosistem secara lintas generasi. Terakhir secara sosial budaya, sumber daya hutan diharapkan bisa menjadi sumber kehidupan masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan melalui sistem dan praktek pengelolaan hutan. Ketiga fungsi pokok pengelolaan sumber daya hutan tersebut seharusnya dimanfaatkan secara adil dan demokratis dengan menjunjung tinggi aspek kelestarian dan keberlanjutannya sehingga sumber daya hutan juga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Ketentuan normatif sistem pengelolaan sumber daya hutan ini dalam prakteknya mengalami kendala. Dominasi peran dari salah satu aspek, yakni aspek ekonomi, dalam aktualitas praktek pengelolaan sumber daya hutan cenderung mengemuka. Pengelolaan sumber daya hutan, kenyataannya hanya mengedepankan kepentingan ekonomis semata. Hutan dieksploitasi untuk mengisi kas penguasa Negara beserta kroni-kroninya, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar hutan maupun dalam hutan) dan kelestarian ekologi sumber daya hutan. Realitasnya, pemanfaatan sumber daya hutan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat yang tergabung dalam elite pemerintahan dan para pemilik kapital. Tetesan kemakmuran dari pemerintah pusat ke masyarakat daerahpun tidak pernah terjadi. Masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun

tinggal di sekitar dan di dalam hutan, faktanya tidak mendapat bagian hasil pembangunan, bahkan cenderung mengalami marginalisasi. Masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan, belum mengalami peningkatan kesejahteraan yang berarti sebagai akibat sistem pengelolaan sumber daya hutan yang mementingkan aspek ekonomi tersebut.

c. Belum berubahnya mindset negara dalam pengelolaan sumber daya hutan, sumber daya hutan tetap dianggap sebagai *domein negara*.

Bila dilacak dari dimensi historis, perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari pendekatan *state based* menjadi *community based*, tidaklah cukup signifikan dalam memberikan dampak baik terhadap kondisi sumber daya alam maupun masyarakat. Perubahan substansial hanya terjadi pada level tekstual dari kebijakan negara. Perubahan tidak sampai menyentuh esensi dari makna kelestarian (sustainability) dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya hutan tetap dipandang sebagai *domein* negara yang secara absah dapat digunakan menurut spektrum negara. Spektrum masyarakat lokal, terutama masyarakat hukum adat diposisikan sebagai subordinasi dari spektrum negara. Rezim negara (sentralisme) ini menekankan kewenangan kepada negara dalam mengelola sumber daya hutan, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan hingga pengawasan dan pengendalian sumber daya alam (hutan).

Kawasan hutan yang dianggap oleh pemerintah sebagai *domein* Negara, justru “diperjualbelikan” kepada investor dengan mekanisme pemberian hak konsesi usaha tanpa memetakan terlebih dahulu kawasan masyarakat hukum adat. Akibatnya masyarakat hukum adat yang tidak memiliki benteng pertahanan diri, kalah dengan kekuatan senjata pemerintah. Masyarakat hukum adat sebagai masyarakat desa hutan mengalami marginalisasi yang berujung pada penurunan kesejahteraan dan meningkatnya ketergantungan pada pihak luar.

2. Strategi untuk merevitalisasi kearifan lokal dalam pembangunan hukum kehutanan yang berkelanjutan.

Perlu ada strategi untuk merevitalisasi kearifan local tersebut, melalui:

a. Peningkatan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat barangkali merupakan sesuatu yang teramat mahal di negara Indonesia ini. Keberhasilan masyarakat hukum adat dalam memelihara sumber daya hutan,

sangat sulit mendapatkan pengakuan dari Negara, terutama pengakuan secara *de yure*.

Pengakuan secara sosial-budaya, ekonomi, politik dan terutama secara yuridis terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, merupakan kondisi *sine qua non* yang sekaligus merupakan insentif yang sudah sepatutnya diberikan oleh negara. Keengganan negara mendiskusikan secara konstruktif lebih banyak diakibatkan oleh penyakit lama negara, yakni phobia terhadap berkurangnya otoritas dalam kontrol terhadap sumber daya hutan. Untuk meredam isu tersebut negara selalu melakukan politisasi kebijakan melalui tarik ulur seperti terlihat dalam kebijakan HKM (Hutan Kemasyarakatan) selama ini.

Padahal, pengakuan terhadap hasil keterlibatan aktif masyarakat hukum adat merupakan refleksi dari demokratisasi dan peradaban negara. Mengizinkan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya hutan tidak bermaksud untuk menghidupkan kembali feodalisme; penghargaan terhadap hukum adat justru akan memuluskan peningkatan jalannya pembangunan.

Pengakuan, baik secara *de yure* maupun *de facto* adalah sangat esensial. Seperti dalam teori yang dipostulatkan Maslow, pengakuan merupakan puncak dari kebutuhan manusia, termasuk masyarakat hukum adat. Keberhasilan aktualisasi diri yang mendapat pengakuan legal-formal akan mendorong optimalisasi dan perluasan keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan oleh komunitas yang lebih luas.

Pengakuan juga akan lebih memberikan kepastian pengelolaan sumber daya hutan bagi masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia ini, naif bila dikonstruksi eksistensinya oleh negara hanya atas dasar pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Berubahnya tata nilai atau sudah tidak berlakunya sebagian dari tata nilai tersebut, bukan berarti langsung menghilangkan identitas budaya masyarakat hukum adat tersebut dalam tata kelola terhadap sumber daya hutan.

Untuk melindungi keberadaan masyarakat hukum adat beserta seluruh kekayaan tradisi budayanya, termasuk kearifan lokalnya dan dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati, hak-hak masyarakat hukum adat berikut ini perlu diakui, dijamin dan dilindungi dalam pembangunan hukum kehutanan ke depan, antara lain adalah: Hak untuk menentukan diri sendiri; Hak atas tanah dan teritori (wilayah); Hak atas

budayanya (termasuk kearifan lokalnya dalam pengelolaan sumber daya hutan); Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam pengelolaan sumber daya hutan; Hak untuk menganut sistem kepercayaan serta nilai-nilai religius mereka sendiri.

Dalam memperjuangkan peningkatan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut, dapat dilakukan melalui upaya dari Pemerintah Daerah untuk mengundangkan:

- 1). Peraturan Daerah yang isinya mengakui hak ulayat dari masyarakat hukum adat yang berada di wilayahnya tersebut;
 - 2). Peraturan Daerah yang isinya mengakui keberadaan kelembagaan adat di wilayahnya. Pengakuan tersebut juga disertai dengan adanya pengakuan terhadap wilayah, struktur pemerintahan dan harta kekayaannya.
- b. Penyusunan program pembangunan bidang kehutanan yang menyesuaikan dengan karakteristik budaya dan lingkungan setempat.

Di era desentralisasi pemerintahan saat ini, perlu disusun program pembangunan bidang kehutanan yang benar-benar adaptif dan aplikatif di lapangan. Sistem pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, sebaiknya berakar pada pluralitas budaya masyarakat hukum adat dengan mengedepankan kebhinekaan program pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan lingkungan setempat.

3. Strategi untuk merekonstruksi kearifan lokal dalam pembangunan hukum kehutanan yang berkelanjutan.
 - a. Kearifan lokal sebagai petunjuk arah dalam pembangunan hukum kehutanan untuk memenuhi syarat tentang keberadaan/keberlakuan hukum.

Kearifan lokal mempunyai arti penting sebagai petunjuk arah bagi pembangunan/pembentukan hukum, yaitu harus memenuhi nilai-nilai filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran); memenuhi nilai-nilai sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat); serta memenuhi nilai-nilai yuridis (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Pembangunan hukum kehutanan ke depan akan mempunyai kekuatan berlaku filosofis, apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi, yaitu Pancasila. Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai dasar negara secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai

norma dasar hukum positif. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan, perlu dijadikan sebagai asas/prinsip dalam pembangunan hukum kehutanan ke depan karena memuat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia.

Pembangunan hukum kehutanan ke depan akan mempunyai kekuatan berlaku sosiologis, apabila memuat asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang berasal dari kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan. Hukum hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku di dalam masyarakat.

Pembangunan hukum kehutanan ke depan akan mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis, apabila dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam membentuk undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan (di tingkat pusat), berbagai prinsip kearifan lokal masyarakat hukum adat yang bersifat universal harusnya dimasukkan sebagai asas hukumnya. Hal ini sebagai cara atau strategi agar prinsip kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan dapat terakomodasi dalam undang-undang nasional. Sedangkan kearifan lokal lainnya yang bersifat lokal, biarlah menjadi kekhasan hukum lokal di daerah tersebut. Kearifan lokal yang menjadi kekhasan atau ciri-ciri khusus di daerah tersebut, harusnya diakomodasi dalam Peraturan Daerah setempat.

- b. Kearifan lokal sebagai asas hukum dalam pembangunan hukum kehutanan yang berparadigma berkelanjutan.

Kearifan lokal masyarakat hukum adat memang berwujud lokal, akan tetapi nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal, seperti: Prinsip hormat terhadap alam; Prinsip tanggung jawab terhadap alam; Prinsip solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam; Prinsip hidup sederhana; Prinsip hidup selaras dengan alam; dan Prinsip keadilan. Berbagai prinsip kearifan lokal yang bersifat universal tersebut, penting dijadikan sebagai asas hukum yang kokoh bagi pembangunan hukum kehutanan, karena tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Dalam merekonstruksi kearifan lokal masyarakat hukum adat tersebut sebagai asas atau prinsip dalam pembangunan hukum kehutanan,

prinsip-prinsip tersebut harus disaring sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai *rechteridee* dalam hukum nasional.

Prinsip-prinsip kearifan lokal tersebut ternyata juga mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu sendiri, yaitu: Prinsip demokrasi; Prinsip keadilan; dan Prinsip keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Berkaitan dengan prinsip demokrasi, pemerintah perlu sungguh-sungguh memberi peran dalam pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat hukum adat yang sudah mempunyai modal sosial (berupa: kearifan lokal; hukum adat dan kelembagaan adat) dalam mengelola sumber daya hutan. Berkaitan dengan prinsip keadilan, pembangunan hukum kehutanan juga harus diorientasikan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat, termasuk masyarakat hukum adat secara berkelanjutan. Oleh karena itu sumber daya hutan harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis, termasuk di antara generasi sekarang maupun dengan generasi yang akan datang. Berkaitan dengan prinsip keberlanjutan, pembangunan Hukum Kehutanan harus tidak lagi berorientasi pada eksploitasi (*use oriented*), tetapi mengedepankan kepentingan keberlanjutan sumber daya hutan. Pembangunan hukum kehutanan yang berkelanjutan tersebut selaras dengan prinsip masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya hutan.

Delapan prinsip (yang bersumber dari prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat hukum adat dan juga bersumber dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan), yaitu: 1). Prinsip hormat terhadap alam; 2). Prinsip tanggung jawab terhadap alam; 3). Prinsip solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam; 4). Prinsip hidup sederhana; 5). Prinsip hidup selaras dengan alam; 6). Prinsip keadilan; 7). Prinsip demokrasi; dan 8). Prinsip keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan, sebaiknya dijadikan sebagai asas hukum dalam pembangunan hukum kehutanan ke depan. Adanya pembangunan hukum kehutanan yang berdasar pada 8 asas/prinsip hukum tersebut, akan mewujudkan hukum kehutanan yang efektif karena mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis (berlakunya atau diterimanya hukum tersebut di dalam masyarakat). Pembangunan hukum kehutanan tersebut di atas, juga sekaligus dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan.

SIMPULAN

1. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Sumber daya hutan
Peraturan perundangan mengenai pengelolaan sumber daya hutan belum sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal. Faktor-faktor yang menjadi penyebabnya: a. Masih dipergunakannya norma dan nilai kapitalisme dalam pengelolaan sumber daya hutan; b. Sistem pengelolaan sumber daya hutan lebih mementingkan aspek ekonomi; c. Belum berubahnya mindset negara dalam pengelolaan sumber daya hutan, sumber daya hutan tetap dianggap sebagai *domein negara*.
2. Strategi untuk merevitalisasi kearifan lokal dalam pembangunan hukum kehutanan yang berkelanjutan, yaitu:
 - a. Melalui peningkatan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional, yang dapat dilakukan melalui: a). Upaya Pemerintah Daerah mengundang Peraturan Daerah yang isinya mengakui hak ulayat (hutan adat) dari masyarakat hukum adat yang berada di wilayahnya tersebut; b). Upaya Pemerintah Daerah untuk mengundang Peraturan Daerah yang isinya mengakui keberadaan kelembagaan adat di wilayahnya.
 - b. Melalui penyusunan program pembangunan bidang kehutanan yang menyesuaikan dengan karakteristik budaya dan lingkungan setempat.
3. Strategi untuk merekonstruksi kearifan lokal untuk membangun hukum kehutanan yang berkelanjutan:
 - a. Kearifan lokal dalam pembangunan hukum kehutanan ke depan sangat penting keberadaannya, agar pembangunan hukum tersebut memenuhi syarat keberadaan/keberlakuan hukum, terutama keberlakuan secara filosofis dan sosiologis. Kearifan lokal tersebut merupakan petunjuk arah bagi pembangunan/pembentukan hukum kehutanan, yaitu harus memenuhi nilai-nilai filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran); memenuhi nilai-nilai sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat).
 - b. Dalam pembangunan hukum kehutanan ke depan, kearifan lokal penting dijadikan sebagai asas/prinsip dalam pembangunan hukum kehutanan dan mengedepankan paradigma pembangunan berkelanjutan. Kearifan lokal tersebut memang berwujud lokal, akan tetapi nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal, seperti: prinsip hormat terhadap alam; prinsip tanggung jawab terhadap alam; prinsip solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam; prinsip hidup sederhana, prinsip hidup selaras dengan alam dan prinsip keadilan. Dalam membangun hukum kehutanan ke depan, harus

juga berparadigma berkelanjutan, yaitu mendasarkan pada prinsip demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Adanya pembangunan hukum kehutanan yang berdasarkan pada 8 asas/prinsip hukum akan mewujudkan hukum kehutanan yang efektif karena mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis (berlakunya atau diterimanya hukum tersebut di dalam masyarakat) juga sekaligus akan dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S.A. (2005). Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia. *Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 20 Tahun VI, halaman: 15.
- Darmodiharjo D. dan Shidarta (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Keraf, S. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Lawrence M. Friedman (2011). *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Lubis, Z. B. (2005). Menumbuhkan (kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Tapanuli Selatan. *Antropologi Indonesia, Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, Vol. 29 No. 3, halaman: 239.
- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Raharjo, S. (2009). *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia (Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, L. (1990). *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Satria, A. (2007). *Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Akses dan Kontrol terhadap Sumberdaya Alam*. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030, di Kampus Magister Manajemen dan Bisnis IPB, Bogor, halaman: 1.
- Soekanto, S. (1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Woro, C. dan Rumboko, L. (2005). Multikulturalisme dalam Pembangunan Kehutanan: Tantangan dan Peluang Ke Depan. *Multikulturalisme, Membangun Harmoni Masyarakat Plural*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wibowo, L. R., Woro, C. dan Subarudi. (2009). *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria (Kapitalisme Mengepung Desa)*. Yogyakarta: Penerbit ALFAMEDIA dan PALMA Foundation.

Boss Selalu Benar: Folklor di Tempat Kerja

Chico Adhibaskara Ekananda Hindarto
Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
adhibaskara8@gmail.com

Abstrak

Folklor modern dalam bentuk humor mengenai interaksi antara pimpinan dan anak buah adalah hal yang cukup umum. Salah satu contoh humor yang sering digunakan adalah “Peraturan pertama: Boss selalu benar; Peraturan kedua: Jika boss salah, lihat peraturan pertama.” Humor ini menunjukkan kekuasaan mutlak pimpinan, terutama dalam sebuah korporasi. Identitas kultural anak buah dalam kelompok pekerjaan diposisikan sebagai pihak yang kurang beruntung. Meskipun demikian, hal ini diasumsikan sebagai kondisi yang wajar oleh sebagian besar anak buah. Sementara itu, pimpinan yang memiliki posisi yang lebih kuat tidaklah dapat dipersalahkan. Kompleksitas hubungan antara pimpinan dan anak buah disederhanakan dengan dua peraturan pada humor ini, sehingga tidak perlu lagi perdebatan lanjutan mengenai salah atau benarnya pimpinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas relevansi folklor dalam bentuk humor pada keseharian karyawan mengenai kekuasaan. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada para informan, yang menduduki posisi sebagai anak buah, dari beragam organisasi untuk kepentingan penelitian ini. Didapatkan pola penerapan humor dari hasil wawancara tersebut. Pada tempat kerja modern, situasi yang terjadi tidak sesuai dengan humor ini. Beberapa informan menyatakan bahwa posisi mereka di dalam organisasi tidak lemah seperti yang disampaikan pada humor ini, meskipun posisi mereka berada di bawah pimpinan. Ada dua hal yang menjadi temuan penelitian ini. Pertama, humor mengenai kekuasaan mutlak pimpinan tidak relevan pada beberapa kondisi. Kedua, kedekatan hubungan antara pimpinan dan anak buah dapat mengurangi kesenjangan di antara mereka.

Kata Kunci: folklor, kekuasaan, organisasi modern, hubungan kerja, budaya organisasi

PENDAHULUAN

Makalah ini membahas mengenai folklor berupa anekdot bermuatan humor yang mengarah pada kekuasaan absolut seorang pimpinan, terutama pada organisasi korporasi. Definisi anekdot adalah cerita singkat yang menghibur atau menarik mengenai insiden atau seseorang yang nyata. Anekdot tidak selalu bermuatan humor. Anekdot yang menjadi

pembahasan adalah:

Peraturan #1
Boss selalu benar
Peraturan #2
Ketika boss salah, baca peraturan #1

Folklor merupakan bentuk naratif oral yang merupakan refleksi atas identitas kebudayaan dan pengetahuan tacit, dimana terdapat refleksi mengenai pengelolaan keragaman sosial, kompleksitas dan termasuk di dalam kelompok (Rayner, 2008). Identitas kebudayaan anak buah sebagai suatu kelompok sangat ketara pada anekdot tersebut, sebagai pihak yang selalu salah. Di samping itu, posisi ini secara tacit dipahami dan dimaklumi secara seragam oleh anak buah sebagai suatu yang wajar. Keragaman sosial antara pimpinan dan anak buah tercerminkan pada anekdot tersebut. Selain itu, juga tercermin superioritas pimpinan sebagai pihak yang selalu benar atau tidak pernah salah. Kompleksitas hubungan antara kedua belah pihak disederhanakan dengan peraturan ini, tidak ada perdebatan lebih lanjut mengenai benar salahnya boss. Mereka yang berada pada posisi anak buah merasakan inklusifitas di dalam kelompok tersebut dan bernasib sama.

Folklor yang berbentuk cerita membuka jendela-jendela yang bernilai untuk memasuki kehidupan organisasional yang emosional, politis, dan simbolis; serta memanusiasi organisasi tersebut (Gabriel 2000, pada Smith dkk, 2014: 218). Rayner (2008) membagi pembelajaran yang terkait dengan folklor menjadi tiga. Pertama, folklor memiliki bentuk yang bermacam-macam dan sangat nyata pada kehidupan sehari-hari. Akibat yang terjadi merupakan konsekuensi bagi yang melanggarnya. Kedua, hal yang dikelola oleh folklor adalah rasa percaya (*trust*). Pembelajaran ketiga adalah perlu keberhati-hatian yang sangat untuk mengubahnya.

Makna yang termuat pada anekdot humor ini berlaku secara umum. Jika hal ini dianggap sebagai mite organisasional, Gabriel (1991) menyatakan bahwa maknanya tidaklah tranparan dan memuat ambiguitas, bahkan seringkali merefleksikan harapan kontradiktif dan membuka peluang untuk diinterpretasikan secara berbeda atau berkompetisi. Mite dievaluasi berdasarkan atas lima tipe kriteria: akurasi dan kesahihan muatan; utilitas; mewakili kepentingan; melekat pada norma-norma keilmuan; dan campuran

motif-motif (Spich, 1995). Muatan anekdot ini dianggap berlaku secara general, meskipun terkesan berpihak kepada kepentingan anak buah yang merasa berada posisi yang lemah secara relatif terhadap boss pada bahasan makalah ini. Utilitas suatu mite melayani tujuan-tujuan: melakukan sosialisasi generasi yang lebih muda, mengingatkan penyimpangan dari akar, menjaga disiplin dan komitmen, serta menghidupkan kelompok dan membedakan antar manusia (Spich, 1995). Utilitas anekdot ini memenuhi tujuan-tujuan ini, terutama dikarenakan hal ini dianggap sebagai mite yang tepat pada kegiatan sehari-hari di organisasi. Namun demikian, perlu diingat bahwa mite tidaklah penyampai kebenaran dan suatu tatanan nilai yang menjadi panduan bertindak (Spich, 1995).

Sebagai mite, anekdot humor soal hubungan antara boss dan anak buah secara tepat merepresentasikan berbagai kondisi di berbagai organisasi. Dengan demikian, kriteria perwakilan kepentingan terpenuhi sebagai isu yang menarik dan keragaman partisipasi. Jika ditelusuri muatan keilmuan, mite ini juga memenuhi kriteria untuk dibahas dari sisi perimbangan kekuasaan dan alokasi sumberdaya. Kekuasaan dan sumberdaya yang dimiliki oleh boss secara relatif lebih besar dibandingkan dengan anak buah. Mite ini juga dapat dikatakan sebagai campuran motif yang bisa ditinjau dari sisi akademis, yaitu teori organisasi, dan sisi aplikatif yang berlaku pada organisasi secara umum. Tugas keilmuan adalah berupaya untuk menguji legitimasi gagasan folkloris, dimana ketika hal itu terbukti sah maka harus masuk ke bagian pengetahuan ilmiah (Armstrong, 1996).

Folklor sebagai bagian dari ilmu dimulai pada paruh kedua tahun 1970an, dimana mahasiswa perilaku organisasi mulai berkecenderungan dalam hal kebudayaan dan simbolisme (Jones, 1999), dimana judul esay mengenai folklor organisasi adalah seperti: cerita yang disampaikan manajer (Mitroff dan Kilmann, 1975), simbol di tempat kerja (Dandridge, 1976), struktur formal sebagai mitos dan seremoni (Meyer dan Rowan, 1977), kepemimpinan sebagai suatu "permainan bahasa" (Pondy, 1978), simbol, pola, dan setting (Peters, 1978), dan kebudayaan organisasi, mitos, dan cerita-cerita (Pettigrew, 1979; Westerlund dan Sjostrand, 1979; dan Wilkins, 1978). Kaitan antara konsep folklor dan organisasi, diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai keduanya dan memberikan saran untuk menyempurnakan organisasi (Jones, 1991).

Sebagai artefak penting pada kebudayaan manusia, folklor berperan membentuk struktur dan keberlanjutan pengalaman dan kebajikan manusia (Armstrong, 1996). Ketika terbentuk dialog yang positif antara dua pihak yang terlibat, kisah-kisah mengenai organisasi akan memberikan manfaat kepada keberlangsungan

organisasi (Solnet dan Kandampully, 2008). Kondisi yang berseberangan dapat menimbulkan kondisi yang negatif, dimana kisah-kisah negatif punya peluang melemahkan keberlangsungan organisasi.

Salah satu konteks peranan folklor pada organisasi adalah sebagai alat adaptasi karyawan baru dalam memasuki dunia kerja Farrow (2005). Anekdot yang dibahas pada makalah ini dapat berperan sebagai medium pembelajaran karyawan baru. Anekdot terkait kekuasaan yang dimiliki boss, mengondisikan karyawan baru pada suatu pola gagasan sebagai panduan mereka dalam bertindak. Beberapa tujuan melakukan ini adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi, bertahan di tempat kerja, dan pelarian diri dari tekanan pekerjaan melalui humor.

Anekdot ini dapat juga ditinjau dari teori humor. Stefanova (www.folklore.ee) menjelaskan tiga sisi yang ada pada humor, yaitu:

- Karakter yang kita tanggap.
- Properti objek yang dijadikan humor.
- Apa yang perlu ada pada objek agar menjadi lucu.

Makalah ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui relevansi folklor berbentuk humor pada keseharian karyawan dalam menghadapi tekanan kekuasaan dari pimpinan mereka. Berdasarkan studi literatur sebagai bingkai pembahasan folklor ini, dilakukan serangkaian wawancara untuk mengetahui apakah folklor ini dipraktikkan oleh pimpinan mereka di lingkungan kerja sehari-hari.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan yang sedang menempuh program pendidikan pasca sarjana bisnis di suatu universitas swasta di Jakarta, dimana mereka berkuliah paruh waktu pada malam hari. Pada siang hari kerja, mereka bekerja. Wawancara diadakan kepada tujuh orang, sesudah perkuliahan. Bentuk wawancara yang dilakukan tidak mengikuti daftar pertanyaan yang baku, tetapi dikembangkan sesuai dengan situasi yang terjadi di saat sesi wawancara. Di awal wawancara ditanyakan apakah mereka pernah mengetahui mengenai folklor yang menjadi topik pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seluruh informan pernah mendengar dan mengetahui folklor yang menjadi topik bahasan pada makalah ini, tetapi mereka tidak tahu sumber folklor tersebut. Dari enam informan tersebut, tiga diantaranya menyatakan bahwa anekdot tersebut terjadi di tempat mereka bekerja. Sedangkan tiga orang lainnya mengatakan

kondisi seperti ini tidak terjadi secara mutlak, dan satu orang mengatakan tidak terjadi di tempat kerjanya.

Veronica yang berlatarbelakang pendidikan S1 animasi menyatakan anekdot tersebut terjadi di tempatnya bekerja. Menariknya, sikap pimpinan yang selalu mau benar bukanlah semata-mata dari kemauannya, tetapi karena mendapat tekanan dari pihak klien. Kesepakatan awal antara perusahaan dengan klien pada pelaksanaannya berubah, dan ketika Veronica mengeluhkan soal ini, pimpinannya mengatakan bahwa klien harus dipatuhi. Oleh karena itu, karyawan harus mengikuti keputusan pimpinan, karena perusahaan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Nastiti juga menyepakati bahwa anekdot tersebut terjadi dengan pimpinannya. Hal yang membedakan pimpinan Nastiti dengan Veronica adalah pimpinan Nastiti merupakan pemilik perusahaan, sedangkan pimpinan Veronica adalah profesional. Dengan demikian, pimpinan Nastiti lebih memiliki akses ke sumberdaya. Konsekuensi yang besar peluang untuk terjadi adalah pimpinan Nastiti memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi karyawan, baik dalam hal memberikan ganjaran ataupun hukuman. Kasus yang dicontohkan oleh Nastiti adalah hal yang secara logika tidak membuat pimpinan marah. Kasusnyanya adalah Nastiti ditugaskan untuk melakukan penagihan untuk perusahaan distributor tempat dia bekerja. Pimpinan memberikan tenggat waktu dana harus tertagih pada tanggal 10. Nastiti melakukan perintah tersebut, dan ternyata pembayaran dilakukan lebih dini, atau sebelum tanggal 10. Menurut logika, hal tersebut adalah hal baik untuk perusahaan. Namun demikian, pimpinan Nastiti menegur Nastiti dengan keras karena tidak sesuai dengan tenggat waktu yang dia minta, yaitu tanggal 10. Nastiti merasa bingung dengan kondisi ini, tetapi dia tidak melawan ataupun membantah pimpinannya. Dia terima salah. Hal ini sesuai dengan anekdot 'Boss selalu benar.'

Agnesia yang bekerja di bagian pemasaran Bursa Efek Jakarta menyatakan anekdot tersebut benar adanya. Pimpinannya ketika beda pendapat dengannya selalu menang-menangan. Agnesia menerima hal tersebut sebagai hal yang wajar karena pimpinannya mempunyai kekuasaan. Menariknya, Agnesia menyatakan bahwa pada kondisi pimpinannya menyadari bahwa kesalahan ada di pihaknya, pimpinan tersebut meminta maaf atas kesalahannya. Informasi yang disampaikan Agnesia ini menarik, karena ternyata anekdot tersebut tidak selalu benar, meskipun pimpinan memiliki kekuasaan. Karakter pribadi pimpinan yang terbuka untuk meminta maaf berpeluang membuat anekdot tersebut tidak relevan.

Pimpinan di tempat kerja Kurniadi di bidang teknologi informasi memiliki karakter yang fleksibel. Ketika

ditanyakan apakah anekdot tersebut berlaku di tempat kerja, Kurniadi mengatakan tergantung kondisi. Dengan perkataan lain, tidak selalu pimpinannya merasa benar dalam setiap situasi. Hal yang sama disampaikan oleh Rudy, yang bekerja di perbankan bagian teknologi informasi. Rudy mengatakan hal seperti ini tergantung kasusnya. Pada beberapa kondisi, ketika pimpinan kurang mengerti sesuatu hal, dia menanyakan kepada Rudy. Dengan demikian terjadi hubungan yang saling tergantung antar Rudy dan pimpinannya.

Pada kasus Jody yang bekerja di konsultan manajemen, fleksibilitas terjadi pada kondisi pimpinan meminta usul kepada anak buah. Pimpinan terbuka atas masukan yang diberikan anak buah. Jody mengatakan bahwa pimpinannya akan murka jika target tidak tercapai. Kasus Jody ini mengindikasikan pimpinan berorientasi pada hasil, dimana hal tersebut sudah merupakan kesepakatan antara dirinya dengan anak buah. Target pada umumnya dinyatakan dalam angka, sehingga secara jernih dipahami oleh para pihak yang terlibat. Akibatnya, ketika target tersebut tidak tercapai, pimpinan memiliki fakta nyata yang bisa digunakan sebagai alasan atas kemarahannya.

Masukan yang menarik disampaikan oleh Adhita yang bekerja di perbankan. Menurut Adhita, peraturan sangat jelas di perbankan, dan industri ini sangatlah diatur oleh pemerintah. Akibatnya, pelaksanaan tugas di perbankan dijaga ketat agar bank tersebut patuh dengan peraturan yang ada. Adhita mencontohkan proses pemberian pinjaman oleh bank sangatlah kaku, sangat sedikit modifikasi yang dapat dilakukan. Pandangan Adhita kepada pimpinannya adalah sebagai pengambil keputusan berganda (*multiple decision maker*), dengan memastikan segala sesuatunya taat kepada peraturan yang berlaku. Karena peraturannya jelas maka pimpinan tidak bisa semena-mena kepada anak buah.

Terkait dengan tiga sisi humor yang disampaikan oleh Stefanova (www.folklore.ee), karakter yang ditanggapi adalah pimpinan, properti adalah peraturan yang dibuat oleh pimpinan, dan hal yang membuat lucu adalah boss selalu benar. Dari hasil wawancara, informan menyadari bahwa karakter ini sesuai dengan kondisi di tempat kerja mereka.

Hal yang menarik adanya variasi peraturan sebagai properti yang dijadikan humor. Peraturan bisa dibuat dan penerapannya ditentukan secara otoriter oleh pimpinan, seperti yang disampaikan pada anekdot ini. Tetapi, ada juga variasi bahwa peraturan disepakati oleh pimpinan dan anak buah, dan peraturan yang taat pada peraturan dari pemerintah dalam kasus industri perbankan. Variasi dua peraturan tersebut membuat anekdot tidak relevan lagi.

Hal yang membuat lucu sebagai sisi ketiga, dalam hal ini adalah pimpinan tidak pernah salah, tidak berlaku secara umum. Karakter pribadi pimpinan bisa membuat anekdot ini tidak berlaku. Hal ini diindikasikan pada kasus pimpinan yang meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan pimpinan yang membuka diri untuk menerima masukan dari para anak buahnya. Hal yang menarik disampaikan oleh Rudy, dimana pimpinannya meminta bantuan untuk hal yang tidak diketahuinya kepada Rudy. Kondisi ini adalah indikasi kekuasaan yang berimbang antara pimpinan dan anak buah, dimana dapat meniadakan segi kelucuan pada anekdot yang dibahas pada makalah ini.

Bentuk humor digunakan pada anekdot ini sebagai bentuk satir akan kekuasaan boss kepada anak buahnya. Kemas humor bertujuan juga memperhalus penyampaian agar tidak menjadi sarkasme dan menjadi 'pelarian' dari tekanan pekerjaan sehari-hari. Tekanan yang dihadapi ini merupakan kompleksitas yang untuk kemudian direfleksikan sebagai suatu hal yang lumrah terjadi sehari-hari (Rayner, 2008). Hasil wawancara mengindikasikan bahwa para informan menyadari inferioritas mereka dibandingkan dengan pimpinan. Namun demikian, pada kenyataannya humor ini tidak selalu berlaku pada kondisi-kondisi yang terkait dengan bagaimana peraturan dibuat dan kepribadian pimpinan. Tekanan yang dihadapi oleh karyawan lebih dikarenakan beban pekerjaan dibandingkan dengan arogansi pimpinan. Pada kasus Veronika, tekanan dari pimpinan merupakan efek rantai tekanan dari klien perusahaan. Bukan semata-mata karena kekuasaan yang dimiliki pimpinan. Dengan demikian, anekdot ini tidak sesuai lagi sebagai pelarian pada kondisi-kondisi seperti ini.

Jika dikaitkan antara folklor berupa anekdot humor ini dengan tiga pembelajaran yang diajukan Rayner (2008), maka dapat diartikan bahwa: pertama, anak buah menghadapi dominasi pimpinan dalam kehidupan sehari-hari, dan akan menghadapi konsekuensi jika melanggarnya; kedua, anak buah mempercayai dua aturan pada folklor tersebut sebagai hal yang benar dan tidak terbantahkan, dan ketiga, perubahan radikal dan berulang-ulang yang konsisten memberikan peluang untuk mengubah pemahaman atas makna folklor tersebut. Pada pembelajaran pertama, dominasi pimpinan masih terjadi, namun pada beberapa kondisi hal ini dapat berkurang pengaruhnya karena ketaatan pada peraturan yang sudah baku, dan tergantung pada karakter pribadi pimpinan.

Dari hasil wawancara, pembelajaran kedua juga sudah memudar. Berdasarkan keseharian informan dengan pimpinan, folklor berbentuk anekdot humor 'boss selalu benar' tidak relevan di tempat kerja mereka. Meskipun demikian, sebagian besar informan masih menyadari bahwa posisi mereka belum setara dengan

pimpinan. Pada kasus Jody, peluang memberi gagasan dan masukan untuk mendapatkan kesepakatan tetap dibawah komando pimpinan. Sedangkan pada kasus Rudy, saling ketergantungan terjadi, sehingga pada beberapa kondisi terjadi keseimbangan kekuasaan.

Perubahan folklor yang dibahas pada makalah ini tidak terjadi secara radikal dan berulang-ulang atas upaya dari pihak anak buah. Pimpinan adalah pihak yang tetap menentukan untuk bertindak otoriter, membuka diri, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, atau menunjukkan ketergantungannya kepada anak buah. Kondisi otoriter terjadi pada kasus Veronica dan Nastiti, dimana pimpinan mereka menunjukkan superioritasnya. Sedangkan kondisi yang dihadapi oleh keempat informan lainnya sedikit berbeda dengan kedua kasus tersebut. Dalam hal ini, pendapat yang disampaikan oleh Gabriel (1991) mengenai pemaknaan mitos organisasi dengan makna tidak transparan dan ambigu. Diprakiraan adanya dominasi pimpinan, tetapi pada prakteknya bisa terjadi dan tidak. Interpretasi yang timbul menjadi berbeda-beda.

Kriteria pertama mengenai mite yang disampaikan oleh Spich (1995), yaitu akurasi dan kesahihan muatan, tidak berlaku mutlak. Terdapat variasi yang mengurangi keakuratan. Namun demikian, dapat dikatakan keempat kriteria yang lain tetap berlaku.

Peran folklor sebagai artefak sebagai pembentuk struktur dan keberlanjutan pengalaman dan kebajikan manusia (Armstrong, 1996), pada anekdot 'boss selalu benar' mengarah pada kepatuhan anak buah kepada pimpinannya, sebagai upaya terbentuknya satu komando dalam melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Bentuk ancaman pada anekdot ini, memiliki efek negatif atas keberlangsungan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian pada makalah ini, diketahui bahwa para informan tetap menempatkan diri inferior dibanding pimpinan. Peran folklor ini tetap berfungsi agar anak buah mematuhi pimpinan, namun tidak lagi diartikan sebagai ancaman. Peraturan yang baku dan karakter pribadi pimpinan menegasi efek negatif yang mengancam kelanggengan organisasi.

SIMPULAN

Pada makalah ini dibahas mengenai folklor berupa anekdot dengan muatan humor mengenai dominasi pimpinan di dalam organisasi. Anekdot 'boss selalu benar' diketahui oleh para informan yang terlibat pada penelitian ini. Mereka sadar akan posisi superior para pimpinan di tempat kerja. Namun demikian, ditemukan variasi pada interaksi antara pimpinan dan anak buah yang membuat folklor ini tidak lagi bersifat mutlak.

Dominasi pimpinan dipengaruhi tidak hanya oleh posisi mereka di dalam organisasi, tetapi juga oleh ketaatan pada peraturan, tekanan dari klien organisasi, dan karakter pribadi. Namun demikian, fungsi folklor tetap berlaku sebagai pendukung kepatuhan anak buah kepada pimpinan, dengan mengurangi efek negatif yang dapat mengganggu keberlangsungan organisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan diskusi dari Bapak Dr. Jajang Gunawijaya, sebagai pengajar mata kuliah Analisis Folklor di jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, J. Scott (1996). The ombudsman: Management folklore and management science: On portfolio planning, escalation bias, and such, *Interfaces*, 26, 25-55
- Farrow, Jane (2005). Workplace culture, folklore, and adaptation, *Journal of Occupational Science*, 12, 1, 4-8
- Gabriel, Yiannis (1991). Turning facts into stories and stories into facts: A hermeneutic exploration of organizational folklore, *Human Relations*, 44, 8, 857-875
- Jones, Michael Owen (1991). Why folklore and organization(s)? *Western Folklore*, 50, 1, 29-40
- Rayner, Stephen G. (2008). Complexity, diversity and management: Some reflections on folklore and learning leadership in education, *Management in Education*, 22(2), 40-46
- Smith, Robert, Sarah Pedersen, dan Simon Burnett (2014). Towards an organizational folklore of policing: The storied nature of policing and the police use of storytelling, *Folklore*, 125, 218-237
- Spich, Robert S. (1995). Globalization folklore: problems of myth and ideology in the discourse on globalization, *Journal of Organizational Change Management*, 8, 4, 6-29.
- www.folklore.ee/folklore/vol50/stefanova.pdf.
Humour theories and the archetype of the trickster in folklore: An analytical psychology point of view by Stefanova, A.

Mengali Kearifan Sosial Politik Masyarakat Minangkabau melalui Ungkapan Pepatah-pepatah Minangkabau

Wiridanengsih

Universitas Negeri Padang
wiridanengsih69@yahoo.com

Abstrak - Salah satu kearifan lokal yang ada di nusantara ini adalah kekayaan bahasa dan budaya daerah. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa dan budaya ke generasi selanjutnya adalah dengan memberikan dan mengajarkan serta mendidik anak-anak dengan beberapa pepatah-pepatah serta menjelaskan nilai-nilai yang terdapat ungkapan pepatah dalam bahasa daerah tersebut. Masyarakat Minangkabau adalah salah satu masyarakat yang memiliki kiasan dan pepatah yang bermakna. Pepatah-pepatah tersebut adalah cerminan dari pandangan hidup yang khas dalam masyarakat Minangkabau yaitu musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mufakat merupakan landasan hidup terpenting dalam adat Minangkabau dan memiliki semangat egalitarian. Maka tulisan ini mencoba untuk menjelaskan ungkapan pepatah yang bermakna semangat kebersamaan (egalitarian) dan budaya musyawarah mufakat yang diterapkan dalam rangkaian upacara khatam Quran anak-anak yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal yaitu Perguruan Quran Awaliyah di Kanagarian Balai Gurah Sumatera Barat. Kerangka berpikirnya menggunakan ilmu etnolinguistik. Spirit egalitarian yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi sudah sejak lama berkembang di kalangan masyarakat suku bangsa Minangkabau. Spirit ini tergambar dalam falsafah atau pepatah kehidupan, di antaranya *kato mufakaik nan bakuaso* (kata mufakat yang berkuasa), *basilang kayu dalam tungku mako api kahiduih* (bersilang kayu dalam tungku, sehingga api bisa hidup), *bulek aia dek Pambuluah*, *Bulek kato dek mufakaik* (*bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat*), *ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah* (ditinggikan hanya seranting, didahulukan), *duduk samo randah tagak samo tinggi* (duduk sama rendah berdiri sama tinggi). Terkait dengan proses pilkada di daerah Sumatera Barat, suatu kearifan lokal sosial politik tersimbolkan dalam pepatah dan simbol *pemilu badunsanak*. Suatu kearifan lokal dalam sistem politik di Sumatera Barat yang memiliki pengaruh dalam proses penyelesaian masalah Pemilu. Pemilu *badunsanak* yang mengandung filosofi persaudaraan, kebersamaan merupakan semangat masyarakat Sumbar untuk mensukseskan setiap pesta demokrasi.

Kata kunci: kearifan lokal politik, Minangkabau, pepatah

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya kita tidak bisa melupakan akar budaya yang memiliki nilai-nilai luhur bangsa. Nilai bijak dan nilai luhur di kenal dengan istilah kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal yang di nusantara ini adalah kekayaan bahasa dan budaya daerah. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa dan budaya ke generasi selanjutnya adalah dengan memberikan dan mengajarkan serta mendidik anak-anak dengan beberapa pepatah-pepatah serta menjelaskan nilai-nilai yang terdapat ungkapan pepatah dalam bahasa daerah tersebut.

Masyarakat Suku bangsa Minangkabau adalah satu etnis yang memiliki kebanggaan dalam berbahasa walaupun kadang-kadang ada ketidakmampuan secara sempurna dalam menggunakan bahasa Minangkabau yang penuh dengan kiasan dan pantun yang bermakna. Namun demikian pedoman dan nilai-nilai bijak yang ada dalam khasanah bahasa dan budaya bangsa tersebut masih dibutuhkan agar bangsa ini menjadi bangsa yang arif dan bijaksana, memiliki rasa kedamaian antara suku yang berbeda. Oleh karenanya kearifan lokal bahasa dan budayanya perlu digali dan dilestarikan.

Masyarakat suku bangsa Minangkabau adalah masyarakat yang berupaya memadukan antara nilai-nilai adat (tradisi) dan nilai keagamaan Islam. Masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat yang hidup dalam suasana egalitarian dan menghargai hak individu untuk berpendapat (Abdullah, 1966; Abdullah, 1988; Naim, 1984; Kato, 2005). Oleh karena itu semangat kebersamaan (egalitarian) adalah ciri khas masyarakat Minangkabau dimana musyawarah untuk mufakat merupakan landasan hidup terpenting dalam adat Minangkabau.

Kebersamaan (egalitarian) dalam masyarakat Minangkabau, terutama dalam proses pengambilan keputusan harus dibuat berdasarkan musyawarah menuju mufakat. Keputusan akan ada apabila ada kemufakatan oleh berbagai pihak. Orang suku Minangkabau memiliki kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari jaringan sosial yang memiliki tanggung jawab dan hak. Dalam pengambilan keputusan, setiap orang berhak menyatakan pendapat yang diakhiri dengan persetujuan (Beckmann, 2000:1-2).

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memahami budaya suatu suku bangsa, salah satu dengan cara mengkaji dan memahami ungkapan pepatah yang terdapat didalam bahasa dan budaya daerah seperti dalam bahasa dan budaya suku bangsa Minangkabau. Dalam bentuk kebahasaannya terkandung nilai luhur yang tidak pernah disadari oleh generasi muda karena dianggap sebagai warisan budaya yang hanya perlu diketahui oleh orang tua saja. Dengan kondisi masyarakat yang terpuruk oleh etika dan sopan santun, maka diperlukanlah sosialisasi untuk menanamkan nilai budaya lokal lewat jalur formal maupun informal,

Berdasarkan perihal di atas, tulisan mencoba untuk menjelaskan ungkapan pepatah yang memiliki makna kebersamaan (egalitarian) yang diterapkan dalam rangkaian upacara khatam Quran anak-anak yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal yaitu Perguruan Quran Awaliyah (PQA) yang ada di daerah Bukit Tinggi dan kabupaten Agam Sumatera Barat yang dilihat sebagai budaya yang sudah mengakar hidup ditengah masyarakat

Kerangka konseptual

Etnolinguistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bentuk-bentuk linguistik dipengaruhi oleh aspek sosial budaya, mental dan psikologis serta bagaimana hubungannya satu sama lainnya beserta maknanya. (Duranti 1997)

Sapir (Dalam Bonvillain 1997 :49) mengemukakan bahwa menganalisis kosa kata dalam suatu bahasa dapat mengungkapkan lingkungan fisik dan sosial dimana si penutur bahasa tersebut bermukim. bahasa adalah alat mendasar bagi manusia untuk kehidupan sosial, dan bahasa itu ketika diungkapkan terkait dengan budaya, bahasa mengungkapkan kenyataan budaya dan melambangkan kenyataan budaya tersebut maka orang berbicara dengan cara berbeda mengungkapkan cara berpikir yang berbeda pula. manusia berbahasa berbeda dengan cara berpikir berbeda karena bahasa yang digunakan menawarkan cara memandang dunia sekitar mereka yang berbeda pula.

Sehubungan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan budaya. Didalam masyarakat suku bangsa Minangkabau terdapat pepatah-pepatah (bahasa) . Pepatah-pepatah ini memiliki nilai-nilai yang mencerminkan latar belakang budaya masyarakat Suku bangsa Minangkabau tersebut seperti pepatah *bulek aia dek pambuluah*, *bulek kato dek mufakaik* (bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat). Pepatah ini menggambarkan latar belakang budaya masyarakat Minang yang suka bermusyawarah dan bermufakat dalam proses pengambil keputusan. Sebagaimana pendapat Abdullah, 1966 dan 1988; Naim, 1984; dan

Kato 2005, dimana semangat kebersamaan (egalitarian) adalah ciri khas masyarakat Minangkabau dimana musyawarah untuk mufakat merupakan landasan hidup terpenting dalam adat Minangkabau.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Menurut Spradley (1980) pendekatan etnografi adalah pendekatan penelitian yang mendeskripsikan fenomena sosial manusia sebagaimana adanya. Dalam pendekatan, penelitian ini berupaya menggali kearifan sosial politik Masyarakat Minangkabau melalui ungkapan pepatah-pepatah Minangkabau. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi sebagai metode utama dalam pendekatan etnografi.

PEMBAHASAN

Sistem Sosial Politik” Egalitarian” dalam Pepatah pepatah Minangkabau

Keyakinan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dalam kehidupan yang dikenal dengan semangat egalitarian merupakan nilai prinsip demokrasi yang digaung-gaungkan didunia internasional dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara sejarah perjalanan pemikiran, spirit egalitarian yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi sudah sejak lama berkembang, di kalangan masyarakat suku bangsa Minangkabau, nilai ini sudah ada sebelum kedatangan negara-negara Eropa ke Indonesia, ini dapat dibuktikan melalui falsafah adat suku bangsa Minangkabau yang berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, adapun spirit egaliter (spirit demokrasi) ini tergambar dalam falsafah atau pepatah kehidupan, di antaranya:

a. Kato mufakaik nan Bakuaso (Kata mufakat yang berkuasa)

Masyarakat bermusyawarah dilaksanakan dengan sungguh untuk mencari kata mufakat, pentingnya musyawarah bagi masyarakat Minangkabau karena hasil musyawarah diatas segala-galanya, seperti yang terungkap dalam pepatah dibawah ini

Sakalipun hingok nan mancangkam

Kuku nan tajam tak paguno

Walaupun mamacik tampuak alam.

Kato mufakaik nan bakuaso

(Sekalipun hinggap yang mencengkeram

Kuku yang tajam tak berguna

Walau memegang tampuk alam

Kata mufakat yang berkuasa

Dan

Duduk surang basampik-sampik

Duduk basamo balapang-lapang

Kato basamo di paiyokan

Kato surang babulek-i

Nan rajo kato mufakaik

Nan bana kato saiyo

(Duduk sendiri bersempit-sempit

Duduk bersama berlapang-lapang

Kata bersama di per iyakan

Kata seorang dibulati

Yang raja kata mufakat

Yang benar kata se iya.

b. Basilang kayu dalam tungku mako api kahiduiik (bersilang kayu dalam tungku, sehingga api bisa hidup)

Persilangan pendapat dalam musyawarah adalah hal yang lumrah dan menjadi suatu keharusan bagi masyarakat Minangkabau dalam memperoleh kata kesepakatan bersama, sebagaimana ungkapan di bawah ini:

Basilang kayu dalam tungku mako api kahiduiik
(Bersilang kayu dalam tungku, sehingga api bisa hidup)

Musyawarah untuk mufakat merupakan pola yang terimplikasi dalam rangkaian upacara Khatam Quran anak-anak di kanagarian Balai Gurah Sumatera Barat. Ini diungkapkan dalam pepatah *Basilang kayu dalam*

tungku mako api kahiduiik (Bersilang kayu dalam tungku, sehingga api bisa hidup) artinya setiap persoalan bisa dipecahkan dengan adanya silang pendapat dalam setiap musyawarah, setiap persoalan dimusyawarahkan agar dapat dipecahkan (Nusyirwan 2007:149).

c. Bulek aia dek Pambuluah, Bulek kato dek mufakaik (Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat)

Musyawarah mufakat adalah salah satu nilai dasar yang menjadi pandangan hidup masyarakat Minangkabau, sebagaimana dengan pepatah *Bulek aia dek Pambuluah, Bulek kato dek mufakaik* (Bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat).

Setiap orang mempunyai hak untuk berpedapat sesuai dengan aspirasinya, kebebasan berpendapat dijunjung tinggi atas nilai kebersamaan dan kesamaan. Semua orang dalam musyawarah dipandang sama meskipun mereka memiliki fungsi yang berbeda, semua orang bermanfaat sesuai dengan fungsinya, sebagaimana pepatah “*Nan buto paambuih lasuang, nan pakak palaeh badia, nan lumpuah paunyi rumah, nan kuek pambao baban, nan cadiak lawan barundiang*” artinya yang buat untuk meniup salung, yang tuli melepas bedil, yang lumpuh penunngu rumah, yang kuat pembawa beban, yang pintar teman berunding.

d. Ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah (ditinggikan hanya seranting, didahulukan selangkah)

Ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah (ditinggikan hanya seranting, didahulukan selangkah) artinya hampir tak ada jarak antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin. Dengan jarak yang hanya selangkah didepan orang yang dipimpin atau dengan jarak setinggi satu buah ranting antara yang dipimpin dengan yang dipimpin membuat sebuah kepemimpinan itu terkontrol dan mudah melakukan pengecekan “*check and balance*” terhadap perjalanan keputusan dan roda kepemimpinan.

Pemimpin dalam nagari alam Minangkabau seperti penghulu (kepala kampung) memiliki kedudukan terhormat, namun kedudukan mereka ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah, ini mensyaratkan mereka memiliki kedudukan yang sama ditengah masyarakat, namun memiliki kedudukan dan wewenang sebagai pemimpin, maka mereka perlu dihormati sebagaimana layaknya. Penghormatan tidak membuat mereka mengambil keputusan secara semena-mena dimana setiap keputusan yang akan dilakukan, tidaklah menjadi suatu keputusan yang otomatis, melainkan perlu mendapat persetujuan dari masyarakat banyak melalui forum bersama atau forum perwakilan.

e. Duduk samo rendah, tagak samo tinggi (duduk sama rendah berdiri sama tinggi)

Adanya nilai-nilai kesamaan dan keterbukaan, terlihat pada pepatah “*duduk samo rendah tagak samo tinggi*” (duduk sama rendah berdiri sama tinggi), walaupun pada kenyataan formal punya kedudukan yang lebih tinggi, tapi dalam prakteknya posisi pimpinan tidak terlalu berjarak dengan masyarakat sebagaimana pepatah untuk kepemimpinan, baik untuk kepemimpinan adat, agama dan kepemimpinan lainnya yang bunyinya antara lain. “*ditinggikan sa rantiang, didahulukan salangkah*” (ditinggikan se ranting, didahulukan selangkah) artinya hampir tidak ada jarak antara seorang yang memimpin dengan yang dipimpin, dalam hal ini akan mudah dilakukan koreksi satu sama lainnya dalam sistem sosial kehidupan dan pemimpin tidak bisa bertindak semaunya tetapi menyuatkan aspirasi rakyat

Berdemokrasi bagi orang Minangkabau, setiap proses pengambil keputusan harus melalui proses musyawarah menuju mufakat. Kata sepakat berasal dari orang-orang yang terlibat dalam permasalahan yang harus diselesaikan. Masyarakat Minangkabau memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari jaringan sosial yang memiliki hak dan tanggung jawab. Diri mereka adalah bagian dari kelompok, tiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan diakhiri oleh suatu persetujuan /tidak persetujuan (Beckmann, 2006:1-2)

Orang Minangkabau menyebut kampung halamannya dengan istilah alam Minangkabau, ini mengandung makna, bahwa alam itu segala-galanya, alam tidak hanya tempat lahir atau mati, tempat hidup dan berkembang namun alam tempat berguru, ini terkenal dengan falsafah “*alam takambang jadi guru.*” (Navis, 1984:59)

Masyarakat Minangkabau menganggap masyarakat adalah masyarakat yang dinamis di mana perubahan dipandang sebagai suatu yang lumrah saja (Sairin, 2002) ini terungkap dalam pepatah *sakali aia gadang, sakali tapian beralih sakali musim batuka, sakali caro batuka* (sekali air besar, sekali tepian beralih, sekali musim bertukar, sekali cara berganti) artinya masyarakat Minangkabau menyadari ada pola perubahan hidup dan berkembang di tengah masyarakat sehingga masyarakat sangat lentur terhadap perubahan. Selain itu masyarakat Minangkabau memiliki budaya merantau, dimana arti merantau ini adalah meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu pengetahuan, kekayaan dan kemasyuran (Kato, 2005:4)

Budaya bermusyawarah dan nilai egalitarian dalam sistem sosial politik Minangkabau merupakan budaya yang sudah turun-temurun diwariskan dan bertujuan mempersatukan masyarakat selain itu budaya

bermusyawarah dan adanya nilai egalitarian dalam masyarakat Minangkabau juga memiliki fungsi sebagai media penyelesaian konflik baik dalam skala kecil maupun besar. Budaya musyawarah dan egalitarian ini merupakan modal sosial politik bagi masyarakat dan bagi pemerintah diharapkan untuk merevitalisasi dalam kehidupan masyarakat

**Budaya Lokal “ Musyawarah dan Egalitarian,”
Lokal Dalam Masyarakat Minangkabau Suatu
tantangan**

Nilai budaya local egalitarian pada suku bangsa Minangkabau merupakan aset bangsa yang memiliki nilai harga yang tinggi. Namun dengan adanya penyeragaman yang dilakukan pada masa orde baru secara tidak langsung telah memudahkan nilai –nilai budaya lokal sebagai pegangan dan kearifan lokal masyarakat setempat. Ini diawali oleh adanya penetapan undang undang nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dan Undang Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Hal inilah yang dianggap sebagai suatu awal pemecahan komunitas lokal melebur dalam unit baru padahal komunitas adat tersebut memiliki khas tersendiri dan komunitas-komunitas adat itu bukanlah satu kesamaan adat. Melalui penetapan Undang-undang sedikitnya banyak telah mengerus kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan yang berbasis kultural seperti di Minangkabau, *Kerapatan Adat Nagari* (KAN) beserta sistem sosial politiknya. Jika sekarang mulai dikembalikan kepada hakikatnya suatu nagari di Minangkabau, muncul suatu tantangan karena nilai budaya lokal “egalitarian” tersebut sudah terdegradasi oleh sistem yang baru berdasarkan penyeragaman tersebut.

Nagari merupakan organisasi sosial politik di Minangkabau (Naim, 1979:17). Tiap *nagari* dipimpin oleh sebuah dewan penghulu atau *Kerapatan Adat Nagari* (KAN) yang terdiri dari wakil-wakil penghulu suku. Salah seorang di antaranya diangkat menjadi kepala yang dikenal dengan istilah penghulu *pucuk* (Penghulu pucuk). Jadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan didalam *nagari* adalah *Kerapatan Adat Nagari* (Graves, 1981: 11-12).

Pada masa pemerintahan orde baru organ politik lokal termasuk organ politik masyarakat Minangkabau diatur secara terpusat dan seragam serta mengabaikan sistem politik lokal yang telah mengakar di tengah masyarakat. Konsep Kenagarian yang gerakannya lebih mengarah pada sistem demokrasi dan otonom dihapus dan diganti dengan sistem pemerintahan desa. Perubahan ini juga mempengaruhi cara berperilaku politik masyarakat di Sumatera Barat dimana sistem birokrasi yang kaku

membuat sikap feodalisme juga tumbuh di tengah kehidupan masyarakat.

Ketika reformasi 1998 bergulir, nilai demokrasi mulai ditumbuhkan namun tetap menjadi tantangan karena nilai itu belum sepenuhnya berkembang dan perlu optimisme bahwa budaya lokal minangkabau dengan semangat musyawarah dan egalitariannya merupakan modal sosial budaya lokal yang perlu digali dan dilestarikan.

Kearifan lokal sosial Politik Masyarakat Sumatera dalam Pepatah Kontemporer “Pemilu Badunsanak”.

Memilih pemimpin-pemimpin daerah secara langsung saat ini merupakan momentum yang strategis dalam kehidupan bernegara, untuk itu diperlukan partisipasi politik rakyat yang aktif, artinya partisipasi politik rakyat yang ada tidaklah hanya menggunakan hak pilihnya secara pasif tetapi juga menunjukkan partisipasi yang mengimplementasikan bagaimana melakukan pilihan yang rasional dalam rangka memberikan kemaslahatan untuk orang banyak.

Partisipasi politik ini akan menjadi masalah, ketika partisipasi diiringi oleh konflik antar tim sukses yang menggalang kekuatan untuk kemenangan calon kepala daerah tersebut. Konflik bisa berujung kekerasan jika tidak ada manajemen konflik yang efektif dan manajemen yang memiliki tekad kampanye pemilihan yang damai serta pandangan yang positif atas kekalahan dan kemenangan atas pilkada maupun pilwako dalam suatu daerah.

Jika partisipasi politik yang diiringi konflik terjadi maka mengingatkan kita, arti penting pengembangan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam rangka mencari solusi bersama dan mengantisipasi konflik yang akan terjadi. Kearifan lokal yang mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dikenal, dipercaya dan diakui sebagai elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat.

Pepatah pemilu *badunsanak* yang menjadi komitmen moral semua pihak, tidak terkecuali bagi penyelenggaraan dan juga pasangan calon serta partai politik. Awalnya, lanjut dia, *pepatah* itu timbulkan diskusi yang hangat dan keraguan dari beberapa pihak. Pasalnya mungkinkah pilkada yang seyogyanya sebuah kompetisi bisa disandingkan dengan filosofi *badunsanak* yang seakan-akan meniadakan kompetisi. Nyatanya hal itu bisa kita dilaksanakannya pemilu *badunsanak* ketika itu, terangnya lagi, karena KPU Sumbang waktu itu

menggagas bahwa kompetisi di pilkada itu tetap ada nilai yang dibalut dengan filosofi minangkabau yakni nilai-nilai adat *badunsanak*.

Salah satu kearifan lokal sosial politik dalam bentuk pepatah kontemporer yaitu pemilu *badunsanak* adalah sebuah istilah yang dipakai dalam setiap perhelatan politik di Sumatera Barat. Mulai dari pemilihan legislatif, Pilpres sampai kepada Pilkada. Konsep pemilihan *badunsanak* itu dipopulerkan oleh pemerintah daerah untuk meminimalisir konflik dalam proses politik itu. Pemilihan *badunsanak* artinya pemilihan yang didasarkan semangat persaudaraan (Effendi, 2001:1).

Pepatah pemilu *badunsanak* yang menjadi komitmen moral semua pihak, tidak terkecuali bagi penyelenggaraan dan juga pasangan calon serta partai politik. Pilkada adalah sebuah kompetisi namun realitanya bisa disandingkan dengan filosofi, dimana filosofi *badunsanak* lebih mementingkan semangat kebersamaan daripada kompetisi, ini terlihat dari terlaksanakannya pemilu tanpa konflik dan perseteruan yang anarkis, ini tak lepas dari semangat pemilu *badunsanak* dan KPU Sumbang menggagas ini pemilu *badunsanak* ini adalah suatu kompetisi dalam pilkada harus tetap ada nilai yang dibalut dengan filosofi minangkabau yakni nilai-nilai adat *badunsanak* (Husni, 2005).

Pepatah pilkada *badunsanak* yang telah dipopulerkan sejak pilkada tahun 2005. Pilkada *badunsanak* adalah sebuah komitmen moral antar penyelenggara, peserta pemilihan dan masyarakat untuk menghadirkan kontestasi politik tanpa kekerasan, tanpa kecurangan dan mengedepankan semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Dalam hal ini meminta komitmen pasangan calon, partai politik pengusung dan masyarakat untuk tetap menegakkan prinsip *badunsanak* dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Kontestasi politik untuk memperebutkan kekuasaan di tingkat lokal tidak boleh merusak kohesivitas sosial hubungan kekerabatan dan pertemanan. Terlalu murah jika pertarungan untuk memperebutkan jabatan harus melepaskan hubungan kekerabatan dan pertemanan yang telah terjalin antar pasangan calon selama ini. Pilkada *badunsanak* bukan berarti meniadakan kompetisi tetapi berkompetisi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang hidup dan dianut oleh masyarakat Minangkabau. Pilkada *badunsanak* dapat terwujud jika penyelenggara bekerja secara profesional dan bertanggung jawab (Husni, 2010).

KESIMPULAN

Dalam ajaran adat Minangkabau, kedudukan manusia adalah setara, terlihat dari sikap mau menerima perbedaan di tengah masyarakat, setiap memiliki potensi untuk menyampaikan kebenaran sehingga sikap akomodatif secara positif perlu dikembangkan dalam mencari kebenaran yang bisa diterima semua pihak. Di antaranya indikasi kesetaraan terlihat ada sistem pengambilan keputusan yang terdiri dari nagari, dimana nagari ini berdiri secara otonom. Posisi pemimpin adalah posisi orang yang mewakili rakyat, bukan raja yang memiliki struktural yang tinggi. Model kepemimpinannya, model kepemimpinan yang tidak berjarak tinggi, jaraknya hanya seranting dan selangkah lebih tinggi dari rakyatnya. Pemimpin tidak bisa bertindak semaunya tetapi menyuarakan aspirasi rakyat, hal ini dapat dikatakan bahwa pola hubungan antara pemimpin dan dipimpin bersifat *patron client*, suatu hubungan yang saling mempengaruhi dan membutuhkan dan ini adalah suatu kearifan lokal masyarakat Minangkabau.

Kearifan lokal adalah nilai nilai, pandangan masyarakat setempat yang bersifat bijaksana dan penuh pengertian. Yusri (2008) mengemukakan bahwa kearifan lokal adalah sistem ide dan makna yang dimiliki masyarakat secara matang yang merupakan hasil proses belajar dan seleksi sosial dalam berpikir, bersikap dan bertindak serta berperilaku yang berfungsi untuk penataan lingkungan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum dan lain-lain.

Kearifan lokal membawa pesan kepada masyarakat dalam proses penyelesaian masalah di lingkungan sehingga semangat mengangkat kearifan lokal sebagai salah satu solusi dalam pemecahan permasalahan dan memberikan penekanan bahwa kearifan lokal adalah produk budaya yang dapat menyatu tatanan kehidupan agar lebih serasi dan adaya penekanan akan penting partisipasi masyarakat dalam penciptaan kearifan kearifan kehidupan patut dihargai

Suatu kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat dalam sistem politik yang tertuang di dalam beberapa pepatah *Kato mufakaik nan Bakuaso, Basilang kayu dalam*

tungku mako api kahiduiik, ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah, duduk samo randah tagak samo tinggi. Dan pepatah yang sangat kekinian saat ini dikembangkan konsep atau pepatah pemilu *badunsanak* dimana Pemilu dan *badunsanak* mengandung makna yang berlawanan, di mana Pemilu mengandung makna semangat berkompetisi untuk dipilih oleh masyarakat, sementara *badunsanak* adalah persaudaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (1980) Studi Tentang Minangkabau. Kertas Kerja Seminar Internasional Mengenai Kesusastraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau 4-6 September 1980 di Bukit Tinggi
- Beckmann, keebet von Benda (2000) Goyahnya Tangga Menuju Mufakat. Jakarta Grasindo
- Bonvillian, Nancy (1997) Language, Cultural and Communication The meaning of message, New Jersey. Prentice Hall
- Kato, Tsuyoshi (2005) Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah. Jakarta. Balai Pustaka.
- Naim, Muchtar (1984) Merantau: Pola migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Duranti, Alessandro 1997. Linguistic Antropology. Cambridge: Cambridge University Press
- Iskandar, Hary Efendi (2005) *Dari pemilu badunsanak kepemilu basiarak* Studi Tentang Radikalisasi Politik di Kabupaten Padang Pariaman 2005 Makalah ini disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII tanggal 14-17November 2006 di Hotel Millenium Jakarta.
- Kamil, Husni (2010) dalam berita <http://riaupos.co/84867-arsip-kembalikan-semangat-pemilu-badunsanak-di-sumbar.html#ixzz4Ml3YibU6>
- Kamil, Husni (2010) dalam berita <http://www.antasumbar.com/berita/157115/husni--tagline-pilkada-badunsanak-masih-layak-diimplementasikan.html>
- Yusri, Yusuf (2008), *Peute Beun, Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh

Peranan Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Desa di Minahasa (Studi di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)

Welly Waworundeng

Mahasiswa Pascasarjana Program Doktor Prodi Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Pemerintahan

FISIP Unpad Bandung

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado

wellywaworundeng@yahoo.com

Abstrak

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya, yang mengandung gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan lokal, yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat desa. Budaya yang diterapkan oleh masyarakat termasuk kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kearifan lokal yang perlu dibina dan dilestarikan sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan desa. Metode penelitian secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan lokasi di desa Warembungan kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan desa berpenduduk terbanyak kedua dari 227 desa yang ada di kabupaten Minahasa, dan merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kota Manado sebagai ibukota propinsi Sulawesi Utara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kearifan lokal di Minahasa yaitu mapalus, pinontol sawang, jaga negeri dan kerja bakti (gotong royong). Kearifan lokal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa bahkan berpengaruh pada pembangunan desa, sehingga kearifan lokal dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan pada tingkat lokal di desa. Sejalan dengan perubahan sosial kultural, terjadi pergeseran dalam penerapan budaya sebagai kearifan lokal di desa Warembungan, bahkan sebagian telah hilang di masyarakat. Kearifan lokal yang saat ini telah ditinggalkan masyarakat desa Warembungan yaitu pinontol sawang, jaga negeri dan mapalus tani. Agar kearifan lokal tersebut dapat terus dilestarikan masyarakat, maka perlu adanya strategi politik kebudayaan yang dilaksanakan di desa. Bentuk strategi tersebut yaitu pembuatan peraturan desa (perdes) dan peraturan daerah (perda) di tingkat pemerintah daerah/kabupaten Minahasa, sebagai dasar membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa

Kata kunci: peranan, budaya, kearifan lokal, desa, pembangunan desa.

PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya, yang mengandung gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan lokal, yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat desa. Kearifan lokal menurut Theresia, dkk. (2015:66) dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya menurut Sibarani (2012:112-113) adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana. Dengan kata lain, budaya yang diterapkan oleh masyarakat termasuk kearifan lokal.

Setiap daerah sesuai dengan kondisi geografisnya, memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda (Zulkarnain dkk, 2008:69-84., Siswadi dkk, 2011:63-68., Alus, 2014., Suhartini, 2009., Juniarta dkk, 2013). Kearifan lokal di setiap daerah, memiliki manfaat karena mampu mensejahterakan masyarakatnya (Juniarta dkk, 2013., Sungkharat *et.al*, 2010). Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan Zulkarnain dkk, (2008), Siswadi dkk (2011) dan Alus (2014), diketahui bahwa kearifan lokal di setiap daerah perlu dijaga dan dilestarikan karena dapat hilang seiring dengan perkembangan zaman. Kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya sangatlah penting untuk ditumbuhkan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan agar kearifan lokal yang merupakan budaya setempat dapat terus menerus dilaksanakan masyarakat antara lain 1) perlu adanya penyusunan rencana strategis pengembangan dan pelestarian budaya yang di tetapkan melalui peraturan desa 2) perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kreatifitas kebudayaan.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian tersebut, maka di desa Warembungan kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa juga memiliki kearifan lokal sebagai budaya Minahasa. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, terdapat budaya yang mulai hilang bahkan ditinggalkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal yang merupakan budaya Minahasa, dalam perannya sebagai faktor yang perlu dioptimalkan dalam pembangunan desa Warembungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu obyek dalam keadaan apa adanya. Metode ini dapat digunakan untuk memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang terkadang sulit dipahami secara memuaskan. Penggunaan desain kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting atau konteks yang dikaji dari sudut pandang secara utuh, komprehensif, dan holistik (Creswell, 2013:4). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan bagaimana perkembangan kearifan lokal dan bagaimana peran kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan di desa Warembungan kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

Lokasi penelitian di desa Warembungan kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa provinsi Sulawesi Utara, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan desa berpenduduk kedua terbanyak dari 227 desa yang ada di kabupaten Minahasa, dan merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan kota Manado sebagai ibukota propinsi Sulawesi Utara. Informan dalam penelitian ini yaitu Hukum Tua (sebutan lain kepala desa di Minahasa berdasarkan hukum adat), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan tokoh agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menjelaskan gambaran umum desa Warembungan, kearifan lokal yang ada di Minahasa, perkembangan kearifan lokal di desa Warembungan, peranan kearifan lokal dalam pembangunan desa Warembungan, dan strategi politik kebudayaan untuk melestarikan kearifan lokal di desa.

Gambaran Umum Desa Warembungan

Desa Warembungan merupakan salah satu dari 227 desa di kabupaten Minahasa berada di kecamatan Pineleng termasuk desa yang memiliki sumber daya yang besar. Desa ini berdiri tahun 1850, memiliki luas wilayah 1.580,00ha (+ 1.100ha lahan pertanian/perkebunan) dan jumlah penduduk 4.084 jiwa, memiliki 15 (lima belas) *jaga* (lingkungan), mayoritas pekerjaan penduduk sebagai petani (68%), mayoritas penduduk sub etnis *tombulu* (80%).

Peranan Kearifan Lokal dalam Pembangunan Desa di Minahasa

Kearifan lokal di Kabupaten Minahasa merupakan warisan nenek moyang, dimana asal mulanya tidak diketahui sebelumnya. Kearifan lokal tersebut yaitu:

1. *Lukar/lumukar/ma'lukar atau jaga negeri/desa*, meliputi kegiatan menjaga keamanan desa, kantor desa, dan rumah Hukum Tua, menerima/mengantar surat di desa, serta sebagai penerima tamu desa/Hukum Tua, dimana pelaksanaannya berdasarkan swadaya/sukarela masyarakat desa secara bergilir setiap hari (Rondonuwu, 2015).
2. *Sumawang/pinontol sawang*, berupa kegiatan masyarakat desa yang memberikan tenaganya untuk bekerja di kebun, sawah dan di rumah Hukum Tua untuk beberapa hari dalam satu tahun. Kegiatan tersebut merupakan wujud kebersamaan masyarakat atas balas jasa serta ungkapan terima kasih karena Hukum Tua telah berkorban, memimpin dan melayani masyarakat desa. Hukum Tua tidak diberi gaji, hanya memperoleh prosentase dari penagihan pajak. Selain itu Hukum Tua berhak mengerahkan tenaga rakyat untuk membantunya tanpa bayaran (Suwondo, 1978:70-71).
3. *Kerja bakti* (gotong-royong), berupa kegiatan membangun desa atas swadaya/sukarela masyarakat, yaitu berperan dalam kegiatan membersihkan lingkungan pemukiman, membersihkan lingkungan pekuburan, membersihkan lingkungan pasar desa, membuat atau memelihara prasarana jalan desa, tempat ibadah, gedung sekolah, puskesmas/pos kesehatan, pos kamling, dan saluran irigasi;
4. *Mapalus*, merupakan kegiatan tolong menolong yang dilakukan sesama anggota dalam kelompok mapalus (Supit, 1986:46). Kelompok mapalus terbentuk atas dasar adanya kepentingan yang sama diantara anggotanya, seperti mapalus pertanian/nelayan, mapalus uang, mapalus bantuan duka, mapalus bantuan perkawinan, mapalus kelahiran anak, mapalus pembangunan keluarga (Taulu, 1951: 43-44; Turang, 1983:24). Bentuk dan keanggotaan kelompok tersebut misalnya: kelompok tani, kelompok rukun tetangga/warga

(*jaga*/lingkungan), kelompok rukun keluarga, kelompok organisasi keagamaan, kelompok profesi.

Jaga negeri dan kerja bakti, diwajibkan untuk dilaksanakan oleh penduduk desa laki-laki berumur 17 s/d 55 tahun atau tidak sekolah/bekerja, sedangkan *sumawang/ pinontol sawang* dan *mapalus* oleh penduduk desa laki-laki dan perempuan berumur 17 s/d 55 tahun atau tidak sekolah/bekerja.

Kegiatan yang dilaksanakan pada keempat jenis kearifan lokal tersebut, berperan dalam pembangunan desa, khususnya jaga negeri, kerja bakti, dan *mapalus*. Ketiga kearifan lokal tersebut merupakan kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa (sesuai definisi pembangunan desa dalam Permendagri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa). Kearifan lokal tersebut merupakan wujud partisipatif yang dilaksanakan masyarakat desa dalam pembangunan desa. Pembangunan partisipatif yang mampu diwujudkan oleh masyarakat desa, sangat dibutuhkan bahkan merupakan modal utama dalam pembangunan desa. Dengan demikian, melalui koordinasi Hukum Tua, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan, mampu mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial di desa (sesuai definisi pembangunan partisipatif dalam Permendagri No.114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)

Seiring dengan perkembangan zaman, kearifan lokal juga telah mengalami perubahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informanⁱⁱ diketahui bahwa di desa Warembungan, terdapat kearifan lokal yang sudah ditinggalkan masyarakat. Kearifan lokal tersebut yaitu:

1. *Jaga negeri/malukar*, dimana sejak tahun 1990-an tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakat. Hilangnya kearifan lokal tersebut, karena kebijakan pemerintah desa yang menghentikan pelaksanaan *jaga negeri*, dengan alasan terdapat masyarakat desa yang tidak mau lagi memberikan tenaganya karena harus bekerja di luar desa. *Jaga negeri* kemudian diganti dengan kegiatan pos kamling yang dijaga oleh para hansip, wandra dan kambra.
2. *Sumawang/pinontol sawang*, sejak tahun 2000-an tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakat, dengan alasan bahwa Hukum Tua telah menerima gaji/tunjangan kesejahteraan dari dana desa. Bersamaan dengan hal tersebut, muncul perasaan malu dari Hukum Tua untuk menerima bantuan tenaga dari masyarakat desa.

3. *Kerja bakti* (gotong-royong) untuk pembangunan desamulai berkurang diikuti oleh masyarakat. Dengan kata lain, terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
4. *Mapalus*, dimana terjadi penurunan jumlah organisasi/kelompok dan kegiatan *mapalus* pertanian, ekonomi dan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, hilangnya kearifan lokal di desa Warembungan, diikuti juga dengan penurunan nilai-nilai yang terkandung bahkan mendasari kegiatan-kegiatan sehubungan dengan kearifan lokal di masyarakat. Hilangnya budaya *mapalus* berdampak pada meningkatnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, berkurangnya kepemilikan lahan pertanian oleh penduduk desa, banyaknya lahan tidur, sehingga terjadi peningkatan konflik sosial, yang berakibat pada berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desaⁱⁱⁱ.

Strategi Politik Kebudayaan Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Minahasa

Kearifan lokal di Minahasa, apabila tetap dipertahankan untuk dilaksanakan di desa Warembungan, dapat membantu terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa. Kearifan lokal di desa Warembungan perlu dijaga dan dilestarikan, sehingga dapat terus menjadi warisan budaya di masa mendatang karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Berbagai upaya perlu dilakukan sebagai strategi politik kebudayaan dalam melestarikan kearifan lokal minahasa (Zulkarnain dkk, 2008., Siswadi dkk, 2011., Alus, 2014). Agar supaya kearifan lokal di Minahasa seperti *mapalus*, kerja bakti dan jaga negeri dapat terus dilaksanakan sebagai pelestarian kebudayaan Minahasa, maka perlu dilakukan perencanaan untuk membuat:

1. peraturan daerah yang mengatur tentang pembangunan budaya di Minahasa.
2. peraturan desa tentang pembangunan budaya yang mengacu pada peraturan daerah. Hal tersebut perlu dilakukan karena umumnya program di desa merupakan turunan dari program propinsi/kabupaten.
3. perlu dilakukan pelatihan kepemimpinan Hukum Tua agar mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari jaman ke jaman.

SIMPULAN

Kearifan lokal di Minahasa dapat berperan dalam pembangunan desa apabila secara terus menerus mampu dijalankan oleh masyarakat desa. Kearifan lokal

di Minahasa mengandung nilai-nilai budaya yang patut di jaga dan dilestarikan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang partisipatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa secara bersama-sama. Oleh sebab itu, diperlukan strategi politik kebudayaan dalam penerapannya, antara lain perlu menetapkan peraturan desa dan peraturan daerah tentang pelaksanaan kearifan lokal yang dapat meningkatkan kreatifitas kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alus, Christeward. 2014. Peran lembaga adat dalam pelestarian kearifan lokal suku sahu di desa balisoan kecamatan sahu Kabupaten halmahera barat. *Journal Acta Diurna* Volume III (4)
- Juniarta, Hagi Primadasa., Edi Susilo., Mimit Primyastanto., 2013. Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. *Jurnal ECSOFiM* Volume 1(1)
- Rondonuwu, B. 2015. Eksistensi Hukum Tua Pada Pemerintahan Desa (studi Tentang Hukum Tua Dlam Konsep Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Periode Thun 1945-2014). Bandung: PPS Unpad
- Siswadi, Tukiman Taruna, Hartuti Purnaweni. 2011. Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Mata Air (Studi Kasus di Desa Purwogondo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). *Jurnal Ilmu Lingkungan* Volue 9 (2): 63-68. ISSN 1829-8907
- Zulkarnain, Asdi Agustar, Rudi Febriamansyah. 2008. Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Dan

Pelestarian Sumberdaya Pesisir (Studi Kasus di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau). *Jurnal Agribisnis Kerakyatan* Volume 1(1):69-84.

- Sibarani, Robert 2012. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
- Suhartini. 2009. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009
- Sungkharat Utit, Piboon DOUNGCHAN, Chantas Tongchiou, Banlue Tinpang-nga. 2010. Local Wisdom: The Development Of Community Culture And Production Processes In Thailand. *International Business & Economics Research Journal*. Volume 9 (11).
- Cresswell, J.W. 2013. (Cresswell, J.W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Supit, Bert. 1986. *Minahasa: Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Mina Wanua*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Theresia, A., dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Taulu, H.M. 1952 *Adat dan Hukum Adat Minahasa*. Tomohon: Jajasan Membangun.
- Turang, J. 1983. *Mapalus di Minahasa. Daerah Tk II Minahasa: Posko Koperasi Mandiri*.

Warembungan, tokoh masyarakat. Hasil wawancara tanggal 8 Juni 2016; FT selaku Hukum Tuadesa Warembungan. Hasilwawancaratanggal 29 September 2016. WR selaku sekretaris BPMJ GMIM Sion Warembungan, tokoh agama, mantan sekretaris desa.

ⁱⁱⁱNT selakuKepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kab. Minahasa. Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2016;

ⁱSumber register Desa Warembungan tahun 2015, dan hasil wawancara peneliti dengan AW selaku mantan Hukum Tua (KepalaDesa) desa Warembungan kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa, tanggal 8 Juni 2016

ⁱⁱAK selaku wakil ketua BPD desa Warembungan, tokoh masyarakat. Hasil wawancara tanggal 5 Maret 2016;AW selaku mantan Hukum Tuadesa

MODEL PENGELOLAAN MADRASAH MANDIRI BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Junardi Harahap
Budi Rajab
Budhi Gunawan
Opan S. Suwartapradja

Departemen Antropologi, Universitas Padjadjaran
junardiharahap@gmail.com

Abstrak

Madrasah adalah sebuah institusi pendidikan yang bergerak di bidang religi dan merupakan salah satu ujung tombak dalam pendidikan berbasis agama mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Madrasah mempunyai kemampuan untuk mencetak para anak bangsa untuk semakin berkarakter. Pendidikan berkarakter berbasis agama sebenarnya berasal dari budaya dan akar budi masyarakat serta falsafah bangsa Indonesia. Artinya, madrasah tidak lepas dari budaya masyarakat setempat yang menjadikannya sangat dekat dengan kearifan lokal budaya bangsa. Madrasah adalah sebuah aset budaya lokal yang harus terus tetap dijaga dan dijadikan sebagai institusi yang terus bergerak di bidang karakter agama serta terus dijadikan sebagai salah satu ujung tombak tolak ukur peradaban bangsa berkarakter agama. Yang secara budaya bangsa Indonesia madrasah memiliki kontribusi yang berorientasi pada membangun peradaban bangsa. Pertanyaan dalam artikel ini adalah bagaimana model pengelolaan madrasah mandiri berdasarkan kearifan lokal bangsa. Metodologi dalam artikel ini adalah menggunakan data pengabdian masyarakat dengan metode kualitatif dengan observasi dan wawancara. Hasil dari artikel ini menyatakan bahwa model pengelolaan madrasah mandiri bagi kehidupan madrasah secara mandiri yang berbasis kearifan lokal adalah dengan memelihara domba Garut dan membuat usaha mandiri seperti kios. Dengan model ini madrasah mampu kehidupan dan mengelola madrasah secara mandiri. Implikasi dari artikel ini adalah memberikan masukan bagi pengelolaan madrasah secara mandiri dengan berbasis kearifan lokal melalui usaha pemeliharaan domba Garut dan bentuk usaha lainnya.

Kata kunci: Masyarakat, madrasah, mandiri, kearifan lokal dan pengelolaan

PENDAHULUAN

Madrasah merupakan sebuah institusi yang bergerak di dalam dunia pendidikan. Madrasah adalah sebuah lembaga yang berdasarkan kepada pendidikan yang berteraskan kepada agama bersifat religius yaitu agama Islam. Agama yang melandasi berdirinya pendidikan berbasis religi tersebut, yang bernama madrasah. Madrasah telah menjadi sebuah candra dimuka bagi berhasilnya tujuan yang ingin

dicapai dalam pendidikan berdasarkan agama. Hal penting yang perlu diingat bahwa menjadikan madrasah sebagai bagian penting di dalam masyarakat. Tujuan di dalam penulisan artikel ini adalah untuk menjadikan madrasah sebagai kebanggaan bangsa, dengan sifat religiusitasnya. Madrasah merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pendidikan agama yang membawa masyarakat untuk memperoleh pencerahan yang lebih baik di dalam pendidikan agama, tentu hal ini akan memberikan perubahan pendidikan masyarakat yang lebih baik. Keberadaan madrasah telah membawa masyarakat kepada perubahan pendidikan berkarakter agama yang lebih baik.

Madrasah sebagai institusi yang banyak didirikan oleh inisiatif dari masyarakat telah banyak memberikan kontribusi kepada pendidikan berteraskan agama di pedesaan dan di perkotaan. Keberadaan madrasah akhirnya memberikan korelasi positif terhadap masyarakat yang membawa kebaikan dan keberkahan pendidikan di masyarakat. Meskipun, di sana sini terdapat persoalan di dalam tubuh madrasah, terlebih-lebih berkaitan dengan pengelolaan dan pendanaan. Namun, lambat laun hal tersebut dapat diselesaikan dengan adanya musyawarah yang dilakukan. Salah satu bentuk penyelesaian persoalan, tersebut coba dipecahkan di dalam artikel ini, yaitu mengenai model pengelolaan madrasah. Model pengelolaan madrasah sangat penting untuk melihat bagaimana baiknya membangun madrasah dengan model kearifan lokal yang ada yang tentu akan membawa madrasah sebagai sebuah institusi dengan pengelolaan yang lebih baik.

METODE

Metode yang digunakan di dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan sumber data berasal dari hasil pengabdian masyarakat dengan sumber informasi dari informan dan juga dari hasil observasi di lapangan. Hasilnya adalah sebuah olahan mengenai konsep dan model pengelolaan madrasah yang ideal yang baik untuk mengelola madrasah sehingga dapat kehidupan pengelolaan madrasah dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kajian menunjukkan akan ada model yang cukup baik yang berdasarkan kepada budaya bangsa yaitu yang melekat seperti pemeliharaan domba garut yang mesti tetap harus dijaga dengan baik dan sesuai dengan dasar dan juga kemampuan yang harus tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kearifan tradisional yang mesti dijalankan dan dijadikan sebagai sumber dari berbagai hal yang harus dilakukan dengan baik. Masyarakat yang menjalankan banyak hal yang membawa kepada perubahan besar di dalam masyarakat yang mempelajari. Untuk madrasah sendiri menurut Kosim(2007:45-46), yang memaparkan sejarah penting madrasah pada masa awal kemerdekaan yang menjadikan madrasah dan pesantren sebagai tonggak pendidikan agama di Indonesia, salah satunya adalah madrasah yang punya sejarah penting bangsa kita.

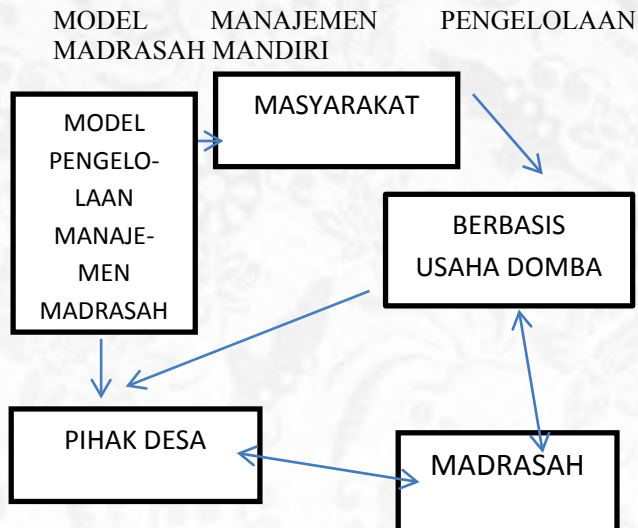
Hasil dan pembahasan yang ingin disampaikan bahwa madrasah perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan hal pendanaan bagi madrasah. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diberikan oleh Nasikun (1995:19) banyak institusi yang terkendala akibat masalah teknis, sehingga sukar untuk berkembang. Sehingga fungsi madrasah tetap pada fungsi awalnya yaitu melakukan perubahan masyarakat dengan berlatar belakang kepada masalah religi yang sudah berakar sejak lama pada masyarakat kita. Akar dari religi yang telah berakar tersebut tentu juga berhubungan dengan budaya setempat yang memiliki akar yang kuat pula. Di dalam pembahasan yang akan disampaikan dalam artikel ini pula akan melakukan analisis sesuai dengan budaya masyarakat yang berbasis kepada religi masyarakat setempat. Masyarakat setempat mesti menjadi prioritas utama dalam analisis yang akan dibuat di dalam artikel ini. Artinya masyarakat setempat memiliki keistimewaan yang ada sejak ratusan tahun yang lalu berhubungan dengan budaya setempat yang berakar sejak lama. Tentu hal tersebutlah yang akan dijadikan pisau analisis model yang akan dikembangkan di dalam artikel ini.

Masyarakat, budaya dan agama adalah bahasan yang menarik karena menyentuh ke bagian yang terdalam dalam masyarakat kita. Bisa dibayangkan bagaimana ketiga unsur ini menyatu di dalam masyarakat dan menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan termaktub di dalam sebuah masyarakat yang membawa kepada terimplementasinya semua unsur dengan baik pada masyarakat yang apalagi hal tersebut digunakan dengan baik akan mudahlah semua program dilakukan dengan baik. Model yang dikembangkan disini yang berhubungan dengan ketiga komponen tersebut sehingga mudah terimplementasi dengan baik.

Masyarakat mempunyai budaya yang telah mengakar begitu kuat yang menjadi hal penting di dalam masyarakat yang membawa pengaruh penting di dalam

masyarakat kita. Pengelolaan madrasah dengan melibatkan masyarakat sangat penting, karena madrasah merupakan sebuah bagian yang penting dalam masyarakat yang membawa banyak pengaruh pada masyarakat kita. Masyarakat kita mempunyai banyak kearifan lokal yang mesti tetap dijaga dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ada. Yang tentunya membawa banyak perubahan besar dalam masyarakat kita, yang mempunyai banyak pengaruh bagi masyarakat kita. Masyarakat kita berdasarkan kepada sebuah kebudayaan yang mesti dilestarikan dengan banyak hal dan mesti dilestarikan. Karena masyarakat bangsa kita adalah masyarakat yang sangat tergantung pada tradisi yang berangkat dari kearifan lokal bangsa yang terus terjamin. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadikan sumber daya dan juga segala sumber daya lokal yang harus tetap dipertahankan dan digunakan dengan baik.

Masyarakat akan merespons baik bila dilakukan melalui pendekatan budaya hal itulah coba dikembangkan di dalam artikel ini. Dengan metode yang digunakan adalah domba garut sebagai prioritas untuk pengembangan madrasah dan juga pengelolaan madrasah. Beternak domba telah menjadibudaya dalam masyarakat kita, dengan memelihara domba akan membawa nilai budaya telah masuk ke dalam masyarakat sehingga model yang digunakan juga menjadi lebih baik. Domba adalah sebuah budaya yang telah berjalan cukup lama pada budaya sunda, yang menjadikan ternak domba sebagai ternak yang dipelihara oleh masyarakat yang tentu akan membawa hal kesejahteraan dan ekonomi bagi masyarakat. Hal ini yang menjadi landasan bagi masyarakat untuk beternak domba garut karena memang karena telah menjadi budaya yang telah lama bagi masyarakat. Masyarakat tentu akan suka bila pengelolaan sangat berhubungan dengan budaya dari masyarakat yang bersangkutan tentu akan membawa kepada pengelolaan yang lebih baik karena berhubungan budaya. Dengan budaya masyarakat setempat dan tentu tidak akan memperoleh penentangan dari masyarakat setempat yang membawa kepada perubahan dalam daya fikir akan membawa pengelolaan akan lebih mudah karena menggunakan kearifan lokal masyarakat setempat. Sebelumnya juga kajian sebelumnya juga telah dilakukan seperti Mulyanto, Suwartapradja & Wijanti (2011) & Harahap, Suwartapradja & Mulyanto (2012). Model yang digunakan seperti tergambar di dalam Junardi Harahap et al(2016:15), yang menggambarkan mengenai model yang dikembangkan seperti di bawah ini:



Sumber: Junardi Harahap et al(2016:10)

Domba merupakan hewan yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat kita, terlebih-lebih yang namanya domba garut yang telah menjadi icon yang telah lama dan berakar di dalam kehidupan masyarakat kita. Pemeliharaan hewan ini, telah membawa perubahan yang lebih baik pada mata pencaharian pada masyarakat kita, sehingga hewan domba adalah sebuah bentuk mata pencaharian yang sangat menjanjikan bagi masyarakat kita. Sebuah pengelolaan dapat berjalan dengan baik bila sebuah program berjalan sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Supa'at (2008:48), madrasah sangat memerlukan manajemen pendanaan madrasah dan manajemen skill madrasah. Maka Rochmawati (2012:163), skill yang diberikan yaitu bersangkut paut dengan pelajaran karakter agama. Dari sini pulah berangkat ide-ide untuk membuat sebuah manajemen pengelolaan madrasah yang baik. Karena semua yang dilakukan untuk pengelolaan madrasah sesuai dengan budaya masyarakat setempat yaitu dengan berdasarkan kepada budaya yang telah berakar cukup lamanya masyarakat dalam pengelolaan madrasah, dengan memakai kearifan lokal yang ada pada masyarakat kita. Hal ini mutlak diperlukan untuk memperoleh penanganan yang serius dari masyarakat sehingga pengelolaan madrasah dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa terkendala dengan masalah biaya dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diuraikan dalam artikel ini adalah model pengelolaan yang baik dalam pengelolaan madrasah untuk kawasan Jawa Barat utamanya pada masyarakat desa adalah dengan pengelolaan yang masyarakat juga terlibat dalam pemeliharaan domba garut di dalamnya. Artinya di dalam pengelolaan madrasah pihakustad dan ustazah terlibat pula di dalam memelihara domba untuk menghidupi madrasah tanpa harus terkendala dengan biaya. Masyarakat

dapat merasakan keberadaan institusi madrasah tanpa harus bingung dengan pembiayaan madrasah karena sudah dipenuhi pembiayaan dan juga hal lainnya dari pengelolaan madrasah yang berdasarkan kepada pemeliharaan domba untuk menghidupi operasional pembiayaan madrasah. Madrasah adalah sebuah institusi yang bergerak di bidang pendidikan masyarakat sehingga dapat memberikan pemberdayaan yang baik tentu dengan pengelolaan dan model pengelolaan yang dikembangkan diatas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada LPPM UNPAD yang telah memberikan dana buat melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih kepada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, J., Rajab, B., Gunawan, B., & Suwartapradja, O.S. (2016). Laporan Kemajuan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) Prioritas. *Manajemen Pengelolaan Madrasah Mandiri Al Furqon*. Jatinangor: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
- Harahap, J., Suwartapradja, O.S & Mulyanto, D. (2012). *Pengelolaan Madrasah Diniyah Ibtidaiyah (MDI) Al Furqon Menuju Madrasah mandiri*. Jatinangor: Laporan PKM LPPM UNPAD.
- Kosim, M. (2007). Madrasah di Indonesia. (Pertumbuhan dan Perkembangan). *Tadris*. 2. (1): 41-57.
- Rochmawati, I. (2012). *Optimalisasi Peran Madrasah Dalam Pengembangan Sistem Nilai Masyarakat*. *Pedagogia* 1, (2):161-171.
- Nasikun. (1995). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyanto, D., Suwartapradja, O.S & Wijanti, D.T. (2011). *Pengelolaan Madrasah Diniyah Ibtidaiyah (MDI) Al Furqon Menuju Madrasah Mandiri (Tahap 1)*. Laporan PKM LPPM UNPAD.
- Supa'at. (2008). Paradigma Baru Pengelolaan Madrasah. *Kepemilikan Islam*, 3, (1):35-57.

Pemilihan *Wali Jorong* Langsung Dan Implikasinya terhadap Budaya Politik *Nagari*

Irawati
Fisip Universitas Andalas
Ira.tanjung@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini memfokuskan kajian pada perkembangan demokrasi lokal dilihat dari nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan dalam ranah desentralisasi di Indonesia yang cenderung mengedepankan prinsip partisipasi individu yang termanifestasi nyata dalam mekanisme pemilihan pejabat eksekutif daerah dengan model pemilihan langsung. Model pemilihan Kepala Daerah langsung yang kemudian diadopsi juga untuk model pemilihan pejabat eksekutif di pemerintahan *Nagari* (*Wali Nagari/Wali Jorong*) di Sumatera Barat. Padahal situasi sosial-politik pada level Pemerintahan Daerah jauh berbeda dengan situasi sosial-politik pada level *Nagari*. Konsep pemilihan langsung ini diadopsi dari konsep demokrasi liberal yang memegang prinsip partisipasi individual sebagai salah satu ukuran kualitas demokrasi. Tak jarang model pemilihan langsung ini menunculkan konflik seperti yang terjadi dalam pemilihan *Wali Jorong* Padang Kunyik, *Nagari* Kamang Mudik Kabupaten Agam. Tulisan ini bertujuan menjelaskan implikasi model pemilihan langsung dalam pemilihan *Wali Jorong* terhadap karakteristik budaya demokrasi masyarakat di tingkat *Nagari*. Studi dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis* dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam, sedangkan data skunder didapat dari dokumentasi. Pada periode-periode sebelumnya pemilihan *Wali Jorong* dilaksanakan dengan sistem musyawarah tetapi dukungan itu tidak bisa lepas dari basis komunal (suku). Representasi seseorang didasari oleh representasi komunal, bukan representasi individual. Masyarakat *Nagari* yang melandaskan kehidupan pada kekuatan hubungan komunal, “dipaksa” untuk memahami dan mempraktekkan model demokrasi yang tidak berakar pada kultur politik setempat. Akibat pengadopsian pemilihan langsung *Wali Jorong* terjadi kompetisi yang bebas, secara langsung dengan prinsip *one man, one vote*, menimbulkan rasa permusuhan “perang dingin” antar kandidat maupun antar pendukung yang sebenarnya mereka saling bertetangga. Bahkan bukan suatu keniscayaan akan menimbulkan konflik antara pendukung. Penerapan nilai demokrasi yang berbeda dengan nilai-nilai masyarakat sendiri menghilangkan

prinsip musyawarah dalam komunal sebagai bentuk demokrasi deliberatif masyarakat *Nagari*.

Kata kunci: pemilihan langsung, *wali jorong*, konflik, demokrasi, budaya politik, *nagari*

PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi di Indonesia membawa perubahan besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan demokrasi lokal. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai berbagai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi kehidupan masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional (Eko, 2003:2). Semangat ini mawadahi keinginan masyarakat daerah untuk membentuk pemerintah yang sesuai dengan karakter mereka sendiri. Perubahan UU No 22 tahun 1999 dengan UU No 32 tahun 2004 secara konseptual berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengembangan demokrasi lokal. Salah satu wujud keinginan tersebut terlihat pada pasal yang mengatur tentang pemilihan pejabat eksekutif daerah dengan model pemilihan langsung. Konsep ini diadopsi dari konsep demokrasi liberal yang memegang prinsip partisipasi individual sebagai salah satu ukuran kualitas demokrasi.

Banyak kajian para ahli yang menjelaskan desentralisasi dan proses demokrasi lokal di Indonesia dari berbagai pendekatan. Kajian tersebut ada yang menunjukkan sikap pesimis dan sikap optimis terhadap perkembangan desentralisasi di Indonesia. Di antaranya Hidayat (2007) mencoba menjelaskan tentang desentralisasi dalam perspektif elite negara setempat. Studi Hidayat menunjukkan pelaksanaan desentralisasi ditandai oleh tawar-menawar dan koalisi antara elit lokal dan tidak bisa disangkal bahwa proses pengambilan keputusan juga cenderung terkonsentrasi di tangan beberapa orang, terutama mereka yang berada pada Pemerintah Daerah dan DPRD. Baswedan (2007) mempelajari tentang hubungan antara desentralisasi dan proses demokratisasi. Baswedan menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak secara langsung meningkatkan partisipasi politik lokal. Otonomi daerah mengalihkan fokus

perhatian dari isu-isu nasional menjadi isu-isu politik regional. Temuan lain mengindikasikan bahwa tingkat response pemerintah dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Berkaitan dengan isu transparansi, Baswedan juga menemukan bahwa tingkat transparansi pemerintah berkaitan dengan tingkat keasadaran publik terhadap politik lokal. Sedangkan Lele (2012) mencoba menjelaskan paradoks desentralisasi dilihat dari pelayanan publik dan pengambilan keputusan. Lele berkesimpulan bahwa pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tampaknya justru membuat jarak antara pemerintah dan masyarakat semakin jauh. Artikel ini berpendapat bahwa paradoks jarak tersebut terjadi akibat rekayasa kelembagaan. Setidaknya terdapat dua hal yang menyebabkan kondisi tersebut, pertama terkait dengan politik pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang lebih menguntungkan pemerintah pusat. Faktor kedua adalah pengaturan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat di mana hampir tidak ada jalan bagi masyarakat setempat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah yang lalai menjalankan tugasnya.

Kajian Lele dan Hidayat menunjukkan pandangan yang pesimis terhadap perkembangan desentralisasi. Sedangkan kajian Baswedan memperlihatkan pandangan yang sangat optimis terhadap perkembangan desentralisasi dan demokrasi di Indonesia. Berangkat dari dua pandangan ini yang kontradiktif ini, terutama kajian Baswedan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kaitan desentralisasi dan demokrasi lokal. Peneliti memfokuskan kajian pada perkembangan demokrasi lokal dilihat dari nilai-nilai demokrasi yang dianut dan dikembangkan dalam ranah desentralisasi di Indonesia yang cenderung mengedepankan prinsip partisipasi individu. Prinsip partisipasi individual ini termanifestasi nyata dalam mekanisme pemilihan pejabat eksekutif daerah dengan model pemilihan langsung. Konsep ini diadopsi dari konsep demokrasi liberal yang memegang prinsip partisipasi individual sebagai salah satu ukuran kualitas demokrasi (Held: 2007).

Model pemilihan Kepala Daerah langsung yang kemudian diadopsi juga untuk model pemilihan pejabat eksekutif di *Nagari* (Wali *Nagari/Wali Jorong*) di Sumatera Barat. Padahal situasi sosial-politik pada level Pemerintahan Daerah jauh berbeda dengan situasi sosial-politik pada level *Nagari*. Pemerintahan *Nagari* yang dirancang di Sumatera Barat pasca reformasi, dipahami dengan menggunakan cara pandang desentralisasi dan demokrasi lokal untuk memaknai dan membingkai transformasi *Nagari* di Sumatera Barat. *Pertama*, *Nagari* dapat dipahami dengan kerangka pemerintahan sendiri yang berbasis (*self-governing community*). Artinya *Nagari* mempunyai otonomi (kemandirian) dalam

membangun organisasi kekuasaan dan pemerintahan sendiri, keleluasaan mengambil keputusan lokal, mengelola pemerintahan sehari-hari secara mandiri, mengelola sumberdaya lokal sendiri, mengelola interaksi sosial, mempunyai pola pengelolaan konflik dan sistem peradilan sendiri. *Self-governing community*, pada prinsipnya telah lama hidup sebelum *Nagari* diintegrasikan ke dalam negara, yang dikerangkai dengan aturan (hukum) adat. Mengikuti hukum nasional, *self-governing community* berarti sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak dan kewenangan sesuai dengan asal-usulnya.

Kedua, ketika *Nagari* sudah masuk ke dalam formasi besar negara-bangsa Indonesia, maka konsep *subsidiarity* sangat penting untuk memaknai ulang keberadaan *Nagari*. *Nagari* sekarang berbeda dengan *Nagari* dulu. *Nagari* dulu sangat otonom, mempunyai *self-governing community* bagaikan “republik kecil” yang terbebas dari kekuasaan pusat. *Nagari* sekarang tidak sepenuhnya otonom dari struktur negara. Struktur negara yang hirarkhis telah melakukan desentralisasi kekuasaan, kewenangan dan sumberdaya pada *Nagari*. Dengan kalimat lain, otonomi *Nagari* sekarang adalah “pemberian” negara. Karena itu, untuk membangkitkan (revitalisasi) semangat “republik kecil”, konsep *subsidiarity* adalah jawabannya. Sebagai sebuah prinsip politik, *subsidiarity* bukan sekadar berbicara tentang pembagian kewenangan ke unit pemerintahan yang lebih rendah, melainkan berbicara tentang pengambilan keputusan dan penggunaan kewenangan secara mandiri oleh unit pemerintahan atau komunitas yang paling rendah

Dalam konteks *subsidiarity ini*, maka sangat penting melihat kajian tentang pengembangan demokrasi dengan menggunakan konsep demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai kultural masyarakat *Nagari* itu sendiri. Pengembangan demokrasi dengan konsep pemberian dari pemerintah lebih atas, jelas akan menghilangkan kesempatan masyarakat *Nagari* untuk memiliki kewenangan sendiri secara mandiri. Penyeragaman model pemilihan pemimpin politik *Nagari* (Wali *Nagari/Wali Jorong*) secara langsung, perlu dilakukan mengkajian terkait dengan karakteristik budaya masyarakat *Nagari* yang memiliki kekuatan hubungan komunal.

Di beberapa *Nagari*, pemilihan pemimpin politik *Nagari* (Wali *Nagari/Wali Jorong*) secara langsung yang berlangsung secara demokratis sering harus dibayar dengan risiko sosial dan politik yang mahal, seperti munculnya dendam pribadi yang terus dibawa, serta permusuhan “perang dingin” antar kandidat maupun antar pendukung yang sebenarnya mereka saling bertetangga.

Bahkan bukan suatu keniscayaan akan menimbulkan konflik antara pendukung seperti terjadi dalam Pemilihan *Wali Jorong* Padang Kuyik *Nagari* Kamang Mudik, kabupaten Agam pada tahun 2015. Risiko sosial dan politik yang muncul tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan proses politik dan kondisi sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Masyarakat *Nagari* yang melandaskan kehidupan pada kekuatan hubungan komunal, “dipaksa” untuk memahami dan mempraktekkan model demokrasi yang tidak berakar pada kultur politik setempat. Masyarakat *Nagari* dipaksa untuk memahami mekanisme politik dalam pemilihan pemimpin sesuai dengan konsep demokrasi dengan prinsip *one man one vote*. Jika dikaji dari sisi tujuan desentralisasi yang diyakini membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis berbasis pada masyarakat, jelas kenyataan penyeragaman model pemilihan *Wali Jorong* langsung ini menjadi sangat kontradiktif dengan semangat tersebut.

Persoalan yang hendak dijadikan fokus penelitian ini meliputi, yaitu: *pertama*, Mengapa terjadi konflik setelah pemilihan langsung *Wali Jorong* Padang Kuyik *Nagari* Kamang Mudik, kabupaten Agam pada tahun 2015? *Kedua*, Apa implikasi model pemilihan *Wali Jorong* langsung terhadap budaya demokrasi masyarakat Jorong Padang Kuyik *Nagari* Kamang Mudik?

METODE

Penelitian tentang konflik pemilihan *Wali Nagari* langsung dan implikasinya terhadap budaya masyarakat *Nagari* ini, merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer direncanakan dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan penelitian ini juga menggunakan sumber tertulis (data sekunder) seperti sumber dari arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, majalah ilmiah, dan seterusnya.

Untuk pengambilan informan dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Oleh karena penelitian ini ingin menemukan nilai-nilai budaya masyarakat yang terkait dengan mekanisme pemilihan pemimpin politik di *Nagari*, maka penggunaan teknik ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Informan penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan kedudukan mereka pemilihan *Wali Jorong* langsung dan kedudukannya dalam masyarakat. Untuk menemukan nilai-nilai masyarakat peneliti menggunakan tokoh masyarakat sebagai sumber informasi yang nantinya akan memberikan penjelasan tentang nilai-nilai budaya dan prakteknya di *Nagari*, maka proses penarikan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball* dan berakhir hingga pada

titik jenuh tertentu dengan ditemukannya suatu pola yang berulang atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan ke informan tersebut. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan terkait pada gabungan data yang didapat dari informan (*emik*) dan interpretasi peneliti (*etic*) terhadap data lapangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nagari dalam Konteks Desentralisasi

Otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi politik menjadi pilihan paling tidak ada tiga alasan utama, *Pertama* dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Desentralisasi dianggap mampu memangkas rigiditas birokrasi dan meningkatkan otoritas pemerintah daerah sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin efektif. *Kedua* desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat tercipta partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. *Ketiga* dalam rangka demokratisasi sistem pemerintahan. Diyakini bahwa demokratisasi pada tingkat nasional tidak dapat bertahan kokoh tanpa ditopang oleh demokrasi ditingkat daerah (Hidayat, 2007: 238-240). Alasan ini menunjukkan bahwa pembangunan demokrasi lokal merupakan salah satu tujuan dari kebijakan desentralisasi yang penting. Ada keterkaitan yang signifikan antara demokrasi pada tingkat lokal dengan kekokohan demokrasi negara. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak hanya berurusan dengan persoalan pembagian kewenangan dan keuangan dari pusat ke daerah, melainkan juga hendak membawa negara lebih dekat pada masyarakat atau membuat demokrasi lokal bekerja (akuntabilitas lokal, transparansi, responsivitas dan partisipasi masyarakat) (Eko: 2003a).

Namun demokrasi dalam pengertian ini tidak hanya sebatas penyerahan kewenangan dan pemilihan pemimpin secara langsung. Tetapi yang menjadi terpenting adalah bagaimana desentralisasi pada pemerintahan daerah mampu menjamin keterlibatan dan kepentingan masyarakat keseluruhan dalam proses politik atau memperkuat posisi rakyat. Tidak hanya sebatas terlibat dalam pemungutan suara semata.

Salah satu tema sentral kebangkitan desentralisasi dan demokrasi lokal di Sumbar adalah “Kembali ke *Nagari*”, yakni kembali ke identitas dan komunitas politik lokal yang desentralistik dan demokratis. Pemahaman akan perubahan yang inilah kemudian yang menciptakan sistem pemerintahan *Nagari* yang diberlakukan pada tahun 2000 menggunakan konsep sistem politik modern yang digabungkan dengan kultur tradisional. Konsep

pemerintahan *Nagari* seperti yang diatur dalam perda No. 9 Tahun 2000 menganut prinsip *trias politica* dalam politik modern. Konsep dalam perda ini sendiri mengakomodir sistem politik modern yang digabung dengan kultur Minangkabau. Adanya struktur pemerintahan *Nagari* yang terdiri dari lembaga legislatif (BPAN), Lembaga eksekutif (Wali *Nagari*) dan yudikatif dalam batasan tertentu (KAN), yang disandingkan dengan kultur minangkabau dengan pengakomodiran kepemimpinan *Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajaringan* sebagai orang-orang yang mengisi lembaga-lembaga tersebut. Selain lembaga-lembaga ini masih dimungkinkan membentuk organisasi sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga keputusan untuk menjadikan *Nagari* menjadi pemerintahan terendah ini menimbulkan harapan yang sangat besar dari semua lapisan masyarakat Minangkabau untuk menciptakan sistem pemerintahan *Nagari* yang berakar pada kultur mereka yang sajak lama dianggap demokratis. *Image* demokrasi model *Nagari* Minangkabau lama yang memang diakui sebagai model yang ideal baik oleh masyarakatnya sendiri maupun pihak luar.

Tengku Rika dkk (2011) menyimpulkan bahwa didalam *Nagari*, perangkat *Nagari* dan masyarakat serta lembaga *Nagari* bisa membuat sebuah komitmen bersama dengan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal dalam membangun *Nagari* dengan prinsip integritas. Praktek nilai-nilai bekerja pada level masyarakat awam dan dijadikan patokan perilaku bagi semua aktor-aktor dalam lembaga-lembaga yang ada di *Nagari* seperti Wali *Nagari* dan perangkatnya sebagai eksekutif, Badan Musyawarah *Nagari* sebagai unsur legislatif dan Kerapatan Adat *Nagari* sebagai unsur yudikatif. Dalam prakteknya nilai-nilai budaya lokal dalam lembaga adat dan lembaga *Nagari* yang bersifat formal ternyata bisa menjembatani kepentingan yang berbeda antara penghulu yang bergelar rajo dengan wali *Nagari* sebagai institusi pemerintahan formal. Di *Nagari* ini masyarakat diberikan ruang publik yang sangat bebas dan menyalurkan aspirasi dan pendapatnya, ruang publik itu dikelompokkan jadi dua yaitu ruang publik untuk mengurus segala bentuk masalah adat dan budaya, sako dan pusako terletak di lembaga Adat (KAN) dan ruang publik untuk masalah formal serta administrasi pemerintahan terletak di pemerintahan *Nagari*.

Artinya masyarakat Sumatera Barat sendiri sudah dianggap memiliki *social capital* yang cukup kuat untuk mendukung penciptaan demokrasi tersebut. Penciptaan struktur demokratis itu menjadi tidak cukup ketika tidak didukung oleh kekuatan kultural yang memungkinkan

bekerjanya lembaga-lembaga tersebut secara maksimal. Membuat desentralisasi dan demokrasi bekerja lebih baik tidak cukup hanya disandarkan pada kebijakan yang demokratis (akuntabel, responsif dan partisipatif), komitmen elite lokal, atau *capacity building* bagi pemerintah daerah, melainkan juga harus digerakkan oleh modal sosial dalam sektor masyarakat sipil. Mungkin perspektif yang dikembangkan oleh Robert Putnam (1993) tentang *social capital* menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji apakah sistem pemerintahan *Nagari* di Sumatera Barat mampu menciptakan demokrasi secara substantif.

Demokrasi Komunitarian dan Proses Deliberasi Berbasis Kultur

Demokrasi adalah cara atau seni “pergaulan hidup” untuk mencapai kebaikan bersama. Banyak orang memahami bahwa prinsip dasar demokrasi adalah kebebasan individu. Tetapi idelanya prinsip dasar demokrasi adalah mendengarkan dan menghargai orang lain. Jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat, maka pemerintah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan dan bertindak. Sebagai seni pergaulan hidup demokrasi bisa diwujudkan dalam level prosedural dan kultural (Eko, 2003b). Demokrasi prosedural antara lain terkait dengan mekanisme pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Demokrasi pada level kultural terkait dengan budaya atau tatakrama (*fatsoen*) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil. Ini tercermin dalam kultur yang toleran, terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, *mutual trust*, kepedulian warga, kompetensi politik, dan seterusnya.

Pemikiran dan penerapan demokrasi prosedural sangat beragam karena dipengaruhi oleh dua tradisi pemikiran: demokrasi liberal dan demokrasi komunitarian. Menurut tradisi liberal, demokrasi prosedural diukur dengan bekerjanya tiga nilai penting: kontestasi (kompetisi), liberalisasi dan partisipasi. Ketiga elemen ini berbasis pada individualisme dan semangat kebebasan individu.

Demokrasi komunitarian lahir sebagai kritik atas demokrasi liberal, karena demokrasi liberal ini dinilai menjadi hegemoni universal yang melakukan penyeragaman praktek demokrasi prosedural di seluruh dunia. Orang di manapun akan mengatakan bahwa demokrasi adalah kebebasan individu, pemilihan secara bebas, dan partisipasi. Jarang sekali orang yang berargumen bahwa demokrasi adalah metode untuk mencapai kebersamaan secara kolektif. Tradisi komunitarian, yang peka terhadap masalah ini, memaknai demokrasi secara partikularistik dengan memperhatikan

keragaman budaya, struktur sosial, sistem ekonomi dan sejarah setiap negara. Dua penganut demokrasi komunitarian, Barber (1983) dan Walzer (1984), menyatakan bahwa individualisme liberal cenderung merusak kewarganegaraan dan menafikkan *civic virtue*. Artinya, semangat individualisme liberal itu tidak mampu memberikan landasan yang kokoh bagi kebebasan dan kesetaraan warga dalam bingkai demokrasi komunitas (Eko,2003b). Penganut komunitarian yakin bahwa rakyat selalu berada dalam ikatan komunal ketimbang individualistik.

Tabel 1
Dua tradisi demokrasi

	Item	Liberal	Komunitarian
1.	Sumber	Tradisi liberal ala Barat	Komunitarian ala masyarakat lokal
2.	Basis	Individualisme	Kolektivisme
3.	Semangat	Kebebasan individu	Kebersamaan secara kolektif
4.	Wadah	Lembaga perwakilan, partai politik dan pemilihan umum	Komunitas, <i>commune</i> , rapat desa, rembug desa, forum warga, asosiasi sosial, paguyuban, dll
5.	Metode	<i>Voting</i> secara kompetitif	Musyawarah
6.	Model	Demokrasi perwakilan	Demokrasi deliberatif

Sumber: diadopsi dari Eko, 2003b, Revitalisasi Demokrasi komunitarian.

Gagasan demokrasi komunitarian sangat relevan diterapkan pada level komunitas yang kecil seperti *Nagari* karena kegagalan demokrasi prosedural-liberal mewadahi partisipasi publik. Demokrasi liberal secara konvensional mereduksi praktek demokrasi hanya dalam kerangka pemilihan pemimpin dan lembaga perwakilan, yang diyakini sebagai wadah partisipasi publik. Format demokrasi perwakilan yang didesain itu dilembagakan secara formal melalui peraturan, yang mau tidak mau menimbulkan apa yang disebut oleh Robert Michel sebagai oligarki elite. Segelintir elite yang mengendalikan pemerintahan dan pembuatan keputusan itu umumnya bersikap konservatif dan punya kepentingan sendiri yang tercerabut dari konstituennya, tetapi mereka selalu mengklaim mewakili rakyat banyak.

Karena itu, demokrasi komunitarian sebagai pilar *self-governing community*, dapat mempromosikan partisipasi publik dalam urusan publik, pemerintahan dan pembangunan di level komunitas. Melampaui batasan-batasan formal, demokrasi komunitarian merekomendasikan pentingnya perluasan ruang publik,

pengaktifan peran kelompok-kelompok sosial, forum warga, serta jaringan antarkelompok, yang bukan saja untuk keperluan *self-help* kelompok, tetapi juga sebagai wahana *awareness* warga, *civic engagement* dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas (Eko,2003c). Elemen-elemen komunitarian yang dinamis inilah yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) dan pembuatan keputusan berbasis komunitas (bukan segelintir elite) secara partisipatif serta memungkinkan penggalan potensi dan kreativitas individu dalam ikatan kolektif.

Model demokrasi deliberatif merupakan bentuk ekstrem demokrasi prosedural yang dijiwai oleh tradisi komunitarian. Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung dalam hal penentuan pemimpin dan mekanisme pembuatan keputusan. Menurut penganjur demokrasi deliberatif, mekanisme penentuan pemimpin dan pembuatan keputusan dilakukan dengan cara partisipasi warga secara langsung, bukan melalui *voting* atau perwakilan, melainkan melalui dialog, musyawarah dan pengambilan kesepakatan. Menurut Dryzek, untuk menyelesaikan permasalahan publik, kualitas pembuatan keputusan harus diletakkan dalam inti perdebatan dengan diperkuatnya rasionalitas yang diskursif atau komunikatif, sehingga kita dapat mencari solusi kolektif dari permasalahan kolektif yang kita hadapi dalam kehidupan modern (Held, 2007: 277-278). Demokrasi deliberatif menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan sendiri. Dalam model demokrasi ini keputusan politik yang memenuhi standar adalah yang dapat dipertahankan dalam debat publik yang diikuti oleh semua pihak yang berkepentingan yang setara (Held, 2007: 281).

Model demokrasi deliberatif ini menuntut pemahaman nilai-nilai kolektif yang dihargai dan dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan politik. Saling menghargai sesama anggota kelompok, kultur yang toleran, terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, *mutual trust* dan kesetaraan menjadi hal yang penting dalam debat publik dalam pengambilan keputusan. Kehadiran masyarakat dalam wilayah publik yang terbuka merupakan bagian dari perluasan arena masyarakat dengan cara ikut berpartisipasi di dalam pembentukan kebijakan sebagai upaya penguatan basis lokal. Penguatan basis lokal tersebut diharapkan bisa mengubah taraf kehidupan yang lebih baik dan lebih bermartabat. Oleh sebab itu, bagaimana menggunakan pintu pemberian otonomi daerah ini menjadi titik masuk bagi demokratisasi dan partisipasi masyarakat. Secara historis-sosiologis, *Nagari*

mempunyai tradisi demokrasi komunitarian yang berlandaskan pada *suku/kaum*.

Praktek Pemilihan Langsung dan Hilangnya Karakter Demokrasi Komunal Masyarakat

Masyarakat *Nagari* di Sumatera Barat dikenal sebagai masyarakat yang memiliki khazanah budaya yang ekuivalen dengan nilai-nilai demokrasi yang bertumpu pada komunal. Dalam literatur-literatur seperti ditulis Franz & Benda-Beckmann (2000), Dobbin (1983), Tsuyoshi Kato (1989), Audrey Kahin (2005), masyarakat *Nagari* selalu digambarkan sebagai masyarakat yang egaliter dengan model demokrasi yang menempatkan kesepakatan kolektif komunal sebagai suatu proses penentuan keputusan. Masyarakat tidak mengenal suara individu sebagai penentu keputusan politik, individu selalu didefensikan sebagai bahagian dari komunal. Representasi seseorang didasari oleh representasi komunal, bukan representasi individual. Model seperti ini, akan mengikat hubungan yang timbal balik antara pemimpin dengan masyarakatnya.

Pemilihan Wali *Nagari/ Wali Jorong* adalah bentuk kongkrit pengalaman berdemokrasi masyarakat *Nagari*. Pemilihan Wali *Nagari/ Wali Jorong* langsung dianggap sebagai arena demokrasi dan sekaligus sebagai arena pergolakan politik paling seru di *Nagari*, karena melibatkan kompetisi aktor-aktor politik dan mobilisasi massa besar-besaran. Dalam Pemilihan Wali *Nagari/Wali Jorong* langsung terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote*. Kemenangan seorang kandidat Wali *Nagari/ Wali Jorong* atau kompetitor sangat ditentukan oleh dukungan suara individu dalam proses pemilihan, tetapi dukungan itu tidak bisa lepas dari basis komunal, baik yang terkait dengan kekerabatan (keluarga), teman dan tetangga. Kekerabatan (*trah*) semakin tampak dan solid bila salah satu anggotanya tampil menjadi calon Wali *Nagari/Wali Jorong*. Tetapi kohesivitas ketetanggaan atau pertemanan bisa pecah karena proses pilwana.

Risiko sosial dan politik yang muncul tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan proses politik dan kondisi sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Masyarakat *Nagari* yang melandaskan kehidupan pada kekuatan hubungan komunal, “dipaksa” untuk memahami dan mempraktekkan model demokrasi yang tidak berakar pada kultur politik setempat. Masyarakat *Nagari* dipaksa untuk memahami mekanisme politik dalam pemilihan pemimpin sesuai dengan konsep demokrasi dengan

prinsip *one man one vote*. Jika dikaji dari sisi tujuan desentralisasi yang diyakini membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis berbasis pada masyarakat, jelas kenyataan penyeragaman model pemilihan *Wali Jorong* langsung ini menjadi sangat kontradiktif dengan semangat tersebut.

Penyeragaman model pemilihan pemimpin politik *Nagari* (Wali *Nagari/Wali Jorong*) secara langsung, sangat berbeda dengan karakter budaya yang tumbuh dalam masyarakat *Nagari* selama ini. Misalnya kasus yang terjadi pada Pemilihan *Wali Jorong* Padang Kunyik *Nagari* Kamang Mudik, kabupaten Agam pada tahun 2015. Pemilihan yang dilakukan pada bulan September 2015 memunculkan konflik setelah panitia pemilihan menetapkan *Wali Jorong* terpilih. Beberapa kelompok warga menolak *Wali Jorong* terpilih dengan alasan bahwa *Wali Jorong* terpilih tidak memenuhi syarat umur seperti yang ditentukan oleh Perda kabupaten Agam No. 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan *Nagari*. *Wali Jorong* terpilih telah berusia 64 tahun, sedangkan pada pasal 39 Perda Kabupaten Agam No 12 tahun 2007 menyebutkan syarat menjadi *Wali Jorong* berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Beberapa kelompok masyarakat ini melakukan protes kepada panitia pemilihan dan mengajukan pengaduan kepada wali *Nagari* secara resmi.

Konflik muncul dalam masyarakat justru setelah proses pemilihan berlangsung, namun mereka tidak memprotes ketika proses pencalonan dilakukan. Jika diamati lebih dalam protes ini muncul sebenarnya dari rasa ketidakpuasan beberapa kelompok masyarakat yang tidak senang dengan *Wali Jorong* terpilih. Persyarakatan umur menjadi alat yang paling jitu sebagai alasan protes. Selama masa protes terjadi, muncul berbagai desas-desus yang saling menyudutkan diantara para pendukung, baik pendukung dari *Wali Jorong* terpilih maupun dari kelompok pendukung calon yang tidak terpilih. Tak jarang dalam pergaulan mereka sampai perang mulut meskipun mereka bertetangga dan satu suku. Kelompok masyarakat yang menolak hasil pemilihan *Wali Jorong* langsung, melakukan rapat terbatas dan mengajukan gugatan ke wali *Nagari*. Mereka meminta pembatalan terhadap *Wali Jorong* yang terpilih dan meminta pelantikan terhadap pemenang nomor dua yang memenuhi syarat dilihat dari sisi usia.

Perseteruan atau konflik akibat pemilihan *Wali Jorong* ini, memiliki efek lanjutan yang cukup buruk. Konflik ini bahkan merembet hingga ke program PKK yang sebelumnya berjalan baik. Kelompok PKK yang

sebelumnya solid dan bahkan memenangkan perlombaan tingkat Kecamatan, pecah karena adanya pertentangan antar pengurus yang berawal dari berseberangan dukungan dalam pemilihan *Wali Jorong*. Pemilihan ini membawa dampak permusuhan dalam masyarakat serta menyebabkan hilangnya solidaritas ketetangaan maupun komunal.

Jika dilihat pengalaman sebelumnya dalam masyarakat Jorong padang Kunyik, praktek pemilihan *Wali Jorong* biasanya menggunakan sistem musyawarah masyarakat yang berangkat dari kesepakatan kolektif komunal. Semenjak diterapkannya pemerintahan *Nagari* pada tahun 2000 model pemilihan musyawarah dengan basis kesepakatan komunal berjalan baik. Empat periode pergantian *Wali Jorong* tidak pernah terjadi konflik maupun penolakan oleh masyarakat terhadap *Wali Jorong* terpilih. Padahal jika dilihat dalam proses pemilihan tidak melibatkan semua anggota masyarakat jorong satu persatu. Proses musyawarah dilakukan dengan prinsip kebersamaan dengan representasi/ perwakilan dari kaum atau suku, dengan proses musyawarah terbuka dan dapat disaksikan oleh siapa saja anggota masyarakat yang bersedia hadir. Dalam proses musyawarah ini berbagai diskusi dan pertentangan memang kadang kala muncul, tetapi tidak pernah menjadi konflik ketika kesepakatan dan keputusan diambil untuk menetapkan *Wali Jorong*. Disinilah tepat rasanya apa yang dikatakan Dryzek, untuk menyelesaikan permasalahan publik, kualitas pembuatan keputusan harus diletakkan dalam inti perdebatan dengan diperkuatnya rasionalitas yang diskursif atau komunikatif, sehingga kita dapat mencari solusi kolektif dari permasalahan kolektif yang kita hadapi dalam kehidupan modern. Saling menghargai sesama anggota kelompok, kultur yang toleran, terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, *mutual trust* dan kesetaraan menjadi hal yang penting dalam debat publik dalam pengambilan keputusan. Sehingga keputusan musyawarah inilah yang menentukan siapa yang menjadi *Wali Jorong*. Meskipun tidak hadir dalam musyawarah, namun setiap anggota masyarakat dapat menerima keputusan musyawarah pemilihan *Wali Jorong* tersebut. Masyarakat sangat memahami bahwa musyawarah yang dilakukan oleh representasi komunal sudah mampu mengakomodir keinginan mereka dan keputusan tersebut diterima sebagai keputusan milik bersama. Dalam proses seperti inilah demokrasi deliberatif ini menuntut pemahaman nilai-nilai kolektif yang dihargai dan dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Berbeda dengan pengalaman ketika pemilihan langsung - model demokrasi liberal- diterapkan dalam pemilihan *Wali Jorong*, keterlibatan individual yang sangat

ditonjolkan menciptakan masyarakat yang rentan permusuhan. Masyarakat kehilangan rasa kepercayaan, toleran dan keterbukaan meskipun telah jelas hasil proses pemilihan. Pemilihan *Wali Jorong* boleh saja berlalu, tetapi permusuhan antar pendukung atau masyarakat menjadi pengalaman buruk bagi proses sosial kehidupan mereka. Kehilangan proses deliberasi dalam penentuan keputusan pemilihan pemimpin membuat masyarakat kehilangan nilai-nilai kebersamaan dalam komunal.

KESIMPULAN

Praktek demokrasi liberal yang diterapkan dalam pemilihan pemimpin politik dalam masyarakat komunal, ternyata dapat menciptakan permusuhan dalam masyarakat. Masyarakat justru kehilangan makna demokrasi itu sendiri, ketika model yang demokrasi yang dipaksakan tidak sesuai dengan kultur demokrasi yang mereka miliki. Dengan menemukan kembali ide, gagasan demokrasi dari kultur sendiri, dapat dijadikan landasan untuk melakukan perubahan dan pembenahan bagi proses demokratisasi yang sedang berlangsung di *Nagari* saat ini.

Pembangunan demokrasi di *Nagari* juga harus didasarkan kepada model budaya yang sudah tumbuh dalam *Nagari*. Tidak semua masyarakat *Nagari* dapat dipaksa untuk demokratis seperti yang selalu di imajinasikan demokrasi dari atas. Tetapi yang paling penting adalah pemberdayaan nilai-nilai demokrasi komunal yang dianggap unggul inilah yang seharusnya dieksplorasi untuk menjembatani perubahan yang ada. Apalagi kultur demokrasi Minangkabau sendiri sudah memperlihatkan keterbukaan pada perbedaan dan masyarakat yang mampu mendialektikakan perbedaan menjadi persamaan yang dihargai bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswedan, Anies Rasyid. 2007. "Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia". *PhD theses*, Department of Political Science, Northern Illinois University.
- Eko, Sutoro, 2003a. *Dinamika Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*, Makalah Disajikan dalam Lokakarya "Wawasan Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Masyarakat Mandiri (YBM2), 17-19 September Bogor.
- _____, 2003b, *Revitalisasi Demokrasi Komunitarian*, Makalah, IRE,

- Yogyakarta. <http://www.ireyogya.org>. diunduh 12 Juli 2009.
- _____, 2003c. "Modal Sosial, Desentralisasi dan Demokrasi Lokal", makalah disajikan dalam Seminar Internasional IV *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Demokrasi dan Partisipasi*, yang digelar oleh Yayasan Percik dan The Ford Foundation, Salatiga, 15-18 Juli.
- Lele, Gabriel, "The Paradox of Distance in Decentralized Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 15, Nomor 3, Maret 2012, hal. 220-231.
- Rika, Tengku Valentina, Irawati dan Roni Ekha Putera, 2011, *Membuat Model Intergritas Nasional Berbasis Lokal (Kasus: Transisi Demokrasi Lokal Nagari di Sumatera Barat dengan Menghidupkan Kembali Potensi Pilar - Pilar Kelembagaan di Tingkat Lokal)*, tidak diterbitkan, Kerjasama dengan PIEN-TIRI.
- Benda-Beckmann, Keebet von, 2000, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta: Grasindo.
- Dobbin, Christine E., 1983, *Islamic revivalism in a changing peasant economy: central Sumatra, 1784-1847*, Curzon Press.
- Held, David, 2007. *Model of Democracy*, Terj. Ahdul Haris, Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
- Hidayat, Syarif. 2007. *Too Much, Too Soon: Local State Elite's Perspective on and The Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kahin, Audrey, 2005, *Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Terj. Azmi dan Zulfahmi, Jakarta: Yayasan Obor.
- Kato, Tsuyoshi, 1989. *Nasab Ibu dan Merantau: Tradisi Minangkabau yang Berketerusan di Indonesia*. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Putnam, Robert. 1993, "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life" in *American Prospect*, Spring, p. 4-13.

Idiom Jawa dan Politik Elektoral Lokal

Iwan Nurhadi

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
iwan.nurhadi@ub.ac.id

Abstrak

Penggunaan idiom Jawa dalam kontestasi politik elektoral lokal adalah fenomena yang menguat seiring dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Seturut dengan pencitraan kontestan politik yang diproduksi dan direproduksi oleh para elit politik, idiom lokal mendapatkan momentum sebagai salah satu strategi politik untuk kemenangan pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk idiom Jawa yang digunakan oleh elit politik lokal dalam kontestasi politik lokal, menjelaskan konteks sosiokultural penggunaan idiom Jawa dalam kontestasi politik elektoral lokal dan menganalisis aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penggunaan idiom Jawa oleh elit politik lokal. Kerangka konseptual dalam penelitian ini terutama dibangun di atas karya-karya Anderson tentang bahasa dan kekuasaan masyarakat Jawa yang penuh dengan idiom, simbol-simbol serta rasa bahasa yang kompleks. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal intrinsik digunakan dalam penelitian ini. Informan dipilih secara purposif dengan kategori informan meliputi kontestan politik pada pemilihan kepala desa di lokasi penelitian dan kontestan politik pada pemilihan Bupati Kabupaten Malang. Perjudohan pola digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini untuk menjelaskan idiom, simbol dan perilaku strategi komunikasi politik kontestan politik pada pemilihan Bupati Malang dan Kepala Desa di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perilaku politik sangat ditentukan oleh tutur kata atau bahasa yang dipilihnya. Perilaku politik antar elit menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh *kawula alit* (orang biasa). Perilaku semacam ini sering diistilahkan sebagai perilaku atau tindakan yang terbungkus dengan bahasa Jawa melalui *kembang*, *lambang*, dan *sinarmuning* serta *lelaku* serta seperangkat pengetahuan simbolis lain sehingga strategi komunikasi politik berbeda antar elit.

Kata Kunci: *idiom Jawa, perilaku elit politik, kekuasaan, kontestasi politik elektoral, simbol.*

PENDAHULUAN

Redupnya penggunaan bahasa lokal atau *boso Jowo* dalam komunikasi politik di Indonesia dapat dilacak ke belakang dalam karya-karya Benedict R.O'G Anderson, Profesor Politik dan Ilmu Pemerintahan di Universitas Cornell Amerika. Melalui risetnya tentang Bahasa dan Kekuasaan Politik di Indonesia, Ben Anderson (1990) menganalisis bahwa redupnya penggunaan bahasa Jawa dalam politik kekuasaan Indonesia terjadi pada masa "investasi kolonial" dan penggunaan Bahasa Indonesia (Melayu) untuk memperluas perjuangan Indonesia merdeka.

Secara politik-kultural, penggunaan bahasa dalam berpolitik mencerminkan perilaku bertutur dan citra kebahasaan elit politik dan sekaligus membentuk apa yang disebut sebagai dengan "keberkuasaan berbahasa". Keberkuasaan berbahasa ditunjukkan melalui pemilihan gramatika dan menunjukkan sumbu berbahasa dalam komunikasi politik (Ibrahim, 2005). Pemilihan dan penggunaan bahasa tersebut membentuk imaji realitas politik. Misalnya, Presiden Sukarno dianggap sebagai pemimpin yang sangat senang menggunakan idiom atau kutipan dengan menggunakan bahasa Belanda dalam berpidato, seperti "oleh karena itu, maka semua bangsa Indonesia terutama haruslah ditujukan ke arah kemerdekaan nasional itu. Dengan bahasa Belanda: *de nationale vrijhed als zeer belangrijke voorwaarde tot de national reconstructie!*" Presiden Soeharto seringkali menggunakan idiom Jawa dalam beberapa pidatonya misalnya "Aja kagetan, aja gumunan, aja dumeah". Jika merujuk pada contoh di atas, nampaknya ada tesis yang dapat ditarik sebagai gambaran dunia politik kita dibentuk oleh suatu sistem bahasa yang politis. Sistem bahasa politik tersebut salah satunya tercermin melalui penggunaan "idiom" atau "perumpamaan" dalam berkomunikasi. Penggunaannya bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada audiens, mempersuasi khlayak dan menyerang lawan politik. Pada skala politik-lokal, penggunaan idiom bahasa lokal hampir selalu bermunculan setahun atau dua tahun menjelang kampanye dimulai. Dapat dikatakan idiom bahasa lokal

mencerminkan penggunaannya sebagai isyarat pencurian waktu kampanye politik. Ini bisa dijumpai pada berbagai media kampanye yang dijumpai di sepanjang jalan protokol suatu kota. Misalnya idiom *holopis kuntul baris* dari salah seorang elit politik nasional di Jawa Timur. Ungkapan tersebut bermakna agar bangsa Indonesia bergotong royong untuk membangun. Penggunaan idiom Jawa pada tingkatan lokal menjadi menarik untuk diteliti karena ia mencerminkan bagaimana elit politik lokal mencerminkan dirinya sebagai “pusat bahasa” politik. Melalui penggunaan idiom maka pencitraan politik seorang kontestan politik dibentuk dan mulai dikomunikasikan kepada para calon pemilihnya. Dengan kata lain, elit lokal menggunakan idiom Jawa sebagai salah satu *mainstream* komunikasi politik lokal.

Pada masyarakat Jawa, penggunaan idiom dalam berkomunikasi masih sering digunakan oleh mereka yang ada dalam wilayah pedesaan. Penggunaan idiom Jawa cenderung dipahami sebagai hal yang simbolik dan memiliki definisi yang dalam. Melalui idiom khas Jawa tersebut, biasanya kontestan pemilih memanfaatkannya untuk membangun relasi dengan para pemilihnya. Idiom Jawa adalah salah satu bentuk pengungkapan makna secara tradisional oleh masyarakat Jawa yang diperuntukkan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau kenyataan. Idiom Jawa mengandung makna semantik dan kultural bagi para penggunanya. Khusus untuk memilih seorang pemimpin atau bagaimana menjadi pemimpin sangat jelas dijabarkan dalam idiom Jawa. Misalnya pada prinsip yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang perilaku pemimpin *ing ngarso sing tuludo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*, penggunaan idiom tersebut menunjukkan pada makna dibalik simbolisasi tentang keperibadian seorang pemimpin.

Pada idiom Jawa, tersirat nilai-nilai lokal yang memiliki daya sugesti yang tinggi dan dianggap mampu menggerakkan bagi orang yang memahaminya (orang Jawa). Pada masyarakat Jawa, penggunaan idiom kadangkala menunjukkan sikap kehati-hatian seorang pemimpin dalam bertindak. Idiom ini sangat identik dengan tindak-tutur seorang pemimpin. Pada karakteristik tertentu, penggunaan idiom Jawa dapat dianggap sebagai citra penggunanya. Penggunaan idiom juga penting diperhatikan karena ia selalu memilih diksi yang tepat tentang prinsip yang dikemasnya dalam komunikasi politik.

Untuk memulai studi mengenai perilaku pemilih dan hubungannya dengan budaya Jawa, maka tulisan ini kembali merujuk pada tulisan penting yang lahir pada

tahun 1950an yaitu karya antropolog Clifford Geertz *The Religion of Java* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Santri, Priyayi, Abangan dalam Masyarakat Jawa (Geertz, 1989). Karya kedua yang patut dirujuk adalah tulisan dari hasil disertasi Afan Gaffar tentang *Javanese Voters* yang mengambil studi di masyarakat pedalaman Jawa (Gaffar, 1992). Secara kontemporer, perilaku pemilih pada era otonomi daerah yang dikenal dengan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) dapat dijelaskan melalui tulisan tentang Kuasa Rakyat dari Mujani et al. (2011). Ketiganya memberikan sumbangan pemikiran tentang transformasi pemilih orang Jawa dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia dan secara spesifik di Pulau Jawa. Studi Geertz di Kota Mojokuto (suatu kota yang belakangan diduga terletak di Pare, Kabupaten Kediri – Jawa Timur) pada tahun 1950-1953an, secara spesifik tidak melihat tentang perilaku politik pemilih Jawa. Namun, pada salah satu Bab dalam buku tersebut, studi ini telah berperan penting menjadi pembuka pada kajian tentang karakteristik pemilih orang Jawa. Dengan meletakkan analisis pada studi aliran, Geertz memfokuskan pada orientasi religius individu sebagai dasar penentuan perilaku pemilih. Memang bahwa dalam karyanya ini Geertz tidak membahas tentang karakter pemilih orang Jawa. Tetapi, studi ini telah memberikan aspek-aspek detail bagaimana beragam aspek muncul dalam satu konsep sistem sosial yang utuh.

Secara eksplisit, studi tentang Mojokuto tidak membicarakan mengenai perilaku pemilih dalam sistem politik di Jawa pada saat itu. Namun, perlu melihat secara historis, bahwa masa kegiatan lapang (fieldwork) yang dilakukan oleh Geertz bertepatan dengan masa pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1951. Jika melihat pada konteks historitas pemilu tersebut, perlu dipahami bahwa pemilu pertama tersebut, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki konstitusi paling maju di dunia. Dimana konstitusi tersebut menjamin kebebasan dan kaya akan budaya politik yang beragam. Pemilihan Mojokuto menurut Geertz, karena ia melihat Mojokuto sebagai suatu sistem sosial dengan kebudayaan akulturatif. Struktur sosial seperti Abangan (berpusat di pedesaan), Santri (berpusat di tempat perdagangan dan pasar) dan Priyayi (berpusat di kantor pemerintahan atau kota) mencerminkan bahwa sub-sub kebudayaan Jawa tersebut masing-masing merupakan struktur yang berlainan. Berdasarkan atas tulisan tersebut Geertz cenderung pada kesimpulan bahwa orientasi kaum Santri yang memiliki keyakinan Islam lebih baik dibandingkan dengan kaum Abangan akan cenderung memilih calon-calon atau partai-partai yang berazaskan atau memiliki ideologi Islam. Bagi kelompok Abangan,

pola keterwakilan atau pemilihan mereka akan teridentifikasi pada partai-partai yang non-Islam.

Afan Gaffar untuk projek disertasinya tentang pemilihan Jawa di pedalaman Jawa (Jawa Timur dan Jawa Tengah) berangkat dari pemikiran Clifford Geertz ini. Berdasarkan risetnya tersebut, Gaffar (1992) melihat bahwa perilaku memilih orang Jawa ditentukan oleh empat faktor utama. Pertama, keyakinan religius. Keyakinan religius merupakan variabel penting dalam mempengaruhi pilihan seseorang terhadap partai politik. Faktor ini mendapatkan pengaruh yang kuat dari studi yang dilakukan oleh Geertz tentang variasi aliran dalam menentukan preferensi politik orang Jawa. Faktor kedua, Identifikasi partai politik. Pada konteks ini pemilih Jawa berorientasi pada sisi psikologis-ideologis individu yaitu seberapa dekat individu terhadap partai politik atau elit politik dari partai tersebut. Kedekatan ini dapat terbentuk atau bahkan dibentuk melalui sosialisasi politik. Perilaku ini dapat menjelaskan bagaimana seorang yang berorganisasi ke Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kecenderungan psikologis memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau partai Islam, begitu juga sebaliknya dengan individu yang nasionalis akan memiliki sisi psikologis memilih partai yang berazaskan nasionalisme. Faktor ketiga, pola kepemimpinan. Berdasarkan atas perilaku pemilih di Jogjakarta, Gaffar (1992) perilaku pemilih Jawa ditentukan oleh pemilih non-formal seperti kyai, ustadz, guru, dukun dan sebagainya. Ini juga bisa dilacak dalam tulisan Geertz, dimana dijelaskan bahwa kaum santri dalam memilih banyak dilakukan atas dasar petunjuk pada kyai atau guru agama mereka. Sedangkan bagi kelompok Abangan, para guru dan dukun dianggap sebagai preferensi dalam memilih karena kepercayaan akan kekuatan supernatural yang mereka miliki. Sedangkan faktor terakhir yang diidentifikasi oleh Gaffar adalah kelas dan status sosial seseorang. Gejala perilaku pemilih yang bisa diamati adalah pada kelompok kelas atas. Perilaku memilih akan cenderung untuk memilih orang atau kelompok yang bisa mempertahankan status quo. Sedangkan pada pemilih kelas bawah akan cenderung pada partai oposisi.

Pada konteks kekinian, tulisan Saiful Mujani et al. (2011) mengkritik kedua pendekatan di atas yang cenderung mengedepankan model sosiologis. Mujani dan kawan-kawan, menawarkan suatu pendekatan yang berorientasi ekonomi-politik dan psikologis dalam melihat perubahan politik yang sangat cepat di Indonesia. Model ekonomi-politik bertumpu pada rasionalitas pemilih sebagai dasar berpijak dan model psikologis bertumpu pada identitas partai dan kualitas tokoh personal dalam memahami dinamika perilaku

politik. Model psikologis memperkenalkan tentang konsep budaya demokrasi dan ini melihat pemilih melakukan hak pilih atas dasar ketertarikan politik. Jadi pada konteks ini pemilih ikut melakukan pemilihan karena pemilih ingin berpartisipasi mewujudkan keadaan yang lebih baik. Ini juga bisa dilihat dari informasi politik, ketertarikan politik, identitas partai. Pada skala yang lebih mikro, sejalan dengan penelitian Fatanti (2013) perilaku memilih juga dapat ditentukan melalui tokoh yang diajukan dan bagaimana tokoh tersebut dikemas dalam komunikasi pemasaran politiknya. Maka dengan demikian, faktor-faktor sosiologis tidak bisa langsung mempengaruhi keputusan untuk memilih. Tetapi melalui persepsi dan sikap terhadap partai politik dan elit politiknya hal tersebut dapat dipengaruhi. Maka yang muncul kemudian bukan faktor sosiologis secara obyektif, melainkan faktor sosiologis yang dipersepsikan. Berangkat dari faktor sosiologis yang dipersepsikan tersebut, karakter pemilih telah banyak diuraikan, tetapi elit politik dalam wacana demokrasi politik lokal menjadi sedikit diungkapkan.

Dengan memfokuskan pada budaya lokal, melalui idiom Jawa, maka konteks penelitian diarahkan untuk mengeksplorasi sampai sejauh mana penggunaannya dalam strategi komunikasi politik pada skala meso-politik. Pembahasan mengenai idiom Jawa sebagai pesan politik dalam kajian antropologis, ilmu politik dan komunikasi politik adalah tema yang luas, sehingga perlu suatu pembatasan. Pemilihan skala politik pada level meso dan mikro dipilih untuk membatasi sekaligus melihat penggunaan idiom ini bekerja dalam proses pemilihan. Mengambil suatu penelitian pada level meso yang diwakili pada pemilihan bupati dan level mikro yang ditunjukkan pada pemilihan kepala desa memberikan peluang untuk melihat kajian ini secara lebih mendalam dalam kultur budaya orang Jawa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Pada dasarnya, penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus. Pemilihan metode ini didasari pada tujuan eksploratif permasalahan penelitian bahwa penggunaan idiom Jawa erat hubungannya dengan konteks sosiokultural antara aktor politik dengan pemilihnya.

Penentuan informan menggunakan teknik purposif dengan kategori didasarkan pada pilihan peneliti tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada

saat situasi tertentu dan saat ini terus-menerus sepanjang penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah kontestan pemilihan kepala desa.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang karena menggambarkan fenomena penggunaan idiom Jawa dalam kontestasi politik baik di tingkat mikro (desa) maupun meso (bupati)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi politik elit politik lokal telah mengalami perubahan sejak diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah di Indonesia (Fatanti, 2013; Mochtar, 2011). Ini dapat dilihat pada perubahan peran elit lokal sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dan berkooptasi sebagai kepanjangan tangan masyarakat (Haryanto, 2009). Akibatnya dalam sistem demokrasi Indonesia, posisi elit politik lokal meningkat dan berpengaruh pada cara-cara elit politik lokal berhadapan dengan pemilih mereka secara langsung. Untuk mempertahankan suara mereka dalam suatu sistem pemilihan lokal, tidak jarang para elit lokal harus mampu membangun pijakan baru yang berorientasi kepada para pemilihnya. Pijakan baru tersebut salah satunya adalah kemampuan dan strategi para elit dalam konteks politik elektoral. Pada kebudayaan Jawa, perilaku elit lokal harus berkonsep *manunggal* dengan bawahannya. Melalui konsep *manunggaling kawulo gusti* atau *jumbuhing kawulo gusti* konsep itu dapat diturunkan pada skala epistemologis dalam hubungan patron-klien antara elit dan pemilihnya (Mulders, 2001). Perilaku politik kelompok elit Jawa telah lama dikenal dengan model simbolisme yang lentur. Petuah-petuah pemimpin tidak diuraikan melalui bahasa-bahasa yang lugas, sering berbelit-belit dan bahkan penuh dengan bahasa metafora. Misalnya bisa dilihat pada teks-teks tentang kepemimpinan yang ditulis oleh R. Ng. Ronggowarsito. Idiom Jawa semacam ini memang seringkali menimbulkan pemaknaan yang beragam. Pada kultur Jawa, perilaku politik sangat ditentukan oleh tutur kata atau bahasa yang dipilihnya. Perilaku politik antar elit menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh orang kebanyakan (Anderson, 1990). Perilaku semacam ini sering diistilahkan sebagai perilaku atau tindakan bermedia (Herusatoto, 1984). Perilaku yang demikian terbungkus dengan bahasa Jawa yang terkenal dengan *kembang*, *lambang*, dan *sinarmuning* (tersembunyi) sehingga seringkali ucapan dan tindakan menjadi jauh berbeda. Ungkapan-ungkapan seperti "*Wong Jowo nggone rasa, pada gulangening kalbu, ing sasmita amrih lantip, kuwowo nahan hawa, kinemat maoting driya*" adalah

ungkapan yang bernada sangat dalam. Ungkapan tersebut adalah pedoman yang mengatur dan menjelaskan perilaku orang Jawa dalam keseharian. Tentu saja, dalam praktik kesehariannya para elit mengklaim bahwa ada dua hal secara prinsip yang dipegang yaitu falsafah atau pandangan hidup dan sikap hidup. Falsafah terkait dengan tuntunan hidup dan berperilaku sehari-hari. Pada konteks demikian, tindakan orang Jawa senantiasa dihubungkan dengan Tuhan (seringkali berhubungan dengan unsur mistisnya). Oleh karena itu, simbol-simbol menjadi penting dalam menentukan tindakan orang Jawa. Misalnya untuk menjadi pemimpin, konsep-konsep seperti Hasta Sila (delapan sikap dasar), Asta Brata (delapan macam tindakan) dan Panca Kreti (lima perbuatan) menjadi panutan bagi mereka-mereka yang ingin memilih pemimpin dan sekaligus ingin menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Konsep-konsep tersebut direfleksikan ke dalam sikap hidup orang Jawa melalui simbol-simbol lain misalnya melalui tokoh pewayangan. Pada studinya tentang wayang di Jawa, Anderson (2009) melihat secara lebih luas bahwa karakter seorang pemimpin dalam budaya Jawa sangat terwakili oleh tokoh-tokoh dalam pewayangan. Misalnya karakteristik Yudhistira merupakan simbol sebagai pemimpin yang bijaksana. Maka sifat-sifat yang dimiliki oleh Yudhistira seperti sabar, tenang dan bijaksana merupakan sifat yang dikehendaki oleh orang Jawa. Namun demikian, seorang pemimpin Jawa tidak akan pernah menunjukkan sifat-sifat itu secara langsung. Sifat-sifat tersebut akan dimunculkan ke permukaan oleh masyarakatnya (Mulder, 2001) atau dengan lain ia akan muncul sebagai bentuk karisma pemimpin (Anderson, 1990). Sehingga model komunikasi politik elit lokal di Jawa menjadi penting untuk didalami karena dalam bahasanya ia selalu muncul dalam idiom-idiom dan kode yang beragam.

Tindak-tutur mereka telah dijelaskan di atas sangat terpolarisasi ke dalam domain simbol makna bahasa. Simbolisme berperan sebagai media atau alat perantara untuk menguraikan sesuatu tentang keadaan, kondisi, dan sikap orang Jawa (Herusatoto, 1984, hlm. 96). Simbolisme bahasa dapat diketahui sangat melekat dalam struktur bahasa Jawa. Tingkatan bahasa *ngoko*, *kromo* halus dan *kromo inggil* mencerminkan karakter tindakan sosial individu penggunaannya (Suharno, 1982). Oleh karena struktur bahasa Jawa yang kompleks tersebut, maka membutuhkan perangkat kerja semiotik dan semantik untuk menguraikan kerumitannya. Anderson (1990) menyampaikan kekagumannya atas kerumitan pembendaharaan kata yang dimiliki oleh bahasa Jawa dengan penggunaan kalimat berikut: "*Here was a sophisticated corpus of writing produced*

by and for a few hundreds, or perhaps thousands, of men and women, over centuries in which 90 percent ... illiterate" (Anderson, 1990, hlm. 194). Dengan membandingkan dengan beberapa pembendaharaan kata seperti kamus bahasa Belanda-Indonesia (40.000), Inggris-Indonesia (12.000) dan Kamus bahasa Indonesia Poerwadarminta (27.000 kata), Anderson menyebutkan bahwa bahasa Jawa pada zamannya adalah bahasa dengan tradisi literasi tua. Umurnya jauh lebih tua dari bahasa Rusia, dan bahkan mungkin sama tuannya dengan tradisi literatur dalam bahasa Prancis dan Inggris. Penggunaan idiom oleh orang Jawa adalah salah satu bentuk komunikasi simbolis dan verbal yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada tindakan ritus ritual, seni, dan tradisi pun penggunaan idiom masih seringkali dapat ditemui (Herusatoto, 1984). Lalu bagaimana halnya dengan tindakan politik mereka khususnya pada kegiatan kampanye pada momentum pemilihan bupati atau kepala desa? Masyarakat Pandansari menunjukkan penggunaan idiom sebagai materi dan media kampanye. Idiom merupakan istilah khas yang memiliki nilai estetika dan kultural dalam suatu bahasa. Idiom Jawa merujuk pada istilah khusus dalam bahasa Jawa yang bermakna simbolis. Pada bahasa Jawa yang sangat rumit, idiom ini bentuknya beragam dan dapat ditemukan pada pengucapan sehari-hari atau rahasia. Khusus pada idiom Jawa dalam konteks politik sebenarnya banyak ditemukan dalam cerita, wejangan, cerita panji, pewayangan dan bahkan karya - karya sastra klasik Jawa (Anderson, 1990). Idiom Jawa dapat berupa kata atau bahkan gabungan kata yang membentuk suatu ungkapan khusus. Beberapa idiom Jawa telah lama populer sebelumnya baik melalui cerita atau karya agung pujangga. Merujuk pada konsepsi strategi komunikasi politik, idiom Jawa dapat dianggap sebagai salah satu bentuk cara orang Jawa dalam menyampaikan pesannya kepada orang tertentu. Penggunaan idiom dalam bahasa Jawa mencerminkan suatu kerahasiaan yang hanya dapat ditangkap oleh pengguna bahasa tersebut. Bentuk komunikasi semacam ini seringkali disebut dengan komunikasi berkode yaitu suatu model komunikasi yang membutuhkan pemahaman dan pengetahuan khusus antar penggunanya.

Peranan kepala daerah sangat strategis maka tingkat persaingan juga semakin tinggi yang membuat para aktor politik mudah sekali terjebak dalam pragmatisme politik (orientasi jangka pendek dari para aktor politik untuk dapat memenangkan persaingan politik). Dalam hal ini, Gatara (2009: 265) menjelaskan bahwa aktor politik adalah bagian kunci yang berkuasa dalam dimensi kehidupan politik. Lebih lanjut, aktor menurutnya, merupakan suatu istilah yang

menunjukkan orang-orang yang memainkan kekuasaannya dalam arena politik. Berkenaan dengan itu, Andrain (1992: 14) dalam Gatara (2009: 265) juga mengatakan di samping keyakinan dan struktur dimensi kehidupan politik utama lainnya yang terdiri dari individu-individu, ada kalanya digambarkan sebagai "aktor yang berkuasa", suatu istilah yang menunjukkan bahwa orang-orang ini memainkan peranan dalam dunia politik. Kegiatan politik merupakan penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain.

SIMPULAN

Realitas politik elektoral adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik yang pada konteks masyarakat Jawa terkait dengan simbol kebahasaan. Oleh sebab realitas politik bersifat temporer atau situasional. Perilaku politik menampilkan karakter sebagai identitas. Pada karakteristik tertentu, penggunaan idiom Jawa dapat dianggap sebagai citra penggunaannya. Penggunaan idiom juga penting diperhatikan karena ia selalu memilih diksi yang tepat tentang prinsip yang dikemasnya dalam politik elektoral. Nilai-nilai lokal tentang dalam idiom Jawa tidak hanya merefleksikan dunia orang Jawa, tetapi juga sekaligus membentuk dunia politik dan bagaimana politik tersebut diartikulasikan oleh orang Jawa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas pendanaan Penelitian Hibah Internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Tahun Anggaran 2016 atas dukungan finansialnya pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. (1990). *Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Anderson, B. (2009). *Mythology and the Tolerance of the Javanese*. Singapore: Equinox Publishing (Asia).
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1992). *Introduction to Qualitative Research Methods; A Phenomenological Approach to the Sciences*. New York: John Wiley & Sons, Ltd.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatanti, M. N. (2013). *Popularitas dan Orientasi Politik: Negasi Personal Brand dan Popularitas dengan Elektabilitas dalam Komunikasi Pemasaran*

- Politik Heri Pudji Utami Pada Pilkada Kota Malang Tahun 2013. Universitas Brawijaya.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, A. (1992). *Javanese Voters: A Case Study of Election under Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, C. (1989). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Guba, E. ., & Lincoln, Y. S. (1994). *Competing Paradigms in Qualitative Research*. In
- Hamid, A. (2006). *Jawara dan Penguasa Politik Lokal di Banten*. In Okamoto & A.
- Rozaki (Eds.), *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*. Yogyakarta: IRE Press.
- Haryanto. (2009). *Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 13(November), 131–148.
- Herusatoto, B. (1984). *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.
- Hidayat, D. N. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ibrahim, G. A. (2005). *Idiom Kegamangan dalam Bahasa Politik Kita*. In *Seminar Nasional PESAT 2005* (pp. 48–54). Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Kartomihardjo, S. (1979). *Ethnography of Communication Codes in East Java*. *Pacific Linguistics*, D(39), 1–39.
- Marsh, D., & Stoker, G. (2011). *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Miles, M. B., & Huberman, A. . (1992). *Analisi Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mochtar, H. (2011). *Demokrasi dan Politik Lokal di Kota Santri*. Malang: UB Press. Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.
- Mujani, S., Liddle, W., & Ambardhi, K. (2011). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Mulder, N. (2001). *Ideologi Kepemimpinan Jawa*. In H. Antlov & S. Cederroth (Eds.), *Kepemimpinan Jawa, Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter* (pp. 79– 99). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pawito. (2009). *Komunikasi Politik, Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rozaki, A. (2004). *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*. Yogyakarta: Pustaka Mawar. Ruslan, A. (2005). *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Press. Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Nilai Budaya *Mapalus* Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Minahasa Selatan

Dr. Very Y. Londa, S.Sos. M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi
e-mail: v312yjlo@yahoo.com

Abstrak - Pada hakekatnya penyelenggaraan pelayanan di daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan. Akan tetapi hal ini masih merupakan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan di kabupaten Minahasa Selatan yang terlihat dari berbagai fenomena yang mengemuka dan dikeluhkan oleh masyarakat baik dalam pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan sampai dengan pemberdayaan. *Mapalus* merupakan nilai kerja suprastruktur sosial dan budaya orang Minahasa dan membentuk sebuah hubungan sosial antar sesama orang Minahasa. Penelitian ini berupaya mendasarkan pemahaman pada nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan yang didasarkan pada dimensi nilai kekeluargaan, nilai rasa sepenanggungan yang tinggi, nilai kebersamaan, nilai musyawarah dan mufakat, nilai kepemimpinan, nilai keterbukaan, nilai disiplin yang kuat dan nilai religius dalam kaitannya dengan *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy*. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Dengan maksud bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan dapat mengungkap, menguraikan serta memahami fenomena yang terjadi pada latar dan obyek penelitian. Peneliti memandang perlunya suatu metode epistemologis yang mampu melahirkan teori dari kombinasi antara perspektif yang diteliti dan dari perspektif peneliti sendiri, lebih melalui pendekatan emik, seperti halnya paradigma penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Mapalus* merupakan sistem nilai yang menyatu dalam penyelenggaraan pelayanan public melalui responsibilitas, disiplin, partisipatif, solidaritas dan keadilan sosial. Sebab *Mapalus* merupakan hakikat dasar dan aktivitas kehidupan orang Minahasa yang terpenggil dengan ketulusan hati nurani yang mendasar dan mendalam (*touching hearts*) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menjadikan manusia dan kelompoknya (*teaching mind*) untuk saling menghidupkan dan menyejahterakan setiap orang dan kelompok dalam komunitasnya (*transforming life*). Sehingga nilai budaya *Mapalus* dapat dijadikan media untuk perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan pada cara kerja, metode pelayanan dan teknik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Nilai, Budaya, *Mapalus*, Pelayanan, Publik

PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan publik menjadi kunci penentu kepercayaan masyarakat dan menjadi indikator utama penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat urgensi keberadaan dan tugas pokok serta fungsi pemerintah yang adalah melindungi dan menyejahterakan masyarakat maka menjadi penting mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari peran aparat dalam mengemban misi sebagai pelayan masyarakat.

Aparat dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan dapat membangun citra pelayanan publik yang berkualitas, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pelayanan publik belum dapat berjalan dengan baik terbukti dengan begitu banyaknya permasalahan yang mengemuka di lapisan masyarakat tentang pelayanan yang diterima dari pemerintah dan selalu memperlakukan aparatnya karena tidak tersedianya aparat pelayanan yang profesional, berdedikasi, akuntabel dan responsif serta loyal terhadap tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

Dorongan untuk melaksanakan tugas didasari oleh motivasi yang ada dalam diri setiap aparat akan mempengaruhi perilaku aparat itu sendiri. Keterampilan dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas serta kesediaan aparat untuk melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab merupakan faktor yang mendukung terciptanya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparat baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan maupun administrasi yang terlihat dari sikap kerja, tingkat keterampilan yang dimiliki maupun hubungan kerja yang terbina dalam organisasi.

Operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang terhadap situasi dan kondisi lingkungan dimana dia berada yang terlihat dari persepsi, sikap, nilai dan motivasi sebagai cerminan dari kemampuan, keterampilan, pengetahuan, keinginan dan kebutuhan yang dimiliki. Persepsi, sikap, nilai dan motivasi yang dimiliki akan mempengaruhi aparat bertindak termasuk di dalam menjalankan pekerjaannya. Aparat yang mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya bukan

saja memiliki tingkat pendidikan yang tinggi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bagus jelas. Demikian pula halnya dengan persepsi yang dimiliki akan secara langsung mempengaruhi pola kerja yang berdampak pada pelayanan yang di berikan kepada masyarakat.

Kabupaten Minahasa Selatan berada pada bagian tengah propinsi Sulawesi Utara dan di sebelah selatan Kabupaten Minahasa dengan luas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan adalah 1.429.7 KM² yang didiami oleh 195.553 jiwa dengan kepadatan 136,78 jiwa/km² berdasarkan data BPS Tahun 2010. Kabupaten Minahasa terbagi dalam 17 kecamatan dengan 170 Desa dan 10 Kelurahan. Merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Minahasa.

Berbagai fenomena permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik baik dalam bidang administrasi kependudukan (hasil penelitian dari Daud Liando, 2011), penyelenggaraan efektivitas pemerintahan desa (hasil penelitian dari Very Londa, 2012), pelayanan kesehatan, masalah pertambangan : pasir besi (Pakuure), Galian C (Rumoong Bawah), Tambang Emas (Motoling), tata ruang Kota Amurang serta permasalahan lainnya yang mengemuka sebagaimana amatan peneliti. Kondisi ini menunjukkan kualitas pelayanan setelah Kabupaten Minahasa Selatan menjadi daerah otonom yang telah 10 tahun belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat serta sebagaimana yang diamanatkan undang – undang. Fenomena lainnya yang terlihat dimana adanya ketidak harmonisan penyelenggara pemerintahan dalam hal ini hubungan kerja yang tidak sejalan lagi. Situasi ini semakin membuat pelayanan di Kabupaten Minahasa Selatan semakin terpuruk. Hal ini dibuktikan dengan penilaian kinerja dan pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai Disclaimer.

Dengan memerhatikan kondisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan setidaknya permasalahan – permasalahan sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya tidaklah perlu terjadi. Masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan sangat kental dengan yang namanya budaya *Mapalus*. *Mapalus* merupakan nilai kerja yang merupakan suprastruktur sosial dan budaya yang ada dan hidup dalam sistem budaya orang Minahasa. Sistem kerja *Mapalus* kemudian menjadi struktur yang membentuk sebuah hubungan sosial antar sesama tou Minahasa. Dari ciri, struktur dan sifatnya, *Mapalus* pada akhirnya dapat kita katakan sebagai sebuah sistem nilai yang menyatu dalam keterikatan (interelation) masing-masing nilai, yakni antara resiprokal, responsibilitas, disiplin, kesetaraan, partisipatif, solidaritas, keadilan sosial, pluralisme, dan kasih.

Konsep nilai budaya *Mapalus* melalui dimensi nilai kekeluargaan, nilai rasa sepenanggungan yang tinggi, nilai kebersamaan, nilai musyawarah dan mufakat, nilai kepemimpinan, nilai keterbukaan, nilai Disiplin yang kuat dan nilai religius. Nilai budaya *Mapalus* ini jika dipahami dengan benar dan menjadi sebagai sebuah gaya hidup masyarakat dan pemerintah menjadi sangat penting dalam mewarnai penyelenggaraan pelayanan public melalui dimensi *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy* yang membentuk kualitas pelayanan publik.

Didasarkan pada yang dikemukakan di atas, membawa ketertarikan bagi peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan. Bagi penulis permasalahan ini sangat penting mengingat bahwa awal dari semua proses pelayanan publik sebenarnya terletak pada nilai yang dimiliki oleh aparat selaku penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan yang dapat dilihat dalam pola perilaku yang terjadi. Atas pemikiran tersebut peneliti berkeyakinan bahwa kajian ini akan menjadi sangat penting dan strategis karena benar – benar akan bermanfaat dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan. Sebab apabila pembenahan tidak dilakukan oleh pemerintah yang diawali dari pemberian pelayanan, penafsiran secara baik dan benar segala hal yang berhubungan dengan program kerja serta penerapan atau pelaksanaan pelayanan akan mempengaruhi proses dan kerja pemerintah serta akan merusak citra pemerintah daerah itu sendiri di mata masyarakat sebagai pemberi kedaulatan.

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, penulis beranggapan bahwa nilai budaya *Mapalus* belum sepenuhnya menjadi bagian dari aparat di Kabupaten Minahasa Selatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang memberikan dampak yang kurang dalam pelayanan publik. Kondisi ini menjadi pernyataan masalah (*problem statement*) guna mengungkapkan penyebab nilai budaya *Mapalus* tidak diterapkan sebagai pola pelayanan pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan serta bagaimana model nilai budaya *Mapalus* yang dapat dijadikan pola penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan.

Tulisan ini mendiskripsikan dan mengeksplorasi dimensi yang membentuk nilai budaya *Mapalus* yang dimiliki masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan untuk dijadikan sebagai model dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap dimensi-dimensi dari nilai budaya *Mapalus* yang dimodifikasi dengan dimensi yang membentuk konsep kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan untuk

memperkuat konsep pelayanan publik dalam lingkup kajian ilmu administrasi publik dengan cara memodifikasi dimensi nilai budaya *Mapalus* dengan dimensi kualitas pelayanan publik.

Penulis beranggapan bahwa urgensi penelitian terkait tentang nilai budaya *Mapalus* (sebagai sebuah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Minahasa) untuk dikembangkan menjadi sebuah model dalam memperkuat pelayanan publik sehingga dicapainya kualitas yang diharapkan dalam melayani masyarakat. Upaya mengembangkan sebuah kearifan lokal dianggap menjadi sebuah konsep yang sangat menarik mengingat perkembangan ilmu yang berkembang selama ini lebih banyak mengadopsi konsep teori barat yang sangat bertolak belakang dengan kondisi lokal. Sehingga ketika sebuah konsep teoritis diaplikasikan banyak mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan maksud bahwa dalam penelitian ini dapat mengungkap, menguraikan serta memahami fenomena yang terjadi pada latar dan obyek penelitian sehubungan dengan nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan. Pertimbangan digunakannya metode penelitian kualitatif (Bungin, 2009) adalah untuk menemukan (*uncover*) dan memahami (*understand*) apa yang ada di balik fenomena yang akan diteliti, yakni mengapa nilai budaya *Mapalus* tidak diterapkan sebagai pola pelayanan pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan, dan bagaimana model nilai budaya *Mapalus* yang dapat dijadikan pola penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan. Pemilihan pendekatan kualitatif untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan dengan menekan kepada interpretasi bukan pada generalisasi dan lebih ditekankan dalam mengungkapkan *meaning* dan memahami fenomena nilai budaya *Mapalus* belum sepenuhnya menjadi bagian dari aparat di Kabupaten Minahasa Selatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang memberikan dampak yang kurang dalam pelayanan publik.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data utama hasil penelitian dan sumber data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah seluruh kegiatan dilapangan berupa pernyataan dan tindakan dari informan yang diteliti. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah data dari semua pihak dimana diharapkan data yang akurat, lengkap dan mendalam dari para informan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan. Peneliti memilih informan dengan mempertimbangkan kemampuan memberikan data

yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut maka informan yang diwawancarai terdiri dari unsur kepala dinas, unsur kepala bidang, unsur staf di loket pelayanan, unsur camat, unsur lurah dan unsur hukum tua.

Sementara Data sekunder meliputi dokumen tertulis yang sejak awal menjadi bahan dalam penelitian empiris di lapangan menyangkut data yang berhubungan dengan dokumen – dokumen yang ada kaitannya dengan nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan seperti surat keputusan, tugas pokok dan fungsi, bagan alur kerja, prosedur pelayanan, laporan kerja dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan nilai budaya *Mapalus* dan pelayanan publik serta artikel, buku maupun karya ilmiah lainnya yang dijadikan rujukan teoritik.

Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen dalam penelitian dengan menggunakan (Bungin, 2009) : (1) pedoman wawancara terbuka (peneliti bertatap muka langsung dengan informan). Teknik pengumpulan data ini yang digunakan melalui komunikasi langsung dengan informan yang dianggap mengetahui dan menguasai serta memahami informasi yang berkaitan dengan nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan. (2) observasi lokasi penelitian dengan cara mengamati secara langsung proses yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan yang antara lain pada pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, pelayanan perizinan dan pelayanan umum lainnya; (3) penggunaan dokumen yang berhubungan langsung dengan nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan berupa laporan kerja, SOP, tugas yang terkait baik yang bersifat kajian teoritik maupun dokumen yang ada pada objek penelitian.

Proses analisis data dilakukan sejak memasuki lapangan penelitian yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan peneliti, memasuki lokasi dan obyek penelitian pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui tugas, fungsi dan hak yang melekat didalamnya. Melakukan pengamatan secara mendalam tentang masalah penelitian dikaitkan dengan fenomena yang ada. Melakukan wawancara mendalam dengan informan tentang nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan. Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap berikut :

1. Kategorisasi dan mereduksi data yang berhubungan dengan nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten

Minahasa Selatan yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan studi dokumen.

2. Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga data berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Melakukan interpretasi pada data yang telah dikelompokkan berdasarkan hasil kategorisasi dan reduksi sehingga mendapatkan makna yang sebenarnya sebagai ungkapan nyata atas masalah yang sebenarnya terjadi dalam nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian yaitu menyangkut nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat.

Pada tahap kesahihan data, peneliti melakukan pengecekan temuan penelitian yang disesuaikan dengan situasi yang terjadi dalam pelayanan di lokasi penelitian sehubungan dengan nilai budaya *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan. Peneliti memeriksa seluruh data yang mendukung, menangkap atau menggambarkan temuan. Pada tahap ini, peneliti bersikap konsisten terhadap data penelitian, memilih topik-topik penting yang menonjol, menganalisis dan membuat interpretasi data. Hasil interpretasi data kemudian dibuat dalam bentuk deskripsi, yang selanjutnya di diskusikan kepada subjek penelitian. Peneliti menggunakan triangulasi (Bungin, 2009) dengan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber data yang digunakan, data primer maupun data sekunder, metode yang ada dalam hal tahapan tahapan yang dilakukan, penyidik selaku pihak yang melakukan penelitian baik dalam hal pengetahuan maupun kemampuan menganalisis dan menginterpretasi dan teori yang digunakan baik melalui diskusi dengan teman sejawat maupun melalui focus group diskusi berkaitan dengan masalah yang diteliti yang memudahkan peneliti baik dalam proses analisis, interpretasi dan pengambilan kesimpulan. Peneliti membandingkan data pengamatan dengan data wawancara dan dokumen. Peneliti juga memeriksa kembali penemuan hasil penelitian dari teknik pengumpulan data dan sumber data. Sehingga peneliti dapat menemukan perbedaan dan kesamaan serta alasan-alasannya. Pemanfaatan temuan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dimanfaatkan untuk pengecekan kembali data penelitian dan mengarahkan analisis data. Seluruh data penelitian yang dianggap penting akan dijelaskan dengan menggunakan teori-

teori yang relevan yang mengurai tentang nilai budaya *Mapalus* dan pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota kabupaten yaitu Amurang. Jarak dari Amurang Minahasa Selatan ke Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Kota Manado \pm 64 km. Secara geografis kabupaten minahasa selatan terletak antara $0^{\circ},47 - 1^{\circ},24$ lintang utara dan $124^{\circ},18 - 124^{\circ},45$ bujur timur. Sedangkan secara administratif terletak disebelah selatan Kabupaten Minahasa dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Minahasa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Luas wilayah adalah 1.489.8 km yang terdiri dari 17 kecamatan dan 176 desa, 10 kelurahan dengan jumlah penduduk 207.074 jiwa.

Penduduk Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 207.074 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan 102.300 jiwa dan jumlah penduduk laki – laki 104.774 jiwa. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya yaitu kecamatan Sinonsayang dan yang paling sedikit adalah kecamatan Motoling. Untuk komposisi penduduk kabupaten Minahasa Selatan tahun 2012 menurut golongan umur, menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Minahasa Selatan berusia muda (0 -14 tahun) laki-laki sebanyak 27.396 jiwa dan perempuan 27.621 jiwa. Dan yang berusia produktif (15 – 64 tahun) laki-laki sebanyak 62.232 jiwa, perempuan 59.556 jiwa dan yang berusia lanjut (\geq 65 tahun) laki-laki sebanyak 11.275 jiwa, perempuan 11.283 jiwa.

Kondisi perekonomian masyarakat Minahasa Selatan merupakan salah satu aspek yang mendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat kabupaten Minahasa Selatan mengalami peningkatan di bidang pertanian dan nelayan juga tersedianya pasar di hampir semua kecamatan, berdirinya koperasi, usaha mikro, usaha menengah dan usaha-usaha perekonomian lain. Salah satu pendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesehatan adalah sektor pendidikan yang merupakan prioritas penting di Minahasa Selatan. Berbagai program dilakukan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan untuk menjangkau seluruh pelosok desa agar memperoleh pendidikan meskipun banyak permasalahan yang dihadapi, antara lain permasalahan sarana dan prasarana, akses, sumber daya manusia, serta pemerataan pelayanan pendidikan juga mutu pendidikan. Namun demikian, pemerintah Minahasa Selatan terus menerus mengadakan perbaikan manajemen serta mengatasi masalah-masalah lainnya.

Saat ini sarana pendidikan di Minahasa Selatan cukup memadai, dapat dilihat dari setiap kecamatan yang terdapat lembaga pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan data jumlah siswa SMA dan SMK maka sangat diperlukan adanya perguruan tinggi yang representatif sesuai dengan keadaan Kabupaten Minahasa Selatan untuk menampung para siswa lulusan SMA dan SMK Minahasa selatan yang kebanyakan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di kota Manado, Tondano dan Airmadidi di Minahasa Utara, dengan konsekuensi biaya yang lebih tinggi dibandingkan jika melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di daerah sendiri kabupaten Minahasa Selatan.

Budaya Minahasa Selatan berasal dari budaya Minahasa yang terkenal dengan sebutan *Mapalus* yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Umumnya penduduk yang tinggal di wilayah kabupaten Minahasa Selatan berasal dari sub etnis Tountemban dengan menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Tountemboan. Budaya lainnya juga diselenggarakan oleh masyarakat Minahasa Selatan di setiap pertengahan tahun (bulan juli), masyarakat Minahasa Selatan menggelar acara yang disebut Pengucapan Syukur dimana masyarakat Minahasa Selatan bersyukur atas berkat Tuhan lewat hasil pertanian (panen raya). Masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan umumnya memeluk agama Kristen Protestan, namun ada juga agama lainnya yaitu Kristen Katolik dan Islam. Dalam perkembangannya, sejak Minahasa Selatan menjadi daerah otonom yang baru, bermunculan kreaitivitas masyarakat lewat tari – tarian antara lain tari pisok, tari dodol, tari kentang, tari elasoma, tari batifar, tari lenso, tari pete cingkeh dan tari mawolay.

Dalam hal menjalankan pelayanan publik, keberadaan sumber daya manusia yang handal sangat diperlukan, baik dari jumlah, jenis kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menempatkan pegawai untuk menjalankan fungsi pelayanan sebagai mana data yang ada bahwa pada Dinas Kesehatan terdapat 368 orang pegawai, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebanyak 3525 orang pegawai dan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sebanyak 18 orang pegawai.

Data diatas menunjukkan bahwa dinas pendidikan dan dinas kesehatan menyerap sumber daya manusia yang sangat banyak. Hal ini dikarenakan kedua SKPD ini banyak berkecimpung dalam pelayanan kepada masyarakat secara langsung, baik dalam pelayanan kesehatan maupun dalam pendidikan anak sekolah. Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga mendukung dalam tercapainya pelayanan publik selain itu juga didukung oleh sumber anggaran. Dinas Kesehatan yang didukung dengan 17 Puskesmas, 62 Pustu, 12 Pusling dan 185 Posyandun didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD Rp. 35,912,238,325. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan 158 PAUD/TJ, 240 SD, 82 SMP dan 29 SMA/K mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Rp. 249.830.705.961. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Rp. 3,595,748,676. (Bappeda Kab. Minahasa Selatan, 2014).

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Sementara itu makna kata *Mapalus* merupakan suatu sistem atau teknik kerja sama untuk kepentingan bersama dalam budaya Suku Minahasa (Turang, 1984). Secara fundamental, *Mapalus* adalah suatu bentuk gotong royong tradisional yang memiliki perbedaan dengan bentuk-bentuk gotong royong modern, misalnya: *perkumpulan atau asosiasi usaha*. Secara filosofis, *Mapalus* mengandung makna dan arti yang sangat mendasar. *Mapalus* sebagai *local spirit and local wisdom* Masyarakat Minahasa yang terpatri dan berkohehi di dalamnya: 3 (tiga) jenis hakikat dasar pribadi manusia dalam kelompoknya, yaitu: *Touching Hearts*, *Teaching Mind*, dan *Transforming Life*. *Mapalus* adalah hakikat dasar dan aktivitas kehidupan orang Minahasa (Manado) yang terpanggil dengan ketulusan hati nurani yang mendasar dan mendalam (*touching hearts*) dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menjadikan manusia dan kelompoknya (*teaching mind*) untuk saling menghidupkan dan menyejahterakan setiap orang dan kelompok dalam komunitasnya (*transforming life*). Menurut buku, *The Mapalus Way*, *Mapalus* sebagai sebuah sistem kerja yang memiliki nilai-nilai etos seperti, etos resiprokal, etos partisipatif, solidaritas, responsibilitas, gotong royong, *good leadership*, disiplin, transparansi, kesetaraan, dan trust (Umbas, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Mapalus>).

Berbagai tulisan dari orang Minahasa yang dapat dijumpai maupun melalui website Kerukunan Keluarga Kawanua banyak memberikan penjelasan mengenai *Mapalus*. *Mapalus* adalah satu bentuk solidaritas masyarakat agraris Minahasa yang berkembang sebagai

pola perilaku tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Pola perilaku masyarakat Minahasa waktu yang lalu ini didasarkan pada keterikatan satu sama lain berdasarkan relasi social yang disebut ikatan primordial yaitu antara lain ikatan keluarga, ikatan kesatuan/kedekatan geografis serta ikatan kesamaan kepercayaan. Di jaman orde lama dan orde baru ikatan dan perilaku ini digolongkan sebagai bentuk "gotong royong" yang merupakan latar belakang aktifitas tolong menolong dan bantu membantu antara warga seikatan (se-marga, se-desa, se-pekerjaan, se-kebutuhan, se-golongan bahkan se-kepercayaan) yang nyata dilaksanakan dalam aktivitas seperti: kematian dengan rangkaian upacara perkabungannya, perkawinan, baptisan, dan perayaan lainnya, serta dalam mengerjakan atau menyelesaikan berbagai bentuk pekerjaan seperti dalam bidang pertanian, membangun rumah dan fasilitas lainnya dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (perorangan dan keluarga) atau kebutuhan bersama. Dalam kegiatan ini nilai budaya yang menonjol atau yang menjadi landasan utama adalah adanya Bantu membantu, saling menolong berdasarkan prinsip "timbal balik". Suatu bantuan yang diberikan selalu harus diberikan balasan pada orang lain yang telah membantu itu pada saat ia/mereka membutuhkan.

Dari berbagai literatur serta informasi lisan yang dihimpun penulis, dapat disimpulkan bahwa *Mapalus* adalah; "sebuah sistem sosial yang menghimpun dan melibatkan masyarakat untuk saling menolong secara aktif dalam mencapai tujuan bersama di berbagai bidang." Dari ciri, struktur dan sifatnya, *Mapalus* pada akhirnya dapat kita katakan sebagai sebuah sistem nilai yang menyatu dalam keterikatan (interelation) masing-masing nilai, yakni antara resiprokal, responsibilitas, disiplin, kesetaraan, partisipatif, solidaritas, keadilan sosial, pluralisme, dan kasih. *Mapalus* adalah simbol dari kehadiran (*existence*) komunitas Minahasa yang dalam implementasi sosialnya memasuki bidang-bidang sebagai sebuah relasi kerja, baik di bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. Mengingat itu Minahasa lebih dulu akrab dengan sistem kerja di bidang pertanian. *Mapalus* memiliki fungsi aktif untuk menghimpun dan melibatkan peran masyarakat untuk saling menolong secara aktif.

Makna nilai *Mapalus* ini yang dalam upaya perbaikan pelayanan public diupayakan dapat dielaborasi sehingga mampu memperbaiki kinerja penyelenggaraan pelayanan oleh aparat kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagaimana dalam Undang – Undan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan public merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan

administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public. Dalam perkembangan konsep tentang pelayanan publik oleh Rusli (2013:168) mengungkapkan bahwa unsur pokok pelayanan public yaitu pemerintah (*servant*), masyarakat (*customer*), hubungan antar *servant* dan *customer* (*relations*) dan lingkungan (*environment*). Pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membentuk suatu hubungan (*relations*) inilah tercipta suatu nilai yang dirasakan baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Nilai (*value*) merupakan sesuatu yang penting dalam upaya mengembangkan sikap kerja yang baik. Nilai tersebut terdapat pada karakter manusia maupun perilaku masyarakat. *Values are the enduring beliefs and expectations held to be important guides to behavior by a person or group of people* (Cook, 2001: 125), nilai adalah kepercayaan dan harapan yang menjadi pegangan penting bagi seseorang atau sekelompok orang untuk berperilaku. Nilai pribadi seseorang, ia pelajari dari pengalaman-pengalaman sepanjang hidupnya. Proses pembelajaran sepanjang hidup terjadi melalui pola interaksi yang ada dalam masyarakat Minahasa yang disebut dengan *Mapalus*. Robbins dan Judge (2009:214) : membagi nilai menjadi dua yaitu Nilai instrumental (*instrumental value*) yaitu nilai – nilai yang dianut dalam berperilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan nilai terminal (*terminal value*) adalah nilai – nilai dari suatu tujuan yang dianggap baik dan ingin dicapai.

Nilai menunjukkan konsistensi tingkah laku setiap individu. Danandjaja, (1986:12) bahwa nilai adalah suatu keyakinan abadi bahwa suatu cara bertindak yang khas, atau tujuan eksistensi secara pribadi atau sosial yang lebih diinginkan dibanding cara bertindak atau tujuan hidup yang bertentangan atau berlainan". Karena itu, tingkahlaku manusia menganut sistem nilai tertentu sebagaimana dikemukakan Siagian (2004:109) yaitu "berupa pola kelakuan atau alasan keberadaan seseorang, sistem nilai yang dimiliki seseorang akan dikaitkan dengan norma-norma yang menyangkut hal-hal tertentu seperti yang "baik", "buruk", "benar" atau "salah". Islamy dalam Londa (2012) juga mengatakan sistem nilai adalah "kaitan dan kebulatan nilai-nilai, norma-norma dan tujuan-tujuan yang mapan yang terdapat dalam masyarakat".

Baik pemerintah maupun masyarakat sama – sama mengharapkan terjadinya pelayanan public yang prima. Sehingga untuk melaksanakan pelayanan yang baik maka diperlukannya sejumlah indicator yang membentuknya sebagaimana pendapat Fitzsimmons and Fitzsimmons dalam Rusli (2013:179) yaitu tangibles (penyediaan sumber daya yang memadai), empathy (tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen), responsiveness (keinginan

melayani dengan cepat) reliability (memberikan pelayanan secara tepat dan cepat) dan assurance (tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan).

Pelayanan yang baik yang diharapkan dapat diberikan oleh pemerintah sebagaimana indikator yang membentuknya dapat diperkuat dengan memahami dan mengejawantahkan makna nilai budaya *Mapalus* melalui “nilai kekeluargaan” yang mengatur bahwa semua anggota dalam kelompok dianggap sebagai hubungan keluarga sehingga dalam memberikan pelayanan tidak ada pilih kasih, nilai “rasa sepenanggungan yang tinggi” dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat, “nilai kebersamaan” untuk bersama saling membantu, “nilai kepemimpinan” dalam tanggungjawab kerja untuk melayani, “nilai Keterbukaan” yang menjamin tidak adanya korupsi dalam melayani masyarakat, “nilai disiplin” yang kuat dalam menjalankan tugas dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan, “nilai religious” dengan selalu menganggap bahwa pelayanan yang diberikan sebagai bagian dari ibadah.

Dalam masyarakat Minahasa Selatan status sosial bukanlah sesuatu yang harus di ‘hormati atau dijunjung tinggi’. Artinya cara orang Minahasa Selatan menganggap status seseorang tinggi apabila orang tersebut mampu beradaptasi secara langsung dengan semua lapisan masyarakat dan memiliki ‘jiwa sosial’. Dan mereka mengimplementasikan rasa hormat sebagai contoh memilih/menjadikan orang yang di anggap ini menjadi tokoh masyarakat, aparat desa atau ketua organisasi agama, partai politik, organisasi sosial dan sebagainya.

Nilai yang dapat dipelajari dari masyarakat Minahasa pada umumnya dan masyarakat Minahasa Selatan khususnya dalam nilai “*Mapalus*” dan semboyan “*si tou timou tu mou tou*”. Bagi masyarakat Minahasa, keterpanggilan, tanggung jawab dan komitmen dalam melaksanakan tugasnya, ternyata mengandung makna nilai budaya masyarakat Minahasa yaitu *Si Tou Timou Tumou Tou* (ST4) yaitu manusia hidup untuk memanusiaikan orang lain. Makna tersebut kemudian memberi arti bahwa setiap orang yang telah menjadi manusia (berhasil), berkewajiban memanusiaikan orang lain. Masyarakat Minahasa memandang bahwa setiap manusia (*Si Tou*) yang lahir dan telah menjadi manusia (*Timou*) berkewajiban memanusiaikan manusia lain (*Tou*).

Mapalus adalah satu bentuk solidaritas masyarakat agraris Minahasa yang berkembang sebagai pola perilaku tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Pola perilaku masyarakat Minahasa waktu yang lalu ini didasarkan pada keterikatan satu sama lain berdasarkan

relasi social yang disebut ikatan primordial yaitu antara lain ikatan keluarga, ikatan kesatuan/kedekatan geografis serta ikatan kesamaan kepercayaan. Dijaman orde lama dan orde baru ikatan dan perilaku ini digolongkan sebagai bentuk “gotong royong” yang merupakan latar belakang aktifitas tolong menolong dan bantu membantu antara warga seikatan (se-marga, se-desa, se-pekerjaan, se-kebutuhan, se-golongan bahkan se-kepercayaan) yang nyata dilaksanakan dalam aktivitas seperti: kematian dengan rangkaian upacara perkabungannya, perkawinan, baptisan, dan perayaan lainnya, serta dalam mengerjakan atau menyelesaikan berbagai bentuk pekerjaan seperti dalam bidang pertanian, membangun rumah dan fasilitas lainya dalam memenuhi kebutuhan masing-masing (perorangan dan keluarga) atau kebutuhan bersama.

Dalam kegiatan ini nilai budaya yang menonjol atau yang menjadi landasan utama adalah adanya bantu membantu, saling menolong. Mengingat semakin banyak dan berkembangnya masyarakat dan semakin kompleksnya kebutuhan dan beragamnya kegiatan dan upaya memenuhi kebutuhan maka upaya saling bantu dan saling tolong ini berkelompok dalam berbagai kelompok berdasarkan kebutuhan. Kelompok-kelompok ini dalam kegiatannya selalu mengutamakan nilai saling bantu secara timbal balik dalam *Mapalus*.

Dalam penyelenggaraan pelayanan public dewasa ini sangat diharapkan adanya pelayanan yang berkualitas dengan mendakikan masyarakat sebagai yang utama untuk dilayani. Hadirnya era reformasi diharapkan mampu menghadirkan dan melahirkan program – program pemerintah yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sampai dengan pelayanan ketenagakerjaan dan pelayanan administrasi kependudukan maupun pelayanan perizinan. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya menjadikan pemerintah daerah termasuk yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan dapat memahami dengan benar persoalan dan budaya masyarakat dengan memperkecil konstalasi politik guna memberikan ruang dan akses kepada masyarakat untuk juga menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan dengan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan pelayanan pemerintahan.

Dari ciri, struktur dan sifatnya, *Mapalus* pada akhirnya dapat kita katakan sebagai sebuah sistem nilai yang menyatu dalam keterikatan (*interelation*) masing-masing nilai, yakni antara resiprokal, responsibilitas, disiplin, kesetaraan, partisipatif, solidaritas, keadilan sosial, pluralisme, dan kasih. Semua variabel itu menyatu dalam sebuah konsensus besar *tou* Minahasa yakni *Mapalus*. Karena itu, prinsip *Si Tou Timou*

Tumou Tou, yang dipegang dan diyakini sebagai gagasan kultural Bangsa Minahasa adalah manifestasi nilai-nilai etos *Mapalus* yang diangkat dalam sebuah wejangan yang bukan saja kalimat biasa, tetapi menjadi satu semboyan yang memang melekat dalam diri masyarakatnya. *Si Tou Timou Tumou Tou* juga mengandung unsur-unsur karakter asli tou Minahasa diantaranya, ngaasan yang berarti cerdas atau yang bijak, niatean atau yang telah ditekankan menjadi sesuatu yang pantang urung, sama' atau baik adalah sesuatu yang menjadi harapan agar kehidupan menjadi lebih baik.

Dengan semua nilai ini, *Si Tou Timou Tumou Tou* memberikan pesan agar sesama manusia berkewajiban untuk menjadikan manusia lain menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga kehidupan yang saling memperbaiki menuju pada sebuah masyarakat yang cerdas dan sejahtera. Dalam implementasinya, *Mapalus* merupakan alat kerja *Si Tou Timou Tumou Tou* di tingkatan praksis sebagai sebuah tools mencapai cita-cita perjuangan seperti yang diimpikan oleh *setou* Sam Ratulangi.

Di sinilah relasi sosial itu menjadi sangat menarik untuk dilihat. Manusia sebagai subjek aktivitas *Mapalus*, *si tou timou tumou tou* adalah pandangan hidup kultural, sementara *Mapalus* adalah relasi kerja antara manusia satu dan lainnya dalam sebuah himpunan besar bangsa Minahasa. Pada model hubungan seperti inilah *Mapalus* menjadi sangat subur berkembang karena ibarat wadah, *Mapalus* disuplai oleh sistem sosial yang sangat kondusif bagi berkembangnya *Mapalus*.

Dengan demikian, *Mapalus* adalah sebuah sistem sosial yang sangat kompetibel dengan berbagai aktivitas baik, ekonomi, sosial, bahkan pembangunan bangsa, apabila menempatkan *Mapalus* sebagai semangat dan dasar aktivitas senantiasa aktivitas tersebut berhasil. Seperti sebuah tubuh, *Mapalus* adalah sistem kerja dari fungsi-fungsi biologis yang harmonis antar organ tubuh mulai dari otak, mata, mulut, tangan, kaki, dan lain sebagainya. *Mapalus* dengan nilai-nilainya telah menjadi sistem simbol yang merekat erat dengan manusia Minahasa yang selanjutnya menjadi penanda (*coding*) sebuah identitas budaya Minahasa. Dengan kata lain, *Mapalus* adalah simbol dari kehadiran (*existence*) komunitas Minahasa yang dalam implementasi sosialnya merasuki bidang-bidang sebagai sebuah relasi kerja, baik di bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. Memang tou Minahasa lebih dulu akrab dengan sistem kerja di bidang pertanian. *Mapalus* memiliki fungsi aktif untuk menghimpun dan melibatkan peran masyarakat untuk saling menolong secara aktif.

Penguatan dan pencegahan agar aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan semakin bernilai maka perlu dilakukan dengan cara

penguatan mental spiritual melalui pendekatan kepercayaan serta penguatan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab dengan didasari pada nilai *Mapalus* dan *Si Tou Timou Tumou Tou*. Tujuannya agar tata nilai yang dimiliki oleh aparat benar – benar berfungsi sebagai pembimbing dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat. Jika tata nilai yang dimiliki aparat sudah berurat berakar maka perilaku – perilaku yang ditunjukkan oleh aparat desa akan semakin baik.

Siagian (1995:109) mengungkapkan bahwa setiap orang menganut sistem nilai tertentu, yaitu berupa pola kelakuan atau alasan keberadaan seseorang. Memahami sisten nilai yang dianut oleh anggota organisasi termasuk didalamnya sistim nilai yang dianut oleh aparat selaku pemberi pelayanan merupakan hal yang sangat penting. Tingkatan sistem nilai lebih lanjut dikemukakan oleh Siagian (1995:113) setidaknya terdapat tujuh yaitu nilai yang sifatnya reaktif, nilai yang sifatnya tribalistik, nilai yang ego sentris, nilai konformitas, nilai manipulatif, nilai yang sosio sentris dan nilai eksistensial.

Memperhatikan tingkatan sistem nilai yang dikemukakan diatas maka dalam upaya mmeberikan pelayana yang berkualitas kepada masyarakat perlu dihindari nilai yang sifatnya konformitas dengan tipe politis dan ekonomis. Kesediaan untuk memahami dan menerima nilai yang berbeda dan pendapat yang berlainan merupakan salah satu segi kehidupan organisasional yang amat penting untuk dipupuk dan dikembangkan. Permasalahan kewenangan dalam jabatan sebagai pemerintah yang ditinjau dari aspek politik yang menjurus pada kekuasaan, kekuatan, wewenang dan pengaruh yang dimilikinya perlu dipahami sebagai media untuk menjadikan seseorang mendapatkan hubungan ketergantungan dengan orang lain atau lingkungannya. Sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan aparat perlu untuk menghindari tipe ekonomi yang hanya mementingkan unsur pendapatan yang mengakibatkan pemberi pelayanan diperhadapkan dengan korupsi.

Aparat yang mampu memaknai dan menerapkan sistem nilai *Mapalus* dalam penyelenggaraan pelayanan publik apabila nilai itu dapat berfungsi dan mampu merespon serta mengatasi masalah – masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tanggungjawab yang diberikan. Dalam arti sempit *Mapalus* mengandung konsep kesediaan individu untuk bekerjasama dalam organisasi sukarela demi tujuan bersama, dan bentuk organisasi kerja. Dalam arti luas *Mapalus* merupakan suatu konsep tingkah laku dalam memecahkan persoalan bersama. Sehingga makna *Mapalus* sebagai sebuah sistem kerja yang memiliki nilai-nilai etos seperti, etos resiprokal, etos partisipatif, solidaritas, responsibilitas, gotong royong, good

leadership, disiplin, transparansi, kesetaraan, dan trust (kepercayaan) dapat membentuk suatu sikap dan tindakan dari aparat selaku pemberi pelayanan untuk beraktivitas dengan mempersatukan kekuatan dan kepandaian yang dimiliki dalam melayani masyarakat. Budaya *Mapalus* dianggap sebagai aktualisasi yang paling konkret tentang makna hakiki *Si Tou Timou Tumou Tou*, yang dapat dilihat dari sifat sosial budayanya sebagai sumber adat kebiasaan masyarakat. Olehnya konsep Budaya *Mapalus* diharapkan dapat dipelihara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa nilai budaya *Mapalus* belum diterapkan sebagai pola pelayanan pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Selatan karena budaya *Mapalus* yang mengandung makna kekeluargaan, rasa sepenanggungan yang tinggi, kebersamaan, musyawarah dan mufakat, kepemimpinan, keterbukaan, disiplin yang kuat dan religius belum dijadikan sebagai tata nilai yang berfungsi sebagai pembimbing dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat. Sehingga guna perbaikan pelayanan, dengan didasarkan pada konsep kualitas pelayanan public yang dibentuk melalui aspek *tangibles, emphaty, reliability, responsiveness, assurance* maka model nilai budaya *Mapalus* dalam pelayanan public perlu dilakukan melalui aspek responsibilitas, disiplin, kesetaraan dan keadilan sosial dan religious.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui tulisan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sam Ratulangi melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian. Serta kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang telah membantu dalam pengumpulan data. Dan kepada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran melalui Panitia Seminar Nasional Politik dan Kebudayaan yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam keikutsertaan pada kegiatan ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, 2014. *Profil Kabupaten Minahasa Selatan*. Amurang: Bappeda Kab. Minahasa Selatan.

Bungin, Burhan.2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group Cook.

Cook, Curtis W, and Hunsaker L, Phillip. 2001. *Management and Organizational Behavior, Third Edition*. New York San Francis: Mc Graw- Hill, Irwin, Boston Burr Ridge.

Danandjadja, Andreas A. 1986. *Sistem Nilai Manajer Indonesia Tinjauan Kritis Terhadap Penelitian*. Jakarta : PPM.

Liando, Daud. 2011. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Terhadap Kualitas Pelayanan KTP di Kabupaten Minahasa Selatan*. Bandung : PPs. Unpad.

Londa, Very. 2012. *Pengaruh Perilaku Aparat Terhadap Efektivitas Kerja Aparat Desa di Kabupaten Minahasa Selatan*. Bandung : PPs. Unpad.

Robbins, S.P., and T.A., Judge, 2009, *Organizational Behavior*. United State Of America, New York : Pearson Prentice Hall.

Rusli Budiman. 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.

Siagian. S. P. 2004. *Motivasinya dan Aplikasinya*. Jakarta : Rineka Cipta.

Turang, Jan. 1984. *Pembangunan Daerah Minahasa dengan Pertanian Inti Sistem Mapalus (Prisma)*. Manado: Yayasan *Mapalus*.

Undang – Undan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

DILEMA KEBIJAKAN *LAND REFORM*

Anik Susanti
Nyimas Nadya Izana
Nike Kusumawanti, MA
Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya
aniksusantie@gmail.com

Abstrak

Fenomena tekanan penduduk atas tanah telah menarik perhatian para peneliti dan memunculkan beragam judul penelitian di seputar topik tentang soal tanah, sistem penguasaan tanah, stratifikasi sosial masyarakat petani, konflik pertanahan dan kesenjangan sosial. Dalam upaya mengatasi permasalahan penguasaan tanah di pedesaan, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembaharuan agraria. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001, salah satu arah kebijakan yang menjadi perhatian utama penulis adalah mengenai *land reform*. *Land reform* menyangkut penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat. Melalui kebijakan *land reform*, diharapkan pemerintah dapat mendorong kaum tani untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pada kenyataannya secara tidak disengaja, kebijakan *land reform* juga mendorong terbukanya pasar tanah karena adanya legalisasi tanah. Penulis merasa khawatir jika *land reform* ini malah bergeser dari tujuan semula, semestinya memantapkan kedudukan petani atas tanah yang telah didudukinya menjadi membuka peluang bagi petani untuk terlepas dari tanahnya di bawah kondisi tertentu. Pada paper ini, penulis bermaksud untuk menjelaskan implikasi kebijakan *land reform* bagi kehidupan masyarakat tani: apakah membantu kesejahteraan keluarga petani atau justru mempermudah petani terlepas dari tanahnya. Untuk keperluan tersebut, penulis menyajikan data yang relevan berdasarkan hasil penelitian lapang dengan menggunakan metode kualitatif serta studi literatur. Adapun temuan yang diperoleh yaitu kebijakan *land reform* ini cenderung mengarah pada liberalisasi tanah yang pada gilirannya dapat mengancam kedudukan petani atas tanahnya.

Kata kunci: kebijakan, *land reform*, dilema, petani, penguasaan tanah

PENDAHULUAN

Land reform kembali menjadi topik penting semenjak era reformasi seiring dengan kemiskinan dan ketimpangan penguasaan tanah yang dihadapi petani. Sebagian besar petani di Jawa hidup dalam garis batas subsistensi, ia mengerjakan tanah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Sayangnya, hanya sebagian petani menjalankan usaha tani di atas tanah miliknya, itupun luasnya rata-rata 0,5 ha. Sementara itu, sebagian yang lain terlibat dalam perjanjian bagi hasil seperti *maro*, *mertelu* dan *mrapat*. Artinya, terdapat petani yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga sewaktu-waktu ia dapat kehilangan hak garap manakala perjanjian bagi hasil berakhir. Begitu pentingnya arti lahan bagi seorang petani sehingga apabila tanah terlepas dari penguasaannya, maka pemenuhan kebutuhan makan keluarganya akan terancam.

Menanggapi fenomena kehidupan suram kaum petani, *land reform* merupakan kebijakan yang semestinya dilaksanakan secara efektif. Reforma agraria di Indonesia bukanlah ide baru karena sudah diterapkan pada periode 1960-1965. Kini gagasan mulia tersebut dilanjutkan kembali dalam kerangka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001. Ironisnya, tujuan mulia dari *land reform* tidak selalu dapat direalisasikan mengingat berbagai kondisi pemilikan tanah dan pranata yang muncul dari hubungan orang dengan tanahnya yang berimplikasi pada relasi sosial diantara mereka.

Program ini semestinya disertai dengan asistensi dan fasilitasi supaya penerima tanah redistribusi dapat meningkatkan aksesnya pada input-input pertanian, kredit, tata guna tanah, pemasaran dan asistensi teknis. Dengan ungkapan lain, *land reform* mencakup asset reform dan access reform supaya tanah yang didistribusikan menjadi produktif, menguntungkan dan dapat dikelola secara berkelanjutan (Rachman, 2012). Pada kenyataannya, redistribusi tanah masih menyisakan berbagai persoalan. Beberapa penelitian mengungkapkan persoalan-persoalan terkait dengan redistribusi tanah.

Semenjak diterapkan antara tahun 1960 hingga tahun 1965 dan diabaikan pada masa Orde Baru, *land reform* pada masa reformasi nampaknya telah mengalami pergeseran. Keterbatasan ketersediaan tanah yang

dapat didistribusikan yaitu tanah-tanah yang melebihi ketentuan maksimum, tanah-tanah swapraja atau bekas swapraja, tanah guntai dan tanah terlantar, menyebabkan *land reform* sangat sulit untuk diterapkan khususnya di Jawa. Namun, guna memenuhi ambisi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan maka *land reform* dijalankan sebatas legalisasi aset pemilikan tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh rakyat. Beberapa skema *land reform* seperti PRONA, P4T dan redistribusi tanah merupakan bentuk legalisasi aset yang tidak saja memiliki manfaat positif, tetapi berpotensi menjerumuskan petani dalam pasar tanah pada kondisi tertentu. Dengan melakukan penelitian lapangan di Desa Sri Mulyo dan Desa Sukodono, peneliti ingin memahami lebih dalam mengenai dilema yang dirasakan kaum tani akibat *land reform*.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam memahami lebih dalam mengenai dilema yang dialami oleh kaum tani akibat kebijakan *land reform* khususnya dalam program redistribusi tanah. Informasi yang akurat mengenai pengalaman petani pada proses dan dampak *land reform* hanya dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang ditawarkan oleh metode kualitatif. Sugiyono (2006) menyatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara, sementara itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Ketiga cara tersebut menjadi acuan penulis ketika mengumpulkan data yang relevan.

Adapun operasional dari ketiga cara yang disampaikan oleh Sugiyono adalah sebagai berikut. Sekitar April 2016, penulis membaca berita pada situs online mengenai adanya program redistribusi yang dilaksanakan di Kecamatan Dampit. Penulis merasa tertarik dengan tema redistribusi tanah karena program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial khususnya di wilayah pedesaan. Untuk memahami lebih dalam mengenai tema ini, penulis memutuskan untuk menyusun proposal penelitian pada Mei-Juni 2016 yang diawali dengan studi literatur tentang program redistribusi tanah. Berdasarkan studi literatur, penulis memutuskan untuk lebih fokus pada dilema kaum tani yang terlibat dalam program *land reform* atau redistribusi tanah. Setelah mendapatkan fokus penelitian, penulis memilih metode kualitatif deskriptif dan segera memulai pengumpulan data.

Penulis melakukan observasi pendahuluan pada Juli 2016 dengan hasil yang agak berbeda dengan apa yang penulis bayangkan. Berdasarkan hasil analisis data yang dihasilkan oleh observasi pendahuluan ini,

selanjutnya penulis melakukan wawancara mendalam dan observasi dengan subyek penelitian sampai menemukan informasi yang jenuh. Wawancara mendalam dan observasi dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2016. Sembari melakukan pengumpulan data, penulis juga segera melakukan analisis data dengan mengikuti model Miles dan Huberman. Setelah analisis data selesai, penulis menyusun laporan penelitian hingga selesai pada awal Oktober 2016. Sebagai langkah terakhir, penulis ingin temuan yang dihasilkan terjamin keakuratannya sehingga penulis kembali lagi ke lapangan untuk memastikan bahwa data itu benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Redistribusi tanah mulai dilaksanakan di Kecamatan Dampit pada sekitar tahun 1961 dengan obyek tanah peninggalan Belanda. Menurut Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960, setiap keluarga petani hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian yang tidak melebihi ketentuan maksimum. Luas tanah pertanian yang tergolong tanah kering hanya bisa dikuasai keluarga petani maksimum 20 hektar, 12 hektar, 9 hektar dan 6 hektar masing-masing untuk daerah tidak padat, kurang padat, cukup padat dan sangat padat. Keluarga petani yang menguasai tanah melebihi ketentuan tersebut wajib melaporkannya kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pemerintah mengambil tanah kelebihan dari ketentuan maksimum dengan ganti kerugian, kemudian membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan.

Agak berbeda dengan ketentuan tersebut, luas tanah kering yang dapat dikuasai oleh keluarga petani di Kecamatan Dampit khususnya di Desa Sri Mulyo adalah 1 hektar melalui peristiwa pendahuluan yang disebut oleh orang lokal dengan *blodosan* dan *pengguntingan* tanah. Secara tersirat, *blodosan* merupakan serangkaian kegiatan pendataan tanah yang dikuasai oleh keluarga petani, lalu tanah tersebut diukur sebelum akhirnya digunting apabila dianggap lebih dari satu hektar. Tanah yang terkena *pengguntingan* diambil oleh pemerintah dengan ganti rugi untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada petani *tunakisma*. Berikut petikan wawancara dengan salah seorang tokoh program redistribusi tanah di Kecamatan Dampit:

“Pada tahun enam puluh satu pemerintah itu diadakan pemutihan, *jarene* (kata) wong (orang) *biyen* (dulu) *blodosan*. Nah orang pada waktu tahun enam puluh satu yang kelebihan tanah kayak suami isteri, tanahnya yang lebih dari satu hektar, tanahnya digunting dikasihkan orang yang nggak punya tanah”.

Ketentuan informal mengenai penguasaan tanah seluas 1 hektar ini cukup menarik untuk ditelisik lebih lanjut dalam kaitannya dengan ketentuan formal penguasaan tanah maksimum. Penulis berpendapat bahwa lahan kering seluas satu hektar dianggap oleh penduduk setempat sudah bisa mencukupi kebutuhan subsistennya atau dianggap sebagai mekanisme sosial untuk melakukan pemerataan hak akan sumber nafkah. Temuan ini menjadi penting ketika ada pernyataan dari dua penulis yaitu Stanislaus Swianiewiez dan Inna E. Selamet.

Stanislaus Swianiewiez berpandangan bahwa perombakan agraria adalah kurang penting di Indonesia daripada di kebanyakan negara Asia lainnya. Sebabnya ialah soal pemusatan milik tanah pada tuan-tuan tanah boleh dikatakan tidak ada (Sajogyo&Sajogyo, 1980). Sementara itu, Inna E. Selamet berpandangan bahwa keperluan untuk mengadakan suatu redistribusi tanah khususnya di Jawa kurang menyolok mata (Sajogyo&Sajogyo, 1980). Kedua pandangan tersebut kira-kira perlu dipertimbangkan kembali. Jangankan untuk menguasai tanah layaknya tuan tanah, menguasai tanah lebih dari 1 hektar saja sudah ada mekanisme sosial untuk membagikannya kepada petani tunakisma.

Redistribusi tanah di Jawa bukannya tidak bisa dilakukan, tetapi memang sangat sulit dilakukan karena luas lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga petani tidak memungkinkan untuk dikenakan ketentuan luas maksimum berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960. Pemerintah Indonesia kesulitan menerapkan ketentuan luas maksimum dapatlah dipahami, mengingat sebagian rumah tangga petani menguasai lahan yang luasnya rata-rata 0,5 hektar. Pada tahun 1993 kira-kira 19.713.000 rumah tangga menguasai suatu lahan pertanian. Rincian kasarnya, sebanyak 9.579.000 rumah tangga tani mengendalikan kurang dari 0,5 hektar lahan pertanian. Sementara itu, sebanyak 10.134.000 rumah tangga tani mengendalikan lahan pertanian seluas 0,5 hektar atau lebih. Sebagai informasi tambahan, pada tahun 1993 terdapat kurang lebih 9.054.000 rumah tangga buruh tani tidak menguasai lahan pertanian. Adapun proporsi rumah tangga petani tunakisma dan petani pemilik tanah sempit lebih tinggi di Jawa daripada di Luar Jawa (Prosterman, 2002:6).

Minimnya tanah yang tersedia menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan *land reform* di Indonesia. Sepanjang periode 1960-2000, pemerintah telah meredistribusi tanah seluas 850,128 hektar dari 26.000.000 lahan yang ada di wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, seluas 339,227 hektar tanah dari 5.800.000 berada di Jawa (Prosterman, 2002:3).

Seorang ahli *land reform* bernama Ladejinsky telah menyangsikan keberhasilan *land reform* utamanya di Jawa karena di wilayah tersebut tidak cukup tanah sekalipun pemilikan maksimum lima hektar dikurangi (Lucas & Warren, 2013). Sepanjang populasi di pedesaan terus berkembang dan bersaing dengan area pertanian yang luasnya relatif tetap maka harapan untuk merubah kondisi penguasaan tanah yang lebih baik menjadi pekerjaan yang sangat sulit.

Apabila tidak ditemukan lagi rumah tangga yang menguasai lahan pertanian melampaui ketentuan maksimum, lalu tanah manakah yang semestinya diredistribusikan kepada petani tunakisma khususnya masa kini? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ayat 1, tanah-tanah yang akan dibagikan adalah: (a) tanah terlantar; (b) tanah guntai; (c) tanah swapraja dan bekas swapraja; (d) tanah-tanah lain yang dikuasai oleh negara. Kalau redistribusi tanah diartikan sebagai bagi-bagi tanah kepada petani tunakisma dengan luas yang cukup yaitu 2 hektar, maka sudah pasti tidak dapat dilakukan di Jawa karena kecil kemungkinannya tersedia tanah kelebihan, tanah guntai dan tanah swapraja. Oleh sebab itu, muncullah gagasan untuk menjadikan tanah negara sebagai obyek *land reform*.

Program Reforma Agraria Nasional yang berpusat pada redistribusi tanah negara bagi rakyat miskin pedesaan menuntut 8,15 juta hektar tanah milik perhutani, 1,1 juta hektar tanah negara di bawah wewenang BPN dan 7,3 juta hektar terlantar di bawah yuridiksi kedua lembaga tersebut (Rachman, 2002). Program redistribusi tanah dianggap sebagai cara yang baik untuk mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan, meningkatkan produktivitas pertanian penduduk, juga sebagai instrumen yang efektif dalam mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh distribusi lahan pertanian yang tidak merata. Namun demikian, pemerintah nampak sangat hati-hati ketika ide *land reform* akan ditujukan pada tanah di wilayah hutan. Malahan program ini sering kali ditolak dengan spirit untuk pemeliharaan hutan yang secara ekologis memiliki kompleksitas dan menyediakan beragam layanan kebutuhan publik.

Bachriadi & Sardjono (2006:23) menyatakan bahwa gagasan *land reform* yang didasarkan atas permintaan untuk menciptakan pertanian yang mantap seringkali berada dalam keadaan kontradiksi dengan ide kebutuhan perlindungan wilayah hutan. Ide *land reform* dilihat sebagai ancaman pada keberlanjutan hutan. Di dalam kementerian kehutanan, wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah milik negara. Oleh sebab itu, rakyat yang ingin mengakses dan mengelola wilayah hutan harus mengikuti kebijakan yang berlaku di Kementerian Kehutanan seperti Perhutanan Sosial, Hutan kemasyarakatan,

Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Adat. Di luar mekanisme legal, akses rakyat pada wilayah hutan berakibat kriminalisasi pada rakyat yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Sementara itu, BPN berupaya memastikan tersedianya sumber tanah baru yang tergolong sebagai tanah terlantar untuk didistribusikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, yang dimaksud dengan tanah terlantar adalah tanah atas nama perseorangan dan tanah yang dikuasai pemerintah yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sebagaimana keadaan dan tujuan pemberian hak. Hasil identifikasi BPN luas tanah terlantar mencapai 7.386.289 hektar dengan rinciannya yaitu seluas 1.925.326 tanah hak guna usaha, 49.030 hektar tanah hak guna bangunan, 401.079 hektar tanah hak pakai, 535.682 hektar tanah dengan hak pengelolaan dan 4.475.172 hektar tanah dengan izin lokasi dan izin lain-lainnya (Rachman, 2012).

Keterbatasan akses tanah yang dapat didistribusikan membuat program *land reform* khususnya di Jawa nyaris mengalami jalan buntu. Oleh sebab itu, BPN mengandalkan legalisasi aset tanah negara yang telah dikuasai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh rakyat melalui skema redistribusi tanah, Proyek Nasional Agraria (PRONA) dan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah. Menurut BPN kedua skema ini dianggap sebagai redistribusi tanah dengan sasaran luasan tanah mencapai 1,1 juta hektar. Jumlah sertifikat tanah yang dihasilkan melalui jalur redistribusi tanah ini sepanjang tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 secara berturut-turut adalah 5.000, 4.700, 74.900 dan 332.935 sertifikat. Pada tahun 2004 jumlah bidang tanah yang dilegalisasi hanyalah 269.902 bidang sedangkan pada tahun 2008 jumlahnya mencapai 2.172.507 bidang. Apabila dibiayai sendiri oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha maka jumlahnya mencapai 4.627.039 bidang (Rachman, 2012:111).

Skema legalisasi aset ini juga dilaksanakan di Desa Sri Mulyo antara tahun 2000 sampai 2016. Pada tahun 2000 terdapat limaratus kepala keluarga yang mengikuti program redistribusi tanah, pada tahun 2003 terdapat 500 bidang tanah yang dilegalisasikan melalui skema PRONA. Setelah lima tahun semenjak adanya PRONA, pada tahun 2008 terdapat 1.067 bidang tanah yang dilegalisasikan melalui program redistribusi tanah. Pada tahun 2016 terdapat 132 bidang tanah yang berhasil dilegalisasikan dari 500 bidang yang diusulkan. Kini tanah bekas perkebunan karet pada masa Hindia Belanda itu tidak hanya bisa diusahakan oleh penduduk setempat, tetapi juga bisa dimiliki dengan status hak milik (SHM).

Perubahan status penguasaan tanah hasil redistribusi ini berimbas pada produktivitas pertanian dan harga tanah. Sebelum adanya program redistribusi tanah, petani penggarap pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha tani karena pendapatan yang ia terima sebagai buruh perkebunan cengkeh dan kopi di Kecamatan Tirtoyudho hanya mencukupi untuk kebutuhan subsistensi. Setelah mendapatkan sertifikat tanah redistribusi, petani penggarap dapat mengakses permodalan dari bank dengan menjadikan tanah yang ia peroleh sebagai agunan. Seiring dengan keberhasilan program legalisasi aset tanah, harga tanah di Desa Sri Mulyo menjadi melonjak hingga mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan sebelum adanya program redistribusi tanah.

Perlu ditelisik lebih lanjut, apakah dengan menerima sertifikat tanah petani merasakan dampak positif dalam kehidupannya atau justru terjerumus dalam praktik pasar tanah. Kekhawatiran penulis cukup berdasar karena kehidupan kota semakin merembet ke wilayah pedesaan yang lambat laun akan membutuhkan tanah untuk pembangunan utamanya perumahan, perkantoran, pabrik, dan fasilitas umum. Kebutuhan ini akan menciptakan pasar tanah di pedesaan dengan pembeli utama berasal dari pemodal luar desa. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyusun seperangkat aturan main bagi penerima sertifikat redistribusi supaya tidak menjual lahannya kepada pemodal luar desa apalagi demi tujuan yang tidak terkait dengan kegiatan pertanian. Pelepasan tanah hasil redistribusi kepada para pemilik modal merupakan awal kebangkrutan bagi petani yang menjadikan kehidupannya semakin terpuruk.

Berdasarkan uraian di muka, kebijakan redistribusi tanah dapat dikatakan dilematis, bagaikan dua sisi mata uang. Pada satu sisi dapat meningkatkan kehidupan para petani, mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan. Pada sisi yang lain dapat menjerumuskan petani pada pasar tanah.

SIMPULAN

Program *land reform* dalam artian upaya pemerataan aset tanah kepada petani tunakisma memang sangat sulit untuk diterapkan di Pulau Jawa. Upaya ambisius pemerintah untuk memaksakan gagasan tersebut di Pulau Jawa menjadikan *land reform* sebatas legalisasi aset penguasaan tanah yang berujung dilematis. Di satu sisi memberikan manfaat bagi petani, di sisi yang lain dapat mengarahkan petani pada pasar tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachriadi, D dan Sardjono, MA. 2006. Local Initiative To Return Communities' Control Over Forest Lanf In Indonesia: Conversion Or Occupation? *Paper had been prepared for 11th Biennial Conference of International Association for The Study of Common Property, Bali-Indonesia, June 19-23,2006*
- Prosterman dkk. 2012. Concept For Land reform On Java. *Paper is prepared under Land Law Initiative*
- Lucas, A dan Warren, C. 2013. *The State and Agrarian Conflict In Indonesia*. Athens: Ohio University Press
- Rachman, N.F. 2012. *Land reform Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta
- Rachman, N.F. 2011. *The Resurgence Of Land reform Policy And Agrarian Movement In Indonesia*. Berkeley: University Of California
- Sajogyo & Sajogyo, P. 1980. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Kendala Budaya dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Masalah *Trafficking* di Kabupaten Indramayu

Slamet Mulyana

Meria Octavianti

Ira Mirawati

Kismiyati El Karimah

Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran
mulyanaslamet@yahoo.com

Abstrak

Masalah *human trafficking* di Indramayu merupakan masalah yang kronis dan sangat kompleks. *Trafficking* menyangkut kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi budaya yang menjadi bagian dari masyarakat Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai kendala budaya yang ada di masyarakat Indramayu dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Masalah *Trafficking*. Metode yang digunakan adalah studi kasus sehingga bisa memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Subjek penelitian bersifat *multi sources*, dengan informan kunci sebanyak enam orang yang mewakili birokrat, budayawan, akademisi, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hidup miskin pada sebagian masyarakat Indramayu kontradiktif dengan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik, budaya konsumtif, yang membuat anak dan orang tua rentan dieksploitasi oleh pelaku *human trafficking*. Kasus *human trafficking* terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam keluarga dan masyarakat, praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indramayu seperti *luruh duit*, budaya *saweran* dan budaya *ngadongdot* atau *ngelanang*. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dan putus sekolah karena pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi, serta pernikahan dini dan tingkat perceraian yang tinggi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain; seperti benang yang sangat kusut dan sulit diurai, dan akhirnya menjadi kendala besar dalam upaya penanganan masalah *human trafficking*, termasuk dalam sosialisasi kebijakannya.

Kata kunci: *human trafficking*, sosialisasi kebijakan, budaya luruh duit, saweran, ngadongdot

PENDAHULUAN

Fenomena tingginya angka buruh migran perempuan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Apalagi fenomena ini selalu dikaitkan dengan fenomena lain yaitu *trafficking* dan pelacuran. Ketiga kata tersebut merupakan tiga konsep yang berbeda satu sama lain, tetapi di Indramayu ketiga kata tersebut merupakan gambaran fenomena sosial yang sangat berkaitan. Tingginya minat menjadi buruh migran dan jebakan dunia pelacuran menyebabkan maraknya kasus *trafficking*; sementara banyak korban *trafficking* karena tertipu iming-iming menjadi buruh migran dengan gaji tinggi, yang akhirnya terjerumus dalam aktivitas pelacuran. Data kuantitatif menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang paling banyak mengirimkan buruh migran diikuti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika dilihat per kabupaten, Indramayu merupakan *sending area* tertinggi diikuti Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah kemudian Cilacap dan Kabupaten Cirebon (Puslitfo BNP2TKI, 2012).

Besarnya jumlah pekerja migran perempuan asal Indonesia ternyata tidak sebanding dengan nasib dan masa depan mereka sebagai pahlawan devisa bagi negara. Mencermati kondisi ini, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang secara struktural menjadikan perempuan sebagai pihak yang paling rentan terhadap perdagangan manusia, di samping acapkali menjadi korban pelecehan dalam kapasitasnya sebagai buruh migran. Kemiskinan tentu saja menjadi faktor mendasar, diikuti dengan tingkat pendidikan yang rendah. Faktor kedua ini *linier* dengan faktor pertama, karena ada kecenderungan keluarga dengan kemampuan ekonomi rendah akan memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki daripada anak perempuan (Feminis Standpoint, 19 November 2012).

Kondisi ini bisa dilihat dari tingkat melek huruf yang rendah pada kelompok perempuan di sejumlah

wilayah. Sebagai contoh yaitu daerah Indramayu yang menjadi wilayah pengirim buruh migran terbesar. Di Indramayu, tingkat melek huruf pada perempuan hanya sekitar 55.5% (UNDP, 2009), terpaut jauh dari tingkat melek huruf pada perempuan secara nasional yang berada pada angka 80.5%. Mencermati faktor ini, ditambah adanya kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja di dalam negeri, maka jelas ketika dihadapkan pada permasalahan ekonomi, perempuan yang tidak memiliki *skill* dan bekal pendidikan, serta memiliki wawasan yang sangat minim tentang tindak kejahatan migrasi, akan dengan mudah terjebak dalam sindikat perdagangan manusia (*trafficking*) atau penyelundupan orang (*smuggling*), meskipun selalu saja *kedok* yang ditawarkan adalah dapat bekerja di negara tetangga dengan upah yang tinggi.

Penanganan *trafficking* merupakan kegiatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi sehingga seluruh komponen masyarakat harus terlibat dan memainkan perannya secara optimal. Berbagai laporan maupun hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab *trafficking* adalah multifaktor (Irwanto, dkk, 2001; International Catholic Migration Commission, 2006; Sentika, 2007), tidak hanya karena faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan anak dan perempuan tetapi juga karena budaya patriaki yang mengakar di masyarakat, dampak industrialisasi dan modernisasi pertanian serta faktor sosial budaya. Penelitian PKPM Unika Atmajaya-UNFPA (2003) mengungkapkan bahwa kemiskinan, pendidikan yang rendah, serta budaya masyarakat merupakan kombinasi yang menyebabkan perempuan dan anak terjebak di "sektor industri seks". Penelitian tentang anak yang dilacurkan oleh Universitas Atmajaya dan Yayasan Kusumah Buana (2002) menyimpulkan bahwa faktor pendorong anak terlibat perdagangan anak-dilacurkan antara lain: kemiskinan, utang-piutang, riwayat pelacuran dalam keluarga, permisif, rendahnya kontrol sosial, rasionalisasi, dan stigmasasi.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus *trafficking* sudah dilakukan baik upaya yang bersifat *preemptif*, *preventif*, *kuratif*, maupun *rehabilitatif*. Upaya *preemptif* diarahkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi makro yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor pendorong dan faktor penyebab terjadinya kasus *trafficking*. Selain itu juga diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap penghapusan *trafficking*. Upaya *preventif* diarahkan untuk mencegah terjadinya kasus *trafficking* dengan membangun *supporting system* yang mampu memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya kasus *trafficking*. Hal itu antara lain dilakukan dengan membangun jejaring dan

kerjasama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat.

Upaya *kuratif* diarahkan untuk menangani korban kasus *trafficking*, dari mulai penjemputan, penampungan sementara, sampai pemulangan korban ke daerah asal. Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan hukum dan pendampingan korban sampai masalahnya selesai. Upaya *rehabilitatif* diarahkan untuk pemulihan kondisi kesehatan fisik dan psikis bagi korban *trafficking*; reintegrasi korban ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; serta pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban.

Pada kenyataannya, berbagai upaya penghapusan *trafficking* masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Data yang ada menunjukkan bahwa kasus *trafficking* masih terus terjadi, dengan jumlah kasus yang signifikan. Data Puslitfo BNP2TKI (2012) menjelaskan bahwa pada tahun 2012, dari 3.810.534 buruh migran Indonesia yang tercatat berangkat ke luar negeri, lebih dari 75%-nya adalah perempuan dan sekitar 88% dari perempuan tersebut bekerja di sektor informal, sebagian besar sebagai pembantu rumah tangga (PRT).

Belum optimalnya implementasi kebijakan nasional dalam upaya penghapusan *trafficking*, yang melibatkan peran serta pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, disebabkan beberapa faktor, seperti diungkapkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial (2005), antara lain: (1) Adanya disparitas persepsi para pejabat yang berwenang terhadap kebijakan nasional penghapusan *trafficking*; (2) Kurangnya dukungan sumberdaya (*resources*) di tingkat daerah; dan (3) Faktor lingkungan strategis yang dihadapi di tingkat operasional.

Secara lebih tegas, Tb. Rachmat Sentika mengatakan ada 3 (parameter) yang diperkirakan menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan nasional penghapusan *trafficking*, yaitu: (1) Lemahnya dukungan sumberdaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan penghapusan *trafficking*; (2) Kondisi lingkungan ekonomi, sosial budaya, dan partisipasi masyarakat yang kurang kondusif terhadap implementasi penghapusan *trafficking*; dan (3) Kurang mendukungnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat termasuk nilai-nilai kepemimpinan pemerintah daerah dan organisasi kelembagaan yang peduli anak, yang terkait dengan kebijakan penghapusan *trafficking* (Sentika, 2007: 11).

Adanya berbagai kendala dalam upaya penghapusan *trafficking* menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Kendala yang berkaitan dengan *kondisi*

lingkungan ekonomi, sosial budaya, dan partisipasi masyarakat yang kurang kondusif terhadap implementasi penghapusan trafficking merupakan fenomena yang menarik untuk kajian komunikasi. Selama ini, penelitian-penelitian *trafficking* lebih banyak menyangkut pemetaan kebijakan-kebijakan penanganan, implementasi kebijakan, serta pemaparan faktor pendorong dan faktor penyebab terjadinya *trafficking*.

Tulisan ini, yang merupakan bagian dari penelitian tentang *trafficking* di Jawa Barat, mencoba memotret fenomena *trafficking* di Kabupaten Indramayu. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis budaya masyarakat Indramayu yang selama ini diduga menjadi faktor kendala dalam upaya penanganan *trafficking*, termasuk dalam upaya sosialisasi kebijakannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan karena tujuan dari penelitian ini menghendaki adanya pembahasan yang holistik, sistemik, dan mengungkapkan makna dibalik fakta empiris mengenai kendala budaya dalam sosialisasi penghapusan *trafficking*.

Metode studi kasus digunakan dengan mempertimbangkan relevansinya untuk menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti, yaitu kendala budaya dalam sosialisasi penghapusan *trafficking* di Kabupaten Indramayu. Dalam studi kasus, peneliti mempelajari sebanyak mungkin data mengenai seorang individu, kelompok atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti (Mulyana, 2001:201). Studi kasus merupakan penelitian yang mempelajari secara intensif atau mendalam satu anggota dari kelompok sasaran suatu subjek penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber atau *key informan* dan dipilih secara purposif adalah (1) Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Indramayu, yang secara langsung menangani kegiatan sosialisasi penghapusan *trafficking*; (2) Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Indramayu, yang menyusun dan menetapkan peraturan daerah untuk penghapusan *trafficking*; (3) Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Indramayu, yang menangani masalah *trafficking*; (4) Peneliti masalah *trafficking* di Kabupaten Indramayu; dan (5) Tokoh masyarakat Kabupaten Indramayu, yang diperkirakan mengetahui dan peduli terhadap masalah *trafficking*.

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Sliyeg Indramayu, yang ditetapkan secara purposif sebagai

salah satu wilayah kasus terbanyak. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung yang peneliti lakukan. Selain itu juga, dilakukan peninjauan ulang dan penggunaan dokumentasi dengan menyandarkan pada konsep konsep teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Trafficking di Indramayu

Indramayu sudah lama dikenal sebagai daerah pengirim (*sending area*) buruh migran ke luar negeri, di mana sebagian besar di antara mereka adalah buruh migran perempuan. Kondisi dan perkembangan buruh migran di Indramayu dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi jumlah maupun wilayah tujuan. Menurut data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaker) Kabupaten Indramayu, pada tahun 2013 tercatat ada 16.000 buruh migran dari 31 kecamatan di Indramayu yang berangkat ke luar negeri yang berbekal dokumen lengkap dan mengikuti prosedur yang berlaku (*documented*), terdiri atas 20 laki-laki dan 15.980 perempuan.

Ada tiga kecamatan yang paling banyak mengirimkan tenaga kerjanya sebagai buruh migran ke luar negeri yaitu Kecamatan Juntinyuat, Sliyeg dan Balongan (Dinsosnakertrans Indramayu, 2014). Walaupun demikian, di setiap kecamatan di Indramayu jumlah tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri sebagai buruh migran cukup tinggi. Bagi banyak warga Indramayu, menjadi buruh migran adalah pilihan alternatif untuk keluar dari himpitan kesulitan ekonomi.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah buruh migran yang berangkat ke luar negeri jauh lebih banyak, karena tidak semua buruh migran yang ke luar negeri ada dalam catatan Dinsosnaker kabupaten. Banyak di antara mereka yang berangkat tidak melalui prosedur resmi (*undocumented*). Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinsosnaker Kabupaten Indramayu, Iwan Hermawan menjelaskan; "*Diperkirakan, tenaga kerja yang tidak tercatat justru jumlahnya lebih besar daripada yang tercatat,,,ya begitulah kondisinya!*" Dia mengemukakan, banyaknya calon tenaga kerja yang tidak melalui prosedur ini disebabkan beberapa kemungkinan, di antaranya faktor ketidaktahuan warga, keengganan untuk terlibat birokrasi, ataupun calon tenaga kerja yang menyerahkan segala urusan kepada *sponsor*. "*Padahal sebenarnya birokrasi untuk mengurusnya mudah,...sangat mudah, satu hari juga bisa jadi,*" ujar Iwan. *Sponsor* yang dimaksud adalah individu atau

kelompok yang merekomendasi dan memfasilitasi calon buruh migran untuk berangkat ke luar negeri.

Negara yang menjadi tujuan para buruh migran perempuan Indramayu mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Lima tahun lalu atau sebelumnya wilayah favorit tujuan buruh migran adalah negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti adalah Saudi Arabia, Abu Dhabi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan sebagainya. Sementara saat ini, wilayah tujuan favorit buruh migran adalah negara-negara di kawasan Timur Jauh seperti Taiwan, Korea Selatan dan Hongkong atau kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan sejumlah kalangan di Indramayu menilai bahwa permasalahan buruh migran dan *trafficking* saling berkaitan. Apabila tidak ditangani dengan baik, kedua masalah itu bisa menjadi benang kusut yang tidak mudah diurai. Masalah buruh migran harus ditangani dengan baik, benar dan sungguh-sungguh terutama oleh pemerintah kabupaten melalui dinas/instansi terkait. Iwan Hermawan, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas pada Dinsosnaker Kabupaten Indramayu menegaskan bahwa, *"Apabila salah dalam menangani buruh migran khususnya tentang pengurusan dokumennya, maka sangat rentan terhadap tindak penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Bukan nasib baik yang akan ditemui buruh migran tetapi bisa terjebak dalam sindikat perdagangan orang atau trafficking"*.

Pendapat yang hampir senada disampaikan Soenarto Rois, pimpinan Yayasan As-Sakienah Pondok Pesantren As-Sakienah Desa Tugu Kecamatan Sliyeg yang sudah banyak menangani kasus buruh migran asal Indramayu. Beberapa pernyataan Soenarto Rois

"Sekitar enam dari sepuluh perempuan di sini bekerja di luar negeri. Empat di antaranya memang pulang dengan membawa kesuksesan, dan dua lainnya tidak." "Di desa kami pemberangkatan buruh migran tiap tahun terus bertambah karena para calon buruh migran tersebut melihat keberhasilan pendahulunya, sedangkan kejadian buruk seperti buruh migran yang pulang jadi gila, dihamili oleh majikan, disiksa, tidak pernah jadi pelajaran bagi mereka."

Dorongan menjadi TKW, terutama sejak satu dasawarsa terakhir, kian menjadi primadona di kalangan perempuan desa dengan alasan hanya dengan menjadi buruh migran sajalah mereka bisa mendapatkan uang 'gede' untuk mengubah nasibnya. Itulah sebabnya mereka cenderung 'nekad' meski dengan cara ilegal dengan resiko menjadi korban *trafficking*. Menariknya, resiko menjadi korban *trafficking* dinilai wajar sebagai suatu resiko, bahkan sebagai 'nasib' sial saja.

Sementara Ari Nurjaman, yang beberapa tahun terlibat dalam satuan tugas (satgas) anti-*trafficking* di Indramayu, apalagi pada saat beliau menjabat sebagai Asisten Daerah II (Asda II) bidang Ekonomi dan Pembangunan, menegaskan lebih jauh bahwa kasus *trafficking* yang paling banyak terjadi terhadap perempuan Indramayu di antaranya berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan, penyekapan di penampungan baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu ada pula tenaga kerja wanita asal Kabupaten Indramayu yang tidak dibayar saat bekerja di luar negeri. Korban *trafficking* menanggung trauma maupun gangguan psikis lainnya.

Sementara, Nurhayati, Kepala Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Wiralodra Indramayu, menambahkan bahwa masalah *trafficking* di Indramayu memang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

"Trafficking itu dilema. Banyak orangtua di Indramayu malah membolehkan anaknya untuk bekerja di luar daerah bahkan di luar negeri. Apakah dengan cara legal atau illegal, itu tidak masalah. Mereka menganggap anak perempuan itu adalah aset. Mereka melaporkan adanya kasus trafficking hanya jika tidak ada kiriman uang dari anaknya yang telah bekerja di luar daerah, ... Indramayu, daerah yang sangat kronis dan kompleks untuk trafficking".

Kendala Budaya dalam Sosialisasi Kebijakan Penanganan Trafficking

Sosialisasi kebijakan penanganan *trafficking* di Indramayu belum berjalan optimal salah satu faktor utamanya adalah budaya. Hasil penelitian menunjukkan beberapa budaya yang berkembang di masyarakat Indramayu justru menjadi faktor pemicu meningkatnya jumlah buruh migran perempuan dan sebagian di antaranya menjadi korban *trafficking*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu masalah budaya yang dihadapi Indramayu, sejak dulu sampai sekarang, adalah budaya atau tradisi *luruh duit*. Tradisi inilah yang akhirnya membuat Indramayu dikenal sebagai daerah pengirim buruh migran perempuan bahkan pelacur (PSK) di Indonesia. *Luruh duit* (mencari uang dengan mudah), yang bisa juga diartikan secara kasar sebagai pelacuran, dipandang sebagian masyarakat Indramayu sebagai solusi, jalan penyelemat, untuk keluar dari kemiskinan. Fenomena ini bisa dilihat terutama di Kecamatan Bongas, Karangampel, Juntinyuat, ataupun Sliyeg.

Tujuan dari warga yang *luruh duit* adalah untuk mencari kesugihan (kekayaan). Kekayaan merupakan

representasi suatu kesenangan, supaya ekonominya tercukupi, dan tidak kalah dengan orang lain. Selain itu, status sosialnya terangkat dan untuk masa depan yang lebih baik, serta supaya dapat membahagiakan seluruh keluarganya terutama orang tuanya, sehingga secara otomatis akan mendapat penghargaan dari orang-orang sekitarnya dan kebanggaan diri. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan karena terbatasnya kesempatan kerja; di tengah keterbatasan kemampuan dan keahlian karena rendahnya pendidikan, di tengah himpitan kemiskinan karena tidak punya sawah atau lahan garapan maka *luruh duit* menjadi cara termudah untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Kekayaan diwujudkan dalam bentuk rumah yang bagus, pakaian yang modis, ataupun kendaraan yang dimiliki.

Luruh duit tidak selamanya menghasilkan kekayaan secara cepat. Ketika warga yang *luruh duit* gagal, kegagalan itu disikapi dengan *sikap nrimo* bahwa hal itu merupakan takdir atau nasib buruk. Biasanya mereka berhenti untuk sementara kemudian mencari cara lagi untuk meraih kesuksesan. Beberapa cara merespon kegagalan adalah dengan mencari dukun yang ampuh, menjadi kuli, menjadi pembantu rumah tangga, atau mencari suami. Cara-cara irasional lebih banyak dipilih ketika kegagalan dialami, seperti dengan melakukan ritual-ritual aneh yang hasilnya sangat sulit dipertanggungjawabkan.

Di beberapa wilayah Indramayu, *luruh duit* merupakan kebiasaan turun-temurun. Sebagai kebiasaan turun-temurun, *luruh duit* menjadi sesuatu yang terbuka dan diterima masyarakat. Bahkan masyarakat sangat menerimanya. Selama ini, tidak ada sanksi sosial terhadap pelaku *luruh duit* karena dinilai sudah tradisi. Sebagian warga masyarakat memang ada yang sudah menyadari bahwa *luruh duit* merupakan kejahatan. Tetapi banyak juga yang menganggapnya tidak demikian. Mereka memandang *luruh duit* bukan kejahatan, tetapi pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang lainnya. *Luruh duit* sudah tidak dianggap sesuatu yang salah, bahkan bisa menjadi kebanggaan. *Luruh duit* mudah memperoleh uang dan tidak ada sanksi apa pun, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Berkembangnya budaya *luruh duit* pada sebagian warga masyarakat Indramayu berkaitan dengan pandangan mereka terhadap keberadaan perempuan, yang lebih banyak dilihat dari sisi fisiknya. Tradisi seperti *ngadongdot* (menawarkan anak perempuan kepada lelaki tertentu) atau *ngelanang* (melacurkan diri) pada hakekatnya adalah bentuk pemaknaan masyarakat terhadap tubuh perempuan yang dipandang sebagai asset, nilai tambah ataupun komoditas yang bisa dijual, bahkan itu dilakukan oleh orangtua atau suami. Pandangan ini pula yang menyebabkan kelahiran anak perempuan di beberapa wilayah di Indramayu lebih dihargai daripada kelahiran anak

lelaki. Harapannya, anak perempuan nantinya bisa membalas 'bakti' kepada orang tua dalam bentuk kiriman-kiriman uang yang akan mengangkat harkat martabat keluarga. Tak peduli apakah kiriman uang itu berasal dari hasil bekerja sebagai PSK atau dari pekerjaan lainnya.

Pola dasar yang terjadi biasanya adalah anak perempuan dalam usia yang sangat muda akan dinikahkan oleh orang tuanya, sebagai jalan keluar dari beban menafkahi keluarga yang harus ditanggung orang tua. Selanjutnya, karena secara fisik dan mental mereka belum siap, tidak lama kemudian pasangan muda itu akan bercerai. Si perempuan akan menyandang status sebagai janda; janda muda atau lebih dikenal sebagai janda kembang. Status janda kembang akan meningkatkan nilai jual perempuan. Pandangan seperti itu masih sangat kuat di sebagian masyarakat Indramayu.

Temuan lain penelitian adalah berkembangnya secara turun-temurun beberapa tradisi upacara adat di dalam keluarga berkenaan siklus hidup manusia, dimulai dari tradisi kehamilan sampai kelahiran, tradisi khitanan termasuk *rasulan* (khitanan untuk anak perempuan), tradisi perkawinan, dan tradisi kematian. Di antara tradisi tersebut, yang biasanya dirayakan secara khusus dengan menggelar pesta (*hajatan*) 'besar-besaran' yang cenderung mengeluarkan biaya banyak adalah tradisi sunatan, *rasulan*, dan perkawinan. Acara ini biasanya terjadi pada musim panen, ketika mereka memperoleh pendapatan lumayan dan sekaligus merupakan acara syukuran. Jenis hiburan pada saat *hajatan* menunjukkan tingkat status sosial ekonomi orang tua. Masyarakat kelas atas biasanya mengadakan hiburan orkes dangdut, khas tarling Indramayuan atau Cirebonan, Masyarakat kelas menengah dengan sandiwara, sementara masyarakat kelas bawah cukup organ tunggal. Bagi orang Indramayu mengadakan *hajatan* khitanan atau perkawinan merupakan satu kewajiban yang mau tidak mau harus dilaksanakan; Ia akan merasa sangat malu dan terusik harga dirinya jika tidak melakukannya. Sikap seperti itu mendorong mereka untuk mencari upaya apa pun agar bisa melakukan *hajatan* khitanan atau perkawinan, bahkan dengan cara memaksakan diri misalnya dengan berhutang.

Bersamaan dengan tradisi *hajatan*, berkembang juga kebiasaan (sistem) *buwuhan* yaitu kebiasaan terikat seperti arisan untuk membantu warga masyarakat yang akan mengadakan *hajatan*. *Buwuhan* umumnya dilakukan dalam bentuk beberapa warga yang mampu (punya uang atau beras atau kebutuhan *hajatan* lainnya) melakukan *magang* (meminjamkan) beras atau uang tersebut untuk kebutuhan *hajatan*. Menjadi kewajiban warga yang *hajatan* untuk mencatat siapa saja yang *magang*, dalam bentuk apa, dan berapa banyak. Barang

hasil *magang* harus dibayarkan kembali (*nyurtang*), sebesar minimal yang telah dipinjam atau bahkan dilebihi, ketika tetangga-tetangga 'yang meminjamkan' mengadakan *hajatan* di waktu yang lain.

Menjadi beban warga seperti halnya utang-piutang apalagi nilainya bias sangat besar untuk ukuran masyarakat Indramayu, totalnya bisa sampai puluhan juta rupiah. Kondisi tersebut diperparah dengan budaya konsumtif yang memang merupakan karakter masyarakat Indramayu. Berkenaan dengan sistem *buwuhan*, tokoh masyarakat di Sliyeg, Kuwu Wartono menjelaskan,

"...hajatan dan buwuhan memang tradisi leluhur yang berkembang di hampir seluruh wilayah Indramayu. Tradisi ini awalnya sebenarnya sih menurut saya baik...ya bentuk langsung dari gotong royong tapi lama-lama seperti bergeser maknanya, jadi seperti utang yang mau tidak mau harus dibayar kembali. Dan ini menyangkut harga diri warga di sini. Banyak warga yang sepertinya jadi terjerat 'utang' buwuhan ini...."

Akibat dari tradisi *hajatan* dan sistem *buwuhan* banyak warga masyarakat di Indramayu, khususnya di Kecamatan Sliyeg, yang akhirnya seolah terjerat utang-piutang. Mereka harus selalu siap untuk melakukan *nyurtang* (membayar kembali) ketika tetangga yang melakukan *magang* mengadakan *hajatan* di waktu yang lain. Utang-piutang *buwuhan* bisa berlangsung dalam kurun waktu yang panjang sehingga mereka harus selalu siap sewaktu-waktu jika utang tersebut harus dibayarkan. Tradisi *hajatan* dan *buwuhan* sejalan dengan pola hidup konsumtif yang ditandai dengan kebiasaan masyarakat yang merasa 'sukses' untuk berlomba-lomba untuk membangun rumah mewah dan membeli kendaraan.

"Ada kebanggaan tersendiri ketika menjadi orang kaya di daerah ini, bisa membangun rumah bagus atau membeli barang-barang mahal. Padahal uang tersebut disinyalir diperoleh dari anak-anak mereka, yang harus mencari nafkah sebagai buruh migran atau bahkan PSK, di kota-kota besar"

Temuan berikutnya berkenaan dengan kebiasaan buruk yang biasa dilakukan sebagian warga masyarakat Indramayu, khususnya kaum laki-laki terutama di wilayah pesisir Pantura, adalah kebiasaan mencari popularitas dan prestise dengan cara berfoya-foya. Tradisi *saweran* adalah salah satu contohnya. *Saweran* adalah kebiasaan untuk memberikan 'uang tips' kepada penyanyi atau penari di acara-acara hiburan dangdutan, tarlingan, atau bahkan di acara-acara tradisi yang juga diisi dengan acara hiburan atau pasar malam, seperti tradisi *ngarot* atau *nadran*. Semakin terkenal si penyanyi atau si penari, apalagi kalau primadona atau *sri panggung*-nya dan semakin memenuhi hasrat si

Sistem *buwuhan* persis sama dengan sistem *gantangan* yang berkembang di wilayah kabupaten Subang. Sistem *buwuhan* secara tidak langsung pada akhirnya

lelaki, maka uang *sawer* pun akan semakin besar. Semakin besar uang *sawer* yang diberikan dianggap akan mengangkat popularitas dan prestise si lelaki.

Budaya *luruh duit*, tradisi *ngadongdot* dan *ngelanang*, juga budaya *hajatan* dan *buwuhan*, serta *saweran* pada masyarakat Indramayu mengerucut pada kuatnya budaya konsumtif. Sekalipun umumnya miskin, tetapi sebagian masyarakat Indramayu mempunyai gaya hidup konsumtif untuk mengejar prestise sosial. Kenyataan itu dibenarkan oleh Soenarto Rois, pimpinan Yayasan As-Sakienah, yang merupakan seorang penduduk asli Indramayu.

"Konsumtisme sudah menjadi budaya di sini! Maksud saya adalah kebiasaan masyarakat untuk menghabiskan sejumlah uang untuk prestise tertentu. Warga di sini biasa menggelar hiburan secara besar-besaran untuk *hajatan* pernikahan atau sunatan. Penyelenggaraan hiburan ini terkait dengan prestise yang ingin ditunjukkan."

"Kalau yang mampu, hiburannya bisa sampai tujuh hari tujuh malam. Kalau yang biasa-biasa saja, paling satu hari satu malam. Bahkan ada yang terpaksa jual tanah atau bahkan berutang demi *nganggap sandiwara*."

Temuan-temuan lapangan dalam penelitian ini, seperti sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa masalah *trafficking* di Indramayu merupakan masalah yang kronis dan sangat kompleks. Dalam menangani dan menyelesaikan masalah *trafficking*, Pemerintah daerah kabupaten Indramayu sudah mempertimbangkan berbagai kondisi, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal, termasuk dalam sosialisasi kebijakan penghapusan *trafficking*. Nurhayati sebagai Ketua PSW Universitas Wiralodra Indramayu, secara lebih lugas mengatakan:

"Ada ketimpangan struktur sosial yang melatarbelakangi, yakni kemiskinan dan kebodohan. Di Indramayu, diperparah problem kultural. Masalahnya justru dari orang tua atau keluarga. Keluarga miskin terjerangit sindrom ingin cepat kaya, lalu anak perempuan jadi alatnya. Biasanya, atas nama balas budi ke orang tua. Harus ada perubahan mindset."

Sosialisasi penghapusan *trafficking* merupakan bagian dari kebijakan menyeluruh, kebijakan publik, pemerintah daerah dalam upaya menangani dan menyelesaikan masalah *trafficking* di Indramayu. Suatu kebijakan publik, seperti dikatakan Putra (2001: 16), merupakan sesuatu yang dinamis dan kompleks; bukan sesuatu yang kaku dan hanya didominasi oleh para pemegang kekuasaan formal. Oleh karenanya,

kebijakan publik harus dikembalikan pada makna demokratisnya yaitu kebijakan yang berasal dari, oleh, dan untuk publik (rakyat).

Di sisi lain, penghapusan *trafficking* merupakan kegiatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi sehingga seluruh komponen masyarakat harus terlibat dan memainkan perannya secara optimal. Mengingat faktor penyebab *trafficking* yang bersifat multifaktor, maka dalam upaya penghapusan *trafficking* haruslah ditujukan untuk mengatasi faktor penyebab tersebut dengan melakukan kegiatan yang implementatif dan langsung dirasakan manfaatnya.

Proses sosialisasi, yang berlangsung antara pribadi orang per orang, memungkinkan seseorang mempelajari norma-norma yang terjadi di masyarakatnya. Berger dan Luckmann (1975) menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan sosial yang dimiliki masing-masing individu. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi.

SIMPULAN

Trafficking menyangkut kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi budaya yang menjadi bagian dari masyarakat Indramayu. *Trafficking* di Indramayu merupakan masalah yang sangat kompleks. Kemiskinan pada sebagian masyarakat kontradiktif dengan desakan kuat untuk bergaya hidup materialistik, budaya konsumtif, membuat anak dan orang tua rentan dieksploitasi oleh pelaku *trafficking*. Selain itu, *trafficking* terjadi karena adanya diskriminasi gender; praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia seperti luruh duit, tingkat pendidikan yang rendah dan putus sekolah karena pandangan anak gadis tidak perlu pendidikan tinggi, serta pernikahan dini dan tingkat perceraian yang tinggi.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain; seperti benang yang sangat kusut dan sulit diurai. Kemiskinan yang dialami sebagian penduduk Indramayu, terutama kelompok petani di pedesaan membuat kesempatan mereka untuk memperoleh akses pendidikan menjadi sangat terbatas. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada munculnya bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak dan perempuan, eksploitasi

seksual komersial anak dan perempuan, serta perdagangan anak dan perempuan.

Selain itu, budaya patriaki masih cukup kuat di dalam kebanyakan budaya di Indonesia. Anak gadis dan perempuan kurang mendapat penghargaan tinggi di mana dalam situasi krisis anak gadis dan perempuan yang pertama dikorbankan. Misalnya anak perempuan yang pertama kali akan diberhentikan dari sekolah apabila keluarga mengalami krisis ekonomi atau krisis pangan. Faktor penyebabnya lainnya adalah adanya diskriminasi jender dalam keluarga dan masyarakat. Banyak anak gadis dan perempuan yang berupaya melarikan diri dari ketidakadilan jender, beban kerja yang terlalu berat di rumah, atau mereka dipaksa kawin oleh orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika Kabupaten Indramayu, 2014. Indramayu Dalam Angka Tahun 2014
- Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, 2014. Jawa Barat Dalam Angka 2014
- Basrowi dan Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Mikro. Surabaya: Insan Cendikia.
- Creswell, John W., 1998. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition. New York: sage Publications Inc. USA
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 2009. Handbook of Qualitative Research, London: Sage Publication
- Devi Rahayu. 2011. Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan.
- Dian Noeswantari, dkk. 2011 Mencegah *Trafficking* melalui Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Surabaya,
- Imam Rosadi. 2010. "Konsekuensi Migrasi Internasional terhadap Relasi Gender (Studi tentang buruh migran internasional yang pulang dari bekerja di luar negeri di Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat)". Disertasi Universitas Indonesia.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Liliweri, Alo. 2009. Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Maxwell, Joseph A. 1996. Qualitative Research Design: An Introduction Approach. London: Sage Publication.
- Mulyana, Deddy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- _____. 2007. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurul Herawati. 2010. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan.
- Patrick Sakdapolrak 2002. Perlindungan Buruh Migran Perempuan Kebijakan di Negara-negara Pengirim dan Penerima.
- Poloma, Margaret M., 2000. Sosiologi Kontemporer (terj.). Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi/Puslitfo BNP2TKI, 2012. Laporan Tahunan Kondisi dan Perkembangan Pekerja Migran.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. 2009. Teori Sosiologi. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Rizqika Tri Utami dan Sukamdi (2011) yang berjudul "Pengambilan Keputusan Bermigrasi Pekerja Migran Perempuan (Kasus di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo)
- Sendjaya, Sasa Djuarsa, 1994. Teori Komunikasi, Jakarta: Universitas Terbuka
- Soekanto, Soerjono. 1997. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi ke-4. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 1978. Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: Petaling Jaya
- Susilaningsih dan Agus M. Nadjib, 2004. Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam.
- Tim Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). 2006 "Bergantung pada Tali Rapuh" Studi tentang Situasi Rentan Yang Dihadapi Buruh migran Perempuan dari Kabupaten Sumenep-Madura, Malang, dan Bojonegoro, Jawa Timur.
- Tri Susilowati. 2011. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Implikasi Budaya Populer terhadap Kebijakan Industri Kreatif Indonesia, Studi Kasus: Pengaruh *Hallyu* terhadap Indonesia

Seny Soniaty

Alumnus Hubungan Internasional FISIP UNPAD

seny.soniaty@gmail.com

Widyastuti

Perencanaan Kepariwisata Institut Teknologi Bandung

Rahmad Efendi

Rahmad Efendi, Komunitas Riset Antronesia

Seny Soniaty,

Widyastuti,

Abstrak

Tulisan ini merupakan kajian tentang tantangan dan implikasi komodifikasi budaya populer dalam industri kreatif di Korea Selatan dan Indonesia. Komodifikasi budaya populer ini terkandung dalam produk industri kreatif. Ekonomi kreatif menjadi salah satu prioritas Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan industri kreatif menjadi sangat krusial di tengah harapan yang tinggi akan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Budaya populer bagaimanapun juga telah menjadi media bahkan alat dari pemasaran produk industri ini. Korea Selatan, melalui gelombang *Hallyu*, berhasil membentuk suatu citra tentang dirinya yang berakibat pada digemarinya produk mereka. Melalui dunia hiburan yang ditawarkan, gelombang *Hallyu* berhasil memasuki pasar dunia internasional, termasuk pasar Indonesia. Korea Selatan membentuk citra budaya “Korea” seperti yang digambarkan dalam setiap produknya. Indonesia sebagai negara multikultural, tidak dapat serta merta meniru apa yang dilakukan Korea Selatan melalui citra “Korea”. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia di tengah keinginan untuk memasarkan produk ekonomi kreatif ke kancah internasional melalui “Indonesia”-nya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan survei online sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana komodifikasi budaya pada industri ekonomi kreatif mampu membangun citra dan penguasaan terhadap ekonomi dan menunjukkan bahwa Indonesia harus membangun konsep “Indonesia” yang dapat merepresentasikan Indonesia yang sebenarnya. Penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan industri ekonomi kreatif Indonesia yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: kebijakan, budaya, komodifikasi, industri, kreatif, *Hallyu*, Indonesia

PENDAHULUAN

Hallyu merupakan sebutan dari masyarakat di luar bangsa Korea Selatan terhadap fenomena pergerakan dan pertumbuhan yang signifikan dari industri kreatif Korea (dalam artikel ini merujuk pada Korea Selatan) yang menyebar ke seluruh dunia.

Dalam studi sejarah perkembangan *Hallyu*, Lee (2013) menemukan adanya tiga tahap perkembangan kebijakan terkait budaya populer di Korea, yaitu tahap kontrol pemerintah (1960-1993), tahap industrialisasi dan penyebaran budaya pop korea (1993-2003), dan tahap ekspansi budaya sebagai kebijakan strategis Korea (2003-sekarang). *Hallyu* sendiri gerakannya dimulai dari tahap kedua dari perkembangan kebijakan kebudayaan di Korea. Setelah melihat potensi dari *Hallyu*, pemerintah Korea Selatan mengembangkan skema jangka panjang *Hallyu*, yang dibagi dalam tiga tahap, yakni yaitu 1) *Hallyu 1.0* (1995-2005), tersebar di Asia Timur, berorientasi pada penyebaran drama dan film (*produk oriented*) dengan menggunakan DVD dan *Broadcasting*. 2) *Hallyu 2.0* (2006-sekarang), sebaran terutama di Asia, Amerika Utara dan Eropa. Mengedepankan Idol (*k-stars-oriented*), melalui internet dan penampilan *on-site*. 3) *Hallyu 3.0*. (masa depan), akan disebar keseluruh dunia. Diversifikasi genre (*stars & creator brand oriented*), dengan menggunakan *cross media*.

Tabel 1. The Past, Present and Future of *Hallyu* (Kim Bok-rae, 2015).

	<i>Hallyu 1.0</i>	<i>Hallyu 2.0</i>	<i>Hallyu 3.0</i>
<i>Period</i>	1995~2005	2006~to the present	Foreseeable future
<i>Diffusion Area</i>	Asia (China, Taiwan and Japan)	Asia, North America and Europe	All over the world
<i>Target</i>	Media contents (K-dramas and movies) (Product-oriented)	K-pop idols (K-stars-oriented)	Genre-diversification (Stars & Creator brandoriented)
<i>Cases</i>	"What is Love? (1992)," "14" Winter Sonata (2002), "My Sassy Girl (2001)" "Jewel in the Palace (2003-2004)," HOT (band), Boa (singer).	Girls' Generation, Kara, Shinee, 2PM, and Big Bang (band)	
<i>Early Distribution</i>	Overseas Korean society	Online circulation (YouTube)	SNS
<i>Media</i>	Video, CD, spot broad casting	Internet, on-site performance	Cross-media
<i>Durability</i>	From several months to years (Winter Sonata)	For several years (Girls' Generation)	For several decades
<i>Directivity</i>	Turning the eyes of the world upon Korea (Tourist industry-centerd)	Overseas expansion and performance	To the world beyond Korea (Regarded as mainstream)

Kesuksesan *Hallyu* menunjukkan kemampuan pelaku industry kreatif dan pemerintah Korea dalam memanfaatkan arus globalisasi serta perkembangan media digital dan internet. Dua hal ini telah membantu penyebaran produk-produk budaya pop korea ke seluruh dunia. Globalisasi sebagai *platform* kerjasama internasional, termasuk keterbukaan informasi, telah membuka ruang untuk masuknya budaya Korea di berbagai. Kesempatan itu dimanfaatkan secara optimal oleh Korea dengan memproduksi produk budaya pop dalam bentuk media digital sehingga lebih mudah didistribusikan melalui *broadcasting* dan internet.

Meski demikian, globalisasi dan media digital hanyalah sarana yang dimanfaatkan dalam proses pemasaran. Daya tarik utama produk korea sesungguhnya bergantung pada kualitas dan keunikan konten dari produk-produk tersebut. Produk industri kreatif Korea Selatan yang populer dalam gerbong *Hallyu* antara lain berupa musik pop, idol, drama, film, fashion, kuliner, dan komik. Do (2012) memetakan bahwa produk

budaya pop korea memiliki beberapa ciri khas yang terkandung di dalam kontennya, yakni dapat dilihat dari beberapa karakteristik berikut. Pertama, di dalam produk musik, terlihat jelas dominasi K-pop dan grup idol yang menguatamakan aliran RnB dan music elektro, diiringi oleh penampilan anggota band yang tampan dan cantik, dengan tarian dan kostum yang menawan. Kemudian musik korea selatan juga banyak berkolaborasi dengan pemusik internasional sehingga memiliki ciri music internasional yang kuat. Sementara dalam drama dan film, konten yang menonjol adalah nilai-nilai konfusianisme, kemanusiaan, kekeluargaan dan romantisme. Produk film dan drama korea menekankan pada *story line* yang sederhana, namun memiliki kekuatan emosi yang dalam. Mereka cenderung menghindari konten-konten provokatif dan seksualitas. Sebab itu, produk film dan drama korea mudah diterima diberbagai Negara, bahkan di negara-negara Arab yang mayoritas ketat dalam kebijakan sensor.

Hallyu terwujud dari kerjasama multipihak. Terdapat beberapa aktor utama yang terlibat dalam proses penyebaran *Hallyu*, diantaranya; pemerintah, pihak swasta (*chaebol*) dan grup idola. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pengawas dan pendukung penyebaran *Hallyu*. Badan pemerintah yang bertanggung jawab atas hal ini adalah Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan atau *Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST)*. Para konglomerat berperan sebagai pihak yang mensponsori kegiatan-kegiatan dalam penyebaran kebudayaan. Seperti agensi musik yang menjadi pihak aktif dalam kegiatan industri musik dimulai dari penyelenggaraan audisi vokal dan tari, proses pelatihan hingga debut sebagai grup idola atau penyanyi solo. Para grup idola, penyanyi solo, aktor dan aktris juga termasuk ke dalam aktor yang bertanggung jawab dalam proses penyebaran *Hallyu*. Mereka adalah aktor yang berdiri di posisi paling depan sebagai wajah *Hallyu*. Pada dasarnya mereka memiliki peran utama dalam ekspansi kebudayaan Korea Selatan ke lingkungan internasional (Sari 2013).

Pada tahap ekspansi budaya populer Korea secara global (1993-sekarang), pemerintah Korea mulai menjadikan ekspansi budaya pop Korea sebagai kebijakan politik luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan *soft-power* Korea dalam hubungan internasional. *Soft power* diartikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui daya tarik daripada koersi atau bayaran. *Soft power* lahir dari ketertarikan akan budaya, politik yang ideal dan kebijakan suatu negara (Nye, 2004).

Pada tahap ekspansi ini, Sari (2013) mengemukakan bahwa pada dasarnya *Hallyu* membawa empat misi kebudayaan, diantaranya; pembentukan citra positif, mengubah perspektif atau pandangan negara lain, menggalang dukungan atas suatu kebijakan luar negeri, membentuk penilaian baik terhadap pemimpin atau dukungan domestik terhadap pemerintah. Misi-misi tersebut yang menjadi faktor penyebab diterimanya kebudayaan Korea oleh masyarakat internasional. *Hallyu* merupakan bentuk komunikasi bukan nasionalisme, analisisnya adalah popularitas yang diraih *Hallyu* di lingkungan internasional bukan ancaman terhadap pergeseran nilai-nilai nasionalisme di negara-negara tersebut karena *Hallyu* merupakan bentuk komunikasi penyampaian ide perdamaian yang dipromosikan oleh Korea terhadap negara-negara lain.

Dalam penyebaran *hallyu* secara global, Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya menerima dengan baik berbagai produk kebudayaan pop Korea. *Hallyu* mulai muncul di Indonesia sejak awal tahun 2000 dengan ditayangkannya drama-drama Korea di TV nasional, seiring dengan menjamurnya penjualan barang-barang buatan Korea. Setelah itu diikuti dengan *booming*-nya Kpop seiring dengan penjualan produk fashion, hingga kuliner. Lebih jauh, pada saat ini budaya pop Korea semakin populer dengan bermunculannya berbagai *fan base* idol atau grup band, yang pada akhirnya memicu pelaksanaan konser-konser artis dan grup Korea di Indonesia. Penyebaran budaya pop Korea di Indonesia merupakan suatu proses interaksi antar budaya/*intercultural*. Bukti kesuksesan *Hallyu* di Indonesia juga dapat dilihat melalui penyelenggaraan eksibisi *Korea EXPO* 2013 di Jakarta dan juga festival-festival kebudayaan lainnya seperti; *Korean Film Festival* 2013 di Jakarta, festival *K-Pop M Countdown Halo Indonesia* 2013, *Music Bank live in Jakarta* 2013 dan sebagainya (Sari 2012).

Saat ini, industri kreatif Indonesia sedang berada pada fase pengembangan. Pemerintah Indonesia, melalui BEKRAF dan kementerian/lembaga (K/L) lainnya berupaya untuk menumbuhkan semangat dan daya kreativitas masyarakat Indonesia terutama kalangan pemuda.

Industri kreatif Indonesia mulai benar-benar dilirik dan diperhatikan dengan seksama oleh Pemerintah adalah sejak tahun 2006. Pada tahun 2006, Pemerintah mulai membuka pemikiran mengenai pentingnya keberadaan industri kreatif di Indonesia. Indonesia Design Power adalah pilot project Pemerintah terkait dengan industri kreatif. Sejak saat itu, industri kreatif Indonesia mulai dikenal dan mulai memainkan peranannya dalam perekonomian nasional.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai program bertemakan ekonomi kreatif dan industri kreatif telah menginspirasi banyak orang, terutama yang berasal dari kalangan pemuda untuk berkreasi dan berkarya serta menjadi wirausaha. Sejak Pemerintah mengenalkan ekonomi kreatif dan industri kreatif, bermunculan para pengusaha muda yang mengembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai usahanya.

Apa yang dilakukan Korea melalui *Hallyu*-nya, secara langsung atau tidak telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan industri kreatif nasional. Di satu sisi, *Hallyu* menginspirasi para pemuda Indonesia untuk lebih kreatif dan imajinatif dalam berkarya dan menonjolkan sisi yang paling memiliki nilai jual tinggi. Namun di sisi lain, masuknya *Hallyu* ke Indonesia telah mengikis sedikit demi sedikit rasa kebanggaan dan kecintaan akan produk dalam negeri dan budaya Indonesia. Dualisme pengaruh ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dan para stakeholder dalam mengembangkan industri kreatif Indonesia.

Oleh sebab itu, tentu menarik untuk melihat bagaimana *Hallyu* yang membawa budaya pop Korea berdampak pada pandangan masyarakat Indonesia, terutama para pemuda, baik di tingkat pemikiran maupun di tingkat perilaku, mengenai budaya pop Korea itu sendiri dan industri industri kreatif di Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari penelitian pada akhirnya ingin melihat bagaimana pengaruh budaya pop Korea terhadap masyarakat dan perkembangan Industri kreatif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan survei online yang didukung oleh studi literatur. Studi literatur dilakukan pada berbagai data-data pemerintah dan kajian-kajian akademik terkait dengan perkembangan budaya pop Korea dan penyebaran melalui *Hallyu*, pengaruh budaya pop Korea di Indonesia dan tentang pengembangan Industri kreatif di Indonesia. Studi literatur dalam penelitian ini banyak menggunakan material yang diakses melalui internet, dan sebagian ada yang bersumber dari material cetak seperti buku dan jurnal.

Survei online berusaha mengumpulkan pandangan dari masyarakat terkait pendapat mereka tentang budaya pop Korea dan pandangannya tentang pengembangan industri kreatif di Indonesia. Survei ini menggunakan *non-probability sampling*, khususnya metode *convenience*/aksidental sebagai teknik pengambilan sampel. Ali (2011: 115), menjelaskan bahwa dalam

metode penyampelan *convenience*, sampel diambil tidak berdasarkan bingkai sampel yang memuat seluruh daftar populasi, melainkan subyek mana saja yang bisa dijadikan sampel, atau dalam kata lain, penyampelan dilakukan lebih mudah. Dengan teknik ini, kami berusaha memperoleh sampel dari elemen-elemen yang paling mudah dihubungi, dikenal, dan mau bekerja sama. Para responden yang terlibat memang memilih untuk berpartisipasi secara sukarela atas kemauan sendiri karena ketertarikan terhadap isu penelitian, yakni tentang *Hallyu* dan gaya hidup. Sebab itu, para responden ini dapat juga disebut sebagai “*self-selected respondent*.”

Unit analisis penelitian ini terdiri dari data literatur dan data yang didapat lewat survei online. Analisa data literatur menggunakan studi komparasi dan *crosscheck* terkait isu-isu yang diangkat. Sementara itu, data kuantitatif hasil survei online dianalisa menggunakan software SPSS 17 dan Microsoft Excel. Tahap awal, data disusun berdasarkan kategori demografi responden. Kemudian dianalisa tingkat konsumsi produk budaya pop Korea berdasarkan kategori-kategori lain. Selanjutnya dianalisa pandangan dan pendapat responden terkait budaya pop Korea dan Industri kreatif Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi *Hallyu* Terhadap Masyarakat Indonesia a. Pengaruh Pada Minat Terhadap Budaya Pop Korea

Untuk melihat bagaimana pengaruh paparan *Hallyu* pada masyarakat Indonesia, kami melakukan survei online, dengan menggunakan metode *convenient*. Responden terlibat dalam survei ini berjumlah 244 orang, mayoritas adalah perempuan (72.8%), tiga banding satu dengan jumlah responden laki-laki (27.2 %). Mereka masuk dalam kelompok usia muda di kisaran usia 16-30 tahun, paling banyak di rentang usia 21-25 tahun (39.3 %), dan 26-30 tahun (38.8%), lalu diikuti oleh usia 16-20 tahun (21.9%). Responden terbesar berasal dari kalangan Mahasiswa (43.3%), kemudian Karyawan Swasta (26.3%), Wiraswasta (7.1%), PNS (5.8%), Tidak Bekerja (3.6%), Pelajar (3.1%), Ibu Rumah Tangga (3.1%), Honorer (2.2%), *Freelancer* (1.8%) dan Lainnya (3.4%).

Secara sebaran wilayah, para responden paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat (62.5%), sisanya berasal dari DKI Jakarta (12.1%), Jawa Timur (6.3%), DI Yogyakarta (4.9%), Jawa Tengah (3.6%) dan Provinsi Banten (3.1 %). Disamping itu, juga terdapat responden dari luar pulau Jawa sebanyak (7.6%) yang tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa

Tenggara. Kemudian responden dapat dibagi atas kategori yang tinggal di Kota Besar dan daerah. Sebanyak 51.3% responden tinggal di kota besar (Bandung dan Jakarta), dan 48.7% responden tinggal di daerah (antara lain Yogyakarta, Cianjur, Bogor, Tangerang, Semarang, Banyumas, Banda Aceh, Palangkaraya, Makasar, Mataram, dan lainnya).

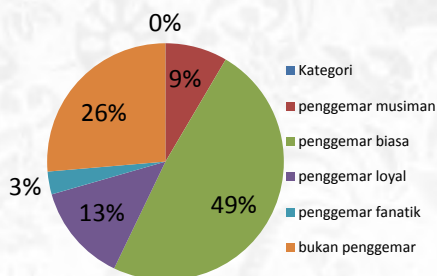
Secara umum, para responden telah mengenal berbagai produk budaya pop Korea. Masifnya paparan informasi tentang Korea memiliki korelasi dengan minat responden terhadap budaya pop Korea. Hanya sedikit dari responden yang menyatakan tidak tertarik terhadap budaya Korea, yakni hanya 6.7% dari total responden. Mayoritas responden tertarik dengan budaya pop Korea dalam tiga tingkatan, yakni biasa saja (31.25%), tertarik (38.39%), dan sangat tertarik (23.66%). Adapun produk-produk budaya yang paling disukai oleh responden adalah drama, musik, film, *reality show*, dan kuliner.

Minat itu sejalan dengan penggunaan produk Korea yang mencapai 62% dari responden. Para peminat itu menggunakan produk korea dalam berbagai kategori dan lewat berbagai media. Dimulai dari yang tertinggi; 1) Konsumsi produk digital Korea melalui internet (54.46%). Produk digital yang dikonsumsi antara lain seperti drama, film, musik, gambar, berita dan artikel. 2) Konsumsi produk Kuliner Korea (35.27%). 3) Konsumsi media cetak tentang Korea (20.09%). 4) Belanja pakaian dan fashion Korea. 5) Biaya channel tv berlangganan khusus tentang Korea (12.95%). 6) Belanja aksesoris fashion Korea (11.61%).

Dari para pengguna itu, 11% diantaranya merasa bangga menggunakan produk Korea. Dari pengguna produk Korea, 95% memiliki artis/aktor yang dijadikan idol, dan 63% di antaranya mengikuti satu atau beberapa gaya hidup dari idol tersebut. Beberapa poin tersebut cukup mengejutkan bahwa, sebagian besar responden menggunakan produk Korea bukan karena bangga tapi lebih kepada pengaruh dari gaya hidup idol yang mereka sukai. Di samping itu 24% dari responden pernah memasarkan produk Korea. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa produk Korea merupakan komoditas dengan pasar yang bagus.

Berdasarkan penilaian terhadap diri mereka sendiri, terkait minat terhadap produk budaya pop Korea, sekitar 30.10% responden menilai dirinya bukan penggemar budaya pop Korea. Sementara mayoritas responden, yakni 73.66%, merasa diri mereka penggemar, yang terbagi dalam empat kategori sebagai berikut, Penggemar Biasa (48.66%), Penggemar Musiman

(8.18%), Penggemar Loyal (7.73%), dan Penggemar Fanatik (2.45%).



Gambar 1. Perbandingan Jumlah Kategori Penggemar

Para responden bukan penggemar ini sebenarnya cukup mengenal budaya pop Korea, tapi mereka mengaku tidak tertarik dan merasa bukan penggemar. Kelompok ini tidak melihat adanya pengaruh positif yang signifikan dari aktivitas mengonsumsi produk Korea bagi diri mereka, dan juga terhadap masyarakat. Sebaliknya mereka melihat pengaruh budaya pop Korea cenderung menimbulkan dampak negatif.

Dari kategori penggemar, yang memiliki perbedaan besar adalah *penggemar musiman*. Kategori ini menyukai produk budaya pop Korea yang sedang hits, misalnya musik, artis, drama, dsb. Saat produk itu hits, penggemar musiman ini aktif mengikuti info terbaru dan mengeluarkan banyak dana untuk mengakses produk yang hits tersebut. Namun jika masa waktu hits produk tersebut telah lewat, atau mereka sudah bosan duluan, tingkat konsumsinya menurun bahkan bisa berhenti. Satu hal lagi, mereka tidak terlibat *fan base* jangka panjang terhadap suatu produk idola tertentu.

Sementara itu *penggemar biasa* menyukai satu atau lebih produk budaya pop Korea, namun mereka mengonsumsi hanya sebagai hiburan semata. Bagi mereka menggunakan produk Korea tidak menimbulkan rasa bangga yang berlebihan, hanya biasa saja. Sangat jarang juga dari mereka yang mau menjadi *brand ambassador* produk Korea. Meski demikian, aktivitas menjual produk Korea cukup banyak dilakukan oleh kategori ini, namun itu karena berdasarkan peluang bisnis saja. Mereka mengagumi satu atau lebih artis/aktor Korea sebagai idol, namun hanya sekedar suka karena tertarik dengan penampilan, dan tidak terlalu mengikuti gaya idol tersebut. Mereka juga mudah berpindah menyukai idol yang lain.

Kategori *penggemar loyal* merupakan yang paling konsisten dalam mengikuti perkembangan budaya pop Korea. Mereka menyukai produk pop Korea secara

keseluruhan, tidak terlalu membedakan dan memilih produk tertentu sebagai yang disukai. Pengetahuan mereka tentang produk Korea sangat baik. Mereka tidak ragu untuk menunjukkan kebanggaannya terhadap produk budaya pop Korea. Sebab itu dari kategori ini banyak yang terlibat dalam komunitas terkait Korea, menjadi *ambassador* produk, dan berjualan produk budaya pop Korea.

Sedangkan Penggemar fanatik tidak begitu suka dalam aktivitas pemasaran produk Korea. Mereka cenderung lebih suka menikmati sendiri, terutama mengoleksi produk-produk yang mereka sukai. Kategori ini juga lebih selektif terhadap produk Korea yang mereka sukai. Mereka hanya menyukai beberapa produk, namun dengan konsistensi yang tinggi. Dalam hal ini termasuk juga saat mereka menyukai artis/aktor Korea. Mereka mengikuti secara konsisten perkembangan info tentang idolnya tersebut, dan lebih susah atau butuh waktu yang lebih lama untuk pindah menyukai idol lain.

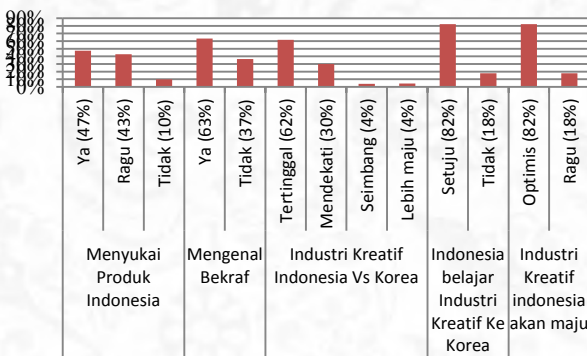
b. Pengaruh Terhadap Pandangan Terkait Industri Kreatif Korea dan Indonesia

Dari hasil survei, terkait *Top of Mind* responden tentang Korea, yakni satu kata yang pertama mereka ingat saat mendengar kata “Korea”, terdapat lima kata yang paling dominan muncul, dimulai dari “Kpop (Korean Pop),” lalu “Drama,” “Boy Band,” “Oppa (kakak laki-laki),” “Film” dan “Operasi Plastik.” Kemudian, dari *Top of Mind* responden, lebih banyak muncul kesan positif terhadap Korea, antara lain seperti “keren, seru, populer, mengagumkan, sejuk, dan cantik.” Hanya sedikit kesan negatif yang muncul, misalnya kata “*alay* dan *banci*.”

Selain itu, dari alasan responden menyukai produk budaya pop Korea, semakin banyak muncul penilaian positif dari produk Korea. Misalnya responden suka terhadap drama karena durasinya singkat, apa yang ditampilkan kreatif, dapat menyentuh hati, romantis, sarat nilai kekeluargaan, memberikan banyak pengetahuan, dan bisa direlasikan nilai-nilai ketimuran yang ada di Indonesia. Kemudian responden menyukai musiknya karena *easy listening*, maknanya dalam, penyajiannya inovatif. Lalu *reality show* dinilai yang sangat menghibur, selalu segar, sangat berbeda dengan produk lokal Indonesia yang terkesan memaksa dan menjenuhkan.

Lebih lanjut, saat membandingkan dengan produk industri kreatif Indonesia, sebanyak 63% responden menyatakan bahwa perkembangan industri industri kreatif Indonesia tertinggal jauh dari industri industri kreatif Korea Selatan. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat menganggap bahwa produk Indonesia kalah bersaing dengan produk Korea.

Masalah kualitas produk ini juga menjadi alasan bagi 53% responden yang menyatakan ragu atau tidak suka pada produk industri kreatif Indonesia. Dalam hal ini, ada *mindset* yang kuat yang ditunjukkan sebagian besar responden, bahwa Korea adalah negara yang jauh lebih maju dari Indonesia, termasuk budaya pop yang merupakan produk industri kreatifnya. Mayoritas responden menilai bahwa Indonesia perlu belajar banyak dari negeri Ginseng tersebut untuk memajukan sektor industri kreatif.



Gambar 2. Pandangan Responden tentang Industri Kreatif

Sebagian besar masyarakat Indonesia berpendapat Pemerintah dapat meniru bahkan mengadopsi kebijakan industri kreatif Korea Selatan untuk kemajuan industri kreatif nasional. Terdapat 82% responden yang menyatakan hal tersebut. Alasan mereka adalah bahwa Indonesia memiliki potensi industri kreatif yang besar baik dari segi SDM maupun pasar. Jika benar-benar dimanfaatkan, akan sangat menguntungkan Indonesia itu sendiri. Korea Selatan bisa dikatakan berhasil dalam menyebarkan dan menanamkan nilai budaya pop Korea. Keberhasilan ini tentunya merupakan kerjasama yang solid antara pelaku industri kreatif dan juga pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Meskipun masyarakat Indonesia beranggapan bahwa industri kreatif Indonesia jauh tertinggal dari industri kreatif Korea, namun mereka menaruh harapan yang besar akan kemajuan industri industri kreatif Indonesia. Sebagian besar masyarakat optimis bahwa industri industri kreatif Indonesia akan maju melebihi Korea. Sebanyak 82% responden menyatakan optimis bahwa industri industri kreatif Indonesia akan maju seperti halnya industri kreatif Korea. Indonesia memiliki potensi yang besar baik dari segi sumber daya manusia, kreativitas, sumber daya alam. Dengan adanya perpaduan yang baik dan tepat antara sumber daya alam, sumber daya manusia, kreativitas dan kebijakan Pemerintah, apa yang dicita-citakan tentang kemajuan industri kreatif Indonesia dapat terwujud.

Implikasi *Hallyu* Terhadap Kebijakan Industri Kreatif Indonesia

a. Budaya Populer sebagai bagian dari Industri Kreatif

Globalisasi telah mengantarkan dunia pada kondisi dimana budaya menjadi salah satu komoditas ekonomi yang bernilai jual tinggi. Persaingan ekonomi yang tinggi dan kebutuhan akan ekonomi yang semakin tinggi, telah mengantarkan negara-negara untuk lebih kreatif dalam mencari cara untuk mengembangkan ekonomi mereka. Budaya menjadi salah satu obyek yang dijadikan komoditas yang pada praktiknya ternyata memberikan sumbangsih ekonomi yang begitu besar terhadap perekonomian nasional mereka.

Budaya populer diidentikan dengan sesuatu yang digemari oleh khalayak ramai/masyarakat kebanyakan. Dalam budaya populer ada indikasi komersialisasi budaya atau lebih dikenal dengan istilah komodifikasi budaya. Budaya dijadikan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Nilai yang terdapat dalam budaya tersebut menjadi nilai jual.

Industri kreatif mulai dikenal dan berkembang di dunia pada era tahun 1990-an akhir. Berakhirnya perang dingin berdampak pada pergeseran paradigma ekonomi dunia menjadi berorientasi pada kreativitas. Negara-negara maju, terutama Barat, telah mengembangkan ekonomi kreatif bukan sebagai pendukung ekonomi utama namun telah menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi utama. Hal ini dilakukan karena ekonomi kreatif ternyata telah berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Kontribusi yang diberikan cukup signifikan untuk ukuran sektor ekonomi yang awalnya sama sekali tidak dilirik.

Kreativitas menjadi hal utama yang harus dimiliki dalam pengembangan industri kreatif ini. Kreativitas mengantarkan negara-negara untuk mengomodifikasi apapun yang mereka miliki. Budaya merupakan salah satu obyek yang terkena komodifikasi budaya dijadikan komoditas ekonomi yang ternyata dalam praktiknya sangat bernilai jual tinggi. Dari situ, muncul dan berkembanglah apa yang disebut budaya populer. Budaya yang tercipta untuk memenuhi hasrat menguasai pasar. Pasar menjadi tujuan, sehingga budaya yang diciptakan pun disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Pada akhirnya, budaya populer menjauhkan budaya tersebut dari makna sesungguhnya, namun disisi lain menjadi kekuatan ekonomi suatu negara.

b. Pengaruh *Hallyu Wave* terhadap industri Kreatif Indonesia

Hallyu Wave atau dikenal dengan juga Korean Wave merujuk pada upaya pemerintah Korea dalam hal ini Korea Selatan dalam menyebarkan dan memasarkan produk budaya populer mereka. *Hallyu* sendiri pada awal kemunculannya merupakan istilah dari China Youth Daily pada tahun 1999 untuk menggambarkan pertumbuhan popularitas dari dunia hiburan dan budaya populer Korea Selatan. Penggunaan istilah *Hallyu* ini ternyata meluas tidak hanya oleh China Youth Daily tapi juga digunakan oleh semua kalangan di dunia terutama yang memiliki perhatian lebih terhadap perkembangan budaya populer Korea.

Menurut Kim Bok-rae (2015), istilah *Hallyu* berasal dari bahasa Mandarin yang merujuk pada sebuah pergerakan gelombang besar dari *simplistic politico-economic ideologies* ke paradigma perbedaan budaya/peradaban pada periode perang pasca perang dingin. *Hallyu wave* bukanlah sebuah agen subaltern dari modernitas namun sebuah agen utama dari budaya populer Asia Timur yang terhubung paralel dengan orientasi budaya populer Barat.

Sejak pertengahan tahun 1990-an, berbagai negara di Asia termasuk Jepang, China dan Vietnam telah mengadopsi budaya populer Korea dan berbagai genre budaya Korea termasuk program televisi dan film (Dal Yong Jin. 2012). Melalui musik populer (K-Pop) dan permainan online (game online), Korea berhasil melakukan penetrasi pasar Eropa dan Amerika Utara. Pertumbuhan industri kreatif Korea yang tidak terduga telah mendatangkan keuntungan besar bagi Korea dimana industri ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Korea (Dal Yong Jin, 2012).

Hallyu wave mengalami 3 fase gelombang yaitu *Hallyu 1.0*, *Hallyu 2.0* dan *Hallyu 3.0*. Pada masing-masing fase tersebut, Korea selalu menampilkan agenda yang berbeda. Terdapat cara dan pendekatan yang berbeda yang dilakukan oleh Korea melalui *Hallyu wave* dalam penyebaran budaya populer mereka. Mereka sangat memanfaatkan perkembangan zaman untuk menyebarkan dan memasarkan produk budaya populer mereka. Teknologi informasi adalah alat penyebaran yang digunakan mereka. Pengemasan yang kreatif dan penggunaan teknologi menjadikan budaya populer mereka cepat untuk diterima oleh masyarakat dunia.

Produk budaya populer Korea yang pertama kali disebarkan/dipasarkan adalah produk hiburan berupa Drama. Drama menjadi titik awal pengenalan budaya populer Korea ke seluruh dunia. Sejak pertama kali

disebarkan Drama mendapat perhatian dari masyarakat dari berbagai negara. Melalui Drama, Korea menyampaikan pesan untuk menggunakan produk budaya mereka. Mereka sedemikian rupa membentuk pola pikir (*mind set*) para penonton bahwa yang Korea itu adalah yang seperti yang digambarkan dalam Drama. Fashionable, cantik, berbudi luhur, pekerja keras, modern, berteknologi tinggi adalah pesan-pesan yang disampaikan dalam Drama-drama yang dibuat oleh Korea atau dikenal dengan istilah K-Drama.

K-Drama dapat dikatakan berhasil memasarkan produk-produk Korea ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal-hal yang berbau Korea menjadi trendsetter di dunia termasuk di Indonesia. Masyarakat sangat menggandrungi produk Korea terutama kosmetik, fesyen (gaya busana dan aksesorisnya), musik, kuliner, dan banyak lagi. Bahkan banyak yang akhirnya belajar bahasa Korea dan budaya Korea itu sendiri serta menjadikan Korea sebagai destinasi wisata luar negeri mereka.

Sebuah gelombang budaya, seperti yang dijelaskan oleh Mariani (2008), menyebabkan peningkatan konsumsi produk, minat terhadap budaya, dan kunjungan wisata ke negara asal budaya tersebut. Rasa keingintahuan terhadap Korea menjadi pasar yang sangat besar bagi berbagai produk buatan Korea.

c. Kebijakan industri kreatif Indonesia

Ekonomi kreatif telah menjadi paradigma baru dalam perekonomian dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, orientasi ekonomi dunia telah bergeser ke ekonomi kreatif. Negara-negara maju, terutama Barat, telah mengembangkan ekonomi kreatif bukan sebagai pendukung ekonomi utama namun telah menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar ekonomi utama. Hal ini dilakukan karena ekonomi kreatif ternyata telah berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Kontribusi yang diberikan cukup signifikan untuk ukuran sektor ekonomi yang awalnya sama sekali tidak dilirik. Apa yang dilakukan negara-negara maju di dunia Barat ini diikuti oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Industri kreatif atau ekonomi kreatif telah menjadi perhatian Pemerintah Indonesia sejak tahun 1984 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yaitu pada Bab VI pasal 17 yang menyatakan bahwa desain produk industri mendapat perlindungan hukum. Pada tahun 2000, diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain industri dalam Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pada tahun 2001 diterbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 20/MPP/Kep/I/2001 tentang Pembentukan Dewan Desain Nasional/Pusat Desain Nasional (PDN). Dalam kurun waktu 2001-2006, Pusat Desain Nasional telah memilih 532 desain produk terbaik Indonesia.

Pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia dapat dikatakan baru benar-benar menaruh perhatian lebih pada sektor ekonomi kreatif dan industri kreatif. Melalui Departemen Perdagangan, Pemerintah membuat program Indonesia Design Power 2006-2010 yang merupakan suatu bentuk pengembangan Koridor Ekonomi Kreatif Indonesia. Program ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya usaha untuk meningkatkan nilai tambah produk Indonesia agar berdaya saing di pasar domestik maupun internasional, belum terpadunya kegiatan yang terkait dengan pembinaan UKM serta belum adanya koordinasi lintas departemen /kementerian yang baik sehingga belum dapat dicapai efektivitas, Industri kreatif dan desain belum berperan sebagai sumber perekonomian yang dapat diandalkan karena belum terciptanya lingkungan yang kondusif seperti kurangnya pembinaan dan kurangnya kebijakan-kebijakan yang menunjang, belum optimalnya eksplorasi tenaga kerja sektor informal berbasis budaya yang sebetulnya melimpah di masyarakat, dan kurangnya pemahaman *brand* dan inovasi sehingga hanya mengeksploitasi alam tanpa memberikan nilai tambah sehingga membahayakan sumber daya alam yang terbatas. Melalui program Indonesia Design Power 2006-2010 ini, Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam membangun perekonomian nasional melalui ekonomi kreatif.

Pada tahun 2007, Pemerintah melakukan studi pemetaan industri kreatif Indonesia yang mana hasilnya adalah ditetapkannya 14 sektor industri kreatif Indonesia. Pada tahun 2008, Departemen Perdagangan menerbitkan cetak biru Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015 dan Rencana Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif 2009-2015. Pada tahun 2009, Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan Inpres no 6 tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Pada Inpres no 6 tahun 2009 tersebut, presiden menginstruksikan jajarannya untuk mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan sasaran, arah, dan strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini. Inpres no 6 tahun 2009 menegaskan perlunya kebijakan yang terintegrasi antar kementerian/lembaga di Indonesia, dalam hal ini

kementerian dan badan terkait, untuk bekerja bersama-sama demi mewujudkan cita-cita membangun industri ekonomi kreatif Indonesia yang maju dan berdaya saing tinggi.

Pada tahun 2015, pemerintah mendirikan sebuah lembaga/badan baru bernama Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). BEKRAF mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif yang diusung oleh BEKRAF adalah memfasilitasi Orang Kreatif (OK) di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari tahap kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi. BEKRAF memiliki visi menjadikan ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia dengan misi terwujudnya pertumbuhan ekonomi kreatif, lapangan serta ekspor ekonomi kreatif.

Agenda nasional pembangunan ekonomi kreatif saat ini didasarkan pada Nawacita 2015-2019 dimana salah satu agendanya, pada butir 6, adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Sub agenda dari agenda ini adalah meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun isu strategis pengembangan ekonomi kreatif adalah mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif.

Pada tahun 2019, Pemerintah menargetkan adanya peningkatan Produk Domesti Bruto (PDB) sebesar 12 %, ekspor sebesar 10% dan tenaga kerja sebesar 13 juta orang. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan memperluas pasar baik domestik maupun mancanegara, memfasilitasi proses ekonomi kreatif melalui ruang kreasi dan jaringan orang kreatif, memfasilitasi rantai nilai ekonomi kreatif dan memfasilitasi *start-up*.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah melakukan sinergi antara kementerian/lembaga (K/L) dimana tiap K/L memiliki perannya masing-masing seperti yang terlihat dalam Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Sinergi K/L dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Sumber: Hamdan, 2016

BEKRAF sebagai badan yang khusus menangani seluk beluk industri kreatif Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang menyeluruh, sebagai mengurus perihal kelembagaan dan HIKI, permodalan, sumber daya manusia (SDM), pemasaran, dan infrastruktur dan tekonologi. Tugas BERAF ini tentunya harus disokong oleh lembaga lain yang memiliki agenda dalam pengembangan industri kreatif nasional.

Pengaruh *Hallyu Wave* terhadap Kebijakan Industri Kreatif Indonesia

Muncul dan berkembangna industri kreatif di Indonesia tidak lepas dari kondisi dunia yang menuntut adanya pergeseran ekonomi ke arah ekonomi kreatif. Perkembangan industri ini di dunia juga tidak lepas dari pengaruh masuknya industri kreatif negara lain ke Indonesia. Korea Selatan melalui *Hallyu* –nya merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan industri kreatif Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Korea Selatan dalam mendongkrak industri kreatif telah menginspirasi berbagai negara di dunia untuk mengembangkan industri kreatif mereka. Apa yang terjadi dengan Korea Selatan melau *Hallyu*-nya dapat dibilang sebagai sesuatu yang tidak terkira akan terjadi. *Hallyu*, budaya populer, berhasil membawa nama Korea Selatan ke dunia internasional dan terkenal.

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang dipandang berhasil mengembangkan industri kreatifnya oleh Indonesia. Pemerintah menempatkan Korea Selatan sebagai negara yang kebijakan industri kreatifnya patut untuk dicontoh. Kebijakan Korea Selatan yang bagus dan perlu dicontoh oleh Pemerintah adalah :

- Mendirikan badan pendukung keuangan yaitu Korean Culture and Arts Foundation

- Bekerjasama dengan komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam promosi program dengan dukungan dana dari Pemerintah Pusat
- Meluncurkan “Rencana Lima Tahun bagi Budaya Korea baru”

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memang tidak serta merta merupakan buah dari pengaruh *Hallyu* di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, keberadaan *Hallyu* ini menjadi pertimbangan Pemerintah dalam membuat kebijakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemunculan ekonomi kreatif di Indonesia bersamaan waktunya dengan masuknya *Hallyu* ke Indonesia. Meskipun secara kebijakan dan aturan baru benar-benar ada tahun 2006.

Seperti halnya Korea Selatan meluncurkan yang Pemerintah Indonesia dalam upaya pengembangan industri kreatif, menerbitkan cetak biru Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015 dan Rencana Pengembangan 14 Subsektor Industri Kreatif 2009-2015. Selain itu, tahun 2015, Pemerintah mendirikan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) sebagai lembaga yang menangani langsung ekonomi dan industri kreatif yang dalam melakukan tugasnya dibantu oleh kementerian/lembaga lain.

Keberadaan *Hallyu* di dunia menyadarkan negara-negara untuk melihat sisi komersil dari budaya. Penggunaan budaya sebagai komoditas ternyata memberikan sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Indonesia saat ini sudah mulai menampilkan sisi nilai budaya Indonesia dalam karyanya. Upaya Indonesia dalam menanamkan nilai budaya Indonesia tercermin dalam produk yang dipasarkan. Produk kriya, fesyen, kuliner sangat kental dengan cita rasa Indonesia. Namun ada yang masih mengganjal jika berkaitan dengan budaya Indonesia, yaitu bahwa budaya Indonesia itu tidak satu. Indonesia adalah negara multicultural. Sehingga klaim bahwa budaya suatu suku bangsa sebagai budaya Indonesia kadang kala tidak diterima dengan baik.

Budaya Indoensia yang beragam menjadi tantang bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Keinginan Pemerintah yang ingin mengidentikan Indonesia dengan satu budaya tidak akan mungkin dapat terwujud. Mempertahankan nilai-nilai budaya local yang ada, budaya adat yang ada, dirasa lebih baik ketimbang membuat budaya Indonesia yang satu. Apa yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan “Korea”-nya tidak dapat serta merta diadopsi oleh Indonesia.

Komodifikasi budaya seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan menggabungkan atau mengakulturasikan budaya tradisional dengan budaya modern, belum dapat sepenuhnya dilakukan oleh Indonesia. Namun meskipun demikian, Indonesia sedikit demi sedikit, tahap demi tahap memasukan nilai-nilai luhur budaya lokal pada produk industri kreatifnya.

Untuk mewujudkan target peningkatan ekonomi kreatif, Pemerintah tengah menyusun kebijakan : (1) Payung Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional, (2) Pengembangan skema pembiayaan khusus bagi ekonomi kreatif, (3) Pengembangan kriteria dan indikator kota kreatif sebagai basis wilayah pembentukan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, (4) Inkubasi wirausaha pemula (start-up) berbasis teknologi.

SIMPULAN

Industri kreatif Indonesia sedang berada pada fase pengembangan. Pengembangan di sini tidak hanya dalam artian pengembangan produknya tapi juga nilai dan identitas yang dibawa oleh produk tersebut. Keinginan dan target Indonesia untuk melakukan akselerasi pertumbuhan melalui ekonomi kreatif telah membawa Indonesia pada kondisi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah melalui kebijakan dan reulasi yang dikeluarkannya. Pemerintah berupaya untuk mengangkat industri kreatif Indonesia di pasa domestic dan internasioal. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan menetapkan mana sektor ekonomi kreatif yang prioritas mana yang bukan. Sehingga dalam pengembangannya dapat maksimal.

Korea Selatan melalui *Hallyu* telah berhasil memasuki pasar Indonesia dan dengan mudahnya mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Segala sesuatu yang berasal dari Korea menjadi trendsetter di masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia untuk merebut hari masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.

Komodifikasi budaya dalam budaya populer yang dibawa oleh *Hallyu*, telah mengantarkan Korea Selatan pada kesuksesan ekonomi. Korea Selatan tumbuh menjadi negara dengan tingkat ekonomi yang mapan di Asia Timur dan Asia. Industri kreatif telah mengantarkan Korea Selatan pada kesuksesan ekonomi dan pengakuan akan keberadaan Korea Selatan di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bok-rae, Kim. 2015. Past, Present and Future of *Hallyu* (Korean Wave). *American International Journal of Contemporary Research* Vol. 5, No. 5; October 2015 :154-160
- Jin, Dal Yong. 2012. *Hallyu 2.0: The New Korean Wave in the Creative Industry*. *International Institute Journal University of Michigan* Volume 2 No. 1, Fall 2012: 3-7
- Meidita, Aullya. (2013). Dampak Negatif Industri *Hallyu* ke Indonesia. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2013, 1 (4): 979 - 992
- Yang , Jonghoe. 2012. The Korean Wave (*Hallyu*) in East Asia: A Comparison of Chinese, Japanese, and Taiwanese Audiences Who Watch Korean TV Dramas. *Development and Society* Volume 41 No. 1, June 2012, 103-147
- DO, Thao Emilie. (2012). Emergence Of The Korean Popular Culture In The World. Bachelor's Thesis Degree programme International Business . Turku University Of Applied Sciences. Finlandia.
- Lee, Hye-Kyung. 2013. Cultural Policy and the Korean Wave: From National Culture to Transnational Consumerism. In Kim, Y (edt). *The Korean Wave: Korean Media Go Global*. London: Routledge
- Sari, Indah Chartika dan Ahmad J. (2013). *Hallyu* Sebagai Fenomena Transnasional. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Pekanbaru
- Tumenggung, Adeline May. 2005. Kebudayaan (para) Konsumen. *Teori-Teori kebudayaan*. Edt. Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto. Yogyakarta : Penerbit Kanisius

Pulau Sebatik : Sebuah Kajian Kawasan Perbatasan (Studi Antropologi Tentang Pandangan Masyarakat terhadap Kawasan Perbatasan)

Poppy Setiawati
Universitas Jayabaya
poppysetiawati@gmail.com

Junardi Harahap
Universitas Padjadjaran

Abstrak

Perbatasan selama ini selalu menjadi isu menarik untuk dikaji karena perbatasan erat dengan permasalahan yang kompleks, memiliki nilai strategis dan identik dengan kedaulatan. Salah satu kawasan perbatasan yang penting untuk dikaji adalah Pulau Sebatik. Pulau ini berada di Provinsi Kalimantan Utara dan memiliki dua jenis perbatasan, yaitu perbatasan darat dan laut. Pembangunan kawasan perbatasan menjadi prioritas, terlebih saat ini Pemerintah memiliki agenda Nawacita yang salah satu fokusnya pada pembangunan perbatasan, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Studi ini bertujuan untuk melihat pandangan masyarakat Sebatik terhadap kawasan perbatasan bagi kelangsungan hidup mereka. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan masyarakat memiliki pandangan bahwa daerah perbatasan harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah pusat dan daerah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan suprastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses informasi yang begitu tinggi dari negara tetangga dapat menyebabkan perubahan sosial bagi masyarakat dalam kaitannya dengan nasionalisme. Studi ini berimplikasi terhadap upaya Pemerintah dalam mewujudkan perbatasan sebagai beranda negara yang berdaya saing, berdaulat dan aman. Kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI harus tetap menjadi prioritas pembangunan dengan memperhatikan latar belakang budaya masyarakat dan karakter perbatasan, sehingga masyarakat tidak lagi berorientasi pada negara tetangga. Sebatik merupakan kawasan perbatasan yang penting karena mempunyai nilai strategis bagi hubungan dua negara yang bertetangga yaitu Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: Masyarakat, Nasionalisme, Perbatasan, Pembangunan, dan Sebatik.

PENDAHULUAN

Salah satu kawasan perbatasan yang menarik untuk dikaji adalah pulau Sebatik. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau yang berada di daerah kawasan perbatasan dan mempunyai nilai strategis di dalam hubungan dua negara yang bertetangga, yaitu Indonesia dan Malaysia. Merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Kahin (1964:253), sudah ada persoalan yang panjang pada kawasan perbatasan. Perbatasan selama ini selalu menjadi isu yang hangat dan penting di dalam masyarakat kita. Salah satu penyebabnya karena kawasan perbatasan adalah sebuah wilayah yang sangat krusial dari berbagai sisi. Pembangunan kawasan perbatasan merupakan hal yang mesti terus dilakukan, dimana pembangunan tersebut wajib menyerap berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat di kawasan perbatasan. Tujuan pembangunan ini tentunya dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

METODE

Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang penting, karena mempunyai nilai strategis bagi masyarakat perbatasan di antara dua negara. Apabila dilihat dari berbagai unsur, hal ini sering membawa persoalan yang kompleks dalam menggalinya secara metode. Rumusan persoalan di dalam penelitian ini adalah sejauh mana urgensi kawasan perbatasan bagi masyarakat di Pulau Sebatik. Yang difokuskan sebagai pertanyaan penelitian dengan melihat pandangan orang Sebatik terhadap kawasan perbatasan yang memandang sebagai sebuah eksistensi kawasan perbatasan bagi kelangsungan hidup mereka. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap bahwa perhatian khusus oleh pemerintah dalam pemanfaatan kawasan perbatasan perlu ditingkatkan lagi. Ketatnya informasi di era globalisasi dan juga berbagai perubahan di kawasan perbatasan menyebabkan dinamisnya masyarakat di kawasan perbatasan. Interaksi yang terjadi antar masyarakat Pulau Sebatik dan masyarakat di kawasan perbatasan negara tetangga, Malaysia membawa perubahan-perubahan pada masyarakat perbatasan. Pembangunan Infrastruktur dan suprastruktur perlu ditingkatkan di kawasan perbatasan agar masyarakat tidak tertarik untuk ke daerah negeri tetangga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kawasan perbatasan sebagai bagian integral yang harus tetap diperhatikan, dan menjadikan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai subjek dan objek pembangunan yang harus terus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga masyarakat perbatasan menjadi masyarakat yang penting dalam masyarakat kita, bukan menjadi masyarakat yang dinomorduakan di kancah masyarakat kita. Kawasan perbatasan selalu dikaitkan dengan nasionalisme. Masalah yang berhubungan dengan aspek nasionalisme di kawasan perbatasan disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Limau, bahwa masyarakat Sebatik bukan tidak cinta pada NKRI atau pun produk-produk Indonesia, tetapi kondisi geografi yang menyebabkan masyarakat harus menempuh cara lain untuk dapat bertahan hidup. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mereka sampai saat ini masih menggunakan produk-produk Malaysia. Contohnya, sampai saat ini, di Patok 5, masih menjadi tempat penampungan tabung gas Malaysia. Pasokan barang-barang dari Malaysia tidak diperkenankan lewat jalur laut setelah ditutupnya jalur pelayaran resmi dari Tawau ke Sebatik dan sebaliknya. Saat ini, para tengkulak membawa barang-barang melalui Sungai Pukul (jalur darat).

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di Pulau Sebatik masih mengalami kendala dalam mendapatkan barang-barang produk Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, masyarakat mengharapkan pemerintah dapat membuka toko yang khusus menjual barang-barang Indonesia dimana barang-barang tersebut disuplai langsung oleh pemerintah agar harganya tidak mahal. Dengan demikian, dalam menentukan nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan bukan hanya ditentukan oleh penggunaan produk-produk yang bukan dari Indonesia tetapi ditentukan juga oleh keterlibatan pemerintah dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Suprastruktur

Peningkatan infrastruktur dan suprastruktur sangat penting dalam menangani perbatasan yang mesti menjadi prioritas utama dalam banyak hal. Hal itulah yang menjadi kekuatan masyarakat perbatasan sehingga mereka menjadi masyarakat yang sangat penting. Penanganan pembangunan kawasan perbatasan sangat memerlukan pembangunan yang bersinergi dengan berbagai pihak dan orang-orang yang peduli dengan persoalan perbatasan. Perbatasan merupakan bagian penting di dalam masyarakat yang harus dijaga supaya tetap lestari dan masyarakatnya tersejahterakan karena masyarakat perbatasan adalah bagian penting dari masyarakat Indonesia. Perbatasan perlu terus mendapatkan perhatian dari pemerintah karena memiliki nilai strategis. Kajian yang dilakukan oleh Raharjo (2013:78) di kawasan perbatasan adanya persoalan infrastruktur, masalah ekonomi dan masalah nasionalisme yang ada di kawasan perbatasan Kalimantan.

Urgennya kawasan perbatasan adalah menjadikan perbatasan sebagai sebuah kawasan yang penting dalam melengkapi infrastruktur dan suprastruktur masyarakat di perbatasan sehingga menjadi lebih modern dan tidak ketinggalan dengan negara tetangga Malaysia. Masyarakat di perbatasan harus juga dijadikan sebagai orang-orang yang dapat merasakan *nikmatnya* menjadi masyarakat Indonesia. Meskipun berada di kawasan perbatasan, tentunya mereka diberikan fasilitas yang menjadikan hidup mereka lebih berdaya dengan infrastruktur dan suprastruktur yang harus selalu dibangun di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di kawasan perbatasan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar hasil pembangunan dapat bermanfaat secara nyata bagi mereka.

Dalam upaya mewujudkan perbatasan sebagai beranda depan NKRI, maka masyarakat di kawasan perbatasan harus dapat merasakan bagaimana menjadi beranda depan bangsa karena berbatasan langsung dengan negara tetangga yang secara fasilitas lebih baik dengan kondisi di perbatasan negeri sendiri. Masyarakat perbatasan harus bangga dengan identitas yang mereka miliki, yaitu sebagai masyarakat kawasan perbatasan yang tentu sangat berkaitan erat dengan isu perbatasan dan keterbatasan. Isu ini harus dapat dihapus dari paradigma masyarakat kita dan menjadikan mereka

mesti lebih berdaya dan tidak ketinggalan dengan wilayah lainnya. Lebih berdaya dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat di Pulau Sebatik yang tentunya dapat membawa banyak perubahan besar bagi masyarakat.

sehingga unsur asing tidak mudah masuk ke dalam kawasan Sebatik dan mengobok-obok kawasan tersebut. Hal ini tentunya akan membawa kepada banyak perubahan ke arah yang lebih baik di kawasan perbatasan Pulau Sebatik.



Foto: Kantor Kecamatan Sebatik Tengah

Masyarakat perbatasan merupakan sebuah bagian penting yang harus dijaga kemaslahatannya. Kawasan perbatasan di Pulau Sebatik menjadi bagian penting dan sesuai dengan kekhasan kawasan sehingga menarik bagi pemilik modal untuk menguasai kawasan tersebut. Hal ini menjadikan semakin pentingnya kawasan Sebatik dari banyak sisi. Banyak hal yang membawa Pulau Sebatik menjadi kawasan perbatasan yang penting, karena Pulau Sebatik memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa dari aspek ekonomi, serta posisi strategis Pulau Sebatik itu sendiri.



Foto: Infrastruktur di kawasan Sebatik

Masyarakat Sebatik adalah bagian penting yang harus dibawa kepada mapan kesejahteraan. Tentunya jika masyarakat telah mapan secara keuangan, maka akan membawa pengaruh yang luar biasa dalam banyak hal. Pengaruh yang luar biasa secara keuangan tersebut tentu akan membawa kepada banyak aspek dalam kaitannya dengan kawasan perbatasan. Salah satunya adalah memiliki posisi tawar yang sangat kuat,

Sumber Daya Manusia di Perbatasan

Manusia di kawasan perbatasan Sebatik adalah manusia yang mempunyai berbagai keinginan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti seperti layaknya keinginan masyarakat di wilayah lainnya. Dan, mereka bukan benda yang diam, melainkan adalah sebuah sumber daya manusia yang luar biasa apabila dikelola, diolah dan diberdayakan dengan baik. Pulau Sebatik merupakan kawasan perbatasan yang memiliki sumber daya manusia yang banyak, yang tentunya dapat menghantarkan banyak perubahan pada masyarakat perbatasan. Kawasan perbatasan adalah sebuah wilayah yang memiliki banyak sumber daya manusia yang harus dibantu oleh pemerintah sehingga masyarakat perbatasan menjadi masyarakat yang berdaya.

Sumber daya manusia masyarakat perbatasan harus dibawa menjadi sumber daya yang mumpuni dan mempunyai peran yang lebih dalam mengembangkan kawasan perbatasan. Sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya ditentukan oleh kesehatannya. Kepala Desa Sungai Limau dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakatnya, membuat Program Jamban Sehat. Melalui program ini, Desa Sungai Limau mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY pada tahun 2014 dan Presiden Jokowi pada tahun 2016 sebagai Desa Terbaik dalam lomba desa tingkat nasional karena memiliki inovasi dalam program kesehatan dan pendidikan. Program jamban sehat ini bertujuan agar masyarakat dapat memiliki pola hidup sehat dengan tidak buang air besar maupun kecil sembarangan. Oleh karena itu, program ini mengharuskan setiap rumah memiliki jamban. Kendala yang dihadapi yaitu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hidup sehat. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Limau, bahwa awalnya masyarakat sulit untuk menerima program ini. Namun, dengan upaya yang dilakukan oleh Kades maka akhirnya semua rumah dapat memiliki jamban. Bagi masyarakat yang tidak mampu, pak Kades memberlakukan subsidi dari masyarakat yang mampu. Sedangkan untuk mengatasi drainase (saluran air), Kades meminta bantuan tenaga ahli dari Puskesmas untuk membantu menangani masalah ini. Dalam hal ini, untuk membangun sumber daya manusia di kawasan perbatasan yang memiliki kualitas diperlukan keterlibatan berbagai pihak.

Masyarakat perbatasan mempunyai perbedaan dengan masyarakat lainnya, ia merupakan masyarakat yang dapat berubah sewaktu-waktu karena daerah perbatasan identik dengan cepatnya berubah karena akses informasi yang begitu besar. Karena wilayah perbatasan juga merupakan bagian yang berada dalam masyarakat yang mempunyai banyak kepentingan di dalamnya sehingga cepat sekali berubah. Tentu lambat laun hal ini membawa kepada perubahan di dalam masyarakat wilayah perbatasan. Masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang bagian penting di dalam masyarakat kita selalu melakukan banyak hal perubahan di dalam masyarakat baik secara internal maupun eksternal.

Pembangunan kawasan perbatasan adalah pembangunan yang mesti dilakukan dengan melihat berbagai persoalan yang ada di kawasan perbatasan sebagai sehingga pembangunan dirasakan oleh seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Masyarakat perbatasan merupakan bagian penting yang semestinya pembangunan selalu membawa kepada perubahan yang lebih baik bagi masyarakat yang berada perbatasan. Tentu pembangunan yang membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat kawasan perbatasan. Pembangunan yang membawa perubahan kepada masyarakat sehingga menjadikan penghidupan yang lebih baik dari hari ini, sehingga mereka bisa menatap masa depan dengan tersenyum.

Pembangunan kawasan perbatasan adalah bagian penting yang harus selalu dilihat sebagai suatu upaya pembangunan wilayah kawasan perbatasan. Perbatasan merupakan daerah yang mesti dijaga dengan program yang mendukung kawasan perbatasan tersebut sebagai kawasan yang pembangunannya tidak hanya sebatas pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan manusia di dalamnya sehingga pembangunan yang ada dilakukan menjadi pembangunan yang terintegrasi. Selama ini ada anggapan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan yang terkadang masyarakatnya dijadikan sebagai masyarakat tidak berdaya karena banyaknya keterbatasan yang mereka hadapi, sehingga menjadikan mereka kadang tergantung kepada negara tetangga.

Masalah Kesejahteraan Yang Utama

Masalah kesejahteraan adalah masalah yang penting untuk memberdayakan masyarakat perbatasan. Masalah ekonomi merupakan parameter untuk meningkatkan perekonomian pada masyarakat di kawasan perbatasan. Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat perbatasan maka dapat

membawa masyarakat perbatasan berdaya secara ekonomi. Dengan berdaya secara ekonomi, mereka akan mampu menjadi masyarakat yang mapan secara ekonomi. Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi cenderung akan banyak mengeluh terutama di bidang ekonomi. Hal ini akan membawa banyak masalah ekonomi dan akhirnya dijadikan sebagai masalah sangat besar. Dapat dibayangkan apabila secara ekonomi bermasalah tentu akan jadi persoalan yang luar biasa apabila anaknya tidak bisa makan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perbatasan secara ekonomi mesti dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Masyarakat perbatasan harus disejahterakan secara ekonomi. Dalam aspek ekonomi, saat ini masyarakat di Pulau Sebatik, khususnya petani pisang dan sawit terkendala dalam memasarkan hasil panen mereka. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Camat Sebatik Tengah yang menyatakan bahwa saat ini, di Pulau Sebatik, khususnya di Kecamatan Sebatik Tengah terkendala dalam fokus pengembangan potensi pertanian. Hal ini merupakan imbas dari ditutupnya jalur pelayaran dari Pulau Sebatik ke Kota Tawau, Sabah, Malaysia. Penutupan jalur pelayaran ini dilakukan oleh Malaysia sejak tahun 2013 dengan alasan bahwa jalur pelayaran yang selama ini digunakan oleh masyarakat Sebatik merupakan jalur pelayaran internasional, sementara perahu-perahu yang digunakan bukan perahu standar internasional, sehingga dilakukan penutupan pelayaran oleh Malaysia secara sepihak. Hal ini tentu merugikan petani Sebatik yang biasa menjual hasil pertaniannya ke Sebatik melalui jalur laut. Masyarakat di Pulau Sebatik harus menuju Nunukan untuk dapat ke Tawau karena hanya penyeberangan dari Nunukan yang merupakan penyeberangan resmi.

Dalam mengatasi hal ini, tentu yang harus dilakukan adalah dengan mencari peluang-peluang dana bagi masyarakat perbatasan agar mereka dapat mandiri dan berdaya secara ekonomi. Nilai mata uang Malaysia yang nilai mata uangnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai mata uang Indonesia, telah menjadi masalah tersendiri. Ekonomi adalah salah satu faktor yang membuat masyarakat menjadi tergantung pada negara tetangga untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Masalah ekonomi mesti dijadikan sebagai keputusan yang harus dilakukan dalam kegiatan ekonomi di masalah yang harus dijalani dan semuanya harus sesuai dengan ekonomi.

Masalah ekonomi harus dijadikan sebagai hal yang penting dan mesti dicari jalan keluar. Dengan adanya penutupan jalur pelayaran resi ke Tawau dari Sebatik, maka masyarakat memilih alternatif untuk menggunakan jalur ilegal (jalur tikus) untuk mencapai

Tawau dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjelasan ini sebagaimana dikatakan oleh salah satu tokoh pemuda di Pulau Sebatik yang kerap melakukan penyeberangan secara ilegal, bahwa dengan adanya penutupan jalur pelayaran di Sebatik, masyarakat tidak tinggal diam. Mereka akhirnya lebih sering menggunakan jalur pelayaran ilegal, dikenal dengan “jalur tikus” untuk menjual hasil pertaniannya ke Tawau. Mereka menggunakan jalur ‘*aji kuning*’ yang berada di Kecamatan Sebatik Tengah dan ‘*lale salo*’ yang berada di Sebatik Utara. Melalui kedua “jalur tikus” ini masyarakat menuju Tawau untuk berbagai keperluan, khususnya keperluan ekonomi. Penyeberangan biasanya dilakukan dini hari, mulai sekitar pukul 04.00 karena pos penjagaan di Dermaga Batu, Tawau baru dibuka pukul 06.00 pagi sehingga masih belum ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia. Masyarakat dapat menggunakan perahu jongkong milik masyarakat Sebatik, biasanya milik nelayan, atau menggunakan perahu jongkong milik Malaysia yang dikemudikan oleh masyarakat Sebatik, biasanya di perahu milik Malaysia ditulis tanda TW sebagai tanda bahwa perahu tersebut sudah terdaftar di Tawau sehingga “aman” jika melewati pos penjagaan *polis* Malaysia di Dermaga Tawau karena perahu tersebut sudah ada penjaminnya yaitu orang Tawau sehingga bebas melakukan penyeberangan ke Tawau. Kegiatan ini tentunya beresiko, namun hanya ini yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk tetap dapat bertahan hidup. Resiko apapun mereka tempuh untuk dapat menjual hasil kebun mereka, seperti pisang dan sawit. Upaya ini mereka lakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan merupakan bagian yang penting, seperti apa yang dilakukan dengan memberikan fasilitas kesehatan yang lebih di kawasan perbatasan. Ketersediaan fasilitas pendidikan dapat mendukung dalam meningkatkan sumber daya perbatasan yang berkualitas. saat ini, fasilitas pendidikan masih minim, terutama fasilitas pendukung pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya. Jangan sampai kawasan perbatasan ketinggalan dari segi pendidikan. Tentu, bila tertinggal secara pendidikan akan membawa masyarakat menjadi bodoh sehingga mudah diperdaya oleh masyarakat di luar tersebut. Pembangunan di bidang pendidikan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di Pulau Sebatik, menurut Camat Sebatik Tengah, dilakukan secara mandiri oleh Hj. Suraidah yaitu dengan membangun Sekolah Tapal Batas di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Sekolah ini

dibangun dalam upaya memberantas buta huruf. Sekolah didirikan untuk para anak-anak TKI.

Ketersediaan fasilitas pendidikan sebagai yang prioritas utama menjadikan masyarakat perbatasan sebagai masyarakat yang berdaya dan mereka dapat melihat menteri pagi dengan cerah karena telah berdaya secara pendidikan.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diperoleh dari artikel ini adalah bahwa perbatasan bagi masyarakat Pulau Sebatik merupakan bagian dari kehidupan mereka. Masalah perbatasan adalah masalah yang krusial dan mesti ditangani dengan melibatkan semua pihak. Kajian dari Dibb (2001:829), bahwa keamanan di Asia Tenggara kuncinya ada di negara Indonesia, ini sebenarnya kesimpulan yang dapat kita jadikan rujukan, bahwa negara kita adalah negara besar. Di dalam menyelesaikan perbatasan yang diperlukan yaitu adanya saling berkordinasi, bukan malah menyalahkan satu sama lainnya. Dengan sikap saling berkordinasi dan mencari solusi terbaik serta dengan tidak saling menyalahkan maka perbatasan akan menjadi beranda negara yang memiliki daya saing, berdaulat dan aman. Bangsa Indonesia, sedang menuju sebuah perubahan besar di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mencapai cita-cita yang diinginkan seperti program Nawacita, yang mencoba membangun Indonesia dari pinggiran, seperti halnya di kawasan perbatasan Pulau Sebatik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Camat Sebatik Tengah, Kepala Desa Sungai Limau, para tokoh pemuda, nelayan dan juga para petani di Pulau Sebatik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dibb, Paul. 2001) Indonesia: The Key to South-East Asia's Security. Source: *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, Vol. 77, No. 4 (Oct., 2001), pp. 829-842. Published by: Wiley on behalf of the Royal Institute of International Affairs. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3095597>.
- Kahin, George McT. (1964). Malaysia and Indonesia. Source: *Pacific Affairs*, Vol. 37, No. 3 (Autumn,

1964), pp. 253-270. Published by: Pacific
Affairs, University of British Columbia Stable
URL: <http://www.jstor.org/stable/2754974>.

Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2013. Kebijakan Pengelolaan
Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia
(Studi Evaluatif di Kecamatan Entikong).
Widyariset, Vol. 16 No.1, April 2013: 73–80.

PENGARUH SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI KEWENANGAN PUSAT DI DAERAH DALAM PENERAPAN UU No. 6/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI NAGARI SUMATERA BARAT

Tamrin

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
tamrin@fisip.unand.ac.id

Abstrak

Terdapat hubungan antara desentralisasi kekuasaan pemerintah dengan dinamika politik lokal, meskipun begitu kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Desentralisasi adalah pemencaran kekuasaan yang dilakukan pemerintah secara internal, seperti dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan politik lokal adalah pemencaran kekuasaan pada dimensi ruang (spatial), serta batas-batas sosial budaya yang melingkunginya. Hubungan keduanya bisa menjelaskan relasi kekuasaan nasional dengan lokal dalam bentuk pengaruh lingkungan sosial budaya masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah pusat di daerah, serta bisa menjelaskan fungsi politik lokal sebagai sarana pembelajaran untuk berdemokrasi dan menumbuhkan kapasitas masyarakat mengelola kekuasaan yang dipancarkan pemerintah pusat ke daerah. Artikel berikut menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan budaya masyarakat dalam mempengaruhi perumusan kebijakan UU No. 6/2014 tentang Nagari sebagai bentuk Pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa terdapat pergeseran dari modal ekonomi kepada modal budaya sebagai bentuk pengaruh modalitas sosial dalam modal simbolik jabatan Wali Nagari (Kepala Desa). Untuk membuktikan asumsi tersebut maka peneliti menggunakan teori modalitas sosial. Dengan alasan sifat hubungan antara beberapa modal sosial tersebut bersifat kompleks sesuai dengan sifat nagari yang tidak hanya memiliki pengertian administratif pemerintahan, tetapi juga memiliki pengertian sosial, budaya dan ekonomi yang rumit serta membedakannya dari pengertian desa pada umumnya. Melalui kaedah penelitian kualitatif, artikel ini menegaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah mempengaruhi dinamika politik lokal dalam bentuk modalitas sosial yang digunakan dalam perebutan jabatan Wali Nagari (Kepala Desa) semakin besar kewenangan yang dibeikan oleh pemerintah pusat dalam menggunakan dana alokasi desa (ADD) kepada pemerintah nagari maka akan semakin besar pengaruh dinamika politik lokal dalam perumusan kebijakan penggunaan alokasi dana desa (ADD) tersebut.

Keywords: birokrasi, patrimonial, demokrasi

PENDAHULUAN

Seiring dengan berlangsungnya konsolidasi demokrasi yang ditandai dengan terbitnya UU No.6/2014 tentang desa, maka peluang untuk melaksanakan nagari dalam konteks yang lebih luas semakin terbuka. Misalnya, dalam pasal 6 ayat 1 UU desa ini dinyatakan “[d]esa terdiri atas desa dan desa adat.” Penegasan terhadap transformasi nagari menjadi nagari adat juga dinyatakan dalam Pasal 28 PP No.43/2014 tentang pelaksanaan UU desa.

Dengan adanya pasal-pasal ini memberi peluang kepada etnis Minangkabau untuk mengembangkan nagarinya berdasarkan adat dan budaya yang ada. Apalagi dengan konsepsi *adat salingka nagari* membawa pesan bahwa pengembangan nagari adat sebenarnya ditentukan oleh sikap masyarakat di nagari dalam memanfaatkan peluang ini. Pilihan kepada pelaksanaan nagari adat ini tidak berarti menghilangkan substansi penyelenggaraan pemerintahan modern terendah yang selama ini menjadi fungsinya.

Perbedaannya adalah pada proporsionalitas pelaksanaan kewenangan yang ada di nagari tersebut yang tentu lebih banyak diarahkan pada penyelenggaraan aspek sosial dan budayanya. Apalagi selama ini kewenangan nagari dalam konteks sosial dan budaya ini tidak jelas walaupun ada pengakuan pemerintah terkait dengan hak asal-usul.

Tentu dengan perubahan praktik bernagari yang di bawah rezim UU Desa yang dipisah dari rezim UU Pemerintahan Daerah memberi manfaat bagi masyarakat nagari. Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di Sumatera Barat telah mengurangi gegar politik yang terjadi dalam bentuk konflik kepentingan yang terjadi antara Kepala Desa dengan BPD, bentuk otonomi kewenangan yang lebih besar diberikan terhadap lembaga adat, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintahan nagari mengurangi konflik kepentingan antara kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, artikel ini menyorot manfaat transformasi yang dilakukan masyarakat menuju nagari adat. Pertanyaannya sekarang bagaimanakah transformasi

penyelenggaraan pemerintahan menuju nagari adat di bawah rezim UU desa ini? Apakah transformasi bentuk penyelenggaraan nagari adat ini membawa manfaat kepada masyarakat dan proses konsolidasi demokrasi?

Dinamika kehidupan masyarakat etnis Minangkabau mendapat perhatian banyak pihak. Bahkan ilmuwan dari berbagai negara juga mendalami bagaimana kehidupan etnis Minangkabau ini. Umumnya mereka menyoroti beberapa aspek secara mendalam, terutama dinamika sosio, budaya, ekonomi, dan politik pemerintahan. Dari beberapa kajian yang pernah dilakukan, paling tidak ada tiga pengelompokan besar yang dikaji, yaitu (1) dari sudut pandang sosial dan budaya di nagari; (2) dari aspek otonomi daerah dan; dan (3) dari aspek kehidupan bernagari di Sumatera Barat. Di antara ilmuwan yang memberi perhatian dari aspek sosial dan budaya di antaranya De Jong (1952), Kato ([1982]; 2005) dan Navis (1984), Hadler (2010). Misalnya, De Jong melihat dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau sebenarnya bersumber dari alam yang melingkupinya. Tidak jarang konsepsi berguru ke alam—alam takambang jadi guru—memiliki pesan yang dalam sehingga mempengaruhi setiap tingkah laku etnis Minangkabau.

Pemahaman yang dalam terkait dengan proses pembelajaran ke “alam” ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkembangan sistem sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Bahkan sendi sosial dan budaya inilah yang menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernagari yang menjadi identitas etnis Minangkabau. Lebih jauh, De Jong menjelaskan bahwa organisasi sosial masyarakat, misalnya nagari, dibangun dari sistem matrilineal yang dimulai dari suku hingga berkembang menjadi kaum. Suku dan Kaum menjadi dasar terbentuknya sistem lain dalam nagari sehingga interaksi yang berlangsung di antara individu di nagari menjadi lebih hidup. Dalam aspek ini, baik pada tingkat suku maupun kaum ada peran penghulu yang menjadi pemimpin dalam menjalankan nagari.¹ Tentu aspek penyelenggaraan nagari tidak hanya sosial dan budaya, tapi penyelenggaraan politik dan pemerintahan yang semuanya berinteraksi dalam nagari yang dikendalikan oleh penghulu adat.

Lain halnya dengan kajian Tsuyoshi Kato dalam Adat Minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah melihat adanya kecenderungan merantau etnis Minangkabau yang berdampak pada perkembangan sistem matrilineal di Sumatera Barat.² Kato bahkan mencoba memahami

keberadaan sistem matrilineal yang cenderung terus berubah dan bahkan meninggalkan esensi yang sebenarnya dari kehidupan suku dan kaum dalam keluarga besar orang Minangkabau. Tanpa disadari, perilaku merantau etnis Minangkabau ini membawa dampak kepada perkembangan nagari dari masa ke masa. Filosofi merantau yang ada dalam pikiran generasi muda di nagari ini menjadi dasar mengapa dorongan merantau ini begitu besar. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangun nagarinya—kelak jika berhasil di rantau.

Pembahasan yang menarik mengenai aspek sosial dan budaya etnis Minangkabau ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Hadler³ Menurut Hadler kedudukan budaya matrilineal dalam sistem sosial dan budaya etnis Minangkabau sedikit banyaknya mempengaruhi dinamika politik yang berlangsung dalam masyarakat Minangkabau. Bahkan Hadler melihat kecenderungan itu dalam kaitannya dengan perkembangan sistem politik kontemporer di Sumatera Barat. Hadler melihat adanya saling hubung antara budaya Minangkabau dengan agama mayoritas penduduknya, yaitu Islam. Interaksi nilai budaya Minangkabau dan Islam ini membentuk dasar yang kuat menjadi filosofi masyarakatnya, yaitu *adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah*. Lebih jauh sistem sosial dan budaya serta pengamalan Islam bagi etnis Minangkabau menjadi bagian penting dalam bersikap dan bertindak dalam interaksinya sehari-hari. Bahkan apa yang menjadi nilai dasar dari filosofi ini menempatkan orang Minang tetap eksis dalam perkembangan politik dari masa ke masa. Realita ini dapat dilihat dari dinamika politik di tingkat nasional bahwa orang Minang tetap bisa bertahan walaupun pasca pemberontakan PRRI tahun 1958 menyebabkan etnis Minangkabau ini mengalami trauma politik yang dahsyat dan rasa inferior dalam kancah perpolitikan nasional⁴

Kajian lain yang juga penting dihubungkan dengan dinamika penyelenggaraan nagari adalah apa yang ditulsi oleh Antlov⁵. Walaupun Antlov hanya menyorot perkembangan desa di Indonesia, namun relevan untuk dijadikan perbandingan dengan kehidupan nagari di masa reformasi. Antlov melihat terjadinya perubahan signifikan dalam praktik berdemokrasi masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah adanya keinginan politik dari pemerintah dengan memberi ruang demokrasi bagi masyarakat di daerah melaksanakan demokrasi. Misalnya, mulai menguatnya fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pengambilan keputusan untuk masyarakat desa. Singkatnya, dapat dilihat adanya peran masyarakat yang lebih luas dalam membuat

¹ De Jong, 1952:49-53.

² Tsuyoshi Kato, 1982:2005

³ Jeffrey Hadler, 2010

⁴ Kahin, 2005

⁵ Antlov, 2003:210

keputusan politik sebagaimana yang dijamin oleh UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah.

Walaupun begitu, Antlov juga melihat praktik demokrasi ini juga mendapat ancaman dari institusi yang berada di luar komunitas masyarakat desa itu sendiri, terutama untuk menguatkan peranan elite pemerintahan atau negara dalam melaksanakan fungsi negara.

“...the main threat to grassroots democracy and village autonomy comes from outside the communities, from the state and from district elites. I am referring to the half-hearted measures through which central and district governments support village autonomy, and the way lokal elites have captured the fruits of decentralisation. To what extent higher authorities will allow villages to maintain their autonomy is still very uncertain”⁶

Akan tetapi, jika fenomena desa yang digambarkan ini dilihat dalam aspek nagari di Sumatera Barat, tentu ditemukan benang merahnya. Misalnya, dalam melihat penyelenggaraan otonomi daerah di nagari. dilihat dalam aspek yang lebih luas, memahami Nagari cenderung menjadikan kebijakan pemerintah sebagai asas melaksanakan hak otonominya, walaupun mengabaikan dimensi sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakatnya. Terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari justru menjadikan nagari sebagai unit pemerintahan terendah yang melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.

Akibatnya nagari tidak lagi menjadi unit yang otonomi sebagaimana sejarah nagari itu sendiri dengan hal asal-usulnya. Namun, dengan perkembangan sistem demokrasi, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka perhatian pada unit pemerintahan terendah pun mengalami perubahan. Pemerintah tidak lagi melihat desa/nagari sebagai unit pemerintahan terendah saja, tapi juga kesatuan masyarakat hukum (adat) yang memiliki kewenangan sesuai dengan hak asal-usulnya yang lebih dulu ada sebelum negara terbentuk. Dalam perkembangannya, pelaksanaan otonomi daerah pun mulai diarahkan untuk memperkuat kedudukan desa/nagari ini.

Faktanya, dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan terendah, di desa/nagari pemerintah menekankan adanya pelaksanaan tata kelola pemerintahan, terutama dari penerapan akuntabilitas, transparansi dan efektifitas dan efisiensi. Ini karena

pemerintah nagari tidak lagi sekedar kesatuan masyarakat hukum adat dan geneologi saja, tapi sudah menjadi unit pemerintahan modern terendah sejak otonomi diberikan kepada daerah. Sebagaimana yang dijelaskan Cheema bahwa tata kelola pemerintahan menggambarkan sesuatu yang kompleks yang meliputi mekanisme, proses, hubungan dan institusi dimana masyarakat dan kelompok lain dapat menyampaikan kepentingannya, melaksanakan hak-hak mereka dan memediasi perbedaan yang ada di antara mereka⁷.

Kecenderungan ini jelas tidak hanya ada di tingkat kabupaten, tetapi juga di desa/nagari dengan nilai-nilai tradisional masyarakat yang kompleks dapat menjadi penghambat pencapaian tujuan otonomi daerah.

Dengan memahami perkembangan nagari di bawah UU No. 6 tahun 2014 ini justru memberi pemahaman baru dalam melihat praktik demokrasi berdasarkan sistem sosial dan budaya etnis Minangkabau. Apalagi saat ini tengah berlangsung transformasi penyelenggaraan nagari ke nagari adat yang mendapat perhatian pemerintah kabupaten sehingga perlu dielaborasi seperti apa dampak yang ditimbulkan dan prospek pengembangannya, terutama dalam memperkuat bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak aturan yang dibuat dalam bentuk kebijakan nasional yang dilakukan pemerintah memerlukan penyesuaian diri dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat pada tingkat lokal di daerah masing-masing, perbedaan penerapan aturan pada tingkat lokal dengan perumusannya pada tingkat nasional menghasilkan bentuk aturan yang berbeda dari tujuan semula.

METODE

Artikel ini bersumber dari penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *grounded theory*. Penggunaan pendekatan dan teknik ini sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menjelaskan bagaimana proses transformasi penyelenggaraan nagari ke nagari adat di bawah UU No 6/2014 tentang desa. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkonstruksi konsep/proposisi yang terkait dengan transformasi pemerintahan terendah dari nagari menuju nagari adat di Sumatera Barat. Peneliti melihat pendekatan ini sangat sesuai dengan teknik ini karena *grounded theory* menumpukan kepada kedalaman data yang dicari, terutama yang terkait dengan pola, konsep, ciri dan dimensi dari fenomena yang diamati.⁸ Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman,

⁶ Ibid.,

⁷ Cheema, 2005:4-6

⁸ Strauss and Corbin, 1998

Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Limapuluh Kota. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara sengaja dengan kriteria yang sudah ditetapkan serta dikembangkan dengan teknik *snowball sampling*. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui pengamatan terkait dengan aktivitas *bernagari* di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika diamati bahwa penyelenggaraan kehidupan *bernagari* di Sumatera Barat mengalami penyempitan makna sejak dilaksanakannya otonomi daerah pada masa reformasi. Ini dapat dilihat dalam pelaksanaan kehidupan *bernagari* yang saat ini tidak lebih hanya sekedar menyelenggarakan bentuk pemerintahan modern terendah saja.⁹ Dengan kata lain, nagari hanya sekedar melaksanakan fungsi pemerintahan dengan kewenangan yang terbatas pada apa yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten. Padahal *bernagari* bagi etnis Minangkabau tidak sekedar menyelenggarakan pemerintahan saja, tapi lebih kompleks dari itu¹⁰ (Musyair Zainuddin, 2008). Menyelenggarakan nagari merangkum segala dimensi kehidupan dalam masyarakat. Karena faktanya, nagari dibentuk dari kondisi yang meliputi aspek sosiobudaya dan geneologi masyarakatnya (cf. De Jong, 1952; Kato, [1982], 2005).

Namun, sejak Orde Baru berkuasa, eksistensi nagari justru mulai hilang. Nagari tidak lagi menjadi tempat masyarakat mengamalkan sistem sosial dan budayanya akibat diseragamkannya penyelenggaraan pemerintahan terendah menjadi desa. Implikasinya nagari harus lebur menjadi desa sebagaimana yang diinginkan UU No.5 tahun 1979. Padahal dalam kenyataannya ada aspek yang berbeda antara desa dan nagari.¹¹ Pada hakikatnya nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang jelas tidak sama dengan desa. Sementara desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Akibat penyeragaman ini, nagari hanya menjadi unit pemerintahan terendah saja sekaligus melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten melalui camat.

Bagi masyarakat di daerah, transformasi penyelenggaraan nagari sangat bergantung pada aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Diskresi dalam penyelenggaraan nagari tidak boleh keluar dari UU yang sudah ditetapkan. Karenanya desain kehidupan *bernagari* di Sumatera Barat sangat ditentukan sejauh mana ruang yang diatur oleh

pemerintah pusat sejalan dengan keinginan masyarakat di daerah. Penyempitan makna nagari sebagai instrumen administrasi pemerintahan pusat di daerah sudah berlangsung sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial menempatkan nagari sebagai sarana pengumpulan pajak *blasting* dari penduduk, kegagalan pemerintahan nagari dalam mencapai target pengumpulan ini dikenakan sanksi dalam bentuk pengurangan otonomi pemerintahan nagari dalam bentuk peleburan dengan nagari tetangga, seperti yang terjadi di nagari Pakan Baru atau *pakambaan* (perkembangan) yang lahir dari peleburan nagari Lubuk Pandan dengan nagari Sungai Asam. Meskipun memiliki lembaga pemerintahan yang sama, tetapi kedua nagari ini memiliki lembaga adat (Kerapatan Adat Nagari) yang berbeda. Perbedaan ini memudahkan kedua nagari ini melakukan pemekaran nagari menjadi nagari Lubuk Pandan dan nagari Sungai Asam pada tahun 1999.

Dalam hal ini, kesepakatan pemuka adat lebih menentukan struktur pemerintahan nagari. Perubahan pemerintahan nagari dalam bentuk pemekaran nagari hanyalah perubahan batas wilayah pemerintahan, tetapi tidak merubah batas wilayah sosial dan kultural yang lebih luas daripada wilayah administrasi pemerintahan. Perbedaan antara wilayah pemerintahan dengan wilayah adat istiadat ini merupakan perbedaan antara bentuk pemerintahan desa daerah lain dengan pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Nagari sebagai kesatuan administrasi pemerintahan terbuka terhadap pengaruh dari luar, diantaranya pengaruh kebijakan pemerintah pusat yang mengatur pemerintah nagari. Tetapi dari segi adat maka nagari memiliki otonomi sendiri yang menentukan batas wilayah administrasi pemerintahan menurut kesepakatan pemuka adat,

Faktor pertimbangan adat istiadat lebih menentukan bentuk pemekaran nagari dibandingkan dengan kebijakan administrasi pemerintahan, seperti yang terjadi di nagari Aur Malintang. Sebelum melakukan pemekaran nagari pada tahun 2010 terdapat konsensus di antara nagari yang melakukan pemekaran untuk memiliki satu lembaga adat (KAN) yang sama antara nagari Aur Malintang Selatan, Aur Malintang Timur, Aur Malintang Utara yang melakukan pemekaran dari nagari induk Aur Malintang Batu Basa. Kekhawatiran kehilangan identitas sosial dan kultural melalui fungsi lembaga adat menyebabkan masyarakat Sungai Pingai tidak mau memekarkan diri dari nagari Aur Malintang Selatan yang memiliki ikatan adat yang sama, meskipun persyaratan pemekaran nagari yang

⁹ Yoserizal dan Asrinaldi, 2013

¹⁰ Musyair Zainuddin, 2008.

¹¹ Imran Manan, 1995

ditentukan oleh jumlah penduduk 4000 penduduk dan 800 Kepala Keluarga (KK) sudah terpenuhi oleh masyarakat nagari tersebut. Pertimbangan lembaga adat lebih menentukan daripada pertimbangan admisnitrasi pemerintahan dalam melakukan pemekaran nagari di Sumatera Barat.

Penegasan konsep pemekaran nagari adalah pemekaran wilayah pemerintahan dan bukannya pemekaran adat istiadat merupakan gagasan ya ng selalu disampaikan kepada masyarakat di nagari Sumatera Barat. Terdapat keseulitan bagi pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk merumuskan bentuk nagari adat yang diinginkan pemerintah melalui kebijakan UU No. 6/2014. Sejak penyusunan draft UU tentang desa ini terjadi polemik yang sangat intens di Sumatera Barat yang keberatan dengan desain UU desa tersebut. Salah satunya adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang keberatan dengan desain UU tersebut. Dimulai dari penggunaan istilah desa dalam UU tersebut mencerminkan ketidakarifan pemerintah menghargai nilai-nilai lokal. Kesan perkataan “desa” mencerminkan dominasi satu kultur saja di Indonesia. Padahal Indonesia dibangun dengan semangat keberagaman. Masalah lain yang juga disorot oleh lembaga kerapatan adat ini jika UU desa ini dilaksanakan adalah semakin lemahnya tananan nilai sosial, budaya dan agama di nagari. Sebab semangat yang terkandung dalam desa ini jelas berbeda dengan rasa kebatinan masyarakat di nagari. Apalagi selama ini, dengan dilaksanakannya UU No.5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa, terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan nagari di Sumatera Barat¹² (cf. Manan, 1995).

Sejak dilaksanakannya UU No. 6/2014 tentang pemerintahan desa sudah terdapat penguatan lembaga adat, penguatan ini dalam bentuk otonomi kewenangan yang diberikan pemerintah dalam mengatur *sako* dan *pusako* serta harta kekayaan nagari lainnya, seperti pengelolaan tanah ulayat. Lembaga adat memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa sosial ytang terjadi dalam masyarakat sebelum diputu skan oleh pihak kepolisian dan pengadilan, seperti yang dilakukan oleh KAN nagari Lubuk Pandan pada tahun 2016 yang menarik kembali 2 pengaduan KDRT yang masuk ke Polsek nagari tersebut. Mekanisme lembaga adat dalam penyelesaian sengketa ini adalah dilakukan melalui orangtua, jika orangtua gagal maka kasus tersebut diselesaikan oieh mamak (paman), jika mamak gagal melakukan penyelesaian maka sengketa tersebut

dapat diteruskan kepada pihak kepolisian melalui rekomendasi lembaga adat (KAN).

Pengakuan pemerintah terhadap kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa ini mengembalikan peran *Mamak* (paman) sebagai datuk pemuka adat dalam menjalankan fungsinya. Gelar datuk dalam masyarakat Minangkabau diberikan kepada tokoh masyarakat yang sukses, di samping pertimbangan warisan dari mamak (paman) kepada kemenakan (keponakan) sebagai bentuk pola hubungan matrilineal dalam masyarakat Minangkabau. Kecenderungan ini menyebabkan 60% dari datuk masyarakat Minang berdomisili di luar nagari, serta tidak menjalankan fungsi dirinya sebagai mamak (paman) yang menyelesaikan sengketa keluarga. Sedangkan fungsi datuk dalam masyarakat Minangkabau adalah sebagai pemuka suku atau kaum yang mewakili suku atau kaum tersebut dalam kerapatan adat. Fungsi datuk sebagai penghulu (kepala suku) memiliki beberapa tingkatan, penghulu pucuk sebagai gelar datuk tertinggi membawahi beberapa datuk di bawahnya. Semain besar jumlah anggota keluarga yang dipimpin oleh datuk tersebut maka semakin tinggi kedudukan sosial datuk tersebut dalam memutuskan sengketa keluarga.

Terdapat keberanian beberapa lembaga adat, seperti KAN Lubuk Pandan untuk merevisi AD/ART lembaga tersebut agar terdapat persyaratan untuk memaksa datuk yang diberi gelar oleh lembaga tersebut bisa menjalankan fungsinya, tidak sebagai gelar simbolis keberhasilan bagi masyarakat nagari.¹³ Ketentuan ini juga sejalan dengan gagasan pemerintah untuk merevisi pesyaratan pencalonan Wali Nagari minimal harus berdomisili di nagari setempat minimal 1 tahun, agar mereka memiliki pengetahuan sosial dan budaya masyarakat setempat sebelum menduduki jabatan Wali Nagari. Ketentuan ini telah memperkuat lembaga adat dalam mengatur etika sosial dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai adat, keberhasilan pemerintah dalam mengakomodasi nilai adat dalam lembaga pemerintahan ditentukan oleh komitmen Wali Nagari sebagai pelaksana kewenangan yang didesentralisasikan pemerintah pusat ke daerah. Komitmen ini meningkat jika Wali Nagari tersebut menjadi datuk yang mewakili suku atau kaumnya, serta semakin lemah jika Wali Nagari tersebut berasal dari struktur pemerintahan formal.

Kekuasaan Wali Nagari yang bisa memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat adalah kekuasaan yang berasal dari gelar datuk sebagai modal simbolik, penggunaan aturan hukum yang

¹² Manan, *loc.cit.*

¹³ Wawancara dengan Maizar Datuk Maninjau, Ketua KAN Lubuk Pandan, 2 Agustus 2016

didasarkan oleh nilai adat setempat memungkinkan Wali Nagari untuk bisa memaksakan visi mereka sebagai bentuk representasi dunia sosial lingkungan masyarakat mereka, seperti yang terlihat dalam kepemimpinan Wali Nagari Aur Malintang Batu Basa. Wali Nagari desa ini diangkat menjadi datuk pemuka suku Koto dengan gelar Rangkayo Datuk Mudo pada 9 November 2015, peranannya sebagai *andiko basa* (besar) dari *penghulu pucuk* adalah sebagai pemilik anak buah ninik mamak lain, seperti datuk Rajo Bangso, datuk Marah, datuk Batuah, datuk Sirajo, datuk Majoindo. Secara adat maka beberapa datuk ini tunduk kepada pak Wali Nagari dalam proses pengambilan keputusan, seperti bisa memaksa lembaga adat untuk merumuskan Peraturan Nagari (Perna) yang mengatur etika sosial yang sesuai dengan lembaga adat.¹⁴

Dalam hal ini, terdapat hubungan antara desentralisasi kekuasaan pemerintah dengan dinamika politik lokal, meskipun begitu kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Desentralisasi adalah pemecaran kekuasaan yang dilakukan pemerintah secara internal, seperti dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan politik lokal adalah pemecaran kekuasaan pada dimensi ruang (*spatial*), serta batas-batas sosial budaya yang melingkunginya. Hubungan kedua istilah tersebut dapat dijelaskan dari fungsi politik lokal sebagai sarana pembelajaran untuk berdemokrasi, serta mengelola kekuasaan yang dipencarkan pemerintah pusat ke daerah serta menumbuhkan kapasitas masyarakat (Dede Mariana & Caroline Paskarina, 2008:52). Peningkatan kapasitas ini dapat dilihat dari gagasan-gagasan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi tersebut berlangsung dari perencanaan pembangunan yang dimulai dari hasil Musrembang yang dihadiri oleh wakil pemerintah dan masyarakat sampai kepada bentuk pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah dalam bentuk sumbangan tenaga yang bisa menghemat anggaran alokasi dana desa (ADD) yang disediakan pemerintah pusat. Bentuk partisipasi ini membedakan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang ADD ini dengan pelaksanaan sebelumnya yang tidak melibatkan masyarakat, pemerintah sudah menetapkan anggaran proyek pembangunan yang dicairkan melalui proses politik yang dilakukan oleh wakil rakyat dalam lembaga legislatif serta melibatkan pihak ketiga (rekanan) sebagai pelaksana proyek pembangunan tersebut. Di samping terdapat biaya ekonomi dan politik yang harus dikeluarkan dalam proses pencairan dana serta pelaksanaan proyek pembangunan tersebut,

kebijakan pemerintah untuk menetapkan alokasi proyek pembangunan serta persyaratan lain untuk melibatkan pihak ketiga (rekanan) dalam pelaksanaannya telah melahirkan konflik berkepanjangan antara Wali Nagari dengan BAMUS (Badan Musyawarah). Konflik tersebut menyangkut persoalan transparansi pengelolaan pemerintahan nagari yang melibatkan lembaga adat dalam struktur pemerintahan nagari tersebut.

Keterlibatan lembaga adat bersama Wali Nagari dalam struktur pemerintahan nagari memungkinkan intervensi pemerintah dalam lembaga adat, fungsi lembaga adat adalah melakukan rasionalisasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah nagari tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan Wali Nagari berkonsultasi bersama-sama dengan masyarakat yang terdiri dari pemuka adat, bundo kanduang, pemuda dalam forum MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang diselenggarakan oleh BAMUS nagari meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dijalankan, posisi lembaga adat dan Wali Nagari terpisah serta memiliki otonomi tersendiri yang tidak memungkinkan intervensi kewenangan masing-masing lembaga adat dan lembaga pemerintahan. Meskipun kedudukan lembaga adat tidak lagi berada dalam struktur pemerintahan nagari, tetapi dukungan lembaga adat terhadap pelaksanaan pemerintahan nagari mengalir sejauh Wali Nagari berjalan dengan standar operasional (SOP) yang ditetapkan pemerintah melalui berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penggunaan anggaran alokasi dana desa (ADD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN).

Pengaruh sosial dan budaya masyarakat terhadap perumusan kebijakan desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah terlihat dalam dinamika politik yang terjadi dalam BAMUS. Ketua BAMUS tidak boleh dijabat oleh Ketua KAN maupun Wali Nagari, tetapi bisa menjadi anggota lembaga legislatif tersebut dalam kedudukan mereka sebagai datuk pemuka adat baik dari kalangan Ketua KAN maupun Wali Nagari. Rangkap jabatan sebagai Wali Nagari maupun Ketua KAN memungkinkan integrasi nilai adat dalam perumusan kebijakan alokasi dana desa (ADD) yang masuk ke rekening Wali Nagari secara langsung dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui dana APBN, fungsi datuk dalam rapat BAMUS tersebut adalah mendorong pelaksanaan serta pengawasan pemerintahan nagari agar sejalan dengan nilai adat istiadat masyarakat setempat, seperti yang dilakukan

¹⁴ wawancara dengan Wali Nagari Aur Malintang Batu Basa, 19 Agustus 2016

oleh datuk yang menjadi Ketua KAN sekaligus merangkap anggota BAMUS nagari Lubuk Pandan bahwa dia akan melakukan reaksi keras jika pelaksanaan pemerintahan nagari tidak berjalan sesuai dengan nilai adat istiadat masyarakat setempat.

Intervensi kewenangan datuk dalam perumusan kebijakan alokasi dana desa (ADD) juga dilakukan melalui jabatan Wali Nagari jika Wali Nagari dijabat oleh datuk yang menjadi wakil pemuka masyarakat dalam BAMUS, seperti yang dilakukan oleh Wali Nagari Aur Malintang Batu Basa yang dijabat oleh datuk pemuka masyarakat suku Koto yang meminta diselenggarakannya pertemuan yang membahas bentuk etika sosial yang mengatur perilaku masyarakat agar sejalan dengan nilai adat istiadat melalui penggunaan alokasi dana desa (ADD) pada bulan Oktober 2016. Pembahasan ini terkait dengan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Padang Pariaman yang melarang organ tunggal dalam pelaksanaan kenduri, dari pembahasan ini dikeluarkan Peraturan Nagari (Perna) yang mengatur ijin kenduri perkawinan harus melalui Wali Nagari setelah melalui ijin dari Mamak (Paman) yang menjadi kepala suku keluarga masyarakat yang menyelenggarakan kenduri tersebut. Terdapat integrasi nilai adat dalam aturan sosial dan kebudayaan yang dibuat pemerintah nagari melalui Peraturan Nagari yang menggunakan anggaran alokasi dana desa (ADD) sebagai bentuk pengaruh politik lokal dalam perumusan kebijakan desentralisasi kewenangan pemerintah pusat di daerah.

Modal simbolik datuk yang digunakan oleh Wali Nagari dalam memaksakan visi pembangunan nagari menghasilkan dukungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik, tidak ada anggaran yang tersisa pada tahun berikutnya dari penggunaan alokasi dana desa (ADD) ini. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari sumbangan tenaga dalam pengerjaan proyek pembangunan fisik, sisa anggaran yang seharusnya digunakan untuk biaya tenaga kerja proyek pembangunan dialokasikan untuk kegiatan proyek pembangunan lainnya yang memberikan dampak kesinambungan (*spillover*) untuk pembangunan berikutnya. Pembangunan fisik yang dimulai dari penggunaan modal simbolik ini bisa menciptakan bentuk pembangunan berkesinambungan untuk tahun berikutnya, serta menciptakan model pembangunan yang terintegrasi antara penggunaan modal simbolik, modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi masyarakat.

Hubungan modal simbolik, modal sosial, modal budaya dan modal ekonomi dalam konteks hubungan politik lokal dengan desentralisasi kewenangan dalam pemerintahan nagari di Sumatera Barat

bersifat kompleks. Kompleksitas hubungan dari keempat modal ini dapat dilihat dari hubungan modal simbolik dengan modal lainnya yang melahirkan “logika modal” yang hadir dalam perumusan kebijakan sebagai ranah sebagai bentuk arena perjuangan kekuatan dari otoritas atau posisi yang memiliki legitimasi dalam masyarakat. Terdapat perbedaan ranah kekuasaan yang menjadi arena perjuangan kekuatan lembaga adat dengan lembaga pemerintahan dan bentuk “logika modal” yang dibangun dalam masing-masing ranah. Ranah kekuasaan Wali Nagari dibangun melalui logika modal demokrasi prosedural, sedangkan ranah kekuasaan dibangun melalui logika modal demokrasi deliberatif. Perbedaan antara kedua ranah dan logika modal adalah pada rekrutmen politik dan proses pengambilan keputusan, proses keputusan pengambilan keputusan dalam lembaga adat dilakukan secara langsung tetapi rekrutmen politik dilakukan secara tidak langsung melalui wakil suku atau kaum dalam lembaga adat (KAN), tetapi dalam pengambilan keputusan harus bermusyawarah dengan anak dan kemenakan yang menjadi anggota suku atau kaum tersebut. Sebaliknya rekrutmen politik Wali Nagari bersifat langsung melalui pemilihan Wali Nagari yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, tetapi dalam proses pengambilan keputusan tidak langsung melibatkan partisipasi masyarakat.

Modal simbolik Wali Nagari dibangun dari logika modal yang berasal dari modal ekonomi dan modal sosial, sedangkan modal simbolik datuk dalam lembaga adat dibangun dari logika modal yang dibentuk oleh modal sosial dan modal budaya. Pengaruh sosial dan budaya menjadi kuat sebagai bentuk logika modal dalam ranah kekuasaan perumusan kebijakan desentralisasi kewenangan pusat di daerah pada saat modal simbolik jabatan Wali Nagari dipegang oleh datuk, pengaruh datuk yang menjabat sebagai Wali Nagari bisa mempengaruhi bentuk alokasi dana desa (ADD) yang dirumuskan bersama dengan pemuka masyarakat lain dari perwakilan lembaga adat agar sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Legitimasi yang diperoleh dari dukungan masyarakat terhadap modal simbolik yang dimiliki oleh datuk yang menduduki jabatan Wali Nagari ini memungkinkan penggunaan hukum serta paksaan yang mengatasnamakan pemerintahan nagari dan lembaga adat dalam pelaksanaan visi pembangunan nagari yang sejalan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

SIMPULAN

Terbitnya UU No.6/2014 tentang desa sebenarnya hanya mempertegas aturan sebelumnya. Walaupun dalam beberapa hal membawa keuntungan bagi etnis Minangkabau. Misalnya, pengakuan yang diberikan oleh negara tentang adanya masyarakat adat dengan hak asal-usulnya. Namun, faktanya, kewenangan yang diselenggarakan oleh nagari masih sebatas kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten dengan prinsip dekonsentrasi. Begitu juga dengan urusan yang bersifat tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada desa atau nagari. Artinya, penyelenggaraan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul masih sebatas konsep yang ada dalam undang-undang. Bahkan ada kekhawatiran, penyelenggaraan hak asal-usul tersebut sulit dilaksanakan karena identifikasi terhadap hak asal-usul itu tumpang tindih dengan kewenangan pemerintahan.

Di nagari, misalnya, hak asal-usul ini tidak hanya sebatas menyelenggarakan urusan adat dan budaya saja. Nagari, sebagai representasi kedaulatan masyarakat yang dikenal dengan “republik mini” tentu menyelenggarakan juga fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan yang diselenggarakan ini, memang sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jika ditelusuri lebih jauh, inilah sebenarnya bagian penting dari hak asal usul tersebut. Sayangnya, ketika nagari diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan pemerintahan, hak asal-usul yang diakui oleh negara tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Tentunya banyak pihak berharap UU tentang desa ini bisa dilaksanakan secara konsisten sehingga membawa manfaat kepada masyarakat di desa, khususnya nagari di Sumatera Barat. Faktanya, transformasi penyelenggaraan nagari ke rezim UU desa ini membawa beberapa manfaat kepada masyarakat di nagari, yaitu memperkuat eksistensi atau kedaulatan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan terendah.

Walaupun sudah ada pengakuan terhadap nagari berdasarkan UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah dan PP No.72/2005 tentang desa, namun dengan UU No.6/2014 tentang desa ada penegasan yang diikuti implementasinya. Selain itu, pelaksanaan bernagari berdasarkan UU ini juga memperkuat kembali sistem nilai etnis Minangkabau yang muaranya adalah penguatan modal sosial di nagari. Selama ini, akibat pengaruh globalisasi yang juga melanda nagari, sistem nilai adat dan budaya Minangkabau ini mengalami pergeseran dari bentuk aslinya. Inilah yang mempengaruhi perkembangan nagari dengan meninggalkan sistem nilai yang berlaku di nagari. Terakhir yang tidak kalah penting terjadinya transisi ke rezim desa ini adalah

meningkatnya pembangunan di nagari. Apalagi dengan adanya alokasi dana desa dari APBN yang cukup besar jelas memberi manfaat bagi nagari. Jika selama ini, pembiayaan pembangunan mengandalkan APBD, sekarang juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini adalah bagian laporan penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi melalui Skema Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Halim, 2014, *Politik Lokal, Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube dan Panggung)*, Yogyakarta, LP2B,
- Agusta, Ivanovich, Tetiani, Ani & Fujiartanto. 2014. “Teori dan Kebijakan Desa Untuk Indonesia”. Dalam Ivanovich Agusta & Fujiartanto (Eds.). *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 13-32.
- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada: Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Antlov, Hans. 2003. “Village Government And Rural Development In Indonesia: The New Democratic Framework.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 39(2): 193-214.
- Benda-Becmann, Franz von & Benda-Beckman, Keebet von. 2013. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonialisation to Desentralisation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cheema, G. Shabir. 2005. *Building Democratic Institutions: Governance Reform In Developing Countries*. New York: Kumarian Press.
- Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition in Western Democracies* (New Haven: Yale University Press)
- Dede Mariana, Caroline Paskarina, 2008, *Demokrasi & Politik Desentralisasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu,
- De Jong, Josselin. 1952. *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff
- Hadler, Jeffrey. 2010. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Terjemahan. Jakarta: The Freedom Institute.

- Hari Sabarno. 2007. *Untaian pemikiran otonomi daerah: memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbi, Muhammad. 1971. "Perkembangan Lembaga Kerapatan Adat di Nagari-Nagari Minangkabau: Uraian Tentang Perkembangan Kerapatan Adat Tradisionil Ke Arah Perkembangan Kerapatan Demokratis Nagari." Skripsi Doktorandus. Institut Ilmu Pemerintahan, Malang.
- Henley, David & Davidson Jamie. S. 2007. "Radical Conservatism—the Protean Politics of Adat" dalam Jamie S Davidson & David Henley (Eds.). *The Revival of Tradition in Indonesia Politics: the Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. London: Routledge, hlm. 1-49.
- Kahin, Audrey R. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau Dalam Perspektif Sejarah*. Terjemahan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Manan, Imran. 1995. *Birokrasi Modern Dan Otoritas Tradisional Minangkabau (Nagari Dan Desa di Minangkabau)*. Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.
- Miles, Matthew. B. & Huberman, A. Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Ed-Kedua. California: Sage Pub.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Robison, Richard & Hadiz, Vedi. R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in An Age of Markets*. London: RoutledgeCurzon.
- Strauss, Anselm. L. & Corbin, Juliet. 1998. *Basics Of Qualitative Research Techniques And Procedures For Developing Grounded Theory*. USA: Sage Pub.
- Zainuddin, Musyair. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan hak Asal-Usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak.
- Laporan Penelitian**
- Tamrin, Asrinaldi dan Indah Adi Putri. 2013. *Model Transfer Dana Perimbangan Dan Pemerataan Kemampuan Fiskal Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Padang: LPPM Universitas Andalas.
- Yoserizal & Asrinaldi. 2013. "Quasi Otonomi Pada Pemerintahan Terendah Nagari Simarasok Di Sumatera Barat Dan Desa ponjong di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Sosiohumaniora*, 15(2): 178-193.
- Yoserizal & Asrinaldi, 2011. "Praktik Pemerintahan Terendah Dalam Pembangunan dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat". *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 3(2):85-103.
- Yoserizal, Asrinaldi & Rahmadani Yusran. 2005. "Pemanfaatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Sumatera Barat". *Laporan Penelitian Balitbang Provinsi Sumbar*. Padang: Balitbang Provinsi Sumatera Barat,

TANTANGAN BAGANSIAPIAPI MENGHADAPI GLOBALISASI: DENGAN MELESTARIKAN WARISAN BUDAYA

Lies Mariani

Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Padjadjaran

liesmar8958@gmail.com

Abstrak – Bagansiapiapi adalah sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Riau, Sumatera. Sejak tahun 1999 kota ini merupakan ibukota Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau. Bagansiapiapi memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kota penting di kepulauan Indonesia. Didirikan pada abad ke-19 oleh puluhan etnis Tionghoa yang berasal dari provinsi Fujian, Cina, Bagansiapiapi berkembang menjadi pelabuhan ikan yang paling penting kedua di dunia setelah Norwegia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian mengembangkan kota ini dan mendirikan banyak bangunan seperti bank, rumah sakit, gereja sebagai warisan budaya yang bersifat *tangible*. Banyak di antara bangunan tersebut yang masih utuh dan fungsional hingga kini. Menghadapi tantangan globalisasi, pelestarian dan revitalisasi warisan budaya ini bisa dikembangkan menjadi alat untuk mempertahankan identitas lokal.

Kata kunci: warisan budaya, pelestarian, revitalisasi, identitas lokal.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Kabupaten Bagansiapiapi terletak di muara Sungai Rokan, di pesisir utara Kabupaten Rokan Hilir, dan merupakan suatu tempat strategis karena letaknya berdekatan dengan Selat Malaka merupakan lalu lintas perdagangan internasional. Kota Bagansiapiapi dijuluki sebagai *Hongkong van Andalas* (Wikipedia, diunduh tanggal 12-2016). Bagansiapiapi secara administrasi merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Riau dengan Ibu Kota

Pekanbaru, luas keseluruhan wilayah 87.023.66 km² dengan populasi penduduknya 5.543.031 jiwa. Suku-suku bangsa yang selama ini telah menetap di Riau antara lain, suku Melayu 37.74%, suku Jawa 25,05%, Minangkabau 11,26%, Batak 7,31%, Banjar 3,78%, Tionghoa 3,72% dan Bugis 2,27% (Dinas Pariwisata Rokan Hilir, 2016:7).

Bagansiapiapi merupakan salah satu kota di Kabupaten Rokan Hilir yang dalam perjalanan sejarahnya pernah mengalami masa kejayaan sebagai kota pelabuhan kedua terbesar setelah Norwegia sebagai penghasil ikan di dunia, meskipun lokasi kota Bagansiapiapi terletak di pelosok sebelah timur Provinsi Riau Daratan. Wilayah ini memiliki latar belakang sejarah yang panjang.

Setelah invasi Portugis tahun 1511 wilayah Rokan Hilir terdiri atas tiga Kenegerian yaitu Tanah Putih, Kubu dan Bangko. Dalam perkembangannya, wilayah ini menjadi lalu lintas perdagangan laut Malayu di selat Melaka. Hal ini diketahui dari adanya sisa-sisa peninggalan artefak seperti situs Candi Sintong dan situs Sidinginan yang diperkirakan memiliki latar belakang agama Buddha. Sedangkan penyebaran Islam terlihat di situs kerajaan Batu Hampar yang letaknya 20 km ke hulu dari Bagansiapiapi dengan peninggalan situs makam.

Tahun 1.858 merupakan awal kegiatan pemerintah Hindia-Belanda melakukan kegiatan menguasai Bagansiapiapi karena Kerajaan Siak di Tanah Putih sudah dikuasai Belanda yang menempatkan kontrolirnya pada tahun 1885/6. Pada tahun 1990 kantor pusat pemerintah Hindia-Belanda dipindahkan ke Bagansiapiapi sampai runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1942¹. Selama menguasai dan menetap di Kota Bagansiapiapi, untuk

¹ Arfan Surya 2016 dalam Sejarah Kabupaten Rokan Hilir & Bakar Tongkang. (Hal:10-12)

memudahkan mengawasi dan menguasai bea dan pajak. Pemerintah Belanda banyak mendirikan bangunan seperti Dermaga Bea cukai, *Water Leiding* (pengolahan air bersih), gereja, dan rumah sakit. Sedangkan kantor BRI yang hingga kini masih berfungsi merupakan kantor bank kedua yang dibangun setelah kantor bank pertama di Kota Magelang.

Masalah penelitian

Bagansiapiapi mempunyai penduduk multi suku (Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Minang, Bugis dan Nias) serta lokasinya cukup dekat dengan selat Malaka serta Singapura. Oleh karena itu Bagansiapiapi dapat menjadi contoh wilayah di mana identitas khususnya identitas budaya menjadi salah satu isu penting.

Koentjaraningrat (1985:180) dalam dekade 1970an mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Lebih lanjut di awal dekade 1980an, Parsudi Suparlan (1986) mencoba melihat kebudayaan sebagai pengetahuan yang bersifat operasional, yaitu sebagai keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial; yang isinya adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya.

Kabupaten Bagansiapiapi mempunyai peninggalan warisan budaya yang sangat beragam, antara lain warisan budaya yang bersifat *tangible*/benda yang pada hakekatnya merupakan salah satu jati diri masyarakat Bagansiapiapi. Untuk mempertahankan identitas lokal, warisan budaya dapat dijadikan sarana karena merupakan salah satu wujud dari ketahanan nasional non militer.

Kajian dan penelitian ini khususnya akan membahas warisan budaya yang bersifat *tangible*/benda yang sampai sekarang masih terawat dengan baik di kota Bagansiapiapi. Ada upaya *revitalisasi*² di Bagansiapiapi yaitu suatu cara menghidupkan kembali spirit kebudayaan sebagai salah satu *identitas lokal*. Hal ini sesuai pendapat Stuart Hall³ yang menyatakan identitas budaya sebagai sebuah wujud (*identity as being*) dan sebagai proses menjadi (*identity as becoming*).

² **Revitalisasi**, ialah kegiatan pemugaran yang bersasaran untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal secara ekonomi, social dan budaya dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar budaya dan dapat sebagai bagian dari revitalisasi kawasan kota lama untuk mencegah hilangnya asset-aset kota yang bernilai sejarah karena kawasan tersebut mengalami penurunan produktivitas (Ref.UNESCO.Dep.PU-Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan),

Kajian dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa saja upaya yang dilakukan untuk melakukan pelestarian serta revitalisasi khususnya warisan budaya di Bagansiapiapi tersebut dalam upaya mempertahankan dan menjaga identitas lokal. Selain itu akan dilihat apakah upaya tersebut efektif sebagai sarana untuk mempertahankan dan menjaga identitas lokal.

Kerangka teoritis

Dalam mengkaji pemertahanan warisan budaya, digunakan konsep Stuart Hall⁴ tentang identitas budaya, yaitu identitas budaya sebagai sebuah wujud (*identity as being*) dan identitas budaya sebagai proses menjadi (*identity as becoming*). Dalam konsep ini diuraikan identitas budaya sebagai suatu kesatuan yang dimiliki bersama, atau yang merupakan 'bentuk dasar/asli seseorang dan berada dalam diri banyak orang yang memiliki kebersamaan sejarah dan leluhur'. Identitas budaya adalah cerminan kesamaan sejarah dalam kode-kode budaya yang membentuk sekelompok orang menjadi 'satu': walaupun dari 'luar' mereka tampak berbeda. Hal ini dapat berarti juga bahwa selain dari kesamaan sejarah dan kode-kode budaya yang menyatukan mereka, sudut pandang ini juga melihat bahwa ciri fisik atau lahiriah mengidentifikasi mereka sebagai suatu kelompok.

Kajian dan penelitian ini akan membahas bagaimana upaya masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempertahankan warisan budaya di Bagansiapiapi dan sebagai identitas lokal, di dalam masyarakat yang multi suku di Kabupaten Bagansiapiapi, serta tepat guna dan berhasil guna sehingga warisan budaya yang bersifat *bendawi* atau *tangible* ini, dapat dipertahankan sebagai jati diri dan sebagai modal menjaga identitas lokal di Bagansiapiapi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian menggambarkan prosedur pengumpulan data atau bahan yang diperlukan untuk menguji dugaan-dugaan. Dalam penulisan laporan diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Studi Kepustakaan (*library research*) yang berkenaan langsung dengan kota Bagansiapiapi serta warisan budaya yang dimilikinya yang bersifat *tangible*. Untuk

atau **Revitalisasi/ Adaptasi**, Membangun untuk fungsi yang lebih sesuai dengan dampak minimal.

³ Stuart Hall. *Cultural Identity and Diaspora*. London:1990:393.

⁴ Stuart Hall. *Cultural Identity and Diaspora*. London:1990:393.

objek yang merupakan hasil peninggalan bersifat *tangible*/ benda seperti situs candi Sintong, peneliti langsung melakukan survei ke lokasi di Tanah Putih.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- b) Survei ke lapangan
- c) Observasi di lapangan
- b) Pendokumentasian (rekaman gambar, dan foto)
- c) Wawancara
- d) Melakukan analisis langsung setelah melakukan pengamatan di lapangan dengan merekam kondisi situs candi Sintong di Tanah Putih.

Menurut Moleong (2012:11) dalam metode deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian berisi data untuk memberi gambaran penyajian laporan hasil penelitian di lapangan tersebut. Data berupa hasil survei di lapangan dan kutipan yang diperoleh perlu dideskripsikan atau dipaparkan apa adanya sehingga pada akhirnya akan diketahui sejauh apa warisan budaya yang bersifat *tangible*/benda ini, menjalani upaya pelestarian dan revitalisasi, sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan identitas lokal yang dimiliki oleh Kota Bagansiapiapi.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti/penulis yang langsung berhadapan dengan sumber data yaitu survei di lapangan dan melakukan wawancara serta melakukan pendokumentasian. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat serta tidak dalam bentuk angka-angka atau bentuk hitungan, bertujuan untuk menemukan teori dari lapangan secara deskriptif dengan menggunakan metode bifikir induktif (Moleong, 2010:8-13).

Alasan penulis menggunakan bentuk penelitian kualitatif karena hasil penelitian ini akan diuraikan dan disimpulkan dalam bentuk kata-kata bukan angka-angka. Sumber data dalam penelitian ini adalah warisan budaya yang bersifat *tangible*/ benda yaitu situs candi Sintong di Tanah Putih.

Peninggalan budaya yang bersifat *tangible*/benda

Mengenai peninggalan dan warisan budaya yang ada di Bagansiapiapi dapat dipilah ke dalam golongan, yaitu yang bersifat *tangible* seperti penjelasan di bawah ini,

Benda Cagar Budaya yang bersifat *tangible*, berwujud benda konkret yang dapat dipegang, yang dapat pula dipilah atas yang “tak bergerak” (tak dapat dipindah-seperti bangunan). Antara lain berupa peninggalan pada masa Klasik/Hindu-Budha seperti Candi Sintong di Kecamatan Tanah Putih, Situs Sidinginan di Kecamatan Tanah Putih, 7 buah tugu prasasti perjanjian beraksara Cina, Komplek Makam Cina agama Budha, Sumur tua Pulau Jemur, 2 buah Goa Pulau Jemur, Kelenteng *Ing Hok Kiong*.

Peninggalan pada masa Islam antara lain, Makam Syekh Abdul Kholid, Makam Syarif Ali/Datuk Batu Hampar, Makam Tengku Abdullah Pasai, Makam Datuk Kancil, Makam Datuk Benuang, Makam Datuk Dewa, Makam Datuk Sirajo Hitam. Peninggalan masa Belanda/ Kolonial antara lain, Dermaga Bea Cukai, Rumah Dinas Bupati., RSU RM Pratomo, Mess Polisi, Water Leiding, Gedung rumah dinas BRI, Bangunan rumah tua Kantor Pajak Pelita, Fillbox Jepang di Pulau Jemur, Mercusuar di Pulau Jemur, Rumah Tua Bangunan Belanda di Pulau Jemur, rumah tua tempat musyawarah warga Cina, Gereja Katholik Santo Petrus dan Paulus, Rumah Kapiten marga Ang, 78 bangunan Kelenteng.

Masyarakat Bagansiapiapi mempunyai keragaman kebudayaan yang cukup unik, sebagaimana dikemukakan oleh Koentjaraningrat, mencakup ketujuh unsur kebudayaan yang masing-masing. mencakup seluruh kebudayaan makhluk manusia di manapun juga di dunia, dan menunjukkan ruang lingkup dari kebudayaan serta isi dari konsepnya (Koentjaraningrat, 1982: 1-4).

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu bagian dari wilayah di Provinsi Riau yang mengandung tinggalan budaya bendawi yang bersifat *tangible* yang cukup tinggi nilainya, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya *pelestarian*. Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pariwisata sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran dan membentuk jati diri bangsa serta untuk kepentingan nasional. Upaya menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya. Sesuai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992⁵.

⁵ Benda cagar budaya pada saat ini sering kali diartikan sebagai ‘*Pusaka Saujana Budaya*’. Penyebutan demikian karena benda cagar budaya termasuk ke dalam kelompok barang-barang atau

benda-benda yang tergabung dalam pusaka saujana budaya (Draft Kaliurang, 2003: 49 dalam Novendra, 2009:49)

Dewasa ini upaya pelaksanaan menjaga kelestarian benda cagar budaya di Indonesia, dengan adanya otonomi daerah maka telah terjadi perubahan seperti diketahui pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Perubahan Paradigma	
UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Orientasi pada "memajukan kebudayaan nasional" saja (pasal 32 UUD'45)	Orientasi pada "memajukan kebudayaan nasional" (pasal 32) dan "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (pasal 33 UUD'45)
Pengaturan terhadap benda	Pengaturan terhadap aktivitas
Pelestarian parsial	Pelestarian kawasan
Pemerintahan bersifat sentralistik	Pemerintahan yang bersifat desentralistik (seperti pembagian kewenangan, peringkat cagar budaya)
Peran dominan Pemerintah dalam pelestarian	Pelestarian berbasis masyarakat

Adanya upaya *revitalisasi*⁶ yaitu suatu cara menghidupkan kembali spirit kebudayaan yang ada di Bagansiapiapi sebagai salah satu *identitas lokal*. Sesuai pendapat Stuart Hall⁷ bahwa identitas budaya sebagai sebuah wujud (*identity as being*) dan identitas budaya sebagai proses menjadi (*identity as becoming*). Dalam cara pandang pertama diuraikan bahwa, identitas budaya dilihat sebagai suatu kesatuan yang dimiliki bersama, atau yang merupakan 'bentuk dasar/asli seseorang dan berada dalam diri banyak orang yang memiliki kebersamaan sejarah dan leluhur. Identitas budaya adalah cerminan kesamaan sejarah dan kode-kode budaya yang membentuk sekelompok orang menjadi 'satu': walaupun dari 'luar' mereka tampak berbeda. Hal ini dapat berarti juga, selain dari kesamaan sejarah dan kode-kode budaya yang menyatukan mereka, sudut pandang ini melihat bahwa cirri fisik atau lahiriah mengidentifikasi mereka sebagai suatu kelompok.

Kebudayaan di mana pun memiliki unsur-unsurnya, begitu pula halnya dengan kondisi yang ada di Bagansiapiapi. Dalam penelitian ini hasil peninggalan warisan budaya yang bersifat *tangible* dengan latar belakang unsur-unsurnya seperti diungkapkan di bawah ini, antara lain: 1). Sistem religi dan upacara keagamaan, dari keadaan masyarakatnya yang multi suku ini mereka mempunyai keyakinan yang beragam

antara lain, Islam, Katholik, Kristen, Buddha dan kepercayaan Tridharma; 2). Sistem dan organisasi kemasyarakatan, dari keadaan masyarakatnya yang multi suku ini mereka mempunyai Komunitas Melayu, Komunitas Tionghoa, Komunitas Jawa, Komunitas batak, Nias dan Bugis; 3). Sistem pengetahuan dari keadaan masyarakatnya yang multi suku ini mereka mempunyai Pembuatan galangan kapal, Proses Pengawet ikan laut, Proses budi daya burung walet; 4). Bahasa, dari keadaan masyarakatnya yang multi suku ini mereka mempunyai bahasa yang berbeda untuk bahasa sehari hari, kalau mereka berinteraksi dengan masyarakat di luar sukunya mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, tetapi saat mereka melakukan interaksi di dalam komunitasnya mereka akan menggunakan bahasa ibu, seperti etnis Tionghoa mereka akan menggunakan bahasa Jawa, suku Melayu akan menggunakan bahasa Melayunya, suku Batak akan menggunakan bahasa Bataknya; 5). Kesenian, dari keadaan masyarakatnya yang multi suku ini mereka mempunyai mempunyai komunitas yang secara rutin akan bertemu dan berlatih untuk kelangsungan kesenian mereka, karena mereka mempunyai suatu yayasan seperti pada suku Jawa mereka mempunyai kelompok komunitas yang bernama 'Hangudi Utomo'. Tempat mereka berkumpul dan berkesenian. Demikian juga dengan etnis Tionghoa mereka mempunyai yayasan Multi Marga, ini tempat mereka untuk berkumpul dan melaksanakan kegiatan bakti sosial, keagamaan dan sebagainya; 6). Sistem mata pencaharian hidup, dari keadaan masyarakatnya yang multi suku ini mereka mempunyai kegiatan berdagang, bertani, berkebun, sebagai nelayan, berternak burung wallet dan sebagainya; 7). Sistem teknologi dan peralatan dari keadaan masyarakatnya yang multi suku ini mereka mempunyai cara-cara untuk mengawetkan ikan, membuat kapal, serta beragam rasa di bidang kuliner antara lain dari kuliner dari etnis Tionghoa, Melayu, Jawa, Minang, Batak, dan sebagainya.

Kelompok masyarakat ini masing-masing memiliki: sistem Religi, Bahasa, Kesenian, Sistem Pengetahuan, Sistem Organisasi masyarakat, Sistem mata pencaharian yang sangat berbeda, tetapi selama ini mereka dapat hidup berdampingan dan saling menghormati serta bergotong di Kabupaten Bagansiapiapi.

⁶ **Revitalisasi**, ialah kegiatan pemugaran yang bersasaran untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal secara ekonomi, social dan budaya dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar budaya dan dapat sebagai bagian dari revitalisasi kawasan kota lama untuk mencegah hilangnya asset-aset kota yang bernilai sejarah karena kawasan tersebut mengalami penurunan produktivitas

(Ref.UNESCO.Dep.PU-Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan), atau **Revitalisasi/ Adaptasi**, Membangun untuk fungsi yang lebih sesuai dengan dampak minimal.

⁷ Stuart Hall. *Cultural Identity and Diaspora*. London:1990:393.

HASIL ANALISIS

Potensi masyarakat di Kabupaten Bagansiapiapi didukung dengan etnik yang cukup beragam yaitu etnik Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Minang, Bugis dan Lombok/NTT. Inilah salah satu potensi yang dimiliki oleh Bagan Siapi Api, dengan latar belakang masyarakat multi budayanya yang selama ini telah menetap di Kabupaten Bagansiapiapi dengan masyarakat dan penduduknya yang cukup beragam.

Hasil kajian dalam penelitian mengenai warisan budaya ini menunjukkan sejak masa prasejarah, masa Klasik/ Hindu-Budha, masa Islam, masa Kolonial dan masa kemerdekaan terdapat 31 situs peninggalan situs benda cagar budaya. Tetapi pada kenyataannya baru dilaksanakan inventarisasi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar (BPCB Batusangkar) pada tahun 2012 dan pada kenyataannya baru terdaftar 5 situs.

Tabel 2 Kabupaten Rokan Hilir

No	No Inventaris	Nama BCB/Situs	Alamat		Kelengkapan Data			Jupel
			Kecamatan	Desa/Kelurahan	Deskripsi	Foto	Denah	
1.	01/BC-TB/B/08/2007	Candi Sintong	Tanah Putih	Sintong	v	v	v	v
2.	02/BC-TB/B/08/2007	Candi Sedingnan	Tanah Putih	Sedingnan	v	v	-	-
3.	03/BC-TB/B/08/2009	Rumah Kapiten Cina Ng Hi Tam	Bagan Timur	Bangko	v	v	v	-
4.	04/BCB-TB/B/08/2009	Kelenteng Ing Ho King	Bagan Kota	Bangko	v	v	v	-
5.	05/BC-TB/B/08/2009	Gereja Katholik St. Petrus & Paulus	Bagan Kota	Bangko	v	v	v	-

Sumber: Daftar Cagar Budaya Tidak Bergerak, Provinsi Riau (2015:9)

Keterangan : v: ada - : tidak/belum ada

Pada tabel 2 di atas ini merupakan benda Cagar Budaya yang sudah dilakukan inventarisasi untuk melakukan suatu upaya perlindungan dan pelestarian cagar budaya atau kepurbakalaan di Kabupaten Rokan Hilir secara holistik. Tujuannya adalah untuk memperoleh data-data cagar budaya atau kepurbakalaan Rokan Hilir, baik berupa data historis, data administratif, data teknis, maupun data arkeologis, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dan acuan dalam rangka

⁸ **Revitalisasi**, ialah kegiatan pemugaran yang bersasaran untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal secara ekonomi, social dan budaya dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan cagar budaya dan dapat sebagai bagian dari revitalisasi kawasan kota lama untuk mencegah hilangnya asset-aset kota yang bernilai sejarah karena

penilaian (pembobotan) dan penetapan cagar budaya yang bersangkutan secara yuridis formal.

Gambar 1. Hasil Budaya *Tangible*/benda

Situs Candi Sintong lokasi di Kecamatan Pasir Putih



Sumber: Foto pribadi, 2016

Kabupaten Rokan Hilir memiliki tinggalan budaya bendawi yang bersifat *tangible* cukup tinggi oleh karena itu diperlukan upaya-upaya *pelestarian*. Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran dan membentuk jati diri bangsa serta untuk kepentingan nasional. Upaya menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan benda cagar budaya.

Ada upaya *revitalisasi*⁸ yaitu suatu cara menghidupkan kembali spirit kebudayaan yang ada di Bagansiapiapi sebagai salah satu *identitas lokal*. Identitas lokal inilah yang dibahas dan dihubungkan dengan kebudayaan dari masyarakat yang multi suku di Kabupaten Bagansiapiapi yang akan dapat dimunculkan serta tepat guna dan berhasil guna sehingga budaya yang bersifat bendawi ini, dapat dipertahankan sebagai modal penguatan jati diri bangsa dan dapat dimanfaatkan oleh segenap pihak yang berkepentingan, baik oleh kalangan pemerintah, akademik, maupun masyarakat.

SIMPULAN

Upaya revitalisasi atau pelestarian khususnya di bidang budaya yang bersifat *tangible* masih belum mencapai sasaran yang diharapkan karena dengan begitu banyaknya benda cagar budaya di seluruh Kabupaten

kawasan tersebut mengalami penurunan produktivitas (Ref.UNESCO.Dep.PU-Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan), atau **Revitalisasi/ Adaptasi**, Membangun untuk fungsi yang lebih sesuai dengan dampak minimal.

Bagansiapiapi, dari jumlah 31 situs cagar budaya, ternyata baru 5 lima situs yang terinventarisasi oleh BPCB di Batu Sangkar, Sumatra Barat.

Begitu pula dengan situs Candi Sintong yang diperkirakan berdiri pada periode klasik (Hindu/Budha) terutama pada masa perkembangan agama Budha di Suwarnabhumi (Pulau Sumatra) sekitar abad 12-15 M. Dengan demikian, situs ini sudah memiliki umur yang cukup tua (5 abad) dan secara yuridis dapat dimasukkan dalam kategori situs cagar budaya yang bersifat *intangible* (sekarang-kurangnya 50 tahun)⁹.

Hasil peninggalan budaya yang bersifat *tangible* telah memberikan andil serta sumbangan bagi perkembangan manusia dan budaya sampai sekarang. Berbagai percampuran manusia dari suku Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Nias, Bugis dan Minang serta Lombok/NTT, seperti diketahui masyarakat berbagai etnis di Bagansiapiapi ini mempunyai hugungan yang sangat cair, mereka dapat hidup berdampingan dengan membawa latar belakang budayanya masing-masing, potensi dan kekuatan budaya dengan latar belakang keberagaman seperti inilah yang akan memunculkan salah satu potensi yang ada di Bagansiapiapi. Mengingat adanya keberagaman dari hasil peninggalan yang bersifat *tangible*. Mengingat adanya perkembangan dan arus globalisasi sebagai suatu keniscayaan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Bagansiapiapi. Adanya masyarakat yang multi etnis/suku dan adanya berbagai peninggalan yang bersifat *tangible* yang mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Hal ini merupakan salah satu identitas budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Bagansiapiapi, karena dengan adanya keberagaman budaya tersebut. Merupakan salah satu ciri khas yang akan selalu mewarnai di Kota Bagansiapiapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Surya 2016 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir Dan Bakar Tongkang. Penerbit Soreram Media dan Yayasan Multi Marga. Bagansiapiapi dan Kabupaten Rokan Hilir.
- Ayatrohaedi 1986 *Kepribadian Budaya Bangsa* (Local Genius). Penerbit: Dunia Pustaka Jaya. Jakarta.
- Arybowo Sutamat 2002 *Kepulauan Riau Dan Pluralisme*. Puslit Kemasyarakatan Dan Kebudayaan (PMB-LIPI). Jakarta.

- Cochrane. Janet 2016 *It's a Jungle Out There* (Contestation and Conflict at Indonesia's Natural World Heritage Sites). Ed.
- King.T.Victor. Unesco in Southeast Asia World Heritage Sites in Comparative Perspective. Copenhagen K. Denmark: NIAS Press (313-346)
- Fross Katharina Johana 2016 *Natural Word Heritage Sites and Local Communities: A Conflit of Interest?* (Two case Studies From Palawan, The Philippines. Ed.King.T.Victor. Unesco in Southeast Asia World Heritage Sites in Comparative Perspective. Copenhagen K. Denmark: NIAS Press (347-366)
- Hall, Stuart 1990 *Cultural Identity and Diaspora*. Dalam Jonasthan Rutherford (Ed.), Identity, Community, Culture, Difference. London:Lawrence & Wishart
- Shanks, Michael & Tilley. Chridtopher 1992 *Re-Constructing Archaeology Theory and Practice*. Printed in Great Britain by Butler & Tanner Ltd, Frome, Somerset
- Miora. Keiko & Sarjjana.I. Made 2016. *The World Heritage Nomination of Balinese Cultural Landscapes*. Ed.King.T.Victor. Unesco in Southeast Asia World Heritage Sites in Comparative Perspective. Copenhagen K. Denmark: NIAS Press (274-290).
- Koentjaraningrat. 1984, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- 1984 *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- 1985 Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.
- 1985 'Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional'. Dalam *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Editor Alfian. Penerbit PT Gramedia, Jakarta
- Labadi, Sophia 2013 *Sustainable Tourism and Development* (Realistic Outcome or Wishful Thinking?). Dalam Unesco, Cultural Heritage and Outstanding Universal Value (Value-based Analyses of the World Heritage an Intangible Cultural Heritage Conventions). AltaMira Press.
- 2013 *Cultural Diversity and Inclusion*. Dalam Unesco, Cultural Heritage and Outstanding Universal Value (Value-based Analyses of the World Heritage an Intangible Cultural Heritage Conventions). AltaMira Press.
- Moleong. Lexy 1990 *Metodolog Penelitian Kualitatif*. Bandung : remaja Rosdakarya

⁹ Analisis Data Cagar budaya. Hasil Laporan Pencagarbudayaan. Kabupaten Rokan Hilir. Provinsi Riau (2012:32).

- Novendra 2009 *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Situs Dan Benda Cagar Budaya*. Studi Kasus:Situs Muara Jambi Di Propinsi Jambi. Penerbit. Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional. Tanjung Pinang.
- Probonegoro,Kleden Ninuk dkk 2002. *Pemahaman Pluralisme Budaya Melalui Seni Pertunjukan*. LIPI. Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI). Jakarta.
- Sahlins, Marshall 1994, 'Goodbye to Tristes Tropique: Ethnography in the Context of Modern World History', dalam R.Borofsky, (ed) *Assessing Cultural Anthropology*. New York:McGraw-Hill, Inc, Hlm, 377-395.
- Suparlan,Parsudi-1986 'Kebudayaan dan Pembangunan', *Media IKA* 14:2-19
- Warnaen, Suwarsih -2002 *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis*. Penerbit: Mata bangsa. Jogjakarta.
- Dinas Pariwisata Rokan Hilir. Bagan Siapiapi 2016. MAPS. Bakar Tongkang 2016. Pesona Indonesia.
- Guswandi 2015.*Rokan Hilir dalam Angka*. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Rokan Hilir. Bagansiap

